



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

2021

LAPORAN KEUANGAN

AUDITED

TAHUN ANGGARAN

2021

LAPORAN KEUANGAN SEMESTER II TAHUN ANGGARAN 2021
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA



KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia adalah salah satu entitas pelaporan sehingga berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan menyusun Laporan Keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2021 *Audited* mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang lebih transparan, akurat dan akuntabel.

Diharapkan Laporan Keuangan ini dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Jakarta, 13 Mei 2022

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia,

Yasonna H. Laoly



KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	v
PERNYATAAN TELAH DIREVIU	xi
PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB	xii
RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN	1
I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN	3
II. NERACA	4
III. LAPORAN OPERASIONAL	6
IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS	7
V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN	8
A. PENJELASAN UMUM	8
A.1. DASAR HUKUM	8
A.2. PROFIL DAN KEBIJAKAN TEKNIS KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA	11
A.2.1. KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA	11
A.2.2. VISI, MISI, NILAI, TUJUAN, DAN SASARAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA	12
A.2.3. ORGANISASI KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA	15
A.2.4. RESTRUKTURISASI PROGRAM DAN KEGIATAN	16
A.3. PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN	19
A.4. BASIS AKUNTANSI	20
A.5. DASAR PENGUKURAN	20
A.6. KEBIJAKAN AKUNTANSI	21
A.7. OUTPUT STRATEGIS	47
A.8. REFOCUSSING KEGIATAN/ REALOKASI ANGGARAN	52
B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN	57
B.1. PENDAPATAN	67
B.2. BELANJA	83
B.2.1. BELANJA PEGAWAI	85
B.2.2. BELANJA BARANG	87
B.3. BELANJA MODAL	105
C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA	119
C.1. KAS DI BENDAHARA PENGELUARAN	119
C.2. KAS DI BENDAHARA PENERIMAAN	122
C.3. KAS LAINNYA DAN SETARA KAS	123
C.4. BELANJA DIBAYAR DIMUKA	127
C.5. UANG MUKA BELANJA	134
C.6. PENDAPATAN YANG MASIH HARUS DITERIMA	134
C.7. PIUTANG PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	136
C.8. BAGIAN LANCAR TAGIHAN TP/TGR	141
C.9. PENYISIHAN PIUTANG TIDAK TERTAGIH PIUTANG LANCAR	143
C.10. PERSEDIAAN	152

	Hal
C.11. TAGIHAN TP/TGR	173
C.12. PIUTANG JANGKA PANJANG LAINNYA	176
C.13. PENYISIHAN PIUTANG TIDAK TERTAGIH – PIUTANG JANGKA PANJANG	177
C.14. TANAH	179
C.15. PERALATAN DAN MESIN	193
C.16. GEDUNG DAN BANGUNAN	224
C.17. JALAN,IRIGASI, DAN JARINGAN	245
C.18. ASET TETAP LAINNYA	252
C.18.1 ASET TETAP RENOVASI (ATR)	253
C.18.2 ASET TETAP LAINNYA (ATL)	259
C.19. KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan (KDP)	267
C.20. AKUMULASI PENYUSUTAN ASET TETAP	274
C.21. ASET TAK BERWUJUD	274
C.22. DANA YANG DIBATASI PENGGUNAANNYA	281
C.23. ASET LAIN-LAIN	283
C.23.1 ASET TETAP YANG TIDAK DIGUNAKAN DALAM OPERASIONAL PEMERINTAHAN	284
C.23.2 ASET TAK BERWUJUD YANG TIDAK DIGUNAKAN DALAM OPERASIONAL PEMERINTAHAN	295
C.24. AKUMULASI PENYUSUTAN DAN AMORTISASI ASET LAINNYA	300
C.25. UTANG KEPADA PIHAK KETIGA	301
C.26. HIBAH LANGSUNG YANG BELUM DISAHKAN	304
C.27. PENDAPATAN DITERIMA DIMUKA	306
C.28. UANG MUKA DARI KPPN	308
C.29. UTANG JANGKA PENDEK LAINNYA	310
C.30. EKUITAS	312
D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL	313
D.1. PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	313
D.2. BEBAN PEGAWAI	327
D.3. BEBAN PERSEDIAAN	331
D.4. BEBAN BARANG DAN JASA	334
D.5. BEBAN PEMELIHARAAN	345
D.6. BEBAN PERJALANAN DINAS	351
D.7. BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	354
D.8. BEBAN PENYISIHAN PIUTANG TAK TERTAGIH	357
D.9. KEGIATAN NON OPERASIONAL	363
D.9.1. PENDAPATAN PELEPASAN ASET NON LANCAR	363
D.9.2. BEBAN PELEPASAN ASET NON LANCAR	371
D.9.3. PENDAPATAN DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL LAINNYA	383
D.9.4. BEBAN DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL LAINNYA	388
E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS	394
E.1. EKUITAS AWAL	394

	Hal
E.2. SURPLUS (DEFISIT) LO	394
E.3. KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	394
E.3.1. KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	394
E.3.2. KOREKSI ATAS REKLASIFIKASI	395
E.3.3. SELISIH REVALUASI ASET	395
E.3.4. KOREKSI NILAI ASET NON REVALUASI	396
E.3.5. KOREKSI LAIN-LAIN	397
E.4. TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	397
E.4.1. DITERIMA DARI ENTITAS LAIN (DDEL)/DITAGIHKAN KE ENTITAS LAIN (DKEL)	398
E.4.2. TRANSFER KELUAR/TRANSFER MASUK	398
E.4.3. PENGESAHAN HIBAH LANGSUNG DAN PENGEMBALIAN PENGESAHAN HIBAH LANGSUNG	399
E.4.4. PENGESAHAN HIBAH LANGSUNG TAYL	400
E.5. EKUITAS AKHIR	401
F. PENGUNGKAPAN – PENGUNGKAPAN LAINNYA.	402
F.1. INFORMASI TERKAIT PENATAUSAHAAN BMN	402
F.2. PERMASALAHAN PADA PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA PER 31 DESEMBER 2020	409
F.3. PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN	411
F.4. TINDAK LANJUT PENYELESAIAN TEMUAN BPK	417
F.4.1 TINDAK LANJUT TEMUAN PEMERIKSAAN BPK TERKAIT BARANG MILIK NEGARA	417
F.4.2 TINDAK LANJUT TEMUAN BPK TERKAIT BMN PADA UNIT ESELON I	425
F.4.3 TEMUAN PEMERIKSAAN BPK RI DAN TINDAK LANJUT PADA SEKRETARIAT JENDERAL	439
F.4.4 TEMUAN PEMERIKSAAN BPK RI DAN TINDAK LANJUT PADA DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM	443
F.4.5 TEMUAN PEMERIKSAAN BPK RI DAN TINDAK LANJUT PADA DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN	449
F.4.6 TEMUAN PEMERIKSAAN BPK RI DAN TINDAK LANJUT PADA DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI	460
F.4.7 TEMUAN PEMERIKSAAN BPK RI DAN TINDAK LANJUT PADA DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL	461
F.5. TINDAK LANJUT CATATAN HASIL REVIEW (CHR) INSPEKTORAT JENDERAL	464
F.6. REKAPITULASI SALDO TEMUAN PEMERIKSAAN BPK DAN INSPEKTORAT JENDERAL YANG BELUM DI SETORKAN KE KAS NEGARA	477
F.7. HIBAH YANG BELUM DICATAT	481

Tabel 1	Rekapitulasi Jumlah Satuan Kerja UAKPA Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Per 31 Desember 2021	18
Tabel 2	Perhitungan Penyisihan Piutang	23
Tabel 3	Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap	43
Tabel 4	Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud	45
Tabel 5	Rincian Output Strategis Kementerian Hukum dan HAM TA 2021	47
Tabel 6	Revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) TA. 2021	57
Tabel 7	Refocusing dan Realokasi Anggaran Per Unit Eselon I TA 2021	60
Tabel 8	Refocusing dan Realokasi Anggaran Per Program TA 2021	61
Tabel 9	Perubahan Pagu Kementerian Hukum dan HAM TA 2021	63
Tabel 10	Capaian Output Prioritas Nasional III Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia per 31 Desember 2021	64
Tabel 11	Capaian Output Prioritas Nasional IV Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia per 31 Desember 2021	64
Tabel 12	Capaian Output Prioritas Nasional VII Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia per 31 Desember 2021	65
Tabel 13	Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia per 31 Desember 2021	67
Tabel 14	Perbandingan Realisasi PNBPN Per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020	69
Tabel 15	Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan dari Penjualan, Pengelolaan BMN, dan Iuran Badan	71
Tabel 16	Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan dari Pendapatan Administrasi dan Penegakan Hukum	74
Tabel 17	Rincian pengembalian pendapatan dari Pendapatan Administrasi dan Penegakan Hukum	76
Tabel 18	Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan Kesehatan, Perlindungan Sosial, dan Keagamaan	76
Tabel 19	Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan Pendidikan, Budaya, Riset, dan Teknologi	78
Tabel 20	Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan Jasa Lainnya	78
Tabel 21	Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan Bunga, Pengelolaan Rekening Perbankan, dan Pengelolaan Keuangan	78
Tabel 22	Rincian Mutasi Pendapatan Jasa Giro	80
Tabel 23	Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan Denda	81
Tabel 24	Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan Lain-Lain	81
Tabel 25	Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja 31 Desember 2021	83
Tabel 26	Perbandingan Realisasi Belanja Negara 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020	84
Tabel 27	Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Menurut Unit Eselon I	85
Tabel 28	Perbandingan Realisasi Belanja Pegawai Per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020	86

Tabel 29	Realisasi Anggaran Belanja Pegawai per 31 Desember 2021	86
Tabel 30	Perbandingan Realisasi Belanja Barang per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020	88
Tabel 31	Rincian Realisasi Anggaran Belanja Barang per 31 Desember 2021	89
Tabel 32	Rincian Realisasi Belanja Barang Penanganan Pandemi Covid-19 per 31 Desember 2021	89
Tabel 33	Belanja Barang Operasional – Penanganan Pandemi Covid-19 (Akun 521131) Menurut Unit Eselon I per 31 Desember 2021	91
Tabel 34	Belanja Barang Non Operasional – Penanganan Pandemi Covid-19 (Akun 521241) Menurut Unit Eselon I per 31 Desember 2021	93
Tabel 35	Belanja Barang Persediaan – Penanganan Pandemi Covid-19 (Akun 521841) Menurut Unit Eselon I per 31 Desember 2021	94
Tabel 36	Belanja Barang Jasa – Penanganan Pandemi Covid-19 (Akun 522192) Menurut Unit Eselon I per 31 Desember 2021	95
Tabel 37	Rincian Realisasi Anggaran Belanja Barang Operasional per 31 Desember 2021	96
Tabel 38	Rincian Realisasi Anggaran Belanja Barang Non Operasional per 31 Desember 2021	97
Tabel 39	Rincian Realisasi Anggaran Belanja Barang Persediaan per 31 Desember 2021	99
Tabel 40	Rincian Realisasi Anggaran Belanja Jasa per 31 Desember 2021	100
Tabel 41	Rincian Realisasi Anggaran Belanja Pemeliharaan per 31 Desember 2021	101
Tabel 42	Rincian Realisasi Anggaran Belanja Perjalanan Dalam Negeri per 31 Desember 2021	102
Tabel 43	Rincian Realisasi Anggaran Belanja Perjalanan Luar Negeri per 31 Desember 2021	104
Tabel 44	Rincian Realisasi Anggaran Belanja Barang Lainnya untuk diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	105
Tabel 45	Rincian Realisasi Belanja Modal per 31 Desember 2021	105
Tabel 46	Rincian Realisasi Belanja Modal Penanganan Pandemi Covid-19 per 31 Desember 2021	106
Tabel 47	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Penanganan Pandemi COVID-19 (Akun 532119) Menurut Unit Eselon I per 31 Desember 2021	106
Tabel 48	Rincian Realisasi Anggaran Belanja Modal Tanah per 31 Desember 2021	107
Tabel 49	Rincian Penjelasan Realisasi Belanja Modal Tanah per 31 Desember 2021	107
Tabel 50	Rincian Realisasi Anggaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2021	108
Tabel 51	Rincian Penjelasan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2021	109
Tabel 52	Rincian Realisasi Anggaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2021	112

Tabel 53	Rincian Penjelasan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2021	113
Tabel 54	Rincian Realisasi Anggaran Belanja Modal Lainnya per 31 Desember 2021	116
Tabel 55	Rincian Penjelasan Realisasi Belanja Modal Lainnya per 31 Desember 2021	116
Tabel 56	Rincian Kas Di Bendahara Pengeluaran Berdasarkan Eselon I Per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020	119
Tabel 57	Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran Berdasarkan Satuan Kerja Per 31 Desember 2021	120
Tabel 58	Perbandingan Kas di Bendahara Penerimaan Berdasarkan Eselon I Per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020	123
Tabel 59	Perbandingan Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020	123
Tabel 60	Perbandingan Kas Lainnya dan Setara Kas Berdasarkan Eselon I Per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020	124
Tabel 61	Total Koreksi Nilai Kas Lainnya dan Setara Kas	124
Tabel 62	Koreksi Nilai Kas Lainnya dan Setara Kas berdasarkan satuan kerja	124
Tabel 63	Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas Berdasarkan Satuan Kerja per 31 Desember 2021	125
Tabel 64	Perbandingan Belanja Dibayar Dimuka Berdasarkan Eselon I Per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020	127
Tabel 65	Total Koreksi Nilai Belanja dibayar Dimuka	127
Tabel 66	Koreksi Nilai Belanja dibayar Dimuka Berdasarkan Satuan Kerja	128
Tabel 67	Rincian Belanja Dibayar Dimuka berdasarkan Satuan Kerja Per 31 Desember 2021	129
Tabel 68	Perbandingan Uang Muka Belanja Berdasarkan Eselon I Per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020	134
Tabel 69	Perbandingan Pendapatan Yang Masih Harus Diterima Berdasarkan Eselon I Per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020	135
Tabel 70	Rincian Pendapatan Yang Masih Harus Diterima Berdasarkan Satuan Kerja per 31 Desember 2021	136
Tabel 71	Perbandingan Rincian Piutang Bukan Pajak Per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020	137
Tabel 72	Perbandingan Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak Berdasarkan Eselon I Per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020	138
Tabel 73	Total Koreksi Nilai Piutang Penerimaan Bukan Pajak	138
Tabel 74	Koreksi Nilai Piutang Penerimaan Bukan Pajak Berdasarkan Satuan Kerja	138

Tabel 75	Perbandingan Rincian Bagian Lancar Tagihan TP/TGR Per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020	141
Tabel 76	Perbandingan Bagian Lancar Tagihan TP/TGR Berdasarkan Eselon I Per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020	141
Tabel 77	Rincian Bagian Lancar Tagihan TP/TGR Berdasarkan Satuan Kerja Per 31 Desember 2021	142
Tabel 78	Rincian Penyisihan Piutang Tak tertagih – Piutang Lancar	144
Tabel 79	Total Koreksi Nilai Penyisihan Piutang Tak tertagih – Piutang Lancar	150
Tabel 80	Koreksi Nilai Penyisihan Piutang Tak tertagih – Piutang PNBK Berdasarkan Satuan Kerja	150
Tabel 81	Koreksi Nilai Penyisihan Piutang Tak tertagih – Piutang Lainnya Berdasarkan Satuan Kerja	150
Tabel 82	Perbandingan Rincian Persediaan Per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020	152
Tabel 83	Perbandingan Nilai Persediaan Berdasarkan Eselon I Per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020	153
Tabel 84	Rincian Kerugian Persediaan Rusak/Usang berdasarkan Satuan Kerja Per 31 Desember 2021	153
Tabel 85	Total Koreksi Nilai Persediaan	161
Tabel 86	Koreksi Nilai Persediaan Berdasarkan Kelompok Barang	161
Tabel 87	Koreksi Barang Konsumsi Berdasarkan Satuan Kerja	162
Tabel 88	Koreksi Bahan untuk Pemeliharaan Berdasarkan Satuan Kerja	168
Tabel 89	Koreksi Amunisi Berdasarkan Satuan Kerja	170
Tabel 90	Perbandingan Tagihan TP/TGR Berdasarkan Eselon I Per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020	174
Tabel 91	Rincian Tagihan TP/TGR Berdasarkan Satuan Kerja Per 31 Desember 2021	174
Tabel 92	Perbandingan Piutang Jangka Panjang Lainnya Berdasarkan Eselon I Per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020	176
Tabel 93	Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Piutang Jangka Panjang 31 Desember 2021	177
Tabel 94	Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Jangka Panjang Berdasarkan Satuan Kerja Per 31 Desember 2021	178
Tabel 95	Perbandingan Nilai Tanah Berdasarkan Eselon I Per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020	180
Tabel 96	Penjelasan Tanah yang dikuasai pihak lain per 31 Desember 2021	182
Tabel 97	Total Koreksi Nilai Tanah	182
Tabel 98	Koreksi Nilai Tanah Berdasarkan Satuan Kerja	183

		Hal
Tabel 99	Rincian Mutasi Tanah per 31 Desember 2021	183
Tabel 100	Perbandingan Nilai Peralatan dan Mesin Berdasarkan Eselon I Per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020	193
Tabel 101	Rincian Peralatan dan Mesin Dalam Rangka Penanganan Pandemi COVID-19 Berdasarkan Eselon I Per 31 Desember 2021	194
Tabel 102	Total Koreksi Nilai Peralatan dan Mesin	195
Tabel 103	Koreksi Nilai Peralatan dan Mesin Berdasarkan Satuan Kerja	195
Tabel 104	Koreksi Nilai Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin Berdasarkan Satuan Kerja	199
Tabel 105	Rincian Mutasi Peralatan dan Mesin Per 31 Desember 2020	208
Tabel 106	Perbandingan Nilai Gedung dan Bangunan Berdasarkan Eselon I Per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020	224
Tabel 107	Total Koreksi Nilai Gedung dan Bangunan	224
Tabel 108	Koreksi Nilai Gedung dan Bangunan Berdasarkan Satuan Kerja	225
Tabel 109	Koreksi Nilai Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan Berdasarkan Satuan Kerja	225
Tabel 110	Rincian Mutasi Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2021	228
Tabel 111	Perbandingan Nilai Jalan, Irigasi dan Jaringan Berdasarkan Eselon I Per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020	245
Tabel 112	Total Koreksi Nilai Jalan, Irigasi, dan Jaringan serta Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	246
Tabel 113	Koreksi Nilai Jalan, Irigasi, dan Jaringan per Satuan Kerja	246
Tabel 114	Koreksi Nilai Akumulasi Penyusutan Jalan Berdasarkan Satuan Kerja	246
Tabel 115	Koreksi Nilai Akumulasi Penyusutan Irigasi Berdasarkan Satuan Kerja	246
Tabel 116	Rincian Mutasi Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 31 Desember 2021	247
Tabel 117	Rincian Nilai Aset Tetap Lainnya Berdasarkan Eselon I Per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020	252
Tabel 118	Rincian Aset Tetap Lainnya Berdasarkan Jenis Aset Per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020	253
Tabel 119	Rincian Nilai Aset Tetap Renovasi Berdasarkan Eselon I Per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020	253
Tabel 120	Rincian Transaksi Mutasi Aset Tetap Renovasi Per 31 Desember 2021	254
Tabel 121	Rincian Nilai Aset Tetap Lainnya (ATL) Berdasarkan Eselon I Per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020	260
Tabel 122	Total Koreksi Nilai Aset Tetap Lainnya dan Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	260
Tabel 123	Koreksi Nilai Aset Tetap Lainnya Berdasarkan Satuan Kerja	260

Tabel 124	Koreksi Nilai Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya Berdasarkan Satuan Kerja	261
Tabel 125	Rincian Transaksi Mutasi Aset Tetap Lainnya Per 31 Desember 2021	262
Tabel 126	Rincian Nilai Konstruksi Dalam Pengerjaan Berdasarkan Eselon I Per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020	267
Tabel 127	Total Koreksi Nilai Konstruksi Dalam Pengerjaan	268
Tabel 128	Koreksi Nilai Konstruksi Dalam Pengerjaan Berdasarkan Satuan Kerja	268
Tabel 129	Rincian Nilai Konstruksi Dalam Pengerjaan Berdasarkan Satuan Kerja Per 31 Desember 2021	268
Tabel 130	Rincian Mutasi Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2021	270
Tabel 131	Rincian Akumulasi Penyusutan per Jenis Aset Tetap per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020	274
Tabel 132	Rincian Aset Tak Berwujud Berdasarkan Eselon I Per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020	275
Tabel 133	Total Koreksi Nilai Aset Tak Berwujud dan Akumulasi Penyusutan Aset Tak Berwujud	275
Tabel 134	Koreksi Nilai Aset Tak Berwujud Berdasarkan Satuan Kerja	276
Tabel 135	Koreksi Nilai Akumulasi Penyusutan Aset Tak Berwujud Berdasarkan Satuan Kerja	276
Tabel 136	Rincian Mutasi Aset Tak Berwujud Per 31 Desember 2021	276
Tabel 137	Rincian Dana Yang Dibatasi Penggunaannya Berdasarkan Unit Eselon I Per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020	282
Tabel 138	Rincian Aset Lain-Lain Berdasarkan Unit Eselon I Per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020	283
Tabel 139	Rincian Aset Lain-Lain Berdasarkan Jenis Aset Per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020	284
Tabel 140	Rincian Aset Tetap Yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintahan Berdasarkan Unit Eselon I Per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020	284
Tabel 141	Total Koreksi Nilai Aset Tetap Yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintahan dan Akumulasi Penyusutannya	285
Tabel 142	Koreksi Nilai Aset Tetap Yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintahan Berdasarkan Satuan Kerja	285
Tabel 143	Koreksi Nilai Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintahan	286
Tabel 144	Rincian Mutasi Aset Tetap Yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintahan Per 31 Desember 2021	288
Tabel 145	Rincian Aset Tak Berwujud Yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintahan Berdasarkan Unit Eselon I Per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020	296
Tabel 146	Total Koreksi Nilai Aset Tak Berwujud Yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintahan dan Akumulasi Penyusutannya	296

Tabel 147	Koreksi Nilai Aset Tak Berwujud Yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintahan Berdasarkan Satuan Kerja	297
Tabel 148	Koreksi Nilai Akumulasi Penyusutan Aset Tak Berwujud Yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintahan Berdasarkan Satuan Kerja	297
Tabel 149	Rincian Mutasi Aset Tak Berwujud Yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintahan Per 31 Desember 2021	297
Tabel 150	Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya Per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020	300
Tabel 151	Rincian Jenis Utang Pihak Ketiga Berdasarkan Eselon I Per 31 Desember 2021	301
Tabel 152	Rincian Utang kepada Pihak Ketiga Berdasarkan Eselon I Per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020	302
Tabel 153	Total Koreksi Nilai Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya	303
Tabel 154	Koreksi Nilai Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar Berdasarkan Satuan Kerja	303
Tabel 155	Koreksi Nilai Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar Berdasarkan Satuan Kerja	303
Tabel 156	Koreksi Nilai Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya Berdasarkan Satuan Kerja	303
Tabel 157	Perbandingan Hibah Yang Belum Disahkan Berdasarkan Eselon I Per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020	304
Tabel 158	Total Koreksi Nilai Hibah Yang Belum Disahkan	305
Tabel 159	Koreksi Nilai Hibah Yang Belum Disahkan Berdasarkan Satuan Kerja	305
Tabel 160	Rincian Hibah yang Belum Disahkan Berdasarkan Satuan Kerja Per 31 Desember 2021	306
Tabel 161	Perbandingan Pendapatan Diterima Dimuka Berdasarkan Eselon I Per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020	306
Tabel 162	Total Koreksi Nilai Pendapatan Diterima Dimuka	307
Tabel 163	Koreksi Nilai Pendapatan Diterima Dimuka Berdasarkan Satuan Kerja	307
Tabel 164	Perbandingan Uang Muka dari KPPN Berdasarkan Eselon I Per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020	308
Tabel 165	Rincian Uang Muka dari KPPN Berdasarkan Satuan Kerja Per 31 Desember 2021	309
Tabel 166	Perbandingan Utang Jangka Pendek Lainnya Berdasarkan Eselon I Per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020	311
Tabel 167	Total Koreksi Nilai Utang jangka pendek lainnya	311
Tabel 168	Koreksi Nilai Utang jangka pendek lainnya Berdasarkan Satuan Kerja	311

Tabel 169	Rincian utang jangka pendek lainnya Per 31 Desember 2021	312
Tabel 170	Perbandingan Pendapatan Negara Bukan Pajak-LO Untuk Periode Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020	314
Tabel 171	Pendapatan PNB-LO dan Pendapatan PNB-LRA Untuk Periode Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2021	317
Tabel 172	Rincian Selisih PNB-LO dan PNB-LRA Untuk Periode Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2021	317
Tabel 173	Penjelasan Selisih Pendapatan PNB-LO dan Pendapatan PNB-LRA Untuk Periode Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2021	319
Tabel 174	Rekapitulasi Selisih Pendapatan PNB-LO dan Pendapatan PNB-LRA Untuk Periode Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2021	324
Tabel 175	Rincian pengembalian pendapatan per 31 Desember 2021	326
Tabel 176	Perbandingan Beban Pegawai-LO Untuk Periode Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020	327
Tabel 177	Perbandingan Beban Pegawai-LO dengan Belanja Pegawai-LRA Untuk Periode Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2021	328
Tabel 178	Rincian Selisih Beban Pegawai-LO dengan Belanja Pegawai-LRA Untuk Periode Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2021	328
Tabel 179	Penjelasan Selisih Beban Pegawai-LO dengan Belanja Pegawai-LRA Untuk Periode Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2021	329
Tabel 180	Perhitungan Selisih Beban Pegawai-LO dengan Belanja Pegawai-LRA Untuk Periode Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2021	331
Tabel 181	Perbandingan Beban Persediaan-LO Untuk Periode Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020	332
Tabel 182	Perbandingan Beban Persediaan-LO dengan Belanja Persediaan-LRA Untuk Periode Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2021	332
Tabel 183	Perhitungan Selisih Beban Persediaan-LO dengan Belanja Persediaan-LRA Untuk Periode Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2021	332
Tabel 184	Perbandingan Beban Barang dan Jasa-LO Untuk Periode Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020	334
Tabel 185	Perbandingan Beban Barang Jasa-LO dengan Belanja Barang Jasa-LRA Untuk Periode Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2021	335
Tabel 186	Rincian Selisih Beban Barang Jasa-LO dengan Belanja Barang-LRA Untuk Periode Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2021	336
Tabel 187	Penjelasan Selisih Beban Barang Jasa-LO dengan Belanja Barang-LRA Untuk Periode Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2021	338
Tabel 188	Perhitungan Selisih Beban Barang Jasa-LO dengan Belanja Barang Jasa-LRA Untuk Periode Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember	344

2021

Tabel 189	Perbandingan Beban Pemeliharaan-LO Untuk Periode Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020	345
Tabel 190	Perbandingan Beban Pemeliharaan-LO dengan Belanja Pemeliharaan-LRA Untuk Periode Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2021	346
Tabel 191	Rincian Selisih Beban Pemeliharaan-LO dengan Belanja Pemeliharaan-LRA Untuk Periode Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2021	346
Tabel 192	Penjelasan Selisih Beban Pemeliharaan-LO dengan Belanja Pemeliharaan-LRA Untuk Periode Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2021	348
Tabel 193	Perhitungan Selisih Beban Pemeliharaan-LO dengan Belanja Pemeliharaan-LRA Untuk Periode Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2021	350
Tabel 194	Perbandingan Beban Perjalanan Dinas-LO Untuk Periode Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020	351
Tabel 195	Perbandingan Beban Perjalanan Dinas-LO dengan Belanja Perjalanan Dinas-LRA Untuk Periode Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2021	352
Tabel 196	Rincian Selisih Beban Perjalanan Dinas-LO dengan Belanja Perjalanan Dinas-LRA Untuk Periode Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2021	352
Tabel 197	Penjelasan Selisih Beban Perjalanan Dinas dengan Belanja Perjalanan Dinas-LRA Untuk Periode Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2021	353
Tabel 198	Perhitungan Selisih Beban Perjalanan Dinas-LO dengan Belanja Perjalanan Dinas-LRA Untuk Periode Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2021	353
Tabel 199	Perbandingan Beban Penyusutan dan Amortisasi-LO Untuk Periode Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020	354
Tabel 200	Perbandingan Beban Penyusutan dan Amortisasi-LO dengan Kenaikan/ Penurunan Penyusutan dan Amortisasi pada Neraca Untuk Periode Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2021	355
Tabel 201	Rincian Selisih Beban Penyusutan dan Amortisasi-LO dengan Kenaikan/Penurunan Penyusutan dan Amortisasi pada Neraca Untuk Periode Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2021	355
Tabel 202	Perbandingan Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih-LO Untuk Periode Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020	357
Tabel 203	Perbandingan Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih-LO Dengan Kenaikan/ Penurunan Penyisihan Piutang pada Neraca Untuk Periode Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2021	359

Tabel 204	Penjelasan Selisih Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih-LO Dengan Kenaikan/ Penurunan Penyisihan Piutang pada Neraca Untuk Periode Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2021	359
Tabel 205	Rincian Koreksi Lainnya atas Penyisihan Piutang Untuk Periode Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2021	360
Tabel 206	Rincian Koreksi Lainnya atas Penyisihan Piutang Berdasarkan Satuan Kerja Untuk Periode Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2021	361
Tabel 207	Perbandingan Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar-LO Untuk Periode Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020	364
Tabel 208	Perbandingan Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar-LO Dengan Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar-LRA Untuk Periode Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2021	364
Tabel 209	Rincian Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar-LO Berdasarkan Satuan Kerja Untuk Periode Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2021	365
Tabel 210	Rincian Beban Pelepasan Aset Non Lancar-LO Untuk Periode Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2021	372
Tabel 211	Penjelasan Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya -LO Untuk Periode Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2021	372
Tabel 212	Rincian Beban Pelepasan Aset Non Lancar-LO Berdasarkan Satuan Kerja Untuk Periode Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2021	373
Tabel 213	Perbandingan Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO Untuk Periode Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020	383
Tabel 214	Perbandingan Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO dan Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LRA Untuk Periode Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2021	384
Tabel 215	Rincian Selisih Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO dan Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LRA Untuk Periode Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2021	385
Tabel 216	Penjelasan Selisih Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya -LO dengan Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya –LRA Untuk Periode Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2021	386
Tabel 217	Perhitungan Selisih Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO dan Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LRA Untuk Periode Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2021	388
Tabel 218	Perbandingan Beban Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO Untuk Periode Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020	389
Tabel 219	Penjelasan Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya -LO Untuk Periode Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2021	389
Tabel 220	Perhitungan Selisih Beban Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO dan Beban Kegiatan Non Operasional Lainnya-LRA Untuk Periode Yang	390

Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2021

Tabel 221	Rincian Beban Rugi Selisih Kurs Uang Persediaan Satker Perwakilan RI/Atase Teknis Berdasarkan Satuan Kerja Untuk Periode Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2021	391
Tabel 222	Rincian Beban Persediaan Rusak/Usang Berdasarkan Satuan Kerja Untuk Periode Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2021	391
Tabel 223	Rincian Beban Kerugian Selisih Kurs Belum Terealisasi Berdasarkan Satuan Kerja Untuk Periode Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2021	392
Tabel 224	Rincian Koreksi Nilai Persediaan per 31 Desember 2021	395
Tabel 225	Rincian Selisih Revaluasi Aset per 31 Desember 2021	396
Tabel 226	Rincian Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi berdasarkan Jenis Koreksi per 31 Desember 2021	397
Tabel 227	Perhitungan Transaksi Antar Entitas LPE 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020	398
Tabel 228	Rincian Pengesahan Hibah Langsung Per 31 Desember 2021	399
Tabel 229	Rincian Pengesahan Hibah Langsung Tahun Anggaran Yang Lalu Per 31 Desember 2021	401
Tabel 230	Rincian Uang Pailit per 31 Desember 2021	412
Tabel 231	Rincian Uang Pihak Ketiga per 31 Desember 2020	412
Tabel 232	Rincian Rekening Uang Pihak Ketiga	413
Tabel 233	Mutasi Uang Pihak Ketiga pada Balai Harta Peninggalan	415
Tabel 234	Informasi Pemanfaatan Tanah di Tangerang	439
Tabel 235	SK Penetapan Penyewaan Tanah di Tangerang	441
Tabel 236	Penyelesaian Permasalahan Tanah Yang Sudah Diokupasi	460
Tabel 237	Penyelesaian Permasalahan Tanah Yang Belum Diokupasi	461
Tabel 238	Rincian Nilai Temuan yang Belum Disetorkan per 31 Desember 2021	477



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA

INSPEKTORAT JENDERAL

Jl. H.R. Rasuna Said Kav 8-9 Kuningan, Jakarta 12940, Po.Box. 3489

Telp. 021-5253004/52565989 Fax. 021-5252975

Laman: <http://itjen.kemenkumham.go.id/> E-mail: itjen@kemenkumham.go.id

**PERNYATAAN TELAH DIREVIU
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI
SEMESTER II TAHUN ANGGARAN 2021**

Kami telah mereviu Laporan Keuangan Kementerian Hukum dan HAM untuk Semester II Tahun Anggaran 2021 berupa Neraca per tanggal 31 Desember 2021, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan untuk periode yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan Standar Reviu atas Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga. Semua informasi yang dimuat dalam laporan keuangan adalah penyajian manajemen Kementerian Hukum dan HAM RI.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan, dan keabsahan informasi, serta kesesuaian pengakuan, pengukuran, dan pelaporan transaksi dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Reviu mempunyai ruang lingkup yang terbatas dibandingkan dengan lingkup audit yang dilakukan sesuai dengan peraturan terkait dengan lingkup audit yang bertujuan untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan secara keseluruhan. Oleh karena itu, kami tidak memberi pendapat semacam itu.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat perbedaan yang menjadikan kami yakin bahwa laporan keuangan yang kami sebutkan di atas tidak disajikan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, dan peraturan lain yang terkait.

Jakarta, 23 Februari 2022
Inspektur Jenderal,

RAZILU
NIP. 19651128 199103 1 002





MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

**PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA**

Laporan Keuangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Tahun Anggaran 2021 *Audited* yang terdiri dari: (a) Laporan Realisasi Anggaran, (b) Neraca, (c) Laporan Operasional, (d) Laporan Perubahan Ekuitas dan (e) Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggung jawab kami, sedangkan substansi Laporan Keuangan dari masing-masing Satuan Kerja merupakan tanggung jawab UAKPA.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Jakarta, 13 Mei 2022

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia,

Yasonna H. Laoly



RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia per 31 Desember 2021 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi :

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2021.

Realisasi Pendapatan Negara per 31 Desember 2021 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak (Bruto) sebesar **Rp3.186.031.886.606,00** dan Pendapatan Negara Bukan Pajak (Netto) sebesar **Rp3.185.268.555.856,00** atau mencapai **71.11%** dari estimasi Pendapatan sebesar **Rp4.479.369.443.186,00**

Realisasi Belanja Negara (Bruto) per 31 Desember 2021 adalah sebesar **Rp14.277.207.130.240,00** dan Realisasi Belanja Negara (Netto) sebesar **Rp14.252.576.022.500,00** atau mencapai **95.99%** dari alokasi anggaran sebesar **Rp14.874.412.483.000,00**.

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas per 31 Desember 2021.

Nilai Aset per 31 Desember 2021 dicatat dan disajikan sebesar **Rp68.397.446.706.266,00** yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar **Rp745.401.812.938,00**; Aset Tetap (Netto) sebesar **Rp67.445.115.67.045,00**; Piutang Jangka Panjang (Netto) sebesar **Rp7.336.445.046,00**; dan Aset Lainnya (Netto) sebesar **Rp199.592.770.237,00**.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar **Rp648.253.533.508,00** dan **Rp67.749.193.172.758,00**.

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2021 adalah sebesar **Rp3.016.169.551.976,00**, sedangkan jumlah beban adalah sebesar **Rp14.075.306.870.272,00** sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional senilai **(Rp11.059.137.318.296,00)**. Surplus/Defisit Kegiatan Non Operasional dan Surplus/Defisit Pos-Pos Luar Biasa masing-masing sebesar **Rp5.050.491.607,00** dan **Rp0,00** sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar **(Rp11.054.086.826.689,00)**.



4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 1 Januari 2021 adalah sebesar **Rp67.744.562.310.510,00** ditambah Defisit-LO sebesar **(Rp11.054.086.826.689,00)** ditambah dengan koreksi-koreksi sebesar **(Rp385.813.689.210,00)** dan Transaksi Antar Entitas sebesar **Rp11.444.531.378.147,00** sehingga Ekuitas entitas per 31 Desember 2021 adalah senilai **Rp67.749.193.172.758,00**.

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 disusun dan disajikan dengan menggunakan basis akrual.

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia

Yasonna H. Laoly



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Catatan Atas Laporan Keuangan - [Ringkasan](#)
Per 31 Desember Tahun Anggaran 2021 (*Audited*)
Dengan Angka Perbandingan 31 Desember Tahun Anggaran 2020
(dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2021 DAN 31 DESEMBER 2020

(dalam Rupiah)

URAIAN	CAT	31 Desember 2021		% Thd Angg	31 Desember 2020
		ANGGARAN	REALISASI		REALISASI
PENDAPATAN	B.1.				
Penerimaan Perpajakan		0,00	0,00	0,00	0,00
Penerimaan Negara Bukan Pajak		4.479.369.443.186,00	3.185.268.555.856,00	71,11	2.938.623.082.326,00
JUMLAH PENDAPATAN		4.479.369.443.186,00	3.185.268.555.856,00	71,11	2.938.623.082.326,00
BELANJA	B.2.				
Belanja Operasi					
Belanja Pegawai	B.2.1.	6.795.953.504.000,00	6.762.254.319.598,00	99,50	6.474.614.295.030,00
Belanja Barang	B.2.2.	6.086.766.694.000,00	5.672.894.551.277,00	93,20	5.004.314.364.126,00
Bunga		0,00	0,00	0,00	0,00
Subsidi		0,00	0,00	0,00	0,00
Hibah		0,00	0,00	0,00	0,00
Bantuan Sosial		0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Lain-lain		0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH BELANJA OPERASI		12.882.720.198.000,00	12.435.148.870.875,00	96,53	11.478.928.659.156,00
Belanja Modal	B.3.				
Belanja Tanah		208.850.000,00	198.890.000,00	95,23	551.494.720,00
Belanja Peralatan dan Mesin		977.952.576.000,00	887.104.844.363,00	90,71	490.652.157.887,00
Belanja Gedung dan Bangunan		943.567.799.000,00	865.255.242.252,00	91,70	417.497.466.922,00
Belanja Jalan Irigasi dan Jaringan		0,00	0,00	0,00	257.848.000,00
Belanja Aset Tetap Lainnya		0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Aset Lainnya		69.963.060.000,00	64.868.175.010,00	92,72	11.658.911.401,00
JUMLAH BELANJA MODAL		1.991.692.285.000,00	1.817.427.151.625,00	91,25	920.617.878.930,00
JUMLAH BELANJA		14.874.412.483.000,00	14.252.576.022.500,00	95,82	12.399.546.538.086,00

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia

Yasonna H. Laoly



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Catatan Atas Laporan Keuangan - [Ringkasan](#)
Per 31 Desember Tahun Anggaran 2021 (*Audited*)
Dengan Angka Perbandingan 31 Desember Tahun Anggaran 2020
(dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

II. NERACA

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NERACA

Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2021 Dan 31 Desember 2020

(dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31 Desember 2021	31 Desember 2020
ASET			
ASET LANCAR			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1.	557.409.357,00	437.017.887,00
Kas di Bendahara Penerimaan	C.2.	0,00	1.000.000,00
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.3.	46.911.594,00	44.953.188.625,00
Belanja Dibayar Dimuka (Prepaid)	C.4.	124.665.683.131,00	29.254.137.917,00
Uang Muka Belanja (Prepayment)	C.5.	0,00	2.394.380.000,00
Pendapatan yang Masih Harus Diterima	C.6.	25.139.898,00	31.297.367,00
Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak	C.7.	231.767.531.548,00	271.664.242.306,00
Bagian Lancar Tagihan TP/TGR	C.8.	225.672.008,00	386.942.668,00
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak	C.9.	(216.759.589.194,00)	(244.725.704.617,00)
Persediaan	C.10.	604.873.054.596,00	597.192.271.954,00
JUMLAH ASET LANCAR		745.401.812.938,00	701.588.774.107,00
PIUTANG JANGKA PANJANG			
Tagihan TP/TGR	C.11.	1.752.131.184,00	1.483.810.558,00
Piutang Jangka Panjang lainnya	C.12.	5.856.300.000,00	5.856.300.000,00
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Piutang Jangka Panjang Lainnya	C.13.	(271.986.138,00)	(129.715.593,00)
JUMLAH PIUTANG JANGKA PANJANG		7.336.445.046,00	7.210.394.965,00
ASET TETAP			
Tanah	C.14.	54.300.058.612.024,00	54.289.885.533.612,00
Peralatan dan Mesin	C.15.	8.395.567.596.182,00	7.783.913.088.592,00
Gedung dan Bangunan	C.16.	13.128.613.611.314,00	12.533.396.297.024,00
Jalan Irigasi dan Jaringan	C.17.	92.560.917.102,00	106.092.953.219,00
Aset Tetap Lainnya	C.18.	29.800.588.859,00	26.397.569.384,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)	C.19.	494.150.574.573,00	174.381.031.855,00
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.20.	(8.995.636.222.009,00)	(7.538.881.299.359,00)
JUMLAH ASET TETAP		67.445.115.678.045,00	67.375.185.174.327,00
ASET LAINNYA			
Aset Tak Berwujud	C.21.	489.713.047.685,00	534.166.062.298,00
Dana Yang Dibatasi Penggunaannya	C.22.	14.272.752.000,00	14.190.852.000,00
Aset Lain-lain	C.23.	722.099.657.104,00	426.406.705.940,00
Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	C.24.	(1.026.492.686.552,00)	(796.061.567.360,00)
JUMLAH ASET LAINNYA		199.592.770.237,00	178.702.052.878,00
JUMLAH ASET		68.397.446.706.266,00	68.262.686.396.277,00
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Utang kepada Pihak Ketiga	C.25.	63.007.116.719,00	32.376.416.169,00
Hibah Yang Belum Disahkan	C.26.	490.498.500,00	0,00
Pendapatan Diterima Dimuka	C.27.	584.177.088.896,00	485.306.124.011,00



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Catatan Atas Laporan Keuangan - [Ringkasan](#)
Per 31 Desember Tahun Anggaran 2021 (*Audited*)
Dengan Angka Perbandingan 31 Desember Tahun Anggaran 2020
(dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Uang Muka dari KPPN	C.28.	557.409.357,00	437.017.887,00
Utang Jangka Pendek Lainnya	C.29.	21.420.036,00	4.527.700,00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		648.253.533.508,00	518.124.085.767,00
JUMLAH KEWAJIBAN		648.253.533.508,00	518.124.085.767,00
EKUITAS			
Ekuitas	C.30.	67.749.193.172.758,00	67.744.562.310.510,00
JUMLAH EKUITAS		67.749.193.172.758,00	67.744.562.310.510,00
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		68.397.446.706.266,00	68.262.686.396.277,00

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia

Yasonna H. Laoly



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Catatan Atas Laporan Keuangan - [Ringkasan](#)
Per 31 Desember Tahun Anggaran 2021 (*Audited*)
Dengan Angka Perbandingan 31 Desember Tahun Anggaran 2020
(dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

III. LAPORAN OPERASIONAL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2021 DAN 31 DESEMBER 2020

(dalam Rupiah)

	CATATAN	31 Desember 2021	31 Desember 2020
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
Pendapatan Perpajakan		0,00	0,00
Pendapatan Negara Bukan Pajak	D.1.	3.016.169.551.976,00	2.783.249.220.519,00
Pendapatan Hibah		0,00	0,00
JUMLAH PENDAPATAN		3.016.169.551.976,00	2.783.249.220.519,00
BEBAN			
Beban Pegawai	D.2.	6.762.851.059.636,00	6.472.424.263.549,00
Beban Persediaan	D.3.	538.662.134.519,00	501.359.428.804,00
Beban Barang dan Jasa	D.4.	4.120.083.995.696,00	3.911.545.495.096,00
Beban Pemeliharaan	D.5.	567.858.477.279,00	466.379.575.916,00
Beban Perjalanan Dinas	D.6.	642.282.586.429,00	426.993.500.566,00
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	D.7.	0,00	0,00
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.8.	1.442.347.421.665,00	1.452.598.896.980,00
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D.9.	1.221.195.048,00	(57.735.389.457,00)
JUMLAH BEBAN		14.075.306.870.272,00	13.173.565.771.454,00
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL		(11.059.137.318.296,00)	(10.390.316.550.935,00)
KEGIATAN NON OPERASIONAL			
Surplus/Defisit Penjualan Aset Non Lancar	D.10.	(23.928.239.679,00)	(21.174.854.380,00)
Surplus/Defisit Kegiatan Non Operasional lainnya	D.11.	28.978.731.286,00	96.994.072.636,00
Defisit Selisih Kurs		0,00	0,00
SURPLUS /DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		5.050.491.607,00	75.819.218.256,00
SURPLUS /DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA		(11.054.086.826.689,00)	(10.314.497.332.679,00)
POS LUAR BIASA		0,00	0,00
Beban Luar Biasa		0,00	0,00
SURPLUS (DEFISIT) LO		(11.054.086.826.689,00)	(10.314.497.332.679,00)

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia

Yasonna H. Laoly



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Catatan Atas Laporan Keuangan - **Ringkasan**
Per 31 Desember Tahun Anggaran 2021 (*Audited*)
Dengan Angka Perbandingan 31 Desember Tahun Anggaran 2020
(dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2021 DAN 31 DESEMBER 2020

(dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31 Desember 2021	31 Desember 2020
EKUITAS AWAL	E.1.	67.744.562.310.510,00	68.274.718.348.226,00
SURPLUS (DEFISIT) LO	E.2.	(11.054.086.826.689,00)	(10.314.497.332.679,00)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI / KESALAHAN MENDASAR KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	E.3.	(385.813.689.210,00)	(57.264.768.842,00)
Penyesuaian Nilai Aset		0,00	0,00
Koreksi Nilai Persediaan	E.3.1.	5.902.162.803,00	769.034.050,00
Koreksi Atas Reklasifikasi	E.3.2.	27.342.399.435,00	32.643.087.986,00
Selisih Revaluasi Aset		(5.672.446.000,00)	37.421.532.134,00
Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi	E.3.3.	(368.789.822.950,00)	(131.465.893.154,00)
Koreksi Lain-Lain	E.3.4.	(44.595.982.498,00)	3.367.470.142,00
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.4.	11.444.531.378.147,00	9.841.606.063.805,00
EKUITAS AKHIR	E.5.	67.749.193.172.758,00	67.744.562.310.510,00

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia

Yasonna H. Laoly



V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

Dasar Hukum

A.1. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.05/2016 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Pusat;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 234/PMK.05/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.05/2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15/PMK.06/2021 tentang Penyelesaian Piutang Instansi Pemerintah yang Diurus/Dikelola oleh Panitia Urusan Piutang Negara/Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Dengan Mekanisme *Crash Program* Tahun Anggaran 2021;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 114/PMK.05/2021 tentang Perubahan atas peraturan Menteri Keuangan Nomor 43/PMK.05/2020 tentang mekanisme pelaksanaan



anggaran belanja atas beban anggaran pendapatan dan belanja negara dalam penanganan pandemi corona virus disease;

12. Surat Menteri Keuangan Nomor S-30/MK.02/2021 tanggal 12 Januari 2021 hal *Refocusing* dan Realokasi Belanja Kementerian/Lembaga TA 2021;
13. Surat Menteri Keuangan Nomor S-131/MK.5/2021 tanggal 31 Desember 2021 hal Kebijakan Akuntansi Penyajian dan Pengungkapan Hak dan Kewajiban dari Putusan Hukum Inkracht dan Pelaporan dan Pengungkapan Penanganan Dampak Pandemi Covid-19 dan/atau PC PEN;
14. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-02.KU.05.01 Tahun 2017 tentang Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrua Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
15. Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-3/PB/PB.6/2021 tanggal 22 Januari 2021 hal Penerapan Metode Penilaian Persediaan dengan Mekanisme *First In First Out* (FIFO);
16. Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor: S-369/PB/2020 tanggal 27 April 2020 hal Pemutakhiran Akun Dalam Rangka Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
17. Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Nomor: KEP-135/PB/2020 tentang Pemutakhiran Kodefikasi Segmen Akun pada Bagan Akun Standar;
18. Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor: S-628/PB/2020 tanggal 23 Juli 2020 hal Tindak Lanjut Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-369/PB/2020 hal Pemutakhiran Akun Dalam Rangka Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
19. Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-21/PB/PB.6/2021 tanggal 20 Juli 2021 hal Kebijakan Akuntansi atas Penggunaan Kurs Penutup;
20. Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per 9/PB//2021 tanggal 30 September 2021 hal pedoman pelaksanaan penerimaan dan



- pengeluaran negara pada akhir tahun anggaran 2021;
21. Surat Direktur Akuntansi dan Pelaporan Nomor S-180/PB.6/2021 tanggal 30 Desember 2021 hal Penyampaian Modul Aplikasi e-Rekon&LK (Volume II);
 22. Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-27/PB/PB.6/2021 tanggal 31 Desember 2021 hal Jadwal Rekonsiliasi, Penyusunan, dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) Tahun 2021 (*Unaudited*) serta Perlakuan Akuntansi atas Transaksi Akhir Tahun ;
 23. Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-3/PB/PB.6/2022 tanggal 25 Januari 2022 hal Rilis Aplikasi SAIBA Versi 21.1.0 dan SIMAK Versi 21.1.0 Dalam Rangka Penyusunan LKKL *Unaudited* Tahun 2021;
 24. Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-72/PB/2022 tanggal 15 Februari 2022 hal Mekanisme Pengungkapan atas Target dan Realisasi Capaian Output Prioritas Nasional dan PC-PEN pada Laporan Keuangan Tahun 2021;
 25. Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-16/PB.6/2022 tanggal 25 Maret 2022 hal Rilis Update Aplikasi Persediaan Versi 21.1.0, SIMAK BMN versi 21.2.0, dan SAIBA Versi 21.2.0 Dalam Rangka Penyusunan LKKL Tahun 2021 *Audited*;
 26. Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-17/PB.6/2022 Tanggal 2 April 2022 Hal Pelaksanaan Koreksi Data/Transaksi, Upload Ulang/*Push* Data Ke Aplikasi e-Rekon&LK, Dan Penyampaian LKKL Tahun 2021 *Audited*;
 27. Surat Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor SEK-KU.01.01-206 tanggal 3 Agustus 2020 hal Tindak Lanjut Surat Sekretaris Jenderal Nomor SEK.KU.01.01-81 Hal Pemutakhiran Akun Dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
 28. Surat Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor SEK-PB.05.06-301 tanggal 3 Desember 2021 hal Pedoman



Penatausahaan Barang Milik Negara di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM;

**Profil dan
Rencana Strategis**

**A.2. PROFIL DAN KEBIJAKAN TEKNIS
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI
MANUSIA**

**A.2.1. Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian
Hukum dan Hak Asasi Manusia**

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden Republik Indonesia.

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dipimpin oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara serta menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang peraturan perundang-undangan, administrasi hukum umum, pemasyarakatan, keimigrasian, kekayaan intelektual, dan hak asasi manusia;
2. Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
3. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
4. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
5. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di daerah;
6. Pelaksanaan pembinaan hukum nasional;
7. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang hukum dan hak asasi manusia;



8. Pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia di bidang hukum dan Hak Asasi Manusia;
9. Pelaksanaan kegiatan teknis yang berskala nasional;
10. Pelaksanaan tugas pokok sampai ke daerah; dan
11. Pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

A.2.2. Visi, Misi, Nilai, Tujuan, dan Sasaran Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

a. Visi

Berdasarkan identifikasi dan analisa lingkungan strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, maka Visi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia adalah:

“Masyarakat memperoleh Kepastian Hukum”

Visi ini lebih menekankan pada orientasi masa depan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan mengacu kepada kompetensi inti (*core bussines*) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yakni Fungsi Pembentukan Hukum, Fungsi Pelayanan Hukum, Fungsi Penegakan Hukum, dan Fungsi Pemenuhan Hak Asasi Manusia yang dikaitkan dengan Visi Pemerintah yakni menuju Indonesia yang sejahtera, demokratis dan berkeadilan.

b. Misi

Pada dasarnya misi merupakan sesuatu yang harus diemban oleh organisasi dalam hal ini Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai suatu uraian untuk memperjelas dan menjabarkan visi yang telah ditetapkan. Pernyataan misi ini menjawab kebutuhan penerima layanan yang harus dipenuhi oleh organisasi sesuai dengan karakteristik dan kompetensi inti organisasi.

Oleh sebab itu berdasarkan analisa strategis dikaitkan dengan visi operasional organisasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia



maka Misi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia adalah:

- a. Mewujudkan peraturan Perundang-Undangan yang berkualitas;
- b. Mewujudkan pelayanan hukum yang berkualitas;
- c. Mewujudkan penegakan hukum yang berkualitas;
- d. Mewujudkan penghormatan, pemenuhan, dan perlindungan Hak Asasi Manusia;
- e. Mewujudkan layanan manajemen administrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; serta
- f. Mewujudkan aparatur Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang profesional dan berintegritas.

c. Nilai

Untuk memandu pencapaian visi dan misi serta untuk mewujudkan tujuan dan sasaran diperlukan nilai-nilai yang digunakan sebagai pedoman bagi seluruh insan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Nilai ini mendukung dan memandu di saat tugas dan tanggung jawab sedang dikerjakan. Ada pun nilai Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia adalah:

1. Profesional

Aparat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia adalah aparat yang bekerja keras untuk mencapai tujuan organisasi melalui penguasaan bidang tugasnya, menjunjung tinggi etika, dan integritas profesi.

2. Akuntabel.

Setiap kegiatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan atau peraturan yang berlaku.

3. Sinergi

Komitmen untuk membangun dan memastikan hubungan kerja sama yang produktif serta kemitraan yang harmonis dengan para pemangku kepentingan untuk menemukan dan melaksanakan solusi terbaik, bermanfaat, dan berkualitas.



4. Transparan.

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai.

5. Inovatif

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia mendukung kreativitas dan mengembangkan inisiatif untuk selalu melakukan pembaharuan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya.

d. Tujuan

Dalam penyusunan rencana strategis tujuan adalah kondisi yang akan atau harus dicapai dalam kurun waktu tertentu sesuai dengan apa yang telah dibayangkan sebelumnya baik dalam konteks visi terutama dalam perspektif misi organisasi. Tujuan akan menjadi acuan dalam perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan. Sesuai dengan misi yang telah dirumuskan dikaitkan dengan analisis strategis maka tujuan yang akan dicapai oleh kementerian adalah:

- a. Terwujudnya politik legislasi yang berkualitas melalui pembentukan peraturan perundang-undangan yang terencana;
- b. Terwujudnya layanan hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang cepat dan murah yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat;
- c. Terwujudnya penegakan hukum yang berkualitas di bidang keimigrasian, kekayaan intelektual, kerjasama timbal balik dengan negara lain, pembinaan pemasyarakatan serta efektifitas koordinasi antar instansi penegak hukum;
- d. Terwujudnya kebijakan nasional yang mendorong penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia;
- e. Terwujudnya manajemen organisasi yang akuntabel dengan penyelenggaraan birokrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang profesional;



- f. Terwujudnya aparat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang profesional dan berintegritas.

A.2.3. Organisasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

1. Sekretariat Jenderal

Sekretariat Jenderal merupakan unsur pembantu pimpinan dalam kementerian yang bertanggung jawab langsung kepada Menteri.

Sekretariat Jenderal membawahi tujuh unit Eselon II, yaitu 6 (enam) biro dan satu pusat, yaitu:

- a. Biro Perencanaan;
- b. Biro Kepegawaian;
- c. Biro Pengelolaan Barang Milik Negara;
- d. Biro Keuangan;
- e. Biro Hukum, Hubungan Masyarakat, dan Kerja Sama;
- f. Biro Umum; dan
- g. Pusat Data dan Informasi yang merupakan unsur penunjang dalam Kementerian dan bertanggung jawab kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal.

2. Inspektorat Jenderal

Inspektorat Jenderal merupakan unsur pengawasan dalam Kementerian yang bertanggung jawab langsung kepada Menteri.

3. Direktorat Jenderal

Direktorat Jenderal merupakan unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi Kementerian yang bersifat teknis serta bertanggung jawab langsung kepada Menteri. Direktorat Jenderal di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia terdiri atas:

- a. Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan;
- b. Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum;
- c. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan;
- d. Direktorat Jenderal Imigrasi;
- e. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual; dan
- f. Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia.

4. Badan

Badan merupakan unsur penunjang dalam Kementerian dan bertanggung jawab langsung



kepada Menteri. Badan di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia terdiri atas:

- a. Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN);
- b. Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia (Balitbang Hukum dan HAM); dan
- c. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia (BPSDM Hukum dan HAM).

5. Kantor Wilayah

Kantor Wilayah adalah instansi vertikal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang berkedudukan di provinsi dan berada di bawah serta bertanggung jawab kepada Menteri untuk melaksanakan tugas dan fungsi berdasarkan kebijakan Menteri sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Kantor Wilayah membawahi unit pelaksana teknis (UPT) di lingkungannya dalam hal pengawasan dan jalur koordinasi.

6. Unit Pelaksana Teknis

UPT adalah unit pelaksana pelayanan di bidang masing-masing dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi pelayanan publik Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Pada Tahun Anggaran 2018 Kantor Wilayah mengalami pemekaran entitas akuntansi. UPT Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia terdiri dari:

- a. Kantor Imigrasi;
- b. Rumah Detensi Imigrasi;
- c. Lembaga Pemasyarakatan;
- d. Balai Pemasyarakatan;
- e. Rumah Tahanan Negara;
- f. Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara;
- g. Balai Harta Peninggalan (di lima Kantor Wilayah); dan
- h. Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan HAM (di tiga Kantor Wilayah).

A.2.4. Restrukturisasi Program dan Kegiatan

Pada Tahun Anggaran 2015 Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia telah melaksanakan Restrukturisasi Program dan Kegiatan (RPK). RPK merupakan implementasi dari upaya penataan



kembali Program dan Kegiatan sebagaimana rekomendasi dari Surat Edaran Bersama Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Negara/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Menteri Keuangan Nomor: 0142/M.PPN/06/2009 dan SE 1848/MK/2009 tanggal 19 Juni 2009 perihal Pedoman Reformasi Perencanaan dan Penganggaran. Penataan kembali Program dan Kegiatan dilaksanakan dengan memberikan kewenangan kepada Unit Eselon I selaku pemangku Program untuk dapat memiliki Satuan Kerja di tingkat Wilayah *in line* secara penganggaran. Dampaknya adalah:

1. Unit Eselon I memiliki Satuan Kerja di tingkat Wilayah berupa satker Kantor Wilayah;
2. Satuan Kerja di daerah dan Perwakilan Luar Negeri yang semula bernaung di bawah Sekretariat Jenderal berpindah menjadi Satuan Kerja Unit Eselon I terkait.

Dalam proses penganggarannya maka Satuan Kerja Kantor Wilayah mengalami pemekaran entitas keuangan dan akuntansi, sehingga Kantor Wilayah menjadi 9 (sembilan) entitas yaitu pemangku anggaran:

1. Sekretariat Jenderal;
2. Ditjen Administrasi Hukum Umum;
3. Ditjen Pemasyarakatan;
4. Ditjen Imigrasi;
5. Ditjen Kekayaan Intelektual;
6. Ditjen Peraturan Perundang-Undangan;
7. Ditjen Hak Asasi Manusia;
8. Badan Pembinaan Hukum Nasional;
9. Balitbang Hukum dan HAM.

Pada tanggal 30 September 2015 telah diterbitkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Terhadap entitas Kantor Wilayah pemangku anggaran Sekretariat Jenderal tidak mengalami perubahan kode Satuan Kerja, sedangkan delapan entitas baru memiliki kode Satuan Kerja baru.



Untuk 739 (tujuh ratus tiga puluh sembilan) Unit Pelaksana Teknis daerah dan 18 (delapan belas) Perwakilan Luar Negeri seluruhnya mengalami perubahan kode Satuan Kerja karena berpindah program dari semula bernaung di bawah Sekretariat Jenderal menjadi bernaung di bawah Unit Eselon I terkait. Perubahan kode Eselon I dan kode satuan kerja tersebut memenuhi syarat sebagai UPT yang harus dilikuidasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 198/PMK.05/2012 tentang Likuidasi Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Kementerian/Lembaga. Proses likuidasi dilaksanakan dengan menyusun Laporan Keuangan Penutup dan Laporan Keuangan Likuidasi menggunakan Aplikasi SAIBA.

Ada pun jumlah Satuan Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia per tanggal 31 Desember Tahun Anggaran 2021 sebagai berikut:

Tabel 1
Rekapitulasi Jumlah Satuan Kerja UAKPA
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Per 31 Desember 2021

Unit Eselon I	Satker Pusat	Satker Kanwil	Satker LN	Satker UPT	TOTAL
Sekretariat Jenderal	2	33	0	0	35
Inspektorat Jenderal	1	0	0	0	1
Ditjen AHU	1	33	0	5	39
Ditjen Pemasyarakatan	1	33	0	680	714
Ditjen Imigrasi	1	33	18	139	191
Ditjen Kekayaan Intelektual	1	33	0	0	34
Ditjen PP	1	33	0	0	34
Ditjen HAM	1	33	0	0	34
BPHN	1	33	0	0	34
Balitbang Hukum dan HAM	1	33	0	0	34



BPSDM Hukum dan HAM	3	0	0	3	6
TOTAL	14	297	18	827	1.156

Pada 31 Desember 2020, jumlah Satuan Kementerian Hukum dan HAM sebanyak 1.155 (seribu seratus lima puluh lima) satuan kerja. Pada Semester I Tahun 2021, terdapat penambahan 1 (satu) satuan kerja pada Direktorat Jenderal Imigrasi, yaitu Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Cianjur (Kode Satker 408627). Dengan demikian, jumlah satuan kerja Kementerian Hukum dan HAM per 31 Desember 2021 adalah sebanyak 1.156 (seribu seratus lima puluh enam) satuan kerja.

**Pendekatan
Penyusunan Laporan
Keuangan**

A.3. PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan per 31 Desember 2021 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan, dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

Laporan Keuangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia ini merupakan laporan konsolidasi dari seluruh jenjang struktur di bawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia seperti Eselon I, Kantor Wilayah, serta Satuan Kerja (Satker) yang bertanggung jawab atas anggaran yang diberikan.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrua (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Entitas yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca, Laporan Operasional, dan laporan barang milik negara, serta laporan manajerial lainnya.



Dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian tingkat Kementerian, satuan kerja yang bertugas dan bertanggung jawab dalam penyajian laporan keuangan Kementerian adalah Biro Keuangan dan Biro Pengelolaan BMN.

Basis Akuntansi

A.4. BASIS AKUNTANSI

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Dasar Pengukuran

A.5. DASAR PENGUKURAN

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.



Kebijakan Akuntansi

A.6. KEBIJAKAN AKUNTANSI

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan per 31 Desember 2021 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Di samping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia adalah sebagai berikut:

Pendapatan-LRA

1. Pendapatan- LRA

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Pendapatan-LO

2. Pendapatan- LO

- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia adalah sebagai berikut:
 - Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan.
 - Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa.
 - Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan.
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan



Belanja

3. Belanja

- membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Beban

4. Beban

- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban, terjadinya konsumsi aset, terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa;
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset

5. Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap dan Aset Lainnya.

Aset Lancar

a. Aset Lancar

Aset Lancar mencakup kas dan setara kas yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung



dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;

- Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal.
- Piutang disajikan pada neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih adalah cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang berdasarkan penggolongan kualitas piutang. Penilaian kualitas piutang dilakukan dengan mempertimbangkan jatuh tempo dan perkembangan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Kualitas piutang didasarkan pada kondisi masing-masing piutang pada tanggal pelaporan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.06/2011 tentang Kualitas Piutang Kementerian Negara/Lembaga dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih.

Tabel 2
Perhitungan Penyisihan Piutang

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama	10%



	tidak dilakukan pelunasan	
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%
	Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	

- Tuntutan Perbedaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.
- Persediaan pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia mencakup:
 - barang atau perlengkapan yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional pemerintah, seperti barang habis pakai dan barang tak habis pakai;
 - bahan atau perlengkapan yang akan digunakan dalam proses produksi, contohnya bahan yang digunakan dalam proses produksi seperti bahan baku dalam kegiatan pembinaan warga binaan pemasyarakatan;
 - barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam kegiatan operasional.
- Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 234/PMK.05/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.05/2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat disebutkan bahwa pengukuran nilai persediaan disajikan sebesar:
 - Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian;
 - Harga pokok produksi digunakan apabila persediaan diperoleh dengan memproduksi sendiri;



- Nilai wajar digunakan apabila persediaan diperoleh dari cara lainnya.

Dalam mencatat persediaan, pemerintah menggunakan metode *Perpetual*. Persediaan dinilai dengan menggunakan metode *First In First Out* (FIFO), di mana barang yang masuk terlebih dahulu dianggap sebagai barang yang pertama kali keluar. Dengan metode ini saldo persediaan dihitung berdasarkan harga perolehan masing-masing.

Selanjutnya berdasarkan Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-3/PB/PB.6/2021 tanggal 22 Januari 2021 hal Penerapan Metode *First In First Out* (FIFO) bahwa mulai tahun 2021 metode penilaian persediaan yang digunakan adalah FIFO.

- Dalam rangka penyajian persediaan di neraca, satuan kerja melaksanakan opname fisik (*stock opname*) persediaan yang dilakukan setiap semester. Berdasarkan hasil opname fisik tersebut, selanjutnya dilakukan penyesuaian data nilai persediaan.

Aset Tetap

b. Aset Tetap

Aset Tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun.

- Nilai aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000,00 (dua



puluh lima juta rupiah);

- c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai beban kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Kebijakan Penilaian Kembali (Revaluasi) Aset Tetap
Pasal 52 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, menyatakan bahwa:
 - 1) Dalam kondisi tertentu, Pengelola Barang dapat melakukan Penilaian kembali atas nilai Barang Milik Negara/Daerah yang telah ditetapkan dalam neraca Pemerintah Pusat/Daerah.
 - 2) Keputusan mengenai Penilaian kembali atas nilai Barang Milik Negara dilaksanakan berdasarkan ketentuan Pemerintah yang berlaku secara nasional.
Dalam rangka mewujudkan penyajian nilai BMN pada Laporan Keuangan Pemerintah Pusat yang akuntabel sesuai dengan nilai wajarnya, Pemerintah melakukan penilaian kembali (revaluasi) BMN berupa aset tetap berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2018 tentang Penilaian Kembali Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK06/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kembali Barang Milik Negara. Revaluasi dilakukan atas BMN berupa Aset Tetap:
 - a. Tanah,
 - b. Gedung dan bangunan, dan
 - c. Jalan, Irigasi, dan Jaringan yang



meliputi:

- 1) Jalan dan Jembatan
- 2) Bangunan Air

Pada Kementerian/Lembaga sesuai dengan kodifikasi BMN yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 2015. Selain Aset Tetap tersebut, Penilaian Kembali BMN juga dilaksanakan terhadap Aset Tetap pada Kementerian/Lembaga yang sedang dilaksanakan Pemanfaatan (Aset yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga). Pelaksanaan Penilaian Kembali BMN tersebut dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2017 sampai dengan Tahun Anggaran 2018. Sesuai Surat Menteri Keuangan Nomor S761/MK.06/2018 tanggal 14 September 2018 hal Pelaksanaan Penilaian Kembali Barang Milik Negara, pelaksanaan Penilaian Kembali BMN dilakukan setelah pencaangan pada tanggal 29 Agustus 2017.

Pelaksanaan penilaian dalam rangka revaluasi dilakukan dengan pendekatan data pasar, pendekatan biaya, dan/atau pendekatan pendapatan oleh Penilai Pemerintah di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan. Berdasarkan pertimbangan efisiensi anggaran dan waktu penyelesaian, pelaksanaan penilaian dilakukan dengan survei lapangan untuk objek penilaian berupa Tanah dan tanpa survey lapangan untuk objek penilaian selain Tanah.

- Kronologi Pelaksanaan Inventarisasi dan Penilaian Kembali (IP)

Pada tahun 2017-2018, pemerintah melakukan inventarisasi dan penilaian kembali (IP) BMN atau revaluasi BMN berupa tanah, gedung bangunan, serta jalan, irigasi dan jaringan. Adapun kronologi pelaksanaan atas penilaian kembali BMN sebagai berikut:



1. Pada tahun 2017, penilaian kembali BMN belum diselesaikan untuk semua BMN. Untuk menghindari ketidak-konsistenan penyajian BMN dalam laporan keuangan, dimana sebagian barang dalam satu kelompok BMN yang telah dilakukan penilaian kembali disajikan menggunakan nilai wajar sedangkan sebagian lagi yang belum dilakukan penilaian kembali disajikan menggunakan nilai historis, maka nilai wajar hasil penilaian kembali belum disajikan dalam Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL) dan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2017. Namun demikian, nilai wajar hasil penilaian kembali tersebut tetap disajikan dalam laporan BMN tingkat satker sampai dengan K/L serta laporan keuangan tingkat satker sampai dengan eselon I di tahun 2017. Selanjutnya, pemerintah melanjutkan dan menyelesaikan proses IP pada tahun 2018.
2. Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Penilaian Kembali BMN tahun 2017-2018 pada Kementerian Keuangan selaku Pengelola Barang, Kementerian/Lembaga selaku Pengguna Barang dan instansi terkait lainnya Nomor 119/LHP/XV/12/2018 tanggal 31 Desember 2018, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyampaikan tidak dapat menerima hasil penilaian kembali BMN tahun 2017-2018, karena terdapat beberapa permasalahan antara lain mekanisme pengendalian internal dan kontrol kualitas dalam pelaksanaan penilaian kembali BMN tidak akurat. Untuk tetap menjaga kualitas LKKL dan LKPP, Pemerintah memutuskan hasil penilaian kembali BMN tidak disajikan dalam LKKL dan LKPP



tahun 2018.

Hasil penilaian kembali BMN akan disajikan setelah dilakukan perbaikan dan hasilnya dapat diterima oleh BPK. Sebagaimana tahun 2017, nilai wajar hasil penilaian kembali tetap disajikan dalam laporan BMN tingkat satker sampai dengan K/L serta laporan keuangan tingkat satker sampai dengan eselon I di tahun 2018.

3. Sebagai tindak lanjut atas hasil pemeriksaan tersebut, maka koreksi atas hasil penilaian kembali yang sebelumnya telah dilakukan dalam LKKL dikeluarkan kembali dalam LKKL. Proses mengeluarkan nilai wajar hasil IP beserta dampaknya terhadap transaksi lanjutan dari LKKL dan LKPP tahun 2017 dan 2018, atau disebut dengan istilah *take out*, dilakukan melalui menu penjurnalan pada Aplikasi SAIBA menggunakan identitas Satker Konsolidasi masing-masing K/L. Hal ini mengakibatkan selisih saldo BMN dan akumulasi penyusutannya antara laporan keuangan dengan laporan BMN, yang harus dijelaskan secara memadai dalam Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK).
4. Selain jurnal *take out* pada LKKL dan LKPP tahun 2017 dan 2018, Pemerintah juga telah melakukan jurnal *take out* untuk mengeluarkan dampak IP terhadap transaksi-transaksi lanjutan pada LKKL dan LKPP periode Semester I Tahun 2019.
5. Sebagai tindak lanjut atas hasil pemeriksaan tersebut diatas, Pemerintah telah melakukan alur bisnis baik pelaksanaan inventarisasi oleh satuan kerja maupun teknis pelaksanaan penilaian oleh Tim Penilai sebagaimana ditetapkan dalam PMK Nomor 107/PMK.06/2019 tentang



Perubahan Kedua atas PMK Nomor 118/PMK.06/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kembali BMN.

6. Menanggapi perbaikan penilaian kembali BMN yang dilakukan pemerintah, melalui surat nomor 338/S/XV/10/2019 tanggal 24 Oktober 2019 hal Perkembangan Hasil Reviu dan Pengujian Terbatas atas Tindak Lanjut Rekomendasi BPK pada LHP Penilaian Kembali BMN Tahun 2017 dan 2018, Auditor Utama Keuangan Negara II menyatakan bahwa secara umum penyempurnaan atas desain pengendalian dan metodologi penilaian kembali BMN tahun 2017-2018 yang dilakukan oleh Pemerintah telah memadai, namun dalam implementasinya masih memerlukan perbaikan.

7. Menindaklanjuti hal tersebut, pemerintah terus melakukan upaya perbaikan sebagaimana temuan dan rekomendasi BPK. Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah disampaikan kepada BPK melalui surat Menteri Keuangan nomor S-937/MK.06/2019 tanggal 23 Desember 2019 hal Penyelesaian Tindak Lanjut Perbaikan Penilaian Kembali BMN Tahun 2017-2018.

Menanggapi surat Menteri Keuangan tersebut, Anggota BPK menyampaikan surat nomor 50/S/IV-XV/01/2020 tanggal 6 Januari 2020 hal Tanggapan atas Penyelesaian Tindak Lanjut Perbaikan Penilaian Kembali BMN Tahun 2017-2018, dimana BPK berpendapat bahwa Pemerintah dapat menyajikan seluruh hasil penilaian kembali BMN tahun 2017-2018 beserta perbaikannya dalam LKPP tahun 2019 *unaudited* sesuai mekanisme yang berlaku.

- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam



kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset lain-lain pada pos Aset Lainnya.

- Aset Tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada penetapan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN.
 - Daftar Transaksi BMN dalam Aplikasi SIMAK-BMN
- Saldo Awal (Kode Transaksi 100)
Menu ini digunakan untuk menginput Barang Milik Negara (BMN) yang diperoleh sebelum Tahun Anggaran Berjalan, yang belum dibukukan pada aplikasi Simak BMN baik diperoleh dengan pembelian, hibah, transfer masuk, reklas masuk atau perolehan lainnya yang sah. Pencatatan transaksi ini dibuktikan dengan dokumen sumber tahun anggaran yang lalu.
 - Pembelian (Kode Transaksi 101)
Menu ini digunakan untuk menginput BMN yang diperoleh dengan pembelian dari DIPA/APBN pada Tahun Anggaran Berjalan yang tanpa melalui proses Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP). Pencatatan berdasarkan Berita Acara Serah Terima (BAST) Barang dilengkapi dengan faktur/nota pembelian barang dengan SPM/SP2D.
 - Transfer Masuk (Kode Transaksi 102)
Menu ini digunakan untuk merekam data BMN dari hasil kiriman (transfer) satker lainnya dalam lingkup Pemerintah Pusat. Pencatatan transaksi ini dilakukan berdasarkan BAST satker pemberi dan satker penerima BMN, bila transfer dilakukan antar



Pengguna Barang (antar Kementerian Negara/Lembaga) maka dibutuhkan dokumen persetujuan alih status untuk melakukan transaksi ini.

- Hibah Masuk (Kode Transaksi 103)
Menu ini digunakan untuk mencatat perolehan aset yang bersumber dari hibah dan diterima dari pihak ketiga di luar Pemerintah Pusat, misalnya dari pemerintah daerah maupun dari swasta. Pencatatan aset tersebut sebagai BMN dilakukan berdasarkan BAST, tanpa menunggu adanya register dari DJPPR/Kanwil Ditjen Perbendaharaan dan pengesahan ke KPPN (MPHL-BJS).
- Rampasan (Kode Transaksi 104)
Menu ini digunakan untuk menginput transaksi perolehan BMN hasil rampasan berdasarkan putusan pengadilan.
- Penyelesaian Pembangunan Langsung (Kode Transaksi 113)
Merupakan transaksi perolehan BMN dari pengadaan pembangunan gedung/bangunan dan BMN lainnya.
- Pembatalan Penghapusan (Kode Transaksi 106)
Menu ini digunakan untuk memunculkan kembali aset tetap/aset lainnya yang sudah dihapuskan disebabkan antara lain berupa temuan oleh APIP dan BPK. Dalam menginput menu transaksi pembatalan penghapusan harus disertai dokumen sumber Berita Acara Pembatalan Penghapusan oleh Kuasa Pengguna Barang.
- Reklasifikasi Masuk (Kode Transaksi 107)
Menu ini digunakan :
 1. Untuk mencatat perubahan transaksi BMN atas jenis penggolongan dan kodifikasi BMN yang sebelumnya telah dicatat dengan penggolongan dan kodifikasi BMN yang lain (Kode Barang terdiri dari golongan, bidang, kelompok, sub kelompok dan sub-



sub kelompok);

2. Untuk mencatat perubahan transaksi BMN yang sebelumnya telah dicatat sebagai aset intrakompatabel menjadi aset ekstrakompabel atau sebaliknya.

- **Pertukaran (Kode Transaksi 111)**

Menu Pertukaran di SIMAK BMN digunakan untuk mencatat transaksi pertukaran dengan entitas lain. Menurut PMK 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara, bahwa suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atau pertukaran sebagian aset tetap yang tidak serupa atau aset lainnya. Biaya dari pos semacam itu diukur berdasarkan nilai wajar aset yang diperoleh, yaitu nilai ekuivalen atas nilai tercatat aset yang dilepas setelah disesuaikan dengan jumlah setiap kas atau setara kas dan kewajiban lain yang di transfer/diserahkan.

- **Perolehan Lainnya (Kode Transaksi 112)**

Menu ini digunakan untuk merekam BMN yang diperoleh pada tahun anggaran berjalan, yang berasal dari transaksi selain Pembelian, Transfer Masuk, Hibah (Masuk), Rampasan, Penyelesaian Pembangunan, Pembatalan Penghapusan, Reklasifikasi Masuk, Pertukaran, dan Perolehan dari Reklasifikasi BPYBDS. Menu ini juga digunakan di beberapa kementerian yang melakukan pengadaan aset dari dana yang bersumber diluar mekanisme APBN seperti dana samsat pada POLRI.

- **Pengurangan (Kode Transaksi 201)**

Menu ini digunakan untuk menginput transaksi pengurangan kuantitas volume Barang Milik Negara ketika ada koreksi terhadap nilai fisik Barang Milik Negara, bukan secara nilai asetnya.

- **Perubahan Kondisi (Kode Transaksi 203)**

Digunakan untuk melakukan pencatatan perubahan kondisi BMN. Perubahan kondisi BMN dilakukan agar terdapat kesesuaian



antara pencatatan pada aplikasi SIMAK BMN dengan kondisi fisik BMN yang sebenarnya.

- Koreksi Perubahan Nilai/Kuantitas (Kode Transaksi 204)

Menu ini digunakan untuk mencatat perubahan-perubahan pada BMN, baik berupa nilai ataupun kuantitas, yang disebabkan oleh kesalahan dalam penginputan dan/atau penyesuaian. Perubahan dapat dicatat pada saat dasar perubahan/koreksi telah ditetapkan.

- Penerimaan Aset dari Pengembangan Aset Renovasi (Kode Transaksi 206)

Menu ini digunakan untuk mencatat penambahan nilai aset yang berasal dari penerimaan aset tetap renovasi.

Aset tetap renovasi adalah renovasi yang dilakukan oleh penyewa/peminjam (bukan pemilik) terhadap aset yang disewa/dipinjam. Pada saat masa sewa BMN tersebut berakhir dan diserahkan, tambahan nilai tersebut harus dicatat sebagai penambahan nilai aset.

- Pengembangan Langsung (Kode Transaksi 202)

Menu ini digunakan untuk merekam pengembangan atas suatu BMN yang sudah dimiliki (sudah tercatat) sampai dengan tahun anggaran berjalan. Pengembangan BMN yang dimaksud adalah pengembangan yang memenuhi syarat/ketentuan untuk dapat dikapitalisasi dan langsung selesai (tanpa melalui tahapan KDP/termin pembayaran).

- Pengembangan Dengan KDP (Kode Transaksi 208)

Menu ini digunakan untuk mereklasifikasi KDP pengembangan Aset yang sudah dimiliki menjadi aset definitifnya.

- Penghapusan (Kode Transaksi 301)

Menu ini digunakan untuk merekam penghapusan BMN dari pembukuan



berdasarkan suatu surat keputusan penghapusan oleh instansi yang berwenang.

- Transfer Keluar (Kode Transaksi 302)

Menu ini digunakan untuk mencatat penyerahan Aset Tetap/Aset Tetap Lainnya ke Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang (UAKPB) lain dimana UAKPB tersebut masih dalam satu entitas pelaporan akuntansi Pemerintah Pusat. Bukti penyerahan berupa Berita Acara Serah Terima atau dokumen yang dapat dipersamakan.

- Hibah Keluar (Kode Transaksi 303)

Menu ini disediakan untuk menginput Barang Milik Negara yang berkurang di tahun berjalan karena dihibahkan ke pihak lain di luar Instansi Pemerintah Pusat. Jenis Satuan Kerja yang memakai menu ini adalah Kantor Pusat (KP) dan Kantor Daerah (KD).

- Reklasifikasi Keluar (Kode Transaksi 304)

Menu ini digunakan untuk merekam penghapusan BMN yang disebabkan oleh kesalahan klasifikasi BMN pada perekaman sebelumnya.

- Koreksi Pencatatan (Kode Transaksi 305)

Menu ini digunakan untuk merekam penghapusan BMN yang disebabkan oleh kesalahan pencatatan kuantitas BMN pada perekaman sebelumnya.

- Penghentian BMN dari Penggunaan (Kode Transaksi 401)

Menu ini digunakan mencatat transaksi penghentian BMN sebelum dilakukan proses/langkah penghapusan BMN karena BMN tersebut tidak dipergunakan lagi dalam operasi normal satker yang bersangkutan.

- Penggunaan Kembali BMN Yang Dihentikan (Kode Transaksi 402)

Menu ini digunakan untuk mencatat BMN yang dipergunakan kembali setelah sebelumnya dilakukan penghentian BMN dari penggunaan dikarenakan perubahan kondisi. BMN tersebut dapat dipergunakan



kembali setelah mendapat perbaikan, baik dengan atau tanpa biaya tambahan.

- Usulan Barang Hilang ke Pengelola (Kode Transaksi 308)

Pengusulan barang hilang ke pengelola digunakan untuk merekam BMN yang statusnya hilang guna diusulkan penghapusannya ke Pengelola Barang. Pada saat dilakukan input pada menu ini, BMN yang hilang (yang semula masih tercatat pada Buku Barang dan Laporan Posisi BMN di Neraca) menjadi tidak ada lagi pada Buku Barang dan Neraca. BMN hilang tersebut selanjutnya tercantum dalam Daftar Barang Hilang.

- Usulan Barang RB (Rusak Berat) ke Pengelola (Kode Transaksi 306)

Usulan Barang RB ke Pengelola digunakan pada saat pengguna barang sudah mengajukan surat permohonan persetujuan pemindahtanganan/pemusnahan atas BMN rusak berat ke Pengelola Barang.

Setelah dilakukan input pada menu ini, BMN rusak berat (yang semula masih tercatat pada Buku Barang dan Laporan Posisi BMN di Neraca) menjadi tidak ada lagi pada Buku Barang dan Neraca. BMN RB tersebut selanjutnya tercantum dalam Daftar Barang Rusak Berat.

- Penghapusan Daftar Barang RB (Rusak Berat) (Kode Transaksi 822)

Menu ini digunakan untuk menginput transaksi pada saat sudah diterbitkan Surat Keputusan Penghapusan oleh Pengguna Barang setelah fisik BMN rusak berat telah selesai dipindahtangankan atau dimusnahkan.

Setelah terbit Surat Keputusan Penghapusan Barang, maka dilakukan penginputan penghapusan barang yang sudah diusulkan dihapuskan.

- BMN Bersejarah
Barang Bersejarah (heritage assets)



dibukukan dan dilaporkan dalam kuantitasnya dan tanpa nilai karena nilai kultural, lingkungan, pendidikan, dan sejarahnya tidak mungkin secara penuh dilambangkan dengan nilai keuangan berdasarkan harga pasar maupun harga perolehannya.

Biaya untuk perolehan, konstruksi, peningkatan, rekonstruksi harus dibebankan sebagai belanja tahun terjadinya pengeluaran tersebut, tidak dikapitalisasi menjadi nilai barang atau penambah nilai barang. Biaya tersebut termasuk seluruh biaya yang berlangsung untuk menjadikan aset bersejarah tersebut dalam kondisi dan lokasi yang ada pada periode berjalan.

BMN yang memenuhi kriteria aset bersejarah (heritage assets) dibukukan dalam Buku Barang Bersejarah. Barang Bersejarah tidak dicatat dalam Laporan Neraca namun dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

- Saldo Awal Barang Bersejarah (Kode Transaksi 601)

Menu saldo awal untuk Barang Bersejarah digunakan untuk mencatat Barang Bersejarah yang telah memperoleh penetapan hukum sebagai barang bersejarah disebabkan kepentingan pelestarian budaya, lingkungan atau bersejarah sebelum tahun berjalan namun belum dilakukan pencatatan pada tahun tersebut sehingga baru dicatat pada tahun berjalan.

- Perolehan BMN Bersejarah (Kode Transaksi 602)

Menu perolehan BMN Bersejarah digunakan untuk mencatat Barang Bersejarah yang telah memperoleh penetapan hukum sebagai barang bersejarah disebabkan kepentingan pelestarian budaya, lingkungan atau bersejarah pada tahun berjalan.

Aset bersejarah harus disajikan dalam bentuk unit, misalnya jumlah unit koleksi yang



dimiliki atau jumlah unit monumen, dalam Catatan atas Laporan Keuangan dengan tanpa nilai.

- Penghapusan BMN Bersejarah (Kode Transaksi 604)

Menu ini disediakan untuk menginput Barang Milik Negara Bersejarah yang berkurang di tahun berjalan karena hancur tak berbentuk lagi atau hilang. Satker mencatat di menu ini apabila izin penghapusan telah disetujui oleh Pengelola Barang (DJKN/KPKNL).

- Perolehan BMN Pihak Ketiga (Kode Transaksi 701)

Menu ini digunakan untuk mencatat aset tetap/aset lainnya berupa Barang Pihak Ketiga yang dititipkan kepada instansi atau barang pihak ketiga yang digunakan sehari-hari. Barang tersebut tidak muncul di neraca hanya muncul di daftar barang ruangan dan daftar barang pihak ketiga.

- Penghapusan BMN Pihak Ketiga (Kode Transaksi 702)

Menu Penghapusan BMN Pihak Ketiga digunakan untuk menghapus barang Pihak ketiga dari Daftar Barang Pihak Ketiga dikarenakan barang tersebut tidak ada lagi, misalnya karena dikembalikan ke pemiliknya, rusak berat atau hilang.

- Saldo Awal KDP (Kode Transaksi 501)

Digunakan untuk merekam KDP yang diperoleh sebelum tahun anggaran berjalan. KDP tidak disusutkan.

- Perolehan KDP (Kode Transaksi 502)

Menu ini digunakan untuk mencatat perolehan transaksi:

1. KDP yang mencakup tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan periode waktu tertentu dan belum selesai



2. Perekaman SPM/SP2D pertama kali untuk pembayaran pertama dalam rangka memperoleh aset tetap yang pembayarannya dilakukan per termin dan SPM/SP2D tersebut di tahun anggaran berjalan.
 - Pengembangan KDP (Kode Transaksi 503)
Menu ini disediakan untuk menginput penambahan KDP setelah perolehan awal sampai dengan penambahan KDP terakhir dan siap dioperasikan untuk menjadi aset tetap yang definitif.
 - Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP (Kode Transaksi 105)
Menu ini digunakan untuk merekam BMN yang diperoleh pada tahun anggaran berjalan, berasal dari aset yang telah selesai proses pembangunan melalui mekanisme KDP (telah selesai 100% pekerjaan fisiknya), dan biasanya pencairan dananya melalui beberapa termin pembayaran.
 - Transfer Masuk KDP (Kode Transaksi 506)
Menu ini digunakan untuk merekam transaksi perolehan KDP bersumber dari Satker lain pada Pemerintah Pusat. Transaksi ini hanya satu kali saja pencatatannya ketika menerima transfer masuk KDP, selanjutnya akan dicatat pada menu pengembangan KDP sampai proses KDP selesai (jika proses KDP tersebut akan dilanjutkan oleh unit penerima transfer KDP).
 - Hibah Masuk KDP (Kode Transaksi 508)
Menu ini digunakan untuk menginput KDP yang diperoleh dari pihak ketiga di luar Kementerian Negara/Lembaga Pemerintah Pusat.
 - Koreksi Perubahan Nilai KDP (Kode Transaksi 504)
Menu ini digunakan untuk menginput koreksi perubahan Nilai KDP yang sudah terinput sebelumnya.
 - Transfer Keluar KDP (Kode Transaksi 507)
Menu ini digunakan untuk menginput KDP



yang diserahkan ke Satker lain atau Kementerian Lain dalam lingkup Pemerintah Pusat. Transfer Keluar diinput ke dalam Aplikasi SIMAK BMN apabila Berita Acara Serah Terima dari kedua belah pihak telah ditandatangani. Penginputan di Aplikasi SIMAK BMN pada menu Transaksi KDP, Transfer Keluar KDP.

- Hibah Keluar KDP (Kode Transaksi 509)
Menu Hibah Keluar KDP Digunakan untuk merekam Hibah Keluar KDP yang diberikan kepada entitas di luar Pemerintah Pusat pada tahun berjalan.
- Penghapusan/Penghentian KDP (Kode Transaksi 505)
Menu ini digunakan untuk mencatat aset-aset KDP yang telah disetujui untuk dilakukan penghapusan/penghentian pembangunannya. Dokumen sumber yang digunakan adalah surat keputusan penghapusan/penghentian atas KDP.
- Barang Berlebih (Kode Transaksi 120)
Sub-submenu Barang Berlebih digunakan untuk mencatat barang yang secara hak merupakan aset suatu satker namun karena satu dan lain hal belum pernah dicatat dan dilaporkan pada Aplikasi SIMAK-BMN. Secara substansi, transaksi Barang Berlebih identik dengan transaksi Saldo Awal pada menu transaksi umum dalam Aplikasi SIMAK-BMN.
- Reklas Masuk Inventarisasi (Kode Transaksi 121)
Sub-submenu Reklasifikasi Masuk Hasil Inventarisasi digunakan untuk mencatat transaksi reklasifikasi masuk barang sehubungan dengan dilakukannya inventarisasi barang. Barang-barang yang direkam melalui ini adalah barang-barang yang merupakan objek Inventarisasi dan Penilaian Kembali BMN yaitu tanah, jalan dan jembatan, gedung dan bangunan, dan bangunan air yang diperoleh sampai dengan



31 Desember 2015.

- Reklas Keluar Inventarisasi (Kode Transaksi 321)

Sub-submenu Reklasifikasi Keluar Inventarisasi digunakan untuk mencatat reklasifikasi keluar barang sehubungan dengan pelaksanaan inventarisasi. Dalam hal ini barang-barang yang dapat direkam melalui sub-submenu reklasifikasi keluar inventarisasi merupakan barang yang merupakan objek Inventarisasi dan Penilaian Kembali BMN tahun 2017 dan 2018, yaitu barang berupa Tanah, Gedung dan Bangunan, Jalan dan Jembatan, dan Bangunan Air yang perolehannya sampai dengan 31 Desember 2015.

- Tidak Ditemukan (Kode Transaksi 221)

Sub-submenu Barang Tidak Ditemukan digunakan untuk merekam barang yang selama ini tercatat dalam Aplikasi SIMAK-BMN, namun dalam pelaksanaan Inventarisasi, barang tersebut secara fisik tidak ditemukan keberadaannya. Perekaman transaksi barang tidak ditemukan tidak serta merta menghapus BMN dari pencatatan karena bertujuan untuk mengidentifikasi BMN yang tidak ditemukan fisiknya. Dengan demikian atas pencatatan barang tidak ditemukan tidak akan terbentuk jurnal, tidak akan terdapat perubahan kuantitas barang, dan tidak terdapat perubahan nilai barang.

- Koreksi Kuantitas Hasil Inventarisasi (Kode Transaksi 222)

Menu ini digunakan untuk pencatatan perubahan kuantitas barang-barang sebagai hasil pelaksanaan inventarisasi dan penilaian kembali. Barang-barang yang dapat direkam pada menu ini adalah barang-barang yang merupakan objek Inventarisasi dan Penilaian Kembali yang secara karakteristik dapat berubah kuantitasnya karena satu dan lain hal. Dengan demikian barang yang dapat direkam dalam menu ini adalah barang



berupa Tanah (kode 2.xx.xx.xx.xxx), Jalan (kode 5.01.01.xx.xxx), dan jembatan (kode 5.01.02.xx.xxx) yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 2015.

- Koreksi Nilai Tim Penertiban Aset (Kode Transaksi 205)

Pencatatan hasil penilaian kembali BMN (revaluasi) dilakukan melalui submenu Koreksi Penilaian Kembali (kode transaksi 205). Nilai baru yang diinput dalam transaksi Koreksi Penilaian Kembali adalah nilai wajar hasil revaluasi yang tertuang dalam dokumen LHIP. Barang yang menjadi objek Penilaian Kembali BMN pada tahun 2017 dan 2018 adalah Tanah, Jalan dan Jembatan, Gedung dan Bangunan, dan Bangunan Air yang perolehannya sampai dengan 31 Desember 2015. Penggunaan submenu Penilaian Kembali BMN (Kode Transaksi 205) tidak terbatas pada barang-barang yang menjadi objek Inventarisasi dan Penilaian Kembali BMN namun juga dimungkinkan untuk perekaman hasil penilaian kembali BMN selain objek penilaian kembali tahun 2017 dan 2018, sepanjang Penilaian Kembali BMN tersebut dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.

Penyusutan Aset Tetap

c. Penyusutan Aset Tetap

Penerapan penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada seluruh entitas Pemerintah Pusat dilaksanakan mulai tahun 2013, sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 53/KMK.06/2012 tentang Penerapan Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap. Kebijakan penyusutan Aset Tetap didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.06/2017 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap



- pada Entitas Pemerintah Pusat.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah;
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP); dan
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan. Nilai yang disusutkan pertama kali adalah nilai yang tercatat dalam pembukuan per 31 Desember 2012 untuk aset tetap yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 2012. Sedangkan untuk Aset Tetap yang diperoleh setelah 31 Desember 2012, nilai yang disusutkan adalah berdasarkan nilai perolehan.
 - Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
 - Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.

Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Tabel 3
Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun



Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

Piutang Jangka Panjang

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Termasuk dalam Piutang Jangka Panjang adalah Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) yang jauh tempo lebih dari satu tahun.
- TPA menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah secara angsuran kepada pegawai pemerintah yang dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayar oleh pegawai ke kas negara atau daftar saldo tagihan penjualan angsuran.
- TP ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan kepada bendahara yang karena lalai atau perbuatan melawan hukum mengakibatkan kerugian negara/daerah.
- TGR merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri atau bukan pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atau suatu kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat langsung maupun tidak langsung dari suatu perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugasnya.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.



Aset Lainnya

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerja sama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. ATB disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa Manfaat ATB ditentukan dengan berpedoman pada Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Tabel 4
Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (Tahun)
Software Komputer	4
Franchise	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa,	20



Perlindungan Varietas Tanaman Semusim.	
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram.	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.I	70

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah yang dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah yang disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

Kewajiban

6. Kewajiban

- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima Dimuka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Ekuitas

7. Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan pada Laporan Perubahan Ekuitas.

Kurs Pelaporan

8. Kurs Pelaporan



**Implementasi
Akuntansi Pemerintah
Berbasis Akrua
Pertama Kali**

Penyajian terhadap transaksi mata uang asing di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM disajikan dalam laporan keuangan dengan menggunakan kurs tengah BI/ kurs penutup penutup 31 Desember 2021 atau sesuai dengan Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-21/PB/PB.6/2021 tanggal 20 Juli 2021 Hal: Kebijakan Akuntansi atas Penggunaan Kurs Penutup.

9. Implementasi Akuntansi Berbasis Akrua Pertama Kali

Mulai 31 Desember 2015 Pemerintah mengimplementasikan akuntansi berbasis akrual sesuai dengan amanat PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Implementasi tersebut memberikan pengaruh pada beberapa hal dalam penyajian laporan keuangan. Pertama, Pos-pos ekuitas dana pada neraca 2014 yang berbasis *cash toward accrual* direklasifikasi menjadi ekuitas sesuai dengan akuntansi berbasis akrual. Kedua, keterbandingan penyajian akun-akun tahun berjalan dengan tahun sebelumnya dalam Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas tidak dapat dipenuhi. Hal ini diakibatkan oleh penyusunan dan penyajian akuntansi berbasis akrual pada 31 Desember 2015 adalah merupakan implementasi yang pertama.

Output Strategis

A.7. OUTPUT STRATEGIS

Selama periode Tahun Anggaran 2021, output strategis yang ditargetkan pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia adalah sebagai berikut:

Tabel 5

Rincian Output Strategis Kementerian Hukum dan HAM TA 2021

Unit Kerja		Kd PN	Kegiatan PN		Kd Prog	Kd Keg	Kd KRO	Kd RO	Pagu Anggaran	Target Output	
DITJEN PAS	Direktorat Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak	03	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas	Kebijakan Pengembangan Sistem Pembelajaran	BF	1577	PBD	001	1.000.000.000,00	1	Rekomendasi Kebijakan



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Catatan Atas Laporan Keuangan – *Penjelasan Umum*
Per 31 Desember Tahun Anggaran 2021 (*Audited*)
(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

			as dan Berdaya Saing	Berkelanjutan Bagi Anak (Prioritas Nasional)							
BPSDM	Pusat Pengembangan Teknis dan Kepemimpinan	03	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Layanan Pengembangan Kompetensi di Bidang SPPA bagi Aparatur Penegak Hukum dan Instansi Teknis Lainnya	WA	1623	TAM	001	763.975.000,00	270	orang
DITJEN KI	Direktorat Kerja Sama dan Pemberdayaan Kekayaan Intelektual	04	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Pengembangan Pusat Data Nasional Kekayaan Intelektual Komunal	BF	1592	QMA	001	1.000.000.000,00	156	Layanan
DITJEN PP	Direktorat Perancangan Peraturan Perundang-Undangan	07	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	RUU KUHP/K UHP	BB	1601	PAA	001	943.000.000,00	1	UU
DITJEN PP	Direktorat Perancangan Peraturan Perundang-Undangan	07	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	RUU KUH Acara Perdata	BB	1601	PAA	002	500.000.000,00	1	UU
DITJEN PP	Direktorat Perancangan Peraturan Perundang-Undangan	07	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	RUU Kepailitan	BB	1601	PAA	003	200.000.000,00	1	UU
DITJEN PP	Direktorat Perancangan Peraturan	07	Memperkuat Stabilitas	RUU Jaminan Benda Bergerak	BB	1601	PAA	004	100.000.000,00	1	UU



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Catatan Atas Laporan Keuangan – *Penjelasan Umum*
Per 31 Desember Tahun Anggaran 2021 (*Audited*)
(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Perundang-Undangan		Polhukh ankam dan Transfor masi Pelayan an Publik								
DITJEN AHU	Direktorat Perdata	07	Memper kuat Stabilita s Polhukh ankam dan Transfor masi Pelayan an Publik	Kebijakan pengemb angr integrasi sistem TI pendaftar an Badan Usaha, Jaminan Benda Bergerak, dan Informasi Kepailitan	BF	1573	PBD	001	1.000.000.000,00	1	Reko mend asi Kebija kan
DITJEN PAS	Direktorat Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak	07	Memper kuat Stabilita s Polhukh ankam dan Transfor masi Pelayan an Publik	Koordina si Pemberd ayaan Masyarak at Untuk Pelaksan aan Keadilan Restoratif (Prioritas Nasional)	BF	1577	PEA	001	1.800.000.000,00	1	Kegia tan
DITJEN PAS	Direktorat Teknologi Informasi dan Kerjasama	07	Memper kuat Stabilita s Polhukh ankam dan Transfor masi Pelayan an Publik	Peningkat an Fungsi SDP untuk Implemen tasi SPPT TI	BF	1578	PEA	001	800.000.000,00	1	Kegia tan
DITJEN IMIGRA SI	Direktorat Lalu Lintas Keimigrasian	07	Memper kuat Stabilita s Polhukh ankam dan Transfor masi Pelayan an Publik	Kebijakan Pengemb angr sistem manajem en pelaksan aan integrasi lintas batas (integrate d border control managem ent)	BF	1584	PBD	001	781.476.000,00	1	Reko mend asi Kebija kan
BPHN	Pusat Penyuluhan dan Bantuan Hukum	07	Memper kuat Stabilita s Polhukh	Kegiatan Bantuan Hukum Litigasi	BF	4841	QBA	001	41.592.000.000,00	5699	orang



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Catatan Atas Laporan Keuangan – *Penjelasan Umum*
Per 31 Desember Tahun Anggaran 2021 (*Audited*)
(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

			ankam dan Transfor masi Pelayan an Publik								
BPHN	Pusat Penyuluhan dan Bantuan Hukum	07	Memper kuat Stabilita s Polhukh ankam dan Transfor masi Pelayan an Publik	Kegiatan Verifikasi dan Akreditasi OBH di Wilayah	BF	4841	PDE	001	2.500.000.000,00	524	Lemb aga
BPHN	Pusat Penyuluhan dan Bantuan Hukum	07	Memper kuat Stabilita s Polhukh ankam dan Transfor masi Pelayan an Publik	Kegiatan Bantuan Hukum Non Litigasi	BF	4841	QBC	001	7.003.353.000,00	758	Kelo mpok Masy arakat
DITJEN HAM	Direktorat Kerjasama HAM	07	Memper kuat Stabilita s Polhukh ankam dan Transfor masi Pelayan an Publik	Pelaksan aan Aksi HAM dalam RANHAM	BG	1606	PBD	003	1.000.000.000,00	1250	Reko mena si Kebija kan
INSPEK TORAT JENDER AL	Inspektorat Wilayah I	07	Memper kuat Stabilita s Polhukh ankam dan Transfor masi Pelayan an Publik	Pembang unan Zona Intergitas WBK/WB BM di Lingkung an Inspektor at Wilayah I	WA	1563	TAK	001	1.042.760.000,00	1	Lapor an
INSPEK TORAT JENDER AL	Inspektorat Wilayah II	07	Memper kuat Stabilita s Polhukh ankam dan Transfor masi Pelayan an Publik	Pembang unan Zona Intergitas WBK/WB BM di Lingkung an Inspektor at Wilayah II	WA	1564	TAK	001	1.042.760.000,00	1	Lapor an



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Catatan Atas Laporan Keuangan – *Penjelasan Umum*
Per 31 Desember Tahun Anggaran 2021 (*Audited*)
(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

INSPEKTORAT JENDERAL	Inspektorat Wilayah III	07	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pembangunan Zona Intergitas WBK/WB BM di Lingkungan Inspektorat Wilayah III	WA	1565	TAK	001	1.042.760.000,00	1	Laporan
INSPEKTORAT JENDERAL	Inspektorat Wilayah IV	07	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pembangunan Zona Intergitas WBK/WB BM di Lingkungan Inspektorat Wilayah IV	WA	1566	TAK	001	1.042.760.000,00	1	Laporan
INSPEKTORAT JENDERAL	Inspektorat Wilayah V	07	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pembangunan Zona Intergitas WBK/WB BM di Lingkungan Inspektorat Wilayah V	WA	1567	TAK	001	1.042.760.000,00	1	Laporan
INSPEKTORAT JENDERAL	Inspektorat Wilayah VI	07	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pembangunan Zona Intergitas WBK/WB BM di Lingkungan Inspektorat Wilayah VI	WA	1568	TAK	001	3.750.600.000,00	1	Laporan
BPSDM	Pusat Pengembangan Fungsional dan HAM	07	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Layanan Pengembangan Kompetensi di Bidang Pembimbing Kemasyarakatan	WA	1621	TAM	001	1.388.740.000,00	320	orang
JUMLAH									71.336.944.000,00		



***Refocussing
Kegiatan/ Realokasi
Anggaran***

**A.8. REFOCUSSING KEGIATAN/ REALOKASI
ANGGARAN**

Dalam rangka mendukung pelaksanaan program pemerintah untuk pengadaan vaksin dan program vaksinasi nasional, penanganan pandemi Covid-19, dukungan anggaran perlindungan sosial kepada masyarakat serta percepatan pemulihan ekonomi nasional, maka Kementerian Hukum dan HAM ikut serta melakukan *refocusing* dan realokasi anggaran sebanyak 4 (empat) kali dengan rincian sebagai berikut, yaitu:

1. *Refocusing* I sebesar Rp346.737.778.000,00.
Surat Menteri Keuangan Nomor S-30/MK.02/2021 tanggal 12 Januari 2021 hal *Refocusing* dan Realokasi Belanja Kementerian/Lembaga TA 2021 yang selanjutnya diturunkan dengan Surat Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM Nomor SEK.PR.01.04-06 tanggal 15 Januari 2021 hal *Refocusing* dan Realokasi Belanja Kementerian Hukum dan HAM TA 2021. *Refocusing* dan realokasi belanja dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Sumber penghematan belanja berasal dari Rupiah Murni (RM);
 - b. Jenis belanja yang dapat dilakukan penghematan adalah belanja barang dan belanja modal;
 - c. Belanja barang dan belanja modal yang dilakukan penghematan adalah belanja non operasional;
 - d. Penghematan belanja difokuskan pada belanja honorarium, perjalanan dinas, paket meeting, belanja jasa, pembangunan gedung kantor, pengadaan kendaraan dan peralatan/mesin, sisa dana lelang, serta anggaran dari kegiatan yang belum dikontrakan atau tidak memungkinkan untuk dilaksanakan;
 - e. Penghematan belanja tidak dapat dilakukan untuk kegiatan arahan Presiden, kegiatan Prioritas Nasional, dan kegiatan *carry over* 2020;
 - f. Pelaksanaan *refocusing* dan realokasi anggaran berpedoman pada ketentuan yang berlaku dengan prosedur yang sederhana, akuntabel, dan terhindar dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).
2. *Refocusing* II sebesar Rp450.542.244.000,00.
Surat Menteri Keuangan Nomor S-408/MK.02/2021 tanggal 18 Mei 2021 hal Penghematan Belanja Kementerian/Lembaga TA 2021, Sehubungan dengan



Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) serta Peraturan Pemerintah (PP) No. 63 Tahun 2021 tentang THR dan Gaji ke-13 kepada ASN, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2021, bersama ini disampaikan hal-hal Refocusing II sebagai berikut:

- a. Dalam rangka mengamankan pelaksanaan pengadaan vaksin dan program vaksinasi nasional, penanganan pandemi COVID-19, dukungan anggaran perlindungan sosial kepada masyarakat serta percepatan pemulihan ekonomi nasional diperlukan langkah strategis berupa penghematan belanja KIL TA 2021.
- b. Untuk memenuhi kebutuhan belanja Program Pemulihan Ekonomi Nasional tersebut perlu dilakukan kembali refocusing anggaran belanja K/L TA 2021 dalam rangka menjaga defisit APBN TA 2021 sesuai dengan proyeksi agar tercipta APBN yang prudent dan sustainable.
- c. Berkenaan dengan hal tersebut, Kementerian/Lembaga diminta untuk melakukan penghematan belanja KIL TA 2021 dari alokasi tunjangan kinerja (tukin) THR dan Gaji ke 13 sebagai tindak lanjut dari PP No. 63 Tahun 2021 dengan besaran sebagaimana tercantum dalam lampiran surat.
- d. Sumber penghematan belanja berasal dari Rupiah Murni dan Non Rupiah Murni (BLU) sepanjang alokasinya diperuntukan bagi pembayaran komponen tunjangan kinerja THR dan Gaji ke-13.
- e. Selanjutnya, Kementerian/Lembaga diminta untuk segera menyampaikan usul revisi anggaran dalam rangka penghematan belanja TA 2021 kepada Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Anggaran (DJA), sesuai ketentuan dalam PMK Nomor : 208/PMK.02/2020 tentang Tata Cara Revisi Anggaran TA 2021, paling lambat tanggal 28
- f. Sampai dengan tanggal 28 Mei 2021, usul revisi anggaran tidak disampaikan, maka akan dilakukan pemblokiran anggaran oleh Kementerian Keuangan
- g. Seluruh proses revisi anggaran dalam rangka penghematan belanja Kementerian/ Lembaga TA 2021 dilaksanakan secara transparan, akuntabel dan bertanggung jawab. serta terhindar dari Korupsi.



Kolusi, dan Nepotisme (KN) sesuai ketentuan yang berlaku.

3. *Refocusing* III sebesar Rp158.986.227.000,00

Surat Menteri Keuangan Nomor S-584/MK.02/2021 tanggal 06 Juli 2021 hal *Refocusing* dan Realokasi Belanja Kementerian/Lembaga TA 2021 yang selanjutnya diturunkan dengan Surat Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM Nomor SEK.PR.01.04-50 tanggal 10 Juli 2021 hal *Refocusing* dan Realokasi Belanja Kementerian Hukum dan HAM TA 2021. Merujuk Surat Menteri Keuangan yang menetapkan Kementerian Hukum dan HAM harus melakukan *refocusing* belanja untuk berkontribusi mendanai penanganan Covid-19 dan dampak yang ditimbulkan serta dukungan anggaran perlindungan sosial kepada masyarakat:

Sehubungan dengan rujukan tersebut diatas, dengan ini ditetapkan besaran *refocusing* III dan realokasi belanja per unit eselon I di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM TA 2021 dengan penjelasan sebagai berikut:

- a. Sumber dana *refocusing* belanja berasal dari Rupiah Murni (RM);
- b. Jenis belanja yang dapat dilakukan *refocusing* adalah Belanja Barang dan Belanja Modal pada kegiatan Belanja Non Operasional;
- c. *Refocusing* belanja dilakukan pada sisa anggaran yang belum terserap, di luar belanja pegawai, belanja operasional perkantoran, penanganan pandemi Covid-19 serta penanganan bencana;
- d. *Refocusing* belanja difokuskan pada belanja bahan, belanja honorarium, perjalanan dinas, paket meeting, belanja jasa, pembangunan gedung kantor, pengadaan kendaraan dan peralatan/mesin, sisa dana lelang, anggaran dari kegiatan yang belum dikontrakan atau tidak memungkinkan untuk dilaksanakan serta kegiatan yang tidak mendesak/dapat ditunda/dibatalkan dengan tetap memperhatikan capaian keluaran;
- e. Penghematan tidak dilakukan untuk bahan makanan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP).

4. *Refocusing* IV sebesar Rp238.700.000,00.



Surat Menteri Keuangan Nomor S-629/MK.02/2021 tanggal 20 Juli 2021 hal *Refocusing* dan Realokasi Belanja Kementerian/Lembaga TA 2021 Tahap IV dan selanjutnya surat Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM Nomor SEK.PR.01.04-60 tanggal 23 Juli 2021 hal *Refocusing* dan Realokasi Belanja Tahap IV, untuk berkontribusi mendanai penanganan Kesehatan dan perlindungan sosial kepada masyarakat sebagai dampak pelaksanaan PPKM Darurat dengan penjelasan sebagai berikut:

- a. Sumber dana refocusing belanja berasal dari Rupiah Murni (RM);
- b. Jenis Belanja yang dapat dilakukan *refocusing* adalah Belanja Pegawai, Belanja Barang, dan Belanja Modal yang berasal dari Belanja Operasional dan Belanja Non Operasional;
- c. Kriteria *Refocusing* Kementerian Hukum dan HAM;
 - Sisa anggaran belanja Kementerian Hukum dan HAM per 21 Juli 2021 yang belum terserap di luar Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), tetapi dapat meliputi alokasi Program Prioritas Nasional dan Anggaran *Multiyears Contract* (MYC) yang dapat direkomposisi/diluncurkan ke tahun anggaran berikutnya;
 - Sisa anggaran belanja Kementerian Hukum dan HAM per 21 Juli 2021 untuk kegiatan single year TA 2021 yang belum dapat dilaksanakan/belum selesai, dapat direlaksasi menjadi *Multiyear Contract* (MYC);
 - Sisa anggaran yang berasal dari belanja honorarium, perjalanan dinas, paket meeting, belanja jasa, pembangunan gedung kantor, pengadaan kendaraan dan peralatan/mesin, sisa dana lelang dan/atau swakelola, anggaran dari kegiatan yang belum dikontrakan dan tidak memungkinkan untuk dilaksanakan, kegiatan yang tidak mendesak/dapat ditunda/dibatalkan dan kegiatan yang telah dikontrakan tetapi pelaksanaannya harus ditunda ke tahun anggaran berikutnya, serta proyeksi sisa belanja pegawai dan belanja operasional pada akhir tahun yang tidak akan terserap.



- d. Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) Permen PPN No.1/2021, dalam hal terdapat usulan perubahan rencana kerja Kementerian Hukum dan HAM akibat dilakukannya *refocusing* pada kegiatan Prioritas Nasional, perlu dibahas dalam Pertemuan Tiga Pihak antara Kementerian Hukum dan HAM, Bappenas dan Kementerian Keuangan dengan melampirkan usulan perubahan tersebut kedalam matrik pada Lampiran II; Penghematan belanja difokuskan pada belanja honorarium, perjalanan dinas, paket meeting, belanja jasa, pembangunan gedung kantor, pengadaan kendaraan dan peralatan/mesin, sisa dana lelang, serta anggaran dari kegiatan yang belum dikontrakan atau tidak memungkinkan untuk dilaksanakan.



B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama periode berjalan, Kementerian Hukum dan HAM telah melaksanakan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. Hal ini disebabkan oleh adanya program penghematan belanja pemerintah dan adanya *refocusing* anggaran dalam rangka penanganan pandemi Covid-19 serta perubahan dalam rangka pelaksanaan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan situasi pada saat pelaksanaannya. Selanjutnya, sebagai upaya percepatan optimalisasi pencapaian target PNPB TA 2021 dan adanya perubahan kebijakan PNPB TA 2021 terkait dampak Covid-19, maka dilakukan penyesuaian target pendapatan pada Kementerian Hukum dan HAM. Perubahan tersebut berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja adalah sebagai berikut:

Tabel 6
Revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) TA. 2021

Uraian	2021	
	Anggaran Awal	Anggaran Revisi
Pendapatan		
Pendapatan PNPB	4.484.092.174.024,00	4.479.369.443.186,00
Jumlah Pendapatan	4.484.092.174.024,00	4.479.369.443.186,00
Belanja		
Belanja Pegawai	7.180.996.101.000,00	6.784.443.070.000,00
Belanja Barang	8.321.911.096.000,00	6.093.918.414.000,00
Belanja Modal	1.454.721.156.000,00	1.996.050.999.000,00
Jumlah Belanja	16.957.628.353.000,00	14.874.412.483.000,00

Pagu belanja awal Kementerian Hukum dan HAM TA 2021 ditetapkan berdasarkan Surat Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM Nomor SEK.PR.01.04-107 tanggal 05 Oktober 2020 hal Penyampaian Pagu Alokasi Anggaran TA 2021. Pagu Kementerian Hukum dan HAM TA 2021 bersumber dana dari Rupiah Murni Rp13.719.877.483.000,00 dan PNPB Rp3.237.750.870.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

NO	JENIS BELANJA	ANGGARAN
1	Belanja Pegawai	Rp 7.180.996.101.000,00
2	Belanja Barang Operasional	Rp 1.421.465.718.000,00
3	Bahan Makanan WBP	Rp 1.987.123.518.000,00
4	Belanja Tugas Fungsi RM	Rp 3.130.292.146.000,00
5	Belanja Tugas Fungsi PNPB	Rp 3.237.750.870.000,00
JUMLAH		Rp16.957.628.353.000,00



Selanjutnya, sampai dengan 31 Desember TA 2021 Kementerian Hukum dan HAM ikut serta melakukan *refocusing* dan realokasi anggaran sebanyak 4 (empat) kali dengan total anggaran yang dihemat sebesar Rp1.194.966.249.000,00 yang bersumber dari Rupiah Murni termasuk anggaran Prioritas Nasional dengan rincian sebagai berikut:

1. Penghematan pertama dilakukan berdasarkan Surat Menteri Keuangan Nomor S-30/MK.02/2021 tanggal 12 Januari 2021 hal *Refocusing* dan Realokasi Belanja Kementerian/Lembaga TA 2021 yang menjadi dasar dilakukannya penghematan anggaran sebanyak Rp346.737.778.000,00 di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM; dan
2. Penghematan kedua dilakukan berdasarkan Surat Menteri Keuangan Nomor S-408/MK.02/2021 tanggal 18 Mei 2021 hal Penghematan Belanja Kementerian/Lembaga TA 2021 yang menjadi dasar dilakukannya penghematan anggaran sebanyak Rp450.542.244.000,00.
3. Penghematan ketiga dilakukan berdasarkan Surat Menteri Keuangan Nomor S-584/MK.02/2021 tanggal 06 Juli 2021 hal *Refocusing* dan Realokasi Belanja Kementerian/Lembaga TA 2021 yang menjadi dasar dilakukannya penghematan anggaran sebanyak Rp158.986.227.000,00.
4. Penghematan keempat dilakukan berdasarkan Surat Menteri Keuangan Nomor S-629/MK.02/2021 tanggal 20 Juli 2021 hal *Refocusing* dan Realokasi Belanja Kementerian/Lembaga TA 2021 Tahap IV yang menjadi dasar dilakukannya penghematan anggaran sebanyak Rp238.700.000.000,00.

Penghematan pagu belanja tersebut dilakukan dalam rangka mendukung pelaksanaan program pemerintah untuk digunakan sebagai berikut:

- Mengamankan pelaksanaan pengadaan vaksinasi dan program vaksinasi nasional;
- Penanganan pandemi Covid-19 dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN); dan
- Dukungan anggaran perlindungan sosial kepada masyarakat serta percepatan pemulihan ekonomi nasional.

Adapun fokus *Refocusing* anggaran yang telah dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM TA 2021 adalah:

- Belanja Pegawai
Melakukan penghematan tunjangan kinerja ke-13 dan 14.
- Belanja Non Operasional
Melakukan penghematan belanja bahan, belanja honorarium, perjalanan dinas, paket meeting, belanja jasa, pembangunan gedung kantor, pengadaan kendaraan dan peralatan/mesin,



sisanya dana lelang, anggaran dari kegiatan yang belum dikontrakan atau tidak memungkinkan untuk dilaksanakan serta kegiatan yang tidak mendesak/dapat ditunda/dibatalkan/blokir.

- Belanja Barang pada KRO/RO Prioritas Nasional.
Melakukan penghematan anggaran pada kegiatan Prioritas Nasional yaitu pada Ditjen PP, BPHN dan BPSDM, dimana penghematan anggaran tidak mengurangi capaian target yang telah ditetapkan.

Sampai dengan 31 Desember TA 2021, unit eselon I di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM yang melakukan *refocusing* dan realokasi anggaran dalam rangka penghematan anggaran dengan rincian sebagai berikut:



Tabel 7
Refocusing dan Realokasi Anggaran Per Unit Eselon I TA 2021

dalam ribuan rupiah

No	Unit Eselon I	Pagu Awal			Penghematan I Feb 2021	Penghematan II Mei 2021	Penghematan III Juli 2021	Penghematan IV Juli 2021	Total Penghematan	Pagu Pasca Hemat IV		
		RM	PNBP	Jumlah	RM	RM	RM	RM	RM	RM	PNBP	Jumlah
1	SETJEN	4.603.309.340	0	4.603.309.340	49.259.383	450.542.244	7.135.526	29.036.325	535.973.478	4.067.335.862	0	4.067.335.862
2	ITJEN	74.461.972	0	74.461.972	5.019.644	0	2.581.000	5.018.330	12.618.974	61.842.998	0	61.842.998
3	DITJEN AHU	57.810.892	674.044.618	731.855.510	0	0	0	1.000.000	1.000.000	56.810.892	674.044.618	730.855.510
4	DITJEN PAS	7.264.811.655	0	7.264.811.655	204.805.128	0	60.731.688	136.145.345	401.682.161	6.863.129.494	0	6.863.129.494
5	DITJEN IM	889.935.673	2.085.977.305	2.975.912.978	0	0	0	0	0	889.935.673	2.085.977.305	2.975.912.978
6	DITJEN KI	74.770.146	476.909.322	551.679.468	0	0	0	0	0	74.770.146	476.909.322	551.679.468
7	DITJEN PP	52.806.325	0	52.806.325	5.700.197	0	537.551	4.000.000	10.237.748	42.568.577	0	42.568.577
8	DITJEN HAM	49.465.599	0	49.465.599	3.530.500	0	543.156	4.000.000	8.073.656	41.391.943	0	41.391.943
9	BPHN	119.548.638	0	119.548.638	7.501.996	0	1.196.244	7.000.000	15.698.240	103.850.398	0	103.850.398
10	BALITBANG	51.095.166	0	51.095.166	5.333.805	0	346.156	2.500.000	8.179.961	42.915.205	0	42.915.205
11	BPSDM	481.862.077	819.625	482.681.702	65.587.125	0	85.914.906	50.000.000	201.502.031	280.360.046	819.625	281.179.671
Grand Total		13.719.877.483	3.237.750.870	16.957.628.353	346.737.778	450.542.244	158.986.227	238.700.000	1.194.966.249	12.524.911.234	3.237.750.870	15.762.662.104

Sedangkan rincian jenis program belanja Kementerian Hukum dan HAM yang melakukan *refocusing* dan realokasi anggaran sebagai berikut:



Tabel 8
Refocusing dan Realokasi Anggaran Per Program TA 2021

dalam ribuan rupiah

No	Nama Program	Rupiah Murni						
		Pagu Awal	Refocusing I	Refocusing II	Refocusing III	Refocusing IV	Total Refocusing	Pagu Setelah Refocusing
1	Program Dukungan Manajemen	11.025.706.738	289.853.755	450.542.244	157.965.109	227.822.544	1.126.183.652	9.899.523.086
2	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	2.647.998.068	50.318.708	0	496.712	5.156.412	55.971.832	2.592.026.236
3	Program Pembentukan Regulasi	29.270.303	5.003.815	0	300.000	3.701.774	9.005.589	20.264.714
4	Pemajuan dan Penegakan HAM	16.902.374	1.561.500	0	224.406	2.019.270	3.805.176	13.097.198
Jumlah		13.719.877.483	346.737.778	450.542.244	158.986.227	238.700.000	1.194.966.249	12.524.911.234



Pada triwulan keempat, Kementerian Hukum dan HAM memperoleh Hibah Langsung Dalam Negeri sebesar Rp1.029.940.000,00 dari Pemerintah Daerah dan penurunan anggaran PNPB pada Ditjen Imigrasi sebesar Rp889.279.561.000,00 dikarenakan tidak tercapainya penerimaan PNPB sehingga total Pagu Kementerian Hukum dan HAM menjadi Rp14.874.412.483.000,00. Adapun rincian perubahan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Hibah Langsung Dalam Negeri Rp1.029.940.000.000,00.
 - a. Rutan Depok mendapat Hibah dari Pemerintah Kota Depok sebesar Rp999.940.000,00 pada bulan September dan November 2021 yang diperuntukan Pembangunan Gazebo, Landscape dan Pematangan Lahan Rutan Depok.
 - b. Rutan Lubuk Sikaping mendapat Hibah dari Pemerintah Kabupaten Pasaman sebesar Rp30.000.000,00 pada bulan Desember 2021 yang diperuntukan Pembuatan Lapangan Olahraga.
2. Penurunan Pagu PNPB pada Ditjen Imigrasi Rp889.279.561.000,00.

Pada tanggal 16 Desember 2021 Ditjen Imigrasi mengusulkan penurunan pagu PNPB kepada Kementerian Keuangan sebesar Rp889.279.561.000,00. Usulan penurunan pagu PNPB tersebut dilakukan akibat pandemi Covid-19 yang berdampak pada tidak tercapainya target penerimaan PNPB dari imigrasi (paspor, visa, izin tinggal dan layanan keimigrasian lainnya) sehingga pagu penggunaan PNPB yang sudah teralokasikan tidak dapat dipergunakan dikarenakan tidak tercapainya target penerimaan PNPB Ditjen Imigrasi TA 2021.

Berikut tabel perubahan pagu Kementerian Hukum dan HAM TA 2021:



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Catatan Atas Laporan Keuangan – *Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran*
Per 31 Desember Tahun Anggaran 2021 (*Audited*)
Dengan Angka Perbandingan 31 Desember Tahun Anggaran 2020
(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Tabel 9
Perubahan Pagu Kementerian Hukum dan HAM TA 2021

dalam ribuan rupiah

No	Unit Eselon I	Pagu Awal			Total Penghematan	Hibah Langsung Dalam Negeri	Penurunan PNPB	Pagu Akhir 31 Desember 2021			Jumlah
		RM	PNBP	Jumlah	RM	HLDN	PNBP	RM	PNBP	HLDN	
1	SETJEN	4.603.309.340	0	4.603.309.340	(535.973.478)	0	0	4.067.335.862	0	0	4.067.335.862
2	ITJEN	74.461.972	0	74.461.972	(12.618.974)	0	0	61.842.998	0	0	61.842.998
3	DITJEN AHU	57.810.892	674.044.618	731.855.510	(1.000.000)	0	0	56.810.892	674.044.618	0	730.855.510
4	DITJEN PAS	7.264.811.655	0	7.264.811.655	(401.682.161)	1.029.940	0	6.863.129.494	0	1.029.940	6.864.159.434
5	DITJEN IM	889.935.673	2.085.977.305	2.975.912.978	0	0	(889.279.561)	889.935.673	1.196.697.744	0	2.086.633.417
6	DITJEN KI	74.770.146	476.909.322	551.679.468	0	0	0	74.770.146	476.909.322	0	551.679.468
7	DITJEN PP	52.806.325	0	52.806.325	(10.237.748)	0	0	42.568.577	0	0	42.568.577
8	DITJEN HAM	49.465.599	0	49.465.599	(8.073.656)	0	0	41.391.943	0	0	41.391.943
9	BPHN	119.548.638	0	119.548.638	(15.698.240)	0	0	103.850.398	0	0	103.850.398
10	BALITBANG	51.095.166	0	51.095.166	(8.179.961)	0	0	42.915.205	0	0	42.915.205
11	BPSDM	481.862.077	819.625	482.681.702	(201.502.031)	0	0	280.360.046	819.625	0	281.179.671
Grand Total		13.719.877.483	3.237.750.870	16.957.628.353	(1.194.966.249)	1.029.940	(889.279.561)	12.524.911.234	2.348.471.309	1.029.940	14.874.412.483



Berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2021 yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2020 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2021, pada Kementerian Hukum dan HAM terdapat Alokasi Anggaran untuk Prioritas Nasional (PN) yaitu pada Prioritas Nasional III, IV, dan VII.

Rincian Pagu Anggaran, Realisasi Anggaran, Target dan Realisasi Output dari masing-masing Prioritas Nasional adalah sebagai berikut:

1. PN III: Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing.

Pagu Anggaran PN III adalah Rp1.763.975.000,00 dan total realisasi sebesar Rp1.615.735.607,00. Beberapa Program/Kegiatan dalam PN III ini antara lain sebagai berikut.

Tabel 10

Capaian Output Prioritas Nasional III

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia per 31 Desember 2021

No	Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Satuan Output	Target	Capaian Output	%
1	Kebijakan Pengembangan Sistem Pembelajaran Berkelanjutan Bagi Anak (Prioritas Nasional)	1.000.000.000,00	985.421.057,00	98,54	Rekomendasi Kebijakan	1	1	100,00
2	Layanan Pengembangan Kompetensi di Bidang SPPA bagi Aparatur Penegak Hukum dan Instansi Teknis Lainnya	763.975.000,00	630.314.550,00	82,50	Orang	270	270	100,00
Jumlah		1.763.975.000,00	1.615.735.607,00	91,60				

2. PN IV: Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan.

Pagu Anggaran PN IV adalah Rp1.000.000.000,00 dan total realisasi sebesar Rp889.491.460,00. Beberapa Program/Kegiatan dalam PN IV ini antara lain sebagai berikut.

Tabel 11

Capaian Output Prioritas Nasional IV

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia per 31 Desember 2021

No	Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Satuan Output	Target	Capaian Output	%



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Catatan Atas Laporan Keuangan – *Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran*
Per 31 Desember Tahun Anggaran 2021 (*Audited*)
Dengan Angka Perbandingan 31 Desember Tahun Anggaran 2020
(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1	Pengembangan Pusat Data Nasional Kekayaan Intelektual Komunal	1.000.000.000,00	889.491.460,00	88,95	Layanan	156	595	381,41
Jumlah		1.000.000.000,00	889.491.460,00	88,95				

3. PN VII: Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.

Pagu Anggaran PN VII adalah Rp68.572.969.000,00 dan total realisasi sebesar Rp66.905.479.432,00. Beberapa Program/Kegiatan dalam PN VII ini antara lain sebagai berikut.

Tabel 12
Capaian Output Prioritas Nasional VII
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia per 31 Desember 2021

No	Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Satuan Output	Target	Capaian Output	%
1	RUU KUHP/KUHP	943.000.000,00	940.595.185,00	99,74	UU	1	1	100,00
2	RUU KUH Acara Perdata	500.000.000,00	484.108.797,00	96,82	UU	1	1	100,00
3	RUU Kepailitan	200.000.000,00	192.147.175,00	96,07	UU	1	1	100,00
4	RUU Jaminan Benda Bergerak	100.000.000,00	96.473.125,00	96,47	UU	1	1	100,00
5	Kebijakan pengembangan integrasi sistem TI pendaftaran Badan Usaha, Jaminan Benda Bergerak, dan Informasi Kepailitan	1.000.000.000,00	632.715.000,00	63,27	Rekomendasi Kebijakan	1	1	100,00
6	Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat Untuk Pelaksanaan Keadilan Restoratif (Prioritas Nasional)	1.800.000.000,00	1.799.636.450,00	99,98	Kegiatan	1	1	100,00
7	Peningkatan Fungsi SDP untuk Implementasi SPPT TI	800.000.000,00	799.978.455,00	100,00	Kegiatan	1	1	100,00
8	Kebijakan Pengembangan sistem manajemen pelaksanaan integrasi	781.476.000,00	581.969.016,00	74,47	Rekomendasi Kebijakan	1	1	100,00



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
 Catatan Atas Laporan Keuangan – *Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran*
 Per 31 Desember Tahun Anggaran 2021 (Audited)
 Dengan Angka Perbandingan 31 Desember Tahun Anggaran 2020
 (Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	lintas batas (integrated border control management)							
9	Kegiatan Bantuan Hukum Litigasi	41.592.000.000,00	41.153.680.000,00	98,95	orang	5.699	11.990	210,39
10	Kegiatan Verifikasi dan Akreditasi OBH di Wilayah	2.500.000.000,00	2.397.707.839,00	95,91	Lembaga	524	619	118,13
11	Kegiatan Bantuan Hukum Non Litigasi	7.003.353.000,00	6.647.254.275,00	94,92	Kelompok Masyarakat	758	3.608	475,99
12	Pelaksanaan Aksi HAM dalam RANHAM	1.000.000.000,00	932.428.405,00	93,24	Rekomendasi Kebijakan	1.250	3.021	241,68
13	Pembangunan Zona Intergitas WBK/WBBM di Lingkungan Inspektorat Wilayah I	1.042.760.000,00	1.041.101.000,00	99,84	Laporan	1	1	100,00
14	Pembangunan Zona Intergitas WBK/WBBM di Lingkungan Inspektorat Wilayah II	1.042.760.000,00	1.041.941.640,00	99,92	Laporan	1	1	100,00
15	Pembangunan Zona Intergitas WBK/WBBM di Lingkungan Inspektorat Wilayah III	1.042.760.000,00	1.042.313.190,00	99,96	Laporan	1	1	100,00
16	Pembangunan Zona Intergitas WBK/WBBM di Lingkungan Inspektorat Wilayah IV	1.042.760.000,00	1.042.340.238,00	99,96	Laporan	1	1	100,00
17	Pembangunan Zona Intergitas WBK/WBBM di Lingkungan Inspektorat Wilayah V	1.042.760.000,00	1.042.055.996,00	99,93	Laporan	1	1	100,00
18	Pembangunan Zona Intergitas WBK/WBBM di Lingkungan Inspektorat Wilayah VI	3.750.600.000,00	3.747.971.084,00	99,93	Laporan	1	1	100,00
19	Layanan Pengembangan Kompetensi di Bidang Pembimbing Kemasyarakatan	1.388.740.000,00	1.289.062.562,00	92,82	Orang	320	320	100,00
Jumlah		68.572.969.000,00	66.905.479.432,00	97,57				



**Realisasi
Pendapatan
(Netto)
Rp3.185.268.555.
856,00**

B.1. PENDAPATAN

Realisasi Pendapatan (netto) Kementerian Hukum dan HAM untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp3.185.268.555.856,00 atau mencapai 71,11% dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp4.479.369.443.186,00.

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Per 31 Desember 2021 disajikan pada Tabel berikut:

Tabel 13
Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia per 31 Desember 2021

MAP	URAIAN	ESTIMASI (Rp)	REALISASI (Rp)	%
4251	Pendapatan dari Penjualan, Pengelolaan BMN dan Iuran Badan Usaha	6.421.716.186,00	19.484.562.954,00	303,42
4252	Pendapatan Administrasi dan Penegakan Hukum	4.471.544.734.000,00	3.118.306.783.653,00	69,74
4253	Pendapatan Kesehatan, Perlindungan Sosial, dan Keagamaan	0,00	76.083.802,00	-
4254	Pendapatan Pendidikan, Budaya, Riset dan Teknologi	987.500.000,00	987.500.000,00	100,00
4256	Pendapatan Jasa Lainnya	214.579.000,00	1.391.526.620,00	648,49
4257	Pendapatan Bunga, Pengelolaan Rekening Perbankan	21.000.000,00	227.272.570,00	1.082,25
4258	Pendapatan Denda	0,00	6.839.633.114,00	-
4259	Pendapatan Lain-lain	179.914.000,00	38.718.523.893,00	21.520,57
Jumlah Pendapatan Kotor		4.479.369.443.186,00	3.186.031.886.606,00	71,13
Pengembalian Pendapatan		0,00	763.330.750,00	-
Jumlah Pendapatan		4.479.369.443.186,00	3.185.268.555.856,00	71,11

Keseluruhan Pendapatan Kementerian Hukum dan HAM berasal dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Jenis pendapatan pada Kementerian Hukum dan HAM antara lain:

- Pendapatan jasa berasal dari penerimaan Jasa Keimigrasian yaitu penerbitan paspor WNI dan Visa/izin



- tinggal Warga Negara Asing (Ditjen Imigrasi), perlindungan hukum bagi Kekayaan Intelektual (Ditjen Kekayaan Intelektual), dan penerimaan jasa administrasi hukum (Ditjen Administrasi Hukum Umum);
- b. Pendapatan dari pengelolaan BMN berasal dari pendapatan sewa rumah dinas yang ditinggali oleh PNS;
 - c. Pendapatan dari hasil karya napi ataupun atas penjualan pemanfaatan sumber daya yang ada pada satker yang melibatkan narapidana pada kegiatan industri dalam lapas/rutan yang dananya bersumber dari DIPA satker seperti penjualan hasil budidaya lele, ikan nila, hasil perkebunan, salon, bengkel, dan sebagainya;
 - d. Pendapatan penjualan atas hasil bongkahan/bongkaran bangunan sesuai arahan KPKNL setempat;
 - e. Pendapatan bunga lainnya yang merupakan pendapatan jasa giro bank;
 - f. Pendapatan dalam rangka penyelenggaraan pendidikan atau pelatihan;
 - g. Pendapatan atas pelayanan kesehatan yang diberikan pada Rumah Sakit Umum Pengayoman;
 - h. Pendapatan denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah digunakan untuk mencatat denda yang ditetapkan sesuai kontrak perjanjian pengadaan barang milik pemerintah yang dibayarkan oleh rekanan karena adanya wanprestasi atas pelaksanaan kontrak tersebut;
 - i. Pendapatan atas pengembalian kelebihan pembayaran belanja tahun anggaran yang lalu.

Pada tahun 2021 terdapat penurunan penerimaan PNBP pada dua unit akibat pandemi covid-19 yaitu Ditjen Imigrasi dan Ditjen AHU yang berdampak pada realisasi anggaran. Adapun penyebab tidak tercapainya penerimaan PNBP pada Ditjen Imigrasi dan Ditjen AHU adalah sebagai berikut:

1. Masih dibatasinya arus masuk dan keluar orang ke wilayah Republik Indonesia, termasuk pencabutan kebijakan Bebas Visa Kunjungan dan *Visa On Arrival*.
2. Masih banyak negara-negara yang melakukan pembatasan untuk dikunjungi.
3. Pemerintah Arab Saudi belum membuka negaranya untuk kunjungan ibadah umroh/haji sehingga calon jemaah umroh dan haji dari Indonesia belum dapat berangkat.



4. Animo masyarakat untuk membuat paspor sangat rendah karena belum adanya kepastian kapan dapat berangkat ke luar negeri.
5. Dengan berkurangnya jumlah kedatangan orang asing, berdampak pada berkurangnya permohonan izin tinggal dan *re-entry* permit.
6. Menurunnya daya beli masyarakat sehingga berimbas langsung terhadap penerimaan fidusia sebagai sektor penerimaan terbesar PNBPN Ditjen AHU.

Berikut adalah perbandingan Realisasi Pendapatan Kementerian Hukum dan HAM per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 sebagai berikut:

Tabel 14
Perbandingan Realisasi PNBPN Per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

MAP	URAIAN	Realisasi Per 31 Desember 2021	Realisasi Per 31 Desember 2020	Kenaikan/Penurunan	
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	%
4251	Pendapatan dari Penjualan, Pengelolaan BMN dan Iuran Badan Usaha	19.484.562.954,00	19.257.840.023,00	226.722.931,00	1,18
4252	Pendapatan Administrasi dan Penegakan Hukum	3.118.306.783.653,00	2.881.357.598.673,00	236.949.184.980,00	8,22
4253	Pendapatan Kesehatan, Perlindungan Sosial, dan Keagamaan	76.083.802,00	56.303.300,00	19.780.502,00	35,13
4254	Pendapatan Pendidikan, Budaya, Riset dan Teknologi	987.500.000,00	987.500.000,00	0,00	0,00
4256	Pendapatan Jasa Lainnya	1.391.526.620,00	1.269.653.046,00	121.873.574,00	9,60



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Catatan Atas Laporan Keuangan – *Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran*
Per 31 Desember Tahun Anggaran 2021 (*Audited*)
Dengan Angka Perbandingan 31 Desember Tahun Anggaran 2020
(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

4257	Pendapatan Bunga, Pengelolaan Rekening Perbankan	227.272.570,00	484.899.012,00	(257.626.442,00)	(53,13)
4258	Pendapatan Denda	6.839.633.114,00	3.511.073.570,00	3.328.559.544,00	94,80
4259	Pendapatan Lain-lain	38.718.523.893,00	32.389.089.702,00	6.329.434.191,00	19,54
TOTAL PENDAPATAN KOTOR		3.186.031.886.606,00	2.939.313.957.326,00	246.717.929.280,00	8,39
PENGEMBALIAN PENDAPATAN		763.330.750,00	690.875.000,00	72.455.750,00	-
TOTAL PENDAPATAN		3.185.268.555.856,00	2.938.623.082.326,00	246.645.473.530,00	8,39

Berdasarkan Tabel 14 di atas, realisasi PNBK per 31 Desember 2021 dibandingkan dengan 31 Desember 2020 mengalami kenaikan sebesar Rp246.645.473.530,00 atau 8,39%. Kenaikan pendapatan ini disebabkan mulai diterapkannya kelonggaran aturan terkait pembatasan sosial pada Tahun 2021 sehingga memungkinkan pelayanan yang diberikan oleh Kementerian Hukum dan HAM dapat kembali diperoleh oleh masyarakat, yang berdampak pada meningkatnya pendapatan di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM.

Beberapa hal yang membuat kenaikan realisasi pendapatan di antaranya sebagai berikut:

1. Pada awal tahun 2021, pemerintah memberikan kelonggaran kebijakan bepergian sehingga banyak masyarakat yang optimis dengan kondisi yang semakin membaik;
2. Adanya kelonggaran kebijakan terkait dengan izin masuk dan izin tinggal bagi warga negara asing sehingga berdampak pada peningkatan pendapatan visa dan izin keimigrasian;
3. Mulai diterapkannya kebijakan WFO yang berdampak pada kembali aktifnya kantor-kantor Notaris dan lembaga pembiayaan sehingga volume transaksi khususnya transaksi badan hukum dan jasa hukum lainnya mulai meningkat;
4. Kembali dibukanya pendaftaran untuk pengangkatan notaris;



5. Mulai membaiknya kondisi penyebaran Covid-19 di awal tahun 2021 menyebabkan meningkatnya aktivitas masyarakat yang berdampak pada meningkatnya kebutuhan pelayanan legalisasi;
6. Meningkatnya volume transaksi layanan kekayaan intelektual yang disebabkan oleh tumbuhnya kesadaran masyarakat terhadap perlindungan Merek, Paten, dan Hak Cipta.

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan dari Penjualan, Pengelolaan BMN, dan Iuran Badan per 31 Desember 2021 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 15
Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan dari Penjualan, Pengelolaan BMN, dan Iuran Badan

MAP	URAIAN	ESTIMASI (Rp)	REALISASI BRUTO (Rp)	PENGEMBALIAN (Rp)	REALISASI NETO (Rp)	%
425119	Pendapatan Penjualan Hasil Produksi Non Litbang Lainnya	257.059.000,00	2.495.262.850,00	0,00	2.495.262.850,00	970,70
425121	Pendapatan dari Penjualan Tanah, Gedung, dan Bangunan	0,00	283.350.198,00	0,00	283.350.198,00	-
425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	16.358.000,00	1.287.503.250,00	0,00	1.287.503.250,00	7.870,79
425129	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	4.000.000,00	1.600.338.007,00	0,00	1.600.338.007,00	40.008,45
425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	6.132.299.186,00	13.734.681.481,00	3.128.750,00	13.731.552.731,00	223,92
425132	Pendapatan Sewa Peralatan dan Mesin	12.000.000,00	13.266.000,00	0,00	13.266.000,00	110,55
425139	Pendapatan dari Pemanfaatan BMN Lainnya	0,00	70.161.168,00	0,00	70.161.168,00	-
Jumlah Pendapatan		6.421.716.186,00	19.484.562.954,00	3.128.750,00	19.481.434.204,00	303,37

- a. Pendapatan Penjualan Hasil Produksi Non Litbang Lainnya (Akun 425119) sebesar Rp2.495.262.850,00



merupakan pendapatan atas penjualan hasil karya narapidana ataupun atas penjualan pemanfaatan sumber daya yang ada pada satker yang melibatkan narapidana pada kegiatan industri dalam lapas/rutan yang dananya bersumber dari DIPA satker seperti penjualan hasil budidaya lele, ikan nila, hasil perkebunan dsb. Adapun satuan kerja yang mendapatkan Pendapatan Penjualan Hasil Produksi Non Litbang Lainnya (Akun 425119) terdapat dalam lampiran LRA.

- b. Dalam hal estimasi Pendapatan Penjualan Tanah, Gedung dan Bangunan (akun 425121) tidak dibuat dikarenakan bukan merupakan pendapatan proses bisnis utama Kementerian Hukum dan HAM dan yang bersifat rutin. Pendapatan Penjualan Tanah, Gedung dan Bangunan sebesar Rp283.350.198,00 merupakan penjualan atas hasil bongkahan/bongkaran bangunan sesuai arahan KPKNL setempat pada Kanwil Jawa Tengah, Kanwil Yogyakarta, Lapas Besi, Lapas Banceuy, Lapas Purwokerto, Rutan Kabanjahe, Rupbasan Semarang, Kanim Kendari, dan Kanim Atambua.
- c. Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin (akun 425122) dan Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya (akun 425129) merupakan akun-akun pendapatan yang digunakan oleh KPKNL setempat untuk menyetorkan pendapatan dari hasil penjualan / lelang atas aset-aset yang telah rusak berat.

Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin (akun 425122) pada Kementerian Hukum dan HAM di antaranya merupakan pendapatan atas penjualan/ hasil lelang kendaraan dinas, paket barang inventaris kondisi rusak berat, dan sebagainya. Adapun satuan kerja yang memperoleh Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin (akun 425122) terdapat dalam lampiran LRA.

Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya (akun 425129) di antaranya merupakan penjualan/hasil lelang sisa bongkaran Gedung, penjualan/hasil lelang kendaraan dinas, penjualan/hasil lelang barang inventaris rusak berat. Adapun satuan kerja yang memperoleh Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya (akun 425129) terdapat dalam lampiran LRA.

- d. Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan (akun 425131) merupakan pendapatan atas sewa rumah dinas,



bangunan koperasi, kantin, dan pendapatan sewa dari pemanfaatan gedung dan bangunan milik satuan kerja di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM. Adapun satuan kerja yang memperoleh Pendapatan dari Penjualan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan (akun 425131) terdapat dalam lampiran LRA.

Terdapat pengembalian pendapatan sewa tanah, gedung, dan bangunan sebesar Rp3.128.750,00 yang terdapat pada Kanim Surakarta disebabkan karena kesalahan input kode billing setoran pada teller Bank BJB yang seharusnya merupakan kode billing untuk pendapatan sewa ATM BNI.

- e. Pendapatan sewa Peralatan dan Mesin (Akun 425132) terdapat pada Lembaga Pemasarakatan Kalisosok Surabaya atas pendapatan sewa mesin pemotong kayu pada pihak ketiga (PT BMS) sebesar Rp9.750.000,00 dan Rutan Pelaihari atas sewa *water filter* dalam rutan sebesar Rp3.516.000,00.
- f. Pendapatan dari Pemanfaatan BMN Lainnya (Akun 425139) merupakan akun pendapatan yang digunakan oleh KPKNL untuk menyetorkan pendapatan atas pemanfaatan aset lainnya. Namun demikian sebagian satuan kerja salah penggunaan akun setoran pendapatan yang tidak tepat atas transaksi pemanfaatan aset dan hasil karya narapidana. Pendapatan tersebut terdapat pada Lapas Pemuda Langkat sebesar Rp600.000,00 berupa hasil karya narapidana, Kanim Tangerang sebesar Rp33.964.200,00, dan Ditjen HAM sebesar Rp35.596.968,00 berupa pendapatan dari kontrak penempatan dan pemasangan Media Light Emitting Diode (LED) dan Media Digital Frame dari PT Focus Media Indonesia. Estimasi atas pendapatan tersebut tidak dibuat dikarenakan bukan merupakan pendapatan proses bisnis utama Kementerian Hukum dan HAM dan yang bersifat rutin.

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan Administrasi dan Penegakan Hukum per 31 Desember 2021 disajikan pada tabel berikut:



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Catatan Atas Laporan Keuangan – *Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran*
Per 31 Desember Tahun Anggaran 2021 (*Audited*)
Dengan Angka Perbandingan 31 Desember Tahun Anggaran 2020
(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Tabel 16

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan dari Pendapatan Administrasi dan Penegakan Hukum

MAP	URAIAN	ESTIMASI (Rp)	REALISASI BRUTO (Rp)	PENGEMBALIAN (Rp)	REALISASI NETO (Rp)	%
425211	Pendapatan Paspor	1.277.500.000.000,00	295.490.600.000,00	0,00	295.490.600.000,00	23,13
425212	Pendapatan Visa	447.750.000.000,00	392.551.045.115,00	0,00	392.551.045.115,00	87,67
425213	Pendapatan Izin Keimigrasian dan Izin Masuk Kembali	806.150.000.000,00	680.579.400.000,00	108.550.000,00	680.470.850.000,00	84,41
425214	Pendapatan Pelayanan Keimigrasian Lainnya	103.075.000.000,00	52.976.952.000,00	5.852.000,00	52.971.100.000,00	51,39
425215	Pendapatan Pelayanan Fidusia	770.147.700.000,00	563.613.900.000,00	200.000,00	563.613.700.000,00	73,18
425216	Pendapatan Pelayanan Badan Hukum	221.097.100.000,00	227.604.617.572,00	25.800.000,00	227.578.817.572,00	102,93
425217	Pendapatan Pelayanan Jasa Hukum Lainnya	45.682.029.000,00	71.373.059.050,00	7.850.000,00	71.365.209.050,00	156,22
425218	Pendapatan Pelayanan Kekayaan Intelektual	800.000.000.000,00	833.268.383.544,00	611.950.000,00	832.656.433.544,00	104,08
425219	Pendapatan Pelayanan dan Administrasi Hukum Lainnya	142.905.000,00	848.826.372,00	0,00	848.826.372,00	593,98
Jumlah Pendapatan		4.471.544.734.000,00	3.118.306.783.653,00	760.202.000,00	3.117.546.581.653,00	69,72

- Realisasi Pendapatan Paspor (Akun 425211), merupakan pendapatan jasa yang berasal dari penerimaan jasa keimigrasian berupa penerbitan passport WNI pada satker pusat Ditjen Imigrasi sebesar Rp295.490.600.000,00.
- Realisasi pendapatan Visa (Akun 425212), merupakan pendapatan jasa yang berasal dari penerimaan jasa keimigrasian berupa visa warga negara pada satker pusat Ditjen Imigrasi sebesar Rp392.551.045.115,00.
- Realisasi pendapatan izin keimigrasian dan izin masuk Kembali (akun 425213) merupakan pendapatan jasa yang berasal dari penerimaan jasa keimigrasian dan izin masuk



- kembali pada satker pusat Ditjen Imigrasi sebesar Rp680.470.850.000,00.
- d. Realisasi pendapatan keimigrasian lainnya (Akun 425214) merupakan pendapatan jasa yang berasal dari penerimaan Jasa Keimigrasian lainnya berupa pendapatan beban alat angkut, pendapatan paspor rusak dan sebagainya pada satker pusat Ditjen Imigrasi sebesar Rp52.971.100.000,00.
 - e. Realisasi Pendapatan Pelayanan Fidusia (Akun 425215) sebesar Rp563.613.700.000,00, Pendapatan Pelayanan Badan Hukum (Akun 425216) sebesar Rp227.578.817.572,00, dan Pendapatan Pelayanan Jasa Hukum lainnya (Akun 425217) sebesar Rp71.365.209.050,00 merupakan pendapatan dari penerimaan jasa administrasi hukum berupa layanan fidusia dan badan hukum lainnya yang terdapat pada Ditjen Administrasi Hukum Umum.
 - f. Realisasi Pendapatan Pelayanan Kekayaan Intelektual (Akun 425218) sebesar Rp832.656.433.544,00 merupakan pendapatan dari Ditjen Kekayaan Intelektual dalam proses perlindungan hukum bagi Kekayaan Intelektual berupa perlindungan Merek, Paten, dan Hak Cipta. Kenaikan pendapatan pelayanan Kekayaan Intelektual tahun 2021 disebabkan oleh meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap perlindungan Merek, Paten, dan Hak Cipta. Khusus pendapatan di bidang Merek meningkat disebabkan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual menerima pendapatan pendaftaran permohonan Merek melalui Protokol Madrid serta penerimaan dari pelunasan piutang PNBK (biaya jasa tahunan paten), dan didukung dengan sistem informasi pelayanan Kekayaan Intelektual yang baik sehingga memudahkan dan mempercepat proses penerimaan pendapatan pelayanan Kekayaan Intelektual.
 - g. Realisasi Pendapatan pelayanan dan administrasi hukum lainnya (Akun 425219) sebesar Rp848.826.372,00 merupakan pendapatan dari kegiatan kemandirian, bimbingan kerja, dan kegiatan industri dalam lapas/rutan yang dibiayai oleh pihak ketiga berdasarkan perjanjian kerja sama. Adapun rincian satuan kerja yang memperoleh pendapatan pelayanan dan administrasi hukum lainnya (Akun 425219) terdapat dalam lampiran LRA.



- h. Terdapat pengembalian pendapatan dari Pendapatan Administrasi dan Penegakan Hukum sebesar Rp760.202.000,00 yang terjadi karena kelebihan pembayaran, kesalahan pembayaran atau pembayaran ganda dari penerimaan jasa administrasi hukum (Ditjen Administrasi Hukum Umum), pelayanan keimigrasian (Ditjen Imigrasi), dan penerimaan perlindungan hukum bagi Kekayaan Intelektual (Ditjen Kekayaan Intelektual).

Rincian pengembalian pendapatan dari Pendapatan Administrasi dan Penegakan Hukum per 31 Desember 2021 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 17
Rincian pengembalian pendapatan dari Pendapatan Administrasi dan Penegakan Hukum

NO	SATUAN KERJA	JUMLAH	KETERANGAN
1	Direktorat Jenderal Imigrasi	114.402.000,00	Pengembalian Izin Masuk Kembali Masa Berlaku Paling Lama 1 (Satu) Tahun dan Izin Tinggal Terbatas Masa Berlaku Paling Lama 1 (Satu) Tahun
2	Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum	33.850.000,00	Pengembalian Pendapatan Pelayanan Badan Hukum disebabkan karena kesalahan pembelian voucher layanan AHU
3	Ditjen Kekayaan Intelektual	611.950.000,00	Merupakan pengembalian pembayaran PNBP yang disebabkan oleh kesalahan pemilihan jenis pelayanan Kekayaan Intelektual oleh pemohon secara daring dan terhadap kode billing yang telah dibayarkan belum digunakan untuk mengajukan pelayanan kekayaan intelektual.
TOTAL		760.202.000,00	

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan Kesehatan, Perlindungan Sosial, dan Keagamaan per 31 Desember 2021 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 18
Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan Kesehatan, Perlindungan Sosial, dan Keagamaan

MAP	URAIAN	ESTIMASI (Rp)	REALISASI (Rp)	%
425311	Pendapatan dari Badan Penyelenggara Jaminan	0,00	39.980.202,00	-



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Catatan Atas Laporan Keuangan – *Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran*
Per 31 Desember Tahun Anggaran 2021 (*Audited*)
Dengan Angka Perbandingan 31 Desember Tahun Anggaran 2020
(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Sosial (BPJS) Kesehatan pada FKTP			
425313	Pendapatan Layanan Fasilitas Kesehatan	0,00	36.103.600,00	-
Jumlah Pendapatan		0,00	76.083.802,00	-

Realisasi Pendapatan dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) (Akun 425311) sebesar Rp39.980.202,00 pada satuan kerja Lapas Cipinang, Rutan Cipinang, dan Lapas Narkotika Jakarta. Pendapatan ini merupakan Dana Kapitasi yang besaran pembayaran per bulannya dibayar di muka oleh BPJS Kesehatan melalui kerjasama dengan Pemerintah Kota Jakarta kepada FKTP berizin yang ada pada Lapas dan Rutan berdasarkan jumlah peserta yang terdaftar tanpa memperhitungkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan.

Dana kapitasi ini berdasarkan PMK No. 194/PMK.02/2018 tentang Tata Cara Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak dari Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama dan Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan Milik Pemerintah mensyaratkan agar satuan kerja penerima dana kapitasi untuk menetapkan rencana kerja dan anggaran PNB dari penyelenggaraan JKN, melakukan penambahan pagu dana yang bersumber dari PNB dan secara periodik melakukan konfirmasi laporan data peserta BPJS di FKTP tersebut kepada BPJS Kesehatan. Ketiga syarat ini belum dapat dipenuhi oleh satuan kerja penerima dana kapitasi tersebut sehingga sampai dengan tanggal pelaporan 31 Desember 2021, dana tersebut belum dapat dimanfaatkan sebagaimana mestinya.

Realisasi Pendapatan Layanan Fasilitas Kesehatan (Akun 425313) sebesar Rp36.103.600,00 merupakan pendapatan fungsional atas layanan kesehatan pada satuan kerja Rumah Sakit Pengayoman Cipinang Kelas D.

Estimasi atas pendapatan Kesehatan, Perlindungan Sosial, dan Keagamaan tidak dapat dilakukan estimasi karena atas pendapatan tersebut tidak dapat diprediksi.

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan Pendidikan, Budaya, Riset, dan Teknologi per 31 Desember 2021 disajikan pada tabel berikut:



Tabel 19

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan Pendidikan, Budaya, Riset, dan Teknologi

MAP	URAIAN	ESTIMASI (Rp)	REALISASI (Rp)	%
425421	Pendapatan Layanan Pendidikan dan/atau Pelatihan	987.500.000,00	987.500.000,00	100,00
Jumlah Pendapatan		987.500.000,00	987.500.000,00	100,00

Realisasi Pendapatan Pendidikan, Budaya, Riset, dan Teknologi merupakan pendapatan yang diperoleh BPSDM Hukum dan HAM atas PNPB Pendidikan dan Pelatihan Penyusunan Perancang Perundang-undangan dan sebagainya.

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan Jasa Lainnya per 31 Desember 2021 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 20

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan Jasa Lainnya

MAP	URAIAN	ESTIMASI (Rp)	REALISASI (Rp)	%
425699	Pendapatan Jasa Lainnya	214.579.000,00	1.391.526.620,00	648,49
Jumlah Pendapatan		214.579.000,00	1.391.526.620,00	648,49

Pendapatan Jasa Lainnya (Akun 425699) sebesar Rp1.391.526.620,00 merupakan pendapatan atas pemanfaatan jasa narapidana pada kegiatan industri dalam lapas/rutan, seperti jasa laundry, salon, bengkel, cuci mobil/motor, dll yang dibiayai oleh DIPA satker. Adapun satuan kerja yang memperoleh Pendapatan Jasa Lainnya (Akun 425699) terdapat dalam lampiran LRA.

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan Bunga, Pengelolaan Rekening Perbankan per 31 Desember 2021 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 21

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan Bunga, Pengelolaan Rekening Perbankan, dan Pengelolaan Keuangan

MAP	URAIAN	ESTIMASI (Rp)	REALISASI (Rp)	%
425752	Pendapatan dari Untung Selisih Kurs Uang Persediaan	0,00	2.275.370,00	-



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Catatan Atas Laporan Keuangan – *Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran*
Per 31 Desember Tahun Anggaran 2021 (*Audited*)
Dengan Angka Perbandingan 31 Desember Tahun Anggaran 2020
(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

425764	Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)	21.000.000,00	37.392.827,00	178,06
425791	Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai	0,00	157.104.373,00	-
425792	Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Bendahara	0,00	27.000.000,00	-
425793	Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pihak Ketiga	0,00	3.500.000,00	-
Jumlah Pendapatan		21.000.000,00	227.272.570,00	1.082,25

- a. Pendapatan dari Untung Selisih Kurs (Akun 425752) sebesar Rp2.275.370,00 merupakan pendapatan atas selisih kurs uang persediaan pada Perwakilan Imigrasi di Sidney. Atas pendapatan tersebut, estimasinya tidak dibuat dikarenakan bukan merupakan pendapatan proses bisnis utama Kementerian Hukum dan HAM dan yang bersifat rutin.
- b. Estimasi Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Akun 425764) terdapat satker pusat Ditjen AHU sebesar Rp21.000.000,00. Realisasi Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (akun 425764) sebesar Rp37.392.827,00 merupakan pendapatan bunga rekening pemerintah pada satker yang diberikan oleh bank daerah setempat pada saat pembukaan rekening baru. Walaupun ketentuan atas rekening pemerintah tidak diberikan bunga, sehingga terjadi kesalahan oleh pihak bank yang tidak mengetahui bahwa rekening satker tersebut merupakan rekening pemerintah dan sudah berstatus *Treasury National Pooling* (TNP) tidak diperbolehkan menerima Jasa Giro, yaitu terdapat pada Kanwil Aceh DIPA Setjen Rp2.648,00, Kanwil Aceh DIPA Pemasarakatan Rp5.545,00, dan Lapas Bengkulu Rp11.934,00. Sementara itu, pada Balai Harta Peninggalan Semarang terdapat pendapatan jasa giro sebesar Rp37.372.700,00 yang berasal dari rekening pailit. Adapun rincian mutasi pendapatan jasa giro periode 31 Desember 2021 sebagai berikut:



Tabel 22
Rincian Mutasi Pendapatan Jasa Giro

No.	Nama Satker	Saldo per 30 Juni 2021	Mutasi tambah periode 1 Jul - 31 Des 2021	Saldo per 31 Desember 2021	Keterangan
1	Kanwil Aceh DIPA Setjen	2.648,00	0,00	2.648,00	Sudah dilakukan perbaikan dan saat ini rekening pada satker tersebut sudah tidak lagi menerima bunga karena sudah berstatus TNP.
2	Kanwil Aceh DIPA Pemasyarakatan	5.545,00	0,00	5.545,00	
3	Lapas Bengkulu	11.934,00	0,00	11.934,00	
4	BHP Semarang	25.402.900,00	11.969.800,00	37.372.700,00	Sudah disampaikan surat ke KPPN dan Ditjen Perbendaharaan terkait rekening dengan status <i>Treasury National Pooling</i> (TNP) dan sudah dilakukan perbaikan. Per bulan Oktober 2021, rekening pada satker tersebut sudah tidak lagi menerima bunga karena sudah berstatus TNP.
Total		25.423.027,00	11.969.800,00	37.392.827,00	

- c. Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai (akun 425791) sebesar Rp157.104.373,00 merupakan penerimaan pembayaran angsuran TP/TGR pegawai non bendahara. Adapun rincian satuan kerja yang memperoleh pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai (akun 425791) terdapat dalam lampiran LRA. Atas pendapatan tersebut, estimasinya tidak dibuat dikarenakan bukan merupakan pendapatan proses bisnis utama Kementerian Hukum dan HAM dan yang bersifat rutin.
- d. Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap bendahara (akun 425792) sebesar Rp27.000.000,00 merupakan penerimaan pembayaran angsuran TP/TGR bendahara yang terdapat pada Kanim Ternate sebesar Rp26.000.000,00 merupakan TGR Bendahara a.n Aisah Arsad yang merupakan TP/TGR yang merupakan temuan dari pengelolaan PNBPN periode tahun 2010 sampai dengan Semester I tahun 2011 dan pada Lapas Amurang sebesar Rp1.000.000,00 atas TGR yang merupakan temuan Itjen berupa pengeluaran anggaran yang tidak diperoleh bukti



pertanggungjawaban. Atas pendapatan tersebut, estimasinya tidak dibuat dikarenakan bukan merupakan pendapatan proses bisnis utama Kementerian Hukum dan HAM dan yang bersifat rutin.

- e. Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pihak Ketiga (akun 425793) sebesar Rp3.500.000,00 terdapat pada Balai Harta Peninggalan Jakarta terkait dengan cicilan pembayaran atas kehilangan laptop. Atas pendapatan tersebut, estimasinya tidak dibuat dikarenakan bukan merupakan pendapatan proses bisnis utama Kementerian Hukum dan HAM dan yang bersifat rutin.

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan Denda per 31 Desember 2021 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 23
Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan Denda

MAP	URAIAN	ESTIMASI (Rp)	REALISASI (Rp)	%
425811	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	0,00	6.839.633.114,00	-
Jumlah Pendapatan		0,00	6.839.633.114,00	-

Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah (Akun 425811) sebesar Rp6.839.633.114,00 di antaranya disebabkan adanya pembayaran denda atas keterlambatan pekerjaan. Atas pendapatan tersebut, estimasinya tidak dibuat dikarenakan bukan merupakan pendapatan proses bisnis utama Kementerian Hukum dan HAM dan yang bersifat rutin. Adapun Rincian Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah (Akun 425811) terdapat pada lampiran LRA.

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan Lain-Lain per 31 Desember 2021 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 24
Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan Lain-Lain

MAP	URAIAN	ESTIMASI (Rp)	REALISASI (Rp)	%
425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	6.126.000,00	1.178.047.774,00	19.230,29
425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	52.464.000,00	24.898.397.306,00	47.458,06



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Catatan Atas Laporan Keuangan – *Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran*
Per 31 Desember Tahun Anggaran 2021 (*Audited*)
Dengan Angka Perbandingan 31 Desember Tahun Anggaran 2020
(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

425913	Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	121.324.000,00	12.202.421.890,00	10.057,71
425931	Pendapatan Setoran dari Sisa Utang Non TP/TGR Pensiunan PNS	0,00	413.626.725,00	-
425991	Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji	0,00	6.205.300,00	-
425999	Pendapatan Anggaran Lain-lain	0,00	19.824.898,00	-
Jumlah Pendapatan		179.914.000,00	38.718.523.893,00	21.520,57

- Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang lalu (Akun 425911) Sebesar Rp1.178.047.774,00 merupakan penerimaan kembali atas kelebihan pembayaran uang makan, tunjangan dan gaji pegawai pada tahun anggaran sebelumnya yang disetorkan pada tahun 2021. Adapun Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang lalu (Akun 425911) pada lampiran LRA.
- Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang lalu (Akun 425912) sebesar Rp24.898.397.306,00 yang merupakan di antaranya tindak lanjut temuan pemeriksaan BPK dan Inspektorat Jenderal berupa pengembalian honorarium, pengembalian belanja perjalanan dinas, kelebihan pembayaran RDK dan lain sebagainya pada tahun anggaran sebelumnya yang disetorkan pada tahun 2021. Adapun Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang lalu (Akun 425912) terdapat pada lampiran LRA.
- Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang lalu (Akun 425913) sebesar Rp12.202.421.890,00 merupakan penerimaan Kembali atas kelebihan pembayaran belanja modal TAYL atas pekerjaan pembangunan fisik maupun pengadaan belanja modal sebagai hasil temuan dari BPK dan Inspektorat Jenderal pada tahun anggaran sebelumnya yang disetorkan pada tahun 2021. Adapun Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang lalu (Akun 425913) terdapat dalam lampiran LRA.
- Pendapatan Setoran dari Sisa Utang Non TP/TGR Pensiunan PNS (Akun 425931) sebesar Rp413.626.725,00 merupakan pendapatan atas setoran kelebihan pembayaran non TP/TGR PNS yang sudah pensiun terdapat pada satker pusat Sekretariat Jenderal. Atas pendapatan tersebut, estimasinya tidak dibuat dikarenakan bukan merupakan pendapatan



proses bisnis utama Kementerian Hukum dan HAM dan yang bersifat rutin.

- e. Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji (Akun 425991) yang terdapat pada Kanwil Pekanbaru sebesar Rp6.205.300,00 merupakan pendapatan yang berasal dari pengembalian dari uang muka gaji pada pegawai yang mengalami mutasi. Atas pendapatan tersebut, estimasinya tidak dibuat dikarenakan bukan merupakan pendapatan proses bisnis utama Kementerian Hukum dan HAM dan yang bersifat rutin.
- f. Pendapatan Anggaran Lain-lain (Akun 425999) sebesar Rp19.824.898,00 di antaranya adalah pendapatan pengembalian pembulatan belanja pegawai TAYL yang salah menggunakan kode akun pendapatan pada aplikasi GPP dan pengembalian kelebihan setoran TUP a.n Bendahara pengeluaran yang diralat ke akun pendapatan anggaran lain-lain. Adapun Pendapatan Anggaran Lain-lain (Akun 425999) terdapat pada lampiran LRA. Atas pendapatan tersebut, estimasinya tidak dibuat dikarenakan bukan merupakan pendapatan proses bisnis utama Kementerian Hukum dan HAM dan yang bersifat rutin.

Realisasi Belanja B.2. BELANJA

(Netto)

Rp14.252.576.022.500,00

Realisasi Belanja (netto) Kementerian Hukum dan HAM per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp14.252.576.022.500,00 atau 95,82% dari anggaran belanja sebesar Rp14.874.412.483.000,00.

Berikut adalah Tabel Anggaran dan Realisasi Belanja Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian Hukum dan HAM per 31 Desember 2021 menurut sumber dana per jenis belanja.

Tabel 25

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja 31 Desember 2021

Jenis Belanja	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Rupiah Murni			
Belanja Pegawai	6.795.953.504.000,00	6.763.120.763.194,00	99,52
Belanja Barang	4.366.582.768.000,00	4.296.967.596.091,00	98,41
Belanja Modal	1.362.374.962.000,00	1.357.293.694.925,00	99,63
Total DIPA Rupiah Murni	12.524.911.234.000,00	12.417.382.054.210,00	99,14
PNBP			
Belanja Barang	1.720.153.926.000,00	1.399.312.657.620,00	81,35
Belanja Modal	628.317.383.000,00	459.489.157.810,00	73,13
Total DIPA PNBP	2.348.471.309.000,00	1.858.801.815.430,00	79,15



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Catatan Atas Laporan Keuangan – *Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran*
Per 31 Desember Tahun Anggaran 2021 (*Audited*)
Dengan Angka Perbandingan 31 Desember Tahun Anggaran 2020
(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Hibah Langsung dalam Negeri			
Belanja Barang	30.000.000,00	30.000.000,00	100,00
Belanja Modal	999.940.000,00	993.260.600,00	99,33
Total DIPA PNB	1.029.940.000,00	1.023.260.600,00	99,35
Total Belanja Kotor	14.874.412.483.000,00	14.277.207.130.240,00	95,99
Pengembalian Belanja	0	24.631.107.740,00	-
Total Belanja	14.874.412.483.000,00	14.252.576.022.500,00	95,82

Realisasi Belanja Negara per 31 Desember 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp1.853.029.484.414,00 atau sebesar 14,94% dibandingkan 31 Desember 2020. Kenaikan realisasi belanja ini disebabkan antara lain:

- Adanya penerimaan CPNS di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM;
- Adanya percepatan realisasi belanja penanganan pandemi Covid-19 pada satker-satker di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM;
- Adanya kelonggaran aturan pemerintah yang memungkinkan dilaksanakannya kembali sistem *Work From Office* (WFO), perjalanan ke luar daerah, dan kegiatan yang mengumpulkan orang secara langsung dengan tetap menerapkan protokol kesehatan.

Perbandingan Realisasi Belanja Kementerian Hukum dan HAM per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 disajikan pada Tabel berikut:

Tabel 26

Perbandingan Realisasi Belanja Negara 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Uraian	Realisasi	Realisasi	Kenaikan / (Penurunan) %	
	Per 31 Desember 2021	Per 31 Desember 2020		
Belanja Pegawai	6.763.120.763.194,00	6.476.617.560.174,00	286.503.203.020,00	4,42
Belanja Barang	5.696.310.253.711,00	5.016.709.631.026,00	679.600.622.685,00	13,55
Belanja Modal	1.817.776.113.335,00	920.627.628.720,00	897.148.484.615,00	97,45
Total Belanja Kotor	14.277.207.130.240,00	12.413.954.819.920,00	1.863.252.310.320,00	15,01
Pengembalian Belanja	24.631.107.740,00	14.408.281.834,00	10.222.825.906,00	70,95
Total Belanja	14.252.576.022.500,00	12.399.546.538.086,00	1.853.029.484.414,00	14,94



Berikut Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja DIPA Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia per 31 Desember 2021 menurut Organisasi (Unit Eselon I):

Tabel 27
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Menurut Unit Eselon I

No.	Unit	Anggaran	Realisasi	%
1	Sekretariat Jenderal	3.937.085.105.000,00	3.922.254.635.496,00	99,62
2	Inspektorat Jenderal	61.842.998.000,00	59.667.871.551,00	96,48
3	Ditjen AHU	732.043.507.000,00	558.184.252.736,00	76,25
4	Ditjen Pemasyarakatan	6.936.191.089.000,00	6.881.135.088.862,00	99,21
5	Ditjen Imigrasi	2.142.729.477.000,00	1.871.710.865.723,00	87,35
6	Ditjen KI	552.829.468.000,00	456.779.729.539,00	82,63
7	Ditjen PP	42.568.577.000,00	42.008.249.757,00	98,68
8	Ditjen HAM	41.602.621.000,00	40.142.887.562,00	96,49
9	BPHN	104.350.398.000,00	102.121.929.238,00	97,86
10	Balitbang KumHAM	41.989.572.000,00	41.329.160.819,00	98,43
11	BPSDM	281.179.671.000,00	277.241.351.217,00	98,60
Jumlah		14.874.412.483.000,00	14.252.576.022.500,00	95,82

**Realisasi
Belanja
Pegawai
Rp6.762.254.319.598,00**

B.2.1. Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp6.762.254.319.598,00 atau 99,50% dari pagu sebesar Rp6.795.953.504.000,00. Sedangkan Realisasi Belanja Pegawai 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp6.474.614.295.030,00 atau 98,96% dari pagu sebesar Rp6.542.433.545.000,00.

Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara. Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Perbandingan Realisasi Belanja Pegawai Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 disajikan pada Tabel berikut:



Tabel 28

Perbandingan Realisasi Belanja Pegawai Per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

MAP	URAIAN	Realisasi Per 31 Desember 2021	Realisasi Per 31 Desember 2020	Kenaikan/Penurunan	
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	%
5111	Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	3.742.306.419.984,00	3.572.881.751.702,00	169.424.668.282,00	4,74
5122	Belanja Lembur	33.790.092.164,00	30.206.932.081,00	3.583.160.083,00	11,86
5124	Belanja Tunjangan Khusus & Belanja Pegawai Transito	2.987.024.251.046,00	2.873.528.876.391,00	113.495.374.655,00	3,95
JUMLAH BELANJA KOTOR		6.763.120.763.194,00	6.476.617.560.174,00	286.503.203.020,00	4,42
PENGEMBALIAN BELANJA PEGAWAI		866.443.596,00	2.003.265.144,00	(1.136.821.548,00)	(56,75)
JUMLAH BELANJA		6.762.254.319.598,00	6.474.614.295.030,00	287.640.024.568,00	4,44

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa realisasi belanja pegawai per 31 Desember 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp287.640.024.568,00 atau sebesar 4,44% dibandingkan realisasi belanja per 31 Desember 2020. Kenaikan ini terjadi antara lain disebabkan adanya penerimaan CPNS di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM. Selain itu, adanya kelonggaran aturan pemerintah yang memungkinkan dilaksanakannya kembali sistem *Work From Office* (WFO) menyebabkan peningkatan belanja lembur.

Berikut adalah Tabel Realisasi Belanja Pegawai 31 Desember 2021 menurut jenis belanja pegawai:

Tabel 29

Realisasi Anggaran Belanja Pegawai per 31 Desember 2021

Kode	Rincian Belanja	Anggaran (Rp)	Realisasi Bruto (Rp)	Pengembalian (Rp)	Realisasi Neto (Rp)	%
511111	Belanja Gaji Pokok PNS	2.511.651.270.000,00	2.500.657.794.896,00	288.619.638,00	2.500.369.175.258,00	99,55



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Catatan Atas Laporan Keuangan – *Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran*
Per 31 Desember Tahun Anggaran 2021 (*Audited*)
Dengan Angka Perbandingan 31 Desember Tahun Anggaran 2020
(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	57.374.000,00	44.298.597,00	549.158,00	43.749.439,00	76,25
511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	164.660.362.000,00	163.203.841.409,00	47.944.892,00	163.155.896.517,00	99,09
511122	Belanja Tunj. Anak PNS	45.786.059.000,00	45.259.610.348,00	4.162.978,00	45.255.447.370,00	98,84
511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	77.110.222.000,00	76.117.537.720,00	95.326.431,00	76.022.211.289,00	98,59
511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	193.330.331.000,00	191.971.823.504,00	126.594.566,00	191.845.228.938,00	99,23
511125	Belanja Tunj. PPh PNS	4.908.976.000,00	4.288.859.235,00	1.427.795,00	4.287.431.440,00	87,34
511126	Belanja Tunj. Beras	152.088.663.000,00	151.229.036.120,00	11.369.940,00	151.217.666.180,00	99,43
511129	Belanja Uang Makan PNS	579.323.435.000,00	566.829.573.470,00	38.348.824,00	566.791.224.646,00	97,84
511135	Belanja Tunj. Daerah Terpencil PNS	595.469.000,00	558.925.000,00	100.000,00	558.825.000,00	93,85
511138	Belanja Tunj. Khusus Papua PNS	8.317.464.000,00	7.935.500.000,00	1.775.000,00	7.933.725.000,00	95,39
511142	Belanja Tunj. Restitusi Pengobatan PNS (Staff di LN)	200.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511145	Belanja Tunj. Penghidupan LN utk Home Staf PNS	1.179.024.000,00	1.083.094.685,00	0,00	1.083.094.685,00	91,86
511151	Belanja Tunj. Umum PNS	34.317.170.000,00	33.126.525.000,00	145.756.437,00	32.980.768.563,00	96,11
512211	Belanja Uang Lembur	35.353.050.000,00	33.790.092.164,00	16.610.000,00	33.773.482.164,00	95,53
512411	Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan)	2.987.074.635.000,00	2.987.024.251.046,00	87.857.937,00	2.986.936.393.109,00	100,00
Jumlah		6.795.953.504.000,00	6.763.120.763.194,00	866.443.596,00	6.762.254.319.598,00	99,50

Pada Tabel di atas terdapat pengembalian belanja pegawai dengan jumlah Rp866.443.596,00 yang disebabkan di antaranya terbitnya Surat Keputusan bagi PNS yang baru mendapatkan tunjangan fungsional tertentu terdapat pada satuan kerja di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM, kelebihan pembayaran uang makan, pengembalian belanja yang disebabkan telah berhentinya tunjangan suami/istri, dan sebagainya.

Realisasi

Belanja Barang
Rp5.672.894.551
.277,00

B.2.2. Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia per 31 Desember 2021 adalah sebesar



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Catatan Atas Laporan Keuangan – *Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran*
Per 31 Desember Tahun Anggaran 2021 (*Audited*)
Dengan Angka Perbandingan 31 Desember Tahun Anggaran 2020
(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Rp5.672.894.551.277,00 atau 93,20% dari pagu sebesar Rp6.086.766.694.000,00. Sedangkan realisasi Belanja Pegawai 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp5.004.314.364.126,00 atau 87,05% dari pagu sebesar Rp5.749.059.134.000,00.

Belanja barang merupakan pembelian barang dan jasa yang habis pakai untuk memproduksi barang dan jasa menunjang dalam penyelenggaraan pelayanan bagi masyarakat serta pengadaan barang dimaksudkan untuk diserahkan atau dijual kepada masyarakat, dan belanja perjalanan. Belanja terdiri dari belanja pengadaan barang dan jasa, belanja pemeliharaan dan belanja perjalanan.

Perbandingan Realisasi Belanja Barang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 disajikan pada Tabel berikut.

Tabel 30
Perbandingan Realisasi Belanja Barang per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Kode	URAIAN	Realisasi Per 31 Desember 2021	Realisasi Per 31 Desember 2020	Kenaikan/Penurunan	
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	%
5211	Belanja Barang Operasional	2.449.348.494.441,00	2.282.923.477.704,00	166.425.016.737,00	7,29
5212	Belanja Barang Non Operasional	659.780.318.721,00	507.077.981.065,00	152.702.337.656,00	30,11
5218	Belanja Barang Persediaan	536.761.750.053,00	520.083.116.648,00	16.678.633.405,00	3,21
5221	Belanja Jasa	857.278.305.508,00	827.889.034.988,00	29.389.270.520,00	3,55
5231	Belanja Pemeliharaan	522.598.891.214,00	441.822.253.903,00	80.776.637.311,00	18,28
5241	Belanja Perjalanan Dalam Negeri	637.597.717.400,00	412.459.075.641,00	225.138.641.759,00	54,58
5242	Belanja Perjalanan Luar Negeri	32.944.776.374,00	24.454.691.077,00	8.490.085.297,00	34,72
JUMLAH BELANJA KOTOR		5.696.310.253.711,00	5.016.709.631.026,00	679.600.622.685,00	13,55
PENGEMBALIAN BELANJA PEGAWAI		23.415.702.434,00	12.395.266.900,00	11.020.435.534,00	88,91
JUMLAH BELANJA		5.672.894.551.277,00	5.004.314.364.126,00	668.580.187.151,00	13,36

Realisasi Belanja Barang per 31 Desember 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp668.580.187.151,00 atau sebesar 13,36% dibandingkan realisasi per 31 Desember 2020. Kenaikan ini disebabkan antara lain oleh:



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Catatan Atas Laporan Keuangan – *Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran*
Per 31 Desember Tahun Anggaran 2021 (*Audited*)
Dengan Angka Perbandingan 31 Desember Tahun Anggaran 2020
(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- Adanya percepatan realisasi belanja penanganan pandemi Covid-19 pada satker-satker di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM;
- Mulai dicabutnya aturan terkait pembatasan sosial berskala besar sehingga kegiatan dapat dilaksanakan kembali yang berdampak pada meningkatnya penyerapan anggaran belanja.

Rincian Realisasi Anggaran Belanja Barang per 31 Desember 2021 disajikan pada Tabel berikut:

Tabel 31
Rincian Realisasi Anggaran Belanja Barang per 31 Desember 2021

Kode	Rincian Belanja	Anggaran (Rp)	Realisasi Bruto (Rp)	Pengembalian (Rp)	Realisasi Neto (Rp)	%
5211	Belanja Barang Operasional	2.486.799.077.000,00	2.449.348.494.441,00	1.932.978.576,00	2.447.415.515.865,00	98,42
5212	Belanja Barang Non Operasional	762.534.764.000,00	659.780.318.721,00	331.014.384,00	659.449.304.337,00	86,48
5218	Belanja Barang Persediaan	558.990.421.000,00	536.761.750.053,00	14.710.219,00	536.747.039.834,00	96,02
5221	Belanja Jasa	945.123.368.000,00	857.278.305.508,00	1.047.847.416,00	856.230.458.092,00	90,59
5231	Belanja Pemeliharaan	546.137.996.000,00	522.598.891.214,00	226.200.216,00	522.372.690.998,00	95,65
5241	Belanja Perjalanan Dalam Negeri	736.547.094.000,00	637.597.717.400,00	14.783.216.837,00	622.814.500.563,00	84,56
5242	Belanja Perjalanan Luar Negeri	50.504.974.000,00	32.944.776.374,00	5.079.734.786,00	27.865.041.588,00	55,17
5263	Belanja Barang Lainnya Untuk Diserahkan Kepada	129.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah		6.086.766.694.000,00	5.696.310.253.711,00	23.415.702.434,00	5.672.894.551.277,00	93,20

Dalam hal penanganan pandemi Covid-19 Kementerian Hukum dan HAM mengalokasikan belanja barang untuk penanganan pandemi Covid-19 sebesar Rp202.587.170.000,00. Sampai dengan tanggal 31 Desember 2021, realisasi belanja barang untuk penanganan pandemi Covid-19 terserap sebesar Rp177.882.617.015,00 atau sebesar 87,81% dari anggaran dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 32
Rincian Realisasi Belanja Barang Penanganan Pandemi Covid-19 per 31 Desember 2021



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Catatan Atas Laporan Keuangan – *Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran*
Per 31 Desember Tahun Anggaran 2021 (*Audited*)
Dengan Angka Perbandingan 31 Desember Tahun Anggaran 2020
(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Kode	Rincian Belanja	Anggaran (Rp)	Realisasi Bruto (Rp)	Pengembalian (Rp)	Realisasi Neto (Rp)	%
521131	Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi Covid 19	46.807.759.000,00	38.702.172.633,00	0,00	38.702.172.633,00	82,68
521241	Belanja Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi Covid – 19	19.519.032.000,00	17.707.959.411,00	14.868.455,00	17.693.090.956,00	90,65
521841	Belanja Barang Persediaan - Penanganan Pandemi Covid – 19	87.915.616.000,00	86.199.638.449,00	2.000,00	86.199.636.449,00	98,05
522192	Belanja Jasa - Penanganan Pandemi Covid – 19	48.071.493.000,00	35.312.207.683,00	155.216.645,00	35.156.991.038,00	73,13
523114	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan - Penanganan Pandemi Covid – 19	43.170.000,00	30.575.939,00	0,00	30.575.939,00	70,83
524115	Belanja Perjalanan Dinas- Penanganan Pandeni Covid – 19	101.100.000,00	100.150.000,00	0,00	100.150.000,00	99,06
526322	Belanja Barang untuk Bantuan Lainnya untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda dalam Bentuk Barang - Penanganan	129.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Catatan Atas Laporan Keuangan – *Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran*
Per 31 Desember Tahun Anggaran 2021 (*Audited*)
Dengan Angka Perbandingan 31 Desember Tahun Anggaran 2020
(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Pandemi COVID-19					
	Jumlah	202.587.170.000,00	178.052.704.115,00	170.087.100,00	177.882.617.015,00	87,81

Terkait dengan belanja penanganan pandemi Covid-19, masih terdapat beberapa satker yang tidak tepat dalam mengalokasikan atau menggunakan akun-akun khusus penanganan pandemi Covid-19. Daftar satker yang tidak menggunakan akun-akun khusus penanganan pandemi Covid-19 dapat dilihat pada lampiran LRA. Namun demikian, terdapat beberapa ketidaktepatan penggunaan akun belanja yang tidak dapat sepenuhnya dilakukan revisi anggaran dan/atau ralat dokumen realisasi ke akun khusus Covid-19 yang seharusnya, di antaranya disebabkan oleh:

- Revisi tidak dilakukan karena akan berdampak pada pagu minus; dan
- Revisi tidak dilakukan ke akun khusus Covid-19 belanja barang karena pengadaan peralatan dalam rangka penanganan pandemi Covid-19 dalam satu dokumen realisasi belanja barang karena pengadaan aset peralatan dan mesin (SPM/SP2D) menggunakan akun belanja barang.

Rincian pembelian belanja barang operasional - penanganan pandemi Covid-19 (Akun 521131) menurut unit Eselon I adalah sebagai berikut:

Tabel 33
Belanja Barang Operasional – Penanganan Pandemi Covid-19 (Akun 521131)
Menurut Unit Eselon I per 31 Desember 2021

NO	UNIT ESELON I	JUMLAH	RINCIAN BELANJA
1	SEKRETARIAT JENDERAL	3.755.939.506,00	Masker Medis, Vitamin, Masker N95, Desinfektan Botol, Alcohol Wipes, Desinfektan Botol, Susu Bear Brand, Madu, Desinfektan Spray, Multivitamin, sabun cair, penyemprotan disinfektan gedung, sewa paket aplikasi zoom meeting, paket data, handsanitizer
2	INSPEKTORAT JENDERAL	29.258.644,00	Biaya langganan aplikasi video conference
3	DITJEN ADMINISTRASI HUKUM UMUM	760.351.144,00	Penambah daya tahan tubuh, lisensi aplikasi video conference, vitamin, masker, handsanitizer
4	DITJEN PEMASYARAKATAN	4.953.444.612,00	Handsanitizer, masker kain, masker KN95, face shield, sarung tangan, alkohol 70%, hair net box, rapid test box, vitamin, susu, madu, alat-alat



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Catatan Atas Laporan Keuangan – *Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran*
Per 31 Desember Tahun Anggaran 2021 (*Audited*)
Dengan Angka Perbandingan 31 Desember Tahun Anggaran 2020
(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

			dalam rangka penanganan pandemi Covid-19, lisensi Zoom
5	DITJEN IMIGRASI	15.507.903.245,00	Pengadaan vitamin, lisensi Zoom, biaya komunikasi, masker Softies, biaya karantina pegawai yang positif, handsanitizer, tissue, dettol, Susu Bear Brand, Vita Long C, masker duckbill, masker KN 95, sabun cuci tangan, madu, tissue basah, paket data, sensor kran air, suplemen, bahan disinfektan, imboost, enervon C, tensi, termometer, stetoskop, CDR, antigen kit, EA mask antivirus, masker sensi, susu, obat-obatan
6	DITJEN HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL	6.163.056.582,00	Masker, Redoxon, Vitamin, penyemprotan disinfektan di gedung kantor, multivitamin, susu Bear Brand, Faceshield, pekerjaan sterilisasi peralatan kantor, alkohol pembersih, pembelian bahan penyemprotan, madu, masker evoplus med, handsanitizer, antivirus, minyak angin, lisensi aplikasi video conference
7	DITJEN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	278.218.880,00	Rhea Health Tone, Blackmores, Ester C, lisensi Zoom, Masker Softies, sarung tangan latex, EA Mask Antivirus, Face Shield
8	DITJEN HAK ASASI MANUSIA	292.941.678,00	Masker sensi, Masker bagus, sarung tangan latex ukuran L dan M, handsanitizer, disinfektan spray, botol handsanitizer, vitamin, masker serbaguna, handsanitizer gel, tussy facial, glass cleaner, enervon C, sarung tangan karet, sarung tangan lifeguard
9	BADAN PEMBIAAN HUKUM NASIONAL	552.549.312,00	Biaya sewa langganan lisensi aplikasi Zoom, Thermometer infrared, Pembelian Obat-Obatan, Alkohol 70 %, Semprotan, Suction Chamber, Becom.C-Box 100 Tab, XYZ Desinfektan UK 5 Liter, Zeviton, Natur E 16
10	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN HAM	1.268.904.928,00	Lisensi Zoom, Wellness Omega-3, Natural Factors, Nutriwell Vitamin, Betadine Mouthwash, masker, pembelian pulsa/paket data pegawai bulanan, cairan disinfektan, handsanitizer, APD
11	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA	5.139.604.102,00	Paket data, masker sensi convex, masker duckbill, handsoap, masker KN-95, lisensi Zoom, obat, vitamin, termometer lotus 85, renovit, masker kesehatan, Baju Anti Virus (APD), Sarung Tangan Latex, Penutup Rambut, Sepatu Boot, Bracket Handsanitizer Stainless
TOTAL		38.702.172.633,00	



Rincian pembelian belanja barang operasional-penanganan pandemi Covid-19 (Akun 521131) tiap satuan kerja terdapat pada lampiran LRA.

Rincian pembelian Belanja Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi Covid-19 (Akun 521241) menurut unit Eselon I sebagai berikut:

Tabel 34
Belanja Barang Non Operasional – Penanganan Pandemi Covid-19 (Akun 521241)
Menurut Unit Eselon I per 31 Desember 2021

NO	UNIT ESELON I	JUMLAH	RINCIAN BELANJA
1	SEKRETARIAT JENDERAL	2.668.944.887,00	Alat rapid test, pulsa telepon / paket data, masker, multivitamin, handsanitizer, faceshield, sarung tangan, sabun, alat pencegahan Covid-19
2	INSPEKTORAT JENDERAL	809.228.593,00	Masker, face shield, vitamin C, alat rapid test antigen, minyak kayu putih
3	DITJEN ADMINISTRASI HUKUM UMUM	850.762.714,00	Handsanitizer, alat pencegahan pandemi Covid-19
4	DITJEN PEMASYARAKATAN	6.373.976.547,00	Biaya komunikasi, paket data, disinfektan, handsanitizer, rapid test, alat penanganan pandemi Covid-19
5	DITJEN IMIGRASI	380.483.800,00	Alat rapid antigen, swab PCR, paket data, pulsa
6	DITJEN HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL	1.129.942.222,00	Paket data, alat rapid test antigen, biaya komunikasi
7	DITJEN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	73.219.218,00	Biaya komunikasi, paket data, masker, vitamin
8	DITJEN HAK ASASI MANUSIA	187.791.000,00	Biaya rapid test antigen, biaya komunikasi
9	BADAN PEMBIAAN HUKUM NASIONAL	35.339.280,00	Biaya komunikasi, paket data, masker, vitamin
10	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN HAM	947.511.267,00	Biaya komunikasi, biaya rapid test, paket data, lisensi aplikasi video conference, pulsa kegiatan, biaya swab antigen
11	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA	4.235.891.428,00	Pulsa internet, lisensi Zoom, biaya komunikasi, rapid test, thermogun, swab PCR, wastafel, faceshield, handsanitizer, biaya komunikasi



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Catatan Atas Laporan Keuangan – *Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran*
Per 31 Desember Tahun Anggaran 2021 (*Audited*)
Dengan Angka Perbandingan 31 Desember Tahun Anggaran 2020
(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

TOTAL	17.693.090.956,00

Rincian pembelian belanja barang non operasional - penanganan pandemi Covid-19 (Akun 521241) tiap satuan kerja terdapat pada lampiran LRA.

Rincian pembelian Belanja Barang Persediaan - Penanganan Pandemi Covid-19 (Akun 521841) menurut unit Eselon I sebagai berikut:

Tabel 35
Belanja Barang Persediaan – Penanganan Pandemi Covid-19 (Akun 521841)
Menurut Unit Eselon I per 31 Desember 2021

NO	UNIT ESELON I	JUMLAH	RINCIAN BELANJA
1	SEKRETARIAT JENDERAL	6.764.089.355,00	Handsantizer, Sarung Tangan Medis, Masker, Hand Sanitizer, Disinfektan, Sabun Cuci Tangan, Tisu yang diniatkan sebagai persediaan
2	INSPEKTORAT JENDERAL	60.141.000,00	Minyak kayu putih dan multivitamin yang diniatkan sebagai persediaan
3	DITJEN ADMINISTRASI HUKUM UMUM	3.717.688.498,00	Handsantizer, masker, disinfektan, sabun, susu, multivitamin, antiseptik, faceshield, masker bedah, masker sensi yang diniatkan sebagai persediaan
4	DITJEN PEMASYARAKATAN	71.099.110.389,00	Handsantizer, Cairan Desinfektan, sarung Tangan Medis, Masker, sabun cuci tangan, face shield, pembelian alkohol, masker kain, sarung tangan plastik, vitamin, pembelian APD, Pembelian plastik limbah medis dan suplemen yang diniatkan sebagai persediaan
5	DITJEN IMIGRASI	3.519.358.255,00	Masker medis, handsantizer, masker sensi, disinfektan, sarung tangan, antiseptik, suplemen kesehatan, madu, susu, sabun, face mask, vitamin, faceshield yang diniatkan sebagai persediaan
6	DITJEN HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL	54.682.000,00	Vitamin, Masker, Handsantizer, dan Disinfectan Spray yang diniatkan sebagai persediaan
7	DITJEN HAK ASASI MANUSIA	142.913.000,00	Handsantizer, redoxon, dettol, minyak kayu putih, madu yang diniatkan sebagai persediaan
8	BADAN PEMBIAAN HUKUM NASIONAL	43.550.390,00	Handsantizer, masker yang diniatkan sebagai persediaan
9	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN HAM	355.435.075,00	Masker medis, masker hijab, handsantizer, tissue, cairan disinfektan, sabun yang diniatkan sebagai persediaan



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Catatan Atas Laporan Keuangan – *Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran*
Per 31 Desember Tahun Anggaran 2021 (*Audited*)
Dengan Angka Perbandingan 31 Desember Tahun Anggaran 2020
(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

10	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA	442.668.487,00	Masker KN-95, madu, multivitamin, handsanitizer, disinfektan, sarung tangan, masker, dan peralatan penanganan Covid-19 yang diniatkan sebagai persediaan
TOTAL		86.199.636.449,00	

Rincian pembelian belanja barang persediaan - penanganan pandemi Covid-19 (Akun 521841) tiap satuan kerja terdapat pada lampiran LRA.

Rincian pembelian Belanja Jasa - Penanganan Pandemi Covid-19 (Akun 522192) menurut unit Eselon I sebagai berikut:

Tabel 36
Belanja Barang Jasa – Penanganan Pandemi Covid-19 (Akun 522192)
Menurut Unit Eselon I per 31 Desember 2021

NO	UNIT ESELON I	JUMLAH	RINCIAN BELANJA
1	SEKRETARIAT JENDERAL	5.453.334.627,00	Biaya rapid test antigen dan swab PCR
2	INSPEKTORAT JENDERAL	1.214.865.302,00	Biaya Jasa Rapid Antigen dan PCR test
3	DITJEN ADMINISTRASI HUKUM UMUM	9.337.889.098,00	Biaya rapid test antigen dan swab PCR di antaranya dalam rangka perjalanan dinas
4	DITJEN PEMASYARAKATAN	2.384.157.122,00	Biaya rapid test antigen dan swab PCR
5	DITJEN IMIGRASI	10.048.857.416,00	Pemeriksaan rapid test antigen pegawai, test PCR, di antaranya terkait dengan perjalanan dinas, dan penyemprotan disinfektan
6	DITJEN HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL	4.671.175.394,00	Biaya swab antigen, test PCR, genose, honor narasumber kegiatan sosialisasi
7	DITJEN PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN	102.614.122,00	Biaya swab antigen pegawai
8	DITJEN HAK ASASI MANUSIA	267.685.000,00	Biaya rapid test antigen dan swab PCR
9	BADAN PEMBIAAN HUKUM NASIONAL	604.932.077,00	Biaya swab test antigen
10	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN HAM	448.855.680,00	Jasa swab antigen dan PCR perjalanan dinas



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Catatan Atas Laporan Keuangan – *Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran*
Per 31 Desember Tahun Anggaran 2021 (*Audited*)
Dengan Angka Perbandingan 31 Desember Tahun Anggaran 2020
(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

11	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA	622.625.200,00	Rapid test antigen dan swab PCR terkait perjalanan dinas dan kegiatan
TOTAL		35.156.991.038,00	

Rincian pembelian belanja jasa - penanganan pandemi Covid-19 (Akun 522192) tiap satuan kerja terdapat pada lampiran LRA.

Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan - Penanganan Pandemi Covid – 19 terdapat pada Balai Harta Peninggalan Semarang senilai Rp1.500.000,00 atas pembuatan Acrylic physical distancing ruangan kantor, Rutan Sidikalang sebesar Rp5.000.000,00, Kanim Tembilahan sebesar Rp1.890.000,00, Kanim Cianjur sebesar Rp2.700.000,00, dan Perwakilan Imigrasi di Penang sebesar Rp19.485.939,00 atas pengadaan tempat cuci tangan portable/permanen yang nilainya tidak memenuhi kapitalisasi Peralatan dan Mesin dan tidak dipergunakan sebagai bahan pendukung suatu kegiatan.

Belanja Perjalanan Dinas - Penanganan Pandemi Covid-19 direalisasikan pada Sekretariat Jenderal sebesar Rp81.900.000,00 terkait biaya transportasi untuk *Working in Office*, dan direalisasikan sebagai uang transport medis pada Kanwil Surabaya senilai Rp9.750.000,00, Bapas Bekasi sebesar Rp5.800.000,00, dan BPSDM sebesar Rp2.700.000,00.

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Barang Operasional disajikan pada tabel berikut.

Tabel 37
Rincian Realisasi Anggaran Belanja Barang Operasional per 31 Desember 2021

Kode	Rincian Belanja	Anggaran (Rp)	Realisasi Bruto (Rp)	Pengembalian (Rp)	Realisasi Neto (Rp)	%
521111	Belanja Keperluan Perkantoran	293.782.260.000,00	283.984.323.249,00	516.530.500,00	283.467.792.749,00	96,49
521112	Belanja Pengadaan BaMa	1.906.249.297.000,00	1.896.960.534.541,00	1.362.979.559,00	1.895.597.554.982,00	99,44
521113	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	40.309.443.000,00	36.130.073.551,00	2.902.800,00	36.127.170.751,00	89,62
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	6.249.076.000,00	4.834.727.131,00	395.700,00	4.834.331.431,00	77,36
521115	Belanja Honor Operasional Satker	101.859.042.000,00	100.038.606.813,00	7.688.577,00	100.030.918.236,00	98,21



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Catatan Atas Laporan Keuangan – *Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran*
Per 31 Desember Tahun Anggaran 2021 (*Audited*)
Dengan Angka Perbandingan 31 Desember Tahun Anggaran 2020
(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	91.542.200.000,00	88.698.056.523,00	42.481.440,00	88.655.575.083,00	96,85
521131	Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi Covid 19	46.807.759.000,00	38.702.172.633,00	0,00	38.702.172.633,00	82,68
Jumlah		2.486.799.077.000,00	2.449.348.494.441,00	1.932.978.576,00	2.447.415.515.865,00	98,42

Terdapat pengembalian belanja barang operasional sebesar Rp1.932.978.576,00 di antaranya terdiri dari:

1. Kanwil Palembang Rp90.800.000,00, Ditjen AHU Rp423.000.000,00, Rutan Mamuju Rp1.720.500,00, Lapas Salemba Rp80.000,00, Kanim Takengon Rp920.000,00, dan Kanim Bau Bau Rp10.000,00 yang merupakan belanja keperluan perkantoran.
2. Pengembalian belanja pengadaan bama sebesar Rp1.362.979.559,00 di antaranya disebabkan karena kesalahan perhitungan jumlah narapidana dan jumlah hari dalam pengajuan pembayaran. Rincian pengembalian belanja pengadaan bama berdasarkan satuan kerja terdapat dalam Lampiran LRA.
3. Pengembalian belanja penambah daya tahan tubuh sebesar Rp1.300.000,00 terdapat pada Rutan Mamuju dan Rudenim Denpasar sebesar Rp1.602.800,00.
4. Pengembalian belanja pengiriman surat dinas pos pusat sebesar Rp395.000,00 terdapat Kanim Takengon dan Rp700,00 terdapat di Rutan Labuhan Deli.
5. Pengembalian belanja honor operasional satker terdapat pada Lapas Pangkalan Bun Rp150.000,00, Lapas Perempuan Palangkaraya Rp30.000,00, Bapas Batu Licin Rp79.577,00, Kanim Balikpapan Rp3.933.000,00, dan Direktorat Jenderal Imigrasi Rp3.496.000,00.
6. Pengembalian atas kelebihan belanja barang operasional lainnya terdapat pada Lapas Tarakan Rp3.000.000,00, Ditjen Kekayaan Intelektual Rp34.756.440,00, dan Politeknik Imigrasi Rp4.725.000,00.

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Barang Non Operasional disajikan pada tabel berikut:

Tabel 38

Rincian Realisasi Anggaran Belanja Barang Non Operasional per 31 Desember 2021

Kode	Rincian Belanja	Anggaran (Rp)	Realisasi Bruto (Rp)	Pngembalian (Rp)	Realisasi Neto (Rp)	%
521211	Belanja Bahan	295.658.491.000,00	253.659.773.116,00	34.531.315,00	253.625.241.801,00	85,78%



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Catatan Atas Laporan Keuangan – *Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran*
Per 31 Desember Tahun Anggaran 2021 (*Audited*)
Dengan Angka Perbandingan 31 Desember Tahun Anggaran 2020
(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

521213	Belanja Honor Output Kegiatan	59.449.838.000,00	51.267.182.996,00	152.451.500,00	51.114.731.496,00	85,98%
521214	Belanja Rugi Selisih Kurs UP Satker Perwakilan LN	274.185.000,00	117.935.499,00	0,00	117.935.499,00	43,01%
521219	Belanja Barang Non Operasional	387.633.218.000,00	337.027.467.699,00	129.163.114,00	336.898.304.585,00	86,91%
521241	Belanja Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi Covid-19	19.519.032.000,00	17.707.959.411,00	14.868.455,00	17.693.090.956,00	90,65%
Jumlah		762.534.764.000,00	659.780.318.721,00	331.014.384,00	659.449.304.337,00	86,48

Pada tabel di atas terdapat pengembalian belanja barang non operasional sebesar Rp331.014.384,00 di antaranya terdiri dari:

1. Kanwil Palembang Rp8.600.000,00, Kanwil Maluku Utara Rp11.500,00, Lapas Malang Rp4.193.000,00, Rutan Labuhan Deli Rp796.000,00, Lapas Banjarmasin Rp1.347.500,00, Rutan Mamuju Rp750.000,00, Lapas Karangasem Rp195.000,00, Lapas Terbuka Kendal Rp2.465,00, Lapas Narkotika Martapura Rp12.013.450,00, Kanim Lhokseumawe Rp5.501.300,00, Kanwil Surabaya Rp1.500,00, Kanim Tanjung Priok Rp500.000,00, Kanwil Kepri Rp578.600,00, dan Politeknik Imigrasi Rp41.000,00 yang di antaranya merupakan pengembalian atas belanja bahan atas pengembalian penggandaan dan penjiilidan.
2. Sekretariat Jenderal Rp3.797.000,00, Kanwil Jambi Rp3.900.000,00, Kanwil Jawa Tengah Rp4.700.000,00, Kanwil Surabaya Rp12.980.000,00, Kanwil Ambon Rp5.700.000,00, Ditjen AHU Rp102.585.000,00, Kanwil Maluku Utara Rp2.932.500,00, Lapas Sumedang Rp1.360.000,00, Rutan Boyolali Rp1.520.000,00, Lapas Kuala Simpang Rp280.000,00, Rutan Negara Rp1.292.000,00, Lapas Narkotika Martapura Rp500.000,00, Lapas Pahuwato Rp1.425.000,00, Kanim Pematang Siantar Rp1.725.000,00, Kanwil Surabaya Rp650.000,00, Ditjen Imigrasi Rp2.550.000,00, Kanwil Jakarta Raya Rp150.000,00, Kanwil Gorontalo Rp285.000,00, Kanwil Kepri Rp600.000,00, Politeknik Imigrasi Rp1.140.000,00, dan Politeknik Ilmu Pemasarakatan Rp2.380.000,00 berupa pengembalian belanja honor output kegiatan yang di antaranya disebabkan karena ketidakhadiran narasumber.
3. Rutan Mamuju Rp530.000,00, Kanim Kelas II TPI Lhokseumawe Rp916.000,00, Kanim Batam Rp150.000,00, Kanim Belawan Rp3.575.000,00, Ditjen Imigrasi Rp64.674.626,00, Kanim Pemalang Rp2.370.370,00, Kanim Tual Rp7.820.000,00, Rudenim Pekanbaru Rp792.000,00,



Ditjen Kekayaan Intelektual Rp9.740.118,00, Kanwil Samarinda Rp3.000.000,00, dan Politeknik Imigrasi Rp35.595.000,00 berupa pengembalian belanja barang non operasional lainnya yang di antaranya berupa pengembalian biaya pengadaan jasa EO.

4. BPSDM Rp14.489.855,00 dan Politeknik Imigrasi Rp378.600,00 berupa pengembalian atas belanja non operasional – penanganan pandemi Covid-19.

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Barang Persediaan disajikan pada tabel berikut:

Tabel 39
Rincian Realisasi Anggaran Belanja Barang Persediaan per 31 Desember 2021

Kode	Rincian Belanja	Anggaran (Rp)	Realisasi Bruto (Rp)	Pengembalian (Rp)	Realisasi Netto (Rp)	%
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	465.985.992.000,00	445.510.393.400,00	14.708.219,00	445.495.685.181,00	95,60
521832	Belanja Barang Persediaan Lainnya	5.088.813.000,00	5.051.718.204,00	0,00	5.051.718.204,00	99,27
521841	Belanja Barang Persediaan - Penanganan Pandemi Covid-19	87.915.616.000,00	86.199.638.449,00	2.000,00	86.199.636.449,00	98,05
Jumlah		558.990.421.000,00	536.761.750.053,00	14.710.219,00	536.747.039.834,00	96,02

Terdapat pengembalian belanja barang persediaan Barang Konsumsi (Akun 521811) Lapas Sintang sebesar Rp1.600.000,00, Rutan Mamuju Rp7.718.000,00, Perwakilan Imigrasi di Sidney Rp5.117.019,00, Kanim Belawan Rp263.200,00, dan Kanim Takengon Rp1.000.000,00. Sementara itu, pada Bapas Pekanbaru terdapat pengembalian belanja barang persediaan barang konsumsi dengan saldo debit sebesar Rp990.000,00 yang merupakan kesalahan dalam penginputan program sehingga terjadi pengembalian belanja.

Terdapat pengembalian belanja barang persediaan – penanganan pandemi Covid-19 (Akun 521841) pada Kanim Kelas I TPI Denpasar sebesar Rp2.000,00.

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Jasa disajikan pada tabel berikut:



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Catatan Atas Laporan Keuangan – *Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran*
Per 31 Desember Tahun Anggaran 2021 (*Audited*)
Dengan Angka Perbandingan 31 Desember Tahun Anggaran 2020
(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Tabel 40
Rincian Realisasi Anggaran Belanja Jasa per 31 Desember 2021

Kode	Rincian Belanja	Anggaran (Rp)	Realisasi Bruto (Rp)	Pengembalian (Rp)	Realisasi Neto (Rp)	%
522111	Belanja Langganan Listrik	186.679.182.000,00	178.483.324.562,00	23.298.675,00	178.460.025.887,00	95,60
522112	Belanja Langganan Telepon	7.724.730.000,00	5.981.539.754,00	6.146.090,00	5.975.393.664,00	77,35
522113	Belanja Langganan Air	19.898.356.000,00	17.602.042.514,00	1.136.046,00	17.600.906.468,00	88,45
522119	Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya	70.804.585.000,00	70.306.235.770,00	0,00	70.306.235.770,00	99,30
522121	Belanja Jasa Pos dan Giro	18.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
522131	Belanja Jasa Konsultan	16.756.510.000,00	13.035.747.058,00	0,00	13.035.747.058,00	77,80
522141	Belanja Sewa	367.952.964.000,00	334.869.548.099,00	66.707,00	334.869.481.392,00	91,01
522151	Belanja Jasa Profesi	74.838.697.000,00	66.796.108.592,00	412.637.253,00	66.383.471.339,00	88,70
522191	Belanja Jasa Lainnya	152.378.851.000,00	134.891.551.476,00	449.346.000,00	134.442.205.476,00	88,23
522192	Belanja Jasa - Penanganan Pandemi Covid-19	48.071.493.000,00	35.312.207.683,00	155.216.645,00	35.156.991.038,00	73,13
Jumlah		945.123.368.000,00	857.278.305.508,00	1.047.847.416,00	856.230.458.092,00	90,59

Pengembalian belanja jasa per 31 Desember 2021 di antaranya terdapat pada:

- Rutan Tanjung Redep sebesar Rp17.083.578,00 dan Rutan Mamuju sebesar Rp6.215.097,00 berupa pengembalian belanja langganan listrik;
- Rutan Labuhan Deli sebesar Rp3.090,00, Rudenim Semarang sebesar Rp10.000,00, dan Kanim Takengon sebesar Rp6.133.000,00 berupa pengembalian belanja langganan telepon;
- Rutan Labuhan Deli sebesar Rp920,00, Kanim Takengon sebesar Rp466.626,00, dan Kanim Putussibau sebesar Rp668.500,00 berupa pengembalian belanja langganan air;
- Kanwil Palembang sebesar Rp66.707,00 berupa pengembalian belanja sewa;
- Pengembalian belanja jasa profesi yang disebabkan di antaranya karena ketidakhadiran narasumber, terdapat pada Sekretariat Jenderal sebesar Rp5.170.000,00, Inspektorat Jenderal Rp255.000,00, BHP Semarang Rp4.200.000,00, Kanwil Ambon Rp1.710.000,00, Kanwil Maluku Utara Rp7.990.000,00, Kanim Sorong Rp900.000,00, Kanim Tanjung Priok Rp5.425.000,00, Kanim Belawan Rp3.825.000,00, Ditjen Imigrasi Rp17.730.000,00, Kanwil Jakarta Raya Rp3.000.000,00, Ditjen HAM Rp3.020.000,00, Kanwil Palembang Rp413.300,00, Kanwil Jayapura Rp1.700.000,00, BPHN Rp23.130.000,00,



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Catatan Atas Laporan Keuangan – *Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran*
Per 31 Desember Tahun Anggaran 2021 (*Audited*)
Dengan Angka Perbandingan 31 Desember Tahun Anggaran 2020
(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

BPSDM Rp332.013.953,00, dan Politeknik Imigrasi Rp2.155.000,00;

- Ditjen AHU sebesar Rp448.896.000,00 dan Kanim Lhokseumawe sebesar Rp450.000,00 berupa pengembalian belanja jasa lainnya; dan
- BHP Ujung Pandang Rp1.109.800,00, Ditjen AHU Rp8.000.000,00, Kanim Mataram Rp6.747.900,00, Kanim Batam Rp120.000,00, Ditjen Imigrasi Rp126.179.945,00, Kanwil Ambon Rp4.040.000,00, BPHN Rp5.347.000,00, Kanwil Banjarmasin Rp9.000,00, dan BPSDM Rp3.663.000,00 berupa pengembalian belanja jasa – penanganan pandemi Covid-19.

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Pemeliharaan disajikan pada tabel berikut.

Tabel 41
Rincian Realisasi Anggaran Belanja Pemeliharaan per 31 Desember 2021

Kode	Rincian Belanja	Anggaran (Rp)	Realisasi Bruto (Rp)	Pengembalian (Rp)	Realisasi Neto (Rp)	%
523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	227.386.756.000,00	223.916.057.215,00	99.209.871,00	223.816.847.344,00	98,43
523112	Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	9.314.677.000,00	8.840.363.773,00	0,00	8.840.363.773,00	94,91
523114	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan -Penanganan Pandemi Covid-19	43.170.000,00	30.575.939,00	0,00	30.575.939,00	70,83
523119	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	1.192.979.000,00	1.192.822.530,00	0,00	1.192.822.530,00	99,99
523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	304.338.954.000,00	285.121.907.645,00	124.990.345,00	284.996.917.300,00	93,64
523123	Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	2.603.337.000,00	2.265.584.263,00	0,00	2.265.584.263,00	87,03
523124	Belanja Asuransi Alat Angkutan Darat/Apung/Udara Bermotor	87.600.000,00	75.163.486,00	0,00	75.163.486,00	85,80
523199	Belanja Pemeliharaan Lainnya	1.170.523.000,00	1.156.416.363,00	2.000.000,00	1.154.416.363,00	98,62
Jumlah		546.137.996.000,00	522.598.891.214,00	226.200.216,00	522.372.690.998,00	95,65

Berdasarkan tabel di atas, terdapat pengembalian belanja sebagai berikut:



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Catatan Atas Laporan Keuangan – *Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran*
Per 31 Desember Tahun Anggaran 2021 (*Audited*)
Dengan Angka Perbandingan 31 Desember Tahun Anggaran 2020
(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

- Kanwil Kupang Rp6.047.045,00, Ditjen AHU Rp11.574.000,00, Lapas Kerobokan Rp1.142.500,00, Rutan Manna Rp150.000,00, Kanim Cilacap Rp11.855.527,00, Kanim Surabaya Rp1.108.069,00, Kanim Pematang Siantar Rp4.385.700,00, Kanim Kupang Rp611.363,00, Kanim Pemalang Rp3.550.194,00, Kanim Blitar Rp2.047.000,00, Kanim Tobelo Rp50.000.000,00, Kanim Takengon Rp2.860.000,00, dan Kanim Labuan Bajo Rp3.878.473,00 berupa pengembalian belanja pemeliharaan gedung dan bangunan;
- Kanwil Surabaya Rp30.870.560,00, Kanwil Banjarmasin Rp6.500.000,00, Kanwil Kupang Rp4.924.852,00, Rutan Labuhan Deli Rp85.000,00, Rutan Mamuju Rp366.403,00, Kanim Jakarta Selatan Rp70.666.200,00, Kanim Kupang Rp1.466.667,00, Kanim Takengon Rp6.191.163,00, dan Politeknik Imigrasi Rp3.919.500,00 berupa pengembalian belanja pemeliharaan peralatan dan mesin.
- Kanim Depok sebesar Rp2.000.000,00 berupa pengembalian belanja pemeliharaan lainnya.

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Perjalanan Dalam Negeri disajikan pada tabel berikut:

Tabel 42
Rincian Realisasi Anggaran Belanja Perjalanan Dalam Negeri per 31 Desember 2021

Kode	Rincian Belanja	Anggaran (Rp)	Realisasi Bruto (Rp)	Pengembalian (Rp)	Realisasi Netto (Rp)	%
524111	Belanja Perjalanan Biasa	443.651.089.000,00	386.699.474.973,00	7.361.910.286,00	379.337.564.687,00	85,50
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	96.080.638.000,00	81.039.712.586,00	133.122.720,00	80.906.589.866,00	84,21
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	67.746.128.000,00	62.025.111.132,00	919.344.921,00	61.105.766.211,00	90,20
524115	Belanja Perjalanan Dinas- Penanganan Pandemi Covid-19	101.100.000,00	100.150.000,00	0,00	100.150.000,00	99,06
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	128.968.139.000,00	107.733.268.709,00	6.368.838.910,00	101.364.429.799,00	78,60
Jumlah		736.547.094.000,00	637.597.717.400,00	14.783.216.837,00	622.814.500.563,00	84,56

Pada tabel di atas terdapat pengembalian belanja perjalanan dalam negeri sebesar Rp14.783.216.837,00 dengan rincian sebagai berikut:



- Pengembalian Belanja Perjalanan Biasa (Akun 524111) sebesar Rp7.361.910.286,00 merupakan pengembalian belanja perjalanan dinas yang di antaranya disebabkan adanya perbedaan nilai riil (selisih harga hotel dan tiket) pelaksanaan kegiatan perjalanan dinas karena pengajuan belanja perjalanan dinas melalui pembayaran LS di muka. Adapun Pengembalian Belanja Perjalanan Biasa (Akun 524111) terdapat pada lampiran LRA;
- Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (Akun 524113) sebesar Rp133.122.720,00 terdapat pada Inspektorat Jenderal sebesar Rp29.745.000,00, Kanwil Palembang Rp1.350.000,00, Ditjen AHU Rp85.317.720,00, Rutan Mamuju Rp300.000,00, Kanwil Mataram Rp750.000,00, Kanwil Maluku Utara Rp450.000,00, Kanim Pematang Siantar Rp1.050.000,00, Kanwil Palembang Rp300.000,00, Kanim Blitar Rp2.400.000,00, Kanwil Surabaya Rp7.500.000,00, Kanwil Tanjung Karang Rp150.000,00, Kanwil Banjarmasin Rp600.000,00, Kanwil Palu Rp1.050.000,00, Balitbang Hukum dan HAM Rp210.000,00, dan BPSDM Rp1.950.000,00 yang disebabkan perbedaan nilai riil pelaksanaan kegiatan perjalanan dinas dalam kota dan pengajuan belanja perjalanan dinas melalui pembayaran LS di muka;
- Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota (Akun 524114) sebesar Rp919.344.921,00 terdapat pada BHP Ujung Pandang Rp1.800.000,00, Kanwil Palembang Rp3.420.000,00, Ditjen AHU Rp583.255.958,00, Kanwil Maluku Utara Rp990.000,00, Ditjen Pemasarakatan Rp113.900.522,00, Ditjen Imigrasi Rp197.905.441,00, Ditjen KI Rp60.000,00, Kanwil Jakarta Raya Rp4.260.000,00, Kanwil Tanjung Karang Rp1.470.000,00, Ditjen HAM Rp860.000,00, dan BPHN Rp11.423.000,00 yang di antaranya disebabkan adanya pembatalan perjalanan dinas paket meeting dalam kota yang telah diajukan melalui pembayaran LS di muka; dan
- Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota (Akun 524119) sebesar Rp6.368.838.910,00 terdapat pada Sekretariat Jenderal Rp1.800.000,00, Inspektorat Jenderal Rp176.835.163,00, BHP Semarang Rp58.753.352,00, Kanwil Surabaya Rp7.269.740,00, Ditjen AHU Rp5.448.978.193,00, Kanwil Maluku Utara Rp4.320.000,00, Ditjen Pemasarakatan Rp900.000,00, Kanwil Jakarta Raya Rp1.500.000,00, Ditjen Imigrasi Rp545.873.652,00, Ditjen KI Rp102.832.610,00, Kanwil Samarinda Rp430.000,00, Kanwil Jayapura Rp150.000,00, Ditjen HAM Rp1.144.000,00, BPHN



Rp2.050.000,00, dan BPSDM Rp16.002.200,00 yang di antaranya disebabkan adanya pembatalan perjalanan dinas paket meeting luar kota yang telah diajukan melalui pembayaran LS di muka.

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Perjalanan Luar Negeri disajikan pada tabel berikut:

Tabel 43
Rincian Realisasi Anggaran Belanja Perjalanan Luar Negeri per 31 Desember 2021

Kode	Rincian Belanja	Anggaran (Rp)	Realisasi Bruto (Rp)	Pengembalian (Rp)	Realisasi Neto (Rp)	%
524211	Belanja Perjalanan Biasa - Luar Negeri	25.359.907.000,00	14.143.499.425,00	3.755.638.606,00	10.387.860.819,00	40,96
524219	Belanja Perjalanan Lainnya - Luar Negeri	25.145.067.000,00	18.801.276.949,00	1.324.096.180,00	17.477.180.769,00	69,51
Jumlah		50.504.974.000,00	32.944.776.374,00	5.079.734.786,00	27.865.041.588,00	55,17

Realisasi perjalanan dinas per 31 Desember 2021 baru mencapai 55,17% dari anggaran di antaranya karena masih adanya pandemi Covid-19 selama tahun 2021, terlebih kasus baru Covid-19 semakin meningkat di penghujung Semester I TA 2021. Hal tersebut menyebabkan ditutupnya akses ke beberapa negara dan pembatasan bagi masyarakat untuk melakukan perjalanan ke luar negeri, sehingga mengakibatkan penurunan belanja perjalanan dinas luar negeri.

Pada tabel di atas terdapat pengembalian belanja perjalanan dalam negeri sebesar Rp5.079.734.786,00 dengan rincian sebagai berikut:

- Pengembalian Belanja Perjalanan Biasa – Luar Negeri (Akun 524211) yang terdapat pada Ditjen AHU sebesar Rp3.621.588.862,00 dan Ditjen Imigrasi sebesar Rp134.049.744,00 di antaranya disebabkan adanya pembatalan perjalanan dinas luar negeri berkenaan dengan meningkatnya penyebaran wabah Covid-19 sedangkan pengajuan perjalan telah dilakukan dengan metode pembayaran LS di muka;
- Pengembalian Belanja Perjalanan Lainnya – Luar Negeri (Akun 524219) yang terdapat pada Ditjen Imigrasi sebesar Rp1.324.096.180,00 di antaranya disebabkan adanya pembatalan perjalanan dinas luar negeri berkenaan dengan meningkatnya penyebaran wabah Covid-19 sedangkan pengajuan perjalan telah dilakukan dengan metode pembayaran LS di muka.



Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Barang Lainnya untuk diserahkan kepada Masyarakat/Pemda disajikan pada tabel berikut:

Tabel 44
Rincian Realisasi Anggaran Belanja Barang Lainnya untuk diserahkan kepada Masyarakat/Pemda

Kode	Rincian Belanja	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
526322	Belanja Barang untuk Bantuan Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda dalam bentuk barang - Penanganan Pandemi COVID-19	129.000.000,00	0,00	0,00
Jumlah		129.000.000,00	0,00	0,00

Anggaran Belanja Barang untuk Bantuan Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda dalam bentuk barang - Penanganan Pandemi Covid-19 (Akun 526322) pada BPSDM sebesar Rp129.000.000,00 yang sampai dengan 31 Desember 2021 belum dilakukan revisi dikarenakan sudah tidak bisa diajukan pengajuan proses revisi pagu. Namun demikian tidak terdapat realiasi belanja dengan menggunakan akun tersebut.

Realisasi Belanja B.3. Belanja Modal
Modal
Rp1.817.427.151.625,00

Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Realisasi Belanja Modal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp1.817.427.151.625,00 atau 91,25% dari pagu Rp1.991.692.285.000,00. Sedangkan Realisasi Belanja Modal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp920.617.878.930,00 atau 89,83% dari pagu Rp1.024.896.892.000,00.

Rincian Realisasi Anggaran Belanja Modal per 31 Desember 2021 disajikan pada Tabel berikut:

Tabel 45
Rincian Realisasi Belanja Modal per 31 Desember 2021

Kode	Rincian Belanja	Anggaran (Rp)	Realisasi Bruto (Rp)	Pengembalian (Rp)	Realisasi Neto (Rp)	%
5311	Belanja Modal Tanah	208.850.000,00	198.890.000,00	0,00	198.890.000,00	95,23
5321	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	977.952.576.000,00	887.115.302.027,00	10.457.664,00	887.104.844.363,00	90,71
5331	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	943.567.799.000,00	865.593.746.298,00	338.504.046,00	865.255.242.252,00	91,70
5361	Belanja Modal Lainnya	69.963.060.000,00	64.868.175.010,00	0,00	64.868.175.010,00	92,72



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Catatan Atas Laporan Keuangan – *Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran*
Per 31 Desember Tahun Anggaran 2021 (*Audited*)
Dengan Angka Perbandingan 31 Desember Tahun Anggaran 2020
(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Jumlah	1.991.692.285.000,00	1.817.776.113.335,00	348.961.710,00	1.817.427.151.625,00	91,25

Dalam hal penanganan pandemi Covid-19, Kementerian Hukum dan HAM mengalokasikan belanja modal untuk penanganan pandemi Covid-19 sebesar Rp3.617.670.000,00. Sampai dengan tanggal 31 Desember 2021, realisasi belanja modal untuk penanganan pandemi Covid-19 terserap sebesar Rp3.418.850.858,00 atau sebesar 94,50% dari anggaran dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 46

Rincian Realisasi Belanja Modal Penanganan Pandemi Covid-19 per 31 Desember 2021

Kode	Rincian Belanja	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
532119	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Penanganan Pandemi COVID-19	3.617.670.000,00	3.418.850.858,00	94,50
Jumlah		3.617.670.000,00	3.418.850.858,00	94,50

Realisasi belanja modal pada akun khusus untuk penanganan pandemi Covid-19 belum menggambarkan keseluruhan realisasi belanja aset dalam rangka penanganan pandemi Covid-19. Namun demikian, tidak dapat sepenuhnya dilakukan revisi anggaran dan/atau ralat dokumen realisasi ke akun Covid-19 yang disebabkan:

- Revisi tidak dilakukan karena akan berdampak pada pagu minus; dan
- Revisi tidak dilakukan ke akun khusus Covid-19 belanja modal karena pengadaan aset dalam rangka penanganan pandemi Covid-19 dalam satu dokumen (SPM/SP2D) terdapat realisasi belanja barang dan belanja modal.

Rincian pembelian Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Penanganan Pandemi Covid-19 menurut unit Eselon I sebagai berikut:

Tabel 47

**Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Penanganan Pandemi COVID-19 (Akun 532119)
Menurut Unit Eselon I per 31 Desember 2021**

NO	UNIT ESELON I	JUMLAH	RINCIAN BELANJA
1	SEKRETARIAT JENDERAL	24.750.000,00	Pembelian 5 buah air cleaner
2	DITJEN PEMASYARAKATAN	3.017.917.500,00	Pembelian 1300 unit termogun senilai Rp1.690.000.000,00, Honorarium tim kegiatan pengadaan termogun Rp3.420.000,00, Pengadaan alat PCR di RSU Pengayoman senilai Rp1.320.000.000,00, Pembelian 1 unit Fog Machine, dan 2 unit Thermometer Automatic Handsanitizer



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Catatan Atas Laporan Keuangan – *Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran*
Per 31 Desember Tahun Anggaran 2021 (*Audited*)
Dengan Angka Perbandingan 31 Desember Tahun Anggaran 2020
(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

3	DITJEN IMIGRASI	283.088.858,00	Pengadaan thermogun dan bilik disinfektan
4	BADAN PEMBIAAN HUKUM NASIONAL	42.531.500,00	Aerosol Greeloy, autoclave, dan Air Purifier Surretech
5	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA	50.563.000,00	Pengadaan Mesin Fogging Disinfektan dan Mesin Cek Suhu
TOTAL		3.418.850.858,00	

Rincian pembelian belanja modal peralatan dan mesin - penanganan pandemi COVID-19 (akun 532119) tiap satuan kerja terdapat pada lampiran LRA.

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Tanah disajikan pada tabel berikut:

Tabel 48
Rincian Realisasi Anggaran Belanja Modal Tanah per 31 Desember 2021

Kode	Rincian Belanja	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
531111	Belanja Modal Tanah	200.000.000,00	190.090.000,00	95,05
531115	Belanja Modal Pengurukan dan Pematangan Tanah	8.850.000,00	8.800.000,00	99,44
Jumlah		208.850.000,00	198.890.000,00	95,23

Realisasi Belanja Modal Tanah terdapat pada Kanwil Jawa Tengah. Realisasi Belanja Modal Pengurukan dan Pematangan Tanah terdapat pada Lapas Cikarang.

Penjelasan atas Rincian Realisasi Belanja Modal Tanah disajikan pada tabel berikut:

Tabel 49
Rincian Penjelasan Realisasi Belanja Modal Tanah per 31 Desember 2021

Uraian	Nilai	Keterangan
Realisasi Belanja Modal Tanah	198.890.000,00	
Rincian :		
Pengembangan Nilai Aset	220.090.000,00	Pengembangan nilai aset yang menambah nilai aset Tanah terdapat pada Kanwil Jawa Tengah



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Catatan Atas Laporan Keuangan – *Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran*
Per 31 Desember Tahun Anggaran 2021 (*Audited*)
Dengan Angka Perbandingan 31 Desember Tahun Anggaran 2020
(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

		Rp190.090.000,00 dan Rutan Lubuk Sikaping Rp30.000.000,00
Salah pembebanan belanja modal tanah menggunakan akun belanja pemeliharaan gedung dan bangunan	(30.000.000,00)	Kesalahan penggunaan akun belanja pemeliharaan gedung dan bangunan yang membentuk aset tanah yang seharusnya menggunakan akun belanja modal tanah terdapat pada Rutan Lubuk Sikaping
Salah pembebanan belanja modal tanah yang membentuk belanja pemeliharaan gedung dan bangunan	8.800.000,00	Kesalahan penggunaan akun belanja modal tanah yang membentuk belanja pemeliharaan gedung dan bangunan pada Lapas Cikarang
	198.890.000,00	
Selisih	0,00	

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin disajikan pada tabel berikut:

Tabel 50
Rincian Realisasi Anggaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2021

Kode	Rincian Belanja	Anggaran (Rp)	Realisasi Bruto (Rp)	Pengembalian (Rp)	Realisasi Netto (Rp)	%
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	948.613.412.000,00	858.482.812.369,00	10.457.664,00	858.472.354.705,00	90,50
532119	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Penanganan Pandemi Covid-19	3.617.670.000,00	3.418.850.858,00	0,00	3.418.850.858,00	94,50
532121	Belanja Penambahan Nilai Peralatan dan Mesin	25.721.494.000,00	25.213.638.800,00	0,00	25.213.638.800,00	98,03
	Jumlah	977.952.576.000,00	887.115.302.027,00	10.457.664,00	887.104.844.363,00	90,71

Pada tabel di atas dapat dilihat terdapat pengembalian belanja modal peralatan dan mesin sebesar Rp10.457.664,00 pada BHP Ujung Pandang sebesar Rp1.630.000,00, Ditjen Imigrasi Rp798.600,00, Kanim Karawang Rp18.000,00, Kanim Pemalang Rp7.743.314,00, dan Kanim Labuan Bajo Rp267.750,00.

Penjelasan atas Rincian Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin disajikan pada tabel berikut:



Tabel 51

Rincian Penjelasan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2021

Uraian	Nilai	Keterangan
Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin	887.104.844.363,00	
Rincian :		
Pembelian	751.364.409.702,00	Pembelian yang menambah nilai dan kuantitas Aset Peralatan dan Mesin pada Eselon I sebagai berikut: Sekretariat Jenderal : Rp 60.472.934.856,00 Inspektorat Jenderal : Rp 3.543.826.417,00 Ditjen AHU : Rp 64.687.775.945,00 Ditjen Pas : Rp 382.901.505.521,00 Ditjen Imigrasi : Rp 115.322.251.210,00 Ditjen KI : Rp 103.177.473.609,00 Ditjen PP : Rp 131.674.458,00 Ditjen HAM : Rp 1.864.344.550,00 BPHN : Rp 2.214.472.930,00 Balitbang HAM : Rp 1.124.313.400,00 BPSDM : Rp 15.923.836.806,00 Rincian pembelian aset peralatan dan mesin terdapat dalam Lampiran LRA.
Pengembangan Nilai Aset	28.017.409.050,00	Pengembangan Nilai Aset yang menambah nilai aset Peralatan dan Mesin terdapat pada: Kanim Tembilahan : Rp 6.910.000,00 Kanwil Jawa Tengah : Rp 49.500.000,00 Inspektorat Jenderal : Rp 80.000.000,00 Ditjen AHU : Rp 505.458.500,00 Ditjen PAS : Rp 892.939.600,00 Ditjen Imigrasi : Rp 23.736.493.800,00 Ditjen PP : Rp 2.004.107.150,00 Ditjen KI : Rp 742.000.000,00
Perolehan/ Penambahan KDP	8.912.170.000,00	Pengembangan KDP terdapat pada satker pusat Ditjen Imigrasi
Pengembangan KDP	197.686.500,00	Pengembangan KDP terdapat pada satker pusat Ditjen Imigrasi
Belanja dibayar di muka atas belanja modal peralatan dan mesin	88.480.245.620,00	Belanja modal dibayar di muka aset peralatan dan mesin yang belum diterima sampai dengan tanggal pelaporan, 31 Desember 2021, terdapat pada satker pusat Ditjen Pemasyarakatan sebesar Rp76.514.606.720,00, satker pusat Ditjen Imigrasi sebesar Rp5.703.788.800,00, dan satker pusat Ditjen KI sebesar Rp6.261.850.100,00



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Catatan Atas Laporan Keuangan – *Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran*
Per 31 Desember Tahun Anggaran 2021 (*Audited*)
Dengan Angka Perbandingan 31 Desember Tahun Anggaran 2020
(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Salah pembebanan belanja modal peralatan dan mesin yang membentuk barang persediaan	8.591.788.900,00	Kesalahan penggunaan akun belanja modal peralatan dan mesin yang membentuk barang persediaan terdapat pada satker pusat Ditjen Pemasyarakatan
Salah pembebanan belanja modal peralatan dan mesin menggunakan akun belanja persediaan	(313.341.484,00)	Kesalahan penggunaan akun belanja barang persediaan yang membentuk aset peralatan dan mesin yang seharusnya menggunakan akun belanja modal peralatan dan mesin terdapat pada Eselon I Ditjen Pemasyarakatan sebesar Rp298.714.484,00 dan Eselon I Ditjen Imigrasi sebesar Rp14.627.000,00
Salah pembebanan belanja modal peralatan dan mesin yang membentuk aset gedung dan bangunan	673.915.000,00	Kesalahan penggunaan akun belanja modal peralatan dan mesin yang membentuk barang aset gedung dan bangunan terdapat pada satker pusat Ditjen Pemasyarakatan sebesar Rp673.915.000,00
Salah pembebanan belanja modal peralatan dan mesin yang menggunakan akun belanja modal gedung dan bangunan	(995.224.150,00)	Kesalahan penggunaan akun belanja modal gedung dan bangunan yang membentuk aset peralatan dan mesin yang seharusnya menggunakan akun belanja modal peralatan dan mesin terdapat pada satker pusat Ditjen AHU sebesar Rp24.750.000,00, satker pusat Ditjen PAS sebesar Rp857.674.150,00, dan Bapas Denpasar sebesar Rp112.800.000,00
Salah pembebanan belanja modal peralatan dan mesin yang membentuk aset lainnya	7.407.023.885,00	Kesalahan penggunaan akun belanja modal peralatan dan mesin yang membentuk aset lainnya terdapat pada Pusdatin sebesar Rp3.091.000.000,00, satker pusat Ditjen AHU sebesar Rp9.457.885,00, satker pusat Ditjen PAS sebesar Rp4.019.874.500,00, Lapas Narkotika Jakarta sebesar Rp6.924.500,00, satker pusat Ditjen Imigrasi sebesar Rp159.049.000,00, dan Kanim Medan sebesar Rp120.718.000,00
Salah pembebanan belanja modal peralatan dan mesin yang menggunakan akun belanja modal aset lainnya	(184.197.389,00)	Kesalahan penggunaan akun belanja modal aset lainnya yang membentuk aset peralatan dan mesin yang seharusnya menggunakan akun belanja modal peralatan dan mesin terdapat pada Perwakilan Imigrasi di Hongkong sebesar Rp124.941.389,00 dan Politeknik Ilmu Pemasyarakatan sebesar Rp59.256.000,00
Salah pembebanan belanja peralatan dan mesin yang membentuk belanja perlengkapan perkantoran	396.550.000,00	Kesalahan penggunaan akun belanja peralatan dan mesin yang membentuk belanja perlengkapan perkantoran terdapat pada satker pusat Ditjen Pemasyarakatan



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Catatan Atas Laporan Keuangan – *Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran*
Per 31 Desember Tahun Anggaran 2021 (*Audited*)
Dengan Angka Perbandingan 31 Desember Tahun Anggaran 2020
(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Salah pembebanan belanja modal peralatan dan mesin menggunakan akun belanja barang operasional penanganan pandemi covid-19	(1.750.000,00)	Kesalahan penggunaan akun belanja barang operasional penanganan pandemi covid-19 yang membentuk aset peralatan dan mesin yang seharusnya menggunakan akun belanja modal peralatan dan mesin terdapat pada Kanim Kupang
Salah pembebanan belanja modal peralatan dan mesin menggunakan akun belanja barang operasional lainnya	(99.756.000,00)	Salah pembebanan belanja modal peralatan dan mesin menggunakan akun belanja barang operasional lainnya terdapat pada satker pusat Ditjen Pemasyarakatan Rp89.406.000,00, Lapas Yogyakarta Rp3.600.000,00, dan LPKA Pangkal Pinang Rp6.750.000,00
Salah pembebanan belanja modal peralatan dan mesin menggunakan akun belanja jasa lainnya	(473.374.620,00)	Kesalahan penggunaan akun belanja jasa lainnya yang membentuk aset peralatan dan mesin yang seharusnya menggunakan akun belanja modal peralatan dan mesin terdapat pada Ditjen AHU
Salah pembebanan belanja peralatan dan mesin yang membentuk belanja jasa penanganan pandemi covid-19	2.093.063,00	Kesalahan penggunaan akun belanja peralatan dan mesin yang membentuk belanja jasa penanganan pandemi covid-19 terdapat pada Perwakilan Imigrasi di Davao
Salah pembebanan belanja modal peralatan dan mesin menggunakan akun belanja pemeliharaan gedung dan bangunan	(3.640.000,00)	Kesalahan penggunaan akun belanja pemeliharaan gedung dan bangunan yang membentuk aset peralatan dan mesin yang seharusnya menggunakan akun belanja modal peralatan dan mesin terdapat pada Kanim Blitar
Salah pembebanan belanja peralatan dan mesin yang membentuk belanja belanja pemeliharaan peralatan dan mesin	52.030.000,00	Kesalahan penggunaan akun belanja peralatan dan mesin yang membentuk belanja belanja pemeliharaan peralatan dan mesin terdapat pada satker pusat Ditjen KI
Salah pembebanan belanja peralatan dan mesin yang membentuk belanja belanja perjalanan dinas biasa	159.725.770,00	Kesalahan penggunaan akun belanja peralatan dan mesin yang membentuk belanja belanja perjalanan dinas biasa terdapat pada satker pusat Ditjen Pemasyarakatan



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Catatan Atas Laporan Keuangan – *Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran*
Per 31 Desember Tahun Anggaran 2021 (*Audited*)
Dengan Angka Perbandingan 31 Desember Tahun Anggaran 2020
(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin yang membentuk beban ekstrakomptabel peralatan dan mesin	997.428.602,00	Realisasi belanja modal Peralatan dan Mesin yang nilai perolehannya dibawah nilai kapitalisasi Peralatan dan Mesin (Rp1.000.000,00) sehingga membentuk beban ekstrakomptabel Peralatan dan Mesin yaitu terdapat pada unit Eselon I Sekretariat Jenderal : Rp 134.561.500,00 Ditjen AHU : Rp 50.307.011,00 Ditjen Pas : Rp 296.201.722,00 Ditjen Imigrasi : Rp 384.414.369,00 Ditjen KI : Rp 76.113.500,00 BPSPDM : Rp 55.830.500,00 Rincian terdapat dalam Lampiran LRA.
Hibah yang belum disahkan	(275.430.722,00)	Hibah barang berupa aset peralatan dan mesin yang sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 belum dilakukan pengesahan terdapat pada satker Ditjen Pemasyarakatan Rp262.870.722,00, Lapas Pati Rp2.200.000,00, Lapas Ujung Pandang Rp8.985.000,00, dan Kanim Surabaya Rp1.375.000,00
Koreksi aset tetap non revaluasi atas belanja modal peralatan dan mesin	(5.800.917.364,00)	Koreksi aset tetap non revaluasi atas aset peralatan dan mesin yang lebih catat/terdapat pengembalian belanja modal tahun anggaran berjalan terdapat pada BHP Ujung Pandang Rp30.000,00, Lapas Dompu Rp89.069.500,00, satker pusat Ditjen Imigrasi Rp5.703.788.800,00 Kanim Labuan Bajo Rp267.750,00, Kanim Karawang Rp18.000,00, dan Kanim Pemalang Rp7.743.314,00
	887.104.844.363,00	
Selisih	0,00	

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan disajikan pada tabel berikut:

Tabel 52

Rincian Realisasi Anggaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2021

Kode	Rincian Belanja	Anggaran (Rp)	Realisasi Bruto (Rp)	Pengembalian (Rp)	Realisasi Netto (Rp)	%
533111	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	788.762.573.000,00	717.254.782.321,00	166.056.056,00	717.088.726.265,00	90,91
533115	Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Gedung dan Bangunan	963.335.000,00	3.300.000,00	0,00	3.300.000,00	0,34
533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	153.841.891.000,00	148.335.663.977,00	172.447.990,00	148.163.215.987,00	96,31
Jumlah		943.567.799.000,00	865.593.746.298,00	338.504.046,00	865.255.242.252,00	91,70



Pada tabel di atas dapat dilihat terdapat pengembalian belanja modal gedung dan bangunan sebesar Rp166.056.056,00 yang terdapat pada Lapas Jambi sebesar Rp6.571.000,00 atas kelebihan pembayaran uang muka Manajemen Konstruksi sebesar 5% karena adanya *refocusing* anggaran, Lapas Kotabaru Rp52.660.634,00 merupakan pengembalian atas pembatalan lelang pekerjaan perencanaan dan manajemen konstruksi dikarenakan terkena *refocusing* anggaran, Lapas Perempuan Jambi Rp1.425.000,00 atas kelebihan pembayaran honorarium tim pokja pembangunan pelaksanaan fisik pembangunan, Kanim Sorong Rp16.124.207,00, Kanim Bima Rp77.945.215,00, Kanim Pematang Rp225.000,00, dan pada BPSDM Rp11.105.000,00 berupa pengembalian honor pokja pembangunan gedung Politeknik.

Pengembalian belanja penambahan nilai gedung dan bangunan terdapat pada Kanwil Ujung Pandang sebesar Rp31.092.094,00, Kanwil Mataram Rp126.259.243,00, Kanwil Sulawesi Barat Rp12.309.000,00, dan Kanim Cilacap Rp2.787.653,00.

Penjelasan atas Rincian Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan disajikan pada tabel berikut:

Tabel 53
Rincian Penjelasan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan per
31 Desember 2021

Uraian	Nilai	Keterangan
Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan	865.255.242.252,00	
Rincian :		
Pembelian	173.595.000,00	Pembelian yang menambah nilai dan kuantitas Aset Gedung dan Bangunan pada Lapas Narkotika Pematang Siantar Rp99.800.000,00 dan Lapas Bitung Rp73.795.000,00
Pengembangan Nilai Aset	43.438.817.547,00	Pengembangan Nilai Aset yang menambah nilai aset Gedung dan Bangunan pada:
		Sekretariat Jenderal : Rp 15.924.209.304,00
		Ditjen AHU : Rp 6.042.197.208,00
		Ditjen Pas : Rp 10.697.774.829,00
		Ditjen Imigrasi : Rp 10.407.489.979,00
		BPSDM : Rp 367.146.227,00
		Rincian pengembangan nilai aset gedung dan bangunan terdapat dalam Lampiran LRA.



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Catatan Atas Laporan Keuangan – *Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran*
Per 31 Desember Tahun Anggaran 2021 (*Audited*)
Dengan Angka Perbandingan 31 Desember Tahun Anggaran 2020
(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Perolehan/Penambahan KDP	14.348.934.828,00	Perolehan/ Penambahan KDP yang menambah nilai KDP aset Gedung dan Bangunan pada:	
		Sekretariat Jenderal	Rp 2.276.977.783,00
		Inspektorat Jenderal	Rp 90.277.000,00
		Ditjen AHU	Rp 290.660.153,00
		Ditjen Pas	Rp 9.998.908.722,00
		Ditjen Imigrasi	Rp 1.434.426.380,00
		BPSDM	Rp 257.684.790,00
		Rincian perolehan/penambahan KDP aset gedung dan bangunan terdapat dalam Lampiran LRA.	
Pengembangan KDP	795.853.396.139,00	Pengembangan KDP yang menambah nilai KDP aset Gedung dan Bangunan pada:	
		Sekretariat Jenderal	Rp 87.981.104.412,00
		Inspektorat Jenderal	Rp 613.249.000,00
		Ditjen AHU	Rp 1.364.113.838,00
		Ditjen Pas	Rp 550.264.770.268,00
		Ditjen Imigrasi	Rp 54.247.288.845,00
		BPSDM	Rp 101.382.869.776,00
		Rincian Pengembangan KDP aset gedung dan bangunan terdapat dalam Lampiran LRA.	
Penyelesaian Pembangunan Langsung	3.428.483.420,00	Penyelesaian Pembangunan Langsung yang menambah nilai dan kuantitas aset Gedung dan Bangunan terdapat pada:	
		Kanwil Jawa Tengah	Rp 198.000.000,00
		BHP Semarang	Rp 102.502.820,00
		Lapas Terbuka Kendal	Rp 160.000.000,00
		Lapas Malang	Rp 104.750.000,00
		Lapas Polewali	Rp 153.765.000,00
		Lapas Watampone	Rp 47.610.000,00
		Lapas Gunung Sugih	Rp 97.478.000,00
		Lapas Piru	Rp 100.170.000,00
		Lapas Narkotika Kasongan	Rp 40.000.000,00
		Rutan Depok	Rp 993.260.600,00
		Ditjen Imigrasi	Rp 1.430.947.000,00
Belanja dibayar di muka atas belanja modal gedung dan bangunan	31.231.570.137,00	Belanja modal dibayar di muka aset gedung dan bangunan yang belum diterima sampai dengan tanggal pelaporan, 31 Desember 2021, terdapat pada	
		Kanwil Ambon	Rp 1.520.590.085,00
		Ditjen Pas	Rp 13.981.686.712,00
		LPP Padang	Rp 11.731.027.915,00
		Lapas Narkotika Rumbai	Rp 183.932.534,00



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Catatan Atas Laporan Keuangan – *Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran*
Per 31 Desember Tahun Anggaran 2021 (*Audited*)
Dengan Angka Perbandingan 31 Desember Tahun Anggaran 2020
(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

		Kanim Palu	:	Rp	1.984.230.931,00
		Kanim Semarang	:	Rp	795.683.187,00
		Badiklat Sulut	:	Rp	1.034.418.773,00
Salah pembebanan belanja modal gedung dan bangunan yang membentuk aset peralatan dan mesin	995.224.150,00	Kesalahan penggunaan akun belanja modal gedung dan bangunan yang membentuk aset peralatan dan mesin terdapat pada satker pusat Ditjen AHU Rp24.750.000,00, Ditjen PAS Rp857.674.150,00, dan Bapas Denpasar Rp112.800.000,00			
Salah pembebanan belanja modal gedung dan bangunan menggunakan akun belanja modal peralatan dan mesin	(673.915.000,00)	Kesalahan penggunaan akun belanja modal peralatan dan mesin yang membentuk aset gedung dan bangunan yang seharusnya menggunakan akun belanja modal gedung dan bangunan terdapat pada satker pusat Ditjen Pemasarakatan			
Salah pembebanan belanja modal gedung dan bangunan yang membentuk aset jalan dan jembatan	11.718.683.000,00	Kesalahan penggunaan akun belanja modal gedung dan bangunan yang membentuk aset jalan dan jembatan terdapat pada satker pusat Sekretariat Jenderal Rp11.121.713.000,00 dan satker pusat Ditjen PAS Rp596.970.000,00			
Salah pembebanan belanja modal gedung dan bangunan yang membentuk aset lainnya	2.853.247.100,00	Kesalahan penggunaan akun belanja modal gedung dan bangunan yang membentuk aset lainnya terdapat pada satker pusat Sekretariat Jenderal Rp1.802.478.100,00, satker pusat Ditjen PAS Rp184.250.000,00, dan Bapas Yogyakarta Rp866.519.000,00			
Salah pembebanan belanja gedung dan bangunan yang membentuk belanja sewa	199.452.000,00	Kesalahan penggunaan akun belanja gedung dan bangunan yang membentuk belanja sewa terdapat pada satker pusat Ditjen Pemasarakatan			
Salah pembebanan belanja modal gedung dan bangunan menggunakan akun belanja pemeliharaan gedung dan bangunan	(464.426.000,00)	Kesalahan penggunaan akun belanja pemeliharaan gedung dan bangunan yang membentuk aset gedung dan bangunan yang seharusnya menggunakan akun belanja modal gedung dan bangunan terdapat pada satker pusat Ditjen Imigrasi Rp176.183.000,00, Kanim Blitar Rp26.000.000,00, Kanim Ponorogo Rp172.543.000,00, dan Kanim Tahuna Rp89.700.000,00			
Hibah Masuk Pengembangan Aset	(6.293.870.093,00)	Terdapat Hibah Pengembangan Nilai Aset Gedung dan Bangunan pada:			
		Sekretariat Jenderal	:	(Rp	1.147.652.500,00)



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Catatan Atas Laporan Keuangan – *Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran*
Per 31 Desember Tahun Anggaran 2021 (*Audited*)
Dengan Angka Perbandingan 31 Desember Tahun Anggaran 2020
(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

		Ditjen Pas	:	(Rp 4.188.867.593,00)
		Ditjen Imigrasi	:	(Rp 957.350.000,00)
		Rincian terdapat dalam Lampiran LRA.		
Koreksi aset tetap non revaluasi atas belanja modal gedung dan bangunan	(32.080.889.519,00)	Koreksi aset tetap non revaluasi atas aset gedung dan bangunan yang lebih catat/terdapat pengembalian belanja modal tahun anggaran berjalan terdapat pada		
		Sekretariat Jenderal	:	(Rp 2.217.189.965,00)
		Ditjen Pas	:	(Rp 25.957.303.795,00)
		Ditjen Imigrasi	:	(Rp 2.860.871.986,00)
		BPSDM	:	(Rp 1.045.523.773,00)
Koreksi atas Temuan BPK berupa Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan	526.939.543,00	Koreksi atas Temuan BPK berupa Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan terdapat pada Kanwil Ambon		
Total Rincian :	865.255.242.252,00			
Selisih	0,00			

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Lainnya disajikan pada tabel berikut:

Tabel 54

Rincian Realisasi Anggaran Belanja Modal Lainnya per 31 Desember 2021

Kode	Rincian Belanja	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
536111	Belanja Modal Lainnya	31.079.501.000,00	28.593.374.511,00	92,00
536121	Belanja Penambahan Nilai Aset Tetap Lainnya dan/atau Aset	38.883.559.000,00	36.274.800.499,00	93,29
Jumlah		69.963.060.000,00	64.868.175.010,00	92,72

Penjelasan atas Rincian Realisasi Belanja Modal Lainnya disajikan pada tabel berikut:

Tabel 55

Rincian Penjelasan Realisasi Belanja Modal Lainnya per 31 Desember 2021

Uraian	Nilai	Keterangan		
Realisasi Belanja Modal Lainnya	64.868.175.010,00			
Rincian :				
Pembelian	66.933.087.961,00	Pembelian yang menambah nilai dan kuantitas Aset lainnya pada:		
		Sekretariat Jenderal	:	Rp 3.283.417.500,00



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Catatan Atas Laporan Keuangan – *Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran*
Per 31 Desember Tahun Anggaran 2021 (*Audited*)
Dengan Angka Perbandingan 31 Desember Tahun Anggaran 2020
(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

		Inspektorat Jenderal	:	Rp	198.997.000,00
		Ditjen AHU	:	Rp	5.748.074.145,00
		Ditjen Pas	:	Rp	5.038.307.200,00
		Ditjen Imigrasi	:	Rp	22.961.382.019,00
		Ditjen KI	:	Rp	28.908.465.040,00
		BPHN	:	Rp	175.445.057,00
		BPSDM	:	Rp	619.000.000,00
		Rincian pembelian aset lain-lain terdapat dalam Lampiran LRA.			
Pengembangan Nilai Aset	10.933.947.400,00	Pengembangan Nilai Aset yang menambah nilai aset lainnya terdapat pada			
		Sekretariat Jenderal	:	Rp	1.610.060.600,00
		Ditjen AHU	:	Rp	1.397.228.800,00
		Ditjen Pas	:	Rp	280.995.000,00
		Ditjen Imigrasi	:	Rp	96.250.000,00
		Ditjen KI	:	Rp	7.519.413.000,00
		Balai Pendidikan dan Pelatihan Jawa Tengah	:	Rp	30.000.000,00
Perolehan/Penambahan KDP	190.920.606,00	Perolehan/ Penambahan KDP yang menambah nilai KDP aset Aset Lainnya terdapat pada satker pusat Ditjen AHU			
Pengembangan KDP	773.240.183,00	Pengembangan KDP yang menambah nilai KDP aset lainnya terdapat pada Ditjen AHU			
Penyelesaian Pembangunan Langsung	1.747.514.456,00	Penyelesaian Pembangunan Langsung yang menambah nilai dan kuantitas aset lainnya terdapat pada satker pusat Ditjen PAS Rp1.622.593.456,00 dan Lapas Semarang Rp124.921.000,00			
Belanja dibayar di muka atas belanja modal aset lainnya	9.988.000,00	Belanja modal dibayar di muka aset lainnya yang belum diterima sampai dengan tanggal pelaporan, 31 Desember 2021, terdapat pada Rupbasan Indramayu			
Salah pembebanan belanja aset lainnya yang membentuk aset peralatan dan mesin	184.197.389,00	Kesalahan penggunaan akun belanja modal aset lainnya yang membentuk aset peralatan dan mesin terdapat pada Perwakilan Imigrasi di Hongkong Rp124.941.389,00 dan Politeknik Ilmu Pemasaryakatan Rp59.256.000,00			
Salah pembebanan belanja modal aset lainnya menggunakan akun belanja modal peralatan dan mesin	(7.407.023.885,00)	Kesalahan penggunaan akun belanja modal peralatan dan mesin yang membentuk aset lainnya yang seharusnya menggunakan akun belanja modal aset lainnya terdapat pada Pusdatin Rp3.091.000.000,00, Ditjen AHU Rp9.457.885,00, Lapas Narkotika Jakarta Rp6.924.500,00, Ditjen PAS Rp4.019.874.500,00, Ditjen Imigrasi Rp159.049.000,00, dan Kanim Medan Rp120.718.000,00			



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
 Catatan Atas Laporan Keuangan – *Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran*
 Per 31 Desember Tahun Anggaran 2021 (*Audited*)
 Dengan Angka Perbandingan 31 Desember Tahun Anggaran 2020
 (Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Salah pembebanan belanja modal aset lainnya menggunakan akun belanja modal gedung dan bangunan	(2.853.247.100,00)	Kesalahan penggunaan akun belanja modal gedung dan bangunan yang membentuk aset lainnya yang seharusnya menggunakan akun belanja modal aset lainnya terdapat pada Sekretariat Jenderal Rp1.802.478.100,00, Ditjen PAS Rp184.250.000,00, dan Bapas Yogyakarta Rp866.519.000,00
Salah pembebanan belanja modal aset lainnya menggunakan akun belanja barang non operasional lainnya	(2.000.000,00)	Kesalahan penggunaan akun belanja barang non operasional lainnya yang membentuk aset lainnya yang seharusnya menggunakan akun belanja modal aset lainnya terdapat pada Rutan Yogyakarta
Salah pembebanan belanja modal aset lainnya yang membentuk belanja jasa konsultan	92.750.000,00	Kesalahan penggunaan akun belanja modal aset lainnya yang membentuk belanja jasa konsultan terdapat pada Ditjen KI
Salah pembebanan belanja modal aset lainnya menggunakan akun belanja jasa lainnya	(35.000.000,00)	Kesalahan penggunaan akun belanja jasa lainnya yang membentuk aset lainnya yang seharusnya menggunakan akun belanja modal aset lainnya terdapat pada Kanwil Yogyakarta
Salah pembebanan belanja modal aset lainnya yang menggunakan akun belanja pemeliharaan peralatan dan mesin	(5.700.200.000,00)	Kesalahan penggunaan akun belanja modal aset lainnya yang menggunakan akun belanja pemeliharaan peralatan dan mesin terdapat pada satker pusat Ditjen KI
Total Rincian :	64.868.175.010,00	
Selisih	0,00	



C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

C.1. KAS DI BENDAHARA PENGELUARAN

**Kas di Bendahara
Pengeluaran
Rp557.409.357,00**

Kas di Bendahara Pengeluaran adalah kas yang dikuasai, dikelola dan menjadi tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa Uang Persediaan/ Tambahan Uang Persediaan (UP/TUP) yang belum dipertanggungjawabkan atau belum disetorkan ke Kas Negara per tanggal neraca. Kas di Bendahara Pengeluaran mencakup seluruh saldo rekening bendahara pengeluaran, uang logam, uang kertas, dan lain-lain kas (termasuk bukti pengeluaran yang belum dipertanggungjawabkan) yang sumbernya berasal dari dana kas kecil (UP) yang belum dipertanggungjawabkan atau belum disetor kembali ke Kas Negara per tanggal neraca.

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing sebesar Rp557.409.357,00 dan Rp437.017.887,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 56
Rincian Kas Di Bendahara Pengeluaran Berdasarkan Eselon I
Per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Unit Eselon I	Kas di Bendahara Pengeluaran	
	31 Desember 2021	31 Desember 2020
Sekretariat Jenderal	12.107.517,00	0,00
Inspektorat Jenderal	0,00	0,00
Ditjen Administrasi Hukum Umum	0,00	0,00
Ditjen Pemasyarakatan	129.607.000,00	68.289.400,00
Ditjen Imigrasi	405.178.940,00	368.728.457,00
Ditjen Kekayaan Intelektual	0,00	0,00
Ditjen Peraturan Perundang-undangan	0,00	0,00
Ditjen Hak Asasi Manusia	0,00	0,00
Badan Pembinaan Hukum Nasional	10.515.900,00	30,00
Balitbang Hukum dan HAM	0,00	0,00
BPSDM Hukum dan HAM	0,00	0,00
TOTAL	557.409.357,00	437.017.887,00



Sampai dengan 31 Desember 2021 masih terdapat saldo Kas di Bendahara Pengeluaran yang disebabkan diantaranya :

- satuan kerja terlambat melakukan penyetoran atas sisa UP/TUP ke kas Negara; dan
- hasil rekon perhitungan selisih kurs untuk satker perwakilan imigrasi LN.

Namun demikian atas sisa UP/TUP pada seluruh satuan kerja telah disetorkan ke kas Negara pada awal tahun 2022, kecuali sisa UP pada kantor perwakilan imigrasi di luar negeri, dengan total nilai sebesar Rp405.178.940,00 belum disetor ke kas negara dan akan menjadi potongan UP awal pada Tahun Anggaran 2022 sesuai dengan PMK Nomor:160/PMK.05/2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri.

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran berdasarkan Satuan Kerja per 31 Desember 2021 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 57
Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran Berdasarkan Satuan Kerja
Per 31 Desember 2021

No	Nama Satker	Saldo	Keterangan
Sekretariat Jenderal			
1	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAYAPURA	12.107.517,00	Sisa TUP Semester II TA 2021
Total		12.107.517,00	
Dijen Pemasyarakatan			
1	LAPAS KELAS III SAPARUA	19.200.000,00	Sisa UP Semester II TA 2021
2	Lapas Perempuan Kelas IIB Yogyakarta	20.490.000,00	Sisa UP Semester II TA 2021
3	RUMAH TAHANAN NEGARA SUKADANA	60.200.000,00	Sisa TUP Semester II TA 2021
4	LEMBAGA PEMASYARAKATAN BALIKPAPAN	29.714.000,00	Sisa TUP Semester II TA 2021
5	Lapas Perempuan Kelas IIB Padang	3.000,00	Sisa TUP Semester II TA 2021



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Catatan Atas Laporan Keuangan – *Penjelasan atas Pos-Pos Neraca*
Per 31 Desember Tahun Anggaran 2021 (*Audited*)
Dengan Angka Perbandingan 31 Desember Tahun Anggaran 2020
(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Total		129.607.000,00	
Dijen Imigrasi			
1	PERWAKILAN IMIGRASI DI SINGAPURA	981.897,00	Sisa UP Semester II TA 2021
2	PERWAKILAN IMIGRASI DI KUALALUMPUR	130.408.684,00	Sisa UP Semester II TA 2021
3	PERWAKILAN IMIGRASI DI PENANG	47.687,00	Sisa UP Semester II TA 2021
4	PERWAKILAN IMIGRASI DI BANGKOK	8.623.627,00	Sisa UP Semester II TA 2021
5	PERWAKILAN IMIGRASI DI HONGKONG	21.924.011,00	Sisa UP Semester II TA 2021
6	PERWAKILAN IMIGRASI DI TOKYO	594.107,00	Sisa UP Semester II TA 2021
7	PERWAKILAN IMIGRASI DI DAVAO	69.196.328,00	Sisa UP Semester II TA 2021
8	PERWAKILAN IMIGRASI DI DEN HAAG	6.156.675,00	Sisa UP Semester II TA 2021
9	PERWAKILAN IMIGRASI DI BERLIN	6.909.695,00	Sisa UP Semester II TA 2021
10	PERWAKILAN IMIGRASI DI SIDNEY	323.112,00	Sisa UP Semester II TA 2021
11	PERWAKILAN IMIGRASI DI KUCHING	20.168.388,00	Sisa UP Semester II TA 2021
12	PERWAKILAN IMIGRASI DI TAWAO	26.997.128,00	Sisa UP Semester II TA 2021
13	PERWAKILAN IMIGRASI DI LOS ANGELES	28.941.934,00	Sisa UP Semester II TA 2021
14	PERWAKILAN IMIGRASI DI JEDDAH	3.003.663,00	Sisa UP Semester II TA 2021
15	PERWAKILAN IMIGRASI DI BEIJING	10.932.950,00	Sisa UP Semester II TA 2021
16	PERWAKILAN IMIGRASI DI JOHOR BAHRU	7.617.883,00	Sisa UP Semester II TA 2021
17	KANTOR PERWAKILAN IMIGRASI PADA KANTOR URUSAN KEPENTINGAN RI DI DILI TIMOR	39.503.084,00	Sisa UP Semester II TA 2021
18	PERWAKILAN IMIGRASI GUANGZHOU DI RRC	22.834.521,00	Sisa UP Semester II TA 2021



19	PERWAKILAN IMIGRASI DI SINGAPURA	1.857,00	Sisa TUP Semester II TA 2021
20	PERWAKILAN IMIGRASI DI SIDNEY	4.284,00	Sisa TUP Semester II TA 2021
21	PERWAKILAN IMIGRASI DI BEIJING	6.140,00	Sisa TUP Semester II TA 2021
22	PERWAKILAN IMIGRASI DI JOHOR BAHRU	571,00	Sisa TUP Semester II TA 2021
23	PERWAKILAN IMIGRASI GUANGZHOU DI RRC	714,00	Sisa TUP Semester II TA 2021
Total		405.178.940,00	
Badan Pembinaan Hukum Nasional			
1	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM KUPANG	10.515.900,00	Sisa UP Semester II TA 2021
Total		10.515.900,00	
Grand Total		557.409.357,00	

C.2. KAS DI BENDAHARA PENERIMAAN

Kas di Bendahara Penerimaan Rp0,00

Kas di Bendahara Penerimaan merupakan saldo uang tunai dan saldo rekening di bank yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNBPN yang berlaku pada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia. Saldo kas ini mencerminkan saldo yang berasal dari pungutan yang sudah diterima oleh Bendahara Penerimaan dan belum disetorkan ke Kas Negara per tanggal neraca.

Kas di Bendahara Penerimaan per tanggal 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah sebesar masing-masing Rp0,00 dan Rp1.000.000,00. Rincian Kas di Bendahara Penerimaan disajikan dalam tabel berikut:



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Catatan Atas Laporan Keuangan – *Penjelasan atas Pos-Pos Neraca*
Per 31 Desember Tahun Anggaran 2021 (*Audited*)
Dengan Angka Perbandingan 31 Desember Tahun Anggaran 2020
(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Tabel 58
Perbandingan Kas di Bendahara Penerimaan Berdasarkan Eselon I
Per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Unit Eselon I	Kas di Bendahara Penerimaan	
	31 Desember 2021	31 Desember 2020
Sekretariat Jenderal	0,00	0,00
Inspektorat Jenderal	0,00	0,00
Ditjen Administrasi Hukum Umum	0,00	1.000.000,00
Ditjen Pemasyarakatan	0,00	0,00
Ditjen Imigrasi	0,00	0,00
Ditjen Kekayaan Intelektual	0,00	0,00
Ditjen Peraturan Perundang-undangan	0,00	0,00
Ditjen Hak Asasi Manusia	0,00	0,00
Badan Pembinaan Hukum Nasional	0,00	0,00
Balitbang Hukum dan HAM	0,00	0,00
BPSDM Hukum dan HAM	0,00	0,00
TOTAL	0,00	1.000.000,00

C.3. KAS LAINNYA DAN SETARA KAS

**Kas Lainnya dan
Setara Kas
Rp46.911.594,00**

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per tanggal 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing sebesar Rp 46.911.594,00 dan Rp44.953.188.625,00. Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan kas pada bendahara pengeluaran yang bukan berasal dari UP/TUP, baik itu saldo rekening di bank maupun saldo uang tunai, dan kas lainnya di bendahara penerimaan yang berasal dari penerimaan yang belum diperhitungkan atau belum dapat diakui sebagai pendapatan. Setara kas yaitu investasi jangka pendek yang siap dicairkan menjadi kas dalam jangka waktu 3 bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan. Rincian Sumber Kas Lainnya dan Setara Kas adalah sebagai berikut:

Tabel 59
Perbandingan Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas
Per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Keterangan	31 Desember 2021	31 Desember 2020
Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	46.911.594,00	167.762.412,00



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Catatan Atas Laporan Keuangan – *Penjelasan atas Pos-Pos Neraca*
Per 31 Desember Tahun Anggaran 2021 (*Audited*)
Dengan Angka Perbandingan 31 Desember Tahun Anggaran 2020
(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan	0,00	44.785.426.213,00
Jumlah	46.911.594,00	44.953.188.625,00

Tabel 60
Perbandingan Kas Lainnya dan Setara Kas Berdasarkan Eselon I
Per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Eselon I	Kas Lainnya dan Setara Kas	
	31 Desember 2021	31 Desember 2020
Sekretariat Jenderal	3.140.200,00	5.106.848,00
Inspektorat Jenderal	0,00	0,00
Ditjen Administrasi Hukum Umum	0,00	4.910.500,00
Ditjen Pemasyarakatan	43.771.394,00	162.655.564,00
Ditjen Imigrasi	0,00	0,00
Ditjen Kekayaan Intelektual	0,00	44.780.515.713,00
Ditjen Peraturan Perundang-undangan	0,00	0,00
Ditjen Hak Asasi Manusia	0,00	0,00
Badan Pembinaan Hukum Nasional	0,00	0,00
Balitbang Hukum dan HAM	0,00	0,00
BPSDM Hukum dan HAM	0,00	0,00
TOTAL	46.911.594,00	44.953.188.625,00

Terdapat perubahan nilai Kas Lainnya dan Setara Kas dari data Laporan Keuangan tahun 2021 (*Unaudited*) dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 61
Total Koreksi Nilai Kas Lainnya dan Setara Kas

Uraian	<i>Unaudited</i>	Koreksi	<i>Audited</i>
Kas Lainnya dan Setara Kas	9.740.161,00	37.171.433,00	46.911.594,00

Tabel 62
Koreksi Nilai Kas Lainnya dan Setara Kas Berdasarkan Satuan Kerja

No	Satker	Kas Lainnya dan Setara Kas		
		<i>Unaudited</i>	Koreksi	<i>Audited</i>
1	LEMBAGA PEMASYARAKATAN DOMPU	0,00	5.044.300,00	5.044.300,00
2	LAPAS KELAS III LABUAN BILIK	0,00	7.879.792,00	7.879.792,00
3	LEMBAGA PEMASYARAKATAN NARKOTIKA DI CIREBON	0,00	12.106.204,00	12.106.204,00



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Catatan Atas Laporan Keuangan – *Penjelasan atas Pos-Pos Neraca*
Per 31 Desember Tahun Anggaran 2021 (*Audited*)
Dengan Angka Perbandingan 31 Desember Tahun Anggaran 2020
(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

4	RUMAH TAHANAN NEGARA LUBUK SIKAPING	0,00	2.137,00	2.137,00
5	LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK PALEMBANG	0,00	11.933.500,00	11.933.500,00
6	LAPAS PEMUDA KELAS III LANGKAT PROVINSI SUMATERA UTARA	0,00	27.000,00	27.000,00
7	LAPAS KELAS III SAPARUA	0,00	14.000,00	14.000,00
8	BAPAS KELAS II LHOK SEMAWE	0,00	164.500,00	164.500,00

Koreksi tersebut merupakan dampak tindak lanjut terhadap Temuan BPK yang menyatakan bahwa terdapat kurang catat kas lainnya dan setara kas.

Rincian atas Kas Lainnya dan Setara Kas berdasarkan satuan kerja per 31 Desember 2021 disajikan pada Tabel berikut.

Tabel 63
Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas Berdasarkan Satuan Kerja
per 31 Desember 2021

No	Uraian Satker	Saldo	Keterangan
SEKRETARIAT JENDERAL			
1	SEKRETARIAT JENDERAL (PUSAT)	3.140.200,00	Retur dana ke Rek Bendahara Pengeluaran (karena kesalahan nomor rekening tujuan) atas: - Biaya Perjadin Kegiatan Catat a.n Decky Nurmansyah Rp1.834.200 - Biaya Swab Seleksi CPNS a.n Rahendro Jati Rp308.000 dan Suranto Rp198.000 - Biaya Komunikasi Kegiatan Administrasi dan Pembinaan Kepegawaian a.n Febri Ramadanti Rp800.000
	SUBTOTAL	3.140.200,00	
DITJEN PEMASYARAKATAN			
1	BAPAS KELAS I MANADO	117.721,00	Uang lembur pegawai yang belum diserahkan s.d. 31 Desember 2021
2	LAPAS KELAS IIA KOTABUMI	5.202.000,00	Honor yang belum diserahkan kepada yang bersangkutan karena terkendala pada sistem Bank



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Catatan Atas Laporan Keuangan – *Penjelasan atas Pos-Pos Neraca*
Per 31 Desember Tahun Anggaran 2021 (*Audited*)
Dengan Angka Perbandingan 31 Desember Tahun Anggaran 2020
(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

3	RUMAH TAHANAN NEGARA MAMUJU	1.269.540,00	Utang pajak yang belum disetor bendahara s.d 31 Desember 2021
4	RUMAH TAHANAN NEGARA RABA/BIMA	10.000,00	Sisa uang di rekening bendahara yang merupakan sisa pencairan SP2D yang belum dilakukan penarikan oleh bendahara
5	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM MATARAM	200,00	Sisa uang di rekening bendahara yang merupakan sisa pencairan SP2D yang belum dilakukan penarikan oleh bendahara
6	LEMBAGA PEMASYARAKATAN NARKOTIKA PAMEKASAN	500,00	Sisa uang di rekening bendahara yang merupakan sisa pencairan SP2D yang belum dilakukan penarikan oleh bendahara
7	LAPAS KELAS III LABUAN BILIK	7.879.792,00	Hutang pajak yang belum disetor s.d. 31 Desember 2021
8	RUMAH TAHANAN NEGARA LUBUK SIKAPING	2.137,00	Bunga rekening koran. Per Januari 2022 telah disetorkan ke negara.
9	LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK PALEMBANG	11.933.500,00	Sisa honor pengelola keuangan, juru masak dan OB yg tidak sempat ditarik. Dilakukan penarikan per Januari 2022
10	LAPAS KELAS III SAPARUA	14.000,00	Pecahan saldo yang tidak dapat ditarik dengan ATM (Rek BRI)
11	LEMBAGA PEMASYARAKATAN DOMPU	5.044.300,00	Saldo atas retur gaji
12	LAPAS PEMUDA KELAS III LANGKAT PROVINSI SUMATERA UTARA	27.000,00	Pecahan saldo yang tidak dapat ditarik dengan ATM (Rek BNI)
13	BAPAS KELAS II LHOK SEMAWE	164.500,00	Hutang pajak yang belum disetor s.d. 31 Desember 2021
14	LEMBAGA PEMASYARAKATAN NARKOTIKA DI CIREBON	12.106.204,00	Utang pajak yang belum disetor bendahara s.d 31 Desember 2021
SUBTOTAL		43.771.394,00	
TOTAL		46.911.594,00	



C.4. BELANJA DIBAYAR DIMUKA

Belanja Dibayar

Dimuka

Rp124.665.683.131,00

Belanja Dibayar Dimuka per tanggal 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing adalah sebesar Rp124.665.683.131,00 dan Rp29.254.137.917,00. Belanja dibayar dimuka merupakan hak yang masih harus diterima setelah tanggal neraca sebagai akibat dari barang atau jasa yang telah dibayarkan secara penuh oleh pemerintah kepada pihak lain namun manfaat atas barang atau jasa tersebut belum diterima seluruhnya oleh pemerintah.

Tabel 64

Perbandingan Belanja Dibayar Dimuka Berdasarkan Eselon I

Per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Unit Eselon I	Belanja Dibayar Dimuka	
	31 Desember 2021	31 Desember 2020
Sekretariat Jenderal	2.325.404.255,00	55.336.289,00
Inspektorat Jenderal	0,00	20.815.960,00
Ditjen Administrasi Hukum Umum	1.245.418.743,00	1.140.811.558,00
Ditjen Pemasyarakatan	102.778.890.032,00	429.720.669,00
Ditjen Imigrasi	10.854.550.995,00	26.749.365.807,00
Ditjen Kekayaan Intelektual	6.425.915.821,00	858.087.634,00
Ditjen Peraturan Perundang-undangan	0,00	0,00
Ditjen Hak Asasi Manusia	0,00	0,00
Badan Pembinaan Hukum Nasional	0,00	0,00
Balitbang Hukum dan HAM	1.084.512,00	0,00
BPSDM Hukum dan HAM	1.034.418.773,00	0,00
TOTAL	124.665.683.131,00	29.254.137.917,00

Terdapat perubahan nilai Belanja Dibayar Dimuka dari data Laporan Keuangan tahun 2021 (*Unaudited*) dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 65

Total Koreksi Nilai Belanja Dibayar Dimuka

Uraian	<i>Unaudited</i>	Koreksi	<i>Audited</i>
Belanja Dibayar Dimuka	117.490.749.724,00	7.174.933.407,00	124.665.683.131,00



Tabel 66
Koreksi Nilai Belanja Dibayar Dimuka Berdasarkan Satuan Kerja

No	Satker	Belanja Dibayar Dimuka		
		Unaudited	Koreksi	Audited
1	DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM	0,00	1.208.491.620,00	1.208.491.620,00
2	BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN HUKUM DAN HAM SULAWESI UTARA	0,00	1.034.418.773,00	1.034.418.773,00
3	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM AMBON	1.627.624.510,00	(107.034.425,00)	1.520.590.085,00
4	KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI SEMARANG	275.051.159,00	520.632.028,00	795.683.187,00
5	KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI PALU	2.115.920.710,00	(131.689.779,00)	1.984.230.931,00
6	DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI	0,00	5.703.788.800,00	5.703.788.800,00
7	DITJEN KEKAYAAN INTELEKTUAL	340.801.831,00	(258.334.831,00)	82.467.000,00
8	Lapas Perempuan Kelas IIB Padang	12.526.366.694,00	(795.338.779,00)	11.731.027.915,00

Koreksi tersebut merupakan dampak tindak lanjut terhadap Temuan BPK yang menyatakan bahwa terdapat selisih progres fisik dengan progres pembayaran pada pembangunan maupun pengadaan peralatan dan mesin serta atas temuan serta kesalahan Pengakuan Belanja Dibayar di Muka Penggunaan RFID TA 2021.

Saldo Belanja Dibayar Dimuka pada Kementerian Hukum dan HAM mengalami kenaikan di antaranya karena masa manfaat (kadaluarsa) masih belum terpakai dan karena dilakukan jurnal pengakuan atas belanja modal dibayar dimuka atas KDP yang progres penyelesaiannya tidak sesuai dengan progres pembayaran yang telah dilakukan sampai dengan 31 Desember 2021. Penyesuaian atas nilai belanja dibayar dimuka dilakukan pada akhir tahun sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 234/PMK.05/2020 tentang Perubahan atas PMK Nomor 225/PMK.05/2016 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada Pemerintah Pusat.



Rincian Belanja Dibayar Dimuka untuk masing-masing satuan kerja per 31 Desember 2021 disajikan pada Tabel berikut.

Tabel 67
Rincian Belanja Dibayar Dimuka berdasarkan Satuan Kerja
Per 31 Desember 2021

No	Uraian Satker	Saldo	Keterangan
Sekretariat Jenderal			
1	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SURABAYA	16.519.701,00	Sewa 2 Unit Terios Kendaraan Roda 4 pada PT. Serasi Autoraya s.d. Februari 2022
		14.982.985,00	Sewa 3 Unit Terios Kendaraan Roda 4 pada PT. Serasi Autoraya s.d. Januari 2022
		6.014.019,00	Sewa 1 Unit Xpander Kendaraan Roda 4 pada PT. Serasi Autoraya s.d. Januari 2022
		11.465.612,00	Sewa 1 Unit Toyota Altis Kendaraan Roda 4 PT. Serasi Autoraya s.d. Januari 2022
2	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM AMBON	367.683.360,00	Sewa Gedung Kantor Wilayah Maluku pada Panca Karya s.d. 31 Desember 2022
		1.520.590.085,00	Belanja dibayar dimuka terdiri dari: - Belanja Modal pembangunan Gedung Kantor Wilayah Maluku (KDP) : PT. DUTAKARYA PRATHAMAUNGGUL dan PT. ANTARIKSA GLOBALINDO - Belanja Modal Jasa Perencanaan untuk pembangunan Gedung Kantor Wilayah Maluku (KDP) PT. MERIDIAN ADHIREKA
3	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAYAPURA	25.017.534,00	Sewa Kendaraan Mobil Operasional Kantor pada PT. Bumi Jasa Utama s.d. 19 Januari 2022



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Catatan Atas Laporan Keuangan – *Penjelasan atas Pos-Pos Neraca*
Per 31 Desember Tahun Anggaran 2021 (*Audited*)
Dengan Angka Perbandingan 31 Desember Tahun Anggaran 2020
(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

4	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM KENDARI	245.958.904,00	Sewa kendaraan operasional pejabat Eselon II, III dan IV pada PT. Bumi Jasa Utama s.d. 4 Maret 2022
		2.416.438,00	Sewa Rumah Dinas Pejabat Divisi Keimigrasian s.d. 18 Februari 2022
		2.909.589,00	Sewa Rumah Dinas Pejabat Divisi Keimigrasian s.d. 28 Februari 2022
		4.832.877,00	Sewa Rumah Dinas Pejabat Divisi Keimigrasian s.d. 18 Februari 2022
		2.613.699,00	Sewa Rumah Dinas Pejabat Divisi Keimigrasian s.d. 22 Februari 2022
		2.909.589,00	Sewa Rumah Dinas Pejabat Divisi Keimigrasian s.d. 28 Februari 2022
5	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PROPINSI MALUKU UTARA	101.489.863,00	Sewa 2 Unit Kendaraan kepada PT. Adi Sarana Armada Tbk dengan masa sewa s.d. 15 Februari 2022
TOTAL		2.325.404.255,00	
Ditjen AHU			
1	DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM	1.208.491.620,00	Belanja barang dibayar dimuka atas pekerjaan Perpanjangan Lisensi ATS SNS
2	BALAI HARTA PENINGGALAN SURABAYA	36.927.123,00	Sewa kendaraan dinas kepada PT. Serasi Autoraya s.d. 6 April 2022
TOTAL		1.245.418.743,00	
Ditjen Pemasyarakatan			
1	LEMBAGA PEMASYARAKATAN NARKOTIKA YOGYAKARTA	34.107.035,00	Sewa tanah Sulthan Ground Karaton Ngayogyakarta s.d. 9 Sept 2028
2	BALAI PEMASYARAKATAN JAKARTA SELATAN	172.358,00	Pembayaran langganan Zoom s.d 24 Januari 2022
3	RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAN NEGARA JAKARTA SELATAN	323.368.758,00	CV. PANCA HAFRITA REKSA AGUNG s.d. 17 Okt 2022
4	DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN	26.436.095.000,00	Belanja senjata Less Lethal yang sudah dilakukan pelunasan pembayaran namun barang belum diterima s.d. 31 Desember 2021
		50.078.511.720,00	Belanja Xray Portable yang sudah dilakukan pelunasan pembayaran



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Catatan Atas Laporan Keuangan – *Penjelasan atas Pos-Pos Neraca*
Per 31 Desember Tahun Anggaran 2021 (*Audited*)
Dengan Angka Perbandingan 31 Desember Tahun Anggaran 2020
(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

			namun barang belum diterima s.d. 31 Desember 2021
		13.981.686.712,00	Pembangunan gedung Lapas Nusakambangan yang belum selesai s.d. 31 Desember 2021 dan dilanjutkan pembangunannya pada tahun 2022 dengan jaminan Bank Garansi
5	Lapas Perempuan Kelas IIB Padang	11.731.027.915,00	Pembangunan gedung dan bangunan lapas yang belum selesai s.d. 31 Desember 2021 dan dilanjutkan pembangunannya di 2022 oleh PT. SAKARNAS
6	LAPAS NARKOTIKA KELAS IIB RUMBAI	183.932.534,00	Pembangunan gedung dan bangunan lapas yang belum selesai s.d. 31 Desember 2021 dan dilanjutkan pembangunannya di 2022
7	RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAN NEGARA INDRAMAYU	9.988.000,00	Belanja pengadaan aplikasi android yang belum selesai s.d. 31 Desember 2021 dan masih dalam proses pembuatan serta penyempurnaan aplikasi
TOTAL		102.778.890.032,00	
Ditjen Imigrasi			
1	DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI	5.703.788.800,00	Pengadaan Air Handling Unit yang belum diterima 100% s.d. 31 Desember 2021
2	KANTOR IMIGRASI KELAS I KHUSUS NON TPI JAKARTA SELATAN	27.359.781,00	Sewa gedung untuk ULP Fatmawati s.d. 01 Mei 2022
3	KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI CIREBON	1.436.303,00	Pembayaran langganan Zoom s.d 5 Agustus 2022
4	KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI TARAKAN	12.810.959,00	Sewa Rumah untuk Kasubsi s.d 30 November 2022
5	KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI SURAKARTA	251.520.548,00	Sewa Gedung ULP s.d 28 Okt 2022
6	KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI SIBOLGA	182.539.726,00	Sewa Gedung UKK Gunungsitoli s.d 4 November 2023



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Catatan Atas Laporan Keuangan – *Penjelasan atas Pos-Pos Neraca*
Per 31 Desember Tahun Anggaran 2021 (*Audited*)
Dengan Angka Perbandingan 31 Desember Tahun Anggaran 2020
(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

7	KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI JAKARTA UTARA	1.893.164.228,00	Sewa Gedung Ir. Andry Arifin Tarjono s.d. 29 September 2022
8	KANTOR IMIGRASI KELAS II NON TPI KARAWANG	1.032.925,00	Pembayaran langganan Zoom s.d 6 Juni 2022
9	RUMAH DETENSI IMIGRASI MEDAN	491.803,00	Sewa Rumah Dinas Karudenim (SPK: W.2.IMI.IMI.7-PB.02.07-0719) s.d 10 Januari 2022
		491.804,00	Sewa Rumah Dinas Kasi (SPK: W.2.IMI.IMI.7-PB.02.07-0180) s.d 10 Januari 2022
10	KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI SEMARANG	795.683.187,00	Pekerjaan Renovasi Gedung Kantor oleh PT Anggada Husada Pertiwi yang belum selesai 100% s.d. 31 Desember 2021
11	KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI PALU	1.984.230.931,00	Pembangunan Gedung Kantor dan Rumah Dinas pekerjaan pembangunan yang belum selesai 100% s.d. 31 Desember 2021 oleh PT. Nurman Abadi
TOTAL		10.854.550.995,00	
Ditjen Kekayaan Intelektual			
1	DITJEN KEKAYAAN INTELEKTUAL	82.467.000,00	PT. Rasindo Tata Laksana atas pengadaan Pemeliharaan Chiller yang per 31 Desember 2021 hanya terselesaikan sebesar 55,9%. PPK dan Penyedia bersepakat melakukan adendum kontrak dan mengajukan perpanjangan BG sehingga sisa pekerjaan sebesar 44,1% atau Rp82.467.00000 akan diselesaikan pada 31 Januari 2022
		2.858.350.000,00	PT. Agusta Triasa pengadaan Perlengkapan Ruang Gedung DJKI Lantai 5 yang per 31 Desember 2021 hanya terselesaikan sebesar 31,27%. PPK dan Penyedia bersepakat melakukan adendum kontrak dan mengajukan perpanjangan BG sehingga sisa pekerjaan sebesar 68,73% atau



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Catatan Atas Laporan Keuangan – *Penjelasan atas Pos-Pos Neraca*
Per 31 Desember Tahun Anggaran 2021 (*Audited*)
Dengan Angka Perbandingan 31 Desember Tahun Anggaran 2020
(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

			Rp2.858.350.000,00 akan diselesaikan pada 19 Februari 2022
		3.403.500.100,00	PT. Astra Graphia pengadaan Perangkat TIK Data Center yang per 31 Desember 2021 hanya terselesaikan sebesar 94,38%. PPK dan Penyedia bersepakat melakukan adendum kontrak dan mengajukan perpanjangan BG sehingga sisa pekerjaan sebesar 5,62% atau Rp3.403.500.100,00 akan diselesaikan pada 31 Januari 2022
2	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SURABAYA	8.864.379,00	Pengadaan Langsung Sewa Komputer oleh CV Mulya Abadi s.d. 31 Januari 2022
3	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM YOGYAKARTA	35.445.246,00	Sewa Kamera oleh CV.Bintang Surya Madani dengan masa manfaat 365 hari kalender sejak 20 Mei 2021 s/d 20 Mei 2022
		37.289.096,00	Sewa PC dan Laptop oleh CV. Wahyu Nugraha masa manfaat 365 hari kalender sejak 26 Maret 2021 s/d 25 Maret 2022
TOTAL		6.425.915.821,00	
Balitbang Hukum dan HAM			
1	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SURABAYA	359.523,00	Pembayaran langganan Zoom s.d Maret 2022
2	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PROPINSI MALUKU UTARA	724.989,00	Pembayaran langganan Zoom s.d April 2022
TOTAL		1.084.512,00	
BPSDM			



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Catatan Atas Laporan Keuangan – *Penjelasan atas Pos-Pos Neraca*
Per 31 Desember Tahun Anggaran 2021 (*Audited*)
Dengan Angka Perbandingan 31 Desember Tahun Anggaran 2020
(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1	BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN HUKUM DAN HAM SULAWESI UTARA	1.034.418.773,00	Pembangunan Gedung serbaguna 2 lantai dan asrama 2 lantai yg belum selesai 100% s.d. 31 Desember 2021
TOTAL		1.034.418.773,00	
GRAND TOTAL		124.665.683.131,00	

C.5. UANG MUKA BELANJA

Uang Muka Belanja
Rp0,00

Uang Muka Belanja per tanggal 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing adalah sebesar Rp0,00 dan Rp2.394.380.000,00. Uang muka belanja merupakan pemberian uang kepada pihak lain yang belum memberikan prestasi atau memenuhi kewajiban atas dasar suatu kontrak atau kesepakatan tertentu. Rincian perbandingan Uang Muka Belanja adalah sebagai berikut:

Tabel 68
Perbandingan Uang Muka Belanja Berdasarkan Eselon I
Per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Unit Eselon I	Uang Muka Belanja	
	31 Desember 2021	31 Desember 2020
Sekretariat Jenderal	0,00	0,00
Inspektorat Jenderal	0,00	0,00
Ditjen Administrasi Hukum Umum	0,00	0,00
Ditjen Pemasyarakatan	0,00	2.394.380.000,00
Ditjen Imigrasi	0,00	0,00
Ditjen Kekayaan Intelektual	0,00	0,00
Ditjen Peraturan Perundang-undangan	0,00	0,00
Ditjen Hak Asasi Manusia	0,00	0,00
Badan Pembinaan Hukum Nasional	0,00	0,00
Balitbang Hukum dan HAM	0,00	0,00
BPSDM Hukum dan HAM	0,00	0,00
TOTAL	0,00	2.394.380.000,00

C.6. PENDAPATAN YANG MASIH HARUS DITERIMA

Pendapatan yang
Masih Harus Diterima
Rp25.139.898,00

Pendapatan yang Masih Harus Diterima per tanggal 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing adalah sebesar Rp25.139.898,00 dan Rp31.297.367,00. Pendapatan yang Masih Harus Diterima merupakan



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Catatan Atas Laporan Keuangan – *Penjelasan atas Pos-Pos Neraca*
Per 31 Desember Tahun Anggaran 2021 (*Audited*)
Dengan Angka Perbandingan 31 Desember Tahun Anggaran 2020
(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

penerimaan di masa yang akan datang yang telah diakui dan dicatat sebagai pendapatan periode berjalan karena manfaat atas barang dan jasa telah diberikan oleh pemerintah kepada pihak lain. Pendapatan yang Masih Harus Diterima di Kementerian Hukum dan HAM adalah berupa pendapatan sewa atas tanah, gedung dan bangunan. Rincian Pendapatan yang Masih Harus Diterima disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 69
Perbandingan Pendapatan Yang Masih Harus Diterima
Berdasarkan Eselon I Per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Unit Eselon I	Pendapatan yang Masih Harus Diterima	
	30 Desember 2021	31 Desember 2020
Sekretariat Jenderal	0,00	0,00
Inspektorat Jenderal	0,00	0,00
Ditjen Administrasi Hukum Umum	0,00	0,00
Ditjen Pemasyarakatan	15.056.598,00	7.871.100,00
Ditjen Imigrasi	5.918.300,00	7.769.863,00
Ditjen Kekayaan Intelektual	0,00	0,00
Ditjen Peraturan Perundang-undangan	0,00	0,00
Ditjen Hak Asasi Manusia	0,00	15.656.404,00
Badan Pembinaan Hukum Nasional	4.165.000,00	0,00
Balitbang Hukum dan HAM	0,00	0,00
BPSDM Hukum dan HAM	0,00	0,00
TOTAL	25.139.898,00	31.297.367,00

Rincian Belanja dibayar dimuka (prepaid) per 31 Desember 2021 pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan satuan kerja disajikan pada table berikut:



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Catatan Atas Laporan Keuangan – *Penjelasan atas Pos-Pos Neraca*
Per 31 Desember Tahun Anggaran 2021 (*Audited*)
Dengan Angka Perbandingan 31 Desember Tahun Anggaran 2020
(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Tabel 70
Rincian Pendapatan Yang Masih Harus Diterima Berdasarkan Satuan Kerja
per 31 Desember 2021

No	Nama Satker	Saldo	Keterangan
Ditjen Pemasyarakatan			
1	LEMBAGA PEMASYARAKATAN BANDA ACEH	7.167.328,00	Koperasi pengayoman (Kanwil Aceh) atas sewa tanah keudah milik lapas banda aceh periode 1 Oktober 2021 s.d.31 Desember 2021 (3 bulan).
2	RUMAH TAHANAN NEGARA NEGARA	1.318.192,00	Sewa kantin oleh Ni Made Dani Kusuma yang belum dibayarkan periode 23 Juli 2021 sd 31 Des 2021
3	Lapas Perempuan Kelas IIA Samarinda	1.917.078,00	Sewa kantin oleh PT Anugrah Vata Abadi periode sewa dari 26 Juli 2021 s.d. 26 juli 2022
4	RUMAH TAHANAN NEGARA SAMARINDA	4.654.000,00	Sewa atas Gudang penyimpanan beras oleh CV Yashinta Dewi periode 1 Januari 2021 s.d. 31 Januari 2021
	SUBTOTAL	15.056.598,00	
Ditjen Imigrasi			
1	KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI MALANG	5.918.300,00	Sewa koperasi periode Januari 2021 s.d. Desember 2021 yang belum terima pembayarannya
	SUBTOTAL	5.918.300,00	
BPHN			
1	BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL	4.165.000,00	Pendapatan atas sewa kantin periode Juni 2021 -September 2021 yang belum diterima pembayarannya s.d. 31 Desember 2021.
	SUBTOTAL	4.165.000,00	
TOTAL		25.139.898,00	

C.7. PIUTANG PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

*Piutang Penerimaan
Negara Bukan Pajak
Rp231.767.531.548,0
0*

Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak per tanggal 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing adalah sebesar Rp231.767.531.548,00 dan Rp271.664.242.306,00 dengan rincian sebagai berikut:



Tabel 71
Perbandingan Rincian Piutang Bukan Pajak
Per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Jenis	31 Desember 2021	31 Desember 2020
Piutang PNB	227.618.296.956,00	270.394.017.744,00
Piutang Lainnya	4.149.234.592,00	1.270.224.562,00
Jumlah	231.767.531.548,00	271.664.242.306,00

Piutang Bukan Pajak merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan namun belum diselesaikan pembayarannya. Sesuai dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-02.KU.05.01 Tahun 2017 tentang Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrua, Piutang Bukan Pajak pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia antara lain berasal dari :

1. Pengakuan PNB lainnya dari hasil temuan BPK atau Inspektorat Jenderal atas kerugian negara pada transaksi pengadaan barang dan pekerjaan;
2. Piutang PNB dari hasil temuan BPK terkait beban alat angkut untuk orang asing yang tidak memiliki dokumen;
3. Piutang PNB atas pencairan garansi bank dari pekerjaan yang belum selesai;
4. Piutang PNB yang berasal dari transaksi hak dan perijinan berupa pelayanan atas pesan nama dan pendirian Perseroan Terbatas yang telah diberikan oleh Ditjen AHU akan tetapi pemohon belum melakukan pembayaran;
5. Piutang atas layanan hukum Ditjen KI berupa Piutang Paten Batal Demi Hukum (BDH), Piutang Pembatalan Paten atas Permintaan Sendiri (PAPS) dan Piutang Paten Keterlambatan; atau
6. Piutang PNB atas sewa tanah, gedung dan bangunan yang belum dibayarkan oleh pihak ketiga. Atas pendapatan sewa tanah, gedung, dan bangunan, terdapat beberapa satuan kerja yang telah melakukan pencatatan piutang atas pemanfaatan aset oleh pihak lain berdasarkan tarif kontrak tahun sebelumnya, dan akan dilakukan koreksi ketika surat penetapan tarif baru telah terbit dari KPKNL.



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Catatan Atas Laporan Keuangan – *Penjelasan atas Pos-Pos Neraca*
Per 31 Desember Tahun Anggaran 2021 (*Audited*)
Dengan Angka Perbandingan 31 Desember Tahun Anggaran 2020
(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Tabel 72
Perbandingan Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak
Berdasarkan Eselon I Per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Unit Eselon I	Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak	
	31 Desember 2021	31 Desember 2020
Sekretariat Jenderal (Pusat)	8.175.649.532,00	6.486.782.852,00
Inspektorat Jenderal	0,00	0,00
Ditjen Administrasi Hukum Umum	687.449.103,00	347.921.704,00
Ditjen Pemasarakatan	2.907.697.623,00	0,00
Ditjen Imigrasi	4.442.231.152,00	14.605.413.413,00
Ditjen Kekayaan Intelektual	215.554.504.138,00	6.863.728.239,00
Ditjen Peraturan Perundang-undangan	0,00	243.305.396.098,00
Ditjen Hak Asasi Manusia	0,00	0,00
Badan Pembinaan Hukum Nasional	0,00	0,00
Balitbang Hukum dan HAM	0,00	0,00
BPSDM Hukum dan HAM	0,00	55.000.000,00
TOTAL	231.767.531.548,00	271.664.242.306,00

Terdapat perubahan nilai Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak dari data Laporan Keuangan tahun 2021 (*Unaudited*) dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 73
Total Koreksi Nilai Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak

Uraian	<i>Unaudited</i>	Koreksi	<i>Audited</i>
Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak	239.379.675.136,00	(7.612.143.588,00)	231.767.531.548,00

Tabel 74
Koreksi Nilai Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak
Berdasarkan Satuan Kerja

No	Satker	Belanja Dibayar Dimuka		
		<i>Unaudited</i>	Koreksi	<i>Audited</i>
1	BALAI HARTA PENINGALAN MEDAN	17.000.500,00	(17.000.500,00)	0,00
2	DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM	1.243.914.868,00	(815.825.000,00)	428.089.868,00
3	Lapas anak Kelas III Batam	606.476.830,00	(606.325.200,00)	151.630,00



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Catatan Atas Laporan Keuangan – *Penjelasan atas Pos-Pos Neraca*
Per 31 Desember Tahun Anggaran 2021 (*Audited*)
Dengan Angka Perbandingan 31 Desember Tahun Anggaran 2020
(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

4	RUMAH TAHANAN NEGARA KABANJAHE	0,00	362.917.826,00	362.917.826,00
5	LEMBAGA PEMASYARAKATAN NARKOTIKA BANDAR LAMPUNG	288.617.429,00	(288.617.429,00)	0,00
6	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BANDUNG	17.950.000,00	(17.950.000,00)	0,00
7	LEMBAGA PEMASYARAKATAN MANOKWARI	32.945.428,00	(32.945.428,00)	0,00
8	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAWA TENGAH	8.232.500,00	(8.232.500,00)	0,00
9	RUMAH TAHANAN NEGARA AMBON	19.817.431,00	(19.817.431,00)	0,00
10	DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN	258.596.500,00	(258.596.500,00)	0,00
11	INSPEKTORAT JENDERAL	40.489.000,00	(40.489.000,00)	0,00
12	LAPAS KELAS III AMURANG	1.206.450,00	(1.206.450,00)	0,00
13	RUMAH TAHANAN NEGARA MANADO	94.310.000,00	(94.310.000,00)	0,00
14	LEMBAGA PEMASYARAKATAN WAY KANAN	77.537.792,00	(77.537.792,00)	0,00
15	Lapas Perempuan Kelas III Manokwari	46.768.765,00	(46.768.765,00)	0,00
16	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BENGKULU	103.699.276,00	(103.699.276,00)	0,00
17	LAPAS KELAS IIA PANCUR BATU	0,00	965.477.858,00	965.477.858,00
18	DITJEN KEKAYAAN INTELEKTUAL	2.660.800.000,00	(2.252.438.383,00)	408.361.617,00
19	RUMAH TAHANAN NEGARA SUKADANA	20.843.530,00	(20.843.530,00)	0,00



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Catatan Atas Laporan Keuangan – *Penjelasan atas Pos-Pos Neraca*
Per 31 Desember Tahun Anggaran 2021 (*Audited*)
Dengan Angka Perbandingan 31 Desember Tahun Anggaran 2020
(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

20	LEMBAGA PEMASYARAKATAN TOLI-TOLI	89.524.315,00	(89.524.315,00)	0,00
21	LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK BANDAR LAMPUNG	148.798.880,00	(148.798.880,00)	0,00
22	LEMBAGA PEMASYARAKATAN BALIKPAPAN	64.390.524,00	(64.390.524,00)	0,00
23	BALAI PEMASYARAKATAN JAKTIM/JAKUT	39.209.403,00	(39.209.403,00)	0,00
24	LPKA Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur	8.046.000,00	(8.046.000,00)	0,00
25	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BANDUNG	0,00	188.114.789,00	188.114.789,00
26	DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI	4.300.240.430,00	(4.300.240.430,00)	0,00
27	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM AMBON	0,00	526.939.543,00	526.939.543,00
28	Lapas Perempuan Kelas IIB Padang	302.780.868,00	(302.780.868,00)	0,00

Koreksi tersebut disebabkan antara lain:

1. Dampak tindak lanjut terhadap piutang hasil pemeriksaan temuan BPK dan Inspektorat Jenderal yang belum dapat disajikan didalam neraca dikarenakan belum terdapat SKTJM beserta jaminan atas piutang. Atas temuan dimaksud diungkapkan pada CaLK Pengungkapan Lainnya.
2. Pengakuan piutang atas tindak lanjut temuan pemeriksaan BPK T.A. 2021 berupa kelebihan pembayaran atas pekerjaan dan telah disetorkan ke kas negara sebelum tanggal pelaporan keuangan T.A 2021 *Audited*.

Rincian atas Transaksi Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak berdasarkan satuan kerja per 31 Desember 2021 dapat dilihat pada lampiran.



Bagian Lancar
Tagihan TP/TGR
Rp225.672.008,00

C.8. BAGIAN LANCAR TAGIHAN TP/TGR

Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per tanggal 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing adalah sebesar Rp225.672.008,00 dan Rp386.942.668,00. Bagian Lancar Tagihan TP/TGR merupakan Tagihan TP/TGR yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 234/MK.05/2020 tentang Perubahan atas PMK Nomor 225/PMK.05/2016 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrua pada Pemerintah Pusat. Rincian Bagian Lancar Tagihan TP/TGR adalah sebagai berikut:

Tabel 75
Perbandingan Rincian Bagian Lancar Tagihan TP/TGR
Per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Jenis	31 Desember 2020	31 Desember 2020
Bagian Lancar TP	24.000.000,00	44.400.000,00
Bagian Lancar TGR	201.672.008,00	342.542.668,00
Jumlah	225.672.008,00	386.942.668,00

Tabel 76
Perbandingan Bagian Lancar Tagihan TP/TGR Berdasarkan Eselon I
Per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Unit Eselon I	Bagian Lancar Tagihan TP/TGR	
	31 Desember 2021	31 Desember 2020
Sekretariat Jenderal	46.800.000,00	290.168.708,00
Inspektorat Jenderal	0,00	0,00
Ditjen Administrasi Hukum Umum	0,00	20.400.000,00
Ditjen Pemasyarakatan	50.216.000,00	0,00
Ditjen Imigrasi	128.656.008,00	46.373.960,00
Ditjen Kekayaan Intelektual	0,00	30.000.000,00
Ditjen Peraturan Perundang-undangan	0,00	0,00
Ditjen Hak Asasi Manusia	0,00	0,00
Badan Pembinaan Hukum Nasional	0,00	0,00
Balitbang Hukum dan HAM	0,00	0,00
BPSDM Hukum dan HAM	0,00	0,00
TOTAL	225.672.008,00	386.942.668,00



Rincian atas Transaksi Bagian Lancar Tagihan TP/TGR berdasarkan satuan kerja per 31 Desember 2021 dapat disajikan pada tabel berikut :

Tabel 77
Rincian Bagian Lancar Tagihan TP/TGR Berdasarkan Satuan Kerja
Per 31 Desember 2021

No	Nama Satker	Jumlah Piutang Lancar	Keterangan
Sekretariat Jenderal			
1	SEKRETARIAT JENDERAL (PUSAT)	22.800.000,00	TGR atas : - Marul sebesar Rp2.400.000,00 denda Keterlambatan Pembangunan Fisik - Nurjaman sebesar Rp20.400.000,00 Kehilangan Kendaraan Dinas Roda 4
2	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM AMBON	24.000.000,00	TGR atas nama Ronal Tuasun
Total		46.800.000,00	
Ditjen Pemasyarakatan			
1	LEMBAGA PEMASYARAKATAN BANCEUY BANDUNG	18.000.000,00	TGR atas hasil Temuan ITJEN berupa penyediaan BAMA 2019 atas nama KUSMANA
2	LAPAS KELAS III AMURANG	6.000.000,00	TGR atas: - FENDY TUMURANG (DAYA TAHAN TUBUH) - Michael Malara (Pembelian BBM) - Fendy Tumurang dan Hendra Rompis (Penggunaan Anggaran Kegiatan Kemandirian)
3	RUMAH TAHANAN NEGARA TERNATE	2.115.000,00	TGR atas UMAR JAWA Kehilangan BMN Berupa kendaraan dinas roda 2
4	BALAI PEMASYARAKATAN GARUT	6.150.000,00	TGR atas nama Anggi Suryawan atas TGR Hilang Motor
5	RUMAH PENYIMPANAN BARANG SITAAN NEGARA BANDUNG, KOT.BANDUNG, JAWA BARAT	12.000.000,00	TGR atas temuan Itjen berupa penyediaan BAMA an. Sambas Hermansyah



6	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PAPUA BARAT	5.951.000,00	Yosep Y. Weyasu Atas hasil Audit BPK Tahun 2013 penyalahgunaan UP oleh Yosep Y.Weyasu
Total		50.216.000,00	
Ditjen Imigrasi			
1	KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI MANADO	74.656.008,00	Muhammad Akmal, Pelimpahan TGR dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Barat berupa kerusakan kendaraan dinas roda 4 (empat)
2	KANTOR IMIGRASI KELAS II NON TPI MADIUN	6.000.000,00	TGR atas hilangnya Kendaraan Dinas R4 Nopol AE 1067 FP a.n Waskito Purnomo
3	KANTOR IMIGRASI KELAS III NON TPI KEDIRI	24.000.000,00	Catur Adi Putra, TGR atas hilangnya kendaraan Dinas R4 Nopol AG 506 AP
4	KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI TERNATE	24.000.000,00	TGR atas nama Aisa Arsad Pengembalian PNPB
Total		128.656.008,00	
GRAND TOTAL		225.672.008,00	

C.9. PENYISIHAN PIUTANG TIDAK TERTAGIH PIUTANG LANCAR

*Penyisihan Piutang
Tidak Tertagih –
Piutang Lancar
(Rp216.759.589.194,00
)*

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Lancar per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar **(Rp216.759.589.194,00)** dan **(Rp244.725.704.617,00)**. Penyisihan piutang tak tertagih – piutang lancar merupakan estimasi atas ketidaktertagihan piutang lancar yang ditentukan oleh kualitas piutang masing-masing debitur. Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Lancar berdasarkan kategori piutang disajikan sebagai berikut:



Tabel 78
Rincian Penyisihan Piutang Tak tertagih – Piutang Lancar
Per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Kualitas Piutang	31 Desember 2021			31 Desember 2020		
	Nilai Piutang Jk. Pendek	% Penyisihan	Nilai Penyisihan	Nilai Piutang Jk. Pendek	% Penyisihan	Nilai Penyisihan
Piutang Bukan Pajak						
Lancar	15.072.029.792,00	0,50%	75.359.078,00	27.164.052.225,00	0,50%	285.070.259,00
Kurang Lancar	0,00	10%	0,00	50.000.000,00	10%	5.000.000,00
Diragukan	24.800.000,00	50%	12.400.000,00	24.800.000,00	50%	12.400.000,00
Macet	216.670.701.756,00	100%	216.670.701.756,00	244.421.279.089,00	100%	244.421.279.089,00
Jumlah	231.767.531.548,00		216.758.460.834,00	271.660.131.314,00		244.723.749.348,00
Bagian Lancar tagihan TP/TGR						
Lancar	225.672.008,00	0,50%	1.128.360,00	386.942.668,00	0,50%	1.934.714,00
Kurang Lancar	0,00	10%	0,00	0,00	10%	0,00
Diragukan	0,00	50%	0,00	0,00	50%	0,00
Macet	0,00	100%	0,00	0,00	100%	0,00
Jumlah	225.672.008,00		1.128.360,00	386.942.668,00		1.934.714,00
Total	231.993.203.556,00		216.759.589.194,00	272.047.073.982,00		244.725.684.062,00

Penyisihan Piutang kategori macet di antaranya terdapat pada satuan kerja sebagai berikut:

- Piutang Bukan Pajak pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum sebesar Rp652.184.235 merupakan piutang yang berasal dari temuan BPK atas kewajiban PNPB pesan nama perseroan yang berasal dari 155 Notaris. Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum telah melakukan penetapan piutang pada 29 April 2016 dan telah dilakukan pelimpahan ke DJKN. Selanjutnya, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum telah mengirim surat kepada Kepala KPKNL Jakarta II dengan Nomor AHU.1.UM.01.01-1821 Tanggal 3 September 2018 Hal Permohonan Penetapan Piutang Sementara Belum Dapat Ditagih (PSBDT). Menindaklanjuti surat Direktorat Jenderal



Administrasi Hukum Umum tersebut, Ketua PUPN Cabang DKI Jakarta atau KPKNL Jakarta II menerbitkan surat PSBDT sebanyak 151 surat dengan Nomor PSBDT-28/PUPNC.10.02/2018 sampai dengan PSBDT-179/PUPNC.10.02/2018 Tanggal 18 September 2018 Hal Pernyataan Piutang Negara Sementara Belum Dapat Ditagih.

Piutang yang telah diterbitkan PSBDT perlu menunggu 2 (dua) tahun untuk diajukan usulan penghapusan piutang dalam Neraca Laporan Keuangan.

No	Keterangan	Jumlah Notaris	Nilai Piutang
1	Piutang >8.000.000	3	Rp36.293.313,60
2	Sudah PSBDT	139	Rp223.065.921,60
	Total	142	Rp259.359.235,20

- Direktorat Jenderal Imigrasi senilai Rp896.500.000,00 an. PT Gagasan Adi Surya berupa piutang pekerjaan yang tidak selesai atas pengadaan perangkat pendukung operasional kantor imigrasi, Rp822.661.600,00 an. PT Indomukti Nusantara berupa piutang pekerjaan yang tidak selesai atas pengadaan peralatan komunikasi keimigrasian, dan Rp80.000.090,00 an. PT Central Auto Computerindo berupa piutang pekerjaan yang tidak selesai atas pengadaan kendaraan imigrasi. Atas piutang macet tersebut telah diserahkan penyelesaiannya kepada KPKNL.
- Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Ngurah Rai senilai Rp190.000.000,00 yang merupakan piutang tahun 2014 atas beban alat angkut orang asing yang tidak memiliki dokumen atas nama maskapai Mandala Airlines dengan nama penumpang Paula Andrea Perez Ocampo, Miljenovic Anja, dan Lizeth Odriguez akibat penumpang yang bersangkutan tidak memiliki visa. Saat ini piutang tersebut sudah dilakukan pelimpahan ke KPKNL dengan Surat W20.IMI1.UM.01.01-2532 Tanggal 30 Mei 2017 karena maskapai yang bersangkutan sudah tutup.



- Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam senilai Rp1.100.000.000,00 yang merupakan piutang tahun 2017 s.d 2019 atas beban alat angkut orang asing yang tidak memiliki dokumen atas nama maskapai PT. Pelayaran Megah Jaya Sejahtera, PT. Batam Fast, PT. Sindo Ferry, PT. Indonesia Marine Service dan PT. Prima Buana Gema Bahari akibat penumpang yang bersangkutan tidak memiliki visa. Saat ini piutang tersebut sudah dilakukan pelimpahan ke KPKNL.
- Ditjen KI berupa :
 - **Piutang Batal Demi Hukum (BDH)** 31 Desember 2020 sebesar Rp218.500.855.582,00. Pada Bulan Januari s.d. Desember 2021 terdapat mutasi pada saldo piutang biaya tahunan Paten BDH sebagai berikut:
 - a. Pelunasan atas 767 ID atau 215 Pemegang Paten sebesar Rp19.672.267.896,00.
 - b. Koreksi kurang nominal piutang atas 86 ID Paten BDH, dimana 85 ID mendapatkan keringanan pembayaran piutang disebabkan adanya crash program dari Kementerian Keuangan melalui KPKNL Jakarta II yang semula jumlah piutangnya sebesar Rp1.941.595.000,00 berkurang sebesar Rp1.503.446.400,00 menjadi Rp438.148.600,00 yang pada bulan Mei s.d. Desember 2021 telah dilakukan pelunasan.
 - c. Koreksi saldo awal atas 1 ID yaitu ID 1252 atas nama "NISSIN KOGYO KABUSHIKI KAISHA" yang berkurang sebesar Rp10.140.000,00 dikarenakan terdapat pembayaran pada tahun 2019 namun belum dilakukan input mutasi kurang pada tahun 2019.
 - d. Koreksi tambah atas 1 ID yaitu ID 12606 sebesar Rp30.225.000,00 yang dibatalkan pelunasannya berdasarkan Berita Acara Rekonsiliasi antara DJKI dan KPKNL pada Bulan September 2021.



- e. Penambahan jumlah pemegang paten dikarenakan adanya perubahan nama pemilik paten berdasarkan surat Sekretaris Ditjen KI Nomor HKI.1-KU.02.02-1239 yang menyatakan bahwa ID3769 merupakan paten atas nama Rauma Materials Technology Oy yang sebelumnya tercatat atas nama BP Chemicals Limited.
- f. Penghapusan atas 217 ID Piutang BDH berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 105/KM.6/2021 tanggal 22 Juli 2021 tentang Penghapusan Secara Bersyarat Piutang Negara c.q. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Atas Nama Shantera Pharmaceuticals (SCHWEIZ) GMBH dan Kawan-kawan (225 Penanggung Utang) pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual sebesar Rp2.132.493.750,00. Dari 225 ID Paten yang disetujui dihapuskan bersyarat, terdapat 8 ID yang melakukan pelunasan pada periode Juli s.d. Desember 2021 sehingga jumlah nilai yang piutang yang dihapusbukukan pada Laporan Keuangan Ditjen KI adalah sebesar Rp2.077.343.750,00.

Atas mutasi dan koreksi tersebut, saldo piutang biaya tahunan paten BDH pada 31 Desember 2021 menjadi sebesar Rp195.267.882.536,00.

- **Total piutang Pembatalan atas Permintaan Sendiri (PAPS)** per 31 Desember 2020 sebanyak 1.130 ID atau 720 Pemegang Paten sebesar Rp23.692.297.466,00. Pada Bulan Januari s.d. Desember 2021 terdapat mutasi pada saldo piutang biaya tahunan Paten PAPS sebagai berikut:
 - a. Pada 1 Januari 2021, terdapat koreksi atas saldo awal piutang PAPS pada ID 5508 atas nama "MITSUBISHI DENKI KABUSHIKI KAISHA" dari semula Rp113.575.000,00



- menjadi Rp16.600.000,00 dan koreksi pencatatan ganda atas nama pemegang paten "CHUNG MIN LINERBAGS (HUI ZHOU) LTD".
- b. Terdapat pelunasan piutang sebanyak 178 ID atau 79 Pemegang Paten sebesar Rp3.102.680.881,00.
 - c. Koreksi kurang nominal piutang atas 5 ID Paten PAPS atas 2 Pemegang Paten yang mendapatkan keringanan pembayaran piutang disebabkan adanya crash program dari Kementerian Keuangan melalui KPKNL Jakarta II yang semula jumlah piutangnya sebesar Rp34.720.000,00 berkurang sebesar Rp24.374.000,00 menjadi Rp Rp10.346.000,00 yang pada bulan Juli s.d. Desember 2021 telah dilakukan pelunasan.
 - d. Terdapat koreksi yang menjadikan saldo piutang lunas pada 2 ID yaitu ID 20733 berdasarkan surat Direktur Paten, DTLST dan Rahasia Dagang Nomor HKI.3-HI.05.03.03AR.20733/2021 sebesar Rp7.250.000,00 dan ID 37976 berdasarkan surat Direktur Paten, DTLST dan Rahasia Dagang Nomor HKI.3-HI.05.03.03AR.37976/2021 sebesar Rp4.900.000,00.
 - e. Penghapusan atas 122 ID Piutang BDH berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 192/KM.6/2021 tanggal 15 November 2021 tentang Penghapusan Secara Bersyarat Piutang Negara c.q. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Atas Nama Privacom B.V dan Kawan-kawan (130 Penanggung Utang) pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual sebesar Rp717.682.500,00. Dari 130 ID Paten yang disetujui dihapuskan bersyarat, terdapat 8 ID yang melakukan pelunasan pada periode Juli



s.d. Desember 2021 sehingga jumlah nilai yang piutang yang dihapusbukukan pada Laporan Keuangan Ditjen KI adalah sebesar Rp667.805.000,00.

Atas mutasi dan koreksi tersebut, saldo piutang biaya tahunan paten PAPS pada 31 Desember 2021 menjadi sebesar Rp19.788.312.585,00.

- **Piutang Paten Dihapuskan** merupakan piutang yang muncul apabila pemegang paten tidak membayar biaya tahunan selama tiga tahun berturut-turut terhadap paten yang diajukan, diproses dan disetujui pada saat berlakunya UU No. 14 Tahun 2001 Tentang Paten, namun keputusan dibatalkan atas paten tersebut terbit setelah berlakunya UU No. 13 Tahun 2016 Tentang Paten. Pada 31 Desember 2020 terdapat saldo Piutang Paten Dihapuskan sebesar Rp159.628.750,00. Selama Januari s.d. Desember 2021 terdapat mutasi piutang paten dihapuskan sebagai berikut:
 - a. Mutasi tambah sebanyak 48 ID Paten atas 41 Pemegang Paten sebesar Rp808.257.500,00.
 - b. Pelunasan atas 50 ID Paten atas 43 Pemegang Paten sebesar Rp778.414.250,00.
 - c. Koreksi kurang nominal piutang atas 4 ID Paten PAPS atas 4 Pemegang Paten yang mendapatkan keringanan pembayaran piutang disebabkan adanya crash program dari Kementerian Keuangan melalui KPKNL Jakarta II yang semula jumlah piutangnya sebesar Rp125.905.000,00 berkurang sebesar Rp99.524.600,00 menjadi Rp26.380.400,00 yang pada bulan Juli s.d. Desember 2021 telah dilakukan pelunasan.
- Atas mutasi dan koreksi tersebut, saldo piutang biaya tahunan paten dihapuskan pada 31



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Catatan Atas Laporan Keuangan – *Penjelasan atas Pos-Pos Neraca*
Per 31 Desember Tahun Anggaran 2021 (*Audited*)
Dengan Angka Perbandingan 31 Desember Tahun Anggaran 2020
(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Desember 2021 menjadi sebesar
Rp89.947.400,00

Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Lancar untuk masing-masing satuan kerja dapat dilihat pada lampiran.

Terdapat perubahan nilai Penyisihan Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak dari data Laporan Keuangan tahun 2021 (*Unaudited*) dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 79

Total Koreksi Nilai Penyisihan Piutang Tak tertagih – Piutang Lancar

Uraian	Unaudited	Koreksi	Audited
Penyisihan Piutang Lancar	218.836.188.027,00	(2.076.499.746,00)	216.759.688.281,00

Tabel 80

Koreksi Nilai Penyisihan Piutang Tak tertagih – Piutang PNB

Bedasarkan Satuan Kerja

No	Satker	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang PNB		
		Unaudited	Koreksi	Audited
1	RUMAH TAHANAN NEGARA AMBON	99.087,00	(99.087,00)	0,00

Tabel 81

Koreksi Nilai Penyisihan Piutang Tak tertagih – Piutang Lainnya

Bedasarkan Satuan Kerja

No	Satker	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Lainnya		
		Unaudited	Koreksi	Audited
1	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BENGKULU	103.699.276,00	(103.699.276,00)	0,00
2	BALAI PEMASYARAKATAN JAKTIM/JAKUT	196.047,00	(196.047,00)	0,00
3	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BANDUNG	0,00	940.573,00	940.573,00
4	LEMBAGA PEMASYARAKATAN MANOKWARI	164.727,00	(164.727,00)	0,00
5	INSPEKTORAT JENDERAL	202.445,00	(202.445,00)	0,00



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Catatan Atas Laporan Keuangan – *Penjelasan atas Pos-Pos Neraca*
Per 31 Desember Tahun Anggaran 2021 (*Audited*)
Dengan Angka Perbandingan 31 Desember Tahun Anggaran 2020
(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

6	RUMAH TAHANAN NEGARA KABANJAHE	0,00	1.814.519,00	1.814.519,00
7	LAPAS KELAS IIA PANCUR BATU	0,00	4.827.389,00	4.827.389,00
8	DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM	6.219.575,00	(4.080.126,00)	2.139.449,00
9	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BANDUNG	89.750,00	(89.750,00)	0,00
10	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM AMBON	0,00	2.634.698,00	2.634.698,00
11	RUMAH TAHANAN NEGARA SUKADANA	104.218,00	(104.218,00)	0,00
12	LEMBAGA PEMASYARAKATAN BALIKPAPAN	321.953,00	(321.953,00)	0,00
13	LEMBAGA PEMASYARAKATAN TOLI-TOLI	447.622,00	(447.622,00)	0,00
14	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAWA TENGAH	41.163,00	(41.163,00)	0,00
15	Lapas Perempuan Kelas III Manokwari	233.844,00	(233.844,00)	0,00
16	DITJEN KEKAYAAN INTELEKTUAL	13.304.000,00	(11.262.192,00)	2.041.808,00
17	LEMBAGA PEMASYARAKATAN NARKOTIKA BANDAR LAMPUNG	1.443.087,00	(1.443.087,00)	0,00
18	LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK BANDAR LAMPUNG	145.934.474,00	(145.934.474,00)	0,00
19	RUMAH TAHANAN NEGARA MANADO	471.550,00	(471.550,00)	0,00
20	LPKA Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur	40.230,00	(40.230,00)	0,00
21	DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI	1.811.666.984,00	(1.811.666.984,00)	0,00
22	LAPAS KELAS III AMURANG	6.032,00	(6.032,00)	0,00
23	Lapas anak Kelas III Batam	3.032.384,00	(3.031.626,00)	758,00
24	DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN	1.292.982,00	(1.292.982,00)	0,00
25	LEMBAGA PEMASYARAKATAN WAY KANAN	387.689,00	(387.689,00)	0,00
26	BALAI HARTA PENINGALAN MEDAN	85.003,00	(85.003,00)	0,00



27	Lapas Perempuan Kelas IIB Padang	1.513.905,00	(1.513.905,00)	0,00

C.10. PERSEDIAAN

Persediaan
Rp604.873.054.596,0
0

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Nilai Persediaan per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing adalah sebesar Rp604.873.054.596,00 dan Rp597.192.271.954,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 82
Perbandingan Rincian Persediaan
Per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Persediaan	31 Desember 2021	31 Desember 2020
Barang Konsumsi	559.532.040.515,00	555.600.255.373,00
Amunisi	39.528.916.820,00	35.867.657.692,00
Bahan Untuk Pemeliharaan	4.575.147.261,00	2.403.778.834,00
Suku Cadang	0,00	402.500,00
Hewan dan Tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat	0,00	920.500.000,00
Aset Tetap Lainnya untuk diserahkan kepada masyarakat	0,00	41.584.625,00
Barang Persediaan Lainnya untuk dijual/diserahkan ke masyarakat	0,00	108.292.930,00
Bahan Baku	0,00	1.864.500.000,00
Persediaan Lainnya	1.236.950.000,00	385.300.000,00
Jumlah	604.873.054.596,00	597.192.271.954,00

Rincian Persediaan berdasarkan Eselon I disajikan sebagai berikut:



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Catatan Atas Laporan Keuangan – *Penjelasan atas Pos-Pos Neraca*
Per 31 Desember Tahun Anggaran 2021 (*Audited*)
Dengan Angka Perbandingan 31 Desember Tahun Anggaran 2020
(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Tabel 83
Perbandingan Nilai Persediaan Berdasarkan Eselon I
Per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Unit/Eselon I	Persediaan	
	31 Desember 2021	31 Desember 2020
Sekretariat Jenderal	5.561.807.512,00	6.773.430.938,00
Inspektorat Jenderal	141.030.767,00	144.195.515,00
Ditjen Administrasi Hukum Umum	821.861.901,00	1.068.474.001,00
Ditjen Pemasyarakatan	131.618.235.348,00	100.494.468.432,00
Ditjen Imigrasi	460.084.434.388,00	481.134.640.826,00
Ditjen Kekayaan Intelektual	5.398.158.609,00	6.130.884.806,00
Ditjen Peraturan Perundang-undangan	2.628.306,00	155.876.266,00
Ditjen Hak Asasi Manusia	291.386.694,00	237.679.376,00
Badan Pembinaan Hukum Nasional	214.599.942,00	174.403.190,00
Balitbang Hukum dan HAM	304.127.959,00	141.800.864,00
BPSDM Hukum dan HAM	434.783.170,00	736.417.740,00
TOTAL	604.873.054.596,00	597.192.271.954,00

Pada 31 Desember 2021 terdapat kerugian atas persediaan yang rusak/usang senilai Rp 5.848.632.439,00 dengan rincian satuan kerja sebagai berikut.

Tabel 84
Rincian Kerugian Persediaan Rusak/Usang berdasarkan Satuan Kerja
Per 31 Desember 2021

No	Nama Satker	Nilai	Keterangan
Ditjen Pemasyarakatan			
1	RUMAH TAHANAN NEGARA PADANG PANJANG	8.456.400,00	Persediaan berupa beras yang diperoleh tahun 2015 sejumlah 972 yang sudah dilakukan penghapusan berdasarkan SK Penghapusan No. W3.PB.06.04-07 Tahun 2021 tanggal 4 Februari 2021 karena kondisi rusak berat.
2	LEMBAGA PEMASYARAKATAN NUNUKAN	14.671.504,00	Terdapat Persediaan rusak berupa beras sejumlah 1823 dan telah dilakukan usulan penghapusan dengan nomor surat W18.PB.06.01-4955 tanggal 15 September 2021, dan telah menerima surat balasan tindak



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Catatan Atas Laporan Keuangan – *Penjelasan atas Pos-Pos Neraca*
Per 31 Desember Tahun Anggaran 2021 (*Audited*)
Dengan Angka Perbandingan 31 Desember Tahun Anggaran 2020
(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

			lanjut dari Setjen nomor SEK.4-PB.06.01-164 tanggal 19 Januari 2022
3	LEMBAGA PEMASYARAKATAN NARKOTIKA DI CIREBON	4.267.200,00	Pada Aplikasi Persediaan tidak terdapat Persediaan Rusak/Usang
4	LEMBAGA PEMASYARAKATAN TERBUKA NUSAKAMBANGAN	147.800.000,00	Penghapusan Hewan/ternak sebanyak 25 ekor yang sudah mati dan telah dilakukan penghapusan dengan Nomer SK :W13-797.PB.06.04 Tahun 2021 Tanggal 6 Oktober 2021
5	LAPAS NARKOTIKA KELAS IIB LANGSA	17.600.976,00	Terdapat persediaan berupa Beras Bulog yang belum dilakukan penghapusan, akan dilakukan proses penghapusan pada semester II 2021
SUBTOTAL		192.796.080,00	
Ditjen Imigrasi			
1	KANTOR IMIGRASI KELAS III NON TPI KALIANDA	216.900,00	Persediaan Dokim Usang berupa A/D Card WNA sebanyak 900 buku dan telah diusulkan permohonan penghapusan persediaan usang dengan nomor W9.IMI.IMI.2-PB.06.04-0358
2	KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI TANJUNG PANDAN	31.359.500,00	Persediaan Dokim usang berupa SPRI/Paspor Biasa 24 Hal sejumlah 500 buah dan telah keluar SK Penghapusan No. W. 7-5301.PB.06.04 Tahun 2021 Tanggal 24 September 2021 dan telah dilakukan pemusnahan
3	KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI BANDUNG	1.439.438,00	Terdapat Persediaan Dokim Usang berupa A/D Card WNA sebanyak 4000 buku senilai Rp 964.000, SPRI/Paspor 24 Hal sebanyak 2 buku senilai Rp 125.438 dan Paspor untuk Orang Asing sebanyak 10 buku senilai Rp 350.000 yang akan segera diusulkan pemusnahannya.
4	KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI SEMARANG	1.168.674,00	penghapusan DOKIM usang berupa A/D Card WNA dan Perdim 12 sesuai dengan SK Penghapusan Nomor :W13-491.PB.06.02 Tahun 2021 tg 21 Juni 2021



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Catatan Atas Laporan Keuangan – *Penjelasan atas Pos-Pos Neraca*
Per 31 Desember Tahun Anggaran 2021 (*Audited*)
Dengan Angka Perbandingan 31 Desember Tahun Anggaran 2020
(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

5	KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI CILACAP	7.150,00	berupa persediaan usang berupa Perdim 12 sebanyak 50 lembar senilai Rp.7.150 sesuai dengan Berita Acara Nomor: W.13.IMI.IMI.3-PB.04.03-289 Tanggal 31 Desember 2021 Sesuai Surat Edaran Dirjen Imigrasi No IMI-0470.GR.01.01 TAHUN 2021 Tentang Pemusnahan dan Penghapusan Barang Berupa Dokumen Keimigrasian
6	KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI YOGYAKARTA	602.500,00	Persediaan Usang berupa A/D Card WNA sebanyak 2.500 lembar @ Rp 241. Akan diproses penghapusannya di Semester I Tahun 2022.
7	KANTOR IMIGRASI KELAS I KHUSUS TPI MEDAN	1.687.000,00	Persediaan Dokim Usang berupa A/D Card WNA sebanyak 7.000 buku dan telah diusulkan permohonan penghapusan persediaan usang dengan nomor W.2-PB.06.04-21316 tanggal 27 September 2021.
8	KANTOR IMIGRASI KELAS II NON TPI PEMATANG SIANTAR	578.400,00	Persediaan Dokim Usang berupa A/D Card WNA sebanyak 2.400 buku dan belum diajukan permohonan persetujuan pemusnahan.
9	KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI PEKANBARU	482.000,00	Persediaan Dokim Usang berupa A/D Card WNA sebanyak 2000 buku dan telah diusulkan permohonan penghapusan persediaan usang dengan nomor W4.IMI.1.PB.06.04-0141 Tanggal 10 Januari 2022
10	KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI TANJUNG PINANG	4.579.000,00	Persediaan Dokim Usang berupa A/D Card WNA sebanyak 19.000 buku dan telah diusulkan permohonan penghapusan persediaan usang dengan nomor W.32.IMI.IMI.2-PB.05.02-2608 tanggal 29 November 2021
11	KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI BELAKANG PADANG	1.575.125,00	Berupa Persediaan Usang berupa Perdim 12 sebanyak 50 lembar senilai Rp 7.150,- dan Paspor biasa 24 Hal sebanyak 50 buku senilai Rp1.567.975 yang akan dimusnakan. Sesuai Surat Edaran Dirjen Imigrasi No IMI-0470.GR.01.01 TAHUN 2021 Tentang Pemusnahan dan Penghapusan Barang Berupa Dokumen Keimigrasian



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Catatan Atas Laporan Keuangan – *Penjelasan atas Pos-Pos Neraca*
Per 31 Desember Tahun Anggaran 2021 (*Audited*)
Dengan Angka Perbandingan 31 Desember Tahun Anggaran 2020
(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

12	KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI PONTIANAK	553.500,00	Telah dilakukan Pemusnahan dengan Nomor SK : SEK.PB.06.04- 242 Tanggal 05 Oktober 2021 dan SK Penghapusan Nomor : W.16-6762.PB.06.04. Tanggal 04 November 2021 Dokumen Keimigrasian Berupa A/D Card WNA Sejumlah 2.000 dan Perdim 12 Sejumlah 500.
13	KANTOR IMIGRASI KELAS II NON TPI SINGKAWANG	15.679.750,00	Telah dilakukan Pemusnahan dengan Nomor SK : SEK.PB.06.04 - 243 Tanggal 05 Oktober 2021 dan SK Penghapusan Nomor : W16-6456.PB.06.04 Tahun 2021 Tanggal 15 Oktober 2021 Dokumen Keimigrasian berupa SPRI Paspur Biasa 48 Halaman Sejumlah 250 Buku.
14	KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI MAKASSAR	482.000,00	Dokim Usang A/D Card WNA Sesuai Edaran Dirjenim IMI-2032.GR.01.01 thn 2020, Dalam Proses Permohonan persetujuan pemusnahan Dokumen keimigrasian Usang. Nomor Surat W.23.IMI.IMI.1-PB.06.04-0619 tanggal 15 Maret 2021
15	KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI BIAK	132.550,00	Sudah dilakukan pemusnahan dokim berupa 550 lembar A/D Card WNA dengan SK Pemusnahan Nomor : W30-188.PB.06.04 Tahun 2021 tanggal 21 Juni 2021. Saat ini sedang mengajukan usulan Penghapusan ke Setjen
16	KANTOR IMIGRASI KELAS I NON TPI PALANGKARAYA	701.500,00	Pemusnahan dokim berupa Perdim 12 dan Paspur untuk Orang Asing, Persetujuan Pemusnahan Nomor : SEK-PB.06.04-355 Tanggal 28 Desember 2021, Berita Acara Pemusnahan Nomor : W.17.IMI.IMI.1-PB.06.04-102 Tanggal 10 Januari 2022 dan SK Penghapusan Nomor : W.17-049.PB.06.04 Tahun 2022 Tanggal 28 Januari 2022
17	KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI TEMBILAHAN	5.393.834,00	Berupa dokim paspor 24 halaman yang sudah dilakukan pemusnahan sebanyak 86 buah dengan SK Penghapusan Nomor: W.4.0071.PB.05.05 Tahun 2022 tanggal 17 Januari 2022



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Catatan Atas Laporan Keuangan – *Penjelasan atas Pos-Pos Neraca*
Per 31 Desember Tahun Anggaran 2021 (*Audited*)
Dengan Angka Perbandingan 31 Desember Tahun Anggaran 2020
(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

18	KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI TANJUNG BALAI ASAHAN	1.566.500,00	Persediaan Dokim Usang berupa A/D Card WNA sebanyak 6.500 buku dan telah diusulkan permohonan penghapusan persediaan usang dengan nomor W.2-PB.06.04-3108 tanggal 14 Februari 2021.
19	KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI BANDA ACEH	12.861.819,00	Sudah diajukan ke kanwil permohonan persetujuan pemusnahan dokim usang pada tanggal 16 juni 2021 senilai 12.861.819 dengan rincian barang sbb : 1. Paspor 24 halaman seri lama sebanyak 201 dg nilai 12.606.519 2. Perdim 12 sebanyak 100 dg nilai 14.300 3. A/D card WNA sebanyak 1000 dg nilai 241.000 Namun dikembalikan ke kanim tanggal 19 juli 2021 oleh kanwil dikarenakan jumlah panitia pemusnahan berjumlah genap, saat ini sedang proses perbaikan di kanim
20	KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI BANJARMASIN	5.063.682,00	Telah dikirimkan surat nomor : W.19.IMI.IMI.1.PB.06.04-2492 perihal permohonan persetujuan pemusnahan persediaan dokumen keimigrasian usang pada tanggal 30 November 2021 ke Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Selatan, dan telah ditindaklanjuti kantor wilayah sesuai dengan surat nomor : W.19.PB.06.04 - 5486 tanggal 09 Desember 2021 hal Permohonan Persetujuan Penghapusan BMN Berupa Persediaan pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Banjarmasin dengan rincian barang berupa perdim 12 sebanyak 1200 lembar dengan nilai Rp. 171.600,- dan paspor 24 halaman seri AL sebanyak 78 buku dengan nilai Rp. 4.892.082,-
21	KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI SURAKARTA	4.579.000,00	usulan penghapusan Dokim A/D Card WNA menjadi persediaan usang dan dalam proses penghapusan ke Pengguna Barang
22	KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI SIBOLGA	241.000,00	Persediaan Dokim Usang berupa A/D Card WNA sebanyak 1.000 buku dan telah diusulkan permohonan penghapusan persediaan usang



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Catatan Atas Laporan Keuangan – *Penjelasan atas Pos-Pos Neraca*
Per 31 Desember Tahun Anggaran 2021 (*Audited*)
Dengan Angka Perbandingan 31 Desember Tahun Anggaran 2020
(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

			dengan nomor W.2-PB.06.04-3416 tanggal 17 Februari 2021.
23	KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI LANGSA	3.135.950,00	terdapat persediaan usang berupa Paspor biasa 24 Hal sebanyak 50 buah dengan jumlah Rp. 3.135.950,- sudah tindak lanjut pemusnahan dan saat ini sedang menunggu surat persetujuan pemusnahan dari Setjen.
24	KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI TANJUNG UBAN	4.820.000,00	Berupa Persediaan Usang berupa A/D Card WNA Sebanyak 20.000 lembar senilai Rp 4.820.000,- Sesuai Surat Edaran Dirjen Imigrasi No IMI-0470.GR.01.01 TAHUN 2021 Tentang Pemusnahan dan Penghapusan Barang Berupa Dokumen Keimigrasian
25	DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI	5.112.256.984,00	Berupa dokumen keimigrasian senilai Rp951.178.266 dan Alat Tulis Kantor (ATK) terdiri dari tinta/toner printer senilai Rp4.161.078.718. Sudah diusulkan untuk penghapusannya, sedang berproses di Setjen
26	KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI ENTIKONG	114.400,00	Telah dilakukan Pemusnahan dengan Nomor SK : SEK-PB.06.04-245 Tanggal 06 Oktober 2021 dan SK Penghapusan Nomor : W16-8001.PB.06.04 Tahun 2021 Tanggal 20 Desember 2021 Dokumen Keimigrasian Berupa Perdim 12 Sejumlah 800 Lembar.
27	KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI SABANG	51.574,00	Berupa Persediaan Usang berupa A/D Card WNA Sebanyak 214 lembar senilai Rp 51.574,- Sesuai Surat Edaran Dirjen Imigrasi No IMI-0470.GR.01.01 TAHUN 2021 Tentang Pemusnahan dan Penghapusan Barang Berupa Dokumen Keimigrasian dan sudah diajukan Permohonan Penghapusan ke Kanwil dengan Nomor Surat W.1.IMI.IMI.3-PB.06.04-1793 tanggal 10 November 2021 Perihal Permohonan Persetujuan Penghapusan BMN berupa Barang Persediaan Dokumen Keimigrasian pada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sabang



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Catatan Atas Laporan Keuangan – *Penjelasan atas Pos-Pos Neraca*
Per 31 Desember Tahun Anggaran 2021 (*Audited*)
Dengan Angka Perbandingan 31 Desember Tahun Anggaran 2020
(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

28	KANTOR IMIGRASI KELAS I NON TPI SERANG	4.861.297,00	terdapat persediaan usang berupa Paspor biasa 24 Hal sebanyak 63 buah dan Paspor untuk orang asing sebanyak 26 buah dengan jumlah Rp. 4.861.297,- sudah TL dan saat ini sedang menunggu surat persetujuan pemusnahan dari Setjen.
29	KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI SAMBAS	128.700,00	Telah dilakukan Pemusnahan dengan Nomor SK : SEK-PB.06.04-226 Tanggal 20 September 2021 dan SK Penghapusan Nomor : W16-6156.PB.06 04 Tahun 2021 Tanggal 29 September 2021 Dokumen Keimigrasian Berupa Perdim 12 Sejumlah 900 Lembar.
30	KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI TAHUNA	5.456.553,00	Terdapat 87 pcs SPRI/ Paspor 24 Halaman yang sudah mendapat persetujuan pemusnahan dari Sekretaris Jenderal dengan Nomor Persetujuan SEK-PB.06.04-358 tanggal 28 Desember 2021. Proses akan segera dilakukan pemusnahan.
31	KANTOR IMIGRASI KELAS III NON TPI KOTABUMI	216.900,00	Dokumen Keimigrasian usang berupa A/D CARD WNA sebanyak 900 buku dan telah diusulkan permohonan penghapusan persediaan usang dengan nomor W9.IMI3.PB.06.04-0386 dan Surat Keputusan DITJEN IMIGRASI NOMOR IMI-2032.GR.01.01 TAHUN 2020
32	KANTOR IMIGRASI KELAS III NON TPI PUTUSSIBAU	31.108.624,00	Telah dilakukan Pemusnahan dengan Nomor SK : SEK-PB.06.04-235 Tanggal 16 September 2021 dan SK Penghapusan Nomor : W16-6395.PB.06.04 Tahun 2021 Tanggal 12 Oktober 2021 Tanggal Dokumen Keimigrasian berupa SPRI Paspor Biasa 24 Halaman selain Seri AT/AU Sejumlah 496 Buku.
SUBTOTAL		5.253.101.804,00	
Ditjen Peraturan Perundang-undangan			



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Catatan Atas Laporan Keuangan – *Penjelasan atas Pos-Pos Neraca*
Per 31 Desember Tahun Anggaran 2021 (*Audited*)
Dengan Angka Perbandingan 31 Desember Tahun Anggaran 2020
(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1	DITJEN PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN	149.877.555,00	Merupakan persediaan usang berupa LN Tahun 2011 (Cetak 2012) sebanyak 56 buah, TLN Tahun 2011 (Cetak 2012) sebanyak 7 buah, BN dan TBN Tahun 2011 (Cetak 2012) sebanyak 120 buah senilai Rp 41.584.625,- (telah dimasukkan ke dalam daftar persediaan usang sesuai dengan Berita Acara Opname Fisik Nomor PPE.1.PB.05.03-100 Tahun 2021 tanggal 30 Juni 2021 dan sedang dalam proses penerbitan SK Penghapusan), serta LN/TLN Tahun 2012 (Cetak 2013) sebanyak 12 set dan LN/TLN, BN/TBN Tahun 2014 (Cetak 2015) sebanyak 1 set dengan total nilai Rp 108.292.930,- yang telah dimasukkan ke dalam daftar persediaan usang (sesuai dengan Berita Acara Opname Fisik Nomor PPE.1.PB.05.03-217 Tahun 2021 tanggal 31 Desember 2021 dan sedang dalam proses pengajuan jadwal lelang ke KPKNL Jakarta IV)
SUBTOTAL		149.877.555,00	
BPSDM			
1	POLITEKNIK ILMU PEMASYARAKATAN	252.857.000,00	Persediaan berupa 1000 buah alat tes urine dengan jumlah Rp.252.857.000,- yang sudah kadaluarsa dan akan diajukan permohonan penghapusan pada semester 1 Tahun Anggaran 2022
SUBTOTAL		252.857.000,00	
GRAND TOTAL		5.848.632.439,00	

Sampai dengan tanggal 9 Februari 2022, Kementerian Hukum dan HAM telah melakukan pemantauan pelaksanaan opname fisik persediaan melalui form Rekap Checklist Opname Fisik kepada seluruh satuan kerja baik tingkat pusat maupun daerah.

Adapun Rekapitulasi Monitoring Pelaksanaan Opname Fisik untuk seluruh satker di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM dapat diakses melalui link : https://bit.ly/Lamp_LBP_Kemenkumham2021



Pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia terdapat pengadaan persediaan dalam rangka penanganan pandemi COVID-19 yang berasal dari pembelian, transfer masuk, atau hibah per tanggal 31 Desember 2021 di antaranya berupa Hand Sanitizer, Cairan Desinfektan, sarung Tangan Medis, Masker, Cairan Hand wash, Face shield, Pembersih Cuci Tangan Refil, alkohol, jas operasi, kacamata pelindung, handscoon, sepatu bot medis, APD, face shield, sarung tangan plastik, vitamin, Pembelian APD, Pembelian plastik limbah medis, vitamin, dan sebagainya.

Rincian belanja persediaan dalam rangka penanganan pandemi COVID-19 pada satuan kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di antaranya disajikan dalam lampiran.

Terdapat perubahan nilai nilai Persediaan pada Kementerian Hukum dan HAM khususnya pada akun Barang Konsumsi, Bahan Untuk Pemeliharaan, serta Amunisi dari data Laporan Keuangan tahun 2021 (*Unaudited*) dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 85
Total Koreksi Nilai Persediaan

Uraian	Unaudited	Koreksi	Audited
Persediaan	602.543.734.863,00	2.329.319.733,00	604.873.054.596,00

Tabel 86
Koreksi Nilai Persediaan Berdasarkan Kelompok Barang

No	Kelompok Persediaan	Unaudited	Koreksi	Audited
1	Bahan Konsumsi	560.220.566.682,00	(688.526.167,00)	559.532.040.515,00
2	Amunisi	36.537.117.204,00	2.991.799.616,00	39.528.916.820,00
3	Bahan Untuk Pemeliharaan	4.549.100.977,00	26.046.284,00	4.575.147.261,00
Jumlah			2.329.319.733,00	



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Catatan Atas Laporan Keuangan – *Penjelasan atas Pos-Pos Neraca*
Per 31 Desember Tahun Anggaran 2021 (*Audited*)
Dengan Angka Perbandingan 31 Desember Tahun Anggaran 2020
(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Tabel 87
Koreksi Barang Konsumsi berdasarkan Satuan Kerja

No	Satker	Barang Konsumsi		
		Unaudited	Koreksi	Audited
1	Ditjen Pemasarakatan	1.341.326.588,00	1.896.300.000,00	3.237.626.588,00
2	Kanim Jakarta Barat	3.585.067.069,00	749.936.646,00	4.335.003.715,00
3	Lapas Cibinong	146.186.335,00	538.799.268,00	684.985.603,00
4	Kanim Parepare	145.224.033,00	338.962.910,00	484.186.943,00
5	Kanim Jakarta Selatan	3.888.719.583,00	260.538.045,00	4.149.257.628,00
6	Kanim Tanjung Perak	1.388.498.941,00	260.203.205,00	1.648.702.146,00
7	Kanim Surabaya	2.000.192.340,00	256.929.496,00	2.257.121.836,00
8	Kanim Jakarta Pusat	5.928.577.703,00	240.486.921,00	6.169.064.624,00
9	Kanim Semarang	553.605.508,00	189.290.552,00	742.896.060,00
10	Lapas Banceuy	19.057.770,00	181.556.124,00	200.613.894,00
11	Lapas Salemba	641.021.499,00	169.477.640,00	810.499.139,00
12	Kanim Blitar	491.638.264,00	157.881.880,00	649.520.144,00
13	Lapas Narkotika Pematang Siantar	243.500.084,00	91.266.520,00	334.766.604,00
14	Kanim Pematang Siantar	642.419.691,00	83.650.600,00	726.070.291,00
15	Lapas Gorontalo	0,00	67.798.500,00	67.798.500,00
16	Poltekip	22.743.800,00	65.599.500,00	88.343.300,00
17	Kanim Manokwari	274.981.683,00	58.824.200,00	333.805.883,00
18	Lapas Sentul	113.383.330,00	48.040.200,00	161.423.530,00
19	Kanim Samarinda	558.595.835,00	46.685.950,00	605.281.785,00
20	Lapas Bogor	135.473.802,00	44.219.992,00	179.693.794,00
21	Kanim Bagan Siapiapi	173.286.712,00	43.035.715,00	216.322.427,00
22	Lapas Perempuan Ambon	65.806.720,00	40.635.000,00	106.441.720,00
23	Lapas Ambon	30.136.520,00	40.635.000,00	70.771.520,00
24	Kanim Kediri	402.094.379,00	34.706.100,00	436.800.479,00
25	Lapas Balikpapan	489.580.780,00	33.757.286,00	523.338.066,00
26	Kanim Kotabumi	190.477.649,00	30.696.500,00	221.174.149,00
27	Kanim Bandar Lampung	612.898.061,00	28.120.840,00	641.018.901,00
28	LPKA Palangkaraya	135.259.628,00	17.846.520,00	153.106.148,00
29	LPP Palangkaraya	1.273.830,00	17.833.520,00	19.107.350,00
30	Rutan Buntok	3.872.000,00	17.766.520,00	21.638.520,00
31	Rutan Nganjuk	65.696.900,00	17.766.520,00	83.463.420,00
32	LPP Jayapura	83.359.148,00	17.766.520,00	101.125.668,00
33	Lapas Narkotika Jakarta	70.320.180,00	17.766.520,00	88.086.700,00
34	Lapas Palangkaraya	23.075.100,00	17.766.520,00	40.841.620,00



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Catatan Atas Laporan Keuangan – *Penjelasan atas Pos-Pos Neraca*
Per 31 Desember Tahun Anggaran 2021 (*Audited*)
Dengan Angka Perbandingan 31 Desember Tahun Anggaran 2020
(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

35	Lapas Brebes	94.255.100,00	17.766.520,00	112.021.620,00
36	Lapas Kotabumi	114.328.090,00	17.766.520,00	132.094.610,00
37	Lapas Warung Kiara	226.264.354,00	17.644.120,00	243.908.474,00
38	Kanim Cilacap	178.615.641,00	17.292.758,00	195.908.399,00
39	Kanim Tanjung Balai Asahan	561.423.977,00	17.087.580,00	578.511.557,00
40	Kanim Cilegon	743.262.189,00	16.908.100,00	760.170.289,00
41	LPP Bandung	288.947.131,00	13.519.069,00	302.466.200,00
42	Politeknik Imigrasi	14.749.286,00	13.443.914,00	28.193.200,00
43	Lapas Gunung Sugih	125.271.084,00	13.324.890,00	138.595.974,00
44	Kanim Banggai	31.906.575,00	11.937.231,00	43.843.806,00
45	Kanim Labuan Bajo	228.965.366,00	9.398.412,00	238.363.778,00
46	Kanim Entikong	400.957.930,00	6.272.288,00	407.230.218,00
47	Lapas Tangerang	304.054.967,00	5.956.763,00	310.011.730,00
48	Kanim Tanjung Balai Karimun	265.522.712,00	4.599.600,00	270.122.312,00
49	Kanim Balikpapan	868.896.054,00	4.544.484,00	873.440.538,00
50	Kanim Wonosobo	318.565.721,00	4.449.500,00	323.015.221,00
51	Kanim Karawang	889.355.080,00	3.996.225,00	893.351.305,00
52	Lapas Kendal	262.178.999,00	3.654.816,00	265.833.815,00
53	Kanim Bekasi	714.550.220,00	3.465.000,00	718.015.220,00
54	Kanim Polonia	971.089.273,00	3.160.197,00	974.249.470,00
55	Kanim Ranai	324.677.604,00	3.114.650,00	327.792.254,00
56	Lapas Pangururan	154.191.170,00	2.962.280,00	157.153.450,00
57	Kanim Langsa	196.981.869,00	2.777.800,00	199.759.669,00
58	Lapas Terbuka Kendal	216.861.370,00	2.451.064,00	219.312.434,00
59	Kanim Maumere	465.763.253,00	2.321.818,00	468.085.071,00
60	Kanim Jember	904.082.438,00	2.220.050,00	906.302.488,00
61	Kanim Ngurah Rai	2.795.535.414,00	2.175.000,00	2.797.710.414,00
62	Lapas Kaimana	149.521.936,00	2.133.600,00	151.655.536,00
63	Lapas Nunukan	250.893.192,00	1.797.750,00	252.690.942,00
64	Kanim Sorong	223.348.087,00	1.708.305,00	225.056.392,00
65	Kanim Cirebon	672.473.433,00	1.690.810,00	674.164.243,00
66	Ditjen HAM	270.791.993,00	1.601.331,00	272.393.324,00
67	Lapas Sumbawa Besar	207.349.538,00	1.250.000,00	208.599.538,00
68	Kanim Yogyakarta	2.090.935.945,00	1.231.680,00	2.092.167.625,00
69	Kanim Tobelo	69.472.821,00	978.890,00	70.451.711,00
70	Kanim Pamekasan	454.839.646,00	960.000,00	455.799.646,00
71	Lapas Banda Aceh	693.443.682,00	906.000,00	694.349.682,00
72	Kanim Jakarta Timur	1.202.174.102,00	894.600,00	1.203.068.702,00
73	Lapas Muara Enim	79.248.334,00	799.000,00	80.047.334,00



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Catatan Atas Laporan Keuangan – *Penjelasan atas Pos-Pos Neraca*
Per 31 Desember Tahun Anggaran 2021 (*Audited*)
Dengan Angka Perbandingan 31 Desember Tahun Anggaran 2020
(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

74	Kanim Bogor	2.031.550.731,00	738.361,00	2.032.289.092,00
75	Rudenim Jakarta	121.210.511,00	694.649,00	121.905.160,00
76	Lapas Abepura	434.328.033,00	671.000,00	434.999.033,00
77	Kanim Banjarmasin	689.287.511,00	669.641,00	689.957.152,00
78	Kanim Pemalang	585.344.530,00	666.320,00	586.010.850,00
79	Rutan Trenggalek	179.775.050,00	633.600,00	180.408.650,00
80	Lapas Sorolangun	129.995.610,00	598.000,00	130.593.610,00
81	Kanim Cianjur	213.039.860,00	533.940,00	213.573.800,00
82	Lapas Narkotika Yogyakarta	122.001.779,00	516.200,00	122.517.979,00
83	Lapas Jambi	24.606.200,00	444.500,00	25.050.700,00
84	Rupbasan Serang	21.155.610,00	408.600,00	21.564.210,00
85	Pusdatin	58.350.792,00	372.494,00	58.723.286,00
86	Rutan Jakarta Pusat	262.026.234,00	344.178,00	262.370.412,00
87	Rupbasan Denpasar	131.000,00	282.000,00	413.000,00
88	Lapas Merauke	137.273.110,00	240.000,00	137.513.110,00
89	Lapas Bengkulu	18.968.020,00	225.000,00	19.193.020,00
90	Kanim Meulaboh	429.324.488,00	214.100,00	429.538.588,00
91	Lapas Tulungagung	224.914.884,00	201.200,00	225.116.084,00
92	Rutan Batang	112.172.112,00	200.000,00	112.372.112,00
93	Kanim Dumai	114.049.077,00	185.000,00	114.234.077,00
94	BHP Surabaya	10.248.810,00	178.500,00	10.427.310,00
95	Rutan Makale	372.848.376,00	176.000,00	373.024.376,00
96	Bapas Sibolga	1.282.000,00	165.000,00	1.447.000,00
97	Kanwil DKI Jakarta (Setjen)	531.622.616,00	147.740,00	531.770.356,00
98	Lapas Karawang	48.576.389,00	134.997,00	48.711.386,00
99	Rupbasan Jakarta Di Tangerang	37.393.144,00	115.500,00	37.508.644,00
100	Lapas Narkotika Martapura	30.993.620,00	114.200,00	31.107.820,00
101	Lapas Luwuk	1.161.000,00	100.000,00	1.261.000,00
102	Lapas Purwokerto	588.405.607,00	100.000,00	588.505.607,00
103	BHP Medan	1.798.900,00	99.000,00	1.897.900,00
104	Lapas Medan	188.352.120,00	98.800,00	188.450.920,00
105	Rutan Pandeglang	111.587.830,00	96.800,00	111.684.630,00
106	Rutan Marabahan	18.854.520,00	95.000,00	18.949.520,00
107	Rudenim Denpasar	878.565,00	93.000,00	971.565,00
108	Kanim Manado	309.524.688,00	65.118,00	309.589.806,00
109	LPP Palembang	126.273.392,00	60.000,00	126.333.392,00
110	Bapas Amuntai	0,00	50.000,00	50.000,00
111	Lapas Boalemo	184.364.482,00	46.000,00	184.410.482,00
112	Kanim Makassar	533.456.996,00	41.200,00	533.498.196,00



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Catatan Atas Laporan Keuangan – *Penjelasan atas Pos-Pos Neraca*
Per 31 Desember Tahun Anggaran 2021 (*Audited*)
Dengan Angka Perbandingan 31 Desember Tahun Anggaran 2020
(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

113	Lapas Narkotika Nusakambangan	393.138.994,00	40.000,00	393.178.994,00
114	Lapas Tanjung Raja	56.394.704,00	39.000,00	56.433.704,00
115	Rutan Perempuan Surabaya	69.768.360,00	33.000,00	69.801.360,00
116	Lapas Tasikmalaya	206.675.514,00	30.730,00	206.706.244,00
117	Lapas Kembang Kuning	292.850.542,00	28.350,00	292.878.892,00
118	Rutan Bantaeng	5.808.650,00	28.000,00	5.836.650,00
119	Lapas Kalianda	331.432.584,00	27.600,00	331.460.184,00
120	Lapas Tarakan	356.797.103,00	24.750,00	356.821.853,00
121	Bapas Aceh	1.895.000,00	20.000,00	1.915.000,00
122	Lapas Terbuka Mataram	60.289.420,00	18.500,00	60.307.920,00
123	Rupbasan Rengat	0,00	15.000,00	15.000,00
124	Kanim Tarempa	101.508.383,00	15.000,00	101.523.383,00
125	Rupbasan Pasuruan	742.500,00	12.000,00	754.500,00
126	Kanwil Kalimantan Tengah (Setjen)	41.236.000,00	10.500,00	41.246.500,00
127	Rutan Jeneponto	97.821.338,00	10.000,00	97.831.338,00
128	Lapas Bangkinang	2.518.400,00	9.800,00	2.528.200,00
129	Kanim Depok	862.978.293,00	8.250,00	862.986.543,00
130	Lapas Serang	440.685.744,00	7.500,00	440.693.244,00
131	Lapas Perempuan Jambi	21.204.035,00	6.405,00	21.210.440,00
132	Kanim Takengon	143.850.466,00	5.000,00	143.855.466,00
133	Lapas Pati	743.982.057,00	4.000,00	743.986.057,00
134	Kanim Tanjung Uban	912.033.618,00	3.000,00	912.036.618,00
135	Lapas Samarinda	786.474.469,00	1.800,00	786.476.269,00
136	Rupbasan Yogyakarta	8.229.400,00	1.000,00	8.230.400,00
137	Kanim Jakarta Utara	3.833.002.374,00	(2.959.201.006,00)	873.801.368,00
138	Kanim Tanjung Priok	3.820.118.644,00	(1.314.493.258,00)	2.505.625.386,00
139	BPSDM	424.595.136,00	(196.047.752,00)	228.547.384,00
140	Ditjen KI	5.573.888.783,00	(177.585.214,00)	5.396.303.569,00
141	Kanim Bandung	2.582.639.259,00	(126.988.105,00)	2.455.651.154,00
142	Sekretariat Jenderal	3.399.976.569,00	(126.779.600,00)	3.273.196.969,00
143	Kanim Mataram	442.035.482,00	(90.419.301,00)	351.616.181,00
144	Kanwil Kalimantan Timur (Setjen)	81.427.370,00	(79.392.970,00)	2.034.400,00
145	Lapas Tebingtinggi Deli	462.863.225,00	(46.053.000,00)	416.810.225,00
146	Lapas Lubuk Pakam	303.523.584,00	(43.356.000,00)	260.167.584,00
147	Lapas Rantau Prapat	254.240.604,00	(43.344.000,00)	210.896.604,00
148	Lapas Kerobokan	110.842.758,00	(43.344.000,00)	67.498.758,00



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Catatan Atas Laporan Keuangan – *Penjelasan atas Pos-Pos Neraca*
Per 31 Desember Tahun Anggaran 2021 (Audited)
Dengan Angka Perbandingan 31 Desember Tahun Anggaran 2020
(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

149	Lapas Tuban	216.489.490,00	(41.790.000,00)	174.699.490,00
150	LPP Malang	157.392.449,00	(41.299.225,00)	116.093.224,00
151	Kanim Madiun	235.451.209,00	(41.024.390,00)	194.426.819,00
152	Lapas Gunung Tua	204.272.620,00	(40.762.000,00)	163.510.620,00
153	Rutan Klungkung	159.749.454,00	(40.701.500,00)	119.047.954,00
154	Rutan Bangil	238.943.884,00	(40.645.800,00)	198.298.084,00
155	Lapas Karangasem	114.303.486,00	(40.635.000,00)	73.668.486,00
156	Lapas Singaraja	122.466.595,00	(40.635.000,00)	81.831.595,00
157	Lapas Labuan Bilik	128.922.820,00	(40.635.000,00)	88.287.820,00
158	Lapas Teluk Dalam	84.682.122,00	(40.635.000,00)	44.047.122,00
159	Rutan Sibuhuan	360.773.453,00	(40.635.000,00)	320.138.453,00
160	Lapas Probolinggo	430.170.094,00	(40.635.000,00)	389.535.094,00
161	Lapas Tagulandang	75.927.525,00	(40.635.000,00)	35.292.525,00
162	Rutan Gianyar	158.791.715,00	(40.635.000,00)	118.156.715,00
163	Rutan Situbondo	109.110.620,00	(40.635.000,00)	68.475.620,00
164	Lapas Bondowoso	231.026.610,00	(40.635.000,00)	190.391.610,00
165	Lapas Arjasa	98.895.020,00	(40.635.000,00)	58.260.020,00
166	Lapas Kotanopan	215.145.560,00	(40.635.000,00)	174.510.560,00
167	Rutan Kraksaan	231.219.090,00	(40.635.000,00)	190.584.090,00
168	Lapas Kota Pinang	209.757.820,00	(40.635.000,00)	169.122.820,00
169	Rutan Bangli	85.090.520,00	(40.635.000,00)	44.455.520,00
170	Lapas Enemawira	116.696.330,00	(40.635.000,00)	76.061.330,00
171	Lapas Narkotika Bangli	94.949.604,00	(40.635.000,00)	54.314.604,00
172	Lapas Anak Gianyar	149.253.045,00	(40.635.000,00)	108.618.045,00
173	Rutan Sampang	204.524.090,00	(40.635.000,00)	163.889.090,00
174	Rutan Bangkalan	57.945.900,00	(40.635.000,00)	17.310.900,00
175	Lapas Tanjung Balai Asahan	258.713.410,00	(40.635.000,00)	218.078.410,00
176	Rutan Negara	106.471.320,00	(40.635.000,00)	65.836.320,00
177	Rutan Sumenep	112.405.590,00	(40.635.000,00)	71.770.590,00
178	Rutan Natal	137.189.038,00	(40.635.000,00)	96.554.038,00
179	Lapas Pamekasan	92.934.800,00	(40.635.000,00)	52.299.800,00
180	Lapas Tamako	125.859.769,00	(40.635.000,00)	85.224.769,00
181	Lapas Gunung Sitoli	322.917.620,00	(40.635.000,00)	282.282.620,00
182	Lapas Lumajang	242.833.686,00	(40.635.000,00)	202.198.686,00
183	Lapas Jember	58.486.020,00	(40.635.000,00)	17.851.020,00
184	LPP Denpasar	151.178.711,00	(40.635.000,00)	110.543.711,00
185	Lapas Geser	218.994.756,00	(34.469.553,00)	184.525.203,00
186	Kanim Pati	607.524.811,00	(34.446.280,00)	573.078.531,00
187	Lapas Tabanan	119.485.500,00	(31.751.740,00)	87.733.760,00



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Catatan Atas Laporan Keuangan – *Penjelasan atas Pos-Pos Neraca*
Per 31 Desember Tahun Anggaran 2021 (*Audited*)
Dengan Angka Perbandingan 31 Desember Tahun Anggaran 2020
(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

188	Lapas Pasuruan	45.903.320,00	(28.136.800,00)	17.766.520,00
189	LPKA Ambon	199.910.627,00	(25.946.320,00)	173.964.307,00
190	Lapas Labuhan Ruku	39.767.800,00	(21.672.000,00)	18.095.800,00
191	Kanim Ponorogo	414.493.456,00	(18.546.827,00)	395.946.629,00
192	Kanim Tembagapura	473.808.451,00	(17.734.600,00)	456.073.851,00
193	Kanim Bitung	68.578.827,00	(16.401.400,00)	52.177.427,00
194	Lapas Banyuwangi	284.126.134,00	(14.512.000,00)	269.614.134,00
195	Lapas Narkotika Pamekasan	31.821.520,00	(13.545.000,00)	18.276.520,00
196	Kanim Soekarno Hatta	1.345.864.618,00	(13.264.940,00)	1.332.599.678,00
197	Kanim Gorontalo	451.659.377,00	(12.300.988,00)	439.358.389,00
198	Lapas Martapura	387.200.382,00	(10.140.000,00)	377.060.382,00
199	Kanim Kerinci	294.768.161,00	(8.611.370,00)	286.156.791,00
200	Kanim Sukabumi	547.654.178,00	(7.315.600,00)	540.338.578,00
201	Kanim Tanjung Redeb	220.502.293,00	(6.941.220,00)	213.561.073,00
202	Kanim Batulicin	66.564.520,00	(5.072.430,00)	61.492.090,00
203	Lapas Pria Tangerang	548.662.970,00	(4.573.800,00)	544.089.170,00
204	Rutan Salatiga	210.705.058,00	(4.212.400,00)	206.492.658,00
205	Kanim Jambi	295.414.082,00	(3.737.580,00)	291.676.502,00
206	Kanim Atambua	551.164.982,00	(2.224.750,00)	548.940.232,00
207	Kanim Serang	1.365.801.321,00	(1.971.470,00)	1.363.829.851,00
208	Lapas Anak Pria Tangerang	288.842.382,00	(1.730.880,00)	287.111.502,00
209	Kanim Pekanbaru	794.778.981,00	(1.670.148,00)	793.108.833,00
210	Lapas Cikarang	39.911.020,00	(1.098.000,00)	38.813.020,00
211	Kanim Ambon	165.688.584,00	(1.053.120,00)	164.635.464,00
212	Rutan Kuala Kapuas	28.896.020,00	(888.326,00)	28.007.694,00
213	Rupbasan Cirebon	902.750,00	(672.250,00)	230.500,00
214	Rutan Masohi	127.306.376,00	(594.200,00)	126.712.176,00
215	Rutan Samarinda	577.352.339,00	(593.295,00)	576.759.044,00
216	Kanim Palembang	1.121.670.699,00	(523.142,00)	1.121.147.557,00
217	Lapas Wanita Tangerang	269.755.570,00	(507.500,00)	269.248.070,00
218	Rutan Surabaya	54.533.800,00	(419.870,00)	54.113.930,00
219	Lapas Rangkasbitung	240.494.299,00	(391.500,00)	240.102.799,00
220	LPKA Samarinda	178.737.178,00	(269.125,00)	178.468.053,00
221	Rutan Perempuan Bandung	237.290.958,00	(265.000,00)	237.025.958,00
222	Kanim Batam	2.195.433.365,00	(237.000,00)	2.195.196.365,00
223	Lapas Wanita Sungguminasa	43.128.070,00	(232.100,00)	42.895.970,00
224	Rupbasan Kotabumi	2.328.430,00	(180.000,00)	2.148.430,00
225	Bapas Jakarta Selatan	1.277.800,00	(179.400,00)	1.098.400,00
226	Ditjen AHU	682.366.327,00	(173.250,00)	682.193.077,00



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Catatan Atas Laporan Keuangan – *Penjelasan atas Pos-Pos Neraca*
Per 31 Desember Tahun Anggaran 2021 (*Audited*)
Dengan Angka Perbandingan 31 Desember Tahun Anggaran 2020
(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

227	Rutan Pekalongan	306.553.198,00	(111.000,00)	306.442.198,00
228	Kanim Surakarta	933.413.709,00	(109.000,00)	933.304.709,00
229	Lapas Cilegon	685.358.525,00	(103.310,00)	685.255.215,00
230	Lapas Meulaboh	324.121.826,00	(100.000,00)	324.021.826,00
231	LPP Martapura	124.869.920,00	(80.000,00)	124.789.920,00
232	Kanim Sumbawa Besar	377.180.239,00	(56.474,00)	377.123.765,00
233	LPKA Bandar Lampung	382.291.576,00	(48.000,00)	382.243.576,00
234	Kanwil Bali (Setjen)	3.107.433,00	(45.000,00)	3.062.433,00
235	Rudenim Balikpapan	52.695.050,00	(44.100,00)	52.650.950,00
236	Kanim Palangkaraya	485.123.760,00	(44.000,00)	485.079.760,00
237	Kanim Belakang Padang	431.343.364,00	(44.000,00)	431.299.364,00
238	Rutan Singkel	91.374.100,00	(30.000,00)	91.344.100,00
239	Kanim Pontianak	417.091.433,00	(21.000,00)	417.070.433,00
240	Rupbasan Jakarta Pusat	5.400.500,00	(21.000,00)	5.379.500,00
241	Rutan Pacitan	231.377.860,00	(20.000,00)	231.357.860,00
242	Bapas Pontianak	20.000,00	(20.000,00)	0,00
243	Kanim Kuala Tungkal	341.627.005,00	(14.000,00)	341.613.005,00
244	Lapas Selong	59.662.000,00	(8.000,00)	59.654.000,00
245	Bapas Jakbar	7.331.875,00	(8.000,00)	7.323.875,00
246	Bapas Samarinda	6.559.524,00	(7.800,00)	6.551.724,00
247	Lapas Terbuka Nusakambangan	59.853.520,00	(7.500,00)	59.846.020,00
248	Lapas Bojonegoro	167.092.182,00	(6.000,00)	167.086.182,00
249	LPP Pekanbaru	550.000,00	(5.000,00)	545.000,00
250	Kanim Nunukan	1.024.822.220,00	(4.796,00)	1.024.817.424,00
251	Lapas Jombang	129.520.334,00	(3.000,00)	129.517.334,00
252	Kanwil Riau (Setjen)	19.075.991,00	(2.040,00)	19.073.951,00
253	Lapas Yogyakarta	195.211.807,00	(1.920,00)	195.209.887,00
254	Rutan Wonosobo	94.596.370,00	(1.000,00)	94.595.370,00
255	Rupbasan Pekalongan	374.000,00	(500,00)	373.500,00
256	Kanim Banda Aceh	489.334.656,00	(100,00)	489.334.556,00

Tabel 88

Koreksi Bahan Untuk Pemeliharaan berdasarkan Satuan Kerja

No	Satker	Bahan Untuk Pemeliharaan		
		Unaudited	Koreksi	Audited
1	Lapas Sentul	0,00	19.665.000,00	19.665.000,00
2	Sekretariat Jenderal	24.319.900,00	9.365.950,00	33.685.850,00
3	Kanim Jakarta Selatan	157.541.107,00	4.892.815,00	162.433.922,00
4	BPSDM	47.143.600,00	4.774.000,00	51.917.600,00



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Catatan Atas Laporan Keuangan – *Penjelasan atas Pos-Pos Neraca*
Per 31 Desember Tahun Anggaran 2021 (*Audited*)
Dengan Angka Perbandingan 31 Desember Tahun Anggaran 2020
(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

5	Lapas Ambon	0,00	3.408.600,00	3.408.600,00
6	Kanim Pekanbaru	517.260,00	2.249.000,00	2.766.260,00
7	Lapas Kayu Agung	1.380.000,00	850.000,00	2.230.000,00
8	Lapas Cikarang	8.385.520,00	705.920,00	9.091.440,00
9	Kanwil Sulawesi Utara (Setjen)	1.331.800,00	120.000,00	1.451.800,00
10	Rutan Cipinang	9.690.890,00	83.800,00	9.774.690,00
11	Lapas Sorolangun	6.800.000,00	50.000,00	6.850.000,00
12	Rudenim Surabaya	6.427.800,00	48.000,00	6.475.800,00
13	Bapas Jakarta Selatan	143.000,00	36.000,00	179.000,00
14	Kanim Dumai	1.023.000,00	18.000,00	1.041.000,00
15	Kanwil Bali (Setjen)	35.850,00	10.650,00	46.500,00
16	Kanim Jember	3.079.000,00	10.500,00	3.089.500,00
17	Kanim Tanjung Pinang	10.764.600,00	5.500,00	10.770.100,00
18	Kanim Bogor	48.086.700,00	5.030,00	48.091.730,00
19	Rutan Bangil	19.680.500,00	1.500,00	19.682.000,00
20	Rudenim Pusat Tanjung Pinang	5.002.560,00	1.280,00	5.003.840,00
21	Lapas Perempuan Gorontalo	13.110.000,00	(13.110.000,00)	0,00
22	Kanim Soekarno Hatta	16.181.200,00	(2.586.340,00)	13.594.860,00
23	Kanim Manokwari	1.772.000,00	(1.772.000,00)	0,00
24	Lapas Anak Pria Tangerang	12.024.500,00	(1.250.000,00)	10.774.500,00
25	Kanim Yogyakarta	24.556.800,00	(323.450,00)	24.233.350,00
26	Lapas Sorong	14.064.804,00	(277.104,00)	13.787.700,00
27	Kanim Tembagapura	2.902.680,00	(205.800,00)	2.696.880,00
28	Lapas Amurang	6.690.000,00	(135.000,00)	6.555.000,00
29	Lapas Serui	125.000,00	(125.000,00)	0,00
30	Lapas Narkotika Yogyakarta	35.754.500,00	(80.000,00)	35.674.500,00
31	Kanim Jakarta Pusat	104.140.992,00	(66.750,00)	104.074.242,00
32	Kanim Denpasar	55.225.335,00	(66.000,00)	55.159.335,00
33	Lapas Kotabumi	26.280.000,00	(60.000,00)	26.220.000,00
34	Lapas Kalisosok	22.215.980,00	(41.500,00)	22.174.480,00
35	Kanim Bitung	40.800,00	(40.800,00)	0,00
36	Kanim Atambua	18.883.000,00	(35.000,00)	18.848.000,00
37	Lapas Banda Aceh	3.071.200,00	(29.000,00)	3.042.200,00
38	Kanim Malang	8.685.800,00	(11.900,00)	8.673.900,00
39	Bapas Aceh	120.000,00	(8.000,00)	112.000,00
40	Kanim Meulaboh	31.003.300,00	(6.800,00)	30.996.500,00
41	Lapas Sumedang	2.683.100,00	(5.000,00)	2.678.100,00
42	Kanim Tanjung Balai Karimun	2.485.500,00	(5.000,00)	2.480.500,00
43	Rudenim Jakarta	22.866.667,00	(4.600,00)	22.862.067,00



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Catatan Atas Laporan Keuangan – *Penjelasan atas Pos-Pos Neraca*
Per 31 Desember Tahun Anggaran 2021 (*Audited*)
Dengan Angka Perbandingan 31 Desember Tahun Anggaran 2020
(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

44	LPKA Samarinda	2.800.100,00	(4.600,00)	2.795.500,00
45	Kanim Pamekasan	3.494.000,00	(4.000,00)	3.490.000,00
46	Lapas Narkotika Pangkalpinang	1.617,00	(1.617,00)	0,00

Tabel 89

Koreksi Amunisi berdasarkan Satuan Kerja

No	Satker	Amunisi		
		Unaudited	Koreksi	Audited
1	Lapas Narkotika Gunung Sindur	121.671.800,00	462.856.400,00	584.528.200,00
2	Lapas Karawang	33.899.250,00	250.973.712,00	284.872.962,00
3	Rutan Cipinang	0,00	202.999.000,00	202.999.000,00
4	Lapas Bekasi	19.951.600,00	180.382.839,00	200.334.439,00
5	Lapas Singkawang	0,00	131.894.180,00	131.894.180,00
6	Lapas Lahat	0,00	126.771.848,00	126.771.848,00
7	Lapas Kuala Tungkal	4.627.550,00	114.932.780,00	119.560.330,00
8	Lapas Lubuk Linggau	40.665.191,00	96.466.740,00	137.131.931,00
9	Lapas Gunung Sugih	0,00	92.871.775,00	92.871.775,00
10	Rutan Bengkulu	0,00	90.226.700,00	90.226.700,00
11	Rutan Kota Agung	0,00	83.250.000,00	83.250.000,00
12	Lapas Banyuasin	0,00	83.250.000,00	83.250.000,00
13	Lapas Narkotika NK	15.327.100,00	83.129.763,00	98.456.863,00
14	Rutan Buntok	0,00	80.568.600,00	80.568.600,00
15	Lapas Kembang Kuning	60.386.280,00	77.742.600,00	138.128.880,00
16	Lapas Pamekasan	5.318.200,00	77.608.350,00	82.926.550,00
17	Rutan Kuala Kapuas	5.197.500,00	73.500.000,00	78.697.500,00
18	LPKA Yogyakarta	0,00	62.000.000,00	62.000.000,00
19	Lapas Mojokerto	5.500.000,00	52.386.336,00	57.886.336,00
20	Lapas Kendari	40.271.000,00	46.879.779,00	87.150.779,00
21	Lapas Saumlaki	46.158.000,00	42.207.900,00	88.365.900,00
22	LPKA Jakarta	0,00	41.000.000,00	41.000.000,00
23	LPKA Palangkaraya	0,00	41.000.000,00	41.000.000,00
24	LPP Palangkaraya	0,00	41.000.000,00	41.000.000,00
25	Rutan Bandar Lampung	166.250.000,00	40.760.055,00	207.010.055,00
26	Lapas Sukabumi	12.776.500,00	35.658.084,00	48.434.584,00
27	Lapas Manokwari	86.975.000,00	31.746.768,00	118.721.768,00
28	Lapas Empat Lawang	0,00	30.583.192,00	30.583.192,00
29	LPP Jayapura	0,00	29.820.000,00	29.820.000,00
30	Lapas Pangkalpinang	128.399.250,00	29.000.172,00	157.399.422,00



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Catatan Atas Laporan Keuangan – *Penjelasan atas Pos-Pos Neraca*
Per 31 Desember Tahun Anggaran 2021 (Audited)
Dengan Angka Perbandingan 31 Desember Tahun Anggaran 2020
(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

31	Lapas Lamongan	31.567.900,00	28.447.752,00	60.015.652,00
32	Lapas Gorontalo	0,00	27.783.699,00	27.783.699,00
33	Lapas Bau-Bau	117.099.500,00	26.475.766,00	143.575.266,00
34	Lapas Kupang	96.208.800,00	23.832.315,00	120.041.115,00
35	Lapas Pemuda Tangerang	168.712.471,00	21.708.038,00	190.420.509,00
36	Lapas Jombang	77.250.000,00	20.486.535,00	97.736.535,00
37	Lapas Batu	114.524.600,00	19.489.256,00	134.013.856,00
38	Lapas Muara Tebo	87.643.275,00	18.359.265,00	106.002.540,00
39	Lapas Tabanan	83.250.000,00	18.007.454,00	101.257.454,00
40	Lapas Anak Medan	0,00	16.350.344,00	16.350.344,00
41	Lapas Tasikmalaya	2.544.696,00	15.979.248,00	18.523.944,00
42	Lapas Purwakarta	45.139.570,00	15.440.240,00	60.579.810,00
43	Lapas Muara Tewe	13.707.954,00	12.786.288,00	26.494.242,00
44	Lapas Ciamis	33.899.250,00	12.276.000,00	46.175.250,00
45	Lapas Tenggarong	136.049.270,00	12.213.630,00	148.262.900,00
46	Rutan Muntok	0,00	12.189.183,00	12.189.183,00
47	Lapas Muara Enim	196.939.000,00	11.689.704,00	208.628.704,00
48	Lapas Teminabuhan	0,00	11.330.025,00	11.330.025,00
49	Rutan Gresik	27.474.000,00	11.330.025,00	38.804.025,00
50	Lapas Tanjung Raja	3.403.632,00	10.610.661,00	14.014.293,00
51	Lapas Indramayu	71.750.000,00	10.433.276,00	82.183.276,00
52	Lapas Majalengka	107.399.250,00	10.213.632,00	117.612.882,00
53	Lapas Sukamiskin	0,00	10.187.100,00	10.187.100,00
54	Rutan Jaktim	216.726.800,00	10.128.525,00	226.855.325,00
55	Lapas Banjar	83.250.000,00	9.574.500,00	92.824.500,00
56	Lapas Batam	186.400.000,00	9.448.425,00	195.848.425,00
57	Lapas Ketapang	0,00	8.509.080,00	8.509.080,00
58	Lapas Merauke	84.916.125,00	8.244.628,00	93.160.753,00
59	Lapas Narkotika Jayapura	103.715.666,00	7.635.609,00	111.351.275,00
60	Rutan Sidikalang	59.726.680,00	6.126.120,00	65.852.800,00
61	Rutan Nganjuk	29.114.500,00	5.940.000,00	35.054.500,00
62	Lapas Subang	11.305.500,00	5.692.302,00	16.997.802,00
63	Lapas Tanjung Pinang	113.151.120,00	4.981.680,00	118.132.800,00
64	Lapas Banceuy	134.951.730,00	4.904.321,00	139.856.051,00
65	Lapas Palangkaraya	112.068.600,00	4.777.542,00	116.846.142,00
66	Lapas Metro	23.445.125,00	4.286.975,00	27.732.100,00
67	Lapas Kalabahi	125.350.020,00	4.053.105,00	129.403.125,00
68	LPKA Blitar	0,00	3.625.608,00	3.625.608,00
69	Lapas Sumedang	86.297.814,00	2.758.800,00	89.056.614,00



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Catatan Atas Laporan Keuangan – *Penjelasan atas Pos-Pos Neraca*
Per 31 Desember Tahun Anggaran 2021 (*Audited*)
Dengan Angka Perbandingan 31 Desember Tahun Anggaran 2020
(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

70	Lapas Pangkalan Bun	114.355.500,00	2.702.700,00	117.058.200,00
71	Lapas Kediri	108.129.200,00	2.528.372,00	110.657.572,00
72	Lapas Anak Kutoarjo	25.620.980,00	1.798.320,00	27.419.300,00
73	Rutan Enrekang	30.832.450,00	1.624.975,00	32.457.425,00
74	Lapas Tanjung	71.750.000,00	1.053.930,00	72.803.930,00
75	Lapas Baa	9.013.478,00	1.025.722,00	10.039.200,00
76	Rutan Sipirok	77.064.000,00	567.600,00	77.631.600,00
77	Rutan Temanggung	28.037.110,00	524.900,00	28.562.010,00
78	Lapas Medan	83.250.000,00	244.335,00	83.494.335,00
79	Lapas Narkotika Bandung	275.610.020,00	176.000,00	275.786.020,00
80	Rutan Soasiu	5.904.360,00	12.474,00	5.916.834,00
81	Lapas Lubuk Pakam	187.881.560,00	3.960,00	187.885.520,00
82	Lapas Amuntai	170.618.017,00	(64.364.251,00)	106.253.766,00
83	Lapas Argamakmur	88.596.000,00	(55.401.975,00)	33.194.025,00
84	Lapas Talu	83.250.000,00	(37.000.000,00)	46.250.000,00
85	Rutan Jakarta Pusat	211.802.200,00	(35.700.000,00)	176.102.200,00
86	Rutan Ambon	187.033.000,00	(22.599.500,00)	164.433.500,00
87	Lapas Probolinggo	104.326.153,00	(15.236.776,00)	89.089.377,00
88	Lapas Karanganyar NK	88.500.000,00	(14.965.000,00)	73.535.000,00
89	Lapas Blangpidie	36.750.000,00	(12.600.000,00)	24.150.000,00
90	Lapas Payakumbuh	122.750.802,00	(11.100.000,00)	111.650.802,00
91	Rutan Mamuju	92.400.000,00	(9.450.000,00)	82.950.000,00
92	Lapas Narkotika Langsa	64.599.500,00	(9.450.000,00)	55.149.500,00
93	Rutan Watansopeng	28.299.370,00	(7.667.000,00)	20.632.370,00
94	Lapas Bandar Lampung	51.445.025,00	(7.095.450,00)	44.349.575,00
95	Lapas Piru	70.836.500,00	(6.453.846,00)	64.382.654,00
96	Lapas Mamasa	49.359.660,00	(3.441.060,00)	45.918.600,00
97	Lapas Bogor	108.220.350,00	(2.612.800,00)	105.607.550,00
98	Lapas Pasir Putih Nusakambangan	94.013.900,00	(2.223.420,00)	91.790.480,00
99	Ditjen Pemasyarakatan	176.000.000,00	(2.200.000,00)	173.800.000,00
100	Rutan Sinjai	21.878.450,00	(1.855.700,00)	20.022.750,00
101	Rutan Rembang	111.316.220,00	(1.448.960,00)	109.867.260,00
102	Rutan Bima	86.617.058,00	(1.400.000,00)	85.217.058,00
103	Lapas Salemba	193.217.400,00	(1.387.550,00)	191.829.850,00
104	Rutan Balikpapan	186.247.814,00	(1.064.448,00)	185.183.366,00
105	Rutan Sukadana	79.110.000,00	(1.050.000,00)	78.060.000,00
106	Lapas Sungai Liat	5.910.600,00	(821.920,00)	5.088.680,00
107	Rutan Purwodadi	33.881.100,00	(792.000,00)	33.089.100,00



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Catatan Atas Laporan Keuangan – *Penjelasan atas Pos-Pos Neraca*
Per 31 Desember Tahun Anggaran 2021 (*Audited*)
Dengan Angka Perbandingan 31 Desember Tahun Anggaran 2020
(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

108	Lapas Cilegon	100.202.166,00	(694.386,00)	99.507.780,00
109	Lapas Kayu Agung	7.212.640,00	(414.630,00)	6.798.010,00
110	Lapas Brebes	34.039.500,00	(396.000,00)	33.643.500,00
111	Rutan Bangli	112.002.712,00	(388.080,00)	111.614.632,00
112	Lapas Tanah Merah	34.151.425,00	(383.350,00)	33.768.075,00
113	Lapas Lhokseumawe	78.610.700,00	(207.900,00)	78.402.800,00
114	Lapas Panyabungan	95.248.800,00	(130.680,00)	95.118.120,00
115	Lapas Ende	85.639.800,00	(91.080,00)	85.548.720,00
116	Rutan Natal	3.389.760,00	(59.400,00)	3.330.360,00
117	Rutan Tanah Grogot	82.822.500,00	(54.054,00)	82.768.446,00
118	Lapas Narkotika Bandar Lampung	182.498.496,00	(32.725,00)	182.465.771,00
119	Lapas Tebingtinggi Deli	201.084.360,00	(3.960,00)	201.080.400,00

Koreksi tersebut merupakan dampak perbaikan perhitungan FIFO yang terdapat pada Aplikasi Persediaan 21.1 serta tindak lanjut terhadap Temuan BPK yang menyatakan bahwa terdapat lebih catat atau kurang catat terhadap Persediaan berupa Barang Konsumsi, Bahan Untuk Pemeliharaan, dan Amunisi.

Pada tahun 2021 terdapat identifikasi persediaan anomali berupa selisih harga satuan barang yang signifikan, yang disebabkan adanya perbedaan satuan dan salah catat kuantitas dan nilai barang. Terhadap hal tersebut berpotensi menimbulkan salah saji pada Laporan Keuangan Tahun 2022, namun belum berdampak pada Laporan Keuangan Tahun 2021 dikarenakan belum ada pemakaian atas barang persediaan tersebut sehingga belum membentuk beban.

C.11. TAGIHAN TP/TGR

Tagihan TP/TGR
Rp1.752.131.184,00

Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (Tagihan TP/TGR) per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing sebesar Rp1.752.131.184,00 dan Rp1.483.810.558,00. Tagihan Tuntutan Perbendaharaan adalah tagihan kepada bendahara akibat kelalaiannya atau tindakannya yang melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian negara. Sedangkan Tagihan Tuntutan Ganti Rugi adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara untuk penggantian atas



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Catatan Atas Laporan Keuangan – *Penjelasan atas Pos-Pos Neraca*
Per 31 Desember Tahun Anggaran 2021 (*Audited*)
Dengan Angka Perbandingan 31 Desember Tahun Anggaran 2020
(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

suatu kerugian yang diderita oleh negara karena kelalaiannya.

Tabel 90
Perbandingan Tagihan TP/TGR Berdasarkan Eselon I
Per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Unit Eselon I	Tagihan TP/TGR	
	31 Desember 2021	31 Desember 2020
Sekretariat Jenderal	397.096.332,00	472.766.448,00
Inspektorat Jenderal	0,00	0,00
Ditjen Administrasi Hukum Umum	0,00	17.000.000,00
Ditjen Pemasyarakatan	725.801.620,00	662.634.870,00
Ditjen Imigrasi	629.233.232,00	331.409.240,00
Ditjen Kekayaan Intelektual	0,00	0,00
Ditjen Peraturan Perundang-undangan	0,00	0,00
Ditjen Hak Asasi Manusia	0,00	0,00
Badan Pembinaan Hukum Nasional	0,00	0,00
Balitbang Hukum dan HAM	0,00	0,00
BPSDM Hukum dan HAM	0,00	0,00
TOTAL	1.752.131.184,00	1.483.810.558,00

Rincian Tagihan TP/TGR untuk masing-masing satuan kerja disajikan pada Tabel berikut:

Tabel 91
Rincian Tagihan TP/TGR Berdasarkan Satuan Kerja
Per 31 Desember 2021

No	Uraian Satker	Saldo	Keterangan
SEKRETARIAT JENDERAL			
1	SEKRETARIAT JENDERAL (PUSAT)	50.598.000,00	TGR atas nama Denny Ardiyanto Tidak dapat mempertanggungjawabkan penggunaan Dana Operasional Menteri
		23.876.000,00	TGR atas nama Fengki Recli Kampong Tidak dapat mempertanggungjawabkan penggunaan Dana Operasional Menteri
		23.292.500,00	TGR atas nama Gusti Ika Purnama Tidak dapat mempertanggungjawabkan penggunaan Dana Operasional Menteri



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Catatan Atas Laporan Keuangan – *Penjelasan atas Pos-Pos Neraca*
Per 31 Desember Tahun Anggaran 2021 (*Audited*)
Dengan Angka Perbandingan 31 Desember Tahun Anggaran 2020
(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

		19.512.500,00	TGR atas nama Jaya Rafikal Tidak dapat mempertanggungjawabkan penggunaan Dana Operasional Menteri
		25.626.000,00	TGR atas nama Kusno Tidak dapat mempertanggungjawabkan penggunaan Dana Operasional Menteri
		23.292.500,00	TGR atas nama Musyarofah noor rohmah Tidak dapat mempertanggungjawabkan penggunaan Dana Operasional Menteri
		32.042.500,00	TGR atas nama Zamrony Tidak dapat mempertanggungjawabkan penggunaan Dana Operasional Menteri
		20.440.750,00	TGR atas nama Maruli Denda Keterlambatan Pembangunan Fisik
		71.012.424,00	TGR atas nama nuras Penyalahgunaan Kas Bendahara, Sisa UUDP tidak disetor
		3.400.000,00	TGR atas nama Nurjaman Kehilangan Kendaraan Dinas Roda 4
		13.290.126,00	TGR atas nama Deddy Kusnadi Penyalahgunaan Kas Bendahara (Kas Tekor)
2	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM AMBON	90.713.032,00	TGR atas nama Ronal Tuasun
Total		397.096.332,00	
Ditjen Pemasyarakatan			
1	LEMBAGA PEMASYARAKATAN BANCEUY BANDUNG	192.012.000,00	Temuan ITJEN berupa penyediaan BAMA 2019 atas nama KUSMANA
2	LAPAS KELAS III AMURANG	25.875.000,00	TGR atas nama FENDY TUMURANG (DAYA TAHAN TUBUH) temuan itjen
		100.000,00	TGR atas nama FENDY TUMURANG (DAYA TAHAN TUBUH) temuan itjen
		21.685.000,00	TGR atas nama Michael Malara (Pembelian BBM) temuan itjen
		10.800.000,00	TGR atas nama Fendy Tumurang dan Hendra Rompis (Penggunaan Anggaran Kegiatan Kemandirian) temuan itjen
3	RUMAH PENYIMPANAN BARANG SITAAN NEGARA BANDUNG,	423.134.500,00	TGR atas temuan Itjen berupa penyediaan BAMA an. Sambas Hermansyah



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Catatan Atas Laporan Keuangan – *Penjelasan atas Pos-Pos Neraca*
Per 31 Desember Tahun Anggaran 2021 (*Audited*)
Dengan Angka Perbandingan 31 Desember Tahun Anggaran 2020
(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	KOT.BANDUNG, JAWA BARAT		
4	BALAI PEMASYARAKATAN TERNATE, MALUKU UTARA	52.195.120,00	TGR atas nama Husein sepa, S.Sos
Total		725.801.620,00	
Ditjen Imigrasi			
1	KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI MANADO	260.823.992,00	TGR atas nama Muhammad Akmal Pelimpahan TGR dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Barat berupa kerusakan kendaraan dinas roda 4 (empat)
2	KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI TERNATE	161.209.240,00	TGR atas nama Aisa Arsad Pengembalian PNPB
3	KANTOR IMIGRASI KELAS II NON TPI MADIUN	138.200.000,00	TGR atas hilangnya Kendaraan Dinas R4 Nopol AE 1067 FP a.n Waskito Purnomo
4	KANTOR IMIGRASI KELAS III NON TPI KEDIRI	69.000.000,00	TGR atas hilangnya Kendaraan Dinas R4 Nopol AG 506 AP a.n Catur Adi Putra
Total		629.233.232,00	
Grand Total		1.752.131.184,00	

C.12. PIUTANG JANGKA PANJANG LAINNYA

Piutang Jangka Panjang Lainnya
Rp5.856.300.000,00

Piutang Jangka Panjang Lainnya per tanggal 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah sebesar masing-masing Rp5.856.300.000,00 dan Rp5.856.300.000,00. Perbandingan Nilai Piutang Jangka Panjang Lainnya berdasarkan Eselon I per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2020 disajikan pada Tabel berikut:

Tabel 92
Perbandingan Piutang Jangka Panjang Lainnya Berdasarkan Eselon I
Per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Unit Eselon I	Piutang Jangka Panjang Lainnya	
	31 Desember 2021	31 Desember 2020
Sekretariat Jenderal	5.856.300.000,00	5.856.300.000,00
Inspektorat Jenderal	0,00	0,00
Ditjen Administrasi Hukum Umum	0,00	0,00



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Catatan Atas Laporan Keuangan – *Penjelasan atas Pos-Pos Neraca*
Per 31 Desember Tahun Anggaran 2021 (*Audited*)
Dengan Angka Perbandingan 31 Desember Tahun Anggaran 2020
(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Ditjen Pemasyarakatan	0,00	0,00
Ditjen Imigrasi	0,00	0,00
Ditjen Kekayaan Intelektual	0,00	0,00
Ditjen Peraturan Perundang-undangan	0,00	0,00
Ditjen Hak Asasi Manusia	0,00	0,00
Badan Pembinaan Hukum Nasional	0,00	0,00
Balitbang Hukum dan HAM	0,00	0,00
BPSDM Hukum dan HAM	0,00	0,00
TOTAL	5.856.300.000,00	5.856.300.000,00

Piutang Jangka Panjang Lainnya tersebut adalah atas transaksi perjanjian kontrak sewa lahan antara Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan PT. Paramita selama 20 Tahun dengan sisa masa sewa 3 tahun dari 2022 s.d. 2024.

C.13. PENYISIHAN PIUTANG TIDAK TERTAGIH – PIUTANG JANGKA PANJANG

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Jangka Panjang Rp(271.986.138,00)

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Jangka Panjang per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar **Rp(271.986.138,00)** dan **Rp(129.715.593,00)**. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Jangka Panjang merupakan estimasi atas ketidaktertagihan Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dan Piutang Jangka Panjang Lainnya yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang. Perhitungan Penyisihan Piutang Tak Tertagih atas Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dan Piutang Jangka Panjang Lainnya adalah sebagai berikut :

Tabel 93

Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Piutang Jangka Panjang 31 Desember 2021

Kualitas Piutang	31 Desember 2021			31 Desember 2020		
	Nilai Piutang Jk Panjang	% Penyisihan	Nilai Penyisihan	Nilai Piutang Jk Panjang	% Penyisihan	Nilai Penyisihan
Piutang Jangka Panjang Lainnya						
Lancar	5.856.300.000,00	0,50%	29.281.500,00	5.856.300.000,00	0,50%	29.281.500,00
Kurang Lancar	0,00	10%	0,00	0,00	10%	0,00



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Catatan Atas Laporan Keuangan – *Penjelasan atas Pos-Pos Neraca*
Per 31 Desember Tahun Anggaran 2021 (*Audited*)
Dengan Angka Perbandingan 31 Desember Tahun Anggaran 2020
(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Diragukan	0,00	50%	0,00	0,00	50%	0,00
Macet	0,00	100%	0,00	0,00	100%	0,00
Jumlah	5.856.300.000,00		29.281.500,00	5.856.300.000,00		29.281.500,00
Piutang TP/TGR						
Lancar	1.417.393.514,00	0,50%	7.086.968,00	1.390.359.764,00	0,50%	6.983.299,00
Kurang Lancar	0,00	10%	0,00	0,00	10%	0,00
Diragukan	198.240.000,00	50%	99.120.000,00	0,00	50%	0,00
Macet	136.497.670,00	100%	136.497.670,00	93.450.794,00	100,00%	93.450.794,00
Jumlah	1.752.131.184,00		242.704.638,00	1.483.810.558,00		100.434.093,00
TOTAL	7.608.431.184,00		271.986.138,00	7.340.110.558,00		129.715.593,00

Tabel 94

Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Jangka Panjang Berdasarkan Satuan Kerja Per 31 Desember 2021

No	Uraian Satker	Saldo	% Penyisihan	Jumlah Penyisihan	Kualitas
SEKRETARIAT JENDERAL					
1	SEKRETARIAT JENDERAL (PUSAT)	50.598.000,00	50,00%	25.299.000,00	Diragukan
		23.876.000,00	50,00%	11.938.000,00	Diragukan
		23.292.500,00	50,00%	11.646.250,00	Diragukan
		19.512.500,00	50,00%	9.756.250,00	Diragukan
		25.626.000,00	50,00%	12.813.000,00	Diragukan
		23.292.500,00	50,00%	11.646.250,00	Diragukan
		32.042.500,00	50,00%	16.021.250,00	Diragukan
		20.440.750,00	0,50%	102.204,00	Lancar
		71.012.424,00	100,00%	71.012.424,00	Macet
		3.400.000,00	0,50%	17.000,00	Lancar
		13.290.126,00	100,00%	13.290.126,00	Macet
		5.856.300.000,00	0,50%	29.281.500,00	Lancar
2	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM AMBON	90.713.032,00	0,50%	453.565,00	Lancar
Total		6.253.396.332,00		213.276.819,00	
Ditjen Pemasyarakatan					
1	LEMBAGA PEMASYARAKATAN BANCEUY BANDUNG	192.012.000,00	0,50%	960.060,00	Lancar



2	LAPAS KELAS III AMURANG	58.460.000,00	0,50%	292.300,00	Lancar
3	RUMAH PENYIMPANAN BARANG SITAAN NEGARA BANDUNG, KOT.BANDUNG, JAWA BARAT	423.134.500,00	0,50%	2.115.673,00	Lancar
4	BALAI PEMASYARAKATA N TERNATE, MALUKU UTARA	52.195.120,00	100,00%	52.195.120,00	Macet
Total		725.801.620,00		55.563.153,00	
Ditjen Imigrasi					
1	KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI MANADO	260.823.992,00	0,50%	1.304.120,00	Lancar
2	KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI TERNATE	161.209.240,00	0,50%	806.046,00	Lancar
3	KANTOR IMIGRASI KELAS II NON TPI MADIUN	138.200.000,00	0,50%	691.000,00	Lancar
4	KANTOR IMIGRASI KELAS III NON TPI KEDIRI	69.000.000,00	0,50%	345.000,00	Lancar
Total		629.233.232,00		3.146.166,00	
Grand Total		7.608.431.184,00		271.986.138,00	

C.14. TANAH

Tanah
Rp54.300.058.612.02
4,00

Tanah yang dimiliki Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp54.300.058.612.024,00 dan Rp54.289.885.533.612,00. Rincian perbandingan nilai Aset Tanah berdasarkan Eselon I pada Kementerian Hukum dan HAM per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 disajikan sebagai berikut :



Tabel 95
Perbandingan Nilai Tanah Berdasarkan Eselon I
Per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Unit Eselon I	Tanah	
	31 Desember 2021	31 Desember 2020
Sekretariat Jenderal	19.711.643.013.652,00	19.791.302.409.406,00
Inspektorat Jenderal	0,00	0,00
Ditjen Administrasi Hukum Umum	299.301.522.000,00	299.301.522.000,00
Ditjen Pemasyarakatan	28.573.291.330.402,00	28.491.302.354.785,00
Ditjen Imigrasi	4.270.657.320.970,00	4.262.813.822.421,00
Ditjen Kekayaan Intelektual	0,00	0,00
Ditjen Peraturan Perundang-undangan	0,00	0,00
Ditjen Hak Asasi Manusia	0,00	0,00
Badan Pembinaan Hukum Nasional	356.165.357.000,00	356.165.357.000,00
Balitbang Hukum dan HAM	0,00	0,00
BPSPDM Hukum dan HAM	1.089.000.068.000,00	1.089.000.068.000,00
TOTAL	54.300.058.612.024,00	54.289.885.533.612,00

Terkait dengan aset tanah, terdapat tanah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang dicatat secara ganda baik oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia maupun oleh Kementerian Dalam Negeri. Berikut penjelasan atas kondisi tanah tersebut:

1. Aset berupa tanah dan bangunan berlokasi di Kernolong, Kramat, Jakarta Pusat. Aset tersebut digunakan oleh Ditjen Administrasi Hukum Umum sebagai bangunan arsip. Adapun rincian yang telah dicatat dalam aplikasi SIMAK-BMN Ditjen Administrasi Hukum Umum (sesuai dengan data KIB) sebagai berikut:
 - Tanah dengan luas 3.099 m2 senilai Rp36.283.246.950,00
 - Bangunan (Gedung A) dengan luas 740 m2 senilai Rp2.192.748.726,00
 - Bangunan (Gedung B) dengan luas 680 m2 senilai Rp2.669.972.138,00
 - Bangunan (Gedung C) dengan luas 130 m2 senilai Rp392.686.551,00
2. Ditjen Administrasi Hukum Umum telah melakukan koordinasi dengan Kantor Pertanahan Jakarta Pusat



dengan hasil yang disampaikan melalui surat Kantor Pertanahan Jakarta Pusat No.3513/18-31.71-300/X/2019 pada tanggal 14 Oktober 2019, yang intinya menyampaikan hal sebagai berikut:

- Bahwa sesuai daftar Isian yang tersimpan di Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Pusat, Hak Pakai No.44/Kenari, luas 3,099 m² sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur No. 12/2001, tanggal 28 Agustus 2001, terletak di Jalan Kernolong IV Dalam (Jl. Kramat Raya 132 belakang), Kelurahan Kenari, Kecamatan Senen, Kota Administrasi Jakarta Pusat bahwa tanah tersebut tercatat atas nama Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI.
 - Pada Buku Tanah Hak Pakai No.44/Kenari tidak terdapat catatan blokir, sita dan/atau pembebanan hak dari pihak lain.
 - Bahwa Informasi diatas sesuai dengan catatan pada Buku Tanah, tidak termasuk penguasaan fisik lapangan dan masalah-masalah diluar yang tercatat di Buku Tanah.
3. Terhadap aset berupa tanah dan bangunan tersebut telah memiliki Penetapan Status Penggunaan (PSP) Kementerian Hak Asasi Manusia.
 4. Terhadap aset berupa tanah dan bangunan tersebut juga telah masuk dalam program inventarisasi dan penilaian Kembali (revaluasi) BMN dari Kementerian Keuangan, dan nilai aset yang disajikan berdasarkan dengan hasil penilaian tersebut.

Selain itu, terkait temuan tim pemeriksa BPK atas pengelolaan aset tanah Pulau Nusakambangan dengan pihak lain dengan luas 21.000.000 m² senilai Rp2.970.534.000.000,00, tindak lanjut yang telah dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Melakukan rapat koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri pada tanggal 2 Juli 2020 terkait dukungan dari Kementerian Dalam Negeri apabila terdapat permasalahan sengketa khususnya pada dokumen dukung atas kepemilikan tanah.
2. Melakukan rapat koordinasi dengan Kementerian ATR BPN pada tanggal 31 Agustus 2020 dan dilanjutkan



dengan melakukan koordinasi dengan Kantor Pertanahan Cilacap pada tanggal 21 September 2020 untuk dukungan penertiban kawasan Nusakambangan yang bersinggungan dengan masyarakat Kampung Laut dalam hal batas wilayah.

3. Langkah selanjutnya akan melakukan koordinasi dengan pihak-pihak lain yang terkait untuk menyikapi status Pulau Nusakambangan sebagai salah satu pulau kecil terluar. Pihak-pihak yang akan dilakukan koordinasi adalah Kementerian Keuangan, Kementerian Polhukam, Kementerian KKP, Kementerian Kehutanan dan pihak terkait lainnya.

Terdapat Aset Tanah milik Kementerian Hukum dan HAM yang tercatat dan/atau dikuasai pihak yang tidak berhak dengan data sebagai berikut:

Tabel 96
Penjelasan Tanah yang dikuasai pihak lain
per 31 Desember 2021

Satuan Kerja	Keterangan
Sekretariat Jenderal	- Telah melakukan pemanfaatan sewa aset tanah yang diokupasi pihak lain di Jl. Perintis kemerdekaan, Kota Tangerang. - Sekretariat Jenderal telah mengambil alih Pengelolaan Pasar Babakan Tangerang, sebagai tindak lanjut atas rekomendasi BPK terkait pengelolaan lahan dimaksud dengan melakukan penertiban dan sosialisasi langsung ke lokasi pada bulan Juni 2021.
Lapas Sukamiskin	Terdapat duplikasi pencatatan antara Lapas dan Pemkot Bandung, namun keduanya tidak memiliki dokumen pendukung (sertifikat) yang berlokasi di Jl. Pacuan Kuda, terkait hal tersebut Biro Pengelolaan BMN mengarahkan untuk meminta revidi kepada APIP atas permasalahan tersebut.

Terdapat perubahan nilai Tanah dari data Laporan Keuangan tahun 2021 (*Unaudited*) dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 97
Total Koreksi Nilai Tanah

Uraian	<i>Unaudited</i>	Koreksi	<i>Audited</i>
Tanah	54.300.361.093.524,00	(302.481.500,00)	54.300.058.612.024,00



Tabel 98
Koreksi Nilai Tanah Berdasarkan Satuan Kerja

No	Satker	Nilai Tanah		
		Unaudited	Koreksi	Audited
1	Lapas Saumlaki	5.891.162.000,00	(313.421.000,00)	5.577.741.000,00
2	Lapas Lubuk Basung	939.454.000,00	10.939.500,00	950.393.500,00
Jumlah			(302.481.500,00)	

Koreksi tersebut merupakan dampak tindak lanjut terhadap hasil Validasi BMN 2021 berupa Tanah serta Temuan BPK yang menyatakan bahwa terdapat kurang catat aset tetap berupa Tanah.

Pada Laporan Keuangan Audited Tahun 2021 belum disajikan luasan tanah di Nusa Kambangan yang terkonfirmasi karena masih diperlukan proses lanjutan berupa penilaian kembali tanah di Nusa Kambangan dan memastikan pengelompokkan klasifikasi tanah antara lain : Tanah Basah, Tanah Padat, Tanah Rawa dan Jenis Tanah Lainnya, untuk hal tersebut akan dilakukan koordinasi dengan Kementerian Keuangan dan Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup.

Terhadap nilai Tanah Rp54.300.058.612.024,00 masih terdapat tanah sengketa dengan luas 855.574 m2 pada 18 satuan kerja dilingkungan Kementerian Hukum dan HAM yaitu Lapas Pamekasan, Rutan Labuhan Deli, Lapas Gunung Sitoli, Rutan Tarutung, Lapas Narkotika Sawah Lunto, Bapas Lahat, Kanwil Kalimantan Barat, Kanim Entikong, Lapas Amuntai, Lapas Manado, Kanwil Sulawesi Selatan, Lapas Mataram, Rutan So'e, Rutan Ruteng, Lapas Merauke, Lapas Boalemo, Bapas Sorong, dan Lapas Manokwari.

Rincian Mutasi Tanah disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 99
Rincian Mutasi Tanah per 31 Desember 2021

Uraian	Intrakomptabel
Saldo per 31 Desember 2020	54.289.885.533.612,00
Mutasi tambah :	



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Catatan Atas Laporan Keuangan – *Penjelasan atas Pos-Pos Neraca*
Per 31 Desember Tahun Anggaran 2021 (*Audited*)
Dengan Angka Perbandingan 31 Desember Tahun Anggaran 2020
(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Penambahan Saldo Awal	7.715.635.839,00
Transfer Masuk	174.071.665.278,00
Hibah Masuk	19.928.072.951,00
Reklasifikasi Masuk	28.932.139.000,00
Perolehan Hasil TL Normalisasi	5.174.909.770.000,00
Pengembangan Nilai Aset	220.090.000,00
Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas	3.342.830.000,00
Pengembangan Dengan KDP	489.454.000,00
Total Mutasi Tambah :	5.409.609.657.068,00
Mutasi Kurang :	
Reklas AT ke AL	1.584.000,00
Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas	6.214.263.902,00
Transaksi Normalisasi BMN	5.175.464.557.000,00
Transfer Keluar	178.137.191.754,00
Hibah Keluar	622.500.000,00
Reklasifikasi Keluar	28.932.139.000,00
Koreksi Pencatatan	10.064.343.000,00
Total Mutasi Kurang :	5.399.436.578.656,00
Saldo per 31 Desember 2021	54.300.058.612.024,00
Nilai Buku per 31 Desember 2021	54.300.058.612.024,00

Penjelasan Sebaran Transaksi sebagai berikut :

- **Mutasi Tambah**

- a. Penambahan Saldo Awal senilai Rp7.715.635.839,00 terdapat pada:
 - Lapas Ampara sebesar Rp2.817.250.000,00 yang merupakan perbaikan pencatatan dimana semula tanah tersebut telah dilakukan Koreksi Pencatatan sebagai tindak lanjut Barang Tidak Ditemukan (BTD) hasil revaluasi, namun setelah dilakukan penelusuran diketahui bahwa tanah tersebut masih ada (ditemukan), sehingga dilakukan perekaman kembali tanah tersebut melalui Saldo Awal.
 - Rutan Bima sebesar Rp2.548.100.000,00 yang merupakan pencatatan Tanah Kebun Lainnya yang belum tercatat di SIMAK. Tanah tersebut diketahui merupakan milik Rutan Bima berdasarkan informasi dari pihak Kelurahan Rontu berdasarkan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan atas nama Rutan Bima. Berdasarkan



- dokumen tersebut, maka melanjutkan dengan pengurusan sertifikat dan akhirnya terbit SHP Nomor 6 pada Tahun 2021 yang ditindaklanjuti dengan mencatat aset tanah tersebut sebagai Saldo Awal.
- Kanim Tanjung Pinang sebesar Rp853.629.000,00 yang merupakan pencatatan dua bidang tanah milik Kanim Tanjung Pinang yg berlokasi di Kecamatan Serasan, Kabupaten Natuna yg belum tercatat yang memiliki bukti kepemilikan berupa AJB dengan rincian berdasarkan akta jual beli no 08/593/1985 tanggal 10/09/1985 senilai Rp1.000.000 luas 400 m2, akta jual beli No.07/593/1985 tanggal 10/09/1985 senilai Rp1.500.000 luas 600 m2, serta pencatatan tanah di Bukit Semprong yang sebelumnya dikategorikan sebagai BTB ketika revaluasi tahun 2018, saat ini telah dicatat sebagai aset milik Kanim berdasarkan surat pernyataan penguasaan aset senilai Rp851.129.000 luas 1.338 m2.
 - Kanwil Riau (Setjen) sebesar Rp796.530.644,00 yang merupakan pemecahan Tanah Bangunan Kantor Pemerintah NUP 5 dari 1 sertifikat menjadi 3 sertifikat Tanah. Awalnya luas tanah tersebut ialah 7.213 m2, namun sertifikat atas tanah tersebut hilang sehingga dilakukan proses pengukuran ulang oleh BPN. Dari hasil pengukuran ulang diketahui bahwa luas tanah tersebut berkurang akibat pemotongan jalan yang digunakan masyarakat dan terpisah menjadi 3 bidang tanah sehingga kemudian diterbitkan 3 sertifikat yang berbeda. Sehingga terhadap hal tersebut dilakukan penyesuaian luas tanah eksisting melalui transaksi Koreksi Perubahan Nilai/Kuantitas dan pencatatan dua bidang tanah yang baru melalui transaksi Saldo Awal.
 - Lapas Sarolangun Rawas sebesar Rp697.051.475,00 yang merupakan pencatatan hibah tanah dari Pemkab Musi Rawas berdasarkan BAST Nomor 028//2457/DPPKAD/2015 tanggal 23 November 2015 dimana tanah tersebut saat ini digunakan oleh Bapas Musi Rawas.
 - Rutan Menggala sebesar Rp3.074.720,00 yang merupakan pencatatan Tanah Bangunan Kantor yang telah dihibahkan oleh Pemda setempat pada tahun



- 2014 sesuai Naskah Perjanjian Hibah nomor :
900/2351/III/X/TB/2014 tanggal 21 Oktober 2014.
- b. Transfer Masuk senilai Rp174.071.665.278,00 diantaranya terdapat pada:
- Rutan Surabaya sebesar Rp61.260.560.000,00 yang merupakan transfer masuk Tanah Bangunan Rumah Negara Gol I dan Tanah Bangunan Fasilitas Tempat Tinggal Lainnya dari Kanwil Jawa Timur (Setjen)
 - Kanwil Banten (Setjen) sebesar Rp28.951.634.000,00 yang merupakan transfer masuk Tanah Bangunan Fasilitas Tempat Tinggal Lainnya dari Rutan Serang.
 - Lapas Mataram sebesar Rp25.681.065.000,00 yang merupakan transfer masuk Tanah Sawah Irigasi dari Kanwil NTB (Setjen).
 - Ditjen AHU sebesar Rp16.400.081.000,00 yang merupakan transfer masuk Tanah Bangunan Tempat Kerja Lainnya dari BHP Semarang.
 - Rutan Salatiga sebesar Rp6.976.963.000,00 yang merupakan transfer masuk Tanah Bangunan Tempat Kerja Lainnya dari Kanwil Jawa Tengah (Setjen).
- c. Hibah Masuk senilai Rp19.928.072.951,00 diantaranya terdapat pada:
- Kanwil Kalimantan Timur (Setjen) sebesar Rp10.355.015.607,00 yang merupakan hibah dari Pemkab Penajam Paser Utara dengan nomor BAST : 032/868/TU-PIMP/BKAD tanggal 13 Juli Tahun 2021 yang akan digunakan untuk pembangunan UPT Pemasayarakatan di Kabupaten Penajam Paser Utara.
 - Kanwil Gorontalo (Setjen) sebesar Rp2.824.000.000,00 yang merupakan hibah dari Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara dengan nomor BAST 900/BK-GORUT/NHPD/289.a/IX/2021 tanggal 9 September 2021 yang digunakan untuk Pembangunan Rutan Gorut.
 - Kanim Banggai sebesar Rp1.991.732.741,00 yang merupakan hibah dari Pemkab Banggai dengan BAST Nomor : 580/432/bag.kerjasama tanggal 21 Juli 2020 dan Pemkab Morowali dengan BAST Nomor : 580/1212/UMUM/XII/2019 tanggal 5 Desember 2019. Tanah dari Pemkab Banggai akan digunakan untuk pembangunan Kantor Pelayanan Keimigrasian



sedangkan dari Pemkab Morowali akan digunakan untuk pembangunan faskes, rumah dinas pejabat/pegawai Kantor Imigrasi, dan rudenim.

- Kanwil Kalimantan Selatan (Setjen) sebesar Rp1.196.400.000,00 yang merupakan hibah dari Pemkab Balangan dengan nomor BAST : 030/07/BASTHIBAH-II/2021 tanggal 31 Mei 2021 yang akan digunakan untuk pembangunan Lapas Balangan.
 - Kanwil NTT (Setjen) sebesar Rp.899.397.000,00 yang merupakan tindak lanjut terhadap hibah tanah dari Pemkab Manggarai Barat yang awalnya dicatat melalui Saldo Awal pada tahun 2020, namun karena Nomor Register Hibah telah terbit dari Kanwil Ditjen Perbendaharaan pada Tahun 2021 maka terhadap tanah tersebut dilakukan Koreksi Pencatatan dan dicatat kembali melalui transaksi Hibah Masuk berdasarkan Nomor Register Hibah : 28T95M9A tanggal 5 Februari 2021.
- d. Reklasifikasi Masuk senilai Rp28.932.139.000,00 diantaranya terdapat pada:
- Bapas Klaten sebesar Rp11.576.066.000,00 yang merupakan reklasifikasi Tanah Kebun Lainnya menjadi Tanah Bangunan Kantor Pemerintah.
 - Lapas Perempuan Bengkulu sebesar Rp4.799.944.000,00 yang merupakan reklasifikasi Tanah Bangunan Rumah Negara Dalam Proses Penggolongan NUP 1 menjadi Tanah Bangunan Kantor Pemerintah NUP 1.
 - BHP Medan sebesar Rp4.249.900.000,00 yang merupakan reklasifikasi Tanah Rumah Negara Dalam Proses Penggolongan menjadi Tanah Rumah Negara Golongan I.
 - Lapas Muara Bulian sebesar Rp3.250.498.000,00 yang merupakan reklasifikasi Tanah Rumah Negara Golongan II menjadi Tanah Rumah Negara Golongan I.
 - Kanwil Sulawesi Tenggara (Setjen) sebesar Rp2.700.000.000,00 yang merupakan pemecahan pencatatan tanah menjadi 3 NUP yang diperuntukan Untuk Lembaga Pemasarakatan Perempuan,



Lembaga Pembinaan Khusus Anak dan Rencana Pembangunan Lapas Narkotika.

- e. Perolehan Hasil Tindak Lanjut Normalisasi senilai Rp5.174.909.770.000,00 merupakan tindak lanjut Kertas Kerja Konfirmasi (K3) dimana terhadap BMN berupa Tanah teridentifikasi sebagai BMN Tidak Wajar dengan kategori Tanggal Perolehan Tidak Wajar (Di Bawah 1945), namun secara fisik diketahui bahwa Tanah tersebut masih digunakan sehingga dilakukan penginputan kembali. Transaksi tersebut diantaranya terdapat pada :
- Ditjen Pemasyarakatan sebesar Rp2.970.540.888.000,00
 - Rutan Jakarta Pusat sebesar Rp606.368.361.000,00
 - Rutan Surakarta sebesar Rp355.526.275.000,00
 - Lapas Malang sebesar Rp247.334.349.000,00
 - Lapas Bogor sebesar Rp148.682.817.000,00
- f. Pengembangan Nilai Aset senilai Rp220.090.000,00 terdapat pada :
- Kanwil Jawa Tengah (Setjen) sebesar Rp190.090.000,00 yang merupakan pematangan lahan tanah milik Kanwil yang akan digunakan untuk pembangunan Rusun Oleh PUPR di Jl. Siliwangi, Krapyak, Semarang.
 - Rutan Lubuk Sikaping sebesar Rp30.000.000,00 yang merupakan hibah pembangunan lapangan olah raga dari Pemda Lubuk Sikaping berdasarkan naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) Nomor :900/500/SP/BH/DISPORAPAR/2021 Tanggal 15 November 2021.
- g. Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas senilai Rp3.342.830.000,00 terdapat pada :
- Kanwil Papua Barat (Setjen) sebesar Rp2.248.254.000,00 yang merupakan koreksi terhadap Turap yang awalnya tercatat sebagai Irigasi, kemudian terhadap turap tersebut dilakukan Koreksi Pencatatan dan nilainya ditambahkan ke nilai tanah.
 - Rutan Raha sebesar Rp1.094.576.000,00 yang merupakan koreksi terhadap Turap yang awalnya tercatat sebagai Irigasi, kemudian terhadap turap



tersebut dilakukan Koreksi Pencatatan dan nilainya ditambahkan ke nilai tanah.

- h. Pengembangan Dengan KDP senilai Rp489.454.000,00 terdapat pada Lapas Lubuk Basung yang merupakan penyelesaian pekerjaan pematangan lahan yang diperuntukkan untuk pembangunan rumah negara.

- **Mutasi Kurang**

- a. Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya senilai Rp1.584.000,00 terdapat pada Lapas Manado yang merupakan tindak lanjut terhadap Barang Tidak Ditemukan (BTD) berupa Tanah hasil Revaluasi Tahun 2020 berdasarkan Berita Acara Penghentian dari Penggunaan Nomor : W.27.PAS.PAS.5.PB.05.01-86 tanggal 15 November 2021.
- b. Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas senilai Rp6.214.263.902,00 terdapat pada :
 - Bapas Jambi sebesar Rp1.980.996.700,00 yang merupakan tindak lanjut terhadap perbedaan luas tanah hasil pengukuran dibandingkan yang tertera di sertifikat lama karena adanya tanah Bapas Jambi yang terkena pelebaran jalan sehingga luas tanah hasil pengukuran lebih kecil dibandingkan pada sertifikat.
 - Kanwil Sultra (Setjen) sebesar Rp91.000.000,00 yang merupakan tindak lanjut terhadap perubahan luas tanah di Desa Kondara, Kecamatan Pakue, Kabupaten Kolaka Utara yang berkurang akibat terkena pelebaran jalan.
- c. Transaksi Normalisasi BMN senilai Rp5.175.464.557.000,00 merupakan tindak lanjut Kertas Kerja Konfirmasi (K3) dimana terhadap BMN berupa Tanah teridentifikasi sebagai BMN Tidak Wajar dengan kategori Tanggal Perolehan Tidak Wajar (Di Bawah 1945), sehingga terhadap BMN tersebut dilakukan Normalisasi. Transaksi tersebut diantaranya terdapat pada:
 - Ditjen Pemasyarakatan sebesar Rp2.970.540.888.000,00



- Rutan Jakarta Pusat sebesar Rp606.368.361.000,00
- Rutan Surakarta sebesar Rp355.526.275.000,00
- Lapas Malang sebesar Rp247.334.349.000,00
- Lapas Bogor sebesar Rp148.682.817.000,00

Terdapat selisih antara Transaksi Normalisasi dengan Perolehan Hasil Tindak Lanjut Normalisasi sebesar Rp554.787.000,00 yang terdapat pada Lapas Panyabungan dan Lapas Saumlaki. Selisih tersebut merupakan dampak tindak lanjut terhadap Barang Tidak Ditemukan (BTD) Hasil Revaluasi 2019 pada Lapas Panyabungan, dimana terhadap tanah tersebut dilakukan Normalisasi dan dilanjutkan dengan Penghapusan Normalisasi melalui Berita Acara Nomor : W2.E10.PB.05.01-389 tanggal 22 Desember 2021 serta tindak lanjut terhadap Validasi BMN 2021 pada Lapas Saumlaki.

- d. Transfer Keluar senilai Rp178.137.191.754,00 diantaranya terdapat pada:
- Kanwil Jawa Timur (Setjen) sebesar Rp68.255.271.000,00 yang merupakan transfer keluar sebesar Rp61.260.560.000,00 ke Rutan Surabaya berupa Tanah Bangunan Rumah Negara Gol I dan Tanah Bangunan Fasilitas Tempat Tinggal Lainnya serta sebesar Rp289.432.000,00 berupa Tanah Bangunan Tempat Kerja Lainnya ke Lapas Arjasa.
 - Rutan Serang sebesar Rp28.951.634.000,00 yang merupakan transfer keluar ke Kanwil Banten (Setjen) berupa Tanah Bangunan Fasilitas Tempat Tinggal Lainnya.
 - Kanwil NTB (Setjen) sebesar Rp26.398.085.803,00 yang merupakan transfer keluar Tanah Sawah Irigasi ke Lapas Mataram sebesar Rp25.681.065.000,00 dan Tanah Bangunan Kantor Pemerintah ke Kanim Sumbawa Besar sebesar Rp717.020.083,00



- BHP Semarang sebesar Rp16.400.081.000,00 yang merupakan transfer keluar ke Ditjen AHU berupa Tanah Bangunan Tempat Kerja Lainnya.
- Kanwil Jawa Tengah (Setjen) sebesar Rp6.976.963.000,00 yang merupakan transfer keluar ke Rutan Salatiga berupa Tanah Bangunan Tempat Kerja Lainnya.

Terdapat selisih nilai transfer masuk dan transfer keluar senilai Rp4.065.526.476,00 dengan penjelasan:

Transfer Keluar	Transfer Masuk	Selisih	Keterangan
178.137.191.754,00	174.071.665.278,00	4.065.526.476,00	Selisih disebabkan adanya transfer dari Kanim Sambas ke Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah III Propinsi Kalimantan Barat di bawah Kementerian PUPR yang merupakan transfer keluar sebagian Tanah Kanim Sambas yang terkena proyek pembangunan jalan nasional serta transfer tanah dari Kanim Bogor ke KPKNL Bogor

- e. Hibah Keluar senilai Rp622.500.000,00 terdapat di Kanim Kediri yang merupakan hibah keluar terhadap tanah yang berada di Desa Tugurejo berdasarkan SK Penghapusan Nomor : SEK-46.PB.06.04 Tahun 2021 tanggal 3 September 2021. Pada tahun 2016, Kanim Kediri menerima hibah tanah dari Pemkab Kediri seluas 2.830 m² dan 3.340 m² di Desa Tugurejo, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri berdasarkan BAST Hibah Nomor : W15-PL.04.01-813 tanggal 11 Agustus 2016 yang rencananya akan digunakan untuk pembangunan gedung Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Kediri. Namun sampai dengan tahun 2019, kedua bidang tanah tersebut masih dalam proses sengketa dengan Kepala Desa Tugurejo sedangkan anggaran untuk pembangunan gedung kantor telah turun. Atas dasar hal tersebut, Pemkab Kediri kembali menghibahkan



tanah dengan lokasi yang berbeda yaitu di Desa Grogol, Kabupaten Kediri berdasarkan BAST Hibah Nomor : 028/0312/418.51/2019 tanggal 23 Januari 2019.

- f. Reklasifikasi Keluar senilai Rp28.932.139.000,00,00 terdapat pada :
- Bapas Klaten sebesar Rp11.576.066.000,00 yang merupakan reklasifikasi Tanah Kebun Lainnya menjadi Tanah Bangunan Kantor Pemerintah.
 - Lapas Perempuan Bengkulu sebesar Rp4.799.944.000,00 yang merupakan reklasifikasi Tanah Bangunan Rumah Negara Dalam Proses Penggolongan NUP 1 menjadi Tanah Bangunan Kantor Pemerintah NUP 1.
 - BHP Medan sebesar Rp4.249.900.000,00 yang merupakan reklasifikasi Tanah Rumah Negara Dalam Proses Penggolongan menjadi Tanah Rumah Negara Golongan I.
 - Lapas Muara Bulian sebesar Rp3.250.498.000,00 yang merupakan reklasifikasi Tanah Rumah Negara Golongan II menjadi Tanah Rumah Negara Golongan I.
 - Kanwil Sulawesi Tenggara (Setjen) sebesar Rp2.700.000.000,00 yang merupakan pemecahan pencatatan tanah menjadi 3 NUP yang diperuntukan Untuk Lembaga Pemasyarakatan Perempuan, Lembaga Pembinaan Khusus Anak dan Rencana Pembangunan Lapas Narkotika.
- g. Koreksi Pencatatan senilai Rp10.064.343.000,00 terdapat pada:
- Lapas Kupang sebesar Rp4.000.000.000,00 yang merupakan tindak lanjut BTS hasil revaluasi Tahun 2017 dimana terhadap tanah tersebut tercatat ganda dengan Tanah Bangunan Kantor Pemerintah NUP 3 dan Tanah Kering Lainnya NUP 1.
 - Lapas Banjarmasin sebesar Rp1.803.596.000,00 yang merupakan koreksi atas Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II yang terjadi akibat hasil revaluasi tahun 2020 dimana obyek reval tersebut seharusnya dilakukan reklas masuk dan



reklas keluar disebabkan ketidaktepatan kode barang. Namun dari hasil reval tersebut hanya dilakukan reklas masuk yang mengakibatkan munculnya pencatatan ganda di SIMAK. Sehingga untuk menghilangkan pencatatan ganda tersebut, dilakukan Koreksi Pencatatan.

- Kanwil Bengkulu (Setjen) sebesar Rp500.000.000,00 yang merupakan tindak lanjut terhadap BTB Hasil Revaluasi Tahun 2020, dimana setelah dilakukan penelusuran lebih lanjut diketahui bahwa tanah tersebut adalah milik AURI yang sudah bersertifikat Menurut Surat BPN Nomor : 385/1-17.01.10/XI/2014.
- Lapas Sarolangun Rawas sebesar Rp44.100.000,00 yang merupakan tindak lanjut terhadap obyek reval 2020 berupa Tanah Rumah Negara Golongan I NUP 2 yang dikategorikan sebagai BTB karena kesalahan tanggal perolehan. Terhadap tanah tersebut kemudian diterbitkan tiket revaluasi baru pada tahun yang sama kemudian dikategorikan sebagai Barang Berlebih.

C.15. PERALATAN DAN MESIN

Peralatan dan Mesin
Rp8.395.567.596.182,00

Nilai perolehan aset tetap berupa peralatan dan mesin per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp8.395.567.596.182,00 dan Rp7.783.913.088.592,00. Rincian nilai Peralatan dan Mesin berdasarkan unit Eselon I sebagai berikut:

Tabel 100
Perbandingan Nilai Peralatan dan Mesin Berdasarkan Eselon I
Per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Unit Eselon I	Peralatan dan Mesin	
	31 Desember 2021	31 Desember 2020
Sekretariat Jenderal	873.759.878.836,00	810.284.259.667,00
Inspektorat Jenderal	24.430.293.397,00	21.335.832.898,00
Ditjen Administrasi Hukum Umum	574.169.010.733,00	546.822.607.028,00
Ditjen Pemasyarakatan	3.283.230.894.615,00	2.968.071.668.176,00
Ditjen Imigrasi	3.027.683.037.245,00	2.932.222.328.388,00



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Catatan Atas Laporan Keuangan – *Penjelasan atas Pos-Pos Neraca*
Per 31 Desember Tahun Anggaran 2021 (*Audited*)
Dengan Angka Perbandingan 31 Desember Tahun Anggaran 2020
(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Ditjen Kekayaan Intelektual	428.579.709.066,00	344.365.933.379,00
Ditjen Peraturan Perundang-undangan	30.251.065.643,00	28.376.001.621,00
Ditjen Hak Asasi Manusia	22.291.865.418,00	21.094.410.853,00
Badan Pembinaan Hukum Nasional	22.425.453.956,00	18.929.282.337,00
Balitbang Hukum dan HAM	15.869.386.556,00	15.090.200.714,00
BPSDM Hukum dan HAM	92.877.000.717,00	77.320.563.531,00
Jumlah	8.395.567.596.182,00	7.783.913.088.592,00

Pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia terdapat pengadaan aset peralatan dan mesin dalam rangka penanganan pandemi COVID-19 yang berasal dari pembelian atau transfer masuk dan memenuhi nilai minimum kapitalisasi aset per tanggal 31 Desember 2021. Rincian peralatan dan mesin dalam rangka penanganan pandemi COVID-19 berdasarkan unit eselon I di antaranya disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 101
Rincian Peralatan dan Mesin Dalam Rangka Penanganan Pandemi COVID-19 Berdasarkan Eselon I Per 31 Desember 2021

No	Unit Eselon I	Nilai	Jenis Barang
1	Sekretariat Jenderal	24.750.000	Pembelian air cleaner 5 unit @4.950.000
2	Ditjen Pemasyarakatan	3.017.917.500	Pembelian 1300 unit termogun senilai 1.690.000.000 Honorarium tim kegiatan pengadaan termogun 3.420.000 dan Pengadaan alat PCR di Rumah Sakit Pengayoman senilai 1.320.000.000 dan Pembelian 1 unit Fog Machine Pengadaan PM pada Rutan pondokbambu berupa: Pembelian 2 unit Thermometer Automatic Handsanitizer Pembelian 1 unit fog machine
3	Ditjen Imigrasi	283.088.858	Pengadaan atas UV Sterilizer dan Clinical Thermometer
3	Badan Pembinaan Hukum Nasional	42.531.500	Aerosol Greeloy, autoclave dan Air purifier surretech
4	BPSDM Hukum dan HAM	50.563.000	Pengadaan 2 Unit Mesin Fogging Disinfektan, 2 Unit Mesin Cek Suhu dan krisbow air purified.



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Catatan Atas Laporan Keuangan – *Penjelasan atas Pos-Pos Neraca*
Per 31 Desember Tahun Anggaran 2021 (*Audited*)
Dengan Angka Perbandingan 31 Desember Tahun Anggaran 2020
(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Total	3.418.850.858	

Terdapat perubahan nilai Peralatan dan Mesin beserta Akumulasi Penyusutannya dari data Laporan Keuangan tahun 2021 (*Unaudited*) dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 102
Total Koreksi Nilai Peralatan dan Mesin

Uraian	Unaudited	Koreksi	Audited
Peralatan dan Mesin	8.404.405.292.174,00	(8.837.695.992,00)	8.395.567.596.182,00
Akm. Penyusutan Peralatan dan Mesin	(6.715.932.997.320,00)	(3.747.432.422,00)	(6.719.680.429.742,00)

Tabel 103
Koreksi Nilai Peralatan dan Mesin Berdasarkan Satuan Kerja

No	Satker	Nilai Peralatan dan Mesin		
		Unaudited	Koreksi	Audited
1	Ditjen Pemasarakatan	138.607.556.421,00	16.229.740.605,00	154.837.297.026,00
2	Bapas Bandung	2.956.702.760,00	320.854.243,00	3.277.557.003,00
3	Kanim Jayapura	11.915.813.009,00	275.000.000,00	12.190.813.009,00
4	Politeknik Imigrasi	13.326.973.977,00	121.369.000,00	13.448.342.977,00
5	Lapas Bengkulu	10.101.745.475,00	105.835.455,00	10.207.580.930,00
6	LPKA Ambon	1.500.463.722,00	93.065.390,00	1.593.529.112,00
7	LPKA Manokwari	1.598.211.796,00	93.065.390,00	1.691.277.186,00
8	Kanwil Jawa Barat (Setjen)	20.151.338.942,00	92.290.000,00	20.243.628.942,00
9	Lapas Samarinda	8.784.979.967,00	92.017.500,00	8.876.997.467,00
10	Lapas Anak Pekanbaru	1.839.158.875,00	87.639.684,00	1.926.798.559,00
11	Kanim Tembilahan	6.545.906.978,00	55.027.500,00	6.600.934.478,00
12	Lapas Tanah Merah	1.810.082.817,00	44.306.000,00	1.854.388.817,00
13	Kanwil Jambi (Setjen)	10.485.717.132,00	42.290.000,00	10.528.007.132,00
14	LPP Jakarta	5.586.345.998,00	22.550.000,00	5.608.895.998,00
15	Ditjen AHU	550.356.566.255,00	20.212.500,00	550.376.778.755,00
16	Lapas Fak-Fak	1.906.772.661,00	17.800.000,00	1.924.572.661,00
17	Lapas Panyabungan	2.321.299.956,00	15.910.910,00	2.337.210.866,00
18	Rutan Putussibau	2.578.457.367,00	14.990.876,00	2.593.448.243,00
19	Lapas Palangkaraya	8.078.488.502,00	13.026.300,00	8.091.514.802,00
20	Bapas Garut	1.866.558.180,00	12.994.534,00	1.879.552.714,00
21	Lapas Banjarbaru	7.330.456.763,00	10.910.910,00	7.341.367.673,00
22	Lapas Wanita Tangerang	6.974.411.642,00	10.910.910,00	6.985.322.552,00
23	Kanwil Bengkulu (Setjen)	7.909.877.722,00	9.012.000,00	7.918.889.722,00



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Catatan Atas Laporan Keuangan – *Penjelasan atas Pos-Pos Neraca*
Per 31 Desember Tahun Anggaran 2021 (*Audited*)
Dengan Angka Perbandingan 31 Desember Tahun Anggaran 2020
(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

24	Bapas Luwuk	1.078.134.372,00	6.100.000,00	1.084.234.372,00
25	Rutan Pontianak	5.451.658.901,00	5.455.455,00	5.457.114.356,00
26	Rutan Barabai	2.609.342.582,00	5.455.455,00	2.614.798.037,00
27	Rutan Makassar	21.877.944.323,00	5.455.455,00	21.883.399.778,00
28	Lapas Singkawang	2.176.350.391,00	5.455.455,00	2.181.805.846,00
29	Lapas Amuntai	2.321.548.559,00	5.455.455,00	2.327.004.014,00
30	Lapas Ketapang	2.208.108.279,00	5.455.455,00	2.213.563.734,00
31	Lapas Argamakmur	2.982.655.527,00	5.455.455,00	2.988.110.982,00
32	Lapas Sintang	2.035.247.453,00	5.455.455,00	2.040.702.908,00
33	Lapas Bontang	5.213.879.727,00	5.455.455,00	5.219.335.182,00
34	BHP Surabaya	7.766.497.345,00	4.704.000,00	7.771.201.345,00
35	Kanwil Kalimantan Timur (Setjen)	12.914.177.760,00	4.338.000,00	12.918.515.760,00
36	Lapas Jailolo	1.705.060.900,00	4.250.000,00	1.709.310.900,00
37	LPKA Bandar Lampung	5.101.484.321,00	3.907.890,00	5.105.392.211,00
38	LPKA Bengkulu	2.329.978.040,00	3.004.000,00	2.332.982.040,00
39	Lapas Wonoreli	1.341.480.444,00	2.750.000,00	1.344.230.444,00
40	Bapas Makassar	1.453.051.597,00	2.623.701,00	1.455.675.298,00
41	Lapas Subang	8.102.422.435,00	2.605.260,00	8.105.027.695,00
42	Rutan Manado	10.545.176.404,00	2.179.370,00	10.547.355.774,00
43	Lapas Tembilahan	2.828.172.487,00	2.179.370,00	2.830.351.857,00
44	Lapas Manado	3.461.070.817,00	2.179.370,00	3.463.250.187,00
45	Bapas Manado	1.215.976.219,00	1.563.370,00	1.217.539.589,00
46	Rutan Wonosobo	2.618.227.388,00	1.302.630,00	2.619.530.018,00
47	Bapas Serang	2.016.407.275,00	500.000,00	2.016.907.275,00
48	Rudenim Semarang	7.454.755.987,00	109.845,00	7.454.865.832,00
49	Ditjen Imigrasi	1.417.342.634.612,00	(9.109.856.500,00)	1.408.232.778.112,00
50	Kanwil NTT (Setjen)	11.353.054.972,00	(646.795.600,00)	10.706.259.372,00
51	Lapas Muara Tebo	3.501.831.291,00	(490.941.975,00)	3.010.889.316,00
52	Lapas Narkotika Sawah Lunto	2.654.878.789,00	(490.941.975,00)	2.163.936.814,00
53	LPP Jambi	3.026.879.324,00	(490.941.975,00)	2.535.937.349,00
54	Lapas Kotabaru	6.154.189.789,00	(490.941.975,00)	5.663.247.814,00
55	Lapas Lubuk Basung	7.150.132.909,00	(490.941.975,00)	6.659.190.934,00
56	LPP Martapura	5.057.465.272,00	(490.941.975,00)	4.566.523.297,00
57	Rutan Tanah Grogot	2.992.104.281,00	(480.031.065,00)	2.512.073.216,00
58	Ditjen KI	428.988.070.683,00	(408.361.617,00)	428.579.709.066,00
59	Lapas Pangkalan Bun	5.840.082.761,00	(398.011.585,00)	5.442.071.176,00
60	Rutan Yogyakarta	4.279.000.627,00	(397.876.635,00)	3.881.123.992,00



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Catatan Atas Laporan Keuangan – *Penjelasan atas Pos-Pos Neraca*
Per 31 Desember Tahun Anggaran 2021 (*Audited*)
Dengan Angka Perbandingan 31 Desember Tahun Anggaran 2020
(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

61	Lapas Brebes	2.843.976.829,00	(397.876.585,00)	2.446.100.244,00
62	Bapas Surakarta	2.258.985.400,00	(397.876.585,00)	1.861.108.815,00
63	Rutan Situbondo	2.865.458.717,00	(397.876.585,00)	2.467.582.132,00
64	Rupbasan Wonogiri	1.292.430.502,00	(397.876.585,00)	894.553.917,00
65	Lapas Sukabumi	3.610.767.549,00	(397.876.585,00)	3.212.890.964,00
66	Lapas Narkotika Purwokerto	1.973.792.064,00	(397.876.585,00)	1.575.915.479,00
67	Lapas Yogyakarta	8.582.580.753,00	(397.876.585,00)	8.184.704.168,00
68	Lapas Madiun	15.992.633.724,00	(397.876.585,00)	15.594.757.139,00
69	Rutan Lubuk Sikaping	2.599.294.954,00	(397.876.585,00)	2.201.418.369,00
70	Lapas Narkotika Bandung	12.773.554.150,00	(397.876.585,00)	12.375.677.565,00
71	Rupbasan Purwokerto	1.248.569.863,00	(397.876.585,00)	850.693.278,00
72	Lapas Tanjung	3.135.929.499,00	(397.876.585,00)	2.738.052.914,00
73	Lapas Narkotika Muara Sabak	6.228.956.538,00	(397.876.585,00)	5.831.079.953,00
74	Lapas Narkotika Martapura	14.244.089.677,00	(397.876.585,00)	13.846.213.092,00
75	Rupbasan Sragen	1.074.546.647,00	(397.876.585,00)	676.670.062,00
76	Rutan Wates	2.787.377.526,00	(396.999.585,00)	2.390.377.941,00
77	Lapas Narkotika Samarinda	16.422.202.950,00	(392.421.130,00)	16.029.781.820,00
78	Lapas Sampit	5.790.755.518,00	(384.850.285,00)	5.405.905.233,00
79	Rutan Sungai Penuh	2.762.546.962,00	(103.214.890,00)	2.659.332.072,00
80	Lapas Toli-Toli	2.574.461.323,00	(95.340.390,00)	2.479.120.933,00
81	Rutan Muntok	3.552.138.409,00	(93.065.390,00)	3.459.073.019,00
82	Rutan Pekalongan	2.786.812.994,00	(93.065.390,00)	2.693.747.604,00
83	Lapas Lamongan	3.743.456.210,00	(93.065.390,00)	3.650.390.820,00
84	Rutan Surakarta	12.395.073.553,00	(93.065.390,00)	12.302.008.163,00
85	Rutan Unaaha	1.702.716.282,00	(93.065.390,00)	1.609.650.892,00
86	Lapas Perempuan Jayapura	1.841.180.872,00	(93.065.390,00)	1.748.115.482,00
87	LPKA Palu	3.325.577.488,00	(93.065.390,00)	3.232.512.098,00
88	Rutan Tanjung Pura	2.455.000.636,00	(93.065.390,00)	2.361.935.246,00
89	Lapas Pasir Pangarayan	4.876.026.603,00	(93.065.390,00)	4.782.961.213,00
90	Lapas Bekasi	8.708.002.879,00	(93.065.390,00)	8.614.937.489,00
91	Lapas Alahan Panjang	975.255.771,00	(93.065.390,00)	882.190.381,00
92	Rutan Bangli	2.729.145.908,00	(93.065.390,00)	2.636.080.518,00
93	Lapas Sarolangun Rawas	1.482.620.275,00	(93.065.390,00)	1.389.554.885,00
94	LPKA Jakarta	4.665.441.885,00	(93.065.390,00)	4.572.376.495,00
95	Lapas Klaten	3.304.296.732,00	(93.065.390,00)	3.211.231.342,00
96	Lapas Perempuan Pangkalpinang	1.688.320.012,00	(93.065.390,00)	1.595.254.622,00
97	Rutan Marabahan	2.426.388.889,00	(93.065.390,00)	2.333.323.499,00



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Catatan Atas Laporan Keuangan – *Penjelasan atas Pos-Pos Neraca*
Per 31 Desember Tahun Anggaran 2021 (*Audited*)
Dengan Angka Perbandingan 31 Desember Tahun Anggaran 2020
(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

98	Rutan Palu	5.402.181.647,00	(93.065.390,00)	5.309.116.257,00
99	Lapas Warung Kiara	8.059.249.789,00	(93.065.390,00)	7.966.184.399,00
100	Lapas Bau-Bau	6.349.681.199,00	(93.065.390,00)	6.256.615.809,00
101	Lapas Perempuan Batam	1.874.393.312,00	(93.065.390,00)	1.781.327.922,00
102	Rutan Kendari	5.735.472.285,00	(93.065.390,00)	5.642.406.895,00
103	Lapas Kendal	1.991.396.401,00	(93.065.390,00)	1.898.331.011,00
104	Rutan Nganjuk	2.933.986.014,00	(93.065.390,00)	2.840.920.624,00
105	Lapas Bangko	2.725.912.987,00	(93.065.390,00)	2.632.847.597,00
106	Lapas Dharmas Raya	2.151.297.913,00	(93.065.390,00)	2.058.232.523,00
107	Lapas Pamekasan	11.073.951.498,00	(93.065.390,00)	10.980.886.108,00
108	LPP Mamuju	2.242.437.293,00	(93.065.390,00)	2.149.371.903,00
109	Rutan Padang	5.566.133.060,00	(93.065.390,00)	5.473.067.670,00
110	Rutan Kandangan	2.863.313.324,00	(93.065.390,00)	2.770.247.934,00
111	Lapas Tenggarong	6.197.268.361,00	(93.065.390,00)	6.104.202.971,00
112	LPP Yogyakarta	6.248.831.457,00	(93.065.390,00)	6.155.766.067,00
113	Lapas Wanita Bandar Lampung	8.019.194.851,00	(93.065.390,00)	7.926.129.461,00
114	Rutan Kolaka	2.634.973.053,00	(93.065.390,00)	2.541.907.663,00
115	Lapas Karangasem	3.136.941.652,00	(93.065.390,00)	3.043.876.262,00
116	Lapas Kuningan	4.917.901.146,00	(93.065.390,00)	4.824.835.756,00
117	Lapas Anak Tanjung Pati	2.147.622.357,00	(93.065.390,00)	2.054.556.967,00
118	Lapas Sleman	4.889.149.911,00	(93.065.390,00)	4.796.084.521,00
119	Lapas Cilacap	6.634.902.801,00	(93.065.390,00)	6.541.837.411,00
120	Rutan Perempuan Bandung	2.167.634.080,00	(93.065.390,00)	2.074.568.690,00
121	LPKA Jayapura	1.258.685.426,00	(93.065.390,00)	1.165.620.036,00
122	Lapas Tangerang	5.124.619.069,00	(93.065.390,00)	5.031.553.679,00
123	Rutan Poso	3.752.906.775,00	(93.065.390,00)	3.659.841.385,00
124	Lapas Kuala Tungkal	3.980.222.810,00	(93.065.390,00)	3.887.157.420,00
125	LPKA Yogyakarta	3.032.021.786,00	(93.065.390,00)	2.938.956.396,00
126	Lapas Jombang	2.531.400.214,00	(93.065.390,00)	2.438.334.824,00
127	Rutan Kotabumi	2.792.980.081,00	(93.065.390,00)	2.699.914.691,00
128	Lapas Cikarang	20.404.505.279,00	(93.065.390,00)	20.311.439.889,00
129	Lapas Gunung Sugih	5.016.352.597,00	(93.065.390,00)	4.923.287.207,00
130	LPP Gorontalo	2.873.056.977,00	(93.065.390,00)	2.779.991.587,00
131	Lapas Purwokerto	11.632.679.202,00	(90.460.130,00)	11.542.219.072,00
132	Rutan Mempawah	3.341.874.743,00	(87.609.935,00)	3.254.264.808,00
133	Lapas Pontianak	14.625.247.507,00	(87.609.935,00)	14.537.637.572,00
134	Lapas Bogor	6.486.075.598,00	(16.767.000,00)	6.469.308.598,00
135	Lapas Sragen	3.949.526.892,00	(13.200.000,00)	3.936.326.892,00



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Catatan Atas Laporan Keuangan – *Penjelasan atas Pos-Pos Neraca*
Per 31 Desember Tahun Anggaran 2021 (*Audited*)
Dengan Angka Perbandingan 31 Desember Tahun Anggaran 2020
(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

136	Kanwil Sulawesi Barat (Setjen)	9.955.718.889,00	(11.110.000,00)	9.944.608.889,00
137	Rutan Kabanjahe	1.612.783.239,00	(10.910.910,00)	1.601.872.329,00
138	Lapas Narkotika Langkat	13.693.850.256,00	(10.910.910,00)	13.682.939.346,00
139	Kanim Bengkulu	6.104.779.788,00	(5.358.500,00)	6.099.421.288,00
140	Kanwil Sulawesi Utara (Setjen)	9.404.622.757,00	(5.000.000,00)	9.399.622.757,00
141	Rupbasan Rengat	648.454.656,00	(2.947.405,00)	645.507.251,00
142	Kanwil Sulawesi Selatan (Setjen)	17.875.021.877,00	(2.699.000,00)	17.872.322.877,00
143	Bapas Bekasi	1.365.859.600,00	(2.307.856,00)	1.363.551.744,00
144	Bapas Tarakan	1.031.683.313,00	(1.608.742,00)	1.030.074.571,00
145	LPP Pekanbaru	995.044.607,00	(990.000,00)	994.054.607,00
146	Bapas Nagan Raya	938.265.410,00	(776.870,00)	937.488.540,00
147	Kanim Manado	12.590.969.970,00	(685.000,00)	12.590.284.970,00
148	Rutan Palembang	13.172.835.564,00	(105.000,00)	13.172.730.564,00
149	Rutan Baturaja	3.423.045.063,00	(25.000,00)	3.423.020.063,00

Tabel 104

Koreksi Nilai Akm. Penyusutan Peralatan dan Mesin Berdasarkan Satuan Kerja

No	Satker	Nilai Akm. Penyusutan Peralatan dan Mesin		
		Unaudited	Koreksi	Audited
1	Ditjen Pemasyarakatan	(84.453.486.438,00)	(1.321.928.492,00)	(85.775.414.930,00)
2	Kanim Ngurah Rai	(21.097.853.226,00)	(1.289.759.680,00)	(22.387.612.906,00)
3	Ditjen Imigrasi	(1.258.132.654.927,00)	(1.033.912.321,00)	(1.259.166.567.248,00)
4	BPHN	(17.645.861.900,00)	(419.638.588,00)	(18.065.500.488,00)
5	Kanim Jayapura	(10.174.302.315,00)	(275.000.000,00)	(10.449.302.315,00)
6	Rutan Batam	(11.688.950.160,00)	(233.577.832,00)	(11.922.527.992,00)
7	Kanim Cilacap	(9.889.158.123,00)	(187.250.000,00)	(10.076.408.123,00)
8	Bapas Bandung	(2.065.737.518,00)	(128.507.340,00)	(2.194.244.858,00)
9	Rutan Dumai	(2.783.637.024,00)	(125.689.326,00)	(2.909.326.350,00)
10	Lapas Lubuk Linggau	(4.337.084.435,00)	(122.455.926,00)	(4.459.540.361,00)
11	Lapas Bengkulu	(8.969.727.499,00)	(104.198.819,00)	(9.073.926.318,00)
12	Lapas Narkotika Jayapura	(8.003.224.902,00)	(97.441.987,00)	(8.100.666.889,00)
13	Politeknik Imigrasi	(11.891.008.889,00)	(97.255.375,00)	(11.988.264.264,00)
14	Lapas Samarinda	(8.336.715.181,00)	(92.017.500,00)	(8.428.732.681,00)
15	Lapas Anak Pekanbaru	(1.435.924.944,00)	(87.639.684,00)	(1.523.564.628,00)



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Catatan Atas Laporan Keuangan – *Penjelasan atas Pos-Pos Neraca*
Per 31 Desember Tahun Anggaran 2021 (*Audited*)
Dengan Angka Perbandingan 31 Desember Tahun Anggaran 2020
(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

16	Kanim Banda Aceh	(7.451.563.479,00)	(83.493.080,00)	(7.535.056.559,00)
17	Rutan Pacitan	(2.291.268.314,00)	(65.142.174,00)	(2.356.410.488,00)
18	Rumah Sakit Pengayoman	(26.519.419.716,00)	(62.500.000,00)	(26.581.919.716,00)
19	Bapas Palangkaraya	(953.099.996,00)	(31.577.427,00)	(984.677.423,00)
20	Kanim Nunukan	(9.606.582.365,00)	(29.937.547,00)	(9.636.519.912,00)
21	Kanim Padang	(9.476.327.395,00)	(28.533.231,00)	(9.504.860.626,00)
22	Kanwil Jambi (Setjen)	(8.754.484.759,00)	(23.404.000,00)	(8.777.888.759,00)
23	Ditjen AHU	(397.701.941.081,00)	(20.212.500,00)	(397.722.153.581,00)
24	Lapas Fak-Fak	(1.535.657.502,00)	(17.800.000,00)	(1.553.457.502,00)
25	Lapas Panyabungan	(2.018.541.760,00)	(15.910.910,00)	(2.034.452.670,00)
26	Rutan Putussibau	(2.301.723.506,00)	(14.990.876,00)	(2.316.714.382,00)
27	Bapas Garut	(1.491.114.833,00)	(12.994.534,00)	(1.504.109.367,00)
28	Kanim Bandung	(32.950.419.483,00)	(12.683.000,00)	(32.963.102.483,00)
29	Kanwil Jawa Barat (Setjen)	(18.319.797.350,00)	(11.503.000,00)	(18.331.300.350,00)
30	Kanwil Sumatera Selatan (Setjen)	(12.789.530.261,00)	(11.020.680,00)	(12.800.550.941,00)
31	Lapas Wanita Tangerang	(5.420.644.930,00)	(10.910.910,00)	(5.431.555.840,00)
32	Lapas Banjarbaru	(5.954.249.944,00)	(10.910.910,00)	(5.965.160.854,00)
33	Lapas Tanah Merah	(1.162.965.122,00)	(10.701.500,00)	(1.173.666.622,00)
34	LPKA Manokwari	(918.388.722,00)	(9.306.539,00)	(927.695.261,00)
35	LPKA Ambon	(900.882.558,00)	(9.306.539,00)	(910.189.097,00)
36	Bapas Luwuk	(896.689.802,00)	(6.100.000,00)	(902.789.802,00)
37	LPP Jakarta	(4.202.802.103,00)	(5.637.500,00)	(4.208.439.603,00)
38	Rutan Makassar	(20.235.648.372,00)	(5.455.455,00)	(20.241.103.827,00)
39	Lapas Singkawang	(1.283.349.227,00)	(5.455.455,00)	(1.288.804.682,00)
40	Rutan Raha	(1.659.167.914,00)	(5.455.455,00)	(1.664.623.369,00)
41	Lapas Argamakmur	(2.133.235.933,00)	(5.455.455,00)	(2.138.691.388,00)
42	Lapas Sintang	(1.686.559.996,00)	(5.455.455,00)	(1.692.015.451,00)
43	Lapas Bontang	(3.971.887.935,00)	(5.455.455,00)	(3.977.343.390,00)
44	Lapas Ketapang	(1.822.129.923,00)	(5.455.455,00)	(1.827.585.378,00)
45	Rutan Barabai	(1.822.485.718,00)	(5.455.455,00)	(1.827.941.173,00)
46	Rutan Pontianak	(4.157.166.811,00)	(5.455.455,00)	(4.162.622.266,00)
47	Lapas Amuntai	(1.982.841.694,00)	(5.455.455,00)	(1.988.297.149,00)
48	BHP Surabaya	(5.106.809.948,00)	(4.704.000,00)	(5.111.513.948,00)
49	Rupbasan Rengat	(543.321.608,00)	(4.559.446,00)	(547.881.054,00)



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Catatan Atas Laporan Keuangan – *Penjelasan atas Pos-Pos Neraca*
Per 31 Desember Tahun Anggaran 2021 (*Audited*)
Dengan Angka Perbandingan 31 Desember Tahun Anggaran 2020
(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

50	Kanwil Kalimantan Timur (Setjen)	(11.576.232.359,00)	(4.338.000,00)	(11.580.570.359,00)
51	Kanim Sanggau	(6.712.898.021,00)	(3.843.846,00)	(6.716.741.867,00)
52	Kanim Selat Panjang	(4.947.003.848,00)	(3.027.000,00)	(4.950.030.848,00)
53	Kanwil Bengkulu (Setjen)	(6.863.514.307,00)	(2.648.820,00)	(6.866.163.127,00)
54	Lapas Palangkaraya	(6.917.108.808,00)	(2.605.260,00)	(6.919.714.068,00)
55	LPKA Bengkulu	(1.175.852.586,00)	(2.403.200,00)	(1.178.255.786,00)
56	Lapas Jailolo	(966.552.755,00)	(2.390.625,00)	(968.943.380,00)
57	Bapas Nusakambangan	(1.131.917.316,00)	(1.944.644,00)	(1.133.861.960,00)
58	LPP Pekanbaru	(808.266.690,00)	(1.860.000,00)	(810.126.690,00)
59	Bapas Makassar	(1.230.956.121,00)	(1.836.591,00)	(1.232.792.712,00)
60	Kanim Tasikmalaya	(7.328.434.480,00)	(1.479.375,00)	(7.329.913.855,00)
61	Rutan Bandar Lampung	(8.135.298.945,00)	(1.416.666,00)	(8.136.715.611,00)
62	Lapas Manado	(2.728.157.026,00)	(1.362.106,00)	(2.729.519.132,00)
63	Rutan Manado	(9.962.556.474,00)	(1.362.106,00)	(9.963.918.580,00)
64	Lapas Tembilahan	(2.458.789.136,00)	(1.362.104,00)	(2.460.151.240,00)
65	Kanim Pekanbaru	(16.491.602.178,00)	(1.090.203,00)	(16.492.692.381,00)
66	Kanim Pangkal Pinang	(6.983.931.224,00)	(1.043.876,00)	(6.984.975.100,00)
67	Bapas Manado	(1.040.375.542,00)	(977.106,00)	(1.041.352.648,00)
68	Lapas Wonoreli	(1.163.390.604,00)	(900.000,00)	(1.164.290.604,00)
69	Kanim Banjarmasin	(13.006.641.243,00)	(900.000,00)	(13.007.541.243,00)
70	Kanim Kendari	(5.475.549.787,00)	(815.759,00)	(5.476.365.546,00)
71	LPKA Bandar Lampung	(4.704.310.556,00)	(781.577,00)	(4.705.092.133,00)
72	Rudenim Semarang	(6.477.795.997,00)	(756.946,00)	(6.478.552.943,00)
73	Bapas Bandar Lampung	(1.172.640.173,00)	(708.334,00)	(1.173.348.507,00)
74	Lapas Subang	(7.098.656.301,00)	(521.050,00)	(7.099.177.351,00)
75	Lapas Bangkinang	(4.194.581.974,00)	(516.830,00)	(4.195.098.804,00)
76	Bapas Serang	(1.548.799.123,00)	(500.000,00)	(1.549.299.123,00)
77	Kanim Cianjur	(989.362.194,00)	(483.870,00)	(989.846.064,00)
78	Kanwil Papua (Setjen)	(14.017.544.266,00)	(414.615,00)	(14.017.958.881,00)
79	Rutan Wonosobo	(1.686.220.990,00)	(260.526,00)	(1.686.481.516,00)
80	Rutan Perempuan Medan	(1.002.681.564,00)	(258.415,00)	(1.002.939.979,00)
81	Lapas Terbuka Rumbai	(1.842.288.256,00)	(258.415,00)	(1.842.546.671,00)



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Catatan Atas Laporan Keuangan – *Penjelasan atas Pos-Pos Neraca*
Per 31 Desember Tahun Anggaran 2021 (*Audited*)
Dengan Angka Perbandingan 31 Desember Tahun Anggaran 2020
(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

82	Rutan Bima	(2.189.619.607,00)	(228.200,00)	(2.189.847.807,00)
83	Kanim Palangkaraya	(4.399.503.326,00)	(218.750,00)	(4.399.722.076,00)
84	Bapas Lhokseumawe	(466.508.396,00)	(130.281,00)	(466.638.677,00)
85	Lapas Kembang Kuning	(4.190.240.702,00)	(96.250,00)	(4.190.336.952,00)
86	Lapas Kalisosok	(17.919.613.373,00)	(68.656,00)	(17.919.682.029,00)
87	Lapas Sumedang	(2.607.989.291,00)	(50.000,00)	(2.608.039.291,00)
88	Bapas Nagan Raya	(428.603.534,00)	(42.404,00)	(428.645.938,00)
89	Kanwil NTT (Setjen)	(10.543.255.648,00)	646.326.850,00	(9.896.928.798,00)
90	Kanwil Kalimantan Barat (Setjen)	(10.240.655.079,00)	78.692.927,00	(10.161.962.152,00)
91	Kanim Tembilahan	(4.919.015.895,00)	50.238.518,00	(4.868.777.377,00)
92	Ditjen KI	(233.028.215.090,00)	42.336.161,00	(232.985.878.929,00)
93	Lapas Muara Tebo	(1.831.084.132,00)	40.909.735,00	(1.790.174.397,00)
94	Lapas Kendal	(1.586.376.577,00)	39.544.109,00	(1.546.832.468,00)
95	LPP Jambi	(759.079.840,00)	37.726.296,00	(721.353.544,00)
96	LPP Martapura	(1.179.261.626,00)	37.726.295,00	(1.141.535.331,00)
97	Lapas Lubuk Basung	(3.481.267.730,00)	37.726.295,00	(3.443.541.435,00)
98	Lapas Kotabaru	(4.096.838.000,00)	37.726.295,00	(4.059.111.705,00)
99	Lapas Narkotika Sawah Lunto	(1.405.575.205,00)	37.726.295,00	(1.367.848.910,00)
100	Kanim Sabang	(4.628.329.545,00)	33.955.840,00	(4.594.373.705,00)
101	Lapas Narkotika Bandung	(10.496.633.070,00)	28.994.016,00	(10.467.639.054,00)
102	Rutan Yogyakarta	(3.494.038.748,00)	28.419.760,00	(3.465.618.988,00)
103	Lapas Madiun	(14.226.647.660,00)	28.419.756,00	(14.198.227.904,00)
104	Bapas Surakarta	(1.291.371.188,00)	28.419.756,00	(1.262.951.432,00)
105	Rutan Situbondo	(2.119.063.228,00)	28.419.756,00	(2.090.643.472,00)
106	Rupbasan Wonogiri	(772.336.888,00)	28.419.756,00	(743.917.132,00)
107	Lapas Yogyakarta	(7.258.064.103,00)	28.419.756,00	(7.229.644.347,00)
108	Lapas Tanjung	(2.361.041.896,00)	28.419.756,00	(2.332.622.140,00)
109	Lapas Brebes	(2.062.145.903,00)	28.419.756,00	(2.033.726.147,00)
110	Rupbasan Purwokerto	(740.744.486,00)	28.419.756,00	(712.324.730,00)
111	Lapas Narkotika Martapura	(13.012.721.016,00)	28.419.756,00	(12.984.301.260,00)
112	Rupbasan Sragen	(562.922.305,00)	28.419.756,00	(534.502.549,00)
113	Lapas Narkotika Purwokerto	(391.252.429,00)	28.419.756,00	(362.832.673,00)
114	Lapas Pangkalan Bun	(2.268.223.129,00)	28.419.756,00	(2.239.803.373,00)



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Catatan Atas Laporan Keuangan – *Penjelasan atas Pos-Pos Neraca*
Per 31 Desember Tahun Anggaran 2021 (*Audited*)
Dengan Angka Perbandingan 31 Desember Tahun Anggaran 2020
(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

115	Rutan Lubuk Sikaping	(1.477.899.623,00)	28.419.756,00	(1.449.479.867,00)
116	Lapas Narkotika Muara Sabak	(4.893.450.806,00)	28.396.264,00	(4.865.054.542,00)
117	Inspektorat Jenderal	(18.931.516.961,00)	28.050.000,00	(18.903.466.961,00)
118	Kanim Belakang Padang	(3.962.227.735,00)	27.970.239,00	(3.934.257.496,00)
119	Rutan Wates	(2.063.271.583,00)	27.542.756,00	(2.035.728.827,00)
120	Rutan Tanah Grogot	(1.561.774.273,00)	26.815.385,00	(1.534.958.888,00)
121	Lapas Sampit	(4.603.868.172,00)	25.814.496,00	(4.578.053.676,00)
122	Lapas Bogor	(5.378.925.189,00)	25.707.821,00	(5.353.217.368,00)
123	Lapas Sukabumi	(2.681.045.252,00)	24.119.016,00	(2.656.926.236,00)
124	Lapas Narkotika Samarinda	(14.986.538.432,00)	22.964.301,00	(14.963.574.131,00)
125	Rutan Sungai Penuh	(1.268.377.832,00)	19.456.041,00	(1.248.921.791,00)
126	Kanim Tual	(4.824.506.889,00)	17.412.000,00	(4.807.094.889,00)
127	Bapas Bekasi	(730.069.545,00)	14.727.331,00	(715.342.214,00)
128	Rutan Ambon	(7.441.278.159,00)	12.177.617,00	(7.429.100.542,00)
129	Kanim Ternate	(5.326.894.554,00)	11.147.781,00	(5.315.746.773,00)
130	Rudenim Makassar	(3.459.486.719,00)	11.012.013,00	(3.448.474.706,00)
131	Lapas Narkotika Langkat	(11.805.175.439,00)	10.910.912,00	(11.794.264.527,00)
132	Kanwil Sulawesi Utara (Setjen)	(8.153.590.177,00)	10.000.000,00	(8.143.590.177,00)
133	Lapas Kuala Tungkal	(2.945.238.542,00)	9.593.669,00	(2.935.644.873,00)
134	Lapas Gunung Sugih	(3.352.890.226,00)	9.306.541,00	(3.343.583.685,00)
135	Rutan Kotabumi	(1.493.836.843,00)	9.306.541,00	(1.484.530.302,00)
136	Lapas Warung Kiara	(4.541.676.015,00)	9.306.541,00	(4.532.369.474,00)
137	Lapas Bekasi	(7.381.672.595,00)	9.306.541,00	(7.372.366.054,00)
138	Lapas Kuningan	(3.591.637.788,00)	9.306.541,00	(3.582.331.247,00)
139	Lapas Sarolangun Rawas	(1.238.134.158,00)	9.306.540,00	(1.228.827.618,00)
140	Lapas Dharmas Raya	(1.185.603.857,00)	9.306.539,00	(1.176.297.318,00)
141	Rutan Pekalongan	(1.726.130.656,00)	9.306.539,00	(1.716.824.117,00)
142	Rutan Kandungan	(1.449.139.902,00)	9.306.539,00	(1.439.833.363,00)
143	Rutan Marabahan	(1.619.261.692,00)	9.306.539,00	(1.609.955.153,00)
144	Lapas Bangko	(1.855.927.823,00)	9.306.539,00	(1.846.621.284,00)
145	Rutan Muntok	(1.717.421.899,00)	9.306.539,00	(1.708.115.360,00)
146	Lapas Alahan Panjang	(792.215.700,00)	9.306.539,00	(782.909.161,00)
147	Lapas Karangasem	(2.482.098.302,00)	9.306.539,00	(2.472.791.763,00)



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Catatan Atas Laporan Keuangan – *Penjelasan atas Pos-Pos Neraca*
Per 31 Desember Tahun Anggaran 2021 (Audited)
Dengan Angka Perbandingan 31 Desember Tahun Anggaran 2020
(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

148	Lapas Jombang	(2.018.777.854,00)	9.306.539,00	(2.009.471.315,00)
149	Rutan Kolaka	(1.701.498.875,00)	9.306.539,00	(1.692.192.336,00)
150	LPP Yogyakarta	(2.089.206.161,00)	9.306.539,00	(2.079.899.622,00)
151	Rutan Kendari	(3.500.977.620,00)	9.306.539,00	(3.491.671.081,00)
152	Rutan Nganjuk	(1.921.096.146,00)	9.306.539,00	(1.911.789.607,00)
153	Lapas Pasir Pangarayan	(4.007.710.990,00)	9.306.539,00	(3.998.404.451,00)
154	Rutan Palu	(4.327.664.178,00)	9.306.539,00	(4.318.357.639,00)
155	Lapas Tangerang	(3.396.451.515,00)	9.306.539,00	(3.387.144.976,00)
156	Lapas Toli-Toli	(1.749.211.669,00)	9.306.539,00	(1.739.905.130,00)
157	LPKA Palu	(1.146.850.721,00)	9.306.539,00	(1.137.544.182,00)
158	Lapas Anak Tanjung Pati	(1.724.195.451,00)	9.306.539,00	(1.714.888.912,00)
159	Rutan Surakarta	(11.387.637.004,00)	9.306.539,00	(11.378.330.465,00)
160	Rutan Unaaha	(1.219.890.443,00)	9.306.539,00	(1.210.583.904,00)
161	LPKA Yogyakarta	(1.795.018.352,00)	9.306.539,00	(1.785.711.813,00)
162	Lapas Cilacap	(3.438.488.033,00)	9.306.539,00	(3.429.181.494,00)
163	Rutan Poso	(2.020.968.381,00)	9.306.539,00	(2.011.661.842,00)
164	Lapas Klaten	(2.426.611.544,00)	9.306.539,00	(2.417.305.005,00)
165	LPP Gorontalo	(1.324.174.398,00)	9.306.539,00	(1.314.867.859,00)
166	LPP Pangkalpinang	(933.271.099,00)	9.306.539,00	(923.964.560,00)
167	Lapas Sleman	(3.911.141.474,00)	9.306.539,00	(3.901.834.935,00)
168	Lapas Cikarang	(18.832.216.425,00)	9.306.539,00	(18.822.909.886,00)
169	Lapas Tenggara	(4.851.511.143,00)	9.306.539,00	(4.842.204.604,00)
170	Lapas Wanita Bandar Lampung	(7.652.771.688,00)	9.306.539,00	(7.643.465.149,00)
171	Rutan Bangli	(1.901.459.142,00)	9.306.539,00	(1.892.152.603,00)
172	Rutan Tanjung Pura	(2.036.924.271,00)	9.306.539,00	(2.027.617.732,00)
173	Rutan Padang	(3.900.461.163,00)	9.306.539,00	(3.891.154.624,00)
174	Lapas Lamongan	(2.740.646.366,00)	9.306.539,00	(2.731.339.827,00)
175	LPP Mamuju	(960.641.135,00)	9.306.539,00	(951.334.596,00)
176	Lapas Bau-Bau	(5.268.095.129,00)	9.306.539,00	(5.258.788.590,00)
177	LPKA Jayapura	(819.456.718,00)	9.306.539,00	(810.150.179,00)
178	Lapas Pamekasan	(10.212.167.987,00)	9.306.539,00	(10.202.861.448,00)
179	LPP Batam	(602.619.864,00)	9.306.539,00	(593.313.325,00)
180	LPP Jayapura	(640.278.506,00)	9.306.539,00	(630.971.967,00)
181	Kanim Bekasi	(10.819.247.186,00)	9.043.785,00	(10.810.203.401,00)
182	Lapas Purwokerto	(10.109.681.216,00)	8.785.487,00	(10.100.895.729,00)
183	Kanim Siak	(5.713.215.112,00)	8.758.633,00	(5.704.456.479,00)



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Catatan Atas Laporan Keuangan – *Penjelasan atas Pos-Pos Neraca*
Per 31 Desember Tahun Anggaran 2021 (*Audited*)
Dengan Angka Perbandingan 31 Desember Tahun Anggaran 2020
(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

184	Lapas Karawang	(7.405.492.517,00)	8.728.730,00	(7.396.763.787,00)
185	Kanwil Sulawesi Barat (Setjen)	(7.427.348.669,00)	8.571.453,00	(7.418.777.216,00)
186	Rudenim Jakarta	(6.168.951.903,00)	7.913.543,00	(6.161.038.360,00)
187	Kanim Bagan Siapiapi	(3.449.226.324,00)	7.890.000,00	(3.441.336.324,00)
188	Rutan Perempuan Bandung	(1.321.477.864,00)	7.206.540,00	(1.314.271.324,00)
189	Kanwil Jawa Tengah (Setjen)	(19.018.023.315,00)	6.254.442,00	(19.011.768.873,00)
190	Rutan Kabanjahe	(548.913.766,00)	6.192.256,00	(542.721.510,00)
191	Kanim Denpasar	(18.905.894.180,00)	6.123.750,00	(18.899.770.430,00)
192	Kanim Bengkulu	(5.022.870.285,00)	5.358.500,00	(5.017.511.785,00)
193	Lapas Pasir Putih Nusakambangan	(19.586.679.546,00)	5.335.424,00	(19.581.344.122,00)
194	Kanwil Kalimantan Selatan (Setjen)	(7.190.863.023,00)	4.906.574,00	(7.185.956.449,00)
195	Kanim Bogor	(14.958.423.136,00)	4.130.000,00	(14.954.293.136,00)
196	Rudenim Pekanbaru	(4.161.866.218,00)	3.915.371,00	(4.157.950.847,00)
197	Rudenim Manado	(2.359.873.135,00)	3.883.192,00	(2.355.989.943,00)
198	Lapas Pontianak	(12.921.556.636,00)	3.851.084,00	(12.917.705.552,00)
199	Rutan Mempawah	(2.724.362.428,00)	3.851.084,00	(2.720.511.344,00)
200	Rutan Rengat	(1.694.371.394,00)	3.847.534,00	(1.690.523.860,00)
201	LPKA Jakarta	(3.149.662.109,00)	2.856.539,00	(3.146.805.570,00)
202	LPP Malang	(3.746.272.335,00)	2.786.905,00	(3.743.485.430,00)
203	Kanim Jambi	(5.377.295.591,00)	2.533.100,00	(5.374.762.491,00)
204	Bapas Jakbar	(1.925.771.089,00)	1.699.500,00	(1.924.071.589,00)
205	Lapas Cipinang	(37.437.574.243,00)	1.251.570,00	(37.436.322.673,00)
206	Bapas Palembang	(894.162.193,00)	1.093.950,00	(893.068.243,00)
207	Bapas Tarakan	(471.832.889,00)	1.005.464,00	(470.827.425,00)
208	Lapas Lembata	(2.602.848.330,00)	668.250,00	(2.602.180.080,00)
209	Rutan Humbang Hasundutan	(1.769.391.392,00)	622.116,00	(1.768.769.276,00)
210	Lapas Baa	(784.391.295,00)	587.633,00	(783.803.662,00)
211	Lapas Cianjur	(2.475.747.526,00)	574.260,00	(2.475.173.266,00)
212	Lapas Purwakarta	(2.758.461.884,00)	574.260,00	(2.757.887.624,00)
213	Lapas Muara Bulian	(1.462.565.271,00)	574.260,00	(1.461.991.011,00)
214	Lapas Kalianda	(3.764.257.948,00)	574.260,00	(3.763.683.688,00)
215	Lapas Wanita Medan	(4.715.124.081,00)	574.259,00	(4.714.549.822,00)
216	Kanwil Sulawesi Selatan (Setjen)	(15.341.863.627,00)	521.573,00	(15.341.342.054,00)



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Catatan Atas Laporan Keuangan – *Penjelasan atas Pos-Pos Neraca*
Per 31 Desember Tahun Anggaran 2021 (*Audited*)
Dengan Angka Perbandingan 31 Desember Tahun Anggaran 2020
(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

217	Kanim Palembang	(13.497.352.164,00)	513.040,00	(13.496.839.124,00)
218	Rutan Tarutung	(1.584.917.255,00)	287.130,00	(1.584.630.125,00)
219	Rutan Balige	(1.846.589.998,00)	287.130,00	(1.846.302.868,00)
220	Kanim Manado	(10.437.293.229,00)	159.833,00	(10.437.133.396,00)
221	Rupbasan Cilacap	(893.730.125,00)	113.987,00	(893.616.138,00)
222	Lapas Pemuda Tangerang	(15.333.452.074,00)	3,00	(15.333.452.071,00)
223	Lapas Tasikmalaya	(2.723.152.702,00)	2,00	(2.723.152.700,00)
224	Lapas Lubuk Pakam	(2.514.269.407,00)	2,00	(2.514.269.405,00)
225	Lapas Banyuasin	(5.373.791.477,00)	2,00	(5.373.791.475,00)
226	Lapas Way Kanan	(1.913.939.081,00)	2,00	(1.913.939.079,00)
227	Rutan Prabumulih	(2.388.604.833,00)	2,00	(2.388.604.831,00)
228	Rutan Labuhan Deli	(4.966.506.964,00)	2,00	(4.966.506.962,00)
229	Lapas Siborong- Borong	(1.913.859.324,00)	2,00	(1.913.859.322,00)
230	Rutan Palembang	(12.265.705.488,00)	2,00	(12.265.705.486,00)
231	Rutan Medan	(19.993.416.898,00)	2,00	(19.993.416.896,00)
232	Rutan Bandung	(13.061.926.516,00)	2,00	(13.061.926.514,00)
233	Lapas Narkotika Bandar Lampung	(14.657.210.882,00)	2,00	(14.657.210.880,00)
234	Lapas Garut	(3.438.600.570,00)	2,00	(3.438.600.568,00)
235	Lapas Kayu Agung	(2.920.146.918,00)	2,00	(2.920.146.916,00)
236	Lapas Kota Agung	(1.706.153.428,00)	2,00	(1.706.153.426,00)
237	Rutan Sukadana	(1.511.056.223,00)	2,00	(1.511.056.221,00)
238	Lapas Muara Enim	(4.378.651.809,00)	2,00	(4.378.651.807,00)
239	Rutan Baturaja	(2.928.561.135,00)	2,00	(2.928.561.133,00)
240	Lapas Lahat	(2.133.476.813,00)	2,00	(2.133.476.811,00)
241	Rutan Serang	(8.160.580.114,00)	2,00	(8.160.580.112,00)
242	Lapas Tanjung Balai Asahan	(8.034.248.970,00)	2,00	(8.034.248.968,00)
243	LPP Bandung	(3.337.751.006,00)	2,00	(3.337.751.004,00)
244	Lapas Narkotika Muara Beliti	(11.261.898.384,00)	2,00	(11.261.898.382,00)
245	Rutan Pangkalan Brandan	(1.493.806.495,00)	2,00	(1.493.806.493,00)
246	Lapas Banceuy	(21.555.329.754,00)	2,00	(21.555.329.752,00)
247	Lapas Narkotika Cirebon	(16.644.734.861,00)	2,00	(16.644.734.859,00)
248	Rutan Sidikalang	(1.670.254.394,00)	2,00	(1.670.254.392,00)
249	Rutan Menggala	(2.102.009.450,00)	2,00	(2.102.009.448,00)



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Catatan Atas Laporan Keuangan – *Penjelasan atas Pos-Pos Neraca*
Per 31 Desember Tahun Anggaran 2021 (*Audited*)
Dengan Angka Perbandingan 31 Desember Tahun Anggaran 2020
(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

250	Lapas Serang	(3.537.292.631,00)	2,00	(3.537.292.629,00)
251	Lapas Cilegon	(6.971.777.414,00)	2,00	(6.971.777.412,00)
252	Lapas Bengkalis	(2.356.708.375,00)	2,00	(2.356.708.373,00)
253	Lapas Palembang	(15.739.032.776,00)	2,00	(15.739.032.774,00)
254	Rutan Depok	(6.415.165.552,00)	2,00	(6.415.165.550,00)
255	Lapas Sekayu	(1.947.182.677,00)	2,00	(1.947.182.675,00)
256	Rutan Pekanbaru	(10.774.393.097,00)	2,00	(10.774.393.095,00)
257	Lapas Cirebon	(27.615.262.807,00)	2,00	(27.615.262.805,00)
258	Lapas Indramayu	(2.994.710.581,00)	2,00	(2.994.710.579,00)
259	Lapas Narkotika Banyuasin	(11.045.945.526,00)	2,00	(11.045.945.524,00)
260	Lapas Tanjung Raja	(4.697.009.989,00)	2,00	(4.697.009.987,00)
261	Lapas Pagar Alam	(1.336.529.825,00)	1,00	(1.336.529.824,00)
262	Lapas Martapura	(1.605.879.384,00)	1,00	(1.605.879.383,00)
263	Rutan Pandeglang	(2.235.172.527,00)	1,00	(2.235.172.526,00)
264	Rutan Kota Agung	(1.455.278.607,00)	1,00	(1.455.278.606,00)
265	Lapas Anak Pria Tangerang	(3.459.457.091,00)	1,00	(3.459.457.090,00)
266	Lapas Sentul	(593.411.880,00)	1,00	(593.411.879,00)
267	Lapas Anak Muara Bulian	(1.498.993.405,00)	1,00	(1.498.993.404,00)
268	Lapas Rangkasbitung	(4.238.723.572,00)	1,00	(4.238.723.571,00)
269	Lapas Empat Lawang	(1.537.501.094,00)	1,00	(1.537.501.093,00)
270	Rutan Garut	(1.669.667.556,00)	1,00	(1.669.667.555,00)
271	Lapas Sibolga	(3.989.872.547,00)	1,00	(3.989.872.546,00)
272	Rutan Buntok	(1.182.863.992,00)	1,00	(1.182.863.991,00)
273	Lapas Salemba	(18.883.716.896,00)	1,00	(18.883.716.895,00)
274	Lapas Muara Bungo	(2.161.856.716,00)	1,00	(2.161.856.715,00)
275	Lapas Kotabumi	(3.441.469.338,00)	1,00	(3.441.469.337,00)
276	Rutan Krui	(1.992.355.496,00)	1,00	(1.992.355.495,00)
277	LPKA Palembang	(2.586.582.887,00)	1,00	(2.586.582.886,00)
278	Lapas Teluk Kuantan	(1.246.986.392,00)	1,00	(1.246.986.391,00)
279	Lapas Sorolangun	(1.957.799.129,00)	1,00	(1.957.799.128,00)
280	Lapas Muara Dua	(1.397.248.693,00)	1,00	(1.397.248.692,00)
281	Lapas Gunung Sitoli	(1.595.601.933,00)	1,00	(1.595.601.932,00)

Koreksi tersebut merupakan dampak tindak lanjut terhadap hasil Validasi BMN 2021 berupa Peralatan dan Mesin serta Temuan BPK yang menyatakan bahwa terdapat lebih catat atau kurang catat aset tetap berupa Peralatan dan Mesin.



Nilai Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2021 (*Audited*) senilai Rp8.395.567.596.182,00 didalamnya termasuk X-Ray Votti dan X-Ray *Body Scanner* dalam kondisi rusak yang belum dihentikan penggunaan karena anggaran untuk pemeliharaan dan perawatan pada RKAKL Ditjen Pemasyarakatan tidak mengakomodir seluruh UPT, sedangkan X-Ray 3D Barang Alir mempunyai radiasi tinggi sehingga untuk pemeliharaan maupun perbaikan membutuhkan tenaga ahli.

Rincian mutasi peralatan dan mesin disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 105
Rincian Mutasi Peralatan dan Mesin Per 31 Desember 2020

Uraian	Intrakomptabel
Saldo per 31 Desember 2020	7.783.913.088.592,00
Mutasi tambah :	
Penambahan Saldo Awal	34.073.910.178,00
Pembelian	751.364.409.702,00
Transfer Masuk	457.846.166.605,00
Hibah Masuk	41.361.367.920,00
Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP	270.005.000,00
Reklasifikasi Masuk	50.395.292.162,00
Perolehan Lainnya	655.298.750,00
Reklas AL ke AT	9.366.375.652,00
Perolehan hasil Tindak Lanjut Normalisasi	37.180.507.933,00
Perolehan Reklasifikasi Dari Intra ke Ekstra/ Sebaliknya	132.800.000,00
Pengembangan Nilai Aset	28.017.409.050,00
Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas	82.403.845,00
Transaksi Normalisasi BMN	74.393.390,00
Total Mutasi Tambah :	1.410.820.340.187,00
Mutasi Kurang :	
Reklas AT ke AL	230.421.409.266,00
Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas	18.736.119.773,00
Transaksi Normalisasi BMN	34.368.808.511,00
Penghapusan	1.901.348.618,00
Transfer Keluar	456.767.735.753,00
Reklasifikasi Keluar	49.762.039.541,00



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Catatan Atas Laporan Keuangan – *Penjelasan atas Pos-Pos Neraca*
Per 31 Desember Tahun Anggaran 2021 (*Audited*)
Dengan Angka Perbandingan 31 Desember Tahun Anggaran 2020
(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Koreksi Pencatatan	7.087.288.885,00
Penghapusan (semester II dokumen semester I)	36.276.250,00
Penghapusan (semester I dokumen TAYL)	59.000.000,00
Penghapusan (semester II dokumen TAYL)	15.051.000,00
Penghapusan semu karena reklasifikasi dari intra ke ekstra/ sebaliknya	10.755.000,00
Total Mutasi Kurang :	799.165.832.597,00
Saldo per 31 Desember 2021	8.395.567.596.182,00
Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2021	(6.719.680.429.742,00)
Nilai Buku per 31 Desember 2021	1.675.887.166.440,00

Penjelasan Sebaran Transaksi:

• **Mutasi Tambah**

- a. Penambahan Saldo Awal senilai Rp34.073.910.178,00 diantaranya terdapat pada:
 - Ditjen Imigrasi sebesar Rp8.790.413.700,00 yang merupakan pencatatan perangkat DRC yang mengalami kerusakan tahun 2013 dan sudah ditransfer ke sejumlah satker Imigrasi. Namun karena terhadap BMN tersebut tidak dapat dikembalikan kepada Ditjen Imigrasi, maka dilakukan pencatatan sebagai saldo awal sebesar Rp798.759.500,00 ; serta perbaikan pencatatan 2 unit Chiller sebesar Rp7.991.654.200,00 hasil pengadaan tahun 2016 yang awalnya tercatat 1 NUP.
 - Ditjen AHU sebesar Rp7.734.390.711,00 yang merupakan pencatatan Tablet PC sebesar Rp841.240.400,00 pengadaan Tahun 2020 yang baru diterima tahun 2021; pencatatan CCTV dan TV sebesar Rp119.421.000,00 yang sebelumnya tercatat sebagai pengembangan CCTV; pencatatan Alat Pendingin, Switch Rak, UPS, dan Access Control System yang sebelumnya tercatat sebagai renovasi Gedung Utama Ditjen AHU Tahun 2018; pencatatan 4 buah LCD Monitor sebesar Rp2.304.319.311,00 yang sebelumnya tercatat sebagai 1 NUP LCD Monitor; serta pencatatan 2 unit Hard Disk Eksternal sebesar Rp4.785.000,00 yang sebelumnya tercatat di Persediaan.



- Rutan Ambon sebesar Rp 5.426.125.855,00 yang merupakan perbaikan pencatatan terhadap BMN berupa Alat Detektor Barang Terlarang, Alat Sidik Jari, dan 2 unit Scanner yang awalnya dikategorikan sebagai Barang Tidak Ditemukan sehingga dilakukan Koreksi Pencatatan namun setelah dilakukan penelusuran ulang diketahui bahwa 4 unit barang tersebut masih ada dan masih berfungsi sehingga dilakukan pencatatan kembali melalui Saldo Awal.
- Kanim Jayapura sebesar Rp1.354.080.000,00 yang merupakan pemisahan pencatatan genset, tabung pemadam api, dan sejumlah meubeulair yang sebelumnya tergabung dalam nilai pembangunan gedung kantor pada tahun 2017.
- Kanim Ngurah Rai sebesar Rp1.289.759.680,00 yang merupakan pencatatan perangkat DRC yang mengalami kerusakan tahun 2013 dan sudah ditransfer ke sejumlah satker Imigrasi. Namun karena terhadap BMN tersebut tidak dapat dikembalikan kepada Ditjen Imigrasi, maka dilakukan pencatatan sebagai saldo awal.
- b. Pembelian senilai Rp751.364.409.702,00 diantaranya terdapat pada :
 - Ditjen Pemasyarakatan sebesar Rp373.862.447.499,00 yang merupakan pembelian Alat Besar, Alat Angkutan, Alat Bengkel&Alat Ukur, Alat Pertanian, Alat Kantor, Alat Studio&Komunikasi, Alat Kedokteran, Alat Lab, Alat Peralatan, dan Komputer.
 - Ditjen KI sebesar Rp103.177.473.609,00 yang merupakan pembelian Alat Angkutan, Alat Bengkel&Alat Ukur, Alat Kantor, Alat Studio&Komunikasi, dan Alat Kedokteran.
 - Ditjen AHU sebesar Rp61.004.193.193.14.082.256.665,00 yang merupakan pembelian Alat Besar, Alat Kantor, Alat Keselamatan Kerja, dan Peralatan Olah Raga.
 - Ditjen Imigrasi sebesar Rp50.266.473.130,00 yang merupakan pembelian Alat Besar, Alat Angkutan, Alat Bengkel&Alat Ukur, Alat Kantor, Alat



- Studio&Komunikasi, Alat Kedokteran, Alat Lab, Komputer, dan Alat Keselamatan Kerja.
- Pusdatin sebesar Rp22.458.319.300,00 yang merupakan pembelian Alat Kantor, Alat Studio&Komunikasi, Alat Lab, dan Komputer.
- c. Transfer Masuk senilai Rp457.846.166.605,00 diantaranya terdapat pada:
- Lapas Cipinang sebesar Rp29.903.284.962,00 yang merupakan transfer masuk dari Kanwil DKI Jakarta (Setjen) berupa Alat Studio dan Alat Kedokteran, serta transfer masuk dari Ditjen Pemasyarakatan berupa Alat Pertanian, Alat Kantor, Alat Studio, Alat Kedokteran, dan Komputer.
 - Pusdatin sebesar Rp23.421.196.810,00 yang merupakan transfer masuk dari Ditjen AHU berupa Komputer, serta transfer masuk dari Ditjen KI berupa Alat Studio dan Komputer.
 - Lapas Batu sebesar Rp11.404.361.186,00 yang merupakan transfer masuk dari Kanwil Jawa Tengah (Setjen) berupa Alat Studio dan Alat Kedokteran; transfer masuk dari Ditjen Pemasyarakatan berupa Alat Angkutan, Alat Kantor, Alat Studio, Alat Persenjataan, dan Komputer; transfer masuk dari Lapas Karanganyar berupa Alat Kantor, Alat Studio, dan Komputer; serta transfer masuk dari Kementerian PUPR berupa Alat Kantor.
 - Ditjen Imigrasi sebesar Rp4.518.734.990,00 yang merupakan transfer masuk dari sejumlah satker Imigrasi berupa Komputer.
 - LPP Martapura sebesar Rp4.360.140.101,00 yang merupakan transfer masuk dari Kanwil Kalimantan Selatan (Setjen) berupa Alat Angkutan; transfer masuk dari Kanwil Kalimantan Selatan (Pemasyarakatan) berupa Alat Kantor, Alat Studio, Alat Kedokteran, dan Komputer; serta transfer masuk dari Ditjen Pemasyarakatan berupa Alat Besar, Alat Angkutan, Alat Pertanian, Alat Kantor, Alat Studio, Alat Kedokteran, dan Komputer
- d. Hibah Masuk senilai Rp41.361.367.920,00 diantaranya terdapat pada:



- Ditjen Imigrasi sebesar Rp32.575.746.352,00 yang merupakan Hibah Masuk TAYL berupa perangkat pengganti pada Gedung DRC yang telah diterima pada tahun 2015 dari PT Nusantara Compnet Integrator, PT Berca Hardayaperkasa, dan PT Sigma Cipta Caraka dengan BAST Hibah Nomor IMI.1.PL.06.02-4796 tertanggal 30 Juni 2015.
- Ditjen Pemasyarakatan sebesar Rp3.255.509.000,00 yang merupakan hibah peralatan tanggap darurat dari ICITAP dengan BAST Nomor : USDOJ-ICITAP/X-22/002 Tanggal 10 Oktober 2021 sebesar Rp272.448.000,00; Hibah Penanganan Pandemi Covid 19 dari ICRC dengan BAST Nomor : PAS1.KU.03.02-1215 tanggal 5 Oktober 2021; Hibah Proyek Reformasi Pemasyarakatan dari UNODC ke UPT Pemasyarakatan dengan BAST tanggal 22 Februari 2021 sebesar Rp.391.685.000,00; serta hibah masuk dari Pemerintah Australia kepada Ditjen Pemasyarakatan berupa 45 paket alat persidangan online untuk 45 UPT Pemasyarakatan senilai total Rp2.626.800.000,-. No BAST PAS1.PB.03 - 2700 tanggal 16 September 2021.
- Lapas Batu sebesar Rp720.000.000,00 yang merupakan hibah dari Bank BRI berupa Mobil Ambulance dengan nomor BAST :B-4692-VII/KC/LOG/09/2021 tanggal 15 September 2021.
- Kanim Pematang Siantar sebesar Rp469.613.468,00 yang merupakan hibah dari Pemkab Humbang Hasundutan kepada UKK Kelas II TPI Pematang Siantar di Kabupaten Humbang Hasundutan berupa sarana dan prasarana pendukung kesisteman dengan nomor BAST : 027/02/DISKOMINFO/XII/2021 tanggal 29 Desember 2021.
- Lapas Parigi sebesar Rp364.300.000,00 yang merupakan hibah dari Pemkab Parigi berupa Mobil Pick Up dengan nomor BAST : 036/325/BPKAD tanggal 26 Februari 2021.



- e. Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP senilai Rp270.005.000,00 terdapat pada Kanim Atambua berupa pembuatan sumur bor beserta instalasinya.
- f. Reklasifikasi Masuk senilai Rp50.395.292.162,00 diantaranya terdapat pada:
 - Ditjen Imigrasi sebesar Rp16.341.420.401,00 yang merupakan perubahan kodefikasi Chiller dari yang semula tercatat sebagai Chiller (non aktif).
 - Kanim Soekarno Hatta sebesar Rp5.462.217.246,00 yang merupakan perubahan kodefikasi station wagon dari yang semula tercatat sebagai Micro Bus.
 - Kanim Denpasar sebesar Rp3.679.280.600,00 yang merupakan perubahan kodefikasi 1 unit Papan Pengumuman, 11 unit Mini Bus, dan 51 buah Uninterruptible power supply menjadi kode barang yang lebih sesuai yaitu Display, Station Wagon, dan Unit Power Supply.
 - Kanim Jakarta Timur sebesar Rp3.108.241.093,00 yang merupakan perubahan kodefikasi 14 unit Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah) menjadi 14 unit Station Wagon.
 - Kanim Tanjung Priok sebesar Rp2.807.829.000,00 yang merupakan perubahan kodefikasi 12 kendaraan menjadi 10 unit station wagon dan 2 unit mini bus penumpang 14 orang kebawah).
- g. Perolehan Lainnya senilai Rp655.298.750,00 terdapat pada :
 - Kanwil Jawa Tengah (Setjen) sebesar Rp266.750.000,00 yang merupakan perolehan 1 unit Video Monitor dan 4 buah Tablet PC dari GRBB PT SBI.
 - Lapas Permisan sebesar Rp187.477.000,00 yang merupakan perolehan dari GRBB PT SBI berupa CCTV
 - Lapas Terbuka NK sebesar Rp121.264.000,00 yang merupakan perolehan dari GRBB PT SBI berupa mesin perontok padi, traktor, dan mesin penanam padi.
 - Lapas Kembang Kuning sebesar Rp25.357.750,00 yang merupakan perolehan dari GRBB PT SBI



Berupa 5 unit alat pertukangan dan 2 unit mesin kopi.

h. Reklasifikasi Dari Aset Lainnya ke Aset Tetap senilai Rp9.366.375.652,00 diantaranya terdapat pada :

- Ditjen HAM sebesar Rp630.442.000,00 yang merupakan penggunaan kembali 4 unit AC Sentral yang kemudian ditransfer keluar ke Balitbang HAM serta 13 buah Lemari Besi, 10 buah Kursi Besi, dan 2 buah printer yang diketahui kondisinya masih baik.
- Lapas Mamasa sebesar Rp611.811.000,00 yang merupakan penggunaan kembali pompa air yang diketahui kondisinya masih baik.
- Kanim Jember sebesar Rp606.203.862,00 yang merupakan penggunaan kembali 3 buah printer paspor yang diketahui kondisinya masih baik.
- Kanim Surabaya sebesar Rp587.400.000,00 yang merupakan penggunaan kembali 2 buah printer paspor yang telah selesai diperbaiki.
- Kanwil Sulawesi Utara (Setjen) sebesar Rp463.607.233,00 yang merupakan penggunaan kembali sejumlah meubelair dan komputer yang diketahui kondisinya masih baik setelah dilakukan inventarisasi.

i. Perolehan Hasil Tindak Lanjut Normalisasi senilai Rp37.180.507.933,00 merupakan tindak lanjut Kertas Kerja Konfirmasi (K3) dimana terhadap BMN berupa Peralatan dan Mesin teridentifikasi sebagai BMN Tidak Wajar, namun secara fisik diketahui bahwa BMN tersebut masih ada sehingga dilakukan penginputan kembali. Transaksi tersebut diantaranya terdapat pada :

- Rutan Ambon sebesar Rp5.431.581.310,00.
- Bapas Bandung sebesar Rp3.148.590.613,00.
- Rutan Cirebon sebesar Rp1.969.823.000,00.
- Kanim Belakang Padang sebesar Rp1.897.024.700,00.

j. Perolehan Reklasifikasi Dari Intra ke Ekstra/Sebaliknya sebesar Rp132.800.000,00 terdapat pada Rutan Palembang dimana sebelumnya



terdapat sejumlah barang inventaris kantor dengan nilai buku Rp 1, sehingga dilakukan tindak lanjut berupa Koreksi Perubahan Nilai/Kuantitas yang tercantum dalam BA Koreksi Perubahan Nilai Nomor : W.6.PAS.PAS.12.PB.06.01 tanggal 23 Juli 2021.

- k. Pengembangan Nilai Aset senilai Rp28.017.409.050,00 diantaranya terdapat pada :
- Ditjen Imigrasi sebesar Rp23.736.493.800,00 yang merupakan perbaikan Air Handling Unit, Chiller, Cooling Tower, dan Elevator, serta peningkatan kapasitas sejumlah PC Unit dan Server.
 - Ditjen PP sebesar Rp2.004.107.150,00 yang merupakan perbaikan genset.
 - Ditjen Pemasyarakatan sebesar Rp892.939.600,00 yang merupakan belanja SSD, DJI MAVIC 2 Intelligent Flight Battery (15.4 V), Canon Battery Pack LP-E6NH untuk meningkatkan performa aset berupa Laptop, kamera udara, dan camera digital serta upgrade server.
 - Ditjen KI sebesar Rp742.000.000,00 yang merupakan penambahan lisensi Microsoft pada sejumlah Laptop dan PC.
 - Ditjen AHU sebesar Rp505.458.500,00 yang merupakan upgrade pintu akses masuk di gedung utama AHU menjadi pintu yang menggunakan access card serta perbaikan terhadap meja resepsionis, repeater, LED Monitor, dan Kendaraan bermotor roda tiga pengangkut barang.
- l. Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas senilai Rp82.403.845,00 terdapat pada :
- Kanwil Banten (Setjen) sebesar Rp42.750.000,00 yang merupakan Koreksi Pencatatan Karpet NUP 3 yang nilainya digabung ke Karpet NUP 2 melalui transaksi koreksi perubahan nilai/kuantitas, karena karpet tersebut adalah satu bagian dengan karpet NUP 2.
 - Kanim Tanjung Perak sebesar Rp25.479.995,00 yang merupakan perbaikan harga satuan 2 unit revolver dan 3 unit pistol yang semula nilainya per masing-masing barang Rp 1 menjadi Rp 5.096.000



- setelah dilakukan penilaian kembali oleh tim KPKNL Surabaya berdasarkan surat S-2343/WKN.10/KNL.01/2021 tanggal 30 April 2021.
- Rupbasan Jakarta Utara sebesar Rp5.592.850,00 yang merupakan koreksi atas pencatatan Kabel UTP yang ditambahkan ke nilai PC Unit.
 - BHP Jakarta sebesar Rp4.000.000,00 yang merupakan perbaikan pencatatan terhadap 3 unit Microphone Stand Table menjadi 1 unit, dimana berdasarkan hasil inventarisasi ternyata 3 mic tersebut tergabung dalam 1 receiver mic.
 - Kanim Palembang sebesar Rp3.630.000,00 yang merupakan penambahan nilai honor panitia pengadaan barang dan jasa dalam pembelian alat kedokteran.
 - Bapas Mataram sebesar Rp951.000 yang merupakan perbaikan pencatatan terhadap 114 NUP Perkakas Kantor Lainnya dimana setelah dilakukan inventarisasi diketahui bahwa seluruh BMN tersebut merupakan komponen baut dari Perkakas Kantor Lainnya NUP 116 berupa Pintu Gerbang.
- m. Transaksi Normalisasi BMN senilai Rp74.393.390,00 merupakan tindak lanjut Kertas Kerja Konfirmasi (K3) dimana terhadap BMN berupa Peralatan dan Mesin teridentifikasi sebagai BMN Tidak Wajar, sehingga terhadap BMN tersebut dilakukan Normalisasi. Transaksi tersebut terdapat pada:
- Lapas Serang sebesar Rp63.089.390,00.
 - Bapas Luwuk sebesar Rp6.100.000,00.
 - BHP Surabaya sebesar Rp4.704.000,00.
 - Bapas Serang sebesar Rp500.000,00.
- **Mutasi Kurang**
 - a. Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya senilai Rp230.421.409.266,00 diantaranya terdapat pada :
 - Ditjen Imigrasi sebesar Rp13.433.497.491,00 yang merupakan penghentian penggunaan perangkat DRC senilai Rp5.083.731.290,00 yang mengalami kerusakan di tahun 2013 dan penghentian



- penggunaan 2 unit Chiller senilai Rp8.349.766.201,00 yang sudah rusak.
- Ditjen KI sebesar Rp12.289.132.718,00 yang merupakan penghentian penggunaan terhadap 5.083 NUP barang dengan BA Nomor : 02.03/BU/VIII/2021 tanggal 2 Agustus 2021 dan akan dilanjutkan dengan pelaksanaan lelang pada tanggal 22 Oktober 2021.
 - Lapas Batu sebesar Rp10.593.071.150,00 yang merupakan penghentian penggunaan terhadap Kapal Pengayoman yang tenggelam pada tanggal 17 September 2021 dan penghentian penggunaan terhadap 2 unit Tabung Pemadam Api dan 1 unit TV.
 - Sekretariat Jenderal sebesar Rp10.577.011.712,00,00 yang merupakan penghentian penggunaan terhadap sejumlah peralatan kantor yang sudah rusak.
 - Kanim Ngurah Rai sebesar Rp7.954.545.479,00 yang merupakan penghentian penggunaan sejumlah peralatan kantor yang kondisinya sudah Rusak Berat berdasarkan BA Nomor : W20.PB.06.04-8689 tanggal 13 Desember 2021
- b. Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas senilai Rp18.736.119.773,00 diantaranya terdapat pada:
- Ditjen KI sebesar Rp4.069.161.617,00 yang merupakan tindak lanjut temuan BPK tahun 2020 berupa kemahalan harga pengadaan Server dan UPS.
 - Ditjen AHU sebesar Rp2.523.457.736,00 yang merupakan koreksi nilai sebagai tindak lanjut temuan BPK tahun 2020 berupa genset, CCTV, lampu, gordyn/krey, dan pintu elektrik (menggunakan akses) berupa kelebihan pembayaran.
 - Rumah Sakit Pengayoman sebesar Rp130.000.000,00 yang merupakan koreksi nilai aset atas tindak lanjut temuan Itjen berupa pengembalian atas BMN infusion pump.
 - Lapas Dompus sebesar Rp89.069.500,00 yang merupakan tindak lanjut Temuan BPK Tahun 2020



terhadap kelebihan pembayaran dalam pengadaan alat penggiling kopi, powder press machine, dan coffee maker.

- c. Transaksi Normalisasi BMN senilai Rp34.368.808.511,00 merupakan tindak lanjut Kertas Kerja Konfirmasi (K3) dimana terhadap BMN berupa Peralatan dan Mesin teridentifikasi sebagai BMN Tidak Wajar, sehingga terhadap BMN tersebut dilakukan Normalisasi. Transaksi tersebut diantaranya terdapat pada:

- Rutan Ambon sebesar Rp5.431.581.310,00.
- Bapas Bandung sebesar Rp2.824.093.922,00.
- Kanim Denpasar sebesar Rp2.160.140.000,00.
- Rutan Cirebon sebesar Rp1.969.823.000,00.
- Kanim Belakang Padang sebesar Rp1.897.024.700,00.

Terdapat selisih antara Transaksi Normalisasi dengan Perolehan Hasil Tindak Lanjut Normalisasi sebesar Rp 2.886.092.812,00 . Selisih tersebut secara umum disebabkan oleh : 1) Adanya transaksi Normalisasi (BMN yang Dihentikan); 2) Adanya transaksi Normalisasi yang masuk kelompok Ekstrakomptabel; 3) Adanya transaksi Normalisasi atau Normalisasi (BMN yang Dihentikan) pada tahun anggaran sebelumnya; 4) Adanya transaksi Penghapusan Tindak Lanjut Normalisasi.

- d. Penghapusan senilai Rp1.901.348.618,00 diantaranya terdapat pada:

- Rutan Sanggau sebesar Rp500.992.170,00 yang merupakan penghapusan kendaraan dinas berdasarkan SK Penghapusan Nomor : SEK-71.PB.06.04 Tahun 2021 tanggal 29 September 2021 dan W16.-2102.PB.06.04 tanggal 30 Maret 2021.
- Kanim Sambas sebesar Rp375.895.000,00 yang merupakan penghapusan sejumlah barang inventaris kantor berdasarkan SK Penghapusan Nomor : SEK-79.PB.06.04. Tahun 2021 tanggal 8 Oktober 2021.
- Rudenim Pontianak sebesar Rp187.536.263,00 yang merupakan penghapusan sejumlah barang



- inventaris kantor berdasarkan SK Penghapusan Nomor : W16. PB.06.04-13 tanggal 4 Januari 2021.
- Kanim Kediri sebesar Rp181.190.000,00 yang merupakan Penghapusan 1 Unit Kendaraan dikarenakan hilang dicuri berdasarkan SK Penghapusan Nomor : SEK-81.PB.06.04 Tahun 2021 tanggal 12 Oktober 2021.
 - Kanwil Gorontalo (Setjen) sebesar Rp 154.500.000,00 yang merupakan penghapusan kendaraan dinas berdasarkan SK Penghapusan Nomor : SEK-83.PB.06.04 Tahun 2021 tanggal 25 Oktober 2021
- e. Transfer Keluar senilai Rp456.767.735.753,00 diantaranya terdapat pada :
- Ditjen Pemasarakatan sebesar Rp315.112.947.996,00 merupakan transfer keluar ke sejumlah satker Pemasarakatan di seluruh Indonesia berupa Alat Besar, Alat Angkutan, Alat Bengkel&Alat Ukur, Alat Pertanian, Alat Kantor, Alat Studio, Alat Kedokteran, Alat Lab, Alat Persenjataan, dan Komputer.
 - Ditjen AHU sebesar Rp39.246.795.608,00 merupakan transfer keluar ke Sekretariat Jenderal berupa Alat Kantor, Alat Studio, dan Komputer; transfer keluar ke Pusdatin berupa Komputer; transfer keluar ke sejumlah satker AHU berupa Alat Besar, Alat Angkutan, Alat Kantor, Alat Studio, dan Komputer; transfer keluar ke Rupbasan Jakarta Pusat, Lapas Narkotika Bandung, dan Lapas Narkotika Gunung Sindur berupa Alat Kantor; serta transfer keluar ke BPHN berupa Alat Studio dan Komputer.
 - Sekretariat Jenderal sebesar Rp7.305.925.454,00 merupakan transfer keluar ke sejumlah Kantor Wilayah (Setjen) berupa Alat Angkutan, Alat Pertanian, Alat Kantor, Alat Studio, Alat Persenjataan, dan Komputer; transfer keluar ke Inspektorat Jenderal berupa Alat Persenjataan dan Komputer; transfer keluar ke sejumlah satker Pemasarakatan berupa Alat Angkutan, Alat Pertanian, Alat Kantor, Alat Studio, dan Komputer;



transfer keluar ke Rudenim Jakarta berupa Alat Kantor dan Komputer; serta transfer keluar ke Ditjen PP berupa Komputer.

- Ditjen Imigrasi sebesar Rp5.576.356.3862.460.863.837,00 merupakan transfer keluar ke Sekretariat Jenderal berupa Komputer ; transfer keluar ke Kanwil Sulawesi Utara (Setjen) berupa Komputer; transfer keluar ke Kanwil Sulawesi Selatan (Setjen) berupa Komputer; transfer keluar ke Inspektorat Jenderal berupa Alat Kantor; transfer keluar ke sejumlah satker Imigrasi di seluruh Indonesia dan Perwakilan Imigrasi di Luar Negeri berupa Alat Kantor, Alat Studio, Komputer, dan Alat Keselamatan Kerja; serta transfer keluar ke Poltekim berupa Komputer dan Alat Keselamatan Kerja.
- Kanwil Jawa Tengah (Pemasyarakatan) sebesar Rp4.318.263.068 00 merupakan transfer keluar ke sejumlah satker Pemasyarakatan di Jawa Tengah berupa Alat Pertanian, Alat Kantor, Alat Studio, Alat Kedokteran, dan Komputer.

Terdapat selisih nilai transfer masuk dan transfer keluar senilai Rp1.078.430.852,00 dengan penjelasan:

Transfer Keluar	Transfer Masuk	Selisih	Keterangan
456.767.735.753,00	457.846.166.605,00	1.078.430.852,00	Selisih disebabkan transfer masuk berupa meubelair yang diterima oleh Lapas Batu sebagai kelengkapan Rumah Khusus dari Kementerian PUPR

- f. Reklasifikasi Keluar senilai Rp49.762.039.541,00 diantaranya terdapat pada:
 - Ditjen Imigrasi sebesar Rp16.341.420.401,00 yang merupakan perubahan kodefikasi Chiller dari yang semula tercatat sebagai Chiller (non aktif).



- Kanim Soekarno Hatta sebesar Rp5.313.417.246,00 yang merupakan perubahan kodefikasi station wagon dari yang semula tercatat sebagai Micro Bus.
- Kanim Denpasar sebesar Rp3.638.921.160,00 yang merupakan perubahan kodefikasi 1 unit Papan Pengumuman, 11 unit Mini Bus, dan 51 buah Uninterruptible power supply menjadi kode barang yang lebih sesuai yaitu Display, Station Wagon, dan Unit Power Supply.
- Kanim Jakarta Timur sebesar Rp3.108.241.093,00 yang merupakan perubahan kodefikasi 14 unit Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah) menjadi 14 unit Station Wagon.
- - Kanim Tanjung Priok sebesar Rp2.807.829.000,00 yang merupakan perubahan kodefikasi 12 kendaraan menjadi 10 unit station wagon dan 2 unit mini bus penumpang 14 orang kebawah).

Terdapat selisih nilai reklasifikasi masuk dan reklasifikasi keluar senilai Rp648.992.621,00 dengan penjelasan:

Reklasifikasi Keluar	Reklasifikasi Masuk	Selisih	Keterangan
49.762.039.541,00	50.395.292.162,00	633.252.621,00	Selisih disebabkan adanya reklas masuk yang berasal dari pengurangan nilai gedung hasil renovasi pada tahun berjalan, nilai reklas masuk yang masuk ke Ekstrakomptabel, serta reklas masuk yang berasal dari Aset Tetap Lainnya

- g. Koreksi Pencatatan senilai Rp7.087.288.885,00 diantaranya terdapat pada:
- Kanwil Banten (Setjen) sebesar Rp737.606.250,00 yang merupakan Koreksi Pencatatan terhadap Karpas NUP 3 yang nilainya digabung ke Karpas



- NUP 2 sebesar Rp42.750.000,00 karena karpet tersebut adalah satu bagian dengan karpet NUP 2 (under layer / lapisan / bantalan) serta koreksi terhadap Partisi NUP 1 yang nilainya digabung ke Bangunan Gedung Kantor Permanen NUP 1 sebesar Rp694.856.250,00 karena partisi tersebut menyatu dengan gedung tersebut.
- Lapas Kota Agung sebesar Rp188.457.500,00 yang merupakan perbaikan pencatatan dari aset tetap ke persediaan berupa Matras perolehan dari Ditjen Pemasyarakatan tahun 2011 sebanyak 350 unit.
 - Sekretariat Jenderal sebesar Rp188.141.500 yang merupakan perbaikan pencatatan terhadap mobil ambulance NUP 26 yang sudah tercatat sebelumnya sebagai minibus NUP 104.
 - Rutan Yogyakarta sebesar Rp107.690.000,00 yang merupakan perbaikan pencatatan dari aset tetap ke persediaan berupa Matras perolehan dari Ditjen Pemasyarakatan sebanyak 200 unit.
 - Rutan Gianyar sebesar Rp103.969.000,00 yang merupakan perbaikan terhadap pencatatan ganda BMN berupa Genset, dimana setelah dilakukan inventarisasi hanya terdapat 1 unit Genset.
- h. Penghapusan (Semester II Dokumen Semester I) senilai Rp36.276.250,00 terdapat pada :
- Kanim Muara Enim sebesar Rp20.076.250,00 yang merupakan penghapusan sejumlah barang inventaris kantor berdasarkan SK Penghapusan Nomor : W.6-0178.PB.06.04 Tahun 2021 tanggal 29 Maret 2021.
 - Bapas Garut sebesar Rp16.200.000,00 yang merupakan penghapusan sejumlah barang inventaris kantor berdasarkan SK Penghapusan Nomor : W.11-2955.PB.06.04 Tahun 2021 tanggal 19 Maret 2021.
- i. Penghapusan (Semester I Dokumen TAYL) senilai Rp59.000.000,00 terdapat pada :
- Kanim Surabaya sebesar Rp27.527.000,00 yang merupakan kekurangan input item penghapusan BMN dibawah 100 juta sesuai SK Kepala Kantor Wilayah Nomor W15-PB.06.04-745 THN 2020



- tanggal 10 Desember 2020. BMN tersebut berupa 1 unit Laptop dan 12 unit Kursi Besi Metal.
- Lapas Palembang sebesar Rp22.880.000,00 yang merupakan penghapusan 1 buah mobil tangki air BG 4876AZ yang telah dilakukan di tahun 2012 dan masih tercatat di simak BMN dengan dasar surat keputusan menteri hukum dan hak asasi manusia republika Indonesia nomor M. HH-36. PL. 05.02 Tahun 2012.
 - Bapas Mataram sebesar Rp5.760.000,00 yang merupakan Koreksi Penghapusan 2 (dua) unit kendaraan dinas roda dua berupa sepeda motor honda win (NUP 1, dan NUP 2) dengan nilai masing masing Rp2.880.000,00 pada Aplikasi SIMAK, hal ini dilakukan terkait terjadinya kesalahan pemilihan NUP dalam perekaman penghapusan yang dilakukan di tahun 2015, yang seharusnya dihapus yaitu NUP 1 dan NUP 2 berupa Sepeda Motor Honda Win, namun yang di hapuskan adalah NUP 5 dan NUP 6 sepeda motor merek lain yakni Honda NF dan Yamaha Bison.
 - Kanwil Sumatera Barat (Setjen) sebesar Rp2.883.000,00 yang merupakan penghapusan 4 unit printer sesuai SK Penghapusan Nomor : W3.PB.06.04-20 tanggal 26 Agustus 2020.
- j. Penghapusan (Semester II Dokumen TAYL) senilai Rp15.051.000,00terdapat pada Kanim Jakarta Utara yang merupakan penghapusan terhadap sepeda motor yang hilang, namun menggunakan SK TGR sebagai dokumen sumber yang diinput pada Aplikasi SIMAK.
- k. Penghapusan semu karena reklasifikasi dari intra ke ekstra/ sebaliknya senilai Rp10.755.000,00 terdapat pada :
- Bapas Ciangir sebesar Rp1.620.000,00 yang merupakan tindak lanjut pengembalian belanja modal tahun 2020 berupa 2 unit Meja Kerja yang menyebabkan perpindahan kelompok barang dari Intrakomptabel ke Ekstrakomptabel.
 - Rudenim Manado sebesar Rp9.135.000,00 yang merupakan tindak lanjut Temuan Itjen Tahun 2020



berupa koreksi nilai terhadap BMN berupa 10 unit Tabung Pemadam Api dengan harga satuan di bawah nilai kapitalisasi Peralatan dan Mesin yang menyebabkan perpindahan kelompok barang dari Intrakomptabel ke Ekstrakomptabel.

C.16. GEDUNG DAN BANGUNAN

**Gedung dan
Bangunan
Rp13.128.613.611.314,
00**

Gedung dan bangunan per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah Rp13.128.613.611.314,00 dan Rp12.533.396.297.024,00. Rincian nilai Gedung dan Bangunan per tanggal 31 Desember 2021 berdasarkan Eselon I adalah sebagai berikut:

Tabel 106
Perbandingan Nilai Gedung dan Bangunan Berdasarkan Eselon I
Per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Eselon I	Gedung dan Bangunan	
	31 Desember 2021	31 Desember 2020
Sekretariat Jenderal	894.571.275.143,00	844.871.414.649,00
Inspektorat Jenderal	1.993.629.000,00	1.290.103.000,00
Ditjen Administrasi Hukum Umum	173.816.815.312,00	167.844.295.442,00
Ditjen Pemasyarakatan	9.329.459.763.435,00	9.010.149.890.989,00
Ditjen Imigrasi	2.054.503.537.226,00	1.944.854.995.016,00
Ditjen Kekayaan Intelektual	182.304.258.686,00	167.726.880.830,00
Ditjen Peraturan Perundang-undangan	26.853.457.000,00	26.853.457.000,00
Ditjen Hak Asasi Manusia	70.325.976.000,00	70.325.976.000,00
Badan Pembinaan Hukum Nasional	59.485.084.562,00	59.485.084.562,00
Balitbang Hukum dan HAM	0,00	0,00
BPSDM Hukum dan HAM	335.299.814.950,00	239.994.199.536,00
TOTAL	13.128.613.611.314,00	12.533.396.297.024,00

Terdapat perubahan nilai nilai Gedung dan Bangunan beserta Akumulasi Penyusutannya dari data Laporan Keuangan tahun 2021 (*Unaudited*) dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 107
Total Koreksi Nilai Gedung dan Bangunan

Uraian	Unaudited	Koreksi	Audited
Gedung dan Bangunan	13.126.055.268.724,00	2.558.342.590,00	13.128.613.611.314,00



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Catatan Atas Laporan Keuangan – *Penjelasan atas Pos-Pos Neraca*
Per 31 Desember Tahun Anggaran 2021 (*Audited*)
Dengan Angka Perbandingan 31 Desember Tahun Anggaran 2020
(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Akm. Penyusutan Gedung dan Bangunan	(2.023.595.047.863,00)	(192.195.196.738,00)	(2.215.790.244.601,00)

Tabel 108

Koreksi Nilai Gedung dan Bangunan Berdasarkan Satuan Kerja

No	Satker	Nilai Gedung dan Bangunan		
		Unaudited	Koreksi	Audited
1	Lapas Tangerang	34.737.411.680,00	3.793.405.187,00	38.530.816.867,00
2	Lapas Banceuy	65.126.993.660,00	419.104.000,00	65.546.097.660,00
3	Kanwil NTT (Setjen)	20.607.442.531,00	383.398.000,00	20.990.840.531,00
4	Lapas Watampone	21.234.612.000,00	304.926.000,00	21.539.538.000,00
5	Lapas Bontang	24.403.204.933,00	232.654.000,00	24.635.858.933,00
6	Ditjen Imigrasi	623.541.667.743,00	176.183.000,00	623.717.850.743,00
7	Bapas Tangerang	3.537.736.880,00	97.448.318,00	3.635.185.198,00
8	Lapas Wahai	3.715.549.720,00	81.900.000,00	3.797.449.720,00
9	Rutan Kefamenanu	10.757.855.000,00	18.882.000,00	10.776.737.000,00
10	Bapas Bandung	1.938.671.000,00	(1.097.601.000,00)	841.070.000,00
11	Lapas Pancur Batu	45.653.114.742,00	(965.477.858,00)	44.687.636.884,00
12	Lapas Saumlaki	14.427.853.494,00	(261.223.000,00)	14.166.630.494,00
13	Rutan Kabanjahe	33.478.720.846,00	(221.538.258,00)	33.257.182.588,00
14	Kanwil Jawa Barat (Setjen)	22.357.061.400,00	(188.114.789,00)	22.168.946.611,00
15	Ditjen Pemasarakatan	107.032.294.236,00	(97.448.318,00)	106.934.845.918,00
16	Rupbasan Makassar	5.229.652.000,00	(82.197.000,00)	5.147.455.000,00
17	Lapas Banjarmasin	12.917.893.316,00	(35.957.692,00)	12.881.935.624,00

Tabel 109

Koreksi Nilai Akm. Penyusutan Gedung dan Bangunan Berdasarkan Satuan Kerja

No	Satker	Akm. Penyusutan Gedung dan Bangunan		
		Unaudited	Koreksi	Audited
1	Rutan Jakarta Pusat	(5.511.193.872,00)	(69.620.324.520,00)	(75.131.518.392,00)
2	Lapas Sukamiskin	(14.472.028.335,00)	(53.514.833.399,00)	(67.986.861.734,00)
3	Lapas Waingapu	(12.587.201.558,00)	(29.089.026.519,00)	(41.676.228.077,00)
4	Kanim Tembilahan	(603.168.206,00)	(9.995.189.172,00)	(10.598.357.378,00)
5	Lapas Singaraja	(543.876.475,00)	(4.867.933.980,00)	(5.411.810.455,00)
6	Kanwil Jawa Barat (Setjen)	(2.994.271.666,00)	(2.311.216.686,00)	(5.305.488.352,00)
7	Lapas Sukabumi	(708.478.638,00)	(2.237.529.408,00)	(2.946.008.046,00)
8	Lapas Luwuk	(4.151.375.664,00)	(1.968.414.136,00)	(6.119.789.800,00)
9	BPHN	(15.597.782.767,00)	(1.875.206.119,00)	(17.472.988.886,00)
10	Rutan Bantaeng	(799.775.919,00)	(1.676.978.390,00)	(2.476.754.309,00)



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Catatan Atas Laporan Keuangan – *Penjelasan atas Pos-Pos Neraca*
Per 31 Desember Tahun Anggaran 2021 (*Audited*)
Dengan Angka Perbandingan 31 Desember Tahun Anggaran 2020
(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

11	Lapas Tangerang	(5.913.014.742,00)	(1.477.913.588,00)	(7.390.928.330,00)
12	Lapas Ambon	(2.884.936.957,00)	(1.273.298.180,00)	(4.158.235.137,00)
13	Rutan Klungkung	(1.059.697.888,00)	(1.228.866.600,00)	(2.288.564.488,00)
14	Lapas Leok	(2.324.419.062,00)	(911.326.280,00)	(3.235.745.342,00)
15	Rutan Maumere	(869.050.679,00)	(908.525.578,00)	(1.777.576.257,00)
16	Lapas Atambua	(1.459.714.104,00)	(880.400.756,00)	(2.340.114.860,00)
17	Rutan Sumenep	(550.062.841,00)	(687.628.868,00)	(1.237.691.709,00)
18	Lapas Anak Kupang	(937.760.800,00)	(671.923.313,00)	(1.609.684.113,00)
19	Lapas Kalabahi	(1.736.066.244,00)	(665.331.560,00)	(2.401.397.804,00)
20	Kanwil Jambi (Setjen)	(2.214.591.085,00)	(614.994.064,00)	(2.829.585.149,00)
21	Rutan Pinrang	(3.925.726.449,00)	(609.250.971,00)	(4.534.977.420,00)
22	Kanim Dabo Singkep	(631.260.262,00)	(573.761.349,00)	(1.205.021.611,00)
23	Lapas Palopo	(3.107.588.366,00)	(565.234.161,00)	(3.672.822.527,00)
24	Rutan Kefamenanu	(4.523.735.353,00)	(468.718.968,00)	(4.992.454.321,00)
25	Rutan Larantuka	(1.443.225.226,00)	(438.447.369,00)	(1.881.672.595,00)
26	Lapas Tebingtinggi Deli	(1.166.916.148,00)	(420.497.002,00)	(1.587.413.150,00)
27	Rutan So'e	(1.076.526.014,00)	(403.893.020,00)	(1.480.419.034,00)
28	Kanwil Aceh (Setjen)	(3.601.055.867,00)	(375.261.782,00)	(3.976.317.649,00)
29	Lapas Narkotika Jayapura	(2.427.895.354,00)	(344.015.616,00)	(2.771.910.970,00)
30	Lapas Baa	(714.637.057,00)	(341.383.176,00)	(1.056.020.233,00)
31	Lapas Watampone	(5.270.628.326,00)	(304.926.000,00)	(5.575.554.326,00)
32	Kanim Tangerang	(1.743.467.184,00)	(289.363.827,00)	(2.032.831.011,00)
33	Rutan Sambas	(903.240.677,00)	(190.332.137,00)	(1.093.572.814,00)
34	Lapas Kembang Kuning	(3.808.943.735,00)	(163.461.032,00)	(3.972.404.767,00)
35	Lapas Waikabubak	(1.971.093.221,00)	(159.024.325,00)	(2.130.117.546,00)
36	Rutan Dumai	(984.087.624,00)	(113.867.606,00)	(1.097.955.230,00)
37	Kanwil Lampung (Setjen)	(3.519.177.288,00)	(109.726.813,00)	(3.628.904.101,00)
38	Lapas Banceuy	(4.433.634.155,00)	(108.047.056,00)	(4.541.681.211,00)
39	Rutan Batam	(891.665.659,00)	(102.453.324,00)	(994.118.983,00)
40	Bapas Palangkaraya	(751.141.530,00)	(90.797.329,00)	(841.938.859,00)
41	Rutan Jeneponto	(3.495.916.150,00)	(84.035.517,00)	(3.579.951.667,00)
42	Rupbasan Rengat	(77.800.398,00)	(78.497.333,00)	(156.297.731,00)
43	Kanwil DKI Jakarta (Setjen)	(8.575.963.713,00)	(63.109.560,00)	(8.639.073.273,00)
44	Kanim Belakang Padang	(627.562.612,00)	(48.273.572,00)	(675.836.184,00)
45	Rutan Praya	(1.817.577.011,00)	(43.867.950,00)	(1.861.444.961,00)
46	Lapas Warung Kiara	(3.581.558.700,00)	(41.881.403,00)	(3.623.440.103,00)
47	Kanim Banda Aceh	(1.132.369.224,00)	(37.510.916,00)	(1.169.880.140,00)
48	Lapas Wahai	(479.387.534,00)	(21.294.000,00)	(500.681.534,00)
49	Kanwil Sulawesi Barat (Setjen)	(1.184.714.498,00)	(20.166.435,00)	(1.204.880.933,00)



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Catatan Atas Laporan Keuangan – *Penjelasan atas Pos-Pos Neraca*
Per 31 Desember Tahun Anggaran 2021 (*Audited*)
Dengan Angka Perbandingan 31 Desember Tahun Anggaran 2020
(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

50	Bapas Bandung	(236.353.128,00)	(19.443.015,00)	(255.796.143,00)
51	Lapas Bontang	(2.838.659.526,00)	(13.959.240,00)	(2.852.618.766,00)
52	Lapas Sumedang	(451.444.143,00)	(13.808.282,00)	(465.252.425,00)
53	Rutan Pacitan	(3.574.207.212,00)	(11.216.156,00)	(3.585.423.368,00)
54	Rupbasan Mataram	(253.179.062,00)	(10.061.858,00)	(263.240.920,00)
55	Kanim Nunukan	(1.577.380.271,00)	(9.428.496,00)	(1.586.808.767,00)
56	Bapas Tangerang	(316.586.563,00)	(8.770.348,00)	(325.356.911,00)
57	Lapas Bogor	(11.884.604.640,00)	(8.232.673,00)	(11.892.837.313,00)
58	Rutan Rengat	(1.548.477.359,00)	(7.736.541,00)	(1.556.213.900,00)
59	Kanwil NTT (Setjen)	(3.892.577.507,00)	(3.833.980,00)	(3.896.411.487,00)
60	Lapas Batu	(31.426.045.015,00)	(2.921.688,00)	(31.428.966.703,00)
61	Lapas Lembata	(627.395.062,00)	(2.603.059,00)	(629.998.121,00)
62	Ditjen Imigrasi	(57.421.823.760,00)	(1.835.239,00)	(57.423.658.999,00)
63	Rutan Kabanjahe	(331.806.188,00)	(765.638,00)	(332.571.826,00)
64	Lapas Saumlaki	(1.887.777.596,00)	261.223.000,00	(1.626.554.596,00)
65	Lapas Narkotika Pangkalpinang	(4.411.866.368,00)	238.605.370,00	(4.173.260.998,00)
66	Bapas Surabaya	(883.742.606,00)	182.465.396,00	(701.277.210,00)
67	Lapas Pancur Batu	(4.059.465.994,00)	125.512.120,00	(3.933.953.874,00)
68	Rupbasan Makassar	(701.361.243,00)	82.197.000,00	(619.164.243,00)
69	LPP Mamuju	(1.362.950.609,00)	55.984.294,00	(1.306.966.315,00)
70	Lapas Wanita Medan	(5.141.475.371,00)	18.719.729,00	(5.122.755.642,00)
71	Rutan Tanjung	(1.650.308.374,00)	16.948.750,00	(1.633.359.624,00)
72	Lapas Banjarmasin	(3.339.860.191,00)	11.924.592,00	(3.327.935.599,00)
73	Rutan Tarutung	(324.040.586,00)	5.155.657,00	(318.884.929,00)
74	Lapas Kendal	(1.269.985.059,00)	4.157.821,00	(1.265.827.238,00)
75	Rudenim Manado	(884.467.108,00)	2.207.393,00	(882.259.715,00)
76	Lapas Muara Tebo	(1.513.616.675,00)	1.538.204,00	(1.512.078.471,00)
77	Rutan Sidikalang	(1.353.572.831,00)	361.324,00	(1.353.211.507,00)
78	Lapas Narkotika Bandung	(3.208.229.826,00)	271.364,00	(3.207.958.462,00)
79	Lapas Cianjur	(2.610.045.723,00)	108.126,00	(2.609.937.597,00)

Koreksi tersebut merupakan dampak tindak lanjut terhadap hasil Validasi BMN 2021 berupa Gedung dan Bangunan serta Temuan BPK yang menyatakan bahwa terdapat lebih catat atau kurang catat aset tetap berupa Gedung dan Bangunan.

Rincian Mutasi Gedung dan Bangunan tersebut disajikan dalam tabel berikut:



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Catatan Atas Laporan Keuangan – *Penjelasan atas Pos-Pos Neraca*
Per 31 Desember Tahun Anggaran 2021 (Audited)
Dengan Angka Perbandingan 31 Desember Tahun Anggaran 2020
(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Tabel 110

Rincian Mutasi Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2021

Uraian	Intrakomptabel
Saldo per 31 Desember 2020	12.533.396.297.024,00
Mutasi tambah :	
Penambahan Saldo Awal	26.202.030.899,00
Pembelian	173.595.000,00
Transfer Masuk	111.476.389.160,00
Hibah Masuk	93.842.740.920,00
Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP	276.682.714.870,00
Reklasifikasi Masuk	202.555.630.107,00
Perolehan Lainnya	2.452.075.344,00
Penyelesaian Pembangunan Langsung	3.428.483.420,00
Koreksi Barang Berlebih Hasil Inventarisasi	197.213.000,00
Reklas AL ke AT	966.860.000,00
Perolehan Hasil TL Normalisasi	566.936.820.111,00
Perolehan Reklas dari Intra ke Ekstra/Sebaliknya	25.400.000,00
Pengembangan Nilai Aset	43.438.817.547,00
Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas	34.319.123.559,00
Pengembangan Melalui KDP	167.146.535.790,00
Penerimaan ATR	8.433.406.991,00
Koreksi Kesalahan Input IP	6.943.323.000,00
Koreksi Normalisasi Akibat Koreksi Penilaian Kembali	52.466.000,00
Total Mutasi Tambah :	1.545.273.625.718,00
Mutasi kurang :	
Reklas AT ke AL	37.979.927.233,00
Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas	37.566.943.334,00
Transaksi Normalisasi BMN	582.939.405.665,00
Koreksi Kesalahan Input IP	12.540.706.000,00
Koreksi Barang Berlebih Akibat Koreksi Penilaian Kembali	1.556.180.000,00
Penghapusan	1.801.180.000,00
Transfer Keluar	32.496.912.286,00
Reklasifikasi Keluar	205.145.898.832,00
Koreksi Pencatatan	34.374.784.309,00
Penghapusan (semester II dokumen TAYL)	3.649.038.769,00
Penghapusan semu karena reklas intra ke ekstra/sebaliknya	5.335.000,00



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Catatan Atas Laporan Keuangan – *Penjelasan atas Pos-Pos Neraca*
Per 31 Desember Tahun Anggaran 2021 (*Audited*)
Dengan Angka Perbandingan 31 Desember Tahun Anggaran 2020
(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Total Mutasi Kurang :	950.056.311.428,00
Saldo per 30 September 2021	13.128.613.611.314,00
Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2021	(2.212.765.873.103,00)
Nilai Buku per 30 September 2021	10.915.847.738.211,00

Penjelasan Sebaran Transaksi:

- **Mutasi Tambah**

- a. Penambahan Saldo Awal senilai Rp26.202.030.899,00 diantaranya terdapat pada:
 - Lapas Perempuan Yogyakarta sebesar Rp22.803.042.634,00 yang merupakan pencatatan Koreksi Nilai karena pemecahan pencatatan Gedung Kantor Utama yang sebelumnya tercatat menjadi satu gedung.
 - Kanwil Sulawesi Barat (Setjen) sebesar Rp1.008.044.689,00 yang merupakan pemecahan pencatatan Pagar Permanen yang sebelumnya tergabung dengan Gedung Kantor Permanen senilai Rp672.214.464, serta tindak lanjut Barang Berlebih Hasil Inventarisasi 2021 berupa Pagar dan Talud di lingkungan rumah dinas Kanwil dengan total nilai Rp335.830.225,00 .
 - Sekretariat Jenderal sebesar Rp710.990.000,00 yang merupakan pencatatan kembali Rumah Negara Golongan I Tipe A Permanen NUP 29 di Aplikasi SIMAK. Pada saat revaluasi tahun 2017, rumah tersebut dikategorikan sebagai Barang Tidak Ditemukan (BTD) dan dilakukan tindak lanjut berupa Koreksi Pencatatan pada tahun 2019. Namun pada tahun 2021 baru diketahui bahwa rumah tersebut masih ada dan sudah terlanjur dihapuskan dari SIMAK Setjen. Sehubungan dengan sudah berakhirnya periode revaluasi pada Desember 2020, maka terhadap rumah tersebut tidak memungkinkan untuk dilakukan pencatatan melalui mekanisme revaluasi sehingga dilakukan pencatatan melalui Saldo Awal.
 - Ditjen Pemasarakatan sebesar Rp317.475.797,00 yang merupakan pemecahan pencatatan dari penyelesaian pembangunan Gedung Bapas



Tangerang Tahun 2018 beserta fasilitasnya yang secara fisik terdiri dari Gedung Kantor, Rumah Dinas Ka. Bapas, dan Pagar, namun dicatat sebagai 1 NUP Gedung Kantor. Kemudian terhadap gedung kantor tersebut dilakukan transaksi Koreksi dan Saldo Awal senilai Rumah Dinas Ka. Bapas dan Pagar yaitu sebesar Rp317.475.797,00

- Kanim Langsa sebesar Rp 265.497.000,00 yang merupakan pencatatan BMN berupa 5 unit Rumah Genset dimana sebelumnya aset tersebut dicatat sebagai penambahan nilai untuk Gedung Kantor.
- b. Pembelian senilai Rp173.595.000,00 terdapat pada:
 - Lapas Narkotika Pematang Siantar sebesar Rp99.800.000,00 yang merupakan pembangunan kandang ayam untuk Kegiatan Kemandirian WBP.
 - Lapas Rongkasbitung sebesar Rp73.795.000,00 yang merupakan Pembangunan Kandang Ayam Petelur bermaterial baja Ringan, kawat, serta partisi rak susun ayam beserta perangkat pengairan dan sistem kelistrikan
- c. Transfer Masuk senilai Rp111.476.389.160,00 diantaranya terdapat pada:
 - Lapas Batu sebesar Rp42.144.320.095,00 yang merupakan transfer masuk dari Kementerian PU&Perumahan Rakyat sebesar Rp40.957.146.005,00 berupa Rumah Khusus dan Flat serta dari Ditjen Pemasyarakatan sebesar Rp1.187.174.090,00 berupa Hanggar Permanen.
 - Kanim Batam sebesar Rp19.558.724.399,00 yang merupakan transfer masuk dari Kementerian PU&Perumahan Rakyat berupa Flat.
 - Kanim Denpasar sebesar Rp14.670.159.156,00 yang merupakan transfer masuk dari Kementerian PU&Perumahan Rakyat berupa Flat.
 - Ditjen AHU sebesar Rp8.839.853.327,00 yang merupakan transfer masuk dari BHP Semarang berupa Bangunan Lainnya dan Bangunan Gedung Kantor Lainnya.
 - Kanim Cianjur sebesar Rp5.606.261.905,00 yang merupakan transfer masuk dari Kanim Sukabumi



- berupa Gedung Kantor Permanen dan Gedung Pertemuan Permanen.
- d. Hibah Masuk senilai Rp93.842.740.920,00 diantaranya terdapat pada:
- Lapas Bekasi sebesar Rp78.099.943.000,00 yang merupakan hibah TAYL dari Pemkot Bekasi dengan nomor BAST : 641.7/1589/BPKAD.Aset tanggal 31 Desember 2020 berupa Blok Hunian.
 - Lapas Tarakan sebesar Rp4.498.082.271,00 yang merupakan hibah dari Pemkot Tarakan dengan nomor BAST : 030/BPKADNH/605/2021 Tanggal 19 Juli 2021 berupa Blok Hunian.
 - Kanim Kuala Tungkal sebesar Rp2.591.438.519 yang merupakan hibah dari Pemkab Muaro Jambi dengan nomor BAST : 028/215/BPKAD/2021 tanggal 5 Juli 2021 berupa Gedung dan Bangunan Unit Layanan Paspor Kantor Imigrasi Kelas II Kuala Tungkal di Kabupaten Muaro Jambi.
 - Lapas Narkotika Rumbai sebesar Rp 1.372.250.000,00 yang merupakan hibah dari PT. Bank Riau Kepri dengan nomor BAST: W4.PAS.21.PB.05.01-1860 tanggal 19 Oktober 2021 berupa Masjid dan Halaman Parkir.
 - Rutan Pelaihari sebesar Rp1.293.549.000,00 yang merupakan hibah dari Pemkab Tanah Laut dengan nomor BAST : 6407-CKJK/DPUPRP/2021 Tanggal 21 Desember 2021 berupa Blok Hunian.
- e. Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP senilai Rp276.682.714.870,00 terdapat pada:
- BPSDM Hukum dan HAM sebesar Rp. 93.636.985.363,00 yang merupakan penyelesaian pembangunan auditorium pada kompleks Politeknik di Tangerang.
 - Rutan Donggala sebesar Rp. 32.127.667.015,00 yang merupakan penyelesaian pembangunan gedung kantor utama, blok hunian, pos jaga, dan pagar keliling.
 - Lapas Mataram sebesar Rp.25.453.738.900,00 yang merupakan penyelesaian pembangunan gedung kantor, blok hunian, tempat ibadah, dan rumah dinas.



- Lapas Perempuan Ternate sebesar Rp24.162.176.898,00 yang merupakan penyelesaian pembangunan gedung kantor Lapas, blok hunian, dan sejumlah fasilitas pendukungnya yang dimulai pada tahun 2017 dan sebagian dilanjutkan pada tahun 2020.
- Kanim Bima sebesar Rp23.651.748.524,00 yang merupakan penyelesaian pembangunan gedung kantor yang dimulai tahun 2019.
- f. Reklasifikasi Masuk senilai Rp202.555.630.107,00 diantaranya terdapat pada:
 - Rutan Donggala sebesar Rp32.127.667.015,00 yang merupakan pemecahan pencatatan hasil pembangunan yang sebelumnya dicatat sebagai 1 NUP menjadi 17 NUP sesuai dengan peruntukan masing-masing bangunan.
 - Lapas Mataram sebesar Rp. 25.453.738.900,00 yang merupakan pemecahan pencatatan hasil pembangunan yang sebelumnya dicatat sebagai 1 NUP menjadi 6 NUP sesuai dengan peruntukan masing-masing bangunan.
 - Rutan Perempuan Bandung sebesar Rp24.032.254.875,00 yang merupakan pemecahan pencatatan hasil pembangunan pada tahun 2019 yang dicatat sebagai 1 NUP Bangunan Gedung Rutan Kelas II menjadi 6 NUP Bangunan sesuai dengan peruntukan masing-masing bangunan.
 - LPP Mamuju sebesar Rp 19.378.102.500,00 yang merupakan pemecahan pencatatan hasil pembangunan yang sebelumnya dicatat sebagai 1 NUP menjadi 15 NUP sesuai dengan peruntukan masing-masing bangunan.
 - LPKA Kendari sebesar Rp18.562.351.936,00 yang merupakan pemecahan pencatatan hasil pembangunan pada tahun 2020 yang dicatat sebagai 1 NUP Bangunan Gedung Kantor Permanen menjadi 20 NUP Bangunan sesuai dengan peruntukan masing-masing bangunan.
- g. Perolehan Lainnya senilai Rp2.452.075.344,00 terdapat pada :



- Lapis Batu sebesar Rp1.832.064.300,00 yang merupakan perolehan dari GRBB PT SBI berupa perbaikan atap dan pembuatan tempat parkir Pelabuhan Wijayapura serta Tugu Pemasyarakatan.
- Lapis Pasir Putih NK sebesar Rp498.300.000,00 yang merupakan perolehan dari GRBB PT SBI berupa perbaikan Blok Hunian.
- Lapis Permisian sebesar Rp121.711.044,00 yang merupakan perolehan dari GRBB PT SBI berupa perbaikan Poliklinik dan pembuatan Bio Septic Tank.
- h. Penyelesaian Pembangunan Langsung senilai Rp3.428.483.420,00 diantaranya terdapat pada :
 - Ditjen Imigrasi sebesar Rp1.430.947.000,00 yang merupakan penyelesaian pekerjaan pagar Komplek Imigrasi Tanah Tinggi, Tangerang.
 - Rutan Depok sebesar Rp993.260.600,00 yang merupakan penyelesaian pekerjaan Lapangan Olahraga dan Gazebo.
 - Kanwil Jawa Tengah (Setjen) sebesar Rp198.000.000,00 yang merupakan penyelesaian pekerjaan Gudang Tertutup Permanen.
 - Lapis Terbuka Kendal sebesar Rp160.000.000,00 yang merupakan penyelesaian pekerjaan Gudang Tertutup Permanen untuk pakan ternak.
 - Lapis Polewali sebesar Rp153.765.000,00 yang merupakan pembangunan kandang ayam untuk Kegiatan Kemandirian WBP.
- i. Koreksi Barang Berlebih Hasil Inventarisasi senilai Rp197.213.000,00 merupakan Koreksi revaluasi berupa penambahan nilai dari perekaman barang berlebih, BMN berupa bangunan yang belum pernah tercatat berdasarkan LHIP Tahun 2017/2018. Transaksi tersebut terdapat pada Lapis Narkotika Bandar Lampung.
- j. Reklasifikasi dari Aset Lainnya ke Aset Tetap senilai Rp966.860.000,00 terdapat pada:
 - Kanim Batam sebesar Rp359.174.000,00 yang merupakan penggunaan kembali 8 unit rumah dinas yang kondisinya masih baik sesuai dengan BA



- nomor W.32.IMI.IMI.1.PB.05.01-0011 tanggal 4 Januari 2021.
- Kanim Palangkaraya sebesar Rp 244.565.000,00 yang merupakan penggunaan kembali rumah dinas karena akan dilakukan renovasi.
 - Lapas Madiun sebesar Rp201.118.000,00 yang merupakan penggunaan kembali rumah dinas karena akan dilakukan Reklas keluar Rumah Negara Gol III Tipe D Semi Permanen NUP 1 dan 2 ke Rumah Negara Gol II Tipe B Permanen NUP 3 dan 4 sesuai dengan Surat Pernyataan Nomor W.15.PAS.PAS3.PB.06.04-333 tanggal 16 Juni 2021.
 - Lapas Narkotika Yogyakarta sebesar Rp. 132.003.000,00 yang merupakan penggunaan kembali 1 unit rumah dinas karena kondisinya masih baik.
 - Rutan Krui sebesar Rp20.000.000,00 yang merupakan penggunaan kembali 1 unit rumah dinas karena kondisinya masih baik.
 - Kanwil Jawa Tengah (Setjen) sebesar Rp10.000.000,00 yang merupakan penggunaan kembali bangunan eks. PN Salatiga karena akan dilakukan transfer keluar ke Rutan Salatiga.
- k. Perolehan Hasil Tindak Lanjut Normalisasi senilai Rp576.275.048.322,00 merupakan tindak lanjut Kertas Kerja Konfirmasi (K3) dimana terhadap BMN berupa Bangunan teridentifikasi sebagai BMN Tidak Wajar dengan kategori Tanggal Perolehan Tidak Wajar (Di Bawah 1945), namun secara fisik diketahui bahwa Bangunan tersebut masih digunakan sehingga dilakukan penginputan kembali. Transaksi tersebut diantaranya terdapat pada :
- Rutan Jakarta Pusat sebesar Rp74.860.564.000,00
 - Lapas Cirebon sebesar Rp55.197.095.401,00
 - Lapas Pemuda Tangerang sebesar Rp41.976.501.000,00
 - Lapas Pancur Batu sebesar Rp35.266.172.814,00
 - Lapas Batu sebesar Rp20.323.111.951,00
- l. Perolehan Reklasifikasi dari Intra ke Ekstra/Sebaliknya senilai Rp25.400.000,00 terdapat



pada Rutan Banjarnegara yang merupakan dampak hibah renovasi dari Pemkab Banjarnegara terhadap Bangunan Tempat Ibadah Permanen NUP 1 yang awalnya tercatat sebagai BMN Ekstrakomptabel kemudian setelah dilakukan transaksi Pengembangan Nilai Aset berpindah menjadi BMN Intrakomptabel.

- m. Pengembangan Nilai Aset senilai Rp43.438.817.547,00 diantaranya terdapat pada:
- Sekretariat Jenderal sebesar Rp 12.180.532.050,00 yang merupakan renovasi gedung utama, kantin, Balkesmas, dan rumah dinas Wakil Menteri.
 - Ditjen Imigrasi sebesar Rp5.778.289.390,00 yang merupakan penggantian atap, plafon, serta sealant kaca pada Gedung Utama Ditjenim; renovasi ruang kerja Menteri Hukum dan HAM, Direktur Intelkim, serta Subdit Penyidikan.
 - Ditjen AHU sebesar Rp5.470.661.483,00 yang merupakan renovasi gedung kantor utama, Gedung Arsip di Jl. Kramat, serta Gedung Weeskamer di Semarang.
 - Lapas Kotabaru sebesar Rp2.165.127.636,00 yang merupakan tindak lanjut temuan Itjen tahun 2020 yang memerintahkan untuk membayar sisa pekerjaan pembangunan tembok keliling Lapas Batulicin yang telah dilaksanakan pada tahun 2017.
 - Lapas Tenggarong sebesar Rp1.808.205.500,00 yang merupakan hibah renovasi perluasan blok hunian dan Menara Air dari Pemkab Kutai Kartanegara berdasarkan BAST Hibah Nomor : 20/NPHD/HK/2021 tanggal 30 September 2021
- n. Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas senilai Rp34.319.123.559,00 diantaranya terdapat pada:
- Lapas Karanganyar NK sebesar Rp8.596.539.678,00 yang merupakan perbaikan pencatatan terhadap Talud yang semula tercatat dalam kelompok Irigasi, kemudian dilakukan Koreksi Pencatatan dan nilainya ditambahkan ke 7 NUP Gedung melalui Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas.
 - Lapas Leok sebesar Rp3.872.284.276,00 yang merupakan perbaikan pencatatan terhadap Jalan



- yang semula tercatat dalam kelompok Jalan dan Jembatan, kemudian dilakukan Koreksi Pencatatan dan nilainya ditambahkan ke Gedung Utama melalui Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas.
- Lapas Malang sebesar Rp2.387.693.000,00 yang merupakan perbaikan pencatatan terhadap Turap dan Bangunan Penampung Air yang semula tercatat dalam kelompok Irigasi, kemudian dilakukan Koreksi Pencatatan dan nilainya ditambahkan ke Gedung Utama melalui Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas.
 - Lapas Terbuka Ciangir sebesar Rp1.211.310.195,00 yang merupakan perbaikan pencatatan terhadap Jalan yang semula tercatat dalam kelompok Jalan dan Jembatan, kemudian dilakukan Koreksi Pencatatan dan nilainya ditambahkan ke Gedung Utama melalui Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas.
 - Lapas Perempuan Palu sebesar Rp1.021.282.835,00 yang merupakan perbaikan pencatatan terhadap Instalasi Air Bersih dan Instalasi Listrik yang semula tercatat dalam kelompok Jaringan, kemudian dilakukan Koreksi Pencatatan dan nilainya ditambahkan ke Gedung Utama melalui Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas.
 - o. Penerimaan Aset Tetap Renovasi senilai Rp8.433.406.991,00 diantaranya terdapat pada :
 - Ditjen Imigrasi sebesar Rp2.606.284.784,00 yang merupakan penyelesaian renovasi Gedung Utama Ditjenim dengan menggunakan DIPA Ditjen KI, Itjen, dan Ditjen AHU.
 - BHP Surabaya sebesar Rp2.572.266.596,00 yang merupakan penyelesaian renovasi rumah dinas dengan DIPA Ditjen AHU.
 - Lapas Pasir Putih NK sebesar Rp1.438.343.456,00 yang merupakan penyelesaian renovasi rumah dinas dengan DIPA Ditjen Pemasarakatan.
 - BHP Semarang sebesar Rp392.998.75500 yang merupakan penyelesaian renovasi rumah dinas dengan DIPA Ditjen AHU.



- LPKA Yogyakarta sebesar Rp1.438.343.456,00 yang merupakan penyelesaian pembuatan lapangan olahraga dengan DIPA Bapas Yogyakarta.
- p. Pengembangan Melalui KDP senilai Rp167.146.535.790,00 merupakan pekerjaan renovasi bangunan yang dilakukan melalui tahapan KDP, diantaranya terdapat pada:
 - Lapas Pancur Batu sebesar Rp41.378.301.742,00 yang merupakan penyelesaian proyek tahun 2020 berupa renovasi gedung lapas.
 - Rutan Kabanjahe sebesar Rp25.573.903.000,00 yang merupakan penyelesaian renovasi blok hunian.
 - Ditjen KI sebesar Rp14.577.377.856,00 yang merupakan penyelesaian perubahan layout ruang kerja pada Gedung Utama DJKI.
 - Lapas Balikpapan sebesar Rp11.101.982.491,00 yang merupakan penyelesaian renovasi pagar dan blok hunian.
 - Kanwil NTB (Setjen) sebesar Rp8.305.026.665,00 yang merupakan penyelesaian renovasi gedung kantor.
- q. Koreksi Kesalahan Input IP senilai Rp6.943.323.000,00 merupakan salah satu transaksi revaluasi dimana nilai Bangunan hasil revaluasi yang terbaru lebih tinggi dibandingkan revaluasi awal. Transaksi tersebut seharusnya diinput ketika pelaksanaan revaluasi tahun 2020, namun karena terdapat sejumlah kendala dalam Aplikasi SIMAK penginputannya baru dapat dilakukan setelah rilis update SIMAK 21.1 . Transaksi tersebut terdapat pada :
 - Rutan Makassar sebesar Rp5.766.329.000,00
 - Lapas Ambon sebesar Rp932.967.000,00
 - Bapas Surabaya sebesar Rp219.815.000,00
 - Lapas Empat Lawang sebesar Rp24.212.000,00
- r. Koreksi Normalisasi Akibat Koreksi Penilaian Kembali senilai Rp52.466.000,00 merupakan salah satu transaksi revaluasi yang mengeliminir nilai wajar terhadap obyek revaluasi yang dilakukan normalisasi pada Tahun Anggaran Berjalan. Transaksi tersebut terdapat pada Lapas Tembilahan.



- **Mutasi Kurang**

- a. Reklasifikasi dari Aset Tetap ke Aset Lainnya senilai Rp37.979.927.233,00 diantaranya terdapat pada :
 - Lapas Pria Tangerang sebesar Rp9.133.474.000,00 yang merupakan penghentian Blok Hunian yang hancur akibat kebakaran dengan nomor BA : W12.PAS.PAS.1.PB.05.02 -1306 tanggal 29 Desember 2021.
 - Rutan Surabaya sebesar Rp5.175.607.000,00 yang merupakan penghentian dengan nomor BA : W15.PAS.PAS.25-PB.06.04-4218 tanggal 15 Desember 2021 yang terdiri Tempat Ibadah, Blok Hunian, serta 9 unit rumah dinas karena seluruh bangunan tersebut sudah rusak.
 - Lapas Kerobokan sebesar Rp3.331.096.000,00 yang merupakan penghentian dengan nomor BA : W20.EDP- 70.PB.05.01/2021 tanggal 26 November 2021 yang terdiri 3 unit Bangunan Klinik yang kondisinya sudah rusak.
 - Rupbasan Semarang sebesar Rp2.073.073.000,00 yang merupakan penghentian dengan nomor BA : W13.PAS53.UM.01.01-13 tanggal 11 Januari 2021 yang terdiri 6 unit bangunan tempat kerja, 5 unit rumah negara karena akan diajukan penghapusan bmn untuk digunakan pembangunan Rutan Semarang.
 - Lapas Manado sebesar Rp1.724.380.000,00 yang merupakan penghentian dengan nomor BA : W.27.PAS. AS.1.P8.06.04- 107 tanggal 1 Desember 2021 terhadap Blok Hunian yang hancur akibat kebakaran serta rumah dinas yang rusak akibat bencana longsor.
- b. Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas senilai Rp37.566.943.334,00 diantaranya terdapat pada:
 - Ditjen AHU sebesar Rp4.780.343.000,00 yang merupakan perbaikan pencatatan terhadap sejumlah Peralatan dan Mesin dengan total nilai Rp4.464.625.000,00 yang nilainya tergabung dalam renovasi Gedung Ditjen AHU Tahun 2018 yang kemudian terhadap Peralatan dan Mesin



tersebut dicatat kembali melalui transaksi Saldo Awal; serta tindak lanjut terhadap Temuan BPK 2020 senilai Rp315.718.000 berupa kelebihan pembayaran dalam renovasi gedung Data Centre di Batam, serta Pengadaan Palang Pintu Otomatis Ruang dan Basement Ditjen AHU.

- Kanim Jayapura sebesar Rp1.354.080.000,00 yang merupakan pemisahan pencatatan genset, tabung pemadam api, dan sejumlah meubeulair yang sebelumnya tergabung dalam nilai pembangunan gedung kantor pada tahun 2017.
- Lapas Pancur Batu sebesar Rp965.477.858,00 yang merupakan tindak lanjut terhadap Temuan BPK Tahun 2021 yang menyatakan bahwa terdapat kelebihan pembayaran dalam pembangunan gedung lapas.
- BPSDM Hukum dan HAM sebesar Rp829.541.975,00 yang merupakan tindak lanjut Temuan BPK Tahun 2020 berupa kelebihan pembayaran dalam pembangunan gedung di Tangerang dan Cinere.
- c. Transaksi Normalisasi BMN sebesar Rp582.939.405.665,00 merupakan tindak lanjut Kertas Kerja Konfirmasi (K3) dimana terhadap BMN berupa Bangunan teridentifikasi sebagai BMN Tidak Wajar dengan kategori Tanggal Perolehan Tidak Wajar (Di Bawah 1945) , sehingga terhadap BMN tersebut dilakukan Normalisasi. Transaksi tersebut diantaranya terdapat pada:
 - Rutan Jakarta Pusat sebesar Rp74.860.564.000,00
 - Lapas Cirebon sebesar Rp55.197.095.401,00
 - Lapas Pemuda Tangerang sebesar Rp41.976.501.000,00
 - Lapas Pancur Batu sebesar Rp35.266.172.814,00
 - Rutan Kabanjahe sebesar Rp30.108.301.846,00

Terdapat selisih antara Transaksi Normalisasi dengan Perolehan Hasil Tindak Lanjut Normalisasi sebesar Rp16.002.585.554,00 . Selisih tersebut secara umum disebabkan oleh : 1) Adanya transaksi Normalisasi



(BMN yang Dihentikan); 2) Adanya transaksi Normalisasi yang masuk kelompok Ekstrakomptabel; 3) Adanya transaksi Normalisasi atau Normalisasi (BMN yang Dihentikan) pada tahun anggaran sebelumnya; 4) Adanya transaksi Penghapusan Tindak Lanjut Normalisasi.

- d. Koreksi Kesalahan Input IP senilai Rp12.540.706.000,00 merupakan salah satu transaksi revaluasi dimana nilai Bangunan hasil revaluasi yang terbaru lebih rendah dibandingkan revaluasi awal. Transaksi tersebut seharusnya diinput ketika pelaksanaan revaluasi tahun 2020, namun karena terdapat sejumlah kendala dalam Aplikasi SIMAK penginputannya baru dapat dilakukan setelah rilis update SIMAK 21.1 . Transaksi tersebut terdapat pada :
- Rupbasan Ambon sebesar Rp5.226.207.000,00
 - Lapas Gunung Sugih sebesar Rp2.822.631.000,00
 - Lapas Saumlaki sebesar Rp2.273.722.000,00
 - Lapas Tembilahan sebesar Rp1.003.680.000,00
 - Lapas Saparua sebesar Rp762.149.000,00
 - Bapas Makassar sebesar Rp452.317.000,00
- e. Koreksi Barang Berlebih Akibat Koreksi Penilaian Kembali senilai Rp1.556.180.000,00 merupakan salah satu transaksi revaluasi dimana nilai Barang Berlebih berupa Bangunan hasil revaluasi yang terbaru lebih rendah dibandingkan revaluasi awal. Transaksi tersebut seharusnya diinput ketika pelaksanaan revaluasi tahun 2020, namun karena terdapat sejumlah kendala dalam Aplikasi SIMAK penginputannya baru dapat dilakukan setelah rilis update SIMAK 21.1 . Transaksi tersebut terdapat pada Lapas Gunung Sugih.
- f. Penghapusan senilai Rp1.801.180.000,00 terdapat pada :
- Lapas Kerobokan sebesar Rp847.491.000,00 yang merupakan penghapusan 7 unit rumah negara berdasarkan SK Penghapusan Nomor : SEK.4-39.PB.06.04 Tahun 2021 tanggal 30 Agustus 2021. Seluruh rumah tersebut akan dihapuskan karena



- akan dibangun 10 unit Rumah Khusus oleh Kementerian PU&Perumahan Rakyat.
- Kanwil Bengkulu (Setjen) sebesar Rp757.395.000,00 yang merupakan penghapusan 1 unit Gedung Kantor karena sebab-sebab lain berdasarkan SK Penghapusan Nomor : SEK-104.PB.06.04 Tahun 2021 tanggal 6 Desember 2021
 - Lapas Luwuk sebesar Rp112.485.000,00 yang merupakan penghapusan bangunan yang roboh akibat gempa bumi berdasarkan SK Penghapusan Nomor: SEK-112.PB.06.04 Tahun 2021 Tanggal 20 Desember 2021.
 - Kanim Tembilahan sebesar Rp83.809.000,00 yang merupakan penghapusan Rumah Negara Golongan I tipe C Semi Permanen NUP 1 berdasarkan SK Penghapusan Nomor : SEK-18.PB.06.04 TAHUN 2021 Tanggal 21 April 2021. Rumah tersebut dihapuskan karena Rusak Berat terkena Dampak Renovasi Gedung bangunan Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tembilahan.
- g. Transfer Keluar senilai Rp32.496.912.286,00 diantaranya terdapat pada:
- BHP Semarang sebesar Rp8.839.853.327,00 yang merupakan transfer keluar ke Ditjen AHU berupa Bangunan Lainnya dan Bangunan Gedung Kantor Lainnya.
 - Kanim Sukabumi sebesar Rp5.606.261.905,00 yang merupakan transfer keluar ke Kanim Cianjur berupa Gedung Kantor Permanen dan Gedung Pertemuan Permanen.
 - Ditjen Pemasyarakatan sebesar Rp4.822.359.288,00 yang merupakan transfer keluar ke Bapas Tangerang sebesar Rp3.537.736.880,00 berupa Bangunan Gedung Kantor Permanen dan Rumah Negara Golongan I Tipe C Permanen dan transfer keluar ke Lapas Batu sebesar Rp 1.187.174.090,00 berupa Hanggar Permanen



- Sekretariat Jenderal sebesar Rp3.684.002.000,00 yang merupakan transfer keluar ke BPSDM Hukum dan HAM berupa Pagar Permanen.
- Kanwil Jawa Timur (Setjen) sebesar Rp2.240.858.000,00 yang merupakan transfer keluar ke Rutan Trenggalek, Lapas Arjasa, Rutan Sumenep, Rutan Bangkalan, Lapas Jombang, dan Lapas Pamekasan berupa Bangunan Tempat Sidang, serta transfer keluar ke Rutan Surabaya berupa Rumah Dinas.

Terdapat selisih nilai transfer masuk dan transfer keluar senilai Rp 78.979.476.874,00 dengan penjelasan:

Transfer Keluar	Transfer Masuk	Selisih	Keterangan
32.399.463.968,00	111.378.940.842,00	78.979.476.874,00	Selisih disebabkan adanya transfer masuk berupa Rumah Khusus dari Kementerian PUPR ke sejumlah satker yaitu : Lapas Batu, Kanim Batam, Lapas Kerobokan, Lapas Medan, dan Kanim Atambua; Serta adanya transfer keluar bangunan dari Kanim Bogor ke KPKNL Bogor

- h. Reklasifikasi Keluar senilai Rp 205.145.898.832,00 diantaranya terdapat pada:
 - Rutan Donggala sebesar Rp.32.127.667.015,00 yang merupakan pemecahan pencatatan hasil pembangunan yang sebelumnya dicatat sebagai 1 NUP menjadi 17 NUP sesuai dengan peruntukan masing-masing bangunan.
 - Lapas Mataram sebesar Rp. 25.453.738.900,00 yang merupakan pemecahan pencatatan hasil pembangunan yang sebelumnya dicatat sebagai 1 NUP menjadi 6 NUP sesuai dengan peruntukan masing-masing bangunan.
 - Rutan Perempuan Bandung sebesar Rp24.032.254.875,00 yang merupakan pemecahan



pencatatan hasil pembangunan pada tahun 2019 yang dicatat sebagai 1 NUP Bangunan Gedung Rutan Kelas II menjadi 6 NUP Bangunan sesuai dengan peruntukan masing-masing bangunan.

- Lapas Perempuan Ternate sebesar Rp21.045.961.359,00 yang merupakan pemecahan pencatatan 1 unit Rumah Dinas yang selesai dibangun tahun 2020 menjadi 4 unit rumah dinas, serta 1 unit Bangunan Gedung Lapas Lainnya yang selesai dibangun tahun 2021 menjadi 3 unit gedung yaitu :Bangunan Gedung Lapas Lainnya, Bangunan Gedung Rutan Kelas II, Pagar Permanen dan 1 unit yang masuk dala kelompok Irigasi yaitu Bangunan Talud Penahan.
- LPKA Kendari sebesar Rp18.562.351.936,00 yang merupakan pemecahan pencatatan hasil pembangunan pada tahun 2020 yang dicatat sebagai 1 NUP Bangunan Gedung Kantor Permanen menjadi 20 NUP Bangunan sesuai dengan peruntukan masing-masing bangunan.

Terdapat selisih nilai reklasifikasi masuk dan reklasifikasi keluar senilai Rp 2.590.268.725,00 dengan penjelasan:

Reklasifikasi Keluar	Reklasifikasi Masuk	Selisih	Keterangan
205.145.898.832,00	202.555.630.107,00	2.590.268.725,00	Selisih disebabkan adanya reklas antar kelompok barang, seperti dari kelompok irigasi menjadi bangunan, dan dari bangunan menjadi peralatan dan mesin (umumnya pengadaan peralatan dan mesin jadi satu saat perolehan bersama dengan bangunannya)

- i. Koreksi Pencatatan senilai Rp34.374.784.309,00 diantaranya terdapat pada:

- Lapas Banceuy sebesar Rp6.115.923.000,00 yang merupakan tindak lanjut terhadap BTM pada Revaluasi Tahun 2020 dimana terdapat 1 NUP



- Gedung yang sudah dipecah dan dijadikan Barang Berlebih sebanyak 10 NUP Gedung sesuai dengan kondisi fisiknya.
- Lapas Tobello sebesar Rp5.811.351.000,00 yang merupakan tindak lanjut terhadap BTB pada Revaluasi Tahun 2020, dimana terdapat 32 NUP Bangunan yang dikategorikan sebagai BTB karena perbedaan tanggal perolehan. Kemudian terhadap 32 Bangunan tersebut diterbitkan tiket revaluasi ulang pada tahun yang sama dan dikategorikan sebagai Barang Berlebih.
 - Kanwil Sumbar (Setjen) sebesar Rp4.049.094.500,00 yang merupakan tindak lanjut dari KDP mangkrak yang sudah tercatat sejak 2010 berupa pagar permanen dengan cara menjadikan KDP tersebut sebagai aset definitif untuk kemudian dilakukan Koreksi Pencatatan karena secara fisik pagar tersebut sudah tercatat di Rutan Padang.
 - Rutan Muntok sebesar Rp3.325.754.000,00 yang merupakan tindak lanjut terhadap BTB pada Revaluasi Tahun 2020, dimana terdapat 4 NUP Bangunan yang dikategorikan sebagai BTB karena perbedaan tanggal perolehan. Kemudian terhadap 4 Bangunan tersebut diterbitkan tiket revaluasi ulang pada tahun yang sama dan dikategorikan sebagai Barang Berlebih.
 - Lapas Purwakarta sebesar Rp3.252.450.000,00 yang merupakan tindak lanjut terhadap BTB pada Revaluasi Tahun 2020, dimana terdapat 4 NUP Bangunan yang dikategorikan sebagai BTB karena perbedaan tanggal perolehan. Kemudian terhadap 4 Bangunan tersebut diterbitkan tiket revaluasi ulang pada tahun yang sama dan dikategorikan sebagai Barang Berlebih.
- j. Penghapusan (Semester II Dokumen TAYL) senilai Rp3.649.038.769,00 terdapat pada :
- Lapas Ambon sebesar Rp3.522.145.465,00 merupakan penghapusan terhadap 5 unit Rumah Negara sesuai dengan SK Penghapusan Nomor : SEK-108.PB.06.04 Tahun 2019 tanggal 31 Oktober 2019.



- Kanim Jakarta Barat sebesar Rp97.854.000,00 merupakan penghapusan Bangunan Toilet Umum yang berubah menjadi Jalur Exit Kendaraan sesuai dengan SK Nomor W.10.PL.05.01-170 Tanggal 10 Oktober 2017.
- Rupbasan Medan sebesar Rp29.039.304,00 merupakan penghapusan terhadap Rumah Negara Golongan I Tipe C Permanen NUP 1 sesuai dengan SK Penghapusan Nomor SEK-77.PB.06.04 Tahun 2018 Tgl. 14 Nopember 2018.
- k. Penghapusan Semu Karena Reklas dari Intra ke Ekstra senilai Rp5.335.000,00 terdapat pada Kanim Langsa yang merupakan hasil penilaian wajar dari KPKNL Lhokseumawe terhadap BMN berlebih Kanim Langsa berupa Rumah Genset dimana nilai wajar lebih rendah dari nilai perkiraan senilai 16.865.000 .

C.17. JALAN, IRIGASI, DAN JARINGAN

Jalan, Irigasi, dan Jaringan
Rp92.560.917.102,00

Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp92.560.917.102,00 dan Rp106.092.953.219,00. Rincian nilai Jalan, Irigasi, dan Jaringan berdasarkan unit Eselon I adalah sebagai berikut:

Tabel 111
Perbandingan Nilai Jalan, Irigasi dan Jaringan Berdasarkan Eselon I
Per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Unit Eselon I	Jalan. Irigasi dan Jaringan	
	31 Desember 2021	31 Desember 2020
Sekretariat Jenderal	17.518.064.000,00	8.974.661.000,00
Inspektorat Jenderal	0,00	0,00
Ditjen Administrasi Hukum Umum	857.380.960,00	857.380.960,00
Ditjen Pemasyarakatan	36.449.182.548,00	58.189.366.665,00
Ditjen Imigrasi	27.467.144.601,00	27.658.399.601,00
Ditjen Kekayaan Intelektual	0,00	0,00
Ditjen Peraturan Perundang-undangan	873.500.000,00	968.500.000,00
Ditjen Hak Asasi Manusia	0,00	0,00
Badan Pembinaan Hukum Nasional	0,00	0,00



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Catatan Atas Laporan Keuangan – *Penjelasan atas Pos-Pos Neraca*
Per 31 Desember Tahun Anggaran 2021 (*Audited*)
Dengan Angka Perbandingan 31 Desember Tahun Anggaran 2020
(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Balitbang Hukum dan HAM	0,00	0,00
BPSDM Hukum dan HAM	9.395.644.993,00	9.444.644.993,00
Total	92.560.917.102,00	106.092.953.219,00

Terdapat perubahan nilai nilai Jalan,Irigasi,dan Jaringan beserta Akumulasi Penyusutannya dari data Laporan Keuangan tahun 2021 (*Unaudited*) dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 112
Total Koreksi Nilai Jalan, Irigasi, dan Jaringan Serta Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Uraian	Unaudited	Koreksi	Audited
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	92.900.995.102,00	(340.078.000,00)	92.560.917.102,00
Akumulasi Jalan, Irigasi, dan Jaringan	(55.857.026.977,00)	311.607.594,00	(55.545.419.383,00)

Tabel 113
Koreksi Nilai Jalan, Irigasi, dan Jaringan Per Satuan Kerja

No	Satker	Nilai Jalan, Irigasi dan Jaringan		
		Unaudited	Koreksi	Audited
1.	Lapas Lubuk Pakam	340.078.000,00	(340.078.000,00)	0,00

Tabel 114
Koreksi Nilai Akumulasi Penyusutan Jalan Berdasarkan Satuan Kerja

No	Satker	Akm. Penyusutan Jalan		
		Unaudited	Koreksi	Audited
1	Lapas Lubuk Pakam	(307.689.618,00)	307.689.618,00	0,00

Tabel 115
Koreksi Nilai Akumulasi Penyusutan Irigrasi Berdasarkan Satuan Kerja

No	Satker	Akm. Penyusutan Irigasi		
		Unaudited	Koreksi	Audited
1	Lapas Tobello	(3.013.145,00)	3.013.145,00	0,00
2	Rutan Balige	(904.831,00)	904.831,00	0,00

Koreksi tersebut merupakan perbaikan pencatatan Jalan yang awalnya dicatat secara terpisah, kemudian dilakukan penggabungan pencatatan dengan bangunan utama



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Catatan Atas Laporan Keuangan – *Penjelasan atas Pos-Pos Neraca*
Per 31 Desember Tahun Anggaran 2021 (*Audited*)
Dengan Angka Perbandingan 31 Desember Tahun Anggaran 2020
(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Rincian Mutasi Jalan, Irigasi, dan Jaringan tersebut disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 116
Rincian Mutasi Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 31 Desember 2021

Uraian	Intrakomptabel
Saldo per 31 Desember 2020	106.092.953.219,00
Mutasi tambah :	
Pembelian	3.144.583.500,00
Transfer Masuk	139.000.000,00
Hibah Masuk	246.667.000,00
Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP	2.895.124.500,00
Reklasifikasi Masuk	7.306.044.164,00
Perolehan Lainnya	3.663.102.894,00
Perolehan Hasil Tindak Lanjut Normalisasi	394.078.000,00
Pengembangan Nilai Aset	8.574.099.500,00
Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas	1.256.438.035,00
Total Mutasi Tambah :	27.619.137.593,00
Mutasi Kurang :	
Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya	87.563.000,00
Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas	8.304.686,00
Transaksi Normalisasi BMN	394.078.000,00
Koreksi Kesalahan Input IP	75.063.000,00
Penghapusan	53.978.000,00
Reklasifikasi Keluar	4.190.484.928,00
Koreksi Pencatatan	36.341.702.096,00
Total Mutasi Kurang :	41.151.173.710,00
Saldo per 31 Desember 2021	92.560.917.102,00
Akumulasi Penyusutan 31 Desember 2021	(55.545.419.383,00)
Nilai Buku per 31 Desember 2021	37.015.497.719,00

Net Mutasi Jalan,Irigasi,Jaringan Tahun 2021 adalah sebesar Rp13.532.036.117,00 dimana pengurangan terbesar terdapat pada transaksi Koreksi Pencatatan.

Penjelasan Sebaran Transaksi sebagai berikut :

- **Mutasi Tambah**

- a. Pembelian sebesar Rp3.144.583.500,00 terdapat pada Sekretariat Jenderal berupa pembangunan jalan dan saluran air di Komplek Rumah Dinas Gunung Sindur.



- b. Transfer Masuk sebesar Rp139.000.000,00 terdapat pada Lapas Batu berupa Jalan Khusus di dalam kompleks Rumah Khusus di Nusakambangan dari Kementerian PUPR seluas 226 m sesuai dengan BAST No : 10/BA/Sj/2020/SEK-PB.04.01-185 Tanggal 18 Juni 2021.

Terdapat selisih nilai transfer masuk dan transfer keluar senilai Rp139.000.000,00 dengan penjelasan:

Transfer Keluar	Transfer Masuk	Selisih	Keterangan
0,00	139.000.000,00	139.000.000,00	Selisih disebabkan adanya transfer masuk berupa Jalan Khusus dari Kementerian PUPR ke Lapas Batu

- c. Hibah Masuk sebesar Rp246.667.000,00 terdapat pada Lapas Banjar berupa irigasi dengan Nomor BAST: 028/39a BAST/ DPUPRKP/2021 tanggal: 01 Juli 2021. instansi pemberi hibah: Pemerintah Kota Banjar.
- d. Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP sebesar Rp2.895.124.500,00 terdapat pada Lapas Leok berupa pembangunan Bangunan Talud Penahan.
- e. Reklasifikasi Masuk sebesar Rp7.306.044.164,00 terdapat pada :
- Lapas Perempuan Ternate sebesar Rp6.432.544.164,00 berupa penyesuaian pencatatan berupa pemecahan pencatatan NUP atas penyelesaian KDP tahun 2021, salah satunya Bangunan Talud Penahan.
 - Ditjen PP sebesar Rp873.500.000,00 berupa instalasi gardu listrik kapasitas sedang setelah dikurangi nilai Transformator (kondisi rusak berat) yang sebelumnya tergabung di dalamnya sebesar Rp 95.000.000,00.
- f. Perolehan Lainnya sebesar Rp3.663.102,894,00 terdapat pada :
- Lapas Karanganyar Nusakambangan sebesar Rp1.822.688.386,00 berupa perolehan GRBB PT. SBI berupa 3 unit Bangunan Talud Penahan



- Lapas Besi sebesar Rp434.130.400,00 berupa perolehan GRBB PT. SBI berupa 1 unit Bangunan Talud Penahan dan 1 saluran drainage
 - Lapas Narkotika Nusakambangan sebesar Rp429.731.500,00 berupa perolehan GRBB PT SBI berupa perbaikan jalan masuk menuju kantor lapas
 - Lapas Terbuka Nusakambangan sebesar Rp418.730.400 berupa perolehan GRBB PT SBI Berupa 1 unit tanggul penahan banjir (bangunan pengaman banjir)
 - Lapas Karanganyar Nusakambangan sebesar Rp324.233.252,00 berupa perolehan GRBB PT SBI berupa jalan menuju menara pengawas
 - g. Perolehan Hasil Tindak Lanjut Normalisasi sebesar Rp394.078.000,00 berupa tindaklanjut K3 terdapat pada :
 - Lapas Perempuan Malang sebesar Rp287.623.000,00
 - Lapas Muara Dua sebesar Rp77.702.000,00
 - Lapas Permisian sebesar Rp28.753.000,00
 - h. Pengembangan Nilai Aset sebesar Rp8.574.099,500,00 terdapat pada :
 - Sekretariat Jenderal sebesar Rp7.977.129.500,00 berupa pengembangan jalan dan saluran air di Komplek Gunung Sindur.
 - Ditjen Pemasyarakatan sebesar Rp596.970.000,00 berupa pemeliharaan Jl. Kamboja-Lapas Karanganyar Nusakambangan KM0 s.d KM 7.5 Tahun 2021.
 - i. Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas sebesar Rp1.256.438.035,00 terdapat pada Lapas Karanganyar Nusakambangan berupa koreksi penggabungan Bangunan Talud Penahan GRBB tahun 2021 ke Bangunan Talud Penahan yang sudah ada.
- **Mutasi Kurang**
- a. Reklasifikasi dari Aset Tetap ke Aset Lainnya sebesar Rp87.563.000,00 terdapat pada :
 - Lapas Sukamiskin sebesar Rp87.013.000,00 berupa objek BTM berdasarkan Reviu Tim Inspektorat Jenderal, sudah melakukan permintaan koordinasi tindak lanjut dengan nomor W11.PAS.PAS1.UM.01.01 – 0578



- Lapas Wanita Medan sebesar Rp550.000,- berupa penghentian Saluran Lalu Lintas Air yang merupakan BTB, yang sudah diusulkan penghapusan.
- b. Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas sebesar Rp8.304.686,00 terdapat pada :
 - Lapas Perempuan Ternate sebesar Rp5.272.002,00 berupa tindak lanjut Temuan Inspektorat Jenderal Tahun 2020 berupa kelebihan pembayaran Pembangunan Gedung beserta fasilitasnya.
 - LPKA Palu sebesar Rp3.032.684,00 berupa penyesuaian nilai pada Saluran Pembuang Air Buangan Domestik sebesar Rp952.435,00 dan Instalasi Air Sumber/Mata Air Kapasitas Sedang sebesar Rp2.080.249,00 karena temuan Inspektorat Tahun 2019.
- c. Transaksi Normalisasi BMN sebesar Rp394.078.000,00 berupa tindak lanjut K3 terdapat pada :
 - Lapas Perempuan Malang sebesar Rp287.623.000,00
 - Lapas Muara Dua sebesar Rp77.702.000,00
 - Lapas Permisian sebesar Rp28.753.000,00
- d. Koreksi Kesalahan Input IP sebesar Rp75.063.000,00 terdapat pada Lapas Gunung Sugih
- e. Reklasifikasi Keluar sebesar Rp3.573.102.928,00 terdapat pada :
 - Satker Ditjen PP sebesar Rp968.500.000,00 berupa Instalasi Gardu Listrik Kapasitas Sedang yang semula tercatat juga Transformator senilai Rp95.000.000,00 sesuai BA Reklas Keluar dan Masuk No: PPE.I.PB.05.02-161 Tanggal 1 September 2021
 - Lapas Perempuan Palu sebesar Rp432.413.628,00 berupa Bangunan Air Bersih/Air Baku menjadi Bangunan Lainnya
 - Lapas Narkotika Sawah Lunto sebesar Rp360.952.000,00 berupa koreksi kode dari bangunan penampung air baku 5.02.06.05.005 menjadi bangunan lainnya 4.01.01.30.999



- Lapas Cilacap sebesar Rp231.024.000,00 berupa koreksi kode dari bangunan menara/ bak penampungan /reservoir air minum 5.02.06.05.008 menjadi bangunan lainnya 4.01.01.30.999
- Rutan Siak Sri Indrapura sebesar Rp210.887.300,00 berupa koreksi kode dari 5.02.06.01.003 Bak Penyimpanan / Tower Air Baku menjadi 4.01.01.30.999 Bangunan Lainnya

Terdapat selisih nilai reklasifikasi masuk dan reklasifikasi keluar senilai Rp3.732.941.236,00 dengan penjelasan:

Reklasifikasi Keluar	Reklasifikasi Masuk	Selisih	Keterangan
3.573.102.928,00	7.306.044.164,00	3.732.941.236,00	Selisih disebabkan adanya perubahan kodefikasi Turap pada LPP Ternate dari akun Gedung dan Bangunan menjadi Irigasi serta perubahan kodefikasi Bangunan Air yang awalnya tercatat sebagai Irigasi menjadi Bangunan Lainnya dalam kelompok Gedung dan Bangunan

- f. Penghapusan sebesar Rp53.978.000,00 terdapat pada LPKA Pangkalpinang.
- g. Koreksi Pencatatan sebesar Rp36.672.984.096,00 terdapat pada:
 - Lapas Karanganyar Nusakambangan sebesar Rp9.528.744.461,00 berupa koreksi 11 NUP Bangunan Talud Penahan menambah nilai Gedung dan Bangunan
 - Lapas Leok sebesar Rp3.296.949.276,00 berupa koreksi catat Jalan Khusus Inspeksi, Jalan Khusus Pejalan Kaki, Bangunan Talud, Saluran Pembuang menambah nilai Bangunan Gedung Kantor Permanen dan Pagar Permanen
 - Lapas Malang sebesar Rp3.005.075.000,00 berupa koreksi karena kodefikasi Irigasi terdiri dari 3 NUP yang kemudian dilakukan Koreksi Pencatatan dan nilai tersebut dikapitalisasikan ke Bangunan Induk terdekatnya.
 - Kanwil Papua Barat (Setjen) sebesar Rp2.522.860.000,00 berupa koreksi catat dari Talud



ditambahkan ke nilai Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan I (dicatat menambah nilai tanah/ digabungkan dengan tanah induk)

- Rutan Raha sebesar Rp1.094.576.000,00 berupa koreksi 3 NUP Irigasi menambah nilai tanah.

C.18. ASET TETAP LAINNYA

Aset Tetap Lainnya
Rp29.800.588.859,00

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Termasuk ke dalam aset tetap lainnya adalah aset tetap dalam renovasi. Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2021 dan 30 Desember 2020 sebesar Rp29.800.588.859,00 dan Rp26.397.569.384,00.

Rincian nilai Aset Tetap Lainnya berdasarkan unit Eselon I ialah sebagai berikut:

Tabel 117
Rincian Nilai Aset Tetap Lainnya Berdasarkan Eselon I
Per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Unit Eselon I	Aset Tetap lainnya	
	31 Desember 2021	31 Desember 2020
Sekretariat Jenderal	6.359.372.197,00	6.474.962.515,00
Inspektorat Jenderal	43.333,00	792.871.863,00
Ditjen Administrasi Hukum Umum	554.673.112,00	545.215.227,00
Ditjen Pemasyarakatan	13.690.014.170,00	8.762.658.750,00
Ditjen Imigrasi	3.370.835.416,00	3.821.145.770,00
Ditjen Kekayaan Intelektual	657.349.375,00	882.341.560,00
Ditjen Peraturan Perundang-undangan	413.755.982,00	413.755.982,00
Ditjen Hak Asasi Manusia	526.914.963,00	526.914.963,00
Badan Pembinaan Hukum Nasional	1.041.978.369,00	992.050.812,00
Balitbang Hukum dan HAM	213.007.945,00	213.007.945,00
BPSDM Hukum dan HAM	2.972.643.997,00	2.972.643.997,00
Total	29.800.588.859,00	26.397.569.384,00

Aset Tetap Lainnya terdiri dari Aset Tetap Renovasi (ATR) dan Aset Tetap Lainnya (ATL). Rincian Aset Tetap Lainnya dapat dilihat pada tabel berikut:



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Catatan Atas Laporan Keuangan – *Penjelasan atas Pos-Pos Neraca*
Per 31 Desember Tahun Anggaran 2021 (*Audited*)
Dengan Angka Perbandingan 31 Desember Tahun Anggaran 2020
(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Tabel 118
Rincian Aset Tetap Lainnya Berdasarkan Jenis Aset
Per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Jenis Aset	31 Desember 2021	31 Desember 2020
Aset Tetap Renovasi	4.547.890.517,00	4.203.310.422,00
Aset Tetap Lainnya	25.252.698.342,00	22.194.258.962,00
Total	29.800.588.859,00	26.397.569.384,00

C.18.1 ASET TETAP RENOVASI (ATR)

Aset Tetap Renovasi
Rp4.547.890.517,00

Saldo Aset Tetap Renovasi (ATR) per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 sebesar Rp4.547.890.517,00 dan Rp4.203.310.422,00.

Rincian nilai Aset Tetap Renovasi berdasarkan unit Eselon I ialah sebagai berikut:

Tabel 119
Rincian Nilai Aset Tetap Renovasi Berdasarkan Eselon I
Per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Unit Eselon I	Aset Tetap Renovasi	
	31 Desember 2021	31 Desember 2020
Sekretariat Jenderal	1.325.360.000,00	1.575.360.000,00
Inspektorat Jenderal	0,00	766.814.039,00
Ditjen Administrasi Hukum Umum	0,00	0,00
Ditjen Pemasyarakatan	2.190.848.550,00	49.218.400,00
Ditjen Imigrasi	1.031.681.967,00	1.586.925.798,00
Ditjen Kekayaan Intelektual	0,00	224.992.185,00
Ditjen Peraturan Perundang-undangan	0,00	0,00
Ditjen Hak Asasi Manusia	0,00	0,00
Badan Pembinaan Hukum Nasional	0,00	0,00
Balitbang Hukum dan HAM	0,00	0,00
BPSDM Hukum dan HAM	0,00	0,00
Total	4.547.890.517,00	4.203.310.422,00

Rincian Mutasi Aset Tetap Renovasi disajikan dalam tabel berikut:



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Catatan Atas Laporan Keuangan – *Penjelasan atas Pos-Pos Neraca*
Per 31 Desember Tahun Anggaran 2021 (Audited)
Dengan Angka Perbandingan 31 Desember Tahun Anggaran 2020
(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Tabel 120

Rincian Transaksi Mutasi Aset Tetap Renovasi Per 31 Desember 2021

Uraian	Intrakomptabel
Saldo per 31 Desember 2020	4.203.310.422,00
Mutasi tambah :	
Pembelian	4.879.574.891,00
Transfer Masuk	2.190.848.550,00
Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP	6.483.121.601,00
Penyelesaian Pembangunan Langsung	1.747.514.456,00
Perolehan Hasil Tindak Lanjut Normalisasi	160.616.000,00
Pengembangan Nilai Aset	1.610.060.600,00
Total Mutasi Tambah :	17.071.736.098,00
Mutasi Kurang :	
Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas	6.450.269,00
Reklasifikasi Keluar	0,00
Penghentian Aset dari Penggunaan	0,00
Transaksi Normalisasi BMN	160.616.000,00
Penghapusan	975.933.343,00
Transfer Keluar	10.235.885.091,00
Koreksi Pencatatan	5.348.271.300,00
Total Mutasi Kurang :	16.727.156.003,00
Nilai Buku per 31 Desember 2021	4.547.890.517,00

Penjelasan Sebaran Transaksi:

- **Mutasi Tambah**

- a. Pembelian sebesar Rp4.879.574.891,00 terdapat pada :
 - Ditjen AHU sebesar Rp2.965.265.351,00 berupa pekerjaan renovasi Rumah Dinas BHP Semarang di Jl. Pamularsi-Semarang senilai Rp392.998.755,00 dan renovasi Rumah Dinas BHP Surabaya senilai Rp2.572.266.596,00
 - Bapas Yogyakarta sebesar Rp866.519.000,00 berupa optimalisasi pembangunan pada Lapas Sleman berupa bangunan steril area senilai Rp98.749.000,00, Rutan Wates berupa renovasi ruang pembinaan senilai Rp191.077.000,00, LPKA Yogyakarta



- berupa pembangunan lapangan terbuka senilai Rp199.966.000,00, Rupbasan Yogyakarta berupa renovasi gudang senilai Rp198.877.000,00 dan Rupbasan Wonosari berupa renovasi pagar gedung dan pembangunan drainage senilai Rp277.850.000,00
- Ditjen KI sebesar Rp656.376.040,00 berupa realisasi atas pekerjaan penataan ruang kerja Ditjen KI di Gedung Sentra Mulia Ditjen Imigrasi dan penataan taman di BPSDM Hukum dan HAM
 - Satker Inspektorat Jenderal sebesar Rp198.997.000,00 terdapat pada merupakan renovasi auditorium dan relayout ruang Auditor Utama di Gedung Sentra Mulia (BMN Ditjen Imigrasi), rencana diserahkan kepada Ditjen Imigrasi pada November 2021.
 - Sekretariat Jenderal sebesar Rp192.417.500,00 berupa konstruksi renovasi Rumah Jabatan Menteri Hukum dan HAM.
- b. Transfer Masuk sebesar Rp2.190.848.550,00 terdapat pada Lapas Abepura berupa penerimaan Gedung dan Bangunan dari PUPR, seharusnya merupakan transfer Gedung dan Bangunan, karena bangunan yang dijadikan ATR oleh Kementerian PUPR telah dirobohkan dan telah terbit SK Penghapusan, namun pihak Kementerian PUPR tidak menyanggupi hal tersebut karena PUPR menggunakan akun Belanja Modal Lainnya (536111) dan tidak bisa dilakukan ralat akun. Sehingga berdasarkan keterangan tersebut, maka Lapas Abepura tetap mencatat sebagai ATR dan akan melakukan perbaikan pada Semester berikutnya.
- c. Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP sebesar Rp6.483.121.601,00 terdapat pada :
- Kanwil Sumatera Barat (Setjen) Rp5.098.271.300,00 berupa Perolehan BMN



- melalui Penyelesaian Pembangunan dengan KDP menjadi Aset Tetap Renovasi sebagai tindak lanjut atas penyelesaian KDP Sumbar terdiri atas : 1. tanah dalam pengerjaan KDP Talu (Rp875.476.000,00) 2. tanah dalam pengerjaan KDP Rutan Sawahlunto (Rp884.161.000,00) 3. tanah dalam Pengerjaan KDP Rutan Padang (Rp872.344.000,00) menjadi Tanah dalam Renovasi serta JIJ dalam Pengerjaan KDP Rutan Padang (Rp2.466.290.300,00) menjadi JIJ dalam Renovasi berdasarkan Berita Acara Koreksi Nilai BMN Nomor : W3.PB.05.05-01 tanggal 21 Desember 2021.
- Ditjen AHU sebesar Rp964.160.789,00 berupa renovasi ruang kerja Wakil Menteri di Sentra Mulia
 - Kanim Blitar sebesar Rp420.689.512,00 berupa renovasi gedung dan bangunan (Ruang Tunggu) milik Pemerintah Kabupaten Blitar Tahun 2021
- d. Penyelesaian Pembangunan Langsung sebesar Rp1.747.514.456,00 terdapat pada :
- Ditjen Pemasyarakatan sebesar Rp1.622.593.456,00 berupa renovasi Rumah Dinas Lapas Pasir Putih Nusakambangan Tipe 54 3 unit dan tipe 36 10 unit
 - Lapas Semarang sebesar Rp124.921.000,00 berupa penyelesaian pembangunan pagar Bapas Klaten senilai Rp99.763.000,00 dan renovasi ruang pelayanan kantor wilayah senilai Rp25.158.000,00
- e. Perolehan Hasil Tindak Lanjut Normalisasi sebesar Rp160.616.000,00 terdapat pada Kanim Mataram berupa tindak lanjut K3
- f. Pengembangan Nilai Aset sebesar Rp1.610.060.600,00 terdapat pada Sekretariat Jenderal berupa pengembangan atas renovasi Rumah Jabatan Menteri Hukum dan HAM.



- **Mutasi Kurang**

- a. Koreksi Perubahan Nilai/Kuantitas sebesar Rp6.450.269,00 pada Inspektorat Jenderal berupa koreksi Temuan BPK atas kelebihan pembayaran atas pekerjaan penggantian vinyl pada lantai 6.
- b. Transaksi Normalisasi BMN sebesar Rp160.616.000,00 terdapat pada Kanim Mataram berupa tindak lanjut K3
- c. Penghapusan sebesar Rp975.933.343,00 terdapat pada :
 - Kanim Semarang sebesar Rp639.659.303,00 renovasi aset milik Pemerintah Kota yang digunakan untuk ULP Kanim Semarang, sudah dilakukan transfer keluar ke Pemkot secara administrasi pada tahun 2020 dan sudah keluar SK Penghapusan Nomor SEK-97.PB.06.04-118 tanggal 23 Nopember 2021
 - Kanim Batam sebesar Rp336.274.040,00 berupa penghapusan karena sebab-sebab lain dengan SK Penghapusan Nomor SEK-74.PB.06.04 Tahun 2021 tanggal 4 Oktober 2021
- d. Transfer Keluar sebesar Rp10.235.885.091,00 terdapat pada :
 - Ditjen AHU sebesar Rp3.929.426.140,00 berupa transfer ATR ke :
 1. Ditjen Imigrasi senilai Rp964.160.789,00 yang merupakan pekerjaan interior ruang wakil menteri pada Gedung Sentra Mulia;
 2. BHP Surabaya senilai Rp2.572.266.596,00 yang merupakan pekerjaan rumah dinas jabatan;
 3. BHP Semarang senilai Rp392.998.755,00 yang merupakan pekerjaan perbaikan rumah dinas jabatan.
 - Sekretariat Jenderal Rp1.802.478.100,00 berupa transfer renovasi Rumah Jabatan



- Menteri Hukum dan HAM ke Sekretariat Negara.
- Ditjen Pemasyarakatan sebesar Rp1.671.811.856,00 berupa perbaikan Rumah Dinas Pegawai Lapas Pasir Putih Nusakambangan Tahun 2021 senilai Rp1.438.343.456,00, pembangunan dapur Rusus Lapas Batu senilai Rp49.218.400,00 dan renovasi Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen (dapur, klinik dan bimker) di Lapas Perempuan Tangerang senilai Rp184.250.000,00.
 - Inspektorat Jenderal sebesar Rp959.360.770,00 berupa pekerjaan Pengadaan Renovasi Ruang Auditorium, Ruang Irjen, dan Auditor Utama senilai Rp198.997.000,00 dan pekerjaan renovasi berupa pemasangan Vinyl lantai 16 senilai Rp760.363.770 pada Gedung yang tercatat sebagai BMN Ditjen Imigrasi (Sentra Mulia).
 - Ditjen KI sebesar Rp881.368.225,00 berupa transfer ATR ke BPSDM Hukum dan HAM senilai Rp198.605.000,- yang merupakan pekerjaan penataan taman dan Ditjen Imigrasi senilai Rp682.763.225,00 yang merupakan pekerjaan perbaikan lantai ruang kerja Ditjen KI di Gedung Sentra Mulia.
- e. Koreksi Pencatatan sebesar Rp5.348.271.300,00 terdapat pada :
- Kanwil Sumatera Barat (Setjen) sebesar Rp5.098.271.300,00 berupa penghapusan melalui koreksi catat atas ATR pada Kanwil Sumbar sebagai lanjutan Tindak Lanjut penyelesaian KDP Sumbar atas Aset yang telah dinilai secara wajar oleh KPKNL melalui BA Koreksi Nilai BMN Nomor : W3.PB.05.05-01 tanggal 21 Desember 2021.
 - Kanwil Papua (Setjen) Rp250.000.000,00 merupakan ATR pada Kanim Jayapura



berupa pelepasan tanah adat yang menjadi objek revaluasi dan sudah dinilai wajar.

Sampai dengan tanggal 31 Desember 2021, masih terdapat saldo ATR pada 5 satker di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM dengan penjelasan sebagai berikut :

No	Nama Satker	Penjelasan terkait ATR belum dilakukan Transfer Keluar
1	Kanwil Papua (Setjen)	merupakan pekerjaan pematangan lahan milik Pemprov Papua dimana ATR tersebut belum dapat diserahkan karena masih terkendala koordinasi dengan Pemkab Sarmi
2	Lapas Abepura	seharusnya merupakan transfer Gedung dan Bangunan, karena bangunan yang dijadikan ATR oleh Kementerian PUPR telah dirobokkan dan telah terbit SK Penghapusan, namun pihak Kementerian PUPR tidak menyanggupi hal tersebut karena PUPR menggunakan akun Belanja Modal Lainnya (536111) dan tidak bisa dilakukan ralat akun. Sehingga berdasarkan keterangan tersebut, maka Lapas Abepura tetap mencatat sebagai ATR dan akan melakukan perbaikan pada Semester berikutnya
3	Kanim Pematang Siantar	merupakan renovasi bangunan milik Pemkot Tebing Tinggi dimana saat ini masih dalam proses koordinasi dengan Pemkot Tebing Tinggi
4	Kanim Mataram	merupakan renovasi bangunan milik Pemkab Lombok Timur yang digunakan untuk Unit Layanan Paspor dimana saat ini masih dalam proses koordinasi dengan Pemkab Lombok Timur untuk menyelesaikan ATR tersebut melalui mekanisme hibah
5	Kanim Blitar	merupakan pekerjaan renovasi ruang tunggu milik Pemkab Blitar pada tahun 2021 dimana saat ini Kanim Blitar belum memiliki gedung sehingga menempati gedung milik Pemkab Blitar

C.18.2 ASET TETAP LAINNYA (ATL)

Aset Tetap Lainnya
Rp25.252.698.342,00

Aset Tetap Lainnya pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di antaranya berupa koleksi buku, rak buku, alat musik, dan monografi. Saldo Aset Tetap Lainnya



(ATL) per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2021 sebesar Rp25.252.698.342,00 dan Rp22.194.258.962,00. Rincian nilai Aset Tetap Lainnya (ATL) berdasarkan unit Eselon I ialah sebagai berikut:

Tabel 121
Rincian Nilai Aset Tetap Lainnya (ATL) Berdasarkan Eselon I
Per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Unit Eselon I	Aset Tetap Lainnya (ATL)	
	31 Desember 2021	31 Desember 2020
Sekretariat Jenderal	5.034.012.197,00	4.899.602.515,00
Inspektorat Jenderal	43.333,00	26.057.824,00
Ditjen Administrasi Hukum Umum	554.673.112,00	545.215.227,00
Ditjen Pemasyarakatan	11.499.165.620,00	8.713.440.350,00
Ditjen Imigrasi	2.339.153.449,00	2.234.219.972,00
Ditjen Kekayaan Intelektual	657.349.375,00	657.349.375,00
Ditjen Peraturan Perundang-undangan	413.755.982,00	413.755.982,00
Ditjen Hak Asasi Manusia	526.914.963,00	526.914.963,00
Badan Pembinaan Hukum Nasional	1.041.978.369,00	992.050.812,00
Balitbang Hukum dan HAM	213.007.945,00	213.007.945,00
BPSDM Hukum dan HAM	2.972.643.997,00	2.972.643.997,00
Total	25.252.698.342,00	22.194.258.962,00

Terdapat perubahan nilai Aset Tetap Lainnya beserta Akumulasi Penyusutannya dari data Laporan Keuangan tahun 2021 (*Unaudited*) dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 122
Total Koreksi Nilai Aset Tetap Lainnya dan Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya

Uraian	Unaudited	Koreksi	Audited
Aset Tetap Lainnya	25.202.247.240,00	50.451.102,00	25.252.698.342,00
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	(4.605.965.283,00)	(14.163.000,00)	(4.620.128.283,00)

Tabel 123
Koreksi Nilai Aset Tetap Lainnya Berdasarkan Satuan Kerja

No	Satker	Nilai Aset Tetap Lainnya		
		Unaudited	Koreksi	Audited
1	RUMAH TAHANAN NEGARA PALEMBANG	39.595.505,00	105.000,00	39.700.505,00



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Catatan Atas Laporan Keuangan – *Penjelasan atas Pos-Pos Neraca*
Per 31 Desember Tahun Anggaran 2021 (*Audited*)
Dengan Angka Perbandingan 31 Desember Tahun Anggaran 2020
(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2	LEMBAGA PEMASYARAKATAN TOLI-TOLI	70.112.742,00	2.275.000,00	72.387.742,00
3	LAPAS BANGKO	0,00	15.663.000,00	15.663.000,00
4	RUMAH TAHANAN NEGARA MANADO	4.241.000,00	2.809.250,00	7.050.250,00
5	RUMAH TAHANAN NEGARA BATURAJA	0,00	25.000,00	25.000,00
6	LEMBAGA PEMASYARAKATAN BESI	2.482.860,00	2.750.000,00	5.232.860,00
7	KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI TEMBAGAPURA	3.638.725,00	12.200.000,00	15.838.725,00
8	LEMBAGA PEMASYARAKATAN SRAGEN	88.749.460,00	13.200.000,00	101.949.460,00
9	LEMBAGA PEMASYARAKATAN SUKAMISKIN	16.500.000,00	5.000.000,00	21.500.000,00
10	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM UJUNG PANDANG	145.437.950,00	(51.150,00)	145.386.800,00
11	LEMBAGA PEMASYARAKATAN WANITA MEDAN	133.365.274,00	(3.000.000,00)	130.365.274,00
12	LEMBAGA PEMASYARAKATAN PANGKALAN BUN	23.895.465,00	135.000,00	24.030.465,00
13	LAPAS SEKAYU	11.920.000,00	360.000,00	12.280.000,00
14	RUMAH TAHANAN NEGARA SIDIKALANG	13.190.284,00	(519.998,00)	12.670.286,00
15	CABANG RUMAH TAHANAN NEGARA TANJUNG BALAI KARIMUN	700.000,00	(700.000,00)	0,00
16	LEMBAGA PEMASYARAKATAN ANAK TOMOHON	36.692.000,00	200.000,00	36.892.000,00

Tabel 124

Koreksi Nilai Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya Berdasarkan Satuan Kerja

No	Satker	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya		
		Unaudited	Koreksi	Audited
1	Lapas Sukamiskin	(15.000.000,00)	(2.500.000,00)	(17.500.000,00)
2	Lapas Bangko	0,00	(15.663.000,00)	(15.663.000,00)
3	Kanwil Kalimantan Timur (Setjen)	(4.000.000,00)	4.000.000,00	0,00

Koreksi tersebut merupakan dampak tindak lanjut terhadap hasil Validasi BMN 2021 berupa Aset Tetap Lainnya serta



perbaikan pencatatan BMN berupa Aset Tetap Lainnya yang sebelumnya tercatat sebagai Peralatan dan Mesin.

Rincian Mutasi Aset Tetap Lainnya tersebut disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 125

Rincian Transaksi Mutasi Aset Tetap Lainnya Per 31 Desember 2021

Uraian	Intrakomptabel
Saldo per 31 Desember 2020	22.194.258.962,00
Mutasi tambah :	
Pembelian	382.847.642,00
Transfer Masuk	6.887.671.185,00
Hibah Masuk	523.803.800,00
Reklasifikasi Masuk	189.648.000,00
Reklasifikasi Dari Aset Lainnya ke Aset Tetap	7.320.429,00
Perolehan Tindak Lanjut Normalisasi	821.858.376,00
Total Mutasi Tambah :	8.813.149.432,00
Mutasi Kurang :	
Reklas dari Aset Tetap ke Aset Lainnya	1.067.388.122,00
Transaksi Normalisasi BMN	787.415.145,00
Transfer Keluar	3.754.763.185,00
Reklasifikasi Keluar	105.483.600,00
Koreksi Pencatatan	39.660.000,00
Total Mutasi Kurang :	5.754.710.052,00
Saldo per 31 Desember 2021	25.252.698.342,00
Akumulasi Penyusutan 31 Desember 2021	(4.620.128.283,00)
Nilai Buku per 31 Desember 2021	20.632.570.059,00

Penjelasan Sebaran Transaksi:

● **Mutasi Tambah**

- a. Pembelian sebesar Rp382.847.642,00 diantaranya terdapat pada:
 - Ditjen Imigrasi sebesar Rp159.049.000,00 berupa pembelian alat musik
 - BPHN sebesar Rp49.927.557,00 berupa pembelian 180 buah monografi.
 - Lapas Tenggarong sebesar Rp29.971.200,00 yang merupakan pembelian alat musik.



- Kanwil Jawa Tengah (BPHN) sebesar Rp19.950.000,00 berupa pembelian monografi sebanyak 88 buah untuk JDIH.
- Kanwil NTB (BPHN) sebesar Rp18.734.000,00 merupakan pembelian monografi sebanyak 204 buah buku.
- b. Transfer Masuk sebesar Rp6.887.671.185,00 diantaranya terdapat pada:
 - Ditjen Pemasyarakatan sebesar Rp3.132.908.000,00 berupa monografi dari Perpustakaan sejumlah 45.000 buku
 - Rutan Wonosari sebesar Rp486.879.800,00 berupa berupa 1 (satu) perangkat Gamelan Perunggu laras pelog slendro dari Kanwil Yogyakarta (Setjen)
 - LPKA Jayapura sebesar Rp69.620.256,00 berupa buku dari Perpustakaan
 - LPKA Samarinda sebesar Rp69.620.176,00 berupa buku sebanyak 1.000 buah dari Ditjen Pemasyarakatan (Perpustakaan).
 - LPKA Gorontalo sebesar Rp69.620.176,00 berupa monografi dari Perpustakaan.
- c. Hibah Masuk sebesar Rp523.803.800,00 terdapat pada :
 - Kanwil Yogyakarta (Setjen) sebesar Rp486.879.800,00 berupa 1 (satu) perangkat Gamelan Perunggu laras pelog slendro dengan BAST No: 430/100434 tanggal 15 Desember 2021
 - Lapas Pangururan sebesar Rp30.525.000,00 berupa hibah alat musik dari Dinas Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Pemkab Samosir pada tanggal 20 April 2021.
 - Kanwil Jawa Tengah (Setjen) sebesar Rp6.399.000 berupa Drum electric dari BJB dengan BAST No:003/SEM-KON/BA/2021
- d. Reklasifikasi Masuk sebesar Rp189.648.000,00 terdapat pada :
 - Lapas Pemuda Tangerang sebesar Rp84.000.000,00 berupa buku sebanyak 659 buah yang sebelumnya masuk persediaan, dilakukan reklasifikasi ke SIMAK menjadi monografi .



- Lapas Jember sebesar Rp60.755.000,00 berupa reklasifikasi masuk kamera digital yang semula tercatat sebagai referensi.
- Lapas Bangko sebesar Rp15.663.000,00 berupa reklasifikasi Alat Musik Lainnya (Keyboard) ke Alat Musik Modern/Band
- Lapas Sragen sebesar Rp13.200.000,00 berupa reklasifikasi Piala dan Piagam yang awalnya tercatat sebagai Peralatan dan Mesin menjadi Barang Koleksi Non Budaya Lainnya.
- Lapas Kuala Kapuas sebesar Rp7.200.000,00 berupa reklasifikasi Piala menjadi Barang Koleksi Non Budaya Lainnya.
- e. Reklasifikasi Dari Aset Lainnya ke Aset Tetap sebesar 7.320.429,00 terdapat pada:
 - Lapas Tondano sebesar Rp7.038.000,00 berupa Alat Musik Modern/Band yang masih bisa digunakan
 - Lapas Calang sebesar Rp272.429,00 berupa Monografi yang kondisinya masih bisa digunakan
 - Lapas Sragen sebesar Rp10.000,00 berupa wayang kulit sebagai tindak lanjut normalisasi
- f. Perolehan Tindak Lanjut Normalisasi sebesar Rp821.858.376,00 berupa tindak lanjut K3 terdapat pada :
 - LPKA Blitar sebesar Rp207.040.000,00
 - Kanwil Yogyakarta (Setjen) Rp140.072.500,00
 - Lapas Anak Tanjung Pati sebesar Rp58.458.449,00
 - Lapas Anak Kutoarjo sebesar Rp49.200.000,00
 - Kanwil Sulawesi Barat (DIPA Setjen) sebesar Rp49.000.000,00

● **Mutasi Kurang**

- a. Reklasifikasi Dari Aset Tetap Ke Aset Lainnya sebesar Rp1.067.388.122,00 diantaranya terdapat pada:
 - LPKA Jakarta sebesar Rp750.000.000,00 merupakan penghentian aset dari penggunaan berupa peralatan band yang akan diusulkan penghapusan di tahun 2021.
 - Lapas Anak Muara Bulian sebesar Rp34.458.000,00 berupa tindak lanjut inventarisasi BMN penghentian Alat Musik Modern/Band



- Inspektorat Jenderal sebesar Rp26.014.491,00 berupa Monografi (Buku) yang kondisinya sudah Rusak Berat sebanyak 348 buah sebagai tindak lanjut Hasil Inventarisasi. Selanjutnya akan dilakukan proses Penghapusan.
- Rutan Surabaya sebesar Rp25.000.000,00 merupakan penghentian aset dari penggunaan berupa Alat Musik Modern Band berdasarkan BA No: W15.PAS.PAS.25.PB.06.04-2998 Tanggal 24 September 2021.
- Lapas Wahai sebesar Rp25.000.000,00 berupa tindak lanjut inventarisasi penghentian monografi karena tidak ditemukan
- b. Transaksi Normalisasi BMN sebesar Rp787.415.145,00 berupa tindak lanjut K3 terdapat pada :
 - LPKA Blitar sebesar Rp207.040.000,00
 - Kanwil Yogyakarta (Setjen) sebesar Rp140.072.500,00
 - Lapas Anak Tanjung Pati sebesar Rp58.458.449,00
 - Lapas Anak Kutoarjo sebesar Rp49.200.000,00
 - Kanwil Sulawesi Barat (DIPA Setjen) sebesar Rp49.000.000,00
 - Terdapat selisih antara Transaksi Normalisasi dengan Perolehan Hasil Tindak Lanjut Normalisasi sebesar Rp 34.443.231,00 . Selisih tersebut secara umum disebabkan oleh : 1) Adanya transaksi Normalisasi (BMN yang Dihentikan); 2) Adanya transaksi Normalisasi yang masuk kelompok Ekstrakomptabel; 3) Adanya transaksi Normalisasi atau Normalisasi (BMN yang Dihentikan) pada tahun anggaran sebelumnya.
- c. Transfer Keluar sebesar 3.754.763.185,00 diantaranya terdapat pada:
 - Ditjen Pemasarakatan sebesar Rp3.132.908.000,- berupa monografi dari Perpustakaan ke satker-satker Pemasarakatan
 - Kanwil Yogyakarta (Setjen) sebesar Rp486.879.800,00 berupa 1 (satu) perangkat Gamelan Perunggu laras pelog slendro ke Rutan Wonosari



- Kanwil Jawa Tengah (BPHN) sebesar Rp19.950.000,00 berupa monografi sebanyak 88 buah untuk JDIH ke Kanwil Jawa Tengah (Setjen).
- Kanwil NTB (BPHN) sebesar Rp18.734.000,00 yang merupakan transfer ke Kanwil NTB (Setjen) berupa buku.
- Kanwil Kepulauan Riau (BPHN) sebesar Rp10.324.500,00 yang merupakan transfer ke Kanwil Kepulauan Riau (Setjen) berupa buku.

Terdapat selisih nilai transfer masuk dan transfer keluar senilai Rp 3.132.908.000,00 dengan penjelasan:

Transfer Keluar	Transfer Masuk	Selisih	Keterangan
3.754.763.185,00	6.887.671.185,00	3.132.908.000,00	Selisih disebabkan adanya transfer masuk berupa Buku Perpustakaan yang diterima oleh Ditjen Pemasarakatan dari Perpunas RI

- d. Reklasifikasi Keluar sebesar Rp105.483.600,00 terdapat pada:
- Lapas Jember sebesar Rp60.755.000,00 berupa reklasifikasi keluar dari referensi ke kamera digital.
 - Lapas Bangko sebesar Rp15.663.000,00 berupa reklasifikasi Alat Musik Lainnya (Keyboard) ke Alat Musik Modern/Band
 - Rupbasan Rengat sebesar Rp10.000.000,00 berupa penyesuaian pencatatan BMN berupa monografi ke PC Unit karena kesalahan kodefikasi.
 - Rudenim Jakarta sebesar Rp9.570.000,00 berupa penyesuaian pencatatan BMN berupa monografi ke PC Unit karena kesalahan kodefikasi.
 - Lapas Pemuda Plantungan sebesar Rp9.246.600,00 merupakan koreksi kesalahan kode barang berupa P.C Unit perolehan 2020 dicatat sebagai monografi.

Terdapat selisih nilai reklasifikas masuk dan reklasifikasi keluar senilai Rp84.164.400,00 dengan penjelasan:



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Catatan Atas Laporan Keuangan – *Penjelasan atas Pos-Pos Neraca*
Per 31 Desember Tahun Anggaran 2021 (*Audited*)
Dengan Angka Perbandingan 31 Desember Tahun Anggaran 2020
(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Reklasifikasi Keluar	Reklasifikasi Masuk	Selisih	Keterangan
105.483.600,00	189.648.000,00	84.164.400,00	Selisih disebabkan adanya perubahan kodefikasi Buku Perpustakaan dari Persediaan ke Aset Tetap Lainnya; serta perubahan kodefikasi Piala dan Piagam dari Peralatan dan Mesin ke Aset Tetap Lainnya

- e. Koreksi Pencatatan sebesar Rp39.660.000,00 terdapat pada :
- Kanim Jakarta Timur sebesar Rp39.600.000,00 berupa koreksi atas Video yang merupakan jasa pembuatan video
 - Lapas Sorong sebesar Rp60.000,00 berupa koreksi atas senar gitar yang sudah rusak kemudian dicatat di Persediaan

C.19 KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan

Konstruksi Dalam Pengerjaan
Rp494.150.574.573,00

Nilai Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 sebesar Rp494.150.574.573,00 dan Rp174.381.031.855,00. Rincian nilai KDP berdasarkan unit Eselon I adalah sebagai berikut :

Tabel 126

Rincian Nilai Konstruksi Dalam Pengerjaan Berdasarkan Eselon I
Per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Unit Eselon I	Konstruksi Dalam Pengerjaan	
	31 Desember 2021	31 Desember 2020
Sekretariat Jenderal	59.047.691.402,00	23.652.458.025,00
Inspektorat Jenderal	0,00	0,00
Ditjen Administrasi Hukum Umum	0,00	0,00
Ditjen Pemasyarakatan	400.033.410.278,00	103.911.835.296,00
Ditjen Imigrasi	28.026.881.463,00	32.154.814.678,00
Ditjen Kekayaan Intelektual	84.546.000,00	14.661.923.856,00
Ditjen Peraturan Perundang-undangan	0,00	0,00
Ditjen Hak Asasi Manusia	0,00	0,00
Badan Pembinaan Hukum Nasional	0,00	0,00
Balitbang Hukum dan HAM	0,00	0,00
BPSDM Hukum dan HAM	6.958.045.430,00	0,00



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Catatan Atas Laporan Keuangan – *Penjelasan atas Pos-Pos Neraca*
Per 31 Desember Tahun Anggaran 2021 (*Audited*)
Dengan Angka Perbandingan 31 Desember Tahun Anggaran 2020
(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

TOTAL	494.150.574.573,00	174.381.031.855,00

Terdapat perubahan nilai Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) dari data Laporan Keuangan tahun 2021 (*Unaudited*) dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 127
Total Koreksi Nilai Konstruksi Dalam Pengerjaan

Uraian	Unaudited	Koreksi	Audited
Konstruksi Dalam Pengerjaan	493.599.853.876,00	550.720.697,00	494.150.574.573,00

Tabel 128
Koreksi Nilai Konstruksi Dalam Pengerjaan Berdasarkan Satuan Kerja

No	Satker	Nilai Konstruksi Dalam Pengerjaan		
		Unaudited	Koreksi	Audited
1	Ditjen Imigrasi	0,00	3.406.067.700,00	3.406.067.700,00
2	Lapas Perempuan Padang	11.885.445.539,00	1.098.119.647,00	12.983.565.186,00
3	Kanwil Sumatera Barat (Setjen)	2.805.116.950,00	5.720.000,00	2.810.836.950,00
4	Kanwil Gorontalo (Setjen)	0,00	200,00	200,00
5	Kanim Palu	24.701.832.265,00	(1.984.230.931,00)	22.717.601.334,00
6	Badiklat Sulawesi Utara	7.992.464.203,00	(1.034.418.773,00)	6.958.045.430,00
7	Kanim Semarang	1.513.281.986,00	(520.632.028,00)	992.649.958,00
8	Kanwil Maluku (Setjen)	42.806.569.035,00	(419.905.118,00)	42.386.663.917,00

Koreksi tersebut merupakan dampak tindak lanjut terhadap hasil Validasi BMN 2021 berupa KDP serta Temuan BPK yang menyatakan bahwa terdapat kurang catat atau lebih catat aset tetap berupa KDP.

Pada tanggal 31 Desember 2021, masih terdapat KDP pada 38 satuan kerja dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 129
Rincian Nilai Konstruksi Dalam Pengerjaan Berdasarkan Satuan Kerja
Per 31 Desember 2021

No	Nama Satker	Tahun KDP	Nilai KDP	Keterangan
1	Sekretariat Jenderal	2020	11.121.433.500	Dilanjutkan
2	Kanwil Sumbar	2010	2.810.836.950	Dihentikan Permanen
3	Kanwil NTT	2021	2.147.614.835	Dilanjutkan
4	Kanwil Maluku	2021	42.386.663.917	Dilanjutkan



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Catatan Atas Laporan Keuangan – *Penjelasan atas Pos-Pos Neraca*
Per 31 Desember Tahun Anggaran 2021 (*Audited*)
Dengan Angka Perbandingan 31 Desember Tahun Anggaran 2020
(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

5	Kanwil Papua	2021	283.942.000	Dilanjutkan
6	Kanwil Gorontalo	2008	200	KDP sudah selesai pada tahun 2008, namun terdapat selisih ketika dilakukan penyelesaian pembangunan pada tahun yang sama sehingga muncul Kartu KDP nilai minus. Pada tahun 2021 dilakukan perbaikan melalui Normalisasi Otomatis, namun memunculkan Saldo KDP di Neraca
7	Kanwil Pabar	2016	297.200.000	Dihentikan Sementara
8	LPKA Palu	2018	285.725.005	Dilanjutkan
9	Lapas Semarang	2020	27.222.190.692	Dilanjutkan
10	Lapas Pekalongan	2020	632.354.100	Dihentikan Sementara
11	Lapas Lhokseumawe	2021	775.377.400	Dilanjutkan
12	Lapas Bagansiapiapi	2021	9.768.678.658	Dilanjutkan
13	Lapas Jambi	2021	544.992.250	Dihentikan Sementara
14	Lapas Kotabaru	2021	615.702.972	Dihentikan Sementara
15	Lapas Luwuk	2021	564.577.700	Dilanjutkan
16	Rutan Selayar	2009	1.358.827.000	Dihentikan Permanen
17	Rutan Makale	2008	1.675.456.559	Dihentikan Permanen
18	Lapas Ende	2016	374.843.750	Dihentikan Permanen
19	Rutan Bajawa	2016	366.549.190	Dihentikan Permanen
20	Lapas Teminabuhan	2008	12.226.389.922	Dilanjutkan
21	Lapas Pria Tangerang	2021	518.936.260	Dilanjutkan
22	Lapas Anak Pekanbaru	2021	320.639.100	Dilanjutkan
23	Ditjen Pemasyarakatan	2015&2020	280.259.060.469	KDP Tahun 2015 sudah Dihentikan Permanen sedangkan KDP Tahun 2020 Dilanjutkan
24	LPP Padang	2020	12.983.565.186	Dilanjutkan
25	LPP Manokwari	2019	19.721.850.243	Dilanjutkan
26	LPN Rumbai	2021	15.143.778.621	Dilanjutkan
27	Lapas Lubuk Basung	2010	98.754.000	Dihentikan Sementara
28	Lapas Sorolangun	2011	644.896.273	Dihentikan Permanen
29	Lapas Dharmasraya	2014	2.593.236.959	Dihentikan Sementara
30	LPKA Batam	2020	11.337.027.969	Dihentikan Sementara
31	Kanim Semarang	2020	992.649.958	Selesai pada Januari 2022



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Catatan Atas Laporan Keuangan – *Penjelasan atas Pos-Pos Neraca*
Per 31 Desember Tahun Anggaran 2021 (*Audited*)
Dengan Angka Perbandingan 31 Desember Tahun Anggaran 2020
(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

32	Kanim Palu	2020	22.717.601.334	Dilanjutkan
33	Kanim Padang	2013	199.250.000	Dihentikan Permanen
34	Kanim Sibolga	2016	128.228.750	Dihentikan Permanen
35	Ditjen Imigrasi	2021	3.406.067.700	Dilanjutkan
36	Rudenim Kupang	2021	583.083.721	Dilanjutkan
37	Ditjen KI	2018	84.546.000	Dihentikan Sementara
38	Badiklat Sulut	2021	6.958.045.430	Dilanjutkan

Dari 38 satker yang terdapat saldo KDP, terdapat beberapa kondisi yaitu: dilanjutkan pekerjaan dan hal tersebut tertuang dalam Salinan DIPA di tahun 2022, dihentikan sementara akibat dampak dari refocusing anggaran di tahun 2021, belum tersedianya anggaran lanjutan pekerjaan, dan dihentikan permanen karena KDP sudah kondisi mangkrak atau rusak berat. Selain itu terdapat pekerjaan KDP yang selesai di periode Januari dan februari tahun 2022 karena mengikuti langkah-langkah akhir tahun dari Kementerian Keuangan sehingga posisi per 31 Desember 2021 tetap dicatat sebagai KDP.

Rincian Mutasi KDP disajikan dalam tabel disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 130

Rincian Mutasi Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2021

Uraian	Intrakomptabel
Saldo per 31 Desember 2020	174.381.031.855,00
Mutasi tambah :	
Saldo Awal KDP	2.233.072.815,00
Perolehan/Penambahan KDP	23.452.025.434,00
Pengembangan KDP	796.824.322.822,00
Koreksi Nilai KDP	2.189.399.000,00
SAIBA	22.470.152.788,00
Total Mutasi Tambah :	847.168.972.859,00
Mutasi Kurang :	
Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP	286.330.965.971,00
Pengembangan Melalui KDP	167.635.989.790,00
Koreksi Nilai KDP	46.264.228.202,00
Penghapusan/Penghentian KDP	19.983.913.275,00



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Catatan Atas Laporan Keuangan – *Penjelasan atas Pos-Pos Neraca*
Per 31 Desember Tahun Anggaran 2021 (*Audited*)
Dengan Angka Perbandingan 31 Desember Tahun Anggaran 2020
(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Penghapusan/Penghentian KDP (Semester II Dokumen TAYL)	7.184.332.903,00
Total Mutasi Kurang :	527.399.430.141,00
Nilai Buku per 31 Desember 2021	494.150.574.573,00

Penjelasan Sebaran Transaksi:

● **Mutasi Tambah**

- a. Saldo Awal KDP sebesar Rp2.233.072.815,00 terdapat pada :
 - Rutan Donggala sebesar Rp1.449.456.015,00
 - Kanim Palu sebesar Rp783.616.800,00
- b. Perolehan/Penambahan KDP merupakan penambahan nilai KDP dari adanya pembangunan atau perbaikan aset yang umumnya adalah berupa gedung dan bangunan yang pekerjaannya dilakukan secara bertahap serta pembayaran yang dibagi kedalam beberapa termin. Adapun perolehan/penambahan KDP sebesar Rp23.452.025.434,00 diantaranya terdapat pada:
 - Ditjen Imigrasi sebesar Rp8.912.170.000,00
 - Lapas Teminabuhan sebesar Rp7.675.352.870,00
 - Kanwil Sulawesi Selatan (Setjen) sebesar Rp692.373.020,00
 - Rutan Kabanjahe sebesar Rp412.250.850,00
 - Lapas Gunung Sugih sebesar Rp385.667.100,00
- c. Pengembangan KDP merupakan penambahan nilai KDP sebagai kelanjutan dari termin perolehan KDP serta termin-termin selanjutnya sampai KDP tersebut selesai. Adapun pengembangan KDP sebesar Rp796.824.322.822,00,00 diantaranya terdapat pada:
 - Ditjen Pemasarakatan sebesar Rp299.457.169.359,00
 - BPSDM Hukum dan HAM sebesar Rp93.628.644.363,00.
 - Kanwil Maluku (Setjen) sebesar Rp44.407.417.545,00
 - Lapas Pancur Batu sebesar Rp33.785.237.314,00
 - Rutan Donggala sebesar Rp30.678.211.000,00
- d. Koreksi Nilai KDP sebesar Rp2.189.399.000,00 terdapat pada Lapas Wahai yang merupakan perbaikan nilai pada Kartu KDP terhadap penyelesaian pembangunan gedung kantor pada bulan Maret 2021.



● **Mutasi Kurang**

- a. Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP sebesar Rp286.330.965.971,00 terdapat pada :
 - BPSDM Hukum dan HAM sebesar Rp93.636.985.363,00
 - Rutan Donggala sebesar Rp32.127.667.015,00
 - Lapas Mataram sebesar Rp25.453.738.900,00
 - Lapas Perempuan Ternate sebesar Rp24.162.176.898,00
 - Kanim Bima sebesar Rp23.651.748.524,00
- b. Pengembangan Melalui KDP sebesar Rp167.635.989.790,00,00 terdapat pada :
 - Lapas Pancur Batu sebesar Rp41.378.301.742,00
 - Rutan Kabanjahe sebesar Rp25.573.903.000,00
 - Ditjen KI sebesar Rp14.577.377.856,00
 - Lapas Balikpapan sebesar Rp11.101.982.491,00
 - Kanwil NTB (Setjen) sebesar Rp8.305.026.665,00
- c. Koreksi Nilai KDP sebesar Rp46.264.228.202,00 terdapat pada:
 - Ditjen Pemasyarakatan sebesar Rp13.981.686.712,00 berupa Bank Garansi yang diterbitkan oleh Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., Cabang Sudirman Jakarta I Nomor 0037621122100018 tanggal 21 Desember 2021 untuk pembayaran paket pekerjaan pembangunan 2 Lapas Maksimum dan 1 Lapas minimum di Pulau Nusakambangan Tahun 2021.
 - Lapas Perempuan Padang sebesar Rp11.735.827.915,00 berupa koreksi nilai KDP atas pembangunan LPP berdasarkan hasil dari persentase pekerjaan dilapangan per 31 Desember 2021
 - Ditjen Imigrasi sebesar Rp5.703.788.800,00 yang merupakan tindak lanjut temuan BPK Tahun 2020 terhadap kelebihan pembayaran dalam pekerjaan pemasangan Air Handling Unit (AHU).
 - Lapas Lubuk Basung sebesar Rp5.108.424.650,00 merupakan koreksi KDP NUP 3 sebagai tindak lanjut dari penyelesaian KDP Gedung dan Bangunan dalam pengerjaan menjadi KDP untuk 4 unit pos jaga berdasarkan BA Koreksi Nilai BMN Nomor W3.PAS.PAS9-PB.05.05-66b tanggal 30 Desember 2021.
 - Kanim Palu sebesar Rp4.100.151.641,00 karena pembayaran pekerjaan pembangunan gedung kantor per



- 31 Desember 2021 telah 100% dengan bank garansi, sementara progres pekerjaan per 31 Desember 2021 sebesar 92,11%, maka dilakukan koreksi perubahan nilai KDP, maka nilai yang terkoreksi sebesar Rp.2.115.920.710
- Kanwil Maluku (Setjen) sebesar Rp2.047.529.628,00 karena berdasarkan Surat Dirjen Perbendaharaan Nomor :S-327/PB/PB.6/2021 tanggal 31 Desember 2021 , Perlakuan Akuntansi atas Transaksi Akhir Tahun Anggaran 2021 , untuk Kanwil Maluku terdapat Koreksi Nilai KDP sebesar Rp1.627.624.510 dengan penjelasannya sbb : Realiasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Rp44.434.193.545 , pada tanggal 31 Desember 2021 progres Penyelesaian Gedung Kanwil Maluku sebesar 96,337% jadi $96,337\% \times \text{Rp}44.434.193.545 = \text{Rp}1.627.624.510$
 - d. Penghapusan/Penghentian KDP sebesar Rp19.983.913.275,00 terdapat pada :
 - Lapas Saumlaki sebesar Rp5.121.926.800,00 merupakan tindak lanjut terhadap validasi BMN 2021 berupa KDP.
 - Kanwil Kalimantan Timur (DIPA Setjen) sebesar Rp4.826.807.055,00 merupakan tindak lanjut terhadap validasi BMN 2021 berupa KDP.
 - Lapas Wahai sebesar Rp2.189.399.000,00 00 merupakan tindak lanjut terhadap validasi BMN 2021 berupa KDP.
 - Rutan Donggala sebesar Rp1.449.456.015,00 berupa penghapusan KDP tahun 2020 dilakukan karena penyesuaian terhadap penginputan KDP yang sebenarnya, kemudian dilakukan perekaman saldo awal di tahun 2021 sejumlah nilai KDP yang ada pada tahun 2020. Nomor W24.EF.PB.150a tanggal 2 Januari 2021
 - Lapas Meulaboh sebesar Rp1.325.808.500,00 merupakan tindak lanjut terhadap validasi BMN 2021 berupa KDP.
 - e. Penghapusan/Penghentian KDP (Semester II Dokumen TAYL) sebesar Rp7.814.332.903,00 terdapat pada :
 - Lapas Warung Kiara sebesar Rp6.440.730.850,00 merupakan tindak lanjut terhadap validasi BMN 2021 berupa KDP.
 - Lapas Luwuk sebesar Rp610.405.503,00 merupakan tindak lanjut terhadap validasi BMN 2021 berupa KDP.



- Rutan So'e sebesar Rp94.295.550,00 merupakan tindak lanjut terhadap validasi BMN 2021 berupa KDP.
- Lapas Tangerang sebesar Rp38.901.000,00 merupakan tindak lanjut terhadap validasi BMN 2021 berupa KDP.

C.20. AKUMULASI PENYUSUTAN ASET TETAP

**Akumulasi Penyusutan
Aset Tetap
(Rp8.995.636.222.009,00)**

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing sebesar (Rp8.995.636.222.009,00) dan Rp(7.538.881.299.359,00). Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan masa manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP). Berikut disajikan rangkuman Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2021.

Tabel 131
Rincian Akumulasi Penyusutan per Jenis Aset Tetap
per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

No	Aset Tetap	31 Desember 2021			31 Desember 2020		
		Nilai Perolehan	Akm. Penyusutan	Nilai Buku	Nilai Perolehan	Akm. Penyusutan	Nilai Buku
1	Peralatan dan Mesin	8.395.567.596.182,00	6.719.680.429.742,00	1.675.887.166.440,00	7.783.913.088.592,00	6.036.170.230.382,00	1.747.742.858.210,00
2	Gedung dan Bangunan	13.128.613.611.314,00	2.215.790.244.601,00	10.912.823.366.713,00	12.533.396.297.024,00	1.440.526.959.909,00	11.092.869.337.115,00
3	Jalan, Irigasi dan Jaringan	92.560.917.102,00	55.545.419.383,00	37.015.497.719,00	106.092.953.219,00	56.667.777.914,00	49.425.175.305,00
4	Aset Tetap Lainnya	29.800.588.859,00	4.620.128.283,00	25.180.460.576,00	26.397.569.384,00	5.516.331.154,00	20.881.238.230,00
Jumlah		21.646.542.713.457,00	8.995.636.222.009,00	12.650.906.491.448,00	20.449.799.908.219,00	7.538.881.299.359,00	12.910.918.608.860,00

C.21. ASET TAK BERWUJUD

**Aset Tak Berwujud
Rp489.713.047.685,00**

Aset tak berwujud adalah aset non keuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa/digunakan untuk tujuan lainnya. Pada kementerian



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Catatan Atas Laporan Keuangan – *Penjelasan atas Pos-Pos Neraca*
Per 31 Desember Tahun Anggaran 2021 (*Audited*)
Dengan Angka Perbandingan 31 Desember Tahun Anggaran 2020
(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Hukum dan Hak Asasi Manusia, aset tak berwujud yang dimiliki per 31 Desember 2021 berupa *software*. Nilai perolehan Aset Tak Berwujud (ATB) per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah Rp489.713.047.685,00 dan Rp534.166.062.298,00 dengan rincian sebagai berikut

Tabel 132
Rincian Aset Tak Berwujud Berdasarkan Eselon I
Per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Unit Eselon I	Aset Tak Berwujud	
	31 Desember 2021	31 Desember 2020
Sekretariat Jenderal	32.842.593.800,00	31.867.331.595,00
Inspektorat Jenderal	2.587.580.458,00	3.774.887.458,00
Ditjen Administrasi Hukum Umum	61.096.636.106,00	56.618.944.966,00
Ditjen Pemasyarakatan	9.053.379.501,00	7.246.484.557,00
Ditjen Imigrasi	317.958.069.396,00	404.018.441.941,00
Ditjen Kekayaan Intelektual	58.307.377.377,00	23.154.194.377,00
Ditjen Peraturan Perundang-undangan	968.804.000,00	968.804.000,00
Ditjen Hak Asasi Manusia	149.627.500,00	358.005.700,00
Badan Pembinaan Hukum Nasional	4.184.325.500,00	4.184.325.500,00
Balitbang Hukum dan HAM	27.094.214,00	139.339.214,00
BPSPDM Hukum dan HAM	2.537.559.833,00	1.835.302.990,00
Total	489.713.047.685,00	534.166.062.298,00

Terdapat perubahan nilai Aset Tetap Tak Berwujud (ATB) beserta Akumulasi Penyusutannya dari data Laporan Keuangan tahun 2021 (*Unaudited*) dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 133
Total Koreksi Nilai Aset Tak Berwujud dan Akumulasi Penyusutan Aset Tak Berwujud

Uraian	Unaudited	Koreksi	Audited
Aset Tetap Tak Berwujud	511.587.457.343,00	(21.874.409.658,00)	489.713.047.685,00
Akumulasi Aset Tetap Tak Berwujud	(409.356.131.486,00)	26.489.527.134,00	(382.866.604.352,00)



Tabel 134

Koreksi Nilai Aset Tak Berwujud Berdasarkan Satuan Kerja

No	Satker	Nilai Aset Tak Berwujud		
		Unaudited	Koreksi	Audited
1	Ditjen Kekayaan Intelektual	52.607.177.377,00	5.700.200.000,00	58.307.377.377,00
2	Ditjen Imigrasi	333.361.780.078,00	(27.574.609.658,00)	305.787.170.420,00

Tabel 135

Koreksi Nilai Akumulasi Penyusutan Aset Tak Berwujud Berdasarkan Satuan Kerja

No	Satker	Nilai Akumulasi Software		
		Unaudited	Koreksi	Audited
1	Ditjen Kekayaan Intelektual	(21.829.819.645,00)	(712.525.000,00)	(22.542.344.645,00)
2	Ditjen Imigrasi	(291.814.908.227,00)	27.202.052.134,00	(264.612.856.093,00)

Koreksi tersebut merupakan dampak tindak lanjut Temuan BPK yang menyatakan bahwa terdapat kurang catat dan lebih catat terhadap Aset Lainnya berupa Software.

Rincian Mutasi Aset Tak Berwujud disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 136

Rincian Mutasi Aset Tak Berwujud Per 31 Desember 2020

Uraian	Intrakomptabel
Saldo per 31 Desember 2020	534.166.062.298,00
Mutasi tambah :	
Penambahan Saldo Awal	10.113.364.250,00
Pembelian	61.670.665.428,00
Transfer Masuk	254.128.014,00
Hibah Masuk	30.000.000,00
Reklasifikasi Masuk	49.000.000,00
Reklasifikasi Dari Aset Lainnya ke Aset Tetap	598.820.000,00
Perolehan Hasil Tindakanlanjutan Normalisasi	13.812.097.491,00
Pengembangan Nilai Aset	9.323.886.800,00
Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas	2.184.506.500,00
Total Mutasi Tambah :	98.036.468.483,00
Mutasi kurang :	
Reklas dari Aset Tetap ke Aset Lainnya	116.885.173.781,00
Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas	92.844.000,00
Transaksi Normalisasi BMN	13.807.186.798,00



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Catatan Atas Laporan Keuangan – *Penjelasan atas Pos-Pos Neraca*
Per 31 Desember Tahun Anggaran 2021 (*Audited*)
Dengan Angka Perbandingan 31 Desember Tahun Anggaran 2020
(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Transfer Keluar	254.128.014,00
Koreksi Pencatatan	11.450.150.503,00
Total Mutasi Kurang :	142.489.483.096,00
Saldo per 31 Desember 2021	489.713.047.685,00
Akumulasi Penyusutan 31 Desember 2021	(382.866.604.352,00)
Nilai Buku per 31 Desember 2021	106.846.443.333,00

Penjelasan Sebaran Transaksi:

● **Mutasi Tambah**

- a. Penambahan Saldo Awal sebesar Rp10.113.364.250,00 diantaranya terdapat pada:
 - Ditjen AHU sebesar Rp10.113.364.250,00 berupa pengadaan software yang digunakan pada SOC (Security Operation Center) perolehan 2019 dan pengembangan tahun 2020 menggunakan akun 522191, 2021 dicatat sebagai saldo awal software NUP 1701 dan 1702.
- b. Pembelian sebesar Rp61.670.665.428,00 diantaranya terdapat pada:
 - Ditjen KI sebesar Rp28.252.089.000,00 berupa pembelian software computer yang digunakan dalam mendukung operasional pelayanan KI
 - Ditjen Imigrasi sebesar Rp22.632.915.019,00 berupa pembelian software komputer sebesar Rp96.800.000 berupa Aplikasi Rumah Negara dan software komputer sebesar Rp22.536.115.019 berupa Sistem Manajemen Biometrik
 - Ditjen Pemasyarakatan sebesar Rp4.132.892.500,00 berupa pembelian Aplikasi Slip Gaji senilai Rp14.850.000,00, Aplikasi SIMBA senilai Rp280.328.000,00 dan Pembangunan Aplikasi SDP Ditjen Pemasyarakatan senilai Rp4.019.874.500,00.
 - Pusdatin sebesar Rp3.091.000.000,00 berupa pembelian lisensi MCU Cloud.
 - Ditjen AHU sebesar Rp2.678.125.909,00 berupa pembelian unit terdiri dari Wireframing Tool senilai Rp11.540.864,00 aplikasi difungsikan untuk mockup/tampilan awal/ Design suatu aplikasi, Manajemen Dokumen dan Persuratan senilai Rp90.326.500,00 aplikasi difungsikan untuk mengatur dan menyimpan/ manage arsip surat dan



dokumen disubbag penyusunan anggaran dan perencanaan, Bagian P2L, Sistem Informasi Buku Tamu senilai Rp89.898.545,00 aplikasi difungsikan untuk menggantikan buku tamu manual. Untuk Tamu yang datang ke Ditjen AHU, Aplikasi Perseroan Perorangan senilai Rp342.270.500,00 aplikasi difungsikan untuk layanan dari Ditjen AHU untuk mengesahkan perseroan perorangan serta Aplikasi Penataan Harta Pailit senilai Rp184.800.000,00 aplikasi difungsikan untuk memonitor harta pailit yang berada di pengawasan BHP di Indonesia, pembuatan Aplikasi Perseroan termin II senilai Rp342.270.500, Konsultan jasa pembuatan Aplikasi Penugasan Pejabat Pengadaan senilai Rp20.962.500,00 + Rp62.887.500,00, Konsultan jasa pembuatan Aplikasi Apostile senilai Rp342.210.000,00 + Rp342.210.000,00 dan konsultan jasa pembuatan Aplikasi Amanah senilai Rp848.749.000

- c. Transfer Masuk sebesar Rp254.128.014,00 terdapat pada:
 - Kanwil Yogyakarta (Setjen) sebesar Rp35.000.000,00 berupa software dari Kanwil Yogyakarta (DIPA AHU).
 - Kanim Merauke sebesar Rp10.667.415,00 berupa software dari satker Ditjen Imigrasi.
 - Kanim Jakarta Utara sebesar Rp10.667.415,00 berupa software dari satker Ditjen Imigrasi.
 - Kanim Malang sebesar Rp9.697.650,00 berupa software dari satker Ditjen Imigrasi.
 - Kanim Kediri sebesar Rp9.697.650,00 berupa software dari satker Ditjen Imigrasi.
- d. Hibah Masuk sebesar Rp30.000.000,00 terdapat pada :
 - Kanim Batam sebesar Rp30.000.000,- merupakan Software Aplikasi E-Clearance hibah dari perorangan BAST Nomor W.32.IMI.IMI.I.PB.06.03-4512 Tanggal 23 Agustus 2021
- e. Reklasifikasi Masuk sebesar Rp49.000.000,00 terdapat pada :
 - Politeknik Imigrasi berupa rekodefikasi dari jaringan.
- f. Reklasifikasi Dari Aset Lainnya ke Aset Tetap sebesar Rp598.820.000,00 terdapat pada :
 - Ditjen AHU sebesar Rp525.470.000,00 berupa penggunaan kembali software yang sudah dihenti gunakan, karena software tersebut tidak masuk kriteria



- aset tak berwujud maka selanjutnya dilakukan koreksi pencatatan.
- Kanim Yogyakarta sebesar Rp550.000,- berupa penggunaan kembali software karena belum dilakukan perubahan kondisi ketika akan diusulkan penghapusan
- g. Perolehan Hasil Tindaklanjut Normalisasi sebesar Rp13.812.097.491,00 berupa tindak lanjut K3 terdapat pada :
- Ditjen Imigrasi sebesar Rp12.211.529.698,00
 - Kanim Sumbawa Besar sebesar Rp621.940.000,00
 - Kanwil Yogyakarta (Setjen) sebesar Rp391.452.600,00
 - Kanim Agam sebesar Rp146.003.000,00
 - Kanim Ngurah Rai sebesar Rp142.065.000,00
- h. Pengembangan Nilai Aset sebesar Rp9.323.886.800,00 terdapat pada :
- Ditjen KI sebesar Rp7.519.413.000,00 berupa pengembangan atas software aplikasi berupa layanan hak cipta dan paten, serta perpanjangan lisensi penggunaan software yang diinstall pada 100 hardware (PC Unit) dalam mendukung kegiatan kerja dengan skema WFH (Work From Home).
 - Ditjen AHU sebesar Rp1.397.228.800,00 berupa pengembangan kapasitas pada Software Data Warehouse senilai Rp1.138.901.500,00, Pengembangan fitur pada software Penataan Harta Pailit senilai Rp177.595.000,00, Pengembangan fitur pada Software Aplikasi PPNPN DITJEN AHU senilai Rp80.732.300,00
 - Ditjen Pemasarakatan sebesar Rp280.995.000,00 berupa penambahan fitur pada Aplikasi opname fisik dan Aplikasi sistem informasi keuangan
 - Ditjen Imigrasi sebesar Rp96.250.000,00 berupa Pengembangan Software Komputer NUP 937 berupa Sistem Informasi Administrasi Pengadaan
 - Badiklat Jawa Tengah sebesar Rp30.000.000,00 berupa penambahan beberapa fitur pada aplikasi Badiklat Learning Center
- i. Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas sebesar Rp2.184.506.500,00 terdapat pada :
- Ditjen AHU berupa penggabungan nilai, dimana sebelumnya dilakukan juga koreksi catat atas aplikasi



kenotariatan dan aplikasi Simphadu yang merupakan hasil tindak lanjut identifikasi pencatatan ATB.

● **Mutasi Kurang**

- a. Reklas Dari Aset Tetap Ke Aset Lainnya sebesar Rp116.885.173.781,00 terdapat pada:
 - Ditjen Imigrasi sebesar Rp103.511.102.206,00 berupa Penghentian penggunaan atas Software yang tidak digunakan yang merupakan TL TP BPK tahun 2020 dengan BA Penghentian Penggunaan Nomor IMI.1-PB.06.04-198 tanggal 4 Mei 2021
 - Ditjen AHU sebesar Rp3.443.826.949,00 berupa tindak lanjut inventarisasi bersama dengan Direktorat TI, software sudah tidak digunakan dan tidak berfungsi lagi sehingga selanjutnya akan dilakukan proses penghapusan. BA koreksi No AHU.1.PB.06.01-8 Tahun 2021 tertanggal 31 Desember 2021
 - Ditjen Pemasyarakatan sebesar Rp2.511.992.556,00 berupa penghentian Software Komputer (ATB) dengan Nomor Berita Acara PAS1.PB.06.04 - 2738 tanggal 27 Juli 2021. ATB tersebut dihentikan dikarenakan software komputer tersebut sudah tidak sesuai dengan perkembangan teknologi, masa manfaatnya telah berakhir dan telah tergantikan dengan aplikasi lain.
 - Inspektorat Jenderal sebesar Rp1.187.307.000,00 berupa penghentian penggunaan 3 buah software yaitu aplikasi SIMWAS sebesar Rp449.132.000,00, Pengembangan SIMWAS sebesar Rp444.805.000,00 dan ACL sebesar Rp293.370.000,00.
 - Kanim Jakarta Barat sebesar Rp895.499.950,00 berupa penghentian ATB karena sudah tidak digunakan dengan BA Nomor. W10.IMI.PB.03.04-6639 Tanggal 24-09-2021 selanjutnya akan dilakukan usulan penghapusan
- b. Koreksi Perubahan Nilai/Kuantitas sebesar Rp92.844.000,00 terdapat pada :

Ditjen KI merupakan koreksi atas Temuan Pemeriksaan BPK atas kelebihan pembayaran pekerjaan jasa konsultasi aplikasi paten dan aplikasi desain industri.
- c. Transaksi Normalisasi BMN sebesar Rp13.807.186.798,00 berupa tindak lanjut K3 terdapat pada:
 - Ditjen Imigrasi sebesar Rp12.211.529.698,00



- Kanim Sumbawa Besar sebesar Rp621.940.000,00
- Kanwil Yogyakarta (Setjen) sebesar Rp391.452.600,00
- Kanim Agam sebesar Rp146.003.000,00
- Kanim Ngurah Rai sebesar Rp142.065.000,00

Terdapat selisih antara Transaksi Normalisasi dengan Perolehan Hasil Tindak Lanjut Normalisasi sebesar Rp 4.910.693,00 . Selisih tersebut secara umum disebabkan adanya transaksi Normalisasi (BMN yang Dihentikan) pada Perwakilan Imigrasi di Berlin.

- d. Transfer Keluar sebesar Rp254.128.014,00 terdapat pada :
 - Ditjen Imigrasi sebesar Rp215.248.954,00 berupa software ke Kanim Merauke, Kanim Jakarta Utara, Kanim Malang, Kanim Kediri dan Kanim Jakarta Selatan.
 - Kanwil Yogyakarta (DIPA AHU) sebesar Rp35.000.000 berupa software ke Kanwil Yogyakarta (DIPA Setjen).
 - Kanim Sukabumi sebesar Rp3.879.060,00 berupa software ke Kanim Cianjur.
- e. Koreksi Pencatatan sebesar Rp11.450.150.503,00 terdapat pada:
 - Ditjen AHU sebesar Rp9.024.902.370,00 berupa koreksi pada Software yang akan digabungkan nilainya karena merupakan suatu kesatuan atau hasil pengembangan software tersebut senilai Rp2.184.506.500 Koreksi Pencatatan pada Software yang tidak dapat dikapitalisasi sebagai software karena mempunyai umur kurang dari 12 bulan senilai Rp5.329.710.870.
 - Sekretariat Jenderal sebesar Rp1.914.386.400,00 berupa koreksi atas double input software karena sudah tercatat pada masing-masing PC Unit.
 - Ditjen Imigrasi sebesar Rp510.861.733,00 yang merupakan tindak lanjut Temuan BPK yang menyatakan bahwa terdapat 2 NUP Software Komputer yang tidak memenuhi kriteria sebagai ATB.

C.22. DANA YANG DIBATASI PENGGUNAANNYA

***Dana Yang Dibatasi
Penggunaannya
Rp14.272.752.000,00***

Nilai Dana yang Dibatasi Penggunaannya per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 sebesar Rp14.272.752.000,00 dan Rp14.190.852.000,00.

Rincian nilai Dana Yang Dibatasi Penggunaannya berdasarkan unit Eselon I sebagai berikut :



Tabel 137

**Rincian Dana Yang Dibatasi Penggunaannya Berdasarkan Unit Eselon I
Per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020**

Unit Eselon I	Dana Yang Dibatasi Penggunaannya	
	31 Desember 2021	31 Desember 2020
Sekretariat Jenderal	0,00	0,00
Inspektorat Jenderal	0,00	0,00
Ditjen Administrasi Hukum Umum	14.272.752.000,00	14.190.852.000,00
Ditjen Pemasyarakatan	0,00	0,00
Ditjen Imigrasi	0,00	0,00
Ditjen Kekayaan Intelektual	0,00	0,00
Ditjen Peraturan Perundang-undangan	0,00	0,00
Ditjen Hak Asasi Manusia	0,00	0,00
Badan Pembinaan Hukum Nasional	0,00	0,00
Balitbang Hukum dan HAM	0,00	0,00
BPSDM Hukum dan HAM	0,00	0,00
TOTAL	14.272.752.000,00	14.190.852.000,00

Dana Dibatasi Penggunaannya pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia terdapat pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum. Dana tersebut merupakan dana yang ditempatkan di Department of Justice (DoJ) Hongkong terkait dengan kasus Century senilai HKD7.800.000. Kurs yang digunakan per 31 Desember 2021 merupakan kurs tengah BI yang berlaku pada 31 Desember 2021, yaitu senilai Rp1.829,84 per HKD sesuai dengan Surat Edaran DJPB S-21/PB/PB.6/2021, penyesuaian kurs tengah BI akan dilakukan setiap periode pelaporan atau per tanggal neraca.

Dalam penanganan kasus century di Hongkong, Menteri Kehakiman memberitahukan bahwa Hong Kong mungkin terpaksa harus menggunakan penggantian kerugian yang sebelumnya diberikan oleh Indonesia dan mengundang Indonesia untuk mempertimbangkan memberikan kepada Hong Kong garansi bank senilai USD 1 juta melalui bank berlisensi di Hong Kong sebagai biaya Kurator. DoJ



meminta agar garansi bank dapat disediakan paling lambat akhir Desember 2015 dan menjelaskan bahwa setiap penangguhan akan menempatkan Pemerintah Hong Kong dalam posisi yang sangat sulit, khususnya secara finansial, untuk terus memberikan bantuan hukum dalam kasus Bank Century. Pemerintah menandatangani Indemnity Contract yang baru dan menyetorkan sejumlah HKD 7,8 juta (sekitar US\$ 1 juta) kepada DoJ sebagai biaya jasa Kurator. Keputusan Menteri Kehakiman untuk menerima pembayaran sebesar US\$ 1 juta dalam bentuk deposit, dan bukan dalam bentuk garansi bank dengan jumlah yang sama, dicapai setelah negosiasi antara Lipman Karas dan DoJ.

C.23. ASET LAIN-LAIN

Aset Lain-Lain
Rp722.099.657.104,00

Nilai Aset Lain-Lain per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 sebesar Rp722.099.657.104,00 dan Rp426.406.705.940,00.

Rincian nilai Aset Lain-Lain berdasarkan unit Eselon I sebagai berikut :

Tabel 138
Rincian Aset Lain-Lain Berdasarkan Unit Eselon I
Per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Unit Eselon I	Aset Lain-lain	
	31 Desember 2021	31 Desember 2020
Sekretariat Jenderal	24.860.320.087,00	27.345.350.744,00
Inspektorat Jenderal	2.348.076.591,00	6.930.000,00
Ditjen Administrasi Hukum Umum	11.354.543.050,00	2.473.510.465,00
Ditjen Pemasyarakatan	266.454.916.969,00	154.365.280.569,00
Ditjen Imigrasi	385.937.175.849,00	225.595.995.040,00
Ditjen Kekayaan Intelektual	17.483.742.082,00	4.745.615.364,00
Ditjen Peraturan Perundang-undangan	481.337.026,00	368.341.940,00
Ditjen Hak Asasi Manusia	1.825.296.255,00	1.727.818.270,00
Badan Pembinaan Hukum Nasional	2.070.732.320,00	2.332.664.320,00
Balitbang Hukum dan HAM	973.126.947,00	354.883.300,00
BPSDM Hukum dan HAM	8.310.389.928,00	7.090.315.928,00
Total	722.099.657.104,00	426.406.705.940,00



Aset Lain-Lain terdiri dari Aset Tetap Yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintahan dan Aset Tak Berwujud Yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintahan. Rincian Aset Lain-Lain dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 139
Rincian Aset Lain-Lain Berdasarkan Jenis Aset
Per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Jenis Aset	31 Desember 2021	31 Desember 2020
Aset Tetap Yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintahan	505.178.931.693,00	324.145.751.166,00
Aset Tak Berwujud Yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintahan	216.920.725.411,00	102.260.954.774,00
Total	722.099.657.104,00	426.406.705.940,00

C.23.1. ASET TETAP YANG TIDAK DIGUNAKAN DALAM OPERASIONAL PEMERINTAHAN

Aset Tetap Yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintahan
Rp505.178.931.693,00

Nilai Aset Tetap Yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintahan per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 sebesar Rp505.178.931.693,00 dan Rp324.145.751.166,00.

Rincian nilai Aset Tetap Yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintahan berdasarkan unit Eselon I sebagai berikut :

Tabel 140
Rincian Aset Tetap Yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintahan Berdasarkan Unit Eselon I
Per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Unit Eselon I	Aset Tetap Yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintahan	
	31 Desember 2021	31 Desember 2020
Sekretariat Jenderal	24.638.468.692,00	27.345.350.744,00
Inspektorat Jenderal	1.153.839.591,00	0,00
Ditjen Administrasi Hukum Umum	7.898.216.101,00	1.924.280.465,00
Ditjen Pemasyarakatan	263.473.130.538,00	153.961.905.943,00
Ditjen Imigrasi	177.512.222.213,00	124.334.972.392,00



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Catatan Atas Laporan Keuangan – *Penjelasan atas Pos-Pos Neraca*
Per 31 Desember Tahun Anggaran 2021 (*Audited*)
Dengan Angka Perbandingan 31 Desember Tahun Anggaran 2020
(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Ditjen Kekayaan Intelektual	16.958.267.082,00	4.745.615.364,00
Ditjen Peraturan Perundang-undangan	481.337.026,00	331.794.440,00
Ditjen Hak Asasi Manusia	1.825.296.255,00	1.727.818.270,00
Badan Pembinaan Hukum Nasional	2.070.732.320,00	2.332.664.320,00
Balitbang Hukum dan HAM	857.031.947,00	351.033.300,00
BPSDM Hukum dan HAM	8.310.389.928,00	7.090.315.928,00
Total	505.178.931.693,00	324.145.751.166,00

Terdapat perubahan nilai nilai Aset Tetap Yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintahan beserta Akumulasi Penyusutannya dari data Laporan Keuangan tahun 2021 (*Unaudited*) dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 141

Total Koreksi Nilai Aset Tetap Yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintahan dan Akumulasi Penyusutannya

Uraian	Unaudited	Koreksi	Audited
Aset Tetap Yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintahan	505.298.351.554,00	(119.419.861,00)	505.178.931.693,00
Akm. Penyusutan Aset Tetap Yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintahan	(426.378.415.618,00)	(977.358.270,00)	(427.355.773.888,00)

Tabel 142

Koreksi Nilai Aset Tetap Yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintahan Berdasarkan Satuan Kerja

No	Satker	Nilai Aset Tetap Yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintahan		
		Unaudited	Koreksi	Audited
1	Kanwil NTT (Setjen)	712.227.549,00	646.045.600,00	1.358.273.149,00
2	Lapas Serang	1.087.009.915,00	74.000.300,00	1.161.010.215,00
3	Kanwil Sulawesi Barat (Setjen)	341.466.689,00	11.110.000,00	352.576.689,00
4	Rutan Kabanjahe	9.114.730.832,00	10.910.910,00	9.125.641.745,00
5	Lapas Narkotika Langkat	1.649.634.962,00	10.910.910,00	1.660.545.872,00
6	Rutan Sungai Penuh	820.819.800,00	10.239.500,00	831.059.300,00
7	Kanwil Bangka Belitung (Setjen)	92.300.000,00	10.000.000,00	102.300.000,00
8	Kanim Bengkulu	2.590.877.528,00	5.358.500,00	2.596.236.028,00
9	Kanwil Sulawesi Utara (Setjen)	1.225.320.988,00	5.000.000,00	1.230.320.988,00



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Catatan Atas Laporan Keuangan – *Penjelasan atas Pos-Pos Neraca*
Per 31 Desember Tahun Anggaran 2021 (*Audited*)
Dengan Angka Perbandingan 31 Desember Tahun Anggaran 2020
(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

10	Kanim Manado	2.009.534.771,00	1.958.000,00	2.011.492.771,00
11	Rutan Batam	1.791.813.866,00	25.919,00	1.791.839.785,00
12	Lapas Banceuy	2.794.416.820,00	(419.104.000,00)	2.375.312.820,00
13	Lapas Watampone	454.807.394,00	(304.926.000,00)	149.881.394,00
14	Kanim Atambua	825.618.260,00	(51.690.000,00)	773.928.260,00
15	Kanwil Jambi (Setjen)	467.298.347,00	(42.290.000,00)	425.008.347,00
16	Ditjen AHU	5.868.807.279,00	(20.212.500,00)	5.848.594.779,00
17	Rutan Kefamenanu	18.882.000,00	(18.882.000,00)	0,00
18	Lapas Bangko	447.378.584,00	(15.663.000,00)	431.715.584,00
19	Ditjen Pemasyarakatan	7.060.384.795,00	(9.293.000,00)	7.051.091.795,00
20	Bapas Luwu	25.170.500,00	(6.100.000,00)	19.070.500,00
21	BHP Surabaya	953.415.598,00	(4.704.000,00)	948.711.598,00
22	Kanwil Kalimantan Timur (Setjen)	493.255.341,00	(4.648.000,00)	488.607.341,00
23	Lapas Baa	129.261.564,00	(2.440.000,00)	126.821.564,00
24	Lapas Panyabungan	218.093.388,00	(2.000.000,00)	216.093.388,00
25	Lapas Lembata	121.916.974,00	(1.650.000,00)	120.266.974,00
26	Rutan Wates	216.022.529,00	(877.000,00)	215.145.529,00
27	Bapas Serang	91.246.702,00	(500.000,00)	90.746.702,00

Tabel 143

Koreksi Nilai Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintahan

No	Satker	Nilai Akm. Penyusutan Aset Tetap Yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintahan		
		Unaudited	Koreksi	Audited
1	Kanwil NTT (Setjen)	(674.822.160,00)	(646.045.600,00)	(1.320.867.760,00)
2	Rutan So'e	(478.847.658,00)	(425.555.650,00)	(904.403.308,00)
3	Rutan Surabaya	(2.710.596.793,00)	(203.590.119,00)	(2.914.186.912,00)
4	Lapas Serang	(1.084.054.781,00)	(74.000.300,00)	(1.158.055.081,00)
5	Lapas Sukamiskin	(210.396.168,00)	(61.751.161,00)	(272.147.329,00)
6	Rudenim Manado	(1.843.942.980,00)	(31.554.303,00)	(1.875.497.283,00)
7	Lapas Muara Tebo	(444.924.948,00)	(13.693.185,00)	(458.618.133,00)
8	Lapas Narkotika Langkat	(1.585.567.102,00)	(11.427.742,00)	(1.596.994.844,00)
9	Kanwil Sulawesi Barat (Setjen)	(341.165.746,00)	(11.110.000,00)	(352.275.746,00)
10	Rutan Kabanjahe	(2.140.021.948,00)	(10.910.910,00)	(2.150.932.858,00)
11	Rutan Sungai Penuh	(802.903.768,00)	(10.239.500,00)	(813.143.268,00)
12	Kanwil Kep. Bangka Belitung (Setjen)	(24.123.864,00)	(10.000.000,00)	(34.123.864,00)



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Catatan Atas Laporan Keuangan – *Penjelasan atas Pos-Pos Neraca*
Per 31 Desember Tahun Anggaran 2021 (Audited)
Dengan Angka Perbandingan 31 Desember Tahun Anggaran 2020
(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

13	Kanim Tual	(1.881.007.884,00)	(9.063.500,00)	(1.890.071.384,00)
14	Kanim Bengkulu	(2.504.318.359,00)	(5.358.500,00)	(2.509.676.859,00)
15	Kanwil Sulawesi Utara (Setjen)	(1.222.969.191,00)	(5.000.000,00)	(1.227.969.191,00)
16	Kanim Bogor	(1.523.335.638,00)	(3.116.667,00)	(1.526.452.305,00)
17	Kanim Jambi	(320.320.266,00)	(1.508.283,00)	(321.828.549,00)
18	Kanim Manado	(1.928.992.555,00)	(1.501.134,00)	(1.930.493.689,00)
19	BPHN	(2.066.998.986,00)	(933.334,00)	(2.067.932.320,00)
20	Bapas Jakbar	(336.006.880,00)	(849.750,00)	(336.856.630,00)
21	Kanim Bekasi	(1.956.153.805,00)	(555.034,00)	(1.956.708.839,00)
22	Bapas Palembang	(397.741.532,00)	(505.303,00)	(398.246.835,00)
23	Lapas Luwuk	(102.031.134,00)	(172.306,00)	(102.203.440,00)
24	Kanim Palembang	(705.009.349,00)	(171.013,00)	(705.180.362,00)
25	Rutan Batam	(1.771.432.759,00)	(16.199,00)	(1.771.448.958,00)
26	Lapas Watampone	(442.469.504,00)	304.926.000,00	(137.543.504,00)
27	Kanim Atambua	(724.195.139,00)	51.690.000,00	(672.505.139,00)
28	Lapas Banceuy	(661.122.196,00)	40.957.260,00	(620.164.936,00)
29	Kanwil Jambi (Setjen)	(458.062.141,00)	33.053.794,00	(425.008.347,00)
30	Kanwil Jawa Tengah (Setjen)	(666.378.737,00)	23.591.827,00	(642.786.910,00)
31	Ditjen AHU	(5.762.190.134,00)	20.212.500,00	(5.741.977.634,00)
32	Lapas Bangko	(431.368.265,00)	15.663.000,00	(415.705.265,00)
33	Perwakilan Imigrasi Di Guangzhou	(15.492.587,00)	15.492.587,00	0,00
34	Rutan Kefamenanu	(14.717.752,00)	14.717.752,00	0,00
35	Ditjen Pemasyarakatan	(7.037.668.973,00)	9.293.000,00	(7.028.375.973,00)
36	Kanim Selat Panjang	(176.424.000,00)	9.081.000,00	(167.343.000,00)
37	Bapas Luwuk	(25.170.500,00)	6.100.000,00	(19.070.500,00)
38	BHP Surabaya	(953.415.598,00)	4.704.000,00	(948.711.598,00)
39	Kanwil Kalimantan Timur (Setjen)	(491.755.868,00)	4.648.000,00	(487.107.868,00)
40	Lapas Baa	(126.724.424,00)	2.196.000,00	(124.528.424,00)
41	Lapas Panyabungan	(217.288.249,00)	2.000.000,00	(215.288.249,00)
42	Lapas Lembata	(121.834.474,00)	1.567.500,00	(120.266.974,00)
43	Rutan Wates	(202.442.661,00)	877.000,00	(201.565.661,00)
44	Bapas Serang	(91.246.702,00)	500.000,00	(90.746.702,00)
45	Lapas Kuala Tungkal	(647.768.415,00)	1,00	(647.768.414,00)
46	Lapas Banjar	(347.574.570,00)	1,00	(347.574.569,00)
47	Lapas Majalengka	(461.421.802,00)	1,00	(461.421.801,00)



Koreksi tersebut merupakan dampak tindak lanjut terhadap hasil Validasi BMN 2021 berupa Aset Tetap Yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintahan.

Rincian Mutasi Aset Tetap Yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintahan meliputi :

Tabel 144
Rincian Mutasi Aset Tetap Yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintahan
Per 31 Desember 2021

Uraian	Intrakomptabel
Saldo per 31 Desember 2020	324.145.751.166,00
Mutasi tambah :	
Reklas dari Aset Tetap ke Aset Lainnya	269.557.871.621
Total Mutasi Tambah :	269.557.871.621,00
Mutasi Kurang :	
Reklas dari Aset Lainnya ke Aset Tetap	10.340.556.081,00
Transaksi Normalisasi (BMN Yang Dihentikan)	4.967.727.281,00
Penghapusan BMN yang Dihentikan (Semester II Dokumen Semester I)	1.098.741.396,00
Penghapusan BMN yang dihentikan (SMT I Dokumen TAYL)	994.609.788,00
Penghapusan BMN yang Dihentikan (Semester II Dokumen TAYL)	562.327.527,00
Penghapusan (BMN yang dihentikan)	61.091.554.619,00
Reklasifikasi Keluar (BMN yang dihentikan)	365.234.726,00
Koreksi Pencatatan (BMN yang dihentikan)	8.477.939.583,00
Usulan Barang RB ke Pengelola (BMN yang dihentikan)	626.000.093,00
Total Mutasi Kurang :	88.524.691.094,00
Saldo per 31 Desember 2021	505.178.931.693,00
Akumulasi Penyusutan 31 Desember 2021	(427.355.773.888,00)
Nilai Buku per 31 Desember 2021	77.823.157.805,00

Penjelasan Sebaran Transaksi:

- **Mutasi Tambah**
 - a. Reklas Dari Aset Tetap Ke Aset Lainnya sebesar Rp269.557.871.621,00,00 diantaranya terdapat pada:
 - Imigrasi sebesar Rp13.634.767.491,00 berupa Penghentian penggunaan dengan BA Nomor IMI.1-PB.06.04-077 tanggal 2 Juli 2021 berupa perangkat rusak pada Gedung DRC Bali yang mengalami insiden



- kebakaran di tahun 2013 dengan total nilai sebesar Rp5.083.731.290,00,. Penghentian penggunaan dengan BA Nomor IMI.1-PB.06.04.125 tanggal 31 Agustus 2021 berupa 2 unit Chiller yang sudah rusak dengan total nilai sebesar Rp8.349.766.201,00. Penghentian penggunaan dengan BA Nomor IMI.1-PB.06.04-201.1 tanggal 31 Desember 2021 berupa 1 unit Bangunan Gedung Pertemuan Permanen yang merupakan tindak lanjut Barang Tidak Ditemukan pada Revaluasi Aset tahun 2019 dengan nilai sebesar Rp201.270.000,00
- Ditjen KI sebesar Rp12.289.132.718,00 merupakan perubahan kondisi menjadi rusak berat dan dilakukan penghentian aset dari penggunaan sebanyak 5.083 NUP dengan BA Nomor : 02.03/BU/VIII/2021 tanggal 02 Agustus 2021. Kemudian selanjutnya akan dilakukan penghapusan melalui lelang secara open bidding dengan pengumuman lelang tanggal 15 Oktober 2021 dan pelaksanaan lelang pada tanggal 22 Oktober 2021 sesuai Surat KPKNL Jakarta IV Nomor: S-6230/WKN.07/KNL.04/2021 tanggal 13 Oktober 2021 perihal Penetapan Jadwal Lelang.
 - Lapas Batu sebesar Rp10.593.071.150,00 merupakan penghentian 2 unit Kapal Pengayoman II dan IV yang tenggelam dan diusulkan penghapusan dengan nomor W.13. PAS. PAS2.PB.05.06-901 tanggal 20 September 2021.
 - Sekretariat Jenderal sebesar Rp10.577.011.712,00 berupa penghentian aset karena akan dihapuskan dengan SK Penghapusan Nomor SEK-32.PB.06.04 Tahun 2021.
 - Lapas Manado sebesar Rp9.291.751.400,00 merupakan penghentian BMN dari Penggunaan untuk proses Penghapusan BMN berupa Alat Detektor barang terlarang /xray sejumlah 2 NUP dengan Nomor BA W.27.PAS.PAS.5.PB.06.04- 53 Tahun 2021.
- **Mutasi Kurang**
 - a. Reklas Dari Aset Lainnya Ke Aset Tetap sebesar Rp10.340.556.081,00,00 diantaranya terdapat pada:



- Kanim Batam sebesar Rp716.985.600,00 berupa penggunaan kembali 2 unit mobil mini bus, 8 unit Rumah Negara.
- Ditjen HAM sebesar Rp630.442.000,00 berupa Reklasifikasi BMN dari Aset Lainnya ke Aset Tetap (BA No. HAM1-PB.05.01-01 Tanggal 29 Maret 2021) Peralatan dan Mesin dan kemudian dilakukan Transfer Keluar Ke Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM (BA No. HAM1-PB.06.04-01 Tanggal 5 April 2021) berupa 4 unit A.C. Sentral Senilai Rp569.412.000,00. Reklasifikasi dari Aset Lainnya ke Aset Tetap Peralatan dan Mesin Senilai Rp14.000.000,00 untuk digunakan kembali dalam kegiatan operasional berupa 2 buah printer dengan BA No. HAM.1-PB.05.01-02 Tanggal 30 Juni 2021. Reklasifikasi dari Aset Lainnya ke Aset Tetap Peralatan dan Mesin Senilai Rp.47.030.000,00 untuk digunakan kembali dalam kegiatan operasional berupa 13 buah lembar besi/metal dan 10 buah kursi besi/meta; dengan BA No. HAM.1-PB.05.01-06 Tanggal 31 Desember 2021.
- Lapas Mamasa sebesar Rp611.811.000,00 merupakan Penggunaan Kembali BMN berupa Stationary Water Pump NUP 1, dengan BA Nomor W.33.PAS.PAS6-PB.05.01-06 tanggal 24 Februari 2021
- Kanim Jember sebesar Rp606.203.862,00 berupa penggunaan kembali 3 printer (peralatan personal komputer)/ printer paspor karena perubahan kondisi.
- Kanim Surabaya Rp587.400.000,00 nilai tersebut karena adanya pergeseran Kondisi Barang dari Rusak Berat ke Baik/ penggunaan kembali BMN yang telah dihentikan. BMN yang dimaksud adalah dua unit printer cetak paspor @ Rp293.700.000. Kronologi : 1. Kondisi Printer paspor tersebut tidak dapat digunakan secara optimal 2. Kanim kekurangan anggaran untuk pemeliharaan printer paspor mengingat SBM pemeliharaan printer tidak mencukupi 3. Rencana dilakukan penghapusan BMN yang RB termasuk printer paspor tersebut di tahun 2021 4. Setelah dicek PSP, PSP BMN tersebut (printer paspor) belum diajukan dan dilakukan pengajuan tanggal 20 Agustus 2021 5. ULP



Kanim SBY banyak yang membutuhkan backup printer paspor 6. Printer paspor tersebut diperbaiki meskipun belum dapat digunakan secara optimal namun dapat digunakan kembali sebagai backup printer paspor (Nomor BA : W15.IMI.IMI.1-PB.01.01-2994-1 tanggal 06 Juli 2021.

- b. Transaksi Normalisasi (BMN yang dihentikan) sebesar Rp4.967.727.281,00 yang umumnya disebabkan karena terdapat data BMN yang terindikasi tidak normal seperti nilai buku minus yang dilihat dalam aplikasi eRekon&LK, dan merupakan tindak lanjut K3 yang diantaranya terdapat pada:
 - LPKA Jakarta sebesar Rp800.495.800,00
 - Kanim Padang sebesar Rp694.347.317,00
 - Rutan Surabaya sebesar Rp493.487.000,00
 - Lapas Banceuy sebesar Rp419.104.000,00
 - Lapas Watampone sebesar Rp304.926.000,00
- c. Penghapusan BMN yang Dihentikan (Semester II Dokumen Semester I) sebesar Rp1.098.741.396,00 terdapat pada :
 - Kanim Blitar sebesar Rp484.774.500,00 merupakan Penghapusan BMN Lainnya dibawah 100 Juta dengan SK nomor W.15-323.PB.06.04 Tahun 2021 21 Juni 2021
 - Rutan Kotamobagu sebesar Rp156.034.754,00
 - Lapas Labuhan Ruku sebesar Rp127.150.000,00
 - Kanim tarakan sebesar Rp118.771.500,00
 - Bapas Garut sebesar Rp107.655.911,00
- d. Penghapusan BMN yang Dihentikan (Semester I Dokumen TAYL) sebesar Rp994.609.788,00 terdapat pada :
 - Lapas Bogor sebesar Rp686.166.200,00 merupakan aplikasi yang mengalami kendala hanya sebagian yang terinput di tahun 2020, setelah koordinasi dengan KPKNL dilakukan penginputan di tahun 2021 semester 1 dengan nomor SK: W11.5287.PB.06.01 Tahun 2020 Tanggal 30 Juli 2020
 - Kanwil Sumatera Barat (Setjen) sebesar Rp216.620.588,00 merupakan aset tetap berupa peralatan mesin yg telah dihentikan penggunaannya



- karena berada dalam kondisi rusak berat, akan diajukan penghapusan
- Kanwil Riau (Setjen) sebesar Rp91.800.000,00 merupakan penghapusan atas 1 unit mobil yang tertinggal input pada semester sebelumnya, SK Penghapusan No: SEK-99.PB.06.04 Tahun 2019 tanggal 3 Oktober 2019.
 - Bapas Mataram sebesar Rp23.000,00 merupakan penghapusan 3 unit jam elektronik dengan SK Penghapusan No : W21-369-PB.06.04 tahun 2021 tanggal 14 Juni 2021.
- e. Penghapusan BMN yang Dihentikan (Semester II Dokumen TAYL) sebesar Rp562.327.527,00 terdapat pada :
- Perwakilan Imigrasi di Sidney sebesar Rp416.518.400,00 berupa penghapusan kendaraan Sedan Mercy NUP 1 dengan SK Penghapusan Nomor SEK-55.PB.06.04 tahun 2020.
 - Bapas Madiun sebesar Rp143.898.127,00 berupa penghapusan Mesin Ketik, Mesin Hitung Manual, Kursi Besi/Metal, Kursi Fiber Glas/Plastik, Alat Pembersih lainnya, A.C. Split, Kipas Angin, Televisi, Tangga Aluminium, P.C Unit, Lap Top, CPU (Peralatan Mainframe), Hard Disk, Monitor dan Printer (Peralatan Personal Komputer) dengan Nomor SK : W15.PB.06.04-753 Tahun 2020 tanggal 22 Desember 2020
 - LPKA Pekanbaru sebesar Rp1.051.000,00 berupa Kursi Besi/ Metal dengan kondisi rusak berat dan akan dilakukan penghapusan pada tahun depan (kesalahan jenis transaksi akan dilakukan perbaikan transaksi di semester II)
 - Kanim Bitung sebesar Rp851.000,00 merupakan penghapusan BMN berupa BMN Lainnya s.d 100 Juta, dengan Nomor SK: W.27-3108.PB.06.04 Tahun 2021 tanggal 02 Juli 2021. BMN yang dilakukan penghapusan, yaitu Kursi besi/metal sebanyak 23 unit.
 - Lapas Bogor sebesar Rp9.000,00 merupakan aplikasi mengalami kendala hanya sebagian yang terinput di tahun 2020, setelah koordinasi dengan KPKNL dilakukan penginputan di tahun 2021 semester 1,



namun setelah dilakukan pengiputan terdapat buku minus sesuai dengan arahan pusat untuk di input di semester 2 dengan nomor SK: W11.5287.PB.06.01 Tahun 2020 Tanggal 30 Juli 2020

f. Penghapusan (BMN Yang Dihentikan) sebesar Rp61.091.554.619,00 diantaranya terdapat pada:

- Sekretariat Jenderal sebesar Rp16.803.797.438,00 berupa penghapusan BMN Lainnya SK Penghapusan Nomor SEK-32.PB.06.04 Tahun 2021.
- Kanim Batam Rp6.223.717.534,00 Merupakan penghapusan BMN selain tanah dan/atau bangunan berupa BMN lainnya (W.32-258.PB.06.04 tahun 2021 tanggal 13 September 2021) dan penghapusan bmn berupa kendaraan dinas operasional karena penjualan (SEK-14 PB.06.04 Tahun 2021)
- Ditjen Imigrasi sebesar Rp3.969.957.108,00 berupa penghapusan 5.432 unit meubelair dengan nomor SK Penghapusan No : IMI-0578.UM.01.01 tahun 2021 tanggal 16 Maret 2021.
- Kanim Jakarta Utara Rp2.102.918.215,00 merupakan penghapusan BMN dibawah 100 juta dengan nomor SK W.10.PB.06.04-1093 Tahun 2021
- Lapas Narkotika Jakarta sebesar Rp1.283.023.304,00 berupa penghapusan BMN dibawah 100 jt, dengan nomor SK: W.10.PB.06.04 – 1567 Tahun 2021 tanggal 25 Oktober 2021

g. Reklasifikasi Keluar (BMN Yang Dihentikan) sebesar Rp365.234.726,00 terdapat pada:

- Lapas Madiun sebesar Rp175.375.000,00 merupakan reklasifikasi dilakukan untuk selanjutnya dilakukan Penghapusan BMN, dengan dokumen meliputi Surat Pernyataan Reklasifikasi Kepala Lapas Kelas I Madiun Nomor : W15.PAS.PAS3-PB.06.04-30 tanggal 8 Januari 2021, Surat Persetujuan Penghapusan dari KPKNL Madiun Nomor : S-11/MK.6/WKN.10/KNL.6/2021 tanggal 16 Maret 2021 dan Surat Keputusan Menkumham RI Nomor : SEK-34.PB.06.04 tanggal 7 Juni 2021 tentang Penghapusan BMN berupa Rumah Negara karena sebab-sebab lain pada Lapas Kelas I Madiun.



- Kanim Batam sebesar Rp67.370.286,00 berupa reklas dari mesin scanning kode alat laboratorium 3.08 ke alat komputer berupa scanner.
- Rutan Menggala sebesar Rp55.000.000,00 merupakan perubahan kodefikasi dari Peralatan Proses Produksi (3.17) menjadi Alat Besar (3.01) sebanyak 8 NUP
- Kanim Denpasar sebesar Rp40.359.440,00 berupa reklasifikasi BMN berupa Uninterruptible Power Supply (UPS) sejumlah 11 buah
- Lapas Kaimana sebesar Rp10.000.000,00 berupa reklasifikasi ke kode yang seharusnya yaitu Mesin Packing Benang.
- h. Koreksi Pencatatan (BMN yang dihentikan) sebesar Rp8.477.939.583,00 terdapat pada:
 - Kanwil NTT (Setjen) sebesar Rp6.438.563.400,00 berupa koreksi pencatatan berupa 3 NUP bangunan pagar permanen yang merupakan kesalahan pencatatan kegiatan renovasi di Satker yang dicatat sebagai NUP baru di kanwil, padahal di satker sudah dilakukan pencatatan SIMAK BMN dengan BA nomor W22. PB. 05.01-5508 tanggal 15 oktober 2021.
 - Kanim Jakarta Barat sebesar Rp1.989.748.683,00 berupa koreksi pencatatan Bangunan Gedung Ibadah Darurat senilai 1.989.748.683,- tindak lanjut BTD dari Revaluasi dengan SK Nomor : W10.IMI.IMI.PB.05.01-8446 Tanggal 21 Desember 2021.
 - Sekretariat Jenderal (Satker) sebesar Rp47.011.000,00 merupakan peralatan kantor berupa meja dan kursi yang sudah ditransfer ke Balitbang
 - Kanim Tanjung Pinang sebesar Rp1.666.500,00 berupa koreksi atas tahun perolehan yang semula 1987 menjadi 1997 dengan BA No: W32.IMI.IMI.2-PB.05.01-0646 tanggal 22 Maret 2021.
 - Bapas Mataram sebesar Rp950.000,00 berupa bmn yang telah di hentikan dari penggunaanya di lakukan koreksi pencatatan di gunakan kembali agar bmn tersebut bisa di usulkan untuk penerbitan sk psp nya.



di input di aplikasi bmn pada tanggal 21 september 2021 pada menu transaksi bmn - penggunaan kembali bmn yang sudah di hentikan penggunaan dengan rincian barang perkakas kantor lainnya (Nup.119-134) dan di usulkan SK PSP pada tanggal 21 september 2021 dan SK psp nya telah terbit dengan nomor: SEK-278.PB.04.01 TAHUN 2021 tanggal 27 oktober 2021

- i. Usulan Barang Rusak Berat Ke Pengelola (BMN Yang Dihentikan) sebesar Rp626.000.093,00 terdapat pada:
 - Kanim Bagan Siapi-api sebesar Rp612.093.093,00 merupakan BMN dengan kondisi rusak berat dalam proses pengajuan usulan penghapusan dengan nomor surat W4.IMI.IMI.5.PB.06.04-0520 berupa barang inventaris kantor sebanyak 118 unit.
 - Kanim Jayapura sebesar Rp13.907.000,00 merupakan penghentian BMN berupa Kendaraan Roda 2 (dua) dalam rangka penghapusan melalui penjualan Sesuai BA Nomor : W.30.IMI.IMI1.PB.05.01-0142 tanggal 17 Februari 2021. Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jayapura telah mengusulkan penghapusan BMN Kendaraan Roda 2 (dua) dari aplikasi SIMAK BMN sesuai surat Nomor : W.30.IMI.IMI1.PB.06.04-0150 tanggal 22 Februari 2021 dan sampai saat ini belum ada SK penghapusan dari Sekretaris Jenderal.

C.23.2. ASET TAK BERWUJUD YANG TIDAK DIGUNAKAN DALAM OPERASIONAL PEMERINTAHAN

Aset tak berwujud yang tidak digunakan dalam operasional pemerintahan
Rp216.920.725.411,00

Nilai Aset Tak Berwujud Yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintahan per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 sebesar Rp216.920.725.411,00 dan Rp102.260.954.774,00.

Rincian nilai Aset Tak Berwujud Yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintahan berdasarkan unit Eselon I ialah sebagai berikut :



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Catatan Atas Laporan Keuangan – *Penjelasan atas Pos-Pos Neraca*
Per 31 Desember Tahun Anggaran 2021 (*Audited*)
Dengan Angka Perbandingan 31 Desember Tahun Anggaran 2020
(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Tabel 145

**Rincian Aset Tak Berwujud Yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintahan
Berdasarkan Unit Eselon I Per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020**

Unit Eselon I	Aset Tak Berwujud Yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintahan	
	31 Desember 2021	31 Desember 2020
Sekretariat Jenderal	221.851.395,00	0,00
Inspektorat Jenderal	1.194.237.000,00	6.930.000,00
Ditjen Administrasi Hukum Umum	3.456.326.949,00	549.230.000,00
Ditjen Pemasyarakatan	2.981.786.431,00	403.374.626,00
Ditjen Imigrasi	208.424.953.636,00	101.261.022.648,00
Ditjen Kekayaan Intelektual	525.475.000,00	0,00
Ditjen Peraturan Perundang-undangan	0,00	36.547.500,00
Ditjen Hak Asasi Manusia	0,00	0,00
Badan Pembinaan Hukum Nasional	0,00	0,00
Balitbang Hukum dan HAM	116.095.000,00	3.850.000,00
BPSDM Hukum dan HAM	0,00	0,00
Total	216.920.725.411,00	102.260.954.774,00

Terdapat perubahan nilai Aset Tak Berwujud Yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintahan beserta Akumulasi Penyusutannya dari data Laporan Keuangan tahun 2021 (*Unaudited*) dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 146

**Total Koreksi Nilai Aset Tak Berwujud Yang Tidak Digunakan Dalam Operasional
Pemerintahan dan Akumulasi Penyusutannya**

Uraian	<i>Unaudited</i>	Koreksi	<i>Audited</i>
Aset Tak Berwujud Yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintahan	189.856.977.486,00	27.063.747.925,00	216.920.725.411,00
Akumulasi Penyusutan Aset Tak Berwujud Yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintahan	(189.387.544.762,00)	(26.882.763.550,00)	(216.270.308.312,00)



Tabel 147

**Koreksi Nilai Aset Tak Berwujud Yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintahan
Berdasarkan Satuan Kerja**

No	Satker	Nilai Aset Tak Berwujud Yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintahan		
		<i>Unaudited</i>	Koreksi	<i>Audited</i>
1	Ditjen Imigrasi	175.264.075.822,00	27.063.747.925,00	202.327.823.747,00

Tabel 148

Koreksi Nilai Akumulasi Penyusutan Aset Tak Berwujud Yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintahan Berdasarkan Satuan Kerja

No	Satker	Nilai Akumulasi Aset Tak Berwujud Yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintahan		
		<i>Unaudited</i>	Koreksi	<i>Audited</i>
1	Ditjen Imigrasi	(175.025.046.286,00)	(26.882.763.550,00)	(201.907.809.836,00)

Koreksi tersebut merupakan dampak tindak lanjut Temuan BPK yang menyatakan bahwa terdapat kurang catat Aset Tak Berwujud Yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintahan.

Rincian Mutasi Aset Tak Berwujud Yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintahan disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 149

**Rincian Mutasi Aset Tak Berwujud
Yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintahan
Per 31 Desember 2021**

Uraian	Intrakomptabel
Saldo per 31 Desember 2020	102.260.954.774,00
Mutasi Tambah :	
Reklas dari Aset Tetap ke Aset Lainnya	116.885.173.781,00
Total Mutasi Tambah :	116.885.173.781,00
Mutasi Kurang :	
Reklasifikasi Dari Aset Lainnya ke Aset Tetap	598.820.000,00
Transaksi Normalisasi BMN(BMN Yang Dihentikan)	4.910.693,00



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Catatan Atas Laporan Keuangan – *Penjelasan atas Pos-Pos Neraca*
Per 31 Desember Tahun Anggaran 2021 (*Audited*)
Dengan Angka Perbandingan 31 Desember Tahun Anggaran 2020
(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Penghapusan BMN yang Dihentikan (Semester II Dokumen Semester I)	415.527.500,00
Penghapusan(BMN yang dihentikan)	1.206.144.951,00
Total Mutasi Kurang :	2.225.403.144,00
Saldo per 31 Desember 2021	216.920.725.411,00
Akumulasi Penyusutan 31 Desember 2021	(216.270.308.312,00)
Nilai Buku per 31 Desember 2021	650.417.099,00

Penjelasan Sebaran Transaksi:

- **Mutasi Tambah**

- a. Reklas Dari Aset Tetap Ke Aset Lainnya sebesar Rp116.885.173.781,00 terdapat pada:
 - Ditjen Imigrasi sebesar Rp103.551.102.206,00 berupa Penghentian penggunaan atas Software yang tidak digunakan yang merupakan TL TP BPK tahun 2020 dengan BA Penghentian Penggunaan Nomor IMI.1-PB.06.04-198 tanggal 4 Mei 2021
 - Ditjen AHU sebesar Rp3.443.826.949,00 berupa tindak lanjut inventarisasi bersama dengan Direktorat TI, software sudah tidak digunakan dan tidak berfungsi lagi sehingga selanjutnya akan dilakukan proses penghapusan. BA koreksi No AHU.1.PB.06.01-8 Tahun 2021 tertanggal 31 Desember 2021
 - Ditjen Pemasarakatan sebesar Rp2.511.992.556,00 berupa penghentian Software Komputer (ATB) dengan Nomor Berita Acara PAS1.PB.06.04 - 2738 tanggal 27 Juli 2021. ATB tersebut dihentikan dikarenakan software komputer tersebut sudah tidak sesuai dengan perkembangan teknologi, masa manfaatnya telah berakhir dan telah tergantikan dengan aplikasi lain.
 - Inspektorat Jenderal sebesar Rp1.187.307.000,00. Yang merupakan penghentian penggunaan 3 buah software yaitu aplikasi SIMWAS sebesar Rp449.132.000,00, Pengembangan SIMWAS sebesar Rp444.805.000,00 dan ACL sebesar Rp293.370.000,00.
 - Kanim Jakarta Barat sebesar Rp895.499.950,00 berupa penghentian ATB karena sudah tidak



digunakan dengan BA Nomor. W10.IMI.PB.03.04-6639 Tanggal 24-09-2021 selanjutnya akan dilakukan usulan penghapusan.

- **Mutasi Kurang**

- a. Reklasifikasi Dari Aset Lainnya ke Aset Tetap sebesar Rp598.820.000,00,00 terdapat pada:
 - Ditjen AHU sebesar Rp525.470.000,00 berupa penggunaan kembali software yang sudah dihentikan, karena software tersebut tidak masuk kriteria aset tak berwujud maka selanjutnya dilakukan koreksi pencatatan
 - Kanim Yogyakarta sebesar Rp73.350.000,00 berupa penggunaan kembali karena belum dirubah kondisinya untuk di usulkan penghapusan
- b. Transaksi Normalisasi BMN (BMN Yang Dihentikan) sebesar Rp4.910.693,00 berupa tindak lanjut K3 pada Perwakilan Imigrasi di Berlin.
- c. Penghapusan BMN Yang Dihentikan (Semester II Dokumen Semester I) sebesar Rp415.527.500,00 pada :
 - Kanim Surabaya berupa Penghapusan ATB sejumlah 10 unit ATB, SK baru turun dari Sumaker di Semester II (W.15-321.PB.06.04 TAHUN 2021 - 18 Juni 2021)
- d. Penghapusan (BMN Yang Dihentikan) sebesar Rp1.206.144.951,00 terdapat pada:
 - Kanim Jakarta Timur sebesar Rp515.630.000,00 berupa penghapusan ATB karena sudah tidak terpakai dan rusak berat dengan SK Penghapusan Nomor W.10.PB.06.04-1978 Tahun 2021 Tanggal 31 Desember 2021
 - Ditjen HAM sebesar Rp208.378.200,00 berupa penghapusan terhadap 6 buah Software Komputer dengan SK No. HAM.1-02.PB.06.04 TAHUN 2021 Tanggal 29 November 2021, dengan keterangan sebagai berikut:
 1. Software Komputer berupa 2 buah Citric Xen Enterprise Edition merupakan Software pengamanan pada Server
 2. Software Komputer berupa Sistem Aplikasi Kepegawaian



3. Software Komputer berupa Aplikasi Program Pemajuan HAM Terpadu diperoleh pada tahun 2015
 4. Software Komputer berupa Aplikasi Pendaftaran Online Duta HAM diperoleh pada tahun 2016
 5. Software Komputer berupa Aplikasi Persuratan Online (Apertal) diperoleh pada tahun 2016
- Kanim Sukabumi sebesar Rp103.400.000,00 merupakan penghapusan BMN yang dihentikan penggunaannya pada aplikasi SIMAK BMN Kanim Sukabumi adalah berupa Software Komputer. Nomor dan tanggal SK penghapusan adalah: W.11-6426.PB.06.04 Tahun 2021 tanggal 2 Agustus 2021
 - Kanim Karawang sebesar Rp99.698.500,00 berupa penghapusan Aplikasi APWNA sesuai SK Penghapusan No : W.11-10280.PB.06.04 tahun 2021 tanggal 03 Desember 2021
 - Kanim Pati sebesar Rp74.800.000,00 berupa penghapusan software modul haji sudah habis masa manfaat sehingga dihapuskan dengan SK nomor SEK-PB.06.04-128 tanggal 20/05/2021

C.24. AKUMULASI PENYUSUTAN DAN AMORTISASI ASET LAINNYA

Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya
(Rp1.026.492.686.552,00)

Saldo Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya per 31 Desember 2021 adalah sebesar **(Rp1.026.492.686.552,00)** dan 31 Desember 2020 adalah sebesar **Rp(796.061.567.360,00)**. Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya adalah sebagai berikut :

Tabel 150

Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya
Per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

No	Aset Lainnya	31 Desember 2021			31 Desember 2020		
		Nilai Perolehan	Akm. Amortisasi	Nilai Buku	Nilai Perolehan	Akm. Amortisasi	Nilai Buku
A	Aset Tak Berwujud (ATB)						



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Catatan Atas Laporan Keuangan – *Penjelasan atas Pos-Pos Neraca*
Per 31 Desember Tahun Anggaran 2021 (*Audited*)
Dengan Angka Perbandingan 31 Desember Tahun Anggaran 2020
(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1	Software	489.713.047.685,00	382.866.604.352,00	106.846.443.333,00	534.166.062.298,00	432.954.291.804,00	101.211.770.494,00
2	Lisensi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Aset Tak Berwujud Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah		489.713.047.685,00	382.866.604.352,00	106.846.443.333,00	534.166.062.298,00	432.954.291.804,00	101.211.770.494,00
B	Aset Lain-lain						
1	Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasi Pemerintahan	505.178.931.693,00	427.355.773.888,00	77.823.157.805,00	324.145.751.166,00	261.945.639.339,00	62.200.111.827,00
2	ATB yang Tidak Digunakan Dalam Operasi Pemerintahan	216.920.725.411,00	216.270.308.312,00	650.417.099,00	102.260.954.774,00	101.161.636.217,00	1.099.318.557,00
Jumlah		722.099.657.104,00	643.626.082.200,00	78.473.574.904,00	426.406.705.940,00	363.107.275.556,00	63.299.430.384,00
Grand Total		1.211.812.704.789,00	1.026.492.686.552,00	185.320.018.237,00	960.572.768.238,00	796.061.567.360,00	164.511.200.878,00

C.25. UTANG KEPADA PIHAK KETIGA

Utang kepada Pihak Ketiga
Rp63.007.116.719,00

Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing sebesar Rp63.007.116.719,00 dan Rp32.376.416.169,00. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan belanja yang masih harus dibayar dan merupakan kewajiban yang harus segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan). Pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Utang kepada Pihak Ketiga terdiri dari utang biaya perjalanan dinas mutasi pegawai yang belum dibayar, kekurangan gaji dan uang makan pegawai yang belum dibayar, kekurangan belanja bahan makanan narapidana dan belanja barang yang tagihannya belum dilunasi.

Tabel 151

Rincian Jenis Utang Pihak Ketiga Berdasarkan Eselon I Per 31 Desember 2021

Unit Eselon I	Utang Kepada Pihak Ketiga			TOTAL
	Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar	Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar	Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya	



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Catatan Atas Laporan Keuangan – *Penjelasan atas Pos-Pos Neraca*
Per 31 Desember Tahun Anggaran 2021 (*Audited*)
Dengan Angka Perbandingan 31 Desember Tahun Anggaran 2020
(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Sekretariat Jenderal	504.442.053,00	9.077.525.850,00	3.140.200,00	9.585.108.103,00
Inspektorat Jenderal	0,00	0,00	0,00	0,00
Ditjen Administrasi Hukum Umum	8.808.140,00	25.583.361,00	0,00	34.391.501,00
Ditjen Pemasyarakatan	3.072.699.648,00	45.490.995.069,00	22.349.221,00	48.586.043.938,00
Ditjen Imigrasi	1.383.844.179,00	1.587.319.000,00	0,00	2.971.163.179,00
Ditjen Kekayaan Intelektual	0,00	1.744.357.446,00	0,00	1.744.357.446,00
Ditjen Peraturan Perundang-undangan	0,00	0,00	0,00	0,00
Ditjen Hak Asasi Manusia	0,00	0,00	0,00	0,00
Badan Pembinaan Hukum Nasional	0,00	86.052.552,00	0,00	86.052.552,00
Balitbang Hukum dan HAM	0,00	0,00	0,00	0,00
BPSDM Hukum dan HAM	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	4.969.794.020,00	58.011.833.278,00	25.489.421,00	63.007.116.719,00

Tabel 152

**Rincian Utang kepada Pihak Ketiga Berdasarkan Eselon I
Per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020**

Unit Eselon I	Utang Kepada Pihak Ketiga	
	30 Desember 2021	31 Desember 2020
Sekretariat Jenderal	9.585.108.103,00	11.569.294.510,00
Inspektorat Jenderal	0,00	0,00
Ditjen Administrasi Hukum Umum	34.391.501,00	31.010.262,00
Ditjen Pemasyarakatan	48.586.043.938,00	17.659.542.658,00
Ditjen Imigrasi	2.971.163.179,00	3.030.812.743,00
Ditjen Kekayaan Intelektual	1.744.357.446,00	0,00
Ditjen Peraturan Perundang-undangan	0,00	0,00
Ditjen Hak Asasi Manusia	0,00	0,00
Badan Pembinaan Hukum Nasional	86.052.552,00	85.755.996,00
Balitbang Hukum dan HAM	0,00	0,00
BPSDM Hukum dan HAM	0,00	0,00
TOTAL	63.007.116.719,00	32.376.416.169,00

Terdapat perubahan nilai Utang kepada Pihak Ketiga dari data Laporan Keuangan tahun 2021 (*Unaudited*) dengan rincian sebagai berikut:



Tabel 153

Total Koreksi Nilai Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya

Uraian	Unaudited	Koreksi	Audited
Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar	4.969.021.320,00	772.700,00	4.969.794.020,00
Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar	55.268.038.655,00	2.743.794.623,00	58.011.833.278,00
Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya	8.470.621,00	17.018.800,00	25.489.421,00
Total	60.245.530.596,00	2.761.586.123,00	63.007.116.719,00

Tabel 154

Koreksi Nilai Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar Berdasarkan Satuan Kerja

No	Satker	Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar		
		Unaudited	Koreksi	Audited
1	BALAI PEMASYARAKATAN SORONG	17.173.350,00	772.700,00	17.946.050,00

Tabel 155

Koreksi Nilai Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar Berdasarkan Satuan Kerja

No	Satker	Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar		
		Unaudited	Koreksi	Audited
1	LAPAS BONDOWOSO	88.844.320,00	(78.206.562,00)	10.637.758,00
2	RUMAH TAHANAN KELAS IIB KOTA AGUNG	15.626.314,00	(54.000,00)	15.572.314,00
3	SEKRETARIAT JENDERAL (PUSAT)	5.691.501.267,00	2.710.827.000,00	8.402.328.267,00
4	Rutan Perempuan Kelas IIA Medan	696.201.842,00	70.736.464,00	766.938.306,00
5	DITJEN KEKAYAAN INTELEKTUAL	1.702.692.277,00	41.665.169,00	1.744.357.446,00
6	Lapas Perempuan Kelas IIA Samarinda	33.828.449,00	(1.173.448,00)	32.655.001,00

Tabel 156

Koreksi Nilai Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya Berdasarkan Satuan Kerja

No	Satker	Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya		
		Unaudited	Koreksi	Audited
1	LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK PALEMBANG	0,00	11.933.500,00	11.933.500,00
2	LEMBAGA PEMASYARAKATAN DOMPU	0,00	5.044.300,00	5.044.300,00



3	LAPAS KELAS III SAPARUA	0,00	14.000,00	14.000,00
4	LAPAS PEMUDA KELAS III LANGKAT PROVINSI SUMATERA UTARA	0,00	27.000,00	27.000,00

Koreksi tersebut disebabkan antara lain:

1. Koreksi atas kurang atau lebih saji belanja barang yang masih harus dibayar diantaranya hutang listrik, hutang air, hutang uang makan dan biaya mutasi.
2. Koreksi atas penggunaan RFID tahun 2021 yang belum dibayar.
3. Koreksi atas sisa saldo kas lainnya di Bendahara Pengeluaran yang belum diserahkan kepada Pegawai atau pihak ketiga lainnya.

Rincian atas Transaksi Utang Kepada Pihak Ketiga berdasarkan satuan kerja per 31 Desember 2021 dapat dilihat pada lampiran.

C.26. HIBAH LANGSUNG YANG BELUM DISAHKAN

*Hibah Langsung yang
Belum Disahkan
Rp490.498.500,00*

Hibah yang belum disahkan per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 tersaji sebesar Rp490.498.500,00 dan Rp00,00. Hibah yang belum disahkan merupakan aset yang diterima oleh Satuan Kerja dan belum disahkan melalui KPPN, namun telah dicatatkan pada aplikasi SIMAK-BMN berdasarkan Berita Acara Serah Terima (BAST).

Perbandingan Nilai Hibah Yang Belum Disahkan berdasarkan Eselon I per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 disajikan pada Tabel berikut:

Tabel 157
Perbandingan Hibah Yang Belum Disahkan Berdasarkan Eselon I
Per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Unit Eselon I	Hibah yang Belum Disahkan	
	31 Desember 2021	31 Desember 2020
Sekretariat Jenderal	0,00	0,00
Inspektorat Jenderal	0,00	0,00
Ditjen Administrasi Hukum Umum	0,00	0,00
Ditjen Pemasyarakatan	416.642.500,00	0,00



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Catatan Atas Laporan Keuangan – *Penjelasan atas Pos-Pos Neraca*
Per 31 Desember Tahun Anggaran 2021 (*Audited*)
Dengan Angka Perbandingan 31 Desember Tahun Anggaran 2020
(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Ditjen Imigrasi	73.856.000,00	0,00
Ditjen Kekayaan Intelektual	0,00	0,00
Ditjen Peraturan Perundang-undangan	0,00	0,00
Ditjen Hak Asasi Manusia	0,00	0,00
Badan Pembinaan Hukum Nasional	0,00	0,00
Balitbang Hukum dan HAM	0,00	0,00
BPSDM Hukum dan HAM	0,00	0,00
TOTAL	490.498.500,00	0,00

Terdapat perubahan nilai Hibah Langsung yang Belum Disahkan dari data Laporan Keuangan tahun 2021 (*Unaudited*) dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 158
Total Koreksi Nilai Hibah Yang Belum Disahkan

Uraian	Unaudited	Koreksi	Audited
Hibah yang belum disahkan	556.161.900,00	(65.663.400,00)	490.498.500,00

Tabel 159
Koreksi Nilai Hibah Yang Belum Disahkan Berdasarkan Satuan Kerja

No	Satker	Hibah Yang Belum Disahkan		
		Unaudited	Koreksi	Audited
1	LEMBAGA PEMASYARAKATAN LUBUK BASUNG	0,00	10.939.500,00	10.939.500,00
2	KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI MALANG	76.602.900,00	(76.602.900,00)	0,00

Koreksi tersebut disebabkan antara lain:

1. Hibah tanah dari Pemerintah Kabupaten Agam kepada Lapas Lubuk Basung sebesar 10.939.500,00 yang belum dilakukan pengesahan sampai dengan tanggal pelaporan dikarenakan proses register hibah baru dilakukan pada tahun 2022.
2. Hibah barang dari Bank BRI kepada Kanim Malang yang telah disahkan setelah tanggal pelaporan *Unaudited*.



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Catatan Atas Laporan Keuangan – *Penjelasan atas Pos-Pos Neraca*
Per 31 Desember Tahun Anggaran 2021 (*Audited*)
Dengan Angka Perbandingan 31 Desember Tahun Anggaran 2020
(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Rincian atas Hibah Langsung yang Belum Disahkan berdasarkan satuan kerja per 31 Desember 2021 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 160
Rincian Hibah yang Belum Disahkan Berdasarkan Satuan Kerja
Per 31 Desember 2021

No	Nama Satker	Saldo	Keterangan
Ditjen Pemasyarakatan			
1	DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN	14.018.000,00	Hibah barang trauma kits dari UNODC dan dalam proses register
		391.685.000,00	Hibah barang perlengkapan informasi dari UNODC dan dalam proses register
2	LEMBAGA PEMASYARAKATAN LUBUK BASUNG	10.939.500,00	Hibah tanah jalan dari Pemerintah Kabupaten Agam proses register hibah pada Februari 2022
	SUBTOTAL	416.642.500,00	
Ditjen Imigrasi			
1	KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI TUAL	73.856.000,00	Hibah barang dari Pemerintah Kota Tual Register Hibah Masih Dalam Proses Koordinasi Tindak Lanjut dengan Kanwil, Ditjen Perbendaharaan Provinsi Maluku dan Badan Pertanahan Negara
	SUBTOTAL	73.856.000,00	
	TOTAL	490.498.500,00	

C.27. PENDAPATAN DITERIMA DIMUKA

*Pendapatan Diterima
Dimuka
Rp584.177.088.896,00*

Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 sebesar Rp584.177.088.896,00 dan Rp485.306.124.011,00. Pendapatan Diterima Dimuka adalah pendapatan PNBP yang telah diterima tetapi belum menjadi hak sepenuhnya karena masih melekat kewajiban untuk memberikan barang/jasa.

Tabel 161
Perbandingan Pendapatan Diterima Dimuka Berdasarkan Eselon I
Per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Unit Eselon I	Pendapatan Diterima Dimuka	
	31 Desember 2021	31 Desember 2020



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Catatan Atas Laporan Keuangan – *Penjelasan atas Pos-Pos Neraca*
Per 31 Desember Tahun Anggaran 2021 (*Audited*)
Dengan Angka Perbandingan 31 Desember Tahun Anggaran 2020
(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Sekretariat Jenderal	2.221.360.527,00	1.597.981.287,00
Inspektorat Jenderal	0,00	0,00
Ditjen Administrasi Hukum Umum	4.389.250.000,00	2.672.050.000,00
Ditjen Pemasyarakatan	1.183.101.392,00	1.464.456.028,00
Ditjen Imigrasi	1.183.573.738,00	671.188.355,00
Ditjen Kekayaan Intelektual	575.100.615.110,00	478.788.986.258,00
Ditjen Peraturan Perundang-undangan	0,00	0,00
Ditjen Hak Asasi Manusia	1.519.383,00	0,00
Badan Pembinaan Hukum Nasional	21.870.535,00	5.783.858,00
Balitbang Hukum dan HAM	0,00	0,00
BPSDM Hukum dan HAM	75.798.211,00	105.678.225,00
TOTAL	584.177.088.896,00	485.306.124.011,00

Terdapat perubahan nilai Pendapatan Diterima Dimuka dari data Laporan Keuangan tahun 2021 (*Unaudited*) dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 162

Total Koreksi Nilai Pendapatan Diterima Dimuka

Uraian	<i>Unaudited</i>	Koreksi	<i>Audited</i>
Pendapatan diterima dimuka	541.257.903.896,00	42.919.185.000,00	584.177.088.896,00

Tabel 163

Koreksi Nilai Pendapatan Diterima Dimuka Berdasarkan Satuan Kerja

No	Satker	Pendapatan Bukan pajak lainnya Diterima Dimuka		
		<i>Unaudited</i>	Koreksi	<i>Audited</i>
1	DITJEN KEKAYAAN INTELEKTUAL	532.102.755.000,00	42.919.185.000,00	575.021.940.000,00

Koreksi tersebut disebabkan antara lain:

- Pengakuan Saldo Awal Pendapatan Diterima Di Muka TA 2021 atas Kode Billing TA 2020 yang belum digunakan dalam pelayanan hingga 31 Desember 2020
- Penyesuaian atas Penggunaan Kode Billing TA 2021 pada pelayanan KI di TA 2021
- Koreksi Nilai Pendapatan Diterima Di Muka TA 2021 atas Kode Billing TA 2021 yang telah diakui sebagai Pendapatan Diterima Di Muka namun telah digunakan di TA 2021



- Penyesuaian Nilai Pendapatan Diterima Di Muka TA 2021 atas Layanan Perpanjangan Merek yang masa jatuh temponya melewati 31 Desember 2021
- Penyesuaian Nilai Pendapatan Diterima Di Muka TA 2021 atas Layanan Pemeriksaan Substantif Paten yang hingga 31 Desember 2021 belum memasuki tahap Pemeriksaan Substantif

Rincian Pendapatan Diterima Dimuka untuk masing-masing satuan kerja disajikan pada lampiran.

C.28. UANG MUKA DARI KPPN

*Uang Muka dari
KPPN
Rp557.409.357,00*

Uang Muka dari KPPN per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing sebesar Rp557.409.357,00 dan Rp437.017.887,0. Uang Muka dari KPPN merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang diberikan KPPN sebagai uang muka kerja yang masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan. Saldo Uang Muka Di KPPN mencerminkan jumlah Kas di Bendahara Pengeluaran.

Rincian Uang Muka dari KPPN berdasarkan Eselon I per 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 164
Perbandingan Uang Muka dari KPPN Berdasarkan Eselon I
Per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Unit Eselon I	Uang Muka dari KPPN	
	31 Desember 2021	31 Desember 2020
Sekretariat Jenderal	12.107.517,00	0,00
Inspektorat Jenderal	0,00	0,00
Ditjen Administrasi Hukum Umum	0,00	0,00
Ditjen Pemasyarakatan	129.607.000,00	68.289.400,00
Ditjen Imigrasi	405.178.940,00	368.728.457,00
Ditjen Kekayaan Intelektual	0,00	0,00
Ditjen Peraturan Perundang-undangan	0,00	0,00
Ditjen Hak Asasi Manusia	0,00	0,00



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Catatan Atas Laporan Keuangan – *Penjelasan atas Pos-Pos Neraca*
Per 31 Desember Tahun Anggaran 2021 (*Audited*)
Dengan Angka Perbandingan 31 Desember Tahun Anggaran 2020
(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Badan Pembinaan Hukum Nasional	10.515.900,00	30,00
Balitbang Hukum dan HAM	0,00	0,00
BPSDM Hukum dan HAM	0,00	0,00
TOTAL	557.409.357,00	437.017.887,00

Rincian Uang Muka dari KPPN berdasarkan Satuan Kerja per 31 Desember 2021 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 165
Rincian Uang Muka dari KPPN Berdasarkan Satuan Kerja
Per 31 Desember 2021

No	Nama Satker	Saldo	Keterangan
Sekretariat Jenderal			
1	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAYAPURA	12.107.517,00	Sisa TUP Semester II TA 2021
Total		12.107.517,00	
Dijen Pemasyarakatan			
1	LAPAS KELAS III SAPARUA	19.200.000,00	Sisa UP Semester II TA 2021
2	Lapas Perempuan Kelas IIB Yogyakarta	20.490.000,00	Sisa UP Semester II TA 2021
3	RUMAH TAHANAN NEGARA SUKADANA	60.200.000,00	Sisa TUP Semester II TA 2021
4	LEMBAGA PEMASYARAKATAN BALIKPAPAN	29.714.000,00	Sisa TUP Semester II TA 2021
5	Lapas Perempuan Kelas IIB Padang	3.000,00	Sisa TUP Semester II TA 2021
Total		129.607.000,00	
Dijen Imigrasi			
1	PERWAKILAN IMIGRASI DI SINGAPURA	981.897,00	Sisa UP Semester II TA 2021
2	PERWAKILAN IMIGRASI DI KUALALUMPUR	130.408.684,00	Sisa UP Semester II TA 2021
3	PERWAKILAN IMIGRASI DI PENANG	47.687,00	Sisa UP Semester II TA 2021
4	PERWAKILAN IMIGRASI DI BANGKOK	8.623.627,00	Sisa UP Semester II TA 2021
5	PERWAKILAN IMIGRASI DI HONGKONG	21.924.011,00	Sisa UP Semester II TA 2021
6	PERWAKILAN IMIGRASI DI TOKYO	594.107,00	Sisa UP Semester II TA 2021
7	PERWAKILAN IMIGRASI DI DAVAO	69.196.328,00	Sisa UP Semester II TA 2021



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Catatan Atas Laporan Keuangan – *Penjelasan atas Pos-Pos Neraca*
Per 31 Desember Tahun Anggaran 2021 (*Audited*)
Dengan Angka Perbandingan 31 Desember Tahun Anggaran 2020
(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

8	PERWAKILAN IMIGRASI DI DEN HAAG	6.156.675,00	Sisa UP Semester II TA 2021
9	PERWAKILAN IMIGRASI DI BERLIN	6.909.695,00	Sisa UP Semester II TA 2021
10	PERWAKILAN IMIGRASI DI SIDNEY	323.112,00	Sisa UP Semester II TA 2021
11	PERWAKILAN IMIGRASI DI KUCHING	20.168.388,00	Sisa UP Semester II TA 2021
12	PERWAKILAN IMIGRASI DI TAWAO	26.997.128,00	Sisa UP Semester II TA 2021
13	PERWAKILAN IMIGRASI DI LOS ANGELES	28.941.934,00	Sisa UP Semester II TA 2021
14	PERWAKILAN IMIGRASI DI JEDDAH	3.003.663,00	Sisa UP Semester II TA 2021
15	PERWAKILAN IMIGRASI DI BEIJING	10.932.950,00	Sisa UP Semester II TA 2021
16	PERWAKILAN IMIGRASI DI JOHOR BAHRU	7.617.883,00	Sisa UP Semester II TA 2021
17	KANTOR PERWAKILAN IMIGRASI PADA KANTOR URUSAN KEPENTINGAN RI DI DILI TIMOR	39.503.084,00	Sisa UP Semester II TA 2021
18	PERWAKILAN IMIGRASI GUANGZHOU DI RRC	22.834.521,00	Sisa UP Semester II TA 2021
19	PERWAKILAN IMIGRASI DI SINGAPURA	1.857,00	Sisa TUP Semester II TA 2021
20	PERWAKILAN IMIGRASI DI SIDNEY	4.284,00	Sisa TUP Semester II TA 2021
21	PERWAKILAN IMIGRASI DI BEIJING	6.140,00	Sisa TUP Semester II TA 2021
22	PERWAKILAN IMIGRASI DI JOHOR BAHRU	571,00	Sisa TUP Semester II TA 2021
23	PERWAKILAN IMIGRASI GUANGZHOU DI RRC	714,00	Sisa TUP Semester II TA 2021
Total		405.178.940,00	
Badan Pembinaan Hukum Nasional			
1	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM KUPANG	10.515.900,00	Sisa UP Semester II TA 2021
Total		10.515.900,00	
Grand Total		557.409.357,00	

C.29. UTANG JANGKA PENDEK LAINNYA

Utang Jangka Pendek Lainnya
Rp21.420.036,00

Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing sebesar Rp21.420.036,00 dan Rp4.527.700,00. Utang Jangka Pendek Lainnya antara lain berupa utang potongan pajak oleh bendahara pengeluaran yang belum disetor ke



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Catatan Atas Laporan Keuangan – *Penjelasan atas Pos-Pos Neraca*
Per 31 Desember Tahun Anggaran 2021 (*Audited*)
Dengan Angka Perbandingan 31 Desember Tahun Anggaran 2020
(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

rekening kas negara. Rincian utang jangka pendek lainnya pada masing-masing eselon I disajikan sebagai berikut:

Tabel 166
Perbandingan Utang Jangka Pendek Lainnya Berdasarkan Eselon I
Per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Unit Eselon I	Utang Jangka Pendek Lainnya	
	31 Desember 2021	31 Desember 2020
Sekretariat Jenderal	0,00	0,00
Inspektorat Jenderal	0,00	0,00
Ditjen Administrasi Hukum Umum	0,00	0,00
Ditjen Pemasyarakatan	21.420.036,00	4.527.700,00
Ditjen Imigrasi	0,00	0,00
Ditjen Kekayaan Intelektual	0,00	0,00
Ditjen Peraturan Perundang-undangan	0,00	0,00
Ditjen Hak Asasi Manusia	0,00	0,00
Badan Pembinaan Hukum Nasional	0,00	0,00
Balitbang Hukum dan HAM	0,00	0,00
BPSDM Hukum dan HAM	0,00	0,00
TOTAL	21.420.036,00	4.527.700,00

Terdapat perubahan nilai Utang Jangka Pendek Lainnya dari data Laporan Keuangan tahun 2021 (*Unaudited*) dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 167
Total Koreksi Nilai Utang jangka pendek lainnya

Uraian	Unaudited	Koreksi	Audited
Utang jangka pendek lainnya	1.269.540,00	20.150.496,00	21.420.036,00

Tabel 168
Koreksi Nilai Utang jangka pendek lainnya Berdasarkan Satuan Kerja

No	Satker	Pendapatan Bukan pajak lainnya Diterima Dimuka		
		Unaudited	Koreksi	Audited
1	LEMBAGA PEMASYARAKATAN NARKOTIKA DI CIREBON	0,00	12.106.204,00	12.106.204,00
2	LAPAS KELAS III LABUAN BILIK	0,00	7.879.792,00	7.879.792,00



3	BAPAS KELAS II LHOK SEMAWE	0,00	164.500,00	164.500,00

Koreksi tersebut disebabkan atas koreksi pajak tahun 2021 yang belum disetorkan ke Kas Negara.

Rincian utang jangka pendek lainnya pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Satuan Kerja per 31 Desember 2021 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 169
Rincian utang jangka pendek lainnya Per 31 Desember 2021

No	Nama Satker	Saldo	Keterangan
Ditjen Pemasyarakatan			
1	LAPAS KELAS III LABUAN BILIK	7.879.792,00	Hutang pajak tahun 2021 yang belum disetorkan oleh bendahara pengeluaran sampai per 31 Desember 2021.
2	RUMAH TAHANAN NEGARA MAMUJU	1.269.540,00	Hutang pajak yang belum disetorkan ke kas negara dan masih dipegang oleh bendahara pengeluaran sampai dengan tanggal 31 Desember 2021.
3	BAPAS KELAS II LHOK SEMAWE	164.500,00	Hutang pajak tahun 2021 yang belum disetorkan oleh bendahara pengeluaran sampai per 31 Desember 2021.
4	LEMBAGA PEMASYARAKATAN NARKOTIKA DI CIREBON	12.106.204,00	Hutang pajak tahun 2021 yang belum disetorkan oleh bendahara pengeluaran sampai per 31 Desember 2021.
SUBTOTAL		21.420.036,00	
GRAND TOTAL		21.420.036,00	

Ekuitas
Rp67.749.193.172.758,
00

C.30. EKUITAS

Ekuitas per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp67.749.193.172.758,00 dan Rp67.744.562.310.510,00. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Penjelasan lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Catatan Atas Laporan Keuangan – *Penjelasan atas Pos-Pos Neraca*
Per 31 Desember Tahun Anggaran 2021 (*Audited*)
Dengan Angka Perbandingan 31 Desember Tahun Anggaran 2020
(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)



D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

Pendapatan PNB
Rp3.016.169.551.976,00

D.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Pendapatan-LO adalah hak pemerintah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Hak pemerintah tersebut dapat diakui sebagai Pendapatan-LO apabila telah timbul hak pemerintah untuk menagih atas suatu pendapatan atau telah terdapat suatu realisasi pendapatan yang ditandai dengan adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.

Basis akrual akuntansi Pendapatan-LO mengakui pengaruh transaksi penghasil pendapatan atau peristiwa lain penghasil pendapatan pada saat transaksi atau peristiwa penyebab timbulnya hak atas pendapatan terjadi, tanpa memerhatikan saat pendapatan tersebut diterima dalam bentuk tunai atau bentuk penerimaan lain.

Jenis pendapatan pada Kementerian Hukum dan HAM antara lain:

- a. Pendapatan jasa berasal dari penerimaan Jasa Keimigrasian yaitu penerbitan paspor WNI dan Visa/izin tinggal Warga Negara Asing (Ditjen Imigrasi), perlindungan hukum bagi Kekayaan Intelektual (Ditjen Kekayaan Intelektual), dan penerimaan jasa administrasi hukum (Ditjen Administrasi Hukum Umum);
- b. Pendapatan dari pengelolaan BMN berasal dari pendapatan sewa rumah dinas yang ditinggali oleh PNS;
- c. Pendapatan dari hasil karya napi ataupun atas penjualan pemanfaatan sumber daya yang ada pada satker yang melibatkan narapidana pada kegiatan industri dalam lapas/rutan yang dananya bersumber dari DIPA satker seperti penjualan hasil budidaya lele, ikan nila, hasil perkebunan, salon, bengkel, dan sebagainya;
- d. Pendapatan penjualan atas hasil bongkahan/bongkaran bangunan sesuai arahan KPKNL setempat;
- e. Pendapatan bunga lainnya yang merupakan pendapatan jasa giro bank;
- f. Pendapatan dalam rangka penyelenggaraan pendidikan atau pelatihan;
- g. Pendapatan atas pelayanan kesehatan yang diberikan pada Rumah Sakit Umum Pengayoman;
- h. Pendapatan denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah digunakan untuk mencatat denda yang ditetapkan sesuai kontrak perjanjian pengadaan barang milik pemerintah



yang dibayarkan oleh rekanan karena adanya wanprestasi atas pelaksanaan kontrak tersebut;

- i. Pendapatan atas pengembalian kelebihan pembayaran belanja tahun anggaran yang lalu.

Pendapatan Negara Bukan Pajak-LO Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp3.016.169.551.976,00 dan Rp2.783.249.220.519,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 170
Perbandingan Pendapatan Negara Bukan Pajak-LO
Untuk Periode Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Akun	Uraian	31 Desember 2021	31 Desember 2020	Naik/Turun (%)
425119	Pendapatan Penjualan Hasil Produksi Non Litbang Lainnya	2.495.262.850,00	1.861.341.465,00	34,06
425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	15.448.441.778,00	13.290.696.620,00	16,24
425132	Pendapatan Sewa Peralatan dan Mesin	13.266.000,00	14.766.000,00	(10,16)
425139	Pendapatan dari Pemanfaatan BMN Lainnya	52.985.381,00	117.433.229,00	(54,88)
425211	Pendapatan Paspor	295.490.600.000,00	451.296.950.000,00	(34,52)
425212	Pendapatan Visa	392.551.045.115,00	229.088.321.928,00	71,35
425213	Pendapatan Izin Keimigrasian dan Izin Masuk Kembali (Re-entry permit)	680.470.850.000,00	605.627.700.000,00	12,36
425214	Pendapatan Pelayanan Keimigrasian Lainnya	52.081.100.000,00	48.946.700.000,00	6,40
425215	Pendapatan Pelayanan Fidusia	563.230.300.000,00	487.997.550.000,00	15,42
425216	Pendapatan Pelayanan Badan Hukum	226.140.517.572,00	219.301.340.860,00	3,12
425217	Pendapatan Pelayanan Jasa Hukum Lainnya	71.468.709.050,00	47.653.563.729,00	49,98
425218	Pendapatan Pelayanan Kekayaan Intelektual	708.533.867.704,00	667.005.892.779,00	6,23



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Catatan Atas Laporan Keuangan – *Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Operasional*
Per 31 Desember Tahun Anggaran 2021 (*Audited*)
Dengan Angka Perbandingan 31 Desember Tahun Anggaran 2020
(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

425219	Pendapatan Pelayanan dan Administrasi Hukum Lainnya	848.826.372,00	1.419.789.968,00	(40,21)
425311	Pendapatan dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)	39.980.202,00	47.118.900,00	(15,15)
425313	Pendapatan Layanan Fasilitas Kesehatan	36.103.600,00	9.184.400,00	293,10
425421	Pendapatan Layanan Pendidikan dan/atau Pelatihan	987.500.000,00	987.500.000,00	0,00
425699	Pendapatan Jasa Lainnya	1.391.526.620,00	1.269.653.046,00	9,60
425764	Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)	32.476.271,00	92.084.110,00	(64,73)
425811	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	4.830.163.263,00	6.352.827.374,00	(23,97)
425991	Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji	6.205.300,00	23.800.055,00	(73,93)
425999	Pendapatan Anggaran Lain-lain	19.824.898,00	845.006.056,00	(97,65)
Total		3.016.169.551.976,00	2.783.249.220.519,00	8,37

Dari tabel di atas dapat kita lihat terjadi kenaikan pendapatan dibandingkan periode sebelumnya pada beberapa pendapatan seperti Pendapatan Visa sebesar 71,35%, Pendapatan Izin Keimigrasian dan Izin Masuk Kembali (Re-entry permit) sebesar 12,36%, Pendapatan Pelayanan Keimigrasian Lainnya sebesar 6,40%, Pendapatan Pelayanan Fidusia sebesar 15,42%, Pendapatan Pelayanan Badan Hukum sebesar 3,12%, Pendapatan Pelayanan Jasa Hukum Lainnya sebesar 49,98%, Pendapatan Pelayanan Kekayaan Intelektual sebesar 6,23%, dan beberapa pendapatan lainnya sehingga menyebabkan pendapatan LO meningkat sebesar 8,37% atau sebesar Rp232.920.331.457,00.

Kenaikan pendapatan pada Tahun 2021 ini juga disebabkan karena pada Tahun 2020 pendapatan Kementerian Hukum dan HAM mengalami penurunan sebagai dampak dari adanya pandemi Covid-19, sehingga mengakibatkan beberapa operasional pelayanan publik di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM mengalami pembatasan layanan pada Tahun 2020. Pada Tahun 2020, penurunan pendapatan



terbesar berada pada pendapatan jasa keimigrasian yang disebabkan dampak pandemi Covid-19 yang mengakibatkan pembatasan bagi warga negara asing untuk berkunjung ke Indonesia dan pembatasan bagi warga negara Indonesia untuk berkunjung ke luar negeri.

Selanjutnya pada Tahun 2021, mulai diterapkan kelonggaran aturan terkait pembatasan sosial sehingga memungkinkan pelayanan yang diberikan oleh Kementerian Hukum dan HAM dapat kembali diperoleh oleh masyarakat, yang berdampak pada meningkatnya pendapatan di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM. Beberapa hal yang membuat kenaikan Pendapatan Negara Bukan Pajak-LO di antaranya sebagai berikut:

1. Pada awal tahun 2021, pemerintah memberikan kelonggaran kebijakan bepergian sehingga banyak masyarakat yang optimis dengan kondisi yang semakin membaik;
2. Adanya kelonggaran kebijakan terkait dengan izin masuk dan izin tinggal bagi warga negara asing sehingga berdampak pada peningkatan pendapatan visa dan izin keimigrasian;
3. Mulai diterapkannya kebijakan WFO yang berdampak pada kembali aktifnya kantor-kantor Notaris dan lembaga pembiayaan sehingga volume transaksi khususnya transaksi badan hukum dan jasa hukum lainnya mulai meningkat;
4. Kembali dibukanya pendaftaran untuk pengangkatan notaris;
5. Mulai membaiknya kondisi penyebaran Covid-19 di awal tahun 2021 menyebabkan meningkatnya aktivitas masyarakat yang berdampak pada meningkatnya kebutuhan pelayanan legalisasi;
6. Meningkatnya volume transaksi layanan kekayaan intelektual yang disebabkan oleh tumbuhnya kesadaran masyarakat terhadap perlindungan Merek, Paten, dan Hak Cipta.

Perbandingan Pendapatan PNB-LO dengan Pendapatan PNB-LRA untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:



Tabel 171
Perbandingan
Pendapatan PNBP-LO dan Pendapatan PNBP-LRA
Untuk Periode Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2021

Pendapatan PNBP-LO	Pendapatan PNBP-LRA	Selisih
3.016.169.551.976,00	3.185.268.555.856,00	(169.099.003.880,00)

Rincian selisih antara Pendapatan PNBP-LO dengan Pendapatan PNBP-LRA untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 172
Rincian Selisih PNBP-LO dan PNBP-LRA
Untuk Periode Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2021

Uraian	PNBP-LO	PNBP-LRA	Selisih
Pendapatan Penjualan Hasil Produksi Non Litbang Lainnya	2.495.262.850,00	2.495.262.850,00	0,00
Pendapatan dari Penjualan Tanah, Gedung, dan Bangunan	0,00	283.350.198,00	(283.350.198,00)
Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	0,00	1.287.503.250,00	(1.287.503.250,00)
Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	0,00	1.600.338.007,00	(1.600.338.007,00)
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	15.448.441.778,00	13.731.552.731,00	1.716.889.047,00
Pendapatan Sewa Peralatan dan Mesin	13.266.000,00	13.266.000,00	0,00
Pendapatan dari Pemanfaatan BMN Lainnya	52.985.381,00	70.161.168,00	(17.175.787,00)
Pendapatan Paspor	295.490.600.000,00	295.490.600.000,00	0,00
Pendapatan Visa	392.551.045.115,00	392.551.045.115,00	0,00
Pendapatan Izin Keimigrasian dan Izin Masuk Kembali (Re-entry permit)	680.470.850.000,00	680.470.850.000,00	0,00



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Catatan Atas Laporan Keuangan – *Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Operasional*
Per 31 Desember Tahun Anggaran 2021 (*Audited*)
Dengan Angka Perbandingan 31 Desember Tahun Anggaran 2020
(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Pendapatan Pelayanan Keimigrasian Lainnya	52.081.100.000,00	52.971.100.000,00	(890.000.000,00)
Pendapatan Pelayanan Fidusia	563.230.300.000,00	563.613.700.000,00	(383.400.000,00)
Pendapatan Pelayanan Badan Hukum	226.140.517.572,00	227.578.817.572,00	(1.438.300.000,00)
Pendapatan Pelayanan Jasa Hukum Lainnya	71.468.709.050,00	71.365.209.050,00	103.500.000,00
Pendapatan Pelayanan Kekayaan Intelektual	708.533.867.704,00	832.656.433.544,00	(124.122.565.840,00)
Pendapatan Pelayanan dan Administrasi Hukum Lainnya	848.826.372,00	848.826.372,00	0,00
Pendapatan dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)	39.980.202,00	39.980.202,00	0,00
Pendapatan Layanan Fasilitas Kesehatan	36.103.600,00	36.103.600,00	0,00
Pendapatan Layanan Pendidikan dan/atau Pelatihan	987.500.000,00	987.500.000,00	0,00
Pendapatan Jasa Lainnya	1.391.526.620,00	1.391.526.620,00	0,00
Pendapatan dari Untung Selisih Kurs Uang Persediaan	0,00	2.275.370,00	(2.275.370,00)
Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)	32.476.271,00	37.392.827,00	(4.916.556,00)
Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara	0,00	157.104.373,00	(157.104.373,00)
Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Bendahara	0,00	27.000.000,00	(27.000.000,00)
Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pihak Ketiga	0,00	3.500.000,00	(3.500.000,00)
Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	4.830.163.263,00	6.839.633.114,00	(2.009.469.851,00)



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Catatan Atas Laporan Keuangan – *Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Operasional*
Per 31 Desember Tahun Anggaran 2021 (*Audited*)
Dengan Angka Perbandingan 31 Desember Tahun Anggaran 2020
(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0,00	1.178.047.774,00	(1.178.047.774,00)
Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0,00	24.898.397.306,00	(24.898.397.306,00)
Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	0,00	12.202.421.890,00	(12.202.421.890,00)
Pendapatan Setoran dari Sisa Utang Non TP/TGR Pensiunan	0,00	413.626.725,00	(413.626.725,00)
Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji	6.205.300,00	6.205.300,00	0,00
Pendapatan Anggaran Lain-lain	19.824.898,00	19.824.898,00	0,00
Total	3.016.169.551.976,00	3.185.268.555.856,00	(169.099.003.880,00)

Penjelasan selisih antara Pendapatan PNB-P-LO dengan Pendapatan PNB-P-LRA untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 173
Penjelasan Selisih
Pendapatan PNB-P-LO dan Pendapatan PNB-P-LRA
Untuk Periode Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2021

Uraian	Selisih	Keterangan
Pendapatan dari Penjualan Tanah, Gedung, dan Bangunan	(283.350.198,00)	Pendapatan ini membentuk Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar-LO
Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	(1.287.503.250,00)	Pendapatan ini membentuk Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar-LO
Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	(1.600.338.007,00)	Pendapatan ini membentuk Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar-LO



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Catatan Atas Laporan Keuangan – *Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Operasional*
Per 31 Desember Tahun Anggaran 2021 (*Audited*)
Dengan Angka Perbandingan 31 Desember Tahun Anggaran 2020
(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	1.716.889.047,00	Selisih disebabkan di antaranya: Penambahan dan pengurangan atas Piutang PNBK, misalkan sewa gedung PT Paramitha Penambahan dan pengurangan atas Pendapatan Diterima di Muka, misalkan sewa lahan pada pihak ketiga (koperasi, ATM, SPBU, dan sebagainya) Penambahan dan pengurangan atas Pendapatan yang Masih Harus Diterima, misalkan sewa bangunan untuk tempat usaha (kantin, fotocopy, dan sebagainya)
Pendapatan dari Pemanfaatan BMN Lainnya	(17.175.787,00)	Selisih disebabkan karena Jurnal penghapusan pendapatan yang masih harus diterima atas sewa TV Lift oleh PT. Focus Media Indonesia bulan Februari s.d Desember 2020 yang sudah dibayarkan Jurnal pengakuan pendapatan diterima dimuka atas sewa TV Lift dari PT Focus Media Indonesia periode Januari-Februari 2022 yang sudah dibayarkan pada tahun 2021



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
 Catatan Atas Laporan Keuangan – *Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Operasional*
 Per 31 Desember Tahun Anggaran 2021 (*Audited*)
 Dengan Angka Perbandingan 31 Desember Tahun Anggaran 2020
 (Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Pendapatan Pelayanan Keimigrasian Lainnya	(890.000.000,00)	Selisih disebabkan karena adanya penambahan dan pengurangan atas beban alat angkut atas WNA yang masa berlaku Visanya sudah habis
Pendapatan Pelayanan Fidusia	(383.400.000,00)	Selisih disebabkan karena adanya penambahan dan pengurangan atas pendapatan atas voucher pelayanan fidusia yang dibeli masyarakat namun belum digunakan dalam pelayanan jasa hukum pada aplikasi AHU Online
Pendapatan Pelayanan Badan Hukum	(1.438.300.000,00)	Selisih disebabkan karena adanya penambahan dan pengurangan atas pendapatan atas voucher pelayanan badan hukum yang dibeli masyarakat namun belum digunakan dalam pelayanan jasa hukum pada aplikasi AHU Online, misalkan pendirian PT, Yayasan
Pendapatan Pelayanan Jasa Hukum Lainnya	103.500.000,00	Selisih disebabkan karena adanya penambahan dan pengurangan atas pendapatan atas voucher pelayanan jasa hukum lainnya yang dibeli masyarakat namun belum digunakan dalam pelayanan jasa hukum pada aplikasi AHU Online



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
 Catatan Atas Laporan Keuangan – *Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Operasional*
 Per 31 Desember Tahun Anggaran 2021 (*Audited*)
 Dengan Angka Perbandingan 31 Desember Tahun Anggaran 2020
 (Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Pendapatan Pelayanan Kekayaan Intelektual	(124.122.565.840,00)	Selisih disebabkan di antaranya: Penambahan dan pengurangan atas piutang yang muncul karena pemegang paten belum melakukan pembayaran atas biaya pemeliharaan paten Koreksi atas selisih kurs yang belum terealisasi atas pencatatan biaya pendaftaran dan perpanjangan merek internasional melalui Protokol Madrid
Pendapatan dari Untung Selisih Kurs Uang Persediaan	(2.275.370,00)	Pendapatan ini membentuk Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO. Terdapat pada Perwakilan Imigrasi di Sidney
Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)	(4.916.556,00)	Selisih disebabkan di antaranya: Pendapatan jasa giro yang belum disetor ke kas negara (terdapat pada Kanwil Aceh) Pencatatan pendapatan jasa giro uang pailit (terdapat pada BHP Semarang)
Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara	(157.104.373,00)	Pendapatan ini membentuk Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO
Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Bendahara	(27.000.000,00)	Pendapatan ini membentuk Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Catatan Atas Laporan Keuangan – *Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Operasional*
Per 31 Desember Tahun Anggaran 2021 (*Audited*)
Dengan Angka Perbandingan 31 Desember Tahun Anggaran 2020
(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pihak Ketiga	(3.500.000,00)	Pendapatan ini membentuk Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO
Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	(2.009.469.851,00)	Selisih disebabkan karena adanya penambahan dan pengurangan atas pendapatan denda keterlambatan pekerjaan pemerintah yang tidak terselesaikan tepat pada waktunya (terdapat pada Unit Eselon I Ditjen AHU, Ditjen PAS, dan Ditjen Imigrasi)
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	(1.178.047.774,00)	Pendapatan ini membentuk Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO
Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	(24.898.397.306,00)	Pendapatan ini membentuk Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO
Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	(12.202.421.890,00)	Pendapatan ini membentuk Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO
Pendapatan Setoran dari Sisa Utang Non TP/TGR Pensiunan	(413.626.725,00)	Pendapatan ini membentuk Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO
Total	(169.099.003.880,00)	

Dari tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa selisih antara Pendapatan PNB-LO dan Pendapatan PNB-LRA sebesar **(Rp169.099.003.880,00)** disebabkan oleh adanya beberapa Pendapatan yang tidak membentuk Pendapatan PNB-LO namun membentuk Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar-LO ataupun Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO serta adanya jurnal akrual yang menambah



Pendapatan PNB-LO tahun berjalan dan jurnal akrual yang mengurangi Pendapatan PNB-LO karena secara akuntansi akrual transaksi tersebut tidak diperhitungkan sebagai Pendapatan PNB-LO tahun berjalan namun merupakan Pendapatan Operasional Tahun Anggaran Yang Lalu.

Rekapitulasi selisih Pendapatan PNB-LO dan Pendapatan PNB-LRA untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dapat dijelaskan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 174
Rekapitulasi Selisih
Pendapatan PNB-LO dan Pendapatan PNB-LRA
Untuk Periode Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2021

a	Pendapatan PNB LO	3.016.169.551.976,00
b	Pendapatan PNB LRA	3.185.268.555.856,00
c	Selisih Antara LO dan LRA (a - b)	(169.099.003.880,00)
	Faktor Yang Mempengaruhi	
	Pendapatan Yang Masih Harus Diterima Akhir	25.139.898,00
	Pendapatan Yang Masih Harus Diterima Awal	31.297.367,00
d	Kenaikan/Penurunan Pendapatan YMHD	(6.157.469,00)
	Piutang PNB Akhir	231.767.531.548,00
	Piutang PNB Awal	271.664.242.306,00
e	Kenaikan/Penurunan Piutang PNB	(39.896.710.758,00)
	Kas Di Bendahara Penerimaan Akhir	0,00
	Kas Di Bendahara Penerimaan Awal	1.000.000,00
f	Kenaikan/Penurunan Kas di Bend. Penerima	(1.000.000,00)
	Pendapatan Diterima Dimuka Akhir	584.177.088.896,00
	Pendapatan Diterima Dimuka Awal	485.306.124.011,00
g	Kenaikan/Penurunan Pend. Ditrn Dimuka	98.870.964.885,00
	Pendapatan dari Untung Selisih Kurs Uang Persediaan (425752)	2.275.370,00
	Pendapatan Setoran dari Sisa Utang Non TP/TGR Pensiunan PNS (425931)	413.626.725,00
	Pendapatan Pengembalian Belanja TAYL (42591x)	38.278.866.970,00
h	PNBP yang membentuk Pendapatan Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya LO (o + p)	38.694.769.065,00



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Catatan Atas Laporan Keuangan – *Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Operasional*
Per 31 Desember Tahun Anggaran 2021 (*Audited*)
Dengan Angka Perbandingan 31 Desember Tahun Anggaran 2020
(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Pendapatan Dari Pemindahtanganan BMN (42512x)	3.171.191.455,00
i	PNBP yang membentuk Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar LO (r)	3.171.191.455,00
j	Jumlah Faktor Yang Mempengaruhi (d + e + f - g - h - i)	(180.640.793.632,00)
	Faktor Lain Yang Mempengaruhi	
	Pendapatan Ganti Rugi Negara (42579x)	(187.604.373,00)
	Jurnal Pencatatan Baru Piutang PNBPN atas Transaksi Pengembalian Belanja Modal (Aset Belum Register)	(526.939.543,00)
	Jurnal Pembayaran Piutang PNBPN dengan menggunakan Akun 42591x	12.948.864.894,00
	Jurnal Pencatatan Piutang PNBPN dengan menggunakan Akun 42591x	(2.218.394.925,00)
	Jurnal Pencatatan Baru Piutang PNBPN atas Transaksi Pengembalian Belanja Barang (Termasuk pengembalian belanja BAMA, dsb)	(1.177.925.350,00)
	Jurnal Penghapusan Piutang	7.432.130.740,00
	Jurnal Balik Piutang atas Koreksi Belanja Barang Non Operasional Lainnya	423.000.000,00
	Jurnal Pencatatan Baru Piutang atas Koreksi Belanja Barang Non Operasional Lainnya	(851.089.868,00)
	Jurnal Piutang Lainnya dengan Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi	(596.476.406,00)
	Jurnal Manual Reklasifikasi Piutang PNBPN	25.940.750,00
	Jurnal Koreksi Lainnya Atas Transaksi Piutang	729.160.488,00
	Jurnal Koreksi Lainnya Atas Transaksi Pendapatan Diterima Dimuka	40.327.255.614,00
	Jurnal Kas Lainnya Di Bendahara Penerimaan atas Pendapatan	(44.785.426.213,00)
	Jurnal Kas Lainnya Di Bendahara Pengeluaran atas Pendapatan	(6.056,00)
	Jurnal Koreksi Lainnya Atas Pendapatan Yang Masih harus Diterima	(700.000,00)
	Jurnal Transfer Masuk Piutang PNBPN	(940.000.000,00)
	Jurnal Transfer Keluar Piutang PNBPN	940.000.000,00
k	Total Faktor Lain Yang Mempengaruhi	11.541.789.752,00
l	Pendapatan PNBPN LO (b + j + k)	3.016.169.551.976,00
	Selisih (a - l)	0,00



Terdapat pengembalian pendapatan per 31 Desember 2021 yang terjadi karena kelebihan pembayaran, kesalahan pembayaran atau pembayaran ganda dari penerimaan jasa administrasi hukum (Ditjen Administrasi Hukum Umum), pelayanan keimigrasian dan sewa tanah gedung dan bangunan (Ditjen Imigrasi), dan penerimaan perlindungan hukum bagi Kekayaan Intelektual (Ditjen Kekayaan Intelektual).

Rincian pengembalian pendapatan dari Pendapatan Administrasi dan Penegakan Hukum per 31 Desember 2021 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 175
Rincian pengembalian pendapatan per 31 Desember 2021

NO	SATUAN KERJA	JUMLAH	KETERANGAN
1	Direktorat Jenderal Imigrasi	117.530.750,00	• Pengembalian Izin Masuk Kembali Masa Berlaku Paling Lama 1 (Satu) Tahun dan Izin Tinggal Terbatas Masa Berlaku Paling Lama 1 (Satu) Tahun • Pengembalian belanja sewa tanah gedung dan bangunan pada Kanim Surakarta Rp3.128.750,00 disebabkan karena kesalahan input kode billing setoran pada teller Bank BJB yang seharusnya merupakan kode billing untuk pendapatan sewa ATM BNI
2	Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum	33.850.000,00	Pengembalian Pendapatan Pelayanan Badan Hukum disebabkan karena kesalahan pembelian voucher layanan AHU
3	Ditjen Kekayaan Intelektual	611.950.000,00	Merupakan pengembalian pembayaran PNPB yang disebabkan oleh kesalahan pemilihan jenis pelayanan Kekayaan Intelektual oleh pemohon secara daring dan terhadap kode billing yang telah dibayarkan belum digunakan untuk mengajukan pelayanan kekayaan intelektual.



TOTAL	763.330.750,00	

Beban Pegawai

Rp6.762.851.059.636,00

D.2 Beban Pegawai

Beban Pegawai-LO adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negara Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Beban Pegawai-LO Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp6.762.851.059.636,00 dan Rp6.472.424.263.549,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 176

Perbandingan Beban Pegawai-LO

Untuk Periode Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Akun	Uraian	31 Desember 2021	31 Desember 2020	Naik/ Turun (%)
511111	Beban Gaji Pokok PNS	2.500.395.179.801,00	2.411.418.903.406,00	3,69
511119	Beban Pembulatan Gaji PNS	43.755.270,00	44.429.588,00	(1,52)
511121	Beban Tunjangan Suami/Istri PNS	163.157.440.619,00	157.120.433.073,00	3,84
511122	Beban Tunjangan Anak PNS	45.255.956.141,00	43.841.227.151,00	3,23
511123	Beban Tunjangan Struktural PNS	76.021.333.989,00	73.416.146.450,00	3,55
511124	Beban Tunjangan Fungsional PNS	191.863.775.438,00	185.040.564.022,00	3,69
511125	Beban Tunjangan PPh PNS	4.287.122.696,00	3.692.013.120,00	16,12
511126	Beban Tunjangan Beras PNS	151.217.521.340,00	123.807.492.308,00	22,14
511129	Beban Uang Makan PNS	567.342.685.821,00	535.922.042.484,00	5,86
511135	Beban Tunjangan Daerah Terpencil/Sangat Terpencil PNS	558.825.000,00	490.125.000,00	14,02



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Catatan Atas Laporan Keuangan – *Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Operasional*
Per 31 Desember Tahun Anggaran 2021 (*Audited*)
Dengan Angka Perbandingan 31 Desember Tahun Anggaran 2020
(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

511138	Beban Tunjangan Khusus Papua PNS	7.933.725.000,00	7.217.125.000,00	9,93
511145	Beban Tunj. Penghidupan Luar Negeri untuk Home Staff PNS	1.083.094.685,00	1.026.604.568,00	5,50
511151	Beban Tunjangan Umum PNS	32.980.768.563,00	25.709.039.986,00	28,28
512211	Beban Uang Lembur	33.773.482.164,00	30.202.051.081,00	11,83
512411	Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan)	2.986.936.393.109,00	2.873.476.066.312,00	3,95
Total		6.762.851.059.636,00	6.472.424.263.549,00	4,49

Perbandingan Beban Pegawai-LO dengan Belanja Pegawai-LRA untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 177
Perbandingan
Beban Pegawai-LO dengan Belanja Pegawai-LRA
Untuk Periode Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2021

Beban Pegawai-LO	Belanja Pegawai-LRA	Selisih
6.762.851.059.636,00	6.762.254.319.598,00	596.740.038,00

Rincian selisih antara Beban Pegawai-LO dengan Belanja Pegawai-LRA adalah sebagai berikut:

Tabel 178
Rincian Selisih
Beban Pegawai-LO dengan Belanja Pegawai-LRA
Untuk Periode Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2021

Akun	Uraian	Beban Pegawai-LO	Belanja Pegawai-LRA	Selisih
511111	Beban Gaji Pokok PNS	2.500.395.179.801,00	2.500.369.175.258,00	26.004.543,00
511119	Beban Pembulatan Gaji PNS	43.755.270,00	43.749.439,00	5.831,00
511121	Beban Tunjangan Suami/Istri PNS	163.157.440.619,00	163.155.896.517,00	1.544.102,00
511122	Beban Tunjangan Anak PNS	45.255.956.141,00	45.255.447.370,00	508.771,00



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Catatan Atas Laporan Keuangan – *Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Operasional*
Per 31 Desember Tahun Anggaran 2021 (*Audited*)
Dengan Angka Perbandingan 31 Desember Tahun Anggaran 2020
(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

511123	Beban Tunjangan Struktural PNS	76.021.333.989,00	76.022.211.289,00	(877.300,00)
511124	Beban Tunjangan Fungsional PNS	191.863.775.438,00	191.845.228.938,00	18.546.500,00
511125	Beban Tunjangan PPh PNS	4.287.122.696,00	4.287.431.440,00	(308.744,00)
511126	Beban Tunjangan Beras PNS	151.217.521.340,00	151.217.666.180,00	(144.840,00)
511129	Beban Uang Makan PNS	567.342.685.821,00	566.791.224.646,00	551.461.175,00
511135	Beban Tunjangan Daerah Terpencil/Sangat Terpencil PNS	558.825.000,00	558.825.000,00	0,00
511138	Beban Tunjangan Khusus Papua PNS	7.933.725.000,00	7.933.725.000,00	0,00
511145	Beban Tunj. Penghidupan Luar Negeri untuk Home Staff PNS	1.083.094.685,00	1.083.094.685,00	0,00
511151	Beban Tunjangan Umum PNS	32.980.768.563,00	32.980.768.563,00	0,00
512211	Beban Uang Lembur	33.773.482.164,00	33.773.482.164,00	0,00
512411	Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan)	2.986.936.393.109,00	2.986.936.393.109,00	0,00
Total		6.762.851.059.636,00	6.762.254.319.598,00	596.740.038,00

Selisih antara Beban Pegawai-LO dengan Belanja Pegawai-LRA dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 179
Penjelasan Selisih
Beban Pegawai-LO dengan Belanja Pegawai-LRA
Untuk Periode Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2021

Uraian	Selisih	Keterangan
Beban Gaji Pokok PNS	26.004.543,00	Pembayaran Utang Belanja Pegawai TAYL sebesar (Rp91.819.439,00) Pencatatan Utang Belanja Pegawai Tahun Berjalan sebesar Rp117.823.982,00



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
 Catatan Atas Laporan Keuangan – *Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Operasional*
 Per 31 Desember Tahun Anggaran 2021 (*Audited*)
 Dengan Angka Perbandingan 31 Desember Tahun Anggaran 2020
 (Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Beban Pembulatan Gaji PNS	5.831,00	Pembayaran Utang Belanja Pegawai TAYL sebesar (Rp2.150,00) Pencatatan Utang Belanja Pegawai Tahun Berjalan sebesar Rp7.981,00
Beban Tunjangan Suami/Istri PNS	1.544.102,00	Pembayaran Utang Belanja Pegawai TAYL sebesar (Rp1.297.770,00) Pencatatan Utang Belanja Pegawai Tahun Berjalan sebesar Rp2.841.872,00
Beban Tunjangan Anak PNS	508.771,00	Pembayaran Utang Belanja Pegawai TAYL sebesar (Rp261.690,00) Pencatatan Utang Belanja Pegawai Tahun Berjalan sebesar Rp770.461,00
Beban Tunjangan Struktural PNS	(877.300,00)	Pembayaran Utang Belanja Pegawai TAYL sebesar (Rp1.714.100,00) Pencatatan Utang Belanja Pegawai Tahun Berjalan sebesar Rp836.800,00
Beban Tunjangan Fungsional PNS	18.546.500,00	Pembayaran Utang Belanja Pegawai TAYL sebesar (Rp5.315.000,00) Pencatatan Utang Belanja Pegawai Tahun Berjalan sebesar Rp23.861.500,00
Beban Tunjangan PPh PNS	(308.744,00)	Pembayaran Utang Belanja Pegawai TAYL sebesar (Rp346.343,00) Pencatatan Utang Belanja Pegawai Tahun Berjalan sebesar Rp37.599,00
Beban Tunjangan Beras PNS	(144.840,00)	Pembayaran Utang Belanja Pegawai TAYL sebesar (Rp144.840,00)
Beban Uang Makan PNS	551.461.175,00	Pembayaran Utang Belanja Pegawai TAYL sebesar (Rp4.272.152.650,00) Pencatatan Utang Belanja



		Pegawai Tahun Berjalan sebesar Rp4.823.613.825,00
Total	596.740.038,00	

Perhitungan selisih antara Beban Pegawai-LO dengan Belanja Pegawai-LRA berdasarkan Analisa Hubungan antar Laporan dapat dijelaskan secara ringkas dalam tabel berikut:

Tabel 180
Perhitungan Selisih
Beban Pegawai-LO dengan Belanja Pegawai-LRA
Untuk Periode Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2021

a	Beban Pegawai LO	6.762.851.059.636,00
b	Belanja Pegawai LRA	6.762.254.319.598,00
c	Selisih Antara LO dan LRA (a - b)	596.740.038,00
	Faktor Yang Mempengaruhi	
	Pembayaran Utang Belanja Pegawai TAYL	(4.373.053.982,00)
	Pencatatan Utang Belanja Pegawai Tahun Anggaran Berjalan	4.969.794.020,00
d	Total Faktor Yang Mempengaruhi	596.740.038,00
e	Beban Pegawai Total (b + d + e)	6.762.851.059.636,00
	Selisih (a - e)	0,00

Beban Persediaan
Rp538.662.134.519,00

D.3 Beban Persediaan

Beban Persediaan-LO merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan.

Beban Persediaan-LO Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp538.662.134.519,00 dan Rp501.359.428.804,00 dengan rincian sebagai berikut:



Tabel 181
Perbandingan Beban Persediaan-LO
Untuk Periode Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Akun	Uraian	31 Desember 2021	31 Desember 2020	Naik/ Turun (%)
593111	Beban Persediaan Konsumsi	507.231.803.302,00	447.413.964.885,00	13,37
593112	Beban Persediaan Amunisi	928.327.353,00	1.718.542.857,00	(45,98)
593131	Beban Persediaan Bahan Baku	30.499.789.174,00	52.049.732.190,00	(41,40)
593149	Beban Persediaan Lainnya	2.214.690,00	177.188.872,00	(98,75)
Total		538.662.134.519,00	501.359.428.804,00	7,44

Perbandingan Beban Persediaan-LO dengan Belanja Persediaan-LRA untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 182
Perbandingan
Beban Persediaan-LO dengan Belanja Persediaan-LRA
Untuk Periode Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2021

Beban Persediaan-LO	Belanja Persediaan-LRA	Selisih
538.662.134.519,00	536.747.039.834,00	1.915.094.685,00

Perhitungan selisih antara Beban Persediaan-LO dengan Belanja Persediaan-LRA dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 183
Perhitungan Selisih
Beban Persediaan-LO dengan Belanja Persediaan-LRA
Untuk Periode Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2021

a	Beban Persediaan LO	538.662.134.519,00
b	Belanja Barang Persediaan LRA (Akun 5218xx)	536.747.039.834,00
c	Selisih Antara LO dan LRA (a - b)	1.915.094.685,00
Faktor Yang Mempengaruhi		
	Persediaan Awal	597.192.271.954,00
	Persediaan Akhir	604.873.054.596,00



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Catatan Atas Laporan Keuangan – *Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Operasional*
Per 31 Desember Tahun Anggaran 2021 (*Audited*)
Dengan Angka Perbandingan 31 Desember Tahun Anggaran 2020
(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Persediaan Belum diregister	0,00
d	Kenaikan/Penurunan Persediaan	(7.680.782.642,00)
	Blnj Brg Persediaan Pemeliharaan Gedung, Bangunan	8.840.363.773,00
	Blnj Brg Persediaan Pemeliharaan Peralatan Mesin	2.265.584.263,00
e	Blnj Brg Persediaan Akun 523xxx	11.105.948.036,00
	Beban Persediaan Bahan Untuk Pemeliharaan	39.034.260.025,00
	Beban Persediaan Suku Cadang	572.338.480,00
f	Beban Persediaan Yang Membentuk Beban Pemeliharaan LO	39.606.598.505,00
	Faktor Lain Yang Mempengaruhi	
	Transfer Keluar Barang Persediaan	(298.384.222.955,00)
	Kerugian Persediaan Rusak/Usang	(5.848.632.439,00)
	Penghapusan Barang Persediaan	(13.296.000,00)
	Reklas Keluar	(75.517.572.723,00)
	Persediaan Kurang	(379.763.724.117,00)
	Transfer Masuk Barang Persediaan	273.591.460.208,00
	Saldo Awal Persediaan Hasil Reklasifikasi Aset	8.314.217.463,00
	Hibah Masuk	23.364.164.491,00
	Reklas Masuk	105.922.789.823,00
	Persediaan Tambah	411.192.631.985,00
	Jurnal Manual Koreksi Nilai Persediaan	175.414,00
	Jurnal Persediaan Belum Register Karena Belanja Barang Persediaan, namun tidak menggunakan Akun Persediaan (521 / 522 non persediaan)	184.344.655,00
	Jurnal Persediaan Belum Register Karena Belanja Pemeliharaan (523 Non Persediaan) menggunakan Akun Belanja Persediaan	(40.766.176,00)
	Jurnal Persediaan Belum Register Karena Belanja Menggunakan Akun Persediaan (5218xx), namun digunakan untuk Belanja Barang Non Persediaan (521 / 522 non persediaan)	(1.278.863.017,00)
	Jurnal Manual Belum Register atas Belanja Persediaan yang membentuk Aset	(313.341.484,00)



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Catatan Atas Laporan Keuangan – *Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Operasional*
Per 31 Desember Tahun Anggaran 2021 (*Audited*)
Dengan Angka Perbandingan 31 Desember Tahun Anggaran 2020
(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Jurnal Manual Belum Register atas Belanja Persediaan yang menggunakan akun belanja 53	8.591.788.900,00
	Jurnal Manual Belum Register atas Belanja Persediaan yang membentuk Beban Aset Ekstrakomptabel	(457.868.290,00)
	Jurnal Penyesuaian/Umum	6.685.470.002,00
	Koreksi Nilai Persediaan sebagai Dampak dari Update Aplikasi	(17.850.074,00)
g	Total Faktor Lain Yang Mempengaruhi	38.096.527.796,00
h	Beban Persediaan Total (b+d+e-f-g+h)	538.662.134.519,00
	Selisih (a - h)	0,00

Beban Barang dan Jasa D.4 Beban Barang dan Jasa
Rp4.120.083.995.696,00

Beban Barang dan Jasa-LO Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp4.120.083.995.696,00 dan Rp3.911.545.495.096,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 184

Perbandingan Beban Barang dan Jasa-LO

Untuk Periode Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Akun	Uraian	31 Desember 2021	31 Desember 2020	Naik/ Turun (%)
521111	Beban Keperluan Perkantoran	283.905.703.417,00	239.983.801.770,00	18,30
521112	Beban Pengadaan Bahan Makanan	1.923.525.002.451,00	1.760.176.737.629,00	9,28
521113	Beban Penambah Daya Tahan Tubuh	36.127.170.751,00	32.813.825.708,00	10,10
521114	Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	4.921.091.615,00	4.711.323.510,00	4,45
521115	Beban Honor Operasional Satuan Kerja	100.030.918.236,00	90.183.882.731,00	10,92
521119	Beban Barang Operasional Lainnya	88.655.575.083,00	69.628.393.781,00	27,33
521131	Beban Barang Operasional - Penanganan Pandemi	38.698.454.449,00	56.425.223.952,00	(31,42)
521211	Beban Bahan	254.887.779.842,00	206.738.774.248,00	23,29



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Catatan Atas Laporan Keuangan – *Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Operasional*
Per 31 Desember Tahun Anggaran 2021 (*Audited*)
Dengan Angka Perbandingan 31 Desember Tahun Anggaran 2020
(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

521213	Beban Honor Output Kegiatan	51.114.731.496,00	44.122.429.910,00	15,85
521219	Beban Barang Non Operasional Lainnya	335.961.516.748,00	226.618.283.326,00	48,25
521241	Beban Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	17.677.589.967,00	15.778.624.940,00	12,04
522111	Beban Langganan Listrik	182.066.777.198,00	173.240.674.943,00	5,09
522112	Beban Langganan Telepon	6.026.803.644,00	5.721.287.598,00	5,34
522113	Beban Langganan Air	17.321.068.386,00	16.122.027.733,00	7,44
522119	Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya	70.349.465.763,00	76.936.274.853,00	(8,56)
522131	Beban Jasa Konsultan	13.128.497.058,00	12.846.575.773,00	2,19
522141	Beban Sewa	339.606.837.017,00	316.441.911.937,00	7,32
522151	Beban Jasa Profesi	66.383.471.339,00	62.921.857.486,00	5,50
522191	Beban Jasa Lainnya	252.974.890.193,00	418.538.938.850,00	(39,56)
522192	Beban Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	35.159.084.101,00	78.713.701.866,00	(55,33)
595112	Beban Aset Ekstrakomtabel Peralatan dan Mesin	1.561.566.942,00	2.880.942.552,00	(45,80)
Total		4.120.083.995.696,00	3.911.545.495.096,00	5,33

Perbandingan Beban Barang dan Jasa-LO dengan Belanja Barang dan Jasa-LRA untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 185
Perbandingan
Beban Barang Jasa-LO dengan Belanja Barang Jasa-LRA
Untuk Periode Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2021

Beban Barang dan Jasa-LO	Belanja Barang dan Jasa-LRA	Selisih
4.120.083.995.696,00	3.963.095.278.294,00	156.988.717.402,00

Rincian selisih Perbandingan antara Beban Barang dan Jasa-LO dengan Belanja Barang-LRA untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:



Tabel 186
Rincian Selisih Beban Barang Jasa-LO dengan Belanja Barang-LRA
Untuk Periode Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2021

Akun	Uraian	Beban Barang dan Jasa-LO	Belanja Barang dan Jasa-LRA	Selisih
521111	Beban Keperluan Perkantoran	283.905.703.417,00	283.467.792.749,00	437.910.668,00
521112	Beban Pengadaan Bahan Makanan	1.923.525.002.451,00	1.895.597.554.982,00	27.927.447.469,00
521113	Beban Penambah Daya Tahan Tubuh	36.127.170.751,00	36.127.170.751,00	0,00
521114	Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	4.921.091.615,00	4.834.331.431,00	86.760.184,00
521115	Beban Honor Operasional Satuan Kerja	100.030.918.236,00	100.030.918.236,00	0,00
521119	Beban Barang Operasional Lainnya	88.655.575.083,00	88.655.575.083,00	0,00
521131	Beban Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID- 19	38.698.454.449,00	38.702.172.633,00	(3.718.184,00)
521211	Beban Bahan	254.887.779.842,00	253.625.241.801,00	1.262.538.041,00
521213	Beban Honor Output Kegiatan	51.114.731.496,00	51.114.731.496,00	0,00
521214	Beban Rugi Selisih Kurs Uang Persediaan Satker Perwakilan	0,00	117.935.499,00	(117.935.499,00)
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	335.961.516.748,00	336.898.304.585,00	(936.787.837,00)
521241	Beban Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi COVID- 19	17.677.589.967,00	17.693.090.956,00	(15.500.989,00)



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Catatan Atas Laporan Keuangan – *Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Operasional*
Per 31 Desember Tahun Anggaran 2021 (*Audited*)
Dengan Angka Perbandingan 31 Desember Tahun Anggaran 2020
(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

522111	Beban Langganan Listrik	182.066.777.198,00	178.460.025.887,00	3.606.751.311,00
522112	Beban Langganan Telepon	6.026.803.644,00	5.975.393.664,00	51.409.980,00
522113	Beban Langganan Air	17.321.068.386,00	17.600.906.468,00	(279.838.082,00)
522119	Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya	70.349.465.763,00	70.306.235.770,00	43.229.993,00
522131	Beban Jasa Konsultan	13.128.497.058,00	13.035.747.058,00	92.750.000,00
522141	Beban Sewa	339.606.837.017,00	334.869.481.392,00	4.737.355.625,00
522151	Beban Jasa Profesi	66.383.471.339,00	66.383.471.339,00	0,00
522191	Beban Jasa Lainnya	252.974.890.193,00	134.442.205.476,00	118.532.684.717,00
522192	Beban Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	35.159.084.101,00	35.156.991.038,00	2.093.063,00
595112	Beban Aset Ekstrakomtabel Peralatan dan Mesin	1.561.566.942,00	0,00	1.561.566.942,00
Total		4.120.083.995.696,00	3.963.095.278.294,00	156.988.717.402,00

Penjelasan selisih antara Beban Barang dan Jasa-LO dengan Belanja Barang-LRA untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 187



Penjelasan Selisih
Beban Barang Jasa-LO dengan Belanja Barang-LRA
Untuk Periode Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2021

Akun	Uraian	Selisih	Keterangan
521111	Beban Keperluan Perkantoran	437.910.668,00	- Jurnal atas Belanja Keperluan Perkantoran menggunakan Akun Belanja Persediaan sebesar Rp850.000,00 - Jurnal atas Belanja Keperluan Perkantoran menggunakan Akun Belanja Modal Peralatan dan Mesin Rp396.550.000,00 - Pembayaran Utang Belanja Barang TAYL sebesar (Rp214.616.273,00) - Pencatatan Utang Belanja Barang Tahun Berjalan sebesar Rp261.630.941,00 - Pencatatan Reklas dari Beban Keperluan Perkantoran ke Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya sebesar (Rp6.504.000,00)
521112	Beban Pengadaan Bahan Makanan	27.927.447.469,00	- Pencatatan Piutang PNBK sebesar (Rp1.177.925.350,00) - Pembayaran Utang Belanja Barang TAYL sebesar (Rp9.233.533.869,00) - Pencatatan Utang Belanja Barang Tahun Berjalan sebesar Rp38.338.906.688,00



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
 Catatan Atas Laporan Keuangan – *Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Operasional*
 Per 31 Desember Tahun Anggaran 2021 (*Audited*)
 Dengan Angka Perbandingan 31 Desember Tahun Anggaran 2020
 (Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

521114	Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	86.760.184,00	- Pembayaran Utang Belanja Barang TAYL sebesar (Rp13.620.597,00) - Pencatatan Utang Belanja Barang Tahun Berjalan sebesar Rp100.380.781,00
521131	Beban Barang Operasional - Penanganan Pandemi	(3.718.184,00)	- Jurnal atas Pengakuan Belanja Barang Dibayar Dimuka sebesar (Rp1.968.184,00) - Jurnal atas Belanja Aset Peralatan dan Mesin menggunakan Akun 52 sebesar (Rp1.750.000,00)
521211	Beban Bahan	1.262.538.041,00	- Jurnal atas Belanja Bahan menggunakan Akun Belanja Persediaan sebesar Rp1.261.007.341,00 - Pembayaran Utang Belanja Barang TAYL sebesar (Rp55.300,00) - Pencatatan Utang Belanja Barang Tahun Berjalan sebesar Rp1.586.000,00
521214	Beban Rugi Selisih Kurs Uang Persediaan Satker Perwakilan	(117.935.499,00)	Pencatatan Beban Rugi selisih Kurs Uang Persediaan Satker perwakilan RI/Atase Teknis



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
 Catatan Atas Laporan Keuangan – *Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Operasional*
 Per 31 Desember Tahun Anggaran 2021 (*Audited*)
 Dengan Angka Perbandingan 31 Desember Tahun Anggaran 2020
 (Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	(936.787.837,00)	• Pencatatan Koreksi atas Penyajian Sisa Voucher dan Kartu RFID BBM Kendaraan Dinas sebesar (Rp915.168.572,00) • Pencatatan Saldo belanja dibayar dimuka pada Ditjen AHU sebesar Rp1.208.491.620,00 • Pencatatan belanja dibayar dimuka pada Kanim Karawang Rp1.032.925,00 • Pencatatan Piutang PNB sebesar (Rp851.089.868,00) • Pelunasan Piutang PNB sebesar Rp423.000.000,00 • Jurnal atas Belanja Persediaan menggunakan Akun Non Persediaan sebesar (Rp184.344.655,00) • Jurnal atas Belanja Barang Non Operasional menggunakan Akun Belanja Persediaan sebesar Rp16.660.675,00 • Jurnal atas Belanja Aset Peralatan dan Mesin menggunakan Akun 52 sebesar (Rp99.756.000,00) • Jurnal atas Belanja Aset Lainnya menggunakan Akun 52 sebesar (Rp2.000.000,00)



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
 Catatan Atas Laporan Keuangan – *Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Operasional*
 Per 31 Desember Tahun Anggaran 2021 (*Audited*)
 Dengan Angka Perbandingan 31 Desember Tahun Anggaran 2020
 (Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

			- Pembayaran Utang Belanja Barang TAYL sebesar (Rp398.541.020,00) - Pencatatan Utang Belanja Barang Tahun Berjalan sebesar Rp453.639.004,00
521241	Beban Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	(15.500.989,00)	- Jurnal atas Pengakuan Belanja Barang Dibayar Dimuka sebesar (Rp724.989,00) - Pembayaran Utang Belanja Barang TAYL sebesar (Rp14.776.000,00)
522111	Beban Langganan Listrik	3.606.751.311,00	- Pembayaran Utang Belanja Barang TAYL sebesar (Rp5.531.180.027,00) - Pencatatan Utang Belanja Barang Tahun Berjalan sebesar Rp9.137.931.338,00
522112	Beban Langganan Telepon	51.409.980,00	Pembayaran Utang Belanja Barang TAYL sebesar (Rp106.069.815,00)



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
 Catatan Atas Laporan Keuangan – *Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Operasional*
 Per 31 Desember Tahun Anggaran 2021 (*Audited*)
 Dengan Angka Perbandingan 31 Desember Tahun Anggaran 2020
 (Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

			Pencatatan Utang Belanja Barang Tahun Berjalan sebesar Rp157.479.795,00
522113	Beban Langganan Air	(279.838.082,00)	- Pembayaran Utang Belanja Barang TAYL sebesar (Rp1.439.043.893,00) - Pencatatan Utang Belanja Barang Tahun Berjalan sebesar Rp1.159.205.811,00
522119	Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya	43.229.993,00	- Pembayaran Utang Belanja Barang TAYL sebesar (Rp13.728.343,00) - Pencatatan Utang Belanja Barang Tahun Berjalan sebesar Rp56.958.336,00
522131	Beban Jasa Konsultan	92.750.000,00	Jurnal atas Belanja Jasa Konsultan menggunakan Belanja Aset Lainnya sebesar Rp92.750.000,00
522141	Beban Sewa	4.737.355.625,00	- Pencatatan Belanja Dibayar Dimuka sebesar (Rp3.649.194.656,00) - Realisasi Belanja Dibayar Dimuka Tahun Berjalan sebesar Rp8.186.753.280,00 - Jurnal atas Belanja Sewa menggunakan Akun Belanja Persediaan sebesar Rp345.001,00 - Jurnal atas Belanja Sewa menggunakan Akun belanja Modal Gedung dan



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
 Catatan Atas Laporan Keuangan – *Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Operasional*
 Per 31 Desember Tahun Anggaran 2021 (*Audited*)
 Dengan Angka Perbandingan 31 Desember Tahun Anggaran 2020
 (Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

			Bangunan sebesar Rp199.452.000,00 • Pembayaran Utang Belanja Barang TAYL sebesar (Rp8.705.500,00) • Pencatatan Utang Belanja Barang Tahun Berjalan sebesar Rp8.705.500,00
522191	Beban Jasa Lainnya	118.532.684.717,00	• Jurnal atas Belanja Aset Peralatan dan Mesin menggunakan Akun 52 sebesar (Rp473.374.620,00) • Jurnal atas Belanja Aset Lainnya menggunakan Akun 52 sebesar (Rp35.000.000,00) • Hibah Jasa sebesar Rp119.041.059.337,00
522192	Beban Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	2.093.063,00	• Jurnal atas Belanja Jasa Penanganan Pandemi Covid-19 menggunakan Akun belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp2.093.063,00
595112	Beban Aset Ekstrakomtabel Peralatan dan Mesin	1.561.566.942,00	• Jurnal atas belanja Persediaan yang membentuk Beban Aset Ekstrakomptabel PM sebesar Rp457.868.290,00 • Jurnal atas belanja modal PM yang membentuk Beban Aset Ekstrakomptabel PM sebesar Rp997.428.602,00



			Jurnal atas hibah barang Ekstrakomptabel PM sebesar Rp106.270.050,00
Total		156.988.717.402,00	

Perhitungan selisih antara Beban Barang dan Jasa-LO dengan Belanja Barang dan Jasa-LRA dapat dijelaskan secara ringkas sebagai berikut:

Tabel 188
Perhitungan Selisih
Beban Barang Jasa-LO dengan Belanja Barang Jasa-LRA
Untuk Periode Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2021

a	Beban Barang dan Jasa LO	4.120.083.995.696,00
b	Belanja Barang dan Jasa LRA	3.963.095.278.294,00
c	Selisih Antara LO dan LRA (a - b)	156.988.717.402,00
Faktor Yang Mempengaruhi		
	Beban Rugi selisih Kurs Uang Persediaan Satker perwakilan RI/Atase Teknis	(117.935.499,00)
	Pembayaran Utang Belanja Barang dan Jasa TAYL	(16.973.870.637,00)
	Utang Belanja Barang dan Jasa Tahun Berjalan	49.669.920.194,00
	Jurnal Persediaan Belum Register Karena Belanja Menggunakan Akun Persediaan (5218xx), namun digunakan untuk Belanja Barang Non Persediaan (521 / 522 non persediaan)	1.278.863.017,00
	Jurnal Persediaan Belum Register Karena Belanja Barang Persediaan, namun menggunakan Akun Non Persediaan	(184.344.655,00)
	Jurnal Manual Belum Register atas Transaksi Belanja Barang dan Jasa (Akun 521xxx/522xxx) yang membentuk Aset	(611.880.620,00)
	Jurnal Manual Belum Register atas Transaksi Belanja Barang dan Jasa (Akun 521xxx/522xxx) yang menggunakan akun belanja Modal (53)	690.845.063,00
	Jurnal Pencatatan Baru Belanja Barang yang dibayar dimuka dengan	(4.861.412.374,00)



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Catatan Atas Laporan Keuangan – *Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Operasional*
Per 31 Desember Tahun Anggaran 2021 (*Audited*)
Dengan Angka Perbandingan 31 Desember Tahun Anggaran 2020
(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	menggunakan Belanja Barang dan Jasa (Akun 521xxx/522xxx)	
	Jurnal Pencatatan Atas Kadaluarsa atau Habis Masa Manfaat Belanja Barang yang dibayar dimuka dengan menggunakan Belanja Barang dan Jasa (Akun 521xxx/522xxx)	9.101.921.852,00
	Jurnal Pencatatan Baru Piutang PNBPN atas Transaksi Pengembalian Belanja Barang (Termasuk pengembalian belanja BAMA, dsb)	(1.177.925.350,00)
	Jurnal Balik Piutang atas Koreksi Belanja Barang Non Operasional Lainnya	423.000.000,00
	Jurnal Pencatatan Baru Piutang atas Koreksi Belanja Barang Non Operasional Lainnya	(851.089.868,00)
	Beban Ekstrakomptabel	1.561.566.942,00
	Jurnal Manual atas Hibah Jasa	119.041.059.337,00
d	Total Faktor Yang Mempengaruhi	156.988.717.402,00
	Selisih (c - d)	0,00

**Beban Pemeliharaan
Rp567.858.477.279,00**

D.5 Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan-LO Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp567.858.477.279,00 dan Rp466.379.575.916,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 189
Perbandingan Beban Pemeliharaan-LO
Untuk Periode Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Akun	Uraian	31 Desember 2021	31 Desember 2020	Naik/ Turun (%)
523111	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	223.368.347.520,00	164.902.597.514,00	35,45
523114	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan - Penanganan Pandemi	30.575.939,00	1.039.644.058,00	(97,06)
523119	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	1.192.822.530,00	1.187.753.890,00	0,43



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Catatan Atas Laporan Keuangan – *Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Operasional*
Per 31 Desember Tahun Anggaran 2021 (*Audited*)
Dengan Angka Perbandingan 31 Desember Tahun Anggaran 2020
(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

523121	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	302.377.552.936,00	240.572.449.638,00	25,69
523124	Beban Asuransi Alat Angkutan Darat/Apung/Udara	75.163.486,00	170.873.452,00	(56,01)
523133	Beban Pemeliharaan Jaringan	0,00	11.765.000,00	(100,00)
523199	Beban Pemeliharaan Lainnya	1.154.416.363,00	908.548.287,00	27,06
593113	Beban Persediaan Bahan Untuk Pemeliharaan	39.034.260.025,00	18.712.645.284,00	108,60
593114	Beban Persediaan Suku Cadang	572.338.480,00	38.737.751.138,00	(98,52)
595113	Beban Aset Ekstrakomtabel Gedung dan Bangunan	53.000.000,00	135.547.655,00	(60,90)
Total		567.858.477.279,00	466.379.575.916,00	21,76

Perbandingan Beban Pemeliharaan-LO dengan Belanja Pemeliharaan-LRA untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 190
Perbandingan
Beban Pemeliharaan-LO dengan Belanja Pemeliharaan-LRA
Untuk Periode Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2021

Beban Pemeliharaan-LO	Belanja Pemeliharaan-LRA	Selisih
567.858.477.279,00	522.372.690.998,00	45.485.786.281,00

Rincian selisih antara Beban Pemeliharaan-LO dengan Belanja Pemeliharaan-LRA untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 191
Rincian Selisih Beban Pemeliharaan-LO dengan Belanja Pemeliharaan-LRA
Untuk Periode Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2021

Akun	Uraian	Beban Pemeliharaan-LO	Belanja Pemeliharaan-LRA	Selisih
523111	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	223.368.347.520,00	223.816.847.344,00	(448.499.824,00)



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Catatan Atas Laporan Keuangan – *Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Operasional*
Per 31 Desember Tahun Anggaran 2021 (*Audited*)
Dengan Angka Perbandingan 31 Desember Tahun Anggaran 2020
(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

523112	Beban Persediaan Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	0,00	8.840.363.773,00	(8.840.363.773,00)
523114	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan - Penanganan Pandemi	30.575.939,00	30.575.939,00	0,00
523119	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	1.192.822.530,00	1.192.822.530,00	0,00
523121	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	302.377.552.936,00	284.996.917.300,00	17.380.635.636,00
523123	Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	0,00	2.265.584.263,00	(2.265.584.263,00)
523124	Beban Asuransi Alat Angkutan Darat/Apung/Udara	75.163.486,00	75.163.486,00	0,00
523199	Beban Pemeliharaan Lainnya	1.154.416.363,00	1.154.416.363,00	0,00
593113	Beban Persediaan Bahan Untuk Pemeliharaan	39.034.260.025,00	0,00	39.034.260.025,00
593114	Beban Persediaan Suku Cadang	572.338.480,00	0,00	572.338.480,00
595113	Beban Aset Ekstrakomtabel Gedung dan Bangunan	53.000.000,00	0,00	53.000.000,00
TOTAL		567.858.477.279,00	522.372.690.998,00	45.485.786.281,00

Penjelasan selisih antara Beban Pemeliharaan-LO dengan Belanja Pemeliharaan-LRA untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 192
Penjelasan Selisih
Beban Pemeliharaan-LO dengan Belanja Pemeliharaan-LRA
Untuk Periode Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2021



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
 Catatan Atas Laporan Keuangan – *Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Operasional*
 Per 31 Desember Tahun Anggaran 2021 (Audited)
 Dengan Angka Perbandingan 31 Desember Tahun Anggaran 2020
 (Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Uraian	Selisih	Keterangan
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	(448.499.824,00)	• Belanja Pemeliharaan yang memenuhi nilai kapitalisasi aset Tanah sebesar (Rp30.000.000,00) • Belanja Pemeliharaan yang memenuhi nilai kapitalisasi aset Peralatan dan Mesin sebesar (Rp3.640.000,00) • Belanja Pemeliharaan yang memenuhi nilai kapitalisasi aset Gedung dan Bangunan sebesar (Rp464.426.000,00) • Belanja Pemeliharaan yang menggunakan akun belanja modal Tanah sebesar Rp8.800.000,00 • Belanja Pemeliharaan yang menggunakan akun belanja Persediaan sebesar Rp40.766.176,00
Beban Persediaan Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	(8.840.363.773,00)	• Beban ini membentuk Beban Persediaan-LO
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	17.380.635.636,00	• Jurnal pencatatan belanja dibayar dimuka sebesar (Rp82.467.000,00) • Belanja Pemeliharaan yang memenuhi nilai kapitalisasi aset Lainnya sebesar (Rp5.700.200.000,00) • Realisasi Belanja Dibayar Dimuka Tahun Berjalan sebesar Rp23.102.524.242,00 • Jurnal atas Belanja Pemeliharaan yang menggunakan Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp52.030.000,00



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Catatan Atas Laporan Keuangan – *Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Operasional*
Per 31 Desember Tahun Anggaran 2021 (*Audited*)
Dengan Angka Perbandingan 31 Desember Tahun Anggaran 2020
(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

		Pencatatan Utang Belanja Barang Tahun Berjalan sebesar Rp8.748.394,00
Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	(2.265.584.263,00)	Beban ini membentuk Beban Persediaan-LO
Beban Persediaan Bahan Untuk Pemeliharaan	39.034.260.025,00	Beban yang terbentuk dari pemakaian barang persediaan yang ditujukan untuk pemeliharaan
Beban Persediaan Suku Cadang	572.338.480,00	Beban yang terbentuk dari pemakaian barang persediaan yang ditujukan untuk pemeliharaan
Beban Aset Ekstrakomtabel Gedung dan Bangunan	53.000.000,00	- Jurnal atas belanja modal GB yang membentuk Beban Aset Ekstrakomtabel GB sebesar Rp33.000.000,00 - Jurnal atas hibah barang Ekstrakomtabel GB sebesar Rp20.000.000,00
Total	45.485.786.281,00	

Perhitungan selisih antara Beban Pemeliharaan-LO dengan Belanja Pemeliharaan-LRA dapat dijelaskan secara ringkas sebagai berikut:



Tabel 193
Perhitungan Selisih
Beban Pemeliharaan-LO dengan Belanja Pemeliharaan-LRA
Untuk Periode Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2021

a	Beban Pemeliharaan LO	567.858.477.279,00
b	Belanja Pemeliharaan LRA (Akun 523xxx)	522.372.690.998,00
c	Selisih Antara LO dan LRA (a - b)	45.485.786.281,00
	Faktor Yang Mempengaruhi	
	Beban Persediaan Bahan Untuk Pemeliharaan	39.034.260.025,00
	Beban Persediaan Suku Cadang	572.338.480,00
d	Beban Barang Persediaan Yang Membentuk Beban Pemeliharaan LO	39.606.598.505,00
	Blnj Brg Persediaan Pemeliharaan Gedung, Bangunan	8.840.363.773,00
	Blnj Brg Persediaan Pemeliharaan Peralatan Mesin	2.265.584.263,00
e	Belanja Akun 523xxx yang membentuk Barang Persediaan	11.105.948.036,00
	Faktor Lain Yang Mempengaruhi	
	Jurnal Manual Belum Register atas Transaksi Belanja Akun 523 yang membentuk Aset Tetap	(498.066.000,00)
	Jurnal Manual Belum Register atas Transaksi Belanja Akun 523 yang membentuk Aset Lain lain	(5.700.200.000,00)
	Jurnal Manual Belum Register atas Transaksi Belanja Pemeliharaan Menggunakan Akun Belanja Persediaan	40.766.176,00
	Jurnal Manual Belum Register atas Transaksi Belanja Pemeliharaan Menggunakan Akun Belanja Modal	60.830.000,00
	Jurnal Pencatatan Utang Bli Pemeliharaan Tahun Berjalan	8.748.394,00
	Jurnal Pencatatan Baru Belanja Barang yang dibayar dimuka dengan menggunakan Belanja Pemeliharaan (Akun 523xxx)	(82.467.000,00)
	Beban Ekstrakompensasi Gedung dan Bangunan	53.000.000,00
	Jurnal Pencatatan Atas Kadaluarsa atau Habis Masa Manfaat Belanja Barang yang	23.102.524.242,00



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Catatan Atas Laporan Keuangan – *Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Operasional*
Per 31 Desember Tahun Anggaran 2021 (*Audited*)
Dengan Angka Perbandingan 31 Desember Tahun Anggaran 2020
(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	dibayar dimuka dengan menggunakan Belanja Pemeliharaan (Akun 523xxx)	
f	Total Faktor Lain Yang Mempengaruhi	16.985.135.812,00
g	Beban Pemeliharaan Total (b + d - e + f)	567.858.477.279,00
	Selisih (a - g)	0,00

Beban Perjalanan Dinas
Rp642.282.586.429,00

D.6 Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas-LO Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp642.282.586.429,00 dan Rp426.993.500.566,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 194
Perbandingan Beban Perjalanan Dinas-LO
Untuk Periode Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Akun	Uraian	31 Desember 2021	31 Desember 2020	Naik/ Turun (%)
524111	Beban Perjalanan Biasa	370.940.608.965,00	239.248.339.330,00	55,04
524112	Beban Perjalanan Tetap	0,00	75.510.000,00	(100,00)
524113	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	80.906.589.866,00	59.165.969.760,00	36,75
524114	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	61.105.766.211,00	46.179.273.403,00	32,32
524115	Beban Perjalanan Dinas - Penanganan Pandemi COVID-19	100.150.000,00	6.738.356.000,00	(98,51)
524119	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	101.364.429.799,00	55.177.111.977,00	83,71
524211	Beban Perjalanan Biasa – Luar Negeri	10.387.860.819,00	4.477.286.158,00	132,01
524219	Beban Perjalanan Lainnya – Luar Negeri	17.477.180.769,00	15.931.653.938,00	9,70
Total		642.282.586.429,00	426.993.500.566,00	50,42

Perbandingan Beban Perjalanan Dinas-LO dengan Belanja Perjalanan Dinas-LRA untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:



Tabel 195
Perbandingan Beban Perjalanan Dinas-LO
dengan Belanja Perjalanan Dinas-LRA

Untuk Periode Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2021

Beban Perjalanan Dinas-LO	Belanja Perjalanan Dinas-LRA	Selisih
642.282.586.429,00	650.679.542.151,00	(8.396.955.722,00)

Rincian selisih antara Beban Perjalanan Dinas-LO dengan Belanja Perjalanan Dinas-LRA untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 196
Rincian Selisih Beban Perjalanan Dinas-LO dengan Belanja Perjalanan Dinas-LRA
Untuk Periode Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2021

Uraian	Beban Perjadin-LO	Belanja Perjadin-LRA	Selisih
Beban Perjalanan Biasa	370.940.608.965,00	379.337.564.687,00	(8.396.955.722,00)
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	80.906.589.866,00	80.906.589.866,00	0,00
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	61.105.766.211,00	61.105.766.211,00	0,00
Beban Perjalanan Dinas - Penanganan Pandemi COVID-19	100.150.000,00	100.150.000,00	0,00
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	101.364.429.799,00	101.364.429.799,00	0,00
Beban Perjalanan Biasa – Luar Negeri	10.387.860.819,00	10.387.860.819,00	0,00
Beban Perjalanan Lainnya – Luar Negeri	17.477.180.769,00	17.477.180.769,00	0,00
Total	642.282.586.429,00	650.679.542.151,00	(8.396.955.722,00)

Penjelasan selisih antara Beban Perjalanan Dinas-LO dengan Belanja Perjalanan Dinas-LRA untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:



Tabel 197

Penjelasan Selisih

**Beban Perjalanan Dinas dengan Belanja Perjalanan Dinas-LRA
 Untuk Periode Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2021**

Uraian	Selisih	Keterangan
Beban Perjalanan Biasa	(8.396.955.722,00)	Pencatatan Akrua! atas Transaksi: - Pembayaran Utang Belanja Perjalanan Dinas Tahun Anggaran Yang Lalu sebesar (Rp11.314.600.345,00) pada Sekretariat Jenderal - Pencatatan Utang Belanja Perjalanan Dinas sebesar Rp2.710.827.000,00 pada Sekretariat Jenderal dan Rp47.091.853,00 pada Kanim Nunukan - Jurnal Pencatatan Belanja Perjalanan Dinas yang menggunakan Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp159.725.770,00 pada Ditjen Pemasarakatan

Perhitungan selisih antara Beban Perjalanan Dinas-LO dengan Belanja Perjalanan Dinas-LRA dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 198

**Perhitungan Selisih Beban Perjalanan Dinas-LO
 dengan Belanja Perjalanan Dinas-LRA**

Untuk Periode Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2021

a	Beban Perjalanan Dinas LO	642.282.586.429,00
b	Belanja Perjalanan Dinas LRA	650.679.542.151,00
c	Selisih Antara LO dan LRA (a - b)	(8.396.955.722,00)
d	Faktor Yang Mempengaruhi	
	Jurnal atas Pembayaran Utang Belanja Perjalanan Dinas TAYL (Jurnal Balik)	(11.314.600.345,00)
	Jurnal Pencatatan Utang Belanja Perjadin Tahun Berjalan	2.757.918.853,00
e	Faktor Lain Yang Mempengaruhi	



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Catatan Atas Laporan Keuangan – *Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Operasional*
Per 31 Desember Tahun Anggaran 2021 (*Audited*)
Dengan Angka Perbandingan 31 Desember Tahun Anggaran 2020
(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Jurnal Belum Diregister karena Belanja Perjalanan Dinas yang menggunakan akun belanja Modal (53)	159.725.770,00
f	Beban Perjalanan Dinas Total (b + c + d + e)	642.282.586.429,00
	Selisih (a - f)	0,00

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa selisih antara Beban Perjalanan Dinas-LO dengan Belanja Perjalanan Dinas-LRA adalah karena adanya faktor yang mengurangi Beban Perjalanan Dinas-LO tahun berjalan yaitu pembayaran utang belanja perjalanan dinas tahun lalu / biaya mutasi sebesar **(Rp11.314.600.345,00)** pada Sekretariat Jenderal serta faktor yang menambah Beban Perjalanan Dinas-LO tahun berjalan yaitu pencatatan utang belanja perjalanan dinas sebesar Rp2.757.918.853,00 pada Sekretariat Jenderal dan Kantor Imigrasi Nunukan serta jurnal koreksi belanja perjalanan dinas yang menggunakan akun belanja modal peralatan dan mesin sebesar Rp159.725.770,00 pada Ditjen Pemasyarakatan.

Beban Penyusutan dan Amortisasi
Rp1.442.347.421.665,00

D.7 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban Penyusutan dan Amortisasi-LO Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp1.442.347.421.665,00 dan Rp1.452.598.896.980,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 199
Perbandingan Beban Penyusutan dan Amortisasi-LO
Untuk Periode Yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Akun	Uraian	31 Desember 2021	31 Desember 2020	Naik/ Turun (%)
591111	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	858.853.214.472,00	954.915.471.410,00	(10,06)
591211	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	505.052.016.183,00	419.491.855.820,00	20,40
591311	Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	8.777.485.507,00	11.977.469.327,00	(26,72)
591312	Beban Penyusutan Irigasi	752.289.797,00	1.594.970.224,00	(52,83)



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Catatan Atas Laporan Keuangan – *Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Operasional*
Per 31 Desember Tahun Anggaran 2021 (*Audited*)
Dengan Angka Perbandingan 31 Desember Tahun Anggaran 2020
(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

591313	Beban Penyusutan Jaringan	898.371.611,00	948.969.748,00	(5,33)
591411	Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	168.884.697,00	142.516.809,00	18,50
592115	Beban Amortisasi Software	59.670.791.007,00	58.194.027.437,00	2,54
592116	Beban Amortisasi Lisensi	0,00	117.540.078,00	(100,00)
592118	Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam	1.028.309.287,00	621.309.647,00	65,51
592222	Beban Penyusutan Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Opr. Pemerintah	7.146.059.104,00	4.594.766.480,00	55,53
Total		1.442.347.421.665,00	1.452.598.896.980,00	(0,71)

Perbandingan Beban Penyusutan dan Amortisasi-LO dengan Kenaikan/ Penurunan Penyusutan dan Amortisasi pada Neraca untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 200
Perbandingan
Beban Penyusutan dan Amortisasi-LO dengan Kenaikan/
Penurunan Penyusutan dan Amortisasi pada Neraca
Untuk Periode Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2021

Beban Penyusutan dan Amortisasi-LO	Kenaikan/Penurunan Penyusutan dan Amortisasi pd Neraca	Selisih
1.442.347.421.665,00	1.687.186.041.842,00	(244.838.620.177,00)

Perhitungan selisih Beban Penyusutan dan Amortisasi-LO dengan Kenaikan/ Penurunan Penyusutan dan Amortisasi pada Neraca untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 201
Rincian Selisih Beban Penyusutan dan Amortisasi-LO dengan
Kenaikan/Penurunan Penyusutan dan Amortisasi pada Neraca
Untuk Periode Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2021

a	Beban Penyusutan dan Amortisasi LO	1.442.347.421.665,00
b	Akumulasi Penyusutan Awal	(8.334.942.866.719,00)
c	Akumulasi Penyusutan Akhir	(10.022.128.908.561,00)



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
 Catatan Atas Laporan Keuangan – *Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Operasional*
 Per 31 Desember Tahun Anggaran 2021 (*Audited*)
 Dengan Angka Perbandingan 31 Desember Tahun Anggaran 2020
 (Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Faktor Yang Mempengaruhi	(244.838.620.177,00)
	Saldo Awal	(28.518.489.820,00)
	Transfer Masuk	(48.861.889.177,00)
	Hibah (Masuk)	(33.741.895.504,00)
	Reklasifikasi Masuk	(57.491.076.024,00)
	Perolehan hasil Tindak Lanjut Normalisasi	(410.595.514.222,00)
	Perolehan Reklasifikasi Dari Intra ke Ekstra/ Sebaliknya	(133.450.000,00)
	Pengembangan Nilai Aset	(6.340.598,00)
	Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas	(8.895.400.061,00)
	Transaksi Normalisasi BMN	(902.805.362,00)
	Koreksi Penyusutan Karena 225	(9.042.031.123,00)
	Transaksi Normalisasi BMN (BMN Yang Dihentikan)	(15.607.000,00)
	Koreksi Normalisasi Akibat Koreksi Penilaian Kembali	(18.363.100,00)
d	Akum. Penyusutan Transaksional (Masuk)	(598.222.861.991,00)
	Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas	15.166.342.153,00
	Transaksi Normalisasi BMN	130.901.174.880,00
	Koreksi Penyusutan Karena 225	1.874.697.098,00
	Transaksi Normalisasi BMN (BMN Yang Dihentikan)	3.289.908.897,00
	Penghapusan	2.323.159.228,00
	Transfer Keluar	43.588.721.486,00
	Reklasifikasi Keluar	53.136.550.827,00
	Koreksi Pencatatan	37.099.070.521,00
	Penghapusan (BMN yang dihentikan)	58.353.028.884,00
	Reklasifikasi Keluar (BMN yang dihentikan)	337.080.388,00
	Koreksi Pencatatan (BMN yang dihentikan)	2.870.765.570,00
	Usulan Barang Rusak Berat ke Pengelola (BMN Yang Dihentikan)	621.767.877,00
	Penghapusan (semester I dokumen TAYL)	59.000.000,00
	Penghapusan (semester II dokumen TAYL)	788.595.650,00
	Penghapusan semu karena reklasifikasi dari intra ke ekstra/ sebaliknya	2.846.500,00
	Penghapusan (semester II dokumen semester I)	27.297.044,00



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Catatan Atas Laporan Keuangan – *Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Operasional*
Per 31 Desember Tahun Anggaran 2021 (*Audited*)
Dengan Angka Perbandingan 31 Desember Tahun Anggaran 2020
(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Penghapusan BMN yang Dihentikan (semester II dokumen TAYL)	562.327.527,00
	Penghapusan BMN yang Dihentikan (semester II dokumen semester I)	1.401.709.878,00
	Penghapusan BMN yang Dihentikan (semester I dokumen TAYL)	980.197.406,00
e	Akum. Penyusutan Transaksional (Keluar)	353.384.241.814,00
f	Beban Penyusutan Total (b - c + d + e)	1.442.347.421.665,00
	Selisih (a - f)	0,00

Perhitungan di atas diperoleh dari perhitungan akumulasi Jurnal BMN maupun Jurnal Manual (Penyesuaian/Umum) SAIBA yang terbentuk dari masing-masing transaksi di atas.

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan terdapat transaksi-transaksi yang mempengaruhi penyusutan reguler sehingga menyebabkan selisih antara Beban Penyusutan-LO dengan Kenaikan/Penurunan Penyusutan pada Neraca.

**Beban Penyisihan
Piutang Tak Tertagih
Rp1.221.195.048,00**

D.8 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih-LO Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp1.221.195.048,00 dan (Rp57.735.389.457,00) dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 202
Perbandingan Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih-LO
Untuk Periode Yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Akun	Uraian	31 Desember 2021	31 Desember 2020	Naik/Turun (%)
594211	Beban Penyisihan Piutang PNB	958.114.605,00	(57.742.720.593,00)	(101,66)
594212	Beban Penyisihan Piutang Lainnya	164.378.268,00	(2.887.326,00)	(5.793,10)
594411	Beban Penyisihan – Bagian Lancar TP/TGR	0,00	843.240,00	(100,00)
594931	Beban Penyisihan – Piutang TP/TGR	98.702.175,00	18.512.722,00	433,16



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Catatan Atas Laporan Keuangan – *Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Operasional*
Per 31 Desember Tahun Anggaran 2021 (*Audited*)
Dengan Angka Perbandingan 31 Desember Tahun Anggaran 2020
(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

594991	Beban Penyisihan – Piutang Jk. Pjg Lainnya	0,00	(9.137.500,00)	(100,00)
Total		1.221.195.048,00	(57.735.389.457,00)	(102,12)

Terkait dengan pencatatan Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih, Kementerian Keuangan mengeluarkan Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-27/PB/PB.6/2021 tanggal 31 Desember 2021 hal Jadwal Rekonsiliasi, Penyusunan, dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) Tahun 2021 (*Unaudited*) serta Perlakuan Akuntansi atas Transaksi Akhir Tahun. Surat tersebut salah satunya mengatur mengenai perlakuan atas Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih bersaldo minus (di posisi kredit).

Di dalam surat tersebut dijelaskan bahwa berdasarkan Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-43/PB/2015 tentang Pedoman Akuntansi Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Kementerian Negara dimungkinkan adanya beban penyisihan piutang tidak tertagih bersaldo kredit di dalam Laporan Operasional. Walaupun demikian, dalam rangka penyajian laporan keuangan yang lebih wajar, dalam hal terdapat saldo Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih dalam Laporan Operasional di sisi kredit, maka satuan kerja dapat melakukan jurnal penyesuaian dengan cara menjurnal akun Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih di posisi debit dan akun Koreksi Lainnya di posisi kredit. Hal tersebut menyebabkan saldo Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih dalam Laporan Operasional Kementerian Hukum dan HAM TA 2021 memiliki saldo di posisi debit, sehingga menghasilkan selisih yang signifikan dibandingkan dengan saldo Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih di tahun 2020.

Perbandingan Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih-LO dengan Kenaikan/ Penurunan Penyisihan Piutang pada Neraca untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:



Tabel 203

**Perbandingan Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih-LO
Dengan Kenaikan/ Penurunan Penyisihan Piutang pada Neraca
Untuk Periode Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2021**

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih-LO	Kenaikan/ Penurunan Penyisihan Piutang pada Neraca	Selisih
1.221.195.048,00	27.823.844.878,00	(26.602.649.830,00)

Penjelasan selisih Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih-LO dengan Kenaikan/ Penurunan Penyisihan Piutang pada Neraca untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 204

**Penjelasan Selisih Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih-LO
Dengan Kenaikan/ Penurunan Penyisihan Piutang pada Neraca
Untuk Periode Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2021**

a	Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih LO	(1.221.195.048,00)
1	Penyisihan Piutang Akhir	(217.031.575.332,00)
2	Penyisihan Piutang Awal	(244.855.420.210,00)
3	Penghapusan Piutang	7.432.130.740,00
4	Jurnal Koreksi Lainnya Atas Beban Penyisihan	(23.033.638.887,00)
5	Jurnal Koreksi Lainnya Atas Penyisihan Piutang	(1.420.729.701,00)
6	Jurnal Transfer Masuk atas Penyisihan Piutang	(498.993.655,00)
7	Jurnal Transfer Keluar atas Penyisihan Piutang	498.993.655,00
b	Beban Penyisihan Piutang Total (1-2-3+4-5-6-7)	(1.221.195.048,00)
	Selisih (a - b)	0,00

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa selisih antara beban penyisihan piutang tak tertagih-LO dengan kenaikan/penurunan penyisihan piutang pada neraca di antaranya disebabkan oleh adanya jurnal koreksi lainnya atas beban penyisihan piutang yang bersaldo minus sebesar (Rp23.033.638.887,00) sebagaimana diatur dalam Surat



Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-27/PB/PB.6/2021 tanggal 31 Desember 2021 hal Jadwal Rekonsiliasi, Penyusunan, dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) Tahun 2021 (Unaudited) serta Perlakuan Akuntansi atas Transaksi Akhir Tahun.

Selain itu, selisih juga disebabkan karena adanya transaksi koreksi lainnya atas penyisihan piutang. Rincian Koreksi Lainnya atas Penyisihan Piutang Tidak Tertagih untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 205
Rincian Koreksi Lainnya atas Penyisihan Piutang
Untuk Periode Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2021

No	Jenis Koreksi Lainnya atas Penyisihan Piutang	Nilai	Keterangan
1	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang PNB	1.996.691.792,00	Koreksi atas penyisihan piutang PNB pada Sekretariat Jenderal, Ditjen KI, Ditjen Pemasarakatan, dan Ditjen Imigrasi
		(1.831.715.807,00)	Koreksi Pencatatan Penyisihan Piutang Kelebihan Pembayaran Bahan Makanan Satuan Kerja Pemasarakatan yang belum tercatat pada tahun 2020, koreksi pencatatan penyisihan piutang atas pembatalan status lunas piutang pada Ditjen KI, dan koreksi penyisihan piutang pada Kanim Kelas I Soekarno-Hatta
2	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Lainnya	(1.812.969.893,00)	Koreksi Pencatatan Penyisihan Piutang Lainnya pada Ditjen Pemasarakatan dan Ditjen Imigrasi



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
 Catatan Atas Laporan Keuangan – *Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Operasional*
 Per 31 Desember Tahun Anggaran 2021 (*Audited*)
 Dengan Angka Perbandingan 31 Desember Tahun Anggaran 2020
 (Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

		270.327.624,00	Koreksi atas penyisihan piutang lainnya pada Sekretariat Jenderal, Ditjen Pemasyarakatan, dan Ditjen Imigrasi
3	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan TP/TGR	4.350,00	Koreksi Pencatatan Penyisihan Bagian Lancar Piutang TP/TGR pada Kanwil Riau
		(13.136,00)	Koreksi Pencatatan Penyisihan Bagian Lancar Piutang TP/TGR pada Kanwil Sumatera Utara
4	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Tuntutan Ganti Rugi	69.000,00	Koreksi Pencatatan Penyisihan Piutang TP/TGR pada Sekretariat Jenderal Rp12.000,00 dan Kanwil Lampung Rp57.000,00
		(43.123.631,00)	Koreksi Pencatatan Penyisihan Piutang TP/TGR pada Sekretariat Jenderal (Rp13.302.126,00), Lapas Manokwari (Rp64.755,00), dan Bapas Ternate (Rp29.756.750,00)
TOTAL		(1.420.729.701,00)	

Koreksi Lainnya atas Penyisihan Piutang per 31 Desember 2021 sebesar **(Rp1.420.729.701,00)** terdapat pada Satuan Kerja sebagai berikut:

Tabel 206
Rincian Koreksi Lainnya atas Penyisihan Piutang
Berdasarkan Satuan Kerja
Untuk Periode Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2021

No	Uraian Satker	Koreksi
Koreksi Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang PNPB		
1	Direktorat Jenderal Imigrasi	1.799.161.590,00
2	Ditjen Kekayaan Intelektual	89.040.000,00



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Catatan Atas Laporan Keuangan – *Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Operasional*
Per 31 Desember Tahun Anggaran 2021 (*Audited*)
Dengan Angka Perbandingan 31 Desember Tahun Anggaran 2020
(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

3	Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum	71.737.661,00
4	Sekretariat Jenderal (Pusat)	4.823.440,00
5	Rutan Kelas IIB Sibuhuan	539.031,00
6	Rumah Tahanan Negara Marabahan	331.399,00
7	Rumah Tahanan Negara Medan	300.000,00
8	Lapas Kelas IIB Banjarbaru	216.392,00
9	Rutan Kelas IIB Sipirok	152.651,00
10	Rumah Tahanan Negara Sidikalang	77.232,00
11	Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Bandar Lampung	74.992,00
12	Rutan Kelas II B Bengkulu	11.418,00
13	Lapas Kelas III Lirung	(2.600,00)
14	Lembaga Pemasyarakatan Wanita Tangerang	(3.913,00)
15	LPKA Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara	(4.036,00)
16	Balai Pemasyarakatan Ternate, Maluku Utara	(4.500,00)
17	LPKA Pangkal Pinang, Provinsi Kep. Bangka Belitung	(8.512,00)
18	Lapas Perempuan Kelas III Kendari	(9.212,00)
19	Lembaga Pemasyarakatan Pekanbaru	(14.427,00)
20	Lembaga Pemasyarakatan Bitung	(20.872,00)
21	Lapas Kelas III Gunung Tua	(29.357,00)
22	Rumah Tahanan Negara Praya	(31.796,00)
23	Rumah Tahanan Negara Mamuju	(32.840,00)
24	Lembaga Pemasyarakatan Tondano	(38.610,00)
25	Rumah Tahanan Negara Jepara	(42.716,00)
26	Rumah Tahanan Negara Pekalongan	(44.023,00)
27	Lembaga Pemasyarakatan Bengkulu	(52.332,00)
28	Lembaga Pemasyarakatan Ujung Pandang	(199.036,00)
29	Lembaga Pemasyarakatan Tarakan	(951.039,00)
30	Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Tpi Soekarno Hatta	(1.800.000.000,00)
Koreksi Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Lainnya		
31	Rumah Tahanan Negara Wonosobo	(16.310,00)
32	Kantor Imigrasi Kelas II Non Tpi Karawang	(20.283,00)
33	Lembaga Pemasyarakatan Lahat	(50.556,00)
35	Lembaga Pemasyarakatan Tual	(285.308,00)
37	Lembaga Pemasyarakatan Semarang	(482.830,00)
38	Direktorat Jenderal Imigrasi	(1.799.161.590,00)



39	Kanwil Kementerian Hukum Dan HAM Bengkulu	103.699.276,00
40	Lapas Perempuan Kelas III Manokwari	233.844,00
41	Lembaga Pemasyarakatan Way Kanan	387.689,00
42	Direktorat Jenderal Pemasyarakatan	1.292.982,00
43	Rumah Tahanan Negara Sukadana	104.218,00
44	Lembaga Pembinaan Khusus Anak Bandar Lampung	146.664.074,00
45	Rumah Tahanan Negara Manado	471.550,00
46	Lpka Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur	40.230,00
47	Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Bandar Lampung	1.443.087,00
48	Lapas Anak Kelas III Batam	3.031.626,00
49	Lapas Kelas III Amurang	6.032,00
Koreksi Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan TP/TGR		
50	Kanwil Kementerian Hukum Dan HAM Pekanbaru	4.350,00
51	Kanwil Kementerian Hukum Dan HAM Sumatera Utara Di Medan	(13.136,00)
Koreksi Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Tuntutan Ganti Rugi		
52	Kanwil Kementerian Hukum Dan HAM Tanjung Karang	57.000,00
53	Lembaga Pemasyarakatan Manokwari	(64.755,00)
54	Sekretariat Jenderal (Pusat)	(13.290.126,00)
55	Balai Pemasyarakatan Ternate, Maluku Utara	(29.756.750,00)
Total		(1.420.729.701,00)

D.9 Kegiatan Non Operasional

Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar
Rp3.171.191.455,00

D.9.1 Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar

Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar-LO pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia merupakan pendapatan hasil Penjualan/Lelang Barang Persediaan, Aset Gedung dan Bangunan, Peralatan dan Mesin yang dihapuskan.

Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar-LO Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp3.171.191.455,00 dan Rp3.530.914.328,00 dengan rincian sebagai berikut:



Tabel 207

**Perbandingan Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar-LO
Untuk Periode Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020**

Akun	Uraian	31 Desember 2021	31 Desember 2020	Naik/Turun (%)
425121	Pendapatan dari Penjualan Tanah, Gedung dan Bangunan	283.350.198,00	194.232.911,00	45,88
425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	1.287.503.250,00	1.762.093.568,00	(26,93)
425129	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	1.600.338.007,00	1.574.587.849,00	1,64
Total		3.171.191.455,00	3.530.914.328,00	(10,19)

Perbandingan Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar-LO dengan Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar-LRA untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 208

**Perbandingan Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar-LO
Dengan Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar-LRA
Untuk Periode Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2021**

Uraian	Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar-LO	Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar-LRA	Selisih
Pendapatan dari Penjualan Tanah, Gedung dan Bangunan	283.350.198,00	283.350.198,00	0,00
Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	1.287.503.250,00	1.287.503.250,00	0,00
Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	1.600.338.007,00	1.600.338.007,00	0,00
	3.171.191.455,00	3.171.191.455,00	0,00

Tidak terdapat selisih antara Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar-LO dan Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar-LRA.

Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar-LO per 31 Desember 2021 sebesar Rp3.171.191.455,00 terdapat pada Satuan Kerja sebagai berikut:



Tabel 209
Rincian Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar-LO
Berdasarkan Satuan Kerja
Untuk Periode Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2021

No	Satuan Kerja	31 Desember 2021
Pendapatan dari Penjualan Tanah, Gedung dan Bangunan		
1	Kanwil Kementerian Hukum Dan HAM Jawa Tengah	13.600.000,00
2	Kanwil Kementerian Hukum Dan HAM Yogyakarta	40.557.999,00
3	Lembaga Pemasyarakatan Besi	2.567.899,00
4	Lembaga Pemasyarakatan Banceuy Bandung	6.928.000,00
5	Lembaga Pemasyarakatan Purwokerto	1.567.899,00
6	Rumah Tahanan Negara Kabanjahe	25.648.000,00
7	Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Semarang, Kot.Semarang, Jawa Tengah	187.580.000,00
8	Kantor Imigrasi Kelas I TPI Kendari	800.001,00
9	Kantor Imigrasi Kelas II TPI Atambua	4.100.400,00
SUBTOTAL		283.350.198,00
Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin		
10	Kanwil Departemen Hukum Dan HAM Manado	45.791.256,00
11	Kanwil Kementerian Hukum Dan HAM Propinsi Gorontalo	37.704.999,00
12	Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan HAM Kepulauan Riau	57.567.888,00
13	Balai Harta Peninggalan Surabaya	3.750.000,00
14	Rumah Tahanan Negara Bantul	1.987.654,00
15	Rumah Tahanan Negara Marabahan	49.016.000,00
16	Rumah Tahanan Negara Cirebon	7.777.999,00
17	Balai Pemasyarakatan Bogor	1.555.555,00
18	Balai Pemasyarakatan Magelang	13.265.221,00



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Catatan Atas Laporan Keuangan – *Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Operasional*
Per 31 Desember Tahun Anggaran 2021 (*Audited*)
Dengan Angka Perbandingan 31 Desember Tahun Anggaran 2020
(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

19	Lapas Klaten	72.280.000,00
20	Rumah Tahanan Negara Banyumas	11.789.999,00
21	Rumah Tahanan Negara Purbalingga	7.750.000,00
22	Rumah Tahanan Negara Sigli	2.865.000,00
23	Rutan Kelas I Labuhan Deli	9.099.999,00
24	Lapas Kelas III Alahan Panjang	538.000,00
25	Lembaga Pemasyarakatan Pasir Pangarayan	4.437.000,00
26	Lapas Muara Bulian	67.050.000,00
27	Rumah Tahanan Negara Sanggau	73.750.000,00
28	Rumah Tahanan Negara Barabai	1.350.000,00
29	Rumah Tahanan Negara Kotamobagu	2.500.000,00
30	Lapas Kelas III Lirung	902.987,00
31	Lembaga Pemasyarakatan Palu	560.000,00
32	Rumah Tahanan Negara Pangkajene	19.101.000,00
33	Balai Pemasyarakatan Mataram	1.950.500,00
34	Lapas Atambua	15.888.999,00
35	Balai Pemasyarakatan Banjarmasin	9.775.995,00
36	Lembaga Pemasyarakatan Wanita Sungguminasa	41.000,00
37	Rumah Tahanan Negara Gresik	3.100.000,00
38	Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kupang	1.111.111,00
39	Balai Pemasyarakatan Muara Tewe	29.611.000,00
40	Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Indramayu	1.300.000,00
41	Rumah Tahanan Negara Kelas I Tanjung Pinang	880.000,00
42	Lapas Kelas IIB Warung Kiara	1.559.918,00
43	Rutan Kelas IIB Padang	500.000,00
44	Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Kuala Tungkal	10.699.900,00



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Catatan Atas Laporan Keuangan – *Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Operasional*
Per 31 Desember Tahun Anggaran 2021 (*Audited*)
Dengan Angka Perbandingan 31 Desember Tahun Anggaran 2020
(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

45	Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Surabaya	205.000.000,00
46	Kantor Imigrasi Kelas I TPI Tanjung Pinang	32.874.569,00
47	Kantor Imigrasi Kelas I TPI Mataram	1.800.000,00
48	Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Palangkaraya	30.111.111,00
49	Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tembilahan	3.010.000,00
50	Kantor Imigrasi Kelas I TPI Banjarmasin	67.733.000,00
51	Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam	7.200.000,00
52	Perwakilan Imigrasi Di Jeddah	43.967.970,00
53	Kantor Imigrasi Kelas I TPI Surakarta	325.000,00
54	Kantor Imigrasi Kelas I TPI Kendari	74.610.000,00
55	Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bengkulu	1.357.999,00
56	Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Sukabumi	8.375.000,00
57	Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Blitar	10.150.000,00
58	Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sumbawa Besar	6.000.000,00
59	Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Muara Enim	12.690.000,00
60	Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tahuna	47.121.000,00
61	Rumah Detensi Imigrasi Manado	75.671.678,00
62	Rumah Detensi Imigrasi Denpasar	11.555.555,00
63	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum Dan Hak Asasi Manusia	79.141.388,00
SUBTOTAL		1.287.503.250,00
Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya		
64	Sekretariat Jenderal (Pusat)	104.586.512,00
65	Kanwil Kementerian Hukum Dan HAM Jakarta Raya	20.575.000,00
66	Kanwil Kementerian Hukum Dan HAM Sumatera Utara Di Medan	115.999,00



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Catatan Atas Laporan Keuangan – *Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Operasional*
Per 31 Desember Tahun Anggaran 2021 (*Audited*)
Dengan Angka Perbandingan 31 Desember Tahun Anggaran 2020
(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

67	Kanwil Kementerian Hukum Dan HAM Banda Aceh	13.979.797,00
68	Kanwil Kementerian Hukum Dan HAM Padang	755.000,00
69	Kanwil Kementerian Hukum Dan HAM Pekanbaru	3.512.000,00
70	Kanwil Kementerian Hukum Dan HAM Denpasar	8.176.000,00
71	Kanwil Kementerian Hukum Dan HAM Jayapura	4.322.000,00
72	Kanwil Kementerian Hukum Dan HAM Jambi	9.503.899,00
73	Kanwil Kementerian Hukum Dan HAM Yogyakarta	2.000.123,00
74	Kanwil Kementerian Hukum Dan HAM Mataram	4.555.500,00
75	Pusat Data Dan Teknologi Informasi	80.217.890,00
76	Kanwil Kementerian Hukum Dan HAM Propinsi Banten	3.800.000,00
77	Kanwil Kementerian Hukum Dan HAM Propinsi Bangka Belitung	1.567.898,00
78	Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan HAM Sulawesi Barat	1.700.000,00
79	Balai Harta Peninggalan Semarang	15.799.999,00
80	Lembaga Pemasyarakatan Batu	36.201.263,00
81	Lapas Batam	2.705.000,00
82	Balai Pemasyarakatan Jak-Pus	10.024.000,00
83	Rumah Tahanan Negara Purwodadi	13.800.000,00
84	Rumah Tahanan Negara Trenggalek	1.600.000,00
85	Rumah Tahanan Negara Sampang	4.550.000,00
86	Rumah Tahanan Negara Magetan	15.942.022,00
87	Lembaga Pemasyarakatan Lhok Seumawe	200.000,00
88	Lembaga Pemasyarakatan Kutacane	40.099.999,00
89	Lapas Kelas IIA Pancur Batu	4.255.554,00
90	Lapas Lubuk Pakam	3.123.456,00



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Catatan Atas Laporan Keuangan – *Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Operasional*
Per 31 Desember Tahun Anggaran 2021 (*Audited*)
Dengan Angka Perbandingan 31 Desember Tahun Anggaran 2020
(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

91	Lembaga Pemasyarakatan Payakumbuh	4.777.999,00
92	Rumah Tahanan Negara Sanggau	6.729.500,00
93	Lembaga Pemasyarakatan Sintang	344.000,00
94	Lapas Kelas IIA Tenggarong	820.000,00
95	Lembaga Pemasyarakatan Manado	400.000,00
96	Lembaga Pemasyarakatan Tahuna	18.169.999,00
97	Lembaga Pemasyarakatan Ulu Siau	2.168.000,00
98	Rumah Tahanan Negara Rappang	1.200.111,00
99	Rumah Tahanan Negara Enrekang	1.127.000,00
100	Lapas Kelas III Labuha	393.000,00
101	Balai Pemasyarakatan Denpasar	43.000.000,00
102	Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Kerobokan	23.780.888,00
103	Rumah Tahanan Negara Bangli	12.156.798,00
104	Lembaga Pemasyarakatan Karangasem	6.577.000,00
105	Rumah Tahanan Negara Raba/Bima	5.500.000,00
106	Rumah Tahanan Negara Kefamenanu	810.000,00
107	Rumah Tahanan Negara Jakarta Pusat	2.522.000,00
108	Lembaga Pemasyarakatan Pria Tangerang	288.777.777,00
109	Balai Pemasyarakatan Pontianak	1.511.500,00
110	Direktorat Jenderal Pemasyarakatan	43.657.000,00
111	Rumah Tahanan Negara Unaaha	1.750.000,00
112	Lembaga Pemasyarakatan Jailolo	367.400,00
113	Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Tanjung Pinang	1.250.000,00
114	Rumah Tahanan Negara Serang	315.000,00
115	Rumah Tahanan Negara Kendari	500.000,00
116	Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Jakarta Pusat	13.428.000,00



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
 Catatan Atas Laporan Keuangan – *Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Operasional*
 Per 31 Desember Tahun Anggaran 2021 (*Audited*)
 Dengan Angka Perbandingan 31 Desember Tahun Anggaran 2020
 (Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

117	Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Samarinda	550.000,00
118	Lembaga Pemasyarakatan Ternate	1.811.000,00
119	Lembaga Pemasyarakatan Lubuk Basung	2.122.232,00
120	Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Jakarta	17.900.009,00
121	Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Pamekasan	6.000.001,00
122	Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Sanggau	7.150.000,00
123	Rumah Sakit Pengayoman Cipinang Kelas D	22.027.999,00
124	Lapas Kelas III Dharmas Raya	380.000,00
125	Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Dabo Singkep	5.700.000,00
126	Kantor Imigrasi Kelas II TPI Lhokseumawe	20.287.000,00
127	Kantor Imigrasi Kelas II TPI Dumai	8.100.000,00
128	Kantor Imigrasi Kelas II TPI Belakang Padang	10.160.000,00
129	Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang	3.500.999,00
130	Kantor Imigrasi Kelas I TPI Pangkal Pinang	310.000,00
131	Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Singkawang	43.764.000,00
132	Kantor Imigrasi Kelas I TPI Makassar	29.287.000,00
133	Kantor Imigrasi Kelas I TPI Denpasar	600.000,00
134	Kantor Imigrasi Kelas I TPI Mataram	2.700.000,00
135	Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jayapura	2.800.000,00
136	Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sorong	6.929.000,00
137	Kantor Imigrasi Kelas II TPI Merauke	16.050.000,00
138	Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tembilahan	2.550.000,00
139	Kantor Imigrasi Kelas I TPI Manado	66.796.998,00
140	Kantor Imigrasi Kelas I TPI Tanjung Perak	21.588.000,00
141	Kantor Imigrasi Kelas II TPI Bitung	1.576.433,00



142	Kantor Imigrasi Kelas II TPI Maumere	1.500.000,00
143	Direktorat Jenderal Imigrasi	15.800.000,00
144	Kantor Imigrasi Kelas I TPI Ternate	51.833.000,00
145	Kantor Imigrasi Kelas II TPI Entikong	12.482.500,00
146	Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sabang	3.666.666,00
147	Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jakarta Utara	17.058.588,00
148	Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Madiun	10.779.999,00
149	Kantor Imigrasi Kelas II TPI Singaraja	10.000.000,00
150	Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sambas	72.051.000,00
151	Ditjen Kekayaan Intelektual	83.610.700,00
152	Ditjen Peraturan Perundang-Undangan	86.814.000,00
153	Badan Pembinaan Hukum Nasional	43.669.000,00
154	Badan Penelitian Dan Pengembangan Hukum Dan Hak Asasi Manusia	730.000,00
SUBTOTAL		1.600.338.007,00
TOTAL		3.171.191.455,00

Beban Pelepasan Aset Non Lancar
Rp27.099.431.134,00

D.9.2 Beban Pelepasan Aset Non Lancar

Beban Pelepasan Aset Non Lancar-LO Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp27.099.431.134,00 dan Rp24.705.768.708,00.

Beban ini terbentuk dari Jurnal kirim SIMAK-BMN atas transaksi-transaksi yang menyebabkan kerugian pelepasan Aset Non Lancar. Rincian Beban Pelepasan Aset Non Lancar-LO untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:



Tabel 210
Rincian Beban Pelepasan Aset Non Lancar-LO
Untuk Periode Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2021

Uraian	Nilai	Keterangan
Beban Kerugian Pelepasan Aset	27.099.431.134,00	Beban Kerugian yang timbul dari transaksi pelepasan Aset, baik dari transaksi Penghapusan ataupun Hibah Keluar Barang Persediaan / Aset Peralatan dan Mesin / Gedung dan Bangunan / Aset Tetap Lainnya / Konstruksi Dalam Pengerjaan / Aset Lainnya. Penghapusan Aset disebabkan karena beberapa hal, antara lain: • Kondisi Barang / Aset Rusak Berat akibat Pemakaian • Telah Habis Umur Ekonomis • Kondisi Barang / Aset Rusak Berat akibat Force Majeure seperti kerusakan, kebakaran, bencana alam gempa, banjir, tsunami dan lain-lain.
Total	27.099.431.134,00	

Rincian Beban Pelepasan Aset Non Lancar-LO untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 berdasarkan jenis Asetnya adalah sebagai berikut:

Tabel 211
Rincian Beban Pelepasan Aset Non Lancar-LO
Berdasarkan Jenis Aset
Untuk Periode Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2021

No	Uraian	Nilai
1	Barang Konsumsi	13.296.000,00
2	Tanah	622.500.000,00
3	Peralatan dan Mesin	37.363.874,00
4	Gedung dan Bangunan	1.534.045.644,00
5	Irigasi	47.781.646,00
6	Aset Tetap Renovasi	799.068.775,00
7	Konstruksi Dalam pengerjaan	19.983.913.275,00
8	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi	4.002.946.045,00



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Catatan Atas Laporan Keuangan – *Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Operasional*
Per 31 Desember Tahun Anggaran 2021 (*Audited*)
Dengan Angka Perbandingan 31 Desember Tahun Anggaran 2020
(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

9	Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional	58.515.875,00
TOTAL		27.099.431.134,00

Daftar Sebaran Satuan Kerja dengan Beban Pelepasan Aset Non Lancar-LO per 31 Desember 2021 sebesar Rp27.099.431.134,00 adalah sebagai berikut:

Tabel 212
Rincian Beban Pelepasan Aset Non Lancar-LO
Berdasarkan Satuan Kerja
Untuk Periode Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2021

No	Satuan Kerja	31 Desember 2021	Keterangan
1	Sekretariat Jenderal (Pusat)	6.149.000,00	Komputer, Alat Kantor & Rumah Tangga
2	Kanwil Kementerian Hukum Dan HAM Jawa Tengah	266.765.963,00	Bangunan Gedung
3	Kanwil Kementerian Hukum Dan HAM Jambi	118.601.886,00	Alat Angkutan, Alat Kantor & Rumah Tangga, Bangunan Gedung
4	Kanwil Kementerian Hukum Dan HAM Bengkulu	654.697.376,00	Bangunan Gedung
5	Kanwil Kementerian Hukum Dan HAM Yogyakarta	153.952.000,00	Aset Tak Berwujud, Bangunan Gedung
6	Kanwil Kementerian Hukum Dan HAM Propinsi Bangka Belitung	8.256.875,00	Alat Kantor & Rumah Tangga, Alat Studio, Komunikasi Dan Pemancar, Komputer
7	Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan HAM Kepulauan Riau	281.341.775,00	Konstruksi Dalam Pengerjaan



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Catatan Atas Laporan Keuangan – *Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Operasional*
Per 31 Desember Tahun Anggaran 2021 (*Audited*)
Dengan Angka Perbandingan 31 Desember Tahun Anggaran 2020
(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

8	Kanwil Kementerian Hukum Dan HAM Ujung Pandang	65.700.000,00	Konstruksi Dalam Pengerjaan
9	Kanwil Kementerian Hukum Dan HAM Padang	856.920.089,00	Konstruksi Dalam Pengerjaan
10	Kanwil Kementerian Hukum Dan HAM Samarinda	4.826.807.055,00	Konstruksi Dalam Pengerjaan
11	Kanwil Kementerian Hukum Dan HAM Kupang	128.600.000,00	Konstruksi Dalam Pengerjaan
12	Kanwil Kementerian Hukum Dan HAM Ambon	94.871.750,00	Konstruksi Dalam Pengerjaan
	SEKRETARIAT JENDERAL	7.462.663.769,00	
13	Lembaga Pemasyarakatan Batu	273.176.160,00	Alat Angkutan
14	Lembaga Pemasyarakatan Besi	117.176.990,00	Bangunan Gedung
15	Lembaga Pemasyarakatan Cirebon	53.553.352,00	Bangunan Gedung
16	Lembaga Pemasyarakatan Anak Pria Tangerang	435.000,00	Alat Kantor & Rumah Tangga, Alat Kedokteran Dan Kesehatan, Alat Studio, Komunikasi Dan Pemancar, Komputer
17	Lapas Klaten	900.000,00	Alat Bengkel Dan Alat Ukur, Alat Besar, Alat Kantor & Rumah Tangga, Alat Laboratorium, Alat Persenjataan, Alat Pertanian, Alat Studio, Komunikasi Dan Pemancar,



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Catatan Atas Laporan Keuangan – *Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Operasional*
Per 31 Desember Tahun Anggaran 2021 (*Audited*)
Dengan Angka Perbandingan 31 Desember Tahun Anggaran 2020
(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

			Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olah raga, Komputer, Peralatan Olah Raga
18	Lembaga Pemasyarakatan Purwokerto	224.168.933,00	Bangunan Gedung
19	Rumah Tahanan Negara Banyumas	484.525,00	Alat Bengkel Dan Alat Ukur, Alat Besar, Alat Kantor & Rumah Tangga, Alat Kedokteran Dan Kesehatan, Alat Keselamatan Kerja, Alat Laboratorium, Alat Studio, Komunikasi Dan Pemancar, Bahan Perpustakaan, Peralatan Olah Raga
20	Rumah Tahanan Negara Sumenep	23.060.000,00	Bahan Perpustakaan
21	Rumah Tahanan Negara Sampang	84.597.000,00	Bangunan Gedung
22	Lembaga Pemasyarakatan Madiun	7.971.591,00	Bangunan Gedung
23	Lembaga Pemasyarakatan Lhok Seumawe	100.961.699,00	Bangunan Gedung
24	Lapas Kelas III Sinabang	636.888.260,00	Bangunan Gedung
25	Lapas Kelas IIA Pancur Batu	103.708.030,00	Bangunan Gedung
26	Lembaga Pemasyarakatan Labuhan Ruku	112.559.018,00	Bangunan Gedung
27	Lembaga Pemasyarakatan Bandar Lampung	93.408.898,00	Bangunan Gedung



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
 Catatan Atas Laporan Keuangan – *Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Operasional*
 Per 31 Desember Tahun Anggaran 2021 (*Audited*)
 Dengan Angka Perbandingan 31 Desember Tahun Anggaran 2020
 (Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

28	Rumah Tahanan Negara Sanggau	24.208.168,00	Alat Angkutan, Alat Bengkel Dan Alat Ukur, Alat Besar, Alat Kantor & Rumah Tangga, Alat Kedokteran Dan Kesehatan, Alat Produksi, Pengolahan Dan Pemurnian, Alat Studio, Komunikasi Dan Pemancar, Komputer, Peralatan Olah Raga, Peralatan Proses/Produksi
29	Rumah Tahanan Negara Donggala	1.449.456.015,00	Konstruksi Dalam Pengerjaan
30	Lembaga Pemasyarakatan Luwuk	83.141.087,00	Tugu Titik Kontrol/Pasti
31	Lembaga Pemasyarakatan Palopo	290.243,00	Alat Kantor & Rumah Tangga, Alat Kedokteran Dan Kesehatan, Alat Persenjataan, Alat Pertanian, Bahan Perpustakaan
32	Rumah Tahanan Negara Makale	8.973.000,00	Barang Konsumsi
33	Rumah Tahanan Negara Mamuju	310.596.091,00	Bangunan Gedung
34	Lembaga Pemasyarakatan Watampone	4.323.000,00	Barang Konsumsi
35	Lapas Kelas III Labuha	273.101,00	Alat Kantor & Rumah Tangga, Alat Keselamatan Kerja, Alat Studio, Komunikasi Dan Pemancar, Bahan Perpustakaan, Komputer, Peralatan Olah Raga
36	Balai Pemasyarakatan Denpasar	842.506.039,00	Bangunan Gedung
37	Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Kerobokan	738.864.181,00	Bangunan Gedung



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
 Catatan Atas Laporan Keuangan – *Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Operasional*
 Per 31 Desember Tahun Anggaran 2021 (*Audited*)
 Dengan Angka Perbandingan 31 Desember Tahun Anggaran 2020
 (Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

38	Lembaga Pemasyarakatan Karangasem	6.805.141,00	Bangunan Gedung
39	Balai Pemasyarakatan Mataram	1.076.900,00	Alat Bengkel Dan Alat Ukur, Alat Kantor & Rumah Tangga, Alat Studio, Komunikasi Dan Pemancar, Komputer, Peralatan Olah Raga
40	Rumah Tahanan Negara Kefamenanu	72.071.000,00	Alat Bengkel Dan Alat Ukur, Alat Kantor & Rumah Tangga, Alat Kedokteran Dan Kesehatan, Alat Laboratorium, Alat Pertanian, Alat Studio, Komunikasi Dan Pemancar, Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olah raga, Komputer, Peralatan Olah Raga
41	Balai Pemasyarakatan Pontianak	5.098.500,00	Alat Kantor & Rumah Tangga, Alat Studio, Komunikasi Dan Pemancar, Komputer
42	Lembaga Pemasyarakatan Anak Pekanbaru	913.259,00	Bangunan Gedung
43	Rumah Tahanan Negara Unaaha	1.900.000,00	Alat Angkutan, Alat Bengkel Dan Alat Ukur, Alat Besar, Alat Kantor & Rumah Tangga, Alat Kedokteran Dan Kesehatan, Alat Laboratorium, Alat Persenjataan, Alat Pertanian, Alat Studio, Komunikasi Dan Pemancar, Komputer, Peralatan Olah Raga, Peralatan Proses/Produksi



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Catatan Atas Laporan Keuangan – *Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Operasional*
Per 31 Desember Tahun Anggaran 2021 (*Audited*)
Dengan Angka Perbandingan 31 Desember Tahun Anggaran 2020
(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

44	Lembaga Pemasyarakatan Jailolo	6.587.276,00	Alat Bengkel Dan Alat Ukur, Alat Kantor & Rumah Tangga, Alat Kedokteran Dan Kesehatan, Alat Laboratorium, Alat Pengeboran, Alat Persenjataan, Alat Pertanian, Alat Studio, Komunikasi Dan Pemancar, Alat Studio, Komunikasi Dan Pemancar, Bahan Perpustakaan, Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olah raga, Komputer, Peralatan Olah Raga
45	Rumah Tahanan Negara Serang	9.038.771,00	Alat Bengkel Dan Alat Ukur, Alat Kantor & Rumah Tangga, Alat Kedokteran Dan Kesehatan, Alat Studio, Komunikasi Dan Pemancar, Peralatan Olah Raga
46	Rumah Tahanan Negara Kendari	1.300.000,00	Alat Kantor & Rumah Tangga, Alat Kedokteran Dan Kesehatan, Alat Studio, Komunikasi Dan Pemancar, Bahan Perpustakaan, Komputer
47	Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Jakarta	3.629.560,00	Alat Kantor & Rumah Tangga, Alat Kedokteran Dan Kesehatan, Alat Studio, Komunikasi Dan Pemancar, Komputer
48	Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Pamekasan	23.641.448,00	Alat Bengkel Dan Alat Ukur, Alat Kantor & Rumah Tangga, Komputer
49	Rumah Tahanan Negara Kelas I Tanjung Pinang	19.482.126,00	Alat Besar, Alat Kantor & Rumah Tangga, Alat Studio, Komunikasi Dan Pemancar, Bangunan Gedung, Komputer



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Catatan Atas Laporan Keuangan – *Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Operasional*
Per 31 Desember Tahun Anggaran 2021 (*Audited*)
Dengan Angka Perbandingan 31 Desember Tahun Anggaran 2020
(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

50	Rumah Sakit Pengayoman Cipinang Kelas D	993.750,00	Alat Bengkel Dan Alat Ukur, Alat Kantor & Rumah Tangga, Alat Kedokteran Dan Kesehatan, Alat Laboratorium, Komputer
51	Lpka Pangkal Pinang, Provinsi Kep. Bangka Belitung	47.781.646,00	Bangunan Air
52	Lpka Ambon, Provinsi Maluku	978.799.923,00	Konstruksi Dalam Pengerjaan
53	Lembaga Pemasyarakatan Meulaboh	1.325.808.500,00	Konstruksi Dalam Pengerjaan
54	Lapas Kelas III Wahai	2.189.399.000,00	Konstruksi Dalam Pengerjaan
55	Lapas Kelas III Saumlaki	5.121.926.800,00	Konstruksi Dalam Pengerjaan
56	Lapas Atambua	70.111.650,00	Konstruksi Dalam Pengerjaan
57	Lembaga Pemasyarakatan Waingapu	73.499.000,00	Konstruksi Dalam Pengerjaan
58	Lembaga Pemasyarakatan Waikabubak	51.499.000,00	Konstruksi Dalam Pengerjaan
59	Rumah Tahanan Negara Maumere	60.076.650,00	Konstruksi Dalam Pengerjaan
60	Rumah Tahanan Negara Larantuka	54.406.022,00	Konstruksi Dalam Pengerjaan
61	Rumah Tahanan Negara Batam	18.000.000,00	Konstruksi Dalam Pengerjaan
62	Lembaga Pemasyarakatan Anak (LPKA) Kupang	199.858.850,00	Konstruksi Dalam Pengerjaan
63	Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Ambon	459.324.098,00	Konstruksi Dalam Pengerjaan



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Catatan Atas Laporan Keuangan – *Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Operasional*
Per 31 Desember Tahun Anggaran 2021 (*Audited*)
Dengan Angka Perbandingan 31 Desember Tahun Anggaran 2020
(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

64	Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Sungguminasa	74.036.000,00	Konstruksi Dalam Pengerjaan
65	Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Lembata	56.795.298,00	Konstruksi Dalam Pengerjaan
66	Lapas Perempuan Kelas IIB Kupang	71.919.000,00	Konstruksi Dalam Pengerjaan
	DITJEN PEMASYARAKATAN	16.301.459.549,00	
67	Kantor Imigrasi Kelas I TPI Semarang	639.659.303,00	Aset Tetap Dalam Renovasi
68	Kantor Imigrasi Kelas I TPI Malang	1.985.714,00	Alat Angkutan
69	Kantor Imigrasi Kelas I TPI Pekanbaru	64.757.986,00	Bangunan Gedung
70	Kantor Imigrasi Kelas II TPI Dumai	23.217.240,00	Alat Angkutan, Bangunan Gedung
71	Kantor Imigrasi Kelas II TPI Bagan Siapiapi	4.232.216,00	Alat Bengkel Dan Alat Ukur, Alat Kantor & Rumah Tangga, Alat Kedokteran Dan Kesehatan, Alat Keselamatan Kerja, Alat Laboratorium, Alat Pertanian, Alat Studio, Komunikasi Dan Pemancar, Komputer
72	Kantor Imigrasi Kelas II TPI Belakang Padang	3.173.750,00	Alat Kantor & Rumah Tangga, Alat Studio, Komunikasi Dan Pemancar, Bahan Perpustakaan, Komputer



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Catatan Atas Laporan Keuangan – *Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Operasional*
Per 31 Desember Tahun Anggaran 2021 (*Audited*)
Dengan Angka Perbandingan 31 Desember Tahun Anggaran 2020
(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

73	Kantor Imigrasi Kelas I TPI Makassar	810.243,00	Alat Bengkel Dan Alat Ukur, Alat Eksplorasi, Alat Kantor & Rumah Tangga, Alat Kedokteran Dan Kesehatan, Alat Persenjataan, Alat Studio, Komunikasi Dan Pemancar, Bahan Perpustakaan, Komputer, Peralatan Olah Raga
74	Kantor Imigrasi Kelas I TPI Mataram	145.328.802,00	Alat Angkutan, Bangunan Gedung
75	Kantor Imigrasi Kelas II TPI Merauke	530.000,00	Alat Angkutan, Alat Bengkel Dan Alat Ukur, Alat Besar, Alat Kantor & Rumah Tangga, Alat Studio, Komunikasi Dan Pemancar, Komputer
76	Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palu	783.616.800,00	Konstruksi Dalam Pengerjaan
77	Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tembilahan	676.562.000,00	Alat Angkutan, Bangunan Gedung, Konstruksi Dalam Pengerjaan
78	Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jakarta Timur	30.057.500,00	Aset Tak Berwujud
79	Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam	160.612.872,00	Alat Angkutan, Alat Bengkel Dan Alat Ukur, Alat Besar, Alat Kantor & Rumah Tangga, Alat Persenjataan, Alat Studio, Komunikasi Dan Pemancar, Aset Tetap Dalam Renovasi, Komputer
80	Kantor Imigrasi Kelas I TPI Tanjung Perak	7.644.438,00	Bangunan Gedung
81	Direktorat Jenderal Imigrasi	5.548.900,00	Alat Kantor & Rumah Tangga, Alat Kedokteran Dan Kesehatan
82	Kantor Imigrasi Kelas II TPI Entikong	14.695.000,00	Alat Bengkel Dan Alat Ukur, Alat Kantor & Rumah Tangga, Alat Kedokteran Dan Kesehatan, Alat Pertanian, Alat Studio,



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
 Catatan Atas Laporan Keuangan – *Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Operasional*
 Per 31 Desember Tahun Anggaran 2021 (*Audited*)
 Dengan Angka Perbandingan 31 Desember Tahun Anggaran 2020
 (Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

			Komunikasi Dan Pemancar, Komputer
83	Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Sukabumi	4.079.541,00	Alat Angkutan, Alat Kantor & Rumah Tangga, Alat Studio, Komunikasi Dan Pemancar, Aset Tak Berwujud, Komputer
84	Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Madiun	1.634.627,00	Alat Kantor & Rumah Tangga, Alat Pertanian, Alat Studio, Komunikasi Dan Pemancar, Komputer
85	Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Muara Enim	9.678.806,00	Alat Kantor & Rumah Tangga, Alat Kedokteran Dan Kesehatan, Alat Laboratorium, Alat Studio, Komunikasi Dan Pemancar, Komputer
86	Rumah Detensi Imigrasi Pontianak	2.400.000,00	Alat Besar, Alat Kantor & Rumah Tangga, Alat Studio, Komunikasi Dan Pemancar, Komputer
87	Rumah Detensi Imigrasi Denpasar	34.212.290,00	Alat Besar, Alat Kantor & Rumah Tangga, Alat Kedokteran Dan Kesehatan, Alat Persenjataan, Alat Studio, Komunikasi Dan Pemancar, Komputer
88	Perwakilan Imigrasi Guangzhou Di RRC	69.911.413,00	Alat Bengkel Dan Alat Ukur, Alat Kantor & Rumah Tangga, Alat Laboratorium, Alat Persenjataan, Komputer
89	Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Kediri	622.500.000,00	Alat Angkutan, Tanah
	DITJEN IMIGRASI	3.306.849.441,00	
90	Direktorat Jenderal HAM	28.458.375,00	Aset Tak Berwujud
	DITJEN HAM	28.458.375,00	
	TOTAL	27.099.431.134,00	



**Pendapatan dari
Kegiatan Non
Operasional Lainnya
Rp37.346.850.228,00**

D.9.3 Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya

Kelompok pendapatan yang masuk dalam kategori Pendapatan Non Operasional Lainnya-LO adalah pendapatan yang tidak membentuk pendapatan operasional tahun berjalan karena bukan merupakan pendapatan operasional dari menjalankan tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia seperti pendapatan dari Penyelesaian Tuntutan Ganti Rugi Non Bendahara, Tuntutan Perbendaharaan, Pengembalian Belanja Tahun Anggaran Yang Lalu, Pendapatan Selisih Kurs Yang Belum Terealisasi, Pendapatan Penyesuaian Selisih Kurs, Pendapatan Perolehan Aset Lainnya dan Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan dan lain-lain.

Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp37.346.850.228,00 dan Rp162.571.481.440,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 213

**Perbandingan Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO
Untuk Periode Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020**

Akun	Uraian	31 Desember 2021	31 Desember 2020	Naik/Turun (%)
425752	Pendapatan dari Untung Selisih Kurs Uang Persediaan	2.275.370,00	0,00	-
425791	Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Non Bendahara	141.563.640,00	93.919.700,00	50,73
425792	Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Bendahara	65.460.000,00	10.633.800,00	515,58
425793	Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pihak Ketiga	3.500.000,00	0,00	-
425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	1.176.499.136,00	1.751.286.041,00	(32,82)
425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	15.805.333.087,00	18.780.148.041,00	(15,84)



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Catatan Atas Laporan Keuangan – *Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Operasional*
Per 31 Desember Tahun Anggaran 2021 (*Audited*)
Dengan Angka Perbandingan 31 Desember Tahun Anggaran 2020
(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

425913	Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	10.566.564.278,00	12.240.313.308,00	(13,67)
425931	Pendapatan Setoran dari Sisa Utang Non TP/TGR Pensiunan PNS	413.626.725,00	521.086.308,00	(20,62)
491111	Pendapatan Selisih Kurs yang Belum Terealisasi	2.401.551.004,00	9.572.513.025,00	(74,91)
491429	Pendapatan Perolehan Aset Lainnya	6.770.476.988,00	10.148.747.909,00	(33,29)
491511	Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan	0,00	109.452.833.308,00	(100,00)
Total		37.346.850.228,00	162.571.481.440,00	(77,03)

Pada tahun 2021 terjadi penurunan secara signifikan pada Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya dibandingkan dengan tahun 2020. Hal tersebut terutama disebabkan adanya penurunan Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan sebesar 100% karena perubahan metode pencatatan persediaan yang semula menggunakan metode Harga Perolehan Terakhir (HPT) menjadi metode *First In First Out* (FIFO), sehingga menyebabkan tidak adanya pengakuan Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan.

Perbandingan Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO dengan Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LRA untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 214
Perbandingan
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO dan
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LRA
Untuk Periode Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2021

Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO	Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LRA	Selisih
37.346.850.228,00	38.882.373.438,00	(1.535.523.210,00)

Rincian selisih antara Pendapatan dari Kegiatan Non



Operasional Lainnya-LO dengan Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LRA untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 215

**Rincian Selisih Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO dan Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LRA
Untuk Periode Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2021**

Uraian	LO	LRA	Selisih
Pendapatan dari Untung Selisih Kurs Uang Persediaan	2.275.370,00	2.275.370,00	0,00
Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Non Bendahara	141.563.640,00	157.104.373,00	(15.540.733,00)
Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Bendahara	65.460.000,00	27.000.000,00	38.460.000,00
Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pihak Ketiga	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	1.176.499.136,00	1.178.047.774,00	(1.548.638,00)
Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	15.805.333.087,00	24.898.397.306,00	(9.093.064.219,00)
Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	10.566.564.278,00	12.202.421.890,00	(1.635.857.612,00)
Pendapatan Setoran dari Sisa Utang Non TP/TGR Pensiunan PNS	413.626.725,00	413.626.725,00	0,00
Pendapatan Selisih Kurs yang Belum Terealisasi	2.401.551.004,00	0,00	2.401.551.004,00
Pendapatan Perolehan Aset Lainnya	6.770.476.988,00	0,00	6.770.476.988,00
Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan	0,00	0,00	0,00
Total	37.346.850.228,00	38.882.373.438,00	(1.535.523.210,00)

Selisih antara Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO dengan Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LRA dapat dijelaskan sebagai berikut:



Tabel 216
Penjelasan Selisih Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya -LO dengan Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya –LRA
Untuk Periode Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2021

Uraian	Selisih	Keterangan
Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Non Bendahara	(15.540.733,00)	Pencatatan Baru Piutang TP/TGR sebesar Rp141.563.640,00 Pendapatan atas Pembayaran Piutang TP/TGR Tahun Anggaran Yang Lalu sebesar (Rp157.104.373,00)
Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Bendahara	38.460.000,00	Pencatatan Baru Piutang TP/TGR sebesar Rp65.460.000,00 Pendapatan atas Pembayaran Piutang TP/TGR Tahun Anggaran Yang Lalu sebesar (Rp27.000.000,00)
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	(1.548.638,00)	Pendapatan atas Pembayaran Piutang Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu sebesar (Rp2.930.838,00) Pencatatan Piutang Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu sebesar Rp1.382.200,00
Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	(9.093.064.219,00)	Pencatatan Piutang Penerimaan Kembali Belanja Barang TAYL sebesar Rp193.210.187,00 Pendapatan atas Pembayaran Piutang Penerimaan Kembali Belanja Barang TAYL sebesar (Rp8.899.853.532,00) Jurnal Balik Pencatatan Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran atas penyetoran Pendapatan Penerimaan Kembali Belanja Barang TAYL sebesar (Rp500,00)



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Catatan Atas Laporan Keuangan – *Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Operasional*
Per 31 Desember Tahun Anggaran 2021 (*Audited*)
Dengan Angka Perbandingan 31 Desember Tahun Anggaran 2020
(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	(1.635.857.612,00)	Pencatatan Piutang Penerimaan Kembali Belanja Modal TAYL sebesar Rp1.770.661.485,00 Pendapatan atas Pembayaran Piutang Penerimaan Kembali Belanja Modal TAYL sebesar (Rp3.406.519.097,00)
Pendapatan Selisih Kurs yang Belum Terealisasi	2.401.551.004,00	Pendapatan yang terbentuk apabila Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran berdasarkan kurs tengah BI lebih besar dari Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran berdasarkan kurs transaksi (SP2D).
Pendapatan Perolehan Aset Lainnya	6.770.476.988,00	Pendapatan yang terbentuk dari pencatatan Aset dengan Transaksi Perolehan Lainnya
Total	(1.535.523.210,00)	

Dari tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO terbentuk selain karena adanya arus Kas Masuk atas Pendapatan TP/TGR dan Penerimaan Kembali Belanja TAYL namun juga karena adanya Jurnal Akrua atas Pencatatan Baru Piutang TP/TGR, Pencatatan Baru Piutang Penerimaan Kembali Belanja TAYL, Pendapatan Selisih Kurs Yang Belum Terealisasi, Pendapatan Perolehan Aset Lainnya serta Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan.

Sedangkan yang dapat mengurangi nilai Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO adalah transaksi Jurnal Balik atas Pembayaran Piutang TP/TGR, Pembayaran Piutang Penerimaan Kembali Belanja TAYL, dan Kas Lainnya dan Setara Kas atas Penerimaan Kembali Belanja TAYL yang disetor ke Kas Negara.

Perhitungan selisih antara Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO dan Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LRA dapat dijelaskan sebagai berikut:



Tabel 217
Perhitungan Selisih Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO dan Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LRA
Untuk Periode Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2021

a	Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional LO	37.346.850.228,00
	Pendapatan dari Untung Selisih Kurs Uang Persediaan (425752)	2.275.370,00
	Pendapatan Pengembalian Belanja TAYL (42591x)	38.278.866.970,00
	Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara (42579x)	187.604.373,00
	Pendapatan Setoran dari Sisa Utang Non TP/TGR Pensiunan PNS (425931)	413.626.725,00
b	Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional LRA	38.882.373.438,00
c	Selisih Antara LO dan LRA (a - b)	(1.535.523.210,00)
	Faktor Yang Mempengaruhi	
	Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara (42579x)	(187.604.373,00)
	Pendapatan Selisih Kurs yang Belum Terealisasi	2.401.551.004,00
	Pendapatan Perolehan Aset Lainnya	6.770.476.988,00
	Jurnal (Pencatatan Baru) Piutang Jangka Panjang TP/TGR	210.523.640,00
	Jurnal Pengakuan Piutang PNBPN yang menggunakan akun Penerimaan Kembali Belanja TAYL (42591X)	2.218.394.925,00
	Jurnal Balik atas Pembayaran Piutang PNBPN yang menggunakan akun Penerimaan Kembali Belanja TAYL (42591X)	(12.948.864.894,00)
	Jurnal balik atas penyetoran kelebihan belanja TAYL yang terdapat pada BP dengan menggunakan akun 42591x	(500,00)
d	Total Faktor Yang Mempengaruhi	(1.535.523.210,00)
	Selisih (c - d)	0,00

Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya
Rp8.368.118.942,00

D.9.4 Beban Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya

Beban Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar



Rp8.368.118.942,00 dan Rp65.577.408.804,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 218
Perbandingan Beban Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO
Untuk Periode Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Akun	Uraian	31 Desember 2021	31 Desember 2020	Naik/Turun (%)
521214	Beban Rugi Selisih Kurs Uang Persediaan Satker Perwakilan RI/Atase	117.935.499,00	113.298.870,00	4,09
593311	Beban Penyesuaian Nilai Persediaan	0,00	55.868.814.308,00	(100,00)
596121	Beban Persediaan Rusak/Usang	5.848.632.439,00	7.592.515.980,00	(22,97)
596211	Beban Kerugian Selisih Kurs Belum Terealisasi	2.401.551.004,00	2.002.779.646,00	19,91
Total		8.368.118.942,00	65.577.408.804,00	(87,24)

Pada tahun 2021 terjadi penurunan secara signifikan pada Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya dibandingkan dengan tahun 2020. Hal tersebut terutama disebabkan adanya penurunan Beban Penyesuaian Nilai Persediaan sebesar 100% karena perubahan metode pencatatan persediaan yang semula menggunakan metode Harga Perolehan Terakhir (HPT) menjadi metode *First In First Out* (FIFO), sehingga menyebabkan tidak adanya pengakuan Beban Penyesuaian Nilai Persediaan.

Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia secara umum dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 219
Penjelasan Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya -LO
Untuk Periode Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2021

Uraian	31 Desember 2021	Keterangan
Beban Rugi Selisih Kurs Uang Persediaan Satker Perwakilan RI/Atase	117.935.499,00	Beban yang terbentuk atas rugi selisih saldo Uang Persediaan (UP) Satker Perwakilan Imigrasi di Luar Negeri karena adanya perbedaan kurs.



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Catatan Atas Laporan Keuangan – *Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Operasional*
Per 31 Desember Tahun Anggaran 2021 (*Audited*)
Dengan Angka Perbandingan 31 Desember Tahun Anggaran 2020
(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Beban Persediaan Rusak/Usang	5.848.632.439,00	Beban yang terbentuk dari persediaan dengan kondisi rusak/usang.
Beban Kerugian Selisih Kurs Belum Terealisasi	2.401.551.004,00	Beban yang terbentuk atas selisih Kas di Bendahara Pengeluaran Satker Perwakilan Imigrasi di Luar Negeri karena adanya perbedaan kurs. Beban terbentuk apabila Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran berdasarkan kurs tengah BI lebih kecil dari Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran berdasarkan kurs transaksi (SP2D).
Total	8.368.118.942,00	

Perhitungan selisih antara Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO dan Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LRA dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 220

**Perhitungan Selisih Beban Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO dan Beban Kegiatan Non Operasional Lainnya-LRA
Untuk Periode Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2021**

a	Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya LO	8.368.118.942,00
	Faktor Yang Mempengaruhi	
	Beban Rugi Selisih Kurs UP Satker Perwakilan	117.935.499,00
	Kerugian Persediaan Rusak/Usang	5.848.632.439,00
	Beban Kerugian Selisih Kurs Belum Terealisasi	2.401.551.004,00
b	Total Faktor Yang Mempengaruhi	8.368.118.942,00
	Selisih (a - b)	0,00

Beban Rugi Selisih Kurs Uang Persediaan (UP) Satker Perwakilan RI/Atase Teknis per 31 Desember 2021 sebesar Rp117.935.499,00 terdapat pada Satuan Kerja Perwakilan Imigrasi sebagai berikut:



Tabel 221
Rincian Beban Rugi Selisih Kurs Uang Persediaan Satker
Perwakilan RI/Atase Teknis Berdasarkan Satuan Kerja
Untuk Periode Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2021

Satuan Kerja	31 Desember 2021
Perwakilan Imigrasi Di Singapura	243.877,00
Perwakilan Imigrasi Di Kualalumpur	4.483.374,00
Perwakilan Imigrasi Di Tokyo	8.573.814,00
Perwakilan Imigrasi Di Tawao	2.801.971,00
Perwakilan Imigrasi Di Jeddah	2.645.453,00
Direktorat Jenderal Imigrasi	97.073.508,00
Kantor Perwakilan Imigrasi Pada Kantor Urusan Kepentingan RI Di Dili Timor	2.113.502,00
Total	117.935.499,00

Beban Persediaan Rusak/Usang per 31 Desember 2021 sebesar Rp5.848.632.439,00 terdapat pada Satuan Kerja sebagai berikut:

Tabel 222
Rincian Beban Persediaan Rusak/Usang
Berdasarkan Satuan Kerja
Untuk Periode Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2021

Satuan Kerja	31 Desember 2021
Rumah Tahanan Negara Padang Panjang	8.456.400,00
Lembaga Pemasyarakatan Nunukan	14.671.504,00
Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Di Cirebon	4.267.200,00
Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Nusakambangan	147.800.000,00
Lapas Narkotika Kelas IIB Langsa	17.600.976,00
Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Kalianda	216.900,00
Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjung Pandan	31.359.500,00
Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bandung	1.439.438,00
Kantor Imigrasi Kelas I TPI Semarang	1.168.674,00
Kantor Imigrasi Kelas II TPI Cilacap	7.150,00
Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta	602.500,00
Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan	1.687.000,00
Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Pematang Siantar	578.400,00
Kantor Imigrasi Kelas I TPI Pekanbaru	482.000,00
Kantor Imigrasi Kelas I TPI Tanjung Pinang	4.579.000,00
Kantor Imigrasi Kelas II TPI Belakang Padang	1.575.125,00
Kantor Imigrasi Kelas I TPI Pontianak	553.500,00



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Catatan Atas Laporan Keuangan – *Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Operasional*
Per 31 Desember Tahun Anggaran 2021 (*Audited*)
Dengan Angka Perbandingan 31 Desember Tahun Anggaran 2020
(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Singkawang	15.679.750,00
Kantor Imigrasi Kelas I TPI Makassar	482.000,00
Kantor Imigrasi Kelas II TPI Biak	132.550,00
Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Palangkaraya	701.500,00
Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tembilahan	5.393.834,00
Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjung Balai Asahan	1.566.500,00
Kantor Imigrasi Kelas I TPI Banda Aceh	12.861.819,00
Kantor Imigrasi Kelas I TPI Banjarmasin	5.063.682,00
Kantor Imigrasi Kelas I TPI Surakarta	4.579.000,00
Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sibolga	241.000,00
Kantor Imigrasi Kelas II TPI Langsa	3.135.950,00
Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjung Uban	4.820.000,00
Direktorat Jenderal Imigrasi	5.112.256.984,00
Kantor Imigrasi Kelas II TPI Entikong	114.400,00
Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sabang	51.574,00
Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Serang	4.861.297,00
Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sambas	128.700,00
Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tahuna	5.456.553,00
Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Kotabumi	216.900,00
Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Putussibau	31.108.624,00
Ditjen Peraturan Perundang-Undangan	149.877.555,00
Politeknik Ilmu Pemasarakatan	252.857.000,00
Total	5.848.632.439,00

Beban Kerugian Selisih Kurs Belum Terealisasi per 31 Desember 2021 sebesar Rp2.401.551.004,00 terdapat pada Satuan Kerja Perwakilan Imigrasi sebagai berikut:

Tabel 223
Rincian Beban Kerugian Selisih Kurs Belum Terealisasi
Berdasarkan Satuan Kerja
Untuk Periode Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2021

Satuan Kerja	31 Desember 2021
Perwakilan Imigrasi Di Singapura	390.790.826,00
Perwakilan Imigrasi Di Kualalumpur	95.678.399,00
Perwakilan Imigrasi Di Penang	32.732.697,00
Perwakilan Imigrasi Di Bangkok	43.326.372,00
Perwakilan Imigrasi Di Hongkong	287.214.209,00
Perwakilan Imigrasi Di Tokyo	81.668.814,00
Perwakilan Imigrasi Di Davao	46.331.957,00



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Catatan Atas Laporan Keuangan – *Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Operasional*
Per 31 Desember Tahun Anggaran 2021 (*Audited*)
Dengan Angka Perbandingan 31 Desember Tahun Anggaran 2020
(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Perwakilan Imigrasi Di Den Haag	46.101.913,00
Perwakilan Imigrasi Di Berlin	61.723.464,00
Perwakilan Imigrasi Di Sidney	115.044.869,00
Perwakilan Imigrasi Di Kuching	68.504.679,00
Perwakilan Imigrasi Di Tawao	36.653.560,00
Perwakilan Imigrasi Di Los Angeles	846.123.574,00
Perwakilan Imigrasi Di Jeddah	95.923.424,00
Perwakilan Imigrasi Di Beijing	41.422.731,00
Perwakilan Imigrasi Di Johor Bahru	53.863.707,00
Kantor Perwakilan Imigrasi Pada Kantor Urusan Kepentingan RI Di Dili Timor	27.396.819,00
Perwakilan Imigrasi Guangzhou Di RRC	31.048.990,00
Total	2.401.551.004,00



E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

E.1. EKUITAS AWAL

Ekuitas Awal
Rp67.744.562.310.510,00

Nilai Ekuitas Awal untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp67.744.562.310.510,00 dan Rp68.274.718.348.226,00.

E.2. SURPLUS (DEFISIT) LO

Surplus (Defisit) LO
(Rp11.054.086.826.689,00)

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar ***(Rp11.054.086.826.689,00)*** dan ***(Rp10.314.497.332.679,00)***.

Surplus/Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional dan pos luar biasa.

DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR

E.3. KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS

Koreksi Yang Menambah/Mengurangi Ekuitas
(Rp385.813.689.210,00)

Jumlah Koreksi yang Menambah/Mengurangi Ekuitas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar ***(Rp385.813.689.210,00)*** dan ***(Rp57.264.768.842,00)***.

E.3.1. KOREKSI NILAI PERSEDIAAN

Koreksi Nilai Persediaan
Rp5.902.162.803,00

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam penilaian persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi tambah nilai persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 31



Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp5.902.162.803,00 dan Rp769.034.050,00.

Rincian Koreksi Nilai Persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 224

Rincian Koreksi Nilai Persediaan per 31 Desember 2021

JENIS PERSEDIAAN	NILAI KOREKSI
Barang Konsumsi	3.895.786.508,00
Amunisi	4.399.977.901,00
Bahan untuk Pemeliharaan	602.980,00
Persediaan yang Belum Diregister	175.414,00
Uang Muka Belanja Modal (<i>prepayment</i>)	(2.394.380.000,00)
TOTAL KOREKSI	5.902.162.803,00

Rincian Koreksi Nilai Persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dapat dilihat pada lampiran.

Koreksi Atas Reklasifikasi
Rp27.342.399.435,00

E.3.2 KOREKSI ATAS REKLASIFIKASI

Koreksi aset reklasifikasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp27.342.399.435,00 dan Rp32.643.087.986,00.

Rincian koreksi atas reklasifikasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dapat dilihat pada lampiran.

Selisih Revaluasi Aset
(Rp 5.672.446.000)

E.3.3 SELISIH REVALUASI ASET

Selisih revaluasi aset untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar (Rp5.672.446.000,00) dan Rp37.421.532.134,00.

Selisih revaluasi aset tetap merupakan selisih yang terbentuk karena adanya penilaian kembali aset tetap atau selisih antara nilai tercatat aset dan nilai hasil revaluasi pada tiap satuan kerja.



Rincian selisih revaluasi aset untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 225
Rincian Selisih Revaluasi Aset
per 31 Desember 2021

URAIAN AKUN	SATKER	NILAI	KETERANGAN
Koreksi Kesalahan input IP			
Gedung dan Bangunan	Rutan Makassar	5.766.329.000,00	Merupakan salah satu transaksi revaluasi dimana nilai Bangunan hasil revaluasi yang terbaru lebih tinggi dibandingkan revaluasi awal.
	Lapas Ambon	932.967.000,00	
	Bapas Surabaya	219.815.000,00	
	Lapas Empat Lawang	24.212.000,00	
	Rupbasan Ambon	(5.226.207.000,00)	Transaksi tersebut seharusnya diinput ketika pelaksanaan revaluasi tahun 2020, namun karena terdapat sejumlah kendala dalam Aplikasi SIMAK penginputannya baru dapat dilakukan setelah rilis update SIMAK 21.1
	Lapas Gunung Sugih	(2.822.631.000,00)	
	Lapas Saumlaki	(2.273.722.000,00)	
	Lapas Saparua	(762.149.000,00)	
	Bapas Makassar	(452.317.000,00)	
	Lapas Tembilahan	(1.003.680.000,00)	
Jalan dan Jembatan	Lapas Gunung Sugih	(75.063.000,00)	
Total		(5.672.446.000,00)	

Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi
(Rp368.789.822.950,00)

E.3.4. KOREKSI NILAI ASET NON REVALUASI

Koreksi nilai aset non revaluasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar (Rp368.789.822.950,00) dan (Rp131.465.893.154,00).

Koreksi ini berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai.

Rincian Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi berdasarkan Jenis Koreksi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut :



Tabel 226
Rincian Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi berdasarkan Jenis Koreksi
per 31 Desember 2021

JENIS KOREKSI	NILAI KOREKSI
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	(Rp361.967.447.195,00)
Koreksi Nilai Aset Lainnya Non Revaluasi	(Rp6.822.375.755)
TOTAL KOREKSI NILAI ASET NON REVALUASI	(Rp368.789.822.950,00)

Adapun untuk rincian Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi berdasarkan transaksi dapat dilihat pada lampiran.

Koreksi Lain-Lain
(Rp44.595.982.498,00)

E.3.5. KOREKSI LAIN-LAIN

Koreksi lain-lain untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar (Rp44.595.982.498,00) dan Rp3.367.470.142,00.

Koreksi ini merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara, antara lain koreksi atas pendapatan, beban, hibah, piutang, dan utang.

Koreksi dilakukan untuk mutasi tambah atau mutasi kurang suatu transaksi karena kesalahan pencatatan transaksi di tahun-tahun sebelumnya. Koreksi utang/piutang maupun pendapatan hasil suatu proses validasi atau penilaian ulang dari Inspektorat Jenderal, BPKP, atau BPK.

Rincian Koreksi Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dapat dilihat pada lampiran.

Transaksi Antar Entitas
Rp11.444.531.378.147,00

E.4. TRANSAKSI ANTAR ENTITAS

Transaksi antar entitas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp11.444.531.378.147,00 dan Rp9.841.606.063.805,00.



Transaksi antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal K/L, antar K/L, antar BUN, maupun antara K/L dengan BUN.

Perhitungan Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 disajikan dalam Tabel berikut:

Tabel 227
Perhitungan Transaksi Antar Entitas LPE
31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

NO	TRANSAKSI	31 Desember 2021	31 Desember 2020
1	Ditagihkan ke Entitas Lain	14.251.552.761.900,00	12.399.198.092.949,00
2	Diterima dari Entitas Lain	(3.185.268.555.856,00)	(2.938.623.082.326,00)
3	Transfer Keluar	(936.656.604.776,00)	(1.142.175.253.264,00)
4	Transfer Masuk	986.243.334.038,00	1.113.665.288.102,00
5	Pengesahan Hibah Langsung	190.353.580.555,00	404.685.958.957,00
6	Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung	(6.679.400,00)	(2.623.863,00)
7	Pengesahan Hibah Langsung TAYL	138.313.541.686,00	4.857.683.250,00
TOTAL		11.444.531.378.147,00	9.841.606.063.805,00

E.4.1. DITERIMA DARI ENTITAS LAIN (DDEL)/ DITAGIHKAN KE ENTITAS LAIN (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode hingga 31 Desember 2021, DDEL sebesar (3.185.268.555.856,00) sedangkan DKEL sebesar Rp14.251.552.761.900,00.

E.4.2. TRANSFER KELUAR / TRANSFER MASUK

Transfer Keluar /Transfer Masuk merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke



entitas lain pada internal K/L, antar K/L, dan antara K/L dengan BA-BUN.

Sampai dengan tanggal 31 Desember 2021. Transfer Keluar sebesar (Rp936.656.604.776,00) dan Transfer Masuk sebesar Rp986.243.334.038,00

Selisih Transfer Keluar dan Transfer Masuk sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 sebesar (Rp49.586.729.262,00).

Selisih transfer tersebut disebabkan adanya transfer keluar dan transfer masuk dari dan atau ke kementerian/lembaga lain (non BA 013), yaitu masing-masing sebesar Rp35.546.579.675,00 dan (Rp85.133.308.937,00).

Rincian Transfer Keluar dan Transfer Masuk untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dapat dilihat pada lampiran.

E.4.3. PENGESAHAN HIBAH LANGSUNG DAN PENGEMBALIAN PENGESAHAN HIBAH LANGSUNG

Pengesahan Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan hibah langsung K/L dalam bentuk kas, barang, maupun jasa sedangkan pencatatan pendapatan hibah dilakukan oleh BA-BUN. Pengesahan Hibah Langsung sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp190.353.580.555,00.

Rincian Pengesahan Hibah Langsung dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 228

Rincian Pengesahan Hibah Langsung Per 31 Desember 2021

ESELON I	BARANG	JASA	UANG	TOTAL HIBAH
Sekretariat Jenderal	16.565.446.707,00	67.950.250.095,00	0,00	84.515.696.802,00
Direktorat Jenderal Pemasyarakatan	45.589.633.343,00	33.929.214.455,00	1.029.940.000,00	80.548.787.798,00
Direktorat Jenderal Imigrasi	8.104.501.168,00	0,00	0,00	8.104.501.168,00



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Catatan Atas Laporan Keuangan – *Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas*
Per 31 Desember Tahun Anggaran 2021 (*Audited*)
Dengan Angka Perbandingan 31 Desember Tahun Anggaran 2020
(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual	0,00	12.571.692.181,00	0,00	12.571.692.181,00
Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan	0,00	1.478.167.600,00	0,00	1.478.167.600,00
Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia	0,00	2.700.354.777,00	0,00	2.700.354.777,00
Badan Penelitian Dan Pengembangan Hukum Dan Hak Asasi Manusia	0,00	411.380.229,00	0,00	411.380.229,00
Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum Dan HAM	23.000.000,00	0,00	0,00	23.000.000,00
GRAND TOTAL	70.282.581.218,00	119.041.059.337,00	1.029.940.000,00	190.353.580.555,00

Adapun untuk rincian Pengesahan Hibah Langsung per detail satker dapat dilihat pada lampiran.

Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan pengembalian hibah langsung entitas. Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 adalah Rp6.679.400,00 yang merupakan pengembalian hibah uang pada Rumah Tahanan Depok dengan SP4HL No. 00173/684000/2021 tanggal 27 Desember 2021. Pengembalian sisa hibah langsung ini disetorkan kembali kepada Pemerintah Daerah Kota Depok selaku instansi pemberi hibah sesuai kesepakatan yang diatur pada Naskah Perjanjian Hibah Daerah nomor 978.4/26/NPHD/PemKS/2021 dan nomor W.11.PAS.PAS.38.PL.02.02-1911 tanggal 7 Mei 2021 tentang Pemberian Hibah Uang Dalam Rangka Pengadanaan Sarana dan Prasarana TA 2021 pada Rumah Tahanan Depok.

E.4.4. PENGESAHAN HIBAH LANGSUNG TAYL

Pengesahan Hibah Langsung TAYL merupakan transaksi atas pencatatan hibah langsung K/L atas hibah yang diterima tahun anggaran yang lalu atau tahun-tahun sebelumnya dalam bentuk kas, barang, maupun jasa namun belum dilakukan pengajuan nomor register dan/atau pengesahan hibah. Pengesahan Hibah Langsung TAYL sampai dengan



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Catatan Atas Laporan Keuangan – *Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas*
Per 31 Desember Tahun Anggaran 2021 (*Audited*)
Dengan Angka Perbandingan 31 Desember Tahun Anggaran 2020
(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar
Rp138.313.541.686,00.

Tabel 229

Rincian Pengesahan Hibah Langsung Tahun Anggaran Yang Lalu Per 31 Desember 2021

ESELON I	BARANG	JASA	TOTAL HIBAH
Sekretariat Jenderal	899.397.000,00	0,00	899.397.000,00
Direktorat Jenderal Pemasyarakatan	79.785.432.136,00	0,00	79.785.432.136,00
Direktorat Jenderal Imigrasi	34.567.479.093,00	0,00	34.567.479.093,00
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual	0,00	20.800.220.055,00	20.800.220.055,00
Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan	0,00	2.261.013.402,00	2.261.013.402,00
Grand Total	115.252.308.229,00	23.061.233.457,00	138.313.541.686,00

Adapun untuk rincian Pengesahan Hibah Langsung Tahun Anggaran Yang Lalu per detail satker dapat dilihat pada lampiran.

Ekuitas Akhir
Rp67.749.193.172.758

E.5. EKUITAS AKHIR

Nilai ekuitas per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar
Rp67.760.308.420.425,00 dan
Rp67.744.562.310.510,00.



F. PENGUNGKAPAN - PENGUNGKAPAN LAINNYA
F.1 INFORMASI TERKAIT PENATAUSAHAAN BMN

A. Kebijakan Pencatatan Jalan dan Irigasi serta Aset Tak Berwujud (ATB)

Melalui Surat Sekretaris Jenderal Nomor : SEK-PB.05.06-301 tanggal 3 Desember 2021, Kementerian Hukum dan HAM telah selesai menyusun Pedoman Penatausahaan BMN di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-04.PB.05.01 Tahun 2021 dimana di dalamnya terdapat pengaturan terkait kebijakan pencatatan jalan dan irigasi serta ATB. Secara rinci pada Bab VI terdapat aturan terkait kebijakan tersebut antara lain:

No	Uraian (Tidak terbatas pada hal yang disebutkan)	Klasifikasi Pencatatan
1	Jalan yang digunakan untuk akses dari/menuju bangunan tempat tinggal kedinasan, termasuk juga area kompleks. Contoh: Jalan pada Komplek Gunung Sindur, Jalan pada Komplek BPSPDM.	Masuk dalam kelompok Jalan, Irigasi, dan Jaringan, dengan kodefikasi pada Jalan Khusus Komplek.
2	Umumnya ini merupakan halaman kantor atau bentuk perkerasan lainnya yang tidak secara spesifik dapat diidentifikasi sebagai sebuah jalan dan lebih cenderung merupakan bagian dari sebuah fasilitas bangunan. Contohnya : a. Jalan berupa perkerasan di dalam area/lingkungan kantor untuk kontrol keliling (brandgang). b. Jalan berupa perkerasan di area lingkungan kantor.	Terhadap realisasi berupa jalan/perkerasan tersebut tidak dicatat sebagai Jalan, melainkan dicatat menambah nilai aset induknya, dalam hal ini pada kelompok Gedung dan Bangunan.
3	BMN berupa Bangunan Air, Bangunan Menara Penampung Air yang digunakan untuk menunjang operasional kantor.	Terhadap realisasi berupa Bangunan Air, Bangunan Menara Penampung Air tersebut tidak dicatat sebagai Irigasi, melainkan dicatat menambah nilai aset induknya, dalam hal ini pada kelompok Gedung dan Bangunan pada kodefikasi Bangunan Lainnya, dengan memberi keterangan bahwa bangunan ini merupakan



		bangunan air/bangunan Menara penampung air.
4	Umumnya merupakan fasilitas bangunan kantor seperti saluran parit (got), saluran pembuangan air kotor/limbah.	Terhadap realisasi berupa saluran air tersebut tidak dicatat sebagai Irigasi, melainkan dicatat menambah nilai aset induknya, dalam hal ini pada kelompok Gedung dan Bangunan.
5	a. Pembuatan Turap atau Talud yang berdiri sendiri	Terhadap realisasi tersebut dicatat menambah nilai tanah.
	b. Pembuatan Turap atau Talud yang menunjang, mendukung, atau menopang sehingga aset induknya (seperti pada kelompok gedung dan bangunan) dapat berfungsi, dapat digunakan dengan baik sesuai yang seharusnya.	Terhadap realisasi pembuatan atau pembangunan turap tersebut dicatatkan melekat pada nilai aset induk dimaksud. Contoh : Pembangunan turap untuk mengurangi resiko longsor terhadap bangunan X yang berdiri di atasnya. Terhadap pembangunan turap tersebut dicatat dengan menambah nilai bangunan X.
6	a. Pembuatan aplikasi digitalisasi arsip yang dibuat oleh pihak ketiga (vendor). b. Pembelian aplikasi yang Original. c. Pembelian antivirus dengan masa aktif (kegunaan) lebih dari 12 bulan. c. Pembelian Microsoft Office atau Operating System (OS) yang bukan satu kesatuan dengan pengadaan hardware dan bisa digunakan pada beberapa hardware.	Terhadap realisasi tersebut dicatat sebagai Aset Tak Berwujud (ATB) pada kelompok Software Komputer.
7	a) Pembuatan aplikasi yang dilakukan secara internal (dibuat/dikembangkan pegawai sendiri). b) Pembelian antivirus yang masa aktif (kegunaannya) dibawah atau sampai 12 bulan. c) Pembuatan Website kantor yang dibuat /dikembangkan internal pegawai.	Tidak dicatat sebagai ATB karena tidak memenuhi kriteria.



	d. Pembelian/ perolehan baru Microsoft Office atau Operating System (OS) dalam rangka pengadaan perangkat kerasnya (PC atau Laptop).	

B. Penjelasan Kertas Kerja Konfirmasi (K3)

Sampai dengan tanggal 31 Desember 2021, terkait pelaksanaan Kertas Kerja Konfirmasi (K3) pada seluruh satker di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM dapat dijelaskan melalui tabel berikut :

KODE BA	URAIAN KL	JUMLAH SATKER SUDAH K-3	JUMLAH SATKER TIDAK PERLU K-3	TOTAL SATKER
013	KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM	1.110	46	1.156

C. Pelaksanaan Ganti Rugi Bentuk Barang (GRBB) dan Ganti Rugi Pemanfaatan Tanah (GRPT)

Pelaksanaan GRBB dan GRPT dilaksanakan terkait Kerjasama pengelolaan Pulau Nusakambangan antara Kementerian Hukum dan HAM dengan PT. Solusi Bangun Indonesia (SBI).

Adapun secara umum mekanisme GRBB sebagai berikut:

- a. PT. SBI menyampaikan hasil jumlah nilai galian batu kapur selama tahun 2021 yang kemudian di konfersikan menjadi nilai GRBB sesuai dengan rumusan yang tertuang dalam Perjanjian Kerjasama antara Kemenkumham dengan PT. SBI, Tbk. Dan yang selanjutnya Sekretariat Jenderal melakukan verifikasi dan klarifikasi ke Pemkab Cilacap terhadap data hasil galian batu kapur yang diberikan oleh PT. SBI, Tbk.
- b. Sekretariat Jenderal membentuk Panitia Perhitungan Ganti Rugi Bentuk Barang (GRBB) yang terdiri dari tim dari Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Pemasarakatan, Kanwil Kemenkumham Jawa Tengah, Satuan Kerja Pemasarakatan di Pulau Nusakambangan dan PT. Solusi Bangun Indonesia, Tbk. (PT. SBI, Tbk.), yang kemudian tertuang dalam Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tentang Pembentukan Panitia Perhitungan Ganti Rugi Bentuk Barang (GRBB) Tahun 2021 Realisasi Tahun 2022 Dan Corporate Social Responsibility (CSR) Tahun 2022 Yang Akan Diserahkan Oleh PT. Solusi Bangun Indonesia, Tbk Kepada Kementerian Hukum Dan



Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, yang ditandatangani oleh Menteri Hukum dan HAM.

- c. Satuan Kerja di Pulau Nusakambangan mengusulkan rincian kebutuhan GRBB melalui mekanisme RK BMN yang kemudian diverifikasi oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah, yang kemudian diteruskan kepada Unit Eselon I (Direktorat Jenderal Pemasyarakatan kemudian Sekretariat Jenderal) jika kebutuhan tersebut tidak terdapat dalam RK BMN, maka satuan kerja yang mengusulkan barang tersebut harus merevisi RK BMN;

- d. Kementerian Hukum dan HAM melakukan verifikasi terhadap data perhitungan yang diberikan oleh PT. SBI, Tbk. Dan menghitung secara Bersama-sama terhadap nilai GRBB selama tahun berjalan berdasarkan rumus penghitungan yang terdapat dalam perjanjian yaitu:

Jumlah Galian Batu Kapur selama setahun x 20% dari Tarif Pajak Galian Gol. C yang ditetapkan oleh Gubernur Jawa Tengah x Faktor Ganti Rugi (40%)

(Note: Tarif Pajak Galian Gol. C untuk Batu Kapur daerah Cilacap berdasarkan Keputusan Gubernur Jateng adalah 50.800, Kementerian Hukum dan HAM mendapat 20% dari nilai tersebut yaitu 10.160).

Rumusan diatas sesuai dengan perhitungan dalam Perjanjian Kementerian Hukum dan HAM dengan PT. SBI, Tbk.

Setelah mendapatkan nilai GRBB berdasarkan perhitungan diatas, Panitia menyusun Rencana Anggaran Biaya yang telah disepakati oleh Biro Pengelolaan BMN, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Kanwil Kemenkumham Jawa Tengah dan Satker PAS di Nusakambangan.

Kesepakatan RAB dan Nilai GRBB tertuang dalam Berita Acara Perhitungan GRBB yang ditandatangani oleh seluruh pihak yang tercantum dalam SK Panitia Perhitungan GRBB.

- e. Pekerjaan atau pengadaan yang tercantum dalam RAB GRBB dilakukan sepenuhnya oleh PT. SBI, Tbk. mulai dari proses pelelangan pemilihan vendor, pekerjaan pembangunan/pengadaan barang, hingga proses akhir.
- f. Adapun Mekanisme pelaksanaan pekerjaan GRBB setelah ditandatangani Berita Acara Perhitungan GRBB adalah sebagai berikut:
- Sekretariat Jenderal Menyusun Tim Penerima GRBB yang terdiri dari Biro BMN, Ditjen PAS dan Kanwil Jateng yang kemudian tertuang dalam Keputusan Menteri Hukum dan HAM tentang Pembentukan Panitia Penerima GRBB yang ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal.



- Sesuai dengan SK Tim tersebut, Tim berkewajiban untuk Mengevaluasi barang atau sarana dan prasarana hasil GRBB dan CSR sebelum dilaksanakan serah terima kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang dilaksanakan dalam 3 tahap setiap tahunnya.
- Hasil evaluasi tersebut kemudian dituang dalam Berita Acara Serah Terima Barang GRBB dari PT. SBI, Tbk kepada Kementerian Hukum dan HAM.
- Setelah penandatanganan BAST tersebut, barang-barang tersebut kemudian dicatat ke dalam SIMAK BMN sesuai dengan satker yang menerima GRBB.
- Selanjutnya terkait dengan barang-barang yang menjadi BMN akan dicatat melalui transaksi perolehan lainnya dalam aplikasi SIMAK BMN.

D. Progress Tindak Lanjut BTD Hasil Revaluasi 2017-2020 yang diajukan Usulan Penghapusan

Sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 terdapat 75 NUP BTD Hasil Revaluasi 2017-2020 yang diajukan usulan penghapusan dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama Satker	Jumlah NUP	Keterangan
1	Kanwil Aceh	11	Sudah terbit Izin Prinsip Penghapusan dari Pengguna Barang Nomor SEK-PB.06.04-594 tanggal 14 Desember 2020 namun belum mengusulkan SK Penghapusan dikarenakan masih menunggu Persetujuan dari KPKNL
2	Lapas Luwuk	2	- Sudah ada Izin Prinsip Penghapusan dari Sekjen Nomor SEK-PB.06.04-299 Tanggal 3 Desember 2021 - Satker belum mengusulkan SK Penghapusan dikarenakan masih menunggu Persetujuan dari KPKNL
3	Lapas Labuhan Ruku	4	- Sudah ada Izin Prinsip Penghapusan dari Sekjen Nomor SEK-PB.06.04-147 Tanggal 02 Juni 2021 - Satker belum mengusulkan SK Penghapusan dikarenakan masih menunggu Persetujuan dari KPKNL



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Catatan Atas Laporan Keuangan – **Pengungkapan-Pengungkapan Lainnya**
Per 31 Desember Tahun Anggaran 2021 (*Audited*)
(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

4	Rutan Labuhan Deli	1	Sudah terbit SK Penghapusan dari Pengguna Barang Nomor SEK-115.PB.06.04 TAHUN 2021 Tanggal 27 Desember 2021
5	Lapas Kolonedale	3	- Sudah ada Izin Prinsip Penghapusan dari Pengguna Barang Nomor SEK-PB.06.04-318 Tanggal 16 Desember 2021 - Menunggu Persetujuan Penghapusan dari KPKNL
6	Kanim Tanjung Perak	1	Sudah terbit SK Penghapusan dari Pengguna Barang Nomor: SEK-94.PB.06.04 tahun 2021 tanggal 22 November 2021
7	Lapas Lubuk Linggau	26	Sudah terbit Surat Ijin Prinsip Penghapusan Nomor : SEK-PB.06.04-297 tanggal 3 Desember 2021 namun masih menunggu persetujuan penghapusan dari KPKNL
8	LPP Medan	1	Satker sudah mengajukan Surat Permohonan Izin Prinsip Penghapusan No : W2.PB.06.01-13033 namun masih berproses di Sekretariat Jenderal
9	LPN Palembang	9	Sudah terbit Surat Ijin Prinsip Penghapusan Nomor : SEK-PB.06.04-296 tanggal 3 Desember 2021 namun masih menunggu persetujuan penghapusan dari KPKNL
10	Kanwil Lampung	2	Penerbitan Izin Prinsip Penghapusan masih berproses di Sekretariat Jenderal
11	Kanwil Sultra	3	Sudah mendapatkan ijin prinsip penghapusan dari Setjen, namun ketika akan diproses ke KPKNL menurut KPKNL BMN tersebut sebenarnya ada karena masih terdapat sisa pondasi sesuai dengan dokumentasi yang ada. Proses selanjutnya, KPKNL akan menurunkan tim ke lokasi untuk meninjau langsung BMN dimaksud.
12	Lapas Kupang	4	- sudah terbit Izin Prinsip Penghapusan dari Pengguna Barang Nomor SEK-PB.06.04-27 Tanggal 11 Januari 2022 - menunggu persetujuan dari KPKNL

13	Lapas Muara Dua	1	Penerbitan Izin Prinsip Penghapusan masih berproses di Sekretariat Jenderal
14	Lapas Baa	1	- sudah terbit izin prinsip Penghapusan dari Pengguna Barang Nomor SEK-PB.06.04-279 tanggal 23 November 2021 dan persetujuan dari KPKNL - sedang proses penerbitan SK Penghapusan oleh Pengguna Barang
15	Lapas Bengkulu	1	- Sudah terbit surat persetujuan penghapusan dari KPKNL pada tahun 2019 - Satker agar melakukan permohonan persetujuan penghapusan ulang kepada KPKNL karena persetujuan KPKNL sudah kadaluwarsa untuk dilakukan penerbitan SK Penghapusan
16	LPN Lubuk Linggau	1	- sudah terbit Izin Prinsip Penghapusan dari Pengguna Barang Nomor : SEK-PB.06.04-295 tanggal 3 Desember 2021 - menunggu persetujuan dari KPKNL
17	Rutan Pangkalan Brandan	4	Penerbitan Izin Prinsip Penghapusan masih berproses di Sekretariat Jenderal

E. Aset Tetap Berupa Tanah Yang Digunakan Pihak Lain

Terdapat Aset Tetap berupa Tanah yang digunakan pihak lain di antaranya pada satker Lapas Sukamiskin dan Sekretariat Jenderal dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Lapas Sukamiskin

Terdapat Tanah Tegalan NUP 1 yang digunakan untuk ruko oleh pihak ketiga di Jalan A.H. Nasution dimana status tanah tersebut saat ini sedang dalam sengketa non pengadilan. Satker tidak memiliki bukti kepemilikan terkait tanah tersebut.

Terdapat tanah yang berlokasi di Jalan Pacuan Kuda saat ini teridentifikasi double catat dengan Pemkot Bandung.

2. Sekretariat Jenderal

- Sekretariat Jenderal telah melakukan pemanfaatan sewa atas aset tanah yang diokupasi pihak lain di Jalan Perintis Kemerdekaan Tangerang.
- Terkait pengelolaan Rumah Negara, Sekretariat Jenderal telah mengirimkan pemberitahuan ke Eselon I lain untuk



memberikan teguran kepada pegawai pemegang SIP atas Rumah Negara yang tidak terawat dan rusak.

F.2. PERMASALAHAN E-REKON&LK PER 31 DESEMBER 2021

1. MONITORING BMN

a. Rekon SP2D BMN Akun 53

Monitoring BMN – Rekon SP2D Akun 53 merupakan monitoring terhadap pencatatan dokumen SP2D untuk akun 53 antara aplikasi SAIBA dengan SIMAK-BMN. Selisih rekon SP2D BMN 53 antara lain karena kesalahan input nomor dokumen, tanggal, dan kode akun. Penjelasan Selisih Rekonsiliasi SP2D Akun 53 berdasarkan satuan kerja dapat dilihat pada Lampiran Pengungkapan Lainnya.

b. Selisih Rekonsiliasi GL BMN

Monitoring GL BMN merupakan monitoring terhadap pencatatan persediaan dan aset dari sisi SAIBA dengan sisi SIMAK-BMN baik berupa KDP, aset intrakomptabel, dan aset ekstrakomptabel. Selisih disebabkan karena adanya perbedaan nilai persediaan atau aset antara SAIBA dengan SIMAK-BMN. Penjelasan Selisih Rekonsiliasi GL BMN berdasarkan satuan kerja dapat dilihat pada Lampiran Pengungkapan Lainnya.

2. MONITORING LAINNYA

a. Selisih Transfer Keluar/Masuk

Selisih Transfer Keluar/Masuk disebabkan karena adanya perbedaan pencatatan akun, kuantitas, atau nilai persediaan / aset yang ditransfer oleh satuan kerja pengirim (sisi transfer keluar) dengan pencatatan akun atau nilai persediaan / aset yang diterima oleh satker penerima (sisi transfer masuk). Penjelasan Selisih Transfer Keluar/Masuk berdasarkan satuan kerja dapat dilihat pada Lampiran Pengungkapan Lainnya.

b. Selisih Transfer Keluar/Masuk Non Persediaan

Selisih Transfer Keluar/Masuk Non Persediaan disebabkan karena adanya perbedaan mekanisme pencatatan atas aset yang ditransfer oleh satuan kerja pengirim (sisi transfer keluar) dengan pencatatan akun atau nilai aset yang diterima oleh satker penerima (sisi transfer masuk). Penjelasan Selisih Transfer Keluar/Masuk Non Persediaan berdasarkan satuan kerja dapat dilihat pada Lampiran Pengungkapan Lainnya.



c. Selisih Transfer Keluar/Masuk Persediaan

Selisih Transfer Keluar/Masuk Persediaan disebabkan karena terdapat dua transaksi pengiriman persediaan kepada Perwakilan Imigrasi di Seoul dan Perwakilan Imigrasi di Taipei yang secara struktur belum menjadi satker dan masih menginduk pada Ditjen Imigrasi. Atas kesalahan tersebut akan dilakukan koordinasi perbaikan mekanisme pencatatan.

Penjelasan Selisih Transfer Keluar/Masuk Persediaan berdasarkan satuan kerja dapat dilihat pada Lampiran Pengungkapan Lainnya.

d. Selisih Resiprokal BLU

Selisih resiprokal disebabkan transaksi antara satker BLU/Non BLU Pemberi Kerja dan satker BLU Penerima Kerja yang menggunakan dana APBN yang belum dilakukan eliminasi. Transaksi resiprokal pada Kementerian Hukum dan HAM merupakan pengeluaran berupa belanja oleh satuan kerja Kementerian Hukum dan HAM kepada satuan kerja Badan Layanan Umum (BLU), dan satker BLU tersebut mencatatkan Pendapatan dari Pelayanan BLU yang Bersumber dari Entitas Pemerintah Pusat di luar Kementerian Negara/Lembaga yang membawahi BLU. Penjelasan Transaksi Resiprokal berdasarkan satuan kerja dapat dilihat pada Lampiran Pengungkapan Lainnya.

e. Selisih Reklasifikasi Keluar Dan Masuk Aset

Selisih reklasifikasi keluar dengan reklasifikasi masuk aset terdapat pada Kawil Palembang, LP Pemuda Tangerang, dan Lapas Perempuan Kelas IIB Jambi. Penjelasan Selisih Reklasifikasi Keluar Dan Masuk Aset berdasarkan satuan kerja dapat dilihat pada Lampiran Pengungkapan Lainnya.

3. DAFTAR

Jurnal Tidak Lazim

Jurnal Tidak Lazim merupakan penjurnalan terkait aset yang dilakukan secara manual di aplikasi SAIBA. Jurnal tidak lazim yang terdapat pada e-Rekon&LK sampai dengan data tanggal 31 Desember 2021 yang diunduh per tanggal 19 Februari 2022 sebanyak 782 (tujuh ratus delapan puluh dua) jurnal yang sudah dilengkapi dengan memo penyesuaian sebagaimana terlampir. Jurnal tersebut disebabkan antara lain karena:

- 1) Jurnal Pencatatan Hibah
- 2) Jurnal atas Beban Aset Ekstrakomptabel terkait belanja modal dibawah kapitalisasi



- 3) Jurnal atas kesalahan akun belanja
- 4) Jurnal koreksi pencatatan nilai Gedung dan Bangunan atau KDP yang timbul dari pengembalian belanja modal gedung dan bangunan
- 5) Jurnal belanja dibayar dimuka atas pekerjaan yang belum selesai sampai dengan 31 Desember 2021
Penjelasan atas jurnal tidak lazim berdasarkan satuan kerja dapat dilihat pada Lampiran Pengungkapan Lainnya.

4. DAFTAR BMN

Daftar Kapitalisasi SP2D Non 53

Daftar kapitalisasi SP2D Non 53 merupakan monitoring atas SP2D belanja selain 53 yang nilainya memenuhi nilai minimum kapitalisasi dan dicatat sebagai aset tetap. Rincian mengenai Daftar Kapitalisasi SP2D Non 53 dapat dilihat pada lampiran.

F.3. PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN

A. Nilai Uang Pailit Pada BHP Tidak Terdapat Pada Neraca

Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitur pailit yang pengawasan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas sebagaimana diatur dalam UU Kepailitan. Pailit merupakan suatu keadaan dimana seseorang debitur tidak mampu melunasi utang-utangnya. Pernyataan pailit harus didahului dengan pernyataan pengadilan Niaga, baik atas permohonan debitur sendiri maupun atas permintaan seseorang atau lebih krediturnya. Dalam hal pemberesan atas harta terpailit, UU memberikan kewenangan tidak hanya kepada BHP tetapi juga kepada kurator swasta atau perorangan yang terdaftar pada Kementerian yang lingkup tugas dan tanggungjawabnya di bidang hukum peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 20 tahun 2019 Tentang Penatausahaan Uang Pihak Ketiga Pada Balai Harta Peninggalan bahwa harta pailit yang menjadi bagian kreditur dan masih dikelola oleh Balai Harta Peninggalan, dilakukan pengumuman oleh Balai Harta Peninggalan dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) Hari sejak tanggal Peraturan Menteri ini berlaku.

Dalam hal setelah jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari terlampaui, harta pailit yang tidak diambil oleh kreditur yang tidak hadir dan tidak diambil, menjadi Uang Pihak Ketiga.



Per 31 Desember 2021, terdapat Uang Pailit pada 5 (lima) satuan kerja Balai Harta Peninggalan yang tidak dicatat dalam Neraca sejumlah Rp37.658.600.676,35 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 230
Rincian Uang Pailit per 31 Desember 2021

Nama BHP	Tunai	Rekening	Total
Balai Harta Peninggalan Jakarta	0,00	29.192.529.680,26	29.192.529.680,26
Balai Harta Peninggalan Surabaya	0,00	3.338.247.869,94	3.338.247.869,94
Balai Harta Peninggalan Semarang	0,00	2.946.869.287,15	2.946.869.287,15
Balai Harta Peninggalan Medan	0,00	2.151.303.403,00	2.151.303.403,00
Balai Harta Peninggalan Makassar	0,00	29.650.436,00	29.650.436,00
Total	0,00	37.658.600.676,35	37.658.600.676,35

B. Nilai Uang Pihak Ketiga Pada BHP Tidak Terdapat Pada Neraca

Terdapat Uang Pihak Ketiga yang tidak dicatat dalam Neraca, berupa *Onbeeherde*, *Perwalian* dan *Boedel Afwezigheid* yang ditempatkan pada rekening giro masing-masing BHP dengan jumlah Rp100.472.165.009,30

Rincian uang pihak ketiga (UPK) yang tidak dicatat di Laporan Keuangan Neraca disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 231
Rincian Uang Pihak Ketiga per 31 Desember 2021

Nama BHP	Tunai	Rekening	Total
Balai Harta Peninggalan Jakarta	0,00	70.757.525.043,00	70.757.525.043,00
Balai Harta Peninggalan Surabaya	0,00	25.661.075.841,89	25.661.075.841,89
Balai Harta Peninggalan Semarang	0,00	2.084.523.418,00	2.084.523.418,00
Balai Harta Peninggalan Medan	0,00	1.779.430.302,41	1.779.430.302,41
Balai Harta Peninggalan Makassar	0,00	189.610.404,00	189.610.404,00
Total	0,00	100.472.165.009,30	100.472.165.009,30

Menurut Konsep Temuan Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan No. 82/LK-Kumham/04/2017, disampaikan bahwa Uang Pihak Ketiga tidak seluruhnya memenuhi syarat untuk diakui sebagai kas setara kas lainnya karena baru dapat disetorkan ke kas negara setelah dikelola selama 1/3 abad. Hal tersebut diperkuat dengan peraturan sebagai berikut;

1. Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan pada Lampiran 1 PSAP 01. Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan pada paragraf 67 Aset diklasifikasikan ke dalam aset lancar dan non lancar. Suatu aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam



waktu 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Aset yang tidak dapat di masukkan dalam kriteria tersebut diklasifikasikan sebagai aset non lancar.

2. Peraturan Menteri Keuangan No. 219/PMK.05/2013 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat sebagaimana telah diubah dengan 224/PMK.05/2016 pada lampiran Bab III Kebijakan Akuntansi Kas dan Setara Kas huruf B poin 2.d Kas dan Setara kas lainnya yang dikelola Kementerian/Lembaga dalam rangka penyelenggaraan Pemerintah merupakan saldo kas pada KL selain dari Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas di Bendahara Penerimaan dan Kas di BLU, yang dapat berupa pendapatan seperti bunga, jasa giro, pungutan pajak, dan pengembalian belanja yang belum disetor ke kas negara, belanja yang sudah dicairkan akan tetapi belum dibayarkan kepada pihak ketiga dan kas dari hibah langsung KL.

Uang pihak ketiga tersebut disimpan dalam rekening giro milik satuan kerja BHP dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 232
Rincian Rekening Uang Pihak Ketiga

No	Satuan Kerja	Nomor Rekening	Nama Rekening	Jenis Rekening	Keterangan
1	BHP Jakarta	14940100 0018302 (BRI)	BPN 139 GIRO BHP JAKARTA	Rekening Giro	S- 1461/WPB.12/KP.0421/2 015
		14940100 0020309	RPL 139 BHP JAKARTA UTK PDK KEPAILITAN	Rekening Giro	S-7517/MK.5/2017
		96123101 5	RPL 139 BHP JAKARTA UTK PS PIHAK KETIGA	Rekening Giro	S- 815/WPB.12/KP.05/2020
2	BHP Semarang	135-00- 1546137-7 Bank Mandiri KC Semarang Kepodang	RPL 026 Balai Harta Peningggalan Semarang	Rekening Giro	Surat Ijin Pembukaan No S-3387/MKS5/2017 tanggal 05 April 2017 Aktif (Rekening Bendahara Penerimaan Uang Pihak Ketiga)
		135-00- 1546136-9 Bank Mandiri KC	RPL 026 Balai Harta Peningggalan Semarang	Rekening Giro	Surat Ijin Pembukaan No S-3387/MKS5/2017 tanggal 05 April 2017 Aktif (Rekening Bendahara Pailit)



		Semarang Kepodang			
3	BHP Surabaya	140-00- 07255434 (Mandiri)	RPL 135 Balai Harta Peninggalan utk PDT	Giro (30)	Surat Ijin Pembukaan No. S-5487/MK.5/2016 tanggal 12 Juli 2016 Aktif. (Rekening Bendahara Penerimaan Uang Pihak Ketiga)
		141-00- 1600255-2 (Mandiri)	RPL 135 Balai Harta Peninggalan Surabaya utk PDT Kepailitan	Giro (30)	Surat Ijin Pembukaan No. S-4909/MK.5/2017 tanggal 31 Mei 2017 Aktif. (Rekening Bendahara Penerimaan Kepailitan)
4	BHP Medan	71499977 78 (Bank Mandiri Syariah)	RPL 004 PDT BALAI HARTA PENINGGALAN MEDAN	Giro Wadiah Institusi (30)	Surat Ijin Pembukaan No. S- 920/WPB.02/KP.01/2020 tanggal 11 Agustus 2020 Aktif (Rekening Bendahara Penerimaan Uang Pihak Ketiga)
		69294188 0 (Bank BNI (Persero) Tbk.)	RPL 004 PDT BHP Medan	GIRO TDK HIT BBB PEMERIN TAH (30)	Surat Ijin Pembukaan No. S- 286/WPB.02/KP0104/201 8 tanggal 23 Februari 2018 Aktif (Rekening Bendahara Pailit)
5	BHP Ujung Pandang	152-00- 9101965-9 (Bank Mandiri)	Giro Bank Mandiri Kcb. Kartini Makassar	Rekening Giro	Surat Ijin Pembukaan No. S- 1104/WPB.25/KP.02/201 9 tanggal 25 Juli 2019 Aktif (Rekening Bendahara Pihak Ketiga)
		08468920 66 (Bank BNI)	Giro Bank BNI Kcb. Mattoangin Makassar untuk Dana Kepailitan	Rekening Giro	Surat Ijin Pembukaan No. S- 1151/WPB.25/KP.02/201 9 tanggal 09 Agustus 2019



					Aktif (Rekening Bendahara Pailit)

Rincian mutasi uang pihak ketiga pada masing-masing satuan kerja dapat dilihat pada lampiran.

Rincian mutasi uang pihak ketiga secara total pada satuan kerja Balai Harta Peninggalan disajikan pada tabel berikut:

Tabel 233
Mutasi Uang Pihak Ketiga pada Balai Harta Peninggalan

No	MUTASI UPK					
	URAIAN	SALDO AWAL	MUTASI TAMBAH		MUTASI KURANG	SALDO AKHIR
			TRANSFER MASUK	JASA GIRO	KLAIM/PNBP/AJAK	
1	BHP Jakarta	61.219.272.575,00	8.526.203.977,00	1.039.334.323,00	27.285.832,00	70.757.525.043,00
2	BHP Surabaya	25.359.627.711,24	42.400.000,00	485.116.867,00	226.068.743,00	25.661.075.835,24
3	BHP Semarang	1.997.573.575,00	48.677.693,00	38.272.150,00	0,00	2.084.523.418,00
4	BHP Medan	1.773.427.658,02	0,00	6.087.212,31	84.567,92	1.779.430.302,41
5	BHP Makassar	189.610.404,00	0,00	0,00	0,00	189.610.404,00
Total		90.539.511.923,26	8.617.281.670,00	1.568.810.552,31	253.439.142,92	100.472.165.002,65

C. Kronologi Penanganan dan Penggantian Biaya Perkara yang diterima oleh Pemerintah Republik Indonesia atas Kemenangan kasus Churchill Mining Plc Dan Planet Mining Pty.Ltd

1. Pada tanggal 18 Maret 2019 Komite ICSID menegaskan kembali kemenangan Indonesia melalui sebuah putusan yang final dan berkekuatan hukum tetap. Komite ICSID dengan tegas menolak request for annulment Para Penggugat. Selain itu Komite ICSID juga memutuskan untuk mencabut/mengakhiri stay of enforcement of the award dan terkait biaya proses pemeriksaan request for annulment di ICSID dibebankan kepada Para Pengugat namun Indonesia tidak mendapatkan penggantian biaya legal fees.
2. Melalui kemenangan ini, Indonesia terhindar dari klaim sebesar USD 1.3 Milyar (sekitar Rp17,8 Triliun) dan dengan dicabutnya stay of enforcement of the award, maka Putusan Tribunal ICSID pada tanggal 6 Desember Tahun 2016 dapat dieksekusi termasuk putusan Tribunal ICSID yang memerintahkan Para Penggugat untuk mengganti biaya berpekar Pemerintah Indonesia sebesar USD 9,446,528.
3. Pada tanggal 5 April 2019, Planet Mining Pty.Ltd menunjuk Likuidator di Australia yaitu RSM Australia Partners dan Churchill Mining Plc menunjuk administrator di Inggris yaitu

RSM Restructuring Advisory LLP. Lebih lanjut pada tanggal 9 April 2019 Churchill Mining Plc menyampaikan notifikasi penunjukan joint administrators (Notice of appointment of joint Administrators) ke pengadilan Inggris. Melalui penunjukan administrator tersebut Churchill Mining Plc menyatakan insolven/pailit di Court of England dan proses insolvensi/kepailitan dimulai di Inggris. Melalui penunjukan Likuidator, Planet Mining Pty.Ltd menyatakan pailit melalui creditors' voluntary liquidation (CVL).

4. Berdasarkan laporan dari Administrator UK, Churchill Mining Plc hanya memiliki aset sebesar GBP 231,866 dan laporan dari Likuidator Australia, Planet Mining Pty.Ltd memiliki aset senilai AUD 0. Jumlah aset senilai GBP 231.866 akan digunakan untuk biaya proses kepailitan sebesar GBP 160.000, biaya administrasi sebesar GBP 40.000, untuk unsecured creditors sebagaimana ketentuan statute sebesar GBP 5000 dan sisanya sebesar GBP 26.309,31 akan dibayarkan kepada secured creditor. Dalam hal ini terdapat secured creditor, yakni Pala sementara Pemerintah RI bukan termasuk dalam secured creditor, sehingga Pala akan mendapatkan prioritas untuk mengambil value aset senilai GBP 26.309,31 tersebut dan jika ditemukan aset lainnya.
5. Pada tanggal 28 Februari 2020, Grup Mintz memulai penyelidikan selama dua minggu terhadap aset yang di miliki oleh Churchill Mining Plc dan anak perusahaan yang terkait untuk memastikan bahwa tidak ada aset yang bernilai signifikan yang dihilangkan oleh Churchill sebelum kebangkrutannya.
6. Setelah dua minggu melakukan penyelidikan, Grup Mintz mengirimkan sebuah memorandum laporan yang merangkum temuan-temuan investigasi kepada Curtis. Laporan tersebut kepada Administrator Churchill Mining Plc di Inggris dan Planet Mining Plc di Australia.
7. Pada tanggal 20 Maret 2020, para Administrator untuk Churchill Mining Plc menulis surat kepada Curtis, dari laporan yang mereka kirimkan bahwa ada aset yang dapat direalisasikan untuk Administrasi Churchill Mining Plc.
8. Pada tanggal 1 April 2020, Administrator Churchill Mining Plc, mengumumkan deklarasi dividen dimana kreditor tanpa jaminan dengan tingkat dividen yaitu 0,28 pence dalam pound. Jumlah total pembayaran GBP 20.980,61 dan GBP 221,96 telah digunakan untuk biaya klaim. Pembayaran dilakukan melalui Bank RSM sebesar GBP 20.797,91 ke nomor rekening 11779481 (BNINIDJA).



9. Pada tanggal 14 April 2020 Pemerintah Indonesia menerima Biaya perkara tersebut melalui Bank Negara Indonesia sebesar Rp408.268.788 dengan nomor rekening 11779481 (DITJEN ADM HUKUM UMUM DEP HUKUM DAN HAM RI) dan uang tersebut telah disetorkan ke Kas Negara pada tanggal 14 April 2020 dengan NTPN: 3DAD58N3DEAL840.

D. Jaminan Pembayaran Akhir Tahun Anggaran

Dalam Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-27/PB.6.2021 tanggal 21 Desember 2021 Hal Jadwal Rekonsiliasi, Penyusunan, dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) Tahun 2021 (*Unaudited*) serta Perlakuan Akuntansi atas Transaksi Akhir Tahun dijelaskan mengenai pedoman atau petunjuk teknis perlakuan akuntansi atas transaksi-transaksi yang terjadi menjelang dan pada akhir tahun anggaran, di antaranya terkait pelaksanaan pekerjaan yang tidak terselesaikan/tidak dapat diselesaikan 100% sampai dengan berakhirnya masa kontrak atau sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 dan dinyatakan wanprestasi, maka perlakuan akuntansinya memperhatikan ketentuan dalam PMK Nomor 225/PMK.05/2016 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Pusat bahwa satuan kerja tidak menyajikan Jaminan Pembayaran Akhir Tahun Anggaran di dalam Neraca tetapi cukup mengungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Adapun rincian jaminan pembayaran akhir tahun anggaran pada Kementerian Hukum dan HAM disajikan pada lampiran.

F.4. TINDAK LANJUT PENYELESAIAN TEMUAN BPK

F.4.1. Tindak Lanjut Temuan Pemeriksaan BPK terkait Barang Milik Negara

Tindak Lanjut Temuan BPK Tahun 2021

- 1. Pengamanan atas Aset Tetap Tanah BPSDM belum memadai dan penggantian tanah dan bangunan yang terkena pembebasan jalan tol berlarut-larut.**

Penggantian rumah negara yang terkena trase jalan tol Desari masih dalam proses, seperti yang tertuang dalam surat Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat kepada Direktur Utama PT. Citra Waspahutowo nomor KU.02.06/440357/2021/35-297 tanggal 29 November 2021 perihal Permohonan Penyediaan Bangunan Pengganti Milik Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Yang Terkena Pengadaan Tanah Jalan Tol Depok-Antasari.



2. Penatausahaan persediaan berupa amunisi pada Direktorat Jenderal Pemasyarakatan belum tertib

Menindaklanjuti temuan pemeriksaan tersebut, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan telah menyusun Surat Nomor: PAS1.KU.05.01-733 tanggal 28 April 2022 tentang Tanggapan Instansi atas Penyampaian Konsep Temuan Pemeriksaan BPK Tahap IV.

Pada periode penyusunan laporan audited Direktorat Jenderal Pemasyarakatan telah melaksanakan:

- 1) Pengumpulan data amunisi berdasarkan form BPK yang dikirimkan ke satuan kerja,
- 2) Pengolahan data amunisi merujuk pada perbedaan jumlah pada aplikasi dan jumlah pada check fisik,
- 3) Koordinasi klasifikasi amunisi yang akan dikoreksi beserta metode koreksi dengan Badan Pemeriksa Keuangan dan Kementerian Keuangan,
- 4) Penginformasian jenis koreksi beserta langkah koreksi beserta panduan koreksi pada Koordinator Wilayah,
- 5) Melakukan pemantauan atas Koreksi amunisi yang dilaksanakan oleh Koordinator Wilayah. Adapun berdasarkan jenis koreksi yang dilakukan berikut jumlah satuan kerja terpengaruh:
 - Koreksi Saldo Awal Nihil : 73 Satuan Kerja Terdampak
 - Koreksi Opname Fisik Selisih Kurang Harga Sama : 55 Satuan Kerja Terdampak
 - Koreksi Saldo Awal Selisih Tambah Harga Sama : 34 Satuan Kerja Terdampak
 - Koreksi Opname Fisik Selisih Kurang Harga Sama : 1 Satuan Kerja Terdampak
 - Koreksi Saldo Awal Selisih Tambah Harga Sama : 5 Satuan Kerja Terdampak

Terkait dengan amunisi yang belum diketahui harga satuannya, Ditjen Pemasyarakatan akan berkoordinasi lebih lanjut dengan PT Pindad yang memiliki kompetensi dalam hal penentuan harga satuan amunisi.

Tindak Lanjut Temuan BPK Tahun 2020

1. Pengamanan atas Aset Tetap Tanah Kementerian Hukum dan HAM TA 2020 belum memadai.

Permasalahan Pengamanan Tanah:

- a. 105 persil tanah dengan total luasan 22.518.050 m² senilai Rp3.984.665.771.343,00 belum memiliki sertifikat dengan tiga tanah persil diantaranya dalam status sengketa dengan luas 34.210 m² senilai Rp16.565.597.000,00 telah ditindaklanjuti dengan rincian sebagai berikut:
 - 25 persil tanah sudah bersertipikat;
 - 35 persil tanah proses sertipikat;



- 37 persil tanah belum bersertipikat;
 - 5 persil tanah belum ada keterangan;
 - 1 persil proses hibah (Tanah Lapas Sukamiskin); dan
 - 2 persil tanah tidak ditemukan (Tanah Lapas Sarolangun.
- b. 7 tanah persil dengan total luasan 266.269 m² dengan nilai sebesar Rp17.007.554.380,00 masih atas nama pihak ketiga selain Kemenkumham telah ditindaklanjuti dengan rincian sebagai berikut:
- 6 persil proses balik nama sertipikat; dan
 - 1 persil sudah bersertipikat an. Pemerintah RI Cq. Kementerian Hukum dan HAM.
- c. 22 tanah persil seluas 863.614 m² dengan nilai Rp408.152.543.888,00 berstatus sengketa dengan pihak lain, dan dua tanah persil yang tidak dapat diterbitkan sertipikatnya karena termasuk kawasan hutan lindung di Kalimantan Barat dan Nusa Tenggara Timur seluas 11.200 m² dengan nilai Rp2.386.616.000,00 telah ditindaklanjuti dengan rincian sebagai berikut:
- 1 persil sudah bersertipikat;
 - 1 persil tanah sudah selesai sengketa (belum eksekusi);
 - 2 persil tanah proses sertipikat;
 - 1 persil tanah proses penelusuran batas-batas tanah;
 - 1 persil serah terima hibah tanah milik Pemda Kab. Lahat;
 - 2 persil tanah dalam proses hibah;
 - 1 persil koreksi catat/transfer ke Polres Blitar;
 - 1 persil dalam tahap proses ruislag;
 - 2 persil tanah dalam proses penyelesaian sengketa;
 - 2 persil masuk Hutan Lindung; dan
 - 8 persil status sengketa dan belum ada tindaklanjut penyelesaian
- d. 9 tanah persil seluas 10.095 m² dengan nilai sebesar Rp4.228.410.000,00 tidak memiliki sertipikat karena sertipikat hilang akibat bencana alam dan kebakaran saat ini dalam proses pensertipikatan.
- e. 2 tanah persil yaitu Kanim Kelas II Non TPI Kediri seluas 2.830 m² dengan nilai Rp15.000.000,00 yang akan dihibahkan kembali kepada Pemerintah Kabupaten Kediri dan tanah pada Lapas Bengkalis seluas 5.917 m² dengan nilai sebesar Rp8.353.621.000,00 yang sedang dalam proses *ruislag* telah ditindaklanjuti dengan rincian sebagai berikut:
- Tanah Kanim Kediri telah dihibahkan kepada Pemerintah Kab. Kediri; dan
 - Tanah Lapas Bengkalis dalam proses penyelesaian ruislag.



2. Penatausahaan Aset Tak Berwujud (ATB) pada beberapa satuan kerja Kementerian Hukum dan HAM belum tertib.

Pada bulan April 2022 diterbitkan “Tindak Lanjut Pemeriksaan BPK Atas SPI dan Kepatuhan Terhadap ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Tahun 2020 untuk temuan terkait ATB yang ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM.

Adapun rincian penjelasan temuan sebagaimana terlampir pada LBP Tahun 2021 Audited yang mana terdapat 307 NUP ATB yang masih digunakan, 20 NUP ATB yang dilakukan Koreksi Pencatatan, 161 NUP ATB yang telah dihentikan dari penggunaan dan telah diusulkan penghapusan, dan 13 NUP ATB yang telah dilakukan penghapusan.

3. Nilai Persediaan Paspor pada Ditjen Imigrasi per 31 Desember 2020 belum menggambarkan kondisi yang sebenarnya.

Sisa persediaan paspor pada kantor imigrasi di seluruh Indonesia per 31 Desember 2020 sebesar Rp54.791.686.053,00. Atas sisa persediaan paspor tersebut, sebesar Rp34.022.720.432,00 tidak diyakini kewajarannya karena nilai yang disajikan di neraca per 31 Desember 2020 (data dari aplikasi persediaan) berbeda dengan data pada aplikasi manajemen dokim.

Direktorat Jenderal Imigrasi telah menindaklanjuti nilai persediaan paspor yang menurut Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) “Tidak Yakin” tersebut dengan melakukan pengolahan data Paspor 48 Halaman dan Paspor Elektronik yang sudah terbit validasi hasil olahan data dari BPK serta telah dilakukan koreksi sesuai hasil keputusan forum pertemuan yang kedua perihal bipartid penyusunan laporan keuangan tanggal 18 april 2022 yang dilakukan melalui mekanisme opname fisik.

4. Temuan LKPP:

Pencatatan ganda Aset Tetap Tanah Kementerian Dalam Negeri atas SHP Nomor 27 Tahun 1988 seluas 3.099 M2 yang berada dalam penguasaan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum.

Diterbitkannya Berita Acara Koreksi Tindak Lanjut Temuan Pencatatan Ganda Aset Tetap Tanah Kemendagri dan Kementerian Hukum dan HAM Nomor : 028/2309/SES tanggal 14 April 2022, dimana pihak pertama (Kemendagri) akan melakukan koreksi untuk pengurangan luasan tanahnya pada SHP Nomor 27 Tahun 1988 dan KIB NUP 1 seluas 374M2.



Tindak Lanjut Temuan BPK Tahun 2019

1. Kementerian Hukum dan HAM belum menindaklanjuti rekomendasi atas permasalahan tanah Direktorat Jenderal Imigrasi di Kabupaten Sumba Tengah dan tanah Sekretariat Jenderal di Kota Tangerang sesuai ketentuan yang berlaku.

Tanah Ditjen Imigrasi:

- a. Diterbitkannya Surat Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor: IMI-0242.KP.04.01 Tahun 2021 tentang Tim Penyelesaian Permasalahan Tanah Milik Direktorat Jenderal Imigrasi di Kabupaten Sumba Tengah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- b. Kegiatan Pra Kondisi Pengukuran Pengembalian Batas Tanah Milik Direktorat Jenderal Imigrasi di Kab. Sumba Tengah Prov. NTT Tanggal 16 s.d. 26 Maret 2021;
- c. Kegiatan Pengukuran Ulang Tanah dan Identifikasi Lahan di atas Sertipikat Hak Pakai Nomor 1 Tahun 1986 di di Kab. Sumba Tengah Prov. NTT Tanggal 21 Agustus s.d. 7 September 2021;
- d. Dihasilkannya Berita Acara Nomor IMI.1-PB.02.05-003 Kesepakatan Rapat Koordinasi Penyelesaian Permasalahan Tanah Milik Direktorat Jenderal Imigrasi di Kabupaten Sumba Tengah Provinis NTT T.A. 2021 Tanggal 24 s.d. 27 November 2021;
- e. Sudah menerima surat permohonan pinjam pakai dari bupati sumba tengah untuk sejumlah fasum dan fasos eksiting serta pembangunan GOR TA 2022;
- f. Akan melakukan pengukuran ulang area yang beriiisan dengan Kawasan taman nasional MANUPEU TANAH DARU;
- g. Akan melakukan validasi pemetaan SK HPL transmigrasi diatas SHP Nomor 1 Tahun 86;
- h. Akan melakukan finalisasi / pengecekan terhadap area yang dimohonkan untuk pinjam pakai.

Tanah di kota Tangerang:

- a. Terhadap penyelesaian permasalahan Tanah yang digunakan oleh Pemkot Tangerang telah dilakukan hal-hal sebagai berikut:
 - Telah dilakukan permohonan persetujuan Hibah oleh Kementerian Hukum dan HAM kepada Direktorat Jenderal kekayaan Negara Kementerian Keuangan selaku Pengelola Barang melalui surat Sekretaris Jenderal Nomor: SEK-PB.06.03-330 tanggal 31 Agustus 2020 hal Permohonan Persetujuan Hibah Barang Milik Negara (BMN) Berupa Tanah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Di Kota Tangerang atas 7 persil tanah yang digunakan oleh Pemerintah Kota Tangerang;



- Permohonan hibah tersebut belum dapat persetujuan karena tanah tersebut dalam status underlying aset sebagai dasar penerbitan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 205/PMK.08/2017 tentang Penggunaan Barang Milik Negara Sebagai Dasar Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara “BMN yang sedang digunakan sebagai Aset SBSN tidak dapat dipindahtangankan dan/atau dihapuskan”; dan
- Telah dilakukan permohonan penggantian BMN yang berstatus SBSN oleh Kementerian Hukum dan HAM kepada Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan melalui surat Sekretaris Jenderal Nomor SEK-PB.06.03-48 tanggal 20 April 2021 hal Permohonan Penggantian Barang Milik Negara (BMN) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Yang Dijadikan Underlying Asset Surat Berharga Syariah Negara (SBSN).
- b. Terhadap permasalahan Tanah Setjen Kemenkumham yang digunakan untuk Pasar Babakan, saat ini sedang dalam proses pengadilan dalam perkara yang tercatat dan terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang dengan Register Nomor 717/Pdt.G/2021/PN.TNG.
- c. Telah dilakukan inventarisasi rumah mandiri yang berdiri di atas tanah Kemenkumham di Kota Tangerang dengan rincian sebagai berikut:
 - Dihuni pegawai aktif sebanyak 89 Unit
 - Dihuni pensiunan sebanyak 70 Unit
 - Dihuni oleh pihak lain sebanyak 3 Unit
- d. Tindak lanjut Surat Sekjen Kemenkumham Nomor SEK-PB.06.03-48 tanggal 20 April 2021 perihal Permohonan Penggantian BMN Kemenkumham yang dijadikan Underlying Asset Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), Kementerian Keuangan selaku Pengelola Barang telah menyetujui penggantian dan pengembalian 9 NUP BMN pada Kementerian Hukum dan HAM yang tidak dapat digunakan sebagai Aset SBSN melalui surat Direktur Barang Milik Negara Kementerian Keuangan Nomor : S-194/KN/KN.2/2021 tanggal 02 Desember 2021 hal Penggantian Barang Milik Negara (BMN) pada Kementerian Hukum dan HAM yang dijadikan Underlying Aset Surat Berharga Syariah Negara (SBSN).
- e. Belum ada langkah-langkah lebih lanjut dari KPKNL atas Surat Kasubbag Pengelolaan BMN Setjen Nomor SEK.6.PW.04.04-04 perihal Laporan Tindak Lanjut Jawaban Temuan Pemeriksaan



BPK terhadap LK Kemenkumham 2019, khususnya terkait tindak lanjut koordinasi penilaian tanah secara akurat.

2. Kementerian Hukum dan HAM belum menindaklanjuti rekomendasi atas permasalahan tanah Direktorat Jenderal Imigrasi di Kabupaten Sumba Tengah dan tanah Sekretariat Jenderal di Kota Tangerang sesuai ketentuan yang berlaku.

- a. Terkait temuan penyajian luas dan nilai aset tanah Ditjen Pemasarakatan di Pulau Nusakambangan dalam neraca Kemenkumham TA 2021 tidak menggambarkan kondisi yang sebenarnya, tim Barang Milik Negara Direktorat Jenderal Pemasarakatan sudah menerima konfirmasi luas Pulau Nusakambangan dari Badan Informasi Geospasial melalui Pemaparan Pusat Pemetaan Batas Wilayah BIG tanggal 4 Maret 2022 dan melalui Surat Nomor : B-27.5/PBW-BIG/IGD.04.04/4.2022 tanggal 27 April 2022 yang menyatakan bahwa luas Pulau Nusakambangan adalah sebesar 120.568 km² akan tetapi belum bisa dilakukan koreksi terhadap penyajian nilai tanah Pulau Nusakambangan di aplikasi SIMAK BMN dikarenakan hasil perhitungan BIG tersebut tidak merinci dua kelompok klaster yang termasuk kriteria tanah padat/pekarangan atau tanah rawa/hutan/karang.

Mengenai hal tersebut, Tim BMN Ditjenpas sudah mencoba melakukan koordinasi ke Direktorat Jenderal Planologi, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, tetapi dari hasil koordinasi tersebut Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tidak memiliki data tanah padat/pekarangan atau tanah rawa/hutan/karang dimaksud. Sebagai tindak lanjut lain, tim BMN Ditjenpas mencoba koordinasi dengan KPKNL Purwokerto yang pernah menyajikan data tanah padat/pekarangan atau tanah rawa/hutan/karang di Laporan Penilaian Tanah Pulau Nusakambangan Nomor LAP-01/WKN.9/KNL.10/01.00/2012 tanggal penilaian 17 Februari 2012. Berikut ringkasan data tanah yang pernah tersaji di Laporan Penilaian Tanah Pulau Nusakambangan Nomor LAP-01/WKN.9/KNL.10/01.00/2012 tanggal penilaian 17 Februari 2012 tersebut:

- Tanah padat/pekarangan seluas ± 4.200.000 m² senilai Rp.263.787.400.000
 - Tanah rawa/hutan/karang pantai seluas ± 16.800.000 m² senilai Rp.455.347.200.000
- b. Terkait temuan sertifikasi tanah Ditjen Pemasarakatan di Pulau Nusakambangan baru dilaksanakan atas tanah yang telah dimanfaatkan untuk bangunan di atasnya, telah ditindaklanjuti dengan melakukan langkah koordinasi dengan pihak-pihak



terkait, antar lain : Kementerian ATR/BPN, Kementerian Dalam Negeri, Badan Informasi dan Geospasial, Pemerintah Daerah Kabupaten Cilacap, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, KPKNL IV Jakarta, KPKNL Purwokerto, Kantor Pertanahan Kabupaten Cilacap, Kantor Desa Tambakreja Kecamatan Cilacap Selatan, dan Biro Pengelolaan BMN Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Atas arahan dan ketentuan yang disampaikan oleh Kementerian ATR/BPN bahwa untuk mensertifikatkan 1 (satu) pulau tidak bisa dan terkait sertifikasi sudah menjadi kewenangan pada Kantor Pertanahan Setempat.

Selanjutnya atas dasar itu kami berkoordinasi dengan Kantor Pertanahan kabupaten Cilacap karena Pulau Nusakambangan masuk dalam wilayah Kabupaten Cilacap, dari hasil pertemuan Kantor Pertanahan Kabupaten Cilacap dapat membantu sesuai Tusnya melaksanakan pensertifikatan atas aset tanah yang berlokasi di Pulau Nusakambangan hanya yang sudah jelas pemanfaatannya, seperti Lembaga Pemasarakatan, Dermaga, perumahan, Gedung Pertemuan, Gereja, Poliklinik, Perkebunan maupun bidang lain yang sudah digunakan , dimana sampai saat ini sudah 11 (sebelas) Sertifikat yang terbit a.n. Pemerintah Republik Indonesia c.q. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Untuk Mengamankan keseluruhan luas Pulau Nusakambangan yakni 120.568 km² Direktorat Jenderal Pemasarakatan akan berkoordinasi kembali dengan Kementerian ATR/BPN dan Kementerian Kuangan dalam hal ini KPKNL IV Jakarta dan KPKNL Purwokerto untuk mengajukan Hak Pengelolaan Lahan (HPL) atas Pulau Nusakambangan, sehingga ke depannya nanti apabila ada yang akan memanfaatkan aset tanah Pulau Nusakambangan harus terlebih dahulu mengajukan permohonan ijin ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Tindak Lanjut Temuan BPK Tahun 2014

1. Proses penghapusan *Asset Disaster Recovery Center (DRC)* pada Ditjen Imigrasi tidak diikuti dengan proses penyelesaian Tuntutan Ganti Rugi.

- a. Diterbitkannya Surat Rekomendasi Tim Penyelesaian Kerugian Negara (TPKN) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor SEK-KU.03.04-328 tanggal 8 Oktober 2020 yang menyatakan bahwa “Proses penghapusan aset DRC pada Ditjenim tidak menimbulkan kerugian negara karena telah

dilakukan penggantian perangkat DRC Bali yang rusak dan perangkat DRC tersebut telah berfungsi kembali”;

- b. Mengajukan penghapusan kembali atas perangkat DRC yang mengalami kerusakan;
- c. Melakukan penyelesaian proses administrasi hibah atas perangkat pengganti dan telah melakukan pencatatan pada aplikasi SIMAK-BMN.

F.4.2. Tindak Lanjut Temuan BPK terkait BMN pada unit Eselon I

A. Sekretariat Jenderal

1. Kanwil Sumatera Barat

- Menindaklanjuti hasil rapat koordinasi dan konsultasi antara Kantor Wilayah dengan BPK dan unit Eselon I terkait (Biro BMN, Biro Keuangan, dan Dirjen Pemasyarakatan) terkait kronologis dan usulan penyelesaian KDP di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Barat, maka sesuai hasil kesepakatan yang tertuang dalam Laporan KDP Sumbar Nomor : W3.PB.05.05-06 Tanggal 28 September 2021 dan dengan memperhatikan kelengkapan data dukung;
- Selanjutnya pada Semester II T.A 2021 telah dilakukan koreksi Pencatatan atas KDP yang tercatat pada SIMAK BMN Kanwil Sumbar/Setjen berdasarkan Berita Acara Koreksi Nilai Barang Milik Negara nomor : W3.PB.05.05-01 Tanggal 21 Desember 2021 yang menyebabkan terjadi Mutasi Kurang sebesar Rp9.147.365.800,00 atas Saldo KDP semula Rp11.952.482.750- menjadi Rp2.805.116.950,00;
- Kemudian atas saldo KDP Rp2.805.116.950,00 yang masih tercatat pada SIMAK BMN Kanwil Sumbar/Setjen merupakan KDP berupa Tanah Dalam Pengerjaan Pembangunan LP Wanita di Pasaman yang telah dilaksanakan uji kelayakan oleh Dinas PUPR dan telah mendapat reuiu APIP dengan hasil tidak dapat dilanjutkan akan diusulkan penghapusan KDP sesuai mekanisme yang telah diatur dan ditindaklanjuti pada Semester I T.A 2022.

2. Kanwil Nusa Tenggara Barat

Terdapat temuan BPK pada pembangunan/renovasi gedung dan bangunan Kanwil NTB TA 2020 dan TA 2021 yang terdiri dari:

- i. Kekuatan Struktur Bangunan terpasang tidak sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam spesifikasi desain struktur bangunan.
- ii. Kekurangan volume pekerjaan pembangunan/renovasi gedung dan bangunan Kanwil NTB TA 2020 dan 2021 sebesar Rp280.775.882,00



Telah ditindaklanjuti dengan melakukan koreksi perubahan nilai/kuantitas barang milik negara berupa Bangunan Gedung kantor Permanen NUP 7 pada Aplikasi SIMAK BMN senilai Rp280.775.882,00 dan sudah dilakukan penyetoran ke kas negara pada 19 Oktober 2021.

3. Kanwil Nusa Tenggara Timur

Terdapat temuan BPK atas pelaksanaan revaluasi 2017-2019 untuk barang tidak ditemukan fisiknya dan sementara dalam proses tindak lanjut dan sudah dilakukan review oleh Inspektorat Jenderal yang terdapat pada:

- i. Pada Satker Kanwil NTT terdapat temuan BPK berupa Bangunan Pagar Permanen NUP 4,5, dan 6, dimana bangunan tersebut merupakan kesalahan pencatatan di SIMAK dari proyek pembangunan yang tidak dapat ditelusuri dari data proyek. Temuan tersebut telah dilakukan revaluasi oleh Inspektorat Jenderal, ditindaklanjuti dengan pengajuan permohonan rekomendasi koreksi pencatatan Barang Milik Negara berupa BTM nomor W22.PB.06.04-4069 tanggal 28 Juni 2021. Kemudian telah diterbitkan rekomendasi koreksi pencatatan Barang Milik Negara dari Sekretaris Jenderal Kemenkumham dengan nomor SEK.4-PB.05.02-1915 tanggal 13 September 2021. Koreksi nilai pada SIMAK BMN dilakukan sesuai SK Penghapusan Kepala Kantor Wilayah nomor W22.PB.05.01-5508 tanggal 15 Oktober 2021;
- ii. Pada Satker Kanwil NTT terdapat temuan BPK berupa Bangunan Tempat Sidang / Zitting Plaat NUP 10, 24, dan 26 yang bangunannya telah hancur dikarenakan gempa bumi dan kebakaran.

Tindak lanjut: permohonan ijin prinsip penghapusan kepada Sekretaris Jenderal Kemenkumham RI untuk BMN tersebut dengan nomor W22.PB.06.04-4010 tanggal 06 Juli 2021.

4. Kanwil Banten

Terdapat temuan BPK berupa pengembalian belanja modal renovasi Gedung dan Bangunan sebesar Rp5.460.269,00 dan sudah disetorkan ke Kas Negara serta telah dilakukan koreksi pencatatan nilai/kuantitas pada SIMAK BMN.

B. Inspektorat Jenderal

Terdapat kelebihan pembayaran atas paket pengadaan peralatan fasilitas perkantoran berupa Micro Bus sebesar Rp52.489.000,00.

Tindak lanjut:

Telah diterbitkan Surat Pejabat Pembuat Komitmen Inspektorat Jenderal Nomor ITJ.1.UM.01.01-2654 tanggal 19 Juli 2021 perihal



Surat Penagihan Kelebihan Pembayaran atas Temuan BPK Terkait Pengadaan Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Roda Empat Microbus TA 2020. Tindak lanjut dari sisi akuntansi terkait kelebihan bayar pengadaan Micro Bus, Inspektorat Jenderal telah melakukan jurnal koreksi nilai aset tetap non revaluasi.

C. Direktorat Jenderal AHU

1. Penatausahaan ATB Kemenkumham belum tertib

Tindak Lanjut temuan BPK atas Aset Tak Berwujud pada Kementerian Hukum dan HAM bahwa pada tanggal 06 Mei 2021 telah dikirimkan surat kepada Biro Pengelolaan BMN Nomor AHU.UM.01.01-820 perihal Tanggapan Instansi atas Progress Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2020. Bahwa pada Semester I Tahun 2021 telah dilakukan tindak lanjut sebagai berikut:

- Pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum terdapat ATB status tidak berfungsi dan tidak digunakan dengan alasan yang belum bisa dijelaskan sebanyak 7 NUP.
- Tindak lanjut pada ATB yang dihentikan dari penggunaan.
- Berdasarkan penelusuran lebih lanjut dan dokumen pendukung terkait dengan ATB NUP 1032 yang telah dihentikan pada TA 2020, ditemukan bahwa software tersebut tidak memenuhi kriteria sebagai ATB. Sehingga, dilakukan koreksi pencatatan pada Semester I TA 2021 (tabel di bawah).



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Catatan Atas Laporan Keuangan – **Pengungkapan-Pengungkapan Lainnya**
Per 31 Desember Tahun Anggaran 2021 (*Audited*)
(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No	Nama Barang	Uraian	NUP	Tahun Perolehan	Nilai Perolehan	Tindak Lanjut
1	Software	SIEM	1.018	2012	985.215.000	Dilakukan Koreksi Pencatatan --> Lisensi berumur 1 th Terdiri dari 1. Software Log Correlation Engine - Tenable LCE 1 year subscription 2. Software Signature Updation - Software Source Fire Professional Feed 1 Year 3. Software Vulnerability Scanner - Software Tenable Nessus Scanner Profesional Feed 4. Biaya Instalasi A,B dan C tidak memenuhi kriteria ATB
2	Software	SMTP RELAY PENDUKUNG LAYANAN AHU ONLINE	1483	2015	187.000.000	Koordinasi lanjut dengan Direktorat TI, software berupa Lisensi Power MTA version Standart untuk mengirimkan email dan masih digunakan
3	Software	SOFTWARE VIDEO CONFERENCES	1487	2015	1.524.759.500	Diperlukan koordinasi lanjut dengan Direktorat TI, diharapkan terdapat kesepakatan pada akhir Semester II TA 2021. Software sudah tidak digunakan namun belum ada bukti data dukung untuk melakukan penghapusan
4	Software	SISTEM INFORMASI MANAJEMEN ARSIP (E-DOCUMENT)	1509	2018	47.951.750	Diperlukan koordinasi lanjut dengan Direktorat TI, diharapkan terdapat kesepakatan pada akhir Semester II TA 2021. Software sudah tidak digunakan namun belum ada bukti data dukung untuk melakukan penghapusan
5	Lisensi /Software	lisensi berumur 1 thn	1 / 1520	2010	2.394.212.370	Software berupa Antivirus, Database Enterprise, dan Security Software dengan masa manfaat satu tahun sehingga tidak memenuhi kriteria sebagai ATB. Sebagai langkah tindak lanjut dilakukan Koreksi Pencatatan pada Semester I TA 2021.
6	Lisensi/ Software	lisensi berumur 1 thn	2 / 1521	2014	1.361.459.000	Software berupa Vmware vSphere 5 Enterprise Plus dan Vmware vCenter Server 5 Foundation dengan masa manfaat satu tahun sehingga tidak memenuhi kriteria sebagai ATB. Sebagai langkah tindak lanjut dilakukan Koreksi Pencatatan pada Semester I TA 2021.
7	Software	APLIKASI BARANG PERSEDIAAN	1.484	2015	48.675.000	Aplikasi Barang Persediaan (SIMPAN) masih berfungsi dan dapat digunakan sebagai aplikasi pendukung Aplikasi Persediaan Kementerian Keuangan
TOTAL					6.549.272.620	

- ATB dengan nilai perolehan sebesar Rp2.118.079.052,00 berfungsi namun tidak dilengkapi dengan identitas perangkat dan lokasi keberadaan perangkat tersebut sehingga tidak dapat dilakukan prosedur audit.



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Catatan Atas Laporan Keuangan – **Pengungkapan-Pengungkapan Lainnya**
Per 31 Desember Tahun Anggaran 2021 (*Audited*)
(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

No	Jenis ATB	NUP	Nama Software/Aplikasi	Tahun Perolehan	Nilai Aset	Perangkat, instalasi (server/PC/Laptop/dll)	IP Perangkat	Lokasi	Tindak Lanjut
1	Software	1.005	Database Supporting	2011	252.592.013	Server	-	Data Center AHU	Masih dibutuhkan koordinasi dengan Direktorat TI terkait dengan penelusuran dokumen sumber, kemungkinan merupakan jasa migrasi data. Akan ditindaklanjuti di Semester II TA 2021.
2	Software	1.006	Database Supporting	2011	252.592.013	Server	-	Data Center AHU	
3	Software	1.007	Database Supporting	2011	252.592.013	Server	-	Data Center AHU	
4	Software	1.008	Database Supporting	2011	252.592.013	Server	-	Data Center AHU	
5	Software	1.049	Pembangunan SI Manag Not	2014	386.760.000	Server	192.168.46.81	Data Center AHU	Terpasang di Data Center Ditjen AHU. Software telah dikembangkan atau merupakan satu kesatuan dengan Software NUP 1451 (Profil Perusahaan dan Notaris) dan NUP 1460 (Integrasi & Penambahan Modul Permohonan Aplikasi Notariat). Sebagai langkah tindak lanjut dilakukan penggabungan Software NUP 1049, dan 1460 (Koreksi Perubahan Nilai) pada Semester I TA 2021.
6	Software	1.456	SISTEM SINGLE LOGIN	2014	193.875.000	Server	192.168.46.81	Data Center AHU	Terpasang di Data Center Ditjen AHU.
7	Software	1.460	Integrasi & Penambahan Modul Permohonan Aplikasi Notariat	2014	145.805.000	Server	192.168.46.81	Data Center AHU	Dilakukan penggabungan Software NUP 1049, dan 1460 (Koreksi Perubahan Nilai) pada Semester I TA 2021.
8	Software	1.461	PENGADAAN MODUL INTERKONEKSI APLIKASI KEUANGAN	2014	381.271.000	Server	192.168.46.90 192.168.46.91	Data Center AHU	Terpasang di Data Center Ditjen AHU. Software telah dikembangkan atau merupakan satu kesatuan dengan Software NUP 1468 (SIMPONI Keuangan). Sebagai langkah tindak lanjut dilakukan penggabungan Software NUP 1461 dan 1468 (Koreksi Perubahan Nilai) pada Semester I TA 2021.
TOTAL					2.118.979.052				

2. Pencatatan Ganda Aset Tetap Tanah Kemendagri dan Kemenkumham

Pencatatan Ganda Tanah yang berada pada Jl. Kernolong IV Dalam No 132, Jakarta Pusat.

Bahwa sebelumnya diketahui adanya pencatatan ganda untuk tanah yang berada pada Jl. Kernolong IV Dalam No 132, Jakarta Pusat. Pencatatan tanah selain dicatat oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum sebagai Tanah Bangunan Kantor Pemerintah NUP 1.

Bahwa pada periode pemeriksaan Laporan Keuangan TA 2020, dilaporkan bahwa Kementerian Dalam Negeri dan Badan Kepegawaian Negara juga mencatat Tanah yang dimaksud diatas sebagai BMN. Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum melakukan tindak lanjut sebagai berikut:

Tindak lanjut:

- Ditjen AHU telah melakukan koordinasi dengan KPKNL Jakarta IV pada tanggal 20 Mei 2021, perihal pencatatan ganda pada SIMAK BMN oleh 3 Kementerian/ Lembaga yaitu Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Hukum dan HAM dan Badan Kepegawaian Negara. Bahwa pada pertemuan tersebut pihak KPKNL sudah mengetahui perihal pencatatan ganda tersebut karena ketiga K/L berada dalam pembinaan KPKNL Jakarta IV dan akan melakukan penelusuran lebih lanjut.



- b. Pada tanggal 5 April 2021 telah dikeluarkan surat oleh Badan Kepegawaian Negara Nomor 1373/B-PL-03.04/SD/K/2021 perihal Pelepasan tanah dan bangunan milik BKN di Jalan Kramat Raya Nomor 132 Jakarta Pusat.
- c. Telah diperoleh konfirmasi secara lisan pada tanggal 3 Juni 2021 melalui Pelaksana pada KPKNL Jakarta IV yang membantu koordinasi dengan Kemendagri. Kemendagri bersedia menyesuaikan luas tanah yang dicatat sesuai dengan luas tanah yang dikuasai dan digunakan saat ini (mengeluarkan sebagian luas tanah dari sertifikat karena tanah tersebut digunakan dan di bawah Hak Pakai Ditjen AHU). Hal ini berarti tanah yang saat ini tercatat pada Ditjen AHU telah sesuai dengan luas tanah yang dikuasai dan digunakan yaitu seluas 3.099m². Terkait hal ini Ditjen AHU masih terus berkoordinasi dengan KPKNL Jakarta IV dan Kemendagri terkait penyelesaian tersebut.

D. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan

1. Pengelolaan Aset Barang Milik Negara Berupa Tanah Pulau Nusakambangan

Kementerian Hukum dan HAM RI mendapat instruksi sebagai akibat dari audit BPK pada tahun 2019, salah satunya terkait pengelolaan aset BMN berupa Pulau Nusakambangan Cilacap Jawa Tengah. Secara khusus terdapat 4 catatan atas pengelolaan aset BMN dimaksud yaitu:

- Pengelolaan Aset Tanah Pulau Nusakambangan bersinggungan dengan pihak lain;
- Penyajian luas dan nilai aset tidak menggambarkan kondisi yang sebenarnya;
- Ditjen Pas belum meningkatkan status legalitas kepemilikan aset berupa sertifikat;
- Tanah Ditjen Pemasyarakatan berpotensi sengketa dan dikuasai pihak lain.

Tindak lanjut :

- a. Luasan Tanah Nusakambangan

Telah dilakukan pertemuan antara Ditjen Pemasyarakatan, Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM, Kemendagri, dan Badan Informasi Geospasial pada tanggal 30 Maret 2021 dengan focus agenda pada pengukuran luasan tanah Nusakambangan dan data luasan terbaru.

Direktorat Jenderal Pemasyarakatan bersurat kepada Badan Informasi Geospasial nomor : PAS.UM.01.01-16 tanggal 31 Maret 2021 tentang permohonan data luasan pulau Nusakambangan. Balasan surat dari Badan Informasi Geospasial nomor : B-15.2/DIGD-BIG.IGD.04.04/4/2021



tanggal 15 April 2021 tentang Penghitungan Luas Wilayah Pulau Nusakambangan. Adapun data dan parameter yang digunakan untuk menghitung luas wilayah pulau Nusakambangan meliputi :

- Luas dihitung dalam Proyeksi Ekuivalen (Cylindrical Equal Area)
- Data Garis Pantai Edisi “Kebijakan Satu Peta”

disampaikan bahwa luas pulau Nusakambangan adalah 120, 479 km² atau 12.047,9 Ha. Namun demikian Direktorat Jenderal Pemasarakatan mengirimkan surat permintaan klarifikasi dan penjelasan atas perbedaan data yang disampaikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan, di mana dari sumber yang sama PKSP tahun 2018 adalah 120.567.983 m² atau 12.056,78 Ha. Permintaan tersebut tertuang dalam surat nomor PAS.1.PB.03-4279 tanggal 25 Oktober 2021.

Melalui surat nomor : B-12.3/PBW-BIG/IGD.04.04/1/2022 tanggal 12 Januari 2022 Badan Informasi Geospasial mengklarifikasi perbedaan data luasan wilayah Nusakambangan yang menyatakan bahwa luas wilayah yang disampaikan pada Surat Nomor: B-6.6/PPKS-BIG/PL.01/5/2020 yang disampaikan Ketua Tim Badan Pemeriksa Keuangan tanggal 6 Mei 2020 dan Surat Nomor: B-15.2/DIGD-BIG/IGD.04.04/4/2021 yang disampaikan kepada Direktur Jenderal Pemasarakatan dengan menggunakan parameter Luas dalam Proyeksi Ekuivalen dan Data Garis Pantai Edisi Kebijakan Satu Peta adalah bernilai sama. BIG melanjutkan bahwa perbedaan luas wilayah sebesar 0.001km² disebabkan oleh faktor pembulatan.

b. Sertifikat Tanah 2020 – 2021 dan Peta Sertifikat Kementerian ATR/BPN

Pada triwulan pertama tahun anggaran 2021, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia telah menerbitkan tiga sertifikat yang telah diajukan oleh Direktorat Jenderal Pemasarakatan, meliputi sertifikat untuk Bapas Nusakambangan, Tanah LP Narkotika Nusakambangan dan Tanah LP Pasir Putih Nusakambangan.

Pada Sistem Peta Sertifikat Resmi Kementerian ATR/BPN yang dapat diakses pada alamat <https://bhumi.atrbpn.go.id/>, ketiga unit pelaksanaan tersebut telah muncul dan terdaftar dalam database yang ada.

Adapun prosesi penyerahan sertifikat dilaksanakan oleh Kepala Bagian Pengelolaan Barang Milik Negara dan



Umum Direktorat Jenderal Pemasayrakatan dengan Kepala Badan Pertanahan Nasional Cilacap.

c. Proses Sertifikasi Tanah 2022

Pada tahun 2021 Direktorat Jenderal Pemasayrakatan mengajukan 10 Bidang untuk disertifikatkan melalui Program Sertifikasi Kementerian Keuangan pada tahun 2022 melalui Surat No. PAS.1.PB.05.01-628 tanggal 03 Maret 2021. KPKNL Jakarta IV telah menyatakan bahwa Nusakambangan telah diajukan ulang untuk target tahun 2022. Menindaklanjuti hal tersebut, Direktorat Jenderal Pemasayrakatan telah berkoordinasi dengan BPN Cilacap terkait penyiapan Data Dukung 10 Bidang dimaksud dan telah melaksanakan rapat koordinasi daring yang dihadiri oleh DJKN Provinsi Jawa Tengah, DJKN Provinsi DKI Jakarta, KPKNL Kabupaten Purwokerto, dan KPKNL Jakarta IV pada 28 Oktober 2021. Pada 10 November 2021, Direktorat Jenderal Pemasayarkatan mengirimkan surat Nomor : PAS1.PB.05.01-4579 tentang permintaan pengukuran dan pemetaan tanah pulau Nusakambangkn sebagai tindak lanjut surat Kepala KPKNL Jakarta IV Nomor: S-692/WKN.07/KNL.04/2020 tanggal 3 April 2020 dan hasil Pertemuan zoom pada 28 Oktober 2021. Adapun 10 bidang Tanah yang diajukan untuk sertifikasi adalah sebagai berikut:

No.	Nama Bidang
1.	Lapas Terbuka Kelas II A Nusakambangan
2.	Lapas Klas IIA Permisan Nusakambangan
3.	Gedung Pertemuan Wisma Sari Lapas Kelas I Batu Nusakambangan
4.	Dermaga Sodong Lapas Kelas I Nusakambangan
5.	Poliklinik Pengayoman Lapas Kelas I Nusakambangan
6.	Gereja Lapas Kelas I Nusakambangan
7.	Perumahan Lapas Terbuka Kelas II A Nusakambangan
8.	Perumahan Lapas Kelas IIA Pasir Putih Nusakambangan
9.	Perkebunan Lapas Kelas IIA Kembangkuning Nusakambangan
10.	Perkebunan Lapas Kelas IIA Permisan Nusakambangan

d. Akumulatif Luasan Tanah Nusakambangan yang Telah Disertifikasi

Direktorat Jenderal Pemasayarakatan aktif berkinerja mengelola tanah Pulau Nusakambangan, semenjak 2020 hingga laporan ini disusun. Adapun bidang tanah yang telah tersertifikasi menjadi bagian indikator kesuksesan pengelolaan tanah Pulau Nusakambangan. Merujuk pada



data luasan bidang tanah, bidang tanah yang telah disertifikatkan mencapai 245.417 m². Adapun rincian luasan tersebut meliputi:

No	Nama Bidang	Luasan (m ²)
1.	Gedung Balai Pemasyarakatan Cilacap di Nusakambangan	2.700
2.	Gedung Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Pasir Putih Nusakambangan	31.930
3.	Gedung Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas IIA Nusakambangan	37.486
4.	Perumahan Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Kembang Kuning Nusakambangan	30.401
5.	Gedung Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Kembang Kuning Nusakambangan	22.336
6.	Gedung Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Besi Nusakambangan	51.740
7.	Perumahan LP Klas IIA Besi Nusakambangan	17.884
8.	Rumah Susun LP Klas I Batu Nusakambangan	13.020
9.	Rumah Khusus/Tapak LP Klas I Batu Nusakambangan	7.315
10.	Perumahan LP Klas I Batu Nusakambangan	5.966
11.	Gedung Lembaga Pemasyarakatan Klas I Batu Nusakambangan	24.639
	Jumlah	245.417

e. Pengelolaan Pulau Nusakambangan 2021

Pada triwulan pertama tahun anggaran 2021, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia telah menerbitkan tiga sertifikat yang telah diajukan oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, meliputi sertifikat untuk Bapas Nusakambangan, Tanah LP Narkotika Nusakambangan dan Tanah LP Pasir Putih Nusakambangan. Pada Sistem Peta Sertifikat Resmi Kementerian ATR/BPN yang dapat diakses pada alamat <https://bhumi.atrbpn.go.id/> ketiga unit pelaksanaan tersebut telah muncul dan terdaftar dalam database yang ada.

Berdasarkan Koordinasi yang telah dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dengan Kantor BPN Cilacap hingga akhir semester I Tahun Anggaran 2021, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan telah menerima hasil Pengukuran Tanah pada tahun 2021.

Berdasarkan informasi yang diterima Sub Bagian Penatausahaan dan Penghapusan BMN pada 12 Oktober 2021 melalui media komunikasi jejaring online, proses sertifikasi atas delapan sertifikat bidang tanah yang diajukan pada semester I tersebut telah selesai dan penyerahannya dilaksanakan secara simbolis dalam rangka Upacara



Peringatan Hari Agraria dan Tata Ruang Nasional Tahun 2021.

Pada pertengahan Desember Tahun 2021, Direktorat Jenderal Pemasarakatan telah menerima softcopy 8 (Delapan) Sertifikat Bidang Tanah, namun demikian salah satu sertifikat harus dikembalikan dan diperbaiki dikarenakan kesalahan cetak.

f. Rangkaian Kegiatan Pengelolaan Nusakambangan

Pada prinsipnya Direktorat Jenderal Pemasarakatan berkomitmen untuk terus melaksanakan rangkaian Pengelolaan Aset Pulau Nusakambangan. Direktorat Jenderal Pemasarakatan telah melaksanakan tindak lanjut Audit Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia 2019 semenjak tahun 2020 hingga laporan ini disusun. Tindak lanjut yang telah dan akan dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pemasarakatan merupakan rangkaian kegiatan kerja hingga tahun 2024 mendatang. Progress kegiatan serta capaian kegiatan pada tahun 2021 yang telah dipaparkan pada poin sebelumnya menjadi bagian dari pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan tanah Nusakambangan 2020 s.d 2024.

2. Terkait Opname Fisik Satuan Kerja Pemasarakatan

Tindak lanjut:

Satuan Kerja Pemasarakatan telah melaksanakan Opname Fisik Tahun Anggaran 2021 Semester I dan Semester II. Pengawasan pelaksanaan opname fisik telah dilakukan diantaranya melalui Rekon BMN secara Virtual bersama dengan Biro Pengelolaan BMN dan Satuan Kerja. Dokumen hasil opname fisik telah dikumpulkan dan telah dilakukan pemeriksaan oleh Ditjen Pemasarakatan.

E. Direktorat Jenderal Imigrasi

1. Terhadap temuan BPK pada Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tahun 2014 yang menyatakan bahwa “Proses Penghapusan Aset DRC pada Ditjenim Tidak Diikuti dengan Proses Penyelesaian Tuntutan Ganti Rugi” telah diterbitkannya Surat Rekomendasi Tim Penyelesaian Kerugian Negara (TPKN) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor SEK-KU.03.04-328 tanggal 8 Oktober 2020 yang menyatakan bahwa “Proses penghapusan aset DRC pada Ditjenim tidak menimbulkan kerugian negara karena telah dilakukan penggantian perangkat DRC bali yang rusak dan perangkat DRC tersebut telah berfungsi kembali”.



Atas surat rekomendasi dimaksud, Direktorat Jenderal Imigrasi telah menindaklanjutinya dengan:

- mengajukan penghapusan kembali atas perangkat DRC yang mengalami kerusakan; dan
- melakukan penyelesaian proses administrasi hibah atas perangkat pengganti dan telah melakukan pencatatan pada aplikasi SIMAK-BMN.

2. Aset Tetap Tanah Direktorat Jenderal Imigrasi di Kabupaten Sumba Tengah Seluas 3.000 Hektar Senilai Rp330.360.000.000,00 Dikuasai dan Digunakan Oleh Pihak Lain Tindak lanjut:

- a. Diterbitkannya Surat Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor: IMI-0242.KP.04.01 Tahun 2021 tentang Tim Penyelesaian Permasalahan Tanah Milik Direktorat Jenderal Imigrasi di Kabupaten Sumba Tengah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- b. Kegiatan Pra Kondisi Pengukuran Pengembalian Batas Tanah Milik Direktorat Jenderal Imigrasi di Kab. Sumba Tengah Prov. NTT Tanggal 16 s.d. 26 Maret 2021.
- c. Kegiatan Pengukuran Ulang Tanah dan Identifikasi Lahan di atas Sertipikat Hak Pakai Nomor 1 Tahun 1986 di di Kab. Sumba Tengah Prov. NTT Tanggal 21 Agustus s.d. 7 September 2021.
- d. Dihasilkannya Berita Acara Nomor IMI.1-PB.02.05-003 Kesepakatan Rapat Koordinasi Penyelesaian Permasalahan Tanah Milik Direktorat Jenderal Imigrasi di Kabupaten Sumba Tengah Provinsi NTT T.A. 2021 Tanggal 24 s.d. 27 November 2021.

3. Terhadap temuan BPK tahun 2020 yang menyatakan bahwa ATB pada E-1 Direktorat Jenderal Imigrasi dengan total nilai sebesar Rp389.242.116.850,00 tidak menggambarkan kondisi sebenarnya, telah dilakukan identifikasi penjelasan sebagai berikut:

- a. Terhadap ATB yang tidak sesuai kodefikasinya dengan total nilai sebesar Rp24.117.355.784,00 telah dilakukan tindak lanjut berupa reklasifikasi kode barang dari Lisensi (8010101002) menjadi Software Komputer (8010101001) terhadap keseluruhan ATB yang tidak sesuai kodefikasinya tersebut;
- b. Terhadap ATB yang seharusnya dikapitalisasi ke perangkat/peralatan mesin dengan total nilai sebesar Rp254.711.288,00 telah dilakukan tindak lanjut berupa pengembangan nilai perangkat/peralatan mesin yang terpasang ATB tersebut;



- c. Terhadap ATB yang tidak ditemukan perangkat rusaknya dengan total nilai sebesar Rp247.226.060,00 telah dilakukan identifikasi atas keseluruhan lokasi perangkat rusak yang terpasang ATB;
- d. Terhadap ATB yang sudah diganti dengan total nilai sebesar Rp64.173.605.039,00 telah dilakukan tindak lanjut berupa penghentian penggunaan senilai Rp49.733.602.864,00 dan sisanya sebesar Rp14.440.002.175,00 diidentifikasi masih digunakan;
- e. Terhadap ATB yang belum bisa dijelaskan dengan total nilai sebesar Rp108.656.827.267,00 telah dilakukan identifikasi dan diberikan penjelasan senilai Rp107.907.688.484,00. Berdasarkan hasil identifikasi tersebut, terdapat ATB senilai Rp50.511.816.650,00 pada satker pusat Ditjenim yang sudah tidak digunakan dan telah diajukan permohonan penghapusannya;
- f. Terhadap ATB tidak aktif dengan total nilai sebesar Rp3.857.014.080,00 telah dilakukan tindak lanjut berupa penghentian penggunaan atas keseluruhan ATB tersebut;
- g. Terhadap ATB yang belum dimanfaatkan dengan total nilai sebesar Rp1.349.125.080,00 dikarenakan belum adanya kebutuhan berupa penambahan atau penggantian perangkat baru pada satker;
- h. Terhadap ATB yang tidak terdapat statusnya dengan total nilai sebesar Rp27.995.558.855,00 telah dilakukan identifikasi status atas keseluruhan ATB tersebut. Berdasarkan hasil identifikasi tersebut, terdapat ATB senilai Rp25.935.537.631,00 pada satker pusat Ditjenim yang sudah tidak digunakan dan telah diajukan permohonan penghapusannya;
- i. Terhadap ATB yang tidak ada lokasi dengan total nilai sebesar Rp95.009.928.840,00 telah dilakukan identifikasi atas keseluruhan atas ATB tersebut;
- j. Terhadap ATB yang masih digunakan tetapi dihentikan penggunaannya dengan total nilai sebesar Rp63.580.764.557,00 telah ditindaklanjuti dengan melakukan penghapusan transaksi penghentian penggunaan pada aplikasi SIMAK-BMN.

Dalam rangka menindaklanjuti TP-BPK tersebut, Direktorat Jenderal Imigrasi telah mengajukan permohonan penghapusan atas ATB yang sudah tidak digunakan dengan total nilai sebesar Rp132.955.757.959,00 yang terdiri dari:

- ATB yang sudah dihentikan penggunaannya pada Neraca SIMAK BMN Satker Pusat Ditjenim senilai Rp56.508.403.678,00;



- Tindak lanjut atas hasil identifikasi ATB yang belum bisa dijelaskan senilai 50.511.816.650,00; dan
- Tindak lanjut atas hasil identifikasi ATB yang tidak terdapat status penggunaannya senilai Rp25.935.757.959,00.

Terhadap keseluruhan permohonan penghapusan tersebut terbagi menjadi 9 usulan permohonan dengan perincian sebagai berikut:

- Usulan permohonan penghapusan sebesar Rp3.877.879.559,00 dengan Surat Permohonan Penghapusan Nomor IMI-PB.06.04-0025 tanggal 4 Mei 2021;
- Usulan permohonan penghapusan sebesar Rp9.978.320.177,00 dengan Surat Permohonan Penghapusan Nomor IMI-PB.06.04-0026 tanggal 4 Mei 2021;
- Usulan permohonan penghapusan sebesar Rp9.444.279.500,00 dengan Surat Permohonan Penghapusan Nomor IMI-PB.06.04-0023 tanggal 4 Mei 2021;
- Usulan permohonan penghapusan sebesar Rp33.207.924.442,00 dengan Surat Permohonan Penghapusan Nomor IMI-PB.06.04-0024 tanggal 4 Mei 2021;
- Usulan permohonan penghapusan sebesar Rp160.742.250,00 dengan Surat Permohonan Penghapusan Nomor IMI-PB.06.04-0030 tanggal 6 Mei 2021;
- Usulan permohonan penghapusan sebesar Rp5.319.608.800,00 dengan Surat Permohonan Penghapusan Nomor IMI-PB.06.04-0028 tanggal 6 Mei 2021;
- Usulan permohonan penghapusan sebesar Rp12.824.715.500,00 dengan Surat Permohonan Penghapusan Nomor IMI-PB.06.04-0027 tanggal 6 Mei 2021;
- Usulan permohonan penghapusan sebesar Rp19.224.942.000,00 dengan Surat Permohonan Penghapusan Nomor IMI-PB.06.04-0031 tanggal 6 Mei 2021;
- Usulan permohonan penghapusan sebesar Rp38.917.345.731,00 dengan Surat Permohonan Penghapusan Nomor IMI-PB.06.04-0029 tanggal 6 Mei 2021.



F. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual

1. Penatausahaan Persediaan Pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Belum Memadai.

Tindak Lanjut:

Terhadap hal tersebut telah dilakukan Stock Opname Persediaan dengan Berita Acara nomor HKI.1.1-PB.05.03-11 tanggal 23 April 2021 dan Gudang Persediaan Barang Habis Pakai Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual telah menggunakan Kartu Stock Persediaan.

2. ATB DJKI yang tidak berfungsi dan tidak digunakan dengan alasan yang belum bisa dijelaskan sebanyak 27 NUP dengan nilai sebesar Rp9.794.923.532,00

Tindak Lanjut:

Terhadap temuan tersebut DJKI telah melakukan kapitalisasi Software Komputer (Windows Server 2008) sebanyak 4 unit dengan NUP 2 sampai dengan NUP 5 dengan nilai sebesar Rp103.502.300,00 ke dalam Peralatan Mesin Server dengan NUP 57. ATB sebanyak 23 unit dengan sebesar Rp9.691.421.232,00 yang statusnya tidak berfungsi dan tidak digunakan dengan alasan yang belum bisa dijelaskan, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual telah melakukan koordinasi dengan Biro Pengelolaan Barang Milik Negara Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM R.I dan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jakarta IV untuk melakukan inventarisasi terhadap ATB dan telah melaksanakan pemuktahiran data pada Aplikasi SIMAK BMN berupa penghentian ATB sejumlah 5 (lima) buah software.

3. Temuan BPK pada Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Sistem pengendalian Intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan peundang-undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2020 Badan Pemeriksa Keuangan R.I Nomor 23.b/HP/XIV/05/2021 tanggal 24 Mei 2021 atas Paket pengadaan Upgrade Memory Server Fujitsu 3800E

Tindak lanjut:

Telah dilakukan pemuktahiran data pada Aplikasi BMN berupa Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas Peralatan Jaringan senilai Rp3.660.800.000,00 (Tiga Milyar Enam Ratus Enam puluh Juta Delapan ratus Ribu Rupiah) pada Server NUP 154 senilai Rp1.830.400.000,00 (Satu Milyar Delapan Ratus Tiga puluh juta empat ratus ribu rupiah) dan Server NUP 155 senilai Rp1.830.400.000,00 (Satu Milyar Delapan Ratus Tiga puluh juta empat ratus ribu rupiah).



G. BPSDM Hukum dan HAM

1. Telah dilakukan koreksi nilai Gedung dan Bangunan sebesar Rp829.541.975,00 atas pengembalian kelebihan pembayaran Konstruksi Dalam Pengerjaan tahun 2020;
2. Telah dilakukan koreksi nilai Gedung dan Bangunan pada Balai Pendidikan dan Pelatihan Jawa Tengah sebesar Rp356.869.201,00.

F.4.3. Temuan Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut pada Sekretariat Jenderal

A. Penyelesaian permasalahan tanah Kemenkumham yang digunakan oleh Pemkot Tangerang

1. Pemerintah Kota Tangerang memanfaatkan beberapa bidang tanah Kemenkumham yang berlokasi di Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang untuk:
 - Gedung Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Tangerang;
 - Jalan Satria Sudirman;
 - Pedestrian Jalan Jenderal Sudirman;
 - Gedung Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - Gedung SD Negeri Sukasari 4 dan SD Negeri Sukasari 5.
2. Dalam rangka penertiban pemanfaatan BMN, Kemenkumham dan Pemerintah Kota Tangerang telah menyusun Nota Kesepakatan Nomor ^{SEK-PB.04.02-262}_{591/185-Kesamomi/2019} tanggal 23 Juli 2019, dengan kesepakatan bahwa Kemenkumham dan Pemerintah Kota Tangerang akan menyelesaikan penatausahaan atas bidang-bidang tanah sebagaimana tersebut di atas.
3. Menindaklanjuti Nota Kesepakatan, Pemkot Tangerang mengajukan permohonan hibah kepada Kemenkumham atas bidang-bidang tanah sebagaimana dimaksud kepada Kemenkumham.
4. Selanjutnya, Kemenkumham dan Pemkot Tangerang serta Kantor Pertanahan Kota Tangerang secara bersama-sama melakukan pengukuran atas bidang-bidang tanah yang dimohonkan untuk dihibahkan.
5. Berdasarkan hasil pengukuran, diperoleh informasi sebagai berikut:

Tabel 234

Informasi Pemanfaatan Tanah di Tangerang

No.	Pemanfaatan Bidang Tanah	Luas (m ²)
1	Gedung Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Tangerang	3.364
2	Jalan Satria Sudirman	41.964
3	Pedestrian Jalan Jenderal Sudirman	13.408



4	Gedung Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	4.551
5	Gedung SD Negeri Sukasari 4 dan SD Negeri Sukasari 5	4.996
Total		68.283

6. Dengan telah diperolehnya data luasan bidang-bidang tanah Kemenkumham yang telah dimanfaatkan oleh Pemkot Tangerang tersebut, Kemenkumham segera mengajukan usul persetujuan hibah kepada Pengelola Barang pada tahun 2020.

B. Penyelesaian permasalahan tanah Kemenkumham yang digunakan oleh Pihak Ketiga tanpa izin

1. Tanah Kemenkumham yang dimanfaatkan untuk Pasar Pujasera

Kemenkumham telah melakukan penertiban dengan mengalihkan status penggunaan BMN berupa tanah seluas 16.659 m² yang dimanfaatkan oleh Pihak Ketiga untuk Pasar Pujasera kepada Polri guna pembangunan Kantor Polres Metro Kota Tangerang.

Pengalihan status penggunaan tersebut telah mendapat persetujuan dari Pengelola Barang melalui surat Menteri Keuangan Nomor S-107/MK.6/WKN.7/2019 tanggal 9 September 2019, dan telah ditindaklanjuti dengan penyerahan aset dari Kemenkumham kepada Polri melalui BAST Nomor BA/5/IX/LOG.9/2019/SLOG SEK-PB.04.01-381 tanggal 26 September 2019.

2. Tanah Kemenkumham yang dimanfaatkan untuk Parkir Pool Alat Berat

Kemenkumham telah mengenakan mekanisme sewa sesuai dengan ketentuan yang berlaku atas pemanfaatan tanah oleh Pihak Ketiga seluas 2.000 m² untuk Parkir Pool Alat Berat.

- Pemanfaatan dalam bentuk sewa tanah untuk Parkir Pool Alat Berat telah mendapatkan persetujuan dari Pengelola Barang melalui surat Menteri Keuangan Nomor S-199/MK.06/ WKN.07/KNL.04/2019 tanggal 2 Desember 2019 dengan jangka waktu sewa selama 1 (satu) tahun;
- Persetujuan sewa tersebut telah ditetapkan pelaksanaannya melalui SK Menkumham Nomor SEK-10.PB.04.02 Tahun 2020 tanggal 10 Februari 2020 dengan nilai sewa sebesar Rp213.955.000,00.
- Pihak Ketiga telah melakukan pembayaran sewa ke Kas Negara pada tanggal 18 Februari 2020.



- d. Saat ini pelaksanaan sewa tersebut sedang dalam proses penandatanganan perjanjian sewa.

3. Tanah Kemenkumham yang dimanfaatkan untuk SPBU

Kemenkumham telah mengenakan mekanisme sewa sesuai dengan ketentuan yang berlaku atas pemanfaatan tanah oleh KPPDK seluas 2.306,5 m² untuk SPBU.

- a. Pemanfaatan dalam bentuk sewa tanah untuk SPBU telah mendapatkan persetujuan dari Pengelola Barang melalui surat Menteri Keuangan Nomor S-26/MK.6/WKN.07/2019 tanggal 4 Maret 2019 dengan jangka waktu sewa selama 2 (dua) tahun.
- b. Persetujuan sewa tersebut telah ditetapkan pelaksanaannya melalui SK Menkumham Nomor Keputusan Menkumham Nomor SEK-25.PB.04.02 Tahun 2019 dengan nilai sewa sebesar Rp1.208.000.000,00.
- c. KPPDK telah melakukan pembayaran sewa ke Kas Negara pada tanggal 4 April 2019.
- d. Kemenkumham dan KPPDK telah menandatangani perjanjian sewa Nomor SEK.6-PB.04.02-12 tanggal 13 April 2019.

Kemenkumham juga telah mengenakan mekanisme sewa terhadap pemanfaatan tanah oleh pihak ketiga pada beberapa lokasi tanah Kemenkumham di Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang, sebagai berikut:

Tabel 235
SK Penetapan Penyewaan Tanah di Tangerang

No	Nama Penyewa	SK Penetapan Pelaksanaan Sewa		PNBP (Rp)
		Nomor	Tanggal	
1	Abdul Hanny	SEK.6.PB.04.02 – 04 TAHUN 2018	05-06-18	59.495.000
2	Adi Cipta	SEK.6.PB.04.02 – 05 TAHUN 2018	05-06-18	323.205.000
3	Etty Nurbaiti	SEK.6.PB.04.02 – 05 TAHUN 2017	15-09-17	52.190.000
4	Siti Rokhaniyah	SEK.6.PB.04.02 – 06 TAHUN 2017	03-10-17	69.590.000
5	M.Luthfi	SEK.6.PB.04.02 – 34 TAHUN 2019	01-10-19	191.515.000
6	Rita	SEK.6.PB.04.02 – 35 TAHUN 2019	01-10-19	191.585.000
7	Herry Sutrisna	SEK.6.PB.04.02 – 18 TAHUN 2019	10-07-19	79.546.000



8	Mumuh Rahmawan	SEK.6.PB.04.02 – 25 TAHUN 2019	12-08-19	45.980.000
9	SPBU		18-04-19	1.208.000.000
10	Miswan	SEK.6.PB.04.02 – 36 TAHUN 2020	11-09-20	6.339.000
11	Cholifatun Anisah	SEK.6.PB.04.02 – 36 TAHUN 2020	11-09-20	4.266.000
12	Rosidin	SEK.6.PB.04.02 – 39 TAHUN 2020	11-09-20	1.280.000
13	Marta	SEK.6.PB.04.02 – 43 TAHUN 2020	11-09-20	2.346.000
14	Apferdius	SEK.6.PB.04.02 – 42 TAHUN 2020	11-09-20	4.799.000
15	Suharjo	SEK.6.PB.04.02 – 41 TAHUN 2020	11-09-20	4.266.000
16	Sawal	SEK.6.PB.04.02 – 40 TAHUN 2020	11-09-20	7.465.000
17	Bawon	SEK.6.PB.04.02 – 36 TAHUN 2020	11-09-20	7.678.000
18	PT. Selarasgriya Adigunatama	SEK.6.PB.02.07 – 34 TAHUN 2020	20-11-20	481.468.000
19	Nofli	SEK.6.PB.04.02 – 15 TAHUN 2020	30-04-20	137.265.000
Total				2.878.278.000

C. Penyelesaian permasalahan tanah Kemenkumham yang digunakan untuk rumah mandiri

Sekretaris Jenderal telah menyampaikan surat kepada Direktorat Jenderal Pemasyarakatan untuk melakukan inventarisasi atas rumah dinas mandiri baik yang telah maupun yang belum tercatat dalam daftar barang Kemenkumham melalui surat Kepala Biro Pengelolaan Barang Milik Negara Nomor SEK.4-PB.04.04-685 tanggal 28 Mei 2019.

Sekretaris Jenderal juga segera menginstruksikan Satuan Kerja Kemenkumham di Kota Tangerang untuk melakukan inventarisasi rumah mandiri mengingat sebagian rumah mandiri juga tercatat dalam daftar barang Satuan Kerja.

Di samping upaya-upaya penertiban di atas, khususnya terkait penertiban tanah yang dimanfaatkan oleh pihak ketiga baik untuk kegiatan bisnis maupun rumah mandiri, Kemenkumham d.h.i Sekretaris Jenderal juga telah menyusun Surat Edaran Nomor SEK-03.PB.04.03 Tahun 2019 tanggal 13 Agustus 2019 pada Satuan Kerja/UPT Kemenkumham di Kota Tangerang.



D. Penilaian Kembali Aset Tetap Tanah Sekretariat Jenderal Kemenkumham di Sukarasa Tangerang Belum Dicatat Secara Memadai Minimal Sebesar Rp51.000.000.000

Terhadap Temuan BPK tersebut, Sekretariat Jenderal telah melakukan langkah-langkah sebagai berikut :

- Sekretaris Jenderal telah memerintahkan Kepala Biro Pengelolaan BMN untuk melakukan pemutakhiran administrasi BMN berupa KIB tanah bangunan kantor pemerintah milik Sekretariat Jenderal Kemenkumham di Sukaraja;
- Kepala Biro Pengelolaan BMN telah menyampaikan Nota Dinas Nomor SEK.4-PB.04.03-876 tanggal 22 Mei 2020 kepada Kepala Biro Umum selaku KPB Sekretariat Jenderal terkait penyampaian rekapitulasi luasan data tanah Sekretariat Jenderal di kota Tangerang sebagai acuan dalam melakukan pembaharuan KIB;
- Kepala Biro Umum selaku KPB Sekretariat Jenderal pada periode pelaporan semester I tahun 2020 telah melakukan pemutakhiran administrasi BMN berupa KIB tanah bangunan kantor pemerintah milik Sekretariat Jenderal Kemenkumham di Sukarasa Tangerang
- Biro Umum telah melakukan koordinasi dengan KPKNL Jakarta IV dengan surat nomor : SEK.6.PW.04.04 - 04 hal Laporan Tindak Lanjut Jawaban Temuan Pemeriksaan BPK Terhadap Laporan Keuangan Kemenkumham Tahun 2019.

Sekretariat Jenderal telah menerbitkan Surat Peringatan Nomor: SEK-PB.05.02-282 tanggal 30 Juni 2020 hal Tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan Keuangan Kementerian Hukum dan HAM tahun 2019 yg ditujukan kepada Kepala Biro Umum selaku KPB Sekretariat Jenderal untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara lebih optimal khususnya terkait pencatatan, pengelolaan dan pelaporan pemutakhiran atas aset tanah Sekretariat Jenderal di kota Tangerang.

F.4.4. Temuan Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum

A. Tindak Lanjut Penanganan Permintaan MLA Terkait Kasus Bank Century di Yurisdiksi Hong Kong

1. Pemerintah RI melalui permintaan MLA tanggal 26 Desember 2012 yang didasarkan pada Putusan Nomor 399/Pid.B/2010/PN.Jkt.Pst (“Putusan 399”) telah berhasil memperoleh Putusan Pengadilan Tingkat Pertama Hong Kong Nomor HCMP 2557/2010 tanggal 30 Januari 2014. Putusan tersebut memenangkan Pemerintah RI atas perlawanan yang dilakukan oleh Rafat Ali Rizvi (*Defendant 1/D1*) dan Hesham



Talaat Mohamed Al-Warraq (*Defendant 2/D2*) dan pihak-pihak yang terafiliasi dengannya (*Defendant 3 s.d. Defendant 18*) untuk merampas sejumlah aset milik atau atas nama kedua terpidana dan afiliasinya di yurisdiksi Hong Kong.

2. Sidang banding sempat mengalami penundaan cukup lama antara lain disebabkan oleh:
 - a. Hesham dan Rafat juga melakukan *forum shopping* dengan menggugat Pemerintah RI yang dianggap melanggar prinsip *fair and equitable treatment* serta pelanggaran ICCPR (*International Covenant on Civil and Political Rights*) ke forum arbitrase OIC (*Organisation of Islamic Cooperation*) dan ICSID (*International Centre for Settlement of Investment Disputes*).
 - b. Permintaan DoJ Hong Kong agar Pemerintah RI menginformasikan secara patut dan layak terkait hak keduanya untuk melakukan upaya hukum luar biasa berupa Peninjauan Kembali.
 - c. Pergantian pemerintahan di Hong Kong dan pandemi Covid-19 juga turut mempengaruhi penundaan pelaksanaan sidang banding di Hong Kong.
3. Pada bulan September 2021, DoJ Hong Kong menyampaikan bahwa proses persidangan banding atas upaya perampasan aset oleh Pemerintah RI untuk memperoleh putusan pengadilan Hong Kong yang berkekuatan hukum tetap akan dimulai pada April 2022.
4. Berdasarkan hasil rapat koordinasi antara *Law Officers* pada DoJ Hong Kong dengan Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum, pada tanggal 27 September 2021 pihak DoJ Hong Kong menyampaikan Surat Nomor: MLA 069/09(INDO)IN yang pada intinya berisi mengenai pandangan hukum dan rekomendasi posisi Pemerintah RI terkait dengan:
 - a. Rekomendasi dari pihak DoJ Hong Kong agar Pemerintah RI tidak mengajukan kontra banding terhadap aset Bank Century (*Defendant 9/D9*);
 - b. Proposal *settlement arrangement* yang diajukan oleh D1, D2, dan D12; dan
 - c. Rekomendasi dari pihak DoJ Hong Kong agar Pemerintah RI tidak mengajukan kontra banding terhadap Galleria Resources Ltd (*Defendant 5/D5*) dan aset milik Chinkara Capital Markets Limited (*Defendant 8/D8*). Dalam perkembangannya pada tanggal 29 September 2021 diperoleh informasi bahwa pihak DoJ Hong Kong telah memutuskan untuk tidak melanjutkan upaya kontra banding terhadap D5 dan D8.



5. Terkait aset D9, terdapat aset senilai USD1,564,000 milik D9 yang setelah dikurangi biaya *receivers* (kurator) menjadi sekitar USD600,000 yang tidak dikabulkan oleh Putusan Pengadilan Tingkat Pertama Hong Kong untuk dirampas oleh Pemerintah RI, melainkan dikembalikan kepada pemiliknya, yaitu aset PT Bank Century Tbk dalam hal ini Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).
6. Dalam perkembangannya, pada tahun 2014 pihak Citibank sempat menyatakan bahwa pihaknya mengklaim memiliki hak atas aset D9 mengingat Citibank merupakan bank kustodian atas surat-surat berharga PT Bank Century Tbk. Pemerintah RI telah meminta penetapan *status quo* kepada Pengadilan Hong Kong agar aset tersebut tidak jatuh ke tangan pihak ketiga dalam hal ini Citibank. Pada tahun 2020, pihak Citibank melepaskan klaimnya atas aset tersebut karena lebih mengutamakan hubungan baik dengan Pemerintah RI. Namun, hingga saat ini aset D9 masih berstatus disita oleh Pemerintah Hong Kong.
7. DoJ Hong Kong berpandangan bahwa upaya kontra banding terhadap D9 tidak pernah memiliki landasan yang kuat dan untuk itu menyarankan Pemerintah RI tidak melakukan upaya kontra banding. Lebih lanjut Pemerintah RI diharapkan dapat memberikan instruksi kepada PT Bank JTrust Indonesia (“BJTI”) atau bersama-sama dengan BJTI mengajukan aplikasi untuk melepaskan aset dimaksud dari penyitaan Pemerintah Hong Kong dan menentukan rekening tujuan dari aset tersebut di Indonesia.
8. Sebagai langkah tindak lanjut, telah diadakan rapat yang melibatkan Kementerian Keuangan dan LPS pada tanggal 15 dan 22 November 2021. Berdasarkan hasil rapat tersebut, diperoleh informasi bahwa sebaiknya aset D9 dikembalikan kepada Kementerian Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN) terlebih dahulu. Apabila aset D9 dikembalikan kepada Kementerian Keuangan maka aset tersebut akan dicatat sebagai PNBK Kementerian Hukum dan HAM (dalam hal ini Ditjen AHU). PNBK tersebut tetap dapat digunakan untuk membiayai *receivers* (kurator).
9. Apabila pada akhirnya Pemerintah RI memutuskan untuk melepaskan aset tersebut dari penyitaan Pemerintah Hong Kong maka yang perlu dipersiapkan adalah:
 - a. Surat dari Kementerian Hukum dan HAM (Opsi: Menkumham, Dirjen AHU atau Direktorat OPHI) selaku Central Authority kepada Department of Justice Hong Kong yang menyatakan bahwa Pemerintah RI tidak akan mengajukan banding terhadap aset D9.
 - b. Surat tersebut diikuti dengan pengajuan permohonan dari D9 (LPS atau BJTI) yang ditujukan kepada Kementerian Hukum dan HAM untuk kemudian disampaikan kepada



Pengadilan Hong Kong dan DoJ Hong Kong untuk melepaskan aset D9 dari penyitaan Pemerintah Hong Kong, disertai dengan Affidavit yang salah satunya menyampaikan rekening tujuan pengembalian aset, yaitu Kementerian Keuangan selaku Bendahara Umum Negara. Hal tersebut dikarenakan pada awalnya upaya penyitaan aset tersebut dilakukan dengan menggunakan mekanisme MLA sebagai sebuah bentuk kerja sama *government to government* sehingga pada akhirnya aset tersebut harus terlebih dahulu dikembalikan kepada negara untuk kemudian diteruskan kepada pihak yang berhak.

- c. Menentukan pihak yang akan mengajukan permohonan dan rekening yang menjadi tujuan pengembalian aset (Kementerian Keuangan selaku Bendahara Umum Negara, LPS selaku pemilik aset berdasarkan CSPA atau BJTI d/h Bank Century).

B. Kronologi Permintaan Biaya Jasa Kurator Dalam Upaya Perampasan Aset PT. Bank Century di Jersey

Tahun	Keterangan
2009	➤ Dengan dasar Perkara 399, Pemerintah RI mengajukan permohonan MLA pertama kepada Pemerintah Jersey untuk merampas aset Robert Tantular (“RT”) di Jersey. Proses hukum pidana dalam Perkara 399 diajukan terhadap Hesham dan Rafat dituduhkan korupsi dan pencucian uang. Mereka dinyatakan bersalah oleh Pengadilan Negeri pada tanggal 16 Desember 2010. ➤ Dalam konteks proses hukum tersebut, Pengadilan Negeri memerintahkan penyitaan aset dalam Trust milik Robert Tantular (RT), meskipun RT bukan termohon dalam proses hukum tersebut. 18 Maret ➤ PPATK menyampaikan info. Harta Kekayaan Robert Tantular yang diduga terkait dalam tindak pidana Bank Century di yurisdiksi Jersey dalam bentuk <i>trust fund</i> (<i>Jasmine Investment Trust</i>) sebesar \$16,5 jt 22 Juli ➤ Menkumham RI melalui dokumen permintaan MLA kepada Jaksa Agung Jersey meminta kepada otoritas Jersey untuk mengambil langkah-langkah untuk membekukan dan menyita aset tersebut. Sebagai tindak lanjut, Jersey Police menerbitkan “No Consent Order” yang sifatnya himbauan.
2010	➤ Dimulainya proses hukum atas RT dengan dasar tindak pidana penipuan dan pencucian uang terkait jabatannya sebagai presiden Bank Century (“Perkara 1631”). Tanggal 4 Februari 2010, PN Jakpus menerbitkan perintah penahanan terkait aset RT di Jasmine Trust.



2012	➤ Perkara 1631 diterima oleh Pengadilan Jersey dan pihak Jersey (1631).
2013	➤ <u>Pemerintah Indonesia mengajukan permohonan MLA kepada Pemerintah Jersey tanggal 29 Juli 2013</u> untuk membekukan dan menyita aset Robert Tantular di Jersey (<i>saisie judiciaire</i>) dalam bentuk <i>trust structure</i> dengan total nilai aset <u>senilai US\$ 16,5 juta</u> atas dasar perkara 1631. ➤ <u>Tanggal 9 Agustus 2013 (<i>Royal Court granted the First Saisie Judiciaires</i>)</u>, Pengadilan Jersey mengabulkan permohonan MLA dari Pemerintah Indonesia untuk membekukan aset milik Robert Tantular di <i>Jasmine Investment Trust</i> (JIT). Namun First Saisie Judiciaire ini mendapatkan perlawanan dari pihak RT. ➤ Dimulainya proses perkara 210: perkara Antaboga Deltasekuritas, Jaksa Penuntut Umum mendakwa Robert Tantular melakukan pencucian uang, penggelapan dan penipuan pada PT. Antaboga Deltasekuritas dengan tempus delicti perkara antara tahun 2003 sampai dengan November 2008. <u>18 April</u> ➤ Menkumham RI meminta kepada Otoritas Pusat yurisdiksi Jersey untuk meningkatkan status dari <i>no consent order</i> menjadi <i>restrained or freezing order</i> atas aset <i>Jasmine Investment Trust</i> untuk mencegah upaya pencairan aset yang dapat dilakukan melalui jalur perdata <u>Juli</u> ➤ Menteri Hukum dan HAM RI melakukan kunjungan ke Jersey, untuk menegosiasikan dokumen MLA untuk keperluan pembekuan aset kepada Pengadilan Jersey ➤ Pemri mengajukan MLA untuk membekukan dan menyita aset Robert Tantular di Jersey senilai USD16,5juta dengan dasar Perkara 1631 <u>Agustus</u> ➤ Pengadilan Jersey mengabulkan permohonan MLA dari Pemerintah Indonesia untuk membekukan aset milik Robert Tantular di <i>Jasmine Investment Trust</i> (JIT). Namun First Saisie Judiciaire ini mendapatkan perlawanan dari pihak RT ➤ Dimulainya proses perkara 210/Pid.B/2013/PN.JKT.PST ("Perkara 210");perkara Antaboga Deltasekuritas, Jaksa Penuntut Umum mendakwa Robert Tantular melakukan pencucian uang, penggelapan dan penipuan pada PT. Antaboga Deltasekuritas dengan tempus delicti perkara antara tahun 2003 sampai dengan November 2008
2014	➤ <u>16 April 2014: Pengadilan Negeri memutuskan RT bersalah melakukan penipuan dan pencucian uang (Putusan 1631)</u>. Pengadilan Negeri menambahkan waktu satu tahun di atas hukuman penjara sembilan tahun yang sedang dijalani oleh RT dan sita atas aset RT yang mengacu pada putusan 399 ➤ <u><i>Reasoned Judgment</i> 10 Juni 2014 (JRC 128): Pengadilan Jersey memutuskan bahwa kedudukan Robert Tantular sebagai <i>Principal Beneficiary</i> tidak dapat menyebabkan keseluruhan <i>Trust</i> dapat dibekukan, melainkan aset yang dapat dibekukan hanya berupa 6 pemberian (<i>gift</i>) yang dilakukan oleh Robert Tantular kepada <i>Trust</i> tersebut.</u>



- Dalam hal ini, aset yang dapat dibekukan hanya *gift* yang ditempatkan oleh Robert Tantular setelah kurun waktu mulainya tindak pidana (*tempus delicti*) sesuai putusan 1631/Pid.B/2012 PN.JKT.PST (1 November 2007 – September 2008).
- Tanggal 22 Agustus 2014, Pemerintah Indonesia telah mengajukan permohonan MLA yang baru kepada Jaksa Agung Jersey untuk membekukan aset Robert Tantular lainnya dengan dasar perkara Antaboga (perkara 210/Pid.B/2013/PN.JKT.PST). Kemudian, pada tanggal 3 September 2014, Pengadilan Jersey mengabulkan pendaftaran MLA Pemerintah Indonesia tertanggal 22 Agustus 2014, dan menetapkan pembekuan sementara (*saisie judiciaire on an interim basis*).
- Status pembekuan ini akan diputuskan oleh Pengadilan Jersey setelah mendengar *submission* dari Pemerintah Indonesia dan Pihak Robert Tantular pada sidang tanggal 17 September 2014.
- Atas Putusan 1631 dan Putusan 210 yang menjadi dasar permintaan MLA dari Pemerintah Indonesia kepada Pemerintah Jersey, Pengadilan Jersey menerbitkan 2 (dua) Penetapan Sita (*Sassie Judiciaries*). Majelis Hakim dalam amar pada kedua putusan tersebut sama-sama memerintahkan untuk merampas aset Robert Tantular di Jersey dalam bentuk *trust structure* yang disebut Jasmine Investment Trust (JIT) dengan total nilai aset senilai USD16,5 juta. Status dari aset tersebut akan tetap dibekukan sampai kedua Putusan tersebut berkekuatan hukum tetap.

April

- PN Jakpus memutuskan RT bersalah melakukan penipuan dan pencucian uang (Putusan 1631)

September

- Pengadilan Jersey memutuskan untuk membekukan 4 (empat) *gift* senilai USD 1.615.418 dari total keseluruhan 6 (enam) *gift* ke dalam JIT yang terjadi setelah 1 November 2007. Nilai aset yang dibekukan dibulatkan nilainya menjadi USD 1,7 juta untuk mengantisipasi nilai inflasi dan biaya-biaya yang mungkin timbul. Sementara aset yang ditempatkan di luar kurun waktu tersebut tidak dapat dibekukan dan kembali statusnya menjadi sita.
- Untuk dapat menjangkau aset-aset yang tidak tercakup dalam Putusan 1631, Pemri mengajukan MLA yang didasarkan pada Perkara 210.
- Pemerintah Jersey mengabulkan MLA dan menetapkan seluruh aset untuk dibekukan.
- Pihak RT melakukan perlawanan dengan dasar *abuse of process*. Namun kembali ditolak oleh Pengadilan Jersey.



2015	Pengadilan Jersey menerbitkan 2 (dua) putusan sita (Saissie Judiciaries) yang memerintahkan untuk merampas aset Robert Tantular di Jersey dalam bentuk <i>Trust Structure/Jasmine Investment Trust</i> dengan total USD 16,5 juta.
2015 s.d 2016	Putusan 1631 (Putusan Banding No. 287) dan Putusan 210 (Putusan banding No. 183) telah berkekuatan hukum tetap masing-masing melalui Putusan Mahkamah Agung No. 1494K/Pid.Sus/2015 tanggal 10 Agustus 2015 (Putusan 1494) dan No. 631K/Pid.Sus/2016 tanggal 13 Juni 2016 (Putusan 631).
2016	<u>Pada tanggal 17 Desember 2016 Menkumham telah menyampaikan permintaan MLA tambahan kepada Pemerintah Jersey untuk mendaftarkan Putusan 1494 dan Putusan 631 agar dapat dilakukan eksekusi berupa perampasan aset JIT.</u> Namun demikian MLA tambahan tersebut baru akan disampaikan kepada Pengadilan Jersey untuk ditindaklanjuti setelah diperoleh: ➤ <u>informasi nilai dari aset pada Jasmine Investment Trust yang relevan dengan tindak pidana pada Bank Century untuk tempus delicti perkara antara tahun 2003 sampai dengan November 2008</u> ➤ <u>menunggu salinan lengkap putusan No. 631K/Pid.Sus/2016 tanggal Juni 2016 dari Mahkamah Agung RI.</u> 22 Desember 2016 Royal Court of Jersey menetapkan BOS Trust berkewajiban menghitung jumlah aset (memberikan <i>affidavit</i>) yang dapat dirampas dalam JIT atas aset milik atau dibawah kendali Robert Tantular, Hartawan Aluwi, atau Anton Tantular untuk periode dari tanggal 17 Juni 2004 hingga 31 Desember 2006.

F.4.5. Temuan Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut pada Direktorat Jenderal Pemasarakatan

Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Sistem Pengendalian Internal Dan Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang Undangan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Tahun 2020 Di Lingkungan Direktorat Jenderal Pemasarakatan

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melalui Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Internal dan Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia nomor 23.b/HP/XIV/05/2021 tanggal 24 Mei 2021 Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Pemasarakatan Tahun Anggaran 2020 mendapatkan Temuan Pemeriksaan sebagai berikut:



1. Kelebihan Pembayaran Biaya Personil dan Non Personil pada pekerjaan Pengawasan pembangunan Gedung Rupbasan Semarang sejumlah Rp38.640.000,00 yang telah ditindaklanjuti seluruhnya dengan melakukan penarikan kelebihan pembayaran pada tanggal sebagai berikut:

No	Tanggal Penyetoran	NTPN	Jumlah Pembayaran (Rp)	Terhutang pada Neraca
0	30-Jun-21	Temuan Pemeriksaan		38.640.000
1	18-Aug-21	B3D1161QU89GLROF	30.000.000	
2	5-Oct-21	6C00361QU8F3142G	8.640.000	
Total Pembayaran			38.640.000	
Sisa Piutang PNPB 31 Desember 2021				0

Untuk rekomendasi administrasi telah dilakukan tindak lanjut berupa surat Sesditpas Nomor PAS1.KU.05.02-2148. tanggal 15 Oktober 2021 kepada Kakanwil Kemenkumham Jateng untuk memberikan teguran kepada PPK dan KPA pada Rupbasan Semarang. Surat Teguran Dirjen Pemasyarakatan melalui Kakanwil Jateng kepada KPA dan PPK Rupbasan Semarang telah ditindaklanjuti melalui surat Nomor W.13-KU.01.01-680 tanggal 28 oktober 2021. Aset telah dikoreksi sesuai jumlah temuan.

2. Kelebihan Pembayaran atas Pekerjaan Jasa Internet dan sewa CCTV pada Direktorat Jenderal Pemasyarakatan telah ditindaklanjuti sesuai rekomendasi berupa:
 - a. Penarikan kelebihan Pembayaran Biaya Sewa Internet Atas 12 UPT yang Belum Terkoneksi Sebesar Rp547.033.896,00 telah disetorkan ke kas negara pada tanggal 25 Mei 2021 dengan NTPN E8E2348VUIRRF3P6.
 - b. Penarikan kelebihan Pembayaran atas 10 UPT yang tidak didukung dengan BAA, Performance Report dan MRTG Report sebesar Rp468.835.080,00 telah disetorkan ke kas negara pada tanggal 25 Mei 2021 dengan NTPN 6FE141JNF34M8539.
 - c. Penarikan kelebihan Pembayaran biaya sewa internet pada 6 UPT atas bulan tagihan yang melebihi masa bulan BAA sebesar Rp136.112.156,00 telah disetorkan ke kas negara pada tanggal 25 Mei 2021 dengan NTPN B2C6C48VUIRRF4UC
 - d. Penarikan kelebihan bayar atas Layanan Bulanan (SLA Availability) atas Pekerjaan Sewa Layanan Internet Pada 56 UPT Ditjen Pas Senilai Rp688.517.894,00 Tidak Didukung Dengan Performance Report Dan Report MRTG telah disetorkan ke kas negara pada tanggal 25 Mei 2021 dengan NTPN 8116555DEDE7S5VR.



- e. Penarikan Restitusi atas Pekerjaan Sewa Jaringan Internet dan Sewa CCTV pada Ditjen Pas Belum diperhitungkan Sebesar Rp98.176.359,00 telah disetorkan ke kas negara pada tanggal 25 Mei 2021 dengan NTPN D07292G4UTN2L7JK.
 - f. Kelebihan Bayar pekerjaan atas 22 UPT Ditjen Pas yang Belum Terkoneksi Jaringan Internet Terlambat Belum Dikenakan Denda Keterlambatan Sebesar Rp211.300.747,00 telah disetorkan ke kas negara pada tanggal 25 Mei 2021 dengan NTPN 23F7A2G4UTN2L91I.
 - g. Direktur Jenderal Pemasarakatan memberikan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku kepada KPA (melalui surat Nomor PAS-KP.07.01-166 tanggal 1 Juli 2021), PPK (melalui surat Nomor PAS-KP.07.01-167 tanggal 1 Juli 2021) dan Pejabat Penguji Tagihan (melalui surat Nomor PAS-KP.07.01-168) tanggal 1 Juli 2021) yang tidak cermat dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.
3. Kelebihan pembayaran atas Pekerjaan Pembangunan LP Perempuan Kelas IIB Yogyakarta sebesar Rp186.768.186,96,00, yang terdiri dari (a).penyesuaian harga pemasangan lampu downlight sebesar Rp36.097.182,00 dan (b).Kelebihan pembayaran atas selisih kurang volume pekerjaan sebesar Rp150.671.0004,96. Aset telah dikoreksi sesuai dengan jumlah temuan dan seluruh kelebihan pembayaran telah di tindaklanjuti dengan rincian sebagai berikut:

No	Tanggal Penyetoran	NTPN	Jumlah Pembayaran (Rp)	Terhutang pada Neraca
	31-Dec-20	Temuan Pemeriksaan		186.768.187,00
1	23-Jun-21	C62517QLTT8H2H7S.	30.000.000	
2	31-Aug-21	A3A7D61QU89T7VNN	150.000.000	
3	7-Sep-21	DC02E55DEDPQ4EE3	6.768.187	
Total Pembayaran			186.768.187	
Sisa Piutang PNB 31 Desember 2021				186.768.187,00

4. Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin berupa pengadaan Bus Pemindahan Narapidana pada Direktorat Jenderal Pemasarakatan Tidak Sesuai Ketentuan dan Terjadi Kelebihan Bayar Sebesar Rp3.871.876.822,00 telah ditindaklanjuti dengan:
- a. Menarik kelebihan pembayaran sebesar Rp3.871.876.822,00 tanggal Tgl 30 Juni 2021 dengan NTPN 914B548VUIV5R6QU.
 - b. Direktur Jenderal Pemasarakatan memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada masing-masing KPA (melalui surat Nomor PAS-KP.07.01-163 tanggal 1 Juli 2021), Pokja Pemilihan (melalui surat Nomor PAS-KP.07.01-165 tanggal 1 Juli 2021), dan PPK (melalui surat Nomor PAS-KP.07.01-163 tanggal 1 Juli



- 2021) terkait yang kurang cermat dalam menjalankan tugas dan fungsinya; dan
- c. Melalui surat nomor PAS1.PB.05.01-4299 tanggal 15 November 2021 tentang Tindak Lanjut Temuan Pemeriksaan atas LK 2020, telah diinstruksikan kepada 100 satker penerima Bus Pemandangan Narapidana untuk melakukan koreksi harga perolehan aset.
 5. Pengadaan Gembok pada Direktorat Jenderal Pemasyarakatan yang terlambat belum dikenakan denda sebesar Rp277.351.360,00 yang telah ditindaklanjuti seluruhnya dengan pembayaran sebagai berikut:
 - a. sebesar Rp251.050.800,00 tanggal 12 April 2021 dengan NTPN 9C7DC7QLTT24GEAM,
 - b. sebesar Rp26.300.560,00 tanggal 25 Mei 2021 dengan NTPN 5B4551JNF34SEL99.
 6. Pengelolaan Persediaan pada Beberapa Satuan Kerja Kemenkumham Tidak Tertib karena terdapat sembilan satker tidak membuat berita acara stock opname dan persediaan yang disajikan dalam neraca 31 Desember 2020 tidak berdasarkan Hasil Inventarisasi Fisik (Stock Opname), atas temuan pemeriksaan ini, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan telah menindaklanjuti sebagai berikut:
 - a. Sekretaris Direktorat Jenderal Pemasyarakatan melalui surat nomor Nomor PAS1.KP..07.01-06 tanggal 1 Juli 2021 memberikan sanksi kepada Pengurus Barang/Operator Persediaan yang belum melaksanakan penatausahaan persediaan secara optimal;
 - b. Sekretaris Direktorat Jenderal Pemasyarakatan melalui surat nomor Nomor PAS1.KP..07.01-07 tanggal 1 Juli 2021 memberikan sanksi kepada Kepala Bagian Bagian Pengelolaan BMN;
 - c. Sekretaris Direktorat Jenderal Pemasyarakatan melalui surat nomor Nomor PAS1.KP..07.01-05 tanggal 1 Juli 2021 menegur Kepala satuan kerja di lingkungan Ditjen Pas selaku KPA/B yang belum optimal dalam melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap penatausahaan persediaan.
 - d. Sekretaris Direktorat Jenderal Pemasyarakatan melalui surat nomor Nomor Nomor PAS1.KP.04.01-2083. tanggal 1 Juli 2021 menginstruksikan kepada masing-masing Kepala Satuan Kerja terkait untuk melaksanakan inventarisasi fisik persediaan per tanggal 31 Desember sebagai dasar penyajian nilai persediaan di Neraca.

Tindak Lanjut Temuan PDTT TA 2020 Direktorat Jenderal Pemasyarakatan

BPK melalui Laporan Hasil Pemeriksaan atas Pelaksanaan Anggaran Kegiatan Belanja Barang, Belanja Modal dan Layanan Tahun Anggaran



2019 dan Semester I 2020 pada Direktorat Jenderal Pemasyarakatan nomor 222/HP/XIV/12/2020 tanggal 31 Desember 2020 mendapatkan Temuan Pemeriksaan sebagai berikut:

1. Layanan Asimilasi dan Integrasi pada Ditjen Pemasyarakatan Belum Dilaksanakan Secara Akurat dan Memadai, hal ini telah ditindaklanjuti dengan dikeluarkannya Nota Dinas Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor PAS/93/VI/2021 Tanggal 1 Juni 2021 menginstruksikan Sekretaris Ditjenpas, Dir Pelayanan Tahanan dan Pengelolaan Basan Baran Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Dir Pembinaan Narapidana dan Latihan Kerja Produksi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Dir. Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, & Dir, Teknologi Informasi dan Kerjasama Direktorat Jenderal Pemasyarakatan untuk:
 - a. Melakukan upaya peningkatan kemampuan petugas UPT Pemasyarakatan yang bertindak selaku operator SDP dalam melakukan pengisian data dan informasi WBP dalam aplikasi SDP;
 - b. Memperbaiki sistem database WBP dan layanan integrasi dalam aplikasi SDP agar dapat secara otomatis mendeteksi status WBP dan menambah pengendalian dalam pemberian layanan asimilasi;
2. Pengurusan Izin dan Pendistribusian Senjata Tahun Anggaran 2019 pada Ditjen Pemasyarakatan Tidak Sesuai dengan Ketentuan, hal ini telah ditindaklanjuti sebagai berikut:
 - a. Atas denda Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan yang Belum Ditetapkan telah disetor ke kas negara sebesar Rp67.983.300,00 pada tanggal 16 Februari 2021 dengan NTPN 6A2D76U8E29VLFUN
 - b. Direktur Jenderal Pemasyarakatan melalui surat Nomor PAS-KP.07.01-143 Tanggal 1 Juni 2021, Memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada PPK 2 yang tidak cermat dalam melakukan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan;
 - c. Direktur Jenderal Pemasyarakatan melalui nota dinas Nomor PAS/90/VI/2021 Tanggal 1 Juni 2021 menginstruksikan Sekretaris Direktorat Jenderal Pemasyarakatan bersama sama dengan Direktur Keamanan dan Ketertiban, Direktur Teknologi Informasi dan Kerjasama dan Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Jenderal Pemasyarakatan untuk mengupayakan pembuatan kesepakatan dengan POLRI sebagai sesama institusi negara terkait pengurusan senjata. Berdasarkan hasil rapat intern ditemukan bahwa Terdapat Pedoman Kerja Pelaksanaan Kerjasama Kumham dan POLRI tentang kerjasama penyelenggaraan tugas dan fungsi pemasyarakatan nomor PAS-05.HM.05.02 tahun 2016 dan Nomor B/11/II/2016 tanggal



- pada BAB II Pelaksanaan, B. pengamanan 4. Izin senjata api non organik TNI / POLRI
3. Paket Pengadaan Seragam Taktikal Bagi Petugas Lembaga Masyarakatan Karang Anyar Nusakambangan Tahun Anggaran 2019 Tidak Sesuai dengan Ketentuan, tindak lanjut yang telah dilakukan sesuai rekomendasi adalah:
 - a. menarik dan menyetorkan kelebihan pembayaran atas kekurangan volume pekerjaan sebesar Rp53.280.700,00 dan telah disetorkan ke kas negara pada Tanggal 26 Feb 2021 dengan NTPN 9F1020N9V89J9FV4 sejumlah Rp33.280.700,00 dan pada tanggal Tanggal 2 Desember 2020 NTPN F41C70N9UVJLKFR8 sejumlah Rp20.000.000,00
 - b. Direktur Jenderal Masyarakatan melalui surat Nomor PAS-KP.07.01-142 Tanggal 1 Juni 2021 Memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada PPK 2 TA 2019 yang tidak cermat dalam melakukan pengawasan dan pengendalian kegiatan.
 - c. Direktur Jenderal Masyarakatan memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada Kabag BMN dan Umum (melalui surat Nomor PAS-KP.07.01-154 tanggal 1 juni 2021) serta kepada Sekretaris Ditjen Masyarakatan (melalui surat Nomor PAS-KP.07.01-141 Tanggal 1 Juni 2021) yang melaksanakan kegiatan yang belum tersedia anggarannya.
 4. Pengadaan Melalui Tender Cepat atas Enam Paket Pekerjaan pada Ditjen Masyarakatan TA 2019 Tidak Sesuai Ketentuan, telah dilakukan tindak lanjut sesuai rekomendasi sebagai berikut:
 - a. Direktur Jenderal Masyarakatan memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada KPA (melalui surat Nomor PAS-KP.07.01-153 Tanggal 1 Juni 2021) dan PPK 1 TA 2019 (melalui surat PAS-KP.07.01-144 tanggal 1 Juni 2021) yang tidak cermat dalam melakukan pengawasan dan pengendalian kegiatan;
 - b. Direktur Jenderal Masyarakatan memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada Pokja Pemilihan TA 2019 yang lalai dalam melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa melalui Tender Cepat berdasarkan surat- surat berikut Nomor PAS-KP.07.01.149 Tanggal 1 Juni 2021 untuk POKJA HT, Nomor PAS-KP.07.01-147 tgl 1 Juni 2021 Pokja Peralatan makan dan Minum, Nomor PAS-KP.07.01-148 tgl 1 Juni 2021 pokja matras, Nomor PAS-KP.07.01-150 tgl 1 Juni 2021 pokja matras, Nomor PAS-KP.07.01-151 tgl 1 Juni 2021 Pokja Senjata GAs Air mata, dan nomor PAS-KP.07.01-152 tgl 1 Juni 2021 untuk pokja spray bubuk merica.
 5. Proses Pengadaan Sewa CCTV pada Ditjen Masyarakatan TA 2019 dan 2020 Tidak Sesuai Ketentuan Mengakibatkan Kelebihan Pembayaran Sebesar Rp18.225.897,68, telah ditindaklanjuti sesuai rekomendasi sebagai berikut:



- a. menarik dan menyetorkan kelebihan pembayaran atas restitusi gangguan layanan periode Januari s.d. Juni 2020 ke Kas Negara sebesar Rp18.225.897,68 pada tanggal 11 Feb 2021 dengan NTPN FF5831JNF2RG3NNV.
 - b. Direktur Jenderal Pemasyarakatan melalui surat nomor PAS-KP.07.01-145 Tanggal 1 Juni 2021 memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada PPK 1 TA 2019 yang tidak cermat dalam melakukan pengawasan dan pengendalian kegiatan.
6. Kelebihan Pembayaran atas Pekerjaan Jasa Lainnya berupa Jasa Internet dan Nilai Restitusi Kurang Diperhitungkan Sebesar Rp6.302.539.511,00, tindak lanjut yang telah dilakukan adalah sebagai berikut:
- a. Menarik dan menyetorkan kelebihan pembayaran ke Kas Negara sebesar Rp6.113.720.442,00 Tanggal 11 Februari 2021 dengan NTPN 2A54D48VUIILAOO8.
 - b. Menarik restitusi gangguan layanan yang belum diperhitungkan dan disetor ke Kas Negara sebesar Rp188.819.069,00 Tanggal 11 Februari 2021 dengan NTPN E3BFD1JNF2RG3QGD.
 - c. Direktur Jenderal Pemasyarakatan melalui surat Nomor PAS-KP.07.01-146 Tanggal 1 Juni 2021 Memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada PPK 1 TA 2019 yang lalai dalam melakukan pengawasan dan pengendalian kegiatan.
 - d. Penyusunan SOP terkait perhitungan pembayaran Biaya Jasa Internet beserta restitusi gangguan layanan sampai dengan tanggal laporan 31 Desember telah disiapkan berupa DRAFT SOP yang masih dalam proses verifikasi oleh bagian perundang undangan Ditjenpas.

Tindak Lanjut Temuan PDTT TA 2021 Dilakukan Satuan Kerja Pemasyarakatan

BPK melalui Laporan Hasil Pemeriksaan atas Pelaksanaan Anggaran Kegiatan Belanja Barang, Belanja Modal dan Layanan Tahun Anggaran 2020 dan Semester I 2021 pada Kanwil DKI Jakarta, Sumatera Barat dan Nusa Tenggara Barat nomor 149/HP/XIV/12/2021 tanggal 31 Desember 2021 mendapatkan Temuan Pemeriksaan sebagai berikut:

1. Lapas Dompou
 - a. Pengadaan Belanja Modal Peralatan dan Mesin yang belum sesuai ketentuan sejumlah Rp89.069.466,66 yang telah ditindaklanjuti seluruhnya pada tanggal 14 Oktober 2021 dengan NTPN ED0716U8E31P29OJ.
 - b. Pembangunan dan renovasi Gedung Lapas IIB Dompou TA 2020 dengan CV. Orchid Marennu Engineering tidak sesuai ketentuan dan kekurangan volume pekerjaan sejumlah Rp31.793.904,00 berupa pekerjaan atap spandek



(Rp10.301.753,00); rangka atap baja ringan (Rp10.310.487,00); pekerjaan nok atap (Rp1.432.944,00); pekerjaan plafond wiremesh (Rp9.748.720,-) yang telah ditindaklanjuti seluruhnya pada tanggal 19 Oktober 2021 dengan NTPN ED98C8N3DO6HTO61.

2. Balai Pemasyarakatan Jakarta Timur/Jakarta Utara

Terdapat kekurangan volume pada pekerjaan perluasan dan renovasi gedung halaman pagar Bapas Jakarta Timur / Utara sejumlah Rp84.078.918,00 dan telah ditindaklanjuti dengan data sebagai berikut:

No	Tanggal Penyetoran	NTPN	Jumlah Pembayaran (Rp)	Terhutang pada Neraca
	1-Nov-21	Temuan Pemeriksaan		84.078.918,00
1	15-Nov-21	61AD055DEE0171M9	21.019.729,00	
2	16-Dec-21	DAB8B0N9V973AF2K	21.019.729,00	
Total Pembayaran			42.039.458,00	
Sisa Piutang PNPB 31 Desember 2021				42.039.460,00

Terhadap sisa piutang yang belum ditindaklanjuti diakui sebagai piutang pada neraca per 31 Desember 2021.

3. Rumah Sakit Pengayoman, Cipinang

Terdapat ketidakwajaran harga genset sejumlah Rp67.272.728,00 pada pekerjaan renovasi gedung dan bangunan layanan pendukung HCU Isolasi Covid-19. Sampai dengan 31 Desember 2021 temuan ini belum ditindaklanjuti dan diakui sebagai piutang lainnya pada neraca satker.

4. Rumah Tahanan Negara Kelas I Jakarta Pusat

Kegiatan pemeliharaan body scanner dan pengadaan alat test urine yang tidak dapat diyakini kewajarannya sebesar RP.415.025.500,00 BPK merekomendasikan agar Kepala Satker dapat menyampaikan bukti yang valid dan jaminan distributor, bila terdapat selisih maka harus disetorkan ke kas negara.

5. Lapas Perempuan Kelas II B Padang

Terdapat kekurangan volume pekerjaan sebesar Rp302.780.867,41 pada pekerjaan pembangunan Lapas Perempuan Kelas II B Padang yang belum ditindaklanjuti sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 dan diakui sebagai piutang pada neraca satker, yang terdiri dari:

- a. Kekurangan volume sejumlah Rp161.166.266,41 atas volume pekerjaan yang sudah dilaksanakan di lapangan;



- b. Kekurangan volume sebesar Rp141.614.601,00 atas volume pekerjaan yang belum dilaksanakan dilapangan, namun dalam laporan kemajuan fisik 100%.

Laporan Tindak Lanjut Temuan Pemeriksaan BPK Sampai Dengan Semester II 2021 di Lingkungan Satuan Kerja Pemasarakatan Direktorat Jenderal Pemasarakatan

A. Laporan Keuangan TA 2010

Tindak lanjut atas Hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan 2010 pada Lapas Kelas III Bekasi berupa jaminan pelaksanaan pekerjaan pembangunan yang belum dicairkan senilai Rp549.184.300,00, berdasarkan surat Kepala Kantor Wilayah Jawa Barat nomor W.11-PW.04.03-1390 tanggal 23 Maret 2016 kepada Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM hal Permohonan Penghapusan Hasil Temuan BPK Tahun 2010 dengan alasan bahwa:

- Jaminan tidak dapat dicairkan karena tidak dapat dipenuhinya persyaratan yang diminta oleh pihak Bank;
- Saat pemutusan kontrak, realisasi pembayaran 43% dengan realisasi fisik 43,95% dan sisa pekerjaan dilanjutkan tanpa tambahan anggaran, sehingga dalam hal ini negara tidak dirugikan;
- KPA dan PPK terkait pada pemeriksaan telah meninggal dunia.
- Sebagai tindak lanjut atas permohonan ini, Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM meminta agar Kanwil Jawa Barat bersurat kepada Team BPK untuk mengadakan Rekon Tripartit dalam rangka pengajuan usul penghapusan temuan pemeriksaan.

B. Laporan Keuangan TA 2015

Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK No.07/S/PD TT.Kumham/10/2015 tanggal 2 Oktober 2015, terdapat temuan pemeriksaan berupa adanya kelebihan pembayaran atas keuntungan yang tidak berhak diterima oleh PT.Karya Kamefada Wijaya Indonesia selaku penyedia konstruksi pembangunan blok hunian kapasitas 185 orang pada Lapas Way Kanan TA 2014 sejumlah Rp195.037.791,82.

Progress pembayaran atas kelebihan pembayaran tersebut terdapat pada tabel berikut:

No	Tanggal Penyetoran	NTPN	Jumlah Pembayaran (Rp)	Terhutang pada Neraca
0	2-Oct-15	Temuan Pemeriksaan		195.037.791,82
1	2015	AFC8D2R1J16QV28I	5.000.000,00	
2	2016	9221B6MJKGQ5TGS2	20.000.000,00	
3	2017	35BE37RVJ6530462	15.000.000,00	



4	2019	D47897QLTAT28I5R	7.500.000,00	
5	2020	4090955DE4LTIPAT	15.000.000,00	
6	2020	E31826U8DPR6T4K3	15.000.000,00	
7	20-Sep-21	315F36U8E26NMHUB	20.000.000,00	
8	2-Sep-21	237096U8E2UDJH3V	10.000.000,00	
9	14-Oct-21	6212248VUJAIOK2G	10.000.000,00	
Total Pembayaran			117.500.000,00	
Sisa Piutang PNPB 31 Desember 2021				77.537.791,82

Sisa piutang per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp77.537.792,00 telah dicatta sebagai piutang lainnya pada neraca satker.

C. Laporan Keuangan TA 2019

Atas Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2019 nomor 83B/HP/XIV/05/2020 tanggal 20 Mei 2020, yang masih proses tindak lanjut adalah:

Penguasaan Tanah Pulau Nusakambangan senilai Rp2.970.540.888.000,00 Belum didukung Sertifikat Hak Pakai.

Sampai dengan tanggal pelaporan telah diserahterimakan sertifikat 11 bidang tanah yaitu atas, tanah pada:

1. Bapas Nusakambangan
2. LP Narkotika Nusakambangan
3. LP Pasir Putih Nusakambangan
4. Lapas Kelas I Batu Nusakambangan
5. Lapas Kelas II A Besi Nusakambangan
6. Lapas Kelas II A Kembang Kuning Nusakambangan
7. Perumahan Lapas Kelas I Batu Nusakambangan
8. Perumahan Lapas Kelas IIA Besi Nusakambangan
9. Perumahan Lapas Kelas II A Kembang Kuning Nusakambangan
10. Rumah Susun Lapas Kelas I Batu Nusakambangan
11. Rumah Khusus / Tapak Lapas Kelas I Batu Nusakambangan

Proses sertifikasi bidang lainnya tetap dilakukan dengan kerjasama dengan KPKNL setempat melalui mekanisme program pengusulan sertifikasi tanah milik pemerintah Kementerian Keuangan.

Atas Laporan Hasil Pemeriksaan Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang - Undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2019 nomor 83c/HP/XIV/05/2020 tanggal 20 Mei 2020, yang di tindak lanjuti sampai dengan semester II 2021 adalah:

1. Kelebihan pembayaran pada pelaksanaan pekerjaan jasa konsultasi Perencanaan Pembangunan Gedung Lembaga



Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Samarinda TA 2017 oleh CV. Carabica Engineering senilai Rp203.046.000,00 rincian pembayaran yang telah dilakukan adalah sebagai berikut:

No	Tanggal Penyetoran	NTPN	Jumlah Pembayaran (Rp)	Terhutang pada Neraca
0	31-Dec-18	Temuan Pemeriksaan		203.046.000,00
1	15-Oct-18	908DB6VCD5JBD4JP	15.000.000,00	
2	28-Nov-18	797O887ENH7P8IH8	25.000.000,00	
3	8-Oct-19	4094455DDR8P8N8D	2.000.000,00	
4	28-Jan-20	3597E0N9UUSKLLNQ	6.000.000,00	
5	29-Jul-20	2FBA655DE4AF56ML	2.000.000,00	
6	14-Oct-20	A904B55DE4IU8K25	5.000.000,00	
7	18-Feb-21	F2C8361QU7NK7NA2	45.000.000,00	
8	13-Jul-21	B232F2G4UTSS54KM	5.000.000,00	
9	4-Aug-21	C4BC61JNF3D59CFS	5.000.000,00	
10	7-Sep-21	77C1C0N9V8TRU1D7	5.000.000,00	
11	12-Oct-21	0FE2B55DEDSPPF9E	5.000.000,00	
12	3-Nov-21	107667QLTTMPH2BE	5.000.000,00	
13	11-Nov-21	B6B8C61QU819DEBV	15.000.000,00	
14	13-Dec-21	EC0E00N9V96RI85S	5.000.000,00	
15	21-Dec-21	3CBCD6U8E37TCMSH	50.000.000,00	
Total Pembayaran			195.000.000,00	
Sisa Piutang 31 Desember 2021				8.046.000,00

Sisa piutang per 31 Desember 2021 sejumlah Rp8.046.000,00 telah diakui sebagai piutang lainnya pada neraca satuan kerja.

- Kelebihan Pembayaran Biaya Langsung Non Personel Senilai Rp65.905.500,00 pada pelaksanaan Paket Pekerjaan Jasa Konsultansi pada Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Kendari yang tidak sesuai Ketentuan telah disetorkan seluruhnya ke kas negara seluruhnya dengan rincian sebesar Rp30.905.500,00 pada tanggal 4 Juni 2020 dengan NTPN 81E3355D E460 DGML, dan sebesar Rp35.000.000,00 pada tanggal 20 Mei 2021 dengan NTPN ECC556U8E2J0MN3D.
- Denda Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan sebesar Rp24.744.636,36 atas Pekerjaan Pembangunan Sarana Gedung LPKA Kelas II Kendari TA 2019 telah disetorkan seluruhnya pada tanggal 30 Januari 2021 sebesar Rp24.744.636,36 dengan NTPN 6E0818N3DNC68VP9.

Atas Laporan Hasil Pemeriksaan atas Pelaksanaan Anggaran Kegiatan Belanja Barang dan Belanja Modal TA 2017 dan semester I TA 2018 nomor 88/HP/XIV/10/2018 tanggal 20 Mei 2018, pada Lapas Kelas II A Tarakan terdapat kelebihan pembayaran atas paket



pekerjaan konstruksi pembangunan dan renovasi gedung dan bangunan senilai Rp49.575.185,18 yang telah ditindaklanjuti seluruhnya pada tanggal 10 Maret 2021 dengan NTPN 26FC56U8E2CO19GL sejumlah Rp49.565.185,00 dan pada tanggal 24 Maret 2021 sejumlah Rp10.000,00 dengan NTPN 076206U82D7ITUR.

F.4.6. Temuan Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut pada Direktorat Jenderal Imigrasi

A. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Belum Menindaklanjuti Rekomendasi atas Permasalahan Tanah Direktorat Jenderal Imigrasi di Kabupaten Sumba Tengah

Terhadap TP BPK terkait rekomendasi atas permasalahan tanah Direktorat Jenderal Imigrasi di Kabupaten Sumba Tengah telah ditindaklanjuti dengan diterbitkannya Surat Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor: IMI-3379.KP.04.01 Tahun 2020 tentang Tim Penyelesaian Permasalahan Tanah Milik Direktorat Jenderal Imigrasi di Kabupaten Sumba Tengah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan telah dibuat jadwal tahapan (*timeline*) penyelesaian permasalahan tanah milik Direktorat Jenderal Imigrasi di Kabupaten Sumba Tengah.

Berdasarkan progres penyelesaian tindak lanjut terkait penyelesaian permasalahan BMN, diketahui bahwa rekomendasi BPK masih dalam proses tindak lanjut. Berdasarkan Nota Dinas Direktur Jenderal Imigrasi No. IMI-UM.01.01-4418 tanggal 15 September 2020 terhadap temuan 5.000 Ha tanah milik Direktorat Jenderal Imigrasi di Kabupaten Sumba Tengah akan dilakukan tindak lanjut penyelesaian dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 236
Penyelesaian Permasalahan Tanah Yang Sudah Diokupasi

No.	Tujuan Penggunaan Lahan	Alternatif Penyelesaian	Pihak Yang Menggunakan	Luas (Ha)
1	Pemukiman masyarakat Ex. Timor Leste yang memilih NKRI pada saat referendum	Hibah	Masyarakat setempat	500
2	Pemukiman Transmigrasi Lokal	Hibah		800
3	Fasilitas Sosial berupa sekolah & gereja	Hibah		1.250
4	Perkebunan Coklat, Perkebunan Kopi, Kelapa Jati, dan Mahoni	Pinjam Pakai	Pemerintah Daerah	100
5	Peternakan sapi	Pinjam Pakai	Kabupaten	500
6	Proyek perlindungan hutan	Pinjam Pakai	Sumba Tengah	76,1



Total Penggunaan Lahan Oleh Pihak Lain	3.226,1
Sisa Lahan	1.773,9

Tabel 237
Penyelesaian Permasalahan Tanah Yang Belum Diokupasi

No.	Permohonan Lahan	Alternatif Penyelesaian	Pihak Yang Menggunakan	Luas (Ha)
1	Permohonan tanah untuk TNI AU El Tari	Alih Status	TNI AU El Tari	175
2	Permohonan tanah untuk TNI AD (Kodam IX/Udayana)	Alih Status	TNI AD (Kodam IX/Udayana)	150
3	Permohonan tanah untuk POLDA NTT	Alih Status	POLRI	200
4	Permohonan tanah untuk pengembangan ranch peternakan sapi dan perkebunan rakyat	Sewa	Drs. Umbu Sappi P. (pensiunan Bupati)	1000
5	Permintaan alih status sebagian aset tanah untuk Kementerian Pertahanan	Alih Status	Kementerian Pertahanan	150
Total Penggunaan Lahan Oleh Pihak Lain				1675
Total Akhir Sisa Lahan Ditjenim				98,9

Adapun sisa akhir lahan di atas tanah milik Direktorat Jenderal Imigrasi di Kabupaten Sumba Tengah yang belum memiliki perencanaan tindak lanjut pengelolaan Barang Milik Negara adalah seluas 98,9 Ha. Atas sisa lahan seluas 98,9 hektar tersebut dapat digunakan internal untuk kepentingan menunjang pelaksanaan tugas fungsi Kementerian Hukum dan HAM, namun jika tidak terdapat perencanaan penggunaan, maka dapat diusulkan untuk dilaksanakan alih status kepada Kementerian Pertahanan.

F.4.7. Tindak Lanjut Temuan Pemeriksaan BPK Pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual sebagai salah satu unit kerja di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI tidak terlepas dari pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Penyelesaian Temuan BPK RI pada Ditjen KI berdasarkan Surat Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan HAM Nomor ITJ.PW.04.03-1 tanggal 28 Januari 2022 perihal Penyampaian Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Pemeriksaan BPK RI Semester II 2021 pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia adalah sebagai berikut:



NO	JUDUL LHP	TAHUN LHP	REKOMENDASI		HASIL MONITORING TL SMT II TAHUN 2021					
					SESUAI		BELUM SESUAI		BELUM TINDAK LANJUT	
			jml	nilai	jml	nilai	jml	nilai	jml	nilai
1	LHP 2013 atas LK TA 2012	2013	13	0,00	12	0,00	0	0,00	1	-
2	LHP 2021 atas LK TA 2020	2021	10	3.913.198.382,00	6	1.039.610.012,00	4	2.819.588.370,00	0	-
3	PDTT Paten BDH Tahun 2016	2016	11	0,00	10	0,00	1	0,00	0	-
4	PDTT PNBPA TA 2013-2014	2014	2	2.482.500.000,00	1	362.900.000,00	1	2.119.600.000,00	0	-
5	PDTT Kinerja Paten 2018	2018	35	0,00	23	0,00	12	0,00	0	-
TOTAL			71	6.395.698.382,00	52	1.402.510.012,00	18	4.939.188.370,00	1	-

- d. Terdapat 52 rekomendasi yang telah berstatus sesuai dengan nilai temuan sebesar Rp1.402.510.012,00.
- e. Terdapat 18 rekomendasi yang berstatus belum sesuai sebesar Rp4.939.188.370,00 dengan rincian:
- LHP 2021 atas LK 2020:
 - a. Rekomendasi "Memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada masing-masing KPA, Pokja Pemilihan, dan PPK terkait yang kurang cermat dalam menjalankan tugas dan fungsinya". Ditjen KI telah menindaklanjuti temuan tersebut dengan Nota Dinas Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Nomor HKI-PW.04.04-32 tanggal 19 Agustus 2021 perihal Teguran kepada KPA, PPK dan Pokja Pengadaan Peralatan Conference System TA 2020 dan Nota Dinas Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Nomor HKI-PW.04.04-34 tanggal 19 Agustus 2021 perihal Teguran kepada KPA dan PPK dan Pokja Pengadaan Upgrade Memory Server Fujitsu 3800E TA 2020. Namun tindak lanjut tersebut tidak memenuhi rekomendasi dikarenakan teguran yang diberikan adalah untuk Pokja Pengadaan,
 - b. Rekomendasi "Mempertanggungjawabkan kelebihan pembayaran atas penggunaan BBM pada Itjen dan Ditjen KI dengan menyetorkan ke Kas Negara sebesar Rp301.354.859,00 dan menyampaikan copy bukti setornya kepada BPK". Nilai yang harus disetorkan oleh Ditjen KI



adalah sebesar Rp252.398.382,00. Pada 29 September 2021, Ditjen KI telah menyetorkan ke kas negara sebesar Rp93.610.012,00 dengan NTPN 2152548VUJ835170. Atas sisa kewajiban pengembalian sebesar Rp158.788.370,00, Ditjen KI telah menyerahkan data dukung berupa rincian penggunaan Bahan Bakar yang kurang jelas nama penggunaannya serta Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-110.PB.02.07 tahun 2021 tentang Penggunaan Sewa Kendaraan Dinas dan Fasilitas Bahan Bakar Bagi Pimpinan Tinggi di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM dimana Ditjen KI selaku Unit Eselon I penghasil PNPB dapat memberikan fasilitas penggunaan kendaraan sewa dan bahan bakarnya kepada pimpinan Eselon I Lain di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM dan keputusan tersebut berlaku surut sejak tanggal 01 Januari 2019.

- c. Rekomendasi ”Menginstruksikan kepada PPK terkait mempertanggungjawabkan kelebihan pembayaran sebesar Rp3.660.800.000,00 dengan melakukan penyetoran ke kas negara, dan menyampaikan copy bukti setornya kepada BPK”. Temuan tersebut terkait dengan kelebihan pembayaran atas pengadaan upgrade memory server Fujitsu 3800E TA 2020. Pada 4 November 2021, Ditjen KI menyetorkan ke Kas Umum Negara sebesar Rp1.000.000.000,00 dengan NTPN 9888A7QLTTMOF21Q. Selain itu, Ditjen KI telah memberikan dokumen-dokumen lainnya sebagai data dukung untuk tindak lanjut atas temuan dimaksud.
- d. Rekomendasi ” Melakukan inventarisasi kembali atas ATB yang dimiliki dan dikuasainya untuk menentukan status penggunaan dan melakukan update daftar barang serta melakukan penyesuaian pencatatan dan penyajian dalam LK Kemenkumham”. ATB yang berstatus tidak digunakan dengan alasan yang belum dijelaskan pada Ditjen KI adalah sebesar Rp9.794.923.532,00. Ditjen KI telah menindaklanjuti temuan tersebut dengan Nota Dinas Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Nomor HKI-PW.04.04-31 tanggal 19 Agustus 2021 perihal Perintah kepada Kuasa Pengguna Barang Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual untuk menginventarisasi kembali ATB untuk menentukan Status penggunaan dan melakukan pembaharuan daftar barang guna keakuratan penyajian dalam Laporan Keuangan.

Upaya lain yang telah dilakukan oleh Ditjen KI adalah dengan mengajukan status penghentian penggunaan aktif BMN atas 5 (lima) ATB berupa Software Komputer dan atas hal tersebut telah dikoordinasikan dengan BPK RI.



- PDTT PNBPA TA 2013-2014
Nilai pengembalian pada PDTT PNBPA tahun 2013-2014. Atas pengembalian tersebut adalah sebesar Rp2.119.600.000,00 dengan rekomendasi “Menagih pembayaran PNBPA biaya penerbitan sertifikat kepada pemohon sertifikat hak kekayaan intelektual senilai Rp2.469.500.000,00 dan menyetorkannya ke Kas Negara”. Atas temuan tersebut, pada kegiatan Pembahasan Tindak Lanjut Temuan Pemeriksaan BPK pada 5 s.d. 8 Oktober 2021 disetujui untuk dapat diajukan menjadi rekomendasi yang tidak dapat ditindaklanjuti dengan alasan yang sah. DJKI disarankan untuk melakukan permohonan penghapusan rekomendasi melalui surat Menteri Hukum dan HAM kepada Anggota BPK disertai justifikasi dan analisa pendukung yang memadai.
 - Rekomendasi yang belum selesai lainnya adalah temuan kinerja dimana 1 (satu) rekomendasi merupakan rekomendasi pada PDTT Paten BDH Tahun 2016 dan 12 (dua belas) rekomendasi merupakan rekomendasi pada PDTT Kinerja Paten Tahun 2018.
- f. Terdapat 1 (satu) rekomendasi yang bersatus belum ditindaklanjuti yaitu rekomendasi pada LHP Tahun 2013 atas Laporan Keuangan Tahun 2012 dengan temuan “Indikasi Pengaturan Pemenang Lelang pada Proses Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Kemenkumham Tahun 2012” dengan rekomendasi “Mengenakan sanksi kepada masing-masing penyedia barang/jasa dan peserta lelang yang melakukan indikasi pengaturan untuk memenangkan pelelangan untuk dimasukkan dalam daftar hitam (black list)”. Rekomendasi tersebut sedang dalam proses pembahasan bersama dengan Sekretariat Jenderal.

F.5. Tindak Lanjut Catatan Hasil Review (CHR) Inspektorat Jenderal

A. Sekretariat Jenderal

1. Kanwil Aceh

Berdasarkan temuan Itjen nomor ITJ.2.PW.03.01-15/II/2021 tanggal 13 Februari 2021 hal Laporan Hasil Audit Pengelolaan Keuangan pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Aceh Tahun Anggaran 2020, terdapat temuan Itjen atas Kekurangan Volume Pekerjaan Rumah Dinas Kabid 1 dan rumah dinas Kabid 2 sebesar Rp1.081.735,00.

Terhadap temuan tersebut, telah dilakukan penyetoran ke kas negara sebesar Rp1.081.735,00 untuk pekerjaan urugan rumah dinas Kabid 1 dan rumah dinas Kabid 2 serta telah dilakukan koreksi pencatatan pada aplikasi SIMAK berupa Rumah Negara Golongan I Tipe D Permanen NUP 17 dengan nilai koreksi



Rp643.330 dan Rumah Negara Golongan I Tipe D Permanen NUP 18 dengan nilai koreksi Rp438.405.

2. Kanwil Sumatera Barat

Terdapat Koreksi Pencatatan Nilai BMN atas barang Penyemprot mesin akibat selisih harga yang timbul atas ketidaksesuaian barang yang dikirim penyedia semula Rp1.747.000 menjadi Rp1.659.680 sehingga per tiap unit barang dikoreksi sebesar Rp87.320 untuk 100 unit yang terdiri atas BMN yang tercatat pada Kantor Wilayah dan BMN pada satuan kerja (Koreksi dilakukan oleh masing-masing satker hasil transfer masuk dari Kanwil pada tahun 2020).

3. Kanwil Jambi

- Terdapat koreksi perubahan nilai aset gedung bangunan sebesar Rp300.000,00 yang dilakukan tanggal 2 juni 2021, hal ini terkait temuan ITJEN atas kelebihan bayar honor peneliti kontrak pada gedung kantor.
- Terdapat penghapusan mobil Toyota KF Long yang telah diteliti bahwa BMN tersebut fisiknya sudah tidak ada lagi, namun masih tercatat sehingga diketahui terjadi proses double catat pada saat penginputan pertama kali ke SIMAK BMN, data dukung penghapusan 2 mobil dinas tersebut juga dibuktikan dengan salinan risalah lelang BMN yang tersebut serta dituangkan dalam berita acara koreksi pencatatan No. W.5-PB.06.04-18.

4. Kanwil Sumatera Selatan

Terhadap temuan hasil audit Itjen pada Kanwil sumatera Selatan Nomor ITJ.PW.03.01.V-08 tanggal 09 Maret 2021 terkait pengembalian belanja modal berupa renovasi gedung dan rumah negara tahun 2020 sudah dilakukan koreksi nilai atas BMN dimaksud sebesar Rp14.250.834.

5. Kanwil Nusa Tenggara Barat

Temuan Itjen terkait Pengadaan Barang dan Jasa Pembangunan dan Renovasi Gedung Kantor Wilayah Kemenkumham NTB TA 2020 yang tertuang dalam surat Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan HAM RI Nomor ITJ.PW.03.01.II-02 tanggal 22 Januari 2021 hal Tindak Lanjut Hasil Audit Pengadaan Barang dan Jasa Pembangunan dan Renovasi Gedung Kantor Wilayah Kemenkumham NTB TA 2020 telah ditindaklanjuti dengan:

- penyetoran ke kas negara sebesar Rp2.437.500,00 atas kelebihan pembayaran Biaya Langsung Non Personil berupa Sewa Komputer dan Printer Pekerja Jasa Konsultasi



Perencanaan yang dikarenakan CV Danasady Consultant telah memiliki peralatan tersebut;

- penyetoran ke kas Negara sebesar Rp1.400.000,00 atas kelebihan pembayaran Biaya Langsung Non Personil berupa yang tidak ada bukti pertanggungjawaban berupa Dokumentasi oleh PT Sulapaappa Media Utama selaku Konsultan Manajemen Konstruksi;
- penyetoran ke kas Negara sebesar Rp699.464,00 atas kelebihan pembayaran kepada PT. Mardika Griya Prasta selaku penyedia jasa konstruksi fisik bangunan atas pekerjaan yang tidak dilaksanakan berupa pasangan dan finishing dinding pada lantai LG, lantai 1 dan lantai 2; dan
- melakukan koreksi perubahan nilai/kuantitas barang milik negara berupa Bangunan Gedung Kantor Permanen NUP 7 pada Aplikasi SIMAK BMN senilai Rp4.536.964,00.

6. Kanwil Nusa Tenggara Timur

- Temuan Inspektorat tahun 2016 berupa kelebihan pembayaran honor pengajar Kegiatan Diklat Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Tindak lanjutnya penyetoran kembali kelebihan pembayaran tersebut ke kas Negara senilai Rp5.465.00,00 pada Semester I TA 2021 dan telah dilakukan penyetoran di TA 2021;
- Temuan Inspektorat Jenderal tahun 2021 berupa kekurangan volume fisik pekerjaan yang terpasang atas pekerjaan pembangunan Sumur Bor Kantor sebesar Rp5.250.00,00. Tindak lanjutnya penyetoran Kembali ke Kas Negara oleh penyedia CV Jusaera Jaya pada Semester I TA 2021 senilai Rp5.250.00,00 dan sudah dilakukan koreksi nilai pada SIMAK BMN 31 Desember 2021 senilai Rp5.250.00,00;
- Temuan Inspektorat Jenderal tahun 2021 berupa kekurangan volume fisik pekerjaan yang terpasang atas pekerjaan pembangunan pagar keliling Kantor sebesar Rp13.562.915,00. Tindak lanjutnya penyetoran Kembali ke Kas Negara oleh penyedia CV Sola Kristi senilai Rp13.562.915,00 pada Semester I TA 2021 dan sudah dilakukan koreksi nilai pada SIMAK BMN 31 Desember 2021 dengan nilai Rp13.562.915,82;
- Temuan Inspektorat Jenderal tahun 2021 berupa kelebihan pembayaran atas jasa konsultan perencanaan rehabilitasi pagar keliling kantor dan pembuatan halaman parkir kantor sebesar Rp7.475.000,00. Tindak lanjutnya penyetoran Kembali ke Kas Negara oleh penyedia CV Galang Mitra Sejahtera senilai Rp7.475.000,00 pada Semester I TA 2021



dan sudah dilakukan koreksi nilai pada SIMAK BMN 31 Desember 2021 senilai Rp7.475.000,00;

- Temuan Inspektorat Jenderal tahun 2021 berupa kelebihan pembayaran atas jasa konsultan perencanaan pembangunan Sumur Bor kantor sebesar Rp4.275.000,00. Tindak lanjutnya penyetoran Kembali ke Kas Negara oleh penyedia CV Loka Pratama senilai Rp4.275.000,00 pada Semester I TA 2021 dan sudah dilakukan koreksi nilai pada SIMAK BMN 31 Desember 2021 senilai Rp4.275.000,00;
- Temuan Inspektorat Jenderal tahun 2021 berupa kelebihan pembayaran atas biaya non personil jasa konsultan pengawas rehabilitasi pagar keliling kantor, pembuatan halaman parkir, dan pembangunan Sumur Bor sebesar Rp1.890.000,00. Tindak lanjutnya penyetoran Kembali ke Kas Negara oleh penyedia CV Multi Karya Permanen senilai Rp1.890.000,00 pada Semester I TA 2021. Sudah dilakukan koreksi nilai pada SIMAK BMN 31 Desember 2021 senilai Rp1.890.000,00.

7. Kanwil Banten

Terdapat temuan itjen berupa pengembalian belanja modal renovasi Gedung dan Bangunan sebesar Rp4.088.500,00 dan Rp1.192.500,00 dan sudah disetorkan ke Kas Negara serta telah dilakukan koreksi pencatatan Nilai/kuantitas pada SIMAK BMN.

8. Kanwil Gorontalo

Terdapat temuan Itjen terkait Pengadaan Barang dan Jasa pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Gorontalo nomor ITJ.7PW.03.01/I/2021 tanggal 22 Januari 2021, dan sudah dilakukan pengembalian atas hasil temuan sebesar Rp24.573.030,00, pada aplikasi simak telah dilakukan perubahan atas nilai Gedung dan bangunan renovasi tersebut dengan nilai Rp24.573.030,00.

9. Kanwil Sulawesi Barat

Pada Hasil Reviu Pekerjaan Penambahan Nilai Gedung pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (667790) dengan Nomor: ITJ.PW.05.01.IV.-35, terdapat pengembalian belanja (53) Gedung Bangunan pada Divisi Adminitrasi Kanwil Kemenkumham Sulbar (013.01.3400.000.KD) di tahun berjalan sebesar Rp12.309.000,00 (dua belas juta tiga ratus sembilan ribu rupiah). Tindak lanjut mengenai hal tersebut sudah dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku dan sudah dicatat koreksi nilai KDP pada aplikasi SIMAK dan sudah dicatat pengembalian pada aplikasi SAIBA.



B. Direktorat Jenderal AHU

1. Aset Tetap berupa Aset Rumah Negara yang masih terdapat kekurangtertiban dalam pengelolaan aset rumah negara pada satuan kerja di lingkungan Direktorat Jenderal AHU.

Tindak lanjut penertiban rumah negara:

Telah dilakukan tindak lanjut atas temuan Inspektorat Jenderal terkait aset rumah negara dengan menyusun konsep surat kepada penghuni Rumah Negara yang bukan pegawai Direktorat Jenderal AHU. Berikut rincian pengelolaan aset rumah negara pada satuan kerja di lingkungan Direktorat Jenderal AHU:

- a. unit rumah negara pada satuan kerja Direktorat Jenderal AHU sebesar Rp454.873.000,00 masih merupakan rumah negara golongan II belum dilakukan reklasifikasi ke rumah negara golongan I, yaitu 3 unit Rumah Negara Golongan II Tipe C Permanen sebesar Rp352.814.000,00 dan 1 unit Rumah Negara Golongan II Tipe D sebesar Rp102.059.000,00.
- b. Terdapat 4 unit rumah negara pada satuan kerja Direktorat Jenderal AHU yang saat ini dihuni oleh pihak yang tidak berhak dan surat izin penghunian negara belum pernah diperbaharui, yaitu:
 - Rumah negara golongan II tipe D luas 50 M2 berlokasi di Jl. Pengayoman Utara VII D/29, Tanah Tinggi, Tangerang dihuni Arif Syamsuddin, pegawai Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual.
 - Rumah negara golongan II tipe C luas 70 M2 berlokasi di Jl. Kumdang II nomor C/7, Tanah Tinggi, Tangerang dihuni Othman Nasution, S.H., pensiunan pegawai Biro Perencanaan Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM.
 - Rumah negara golongan II tipe C luas 70 M2 berlokasi di Jl Gading Raya Kav 416 Pondok Bambu, Jakarta Timur dihuni Amru Walid Batubara, Kadiv Pelayanan Hukum dan HAM di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Barat.
 - Rumah negara golongan II tipe C luas 50 M2 berlokasi di Jl. Kumdang I nomor 11, Tanah Tinggi, Tangerang dihuni oleh Irchamni Chabiburachman, SH. MH., pensiunan pegawai Inspektorat Jenderal.
- c. Rumah negara pada satuan kerja Direktorat Jenderal AHU, yang terletak di Kampung Tanah Tinggi No. 7 Kec Tangerang Kota Tangerang, yang sudah dialihkan menjadi rumah negara golongan III berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Cipta Karya Nomor:66/KPTS-RN/DC/2011



- tentang Pengalihan Status Rumah Negara Golongan II menjadi Rumah Negara Golongan III, tetapi berdasarkan dokumen Surat Direktur Jenderal AHU dan Surat Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM perihal Persetujuan Pengalihan Status Rumah Negara Golongan II menjadi Rumah Negara Golongan III hal tersebut tidak dapat disetujui. Saat ini rumah tersebut dihuni oleh Othman Nasution, S.H., pensiunan pegawai Biro Perencanaan Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM dan masih dalam status Ijin Penghunian Rumah Negara bukan Ijin Pembelian Rumah Negara.
- d. Rumah negara pada satuan kerja Direktorat Jenderal AHU, yang terletak di Kampung Tanah Tinggi No. 11 Kec Tangerang Kota Tangerang, yang sudah dialihkan menjadi rumah negara golongan III berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Cipta Karya Nomor:505/KPTS-RN/DC/2010 tentang Pengalihan Status Rumah Negara Golongan II menjadi Rumah Negara Golongan III, tetapi berdasarkan dokumen Surat Direktur Jenderal AHU dan Surat Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM perihal Persetujuan Pengalihan Status Rumah Negara Golongan II menjadi Rumah Negara Golongan III hal tersebut tidak dapat disetujui. Saat ini rumah tersebut dihuni oleh Irchamni Chabiburachman, SH. MH., pensiunan pegawai Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM dan masih dalam status Ijin Penghunian Rumah Negara bukan Ijin Pembelian Rumah Negara.
- e. Atas poin-poin di atas untuk kelengkapan dokumen kedua Rumah Negara Gol. III tersebut berupa Salinan Surat Keputusan (SK) Rumah Negara Gol. III dan Surat Ijin Penghunian (SIP) Gol. III Direktorat Jenderal Administrasi telah membuat Surat Permohonan Permintaan Salinan dokumen tersebut kepada Direktur Bina Penataan Bangunan Ditjen Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor AHU.1.UM.01.01-337 tanggal 18 Februari 2020 hal Permohonan Dokumen dan Rekon Rumah Negara. Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum terhadap 2 (dua) unit Rumah Negara Gol. III tersebut akan dilakukan Alih Pencatatan Rumah Negara Gol. III Huruf Daftar Nomor (HDNo) AA. 57372 an. Irchamni Chabiburachman dan AA.57514 an. Othman Nasution melalui Berita Acara Serah Terima Alih Pencatatan Barang Milik Negara berupa Rumah Negara Golongan III antara Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum dengan atas nama Satuan Kerja



Direktorat Bina Penataan Bangunan selaku Kuasa Pengguna Barang Berupa Rumah Negara Golongan III Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

- f. Telah dikirimkan Surat Perihal Penertiban Barang Milik Negara Berupa Rumah Dinas Nomor AHU.1.UM.01.01-3937 tertanggal 11 Desember 2019. Surat dikirimkan kepada Bapak Amru Walid Batubara, S.H., M.H. dan Bapak Ir. Arif Syamsudin, S.H., M.Si. Tindak lanjut surat tersebut adalah adanya pembayaran sewa atas Rumah Negara dengan rincian sebagai berikut:
- g. Telah diterima Nota Dinas nomor ITJ.4.PW.06.03-886/XI/2020 perihal Permintaan Klarifikasi atas Pengaduan an. Arif Syamsudin pegawai Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum. Surat berisikan terkait dengan permintaan klarifikasi dan penjelasan mengenai pengaduan an Arif Syamsudin pegawai Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum terkait permohonan perubahan status rumah dinas an. Arif Syamsudin dari golongan II menjadi golongan III dalam waktu yang tidak terlalu lama.
- h. Telah diberikan Klarifikasi dan Penjelasan atas Pengaduan an Ir. Arif Syamsudin pada Nota Dinas No.AHU.PB.04.04-1 yang berisi hal bahwa yang bersangkutan sudah melunasi pajak bumi dan bangunan (PBB), tagihan listrik, PAM dan telepon serta tidak pernah menunggak pembayaran kewajiban sewa rumah sejak tahun 1990 sampai dengan saat sekarang. Berhubungan dengan permintaan untuk perubahan status rumah dari golongan II ke golongan III, belum dapat dipenuhi karena terbatasnya jumlah rumah negara yang berada di lingkungan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum dan ada pejabat di Ditjen AHU yang masih aktif bertugas tetapi tidak mendapatkan hak penghunian atas rumah negara tersebut.
- i. Pada tanggal 10 Juni 2021, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum mengirimkan surat nomor : AHU.1.PB.04.04-4 tertanggal 31 Mei 2021 kepada Kepala Biro Pengelolaan Barang Milik Negara Sekretariat Jenderal c.q. Kepala Bagian Penetapan dan Status Penggunaan Barang Milik Negara. Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum meminta arahan terkait adanya permohonan perubahan golongan rumah negara milik Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum yang di ajukan oleh Saudara Amru Walid Batubara dan Saudara Arif Syamsudin.

2. Tindak Lanjut temuan pengadaan oleh Itjen di BHP Medan berupa:



- a. Kekurangan volume pekerjaan yang dilaksanakan oleh CV. Dame Cipta Mandiri selaku kontraktor dengan nilai sebesar Rp7.774.000,00.
- b. Kelebihan pembayaran atas biaya Non Personil Jasa Konsultan Pengawas sebesar Rp1.125.000,00.
- c. Kelebihan pembayaran atas biaya Personil dan Non Personil Jasa Konsultan Perencanaan sebesar Rp2.977.500,00.

Untuk ketiga temuan tersebut sudah dilakukan koreksi dalam aplikasi SIMAK BMN dan pengembalian ke Negara untuk kelebihan pembayaran.

C. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan

1. Tindak Lanjut CHR TA 2021 Semester I dan TA 2020 terkait Aset Tetap Renovasi (ATR) Pada Satuan Kerja Pemasyarakatan.

- a) Pembangunan Rumah Susun di Nusakambangan

Pada tahun 2020, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) membangun Rumah Susun di Nusakambangan yang dilaksanakan dengan DIPA Kementerian PUPR, sedangkan sarana didalamnya didayakan oleh dana Ganti Rugi Berupa Barang (GRBB). Untuk melengkapi pembangunan tersebut, Ditjen PAS melaksanakan Pembuatan Dapur Rumah Dinas SESDIT PAS – Rusun di Nusakambangan didasarkan pada DIPA Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Tahun 2020 Nomor SP-DIPA-013.05.1.40926/2020 tanggal 12 November 2019 pada Program 08 Kegiatan 1583.994.002 Sub Komponen A Akun 521119.

Direktorat Jenderal Pemasyarakatan melalui staf PPK memberikan konfirmasi bahwa pekerjaan tersebut meliputi pembangunan kitchen set (peralatan dapur), perbaikan kamar mandi, dan kegiatan pengecatan. Pekerjaan tersebut pun telah diselesaikan pada semester I tahun anggaran 2020. Melalui Surat Perintah Membayar nomor 0069/409263/LS/2020 dan Berita Acara Serah Terima Nomor 001/UM/BAST/V/2020, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan telah membayar lunas pekerjaan tersebut. Didasarkan pada pertimbangan pelekatan aset, mengingat bahwa Rumah Susun belum diserahterimakan oleh Kementerian PUPR, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan mencatatnya sebagai aset tetap renovasi pada aplikasi SIMAK BMN Ditjen Pemasyarakatan. Berdasarkan data E-Rekon per 14 Februari 2022, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan telah melaksanakan transfer saldo ATR dimaksud.



b) Penjelasan Saldo ATR pada Lapas Abepura

Terdapat nilai ATR sebesar Rp2.190.848.550,00 pada data Neraca E-Rekon per 31 Desember 2021 yang merupakan nilai Aset Tetap Renovasi yang dimiliki oleh Lapas Abepura. Adapun nilai tersebut merupakan nilai Rehabilitasi dan Rekonstruksi Balai Latihan Kerja (BLK) Lapas Kelas II A Abepura Provinsi Papua dengan rincian:

- Nilai Kontrak Fisik : 1.805.975.000
- Nilai Kontrak Manajemen Kontruksi : 275.946.000
- Nilai Administrasi Kegiatan : 108.927.550
- Nilai Total / Nilai Perolehan : 2.190.848.550

Adapun pembangunan tersebut telah selesai 100%. Berdasarkan koordinasi yang telah dilakukan Kantor Wilayah Kemenkumham dengan pihak PUPR untuk melakukan transaksi transfer Gedung dan Bangunan, namun tidak disanggupi oleh pihak PUPR karena PUPR menggunakan akun Belanja Modal Lainnya (536111) dan tidak bisa dilakukan ralat akun, padahal Kanwil Papua telah menginformasikan bahwa gedung yang akan dilakukan ATR sudah dirobohkan dan SK Penghapusannya sudah terbit.

2. Tindak Lanjut CHR TA 2021 Semester I dan TA 2020 terkait Penatausahaan Barang pada Kegiatan Latihan Keterampilan dan Kegiatan Kerja Produksi WBP di Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan.

- a) Berdasarkan LHP atas Laporan Keuangan Kemenkumham nomor 15/HP/XIV/05/2018 Tahun 2017 pada Portal Auditee BPK yang menyatakan “BPK merekomendasikan kepada Menteri Hukum dan HAM agar memerintahkan Ditjen Pemasyarakatan untuk menetapkan aturan internal terkait pengelolaan dan pencatatan barang persediaan berupa persediaan rutin dan HASIL KEGIATAN INDUSTRI DALAM LAPAS”, yang ditindaklanjuti dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor M.HH-02.KU.05.01 Tahun 2017 tentang Kebijakan Akuntansi Berbasis Akural yang menuangkan bahwa kebijakan pengelolaan dan pencatatan barang persediaan berupa hasil kegiatan latihan keterampilan dan kegiatan kerja produksi diatur lebih lanjut dalam aturan internal di lingkungan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan secara berjenjang telah menyusun peraturan internal dimaksud.



- b) Pada tahun anggaran 2019, Direktorat Jenderal Pemasarakatan telah menyusun dan mengedarkan Surat Edaran Nomor PAS-09.PB.05.01 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan dan Pencatatan Barang Persediaan Hasil Kegiatan dalam Lapas.
- c) Pada tahun anggaran 2020 hingga semester I tahun anggaran 2021, dalam rangka menindaklanjuti temuan BPK dan keputusan Menteri Hukum dan HAM serta meningkatkan lingkup surat edaran 2019, Direktorat Jenderal Pemasarakatan melalui Bagian Pengelolaan BMN dan Umum telah melaksanakan rangkaian penyusunan Keputusan Direktur Jenderal Pemasarakatan tentang Pedoman Penatausahaan Dan Penghapusan Barang Pada Kegiatan Latihan Keterampilan Dan Kegiatan Kerja Produksi Di UPT Pemasarakatan. Rangkaian penyusunan dimaksud diantaranya meliputi:
- Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan terkait Pencatatan Kegiatan
 - Penyusunan Draft Internal
 - Konsultasi Teknis dengan Unit Pelaksana Teknis pelaksana kegiatan latihan keterampilan dan kegiatan kerja produksi beserta Direktorat terkait
 - Rapat Koordinasi antara Sekretaris Jenderal Kemenkumham; Inspektorat Jenderal Kemenkumham, Bagian Program dan Pelaporan, dan Direktorat terkait; serta Koordinasi Internal Penyusunan Keputusan Direktorat Jenderal Pemasarakatan bersama Bagian Program dan Pelaporan
- d) Pada awal Semester II TA 2021, Keputusan Direktur Jenderal Pemasarakatan tentang Pedoman Penatausahaan dan Penghapusan Barang pada Latihan Keterampilan dan Kegiatan Kerja Produksi di Unit Pelaksana Teknis Pemasarakatan telah ditandatangani dengan nomor surat PAS-19.OT.02.02 Tahun 2021. Keputusan Direktur Jenderal tersebut telah dikirimkan kepada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM melalui aplikasi Sumaker. Sebagai dampak dari Keputusan Direktur Jenderal Pemasarakatan tersebut, diantaranya perlakuan pada penatausahaan kegiatan latihan keterampilan dan kegiatan kerja produksi. Terkait dengan sarana persediaan latihan kerja non aset, dikategorikan sebagai bahan dan pencatatannya dilakukan pada buku manual, sedangkan untuk sarana berupa aset tetap diinput dalam aplikasi SIMAK BMN. Terkait dengan hasil kegiatan berupa barang yang

diharapkan masih akan terjual, dicatat pada pencatatan buku manual.

3. Penjelasan Saldo Irigasi pada Satuan Kerja Pemasarakatan
Berdasarkan data E-Rekon, sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 masih terdapat Saldo Irigasi pada 3 satuan kerja Pemasarakatan dengan rincian sebagai berikut :
- a) Lapas Perempuan Medan senilai Rp550.000,00
Merupakan BTM Hasil Revaluasi 2017 yang saat ini sudah diajukan Usulan Izin Prinsip Penghapusan namun saat ini masih berproses di Sekretariat Jenderal.
 - b) Lapas Muara Dua senilai Rp77.702.000,00
Merupakan BMN Bangunan Air yang teridentifikasi sebagai obyek K3 sehingga dilakukan tindak lanjut berupa Normalisasi. Namun ketika dilakukan reklasifikasi, berdampak pada munculnya Beban Penyusutan Irigasi di sisi Kredit. Sehingga terhadap BMN tersebut tidak dilakukan reklasifikasi.
 - c) Lapas Perempuan Ternate senilai Rp6.427.272.162,00
Merupakan BMN berupa Turap yang berfungsi untuk menahan longsor, dimana seharusnya terhadap BMN tersebut dilekatkan pada nilai Tanah. Namun belum dapat dilaksanakan, karena Tanah yang digunakan oleh LPP Ternate masih tercatat pada Pemkot Ternate dan belum dilaksanakan proses hibah.
4. Penjelasan Saldo Software pada Satuan Kerja Pemasarakatan
Berdasarkan data E-Rekon, sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 terdapat saldo software pada 5 satuan kerja Pemasarakatan dengan rincian sebagai berikut:

Satuan Kerja	Nilai	Keterangan
Bapas Jaktim/Jakut	19.800.000,00	Integrated System Prison Security
Lapas Cipinang	3.520.030.700,00	Integrated System Prison Security
Ditjen Pemasarakatan	4.756.428.800,00	Software Ditjen Pemasarakatan
Rupbasan Bandung Kota Bandung, Jawa Barat	9.020.000,00	Aplikasi Website Kantor
RSU Pengayoman	748.100.001,00	Aplikasi Sistem Informasi Manajemen RS
Total	9.053.379.501,00	



5. Penjelasan KDP yang Belum Selesai Sampai Dengan Batas Terakhir Kontrak di Nusakambangan

Pada tahun 2020, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan melaksanakan pembangunan 3 (tiga) Lembaga Pemasyarakatan di Nusakambangan meliputi Lapas Maksimum bagi Napi Teroris di Ngaseman, Lapas Maksimum bagi Napi Narkotika di Besi dan Lapas Minimum di Nirbaya. Surat Perjanjian Kontrak untuk Konsultan Manajemen ditandatangani per 25 Februari 2021 dengan nomor PAS1.PB.02.09-608 sedangkan untuk Pembangunan Fisik per 22 Juni dengan nomor PAS1.PB.02.09-2428.

Berdasarkan Laporan Manajemen Konstruksi Minggu ke-28 (29 – 31 Desember 2021) dengan nomor 28/Mggu/Lapas NK/mp/XII/2021, Realisasi Presentasi Kumulatif pembangunan mencapai 84,959% dari Rencana Prestasi Kumulatif sebesar 100%. Deviasi menunjukan -15,041%. Berdasarkan konfirmasi yang dilakukan kepada Pejabat Pembuat Komitmen Ditjen Pemasyarakatan pertimbangan keterlambatan tersebut tertuang pada surat nomor PAS1.PB.02.09 – 322 tanggal 5 Januari 2022 tentang Jawaban atas Permohonan Perpanjangan Waktu dan Penghapusan Denda. Adapun pertimbangan tersebut meliputi:

a) Pandemi Covid 19

Berdasarkan Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Cilacap Nomor: 003/04070/04 perihal antisipasi pencegahan penyebaran Covid-19 di Kabupaten Cilacap tanggal 19 Juni 2021, mengakibatkan sulitnya mendatangkan tenaga kerja dari luar daerah Cilacap selama 26 hari kalender. Merujuk pada Instruksi Kementerian Dalam Negeri Nomor 15 tahun 2021, Tentang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat darurat Corona Virus Disease 2019 di wilayah Jawa dan Bali, mengakibatkan sulitnya untuk mendatangkan material dalam jumlah besar dari Kota lain ke Nusakambangan. Hal tersebut diantaranya diakibatkan penyekatan-penyekatan disetiap perbatasan daerah pemerintahan.

b) Penutupan Jalur Laut Nusakambangan akibat Tenggelamnya Kapal

berdasarkan Surat Edaran Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Cilacap Nomor: UM 006/23/11/KSOP Cilacap– 21 perihal penutupan sementara jalur keluar masuk Pelabuhan Tanjung Intan Cilacap tertanggal 17 September 2021 sampai batas waktu diangkatnya kapal Pengayoman IV berikut muatannya, yang



tenggelam dari jalur laut pelabuhan Tanjung Intan Cilacap. Hal ini mengakibatkan keterbatasan penyeberangan material ke Pulau Nusakambangan.

- c) Kerusakan Kapal Pengangkut Material
Berdasarkan Surat Persetujuan Olah Gerak (SPOG) Kapal LCT Honda yang baru dikeluarkan oleh kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan kelas II Cilacap tertanggal 15 Oktober 2021 Nomor AL 820/23/14/KSOP CLP-21 di karenakan kapal LCT harus naik Dock karena mengalami kerusakan berupa kebocoran di area bawah mesin pada saat membantu evakuasi kapal Pengayoman IV dikarenakan benturan keras, mengakibatkan keterlambatan penyeberangan material ke pulau Nusakambangan. Terhitung mulai tanggal 17 September 2021 sampai dengan 15 Oktober 2021 Selama 32 Hari Kalender. Menanggapi hal tersebut, PT. Manda Putra Nusantara berusaha menyewa kapal ke pihak lain (PT. Pelayaran Toni Cogita Eka Marindo dan PT. Pelayaran Rimba Megah Armada) namun tidak berhasil.
- d) Kondisi Curah Hujan
Curah hujan yang cukup tinggi untuk wilayah Cilacap dan Nusakambangan mengakibatkan pekerjaan fisik menjadi tertunda dan pengiriman material terhambat karena arus deras yang ada di perairan Selat antara Cilacap ke Pulau Nusakambangan.

D. Direktorat Jenderal HAM

Telah dilaksanakan tindak lanjut atas Catatan Hasil Reviu (CHR) Laporan Keuangan Direktorat Jendral Hak Asasi Manusia Semester I TA 2021 terkait Aset Tak Berwujud (ATB) dengan melakukan penghapusan terhadap 6 (enam) buah Software Komputer yang dihentikan dari penggunaan operasional pemerintahan dengan nilai perolehan Rp208.378.200,00 pada semester II TA 2021.

E. BPSDM Hukum dan HAM

Untuk Barang Tidak Ditemukan akan segera diusulkan penghapusan setelah mendapatkan CHR dari Itjen dan dokumen bongkaran gedung dan bangunan.



F.6. Rekapitulasi Saldo Temuan Pemeriksaan BPK dan Inspektorat Jenderal Yang Belum Di Setorkan Ke Kas Negara

Tabel 238

**Rincian Nilai Temuan yang belum disetorkan
per 31 Desember 2021**

No	Kode Satker	Nama Satker	Nilai Temuan	Keterangan
1	409175	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BENGKULU	103.699.276,00	Temuan BPK Tahun 2012
2	409241	INSPEKTORAT JENDERAL	40.489.000,00	Nominal yang belum disetor ke Kas Negara oleh Penyedia pengadaan Micro Bus TA 2020. Hasil temuan BPK pada pemeriksaan Laporan Keuangan TA 2020 menemukan bahwa terdapat kelebihan pembayaran sebesar Rp52.489.000,00 Pihak Penyedia telah menyetor ke Kas Negara sebesar Rp12.000.000 selama TA 2021.
3	409257	DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM	392.825.000,00	Piutang PNPB atas adanya temuan pemeriksaan BPK RI pada LK TA 2020
4	099300	BALAI HARTA PENINGALAN MEDAN	5.124.000,00	TP Itjen Audit Pengadaan Barjas TA 2021 keterlambatan pekerjaan renovasi oleh CV. Dame Cipta Mandiri
			7.774.000,00	TP Itjen Audit Pengadaan Barjas TA 2021 kekurangan volume pekerjaan CV.Dame Cipta Mandiri
			1.125.000,00	TP Itjen Audit Pengadaan Barjas TA 2021 Kelebihan biaya non personil CV. ARB
			2.977.500,00	TP Itjen Audit Pengadaan Barjas TA 2021 Kelebihan biaya personil dan non personil CV.Sindang Laya Consultant
5	408730	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BANDUNG	17.950.000,00	Pengembalian atas kelebihan pembayaran belanja perjalanan dinas hasil temuan itjen 2021



6	408743	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAWA TENGAH	8.232.500,00	Pencatatan piutang atas temuan pemeriksaan Pengawasan Optimalisasi Pengelolaan PNBPN oleh Itjen atas kelebihan pembayaran belanja honor tim penyelesaian digital arsip fidusia senilai Rp8.232.500,00 berdasarkan surat Inspektur Jenderal No.ITJ.PW.03.01.III/02 tgl 3 Januari 2022.
7	632527	RUMAH TAHANAN NEGARA AMBON	19.817.431,00	Kelebihan Pembayaran Rehab 2021 dan denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan
8	352608	LPKA Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur	8.046.000,00	Pengembalian temuan BPK
9	404265	BALAI PEMASYARAKATAN JAKTIM/JAKUT	39.209.403,00	Piutang pengembalian belanja modal gedung dan bangunan TA 2020 atas temuan BPK di tahun 2021
10	406576	RUMAH TAHANAN NEGARA SUKADANA	12.789.880,00	Hasil Pengawasan Itjen atas Pekerjaan Pengadaan Langsung
			2.087.575,00	'Hasil Pengawasan Itjen atas Fee Pinjam Bendera
			2.087.575,00	'Hasil Pengawasan Itjen atas ketidaksesuaian Spesifikasi Pengadaan Pakaian Dinas
			2.628.500,00	Hasil Pengawasan Itjen atas Kelebihan Air Minum bulan Januari
			1.250.000,00	Hasil Pengawasan Itjen atas Kegiatan Pelaksanaan Program Kemandirian
11	406890	LAPAS KELAS III AMURANG	1.206.450,00	Temuan Itjen
12	406828	LEMBAGA PEMASYARAKATAN BALIKPAPAN	64.390.524,00	Pengembalian temuan Itjen
13	407029	LEMBAGA PEMASYARAKATAN TOLI-TOLI	48.674.280,00	Kelebihan Pembayaran atas pekerjaan Pemeliharaan Gedung Kantor dan Tempat Parkir Tahun 2019
			10.850.035,00	Kelebihan Pembayaran atas pekerjaab Pemeliharaan sarana dan prasarana dan halaman gedung kantor Tahun 2019



			30.000.000,00	Terdapat kelebihan Pembayaran Pengadaan Baju Dinas Pegawai Tahun 2019 yaitu perbedaan spesifikasi (ongkos jahit)
14	407851	LEMBAGA PEMASYARAKATAN MANOKWARI	32.945.428,00	Atas hasil Audit BPK Tahun 2013 ditemukan bahwa pada Lapas Manokwari terdapat kelebihan pembayaran BAMA. Pada tahun 2021 piutang tersebut diakui pada aplikasi SAIBA
15	409263	DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN	258.596.500,00	Temuan Itjen atas Kelebihan Pembayaran Pengadaan Alat Test Screening HIV TA 2012
16	418361	Lapas Perempuan Kelas III Manokwari	46.768.765,00	Pengembalian Belanja Modal Tahun Yang Lalu atas temuan Itjen Tahun 2019, namun baru dicatat pada aplikasi SAIBA pada tahun 2020
17	497758	LEMBAGA PEMASYARAKATAN WAY KANAN	77.537.792,00	Temuan Hasil Pemeriksaan BPK Tahun 2015 atas belanja modal gedung TA.2014
18	497809	RUMAH TAHANAN NEGARA MANADO	94.310.000,00	Kewajiban pengembalian kelebihan pembayaran kontrak jasa konsultan pengawas pembangunan Gedung Rumah Tahanan Negara Kelas IIA Manado berupa sewa Kantor yang harus di setor ke kas negara
19	652962	LEMBAGA PEMASYARAKATAN NARKOTIKA BANDAR LAMPUNG	288.617.429,00	Hasil Pemeriksaan BPK RI TA 2015 atas Belanja Modal TA 2014
20	683704	LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK BANDAR LAMPUNG	145.920.080,00	Temuan BPK Tahun 2015 atas kelebihan pembayaran pembangunan barak pegawai
			2.878.800,00	Temuan BPK Tahun 2015 atas kelebihan pembayaran pembangunan gereja
21	683998	Lapas anak Kelas III Batam	606.325.200,00	Terdapat Kelebihan Pembayaran Belanja Modal TA 2020 Jasa Konstruksi atas temuan ITJEN KEMENKUMHAM RI
22	418339	Lapas Perempuan Kelas IIB Padang	302.780.868,00	Temuan BPK atas pemeriksaan PDDT TA 2021 pekerjaan



				pembangunan gedung Lapas Perempuan Padang
23	409272	DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI	1.799.161.590,00	Temuan BPK atas LK TA 2012 terhadap keterlambatan pekerjaan dan kelebihan pembayaran pengadaan barang. Sudah dilakukan koordinasi dengan KPKNL untuk melakukan pelimpahan piutang, status terakhir masih dalam penagihan terakhir oleh KPKNL
			471.078.840,00	Temuan BPK atas Pelaksanaan Belanja Barang dan Modal Ditjen Imigrasi TA 2018 dan 2019 atas pengadaan pencetakan paspor tahap II berupa denda keterlambatan pengadaan blangko paspor polikarbonat
			2.030.000.000,00	Temuan BPK atas LK TA 2019 yang belum terbayarkan berupa pengadaan pencetakan blangko paspor biasa elektronik 48 halaman dan non elektronik 48 halaman
24	097102	DITJEN KEKAYAAN INTELEKTUAL	2.660.800.000,00	Piutang yang muncul karena adanya kewajiban penyedia untuk melakukan pengembalian ke kas umum negara akibat adanya kelebihan pembayaran atas pengadaan upgrade memory server Fujitsu 3800E TA 2020 sebesar Rp3.660.800.000,00 berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK Tahun 2021 atas LK 2020. Pada 4 November 2021, Ditjen KI menyetorkan ke Kas Umum Negara sebesar Rp1.000.000.000,00 dengan NTPN 9888A7QLTTMOF21Q
Total			9.640.955.221,00	



F.7. Hibah Yang Belum Dicatat

Sampai dengan tanggal 31 Desember 2021, terdapat hibah di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM yang belum dicatat pada 2 satuan kerja sebagai berikut:

- a) Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Pamekasan
Hibah berasal dari Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Pemerintah Kabupaten Pamekasan berupa Pavingisasi Halaman Kantor Imigrasi Pamekasan senilai Rp182.277.600,00. Atas hibah tersebut masih dalam proses permohonan penerbitan Register Hibah Langsung ke Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Timur berdasarkan surat Kepala Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Pamekasan nomor W15.IMI.IMI.9-PB.06.04-1581 tanggal 20 Desember 2021
- b) Rumah Tahanan Kelas IIB Banda Aceh
Hibah berasal dari Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Aceh berupa Pembangunan Sarana dan Prasarana Lapangan Terbuka senilai Rp577.579.200,00. Hingga tanggal 24 Januari 2021, Rutan Banda Aceh belum menerima BAST dan perjanjian hibah, sehingga belum bisa melakukan register hibah tersebut.
- c) Rumah Tahanan Tanjung Balai Karimun
Hibah berasal dari Pemerintah Kabupaten Karimun berupa pembangunan Pos Jaga Rumah Tahanan Tanjung Balai Karimun senilai Rp135.580.000,00. Sampai dengan tanggal pelaporan belum dilakukan pencatatan hibah dikarenakan belum terdapat naskah perjanjian dan BAST sampai dengan 31 Desember 2021.
- d) Lembaga Pemasyarakatan Kota Metro
Hibah berasal dari Pemerintah Kota Metro berupa garasi Lapas Metro senilai Rp199.695.000. Sampai dengan tanggal pelaporan belum dilakukan pencatatan hibah dikarenakan belum terdapat naskah perjanjian dan BAST sampai dengan 31 Desember 2021.
- e) Rumah Tahanan Negara Sampang
Hibah berasal dari Pemerintah Kabupaten Sampang berupa Masjid AT Taubah Rutan Kelas IIB senilai Rp476.320.000,00. Sampai dengan tanggal pelaporan belum dilakukan pencatatan hibah dikarenakan pembangunan selesai pada 2022.
- f) Rutan Tahanan Negara Sumenep



Hibah berasal dari Pemerintah Kabupaten Sumenep berupa pembangunan tempat ibadah senilai Rp199.800.000,00. Sampai dengan tanggal pelaporan belum dilakukan pencatatan hibah dikarenakan belum terdapat BAST sampai dengan 31 Desember 2021.

g) Lembaga Pemasyarakatan Jombang

Hibah berasal dari Pemerintah Kabupaten Jombang berupa pekerjaan perencanaan, konstruksi dan pengawasan pembangunan gedung untuk dapur senilai Rp197.444.002,00. Sampai dengan tanggal pelaporan belum dilakukan pencatatan hibah dikarenakan pembangunan selesai pada 2022.

h) Rumah Tahanan Negara Trenggalek

Hibah berasal dari Pemerintah Kabupaten Trenggalek berupa gedung Rutan Trenggalek senilai Rp831.435.230,00. Sampai dengan tanggal pelaporan belum dilakukan pencatatan hibah dikarenakan belum terdapat naskah perjanjian dan BAST sampai dengan 31 Desember 2021.


Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia

Yasonna H. Laoly

Pendapatan Penjualan Hasil Produksi Non Litbang Lainnya (Akun 425119)
Menurut daftar satuan kerja per 31 Desember 2021

No	Nama Satker	Jumlah
1	LEMBAGA PEMASYARAKATAN KARAWANG	30.553.644,00
2	LEMBAGA PEMASYARAKATAN BEKASI	5.082.250,00
3	LEMBAGA PEMASYARAKATAN PERMISAN	12.377.675,00
4	LEMBAGA PEMASYARAKATAN BATU	3.300.000,00
5	LEMBAGA PEMASYARAKATAN KEMBANG KUNING	850.000,00
6	RUMAH TAHANAN NEGARA SURABAYA	7.180.418,00
7	RUMAH TAHANAN NEGARA TANAH GROGOT	18.000.000,00
8	LAPAS ARGAMAKMUR	10.878.000,00
9	LEMBAGA PEMASYARAKATAN TOBELLO	5.050.000,00
10	LEMBAGA PEMASYARAKATAN SANANA	550.000,00
11	LAPAS BATAM	16.700.000,00
12	RUMAH TAHANAN NEGARA YOGYAKARTA	2.034.850,00
13	LEMBAGA PEMASYARAKATAN CIPINANG	46.738.000,00
14	LAPAS SUMEDANG	6.125.000,00
15	LAPAS CIAMIS	651.938,00
16	LAPAS TASIKMALAYA	1.699.870,00
17	LEMBAGA PEMASYARAKATAN KUNINGAN	4.725.050,00
18	LAPAS INDRAMAYU	2.265.000,00
19	LAPAS SUKABUMI	10.483.750,00
20	LAPAS PURWAKARTA	3.372.887,00
21	LEMBAGA PEMASYARAKATAN SUBANG	23.315.900,00
22	RUMAH TAHANAN NEGARA WATES	1.469.000,00
23	RUMAH TAHAN NEGARA WONOSARI	3.350.000,00
24	LEMBAGA PEMASYARAKATAN KENDAL	1.945.000,00
25	LAPAS BREBES	9.300.000,00
26	RUMAH TAHANAN NEGARA KEBUMEN	1.000.000,00
27	LEMBAGA PEMASYARAKATAN PATI	11.738.000,00
28	RUMAH TAHANAN NEGARA REMBANG	1.200.000,00
29	RUMAH TAHANAN NEGARA KUDUS	2.025.000,00
30	RUMAH TAHANAN NEGARA BLORA	500.000,00
31	LEMBAGA PEMASYARAKATAN SRAGEN	16.348.000,00
32	LEMBAGA PEMASYARAKATAN PURWOKERTO	9.237.605,00
33	RUMAH TAHANAN NEGARA PURBALINGGA	1.900.000,00
34	LAPAS CILACAP	9.268.650,00
35	LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEMUDA PLANTUNGAN	3.365.000,00
36	LEMBAGA PEMASYARAKATAN SIDOARJO	160.000,00
37	LAPAS MOJOKERTO	3.557.600,00
38	LAPAS JOMBANG	548.750,00
39	LEMBAGA PEMASYARAKATAN BOJONEGORO	5.689.700,00
40	LAPAS TUBAN	9.403.400,00
41	LAPAS LAMONGAN	16.220.000,00
42	LEMBAGA PEMASYARAKATAN KEDIRI	21.886.830,00
43	LAPAS TULUNGAGUNG	7.860.000,00
44	RUMAH TAHANAN NEGARA NGANJUK	300.000,00
45	LAPAS BLITAR	10.861.000,00
46	RUMAH TAHANAN NEGARA TRENGGALEK	480.000,00
47	LAPAS BONDOWOSO	3.360.000,00
48	LAPAS KELAS IIA BANYUWANGI	271.500,00
49	RUMAH TAHANAN NEGARA SITUBONDO	130.000,00
50	LEMBAGA PEMASYARAKATAN PAMEKASAN	6.347.300,00
51	RUMAH TAHANAN NEGARA SUMENEP	2.650.000,00
52	RUMAH TAHANAN NEGARA BANGKALAN	2.400.000,00
53	LEMBAGA PEMASYARAKATAN MALANG	93.969.000,00
54	RUMAH TAHANAN NEGARA KRAKSAAN	169.500,00

Pendapatan Penjualan Hasil Produksi Non Litbang Lainnya (Akun 425119)
Menurut daftar satuan kerja per 31 Desember 2021

No	Nama Satker	Jumlah
55	LAPAS LUMAJANG	7.369.450,00
56	LAPAS PASURUAN	7.140.500,00
57	LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN MALANG	17.930.214,00
58	LEMBAGA PEMASYARAKATAN MADIUN	14.221.000,00
59	LAPAS NGAWI	1.763.500,00
60	RUMAH TAHANAN NEGARA PACITAN	165.000,00
61	LEMBAGA PEMASYARAKATAN BANDA ACEH	17.466.000,00
62	RUMAH TAHANAN NEGARA SABANG	1.000.000,00
63	RUMAH TAHANAN NEGARA SIGLI	500.000,00
64	LEMBAGA PEMASYARAKATAN LHOK SEUMAWA	6.000.000,00
65	LAPAS KELAS III LHOK NGA	3.353.400,00
66	LAPAS KELAS IIB LHOKSUKON	6.000.000,00
67	LAPAS KELAS IIB BIREUN	6.246.000,00
68	RUMAH TAHANAN NEGARA TAKENGON	4.197.500,00
69	LAPAS KELAS IIB KOTA BAKTI	472.000,00
70	LEMBAGA PEMASYARAKATAN KUALA SIMPANG	360.000,00
71	LAPAS KELAS IIB IDI	3.352.250,00
72	LEMBAGA PEMASYARAKATAN KUTACANE	1.790.000,00
73	LAPAS KELAS IIB BLANGKEJEREN	6.579.000,00
74	LEMBAGA PEMASYARAKATAN MEULABOH	8.120.000,00
75	LAPAS KELAS III CALANG	2.045.300,00
76	RUMAH TAHANAN NEGARA TAPAKTUAN	700.000,00
77	RUTAN KELAS IIB SINGKEL	300.000,00
78	LAPAS KELAS III SINABANG	2.288.000,00
79	LEMBAGA PEMASYARAKATAN MEDAN	42.630.000,00
80	LAPAS KELAS IIA PANCUR BATU	90.000,00
81	LAPAS TANJUNG BALAI ASAHAN	1.300.000,00
82	LEMBAGA PEMASYARAKATAN LABUHAN RUKU	50.129.932,00
83	LEMBAGA PEMASYARAKATAN RANTAU PRAPAT	17.500.000,00
84	LAPAS KELAS III LABUAN BILIK	1.210.000,00
85	LAPAS LUBUK PAKAM	10.984.166,00
86	LEMBAGA PEMASYARAKATAN SIBOLGA	4.375.000,00
87	RUMAH TAHANAN NEGARA TARUTUNG	1.325.000,00
88	LEMBAGA PEMASYARAKATAN SIBORONG-BORONG	6.847.500,00
89	LAPAS KELAS III PANGURURAN	2.480.000,00
90	LEMBAGA PEMASYARAKATAN PADANG	2.200.000,00
91	RUMAH TAHANAN NEGARA PAINAN	2.485.000,00
92	LEMBAGA PEMASYARAKATAN BUKITTINGGI	16.075.000,00
93	LAPAS KELAS III TALU	342.000,00
94	RUMAH TAHANAN NEGARA PADANG PANJANG	231.000,00
95	RUTAN KELAS IIB MANINJAU	1.085.000,00
96	RUMAH TAHANAN NEGARA SAWAH LUNTO	3.570.000,00
97	LEMBAGA PEMASYARAKATAN SOLOK	8.920.000,00
98	LEMBAGA PEMASYARAKATAN BENGKALIS	3.820.000,00
99	RUMAH TAHANAN NEGARA SIAK SRI INDRAPURA	55.000,00
100	LAPAS KELAS IIA BAGAN SIAPI-API	3.000.000,00
101	LEMBAGA PEMASYARAKATAN TEMBILAHAN	34.000,00
102	LAPAS KELAS IIB SELATPANJANG	1.500.000,00
103	LEMBAGA PEMASYARAKATAN PASIR PANGARAYAN	12.052.000,00
104	LEMBAGA PEMASYARAKATAN TANJUNG PINANG	6.723.000,00
105	LEMBAGA PEMASYARAKATAN METRO	4.500.000,00
106	LEMBAGA PEMASYARAKATAN JAMBI	6.589.850,00
107	LAPAS MUARA BULIAN	4.044.000,00
108	LEMBAGA PEMASYARAKATAN MUARA BUNGO	7.000.000,00

Pendapatan Penjualan Hasil Produksi Non Litbang Lainnya (Akun 425119)
Menurut daftar satuan kerja per 31 Desember 2021

No	Nama Satker	Jumlah
109	LEMBAGA PEMASYARAKATAN MUARA TEBO	3.665.000,00
110	LAPAS BANGKO	4.746.050,00
111	LEMBAGA PEMASYARAKATAN KUALA TUNGKAL	1.817.055,00
112	LEMBAGA PEMASYARAKATAN TANJUNG RAJA	6.350.000,00
113	LAPAS SEKAYU	20.967.500,00
114	LEMBAGA PEMASYARAKATAN LAHAT	1.227.000,00
115	LAPAS MUARA ENIM	14.718.900,00
116	LAPAS KELAS III PAGAR ALAM	488.000,00
117	LAPAS KELAS III SAROLANGUN RAWAS	5.123.000,00
118	LAPAS KELAS IIB MARTAPURA	2.075.000,00
119	LEMBAGA PEMASYARAKATAN PANGKALPINANG	4.350.000,00
120	LEMBAGA PEMASYARAKATAN TANJUNG PANDAN	5.895.500,00
121	LEMBAGA PEMASYARAKATAN BANDAR LAMPUNG	11.158.000,00
122	RUMAH TAHANAN NEGARA MENGGALA	8.785.700,00
123	RUMAH TAHANAN NEGARA KRUI	3.675.000,00
124	LEMBAGA PEMASYARAKATAN SINGKAWANG	7.262.000,00
125	RUMAH TAHANAN NEGARA SAMBAS	1.129.500,00
126	LEMBAGA PEMASYARAKATAN SINTANG	6.214.500,00
127	LEMBAGA PEMASYARAKATAN PALANGKARAYA	31.085.000,00
128	RUMAH TAHANAN NEGARA KUALA KAPUAS	8.900.000,00
129	LEMBAGA PEMASYARAKATAN MUARA TEWE	9.770.500,00
130	LEMBAGA PEMASYARAKATAN PANGKALAN BUN	16.075.000,00
131	LAPAS SAMPIT	24.000.000,00
132	LAPAS KELAS IIA KOTABARU	11.507.000,00
133	LEMBAGA PEMASYARAKATAN AMUNTAI	11.704.700,00
134	RUMAH TAHANAN NEGARA TANJUNG	1.985.800,00
135	LEMBAGA PEMASYARAKATAN BALIKPAPAN	28.009.000,00
136	RUMAH TAHANAN NEGARA TANJUNG REDEP	11.815.000,00
137	LEMBAGA PEMASYARAKATAN SAMARINDA	7.780.000,00
138	LAPAS KELAS IIA TENGGARONG	13.085.600,00
139	LEMBAGA PEMASYARAKATAN TARAKAN	17.237.400,00
140	LAPAS KELAS III AMURANG	4.369.000,00
141	LEMBAGA PEMASYARAKATAN ANAK TOMOHON	1.100.000,00
142	RUMAH TAHANAN NEGARA KOTAMOBAGU	6.790.000,00
143	LEMBAGA PEMASYARAKATAN GORONTALO	16.954.125,00
144	LEMBAGA PEMASYARAKATAN TAHUNA	3.820.000,00
145	LAPAS KELAS III ENEMAWIRA	450.000,00
146	LAPAS KELAS III TAMAKO	770.000,00
147	LAPAS KELAS III TAUGULANDANG	500.000,00
148	LEMBAGA PEMASYARAKATAN ULU SIAU	1.770.000,00
149	LEMBAGA PEMASYARAKATAN PALU	15.675.695,00
150	LAPAS KELAS III PARIGI	2.765.000,00
151	LEMBAGA PEMASYARAKATAN TOLI-TOLI	11.471.975,00
152	LAPAS KELAS III LEOK	4.850.000,00
153	LEMBAGA PEMASYARAKATAN LUWUK	735.000,00
154	LAPAS KELAS III KOLONEDALE	3.844.000,00
155	RUMAH TAHANAN NEGARA POSO	848.000,00
156	LEMBAGA PEMASYARAKATAN UJUNG PANDANG	5.350.000,00
157	RUMAH TAHANAN NEGARA PANGKAJENE	1.450.000,00
158	LPKA KELAS II MAROS	5.056.500,00
159	LAPAS TAKALAR	4.000.000,00
160	RUMAH TAHANAN NEGARA JENEPONTO	1.000.000,00
161	RUMAH TAHANAN NEGARA SELAYAR	700.000,00
162	LEMBAGA PEMASYARAKATAN BULUKUMBA	2.965.700,00

Pendapatan Penjualan Hasil Produksi Non Litbang Lainnya (Akun 425119)
Menurut daftar satuan kerja per 31 Desember 2021

No	Nama Satker	Jumlah
163	LEMBAGA PEMASYARAKATAN PALOPO	8.000.000,00
164	RUMAH TAHANAN NEGARA MAKALE	4.180.000,00
165	LAPAS KELAS IIA PARE-PARE	14.155.000,00
166	RUMAH TAHANAN NEGARA RAPPANG	7.800.000,00
167	RUMAH TAHANAN NEGARA ENREKANG	5.215.000,00
168	RUMAH TAHANAN NEGARA MAJENE	1.300.000,00
169	LEMBAGA PEMASYARAKATAN POLEWALI	16.210.000,00
170	RUMAH TAHANAN NEGARA MAMUJU	327.000,00
171	RUMAH TAHANAN NEGARA SENGKANG	5.100.000,00
172	LEMBAGA PEMASYARAKATAN AMBON	10.255.000,00
173	LEMBAGA PEMASYARAKATAN PIRU	4.363.250,00
174	LAPAS KELAS III SAPARUA	390.000,00
175	RUMAH TAHANAN NEGARA MASOHI	3.080.000,00
176	LAPAS KELAS III NAMLEA	2.740.000,00
177	LAPAS KELAS III BANDANAIRA	694.000,00
178	LAPAS KELAS III WONRELI	850.000,00
179	LAPAS KELAS III DOBO	949.000,00
180	LEMBAGA PEMASYARAKATAN TUAL	3.020.500,00
181	LAPAS KELAS III SAUMLAKI	3.895.000,00
182	LAPAS KELAS III LABUHA	3.570.000,00
183	LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS IIA KEROBOKAN	15.884.000,00
184	LEMBAGA PEMASYARAKATAN SINGARAJA	6.711.000,00
185	LAPAS TABANAN	6.170.000,00
186	RUMAH TAHANAN NEGARA GIANYAR	1.378.000,00
187	RUMAH TAHANAN NEGARA BANGLI	1.868.750,00
188	LEMBAGA PEMASYARAKATAN KARANGASEM	7.960.000,00
189	LEMBAGA PEMASYARAKATAN MATARAM	1.855.000,00
190	LEMBAGA PEMASYARAKATAN SUMBAWA BESAR	11.750.000,00
191	RUMAH TAHANAN NEGARA RABA/BIMA	1.460.000,00
192	LEMBAGA PEMASYARAKATAN KUPANG	19.845.000,00
193	LAPAS ATAMBUA	12.500.000,00
194	RUMAH TAHANAN NEGARA KEFAMENANU	5.500.000,00
195	LAPAS KELAS III BAA	2.257.301,00
196	RUMAH TAHANAN NEGARA SO'E	1.450.000,00
197	LEMBAGA PEMASYARAKATAN KALABAHI	4.900.000,00
198	LEMBAGA PEMASYARAKATAN WAINGAPU	750.000,00
199	LEMBAGA PEMASYARAKATAN WAIKABUBAK	9.220.000,00
200	LEMBAGA PEMASYARAKATAN ENDE	7.105.000,00
201	RUMAH TAHANAN NEGARA BAJAWA	1.450.000,00
202	RUMAH TAHANAN NEGARA RUTENG	4.250.000,00
203	RUMAH TAHANAN NEGARA MAUMERE	4.340.000,00
204	RUMAH TAHANAN NEGARA LARANTUKA	3.185.000,00
205	LEMBAGA PEMASYARAKATAN ABEPURA	6.300.000,00
206	LEMBAGA PEMASYARAKATAN NABIRE	500.000,00
207	LEMBAGA PEMASYARAKATAN BIAK	6.600.000,00
208	LEMBAGA PEMASYARAKATAN SERUI	1.790.000,00
209	LEMBAGA PEMASYARAKATAN MERAUKE	1.000.000,00
210	LEMBAGA PEMASYARAKATAN MANOKWARI	8.950.000,00
211	LAPAS KELAS III TEMINABUHAN	58.500,00
212	LEMBAGA PEMASYARAKATAN SORONG	1.550.000,00
213	LEMBAGA PEMASYARAKATAN FAK-FAK	1.050.000,00
214	RUMAH TAHANAN NEGARA MANNA	3.140.000,00
215	LEMBAGA PEMASYARAKATAN CURUP	7.000.000,00
216	RUMAH TAHANAN NEGARA DUMAI	258.500,00

Pendapatan Penjualan Hasil Produksi Non Litbang Lainnya (Akun 425119)
Menurut daftar satuan kerja per 31 Desember 2021

No	Nama Satker	Jumlah
217	LEMBAGA PEMASYARAKATAN KOTA AGUNG	7.050.000,00
218	LEMBAGA PEMASYARAKATAN KALIANDA	18.700.000,00
219	LAPAS KELAS III DABO SINGKEP	908.000,00
220	LEMBAGA PEMASYARAKATAN AMPANA	1.500.000,00
221	RUMAH TAHANAN NEGARA BUNTOK	865.585,00
222	LEMBAGA PEMASYARAKATAN DOMPU	9.252.600,00
223	LAPAS KELAS III TANAH MERAH	500.000,00
224	Lapas Perempuan Kelas IIA Jakarta	12.985.000,00
225	Lapas Perempuan Kelas IIA Martapura	18.242.622,00
226	Lapas Perempuan Kelas IIA Palangkaraya	5.240.000,00
227	Lapas Perempuan Kelas IIA Samarinda	13.170.000,00
228	Lapas Perempuan Kelas IIA Denpasar	216.000,00
229	Lapas Perempuan Kelas IIA Pontianak	4.359.240,00
230	Lapas Perempuan Kelas IIB Jambi	40.744.429,00
231	Lapas Perempuan Kelas IIB Padang	3.600.000,00
232	Lapas Perempuan Kelas IIB Yogyakarta	1.648.000,00
233	Lapas Perempuan Kelas IIB Batam	26.032.525,00
234	Lapas Perempuan Kelas IIB Bengkulu	3.974.000,00
235	Lapas Perempuan Kelas IIB Manado	2.072.750,00
236	Lapas Perempuan Kelas III Ambon	1.310.250,00
237	Lapas Perempuan Kelas III Pangkal Pinang	2.500.000,00
238	Lapas Perempuan Kelas III Palu	3.100.000,00
239	Lapas Perempuan Kelas III Gorontalo	3.252.977,00
240	Lapas Perempuan Kelas III Ternate	1.365.000,00
241	Lapas Perempuan Kelas III Mataram	3.241.450,00
242	Lapas Perempuan Kelas III Jayapura	2.800.000,00
243	Lapas Perempuan Kelas III Manokwari	785.025,00
244	Lapas Perempuan Kelas III Mamuju	1.420.000,00
245	Rutan Perempuan Kelas IIA Medan	6.150.000,00
246	Rutan Perempuan Kelas IIA Bandung	623.000,00
247	LAPAS PEMUDA KELAS III LANGKAT PROVINSI SUMATERA UTARA	2.200.000,00
248	Lapas Kelas III Sukamara Provinsi Kalimantan Tengah	1.050.001,00
249	Rutan Kelas IIB Bener Meriah Provinsi Aceh	200.000,00
250	RUMAH TAHANAN NEGARA CIPINANG	20.014.396,00
251	LEMBAGA PEMASYARAKATAN SALEMBA	10.055.375,00
252	LEMBAGA PEMASYARAKATAN CIBINONG	21.770.000,00
253	LEMBAGA PEMASYARAKATAN NARKOTIKA YOGYAKARTA	7.821.500,00
254	LEMBAGA PEMASYARAKATAN WANITA PALEMBANG	24.067.025,00
255	RUMAH TAHANAN NEGARA KOTABUMI	7.910.000,00
256	LEMBAGA PEMASYARAKATAN WAY KANAN	20.000.000,00
257	RUMAH TAHANAN NEGARA LANDAK	300.000,00
258	RUMAH TAHANAN NEGARA BENGKAYANG	900.000,00
259	LEMBAGA PEMASYARAKATAN NUNUKAN	27.902.000,00
260	RUMAH TAHANAN NEGARA MANADO	6.146.000,00
261	LEMBAGA PEMASYARAKATAN WANITA SUNGGUMINASA	10.135.600,00
262	LEMBAGA PEMASYARAKATAN JAILOLO	2.100.000,00
263	LEMBAGA PEMASYARAKATAN BOALEMO	3.280.360,00
264	RUMAH TAHANAN NEGARA BATAM	20.550.996,00
265	LEMBAGA PEMASYARAKATAN NARKOTIKA TANJUNG PINANG	4.300.000,00
266	RUMAH TAHANAN NEGARA BALIKPAPAN	400.000,00
267	RUMAH TAHANAN NEGARA SOASIU	2.500.000,00
268	RUMAH TAHANAN NEGARA JANTHOI	3.750.000,00
269	RUMAH TAHANAN NEGARA GRESIK	147.500,00
270	RUMAH TAHANAN NEGARA PALU	7.250.000,00

Pendapatan Penjualan Hasil Produksi Non Litbang Lainnya (Akun 425119)
Menurut daftar satuan kerja per 31 Desember 2021

No	Nama Satker	Jumlah
271	LAPAS SUNGAI LIAT	6.900.000,00
272	RUMAH TAHANAN NEGARA (RUTAN) PALANGKARAYA	10.960.000,00
273	LAPAS TERBUKA CIANGIR	3.120.275,00
274	RUMAH TAHANAN NEGARA KENDARI	13.685.000,00
275	RUMAH TAHANAN NEGARA AMBON	1.377.500,00
276	LEMBAGA PEMASYARAKATAN NARKOTIKA DI CIREBON	17.681.000,00
277	RUMAH TAHANAN NEGARA SAMARINDA	6.109.200,00
278	LEMBAGA PEMASYARAKATAN TERNATE	8.355.000,00
279	LEMBAGA PEMASYARAKATAN SLEMAN	6.005.300,00
280	LEMBAGA PEMASYARAKATAN BITUNG	1.120.000,00
281	LEMBAGA PEMASYARAKATAN TERBUKA PASAMAN	28.175.000,00
282	LEMBAGA PEMASYARAKATAN TERBUKA KENDAL	120.000,00
283	LEMBAGA PEMASYARAKATAN TERBUKA NUSAKAMBANGAN	1.610.000,00
284	LAPAS TERBUKA KELAS IIB LOMBOK TENGAH	10.100.000,00
285	LEMBAGA PEMASYARAKATAN TERBUKA WAIKABUBAK	52.005.000,00
286	LAPAS NARKOTIKA KELAS IIA MUARA BELITI	16.800.000,00
287	LEMBAGA PEMASYARAKATAN NARKOTIKA JAKARTA	73.225.133,00
288	LEMBAGA PEMASYARAKATAN NARKOTIKA MADIUN	9.479.575,00
289	LEMBAGA PEMASYARAKATAN NARKOTIKA PAMEKASAN	4.954.600,00
290	LEMBAGA PEMASYARAKATAN NARKOTIKA MARTAPURA	42.073.190,00
291	LEMBAGA PEMASYARAKATAN NARKOTIKA BANGLI	18.240.000,00
292	LEMBAGA PEMASYARAKATAN NARKOTIKA SUNGGUMINASA	6.070.000,00
293	LEMBAGA PEMASYARAKATAN NARKOTIKA JAYAPURA	2.580.000,00
294	RUMAH TAHANAN NEGARA BANDAR LAMPUNG	210.000,00
295	RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS I TANJUNG PINANG	5.000.000,00
296	LAPAS KELAS IIB GUNUNG SUGIH	9.927.900,00
297	LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS III LEMBATA	3.700.000,00
298	LAPAS KELAS IIB TANJUNG	250.000,00
299	LAPAS PEREMPUAN KELAS IIB KUPANG	7.169.000,00
300	LAPAS NARKOTIKA KELAS IIA SAMARINDA	3.500.000,00
301	RUMAH TAHANAN KELAS IIB KOTA AGUNG	3.450.500,00
302	RUMAH TAHANAN KELAS IIB GARUT	2.765.000,00
303	RUMAH TAHANAN KELAS IIB BANDA ACEH	2.785.000,00
304	RUMAH TAHANAN KELAS IIB PASANG KAYU	5.760.000,00
305	LAPAS KELAS IIB SOROLANGUN	8.000.000,00
306	LAPAS KELAS IIA BANYUASIN	175.000,00
307	LAPAS KELAS IIB KAYU AGUNG	7.000.000,00
308	LAPAS KHUSUS KELAS IIA GUNUNG SINDUR	22.597.900,00
309	LAPAS KELAS IIA CIKARANG	50.900.000,00
310	LAPAS KELAS IIA CILEGON	7.091.301,00
311	LAPAS NARKOTIKA KELAS IIB LANGSA	5.840.000,00
312	LAPAS NARKOTIKA KELAS IIA LANGKAT	3.735.000,00
313	LAPAS NARKOTIKA KELAS IIB MUARA SABAK	35.469.400,00
314	LAPAS NARKOTIKA KELAS IIA KASONGAN	5.390.000,00
315	LAPAS NARKOTIKA KELAS IIA GUNUNG SINDUR	3.550.000,00
316	RUTAN KELAS IIB TAMIYANG LAYANG PROPINSI KALIMANTAN TENGAH	750.000,00
317	LAPAS KELAS IIB BLANGPIDIE	2.700.000,00
318	LAPAS PEREMPUAN KELAS IIB SIGLI	2.612.000,00
319	Lapas Narkotika Kelas III Sawah Lunto	5.610.000,00
320	Lapas Kelas III Dharmas Raya	1.200.000,00
321	LAPAS NARKOTIKA KELAS IIB BANYUASIN	19.500.000,00
322	Rutan Kelas II B Bengkulu	4.474.000,00
323	Lapas Terbuka Kelas III Rumbai	6.800.000,00
324	RUTAN KELAS I DEPOK	2.543.750,00

Pendapatan Penjualan Hasil Produksi Non Litbang Lainnya (Akun 425119)
Menurut daftar satuan kerja per 31 Desember 2021

No	Nama Satker	Jumlah
325	LAPAS KELAS IIB BANJARBARU	7.712.990,00
326	LAPAS KELAS IIB PAHUWATO	24.000.000,00
327	Rutan Kelas II B Weda	770.000,00
Jumlah		2.495.262.850,00

**Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin (Akun 425122)
Menurut daftar satuan kerja per 31 Desember 2021**

No	Nama Satker	Jumlah
1	KANWIL DEPARTEMEN HUKUM DAN HAM MANADO	45.791.256,00
2	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PROPINSI GORONTALO	37.704.999,00
3	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM KEPULAUAN RIAU	57.567.888,00
4	BALAI HARTA PENINGGALAN SURABAYA	3.750.000,00
5	RUMAH TAHANAN NEGARA BANTUL	1.987.654,00
6	RUMAH TAHANAN NEGARA MARABAHAN	49.016.000,00
7	RUMAH TAHANAN NEGARA CIREBON	7.777.999,00
8	BALAI PEMASYARAKATAN BOGOR	1.555.555,00
9	BALAI PEMASYARAKATAN MAGELANG	13.265.221,00
10	LAPAS KLATEN	72.280.000,00
11	RUMAH TAHANAN NEGARA BANYUMAS	11.789.999,00
12	RUMAH TAHANAN NEGARA PURBALINGGA	7.750.000,00
13	RUMAH TAHANAN NEGARA SIGLI	2.865.000,00
14	RUTAN KELAS I LABUHAN DELI	9.099.999,00
15	LAPAS KELAS III ALAHAN PANJANG	538.000,00
16	LEMBAGA PEMASYARAKATAN PASIR PANGARAYAN	4.437.000,00
17	LAPAS MUARA BULIAN	67.050.000,00
18	RUMAH TAHANAN NEGARA SANGGAU	73.750.000,00
19	RUMAH TAHANAN NEGARA BARABAI	1.350.000,00
20	RUMAH TAHANAN NEGARA KOTAMOBAGU	2.500.000,00
21	LAPAS KELAS III LIRUNG	902.987,00
22	LEMBAGA PEMASYARAKATAN PALU	560.000,00
23	RUMAH TAHANAN NEGARA PANGKAJENE	19.101.000,00
24	BALAI PEMASYARAKATAN MATARAM	1.950.500,00
25	LAPAS ATAMBUA	15.888.999,00
26	BALAI PEMASYARAKATAN BANJARMASIN	9.775.995,00
27	LEMBAGA PEMASYARAKATAN WANITA SUNGGUMINASA	41.000,00
28	RUMAH TAHANAN NEGARA GRESIK	3.100.000,00
29	RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAN NEGARA KUPANG	1.111.111,00
30	BALAI PEMASYARAKATAN MUARA TEWE	29.611.000,00
31	RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAN NEGARA INDRAMAYU	1.300.000,00
32	RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS I TANJUNG PINANG	880.000,00
33	LAPAS KELAS IIB WARUNG KIARA	1.559.918,00
34	Rutan Kelas II B Padang	500.000,00
35	KANTOR IMIGRASI KELAS II NON TPI KUALA TUNGKAL	10.699.900,00
36	KANTOR IMIGRASI KELAS I KHUSUS TPI SURABAYA	205.000.000,00
37	KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI TANJUNG PINANG	32.874.569,00
38	KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI MATARAM	1.800.000,00
39	KANTOR IMIGRASI KELAS I NON TPI PALANGKARAYA	30.111.111,00
40	KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI TEMBILAHAN	3.010.000,00
41	KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI BANJARMASIN	67.733.000,00
42	KANTOR IMIGRASI KELAS I KHUSUS TPI BATAM	7.200.000,00
43	PERWAKILAN IMIGRASI DI JEDDAH	43.967.970,00
44	KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI SURAKARTA	325.000,00
45	KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI KENDARI	74.610.000,00
46	KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI BENGKULU	1.357.999,00
47	KANTOR IMIGRASI KELAS II NON TPI SUKABUMI	8.375.000,00
48	KANTOR IMIGRASI KELAS II NON TPI BLITAR	10.150.000,00
49	KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI SUMBAWA BESAR	6.000.000,00
50	KANTOR IMIGRASI KELAS II NON TPI MUARA ENIM	12.690.000,00
51	KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI TAHUNA	47.121.000,00

Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin (Akun 425122)
Menurut daftar satuan kerja per 31 Desember 2021

No	Nama Satker	Jumlah
52	RUMAH DETENSI IMIGRASI MANADO	75.671.678,00
53	RUMAH DETENSI IMIGRASI DENPASAR	11.555.555,00
54	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA	79.141.388,00
Jumlah		1.287.503.250,00

Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya (Akun 425129)
Menurut daftar satuan kerja per 31 Desember 2021

No	Nama Satker	Jumlah
1	SEKRETARIAT JENDERAL (PUSAT)	104.586.512,00
2	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAKARTA RAYA	20.575.000,00
3	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SUMATERA UTARA DI MEDAN	115.999,00
4	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BANDA ACEH	13.979.797,00
5	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PADANG	755.000,00
6	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PEKANBARU	3.512.000,00
7	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM DENPASAR	8.176.000,00
8	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAYAPURA	4.322.000,00
9	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAMBI	9.503.899,00
10	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM YOGYAKARTA	2.000.123,00
11	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM MATARAM	4.555.500,00
12	PUSAT DATA DAN TEKNOLOGI INFORMASI	80.217.890,00
13	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PROPINSI BANTEN	3.800.000,00
14	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PROPINSI BANGKA BELITUNG	1.567.898,00
15	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SULAWESI BARAT	1.700.000,00
16	BALAI HARTA PENINGGALAN SEMARANG	15.799.999,00
17	LEMBAGA PEMASYARAKATAN BATU	36.201.263,00
18	LAPAS BATAM	2.705.000,00
19	BALAI PEMASYARAKATAN JAK-PUS	10.024.000,00
20	RUMAH TAHANAN NEGARA PURWODADI	13.800.000,00
21	RUMAH TAHANAN NEGARA TRENGGALEK	1.600.000,00
22	RUMAH TAHANAN NEGARA SAMPANG	4.550.000,00
23	RUMAH TAHANAN NEGARA MAGETAN	15.942.022,00
24	LEMBAGA PEMASYARAKATAN LHOK SEUMAWÉ	200.000,00
25	LEMBAGA PEMASYARAKATAN KUTACANE	40.099.999,00
26	LAPAS KELAS IIA PANCUR BATU	4.255.554,00
27	LAPAS LUBUK PAKAM	3.123.456,00
28	LEMBAGA PEMASYARAKATAN PAYAKUMBUH	4.777.999,00
29	RUMAH TAHANAN NEGARA SANGGAU	6.729.500,00
30	LEMBAGA PEMASYARAKATAN SINTANG	344.000,00
31	LAPAS KELAS IIA TENGGARONG	820.000,00
32	LEMBAGA PEMASYARAKATAN MANADO	400.000,00
33	LEMBAGA PEMASYARAKATAN TAHUNA	18.169.999,00
34	LEMBAGA PEMASYARAKATAN ULU SIAU	2.168.000,00
35	RUMAH TAHANAN NEGARA RAPPANG	1.200.111,00
36	RUMAH TAHANAN NEGARA ENREKANG	1.127.000,00
37	LAPAS KELAS III LABUHA	393.000,00
38	BALAI PEMASYARAKATAN DENPASAR	43.000.000,00
39	LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS IIA KEROBOKAN	23.780.888,00
40	RUMAH TAHANAN NEGARA BANGLI	12.156.798,00
41	LEMBAGA PEMASYARAKATAN KARANGASEM	6.577.000,00
42	RUMAH TAHANAN NEGARA RABA/BIMA	5.500.000,00
43	RUMAH TAHANAN NEGARA KEFAMENANU	810.000,00
44	RUMAH TAHANAN NEGARA JAKARTA PUSAT	2.522.000,00
45	LEMBAGA PEMASYARAKATAN PRIA TANGERANG	288.777.777,00
46	BALAI PEMASYARAKATAN PONTIANAK	1.511.500,00
47	DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN	43.657.000,00
48	RUMAH TAHANAN NEGARA UNAHA	1.750.000,00
49	LEMBAGA PEMASYARAKATAN JAILOLO	367.400,00
50	LEMBAGA PEMASYARAKATAN NARKOTIKA TANJUNG PINANG	1.250.000,00
51	RUMAH TAHANAN NEGARA SERANG	315.000,00
52	RUMAH TAHANAN NEGARA KENDARI	500.000,00
53	RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAN NEGARA JAKARTA PUSAT	13.428.000,00
54	RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAN NEGARA SAMARINDA	550.000,00
55	LEMBAGA PEMASYARAKATAN TERNATE	1.811.000,00
56	LEMBAGA PEMASYARAKATAN LUBUK BASUNG	2.122.232,00
57	LEMBAGA PEMASYARAKATAN NARKOTIKA JAKARTA	17.900.009,00
58	LEMBAGA PEMASYARAKATAN NARKOTIKA PAMEKASAN	6.000.001,00
59	RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAN NEGARA SANGGAU	7.150.000,00
60	RUMAH SAKIT PENGAYOMAN CIPINANG KELAS D	22.027.999,00
61	Lapas Kelas III Dharmas Raya	380.000,00
62	KANTOR IMIGRASI KELAS II NON TPI DABO SINGKEP	5.700.000,00
63	KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI LHOKSEUMAWÉ	20.287.000,00
64	KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI DUMAI	8.100.000,00
65	KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI BELAKANG PADANG	10.160.000,00

Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya (Akun 425129)
Menurut daftar satuan kerja per 31 Desember 2021

No	Nama Satker	Jumlah
66	KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI PALEMBANG	3.500.999,00
67	KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI PANGKAL PINANG	310.000,00
68	KANTOR IMIGRASI KELAS II NON TPI SINGKAWANG	43.764.000,00
69	KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI MAKASSAR	29.287.000,00
70	KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI DENPASAR	600.000,00
71	KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI MATARAM	2.700.000,00
72	KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI JAYAPURA	2.800.000,00
73	KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI SORONG	6.929.000,00
74	KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI MERAUKE	16.050.000,00
75	KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI TEMBILAHAN	2.550.000,00
76	KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI MANADO	66.796.998,00
77	KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI TANJUNG PERAK	21.588.000,00
78	KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI BITUNG	1.576.433,00
79	KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI MAUMERE	1.500.000,00
80	DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI	15.800.000,00
81	KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI TERNATE	51.833.000,00
82	KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI ENTIKONG	12.482.500,00
83	KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI SABANG	3.666.666,00
84	KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI JAKARTA UTARA	17.058.588,00
85	KANTOR IMIGRASI KELAS II NON TPI MADIUN	10.779.999,00
86	KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI SINGARAJA	10.000.000,00
87	KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI SAMBAS	72.051.000,00
88	DITJEN KEKAYAAN INTELEKTUAL	83.610.700,00
89	DITJEN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	86.814.000,00
90	BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL	43.669.000,00
91	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA	730.000,00
Jumlah		1.600.338.007,00

Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan (Akun 425131)
Menurut daftar satuan kerja per 31 Desember 2021

No	Nama Satker	Jumlah
1	SEKRETARIAT JENDERAL (PUSAT)	3.498.770.349,00
2	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAKARTA RAYA	181.224,00
3	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BANDUNG	66.721.399,00
4	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAWA TENGAH	10.467.400,00
5	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SURABAYA	28.945.800,00
6	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SUMATERA UTARA DI MEDAN	16.126.007,00
7	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM UJUNG PANDANG	31.267.350,00
8	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BANDA ACEH	41.366.762,00
9	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PADANG	9.445.015,00
10	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PEKANBARU	65.606.337,00
11	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PALEMBANG	40.987.056,00
12	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM TANJUNG KARANG	6.777.376,00
13	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PONTIANAK	37.220.334,00
14	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BANJARMASIN	10.460.400,00
15	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SAMARINDA	23.957.579,00
16	KANWIL DEPARTEMEN HUKUM DAN HAM MANADO	46.862.048,00
17	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM DENPASAR	32.153.558,00
18	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM KUPANG	6.721.492,00
19	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM AMBON	36.194.802,00
20	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAYAPURA	7.331.331,00
21	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAMBI	11.451.090,00
22	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BENGKULU	7.689.515,00
23	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM YOGYAKARTA	47.144.124,00
24	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PALANGKARAYA	2.721.463,00
25	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM KENDARI	16.488.500,00
26	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PALU	17.214.602,00
27	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM MATARAM	16.416.000,00
28	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PROPINSI BANTEN	8.588.706,00
29	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PROPINSI BANGKA BELITUNG	6.911.127,00
30	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PROPINSI GORONTALO	45.557.934,00
31	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PROPINSI MALUKU UTARA	73.151.084,00
32	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PAPUA BARAT	6.030.000,00
33	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM KEPULAUAN RIAU	15.343.667,00
34	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SULAWESI BARAT	24.337.481,00
35	BALAI HARTA PENINGGALAN SEMARANG	14.399.000,00
36	BALAI HARTA PENINGGALAN SURABAYA	26.629.956,00
37	BALAI HARTA PENINGGALAN MEDAN	4.841.600,00
38	DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM	1.653.460,00
39	BALAI PEMASYARAKATAN KELAS I TANGERANG	1.764.446,00
40	BALAI PEMASYARAKATAN KELAS II KLATEN	2.673.936,00
41	LEMBAGA PEMASYARAKATAN KARAWANG	5.434.463,00
42	LEMBAGA PEMASYARAKATAN BEKASI	15.057.387,00
43	LEMBAGA PEMASYARAKATAN PERMISAN	12.482.962,00
44	LEMBAGA PEMASYARAKATAN BATU	40.655.300,00
45	LEMBAGA PEMASYARAKATAN BESI	1.216.800,00
46	LEMBAGA PEMASYARAKATAN KEMBANG KUNING	6.387.680,00
47	RUMAH TAHANAN NEGARA PEKALONGAN	19.705.012,00
48	RUMAH TAHANAN NEGARA BANTUL	12.735.881,00
49	RUMAH TAHANAN NEGARA SURABAYA	18.194.996,00
50	BALAI PEMASYARAKATAN ACEH	3.333.304,00
51	LEMBAGA PEMASYARAKATAN WANITA MEDAN	293.400,00
52	LEMBAGA PEMASYARAKATAN ANAK MEDAN	218.580,00
53	RUMAH TAHANAN NEGARA MEDAN	31.327.500,00
54	BALAI PEMASYARAKATAN JAMBI	4.547.313,00
55	RUMAH TAHANAN NEGARA PALEMBANG	26.890.920,00
56	BALAI PEMASYARAKATAN BANDAR LAMPUNG	1.958.592,00
57	BAPAS KELAS I PALANGKARAYA	3.603.080,00
58	RUMAH TAHANAN NEGARA MARABAHAN	9.000.000,00
59	RUMAH TAHANAN NEGARA TANAH GROGOT	7.195.724,00
60	BALAI PEMASYARAKATAN BALIKPAPAN	2.523.247,00
61	BAPAS KELAS I MANADO	6.901.478,00
62	BALAI PEMASYARAKATAN PALU	6.560.430,00
63	BALAI PEMASYARAKATAN WATAMPONE	534.562,00
64	BALAI PEMASYARAKATAN KENDARI	4.479.000,00
65	BALAI PEMASYARAKATAN AMBON	6.055.248,00
66	LEMBAGA PEMASYARAKATAN ANAK GIANJAR	9.929.556,00
67	BALAI PEMASYARAKATAN KUPANG	3.021.696,00
68	BALAI PEMASYARAKATAN JAYAPURA	10.450.500,00

Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan (Akun 425131)
Menurut daftar satuan kerja per 31 Desember 2021

No	Nama Satker	Jumlah
69	LAPAS ARGAMAKMUR	13.391.800,00
70	BALAI PEMASYARAKATAN BENGKULU	1.293.990,00
71	LEMBAGA PEMASYARAKATAN TOBELLO	58.261.896,00
72	LEMBAGA PEMASYARAKATAN SANANA	21.615.854,00
73	LAPAS BATAM	61.780.756,00
74	RUMAH TAHANAN NEGARA YOGYAKARTA	9.036.884,00
75	LPKA Bengkulu, Provinsi Bengkulu	971.288,00
76	LPKA Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah	928.932,00
77	LPKA Palu, Provinsi Sulawesi Tengah	626.258,00
78	LPKA Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara	1.987.830,00
79	LPKA Ambon, Provinsi Maluku	648.780,00
80	LPKA Ternate, Provinsi Maluku Utara	1.154.429,00
81	LPKA Jayapura, Provinsi Papua	869.616,00
82	LPKA Manokwari, Provinsi Papua Barat	179.199,00
83	LPKA Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat	3.470.916,00
84	BALAI PEMASYARAKATAN JAKBAR	348.810,00
85	BALAI PEMASYARAKATAN JAKTIM/JAKUT	446.664,00
86	LEMBAGA PEMASYARAKATAN CIPINANG	75.237.725,00
87	RUTAN KELAS I PONDOK BAMBU	17.480.000,00
88	BALAI PEMASYARAKATAN BANDUNG	9.868.412,00
89	LEMBAGA PEMASYARAKATAN BANCEUY BANDUNG	12.721.176,00
90	LAPAS SUMEDANG	342.936,00
91	LAPAS GARUT	12.392.400,00
92	LAPAS CIAMIS	9.248.300,00
93	LAPAS TASIKMALAYA	4.250.676,00
94	LEMBAGA PEMASYARAKATAN SUKAMISKIN	405.991.596,00
95	BALAI PEMASYARAKATAN CIREBON	2.884.560,00
96	LEMBAGA PEMASYARAKATAN CIREBON	27.253.257,00
97	RUMAH TAHANAN NEGARA CIREBON	5.411.876,00
98	LEMBAGA PEMASYARAKATAN KUNINGAN	52.099.569,00
99	LAPAS MAJALENGKA	17.050.765,00
100	LAPAS INDRAMAYU	16.201.038,00
101	BALAI PEMASYARAKATAN BOGOR	960.000,00
102	LEMBAGA PEMASYARAKATAN BOGOR	36.799.974,00
103	LAPAS SUKABUMI	3.699.442,00
104	LAPAS CIANJUR	13.094.812,00
105	LAPAS PURWAKARTA	10.668.256,00
106	LEMBAGA PEMASYARAKATAN SUBANG	8.785.422,00
107	LEMBAGA PEMASYARAKATAN SERANG	16.041.070,00
108	LAPAS KELAS III RANGKAS BITUNG	4.094.412,00
109	LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEMUDA TANGERANG	6.839.636,00
110	LEMBAGA PEMASYARAKATAN ANAK PRIA TANGERANG	43.564.931,00
111	LAPAS KELAS IIA TANGERANG	181.224,00
112	BALAI PEMASYARAKATAN YOGYAKARTA	3.934.611,00
113	LEMBAGA PEMASYARAKATAN YOGYAKARTA	30.843.227,00
114	RUMAH TAHANAN NEGARA WATES	7.395.432,00
115	RUMAH TAHAN NEGARA WONOSARI	8.436.919,00
116	BALAI PEMASYARAKATAN SEMARANG	2.220.000,00
117	LEMBAGA PEMASYARAKATAN SEMARANG	13.840.699,00
118	RUMAH TAHANAN NEGARA PURWODADI	3.829.528,00
119	RUMAH TAHANAN NEGARA SALATIGA	660.768,00
120	LEMBAGA PEMASYARAKATAN KENDAL	1.080.000,00
121	RUMAH TAHANAN NEGARA DEMAK	1.212.190,00
122	LEMBAGA PEMASYARAKATAN AMBARAWA	95.966,00
123	LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA SEMARANG	13.814.145,00
124	BALAI PEMASYARAKATAN PEKALONGAN	324.540,00
125	LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEKALONGAN	906.672,00
126	RUMAH TAHANAN NEGARA PEMALANG	3.063.516,00
127	LAPAS TEGAL	3.189.377,00
128	LAPAS BREBES	2.678.030,00
129	BALAI PEMASYARAKATAN MAGELANG	660.960,00
130	LEMBAGA PEMASYARAKATAN MAGELANG	3.366.739,00
131	RUMAH TAHANAN NEGARA TEMANGGUNG	1.214.969,00
132	RUMAH TAHANAN NEGARA WONOSOBO	575.796,00
133	RUMAH TAHANAN NEGARA PURWOREJO	4.032.500,00
134	RUMAH TAHANAN NEGARA KEBUMEN	13.420.000,00
135	BALAI PEMASYARAKATAN PATI	588.000,00
136	LEMBAGA PEMASYARAKATAN PATI	5.331.036,00

Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan (Akun 425131)
Menurut daftar satuan kerja per 31 Desember 2021

No	Nama Satker	Jumlah
137	RUMAH TAHANAN NEGARA REMBANG	5.415.700,00
138	RUMAH TAHANAN NEGARA JEPARA	3.192.974,00
139	RUMAH TAHANAN NEGARA KUDUS	5.347.338,00
140	RUMAH TAHANAN NEGARA BLORA	1.010.800,00
141	BAPAS KELAS I SURAKARTA	1.453.500,00
142	RUMAH TAHANAN NEGARA SURAKARTA	13.308.253,00
143	LEMBAGA PEMASYARAKATAN SRAGEN	37.051.500,00
144	RUMAH TAHANAN NEGARA BOYOLALI	2.324.964,00
145	LAPAS KLATEN	5.369.760,00
146	RUMAH TAHANAN NEGARA WONOGIRI	3.198.200,00
147	BALAI PEMASYARAKATAN PURWOKERTO	324.540,00
148	LEMBAGA PEMASYARAKATAN PURWOKERTO	1.819.164,00
149	RUMAH TAHANAN NEGARA BANYUMAS	10.465.040,00
150	RUMAH TAHANAN NEGARA PURBALINGGA	3.900.000,00
151	RUMAH TAHANAN NEGARA BANJARNEGARA	4.141.176,00
152	LAPAS CILACAP	8.759.698,00
153	LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEMUDA PLANTUNGAN	2.623.376,00
154	BALAI PEMASYARAKATAN SURABAYA	2.337.984,00
155	LEMBAGA PEMASYARAKATAN KALISOSOK	222.053.124,00
156	LEMBAGA PEMASYARAKATAN SIDOARJO	7.530.137,00
157	LAPAS MOJOKERTO	8.889.697,00
158	LAPAS JOMBANG	8.610.466,00
159	BALAI PEMASYARAKATAN BOJONEGORO	914.868,00
160	LEMBAGA PEMASYARAKATAN BOJONEGORO	6.141.506,00
161	LAPAS TUBAN	7.041.538,00
162	LAPAS LAMONGAN	45.765.316,00
163	BALAI PEMASYARAKATAN KEDIRI	408.016,00
164	LEMBAGA PEMASYARAKATAN KEDIRI	22.910.450,00
165	LAPAS TULUNGAGUNG	17.184.500,00
166	RUMAH TAHANAN NEGARA NGANJUK	1.884.000,00
167	LAPAS BLITAR	7.718.828,00
168	RUMAH TAHANAN NEGARA TRENGGALEK	864.542,00
169	BALAI PEMASYARAKATAN JEMBER	4.425.340,00
170	LEMBAGA PEMASYARAKATAN JEMBER	15.769.080,00
171	LAPAS BONDOWOSO	8.080.000,00
172	LAPAS KELAS IIA BANYUWANGI	20.829.000,00
173	RUMAH TAHANAN NEGARA SITUBONDO	5.482.960,00
174	BALAI PEMASYARAKATAN PAMEKASAN	1.716.000,00
175	LEMBAGA PEMASYARAKATAN PAMEKASAN	34.984.650,00
176	RUMAH TAHANAN NEGARA SUMENEP	1.909.961,00
177	RUMAH TAHANAN NEGARA BANGKALAN	84.616.892,00
178	LAPAS KELLAS III ARJASA	330.000,00
179	RUMAH TAHANAN NEGARA SAMPANG	6.415.200,00
180	BALAI PEMASYARAKATAN MALANG	399.240,00
181	LEMBAGA PEMASYARAKATAN MALANG	30.667.644,00
182	LAPAS PROBOLINGGO	4.031.808,00
183	LAPAS LUMAJANG	2.212.499,00
184	LAPAS PASURUAN	8.440.122,00
185	RUMAH TAHANAN NEGARA BANGIL	6.020.302,00
186	LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN MALANG	55.240.512,00
187	BALAI PEMASYARAKATAN MADIUN	3.159.754,00
188	LEMBAGA PEMASYARAKATAN MADIUN	32.859.200,00
189	RUMAH TAHANAN NEGARA MAGETAN	3.234.000,00
190	LAPAS NGAWI	1.249.374,00
191	RUMAH TAHANAN NEGARA PONOROGO	14.893.022,00
192	RUMAH TAHANAN NEGARA PACITAN	11.282.100,00
193	LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK BLITAR	72.230.132,00
194	LEMBAGA PEMASYARAKATAN BANDA ACEH	13.783.912,00
195	RUMAH TAHANAN NEGARA SABANG	1.027.417,00
196	RUMAH TAHANAN NEGARA SIGLI	3.401.200,00
197	LEMBAGA PEMASYARAKATAN LHOK SEUMAWE	22.530.564,00
198	LAPAS KELAS III LHOK NGA	12.799.096,00
199	LAPAS KELAS IIB LHOKSUKON	479.322,00
200	LAPAS KELAS IIB BIREUN	5.149.053,00
201	RUMAH TAHANAN NEGARA TAKENGON	15.919.606,00
202	LAPAS KELAS IIB KOTA BAKTI	655.050,00
203	LAPAS KELAS IIB IDI RAYEUK	6.489.077,00
204	LEMBAGA PEMASYARAKATAN KUALA SIMPANG	3.860.253,00

Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan (Akun 425131)
Menurut daftar satuan kerja per 31 Desember 2021

No	Nama Satker	Jumlah
205	LAPAS KELAS IIB IDI	5.393.475,00
206	LEMBAGA PEMASYARAKATAN KUTACANE	1.485.280,00
207	LAPAS KELAS IIB BLANGKEJEREN	2.039.712,00
208	LEMBAGA PEMASYARAKATAN MEULABOH	6.340.835,00
209	LAPAS KELAS III CALANG	4.547.127,00
210	RUMAH TAHANAN NEGARA TAPAKTUAN	411.204,00
211	LAPAS KELAS III SINABANG	668.256,00
212	BALAI PEMASYARAKATAN MEDAN	5.456.668,00
213	LEMBAGA PEMASYARAKATAN MEDAN	56.160.000,00
214	LAPAS KELAS IIA PANCUR BATU	62.000,00
215	LEMBAGA PEMASYARAKATAN BINJAI	2.332.866,00
216	RUMAH TAHANAN NEGARA TANJUNG PURA	2.300.004,00
217	LAPAS TANJUNG BALAI ASAHAN	1.567.098,00
218	LEMBAGA PEMASYARAKATAN LABUHAN RUKU	6.563.328,00
219	LEMBAGA PEMASYARAKATAN RANTAU PRAPAT	4.546.900,00
220	RUMAH TAHANAN NEGARA KABANJAHE	1.251.000,00
221	LAPAS KELAS III LABUAN BILIK	1.359.394,00
222	LAPAS KELAS III KOTA PINANG	826.380,00
223	RUTAN KELAS I LABUHAN DELI	835.320,00
224	RUMAH TAHANAN NEGARA PANGKALAN BRANDAN	669.600,00
225	LEMBAGA PEMASYARAKATAN TEBINGTINGGI DELI	4.030.080,00
226	LAPAS LUBUK PAKAM	4.418.980,00
227	RUMAH TAHANAN NEGARA SIDIKALANG	4.765.254,00
228	LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEMATANG SIANTAR	10.785.504,00
229	LEMBAGA PEMASYARAKATAN SIBOLGA	3.962.319,00
230	LAPAS GUNUNG SITOLI	10.246.965,00
231	LAPAS KELAS III TELUK DALAM	5.852.645,00
232	LAPAS PADANG SIDEMPUAN	1.507.905,00
233	LAPAS KELAS III KOTANOPAN	277.200,00
234	RUMAH TAHANAN NEGARA TARUTUNG	6.287.540,00
235	LAPAS KELAS III GUNUNG TUA	5.695.000,00
236	LEMBAGA PEMASYARAKATAN SIBORONG-BORONG	565.568,00
237	RUMAH TAHANAN NEGARA BALIGE	10.549.249,00
238	LAPAS KELAS III PANGURURAN	1.777.000,00
239	RUTAN KELAS IIB SIPIROK	1.397.088,00
240	LAPAS KELAS III BARUS	2.625.868,00
241	LEMBAGA PEMASYARAKATAN PANYABUNGAN	3.518.300,00
242	RUTAN KELAS IIB NATAL	1.130.666,00
243	LEMBAGA PEMASYARAKATAN PADANG	6.232.386,00
244	LEMBAGA PEMASYARAKATAN PARIAMAN	8.824.009,00
245	RUMAH TAHANAN NEGARA PAINAN	1.491.336,00
246	LAPAS KELAS III ALAHAN PANJANG	269.269,00
247	RUTAN KELAS IIB MUARA LABUH	1.076.400,00
248	LEMBAGA PEMASYARAKATAN BUKITTINGGI	9.075.838,00
249	LAPAS KELAS III TALU	3.084.852,00
250	RUMAH TAHANAN NEGARA PADANG PANJANG	3.250.434,00
251	RUTAN KELAS IIB MANINJAU	298.980,00
252	RUMAH TAHANAN NEGARA LUBUK SIKAPING	1.847.272,00
253	LEMBAGA PEMASYARAKATAN PAYAKUMBUH	1.528.020,00
254	LAPAS KELAS III SULIKI	2.980.521,00
255	RUMAH TAHANAN NEGARA SAWAH LUNTO	1.056.036,00
256	LEMBAGA PEMASYARAKATAN SOLOK	5.559.615,00
257	LEMBAGA PEMASYARAKATAN SIJUNJUNG	4.687.536,00
258	RUMAH TAHANAN NEGARA BATUSANGKAR	3.105.024,00
259	BALAI PEMASYARAKATAN PEKANBARU	7.807.152,00
260	LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEKANBARU	53.987.400,00
261	LEMBAGA PEMASYARAKATAN BENGKALIS	22.386.008,00
262	RUMAH TAHANAN NEGARA SIAK SRI INDRAPURA	11.232.001,00
263	LAPAS KELAS IIA BAGAN SIPI-API	7.316.371,00
264	RUMAH TAHANAN NEGARA RENGAT	11.461.392,00
265	LEMBAGA PEMASYARAKATAN TEMBILAHAN	22.409.737,00
266	LAPAS KELAS IIB TELUK KUANTAN	6.335.490,00
267	LAPAS KELAS IIB SELATPANJANG	8.211.141,00
268	LAPAS KELAS IIA BANGKINANG	51.092.866,00
269	LEMBAGA PEMASYARAKATAN PASIR PANGARAYAN	68.718.163,00
270	LEMBAGA PEMASYARAKATAN TANJUNG PINANG	34.481.078,00
271	LEMBAGA PEMASYARAKATAN METRO	9.513.390,00
272	CABANG RUMAH TAHANAN NEGARA TANJUNG BALAI KARIMUN	16.415.034,00

Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan (Akun 425131)
Menurut daftar satuan kerja per 31 Desember 2021

No	Nama Satker	Jumlah
273	LEMBAGA PEMASYARAKATAN JAMBI	32.428.280,00
274	LAPAS MUARA BULIAN	11.496.396,00
275	LEMBAGA PEMASYARAKATAN MUARA BUNGO	20.470.318,00
276	LEMBAGA PEMASYARAKATAN MUARA TEBO	13.368.288,00
277	LAPAS BANGKO	11.552.000,00
278	LEMBAGA PEMASYARAKATAN KUALA TUNGKAL	11.759.208,00
279	RUMAH TAHANAN NEGARA SUNGAI PENUH	5.516.602,00
280	BALAI PEMASYARAKATAN PALEMBANG	2.115.091,00
281	LEMBAGA PEMASYARAKATAN PALEMBANG	27.270.700,00
282	LEMBAGA PEMASYARAKATAN TANJUNG RAJA	30.372.648,00
283	LAPAS SEKAYU	22.062.516,00
284	LEMBAGA PEMASYARAKATAN LAHAT	31.517.160,00
285	LAPAS MUARA ENIM	12.892.200,00
286	LAPAS KELAS IIB MUARA DUA	4.202.238,00
287	LAPAS KELAS III PAGAR ALAM	687.000,00
288	LAPAS KELAS IIB EMPAT LAWANG	2.879.372,00
289	LEMBAGA PEMASYARAKATAN LUBUK LINGGAU	2.205.596,00
290	LAPAS KELAS III SAROLANGUN RAWAS	1.995.600,00
291	RUMAH TAHANAN NEGARA BATURAJA	3.736.692,00
292	LAPAS KELAS IIB MARTAPURA	3.526.671,00
293	RUMAH TAHANAN NEGARA PRABUMULIH	2.566.000,00
294	LEMBAGA PEMASYARAKATAN PANGKALPINANG	14.637.166,00
295	LEMBAGA PEMASYARAKATAN TANJUNG PANDAN	5.432.025,00
296	RUTAN KELAS IIB MUNTOK	4.489.893,00
297	LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK PALEMBANG	12.751.417,00
298	LEMBAGA PEMASYARAKATAN BANDAR LAMPUNG	31.481.000,00
299	LAPAS KELAS IIA KOTABUMI	3.081.816,00
300	RUMAH TAHANAN NEGARA MENGGALA	6.722.192,00
301	RUMAH TAHANAN NEGARA SUKADANA	3.365.964,00
302	RUMAH TAHANAN NEGARA KRUI	3.844.376,00
303	LEMBAGA PEMASYARAKATAN PONTIANAK	31.798.990,00
304	RUMAH TAHANAN NEGARA SANGGAU	8.364.240,00
305	LEMBAGA PEMASYARAKATAN SINGKAWANG	16.372.500,00
306	RUMAH TAHANAN NEGARA MEMPAWAH	14.848.375,00
307	RUMAH TAHANAN NEGARA SAMBAS	15.221.744,00
308	LEMBAGA PEMASYARAKATAN SINTANG	10.666.918,00
309	LEMBAGA PEMASYARAKATAN KETAPANG	4.329.742,00
310	LEMBAGA PEMASYARAKATAN ANAK NEGARA SUNGAI RAYA	10.774.960,00
311	LEMBAGA PEMASYARAKATAN PALANGKARAYA	5.394.196,00
312	RUMAH TAHANAN NEGARA KUALA KAPUAS	5.745.311,00
313	LEMBAGA PEMASYARAKATAN MUARA TEWE	5.206.132,00
314	LEMBAGA PEMASYARAKATAN PANGKALAN BUN	10.410.976,00
315	LAPAS SAMPIT	9.888.000,00
316	LEMBAGA PEMASYARAKATAN BANJARMASIN	28.371.000,00
317	LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK MARTAPURA	8.583.702,00
318	RUMAH TAHANAN NEGARA PELAIHARI	1.318.760,00
319	LAPAS KELAS IIA KOTABARU	7.388.765,00
320	RUMAH TAHANAN NEGARA KANDANGAN	2.057.025,00
321	RUMAH TAHANAN NEGARA RANTAU	14.627.325,00
322	RUMAH TAHANAN NEGARA BARABAI	5.194.430,00
323	LEMBAGA PEMASYARAKATAN AMUNTAI	15.011.547,00
324	RUMAH TAHANAN NEGARA TANJUNG	4.748.594,00
325	LEMBAGA PEMASYARAKATAN BALIKPAPAN	177.647.891,00
326	RUMAH TAHANAN NEGARA TANJUNG REDEP	8.529.061,00
327	LEMBAGA PEMASYARAKATAN SAMARINDA	31.867.340,00
328	LAPAS KELAS IIA TENGGARONG	11.710.268,00
329	LEMBAGA PEMASYARAKATAN TARAKAN	23.055.000,00
330	LEMBAGA PEMASYARAKATAN MANADO	50.807.156,00
331	LAPAS KELAS III AMURANG	10.898.581,00
332	LEMBAGA PEMASYARAKATAN TONDANO	35.225.146,00
333	LEMBAGA PEMASYARAKATAN ANAK TOMOHON	38.919.059,00
334	RUMAH TAHANAN NEGARA KOTAMOBAGU	24.558.189,00
335	LEMBAGA PEMASYARAKATAN GORONTALO	5.249.673,00
336	LEMBAGA PEMASYARAKATAN TAHUNA	24.518.274,00
337	LAPAS KELAS III ENEMAWIRA	5.861.216,00
338	LAPAS KELAS III TAMAKO	6.768.696,00
339	LAPAS KELAS III LIRUNG	3.098.160,00
340	LAPAS KELAS III TAUGULANDANG	3.551.601,00

Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan (Akun 425131)
Menurut daftar satuan kerja per 31 Desember 2021

No	Nama Satker	Jumlah
341	LEMBAGA PEMASYARAKATAN ULU SIAU	7.742.218,00
342	LEMBAGA PEMASYARAKATAN PALU	40.645.061,00
343	RUMAH TAHANAN NEGARA DONGGALA	6.095.747,00
344	LAPAS KELAS III PARIGI	10.618.886,00
345	LEMBAGA PEMASYARAKATAN TOLI-TOLI	8.845.350,00
346	LAPAS KELAS III LEOK	2.316.170,00
347	LEMBAGA PEMASYARAKATAN LUWUK	7.539.939,00
348	LAPAS KELAS III KOLONEDALE	11.253.168,00
349	RUMAH TAHANAN NEGARA POSO	3.221.371,00
350	BALAI PEMASYARAKATAN UJUNG PANDANG	1.680.000,00
351	LEMBAGA PEMASYARAKATAN UJUNG PANDANG	8.839.151,00
352	RUMAH TAHANAN NEGARA PANGKAJENE	7.370.868,00
353	LPKA KELAS II MAROS	2.495.606,00
354	LAPAS TAKALAR	15.331.420,00
355	RUMAH TAHANAN NEGARA JENEPONTO	1.200.000,00
356	RUMAH TAHANAN NEGARA SELAYAR	1.302.790,00
357	RUMAH TAHANAN NEGARA BANTA ENG	5.550.000,00
358	LEMBAGA PEMASYARAKATAN BULUKUMBA	17.392.462,00
359	RUMAH TAHANAN NEGARA MALINO	2.034.840,00
360	RUMAH TAHANAN NEGARA SINJAI	2.571.088,00
361	LEMBAGA PEMASYARAKATAN PALOPO	12.199.934,00
362	RUMAH TAHANAN NEGARA MAKALE	712.245,00
363	RUMAH TAHANAN NEGARA MASAMBA	6.662.898,00
364	LAPAS KELAS IIA PARE-PARE	5.730.000,00
365	RUMAH TAHANAN NEGARA PINRANG	19.138.000,00
366	RUMAH TAHANAN NEGARA RAPPANG	6.893.808,00
367	RUMAH TAHANAN NEGARA ENREKANG	320.204,00
368	RUMAH TAHANAN NEGARA BARRU	18.422.000,00
369	RUMAH TAHANAN NEGARA MAJENE	1.171.872,00
370	LEMBAGA PEMASYARAKATAN POLEWALI	7.231.414,00
371	LAPAS KELAS III MAMASA	407.628,00
372	RUMAH TAHANAN NEGARA MAMUJU	1.234.992,00
373	LEMBAGA PEMASYARAKATAN WATAMPONE	8.457.250,00
374	RUMAH TAHANAN NEGARA SENGKANG	1.510.272,00
375	RUMAH TAHANAN NEGARA WATANSOPENG	1.604.264,00
376	LEMBAGA PEMASYARAKATAN KENDARI	20.277.000,00
377	RUMAH TAHANAN NEGARA RAHA	18.427.453,00
378	LEMBAGA PEMASYARAKATAN BAU-BAU	54.628.000,00
379	RUMAH TAHANAN NEGARA KOLAKA	31.854.000,00
380	LEMBAGA PEMASYARAKATAN AMBON	19.764.084,00
381	LEMBAGA PEMASYARAKATAN PIRU	17.860.584,00
382	LAPAS KELAS III SAPARUA	729.372,00
383	RUMAH TAHANAN NEGARA MASOHI	6.724.562,00
384	LAPAS KELAS III NAMLEA	1.959.000,00
385	LAPAS KELAS III BANDANAIRA	454.900,00
386	LAPAS KELAS III GESER	718.800,00
387	LAPAS KELAS III WAHAI	1.676.328,00
388	LAPAS KELAS III WONRELI	1.153.800,00
389	LAPAS KELAS III DOBO	506.880,00
390	LEMBAGA PEMASYARAKATAN TUAL	8.612.424,00
391	LAPAS KELAS III SAUMLAKI	298.980,00
392	RUMAH TAHANAN NEGARA TERNATE	38.579.710,00
393	LAPAS KELAS III LABUHA	14.900.328,00
394	BALAI PEMASYARAKATAN DENPASAR	4.188.400,00
395	LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS IIA KEROBOKAN	17.390.177,00
396	LEMBAGA PEMASYARAKATAN SINGARAJA	6.135.636,00
397	RUMAH TAHANAN NEGARA NEGARA	8.516.744,00
398	RUMAH TAHANAN NEGARA KLUNGKUNG	3.448.992,00
399	LAPAS TABANAN	3.500.988,00
400	RUMAH TAHANAN NEGARA GIANYAR	10.611.264,00
401	RUMAH TAHANAN NEGARA BANGLI	7.069.700,00
402	LEMBAGA PEMASYARAKATAN KARANGASEM	15.013.320,00
403	BALAI PEMASYARAKATAN MATARAM	1.925.724,00
404	LEMBAGA PEMASYARAKATAN MATARAM	14.398.015,00
405	LAPAS KELAS IIB SELONG	25.631.941,00
406	RUMAH TAHANAN NEGARA PRAYA	12.779.028,00
407	LEMBAGA PEMASYARAKATAN SUMBAWA BESAR	20.457.780,00
408	RUMAH TAHANAN NEGARA RABA/BIMA	7.214.760,00

Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan (Akun 425131)
Menurut daftar satuan kerja per 31 Desember 2021

No	Nama Satker	Jumlah
409	LEMBAGA PEMASYARAKATAN KUPANG	6.215.196,00
410	LAPAS ATAMBUA	4.617.143,00
411	RUMAH TAHANAN NEGARA KEFAMENANU	4.700.264,00
412	LAPAS KELAS III BAA	1.082.364,00
413	RUMAH TAHANAN NEGARA SO'E	1.939.425,00
414	LEMBAGA PEMASYARAKATAN KALABAH	3.544.299,00
415	LEMBAGA PEMASYARAKATAN WAINGAPU	2.402.421,00
416	LEMBAGA PEMASYARAKATAN WAKABUBAK	15.699.525,00
417	LEMBAGA PEMASYARAKATAN ENDE	5.421.360,00
418	RUMAH TAHANAN NEGARA BAJAWA	3.310.111,00
419	RUMAH TAHANAN NEGARA RUTENG	4.250.419,00
420	RUMAH TAHANAN NEGARA MAUMERE	5.754.750,00
421	RUMAH TAHANAN NEGARA LARANTUKA	1.038.225,00
422	LEMBAGA PEMASYARAKATAN ABEPURA	11.522.522,00
423	LEMBAGA PEMASYARAKATAN WAMENA	37.996.560,00
424	LEMBAGA PEMASYARAKATAN NABIRE	7.964.027,00
425	LEMBAGA PEMASYARAKATAN BIAK	5.008.800,00
426	LEMBAGA PEMASYARAKATAN SERUI	3.726.135,00
427	LEMBAGA PEMASYARAKATAN MERAUKE	16.474.840,00
428	LEMBAGA PEMASYARAKATAN MANOKWARI	3.751.176,00
429	LAPAS KELAS III TEMINABUHAN	648.586,00
430	LEMBAGA PEMASYARAKATAN SORONG	7.792.064,00
431	LEMBAGA PEMASYARAKATAN FAK-FAK	2.654.805,00
432	LAPAS KELAS III KAIMANA	829.080,00
433	LEMBAGA PEMASYARAKATAN BENGKULU	6.823.902,00
434	RUMAH TAHANAN NEGARA MANNA	9.576.330,00
435	LEMBAGA PEMASYARAKATAN CURUP	10.448.740,00
436	RUMAH TAHANAN NEGARA DUMAI	16.902.328,00
437	LEMBAGA PEMASYARAKATAN KOTA AGUNG	10.174.233,00
438	LEMBAGA PEMASYARAKATAN KALIANDA	30.983.549,00
439	LAPAS KELAS III DABO SINGKEP	3.075.372,00
440	LEMBAGA PEMASYARAKATAN AMPANA	7.499.580,00
441	RUMAH TAHANAN NEGARA BUNTOK	17.013.024,00
442	LEMBAGA PEMASYARAKATAN DOMPU	11.711.093,00
443	LEMBAGA PEMASYARAKATAN ANAK KUTOARJO	2.920.000,00
444	LEMBAGA PEMASYARAKATAN WANITA TANGERANG	1.146.300,00
445	BALAI PEMASYARAKATAN BANJARMASIN	1.711.024,00
446	BALAI PEMASYARAKATAN PADANG	2.274.039,00
447	RUMAH TAHANAN NEGARA JAKARTA PUSAT	204.975.777,00
448	LEMBAGA PEMASYARAKATAN PRIA TANGERANG	56.279.520,00
449	BALAI PEMASYARAKATAN PONTIANAK	5.640.036,00
450	LEMBAGA PEMASYARAKATAN ANAK PEKANBARU	906.990,00
451	LAPAS KELAS III TANAH MERAH	2.472.000,00
452	DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN	57.034.127,00
453	RUMAH TAHANAN NEGARA PANDEGLANG	1.902.750,00
454	RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAN NEGARA (RUPBASAN) MAMUJU	316.328,00
455	Lapas Perempuan Kelas IIA Martapura	2.747.500,00
456	Lapas Perempuan Kelas IIA Palangkaraya	1.148.637,00
457	Lapas Perempuan Kelas IIA Samarinda	2.801.000,00
458	Lapas Perempuan Kelas IIA Pekanbaru	5.804.232,00
459	Lapas Perempuan Kelas IIA Pontianak	16.411.696,00
460	Lapas Perempuan Kelas IIB Jambi	90.288,00
461	Lapas Perempuan Kelas IIB Yogyakarta	681.668,00
462	Lapas Perempuan Kelas IIB Bengkulu	319.700,00
463	Lapas Perempuan Kelas IIB Manado	1.803.109,00
464	Lapas Perempuan Kelas III Kendari	1.015.500,00
465	Lapas Perempuan Kelas III Pangkal Pinang	11.400.000,00
466	Lapas Perempuan Kelas III Palu	2.466.618,00
467	Lapas Perempuan Kelas III Gorontalo	174.012,00
468	Lapas Perempuan Kelas III Mataram	96.290,00
469	Lapas Perempuan Kelas III Jayapura	1.982.832,00
470	Lapas Perempuan Kelas III Mamuju	6.361.050,00
471	Rutan Perempuan Kelas IIA Medan	80.000,00
472	Rutan Perempuan Kelas IIA Surabaya	960.960,00
473	Rutan Perempuan Kelas IIA Bandung	3.631.200,00
474	LAPAS PEMUDA KELAS III LANGKAT PROVINSI SUMATERA UTARA	3.756.256,00
475	Rutan Kelas IIB Bener Meriah Provinsi Aceh	741.864,00
476	LPKA JOGJAKARTA, PROVINSI D.I YOGYAKARTA	2.008.650,00

Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan (Akun 425131)
Menurut daftar satuan kerja per 31 Desember 2021

No	Nama Satker	Jumlah
477	RUMAH TAHANAN NEGARA CIPINANG	41.748.282,00
478	LEMBAGA PEMASYARAKATAN SALEMBA	75.283.268,00
479	BALAI PEMASYARAKATAN GARUT	907.836,00
480	LEMBAGA PEMASYARAKATAN CIBINONG	2.147.810,00
481	LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA BANDUNG	17.102.350,00
482	RUMAH TAHANAN NEGARA BATANG	5.042.224,00
483	LEMBAGA PEMASYARAKATAN PASIR PUTIH NUSAKAMBANGAN	14.653.229,00
484	LEMBAGA PEMASYARAKATAN NARKOTIKA YOGYAKARTA	3.601.050,00
485	LEMBAGA PEMASYARAKATAN WANITA PALEMBANG	27.350.640,00
486	RUMAH TAHANAN NEGARA KOTABUMI	7.427.691,00
487	LEMBAGA PEMASYARAKATAN WAY KANAN	10.221.548,00
488	LEMBAGA PEMASYARAKATAN WANITA BANDAR LAMPUNG	4.126.005,00
489	RUMAH TAHANAN NEGARA LANDAK	2.732.548,00
490	RUMAH TAHANAN NEGARA BENGKAYANG	2.422.497,00
491	LEMBAGA PEMASYARAKATAN NUNUKAN	29.153.175,00
492	RUMAH TAHANAN NEGARA MANADO	26.170.328,00
493	RUMAH TAHANAN NEGARA UNAHA	6.051.169,00
494	LEMBAGA PEMASYARAKATAN WANITA SUNGGUMINASA	17.228.639,00
495	LEMBAGA PEMASYARAKATAN JAILOLO	5.305.074,00
496	RUMAH TAHANAN NEGARA TANGERANG	20.232.208,00
497	LEMBAGA PEMASYARAKATAN BOALEMO	16.682.382,00
498	RUMAH TAHANAN NEGARA BATAM	22.519.536,00
499	LEMBAGA PEMASYARAKATAN NARKOTIKA TANJUNG PINANG	6.415.663,00
500	BALAI PEMASYARAKATAN POLEWALI	2.505.216,00
501	LEMBAGA PEMASYARAKATAN ANAK TANJUNG PATI	2.010.938,00
502	RUMAH TAHANAN NEGARA UJUNG PANDANG	26.498.588,00
503	RUMAH TAHANAN NEGARA BANDUNG	45.439.396,00
504	RUMAH TAHANAN NEGARA SERANG	10.428.750,00
505	RUMAH TAHANAN NEGARA PUTUSSIBAU	2.429.400,00
506	RUMAH TAHANAN NEGARA BALIKPAPAN	4.136.497,00
507	RUMAH TAHANAN NEGARA SOASIU	29.138.010,00
508	RUMAH TAHANAN NEGARA JANTHOI	4.512.660,00
509	RUPBASAN JAKARTA DI TANGERANG	1.253.190,00
510	RUMAH TAHANAN NEGARA GRESIK	10.645.765,00
511	RUMAH TAHANAN NEGARA PONTIANAK	15.837.911,00
512	RUMAH TAHANAN NEGARA PALU	8.384.189,00
513	LAPAS SUNGAI LIAT	11.059.318,00
514	LEMBAGA PEMASYARAKATAN ANAK (LPA) KUPANG	3.562.131,00
515	RUMAH TAHANAN NEGARA (RUTAN) PALANGKARAYA	30.313.283,00
516	BALAI PEMASYARAKATAN SINTANG	708.776,00
517	BALAI PEMASYARAKATAN AMUNTAI, KAB. HULU SUNGAI UTARA, KALIMANTAN SELATAN	3.809.600,00
518	BALAI PEMASYARAKATAN SAMARINDA, KOT.SAMARINDA, KALIMANTAN TIMUR	7.587.698,00
519	RUMAH PENYIMPANAN BARANG SITAAN NEGARA BANDUNG, KOT.BANDUNG, JAWA BARAT	2.092.600,00
520	LAPAS TERBUKA CIANGIR	236.345,00
521	RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAN NEGARA SEMARANG, KOT.SEMARANG, JAWA TENGAH	1.188.000,00
522	RUMAH PENYIMPANAN BARANG SITAAN NEGARA SURABAYA, KOT.SURABAYA, JAWA TIMUR	789.600,00
523	RUMAH PENYIMPANAN BARANG SITAAN NEGARA MEDAN, KOT.MEDAN, SUMATERA UTARA	58.664,00
524	RUMAH PENYIMPANAN BARANG SITAAN NEGARA PALEMBANG, KOT.PALEMBANG, SUMATERA	4.041.636,00
525	RUMAH PENYIMPANAN BARANG SITAAN NEGARA UJUNG PANDANG, KOT.UJUNG PANDANG,	1.128.048,00
526	LEMBAGA PEMASYARAKATAN ANAK, MUARA BULIAN, JAMBI	7.428.830,00
527	BALAI PEMASYARAKATAN LUWU, SULAWESI TENGAH	1.340.625,00
528	BALAI PEMASYARAKATAN TERNATE, MALUKU UTARA	12.902.346,00
529	BALAI PEMASYARAKATAN PANGKALAN BUN, KALIMANTAN TENGAH	1.465.428,00
530	BAPAS KELAS II NAGAN RAYA	69.300,00
531	BAPAS KELAS II LHOK SEMAWE	503.870,00
532	BAPAS KELAS II MUSI RAWAS UTARA	1.007.048,00
533	BAPAS KELAS II OKU INDUK	418.572,00
534	BAPAS KELAS II KOTABUMI	506.880,00
535	BALAI PEMASYARAKATAN KELAS II PRINGSEWU	581.658,00
536	BAPAS KELAS II SAMBAS	2.344.355,00
537	BAPAS KELAS II SAUMLAKI	100.026,00

Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan (Akun 425131)
Menurut daftar satuan kerja per 31 Desember 2021

No	Nama Satker	Jumlah
538	BAPAS KELAS II TIDORE	3.899.940,00
539	LAPAS NARKOTIKA KELAS IIB RUMBAI	187.263,00
540	LAPAS KHUSUS KELAS IIA KARANGANYAR NUSAKAMBANGAN	106.836,00
541	RUMAH TAHANAN NEGARA KENDARI	21.378.000,00
542	RUMAH TAHANAN NEGARA AMBON	21.311.852,00
543	RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAN NEGARA JAKARTA UTARA	101.520,00
544	RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAN NEGARA JAKARTA TIMUR	298.980,00
545	RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAN NEGARA BANDA ACEH	673.560,00
546	RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAN NEGARA PEKANBARU	1.698.144,00
547	RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAN NEGARA LAMPUNG	1.506.856,00
548	RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAN NEGARA PONTIANAK	6.096.032,00
549	RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAN NEGARA PALANGKARAYA	1.252.440,00
550	RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAN NEGARA BANJARMASIN	1.676.700,00
551	RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAN NEGARA SAMARINDA	149.087,00
552	RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAN NEGARA MANADO	1.205.422,00
553	RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAN NEGARA PALU	5.903.861,00
554	RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAN NEGARA KENDARI	9.426.000,00
555	RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAN NEGARA AMBON	7.702.185,00
556	RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAN NEGARA TERNATE	22.613.580,00
557	RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAN NEGARA DENPASAR	1.839.504,00
558	RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAN NEGARA MATARAM	1.540.041,00
559	RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAN NEGARA KUPANG	974.653,00
560	RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAN NEGARA JAYAPURA	38.156,00
561	LEMBAGA PEMASYARAKATAN NARKOTIKA DI CIREBON	68.885.195,00
562	RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAN NEGARA JAMBI	1.702.299,00
563	RUMAH TAHANAN NEGARA SAMARINDA	15.183.300,00
564	KANTOR RUPBASAN BLITAR	1.892.400,00
565	LEMBAGA PEMASYARAKATAN TERNATE	56.604.900,00
566	LEMBAGA PEMASYARAKATAN LUBUK BASUNG	2.680.000,00
567	LEMBAGA PEMASYARAKATAN SLEMAN	4.301.410,00
568	LEMBAGA PEMASYARAKATAN BITUNG	17.278.440,00
569	LEMBAGA PEMASYARAKATAN TIMIKA	3.274.880,00
570	LEMBAGA PEMASYARAKATAN TERBUKA PASAMAN	630.324,00
571	LEMBAGA PEMASYARAKATAN TERBUKA KENDAL	946.944,00
572	LEMBAGA PEMASYARAKATAN TERBUKA NUSAKAMBANGAN	1.348.608,00
573	LAPAS TERBUKA KELAS IIB LOMBOK TENGAH	9.474.166,00
574	LEMBAGA PEMASYARAKATAN TERBUKA WAIKABUBAK	1.717.800,00
575	LEMBAGA PEMASYARAKATAN NARKOTIKA PEMATANG SIANTAR	15.505.640,00
576	LAPAS NARKOTIKA KELAS IIA MUARA BELITI	8.258.911,00
577	LEMBAGA PEMASYARAKATAN NARKOTIKA BANDAR LAMPUNG	2.940.357,00
578	LEMBAGA PEMASYARAKATAN NARKOTIKA JAKARTA	3.519.342,00
579	LEMBAGA PEMASYARAKATAN NARKOTIKA BANDUNG	25.592.294,00
580	LEMBAGA PEMASYARAKATAN NARKOTIKA NUSAKAMBANGAN	4.209.576,00
581	LEMBAGA PEMASYARAKATAN NARKOTIKA MADIUN	13.027.338,00
582	LEMBAGA PEMASYARAKATAN NARKOTIKA PAMEKASAN	14.573.000,00
583	LEMBAGA PEMASYARAKATAN NARKOTIKA MARTAPURA	1.868.333,00
584	LEMBAGA PEMASYARAKATAN NARKOTIKA BANGLI	10.666.375,00
585	LEMBAGA PEMASYARAKATAN NARKOTIKA SUNGGUMINASA	47.598.616,00
586	LEMBAGA PEMASYARAKATAN NARKOTIKA JAYAPURA	10.674.312,00
587	BALAI PEMASYARAKATAN KUTACANE	698.036,00
588	BALAI PEMASYARAKATAN SIBOLGA	1.752.336,00
589	BALAI PEMASYARAKATAN BUKITTINGGI	944.748,00
590	BALAI PEMASYARAKATAN TANJUNG PINANG	1.629.265,00
591	BALAI PEMASYARAKATAN LAHAT	481.140,00
592	BALAI PEMASYARAKATAN MUARA BUNGO	1.042.023,00
593	BALAI PEMASYARAKATAN METRO	149.148,00
594	BALAI PEMASYARAKATAN WONOSARI	1.952.804,00
595	BALAI PEMASYARAKATAN MUARA TEWE	730.349,00
596	BALAI PEMASYARAKATAN PALOPO	3.203.124,00
597	BALAI PEMASYARAKATAN BAU-BAU	8.957.050,00
598	BALAI PEMASYARAKATAN KARANGASEM	4.779.996,00
599	BALAI PEMASYARAKATAN SUMBAWA BESAR	1.323.780,00
600	BALAI PEMASYARAKATAN SORONG	430.416,00
601	BALAI PEMASYARAKATAN MERAUKE	11.995.200,00
602	BALAI PEMASYARAKATAN WAIKABUBAK	525.204,00
603	BALAI PEMASYARAKATAN PANGKAL PINANG	2.112.134,00
604	BALAI PEMASYARAKATAN GORONTALO	5.159.244,00
605	RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAN NEGARA METRO	309.450,00

Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan (Akun 425131)
Menurut daftar satuan kerja per 31 Desember 2021

No	Nama Satker	Jumlah
606	RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAN NEGARA KOTABUMI	129.934,00
607	RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAN NEGARA BATURAJA	352.392,00
608	RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAN NEGARA CIREBON	293.626,00
609	RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAN NEGARA INDRAMAYU	1.599.906,00
610	RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAN NEGARA PURWOKERTO	1.280.950,00
611	RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAN NEGARA PURBALINGGA	434.280,00
612	RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAN NEGARA CILACAP	600.000,00
613	RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAN NEGARA MOJOKERTO	118.800,00
614	RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAN NEGARA PASURUAN	1.296.000,00
615	RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAN NEGARA SINGKAWANG	418.572,00
616	RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAN NEGARA SANGGAU	780.000,00
617	RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAN NEGARA SUMBAWA BESAR	1.931.875,00
618	RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAN NEGARA ARGA MAKMUR	507.977,00
619	RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAN NEGARA BANTUL	865.920,00
620	RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAN NEGARA WONOSARI	869.856,00
621	RUPBASAN PROBOLINGGO	3.996.000,00
622	RUMAH TAHANAN NEGARA BANDAR LAMPUNG	29.610.657,00
623	RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAN NEGARA PANGKAL PINANG	2.491.500,00
624	RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS I TANJUNG PINANG	14.793.814,00
625	LAPAS KELAS IIB GUNUNG SUGIH	3.172.677,00
626	LAPAS KELAS IIB WARUNG KIARA	9.753.972,00
627	LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS III LEMBATA	958.980,00
628	LAPAS KELAS IIB TANJUNG	6.775.131,00
629	LAPAS PEREMPUAN KELAS IIB KUPANG	682.671,00
630	LAPAS NARKOTIKA KELAS IIA SAMARINDA	35.590.966,00
631	LPKA KELAS II LOMBOK TENGAH	1.116.310,00
632	RUMAH TAHANAN KELAS IIB KOTA AGUNG	986.740,00
633	RUMAH TAHANAN KELAS IIB GARUT	3.228.745,00
634	RUMAH TAHANAN KELAS IIB BANDA ACEH	8.373.620,00
635	RUMAH TAHANAN KELAS IIB KUPANG	900.012,00
636	RUMAH TAHANAN KELAS IIB PASANG KAYU	1.113.024,00
637	BALAI PEMASYARAKATAN KELAS I MANOKWARI	1.656.000,00
638	RUMAH SAKIT PENGAYOMAN CIPINANG KELAS D	718.500,00
639	LAPAS KELAS IIB SOROLANGUN	10.627.848,00
640	LAPAS KELAS IIA BANYUASIN	24.594.908,00
641	LAPAS KELAS IIB KAYU AGUNG	22.709.300,00
642	LAPAS KHUSUS KELAS IIA GUNUNG SINDUR	7.500.000,00
643	LAPAS KELAS IIA CIKARANG	42.062.990,00
644	LAPAS KELAS IIB BANJAR	4.708.080,00
645	LAPAS KELAS IIA CILEGON	24.387.696,00
646	LAPAS KELAS IIA BONTANG	5.760.017,00
647	LAPAS NARKOTIKA KELAS IIB LANGSA	15.067.980,00
648	LAPAS NARKOTIKA KELAS IIA LANGKAT	6.054.232,00
649	LAPAS NARKOTIKA KELAS IIB MUARA SABAK	6.876.468,00
650	LAPAS NARKOTIKA KELAS IIA PANGKAL PINANG	7.051.286,00
651	LAPAS NARKOTIKA KELAS IIA KASONGAN	3.287.864,00
652	LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK BANDAR LAMPUNG	15.233.464,00
653	LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KELAS II BANDUNG PROPINSI JAWA BARAT	10.890.792,00
654	RUTAN KELAS IIB HUMBANG HASUNDUTAN PROPINSI SUMATERA UTARA	356.412,00
655	RUTAN KELAS I PEKANBARU	35.708.114,00
656	LAPAS NARKOTIKA KELAS IIA GUNUNG SINDUR	181.514,00
657	RUTAN KELAS IIB TAMIYANG LAYANG PROPINSI KALIMANTAN TENGAH	4.314.425,00
658	RUTAN KELAS IIB BINTUNI PROPINSI PAPUA BARAT	4.200.000,00
659	LAPAS KELAS IIB BLANGPIDIE	2.108.400,00
660	LAPAS PEREMPUAN KELAS IIB SIGLI	2.868.740,00
661	Lapas Narkotika Kelas III Sawah Lunto	3.000.000,00
662	Lapas Kelas III Dharmas Raya	27.006,00
663	LAPAS NARKOTIKA KELAS IIB BANYUASIN	6.949.800,00
664	Rutan Kelas II B Bengkulu	1.278.772,00
665	Lapas anak Kelas III Batam	4.654.992,00
666	Lapas Terbuka Kelas III Rumbai	1.659.840,00
667	RUTAN KELAS I DEPOK	3.492.468,00
668	LAPAS KELAS IIB BANJARBARU	5.700.000,00
669	LAPAS KELAS IIB PAHUWATO	7.559.532,00
670	Rutan Kelas II B Weda	5.297.328,00
671	KANTOR IMIGRASI KELAS I KHUSUS NON TPI JAKARTA SELATAN	352.555.678,00
672	KANTOR IMIGRASI KELAS II NON TPI KUALA TUNGKAL	934.068,00
673	KANTOR IMIGRASI KELAS III NON TPI KALIANDA	2.938.107,00

Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan (Akun 425131)
Menurut daftar satuan kerja per 31 Desember 2021

No	Nama Satker	Jumlah
674	KANTOR IMIGRASI KELAS II BATULICIN	3.639.800,00
675	KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI TEMBAGAPURA	1.144.176,00
676	KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI TANJUNG PANDAN	259.200,00
677	KANTOR IMIGRASI KELAS II NON TPI DABO SINGKEP	3.667.036,00
678	KANTOR IMIGRASI KELAS I KHUSUS NON TPI JAKARTA BARAT	175.272.112,00
679	KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI BANDUNG	2.949.720,00
680	KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI CIREBON	64.878.034,00
681	KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI SEMARANG	12.251.544,00
682	KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI CILACAP	8.311.190,00
683	KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI YOGYAKARTA	7.756.128,00
684	KANTOR IMIGRASI KELAS I KHUSUS TPI SURABAYA	61.413.937,00
685	KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI MALANG	31.988.929,00
686	KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI JEMBER	981.015,00
687	KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI LHOKSEUMAWE	14.365.978,00
688	KANTOR IMIGRASI KELAS I KHUSUS TPI MEDAN	32.609.187,00
689	KANTOR IMIGRASI KELAS II NON TPI PEMATANG SIANTAR	9.743.474,00
690	KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI PEKANBARU	11.658.770,00
691	KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI BENGKALIS	6.590.952,00
692	KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI DUMAI	11.889.039,00
693	KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI BAGAN SIPIAPI	11.495.460,00
694	KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI TANJUNG PINANG	28.919.595,00
695	KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI TANJUNG BALAI KARIMUN	91.005.504,00
696	KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI BELAKANG PADANG	2.042.892,00
697	KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI JAMBI	11.874.918,00
698	KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI PALEMBANG	10.737.872,00
699	KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI PANGKAL PINANG	19.224.000,00
700	KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI BANDAR LAMPUNG	3.045.996,00
701	KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI PONTIANAK	7.245.315,00
702	KANTOR IMIGRASI KELAS II NON TPI SINGKAWANG	16.486.368,00
703	KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI BALIKPAPAN	3.171.348,00
704	KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI TARAKAN	6.536.536,00
705	KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI MAKASSAR	26.983.200,00
706	KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI DENPASAR	45.204.250,00
707	KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI KUPANG	3.936.211,00
708	KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI MATARAM	13.417.034,00
709	KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI JAYAPURA	6.567.107,00
710	KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI BIAK	6.159.600,00
711	KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI SORONG	17.778.178,00
712	KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI MERAUKE	15.064.000,00
713	KANTOR IMIGRASI KELAS I NON TPI PALANGKARAYA	5.987.667,00
714	KANTOR IMIGRASI KELAS I NON TPI BOGOR	88.866.761,00
715	KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI SAMARINDA	19.348.040,00
716	KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI TEMBILAHAN	13.046.142,00
717	KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI TANJUNG BALAI ASAHAN	1.462.533,00
718	KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI SELAT PANJANG	14.239.800,00
719	KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI BANDA ACEH	10.366.580,00
720	KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI PADANG	364.000,00
721	KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI BANJARMASIN	9.484.300,00
722	KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI AMBON	6.122.158,00
723	KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI MANADO	9.999.724,00
724	KANTOR IMIGRASI KELAS I KHUSUS TPI BATAM	45.010.176,00
725	KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI TANJUNG PRIOK	7.339.696,00
726	KANTOR IMIGRASI KELAS I KHUSUS TPI SOEKARNO HATTA	225.771.080,00
727	KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI CILEGON	4.593.600,00
728	KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI SURAKARTA	81.562.718,00
729	KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI TANJUNG PERAK	4.771.858,00
730	KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI POLONIA	12.370.500,00
731	KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI BELAWAN	1.374.632,00
732	KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI SIBOLGA	7.330.986,00
733	KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI PAREPARE	11.503.572,00
734	KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI KENDARI	14.809.072,00
735	KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI TAREMPA	3.203.777,00
736	KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI LANGSA	7.590.660,00
737	KANTOR IMIGRASI KELAS II NON TPI MEULABOH	7.318.145,00
738	KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI TANJUNG UBAN	21.848.047,00
739	KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI RANAI	7.341.109,00
740	KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI BENGKULU	2.960.496,00
741	KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI SAMPIT	5.140.377,00

Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan (Akun 425131)
Menurut daftar satuan kerja per 31 Desember 2021

No	Nama Satker	Jumlah
742	KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI NUNUKAN	9.300.701,00
743	KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI BITUNG	6.921.060,00
744	KANTOR IMIGRASI KELAS I KHUSUS TPI NGURAH RAI	21.979.338,00
745	KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI ATAMBUA	1.996.357,00
746	KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI MAUMERE	1.688.514,00
747	KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI SANGGAU	8.254.680,00
748	DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI	93.299.858,00
749	KANTOR IMIGRASI KELAS III NON TPI KERINCI	700.000,00
750	KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI TERNATE	30.890.040,00
751	KANTOR IMIGRASI KELAS II NON TPI DEPOK	831.600,00
752	KANTOR IMIGRASI KELAS II NON TPI MANOKWARI	2.040.000,00
753	KANTOR IMIGRASI KELAS II NON TPI POLEWALI MANDAR	804.816,00
754	KANTOR IMIGRASI KELAS II NON TPI MAMUJU	2.505.062,00
755	KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI ENTIKONG	2.866.244,00
756	KANTOR IMIGRASI KELAS I NON TPI TANGERANG	14.761.926,00
757	KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI SABANG	2.847.033,00
758	KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI JAKARTA UTARA	1.177.919,00
759	KANTOR IMIGRASI KELAS II NON TPI SUKABUMI	3.613.560,00
760	KANTOR IMIGRASI KELAS II NON TPI KARAWANG	10.724.246,00
761	KANTOR IMIGRASI KELAS II NON TPI TASIKMALAYA	18.130.000,00
762	KANTOR IMIGRASI KELAS II NON TPI PEMALANG	17.557.167,00
763	KANTOR IMIGRASI KELAS II NON TPI WONOSOBO	19.365.000,00
764	KANTOR IMIGRASI KELAS II NON TPI PATI	36.946.697,00
765	KANTOR IMIGRASI KELAS II NON TPI MADIUN	5.005.322,00
766	KANTOR IMIGRASI KELAS II NON TPI BLITAR	17.841.104,00
767	KANTOR IMIGRASI KELAS II NON TPI AGAM	30.427.860,00
768	KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI SINGARAJA	4.946.081,00
769	KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI SUMBAWA BESAR	12.436.700,00
770	KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI GORONTALO	7.918.236,00
771	KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI TUAL	2.773.416,00
772	KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI SAMBAS	10.779.615,00
773	KANTOR IMIGRASI KELAS II NON TPI TOBELO	11.476.823,00
774	KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI SIAK	9.437.359,00
775	KANTOR IMIGRASI KELAS II NON TPI MUARA ENIM	5.451.273,00
776	KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI TAHUNA	18.775.782,00
777	RUMAH DETENSI IMIGRASI MEDAN	784.989,00
778	RUMAH DETENSI IMIGRASI JAKARTA	1.566.936,00
779	RUMAH DETENSI IMIGRASI SEMARANG	5.961.245,00
780	RUMAH DETENSI IMIGRASI SURABAYA	5.944.300,00
781	RUMAH DETENSI IMIGRASI PONTIANAK	1.120.584,00
782	RUMAH DETENSI IMIGRASI MANADO	8.074.845,00
783	RUMAH DETENSI IMIGRASI MAKASSAR	500.580,00
784	RUMAH DETENSI IMIGRASI DENPASAR	9.106.500,00
785	RUMAH DETENSI IMIGRASI KUPANG	3.537.852,00
786	RUMAH DETENSI IMIGRASI PUSAT TANJUNG PINANG	11.339.250,00
787	KANTOR IMIGRASI KELAS III NON TPI TANJUNG REDEB	5.136.000,00
788	KANTOR IMIGRASI KELAS II NON TPI BEKASI	1.515.672,00
789	KANTOR IMIGRASI KELAS III NON TPI KOTABUMI	1.993.656,00
790	KANTOR IMIGRASI KELAS III NON TPI KEDIRI	7.824.500,00
791	KANTOR IMIGRASI KELAS III TPI LABUAN BAJO	414.552,00
792	KANTOR IMIGRASI KELAS III NON TPI PONOROGO	6.575.590,00
793	KANTOR IMIGRASI KELAS III NON TPI BAU BAU	15.133.075,00
794	KANTOR IMIGRASI KELAS III NON TPI PUTUSSIBAU	883.280,00
795	DITJEN KEKAYAAN INTELEKTUAL	43.179.965,00
796	BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL	24.990.000,00
797	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA	9.057.090,00
798	POLITEKNIK IMIGRASI	658.881,00
799	POLITEKNIK ILMU PEMASYARAKATAN	55.000.000,00
Jumlah		13.734.681.481,00

Pendapatan pelayanan dan administrasi hukum lainnya (Akun 425219)
Menurut daftar satuan kerja per 31 Desember 2021

No	Nama Satker	Jumlah
1	LEMBAGA PEMASYARAKATAN PERMISAN	9.012.900,00
2	RUMAH TAHANAN NEGARA PEKALONGAN	1.650.000,00
3	LEMBAGA PEMASYARAKATAN WANITA MEDAN	22.260.000,00
4	LEMBAGA PEMASYARAKATAN SANANA	3.000.000,00
5	LEMBAGA PEMASYARAKATAN BANCEUY BANDUNG	4.085.000,00
6	LAPAS GARUT	1.000.000,00
7	LAPAS TASIKMALAYA	3.216.885,00
8	LEMBAGA PEMASYARAKATAN CIREBON	27.517.000,00
9	LEMBAGA PEMASYARAKATAN SERANG	6.954.000,00
10	LAPAS KELAS III RANGKAS BITUNG	9.500.000,00
11	LEMBAGA PEMASYARAKATAN YOGYAKARTA	4.544.000,00
12	RUMAH TAHANAN NEGARA WATES	860.000,00
13	LEMBAGA PEMASYARAKATAN SEMARANG	35.934.600,00
14	RUMAH TAHANAN NEGARA PURWODADI	4.600.000,00
15	LEMBAGA PEMASYARAKATAN AMBARAWA	4.350.000,00
16	LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA SEMARANG	30.275.600,00
17	LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEKALONGAN	996.500,00
18	LAPAS TEGAL	10.844.000,00
19	LEMBAGA PEMASYARAKATAN MAGELANG	20.434.000,00
20	RUMAH TAHANAN NEGARA PURWOREJO	2.500.000,00
21	RUMAH TAHANAN NEGARA SURAKARTA	2.100.000,00
22	RUMAH TAHANAN NEGARA WONOGIRI	350.000,00
23	LEMBAGA PEMASYARAKATAN KALISOSOK	43.450.300,00
24	LEMBAGA PEMASYARAKATAN JEMBER	14.500.000,00
25	LAPAS KELAS IIA BANYUWANGI	4.500.000,00
26	LAPAS PASURUAN	4.450.000,00
27	LEMBAGA PEMASYARAKATAN BINJAI	61.186.000,00
28	LEMBAGA PEMASYARAKATAN LABUHAN RUKU	8.415.221,00
29	LEMBAGA PEMASYARAKATAN RANTAU PRAPAT	550.000,00
30	RUMAH TAHANAN NEGARA KABANJAHE	3.570.000,00
31	LAPAS KELAS III LABUAN BILIK	110.000,00
32	RUTAN KELAS I LABUHAN DELI	14.400.000,00
33	LEMBAGA PEMASYARAKATAN TEBINGTINGGI DELI	6.900.000,00
34	RUMAH TAHANAN NEGARA SIDIKALANG	1.866.800,00
35	LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEMATANG SIANTAR	51.037.000,00
36	LEMBAGA PEMASYARAKATAN SIBOLGA	20.000.000,00
37	LAPAS GUNUNG SITOLI	6.531.500,00
38	LAPAS KELAS III TELUK DALAM	2.067.004,00
39	LAPAS PADANG SIDEMPUAN	10.100.000,00
40	LAPAS KELAS III GUNUNG TUA	3.972.000,00
41	LEMBAGA PEMASYARAKATAN SIBORONG-BORONG	9.275.000,00
42	RUMAH TAHANAN NEGARA BALIGE	6.655.833,00
43	LAPAS KELAS III BARUS	1.800.000,00
44	LEMBAGA PEMASYARAKATAN PANYABUNGAN	5.120.000,00
45	LAPAS KELAS III ALAHAN PANJANG	500.000,00
46	RUTAN KELAS IIB MUARA LABUH	600.000,00
47	RUMAH TAHANAN NEGARA LUBUK SIKAPING	4.725.000,00
48	LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEKANBARU	24.850.360,00
49	LAPAS KELAS IIB TELUK KUANTAN	840.000,00
50	LAPAS KELAS IIA BANGKINANG	20.000.000,00
51	CABANG RUMAH TAHANAN NEGARA TANJUNG BALAI KARIMUN	16.120.000,00
52	LAPAS MUARA ENIM	2.250.000,00
53	RUMAH TAHANAN NEGARA SUKADANA	3.700.000,00
54	RUMAH TAHANAN NEGARA SANGGAU	7.334.250,00
55	LEMBAGA PEMASYARAKATAN BANJARMASIN	9.953.000,00
56	LAPAS KELAS IIA TENGGARONG	5.612.500,00
57	LEMBAGA PEMASYARAKATAN TONDANO	10.468.475,00
58	LAPAS KELAS III ENEMAWIRA	50.000,00
59	LAPAS KELAS III LIRUNG	2.500.000,00
60	RUMAH TAHANAN NEGARA WATANSOPENG	2.500.000,00
61	LEMBAGA PEMASYARAKATAN KENDARI	20.000.000,00
62	RUMAH TAHANAN NEGARA KOLAKA	7.210.000,00
63	LAPAS KELAS III GESER	500.000,00
64	LAPAS KELAS III WAHAI	1.050.000,00
65	BALAI PEMASYARAKATAN MATARAM	300.000,00
66	LEMBAGA PEMASYARAKATAN WAINGAPU	5.584.000,00
67	RUMAH TAHANAN NEGARA BAJAWA	3.500.300,00
68	RUMAH TAHANAN NEGARA RUTENG	1.500.000,00
69	LEMBAGA PEMASYARAKATAN ABEPURA	1.050.000,00

Pendapatan pelayanan dan administrasi hukum lainnya (Akun 425219)
Menurut daftar satuan kerja per 31 Desember 2021

No	Nama Satker	Jumlah
70	LEMBAGA PEMASYARAKATAN KOTA AGUNG	7.573.250,00
71	Lapas Perempuan Kelas IIB Yogyakarta	2.012.000,00
72	Lapas Perempuan Kelas IIB Batam	1.794.750,00
73	Lapas Perempuan Kelas III Kendari	3.689.000,00
74	LEMBAGA PEMASYARAKATAN CIBINONG	2.500.000,00
75	LEMBAGA PEMASYARAKATAN SLAWI	11.591.250,00
76	LEMBAGA PEMASYARAKATAN WANITA BANDAR LAMPUNG	13.175.275,00
77	LAPAS NARKOTIKA KELAS IIB RUMBAI	1.702.680,00
78	LEMBAGA PEMASYARAKATAN NARKOTIKA DI CIREBON	12.709.380,00
79	LEMBAGA PEMASYARAKATAN TERBUKA KENDAL	10.374.000,00
80	LEMBAGA PEMASYARAKATAN TERBUKA NUSAKAMBANGAN	21.484.100,00
81	LEMBAGA PEMASYARAKATAN NARKOTIKA PEMATANG SIANTAR	6.700.000,00
82	LEMBAGA PEMASYARAKATAN NARKOTIKA BANDAR LAMPUNG	3.134.000,00
83	LEMBAGA PEMASYARAKATAN NARKOTIKA BANDUNG	46.438.155,00
84	LEMBAGA PEMASYARAKATAN NARKOTIKA JAYAPURA	2.250.000,00
85	RUMAH TAHANAN NEGARA BANDAR LAMPUNG	3.345.000,00
86	LAPAS KELAS IIB GUNUNG SUGIH	3.111.000,00
87	LAPAS KELAS IIB WARUNG KIARA	17.482.000,00
88	RUMAH TAHANAN KELAS IIB KUPANG	3.000.000,00
89	LAPAS KHUSUS KELAS IIA GUNUNG SINDUR	7.746.504,00
90	LAPAS KELAS IIB BANJAR	7.875.000,00
91	RUTAN KELAS IIB HUMBANG HASUNDUTAN PROPINSI SUMATERA UTARA	20.000.000,00
Jumlah		848.826.372,00

Penpadatan Jasa Lainnya (Akun 425699)
Menurut daftar satuan kerja per 31 Desember 2021

No	Nama Satker	Jumlah
1	LEMBAGA PEMASYARAKATAN BEKASI	375.000,00
2	LEMBAGA PEMASYARAKATAN KEMBANG KUNING	280.000,00
3	RUMAH TAHANAN NEGARA BANTUL	2.220.000,00
4	RUMAH TAHANAN NEGARA SURABAYA	3.157.995,00
5	RUMAH TAHANAN NEGARA MEDAN	31.632.000,00
6	RUMAH TAHANAN NEGARA PALEMBANG	6.419.000,00
7	RUMAH TAHANAN NEGARA MARABAHAN	1.050.000,00
8	LAPAS BATAM	28.825.000,00
9	LEMBAGA PEMASYARAKATAN CIPINANG	20.139.000,00
10	RUTAN KELAS I PONDOK BAMBU	6.095.879,00
11	LAPAS GARUT	3.660.000,00
12	LAPAS CIAMIS	3.885.600,00
13	LAPAS TASIKMALAYA	200.000,00
14	LEMBAGA PEMASYARAKATAN SUKAMISKIN	156.000,00
15	RUMAH TAHANAN NEGARA CIREBON	365.000,00
16	LEMBAGA PEMASYARAKATAN KUNINGAN	2.971.700,00
17	LAPAS MAJALENGKA	7.500.000,00
18	LAPAS INDRAMAYU	6.013.300,00
19	LEMBAGA PEMASYARAKATAN BOGOR	25.169.200,00
20	LAPAS CIANJUR	21.980.000,00
21	LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEMUDA TANGERANG	77.060.000,00
22	LAPAS KELAS IIA TANGERANG	19.600.000,00
23	LEMBAGA PEMASYARAKATAN YOGYAKARTA	7.121.600,00
24	RUMAH TAHANAN NEGARA WATES	120.000,00
25	RUMAH TAHANAN NEGARA KUDUS	884.000,00
26	LAPAS KLATEN	2.400.000,00
27	LEMBAGA PEMASYARAKATAN PURWOKERTO	11.136.370,00
28	RUMAH TAHANAN NEGARA BANJARNEGARA	8.872.800,00
29	LEMBAGA PEMASYARAKATAN SIDOARJO	5.438.000,00
30	LAPAS JOMBANG	676.250,00
31	LEMBAGA PEMASYARAKATAN BOJONEGORO	5.320.000,00
32	LAPAS KELAS IIA BANYUWANGI	4.500.000,00
33	LAPAS PROBOLINGGO	6.617.300,00
34	LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN MALANG	7.461.415,00
35	LAPAS NGAWI	3.500.000,00
36	LAPAS KELAS IIB KOTA BAKTI	4.650.000,00
37	LAPAS KELAS IIB IDI RAYEUK	2.750.000,00
38	LEMBAGA PEMASYARAKATAN KUALA SIMPANG	279.500,00
39	LEMBAGA PEMASYARAKATAN MEDAN	74.459.326,00
40	LAPAS TANJUNG BALAI ASAHAN	800.000,00
41	LEMBAGA PEMASYARAKATAN LABUHAN RUKU	833.000,00
42	RUMAH TAHANAN NEGARA PANGKALAN BRANDAN	1.840.000,00
43	LAPAS LUBUK PAKAM	6.819.167,00
44	RUMAH TAHANAN NEGARA SIDIKALANG	10.200.000,00
45	RUMAH TAHANAN NEGARA TARUTUNG	1.125.000,00
46	LEMBAGA PEMASYARAKATAN SIBORONG-BORONG	5.625.000,00
47	LEMBAGA PEMASYARAKATAN PADANG	28.500.000,00
48	LEMBAGA PEMASYARAKATAN PARIAMAN	10.000.000,00
49	LEMBAGA PEMASYARAKATAN BUKITTINGGI	4.925.000,00
50	LAPAS KELAS III TALU	2.250.000,00
51	RUMAH TAHANAN NEGARA PADANG PANJANG	3.200.000,00
52	RUTAN KELAS IIB MANINJAU	148.000,00
53	LEMBAGA PEMASYARAKATAN PAYAKUMBUH	8.220.000,00
54	LAPAS KELAS III SULIKI	1.910.000,00
55	LEMBAGA PEMASYARAKATAN SOLOK	2.987.000,00
56	LEMBAGA PEMASYARAKATAN SIJUNJUNG	8.600.000,00
57	RUMAH TAHANAN NEGARA BATUSANGKAR	1.300.000,00
58	LEMBAGA PEMASYARAKATAN BENGKALIS	2.400.000,00
59	LAPAS KELAS IIA BAGAN SIPI-API	9.000.240,00
60	LEMBAGA PEMASYARAKATAN TEMBILAHAN	8.804.000,00
61	LAPAS KELAS IIA BANGKINANG	17.750.000,00
62	LEMBAGA PEMASYARAKATAN TANJUNG PINANG	9.780.000,00
63	LEMBAGA PEMASYARAKATAN METRO	13.060.750,00
64	LEMBAGA PEMASYARAKATAN KUALA TUNGKAL	3.420.905,00
65	RUMAH TAHANAN NEGARA SUNGAI PENUH	1.000.000,00
66	LEMBAGA PEMASYARAKATAN PALEMBANG	30.110.000,00
67	LEMBAGA PEMASYARAKATAN TANJUNG RAJA	6.450.000,00
68	LEMBAGA PEMASYARAKATAN LAHAT	12.668.000,00
69	LAPAS MUARA ENIM	15.350.000,00

Penpadatan Jasa Lainnya (Akun 425699)
Menurut daftar satuan kerja per 31 Desember 2021

No	Nama Satker	Jumlah
70	LAPAS KELAS IIB MUARA DUA	4.900.000,00
71	LAPAS KELAS III PAGAR ALAM	1.050.000,00
72	LAPAS KELAS IIB EMPAT LAWANG	5.040.000,00
73	LEMBAGA PEMASYARAKATAN LUBUK LINGGAU	4.310.000,00
74	LAPAS KELAS IIB MARTAPURA	6.000.000,00
75	RUMAH TAHANAN NEGARA PRABUMULIH	7.000.000,00
76	LEMBAGA PEMASYARAKATAN PANGKALPINANG	6.820.000,00
77	RUTAN KELAS IIB MUNTOK	5.005.000,00
78	LEMBAGA PEMASYARAKATAN BANDAR LAMPUNG	3.578.700,00
79	LAPAS KELAS IIA KOTABUMI	12.600.000,00
80	RUMAH TAHANAN NEGARA SUKADANA	3.510.000,00
81	LEMBAGA PEMASYARAKATAN PONTIANAK	275.670,00
82	RUMAH TAHANAN NEGARA SANGGAU	346.546,00
83	LEMBAGA PEMASYARAKATAN SINGKAWANG	12.446.000,00
84	LEMBAGA PEMASYARAKATAN KETAPANG	300.000,00
85	LEMBAGA PEMASYARAKATAN PANGKALAN BUN	2.025.000,00
86	RUMAH TAHANAN NEGARA PELAIHARI	9.944.000,00
87	LAPAS KELAS IIA KOTABARU	2.253.000,00
88	RUMAH TAHANAN NEGARA BARABAI	200.000,00
89	RUMAH TAHANAN NEGARA TANJUNG	473.500,00
90	LEMBAGA PEMASYARAKATAN BALIKPAPAN	15.250.000,00
91	LEMBAGA PEMASYARAKATAN SAMARINDA	1.950.000,00
92	LEMBAGA PEMASYARAKATAN MANADO	11.000.000,00
93	LEMBAGA PEMASYARAKATAN LUWUK	2.106.000,00
94	LEMBAGA PEMASYARAKATAN UJUNG PANDANG	1.200.000,00
95	LAPAS TAKALAR	4.600.000,00
96	RUMAH TAHANAN NEGARA SELAYAR	1.355.000,00
97	LEMBAGA PEMASYARAKATAN BULUKUMBA	8.540.524,00
98	RUMAH TAHANAN NEGARA MALINO	1.000.000,00
99	RUMAH TAHANAN NEGARA SINJAI	5.145.000,00
100	RUMAH TAHANAN NEGARA MASAMBA	4.500.000,00
101	RUMAH TAHANAN NEGARA PINRANG	10.500.000,00
102	RUMAH TAHANAN NEGARA RAPPANG	4.200.000,00
103	RUMAH TAHANAN NEGARA BARRU	2.334.000,00
104	RUMAH TAHANAN NEGARA MAJENE	1.500.000,00
105	LAPAS KELAS III MAMASA	815.000,00
106	LEMBAGA PEMASYARAKATAN WATAMPONE	10.279.500,00
107	RUMAH TAHANAN NEGARA SENGKANG	3.965.000,00
108	RUMAH TAHANAN NEGARA RAHA	7.750.000,00
109	LEMBAGA PEMASYARAKATAN BAU-BAU	14.070.000,00
110	LEMBAGA PEMASYARAKATAN AMBON	5.250.000,00
111	LEMBAGA PEMASYARAKATAN TUAL	100.000,00
112	LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS IIA KEROBOKAN	28.878.000,00
113	RUMAH TAHANAN NEGARA NEGARA	4.122.270,00
114	RUMAH TAHANAN NEGARA KLUNGKUNG	2.280.000,00
115	LAPAS TABANAN	487.000,00
116	RUMAH TAHANAN NEGARA GIANJAR	1.900.000,00
117	RUMAH TAHANAN NEGARA BANGLI	1.800.000,00
118	LEMBAGA PEMASYARAKATAN KARANGASEM	100.000,00
119	LEMBAGA PEMASYARAKATAN MATARAM	3.050.000,00
120	LAPAS KELAS IIB SELONG	10.050.000,00
121	RUMAH TAHANAN NEGARA PRAYA	3.100.000,00
122	RUMAH TAHANAN NEGARA RABA/BIMA	100.000,00
123	LEMBAGA PEMASYARAKATAN ENDE	500.000,00
124	LEMBAGA PEMASYARAKATAN SERUI	1.290.000,00
125	LEMBAGA PEMASYARAKATAN MERAUKE	1.185.000,00
126	LEMBAGA PEMASYARAKATAN SORONG	2.392.150,00
127	LAPAS KELAS III KAIMANA	1.062.000,00
128	LEMBAGA PEMASYARAKATAN BENGKULU	9.750.000,00
129	LEMBAGA PEMASYARAKATAN CURUP	7.610.000,00
130	LAPAS KELAS III DABO SINGKEP	757.000,00
131	LEMBAGA PEMASYARAKATAN AMPANA	1.500.000,00
132	RUMAH TAHANAN NEGARA BUNTOK	817.250,00
133	LEMBAGA PEMASYARAKATAN WANITA TANGERANG	12.810.000,00
134	RUMAH TAHANAN NEGARA JAKARTA PUSAT	12.636.250,00
135	LEMBAGA PEMASYARAKATAN PRIA TANGERANG	79.131.000,00
136	Lapas Perempuan Kelas IIA Samarinda	855.180,00
137	Lapas Perempuan Kelas IIA Denpasar	5.500.000,00
138	Lapas Perempuan Kelas IIA Pekanbaru	13.316.782,00

Penpadatan Jasa Lainnya (Akun 425699)
Menurut daftar satuan kerja per 31 Desember 2021

No	Nama Satker	Jumlah
139	Lapas Perempuan Kelas III Ambon	1.207.750,00
140	Lapas Perempuan Kelas III Gorontalo	239.700,00
141	Lapas Perempuan Kelas III Mamuju	200.000,00
142	Rutan Kelas IIIB Bener Meriah Provinsi Aceh	4.800.000,00
143	LEMBAGA PEMASYARAKATAN CIBINONG	15.000.000,00
144	LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA BANDUNG	15.611.000,00
145	LEMBAGA PEMASYARAKATAN NARKOTIKA YOGYAKARTA	4.483.000,00
146	LEMBAGA PEMASYARAKATAN WANITA PALEMBANG	3.833.148,00
147	RUMAH TAHANAN NEGARA UNAHA	7.070.000,00
148	LEMBAGA PEMASYARAKATAN BOALEMO	263.250,00
149	LEMBAGA PEMASYARAKATAN NARKOTIKA TANJUNG PINANG	26.270.000,00
150	RUMAH TAHANAN NEGARA UJUNG PANDANG	3.993.750,00
151	RUMAH TAHANAN NEGARA BANDUNG	14.578.155,00
152	RUMAH TAHANAN NEGARA JANTHOI	2.500.000,00
153	RUMAH TAHANAN NEGARA AMBON	1.387.500,00
154	LEMBAGA PEMASYARAKATAN LUBUK BASUNG	9.645.000,00
155	LEMBAGA PEMASYARAKATAN SLEMAN	407.000,00
156	LEMBAGA PEMASYARAKATAN NARKOTIKA BANDAR LAMPUNG	2.916.500,00
157	LEMBAGA PEMASYARAKATAN NARKOTIKA MADIUN	1.201.375,00
158	RUMAH TAHANAN NEGARA BANDAR LAMPUNG	1.455.000,00
159	RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS I TANJUNG PINANG	4.500.000,00
160	LAPAS KELAS IIB GUNUNG SUGIH	2.958.000,00
161	LAPAS KELAS IIB WARUNG KIARA	4.821.000,00
162	LAPAS KELAS IIB TANJUNG	657.250,00
163	LAPAS NARKOTIKA KELAS IIA SAMARINDA	41.385.500,00
164	LAPAS KELAS IIA BANYUASIN	16.786.000,00
165	LAPAS KELAS IIB KAYU AGUNG	24.000.000,00
166	LAPAS KHUSUS KELAS IIA GUNUNG SINDUR	1.103.025,00
167	LAPAS KELAS IIA CILEGON	3.563.998,00
168	LAPAS KELAS IIA BONTANG	31.500.000,00
169	LAPAS NARKOTIKA KELAS IIA PANGKAL PINANG	52.560.000,00
170	Lapas Narkotika Kelas III Sawah Lunto	2.800.000,00
171	Rutan Kelas II B Padang	8.811.000,00
172	LAPAS NARKOTIKA KELAS IIB BANYUASIN	18.275.000,00
173	LAPAS KELAS IIB BANJARBARU	4.259.100,00
Jumlah		1.391.526.620,00

Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai (Akun 425791)
Menurut daftar satuan kerja per 31 Desember 2021

No	Nama Satker	Jumlah
1	SEKRETARIAT JENDERAL (PUSAT)	25.700.000,00
2	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SUMATERA UTARA DI MEDAN	2.627.068,00
3	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PEKANBARU	435.000,00
4	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM AMBON	21.019.700,00
5	LEMBAGA PEMASYARAKATAN BANCEUY BANDUNG	18.000.000,00
6	LAPAS KELAS III NAMLEA	9.228.119,00
7	RUMAH TAHANAN NEGARA TERNATE	2.115.000,00
8	LEMBAGA PEMASYARAKATAN MANOKWARI	6.000.000,00
9	LEMBAGA PEMASYARAKATAN CURUP	5,00
10	BALAI PEMASYARAKATAN GARUT	5.500.000,00
11	BALAI PEMASYARAKATAN JAKARTA SELATAN	545.841,00
12	RUMAH PENYIMPANAN BARANG SITAAN NEGARA BANDUNG, KOT.BANDUNG, JAWA BARAT	2.000.000,00
13	RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAN NEGARA BANDA ACEH	14.182.540,00
14	LEMBAGA PEMASYARAKATAN TERNATE	1.151.100,00
15	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PAPUA BARAT	1.000.000,00
16	KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI MANADO	12.600.000,00
17	KANTOR IMIGRASI KELAS II NON TPI MAMUJU	7.000.000,00
18	KANTOR IMIGRASI KELAS II NON TPI MADIUN	6.000.000,00
19	KANTOR IMIGRASI KELAS III NON TPI KEDIRI	22.000.000,00
Jumlah		157.104.373,00

**Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah (Akun 425811)
Menurut daftar satuan kerja per 31 Desember 2021**

No	Nama Satker	Jumlah
1	SEKRETARIAT JENDERAL (PUSAT)	269.083.653,00
2	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAKARTA RAYA	29.125.250,00
3	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM UJUNG PANDANG	6.499.759,00
4	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PALEMBANG	536.400,00
5	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM KUPANG	20.408.136,00
6	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PALANGKARAYA	15.319.612,00
7	PUSAT DATA DAN TEKNOLOGI INFORMASI	58.092.284,00
8	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PROPINSI BANTEN	175.637,00
9	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM YOGYAKARTA	2.491.250,00
10	DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM	16.824.808,00
11	LPKA Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara	24.774.736,00
12	LEMBAGA PEMASYARAKATAN BANCEUY BANDUNG	132.300.359,00
13	LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEMUDA TANGERANG	1.472.000,00
14	LAPAS KELAS III SINABANG	2.115.412,00
15	LEMBAGA PEMASYARAKATAN MEDAN	12.954.326,00
16	LAPAS KELAS IIA KOTABARU	1.074.208.840,00
17	LAPAS KELAS III LEOK	2.976.344,00
18	LAPAS KELAS III SAPARUA	86.195.300,00
19	LAPAS KELAS III WAHAI	10.361.520,00
20	RUMAH TAHANAN NEGARA LARANTUKA	25.726.109,00
21	LEMBAGA PEMASYARAKATAN ANAK PEKANBARU	56.651.485,00
22	DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN	1.890.189.389,00
23	Lapas Perempuan Kelas III Ternate	142.399.181,00
24	Lapas Perempuan Kelas III Manokwari	100.000.000,00
25	LEMBAGA PEMASYARAKATAN NARKOTIKA YOGYAKARTA	486.000,00
26	LAPAS TERBUKA CIANGIR	9.926.400,00
27	RUMAH TAHANAN NEGARA AMBON	20.000.000,00
28	Lapas anak Kelas III Batam	910.676.812,00
29	KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI JAMBI	3.019.658,00
30	KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI SORONG	12.756.523,00
31	KANTOR IMIGRASI KELAS I KHUSUS TPI BATAM	214.019,00
32	KANTOR IMIGRASI KELAS I KHUSUS TPI SOEKARNO HATTA	24.100.066,00
33	DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI	46.615.062,00
34	KANTOR IMIGRASI KELAS III NON TPI KETAPANG	10.322.690,00
35	KANTOR IMIGRASI KELAS III NON TPI BIMA	1.521.083.921,00
36	KANTOR IMIGRASI KELAS II NON TPI KARAWANG	92.144,00
37	KANTOR IMIGRASI KELAS II NON TPI PEMALANG	144.102,00
38	KANTOR IMIGRASI KELAS II NON TPI BLITAR	756.140,00
39	RUMAH DETENSI IMIGRASI KUPANG	6.849.273,00
40	KANTOR IMIGRASI KELAS II NON TPI BEKASI	200.250,00
41	KANTOR IMIGRASI KELAS III NON TPI PAMEKASAN	741.105,00
42	KANTOR IMIGRASI KELAS III NON TPI TAKENGON	123.090.463,00
43	DITJEN KEKAYAAN INTELEKTUAL	133.704.189,00
44	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA	33.972.507,00
Jumlah		6.839.633.114,00

Penerimaan kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang lalu (Akun 425911)
Menurut daftar satuan kerja per 31 Desember 2021

No	Nama Satker	Jumlah
1	SEKRETARIAT JENDERAL (PUSAT)	93.140.110,00
2	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAKARTA RAYA	5.778.356,00
3	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BANDUNG	666.444,00
4	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SURABAYA	7.605.478,00
5	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SUMATERA UTARA DI MEDAN	1.720.000,00
6	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BANDA ACEH	944.100,00
7	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PADANG	1.295.198,00
8	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PALEMBANG	1.260.459,00
9	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PONTIANAK	953,00
10	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BANJARMASIN	2.000.042,00
11	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM DENPASAR	545.180,00
12	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM KUPANG	206,00
13	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM AMBON	8.645.700,00
14	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAYAPURA	291,00
15	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BENGKULU	2.885.550,00
16	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM YOGYAKARTA	37.236.230,00
17	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM MATARAM	215.488,00
18	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PROPINSI BANTEN	2.051.500,00
19	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PROPINSI BANGKA BELITUNG	1.220.615,00
20	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PROPINSI MALUKU UTARA	370.820,00
21	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM KEPULAUAN RIAU	740.264,00
22	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SULAWESI BARAT	1.850.261,00
23	INSPEKTORAT JENDERAL	925.321,00
24	BALAI HARTA PENINGGALAN SEMARANG	370.000,00
25	BALAI HARTA PENINGGALAN MEDAN	4.810.000,00
26	DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM	635,00
27	LEMBAGA PEMASYARAKATAN BATU	24.842.113,00
28	BALAI PEMASYARAKATAN ACEH	550.000,00
29	RUMAH TAHANAN NEGARA MEDAN	586,00
30	BALAI PEMASYARAKATAN JAMBI	540.000,00
31	RUMAH TAHANAN NEGARA PALEMBANG	341,00
32	BALAI PEMASYARAKATAN BANDAR LAMPUNG	232.318,00
33	BALAI PEMASYARAKATAN BALIKPAPAN	45,00
34	BAPAS KELAS I MANADO	136,00
35	BALAI PEMASYARAKATAN PALU	2.700.687,00
36	BALAI PEMASYARAKATAN WATAMPONE	4.292.954,00
37	BALAI PEMASYARAKATAN AMBON	80,00
38	BALAI PEMASYARAKATAN BENGKULU	130,00
39	LEMBAGA PEMASYARAKATAN TOBELLO	3.623.057,00
40	LEMBAGA PEMASYARAKATAN SANANA	16.921.989,00
41	LAPAS BATAM	6.959.448,00
42	RUMAH TAHANAN NEGARA YOGYAKARTA	265.090,00
43	LPKA Palu, Provinsi SuLawesi Tengah	83.700.000,00
44	LPKA Ternate, Provinsi Maluku Utara	127.620.900,00
45	LPKA Jayapura, Provinsi Papua	742,00
46	BALAI PEMASYARAKATAN JAKBAR	1.042.320,00
47	BALAI PEMASYARAKATAN JAKTIM/JAKUT	158,00
48	BALAI PEMASYARAKATAN BANDUNG	360.192,00
49	LAPAS CIAMIS	64,00
50	BALAI PEMASYARAKATAN CIREBON	3.164.586,00
51	LEMBAGA PEMASYARAKATAN KUNINGAN	132,00
52	LEMBAGA PEMASYARAKATAN BOGOR	78,00
53	LAPAS SUKABUMI	144,00
54	LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEMUDA TANGERANG	913.080,00
55	LAPAS KELAS IIA TANGERANG	1.802.878,00
56	LEMBAGA PEMASYARAKATAN YOGYAKARTA	10,00
57	RUMAH TAHANAN NEGARA WATES	265.042,00
58	RUMAH TAHAN NEGARA WONOSARI	475,00
59	BALAI PEMASYARAKATAN SEMARANG	177,00
60	LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEKALONGAN	12,00
61	LEMBAGA PEMASYARAKATAN MAGELANG	60,00
62	RUMAH TAHANAN NEGARA KEBUMEN	1.103.400,00
63	BALAI PEMASYARAKATAN PATI	196,00
64	RUMAH TAHANAN NEGARA BOYOLALI	150,00
65	BALAI PEMASYARAKATAN PURWOKERTO	2.425.224,00
66	RUMAH TAHANAN NEGARA PURBALINGGA	2.120.498,00
67	LEMBAGA PEMASYARAKATAN SIDOARJO	1.620.000,00

Penerimaan kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang lalu (Akun 425911)
Menurut daftar satuan kerja per 31 Desember 2021

No	Nama Satker	Jumlah
68	RUMAH TAHANAN NEGARA NGANJUK	959.700,00
69	LAPAS BONDOWOSO	249,00
70	LAPAS KELAS IIA BANYUWANGI	2.993.300,00
71	RUMAH TAHANAN NEGARA SITUBONDO	2.189.681,00
72	BALAI PEMASYARAKATAN PAMEKASAN	4.320.000,00
73	LEMBAGA PEMASYARAKATAN PAMEKASAN	2.856,00
74	RUMAH TAHANAN NEGARA BANGIL	2.456.152,00
75	LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN MALANG	764.250,00
76	BALAI PEMASYARAKATAN MADIUN	555.152,00
77	RUMAH TAHANAN NEGARA MAGETAN	79.032,00
78	LAPAS KELAS IIB BLANGKEJEREN	188,00
79	LAPAS KELAS III CALANG	858,00
80	RUMAH TAHANAN NEGARA TAPAKTUAN	414,00
81	RUTAN KELAS IIB SINGKEL	87,00
82	LAPAS KELAS III SINABANG	4.320.385,00
83	BALAI PEMASYARAKATAN MEDAN	8.843.741,00
84	LEMBAGA PEMASYARAKATAN MEDAN	318,00
85	LEMBAGA PEMASYARAKATAN RANTAU PRAPAT	90,00
86	LAPAS KELAS III KOTA PINANG	26,00
87	RUTAN KELAS I LABUHAN DELI	197,00
88	RUMAH TAHANAN NEGARA PANGKALAN BRANDAN	1.113.024,00
89	LAPAS LUBUK PAKAM	108,00
90	LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEMATANG SIANTAR	72,00
91	LAPAS GUNUNG SITOLI	136,00
92	LAPAS KELAS III KOTANOPAN	5.874.250,00
93	RUMAH TAHANAN NEGARA BALIGE	36,00
94	LEMBAGA PEMASYARAKATAN PANYABUNGAN	132,00
95	LEMBAGA PEMASYARAKATAN PADANG	745.054,00
96	RUMAH TAHANAN NEGARA PADANG PANJANG	304,00
97	BALAI PEMASYARAKATAN PEKANBARU	141,00
98	LAPAS KELAS IIA BANGKINANG	168,00
99	LEMBAGA PEMASYARAKATAN PASIR PANGARAYAN	70,00
100	BALAI PEMASYARAKATAN PALEMBANG	258,00
101	LAPAS SEKAYU	530.000,00
102	LAPAS KELAS IIB MUARA DUA	265.000,00
103	LAPAS KELAS III PAGAR ALAM	531.646,00
104	RUMAH TAHANAN NEGARA BATURAJA	531.762,00
105	LAPAS KELAS IIB MARTAPURA	42,00
106	RUMAH TAHANAN NEGARA PRABUMULIH	736.300,00
107	LEMBAGA PEMASYARAKATAN PANGKALPINANG	4.098.450,00
108	RUMAH TAHANAN NEGARA SUKADANA	8.642.200,00
109	LEMBAGA PEMASYARAKATAN SINGKAWANG	40,00
110	LEMBAGA PEMASYARAKATAN PANGKALAN BUN	76,00
111	LEMBAGA PEMASYARAKATAN BANJARMASIN	586,00
112	LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK MARTAPURA	2.062,00
113	LAPAS KELAS IIA KOTABARU	63,00
114	LEMBAGA PEMASYARAKATAN AMUNTAI	1.123,00
115	LAPAS KELAS IIA TENGGARONG	1.182.000,00
116	LEMBAGA PEMASYARAKATAN TARAKAN	14.019.936,00
117	LAPAS KELAS III AMURANG	175.750,00
118	LEMBAGA PEMASYARAKATAN TONDANO	999.000,00
119	LEMBAGA PEMASYARAKATAN GORONTALO	100,00
120	LEMBAGA PEMASYARAKATAN TAHUNA	56,00
121	LEMBAGA PEMASYARAKATAN PALU	540.750,00
122	LEMBAGA PEMASYARAKATAN TOLI-TOLI	368,00
123	BALAI PEMASYARAKATAN UJUNG PANDANG	600.687,00
124	RUMAH TAHANAN NEGARA PANGKAJENE	1.005,00
125	LPKA KELAS II MAROS	233,00
126	RUMAH TAHANAN NEGARA JENEPONTO	62,00
127	RUMAH TAHANAN NEGARA BANTA ENG	69,00
128	RUMAH TAHANAN NEGARA MALINO	72,00
129	RUMAH TAHANAN NEGARA SINJAI	42,00
130	LAPAS KELAS IIA PARE-PARE	165,00
131	RUMAH TAHANAN NEGARA PINRANG	120,00
132	RUMAH TAHANAN NEGARA ENREKANG	10,00
133	RUMAH TAHANAN NEGARA BARRU	70,00
134	RUMAH TAHANAN NEGARA MAJENE	276,00

Penerimaan kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang lalu (Akun 425911)
Menurut daftar satuan kerja per 31 Desember 2021

No	Nama Satker	Jumlah
135	LEMBAGA PEMASYARAKATAN POLEWALI	51,00
136	LEMBAGA PEMASYARAKATAN WATAMPONE	68,00
137	RUMAH TAHANAN NEGARA SENGKANG	51,00
138	LEMBAGA PEMASYARAKATAN AMBON	598,00
139	RUMAH TAHANAN NEGARA TERNATE	22.809.743,00
140	LAPAS KELAS III LABUHA	26.537.148,00
141	LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS IIA KEROBOKAN	1.576.696,00
142	LAPAS TABANAN	531.137,00
143	LEMBAGA PEMASYARAKATAN KARANGASEM	150,00
144	LEMBAGA PEMASYARAKATAN MATARAM	355,00
145	RUMAH TAHANAN NEGARA PRAYA	45,00
146	LEMBAGA PEMASYARAKATAN SUMBAWA BESAR	123,00
147	RUMAH TAHANAN NEGARA RABA/BIMA	10,00
148	RUMAH TAHANAN NEGARA BAJAWA	8,00
149	LEMBAGA PEMASYARAKATAN SERUI	151,00
150	LEMBAGA PEMASYARAKATAN MERAUKE	3.916.185,00
151	LAPAS KELAS III TEMINABUHAN	48,00
152	LAPAS KELAS III DABO SINGKEP	379,00
153	LEMBAGA PEMASYARAKATAN WANITA TANGERANG	51,00
154	BALAI PEMASYARAKATAN BANJARMASIN	72,00
155	BALAI PEMASYARAKATAN PADANG	360.050,00
156	RUMAH TAHANAN NEGARA JAKARTA PUSAT	20,00
157	BALAI PEMASYARAKATAN PONTIANAK	2.197.757,00
158	LAPAS KELAS III TANAH MERAH	24.303.276,00
159	DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN	3.378.997,00
160	RUMAH TAHANAN NEGARA PANDEGLANG	17,00
161	Lapas Perempuan Kelas IIA Jakarta	250,00
162	Lapas Perempuan Kelas IIA Palangkaraya	2,00
163	Lapas Perempuan Kelas IIA Samarinda	214.000,00
164	Lapas Perempuan Kelas IIA Pontianak	105,00
165	Lapas Perempuan Kelas IIB Padang	1.855.000,00
166	Lapas Perempuan Kelas IIB Yogyakarta	8,00
167	Lapas Perempuan Kelas III Palu	117.445.450,00
168	Lapas Perempuan Kelas III Gorontalo	24,00
169	Lapas Perempuan Kelas III Ternate	152.116.800,00
170	LPKA JOGJAKARTA, PROVINSI D.I YOGYAKARTA	600.000,00
171	RUMAH TAHANAN NEGARA CIPINANG	3.130.632,00
172	LEMBAGA PEMASYARAKATAN SALEMBA	1.115,00
173	BALAI PEMASYARAKATAN GARUT	6.795.100,00
174	LEMBAGA PEMASYARAKATAN CIBINONG	120,00
175	LEMBAGA PEMASYARAKATAN SLAWI	84,00
176	LEMBAGA PEMASYARAKATAN NARKOTIKA YOGYAKARTA	360.000,00
177	LEMBAGA PEMASYARAKATAN WANITA PALEMBANG	265.266,00
178	LEMBAGA PEMASYARAKATAN WANITA BANDAR LAMPUNG	1.325.112,00
179	RUMAH TAHANAN NEGARA TANGERANG	1.470,00
180	BALAI PEMASYARAKATAN POLEWALI	134,00
181	RUMAH TAHANAN NEGARA JANTHOI	259,00
182	BALAI PEMASYARAKATAN JAKARTA SELATAN	258,00
183	RUMAH TAHANAN NEGARA PALU	144,00
184	BALAI PEMASYARAKATAN AMUNTAI, KAB. HULU SUNGAI UTARA, KALIMANTAN SELATAN	168,00
185	BALAI PEMASYARAKATAN SAMARINDA, KOT.SAMARINDA, KALIMANTAN TIMUR	925.000,00
186	RUMAH PENYIMPANAN BARANG SITAAN NEGARA UJUNG PANDANG, KOT.UJUNG PANDANG,	220,00
187	BAPAS KELAS II MUSI RAWAS UTARA	4.545.400,00
188	BAPAS KELAS II BEKASI	8.744.496,00
189	BAPAS KELAS II BATU LICIN	1.044,00
190	BAPAS KELAS II TARAKAN	720.028,00
191	LAPAS NARKOTIKA KELAS IIB RUMBAI	2.640.112,00
192	RUMAH TAHANAN NEGARA AMBON	483,00
193	RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAN NEGARA JAKARTA SELATAN	242,00
194	RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAN NEGARA JAKARTA TIMUR	1.100,00
195	RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAN NEGARA YOGYAKARTA	1.726.800,00
196	RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAN NEGARA BANDA ACEH	329.004,00
197	RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAN NEGARA BANJARMASIN	314,00
198	RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAN NEGARA BENGKULU	56,00
199	LEMBAGA PEMASYARAKATAN NARKOTIKA DI CIREBON	76,00

**Penerimaan kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang lalu (Akun 425911)
Menurut daftar satuan kerja per 31 Desember 2021**

No	Nama Satker	Jumlah
200	KANTOR RUPBASAN BLITAR	4,00
201	LEMBAGA PEMASYARAKATAN TERNATE	58.141.329,00
202	LEMBAGA PEMASYARAKATAN SLEMAN	625.000,00
203	LEMBAGA PEMASYARAKATAN TERBUKA KENDAL	75,00
204	LEMBAGA PEMASYARAKATAN TERBUKA NUSAKAMBANGAN	259.300,00
205	LEMBAGA PEMASYARAKATAN NARKOTIKA BANDAR LAMPUNG	99.000,00
206	LEMBAGA PEMASYARAKATAN NARKOTIKA JAKARTA	8.054.922,00
207	LEMBAGA PEMASYARAKATAN NARKOTIKA BANDUNG	534,00
208	LEMBAGA PEMASYARAKATAN NARKOTIKA NUSAKAMBANGAN	213,00
209	LEMBAGA PEMASYARAKATAN NARKOTIKA BANGLI	42,00
210	LEMBAGA PEMASYARAKATAN NARKOTIKA JAYAPURA	56,00
211	BALAI PEMASYARAKATAN KUTACANE	6.391.000,00
212	BALAI PEMASYARAKATAN TANJUNG PINANG	16.470.964,00
213	BALAI PEMASYARAKATAN WAIKABUBAK	6.626.300,00
214	BALAI PEMASYARAKATAN PANGKAL PINANG	260,00
215	RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAN NEGARA CIREBON	1.060.000,00
216	RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAN NEGARA SANGGAU	210,00
217	RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAN NEGARA BANTUL	2.596.502,00
218	RUMAH TAHANAN NEGARA BANDAR LAMPUNG	96,00
219	LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS III LEMBATA	446.100,00
220	LAPAS KELAS IIB TANJUNG	204,00
221	LPKA KELAS II LOMBOK TENGAH	5.142.957,00
222	RUMAH TAHANAN KELAS IIB KOTA AGUNG	54.015.400,00
223	BALAI PEMASYARAKATAN KELAS I MANOKWARI	36,00
224	RUMAH SAKIT PENGAYOMAN CIPINANG KELAS D	452,00
225	LAPAS KELAS IIB KAYU AGUNG	59,00
226	LAPAS NARKOTIKA KELAS IIA PANGKAL PINANG	10.926.350,00
227	RUTAN KELAS I PEKANBARU	7.848.700,00
228	Lapas Kelas III Dharmas Raya	796.309,00
229	LAPAS NARKOTIKA KELAS IIB BANYUASIN	27,00
230	RUTAN KELAS I DEPOK	3.789,00
231	Rutan Kelas II B Weda	3.058.375,00
232	KANTOR IMIGRASI KELAS I KHUSUS NON TPI JAKARTA SELATAN	385,00
233	KANTOR IMIGRASI KELAS II BATULICIN	2.091,00
234	KANTOR IMIGRASI KELAS I NON TPI JAKARTA PUSAT	6.602.156,00
235	KANTOR IMIGRASI KELAS I KHUSUS NON TPI JAKARTA BARAT	97,00
236	KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI BANDUNG	954,00
237	KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI CILACAP	3.548,00
238	KANTOR IMIGRASI KELAS I KHUSUS TPI SURABAYA	168,00
239	KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI JEMBER	185.050,00
240	KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI PEKANBARU	152,00
241	KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI TANJUNG PINANG	449.959,00
242	KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI BELAKANG PADANG	185.144,00
243	KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI BALIKPAPAN	2.220.000,00
244	KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI MAKASSAR	215,00
245	KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI MATARAM	180,00
246	KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI BIAK	363.677,00
247	KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI SORONG	60,00
248	KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI MERAUKE	175,00
249	KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI SAMARINDA	185.420,00
250	KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI TEMBILAHAN	172,00
251	KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI JAKARTA TIMUR	3.331.189,00
252	KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI AMBON	755,00
253	KANTOR IMIGRASI KELAS I KHUSUS TPI SOEKARNO HATTA	2.969,00
254	KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI SURAKARTA	1.196,00
255	KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI TANJUNG PERAK	6.846.032,00
256	KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI POLONIA	2.931.750,00
257	KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI BELAWAN	201.000,00
258	KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI BENGKULU	3.240.000,00
259	KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI SAMPIT	12,00
260	KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI BITUNG	2.035.000,00
261	KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI MAUMERE	102,00
262	DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI	8.852.485,00
263	KANTOR IMIGRASI KELAS II NON TPI DEPOK	3,00
264	KANTOR IMIGRASI KELAS II NON TPI POLEWALI MANDAR	122,00
265	KANTOR IMIGRASI KELAS II NON TPI SUKABUMI	1.368,00
266	KANTOR IMIGRASI KELAS II NON TPI KARAWANG	2.306.488,00

**Penerimaan kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang lalu (Akun 425911)
Menurut daftar satuan kerja per 31 Desember 2021**

No	Nama Satker	Jumlah
267	KANTOR IMIGRASI KELAS II NON TPI TASIKMALAYA	24,00
268	KANTOR IMIGRASI KELAS II NON TPI PEMALANG	241,00
269	KANTOR IMIGRASI KELAS II NON TPI PATI	142,00
270	KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI SUMBAWA BESAR	185.000,00
271	KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI GORONTALO	64,00
272	KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI SAMBAS	185.278,00
273	KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI SIAK	48,00
274	KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI TAHUNA	130,00
275	RUMAH DETENSI IMIGRASI JAKARTA	18.303.500,00
276	RUMAH DETENSI IMIGRASI PONTIANAK	793,00
277	RUMAH DETENSI IMIGRASI BALIKPAPAN	3,00
278	RUMAH DETENSI IMIGRASI MANADO	222,00
279	RUMAH DETENSI IMIGRASI MAKASSAR	257,00
280	RUMAH DETENSI IMIGRASI PUSAT TANJUNG PINANG	148,00
281	KANTOR IMIGRASI KELAS II NON TPI BEKASI	28,00
282	KANTOR IMIGRASI KELAS III NON TPI KOTABUMI	172,00
283	KANTOR IMIGRASI KELAS III NON TPI WAKATOBI	40,00
284	DITJEN KEKAYAAN INTELEKTUAL	3.381,00
285	DITJEN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	2.747.912,00
286	DIREKTORAT JENDERAL HAM	6.435.652,00
287	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA	2.073.996,00
288	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA	1.968,00
289	POLITEKNIK IMIGRASI	4.065.617,00
290	POLITEKNIK ILMU PEMASYARAKATAN	36,00
291	BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN HUKUM DAN HAM SULAWESI UTARA	740.178,00
Jumlah		1.178.047.774,00

Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang lalu (Akun 425912)
Menurut daftar satuan kerja per 31 Desember 2021

No	Nama Satker	Jumlah
1	SEKRETARIAT JENDERAL (PUSAT)	115.455.200,00
2	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SUMATERA UTARA DI MEDAN	4.424.659,00
3	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM UJUNG PANDANG	13.318.548,00
4	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BANDA ACEH	35.051.254,00
5	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PADANG	52.000,00
6	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PALEMBANG	7.520.040,00
7	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM KUPANG	5.465.000,00
8	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM AMBON	1.660.668,00
9	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAMBI	295.192,00
10	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM KENDARI	1.150.000,00
11	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PROPINSI BANTEN	1.277.000,00
12	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PAPUA BARAT	21.529.529,00
13	INSPEKTORAT JENDERAL	122.821.477,00
14	BALAI HARTA PENINGALAN MEDAN	19.013.000,00
15	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAWA TENGAH	1.000.000,00
16	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM UJUNG PANDANG	9.145.450,00
17	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PEKANBARU	5.539.400,00
18	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BANJARMASIN	13.370.000,00
19	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM AMBON	765.000,00
20	DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM	1.256.557.785,00
21	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PROPINSI GORONTALO	342.353,00
22	LEMBAGA PEMASYARAKATAN PERMISAN	923.337,00
23	LEMBAGA PEMASYARAKATAN BATU	1.410.917,00
24	LEMBAGA PEMASYARAKATAN BESI	102.680,00
25	RUMAH TAHANAN NEGARA PEKALONGAN	8.804.693,00
26	RUMAH TAHANAN NEGARA BANTUL	18.544.000,00
27	LEMBAGA PEMASYARAKATAN WANITA MEDAN	3.866.169,00
28	LEMBAGA PEMASYARAKATAN ANAK MEDAN	27.697.865,00
29	RUMAH TAHANAN NEGARA MEDAN	117.622.888,00
30	RUMAH TAHANAN NEGARA PALEMBANG	20.000.000,00
31	LEMBAGA PEMASYARAKATAN ANAK GIANJAR	531.804,00
32	RUMAH TAHANAN NEGARA YOGYAKARTA	4.452.700,00
33	LPKA Pangkal Pinang, Provinsi Kep. Bangka Belitung	1.702.419,00
34	LPKA Bengkulu, Provinsi Bengkulu	563.939,00
35	LPKA Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah	33.922.644,00
36	LPKA Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara	807.166,00
37	RUTAN KELAS I PONDOK BAMBU	6.054.406,00
38	LAPAS SUMEDANG	2.646.459,00
39	LAPAS MAJALENGKA	1.804.371,00
40	LAPAS INDRAMAYU	2.886.000,00
41	LEMBAGA PEMASYARAKATAN BOGOR	17.543.301,00
42	LAPAS PURWAKARTA	471.596,00
43	LEMBAGA PEMASYARAKATAN SUBANG	4.516.268,00
44	LEMBAGA PEMASYARAKATAN YOGYAKARTA	1.326.900,00
45	RUMAH TAHANAN NEGARA WATES	7.206.000,00
46	RUMAH TAHANAN NEGARA WONOSARI	2.682.000,00
47	LEMBAGA PEMASYARAKATAN SEMARANG	96.565.900,00
48	LEMBAGA PEMASYARAKATAN AMBARAWA	3.146.502,00
49	RUMAH TAHANAN NEGARA PEMALANG	17.647.519,00
50	RUMAH TAHANAN NEGARA TEMANGGUNG	676.950,00
51	RUMAH TAHANAN NEGARA WONOSOBO	3.262.000,00
52	RUMAH TAHANAN NEGARA PURWOREJO	62.911,00
53	LEMBAGA PEMASYARAKATAN PATI	20.616.488,00
54	RUMAH TAHANAN NEGARA JEPARA	8.543.200,00
55	LEMBAGA PEMASYARAKATAN SRAGEN	1.044.335,00
56	RUMAH TAHANAN NEGARA BOYOLALI	1.758.500,00
57	LAPAS KLATEN	1.418.807,00
58	RUMAH TAHANAN NEGARA WONOGIRI	24.973.600,00
59	RUMAH TAHANAN NEGARA BANJARNEGARA	1.047.440,00
60	LAPAS TULUNGAGUNG	52.464.150,00
61	LAPAS KELAS IIA BANYUWANGI	82.448.564,00
62	LAPAS KELAS IIB IDI RAYEUK	12.850.279,00
63	LEMBAGA PEMASYARAKATAN KUALA SIMPANG	12.949.200,00
64	LAPAS KELAS IIB IDI	5.263.893,00
65	LAPAS KELAS IIB BLANGKEJEREN	210.591,00
66	LEMBAGA PEMASYARAKATAN MEULABOH	69.934.046,00

Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang lalu (Akun 425912)
Menurut daftar satuan kerja per 31 Desember 2021

No	Nama Satker	Jumlah
67	LEMBAGA PEMASYARAKATAN MEDAN	7.710.950,00
68	RUMAH TAHANAN NEGARA TANJUNG PURA	4.910.278,00
69	LAPAS TANJUNG BALAI ASAHAN	20.371.333,00
70	LEMBAGA PEMASYARAKATAN RANTAU PRAPAT	51.121.945,00
71	LAPAS KELAS III KOTA PINANG	3.172.892,00
72	RUTAN KELAS I LABUHAN DELI	16.359.400,00
73	RUMAH TAHANAN NEGARA PANGKALAN BRANDAN	4.314.503,00
74	LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEMATANG SIANTAR	9.936.023,00
75	LAPAS PADANG SIDEMPUAN	25.130.300,00
76	LAPAS KELAS III GUNUNG TUA	5.871.459,00
77	LEMBAGA PEMASYARAKATAN PADANG	8.164.075,00
78	LEMBAGA PEMASYARAKATAN PARIAMAN	1.000.000,00
79	RUMAH TAHANAN NEGARA LUBUK SIKAPING	1.902.757,00
80	LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEKANBARU	2.885.330,00
81	LEMBAGA PEMASYARAKATAN BENGKALIS	19.544.184,00
82	LAPAS KELAS IIB SELATPANJANG	5.003.864,00
83	LEMBAGA PEMASYARAKATAN PASIR PANGARAYAN	14.772.000,00
84	LEMBAGA PEMASYARAKATAN TANJUNG PINANG	389.000,00
85	LEMBAGA PEMASYARAKATAN JAMBI	42.758.550,00
86	LEMBAGA PEMASYARAKATAN MUARA BUNGO	84.028.901,00
87	LAPAS BANGKO	8.479.504,00
88	LAPAS SEKAYU	996.274,00
89	LEMBAGA PEMASYARAKATAN LAHAT	10.111.219,00
90	LAPAS KELAS IIB MUARA DUA	197.157,00
91	RUMAH TAHANAN NEGARA PRABUMULIH	17.305.568,00
92	LEMBAGA PEMASYARAKATAN PANGKALPINANG	20.733.392,00
93	LEMBAGA PEMASYARAKATAN BANDAR LAMPUNG	22.974.591,00
94	RUMAH TAHANAN NEGARA MENGGALA	19.496.000,00
95	RUMAH TAHANAN NEGARA KRUI	21.547.627,00
96	LEMBAGA PEMASYARAKATAN PONTIANAK	1.868.893,00
97	LEMBAGA PEMASYARAKATAN SINGKAWANG	8.962.786,00
98	LEMBAGA PEMASYARAKATAN SINTANG	6.861.055,00
99	LEMBAGA PEMASYARAKATAN PALANGKARAYA	37.479.235,00
100	RUMAH TAHANAN NEGARA KUALA KAPUAS	7.803.199,00
101	LEMBAGA PEMASYARAKATAN BANJARMASIN	36.226.527,00
102	LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK MARTAPURA	8.558.342,00
103	RUMAH TAHANAN NEGARA PELAIHARI	4.310.098,00
104	LEMBAGA PEMASYARAKATAN SAMARINDA	33.590.970,00
105	LAPAS KELAS IIA TENGGARONG	21.881.133,00
106	LEMBAGA PEMASYARAKATAN TARAKAN	139.702.922,00
107	LAPAS KELAS III AMURANG	12.743.026,00
108	LEMBAGA PEMASYARAKATAN TONDANO	7.721.969,00
109	LEMBAGA PEMASYARAKATAN ANAK TOMOHON	1.863.659,00
110	LEMBAGA PEMASYARAKATAN GORONTALO	4.061.767,00
111	LAPAS KELAS III LIRUNG	520.000,00
112	LEMBAGA PEMASYARAKATAN PALU	9.894.725,00
113	LAPAS KELAS III LEOK	1.960.900,00
114	LEMBAGA PEMASYARAKATAN LUWUK	55.531.000,00
115	LAPAS KELAS III KOLONEDALE	370.000,00
116	RUMAH TAHANAN NEGARA POSO	2.912.819,00
117	LEMBAGA PEMASYARAKATAN UJUNG PANDANG	39.807.164,00
118	LEMBAGA PEMASYARAKATAN BULUKUMBA	21.673.665,00
119	RUMAH TAHANAN NEGARA SINJAI	5.977.100,00
120	LEMBAGA PEMASYARAKATAN PALOPO	167.517,00
121	RUMAH TAHANAN NEGARA MAJENE	7.302.673,00
122	LEMBAGA PEMASYARAKATAN POLEWALI	12.002.092,00
123	LAPAS KELAS III MAMASA	6.983.369,00
124	RUMAH TAHANAN NEGARA MAMUJU	6.567.921,00
125	RUMAH TAHANAN NEGARA RAHA	250.000,00
126	LEMBAGA PEMASYARAKATAN BAU-BAU	26.564.520,00
127	LAPAS KELAS III WAHAI	26.000.000,00
128	LEMBAGA PEMASYARAKATAN TUAL	57.061.663,00
129	LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS IIA KEROBOKAN	178.973.839,00
130	RUMAH TAHANAN NEGARA NEGARA	768.456,00
131	RUMAH TAHANAN NEGARA GIANYAR	3.248.640,00
132	LAPAS KELAS IIB SELONG	45.854,00

Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang lalu (Akun 425912)
Menurut daftar satuan kerja per 31 Desember 2021

No	Nama Satker	Jumlah
133	RUMAH TAHANAN NEGARA PRAYA	6.359.129,00
134	LEMBAGA PEMASYARAKATAN KUPANG	127.723.252,00
135	LEMBAGA PEMASYARAKATAN KALABAH	2.161.391,00
136	RUMAH TAHANAN NEGARA RUTENG	1.626.996,00
137	RUMAH TAHANAN NEGARA LARANTUKA	85.872.929,00
138	LEMBAGA PEMASYARAKATAN ABEPURA	6.200.000,00
139	LEMBAGA PEMASYARAKATAN BENGKULU	10.466.357,00
140	RUMAH TAHANAN NEGARA MANNA	13.090.963,00
141	LEMBAGA PEMASYARAKATAN CURUP	17.005.775,00
142	LEMBAGA PEMASYARAKATAN AMPANA	4.160.011,00
143	LEMBAGA PEMASYARAKATAN ANAK KUTOARJO	880.907,00
144	LEMBAGA PEMASYARAKATAN WANITA TANGERANG	782.654,00
145	RUMAH TAHANAN NEGARA JAKARTA PUSAT	92.842.774,00
146	LEMBAGA PEMASYARAKATAN PRIA TANGERANG	5.185.365,00
147	DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN	8.431.550.459,00
148	Lapas Perempuan Kelas IIA Martapura	2.114.434,00
149	Lapas Perempuan Kelas IIA Samarinda	3.166.459,00
150	Lapas Perempuan Kelas IIA Denpasar	10.495.705,00
151	Lapas Perempuan Kelas IIA Pekanbaru	754.468,00
152	Lapas Perempuan Kelas IIA Pontianak	1.177.140,00
153	Lapas Perempuan Kelas IIB Jambi	32.099.000,00
154	Lapas Perempuan Kelas IIB Yogyakarta	11.278.693,00
155	Lapas Perempuan Kelas IIB Batam	19.882.403,00
156	Lapas Perempuan Kelas IIB Bengkulu	1.664.000,00
157	Lapas Perempuan Kelas III Kendari	1.842.404,00
158	LPKA JAKARTA, PROVINSI DKI JAKARTA	2.142.990,00
159	LPKA JOGJAKARTA, PROVINSI D.I YOGYAKARTA	1.088.279,00
160	LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA BANDUNG	1.587.200,00
161	RUMAH TAHANAN NEGARA BATANG	3.066.776,00
162	LEMBAGA PEMASYARAKATAN PASIR PUTIH NUSAKAMBANGAN	12.137.174,00
163	LEMBAGA PEMASYARAKATAN NARKOTIKA YOGYAKARTA	23.534.506,00
164	LEMBAGA PEMASYARAKATAN WAY KANAN	25.020.000,00
165	RUMAH TAHANAN NEGARA MANADO	80.368.500,00
166	RUMAH TAHANAN NEGARA UNAAHA	1.053.322,00
167	LEMBAGA PEMASYARAKATAN BOALEMO	4.166.465,00
168	RUMAH TAHANAN NEGARA BATAM	73.330.587,00
169	RUMAH TAHANAN NEGARA PUTUSSIBAU	394.501,00
170	RUMAH TAHANAN NEGARA PONTIANAK	24.697.696,00
171	BALAI PEMASYARAKATAN TERNATE, MALUKU UTARA	900.000,00
172	LAPAS KHUSUS KELAS IIA KARANGANYAR NUSAKAMBANGAN	1.856.918,00
173	RUMAH TAHANAN NEGARA AMBON	1.286.512,00
174	RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAN NEGARA JAKARTA SELATAN	100.000,00
175	RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAN NEGARA YOGYAKARTA	54.701.500,00
176	RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAN NEGARA JAMBI	10.003,00
177	KANTOR RUPBASAN WATES	2.004.000,00
178	LEMBAGA PEMASYARAKATAN SLEMAN	4.331.000,00
179	LEMBAGA PEMASYARAKATAN BITUNG	4.174.485,00
180	LEMBAGA PEMASYARAKATAN TERBUKA NUSAKAMBANGAN	1.783.345,00
181	LEMBAGA PEMASYARAKATAN NARKOTIKA PEMATANG SIANTAR	173.060.908,00
182	LAPAS NARKOTIKA KELAS IIA MUARA BELITI	2.065.579,00
183	LEMBAGA PEMASYARAKATAN NARKOTIKA JAKARTA	60.131.800,00
184	LEMBAGA PEMASYARAKATAN NARKOTIKA BANDUNG	276.002.638,00
185	LEMBAGA PEMASYARAKATAN NARKOTIKA NUSAKAMBANGAN	6.570.504,00
186	LEMBAGA PEMASYARAKATAN NARKOTIKA MARTAPURA	39.448.077,00
187	LEMBAGA PEMASYARAKATAN NARKOTIKA BANGLI	3.781.170,00
188	RUMAH TAHANAN NEGARA BANDAR LAMPUNG	7.516.000,00
189	RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS I TANJUNG PINANG	14.994.293,00
190	LAPAS PEREMPUAN KELAS IIB KUPANG	387.372,00
191	LAPAS NARKOTIKA KELAS IIA SAMARINDA	40.669.340,00
192	RUMAH TAHANAN KELAS IIB KOTA AGUNG	13.853.000,00
193	RUMAH TAHANAN KELAS IIB KUPANG	16.857.256,00
194	LAPAS KELAS IIB SOROLANGUN	6.340.000,00
195	LAPAS KHUSUS KELAS IIA GUNUNG SINDUR	9.186.015,00
196	LAPAS KELAS IIA CIKARANG	87.913.014,00
197	LAPAS KELAS IIB BANJAR	232.637,00
198	LAPAS KELAS IIA BONTANG	6.297.100,00

Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang lalu (Akun 425912)
Menurut daftar satuan kerja per 31 Desember 2021

No	Nama Satker	Jumlah
199	LAPAS NARKOTIKA KELAS IIB LANGSA	89.615.165,00
200	LAPAS NARKOTIKA KELAS IIA PANGKAL PINANG	14.306.516,00
201	LAPAS NARKOTIKA KELAS IIA GUNUNG SINDUR	27.470.705,00
202	Rutan Kelas II B Bengkulu	78.840.038,00
203	Lapas anak Kelas III Batam	586.379,00
204	RUTAN KELAS I DEPOK	296.268.197,00
205	LAPAS KELAS IIB BANJARBARU	43.278.404,00
206	KANTOR IMIGRASI KELAS I KHUSUS NON TPI JAKARTA SELATAN	21.215.000,00
207	KANTOR IMIGRASI KELAS I KHUSUS TPI SURABAYA	19.663.700,00
208	KANTOR IMIGRASI KELAS II NON TPI PEMATANG SIANTAR	8.550.000,00
209	KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI JAMBI	6.080.000,00
210	KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI PALEMBANG	1.932.500,00
211	PERWAKILAN IMIGRASI DI DEN HAAG	2.621.680,00
212	KANTOR IMIGRASI KELAS II NON TPI MEULABOH	1.756.250,00
213	KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI BITUNG	1.498.000,00
214	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAMBI	1.040.000,00
215	DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI	10.029.258.610,00
216	KANTOR IMIGRASI KELAS III NON TPI KETAPANG	700.000,00
217	KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI TERNATE	26.887.000,00
218	KANTOR IMIGRASI KELAS II NON TPI SUKABUMI	5.523.406,00
219	KANTOR IMIGRASI KELAS II NON TPI MADIUN	11.090.547,00
220	KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI GORONTALO	9.952.000,00
221	RUMAH DETENSI IMIGRASI MANADO	15.900.000,00
222	RUMAH DETENSI IMIGRASI JAYAPURA	27.282.000,00
223	KANTOR IMIGRASI KELAS III TPI LABUAN BAJO	15.000.000,00
224	DITJEN KEKAYAAN INTELEKTUAL	418.058.321,00
225	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PROPINSI BANTEN	300.000,00
226	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAMBI	1.000.000,00
227	DITJEN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	31.288.700,00
228	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PALEMBANG	150.000,00
229	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BENGKULU	1.600.000,00
230	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PEKANBARU	1.402.007,00
231	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BENGKULU	800.000,00
232	POLITEKNIK IMIGRASI	115.418.525,00
233	POLITEKNIK ILMU PEMASYARAKATAN	2.500.000,00
Jumlah		24.898.397.306,00

Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang lalu (Akun 425913)
Menurut daftar satuan kerja per 31 Desember 2021

No	Nama Satker	Jumlah
1	SEKRETARIAT JENDERAL (PUSAT)	747.017.987,00
2	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAKARTA RAYA	29.766.850,00
3	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SURABAYA	67.718.639,00
4	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BANDA ACEH	8.044.735,00
5	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PADANG	8.732.000,00
6	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PEKANBARU	1.550.000,00
7	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PALEMBANG	14.250.834,00
8	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM DENPASAR	5.684.701,00
9	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM KUPANG	32.452.917,00
10	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAMBI	300.000,00
11	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BENGKULU	122.313.044,00
12	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM YOGYAKARTA	7.101.996,00
13	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM KENDARI	10.565.452,00
14	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM MATARAM	159.053.603,00
15	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PROPINSI BANTEN	10.741.269,00
16	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PROPINSI BANGKA BELITUNG	9.361.750,00
17	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PROPINSI GORONTALO	24.573.030,00
18	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PAPUA BARAT	23.922.696,00
19	INSPEKTORAT JENDERAL	18.450.269,00
20	DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM	373.957.765,00
21	LPKA Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur	140.000.000,00
22	BALAI PEMASYARAKATAN JAKTIM/JAKUT	42.039.458,00
23	LAPAS KELAS III SINABANG	50.022.589,00
24	RUMAH TAHANAN NEGARA KABANJAHE	85.667.261,00
25	LAPAS PADANG SIDEMPUAN	30.000.000,00
26	LAPAS KELAS IIA KOTABARU	477.426.180,00
27	LEMBAGA PEMASYARAKATAN TARAKAN	49.575.185,00
28	LEMBAGA PEMASYARAKATAN PALU	10.050.000,00
29	RUMAH TAHANAN NEGARA DONGGALA	29.669.800,00
30	LEMBAGA PEMASYARAKATAN LUWUK	38.854.443,00
31	RUMAH TAHANAN NEGARA RAHA	100,00
32	LEMBAGA PEMASYARAKATAN AMBON	6.200.000,00
33	LAPAS KELAS III SAPARUA	66.672.728,00
34	LAPAS KELAS III SAUMLAKI	15.236.110,00
35	RUMAH TAHANAN NEGARA BAJAWA	8.215.810,00
36	LEMBAGA PEMASYARAKATAN BENGKULU	50.307.839,00
37	LEMBAGA PEMASYARAKATAN DOMPU	118.465.206,00
38	DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN	4.155.157.522,00
39	Lapas Perempuan Kelas IIB Padang	4.800.000,00
40	Lapas Perempuan Kelas IIB Yogyakarta	216.006.843,00
41	Lapas Perempuan Kelas III Kendari	35.000.000,00
42	Lapas Perempuan Kelas III Ternate	138.015.548,00
43	Lapas Perempuan Kelas III Manokwari	376.200.000,00
44	LEMBAGA PEMASYARAKATAN WAY KANAN	40.000.000,00
45	RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAN NEGARA SEMARANG, KOT.SEMARANG, JAWA TENGAH	47.935.600,00
46	BAPAS KELAS II CIANGIR	4.380.000,00
47	LAPAS NARKOTIKA KELAS IIB RUMBAI	6.745.631,00
48	RUMAH TAHANAN NEGARA AMBON	216.482.598,00
49	RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAN NEGARA PALU	40.741.000,00
50	RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAN NEGARA JAYAPURA	15.795.000,00
51	BALAI PEMASYARAKATAN KARANGASEM	30.062.300,00
52	RUMAH SAKIT PENGAYOMAN CIPINANG KELAS D	135.238.714,00
53	Lapas anak Kelas III Batam	445.995.917,00
54	KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI JAMBI	2.400.000,00
55	KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI PALEMBANG	2.406.308,00
56	KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI PANGKAL PINANG	60.432.523,00
57	KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI TARAKAN	5.168.733,00
58	KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI KUPANG	22.707.250,00
59	KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI TEMBILAHAN	35.738.127,00
60	KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI NUNUKAN	25.418.708,00
61	KANTOR IMIGRASI KELAS III NON TPI KETAPANG	6.900.000,00
62	KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI TERNATE	30.262.200,00
63	RUMAH DETENSI IMIGRASI MANADO	2.744.171,00
64	KANTOR IMIGRASI KELAS III NON TPI TAKENGON	51.476.186,00
65	DITJEN KEKAYAAN INTELEKTUAL	2.052.276.706,00

Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang lalu (Akun 425913)
Menurut daftar satuan kerja per 31 Desember 2021

No	Nama Satker	Jumlah
66	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA	835.253.420,00
67	BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN HUKUM DAN HAM JAWA TENGAH	266.718.639,00
Jumlah		12.202.421.890,00

Pendapatan Anggaran Lain-lain (Akun 425999)
Menurut daftar satuan kerja per 31 Desember 2021

No	Nama Satker	Jumlah
1	SEKRETARIAT JENDERAL (PUSAT)	17.837.358,00
2	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM AMBON	300,00
3	DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM	180.000,00
4	BALAI PEMASYARAKATAN YOGYAKARTA	118.799,00
5	PERWAKILAN IMIGRASI DI PENANG	47.944,00
6	PERWAKILAN IMIGRASI DI BANGKOK	2.854,00
7	PERWAKILAN IMIGRASI DI HONGKONG	285,00
8	PERWAKILAN IMIGRASI DI TOKYO	5.263,00
9	PERWAKILAN IMIGRASI DI DAVAO	4.694,00
10	PERWAKILAN IMIGRASI DI DEN HAAG	6.970,00
11	PERWAKILAN IMIGRASI DI KUCHING	4.552,00
12	PERWAKILAN IMIGRASI DI TAWAO	3.282,00
13	PERWAKILAN IMIGRASI DI LOS ANGELES	6.544,00
14	RUMAH DETENSI IMIGRASI MANADO	27.415,00
15	DITJEN KEKAYAAN INTELEKTUAL	1.005.000,00
16	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM KUPANG	203.500,00
17	BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN HUKUM DAN HAM JAWA TENGAH	370.138,00
Jumlah		19.824.898,00

Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi Covid-19 (Akun 521131)
Menurut Daftar Satuan Kerja per 31 Desember 2021

No	Nama Satker	Jumlah
1	SEKRETARIAT JENDERAL (PUSAT)	1.968.144.360,00
2	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAKARTA RAYA	22.239.154,00
3	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BANDUNG	10.059.100,00
4	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAWA TENGAH	58.654.000,00
5	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SURABAYA	130.138.998,00
6	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SUMATERA UTARA DI MEDAN	10.798.090,00
7	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BANDA ACEH	8.087.200,00
8	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PADANG	11.946.335,00
9	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PEKANBARU	3.457.360,00
10	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PALEMBANG	9.421.564,00
11	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM TANJUNG KARANG	36.988.616,00
12	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PONTIANAK	60.766.893,00
13	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BANJARMASIN	171.303.060,00
14	KANWIL DEPARTEMAN HUKUM DAN HAM MANADO	154.657.286,00
15	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM DENPASAR	17.772.000,00
16	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM KUPANG	85.310.000,00
17	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM AMBON	3.162.910,00
18	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAYAPURA	3.441.930,00
19	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAMBI	45.089.486,00
20	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BENGKULU	10.126.000,00
21	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM YOGYAKARTA	98.343.069,00
22	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PALANGKARAYA	6.000.000,00
23	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM KENDARI	2.500.000,00
24	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PALU	6.292.978,00
25	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM MATARAM	8.891.600,00
26	PUSAT DATA DAN TEKNOLOGI INFORMASI	760.108.200,00
27	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PROPINSI BANGKA BELITUNG	3.000.000,00
28	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PROPINSI GORONTALO	3.396.317,00
29	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PROPINSI MALUKU UTARA	27.182.000,00
30	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PAPUA BARAT	5.000.000,00
31	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM KEPULAUAN RIAU	8.852.000,00
32	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SULAWESI BARAT	4.809.000,00
33	INSPEKTORAT JENDERAL	29.258.644,00
34	BALAI HARTA PENINGGALAN JAKARTA	2.242.200,00
35	BALAI HARTA PENINGGALAN SEMARANG	750.000,00
36	BALAI HARTA PENINGGALAN MEDAN	32.187.895,00
37	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAWA TENGAH	360.373.750,00
38	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PALEMBANG	43.792.661,00
39	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PONTIANAK	71.014.000,00
40	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM MANADO	17.699.746,00
41	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM DENPASAR	163.818.800,00
42	DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM	1.462.292,00
43	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM KEPULAUAN RIAU	67.009.800,00
44	LEMBAGA PEMASYARAKATAN KARAWANG	11.250.000,00
45	LEMBAGA PEMASYARAKATAN ANAK MEDAN	110.450.000,00
46	RUMAH TAHANAN NEGARA MEDAN	10.680.000,00
47	BAPAS KELAS I PALANGKARAYA	2.450.000,00
48	BALAI PEMASYARAKATAN KUPANG	11.000.000,00
49	LEMBAGA PEMASYARAKATAN TOBELLO	1.990.000,00
50	RUMAH TAHANAN NEGARA YOGYAKARTA	23.861.360,00
51	LPKA Bengkulu, Provinsi Bengkulu	36.784.500,00
52	LPKA Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah	5.454.500,00
53	LPKA Ambon, Provinsi Maluku	6.000.000,00
54	LPKA Jayapura, Provinsi Papua	3.694.000,00
55	LPKA Manokwari, Provinsi Papua Barat	18.700.000,00
56	BALAI PEMASYARAKATAN JAKTIM/JAKUT	85.497.282,00
57	BALAI PEMASYARAKATAN BANDUNG	29.688.350,00

Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi Covid-19 (Akun 521131)
Menurut Daftar Satuan Kerja per 31 Desember 2021

No	Nama Satker	Jumlah
58	LAPAS SUMEDANG	62.634.000,00
59	LAPAS TASIKMALAYA	45.750.750,00
60	BALAI PEMASYARAKATAN CIREBON	27.230.000,00
61	BALAI PEMASYARAKATAN BOGOR	3.387.900,00
62	LAPAS PURWAKARTA	7.458.500,00
63	LEMBAGA PEMASYARAKATAN SUBANG	950.000,00
64	BALAI PEMASYARAKATAN YOGYAKARTA	500.000,00
65	RUMAH TAHANAN NEGARA WATES	14.638.500,00
66	RUMAH TAHANAN NEGARA PURWODADI	143.228.000,00
67	RUMAH TAHANAN NEGARA SALATIGA	1.900.000,00
68	RUMAH TAHANAN NEGARA DEMAK	1.200.000,00
69	LEMBAGA PEMASYARAKATAN AMBARAWA	16.140.000,00
70	LEMBAGA PEMASYARAKATAN MAGELANG	24.459.450,00
71	RUMAH TAHANAN NEGARA BLORA	104.725.000,00
72	RUMAH TAHANAN NEGARA SURAKARTA	64.700.000,00
73	RUMAH TAHANAN NEGARA BOYOLALI	14.175.700,00
74	LAPAS KLATEN	53.955.700,00
75	LAPAS JOMBANG	2.750.000,00
76	BALAI PEMASYARAKATAN BOJONEGORO	3.600.000,00
77	LAPAS LAMONGAN	31.000.000,00
78	BALAI PEMASYARAKATAN KEDIRI	30.574.771,00
79	LAPAS TULUNGAGUNG	790.000,00
80	LAPAS BLITAR	8.295.000,00
81	RUMAH TAHANAN NEGARA BANGKALAN	17.440.000,00
82	RUMAH TAHANAN NEGARA SAMPANG	9.375.000,00
83	BALAI PEMASYARAKATAN MALANG	18.342.150,00
84	LEMBAGA PEMASYARAKATAN MALANG	565.000,00
85	LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN MALANG	46.090.000,00
86	LAPAS KELAS IIB IDI	2.700.000,00
87	LAPAS KELAS III LABUAN BILIK	12.540.000,00
88	RUTAN KELAS I LABUHAN DELI	197.500.000,00
89	LEMBAGA PEMASYARAKATAN TEBINGTINGGI DELI	232.190.000,00
90	RUMAH TAHANAN NEGARA SIDIKALANG	12.182.000,00
91	LEMBAGA PEMASYARAKATAN PADANG	30.378.000,00
92	LEMBAGA PEMASYARAKATAN SOLOK	10.656.000,00
93	LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEKANBARU	120.357.130,00
94	LAPAS KELAS IIA BANGKINANG	30.000.000,00
95	LEMBAGA PEMASYARAKATAN PASIR PANGARAYAN	16.250.000,00
96	LEMBAGA PEMASYARAKATAN METRO	93.876.312,00
97	LEMBAGA PEMASYARAKATAN BANDAR LAMPUNG	300.500.000,00
98	RUMAH TAHANAN NEGARA SAMBAS	9.990.000,00
99	LEMBAGA PEMASYARAKATAN ANAK NEGARA SUNGAI RAYA	148.395.000,00
100	LEMBAGA PEMASYARAKATAN PALANGKARAYA	10.440.000,00
101	RUMAH TAHANAN NEGARA PELAIHARI	19.896.930,00
102	RUMAH TAHANAN NEGARA BARABAI	17.000.000,00
103	RUMAH TAHANAN NEGARA TANJUNG	9.597.000,00
104	LEMBAGA PEMASYARAKATAN TARAKAN	19.923.915,00
105	LEMBAGA PEMASYARAKATAN MANADO	28.010.000,00
106	LEMBAGA PEMASYARAKATAN GORONTALO	1.031.375,00
107	LEMBAGA PEMASYARAKATAN TAHUNA	7.900.000,00
108	LAPAS KELAS III TAUGULANDANG	23.400.000,00
109	RUMAH TAHANAN NEGARA MASAMBA	8.500.000,00
110	LEMBAGA PEMASYARAKATAN KENDARI	4.000.000,00
111	LAPAS KELAS III BANDANAIRA	10.200.000,00
112	LAPAS KELAS III WONRELI	36.000.000,00
113	RUMAH TAHANAN NEGARA TERNATE	13.443.700,00
114	LAPAS KELAS III LABUHA	10.399.500,00

Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi Covid-19 (Akun 521131)
Menurut Daftar Satuan Kerja per 31 Desember 2021

No	Nama Satker	Jumlah
115	LEMBAGA PEMASYARAKATAN KUPANG	28.500.000,00
116	LAPAS ATAMBUA	18.980.000,00
117	RUMAH TAHANAN NEGARA KEFAMENANU	15.575.000,00
118	LAPAS KELAS III BAA	7.300.000,00
119	RUMAH TAHANAN NEGARA SO'E	7.904.000,00
120	LEMBAGA PEMASYARAKATAN KALABAH	13.794.500,00
121	RUMAH TAHANAN NEGARA BAJAWA	832.000,00
122	RUMAH TAHANAN NEGARA MAUMERE	10.347.000,00
123	LEMBAGA PEMASYARAKATAN ABEPURA	138.928.825,00
124	LEMBAGA PEMASYARAKATAN BIAK	57.500.000,00
125	LEMBAGA PEMASYARAKATAN SERUI	8.500.000,00
126	LEMBAGA PEMASYARAKATAN MANOKWARI	81.938.000,00
127	LEMBAGA PEMASYARAKATAN SORONG	23.400.000,00
128	LEMBAGA PEMASYARAKATAN FAK-FAK	12.100.000,00
129	LAPAS KELAS III KAIMANA	21.200.000,00
130	LEMBAGA PEMASYARAKATAN WANITA TANGERANG	68.718.000,00
131	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BANDUNG	98.500.000,00
132	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAWA TENGAH	161.878.650,00
133	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SUMATERA UTARA DI MEDAN	17.300.000,00
134	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM UJUNG PANDANG	15.534.100,00
135	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PEKANBARU	13.177.000,00
136	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PONTIANAK	27.850.000,00
137	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM DENPASAR	50.983.054,00
138	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM AMBON	54.489.569,00
139	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAYAPURA	4.950.000,00
140	BALAI PEMASYARAKATAN PONTIANAK	14.100.000,00
141	LEMBAGA PEMASYARAKATAN ANAK PEKANBARU	12.280.731,00
142	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BENGKULU	19.480.000,00
143	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM YOGYAKARTA	180.289.050,00
144	Lapas Perempuan Kelas IIA Samarinda	17.721.421,00
145	Lapas Perempuan Kelas IIA Pekanbaru	1.500.000,00
146	Lapas Perempuan Kelas IIB Padang	61.405.509,00
147	Lapas Perempuan Kelas III Gorontalo	1.310.000,00
148	Lapas Perempuan Kelas III Manokwari	1.700.000,00
149	Lapas Perempuan Kelas III Mamuju	34.202.000,00
150	Rutan Perempuan Kelas IIA Bandung	23.487.388,00
151	Rutan Kelas IIB Bener Meriah Provinsi Aceh	22.291.080,00
152	BALAI PEMASYARAKATAN GARUT	22.574.000,00
153	LEMBAGA PEMASYARAKATAN NARKOTIKA YOGYAKARTA	17.676.000,00
154	LEMBAGA PEMASYARAKATAN WANITA PALEMBANG	2.348.500,00
155	LEMBAGA PEMASYARAKATAN WANITA SUNGGUMINASA	20.100.000,00
156	RUMAH TAHANAN NEGARA TANGERANG	20.990.750,00
157	RUMAH TAHANAN NEGARA PUTUSSIBAU	85.988.000,00
158	RUMAH TAHANAN NEGARA JANTHOI	23.131.000,00
159	BALAI PEMASYARAKATAN JAKARTA SELATAN	2.621.279,00
160	LEMBAGA PEMASYARAKATAN ANAK (LPA) KUPANG	15.000.000,00
161	RUMAH PENYIMPANAN BARANG SITAAN NEGARA MEDAN, KOT.MEDAN, SUMATERA UTARA	39.696.500,00
162	LEMBAGA PEMASYARAKATAN ANAK, MUARA BULIAN, JAMBI	9.243.950,00
163	BALAI PEMASYARAKATAN TERNATE, MALUKU UTARA	44.000.000,00
164	BAPAS KELAS II KOTABUMI	27.000.000,00
165	BAPAS KELAS II SUBANG	16.100.000,00
166	BAPAS KELAS II SAMBAS	2.371.000,00
167	BAPAS KELAS II SAUMLAKI	10.350.000,00
168	BAPAS KELAS II TIDORE	26.250.000,00
169	BAPAS KELAS II FAKFAK	8.800.000,00
170	BAPAS KELAS II CIANGIR	16.000.000,00
171	LAPAS NARKOTIKA KELAS IIB PURWOKERTO	64.969.750,00

Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi Covid-19 (Akun 521131)
Menurut Daftar Satuan Kerja per 31 Desember 2021

No	Nama Satker	Jumlah
172	RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAN NEGARA JAKARTA PUSAT	76.339.150,00
173	RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAN NEGARA JAKARTA UTARA	16.598.000,00
174	RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAN NEGARA YOGYAKARTA	673.000,00
175	RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAN NEGARA PEKANBARU	10.000.000,00
176	RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAN NEGARA PONTIANAK	6.955.000,00
177	RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAN NEGARA PALANGKARAYA	3.600.000,00
178	RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAN NEGARA TERNATE	16.390.000,00
179	RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAN NEGARA JAYAPURA	4.650.000,00
180	LEMBAGA PEMASYARAKATAN NARKOTIKA DI CIREBON	10.354.900,00
181	RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAN NEGARA BENGKALIS	21.950.000,00
182	RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAN NEGARA WONOGIRI	850.000,00
183	KANTOR RUPBASAN BLITAR	4.993.000,00
184	KANTOR RUPBASAN WATES	9.820.925,00
185	LEMBAGA PEMASYARAKATAN TERNATE	21.850.000,00
186	LEMBAGA PEMASYARAKATAN TERBUKA KENDAL	12.923.967,00
187	LEMBAGA PEMASYARAKATAN TERBUKA NUSAKAMBANGAN	5.250.000,00
188	LEMBAGA PEMASYARAKATAN NARKOTIKA MARTAPURA	39.365.000,00
189	LEMBAGA PEMASYARAKATAN NARKOTIKA SUNGGUMINASA	10.000.000,00
190	BALAI PEMASYARAKATAN BUKITTINGGI	5.219.000,00
191	BALAI PEMASYARAKATAN MERAUKE	1.500.000,00
192	RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAN NEGARA KOTABUMI	5.000.000,00
193	RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAN NEGARA BATURAJA	6.000.000,00
194	RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAN NEGARA CIREBON	3.520.000,00
195	RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAN NEGARA INDRAMAYU	3.365.000,00
196	RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAN NEGARA SURAKARTA	6.199.800,00
197	RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAN NEGARA PEKALONGAN	9.630.000,00
198	RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAN NEGARA BANTUL	10.000.000,00
199	RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAN NEGARA WONOSARI	18.570.000,00
200	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PAPUA BARAT	20.000.000,00
201	RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS I TANJUNG PINANG	54.646.729,00
202	LAPAS KELAS IIB TANJUNG	38.771.500,00
203	LAPAS PEREMPUAN KELAS IIB KUPANG	29.652.810,00
204	RUMAH TAHANAN KELAS IIB KUPANG	15.800.000,00
205	RUMAH TAHANAN KELAS IIB PASANG KAYU	900.000,00
206	LAPAS KHUSUS KELAS IIA GUNUNG SINDUR	54.645.800,00
207	LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KELAS II BANDUNG PROPINSI JAWA BARAT	13.395.150,00
208	Rutan Kelas II B Padang	8.296.000,00
209	KANTOR IMIGRASI KELAS I KHUSUS NON TPI JAKARTA SELATAN	702.549.166,00
210	KANTOR IMIGRASI KELAS II NON TPI KUALA TUNGKAL	41.260.000,00
211	KANTOR IMIGRASI KELAS II BATULICIN	35.822.000,00
212	KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI TANJUNG PANDAN	26.614.250,00
213	KANTOR IMIGRASI KELAS II NON TPI DABO SINGKEP	8.731.500,00
214	KANTOR IMIGRASI KELAS I NON TPI JAKARTA PUSAT	367.590.820,00
215	KANTOR IMIGRASI KELAS I KHUSUS NON TPI JAKARTA BARAT	146.268.475,00
216	KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI BANDUNG	128.976.940,00
217	KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI CIREBON	132.902.214,00
218	KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI SEMARANG	125.490.550,00
219	KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI CILACAP	132.188.495,00
220	KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI YOGYAKARTA	48.445.640,00
221	KANTOR IMIGRASI KELAS I KHUSUS TPI SURABAYA	142.284.931,00
222	KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI MALANG	221.185.989,00
223	KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI JEMBER	24.835.780,00
224	KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI LHOKSEUMAWE	10.550.000,00
225	KANTOR IMIGRASI KELAS I KHUSUS TPI MEDAN	141.359.128,00
226	KANTOR IMIGRASI KELAS II NON TPI PEMATANG SIANTAR	5.907.700,00
227	KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI PEKANBARU	32.596.000,00
228	KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI BENGKALIS	25.420.000,00

Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi Covid-19 (Akun 521131)
Menurut Daftar Satuan Kerja per 31 Desember 2021

No	Nama Satker	Jumlah
229	KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI DUMAI	31.425.000,00
230	KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI BAGAN SIAPAI	31.795.100,00
231	KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI TANJUNG PINANG	76.248.061,00
232	KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI PALEMBANG	198.036.210,00
233	KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI PANGKAL PINANG	117.339.461,00
234	KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI BANDAR LAMPUNG	3.428.000,00
235	KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI PONTIANAK	196.867.871,00
236	KANTOR IMIGRASI KELAS II NON TPI SINGKAWANG	31.414.900,00
237	KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI BALIKPAPAN	48.722.200,00
238	KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI TARAKAN	16.528.100,00
239	KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI MAKASSAR	31.928.200,00
240	KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI KUPANG	85.965.852,00
241	KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI MATARAM	25.803.200,00
242	KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI JAYAPURA	112.607.000,00
243	KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI MERAUKE	167.945.100,00
244	PERWAKILAN IMIGRASI DI SINGAPURA	25.250.961,00
245	PERWAKILAN IMIGRASI DI KUALALUMPUR	55.528.962,00
246	PERWAKILAN IMIGRASI DI PENANG	104.025.462,00
247	PERWAKILAN IMIGRASI DI BANGKOK	34.655.695,00
248	PERWAKILAN IMIGRASI DI HONGKONG	19.385.308,00
249	PERWAKILAN IMIGRASI DI TOKYO	41.563.620,00
250	PERWAKILAN IMIGRASI DI DAVAO	18.233.590,00
251	PERWAKILAN IMIGRASI DI DEN HAAG	10.456.912,00
252	PERWAKILAN IMIGRASI DI BERLIN	32.833.338,00
253	PERWAKILAN IMIGRASI DI KUCHING	7.301.306,00
254	PERWAKILAN IMIGRASI DI TAWAO	29.490.856,00
255	KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI PALU	234.429.076,00
256	KANTOR IMIGRASI KELAS I NON TPI PALANGKARAYA	43.145.000,00
257	KANTOR IMIGRASI KELAS I NON TPI BOGOR	121.932.800,00
258	KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI SAMARINDA	14.170.200,00
259	KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI TEMBILAHAN	44.653.800,00
260	KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI TANJUNG BALAI ASAHAN	19.409.363,00
261	KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI SELAT PANJANG	47.966.450,00
262	KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI JAKARTA TIMUR	160.493.325,00
263	KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI PADANG	36.480.042,00
264	KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI BANJARMASIN	212.435.008,00
265	KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI MANADO	101.288.482,00
266	KANTOR IMIGRASI KELAS I KHUSUS TPI BATAM	135.323.178,00
267	KANTOR IMIGRASI KELAS III NON TPI CIANJUR	107.903.123,00
268	PERWAKILAN IMIGRASI DI JEDDAH	43.382.780,00
269	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAKARTA RAYA	106.152.000,00
270	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BANDUNG	55.059.900,00
271	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAWA TENGAH	212.129.750,00
272	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SUMATERA UTARA DI MEDAN	167.085.000,00
273	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM UJUNG PANDANG	62.838.500,00
274	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BANDA ACEH	45.590.000,00
275	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PEKANBARU	79.570.000,00
276	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM TANJUNG KARANG	17.759.250,00
277	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PONTIANAK	34.000.000,00
278	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BANJARMASIN	59.499.001,00
279	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SAMARINDA	37.392.798,00
280	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM MANADO	36.921.620,00
281	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM KUPANG	8.625.600,00
282	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM AMBON	76.000.000,00
283	KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI TANJUNG PRIOK	104.014.000,00
284	KANTOR IMIGRASI KELAS I KHUSUS TPI SOEKARNO HATTA	10.783.500,00
285	KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI CILEGON	240.390.860,00

Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi Covid-19 (Akun 521131)
Menurut Daftar Satuan Kerja per 31 Desember 2021

No	Nama Satker	Jumlah
286	KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI SURAKARTA	172.464.010,00
287	KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI TANJUNG PERAK	71.562.500,00
288	KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI POLONIA	166.536.210,00
289	KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI BELAWAN	62.177.693,00
290	KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI SIBOLGA	83.717.500,00
291	KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI PAREPARE	42.365.400,00
292	KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI TAREMPA	42.230.000,00
293	KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI LANGSA	33.158.500,00
294	KANTOR IMIGRASI KELAS II NON TPI MEULABOH	30.089.200,00
295	KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI TANJUNG UBAN	9.066.000,00
296	KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI RANAI	25.150.600,00
297	KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI BENGKULU	47.472.485,00
298	KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI SAMPIT	20.729.000,00
299	KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI NUNUKAN	26.600.000,00
300	KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI BITUNG	98.549.035,00
301	KANTOR IMIGRASI KELAS I KHUSUS TPI NGURAH RAI	195.643.922,00
302	KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI ATAMBUA	31.277.600,00
303	KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI MAUMERE	57.698.150,00
304	KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI SANGGAU	43.919.300,00
305	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAMBI	16.455.838,00
306	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BENGKULU	30.361.400,00
307	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM YOGYAKARTA	138.602.100,00
308	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PALANGKARAYA	74.953.000,00
309	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM KENDARI	38.460.000,00
310	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PALU	99.002.800,00
311	DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI	3.354.866.081,00
312	KANTOR IMIGRASI KELAS III NON TPI KERINCI	22.880.000,00
313	KANTOR IMIGRASI KELAS III NON TPI KETAPANG	77.614.200,00
314	KANTOR IMIGRASI KELAS III NON TPI PALOPO	60.314.000,00
315	KANTOR IMIGRASI KELAS III NON TPI BIMA	143.886.620,00
316	KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI TERNATE	74.319.700,00
317	KANTOR IMIGRASI KELAS II NON TPI DEPOK	61.332.096,00
318	KANTOR IMIGRASI KELAS II NON TPI POLEWALI MANDAR	159.448.075,00
319	KANTOR IMIGRASI KELAS II NON TPI MAMUJU	64.386.000,00
320	KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI ENTIKONG	49.973.803,00
321	KANTOR IMIGRASI KELAS I NON TPI TANGERANG	85.077.762,00
322	PERWAKILAN IMIGRASI DI JOHOR BAHRU	128.373.233,00
323	KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI SABANG	80.342.000,00
324	KANTOR PERWAKILAN IMIGRASI PADA KANTOR URUSAN KEPENTINGAN RI DI DILI TIMOR	42.212.990,00
325	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PROPINSI BANTEN	30.000.000,00
326	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PROPINSI GORONTALO	33.381.600,00
327	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PROPINSI MALUKU UTARA	55.078.596,00
328	KANTOR IMIGRASI KELAS I NON TPI SERANG	92.650.300,00
329	KANTOR IMIGRASI KELAS II NON TPI SUKABUMI	6.942.900,00
330	KANTOR IMIGRASI KELAS II NON TPI KARAWANG	121.383.720,00
331	KANTOR IMIGRASI KELAS II NON TPI PEMALANG	231.248.113,00
332	KANTOR IMIGRASI KELAS II NON TPI WONOSOBO	29.101.100,00
333	KANTOR IMIGRASI KELAS II NON TPI PATI	222.519.610,00
334	KANTOR IMIGRASI KELAS II NON TPI MADIUN	35.028.933,00
335	KANTOR IMIGRASI KELAS II NON TPI BLITAR	43.866.455,00
336	KANTOR IMIGRASI KELAS II NON TPI AGAM	38.399.100,00
337	KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI SINGARAJA	51.678.861,00
338	KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI SUMBAWA BESAR	69.328.000,00
339	KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI GORONTALO	126.156.590,00
340	KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI TUAL	48.745.500,00
341	KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI SAMBAS	43.496.495,00
342	KANTOR IMIGRASI KELAS II NON TPI TOBELO	72.781.795,00

Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi Covid-19 (Akun 521131)
Menurut Daftar Satuan Kerja per 31 Desember 2021

No	Nama Satker	Jumlah
343	KANTOR IMIGRASI KELAS II NON TPI MUARA ENIM	49.320.000,00
344	KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI TAHUNA	24.131.800,00
345	RUMAH DETENSI IMIGRASI PEKANBARU	148.843.000,00
346	RUMAH DETENSI IMIGRASI JAKARTA	3.998.400,00
347	RUMAH DETENSI IMIGRASI SEMARANG	96.735.200,00
348	RUMAH DETENSI IMIGRASI SURABAYA	36.624.817,00
349	RUMAH DETENSI IMIGRASI PONTIANAK	11.787.000,00
350	RUMAH DETENSI IMIGRASI BALIKPAPAN	56.266.000,00
351	RUMAH DETENSI IMIGRASI MANADO	11.850.300,00
352	RUMAH DETENSI IMIGRASI DENPASAR	6.007.100,00
353	RUMAH DETENSI IMIGRASI JAYAPURA	24.769.275,00
354	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PAPUA BARAT	15.000.000,00
355	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SULAWESI BARAT	51.840.000,00
356	RUMAH DETENSI IMIGRASI PUSAT TANJUNG PINANG	88.360.045,00
357	KANTOR IMIGRASI KELAS III NON TPI TANJUNG REDEB	17.580.200,00
358	KANTOR IMIGRASI KELAS II NON TPI BEKASI	188.871.250,00
359	KANTOR IMIGRASI KELAS III NON TPI KOTABUMI	69.718.888,00
360	KANTOR IMIGRASI KELAS III NON TPI PAMEKASAN	35.799.550,00
361	KANTOR IMIGRASI KELAS III NON TPI KEDIRI	120.876.000,00
362	KANTOR IMIGRASI KELAS III TPI LABUAN BAJO	38.948.000,00
363	KANTOR IMIGRASI KELAS III NON TPI PONOROGO	20.267.500,00
364	KANTOR IMIGRASI KELAS III NON TPI KOTAMOBAGU	132.114.500,00
365	KANTOR IMIGRASI KELAS III NON TPI WAKATOB	8.850.000,00
366	KANTOR IMIGRASI KELAS III NON TPI BAU BAU	20.580.700,00
367	KANTOR IMIGRASI KELAS III NON TPI BANGGAI	66.753.000,00
368	KANTOR IMIGRASI KELAS III NON TPI PUTUSSIBAU	14.370.000,00
369	DITJEN KEKAYAAN INTELEKTUAL	5.153.490.972,00
370	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BANDUNG	93.550.000,00
371	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAWA TENGAH	49.500.000,00
372	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SURABAYA	54.831.684,00
373	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SUMATERA UTARA DI MEDAN	66.160.000,00
374	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM TANJUNG KARANG	25.315.428,00
375	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PONTIANAK	176.236.100,00
376	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BANJARMASIN	225.404.100,00
377	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SAMARINDA	37.827.600,00
378	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM AMBON	7.200.000,00
379	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM YOGYAKARTA	70.320.550,00
380	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PALANGKARAYA	47.200.000,00
381	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM KENDARI	3.833.000,00
382	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PALU	97.650.000,00
383	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM MATARAM	7.776.000,00
384	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PROPINSI GORONTALO	46.761.148,00
385	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAWA TENGAH	64.258.250,00
386	DITJEN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	208.160.630,00
387	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PROPINSI GORONTALO	5.800.000,00
388	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAWA TENGAH	42.767.750,00
389	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SUMATERA UTARA DI MEDAN	49.400.000,00
390	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BANJARMASIN	18.069.678,00
391	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM AMBON	1.000.000,00
392	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM YOGYAKARTA	35.940.000,00
393	DIREKTORAT JENDERAL HAM	145.764.250,00
394	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAWA TENGAH	119.526.000,00
395	BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL	406.488.312,00
396	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PROPINSI BANTEN	26.535.000,00
397	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SURABAYA	1.474.486,00
398	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM UJUNG PANDANG	1.684.121,00
399	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM AMBON	5.250.000,00

Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi Covid-19 (Akun 521131)
Menurut Daftar Satuan Kerja per 31 Desember 2021

No	Nama Satker	Jumlah
400	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BENGKULU	23.400.000,00
401	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM YOGYAKARTA	13.800.000,00
402	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA	1.223.296.321,00
403	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA	4.152.460.501,00
404	POLITEKNIK IMIGRASI	444.370.480,00
405	POLITEKNIK ILMU PEMASYARAKATAN	500.467.363,00
406	BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN HUKUM DAN HAM KEPULAUAN RIAU	1.348.600,00
407	BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN HUKUM DAN HAM JAWA TENGAH	868.858,00
408	BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN HUKUM DAN HAM SULAWESI UTARA	40.088.300,00
Jumlah		38.702.172.633,00

Belanja Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi Covid-19 (Akun 521241)
Menurut Daftar Satuan Kerja per 31 Desember 2021

No	Nama Satker	Jumlah
1	SEKRETARIAT JENDERAL (PUSAT)	1.342.028.824,00
2	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAKARTA RAYA	3.406.400,00
3	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAWA TENGAH	55.374.000,00
4	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SURABAYA	12.000.000,00
5	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SUMATERA UTARA DI MEDAN	81.505.004,00
6	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM UJUNG PANDANG	173.418.200,00
7	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PADANG	376.852.190,00
8	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PEKANBARU	24.000.000,00
9	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PALEMBANG	19.765.200,00
10	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM TANJUNG KARANG	1.458.000,00
11	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SAMARINDA	34.025.608,00
12	KANWIL DEPARTEMEN HUKUM DAN HAM MANADO	14.860.310,00
13	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM AMBON	81.600.000,00
14	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PALU	119.400.000,00
15	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PROPINSI BANTEN	157.095.590,00
16	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PROPINSI GORONTALO	51.000.000,00
17	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SULAWESI BARAT	121.155.561,00
18	INSPEKTORAT JENDERAL	809.228.593,00
19	BALAI HARTA PENINGGALAN SEMARANG	35.565.011,00
20	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PADANG	4.375.000,00
21	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BANJARMASIN	129.138.900,00
22	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM MANADO	21.928.100,00
23	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM YOGYAKARTA	31.200.000,00
24	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM KENDARI	30.937.500,00
25	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PALU	25.917.540,00
26	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM MATARAM	44.000.000,00
27	DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM	318.798.483,00
28	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PROPINSI BANTEN	208.902.180,00
29	BALAI PEMASYARAKATAN KELAS I TANGERANG	3.000.000,00
30	BALAI PEMASYARAKATAN KELAS II KLATEN	26.400.000,00
31	BALAI PEMASYARAKATAN ACEH	3.000.000,00
32	LEMBAGA PEMASYARAKATAN WANITA MEDAN	337.000,00
33	RUMAH TAHANAN NEGARA MEDAN	248.103.000,00
34	RUMAH TAHANAN NEGARA MARABAHAN	29.400.000,00
35	RUMAH TAHANAN NEGARA TANAH GROGOT	23.999.300,00
36	BALAI PEMASYARAKATAN KUPANG	32.760.000,00
37	BALAI PEMASYARAKATAN JAYAPURA	2.585.000,00
38	RUMAH TAHANAN NEGARA YOGYAKARTA	24.358.500,00
39	LPKA Pangkal Pinang, Provinsi Kep. Bangka Belitung	9.100.000,00
40	LPKA Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah	400.000,00
41	LPKA Palu, Provinsi SuLawesi Tengah	12.720.000,00
42	LPKA Gorontalo, Provinsi Gorontalo	1.100.000,00
43	LPKA Ambon, Provinsi Maluku	36.075.000,00
44	LPKA Manokwari, Provinsi Papua Barat	21.000.000,00
45	BALAI PEMASYARAKATAN JAKBAR	32.175.000,00
46	BALAI PEMASYARAKATAN JAKTIM/JAKUT	72.170.060,00
47	BALAI PEMASYARAKATAN BANDUNG	90.656.200,00
48	LEMBAGA PEMASYARAKATAN CIREBON	6.093.500,00
49	BALAI PEMASYARAKATAN BOGOR	2.186.988,00
50	LAPAS PURWAKARTA	9.734.423,00
51	LEMBAGA PEMASYARAKATAN ANAK PRIA TANGERANG	11.850.000,00
52	BALAI PEMASYARAKATAN SEMARANG	7.748.534,00
53	LEMBAGA PEMASYARAKATAN SEMARANG	1.156.000,00

Belanja Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi Covid-19 (Akun 521241)
Menurut Daftar Satuan Kerja per 31 Desember 2021

No	Nama Satker	Jumlah
54	LEMBAGA PEMASYARAKATAN KENDAL	7.772.000,00
55	LEMBAGA PEMASYARAKATAN AMBARAWA	6.720.000,00
56	BALAI PEMASYARAKATAN MAGELANG	20.951.000,00
57	LEMBAGA PEMASYARAKATAN MAGELANG	68.062.500,00
58	BAPAS KELAS I SURAKARTA	40.800.000,00
59	RUMAH TAHANAN NEGARA SURAKARTA	61.976.500,00
60	RUMAH TAHANAN NEGARA BOYOLALI	29.572.000,00
61	LAPAS KLATEN	97.679.000,00
62	RUMAH TAHANAN NEGARA WONOGIRI	75.095.000,00
63	RUMAH TAHANAN NEGARA BANYUMAS	10.234.594,00
64	LAPAS CILACAP	10.800.000,00
65	LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEMUDA PLANTUNGAN	2.800.000,00
66	BALAI PEMASYARAKATAN SURABAYA	22.200.000,00
67	LAPAS MOJOKERTO	5.000.000,00
68	LAPAS TUBAN	8.000.000,00
69	LAPAS LAMONGAN	30.900.000,00
70	LEMBAGA PEMASYARAKATAN KEDIRI	2.700.000,00
71	RUMAH TAHANAN NEGARA NGANJUK	2.200.000,00
72	LAPAS BLITAR	29.694.600,00
73	BALAI PEMASYARAKATAN PAMEKASAN	4.800.000,00
74	RUMAH TAHANAN NEGARA SUMENEP	9.600.000,00
75	RUMAH TAHANAN NEGARA SAMPANG	101.510.000,00
76	LEMBAGA PEMASYARAKATAN MALANG	46.238.000,00
77	RUMAH TAHANAN NEGARA KRAKSAAN	9.600.000,00
78	RUMAH TAHANAN NEGARA BANGIL	71.100.000,00
79	BALAI PEMASYARAKATAN MADIUN	14.700.000,00
80	LAPAS NGAWI	13.200.000,00
81	RUMAH TAHANAN NEGARA SABANG	9.600.000,00
82	LAPAS KELAS III CALANG	7.000.000,00
83	LAPAS KELAS III SINABANG	1.254.000,00
84	LEMBAGA PEMASYARAKATAN MEDAN	63.200.000,00
85	RUMAH TAHANAN NEGARA TANJUNG PURA	30.000.000,00
86	LEMBAGA PEMASYARAKATAN LABUHAN RUKU	207.355.000,00
87	RUMAH TAHANAN NEGARA PANGKALAN BRANDAN	19.783.100,00
88	LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEMATANG SIANTAR	36.000.000,00
89	LAPAS GUNUNG SITOLI	60.100.000,00
90	LEMBAGA PEMASYARAKATAN PADANG	55.080.000,00
91	LEMBAGA PEMASYARAKATAN PARIAMAN	74.495.000,00
92	RUMAH TAHANAN NEGARA LUBUK SIKAPING	3.600.000,00
93	LEMBAGA PEMASYARAKATAN PAYAKUMBUH	18.186.580,00
94	LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEKANBARU	14.030.500,00
95	LEMBAGA PEMASYARAKATAN TEMBILAHAN	37.623.000,00
96	LAPAS KELAS IIA BANGKINANG	13.450.000,00
97	LEMBAGA PEMASYARAKATAN METRO	17.581.790,00
98	BALAI PEMASYARAKATAN PALEMBANG	2.400.000,00
99	LAPAS SEKAYU	180.000,00
100	LEMBAGA PEMASYARAKATAN LAHAT	40.477.000,00
101	LAPAS KELAS IIB EMPAT LAWANG	10.210.000,00
102	LAPAS KELAS III SAROLANGUN RAWAS	600.000,00
103	LAPAS KELAS IIA KOTABUMI	77.550.000,00
104	RUMAH TAHANAN NEGARA SAMBAS	6.322.447,00
105	RUMAH TAHANAN NEGARA PELAIHARI	93.756.986,00

Belanja Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi Covid-19 (Akun 521241)
Menurut Daftar Satuan Kerja per 31 Desember 2021

No	Nama Satker	Jumlah
106	RUMAH TAHANAN NEGARA RANTAU	4.000.000,00
107	RUMAH TAHANAN NEGARA TANJUNG	41.440.000,00
108	RUMAH TAHANAN NEGARA TANJUNG REDEP	88.033.753,00
109	LEMBAGA PEMASYARAKATAN TARAKAN	26.586.996,00
110	LEMBAGA PEMASYARAKATAN MANADO	78.795.500,00
111	LAPAS KELAS III AMURANG	73.645.000,00
112	LEMBAGA PEMASYARAKATAN ANAK TOMOHON	74.188.000,00
113	LEMBAGA PEMASYARAKATAN TAHUNA	25.399.500,00
114	LAPAS KELAS III TAMAKO	8.850.000,00
115	BALAI PEMASYARAKATAN UJUNG PANDANG	100.000,00
116	RUMAH TAHANAN NEGARA JENEPONTO	9.600.000,00
117	RUMAH TAHANAN NEGARA MASAMBA	30.000.000,00
118	RUMAH TAHANAN NEGARA PINRANG	3.000.000,00
119	RUMAH TAHANAN NEGARA MAMUJU	1.800.000,00
120	LEMBAGA PEMASYARAKATAN WATAMPONE	37.300.000,00
121	RUMAH TAHANAN NEGARA WATANSOPENG	2.693.206,00
122	RUMAH TAHANAN NEGARA RAHA	5.000.000,00
123	LEMBAGA PEMASYARAKATAN BAU-BAU	15.000.000,00
124	LEMBAGA PEMASYARAKATAN AMBON	63.800.000,00
125	LAPAS KELAS III NAMLEA	18.500.000,00
126	LAPAS KELAS III BANDANAIRA	11.340.000,00
127	LAPAS KELAS III WAHAI	9.300.000,00
128	LAPAS KELAS III WONRELI	26.150.000,00
129	RUMAH TAHANAN NEGARA TERNATE	55.988.966,00
130	LAPAS KELAS IIB SELONG	9.640.000,00
131	LEMBAGA PEMASYARAKATAN KUPANG	59.080.300,00
132	LAPAS ATAMBUA	52.069.500,00
133	RUMAH TAHANAN NEGARA KEFAMENANU	52.573.000,00
134	LAPAS KELAS III BAA	55.830.000,00
135	RUMAH TAHANAN NEGARA SO'E	5.355.000,00
136	LEMBAGA PEMASYARAKATAN KALABAHI	10.150.000,00
137	LEMBAGA PEMASYARAKATAN WAINGAPU	42.000.000,00
138	LEMBAGA PEMASYARAKATAN WAIKABUBAK	46.173.000,00
139	LEMBAGA PEMASYARAKATAN ENDE	7.500.000,00
140	RUMAH TAHANAN NEGARA BAJAWA	1.176.000,00
141	RUMAH TAHANAN NEGARA RUTENG	14.295.000,00
142	RUMAH TAHANAN NEGARA MAUMERE	16.348.500,00
143	RUMAH TAHANAN NEGARA LARANTUKA	7.100.000,00
144	LEMBAGA PEMASYARAKATAN SERUI	29.400.000,00
145	LEMBAGA PEMASYARAKATAN SORONG	50.335.000,00
146	LEMBAGA PEMASYARAKATAN FAK-FAK	4.700.000,00
147	LEMBAGA PEMASYARAKATAN BENGKULU	2.400.000,00
148	LEMBAGA PEMASYARAKATAN CURUP	3.010.500,00
149	LAPAS KELAS III DABO SINGKEP	25.000.000,00
150	BALAI PEMASYARAKATAN BANJARMASIN	4.200.000,00
151	BALAI PEMASYARAKATAN PADANG	175.000,00
152	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAKARTA RAYA	14.776.000,00
153	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SURABAYA	137.960.000,00
154	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SUMATERA UTARA DI MEDAN	9.600.000,00
155	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PADANG	185.671.752,00
156	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SAMARINDA	71.824.500,00
157	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM KUPANG	18.656.812,00

Belanja Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi Covid-19 (Akun 521241)
Menurut Daftar Satuan Kerja per 31 Desember 2021

No	Nama Satker	Jumlah
158	LEMBAGA PEMASYARAKATAN ANAK PEKANBARU	5.100.000,00
159	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM YOGYAKARTA	10.527.000,00
160	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PALANGKARAYA	6.708.000,00
161	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM KENDARI	31.375.000,00
162	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PALU	83.450.000,00
163	DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN	609.678.945,00
164	Lapas Perempuan Kelas IIA Samarinda	19.358.604,00
165	Lapas Perempuan Kelas IIB Yogyakarta	2.134.913,00
166	Lapas Perempuan Kelas IIB Bengkulu	3.665.000,00
167	Lapas Perempuan Kelas IIB Manado	12.000.000,00
168	Lapas Perempuan Kelas III Gorontalo	825.000,00
169	Lapas Perempuan Kelas III Jayapura	5.985.000,00
170	Lapas Perempuan Kelas III Mamuju	2.400.000,00
171	Rutan Perempuan Kelas IIA Medan	1.650.000,00
172	LEMBAGA PEMASYARAKATAN CIBINONG	3.400.000,00
173	RUMAH Tahanan Negara Batang	2.336.000,00
174	LEMBAGA PEMASYARAKATAN SLAWI	373.568,00
175	LEMBAGA PEMASYARAKATAN NARKOTIKA YOGYAKARTA	24.395.000,00
176	LEMBAGA PEMASYARAKATAN ANAK TANJUNG PATI	6.170.000,00
177	RUMAH Tahanan Negara Serang	3.500.000,00
178	RUMAH Tahanan Negara Jantoi	1.496.400,00
179	LEMBAGA PEMASYARAKATAN ANAK (LPA) KUPANG	46.049.635,00
180	LAPAS TERBUKA CIANGIR	157.662.000,00
181	RUMAH PENYIMPANAN BARANG SITAAN NEGARA SURABAYA, KOT.SURABAYA, JAWA TIMUR	31.196.275,00
182	RUMAH PENYIMPANAN BARANG SITAAN NEGARA PALEMBANG, KOT.PALEMBANG, SUMATERA	1.079.000,00
183	BALAI PEMASYARAKATAN KELAS II PRINGSEWU	26.400.000,00
184	BAPAS KELAS II SAMPIT	8.000.000,00
185	BAPAS KELAS II FAKFAK	1.200.000,00
186	RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAN NEGARA JAKARTA UTARA	10.051.500,00
187	RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAN NEGARA SERANG	4.880.000,00
188	RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAN NEGARA AMBON	12.500.000,00
189	RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAN NEGARA TERNATE	7.200.000,00
190	RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAN NEGARA DENPASAR	6.763.000,00
191	RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAN NEGARA KUPANG	21.100.000,00
192	RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAN NEGARA JAYAPURA	42.000.000,00
193	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PROPINSI BANTEN	75.600.000,00
194	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PROPINSI GORONTALO	10.500.000,00
195	RUMAH Tahanan Negara Samarinda	35.757.500,00
196	RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAN NEGARA BANGKINANG	30.930.000,00
197	RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAN NEGARA WONOGIRI	5.135.000,00
198	KANTOR RUPBASAN WATES	5.972.000,00
199	LEMBAGA PEMASYARAKATAN LUBUK BASUNG	9.725.000,00
200	LEMBAGA PEMASYARAKATAN SLEMAN	787.500,00
201	LEMBAGA PEMASYARAKATAN BITUNG	72.625.000,00
202	LEMBAGA PEMASYARAKATAN TERBUKA NUSAKAMBANGAN	80.087.500,00
203	LEMBAGA PEMASYARAKATAN TERBUKA WAKABUBAK	55.900.000,00
204	LEMBAGA PEMASYARAKATAN NARKOTIKA PEMATANG SIANTAR	20.470.000,00
205	LAPAS NARKOTIKA KELAS IIA MUARA BELITI	29.870.000,00
206	LEMBAGA PEMASYARAKATAN NARKOTIKA JAKARTA	1.249.875,00
207	LEMBAGA PEMASYARAKATAN NARKOTIKA PAMEKASAN	2.100.000,00
208	LEMBAGA PEMASYARAKATAN NARKOTIKA MARTAPURA	321.610.025,00
209	BALAI PEMASYARAKATAN KUTACANE	3.000.000,00

Belanja Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi Covid-19 (Akun 521241)
Menurut Daftar Satuan Kerja per 31 Desember 2021

No	Nama Satker	Jumlah
210	BALAI PEMASYARAKATAN BUKITTINGGI	34.800.000,00
211	BALAI PEMASYARAKATAN MUARA BUNGO	2.400.000,00
212	BALAI PEMASYARAKATAN WONOSARI	46.461.922,00
213	BALAI PEMASYARAKATAN PALOPO	9.300.000,00
214	BALAI PEMASYARAKATAN GORONTALO	7.240.000,00
215	RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAN NEGARA MOJOKERTO	24.000.000,00
216	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SULAWESI BARAT	7.500.000,00
217	LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS III LEMBATA	6.012.074,00
218	LAPAS KELAS IIB TANJUNG	3.000.000,00
219	LAPAS PEREMPUAN KELAS IIB KUPANG	47.840.000,00
220	RUMAH TAHANAN KELAS IIB BANDA ACEH	4.840.000,00
221	RUMAH TAHANAN KELAS IIB KUPANG	28.800.000,00
222	RUMAH SAKIT PENGAYOMAN CIPINANG KELAS D	2.454.427,00
223	LAPAS KELAS IIB SOROLANGUN	13.250.000,00
224	LAPAS KHUSUS KELAS IIA GUNUNG SINDUR	12.925.000,00
225	LAPAS KELAS IIA CILEGON	2.399.497,00
226	LAPAS NARKOTIKA KELAS IIA LANGKAT	45.550.000,00
227	LAPAS NARKOTIKA KELAS IIB MUARA SABAK	20.685.000,00
228	RUPBASAN KELAS I GORONTALO PROPINSI GORONTALO	2.399.500,00
229	Lapas Narkotika Kelas III Sawah Lunto	18.830.000,00
230	KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI MERAUKE	2.350.000,00
231	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAWA TENGAH	28.800.000,00
232	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PADANG	35.912.620,00
233	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM MATARAM	103.867.400,00
234	DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI	24.365.000,00
235	KANTOR IMIGRASI KELAS II NON TPI DEPOK	49.800.000,00
236	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PROPINSI BANTEN	119.990.780,00
237	RUMAH DETENSI IMIGRASI PUSAT TANJUNG PINANG	4.928.000,00
238	KANTOR IMIGRASI KELAS III NON TPI BANGGAI	10.470.000,00
239	DITJEN KEKAYAAN INTELEKTUAL	893.652.518,00
240	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SURABAYA	21.492.000,00
241	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM AMBON	5.400.000,00
242	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM YOGYAKARTA	31.200.000,00
243	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PALU	7.200.000,00
244	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM MATARAM	18.811.000,00
245	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PROPINSI BANTEN	121.736.704,00
246	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PROPINSI GORONTALO	30.450.000,00
247	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM MANADO	3.075.000,00
248	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM MATARAM	6.000.000,00
249	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PROPINSI BANTEN	64.144.218,00
250	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SUMATERA UTARA DI MEDAN	25.650.000,00
251	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SAMARINDA	21.789.000,00
252	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM KENDARI	4.322.000,00
253	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PALU	24.580.000,00
254	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM MATARAM	11.395.000,00
255	DIREKTORAT JENDERAL HAM	64.750.000,00
256	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PROPINSI BANTEN	31.705.000,00
257	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PROPINSI GORONTALO	3.600.000,00
258	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM MANADO	6.880.400,00
259	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM KENDARI	2.300.000,00
260	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM MATARAM	26.158.880,00
261	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAKARTA RAYA	23.237.500,00

Belanja Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi Covid-19 (Akun 521241)
Menurut Daftar Satuan Kerja per 31 Desember 2021

No	Nama Satker	Jumlah
262	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BANDUNG	36.870.000,00
263	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SURABAYA	915.000,00
264	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SUMATERA UTARA DI MEDAN	1.000.000,00
265	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BANDA ACEH	26.400.000,00
266	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PADANG	20.165.000,00
267	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PEKANBARU	19.200.000,00
268	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PALEMBANG	16.060.000,00
269	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM TANJUNG KARANG	13.605.323,00
270	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SAMARINDA	15.127.000,00
271	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM MANADO	13.081.800,00
272	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM DENPASAR	18.300.000,00
273	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAYAPURA	8.800.000,00
274	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM YOGYAKARTA	46.500.000,00
275	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PALANGKARAYA	8.250.000,00
276	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PALU	52.351.000,00
277	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM MATARAM	30.102.350,00
278	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA	522.314.200,00
279	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PROPINSI BANTEN	45.059.000,00
280	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PROPINSI BANGKA BELITUNG	11.200.000,00
281	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PROPINSI MALUKU UTARA	2.473.094,00
282	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM KEPULAUAN RIAU	13.050.000,00
283	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SULAWESI BARAT	3.450.000,00
284	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA	883.140.376,00
285	POLITEKNIK IMIGRASI	1.076.350.550,00
286	POLITEKNIK ILMU PEMASYARAKATAN	1.081.439.798,00
287	BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN HUKUM DAN HAM KEPULAUAN RIAU	359.723.000,00
288	BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN HUKUM DAN HAM JAWA TENGAH	388.378.503,00
289	BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN HUKUM DAN HAM SULAWESI UTARA	461.727.656,00
Jumlah		17.707.959.411,00

Belanja Barang Persediaan - Penanganan Pandemi Covid-19 (Akun 521841)
Menurut Daftar Satuan Kerja per 31 Desember 2021

No	Nama Satker	Jumlah
1	SEKRETARIAT JENDERAL (PUSAT)	3.886.082.490,00
2	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAKARTA RAYA	305.795.840,00
3	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BANDUNG	363.329.800,00
4	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAWA TENGAH	7.985.310,00
5	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SURABAYA	116.116.800,00
6	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SUMATERA UTARA DI MEDAN	29.716.400,00
7	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM UJUNG PANDANG	301.684.100,00
8	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BANDA ACEH	187.879.200,00
9	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PADANG	26.912.200,00
10	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PEKANBARU	71.580.403,00
11	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM TANJUNG KARANG	80.494.729,00
12	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PONTIANAK	6.200.000,00
13	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BANJARMASIN	61.277.975,00
14	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM DENPASAR	12.943.016,00
15	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM AMBON	99.979.251,00
16	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAYAPURA	108.270.000,00
17	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAMBI	33.343.822,00
18	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BENGKULU	89.833.720,00
19	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM YOGYAKARTA	125.304.749,00
20	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PALANGKARAYA	57.453.200,00
21	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM KENDARI	34.600.000,00
22	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PALU	149.259.000,00
23	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM MATARAM	14.725.000,00
24	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PROPINSI BANTEN	143.296.100,00
25	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PROPINSI BANGKA BELITUNG	25.541.000,00
26	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PROPINSI GORONTALO	85.609.470,00
27	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PROPINSI MALUKU UTARA	35.306.150,00
28	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PAPUA BARAT	101.080.000,00
29	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM KEPULAUAN RIAU	50.998.750,00
30	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SULAWESI BARAT	151.490.880,00
31	INSPEKTORAT JENDERAL	60.141.000,00
32	BALAI HARTA PENINGGALAN JAKARTA	110.552.100,00
33	BALAI HARTA PENINGGALAN SEMARANG	74.188.000,00
34	BALAI HARTA PENINGGALAN SURABAYA	27.935.120,00
35	BALAI HARTA PENINGGALAN MEDAN	17.433.000,00
36	BALAI HARTA PENINGGALAN UJUNG PANDANG	72.300.300,00
37	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAKARTA RAYA	29.250.000,00
38	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAWA TENGAH	177.655.000,00
39	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SURABAYA	121.931.210,00
40	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SUMATERA UTARA DI MEDAN	63.621.000,00
41	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BANDA ACEH	85.198.000,00
42	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PALEMBANG	19.539.737,00
43	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM TANJUNG KARANG	43.706.300,00
44	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PONTIANAK	24.941.356,00
45	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BANJARMASIN	45.795.000,00
46	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM MANADO	16.000.000,00
47	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM AMBON	18.533.000,00
48	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAYAPURA	30.988.000,00
49	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM YOGYAKARTA	32.675.000,00
50	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PALANGKARAYA	45.200.000,00
51	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM KENDARI	81.000.000,00
52	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PALU	5.838.000,00
53	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM MATARAM	29.100.000,00

Belanja Barang Persediaan - Penanganan Pandemi Covid-19 (Akun 521841)
Menurut Daftar Satuan Kerja per 31 Desember 2021

No	Nama Satker	Jumlah
54	DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM	2.232.954.475,00
55	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PROPINSI BANGKA BELITUNG	104.875.000,00
56	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PROPINSI GORONTALO	86.999.400,00
57	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PROPINSI MALUKU UTARA	43.079.500,00
58	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PAPUA BARAT	76.400.000,00
59	LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB SENTUL	13.000.000,00
60	BALAI PEMASYARAKATAN KELAS I TANGERANG	10.000.000,00
61	BALAI PEMASYARAKATAN KELAS II KLATEN	8.998.300,00
62	LEMBAGA PEMASYARAKATAN KARAWANG	87.508.434,00
63	LEMBAGA PEMASYARAKATAN BEKASI	168.905.000,00
64	LEMBAGA PEMASYARAKATAN PERMISAN	97.412.000,00
65	LEMBAGA PEMASYARAKATAN BATU	30.637.000,00
66	LEMBAGA PEMASYARAKATAN BESI	32.510.000,00
67	LEMBAGA PEMASYARAKATAN KEMBANG KUNING	50.530.000,00
68	RUMAH TAHANAN NEGARA PEKALONGAN	36.645.000,00
69	RUMAH TAHANAN NEGARA BANTUL	58.045.000,00
70	RUMAH TAHANAN NEGARA SURABAYA	290.005.500,00
71	BALAI PEMASYARAKATAN ACEH	4.560.000,00
72	LEMBAGA PEMASYARAKATAN WANITA MEDAN	99.625.000,00
73	BALAI PEMASYARAKATAN JAMBI	8.396.200,00
74	RUMAH TAHANAN NEGARA PALEMBANG	86.358.000,00
75	BALAI PEMASYARAKATAN BANDAR LAMPUNG	21.140.000,00
76	RUMAH TAHANAN NEGARA TANAH GROGOT	13.150.000,00
77	BAPAS KELAS I MANADO	11.686.200,00
78	BALAI PEMASYARAKATAN PALU	8.600.000,00
79	BALAI PEMASYARAKATAN WATAMPONE	9.576.600,00
80	BALAI PEMASYARAKATAN AMBON	12.000.000,00
81	LEMBAGA PEMASYARAKATAN ANAK GIANYAR	14.000.000,00
82	LAPAS ARGAMAKMUR	49.130.500,00
83	BALAI PEMASYARAKATAN BENGKULU	4.320.000,00
84	LEMBAGA PEMASYARAKATAN SANANA	40.000.000,00
85	LAPAS BATAM	184.880.000,00
86	LPKA Banda Aceh, Provinsi Aceh	41.258.158,00
87	LPKA Pangkal Pinang, Provinsi Kep. Bangka Belitung	6.049.000,00
88	LPKA Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah	97.778.950,00
89	LPKA Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur	16.270.000,00
90	LPKA Palu, Provinsi SuLawesi Tengah	72.557.000,00
91	LPKA Gorontalo, Provinsi Gorontalo	28.712.500,00
92	LPKA Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara	25.825.545,00
93	LPKA Ternate, Provinsi Maluku Utara	54.450.000,00
94	LPKA Jayapura, Provinsi Papua	20.842.450,00
95	LPKA Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat	25.054.000,00
96	BALAI PEMASYARAKATAN JAK-PUS	33.151.400,00
97	BALAI PEMASYARAKATAN JAKBAR	20.997.500,00
98	BALAI PEMASYARAKATAN JAKTIM/JAKUT	24.038.728,00
99	LEMBAGA PEMASYARAKATAN CIPINANG	289.388.242,00
100	RUTAN KELAS I PONDOK BAMBU	135.800.225,00
101	BALAI PEMASYARAKATAN BANDUNG	55.516.340,00
102	LEMBAGA PEMASYARAKATAN BANCEUY BANDUNG	63.875.000,00
103	LAPAS GARUT	68.058.700,00
104	LAPAS CIAMIS	82.596.100,00
105	LAPAS TASIKMALAYA	58.947.500,00

Belanja Barang Persediaan - Penanganan Pandemi Covid-19 (Akun 521841)
Menurut Daftar Satuan Kerja per 31 Desember 2021

No	Nama Satker	Jumlah
106	LEMBAGA PEMASYARAKATAN SUKAMISKIN	79.860.000,00
107	LEMBAGA PEMASYARAKATAN CIREBON	150.461.000,00
108	RUMAH TAHANAN NEGARA CIREBON	131.407.500,00
109	LEMBAGA PEMASYARAKATAN KUNINGAN	22.434.000,00
110	LAPAS MAJALENGKA	31.830.000,00
111	LAPAS INDRAMAYU	43.112.000,00
112	BALAI PEMASYARAKATAN BOGOR	11.599.700,00
113	LEMBAGA PEMASYARAKATAN BOGOR	153.829.143,00
114	LAPAS SUKABUMI	128.700.000,00
115	LAPAS CIANJUR	165.283.865,00
116	LAPAS PURWAKARTA	55.374.500,00
117	LEMBAGA PEMASYARAKATAN SUBANG	57.205.000,00
118	LEMBAGA PEMASYARAKATAN SERANG	84.950.000,00
119	LAPAS KELAS III RANGKAS BITUNG	30.745.000,00
120	LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEMUDA TANGERANG	647.571.000,00
121	LEMBAGA PEMASYARAKATAN ANAK PRIA TANGERANG	78.505.630,00
122	LAPAS KELAS IIA TANGERANG	136.449.000,00
123	BALAI PEMASYARAKATAN YOGYAKARTA	10.888.385,00
124	LEMBAGA PEMASYARAKATAN YOGYAKARTA	92.780.900,00
125	RUMAH TAHANAN NEGARA WATES	41.029.000,00
126	RUMAH TAHAN NEGARA WONOSARI	31.086.433,00
127	BALAI PEMASYARAKATAN SEMARANG	4.200.000,00
128	LEMBAGA PEMASYARAKATAN SEMARANG	275.692.000,00
129	RUMAH TAHANAN NEGARA SALATIGA	135.320.000,00
130	LEMBAGA PEMASYARAKATAN KENDAL	11.732.400,00
131	RUMAH TAHANAN NEGARA DEMAK	92.266.000,00
132	LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA SEMARANG	188.470.000,00
133	BALAI PEMASYARAKATAN PEKALONGAN	8.399.500,00
134	LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEKALONGAN	57.748.000,00
135	RUMAH TAHANAN NEGARA PEMALANG	63.100.000,00
136	LAPAS TEGAL	41.600.000,00
137	LAPAS BREBES	148.241.435,00
138	BALAI PEMASYARAKATAN MAGELANG	3.351.000,00
139	RUMAH TAHANAN NEGARA TEMANGGUNG	88.065.000,00
140	RUMAH TAHANAN NEGARA WONOSOBO	36.695.740,00
141	RUMAH TAHANAN NEGARA PURWOREJO	96.505.000,00
142	RUMAH TAHANAN NEGARA KEBUMEN	58.165.000,00
143	BALAI PEMASYARAKATAN PATI	33.046.400,00
144	LEMBAGA PEMASYARAKATAN PATI	39.504.901,00
145	RUMAH TAHANAN NEGARA REMBANG	116.685.000,00
146	RUMAH TAHANAN NEGARA JEPARA	92.520.000,00
147	RUMAH TAHANAN NEGARA KUDUS	90.715.000,00
148	BALAI PEMASYARAKATAN PURWOKERTO	10.239.000,00
149	LEMBAGA PEMASYARAKATAN PURWOKERTO	85.518.720,00
150	RUMAH TAHANAN NEGARA BANYUMAS	9.038.500,00
151	RUMAH TAHANAN NEGARA PURBALINGGA	18.187.000,00
152	RUMAH TAHANAN NEGARA BANJARNEGARA	19.321.300,00
153	LAPAS CILACAP	76.150.000,00
154	LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEMUDA PLANTUNGAN	31.020.000,00
155	BALAI PEMASYARAKATAN SURABAYA	13.145.000,00
156	LEMBAGA PEMASYARAKATAN KALISOSOK	160.439.400,00
157	LEMBAGA PEMASYARAKATAN SIDOARJO	139.722.000,00

Belanja Barang Persediaan - Penanganan Pandemi Covid-19 (Akun 521841)
Menurut Daftar Satuan Kerja per 31 Desember 2021

No	Nama Satker	Jumlah
158	LAPAS MOJOKERTO	67.917.000,00
159	LAPAS JOMBANG	97.050.000,00
160	LEMBAGA PEMASYARAKATAN BOJONEGORO	41.375.950,00
161	LAPAS TUBAN	20.497.466,00
162	LEMBAGA PEMASYARAKATAN KEDIRI	170.214.000,00
163	LAPAS TULUNGAGUNG	172.134.360,00
164	RUMAH TAHANAN NEGARA NGANJUK	105.000.500,00
165	LAPAS BLITAR	122.273.687,00
166	RUMAH TAHANAN NEGARA TRENGGALEK	6.205.000,00
167	LEMBAGA PEMASYARAKATAN JEMBER	67.739.500,00
168	LAPAS BONDOWOSO	89.557.000,00
169	LAPAS KELAS IIA BANYUWANGI	80.685.000,00
170	RUMAH TAHANAN NEGARA SITUBONDO	28.649.500,00
171	BALAI PEMASYARAKATAN PAMEKASAN	7.050.000,00
172	LEMBAGA PEMASYARAKATAN PAMEKASAN	44.140.000,00
173	RUMAH TAHANAN NEGARA SUMENEP	49.979.834,00
174	RUMAH TAHANAN NEGARA BANGKALAN	47.080.000,00
175	LAPAS KELLAS III ARJASA	115.425.000,00
176	LEMBAGA PEMASYARAKATAN MALANG	131.932.660,00
177	RUMAH TAHANAN NEGARA KRAKSAAN	14.600.000,00
178	LAPAS LUMAJANG	25.320.000,00
179	LAPAS PASURUAN	13.270.000,00
180	LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN MALANG	48.079.500,00
181	BALAI PEMASYARAKATAN MADIUN	719.000,00
182	LEMBAGA PEMASYARAKATAN MADIUN	110.000.000,00
183	RUMAH TAHANAN NEGARA MAGETAN	73.397.000,00
184	LAPAS NGAWI	47.765.000,00
185	RUMAH TAHANAN NEGARA PONOROGO	42.500.000,00
186	RUMAH TAHANAN NEGARA PACITAN	33.042.725,00
187	LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK BLITAR	17.004.500,00
188	LEMBAGA PEMASYARAKATAN BANDA ACEH	29.700.000,00
189	RUMAH TAHANAN NEGARA SABANG	5.637.000,00
190	RUMAH TAHANAN NEGARA SIGLI	37.520.000,00
191	LEMBAGA PEMASYARAKATAN LHOK SEUMAWA	7.500.000,00
192	LAPAS KELAS III LHOK NGA	19.500.000,00
193	LAPAS KELAS IIB LHOKSUKON	19.800.000,00
194	LAPAS KELAS IIB BIREUN	4.000.000,00
195	RUMAH TAHANAN NEGARA TAKENGON	41.700.200,00
196	LAPAS KELAS IIB KOTA BAKTI	9.191.000,00
197	LAPAS KELAS IIB IDI RAYEUK	141.999.600,00
198	LEMBAGA PEMASYARAKATAN KUALA SIMPANG	68.500.000,00
199	LAPAS KELAS IIB IDI	69.570.000,00
200	LEMBAGA PEMASYARAKATAN KUTACANE	31.325.000,00
201	LAPAS KELAS IIB BLANGKEJEREN	55.400.000,00
202	LAPAS KELAS III CALANG	12.760.000,00
203	RUMAH TAHANAN NEGARA TAPAKTUAN	3.000.000,00
204	RUTAN KELAS IIB SINGKEL	20.000.000,00
205	LAPAS KELAS III SINABANG	11.150.000,00
206	LEMBAGA PEMASYARAKATAN BINJAI	51.086.350,00
207	LAPAS TANJUNG BALAI ASAHAN	4.100.000,00
208	RUMAH TAHANAN NEGARA PANGKALAN BRANDAN	6.392.300,00
209	LAPAS LUBUK PAKAM	180.153.000,00

Belanja Barang Persediaan - Penanganan Pandemi Covid-19 (Akun 521841)
Menurut Daftar Satuan Kerja per 31 Desember 2021

No	Nama Satker	Jumlah
210	RUMAH TAHANAN NEGARA SIDIKALANG	66.743.000,00
211	LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEMATANG SIANTAR	14.190.000,00
212	LEMBAGA PEMASYARAKATAN SIBOLGA	106.401.000,00
213	LAPAS KELAS III TELUK DALAM	41.519.864,00
214	LAPAS KELAS III KOTANOPAN	19.922.727,00
215	RUMAH TAHANAN NEGARA TARUTUNG	47.900.000,00
216	LEMBAGA PEMASYARAKATAN SIBORONG-BORONG	57.904.000,00
217	LAPAS KELAS III PANGURURAN	45.694.000,00
218	RUTAN KELAS IIB SIPIROK	23.400.000,00
219	LAPAS KELAS III BARUS	111.277.000,00
220	LEMBAGA PEMASYARAKATAN PANYABUNGAN	35.926.000,00
221	RUTAN KELAS IIB SIBUHUAN	70.430.000,00
222	RUTAN KELAS IIB NATAL	20.500.000,00
223	LEMBAGA PEMASYARAKATAN PADANG	9.740.000,00
224	LEMBAGA PEMASYARAKATAN PARIAMAN	5.490.000,00
225	RUMAH TAHANAN NEGARA PAINAN	41.241.000,00
226	LAPAS KELAS III ALAHAN PANJANG	40.600.000,00
227	RUTAN KELAS IIB MUARA LABUH	37.055.714,00
228	LEMBAGA PEMASYARAKATAN BUKITTINGGI	36.615.620,00
229	RUMAH TAHANAN NEGARA PADANG PANJANG	69.842.500,00
230	RUTAN KELAS IIB MANINJAU	66.781.500,00
231	RUMAH TAHANAN NEGARA LUBUK SIKAPING	14.720.000,00
232	LAPAS KELAS III SULIKI	40.100.000,00
233	RUMAH TAHANAN NEGARA SAWAH LUNTO	7.300.000,00
234	LEMBAGA PEMASYARAKATAN SOLOK	46.430.000,00
235	LEMBAGA PEMASYARAKATAN SIJUNJUNG	148.351.400,00
236	RUMAH TAHANAN NEGARA BATUSANGKAR	72.186.600,00
237	BALAI PEMASYARAKATAN PEKANBARU	2.825.000,00
238	LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEKANBARU	91.086.000,00
239	LEMBAGA PEMASYARAKATAN BENGKALIS	160.304.000,00
240	RUMAH TAHANAN NEGARA SIAK SRI INDRAPURA	219.960.000,00
241	LAPAS KELAS IIA BAGAN SIPI-API	141.100.000,00
242	RUMAH TAHANAN NEGARA RENGAT	33.521.000,00
243	LEMBAGA PEMASYARAKATAN TEMBILAHAN	29.530.000,00
244	LAPAS KELAS IIB TELUK KUANTAN	32.774.990,00
245	LAPAS KELAS IIB SELATPANJANG	56.860.000,00
246	LAPAS KELAS IIA BANGKINANG	63.000.000,00
247	LEMBAGA PEMASYARAKATAN PASIR PANGARAYAN	155.460.000,00
248	LEMBAGA PEMASYARAKATAN TANJUNG PINANG	98.963.450,00
249	CABANG RUMAH TAHANAN NEGARA TANJUNG BALAI KARIMUN	98.072.500,00
250	LEMBAGA PEMASYARAKATAN JAMBI	128.590.000,00
251	LAPAS MUARA BULIAN	52.767.500,00
252	LEMBAGA PEMASYARAKATAN MUARA BUNGO	50.520.000,00
253	LEMBAGA PEMASYARAKATAN MUARA TEBO	44.705.000,00
254	LAPAS BANGKO	151.685.800,00
255	LEMBAGA PEMASYARAKATAN KUALA TUNGKAL	67.492.100,00
256	RUMAH TAHANAN NEGARA SUNGAI PENUH	30.540.000,00
257	BALAI PEMASYARAKATAN PALEMBANG	3.360.000,00
258	LEMBAGA PEMASYARAKATAN PALEMBANG	149.960.578,00
259	LEMBAGA PEMASYARAKATAN TANJUNG RAJA	145.340.000,00
260	LAPAS SEKAYU	235.269.720,00
261	LEMBAGA PEMASYARAKATAN LAHAT	11.725.000,00

Belanja Barang Persediaan - Penanganan Pandemi Covid-19 (Akun 521841)
Menurut Daftar Satuan Kerja per 31 Desember 2021

No	Nama Satker	Jumlah
262	LAPAS MUARA ENIM	128.138.800,00
263	LAPAS KELAS IIB MUARA DUA	12.625.000,00
264	LAPAS KELAS III PAGAR ALAM	28.318.000,00
265	LAPAS KELAS IIB EMPAT LAWANG	11.286.000,00
266	LEMBAGA PEMASYARAKATAN LUBUK LINGGAU	37.899.000,00
267	LAPAS KELAS III SAROLANGUN RAWAS	32.406.000,00
268	RUMAH TAHANAN NEGARA BATURAJA	35.014.000,00
269	LAPAS KELAS IIB MARTAPURA	44.950.000,00
270	RUMAH TAHANAN NEGARA PRABUMULIH	91.236.000,00
271	LEMBAGA PEMASYARAKATAN PANGKALPINANG	36.700.000,00
272	LEMBAGA PEMASYARAKATAN TANJUNG PANDAN	80.717.000,00
273	LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK PALEMBANG	46.444.000,00
274	RUMAH TAHANAN NEGARA MENGGALA	20.000.000,00
275	RUMAH TAHANAN NEGARA SUKADANA	17.000.000,00
276	RUMAH TAHANAN NEGARA KRUI	44.250.000,00
277	LEMBAGA PEMASYARAKATAN PONTIANAK	251.214.150,00
278	RUMAH TAHANAN NEGARA SANGGAU	65.450.000,00
279	LEMBAGA PEMASYARAKATAN SINGKAWANG	70.470.000,00
280	RUMAH TAHANAN NEGARA MEMPAWAH	23.155.000,00
281	LEMBAGA PEMASYARAKATAN SINTANG	37.832.000,00
282	LEMBAGA PEMASYARAKATAN KETAPANG	83.998.000,00
283	LEMBAGA PEMASYARAKATAN PALANGKARAYA	87.695.000,00
284	RUMAH TAHANAN NEGARA KUALA KAPUAS	201.405.100,00
285	LEMBAGA PEMASYARAKATAN MUARA TEWE	51.200.000,00
286	LEMBAGA PEMASYARAKATAN PANGKALAN BUN	88.925.000,00
287	LAPAS SAMPIT	183.480.000,00
288	LEMBAGA PEMASYARAKATAN BANJARMASIN	403.789.000,00
289	LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK MARTAPURA	31.239.500,00
290	LAPAS KELAS IIA KOTABARU	73.762.000,00
291	RUMAH TAHANAN NEGARA KANDANGAN	50.312.000,00
292	RUMAH TAHANAN NEGARA RANTAU	74.540.000,00
293	RUMAH TAHANAN NEGARA BARABAI	41.105.000,00
294	LEMBAGA PEMASYARAKATAN AMUNTAI	93.573.000,00
295	RUMAH TAHANAN NEGARA TANJUNG REDEP	4.893.000,00
296	LEMBAGA PEMASYARAKATAN SAMARINDA	71.974.000,00
297	LAPAS KELAS IIA TENGGARONG	122.411.300,00
298	LEMBAGA PEMASYARAKATAN TARAKAN	11.822.201,00
299	LEMBAGA PEMASYARAKATAN MANADO	79.070.000,00
300	LAPAS KELAS III AMURANG	14.795.000,00
301	LEMBAGA PEMASYARAKATAN TONDANO	96.000.000,00
302	RUMAH TAHANAN NEGARA KOTAMOBAGU	62.358.000,00
303	LEMBAGA PEMASYARAKATAN GORONTALO	57.060.510,00
304	LAPAS KELAS III ENEMAWIRA	9.060.000,00
305	LEMBAGA PEMASYARAKATAN ULU SIAU	24.000.000,00
306	LEMBAGA PEMASYARAKATAN PALU	153.862.500,00
307	RUMAH TAHANAN NEGARA DONGGALA	130.133.000,00
308	LAPAS KELAS III PARIGI	40.550.000,00
309	LEMBAGA PEMASYARAKATAN TOLI-TOLI	23.915.500,00
310	LAPAS KELAS III LEOK	47.170.000,00
311	LEMBAGA PEMASYARAKATAN LUWUK	77.932.000,00
312	LAPAS KELAS III KOLONEDALE	7.200.000,00
313	RUMAH TAHANAN NEGARA POSO	14.750.000,00

Belanja Barang Persediaan - Penanganan Pandemi Covid-19 (Akun 521841)
Menurut Daftar Satuan Kerja per 31 Desember 2021

No	Nama Satker	Jumlah
314	BALAI PEMASYARAKATAN UJUNG PANDANG	4.000.000,00
315	LEMBAGA PEMASYARAKATAN UJUNG PANDANG	113.725.000,00
316	RUMAH TAHANAN NEGARA PANGKAJENE	47.900.000,00
317	LPKA KELAS II MAROS	116.347.507,00
318	LAPAS TAKALAR	110.000.000,00
319	RUMAH TAHANAN NEGARA JENEPONTO	47.700.000,00
320	RUMAH TAHANAN NEGARA SELAYAR	35.250.000,00
321	RUMAH TAHANAN NEGARA BANTA ENG	79.985.000,00
322	LEMBAGA PEMASYARAKATAN BULUKUMBA	101.400.000,00
323	RUMAH TAHANAN NEGARA MALINO	21.000.000,00
324	RUMAH TAHANAN NEGARA SINJAI	26.450.000,00
325	LEMBAGA PEMASYARAKATAN PALOPO	248.760.000,00
326	RUMAH TAHANAN NEGARA MAKALE	14.350.000,00
327	RUMAH TAHANAN NEGARA MASAMBA	17.000.000,00
328	LAPAS KELAS IIA PARE-PARE	93.000.000,00
329	RUMAH TAHANAN NEGARA PINRANG	147.014.000,00
330	RUMAH TAHANAN NEGARA RAPPANG	43.427.000,00
331	RUMAH TAHANAN NEGARA ENREKANG	37.640.000,00
332	RUMAH TAHANAN NEGARA BARRU	90.124.100,00
333	RUMAH TAHANAN NEGARA MAJENE	19.914.000,00
334	LEMBAGA PEMASYARAKATAN POLEWALI	61.900.000,00
335	LAPAS KELAS III MAMASA	43.100.000,00
336	RUMAH TAHANAN NEGARA MAMUJU	79.938.000,00
337	LEMBAGA PEMASYARAKATAN WATAMPONE	44.220.000,00
338	RUMAH TAHANAN NEGARA SENGKANG	72.420.000,00
339	RUMAH TAHANAN NEGARA WATANSOPENG	90.230.000,00
340	LEMBAGA PEMASYARAKATAN KENDARI	33.631.136,00
341	RUMAH TAHANAN NEGARA RAHA	15.106.000,00
342	LEMBAGA PEMASYARAKATAN BAU-BAU	82.953.000,00
343	RUMAH TAHANAN NEGARA KOLAKA	18.580.000,00
344	LEMBAGA PEMASYARAKATAN PIRU	17.779.000,00
345	LAPAS KELAS III SAPARUA	17.000.000,00
346	RUMAH TAHANAN NEGARA MASOHI	24.600.000,00
347	LAPAS KELAS III NAMLEA	8.000.000,00
348	LAPAS KELAS III DOBO	25.820.000,00
349	LEMBAGA PEMASYARAKATAN TUAL	13.250.000,00
350	LAPAS KELAS III SAUMLAKI	46.650.000,00
351	LAPAS KELAS III LABUHA	31.020.000,00
352	BALAI PEMASYARAKATAN DENPASAR	900.000,00
353	LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS IIA KEROBOKAN	83.240.000,00
354	LEMBAGA PEMASYARAKATAN SINGARAJA	102.014.000,00
355	RUMAH TAHANAN NEGARA NEGARA	69.320.000,00
356	RUMAH TAHANAN NEGARA KLUNGKUNG	73.375.000,00
357	LAPAS TABANAN	20.840.000,00
358	RUMAH TAHANAN NEGARA GIANYAR	67.380.000,00
359	RUMAH TAHANAN NEGARA BANGLI	58.926.000,00
360	LEMBAGA PEMASYARAKATAN KARANGASEM	35.300.000,00
361	BALAI PEMASYARAKATAN MATARAM	8.358.970,00
362	LEMBAGA PEMASYARAKATAN MATARAM	109.338.000,00
363	LAPAS KELAS IIB SELONG	31.332.875,00
364	RUMAH TAHANAN NEGARA PRAYA	24.503.700,00
365	LEMBAGA PEMASYARAKATAN SUMBAWA BESAR	22.085.000,00

Belanja Barang Persediaan - Penanganan Pandemi Covid-19 (Akun 521841)
Menurut Daftar Satuan Kerja per 31 Desember 2021

No	Nama Satker	Jumlah
366	RUMAH TAHANAN NEGARA RABA/BIMA	64.866.000,00
367	RUMAH TAHANAN NEGARA SO'E	21.172.000,00
368	LEMBAGA PEMASYARAKATAN KALABAHI	22.713.000,00
369	LEMBAGA PEMASYARAKATAN ENDE	6.575.000,00
370	LEMBAGA PEMASYARAKATAN WAMENA	54.861.000,00
371	LEMBAGA PEMASYARAKATAN NABIRE	81.811.500,00
372	LEMBAGA PEMASYARAKATAN BIAK	74.400.000,00
373	LEMBAGA PEMASYARAKATAN MERAUKE	77.500.000,00
374	LEMBAGA PEMASYARAKATAN MANOKWARI	86.410.000,00
375	LAPAS KELAS III TEMINABUHAN	13.680.000,00
376	LEMBAGA PEMASYARAKATAN SORONG	50.335.000,00
377	LAPAS KELAS III KAIMANA	19.600.000,00
378	LEMBAGA PEMASYARAKATAN BENGKULU	41.749.500,00
379	RUMAH TAHANAN NEGARA MANNA	67.280.000,00
380	LEMBAGA PEMASYARAKATAN CURUP	55.416.575,00
381	RUMAH TAHANAN NEGARA DUMAI	106.605.000,00
382	LEMBAGA PEMASYARAKATAN KOTA AGUNG	31.000.000,00
383	LEMBAGA PEMASYARAKATAN KALIANDA	30.239.350,00
384	LAPAS KELAS III DABO SINGKEP	13.000.000,00
385	LEMBAGA PEMASYARAKATAN AMPANA	77.880.000,00
386	RUMAH TAHANAN NEGARA BUNTOK	42.000.000,00
387	LEMBAGA PEMASYARAKATAN DOMPU	35.680.000,00
388	LEMBAGA PEMASYARAKATAN ANAK KUTOARJO	46.129.200,00
389	LEMBAGA PEMASYARAKATAN WANITA TANGERANG	49.931.800,00
390	BALAI PEMASYARAKATAN BANJARMASIN	5.000.000,00
391	RUMAH TAHANAN NEGARA JAKARTA PUSAT	414.724.400,00
392	LEMBAGA PEMASYARAKATAN PRIA TANGERANG	815.450.900,00
393	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BANDUNG	102.232.500,00
394	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAYAPURA	11.978.000,00
395	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM YOGYAKARTA	49.665.000,00
396	LAPAS KELAS III TANAH MERAH	15.100.000,00
397	DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN	37.896.156.197,00
398	RUMAH TAHANAN NEGARA PANDEGLANG	95.013.000,00
399	Lapas Perempuan Kelas IIA Jakarta	78.104.200,00
400	Lapas Perempuan Kelas IIA Martapura	97.655.100,00
401	Lapas Perempuan Kelas IIA Palangkaraya	43.336.423,00
402	Lapas Perempuan Kelas IIA Samarinda	4.460.000,00
403	Lapas Perempuan Kelas IIA Denpasar	55.555.160,00
404	Lapas Perempuan Kelas IIA Pekanbaru	94.850.000,00
405	Lapas Perempuan Kelas IIA Pontianak	40.994.000,00
406	Lapas Perempuan Kelas IIB Jambi	50.313.190,00
407	Lapas Perempuan Kelas IIB Padang	35.680.357,00
408	Lapas Perempuan Kelas IIB Yogyakarta	45.897.971,00
409	Lapas Perempuan Kelas IIB Batam	46.558.100,00
410	Lapas Perempuan Kelas IIB Bengkulu	39.063.400,00
411	Lapas Perempuan Kelas III Kendari	54.075.000,00
412	Lapas Perempuan Kelas III Ambon	44.700.000,00
413	Lapas Perempuan Kelas III Pangkal Pinang	65.624.500,00
414	Lapas Perempuan Kelas III Palu	36.140.000,00
415	Lapas Perempuan Kelas III Gorontalo	64.929.950,00
416	Lapas Perempuan Kelas III Ternate	43.171.500,00
417	Lapas Perempuan Kelas III Mataram	69.415.974,00

Belanja Barang Persediaan - Penanganan Pandemi Covid-19 (Akun 521841)
Menurut Daftar Satuan Kerja per 31 Desember 2021

No	Nama Satker	Jumlah
418	Lapas Perempuan Kelas III Jayapura	50.446.000,00
419	Lapas Perempuan Kelas III Manokwari	63.495.000,00
420	Lapas Perempuan Kelas III Mamuju	39.740.000,00
421	Rutan Perempuan Kelas IIA Medan	101.500.000,00
422	Rutan Perempuan Kelas IIA Surabaya	5.085.000,00
423	Rutan Perempuan Kelas IIA Bandung	34.312.400,00
424	LAPAS PEMUDA KELAS III LANGKAT PROVINSI SUMATERA UTARA	126.425.390,00
425	Lapas Kelas III Sukamara Provinsi Kalimantan Tengah	159.520.000,00
426	Rutan Kelas IIIB Bener Meriah Provinsi Aceh	48.417.600,00
427	LPKA JAKARTA, PROVINSI DKI JAKARTA	34.218.000,00
428	LPKA JOGJAKARTA, PROVINSI D.I YOGYAKARTA	34.102.500,00
429	RUMAH TAHANAN NEGARA CIPINANG	303.857.500,00
430	LEMBAGA PEMASYARAKATAN SALEMBA	161.200.700,00
431	BALAI PEMASYARAKATAN GARUT	7.000.000,00
432	LEMBAGA PEMASYARAKATAN CIBINONG	147.395.000,00
433	LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA BANDUNG	125.209.800,00
434	RUMAH TAHANAN NEGARA BATANG	28.787.475,00
435	LEMBAGA PEMASYARAKATAN SLAWI	40.510.000,00
436	LEMBAGA PEMASYARAKATAN NARKOTIKA YOGYAKARTA	48.980.000,00
437	LEMBAGA PEMASYARAKATAN WANITA PALEMBANG	121.834.464,00
438	LEMBAGA PEMASYARAKATAN WAY KANAN	36.140.000,00
439	LEMBAGA PEMASYARAKATAN WANITA BANDAR LAMPUNG	9.055.000,00
440	RUMAH TAHANAN NEGARA LANDAK	53.615.000,00
441	RUMAH TAHANAN NEGARA BENGKAYANG	88.308.000,00
442	RUMAH TAHANAN NEGARA MANADO	124.575.000,00
443	RUMAH TAHANAN NEGARA UNAAHA	84.840.000,00
444	LEMBAGA PEMASYARAKATAN WANITA SUNGGUMINASA	110.725.000,00
445	LEMBAGA PEMASYARAKATAN JAILOLO	64.325.000,00
446	RUMAH TAHANAN NEGARA TANGERANG	174.986.000,00
447	LEMBAGA PEMASYARAKATAN BOALEMO	10.280.000,00
448	RUMAH TAHANAN NEGARA BATAM	122.800.000,00
449	LEMBAGA PEMASYARAKATAN NARKOTIKA TANJUNG PINANG	36.882.000,00
450	BALAI PEMASYARAKATAN POLEWALI	4.500.000,00
451	LEMBAGA PEMASYARAKATAN ANAK TANJUNG PATI	5.975.000,00
452	RUMAH TAHANAN NEGARA UJUNG PANDANG	218.140.000,00
453	RUMAH TAHANAN NEGARA BANDUNG	68.892.646,00
454	RUMAH TAHANAN NEGARA SERANG	115.420.000,00
455	RUMAH TAHANAN NEGARA BALIKPAPAN	112.789.650,00
456	RUMAH TAHANAN NEGARA SOASIU	11.627.870,00
457	BALAI PEMASYARAKATAN JAKARTA SELATAN	30.474.999,00
458	RUPBASAN JAKARTA DI TANGERANG	21.727.000,00
459	RUMAH TAHANAN NEGARA GRESIK	101.062.500,00
460	RUMAH TAHANAN NEGARA PALU	116.569.300,00
461	LAPAS SUNGAI LIAT	34.700.000,00
462	RUMAH TAHANAN NEGARA (RUTAN) PALANGKARAYA	65.103.378,00
463	BALAI PEMASYARAKATAN AMUNTAI, KAB. HULU SUNGAI UTARA, KALIMANTAN SELATAN	7.790.000,00
464	BALAI PEMASYARAKATAN SAMARINDA, KOT.SAMARINDA, KALIMANTAN TIMUR	6.028.125,00
465	RUMAH PENYIMPANAN BARANG SITAAN NEGARA BANDUNG, KOT.BANDUNG, JAWA BARAT	64.598.400,00
466	LAPAS TERBUKA CIANGIR	31.379.000,00
467	RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAN NEGARA SEMARANG, KOT.SEMARANG, JAWA TENGAH	15.000.000,00
468	RUMAH PENYIMPANAN BARANG SITAAN NEGARA SURABAYA, KOT.SURABAYA, JAWA TIMUR	6.998.000,00
469	RUMAH PENYIMPANAN BARANG SITAAN NEGARA PALEMBANG, KOT.PALEMBANG, SUMATERA	3.520.000,00

Belanja Barang Persediaan - Penanganan Pandemi Covid-19 (Akun 521841)
Menurut Daftar Satuan Kerja per 31 Desember 2021

No	Nama Satker	Jumlah
470	RUMAH PENYIMPANAN BARANG SITAAN NEGARA UJUNG PANDANG, KOT.UJUNG PANDANG,	7.008.312,00
471	LEMBAGA PEMASYARAKATAN ANAK, MUARA BULIAN, JAMBI	54.399.500,00
472	BALAI PEMASYARAKATAN LUWU, SULAWESI TENGAH	6.000.000,00
473	BAPAS KELAS II LHOK SEMAWE	6.626.000,00
474	BAPAS KELAS II MUSI RAWAS UTARA	12.080.000,00
475	BAPAS KELAS II OKU INDUK	8.400.000,00
476	BALAI PEMASYARAKATAN KELAS II PRINGSEWU	16.695.000,00
477	BAPAS KELAS II BEKASI	42.787.000,00
478	BAPAS KELAS II SUBANG	61.775.000,00
479	BAPAS KELAS II NUSAKAMBANGAN	18.148.000,00
480	BAPAS KELAS II SAMPIT	39.402.000,00
481	BAPAS KELAS II BATU LICIN	26.534.217,00
482	BAPAS KELAS II TARAKAN	8.414.920,00
483	BAPAS KELAS II CIANGIR	10.200.000,00
484	LAPAS NARKOTIKA KELAS IIB RUMBAI	180.712.400,00
485	LAPAS KHUSUS KELAS IIA KARANGANYAR NUSAKAMBANGAN	85.335.000,00
486	LAPAS NARKOTIKA KELAS IIB PURWOKERTO	13.250.000,00
487	RUMAH TAHANAN NEGARA KENDARI	55.130.000,00
488	RUMAH TAHANAN NEGARA AMBON	97.324.200,00
489	RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAN NEGARA JAKARTA SELATAN	5.500.000,00
490	RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAN NEGARA JAKARTA TIMUR	60.200.000,00
491	RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAN NEGARA SERANG	18.855.231,00
492	RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAN NEGARA YOGYAKARTA	21.330.356,00
493	RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAN NEGARA Banda Aceh	15.290.000,00
494	RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAN NEGARA PEKANBARU	14.770.000,00
495	RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAN NEGARA PADANG	17.685.000,00
496	RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAN NEGARA LAMPUNG	10.462.000,00
497	RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAN NEGARA PALANGKARAYA	4.800.000,00
498	RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAN NEGARA BANJARMASIN	1.799.280,00
499	RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAN NEGARA SAMARINDA	5.491.175,00
500	RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAN NEGARA MANADO	19.505.000,00
501	RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAN NEGARA PALU	24.645.000,00
502	RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAN NEGARA DENPASAR	8.185.000,00
503	RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAN NEGARA MATARAM	6.630.590,00
504	RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAN NEGARA BENGKULU	16.000.000,00
505	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PROPINSI BANTEN	26.128.000,00
506	LEMBAGA PEMASYARAKATAN NARKOTIKA DI CIREBON	87.552.150,00
507	RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAN NEGARA JAMBI	12.255.000,00
508	RUMAH TAHANAN NEGARA SAMARINDA	20.726.700,00
509	RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAN NEGARA RENGAT	9.960.000,00
510	RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAN NEGARA TANJUNG PINANG	11.521.700,00
511	RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAN NEGARA WONOGIRI	8.200.000,00
512	KANTOR RUPBASAN WATES	1.000.000,00
513	LEMBAGA PEMASYARAKATAN SLEMAN	45.437.900,00
514	LEMBAGA PEMASYARAKATAN TERBUKA PASAMAN	19.710.000,00
515	LAPAS TERBUKA KELAS IIB LOMBOK TENGAH	55.951.500,00
516	LEMBAGA PEMASYARAKATAN TERBUKA WAIKABUBAK	16.660.000,00
517	LAPAS NARKOTIKA KELAS IIA MUARA BELITI	45.450.000,00
518	LEMBAGA PEMASYARAKATAN NARKOTIKA BANDAR LAMPUNG	154.350.000,00
519	LEMBAGA PEMASYARAKATAN NARKOTIKA JAKARTA	384.902.980,00
520	LEMBAGA PEMASYARAKATAN NARKOTIKA BANDUNG	128.920.000,00
521	LEMBAGA PEMASYARAKATAN NARKOTIKA NUSAKAMBANGAN	16.703.800,00

Belanja Barang Persediaan - Penanganan Pandemi Covid-19 (Akun 521841)
Menurut Daftar Satuan Kerja per 31 Desember 2021

No	Nama Satker	Jumlah
522	LEMBAGA PEMASYARAKATAN NARKOTIKA MADIUN	123.000.000,00
523	LEMBAGA PEMASYARAKATAN NARKOTIKA PAMEKASAN	50.079.500,00
524	LEMBAGA PEMASYARAKATAN NARKOTIKA BANGLI	79.065.459,00
525	LEMBAGA PEMASYARAKATAN NARKOTIKA SUNGGUMINASA	240.000.000,00
526	LEMBAGA PEMASYARAKATAN NARKOTIKA JAYAPURA	62.771.600,00
527	BALAI PEMASYARAKATAN KUTACANE	4.247.000,00
528	BALAI PEMASYARAKATAN SIBOLGA	5.600.000,00
529	BALAI PEMASYARAKATAN TANJUNG PINANG	3.860.290,00
530	BALAI PEMASYARAKATAN LAHAT	7.650.000,00
531	BALAI PEMASYARAKATAN MUARA BUNGO	4.500.000,00
532	BALAI PEMASYARAKATAN WONOSARI	14.975.000,00
533	BALAI PEMASYARAKATAN MUARA TEWE	3.314.000,00
534	BALAI PEMASYARAKATAN KARANGASEM	5.000.000,00
535	BALAI PEMASYARAKATAN SUMBAWA BESAR	10.624.700,00
536	BALAI PEMASYARAKATAN SORONG	14.000.000,00
537	BALAI PEMASYARAKATAN SERANG	8.105.612,00
538	BALAI PEMASYARAKATAN GORONTALO	6.873.450,00
539	RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAN NEGARA BATURAJA	20.541.000,00
540	RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAN NEGARA CIREBON	3.650.700,00
541	RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAN NEGARA PURWOKERTO	6.419.350,00
542	RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAN NEGARA CILACAP	6.895.000,00
543	RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAN NEGARA SINGKAWANG	5.800.000,00
544	RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAN NEGARA SANGGAU	1.560.000,00
545	RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAN NEGARA SUMBAWA BESAR	4.224.000,00
546	RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAN NEGARA ARGA MAKMUR	5.565.000,00
547	RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAN NEGARA BANTUL	5.902.600,00
548	RUPBASAN PROBOLINGGO	4.408.000,00
549	RUMAH TAHANAN NEGARA BANDAR LAMPUNG	235.466.000,00
550	RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAN NEGARA PANGKAL PINANG	3.309.000,00
551	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SULAWESI BARAT	30.000.000,00
552	LAPAS KELAS IIB GUNUNG SUGIH	49.792.636,00
553	LAPAS KELAS IIB WARUNG KIARA	66.000.000,00
554	LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS III LEMBATA	3.119.043,00
555	LAPAS NARKOTIKA KELAS IIA SAMARINDA	298.225.575,00
556	LPKA KELAS II LOMBOK TENGAH	78.500.000,00
557	RUMAH TAHANAN KELAS IIB KOTA AGUNG	37.540.000,00
558	RUMAH TAHANAN KELAS IIB GARUT	29.100.000,00
559	RUMAH TAHANAN KELAS IIB PASANG KAYU	40.650.000,00
560	RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAN KELAS I MANOKWARI	2.520.000,00
561	RUMAH SAKIT PENGAYOMAN CIPINANG KELAS D	327.980.000,00
562	LAPAS KELAS IIB SOROLANGUN	72.035.200,00
563	LAPAS KELAS IIA BANYUASIN	39.114.000,00
564	LAPAS KELAS IIB KAYU AGUNG	26.235.000,00
565	LAPAS KHUSUS KELAS IIA GUNUNG SINDUR	74.626.750,00
566	LAPAS KELAS IIA CIKARANG	215.502.000,00
567	LAPAS KELAS IIB BANJAR	91.991.000,00
568	LAPAS KELAS IIA CILEGON	142.432.500,00
569	LAPAS NARKOTIKA KELAS IIA LANGKAT	19.965.000,00
570	LAPAS NARKOTIKA KELAS IIB MUARA SABAK	24.527.788,00
571	LAPAS NARKOTIKA KELAS IIA PANGKAL PINANG	21.958.397,00
572	LAPAS NARKOTIKA KELAS IIA KASONGAN	37.165.300,00
573	RUTAN KELAS IIB HUMBANG HASUNDUTAN PROPINSI SUMATERA UTARA	52.650.000,00

Belanja Barang Persediaan - Penanganan Pandemi Covid-19 (Akun 521841)
Menurut Daftar Satuan Kerja per 31 Desember 2021

No	Nama Satker	Jumlah
574	RUTAN KELAS I PEKANBARU	235.565.600,00
575	LAPAS NARKOTIKA KELAS IIA GUNUNG SINDUR	68.910.600,00
576	RUTAN KELAS IIB TAMIYANG LAYANG PROPINSI KALIMANTAN TENGAH	39.720.000,00
577	RUPBASAN KELAS I GORONTALO PROPINSI GORONTALO	478.200,00
578	LAPAS KELAS IIB BLANGPIDIE	19.400.000,00
579	LAPAS PEREMPUAN KELAS IIB SIGLI	104.500.000,00
580	Lapas Kelas III Dharmas Raya	15.000.000,00
581	Rutan Kelas II B Padang	80.789.040,00
582	LAPAS NARKOTIKA KELAS IIB BANYUASIN	266.447.395,00
583	Rutan Kelas II B Bengkulu	47.498.500,00
584	Lapas anak Kelas III Batam	45.668.276,00
585	Lapas Terbuka Kelas III Rumbai	37.400.000,00
586	RUTAN KELAS I DEPOK	198.909.400,00
587	LAPAS KELAS IIB BANJARBARU	56.678.000,00
588	LAPAS KELAS IIB PAHUWATO	14.127.105,00
589	Rutan Kelas II B Weda	10.500.000,00
590	KANTOR IMIGRASI KELAS III NON TPI KALIANDA	87.018.780,00
591	KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI TANJUNG PANDAN	24.695.520,00
592	KANTOR IMIGRASI KELAS II NON TPI DABO SINGKEP	5.240.000,00
593	KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI CIREBON	38.835.120,00
594	KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI JEMBER	28.170.090,00
595	KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI LHOKSEUMAWE	11.390.000,00
596	KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI TANJUNG BALAI KARIMUN	21.900.000,00
597	KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI BELAKANG PADANG	28.750.000,00
598	KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI JAMBI	64.223.000,00
599	KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI BANDAR LAMPUNG	27.817.850,00
600	KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI BALIKPAPAN	2.200.000,00
601	KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI MAKASSAR	100.557.750,00
602	KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI DENPASAR	511.703.375,00
603	KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI BIAK	55.488.100,00
604	KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI SORONG	69.688.200,00
605	PERWAKILAN IMIGRASI DI KUCHING	10.259.051,00
606	KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI PALU	76.921.400,00
607	KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI SAMARINDA	23.734.625,00
608	KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI PADANG	5.104.953,00
609	KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI BANJARMASIN	24.202.000,00
610	KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI AMBON	98.138.922,00
611	KANTOR IMIGRASI KELAS I KHUSUS TPI SOEKARNO HATTA	439.427.466,00
612	KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI TANJUNG PERAK	24.811.000,00
613	KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI KENDARI	246.521.719,00
614	KANTOR IMIGRASI KELAS II NON TPI MEULABOH	14.527.500,00
615	KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI TANJUNG UBAN	20.387.690,00
616	KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI BENGKULU	64.724.000,00
617	KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI SAMPIT	32.750.000,00
618	KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI NUNUKAN	26.102.500,00
619	KANTOR IMIGRASI KELAS I KHUSUS TPI NGURAH RAI	111.814.330,00
620	KANTOR IMIGRASI KELAS II NON TPI MANOKWARI	112.285.739,00
621	KANTOR IMIGRASI KELAS II NON TPI POLEWALI MANDAR	38.406.068,00
622	KANTOR IMIGRASI KELAS I NON TPI TANGERANG	130.151.707,00
623	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PROPINSI BANGKA BELITUNG	157.597.200,00
624	KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI JAKARTA UTARA	265.518.950,00
625	KANTOR IMIGRASI KELAS II NON TPI KARAWANG	72.041.151,00

Belanja Barang Persediaan - Penanganan Pandemi Covid-19 (Akun 521841)
Menurut Daftar Satuan Kerja per 31 Desember 2021

No	Nama Satker	Jumlah
626	KANTOR IMIGRASI KELAS II NON TPI TASIKMALAYA	52.598.700,00
627	KANTOR IMIGRASI KELAS II NON TPI PATI	33.296.471,00
628	KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI SIAK	154.055.900,00
629	RUMAH DETENSI IMIGRASI JAKARTA	46.797.128,00
630	RUMAH DETENSI IMIGRASI MAKASSAR	25.313.400,00
631	RUMAH DETENSI IMIGRASI KUPANG	15.652.900,00
632	KANTOR IMIGRASI KELAS II NON TPI BEKASI	56.690.000,00
633	KANTOR IMIGRASI KELAS III NON TPI PAMEKASAN	3.000.000,00
634	KANTOR IMIGRASI KELAS III NON TPI TAKENGON	58.850.000,00
635	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PROPINSI BANTEN	49.600.000,00
636	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PROPINSI MALUKU UTARA	5.082.000,00
637	DIREKTORAT JENDERAL HAM	127.893.000,00
638	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PROPINSI BANTEN	15.020.000,00
639	BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL	24.110.390,00
640	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PROPINSI BANTEN	19.440.000,00
641	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SUMATERA UTARA DI MEDAN	17.000.000,00
642	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA	305.999.375,00
643	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PROPINSI BANTEN	32.435.700,00
644	POLITEKNIK ILMU PEMASYARAKATAN	290.980.700,00
645	BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN HUKUM DAN HAM KEPULAUAN RIAU	65.995.000,00
646	BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN HUKUM DAN HAM JAWA TENGAH	85.692.787,00
Jumlah		86.199.638.449,00

Belanja Barang Jasa - Penanganan Pandemi Covid-19 (Akun 522192)
Menurut Daftar Satuan Kerja per 31 Desember 2021

No	Nama Satker	Jumlah
1	SEKRETARIAT JENDERAL (PUSAT)	4.262.631.502,00
2	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BANDUNG	51.795.000,00
3	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAWA TENGAH	115.234.000,00
4	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SURABAYA	550.000,00
5	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SUMATERA UTARA DI MEDAN	1.816.000,00
6	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM UJUNG PANDANG	39.277.000,00
7	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BANDA ACEH	55.024.750,00
8	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PADANG	15.848.000,00
9	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PEKANBARU	13.069.000,00
10	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PALEMBANG	17.351.000,00
11	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM TANJUNG KARANG	15.115.000,00
12	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PONTIANAK	58.534.000,00
13	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BANJARMASIN	80.882.000,00
14	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SAMARINDA	16.765.000,00
15	KANWIL DEPARTEMEN HUKUM DAN HAM MANADO	25.739.700,00
16	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM DENPASAR	61.718.000,00
17	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM KUPANG	29.991.000,00
18	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM AMBON	33.105.500,00
19	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAYAPURA	51.957.000,00
20	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAMBI	12.294.200,00
21	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BENGKULU	24.865.000,00
22	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM YOGYAKARTA	116.769.000,00
23	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PALANGKARAYA	45.901.500,00
24	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM KENDARI	3.900.000,00
25	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM MATARAM	9.547.000,00
26	PUSAT DATA DAN TEKNOLOGI INFORMASI	80.682.475,00
27	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PROPINSI MALUKU UTARA	63.109.000,00
28	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PAPUA BARAT	46.488.000,00
29	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM KEPULAUAN RIAU	32.230.000,00
30	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SULAWESI BARAT	71.145.000,00
31	INSPEKTORAT JENDERAL	1.214.865.302,00
32	BALAI HARTA PENINGGALAN JAKARTA	188.209.866,00
33	BALAI HARTA PENINGGALAN SEMARANG	10.341.000,00
34	BALAI HARTA PENINGGALAN SURABAYA	32.388.457,00
35	BALAI HARTA PENINGGALAN MEDAN	102.031.789,00
36	BALAI HARTA PENINGGALAN UJUNG PANDANG	62.004.000,00
37	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAKARTA RAYA	22.750.000,00
38	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BANDUNG	72.750.000,00
39	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAWA TENGAH	99.495.000,00
40	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SURABAYA	8.918.950,00
41	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SUMATERA UTARA DI MEDAN	14.842.000,00
42	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM UJUNG PANDANG	13.414.950,00
43	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BANDA ACEH	15.435.000,00
44	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PADANG	80.568.000,00
45	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PEKANBARU	13.455.000,00
46	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PALEMBANG	56.084.000,00
47	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM TANJUNG KARANG	63.055.000,00
48	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PONTIANAK	29.212.000,00
49	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BANJARMASIN	88.199.800,00
50	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SAMARINDA	103.003.000,00
51	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM MANADO	16.963.000,00
52	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM DENPASAR	147.196.000,00
53	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM KUPANG	28.410.000,00

Belanja Barang Jasa - Penanganan Pandemi Covid-19 (Akun 522192)
Menurut Daftar Satuan Kerja per 31 Desember 2021

No	Nama Satker	Jumlah
54	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM AMBON	35.808.000,00
55	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAYAPURA	5.930.000,00
56	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAMBI	21.897.000,00
57	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BENGKULU	14.316.000,00
58	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM YOGYAKARTA	7.552.000,00
59	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PALANGKARAYA	52.233.000,00
60	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PALU	4.850.000,00
61	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM MATARAM	24.135.000,00
62	DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM	7.704.771.086,00
63	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PROPINSI BANTEN	17.634.000,00
64	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PROPINSI BANGKA BELITUNG	49.975.000,00
65	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PROPINSI GORONTALO	10.020.000,00
66	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PROPINSI MALUKU UTARA	31.059.000,00
67	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PAPUA BARAT	23.862.000,00
68	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM KEPULAUAN RIAU	46.410.000,00
69	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SULAWESI BARAT	27.820.000,00
70	LEMBAGA PEMASYARAKATAN KEMBANG KUNING	8.714.000,00
71	RUMAH TAHANAN NEGARA PALEMBANG	5.187.525,00
72	LAPAS BATAM	37.268.000,00
73	LPKA Pangkal Pinang, Provinsi Kep. Bangka Belitung	340.000,00
74	LAPAS TASIKMALAYA	12.118.000,00
75	LEMBAGA PEMASYARAKATAN CIREBON	34.815.000,00
76	LEMBAGA PEMASYARAKATAN KUNINGAN	2.500.000,00
77	BALAI PEMASYARAKATAN MAGELANG	6.737.000,00
78	BALAI PEMASYARAKATAN PATI	20.547.000,00
79	LEMBAGA PEMASYARAKATAN PATI	1.350.000,00
80	BALAI PEMASYARAKATAN KEDIRI	23.090.000,00
81	LAPAS BLITAR	18.960.000,00
82	LEMBAGA PEMASYARAKATAN BANDA ACEH	2.310.000,00
83	RUMAH TAHANAN NEGARA SIDIKALANG	3.000.000,00
84	BALAI PEMASYARAKATAN PEKANBARU	5.505.000,00
85	LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEKANBARU	7.149.000,00
86	LAPAS KELAS IIB TELUK KUANTAN	2.220.000,00
87	LEMBAGA PEMASYARAKATAN PASIR PANGARAYAN	450.000,00
88	LEMBAGA PEMASYARAKATAN TANJUNG PANDAN	6.503.000,00
89	LEMBAGA PEMASYARAKATAN BANJARMASIN	50.000.000,00
90	LAPAS KELAS IIA TENGGARONG	41.750.000,00
91	LEMBAGA PEMASYARAKATAN TARAKAN	9.904.000,00
92	LEMBAGA PEMASYARAKATAN MANADO	1.514.000,00
93	RUMAH TAHANAN NEGARA KOTAMOBAGU	43.000.000,00
94	RUMAH TAHANAN NEGARA TERNATE	650.000,00
95	LEMBAGA PEMASYARAKATAN KARANGASEM	1.800.000,00
96	LAPAS KELAS III BAA	7.750.000,00
97	LEMBAGA PEMASYARAKATAN BENGKULU	12.277.500,00
98	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BANDUNG	19.500.000,00
99	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAWA TENGAH	55.887.000,00
100	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SUMATERA UTARA DI MEDAN	11.250.000,00
101	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM UJUNG PANDANG	8.734.000,00
102	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BANDA ACEH	13.168.000,00
103	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PADANG	1.061.000,00
104	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PEKANBARU	30.798.000,00
105	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PONTIANAK	6.750.000,00

Belanja Barang Jasa - Penanganan Pandemi Covid-19 (Akun 522192)
Menurut Daftar Satuan Kerja per 31 Desember 2021

No	Nama Satker	Jumlah
106	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BANJARMASIN	72.840.000,00
107	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SAMARINDA	5.026.000,00
108	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM MANADO	11.320.000,00
109	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM DENPASAR	1.908.000,00
110	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM KUPANG	25.965.000,00
111	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM AMBON	22.523.000,00
112	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAYAPURA	19.900.000,00
113	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BENGKULU	5.600.000,00
114	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PALANGKARAYA	16.027.000,00
115	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM MATARAM	7.555.000,00
116	DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN	1.480.288.299,00
117	Lapas Perempuan Kelas IIA Palangkaraya	500.000,00
118	Lapas Perempuan Kelas III Jayapura	1.200.000,00
119	LPKA JOGJAKARTA, PROVINSI D.I YOGYAKARTA	26.143.798,00
120	RUMAH TAHANAN NEGARA PALU	11.460.000,00
121	LAPAS TERBUKA CIANGIR	8.944.000,00
122	BALAI PEMASYARAKATAN PANGKALAN BUN, KALIMANTAN TENGAH	2.900.000,00
123	BAPAS KELAS II TARAKAN	31.985.000,00
124	BAPAS KELAS II FAKFAK	4.000.000,00
125	LAPAS NARKOTIKA KELAS IIB PURWOKERTO	1.670.000,00
126	RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAN NEGARA SAMARINDA	16.800.000,00
127	RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAN NEGARA BENGKULU	1.600.000,00
128	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PROPINSI BANGKA BELITUNG	43.184.000,00
129	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PROPINSI GORONTALO	3.600.000,00
130	LEMBAGA PEMASYARAKATAN NARKOTIKA DI CIREBON	3.775.000,00
131	KANTOR RUPBASAN WATES	4.308.000,00
132	LAPAS TERBUKA KELAS IIB LOMBOK TENGAH	21.295.000,00
133	BALAI PEMASYARAKATAN SERANG	10.150.000,00
134	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SULAWESI BARAT	4.123.000,00
135	LAPAS NARKOTIKA KELAS IIA SAMARINDA	1.610.000,00
136	RUPBASAN KELAS I GORONTALO PROPINSI GORONTALO	1.400.000,00
137	KANTOR IMIGRASI KELAS I KHUSUS NON TPI JAKARTA SELATAN	210.336.000,00
138	KANTOR IMIGRASI KELAS II NON TPI KUALA TUNGKAL	19.700.000,00
139	KANTOR IMIGRASI KELAS III NON TPI KALIANDA	20.002.000,00
140	KANTOR IMIGRASI KELAS II BATULICIN	73.755.000,00
141	KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI TANJUNG PANDAN	23.173.901,00
142	KANTOR IMIGRASI KELAS II NON TPI DABO SINGKEP	24.498.000,00
143	KANTOR IMIGRASI KELAS I NON TPI JAKARTA PUSAT	98.322.500,00
144	KANTOR IMIGRASI KELAS I KHUSUS NON TPI JAKARTA BARAT	108.825.250,00
145	KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI BANDUNG	152.725.200,00
146	KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI CIREBON	50.004.000,00
147	KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI SEMARANG	76.784.000,00
148	KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI CILACAP	27.245.644,00
149	KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI YOGYAKARTA	64.764.000,00
150	KANTOR IMIGRASI KELAS I KHUSUS TPI SURABAYA	52.253.992,00
151	KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI MALANG	90.099.000,00
152	KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI JEMBER	22.078.700,00
153	KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI LHOKSEUMAWE	2.324.000,00
154	KANTOR IMIGRASI KELAS I KHUSUS TPI MEDAN	138.250.800,00
155	KANTOR IMIGRASI KELAS II NON TPI PEMATANG SIANTAR	14.617.146,00
156	KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI PEKANBARU	27.200.810,00
157	KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI BENGKALIS	5.614.000,00

Belanja Barang Jasa - Penanganan Pandemi Covid-19 (Akun 522192)
Menurut Daftar Satuan Kerja per 31 Desember 2021

No	Nama Satker	Jumlah
158	KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI BAGAN SIAPIAPI	10.017.000,00
159	KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI TANJUNG PINANG	32.414.000,00
160	KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI TANJUNG BALAI KARIMUN	35.629.200,00
161	KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI BELAKANG PADANG	45.858.900,00
162	KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI JAMBI	205.392.000,00
163	KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI PALEMBANG	31.894.500,00
164	KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI PANGKAL PINANG	50.486.000,00
165	KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI BANDAR LAMPUNG	42.216.000,00
166	KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI PONTIANAK	63.252.000,00
167	KANTOR IMIGRASI KELAS II NON TPI SINGKAWANG	42.264.168,00
168	KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI BALIKPAPAN	53.005.000,00
169	KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI TARAKAN	55.058.999,00
170	KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI MAKASSAR	107.724.500,00
171	KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI DENPASAR	136.336.080,00
172	KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI KUPANG	33.777.000,00
173	KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI MATARAM	82.268.900,00
174	KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI JAYAPURA	8.601.000,00
175	KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI BIAK	69.544.000,00
176	KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI SORONG	21.649.000,00
177	KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI MERAUKE	25.148.000,00
178	PERWAKILAN IMIGRASI DI SINGAPURA	150.575.230,00
179	PERWAKILAN IMIGRASI DI PENANG	11.686.690,00
180	PERWAKILAN IMIGRASI DI BANGKOK	101.663.251,00
181	PERWAKILAN IMIGRASI DI HONGKONG	54.916.992,00
182	PERWAKILAN IMIGRASI DI TOKYO	30.948.850,00
183	PERWAKILAN IMIGRASI DI DEN HAAG	37.205.399,00
184	PERWAKILAN IMIGRASI DI TAWAO	9.343.346,00
185	KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI PALU	65.031.695,00
186	KANTOR IMIGRASI KELAS I NON TPI PALANGKARAYA	67.744.000,00
187	KANTOR IMIGRASI KELAS I NON TPI BOGOR	72.918.000,00
188	KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI SAMARINDA	51.060.000,00
189	KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI TEMBILAHAN	22.660.257,00
190	KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI TANJUNG BALAI ASAHAN	21.098.000,00
191	KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI SELAT PANJANG	12.559.000,00
192	KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI JAKARTA TIMUR	66.767.500,00
193	KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI BANDA ACEH	34.573.000,00
194	KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI PADANG	45.144.000,00
195	KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI BANJARMASIN	94.291.500,00
196	KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI MANADO	64.939.000,00
197	KANTOR IMIGRASI KELAS I KHUSUS TPI BATAM	190.106.395,00
198	KANTOR IMIGRASI KELAS III NON TPI CIANJUR	16.542.000,00
199	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BANDUNG	37.625.000,00
200	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAWA TENGAH	14.923.000,00
201	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SURABAYA	13.923.475,00
202	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SUMATERA UTARA DI MEDAN	28.068.000,00
203	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM UJUNG PANDANG	20.103.000,00
204	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BANDA ACEH	34.805.000,00
205	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PEKANBARU	24.446.000,00
206	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM TANJUNG KARANG	85.000,00
207	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PONTIANAK	36.270.000,00
208	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BANJARMASIN	111.037.400,00
209	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SAMARINDA	35.585.875,00

Belanja Barang Jasa - Penanganan Pandemi Covid-19 (Akun 522192)
Menurut Daftar Satuan Kerja per 31 Desember 2021

No	Nama Satker	Jumlah
210	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM MANADO	35.207.000,00
211	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM DENPASAR	10.890.000,00
212	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM KUPANG	33.146.000,00
213	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAYAPURA	30.650.000,00
214	KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI TANJUNG PRIOK	46.587.423,00
215	KANTOR IMIGRASI KELAS I KHUSUS TPI SOEKARNO HATTA	23.885.250,00
216	KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI CILEGON	66.453.000,00
217	KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI SURAKARTA	88.138.500,00
218	KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI TANJUNG PERAK	29.169.812,00
219	KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI POLONIA	38.420.000,00
220	KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI BELAWAN	5.804.000,00
221	KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI SIBOLGA	54.027.000,00
222	KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI PAREPARE	19.593.750,00
223	KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI KENDARI	43.360.000,00
224	KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI TAREMPA	12.893.000,00
225	KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI LANGSA	28.308.000,00
226	KANTOR IMIGRASI KELAS II NON TPI MEULABOH	74.517.000,00
227	KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI TANJUNG UBAN	47.931.000,00
228	KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI RANAI	36.157.999,00
229	KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI BENGKULU	64.855.000,00
230	KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI SAMPIT	56.689.000,00
231	KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI NUNUKAN	17.870.000,00
232	KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI BITUNG	40.572.000,00
233	KANTOR IMIGRASI KELAS I KHUSUS TPI NGURAH RAI	81.231.750,00
234	KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI ATAMBUA	936.000,00
235	KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI MAUMERE	56.750.000,00
236	KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI SANGGAU	19.384.425,00
237	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAMBI	2.845.000,00
238	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BENGKULU	20.000.000,00
239	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM YOGYAKARTA	24.195.000,00
240	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PALANGKARAYA	20.829.000,00
241	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PALU	22.753.000,00
242	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM MATARAM	22.489.000,00
243	DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI	2.527.632.229,00
244	KANTOR IMIGRASI KELAS III NON TPI KERINCI	13.602.000,00
245	KANTOR IMIGRASI KELAS III NON TPI KETAPANG	41.744.000,00
246	KANTOR IMIGRASI KELAS III NON TPI PALOPO	43.694.000,00
247	KANTOR IMIGRASI KELAS III NON TPI BIMA	73.695.000,00
248	KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI TERNATE	46.316.000,00
249	KANTOR IMIGRASI KELAS II NON TPI DEPOK	31.868.000,00
250	KANTOR IMIGRASI KELAS II NON TPI MANOKWARI	22.665.000,00
251	KANTOR IMIGRASI KELAS II NON TPI POLEWALI MANDAR	36.527.000,00
252	KANTOR IMIGRASI KELAS II NON TPI MAMUJU	27.723.500,00
253	KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI ENTIKONG	7.088.342,00
254	PERWAKILAN IMIGRASI DI BEIJING	3.174.268,00
255	KANTOR IMIGRASI KELAS I NON TPI TANGERANG	33.123.000,00
256	PERWAKILAN IMIGRASI DI JOHOR BAHRU	1.067.977,00
257	KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI SABANG	27.652.000,00
258	KANTOR PERWAKILAN IMIGRASI PADA KANTOR URUSAN KEPENTINGAN RI DI DILI TIMOR	3.407.560,00
259	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PROPINSI BANTEN	12.360.000,00
260	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PROPINSI BANGKA BELITUNG	58.489.000,00
261	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PROPINSI GORONTALO	22.897.962,00

Belanja Barang Jasa - Penanganan Pandemi Covid-19 (Akun 522192)
Menurut Daftar Satuan Kerja per 31 Desember 2021

No	Nama Satker	Jumlah
262	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PROPINSI MALUKU UTARA	37.287.000,00
263	KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI JAKARTA UTARA	177.987.000,00
264	KANTOR IMIGRASI KELAS I NON TPI SERANG	111.915.000,00
265	KANTOR IMIGRASI KELAS II NON TPI SUKABUMI	55.525.000,00
266	KANTOR IMIGRASI KELAS II NON TPI KARAWANG	65.442.400,00
267	KANTOR IMIGRASI KELAS II NON TPI TASIKMALAYA	21.774.000,00
268	KANTOR IMIGRASI KELAS II NON TPI PEMALANG	3.343.000,00
269	KANTOR IMIGRASI KELAS II NON TPI WONOSOBO	3.087.000,00
270	KANTOR IMIGRASI KELAS II NON TPI PATI	42.201.000,00
271	KANTOR IMIGRASI KELAS II NON TPI MADIUN	42.382.000,00
272	KANTOR IMIGRASI KELAS II NON TPI BLITAR	64.205.000,00
273	KANTOR IMIGRASI KELAS II NON TPI AGAM	22.112.000,00
274	KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI SINGARAJA	10.000.000,00
275	KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI SUMBAWA BESAR	18.291.000,00
276	KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI GORONTALO	34.056.000,00
277	KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI TUAL	86.600.000,00
278	KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI SAMBAS	39.036.000,00
279	KANTOR IMIGRASI KELAS II NON TPI TOBELO	62.169.553,00
280	KANTOR IMIGRASI KELAS II NON TPI MUARA ENIM	27.181.000,00
281	KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI TAHUNA	20.930.500,00
282	RUMAH DETENSI IMIGRASI PEKANBARU	22.819.000,00
283	RUMAH DETENSI IMIGRASI JAKARTA	19.915.000,00
284	RUMAH DETENSI IMIGRASI SEMARANG	37.019.000,00
285	RUMAH DETENSI IMIGRASI SURABAYA	54.788.000,00
286	RUMAH DETENSI IMIGRASI PONTIANAK	49.327.000,00
287	RUMAH DETENSI IMIGRASI BALIKPAPAN	67.422.600,00
288	RUMAH DETENSI IMIGRASI MANADO	33.462.806,00
289	RUMAH DETENSI IMIGRASI MAKASSAR	3.000.000,00
290	RUMAH DETENSI IMIGRASI DENPASAR	21.180.000,00
291	RUMAH DETENSI IMIGRASI KUPANG	48.208.000,00
292	RUMAH DETENSI IMIGRASI JAYAPURA	53.418.000,00
293	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM KEPULAUAN RIAU	47.814.000,00
294	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SULAWESI BARAT	9.239.000,00
295	RUMAH DETENSI IMIGRASI PUSAT TANJUNG PINANG	90.884.000,00
296	KANTOR IMIGRASI KELAS III NON TPI TANJUNG REDEB	53.799.700,00
297	KANTOR IMIGRASI KELAS II NON TPI BEKASI	80.375.000,00
298	KANTOR IMIGRASI KELAS III NON TPI KOTABUMI	18.811.130,00
299	KANTOR IMIGRASI KELAS III NON TPI PAMEKASAN	50.290.000,00
300	KANTOR IMIGRASI KELAS III NON TPI KEDIRI	18.605.000,00
301	KANTOR IMIGRASI KELAS III NON TPI TAKENGON	13.245.000,00
302	KANTOR IMIGRASI KELAS III TPI LABUAN BAJO	40.929.780,00
303	KANTOR IMIGRASI KELAS III NON TPI PONOROGO	31.936.000,00
304	KANTOR IMIGRASI KELAS III NON TPI KOTAMOBAGU	67.788.000,00
305	KANTOR IMIGRASI KELAS III NON TPI WAKATOBI	20.358.000,00
306	KANTOR IMIGRASI KELAS III NON TPI BAU BAU	24.510.000,00
307	KANTOR IMIGRASI KELAS III NON TPI PUTUSSIBAU	12.216.000,00
308	DITJEN KEKAYAAN INTELEKTUAL	3.844.193.158,00
309	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAKARTA RAYA	87.600.000,00
310	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BANDUNG	81.905.000,00
311	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAWA TENGAH	63.959.250,00
312	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SURABAYA	6.248.000,00
313	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SUMATERA UTARA DI MEDAN	28.532.000,00

Belanja Barang Jasa - Penanganan Pandemi Covid-19 (Akun 522192)
Menurut Daftar Satuan Kerja per 31 Desember 2021

No	Nama Satker	Jumlah
314	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM UJUNG PANDANG	16.839.950,00
315	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BANDA ACEH	8.439.000,00
316	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PADANG	24.884.000,00
317	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PEKANBARU	4.905.000,00
318	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PALEMBANG	59.104.000,00
319	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM TANJUNG KARANG	20.896.000,00
320	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PONTIANAK	22.409.000,00
321	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BANJARMASIN	22.324.300,00
322	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SAMARINDA	19.806.000,00
323	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM DENPASAR	152.867.000,00
324	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM KUPANG	26.087.000,00
325	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM AMBON	18.690.000,00
326	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAYAPURA	9.096.236,00
327	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAMBI	7.200.000,00
328	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BENGKULU	4.891.000,00
329	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM YOGYAKARTA	37.282.500,00
330	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PALANGKARAYA	3.052.000,00
331	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PALU	3.465.000,00
332	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM MATARAM	43.874.000,00
333	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PROPINSI BANTEN	1.800.000,00
334	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PROPINSI BANGKA BELITUNG	28.333.000,00
335	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PROPINSI GORONTALO	1.995.000,00
336	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PROPINSI MALUKU UTARA	275.000,00
337	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PAPUA BARAT	10.588.000,00
338	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM KEPULAUAN RIAU	9.385.000,00
339	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SULAWESI BARAT	250.000,00
340	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SURABAYA	2.043.000,00
341	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BANDA ACEH	850.000,00
342	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PEKANBARU	780.000,00
343	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PONTIANAK	2.985.000,00
344	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BANJARMASIN	4.230.000,00
345	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM DENPASAR	17.300.000,00
346	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM KUPANG	11.323.000,00
347	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM AMBON	1.725.000,00
348	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAMBI	4.725.000,00
349	DITJEN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	46.704.122,00
350	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PROPINSI BANTEN	5.950.000,00
351	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PROPINSI BANGKA BELITUNG	3.999.000,00
352	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM UJUNG PANDANG	445.000,00
353	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PADANG	2.150.000,00
354	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PONTIANAK	4.440.000,00
355	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BANJARMASIN	1.183.000,00
356	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM MANADO	4.115.000,00
357	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM KUPANG	6.213.000,00
358	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM AMBON	2.040.000,00
359	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAYAPURA	6.950.000,00
360	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PALANGKARAYA	1.820.000,00
361	DIREKTORAT JENDERAL HAM	234.329.000,00
362	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM KEPULAUAN RIAU	4.000.000,00
363	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAKARTA RAYA	2.475.000,00
364	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAWA TENGAH	369.000,00
365	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SURABAYA	915.000,00

Belanja Barang Jasa - Penanganan Pandemi Covid-19 (Akun 522192)
Menurut Daftar Satuan Kerja per 31 Desember 2021

No	Nama Satker	Jumlah
366	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SUMATERA UTARA DI MEDAN	12.750.000,00
367	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM UJUNG PANDANG	2.356.000,00
368	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BANDA ACEH	960.000,00
369	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PADANG	4.521.000,00
370	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PEKANBARU	6.488.000,00
371	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PONTIANAK	2.354.000,00
372	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SAMARINDA	5.020.000,00
373	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM MANADO	4.000.000,00
374	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM KUPANG	13.586.000,00
375	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM AMBON	7.660.000,00
376	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAMBI	4.362.000,00
377	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BENGKULU	600.000,00
378	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PALANGKARAYA	8.950.000,00
379	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM MATARAM	3.219.000,00
380	BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL	512.485.077,00
381	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PROPINSI BANGKA BELITUNG	12.102.000,00
382	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PROPINSI GORONTALO	4.703.000,00
383	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM KEPULAUAN RIAU	4.444.000,00
384	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SURABAYA	10.618.999,00
385	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BANDA ACEH	8.200.000,00
386	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PEKANBARU	9.000.000,00
387	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PONTIANAK	1.920.000,00
388	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BANJARMASIN	21.217.000,00
389	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM MANADO	2.160.000,00
390	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM KUPANG	14.826.000,00
391	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM AMBON	8.610.000,00
392	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAYAPURA	3.650.000,00
393	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PALANGKARAYA	3.748.000,00
394	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM MATARAM	1.845.000,00
395	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA	355.569.681,00
396	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PROPINSI MALUKU UTARA	6.000.000,00
397	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM KEPULAUAN RIAU	750.000,00
398	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SULAWESI BARAT	750.000,00
399	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA	337.926.000,00
400	BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN HUKUM DAN HAM KEPULAUAN RIAU	94.874.700,00
401	BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN HUKUM DAN HAM JAWA TENGAH	22.914.000,00
402	BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN HUKUM DAN HAM SULAWESI UTARA	170.573.500,00
Jumlah		35.312.207.683,00

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Penanganan Pandemi Covid-19 (Akun 532119)
Menurut Daftar Satuan Kerja per 31 Desember 2021

No	Nama Satker	Jumlah
1	SEKRETARIAT JENDERAL (PUSAT)	24.750.000,00
2	RUTAN KELAS I PONDOK BAMBU	4.497.500,00
3	DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN	3.013.420.000,00
4	PERWAKILAN IMIGRASI DI DAVAO	2.093.063,00
5	KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI KENDARI	130.350.000,00
6	KANTOR IMIGRASI KELAS II NON TPI POLEWALI MANDAR	1.320.795,00
7	KANTOR IMIGRASI KELAS III NON TPI BAU BAU	149.325.000,00
8	BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL	42.531.500,00
9	POLITEKNIK ILMU PEMASYARAKATAN	38.163.000,00
10	BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN HUKUM DAN HAM KEPULAUAN RIAU	12.400.000,00
Jumlah		3.418.850.858,00

Pengembalian Belanja Pengadaan Bahan Makanan (Akun 521112)
Menurut daftar satuan kerja per 31 Desember 2021

No	Nama Satker	Jumlah
1	RUMAH TAHANAN NEGARA BANTUL	1.993.449,00
2	RUMAH TAHANAN NEGARA SURABAYA	41.007.914,00
3	RUMAH TAHANAN NEGARA MEDAN	4.872.096,00
4	RUMAH TAHANAN NEGARA MARABAHAN	6.858.355,00
5	LEMBAGA PEMASYARAKATAN ANAK GIANYAR	4.087.311,00
6	LPKA Pangkal Pinang, Provinsi Kep. Bangka Belitung	609.211,00
7	LPKA Palu, Provinsi SuLawesi Tengah	12.037.134,00
8	LAPAS CIAMIS	541.400,00
9	LEMBAGA PEMASYARAKATAN SUKAMISKIN	2.657.339,00
10	LEMBAGA PEMASYARAKATAN CIREBON	125.032,00
11	LEMBAGA PEMASYARAKATAN KUNINGAN	291.597,00
12	LAPAS CIANJUR	638.717,00
13	LEMBAGA PEMASYARAKATAN SUBANG	14.450.652,00
14	LAPAS KELAS III RANGKAS BITUNG	2.627.043,00
15	LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEMUDA TANGERANG	0,00
16	LEMBAGA PEMASYARAKATAN ANAK PRIA TANGERANG	1.129.220,00
17	LEMBAGA PEMASYARAKATAN SEMARANG	774.900,00
18	LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA SEMARANG	2.620.900,00
19	RUMAH TAHANAN NEGARA KUDUS	5.865.100,00
20	RUMAH TAHANAN NEGARA BANYUMAS	1.390.008,00
21	RUMAH TAHANAN NEGARA PURBALINGGA	678.547,00
22	LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEMUDA PLANTUNGAN	3.563.000,00
23	LEMBAGA PEMASYARAKATAN KALISOSOK	14.735.000,00
24	LEMBAGA PEMASYARAKATAN SIDOARJO	24.405.000,00
25	LAPAS JOMBANG	10.898,00
26	LEMBAGA PEMASYARAKATAN BOJONEGORO	2.207.063,00
27	LAPAS LAMONGAN	10.794.819,00
28	LEMBAGA PEMASYARAKATAN KEDIRI	34.940.000,00
29	LAPAS TULUNGAGUNG	15.563.898,00
30	RUMAH TAHANAN NEGARA SUMENEP	5.718.560,00
31	RUMAH TAHANAN NEGARA BANGKALAN	30.977.790,00
32	RUMAH TAHANAN NEGARA SAMPANG	14.723.093,00
33	LAPAS PASURUAN	5.199,00
34	LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN MALANG	15.383.378,00
35	LEMBAGA PEMASYARAKATAN MADIUN	1.933.523,00
36	RUMAH TAHANAN NEGARA PACITAN	2.497.195,00
37	LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK BLITAR	3.857.614,00
38	LAPAS KELAS IIB LHOKSUKON	59.795.270,00
39	LAPAS KELAS IIB BIREUN	1.631.420,00
40	RUMAH TAHANAN NEGARA KABANJAHE	3.502.310,00
41	LAPAS KELAS III KOTA PINANG	2.620.731,00
42	RUTAN KELAS I LABUHAN DELI	45.729.888,00
43	RUMAH TAHANAN NEGARA SIDIKALANG	0,00
44	LAPAS GUNUNG SITOLI	817.620,00
45	LEMBAGA PEMASYARAKATAN PADANG	1.205.089,00
46	LEMBAGA PEMASYARAKATAN PARIAMAN	43.961.145,00
47	RUMAH TAHANAN NEGARA PADANG PANJANG	221.886,00
48	LEMBAGA PEMASYARAKATAN SOLOK	315.000,00
49	RUMAH TAHANAN NEGARA RENGAT	36.671.456,00
50	LEMBAGA PEMASYARAKATAN TEMBILAHAN	249.791,00
51	LAPAS KELAS IIB TELUK KUANTAN	1.166.260,00
52	LAPAS KELAS IIA BANGKINANG	5.875.347,00
53	LEMBAGA PEMASYARAKATAN METRO	4.171.000,00

Pengembalian Belanja Pengadaan Bahan Makanan (Akun 521112)
Menurut daftar satuan kerja per 31 Desember 2021

No	Nama Satker	Jumlah
54	LEMBAGA PEMASYARAKATAN JAMBI	22.814.649,00
55	LEMBAGA PEMASYARAKATAN PANGKALPINANG	52.679.745,00
56	LEMBAGA PEMASYARAKATAN TANJUNG PANDAN	5.554.334,00
57	LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK PALEMBANG	2.850.839,00
58	LEMBAGA PEMASYARAKATAN MUARA TEWE	13.664.907,00
59	LEMBAGA PEMASYARAKATAN PANGKALAN BUN	15.492.953,00
60	LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK MARTAPURA	1.106.286,00
61	LAPAS KELAS IIA KOTABARU	7.660.629,00
62	RUMAH TAHANAN NEGARA KANDANGAN	9.818.622,00
63	RUMAH TAHANAN NEGARA RANTAU	1.106.950,00
64	RUMAH TAHANAN NEGARA BARABAI	8.408.587,00
65	LEMBAGA PEMASYARAKATAN AMUNTAI	5.521.666,00
66	RUMAH TAHANAN NEGARA TANJUNG	2.609.537,00
67	RUMAH TAHANAN NEGARA TANJUNG REDEP	12.603.229,00
68	LEMBAGA PEMASYARAKATAN SAMARINDA	32.726.603,00
69	LAPAS KELAS IIA TENGGARONG	6.888.600,00
70	LEMBAGA PEMASYARAKATAN TARAKAN	139.389.076,00
71	LAPAS KELAS III LIRUNG	4.920.000,00
72	RUMAH TAHANAN NEGARA DONGGALA	18.107.777,00
73	LAPAS KELAS III PARIGI	2.095.000,00
74	LEMBAGA PEMASYARAKATAN TOLI-TOLI	1.031.061,00
75	RUMAH TAHANAN NEGARA RAPPANG	110.136,00
76	RUMAH TAHANAN NEGARA BARRU	8.080.223,00
77	RUMAH TAHANAN NEGARA WATANSOPENG	640.310,00
78	RUMAH TAHANAN NEGARA KOLAKA	900.721,00
79	LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS IIA KEROBOKAN	18.570.328,00
80	RUMAH TAHANAN NEGARA KLUNGKUNG	1.237.573,00
81	RUMAH TAHANAN NEGARA GIANYAR	0,00
82	LEMBAGA PEMASYARAKATAN KARANGASEM	2.162.751,00
83	RUMAH TAHANAN NEGARA PRAYA	1.056.325,00
84	RUMAH TAHANAN NEGARA MAUMERE	1.726.565,00
85	LEMBAGA PEMASYARAKATAN WANITA TANGERANG	6.642.372,00
86	Lapas Perempuan Kelas IIA Martapura	3.198.977,00
87	Lapas Perempuan Kelas IIA Palangkaraya	2.262.218,00
88	Lapas Perempuan Kelas IIA Samarinda	4.034.550,00
89	Lapas Perempuan Kelas IIA Pekanbaru	1.254.497,00
90	Lapas Perempuan Kelas IIA Pontianak	9.180.541,00
91	Lapas Perempuan Kelas IIB Jambi	3.066.000,00
92	Lapas Perempuan Kelas IIB Padang	16.029.787,00
93	Lapas Perempuan Kelas IIB Bengkulu	656.949,00
94	Rutan Perempuan Kelas IIA Surabaya	14.665.000,00
95	LEMBAGA PEMASYARAKATAN SALEMBA	66.692.063,00
96	LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA BANDUNG	79.300,00
97	RUMAH TAHANAN NEGARA TANGERANG	26.657.206,00
98	LAPAS SUNGAI LIAT	11.608.300,00
99	RUMAH TAHANAN NEGARA AMBON	2.997.401,00
100	RUMAH TAHANAN NEGARA SAMARINDA	6.172,00
101	LEMBAGA PEMASYARAKATAN NARKOTIKA BANDUNG	194.781.088,00
102	LEMBAGA PEMASYARAKATAN NARKOTIKA MARTAPURA	2.360.457,00
103	LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS III LEMBATA	476.278,00
104	LAPAS PEREMPUAN KELAS IIB KUPANG	0,00
105	LAPAS NARKOTIKA KELAS IIA SAMARINDA	7.385.071,00

Pengembalian Belanja Pengadaan Bahan Makanan (Akun 521112)
Menurut daftar satuan kerja per 31 Desember 2021

No	Nama Satker	Jumlah
106	LPKA KELAS II LOMBOK TENGAH	127.038,00
107	RUMAH TAHANAN KELAS IIB GARUT	7.475.721,00
108	RUMAH TAHANAN KELAS IIB BANDA ACEH	6.780.800,00
109	LAPAS KELAS IIA BANYUASIN	4.327.642,00
110	LAPAS KHUSUS KELAS IIA GUNUNG SINDUR	11.307.796,00
111	LAPAS NARKOTIKA KELAS IIA PANGKAL PINANG	12.641.764,00
112	LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KELAS II BANDUNG PROPINSI JAWA BARAT	893.000,00
113	RUTAN KELAS IIB TAMIYANG LAYANG PROPINSI KALIMANTAN TENGAH	1.727.459,00
114	Lapas Narkotika Kelas III Sawah Lunto	90.500,00
115	Rutan Kelas II B Padang	19.916.557,00
116	LAPAS KELAS IIB BANJARBARU	27.614.905,00
Jumlah		1.362.979.559,00

Pengembalian Belanja Perjalanan Biasa (Akun 524111)
Menurut daftar satuan kerja per 31 Desember 2021

No	Nama Satker	Jumlah
1	SEKRETARIAT JENDERAL (PUSAT)	501.079.680,00
2	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SURABAYA	14.961.690,00
3	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM UJUNG PANDANG	9.610.500,00
4	KANWIL DEPARTEMEN HUKUM DAN HAM MANADO	988.357,00
5	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAYAPURA	5.127.500,00
6	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM KENDARI	669.000,00
7	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM MATARAM	1.430.000,00
8	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PROPINSI MALUKU UTARA	4.685.400,00
9	INSPEKTORAT JENDERAL	1.157.921.700,00
10	BALAI HARTA PENINGGALAN JAKARTA	5.627.622,00
11	BALAI HARTA PENINGGALAN SEMARANG	4.760.500,00
12	BALAI HARTA PENINGGALAN SURABAYA	2.010.200,00
13	BALAI HARTA PENINGGALAN UJUNG PANDANG	34.312.250,00
14	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SURABAYA	13.314.714,00
15	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PALEMBANG	14.881.035,00
16	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM TANJUNG KARANG	1.200.000,00
17	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BANJARMASIN	438.000,00
18	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM AMBON	17.517.400,00
19	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAYAPURA	54.230.043,00
20	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM KENDARI	12.055.800,00
21	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM MATARAM	10.850.000,00
22	DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM	2.700.078.964,00
23	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PROPINSI MALUKU UTARA	20.635.568,00
24	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PAPUA BARAT	400.000,00
25	RUMAH TAHANAN NEGARA MAMUJU	2.100.000,00
26	LEMBAGA PEMASYARAKATAN FAK-FAK	0,00
27	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM UJUNG PANDANG	7.192.300,00
28	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PALEMBANG	855.200,00
29	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM TANJUNG KARANG	6.171.446,00
30	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAYAPURA	4.570.772,00
31	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAMBI	1.260.000,00
32	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM MATARAM	6.220.000,00
33	DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN	60.717.685,00
34	Lapas Perempuan Kelas IIA Palangkaraya	3.965.100,00
35	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PROPINSI MALUKU UTARA	2.825.500,00
36	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM KEPULAUAN RIAU	256.000,00
37	RUPBASAN KELAS I GORONTALO PROPINSI GORONTALO	1.000.000,00
38	KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI TEMBAGAPURA	12.874.339,00
39	KANTOR IMIGRASI KELAS II NON TPI DABO SINGKEP	5.914.000,00
40	KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI LHOKSEUMAWE	11.000.000,00
41	KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI BENGKALIS	700.000,00
42	KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI PANGKAL PINANG	21.460.387,00
43	KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI BIAK	21.545.500,00
44	KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI SORONG	1.336.504,00
45	KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI JAKARTA TIMUR	130.000,00
46	KANTOR IMIGRASI KELAS I KHUSUS TPI BATAM	5.158.000,00
47	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SURABAYA	962.500,00
48	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BANJARMASIN	583.200,00
49	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAYAPURA	5.042.332,00
50	KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI TANJUNG PRIOK	27.779.937,00
51	KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI BELAWAN	3.029.000,00
52	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM YOGYAKARTA	380.000,00
53	DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI	1.960.055.934,00

Pengembalian Belanja Perjalanan Biasa (Akun 524111)
Menurut daftar satuan kerja per 31 Desember 2021

No	Nama Satker	Jumlah
54	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PROPINSI GORONTALO	0,00
55	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PROPINSI MALUKU UTARA	7.221.915,00
56	KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI TUAL	838.000,00
57	RUMAH DETENSI IMIGRASI BALIKPAPAN	0,00
58	DITJEN KEKAYAAN INTELEKTUAL	19.078.830,00
59	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SURABAYA	2.527.900,00
60	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PEKANBARU	115.000,00
61	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PALEMBANG	14.458.312,00
62	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BANJARMASIN	2.000.000,00
63	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM AMBON	4.504.000,00
64	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAYAPURA	4.157.000,00
65	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PROPINSI MALUKU UTARA	16.574.900,00
66	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAYAPURA	324.900,00
67	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM UJUNG PANDANG	129.098,00
68	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PADANG	1.610.000,00
69	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM TANJUNG KARANG	1.539.296,00
70	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM AMBON	17.800,00
71	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAYAPURA	5.147.000,00
72	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PALU	1.000,00
73	DIREKTORAT JENDERAL HAM	57.104.831,00
74	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PADANG	380.000,00
75	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PALEMBANG	4.992.700,00
76	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BANJARMASIN	1.665.000,00
77	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM AMBON	6.033.800,00
78	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAYAPURA	743.345,00
79	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAMBI	700.000,00
80	BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL	29.945.400,00
81	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PROPINSI MALUKU UTARA	460.507,00
82	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM KEPULAUAN RIAU	256.000,00
83	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PADANG	856.000,00
84	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BANJARMASIN	200.000,00
85	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA	7.495.560,00
86	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PROPINSI MALUKU UTARA	420.000,00
87	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA	327.973.053,00
88	POLITEKNIK IMIGRASI	21.930.000,00
89	POLITEKNIK ILMU PEMASYARAKATAN	56.637.580,00
Jumlah		7.361.910.286,00

Rincian Pembelian Peralatan dan Mesin
Menurut daftar satuan kerja per 31 Desember 2021

No	Kode Satker	Nama Satker	Jumlah
1	108266	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA	10.964.741.820,00
2	109104	LEMBAGA PEMASYARAKATAN KARAWANG	385.798.000,00
3	109106	LEMBAGA PEMASYARAKATAN PERMISAN	53.009.000,00
4	109114	LEMBAGA PEMASYARAKATAN WANITA MEDAN	73.750.000,00
5	109155	KANTOR IMIGRASI KELAS I KHUSUS NON TPI JAKARTA SELATAN	123.519.000,00
6	109156	KANTOR IMIGRASI KELAS II NON TPI KUALA TUNGKAL	317.800.000,00
7	109157	KANTOR IMIGRASI KELAS III NON TPI KALIANDA	427.900.851,00
8	109158	KANTOR IMIGRASI KELAS II BATULICIN	332.375.000,00
9	109159	KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI TEMBAGAPURA	119.790.000,00
10	109160	KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI TANJUNG PANDAN	519.926.000,00
11	109161	KANTOR IMIGRASI KELAS II NON TPI DABO SINGKEP	114.260.000,00
12	352605	LPKA Pangkal Pinang, Provinsi Kep. Bangka Belitung	8.500.000,00
13	404233	SEKRETARIAT JENDERAL (PUSAT)	7.439.854.900,00
14	404271	LEMBAGA PEMASYARAKATAN CIPINANG	59.200.000,00
15	404296	RUTAN KELAS I PONDOK BAMBU	4.497.500,00
16	404309	POLITEKNIK ILMU PEMASYARAKATAN	1.138.879.752,00
17	404404	LEMBAGA PEMASYARAKATAN CIREBON	132.260.000,00
18	404460	LAPAS INDRAMAYU	7.393.782,00
19	404517	LEMBAGA PEMASYARAKATAN SUBANG	114.441.800,00
20	404548	LAPAS KELAS III RANGKAS BITUNG	47.000.000,00
21	404554	LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEMUDA TANGERANG	290.000.000,00
22	404563	LEMBAGA PEMASYARAKATAN ANAK PRIA TANGERANG	1.750.000,00
23	404642	LEMBAGA PEMASYARAKATAN SEMARANG	428.823.600,00
24	404733	LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEKALONGAN	79.243.050,00
25	404987	RUMAH TAHANAN NEGARA BANYUMAS	1.000.000,00
26	405038	LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEMUDA PLANTUNGAN	2.693.600,00
27	405053	LEMBAGA PEMASYARAKATAN KALISOSOK	3.558.000,00
28	405075	LEMBAGA PEMASYARAKATAN SIDOARJO	23.273.007,00
29	405081	LAPAS MOJOKERTO	17.985.000,00
30	405120	LEMBAGA PEMASYARAKATAN BOJONEGORO	8.985.900,00
31	405132	LAPAS LAMONGAN	17.530.920,00
32	405163	LAPAS TULUNGAGUNG	29.785.800,00
33	405239	LAPAS KELAS IIA BANYUWANGI	12.000.000,00
34	405333	LEMBAGA PEMASYARAKATAN MALANG	73.785.000,00
35	405358	LAPAS PROBOLINGGO	3.668.500,00
36	405409	LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN MALANG	146.615.000,00
37	405421	LEMBAGA PEMASYARAKATAN MADIUN	536.606.000,00
38	405446	RUMAH TAHANAN NEGARA MAGETAN	2.850.000,00
39	405565	RUMAH TAHANAN NEGARA TAKENGON	15.700.000,00
40	405713	LEMBAGA PEMASYARAKATAN BINJAI	79.195.325,00
41	405891	LAPAS KELAS III KOTANOPAN	1.600.000,00
42	406055	LEMBAGA PEMASYARAKATAN BUKITTINGGI	70.376.000,00
43	406183	LEMBAGA PEMASYARAKATAN BENGKALIS	56.477.800,00
44	406282	LEMBAGA PEMASYARAKATAN METRO	154.950.000,00
45	406353	RUMAH TAHANAN NEGARA SUNGAI PENUH	1.000.000,00
46	406420	LAPAS MUARA ENIM	45.155.000,00
47	406463	LAPAS KELAS III SAROLANGUN RAWAS	52.157.000,00
48	406488	LAPAS KELAS IIB MARTAPURA	4.725.000,00
49	406523	RUTAN KELAS IIB MUNTOK	1.150.000,00
50	406602	LEMBAGA PEMASYARAKATAN PONTIANAK	376.313.000,00
51	406627	LEMBAGA PEMASYARAKATAN SINGKAWANG	114.906.000,00
52	406658	LEMBAGA PEMASYARAKATAN SINTANG	1.600.000,00

Rincian Pembelian Peralatan dan Mesin
Menurut daftar satuan kerja per 31 Desember 2021

No	Kode Satker	Nama Satker	Jumlah
53	406828	LEMBAGA PEMASYARAKATAN BALIKPAPAN	14.000.000,00
54	406859	LAPAS KELAS IIA TENGGARONG	164.463.000,00
55	406890	LAPAS KELAS III AMURANG	64.268.000,00
56	406922	LEMBAGA PEMASYARAKATAN GORONTALO	212.597.000,00
57	406962	LAPAS KELAS III LIRUNG	4.800.000,00
58	406984	LEMBAGA PEMASYARAKATAN ULU SIAU	2.510.000,00
59	407097	RUMAH TAHANAN NEGARA PANGKAJENE	2.850.000,00
60	407302	LEMBAGA PEMASYARAKATAN WATAMPONE	5.000.000,00
61	407380	LEMBAGA PEMASYARAKATAN AMBON	99.000.000,00
62	407519	BALAI PEMASYARAKATAN DENPASAR	112.800.000,00
63	407622	LAPAS KELAS IIB SELONG	19.600.000,00
64	407794	LEMBAGA PEMASYARAKATAN ABEPURA	5.500.000,00
65	407870	LAPAS KELAS III TEMINABUHAN	5.700.000,00
66	407876	LEMBAGA PEMASYARAKATAN SORONG	18.000.000,00
67	407927	LEMBAGA PEMASYARAKATAN CURUP	1.115.000,00
68	407933	KANTOR IMIGRASI KELAS I NON TPI JAKARTA PUSAT	489.740.960,00
69	407942	KANTOR IMIGRASI KELAS I KHUSUS NON TPI JAKARTA BARAT	527.517.700,00
70	407958	KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI BANDUNG	484.581.000,00
71	407964	KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI CIREBON	527.475.000,00
72	407973	KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI SEMARANG	60.379.000,00
73	407989	KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI CILACAP	512.800.000,00
74	407995	KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI YOGYAKARTA	214.062.000,00
75	408009	KANTOR IMIGRASI KELAS I KHUSUS TPI SURABAYA	47.765.700,00
76	408015	KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI MALANG	445.475.000,00
77	408021	KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI JEMBER	393.623.000,00
78	408040	KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI LHOKSEUMAWE	222.200.000,00
79	408046	KANTOR IMIGRASI KELAS I KHUSUS TPI MEDAN	205.605.000,00
80	408052	KANTOR IMIGRASI KELAS II NON TPI PEMATANG SIANTAR	155.751.000,00
81	408061	KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI PEKANBARU	139.312.500,00
82	408077	KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI BENGKALIS	337.940.000,00
83	408083	KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI DUMAI	158.340.000,00
84	408092	KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI BAGAN SIPIAPI	465.017.000,00
85	408103	KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI TANJUNG PINANG	338.290.000,00
86	408112	KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI TANJUNG BALAI KARIMUN	104.500.000,00
87	408128	KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI BELAKANG PADANG	388.967.000,00
88	408134	KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI JAMBI	569.279.680,00
89	408143	KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI PALEMBANG	134.222.000,00
90	408159	KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI PANGKAL PINANG	170.900.000,00
91	408165	KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI BANDAR LAMPUNG	197.835.000,00
92	408171	KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI PONTIANAK	331.897.500,00
93	408190	KANTOR IMIGRASI KELAS II NON TPI SINGKAWANG	530.321.000,00
94	408196	KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI BALIKPAPAN	328.957.207,00
95	408210	KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI TARAKAN	547.401.500,00
96	408216	KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI MAKASSAR	657.335.000,00
97	408222	KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI DENPASAR	14.999.600,00
98	408231	KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI KUPANG	392.950.000,00
99	408247	KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI MATARAM	448.411.000,00
100	408253	KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI JAYAPURA	768.184.000,00
101	408262	KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI BIAK	547.200.000,00
102	408278	KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI SORONG	576.482.400,00
103	408284	KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI MERAUKE	352.145.212,00
104	408293	PERWAKILAN IMIGRASI DI SINGAPURA	496.598.925,00

Rincian Pembelian Peralatan dan Mesin
Menurut daftar satuan kerja per 31 Desember 2021

No	Kode Satker	Nama Satker	Jumlah
105	408304	PERWAKILAN IMIGRASI DI KUALALUMPUR	56.186.558,00
106	408335	PERWAKILAN IMIGRASI DI HONGKONG	124.511.687,00
107	408341	PERWAKILAN IMIGRASI DI TOKYO	112.625.490,00
108	408360	PERWAKILAN IMIGRASI DI DAVAO	483.737.046,00
109	408372	PERWAKILAN IMIGRASI DI BERLIN	93.764.496,00
110	408381	PERWAKILAN IMIGRASI DI SIDNEY	752.105.935,00
111	408397	PERWAKILAN IMIGRASI DI KUCHING	19.888.988,00
112	408423	KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI PALU	8.227.130.333,00
113	408432	BALAI HARTA PENINGGALAN UJUNG PANDANG	172.105.000,00
114	408448	KANTOR IMIGRASI KELAS I NON TPI PALANGKARAYA	1.039.926.000,00
115	408463	KANTOR IMIGRASI KELAS I NON TPI BOGOR	478.354.522,00
116	408479	KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI SAMARINDA	28.483.800,00
117	408485	KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI TEMBILAHAN	390.383.551,00
118	408491	KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI TANJUNG BALAI ASAHAN	365.670.000,00
119	408511	KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI SELAT PANJANG	104.985.000,00
120	408530	LEMBAGA PEMASYARAKATAN KOTA AGUNG	205.945.000,00
121	408536	LEMBAGA PEMASYARAKATAN KALIANDA	190.000.000,00
122	408542	KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI JAKARTA TIMUR	289.993.700,00
123	408573	KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI BANDA ACEH	1.450.464.400,00
124	408582	KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI PADANG	17.648.145,00
125	408598	KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI BANJARMASIN	106.143.500,00
126	408602	KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI AMBON	137.500.000,00
127	408618	KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI MANADO	687.752.000,00
128	408624	KANTOR IMIGRASI KELAS I KHUSUS TPI BATAM	902.101.000,00
129	408627	KANTOR IMIGRASI KELAS III NON TPI CIANJUR	553.921.500,00
130	408649	LEMBAGA PEMASYARAKATAN DOMPU	218.646.000,00
131	408661	LEMBAGA PEMASYARAKATAN WANITA TANGERANG	120.490.700,00
132	408720	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAKARTA RAYA	1.460.645.014,00
133	408736	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BANDUNG	399.300.000,00
134	408742	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAWA TENGAH	833.608.618,00
135	408751	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SURABAYA	1.055.016.000,00
136	408767	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SUMATERA UTARA DI MEDAN	1.455.082.800,00
137	408773	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM UJUNG PANDANG	1.717.133.000,00
138	408782	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BANDA ACEH	1.652.880.000,00
139	408798	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PADANG	661.368.730,00
140	408818	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PALEMBANG	323.939.000,00
141	408824	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM TANJUNG KARANG	697.224.000,00
142	408830	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PONTIANAK	1.297.997.600,00
143	408855	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SAMARINDA	458.941.000,00
144	408861	KANWIL DEPARTEMEN HUKUM DAN HAM MANADO	549.413.300,00
145	408870	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM DENPASAR	1.982.741.200,00
146	408892	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM AMBON	1.028.033.600,00
147	408906	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAYAPURA	46.500.000,00
148	408922	KANTOR IMIGRASI KELAS I KHUSUS TPI SOEKARNO HATTA	1.182.368.919,00
149	408938	KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI CILEGON	460.567.130,00
150	408944	KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI SURAKARTA	62.619.000,00
151	408953	KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI TANJUNG PERAK	298.780.200,00
152	408969	KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI POLONIA	532.426.400,00
153	408975	KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI BELAWAN	482.351.359,00
154	408981	KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI SIBOLGA	366.300.000,00
155	409001	KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI PAREPARE	105.990.750,00
156	409002	KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI KENDARI	555.311.000,00

Rincian Pembelian Peralatan dan Mesin
Menurut daftar satuan kerja per 31 Desember 2021

No	Kode Satker	Nama Satker	Jumlah
157	409020	KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI TAREMPA	625.655.000,00
158	409026	KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI LANGSA	427.229.500,00
159	409032	KANTOR IMIGRASI KELAS II NON TPI MEULABOH	401.658.999,00
160	409041	KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI TANJUNG UBAN	94.872.000,00
161	409057	KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI RANAI	429.124.646,00
162	409063	KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI BENGKULU	444.000.000,00
163	409072	KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI SAMPIT	548.141.000,00
164	409088	KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI NUNUKAN	61.504.600,00
165	409094	KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI BITUNG	346.727.300,00
166	409108	KANTOR IMIGRASI KELAS I KHUSUS TPI NGURAH RAI	933.408.000,00
167	409114	KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI ATAMBUA	234.624.000,00
168	409123	KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI MAUMERE	490.803.000,00
169	409145	KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI SANGGAU	369.225.000,00
170	409151	LEMBAGA PEMASYARAKATAN ANAK PEKANBARU	38.700.000,00
171	409155	BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN HUKUM DAN HAM KEPULAUAN RIAU	1.970.232.000,00
172	409157	BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN HUKUM DAN HAM JAWA TENGAH	1.572.849.234,00
173	409159	BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN HUKUM DAN HAM SULAWESI UTARA	277.134.000,00
174	409169	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAMBI	738.989.000,00
175	409181	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM YOGYAKARTA	1.179.154.930,00
176	409190	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PALANGKARAYA	1.590.351.135,00
177	409201	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM KENDARI	289.831.000,00
178	409210	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PALU	1.057.710.000,00
179	409226	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM MATARAM	2.064.768.500,00
180	409241	INSPEKTORAT JENDERAL	3.543.826.417,00
181	409257	DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM	61.004.193.193,00
182	409263	DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN	373.951.853.499,00
183	409272	DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI	50.266.473.130,00
184	409288	BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL	2.214.472.930,00
185	418330	Lapas Perempuan Kelas IIA Jakarta	27.860.000,00
186	418332	Lapas Perempuan Kelas IIA Palangkaraya	7.293.538,00
187	418333	Lapas Perempuan Kelas IIA Samarinda	85.580.000,00
188	418334	Lapas Perempuan Kelas IIA Denpasar	14.500.000,00
189	418336	Lapas Perempuan Kelas IIA Pontianak	200.992.500,00
190	418338	Lapas Perempuan Kelas IIB Jambi	213.469.000,00
191	418340	Lapas Perempuan Kelas IIB Yogyakarta	5.600.000,00
192	418342	Lapas Perempuan Kelas IIB Bengkulu	5.589.650,00
193	418351	Lapas Perempuan Kelas III Mataram	69.854.000,00
194	418367	Lapas Kelas III Sukamara Provinsi Kalimantan Tengah	7.483.700,00
195	418935	KANTOR IMIGRASI KELAS III NON TPI KERINCI	88.341.000,00
196	418936	KANTOR IMIGRASI KELAS III NON TPI KETAPANG	1.162.224.426,00
197	418937	KANTOR IMIGRASI KELAS III NON TPI PALOPO	495.626.000,00
198	418938	KANTOR IMIGRASI KELAS III NON TPI BIMA	711.873.000,00
199	480505	KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI TERNATE	95.000.000,00
200	497651	LEMBAGA PEMASYARAKATAN SALEMBA	280.590.125,00
201	497676	LEMBAGA PEMASYARAKATAN CIBINONG	42.672.000,00
202	497691	RUMAH Tahanan NEGARA BATANG	1.500.000,00
203	497821	LEMBAGA PEMASYARAKATAN WANITA SUNGGUMINASA	10.500.000,00
204	498382	KANTOR IMIGRASI KELAS II NON TPI DEPOK	244.420.000,00

Rincian Pembelian Peralatan dan Mesin
Menurut daftar satuan kerja per 31 Desember 2021

No	Kode Satker	Nama Satker	Jumlah
205	498398	KANTOR IMIGRASI KELAS II NON TPI MANOKWARI	1.110.000.700,00
206	498402	KANTOR IMIGRASI KELAS II NON TPI POLEWALI MANDAR	589.903.195,00
207	498418	KANTOR IMIGRASI KELAS II NON TPI MAMUJU	188.559.200,00
208	532413	PUSAT DATA DAN TEKNOLOGI INFORMASI	22.458.319.300,00
209	539101	KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI ENTIKONG	742.985.500,00
210	567869	RUMAH TAHANAN NEGARA GRESIK	4.180.000,00
211	613524	KANTOR IMIGRASI KELAS I NON TPI TANGERANG	474.707.170,00
212	621802	PERWAKILAN IMIGRASI DI JOHOR BAHRU	97.445.228,00
213	622020	DIREKTORAT JENDERAL HAM	1.864.344.550,00
214	626080	LAPAS TERBUKA CIANGIR	917.068.000,00
215	626181	DITJEN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	131.674.458,00
216	627323	KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI SABANG	118.000.000,00
217	632055	LAPAS NARKOTIKA KELAS IIB RUMBAI	1.078.000,00
218	635549	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA	1.124.313.400,00
219	648999	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PROPINSI BANTEN	141.881.800,00
220	649001	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PROPINSI BANGKA BELITUNG	643.738.200,00
221	649018	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PROPINSI GORONTALO	1.022.280.000,00
222	649022	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PROPINSI MALUKU UTARA	1.795.206.300,00
223	649040	LEMBAGA PEMASYARAKATAN NARKOTIKA DI CIREBON	5.328.000,00
224	652276	KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI JAKARTA UTARA	1.347.877.292,00
225	652283	KANTOR IMIGRASI KELAS I NON TPI SERANG	625.442.000,00
226	652297	KANTOR IMIGRASI KELAS II NON TPI SUKABUMI	613.374.300,00
227	652302	KANTOR IMIGRASI KELAS II NON TPI KARAWANG	471.472.000,00
228	652319	KANTOR IMIGRASI KELAS II NON TPI TASIKMALAYA	456.971.000,00
229	652323	KANTOR IMIGRASI KELAS II NON TPI PEMALANG	827.947.000,00
230	652340	KANTOR IMIGRASI KELAS II NON TPI WONOSOBO	611.060.000,00
231	652344	KANTOR IMIGRASI KELAS II NON TPI PATI	19.790.000,00
232	652365	KANTOR IMIGRASI KELAS II NON TPI MADIUN	590.686.220,00
233	652372	KANTOR IMIGRASI KELAS II NON TPI BLITAR	152.140.000,00
234	652393	KANTOR IMIGRASI KELAS II NON TPI AGAM	60.835.500,00
235	652408	KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI SINGARAJA	422.841.000,00
236	652412	KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI SUMBAWA BESAR	53.000.000,00
237	652429	KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI GORONTALO	155.150.000,00
238	652852	LEMBAGA PEMASYARAKATAN SLEMAN	13.970.000,00
239	652902	LEMBAGA PEMASYARAKATAN TERBUKA KENDAL	379.800.000,00
240	652916	LEMBAGA PEMASYARAKATAN TERBUKA NUSAKAMBANGAN	24.018.500,00
241	652923	LAPAS TERBUKA KELAS IIB LOMBOK TENGAH	170.200.000,00
242	652958	LAPAS NARKOTIKA KELAS IIA MUARA BELITI	63.400.000,00
243	652979	LEMBAGA PEMASYARAKATAN NARKOTIKA JAKARTA	502.848.500,00
244	652983	LEMBAGA PEMASYARAKATAN NARKOTIKA BANDUNG	245.100.000,00
245	662952	KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI TUAL	517.650.000,00
246	662967	KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI SAMBAS	300.194.302,00
247	662968	KANTOR IMIGRASI KELAS II NON TPI TOBELO	416.455.500,00
248	664544	KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI SIAK	192.411.000,00
249	664565	KANTOR IMIGRASI KELAS II NON TPI MUARA ENIM	335.629.000,00
250	664572	KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI TAHUNA	338.400.000,00

Rincian Pembelian Peralatan dan Mesin
Menurut daftar satuan kerja per 31 Desember 2021

No	Kode Satker	Nama Satker	Jumlah
251	664586	RUMAH DETENSI IMIGRASI MEDAN	241.300.000,00
252	664593	RUMAH DETENSI IMIGRASI PEKANBARU	412.840.000,00
253	664612	RUMAH DETENSI IMIGRASI JAKARTA	117.400.000,00
254	664629	RUMAH DETENSI IMIGRASI SEMARANG	409.459.000,00
255	664633	RUMAH DETENSI IMIGRASI SURABAYA	255.698.600,00
256	664650	RUMAH DETENSI IMIGRASI PONTIANAK	113.094.150,00
257	664654	RUMAH DETENSI IMIGRASI BALIKPAPAN	99.015.000,00
258	664661	RUMAH DETENSI IMIGRASI MANADO	438.285.700,00
259	664675	RUMAH DETENSI IMIGRASI MAKASSAR	76.313.500,00
260	664682	RUMAH DETENSI IMIGRASI DENPASAR	1.005.600.000,00
261	664696	RUMAH DETENSI IMIGRASI KUPANG	392.500.000,00
262	664701	RUMAH DETENSI IMIGRASI JAYAPURA	353.320.000,00
263	667772	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PAPUA BARAT	379.172.000,00
264	667786	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM KEPULAUAN RIAU	2.280.037.000,00
265	667790	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SULAWESI BARAT	1.771.816.929,00
266	677181	RUMAH DETENSI IMIGRASI PUSAT TANJUNG PINANG	666.682.000,00
267	679991	KANTOR IMIGRASI KELAS III NON TPI TANJUNG REDEB	59.000.000,00
268	683039	KANTOR IMIGRASI KELAS II NON TPI BEKASI	528.500.000,00
269	683111	KANTOR IMIGRASI KELAS III NON TPI KOTABUMI	546.520.790,00
270	683327	LAPAS KELAS IIB WARUNG KIARA	15.000.000,00
271	683458	KANTOR IMIGRASI KELAS III NON TPI PAMEKASAN	382.690.000,00
272	683462	KANTOR IMIGRASI KELAS III NON TPI KEDIRI	360.370.000,00
273	683533	KANTOR IMIGRASI KELAS III NON TPI TAKENGON	201.430.000,00
274	683547	KANTOR IMIGRASI KELAS III TPI LABUAN BAJO	407.682.750,00
275	683661	LAPAS NARKOTIKA KELAS IIA LANGKAT	108.000.000,00
276	683682	LAPAS NARKOTIKA KELAS IIA PANGKAL PINANG	160.370.000,00
277	683711	LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KELAS II BANDUNG PROPINSI JAWA BARAT	7.263.225,00
278	683992	LAPAS PEREMPUAN KELAS IIB SIGLI	80.000.000,00
279	684002	LAPAS KELAS IIB PAHUWATO	209.400.000,00
280	684003	Rutan Kelas II B Weda	21.850.000,00
281	684006	KANTOR IMIGRASI KELAS III NON TPI PONOROGO	715.278.020,00
282	686532	KANTOR IMIGRASI KELAS III NON TPI KOTAMOBAGU	302.185.000,00
283	686549	KANTOR IMIGRASI KELAS III NON TPI WAKATOBI	370.150.000,00
284	686553	KANTOR IMIGRASI KELAS III NON TPI BAU BAU	223.905.000,00
285	686574	KANTOR IMIGRASI KELAS III NON TPI PUTUSSIBAU	631.148.848,00
286	097102	DITJEN KEKAYAAN INTELEKTUAL	103.177.473.609,00
287	099297	BALAI HARTA PENINGGALAN JAKARTA	977.552.652,00
288	099298	BALAI HARTA PENINGGALAN SEMARANG	212.617.300,00
289	099299	BALAI HARTA PENINGGALAN SURABAYA	1.515.357.800,00
290	099300	BALAI HARTA PENINGGALAN MEDAN	805.950.000,00
Jumlah			751.364.409.702,00

**Rincian Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin yang membentuk Beban Ekstrakomptabel PM
Menurut daftar satuan kerja per 31 Desember 2021**

No	Kode Satker	Nama Satker	Jumlah
1	108266	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA	26.257.000,00
2	109158	KANTOR IMIGRASI KELAS II BATULICIN	7.028.000,00
3	404309	POLITEKNIK ILMU PEMASYARAKATAN	29.573.500,00
4	404852	LEMBAGA PEMASYARAKATAN PATI	2.200.000,00
5	407081	LEMBAGA PEMASYARAKATAN UJUNG PANDANG	8.985.000,00
6	407958	KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI BANDUNG	7.750.000,00
7	408009	KANTOR IMIGRASI KELAS I KHUSUS TPI SURABAYA	1.375.000,00
8	408052	KANTOR IMIGRASI KELAS II NON TPI PEMATANG SIANTAR	942.000,00
9	408134	KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI JAMBI	25.157.000,00
10	408253	KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI JAYAPURA	28.215.000,00
11	408278	KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI SORONG	8.314.800,00
12	408335	PERWAKILAN IMIGRASI DI HONGKONG	429.702,00
13	408423	KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI PALU	140.104.767,00
14	408485	KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI TEMBILAHAN	16.300.000,00
15	408542	KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI JAKARTA TIMUR	22.990.000,00
16	408618	KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI MANADO	7.128.000,00
17	408649	LEMBAGA PEMASYARAKATAN DOMPU	5.346.000,00
18	408773	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM UJUNG PANDANG	31.790.000,00
19	409020	KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI TAREMPA	7.150.000,00
20	409057	KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI RANAI	17.305.000,00
21	409094	KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI BITUNG	643.300,00
22	409123	KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI MAUMERE	1.600.000,00
23	409169	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAMBI	950.000,00
24	409210	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PALU	2.750.000,00
25	409226	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM MATARAM	79.112.000,00
26	409257	DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM	16.307.011,00
27	409263	DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN	262.870.722,00
28	409272	DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI	12.606.000,00
29	418938	KANTOR IMIGRASI KELAS III NON TPI BIMA	8.162.000,00
30	498418	KANTOR IMIGRASI KELAS II NON TPI MAMUJU	4.254.800,00
31	652283	KANTOR IMIGRASI KELAS I NON TPI SERANG	745.000,00
32	652923	LAPAS TERBUKA KELAS IIB LOMBOK TENGAH	800.000,00
33	652979	LEMBAGA PEMASYARAKATAN NARKOTIKA JAKARTA	1.595.000,00
34	662952	KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI TUAL	33.000.000,00
35	662968	KANTOR IMIGRASI KELAS II NON TPI TOBELO	11.000.000,00
36	664565	KANTOR IMIGRASI KELAS II NON TPI MUARA ENIM	11.060.000,00
37	664661	RUMAH DETENSI IMIGRASI MANADO	11.154.000,00
38	667790	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SULAWESI BARAT	19.959.500,00
39	683682	LAPAS NARKOTIKA KELAS IIA PANGKAL PINANG	9.000.000,00
40	684003	Rutan Kelas II B Weda	5.405.000,00
41	097102	DITJEN KEKAYAAN INTELEKTUAL	76.113.500,00
42	099300	BALAI HARTA PENINGALAN MEDAN	34.000.000,00
Jumlah			997.428.602,00

Rincian Pengembangan Nilai Aset Gedung dan Bangunan
Menurut daftar satuan kerja per 31 Desember 2021

No	Kode Satker	Nama Satker	Jumlah
1	109106	LEMBAGA PEMASYARAKATAN PERMISAN	63.679.000,00
2	109118	RUMAH TAHANAN NEGARA PALEMBANG	688.438.136,00
3	109155	KANTOR IMIGRASI KELAS I KHUSUS NON TPI JAKARTA SELATAN	104.800.000,00
4	352612	LPKA Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara	1.406.560.000,00
5	404233	SEKRETARIAT JENDERAL (PUSAT)	12.180.532.050,00
6	404585	BALAI PEMASYARAKATAN YOGYAKARTA	198.500.000,00
7	404642	LEMBAGA PEMASYARAKATAN SEMARANG	383.816.500,00
8	404673	RUMAH TAHANAN NEGARA SALATIGA	32.012.000,00
9	404852	LEMBAGA PEMASYARAKATAN PATI	199.751.963,00
10	404899	RUMAH TAHANAN NEGARA BLORA	190.368.000,00
11	405007	RUMAH TAHANAN NEGARA BANJARNEGARA	192.270.000,00
12	405163	LAPAS TULUNGAGUNG	89.455.000,00
13	405409	LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN MALANG	30.000.000,00
14	406761	LAPAS KELAS IIA KOTABARU	2.165.127.636,00
15	406859	LAPAS KELAS IIA TENGGARONG	1.808.205.500,00
16	407989	KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI CILACAP	196.547.000,00
17	408190	KANTOR IMIGRASI KELAS II NON TPI SINGKAWANG	279.310.000,00
18	408231	KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI KUPANG	120.000.000,00
19	408432	BALAI HARTA PENINGGALAN UJUNG PANDANG	238.925.000,00
20	408485	KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI TEMBILAHAN	121.600.000,00
21	408602	KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI AMBON	199.992.000,00
22	408624	KANTOR IMIGRASI KELAS I KHUSUS TPI BATAM	172.000.000,00
23	408706	LEMBAGA PEMASYARAKATAN PRIA TANGERANG	300.828.000,00
24	408742	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAWA TENGAH	825.271.650,00
25	408751	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SURABAYA	121.775.500,00
26	408855	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SAMARINDA	611.031.000,00
27	408938	KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI CILEGON	721.960.400,00
28	408981	KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI SIBOLGA	39.100.000,00
29	409114	KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI ATAMBUA	99.759.000,00
30	409151	LEMBAGA PEMASYARAKATAN ANAK PEKANBARU	658.738.000,00
31	409157	BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN HUKUM DAN HAM JAWA TENGAH	367.146.227,00
32	409169	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAMBI	701.877.000,00
33	409257	DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM	5.470.661.483,00
34	409263	DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN	1.136.367.100,00
35	409272	DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI	5.778.289.390,00
36	418338	Lapas Perempuan Kelas IIB Jambi	484.756.000,00
37	418936	KANTOR IMIGRASI KELAS III NON TPI KETAPANG	484.642.089,00
38	648999	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PROPINSI BANTEN	1.483.722.104,00
39	652372	KANTOR IMIGRASI KELAS II NON TPI BLITAR	26.000.000,00
40	662968	KANTOR IMIGRASI KELAS II NON TPI TOBELO	298.278.000,00
41	664572	KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI TAHUNA	89.700.000,00
42	664612	RUMAH DETENSI IMIGRASI JAKARTA	511.100.000,00
43	664629	RUMAH DETENSI IMIGRASI SEMARANG	199.450.000,00
44	664633	RUMAH DETENSI IMIGRASI SURABAYA	198.567.600,00
45	683313	LAPAS KELAS IIB GUNUNG SUGIH	195.291.000,00
46	683462	KANTOR IMIGRASI KELAS III NON TPI KEDIRI	593.851.500,00
47	683622	LAPAS KELAS IIB BANJAR	42.173.000,00
48	683643	LAPAS KELAS IIA BONTANG	431.437.994,00

**Rincian Pengembangan Nilai Aset Gedung dan Bangunan
Menurut daftar satuan kerja per 31 Desember 2021**

No	Kode Satker	Nama Satker	Jumlah
49	684006	KANTOR IMIGRASI KELAS III NON TPI PONOROGO	172.543.000,00
50	099298	BALAI HARTA PENINGGALAN SEMARANG	332.610.725,00
Jumlah			43.438.817.547,00

Rincian Perolehan / Penambahan KDP Gedung dan Bangunan
Menurut daftar satuan kerja per 31 Desember 2021

No	Kode Satker	Nama Satker	Jumlah
1	108266	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA	19.446.000,00
2	352604	LPKA Banda Aceh, Provinsi Aceh	6.740.000,00
3	404322	LEMBAGA PEMASYARAKATAN BANCEUY BANDUNG	5.300.000,00
4	404585	BALAI PEMASYARAKATAN YOGYAKARTA	3.350.000,00
5	405528	LEMBAGA PEMASYARAKATAN LHOK SEUMAWA	170.670.600,00
6	405704	LAPAS KELAS IIA PANCUR BATU	251.476.500,00
7	405766	RUMAH TAHANAN NEGARA KABANJAHE	412.250.850,00
8	406203	LAPAS KELAS IIA BAGAN SIPI-API	5.160.000,00
9	406293	LEMBAGA PEMASYARAKATAN JAMBI	7.000.000,00
10	406689	LEMBAGA PEMASYARAKATAN PALANGKARAYA	35.458.500,00
11	406761	LAPAS KELAS IIA KOTABARU	17.566.073,00
12	406828	LEMBAGA PEMASYARAKATAN BALIKPAPAN	16.858.840,00
13	407035	LAPAS KELAS III LEOK	4.420.000,00
14	407041	LEMBAGA PEMASYARAKATAN LUWUK	271.739.400,00
15	407519	BALAI PEMASYARAKATAN DENPASAR	86.808.700,00
16	407613	LEMBAGA PEMASYARAKATAN MATARAM	139.384.200,00
17	407870	LAPAS KELAS III TEMINABUHAN	7.675.352.870,00
18	407927	LEMBAGA PEMASYARAKATAN CURUP	24.915.000,00
19	408009	KANTOR IMIGRASI KELAS I KHUSUS TPI SURABAYA	86.790.000,00
20	408021	KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI JEMBER	99.220.000,00
21	408190	KANTOR IMIGRASI KELAS II NON TPI SINGKAWANG	32.002.000,00
22	408231	KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI KUPANG	17.500.000,00
23	408278	KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI SORONG	144.124.740,00
24	408432	BALAI HARTA PENINGGALAN UJUNG PANDANG	80.500.000,00
25	408573	KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI BANDA ACEH	26.317.000,00
26	408706	LEMBAGA PEMASYARAKATAN PRIA TANGERANG	159.120.060,00
27	408736	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BANDUNG	99.938.000,00
28	408773	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM UJUNG PANDANG	692.373.020,00
29	408802	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PEKANBARU	237.798.082,00
30	408818	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PALEMBANG	98.010.000,00
31	408824	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM TANJUNG KARANG	40.310.000,00
32	408855	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SAMARINDA	11.553.700,00
33	408861	KANWIL DEPARTEMAN HUKUM DAN HAM MANADO	40.810.000,00
34	408886	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM KUPANG	56.847.700,00
35	408892	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM AMBON	26.776.000,00
36	408906	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAYAPURA	238.942.000,00
37	408938	KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI CILEGON	54.000.000,00
38	409002	KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI KENDARI	119.035.000,00
39	409026	KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI LANGSA	208.865.140,00
40	409063	KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI BENGKULU	15.000.000,00
41	409114	KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI ATAMBUA	45.225.000,00
42	409151	LEMBAGA PEMASYARAKATAN ANAK PEKANBARU	4.765.000,00
43	409159	BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN HUKUM DAN HAM SULAWESI UTARA	238.238.790,00
44	409169	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAMBI	67.262.800,00
45	409190	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PALANGKARAYA	53.486.400,00
46	409201	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM KENDARI	42.245.170,00
47	409226	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM MATARAM	234.600.000,00
48	409241	INSPEKTORAT JENDERAL	90.277.000,00
49	409263	DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN	18.763.000,00
50	418338	Lapas Perempuan Kelas IIB Jambi	38.514.080,00
51	480505	KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI TERNATE	57.147.200,00
52	498398	KANTOR IMIGRASI KELAS II NON TPI MANOKWARI	198.370.000,00

**Rincian Perolehan / Penambahan KDP Gedung dan Bangunan
Menurut daftar satuan kerja per 31 Desember 2021**

No	Kode Satker	Nama Satker	Jumlah
53	626080	LAPAS TERBUKA CIANGIR	39.710.000,00
54	626093	RUMAH PENYIMPANAN BARANG SITAAN NEGARA SURABAYA, KOT SURABAYA JAWA TIMUR	214.917.949,00
55	632055	LAPAS NARKOTIKA KELAS IIB RUMBAI	3.000.000,00
56	648999	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PROPINSI BANTEN	199.248.713,00
57	649018	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PROPINSI GORONTALO	79.840.000,00
58	652323	KANTOR IMIGRASI KELAS II NON TPI PEMALANG	64.850.800,00
59	652340	KANTOR IMIGRASI KELAS II NON TPI WONOSOBO	1.125.000,00
60	652372	KANTOR IMIGRASI KELAS II NON TPI BLITAR	15.895.000,00
61	664572	KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI TAHUNA	97.460.000,00
62	664696	RUMAH DETENSI IMIGRASI KUPANG	53.000.000,00
63	667786	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM KEPULAUAN RIAU	20.273.000,00
64	667790	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SULAWESI BARAT	36.663.198,00
65	683313	LAPAS KELAS IIB GUNUNG SUGIH	385.667.100,00
66	683458	KANTOR IMIGRASI KELAS III NON TPI PAMEKASAN	98.499.500,00
67	099298	BALAI HARTA PENINGGALAN SEMARANG	165.360.153,00
68	099300	BALAI HARTA PENINGGALAN MEDAN	44.800.000,00
Jumlah			14.348.934.828,00

Rincian Pengembangan KDP Gedung dan Bangunan
Menurut daftar satuan kerja per 31 Desember 2021

No	Kode Satker	Nama Satker	Jumlah
1	108266	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA	93.628.644.363,00
2	352604	LPKA Banda Aceh, Provinsi Aceh	3.836.552.131,00
3	404322	LEMBAGA PEMASYARAKATAN BANCEUY BANDUNG	13.847.610.000,00
4	404585	BALAI PEMASYARAKATAN YOGYAKARTA	6.667.146.844,00
5	404642	LEMBAGA PEMASYARAKATAN SEMARANG	26.444.862.586,00
6	405528	LEMBAGA PEMASYARAKATAN LHOK SEUMAWA	604.706.800,00
7	405704	LAPAS KELAS IIA PANCUR BATU	33.785.237.314,00
8	405766	RUMAH TAHANAN NEGARA KABANJAHE	25.161.652.150,00
9	406203	LAPAS KELAS IIA BAGAN SIPI-API	9.763.518.658,00
10	406293	LEMBAGA PEMASYARAKATAN JAMBI	544.563.250,00
11	406689	LEMBAGA PEMASYARAKATAN PALANGKARAYA	1.132.177.295,00
12	406761	LAPAS KELAS IIA KOTABARU	650.797.533,00
13	406828	LEMBAGA PEMASYARAKATAN BALIKPAPAN	11.085.123.651,00
14	407004	RUMAH TAHANAN NEGARA DONGGALA	30.678.211.000,00
15	407035	LAPAS KELAS III LEOK	2.890.704.500,00
16	407041	LEMBAGA PEMASYARAKATAN LUWUK	624.849.300,00
17	407519	BALAI PEMASYARAKATAN DENPASAR	6.347.299.649,00
18	407613	LEMBAGA PEMASYARAKATAN MATARAM	25.314.354.700,00
19	407638	RUMAH TAHANAN NEGARA PRAYA	268.354.000,00
20	407870	LAPAS KELAS III TEMINABUHAN	430.615.000,00
21	407927	LEMBAGA PEMASYARAKATAN CURUP	79.528.000,00
22	407973	KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI SEMARANG	1.710.853.495,00
23	408009	KANTOR IMIGRASI KELAS I KHUSUS TPI SURABAYA	913.708.101,00
24	408021	KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI JEMBER	4.560.052.620,00
25	408190	KANTOR IMIGRASI KELAS II NON TPI SINGKAWANG	601.474.406,00
26	408231	KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI KUPANG	229.847.000,00
27	408278	KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI SORONG	1.102.087.893,00
28	408423	KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI PALU	26.034.136.175,00
29	408432	BALAI HARTA PENINGGALAN UJUNG PANDANG	666.395.067,00
30	408573	KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI BANDA ACEH	351.005.000,00
31	408706	LEMBAGA PEMASYARAKATAN PRIA TANGERANG	359.816.200,00
32	408736	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BANDUNG	5.154.074.000,00
33	408773	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM UJUNG PANDANG	2.471.316.078,00
34	408802	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PEKANBARU	2.453.455.957,00
35	408818	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PALEMBANG	6.019.348.726,00
36	408824	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM TANJUNG KARANG	6.742.088.851,00
37	408855	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SAMARINDA	679.377.811,00
38	408861	KANWIL DEPARTEMAN HUKUM DAN HAM MANADO	444.241.038,00
39	408886	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM KUPANG	3.030.486.347,00
40	408892	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM AMBON	44.407.417.545,00
41	408906	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAYAPURA	45.000.000,00
42	408938	KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI CILEGON	368.046.500,00
43	409002	KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI KENDARI	6.265.000,00
44	409026	KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI LANGSA	209.826.489,00
45	409063	KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI BENGKULU	418.826.000,00
46	409088	KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI NUNUKAN	1.385.768.500,00
47	409114	KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI ATAMBUA	224.780.000,00
48	409151	LEMBAGA PEMASYARAKATAN ANAK PEKANBARU	315.874.100,00
49	409159	BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN HUKUM DAN HAM SULAWESI UTARA	7.754.225.413,00
50	409169	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAMBI	1.222.686.700,00
51	409190	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PALANGKARAYA	1.275.499.658,00

**Rincian Pengembangan KDP Gedung dan Bangunan
Menurut daftar satuan kerja per 31 Desember 2021**

No	Kode Satker	Nama Satker	Jumlah
52	409201	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM KENDARI	857.225.030,00
53	409226	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM MATARAM	8.070.426.665,00
54	409241	INSPEKTORAT JENDERAL	613.249.000,00
55	409263	DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN	299.457.169.359,00
56	418338	Lapas Perempuan Kelas IIB Jambi	5.676.928.005,00
57	418339	Lapas Perempuan Kelas IIB Padang	23.440.808.041,00
58	418938	KANTOR IMIGRASI KELAS III NON TPI BIMA	5.767.744.114,00
59	480505	KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI TERNATE	444.450.901,00
60	498398	KANTOR IMIGRASI KELAS II NON TPI MANOKWARI	2.145.413.320,00
61	613524	KANTOR IMIGRASI KELAS I NON TPI TANGERANG	785.848.000,00
62	626080	LAPAS TERBUKA CIANGIR	593.221.300,00
63	626093	RUMAH PENYIMPANAN BARANG SITAAN NEGARA SURABAYA, KOT. SURABAYA, JAWA TIMUR	464.403.847,00
64	632055	LAPAS NARKOTIKA KELAS IIB RUMBAI	15.324.711.155,00
65	648999	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PROPINSI BANTEN	51.956.350,00
66	649018	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PROPINSI GORONTALO	1.789.759.750,00
67	652323	KANTOR IMIGRASI KELAS II NON TPI PEMALANG	3.413.200,00
68	652340	KANTOR IMIGRASI KELAS II NON TPI WONOSOBO	2.061.117.900,00
69	652372	KANTOR IMIGRASI KELAS II NON TPI BLITAR	404.794.512,00
70	664572	KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI TAHUNA	1.478.471.911,00
71	664696	RUMAH DETENSI IMIGRASI KUPANG	530.083.721,00
72	667786	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM KEPULAUAN RIAU	965.865.200,00
73	667790	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SULAWESI BARAT	2.300.878.706,00
74	683313	LAPAS KELAS IIB GUNUNG SUGIH	4.473.973.900,00
75	683458	KANTOR IMIGRASI KELAS III NON TPI PAMEKASAN	1.210.789.223,00
76	683533	KANTOR IMIGRASI KELAS III NON TPI TAKENGON	1.298.484.864,00
77	099298	BALAI HARTA PENINGGALAN SEMARANG	204.877.152,00
78	099300	BALAI HARTA PENINGGALAN MEDAN	492.841.619,00
Jumlah			795.853.396.139,00

Rincian Pembelian Aset Lain-lain
Menurut daftar satuan kerja per 31 Desember 2021

No	Kode Satker	Nama Satker	Jumlah
1	108266	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA	163.500.000,00
2	109636	RUMAH TAHANAN NEGARA YOGYAKARTA	2.000.000,00
3	404233	SEKRETARIAT JENDERAL (PUSAT)	192.417.500,00
4	404309	POLITEKNIK ILMU PEMASYARAKATAN	386.000.000,00
5	404585	BALAI PEMASYARAKATAN YOGYAKARTA	866.519.000,00
6	406859	LAPAS KELAS IIA TENGGARONG	29.971.200,00
7	408046	KANTOR IMIGRASI KELAS I KHUSUS TPI MEDAN	120.718.000,00
8	408627	KANTOR IMIGRASI KELAS III NON TPI CIANJUR	30.000.000,00
9	408727	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAKARTA RAYA	4.413.000,00
10	408737	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BANDUNG	7.500.000,00
11	408749	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAWA TENGAH	19.950.000,00
12	408759	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SURABAYA	3.600.000,00
13	408769	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SUMATERA UTARA DI MEDAN	9.998.000,00
14	408799	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PADANG	2.500.000,00
15	408829	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM TANJUNG KARANG	3.000.000,00
16	408839	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PONTIANAK	8.000.000,00
17	408848	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BANJARMASIN	8.998.000,00
18	408859	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SAMARINDA	7.500.000,00
19	409155	BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN HUKUM DAN HAM KEPULAUAN RIAU	40.000.000,00
20	409157	BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN HUKUM DAN HAM JAWA TENGAH	29.500.000,00
21	409180	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM YOGYAKARTA	35.000.000,00
22	409227	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM MATARAM	18.734.000,00
23	409241	INSPEKTORAT JENDERAL	198.997.000,00
24	409257	DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM	5.652.849.145,00
25	409263	DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN	4.132.892.500,00
26	409272	DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI	22.791.964.019,00
27	409288	BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL	49.927.557,00
28	532413	PUSAT DATA DAN TEKNOLOGI INFORMASI	3.091.000.000,00
29	649008	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PROPINSI BANGKA BELITUNG	5.000.000,00
30	652979	LEMBAGA PEMASYARAKATAN NARKOTIKA JAKARTA	6.924.500,00
31	664701	RUMAH DETENSI IMIGRASI JAYAPURA	18.700.000,00
32	667779	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PAPUA BARAT	10.000.000,00
33	667789	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM KEPULAUAN RIAU	10.324.500,00
34	667799	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SULAWESI BARAT	6.000.000,00
35	097102	DITJEN KEKAYAAN INTELEKTUAL	28.908.465.040,00
36	099297	BALAI HARTA PENINGGALAN JAKARTA	60.225.000,00
Jumlah			66.933.087.961,00

RINCIAN REALISASI BELANJA DALAM RANGKA PENANGANAN PANDEMI COVID-19 YANG TIDAK SESUAI DENGAN PERUNTUKANNYA
SEMESTER II TA 2021

NO	KODE SATKER	NAMA SATKER	KODE AKUN BELANJA	NO SP2D	JUMLAH	RINCIAN BELANJA	KETERANGAN
a	b	c	d	e	f	g	h
sudah jelas	sudah jelas	sudah jelas	diisi dengan kode akun belanja yang telah terbit SP2D dengan menggunakan akun khusus penanganan pandemi COVID-19 ataupun tidak	diisi dengan nomor SP2D atas belanja di kolom d	diisi dengan nilai belanja yang ada di SP2D	diisi dengan nama kegiatan atau jenis barang yang dibelanjakan	diisi dengan alasan penggunaan akun belanja yang tidak sesuai dalam rangka penanganan pandemi COVID-19
1	409181	Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM D.I.Yogyakarta	521131	210301701000436	7.050.000	Honor tim penyemprot 3 org 10 kali kegiatan transport tim penyemprot 3 org 10 kali kegiatan	Tidak dilakukan ralat SPM
2	409057	Kanin Ranai	522192	210091303010616	9.915.000	vitamin masker dan handsanitizer	
3	683111	Kantor Imigrasi Non TPI Kelas III Kotabumi	522192	211161301004642	12.604.130	Vitamin	
4	408953	Kantor Imigrasi Kelas I TPI Tanjung Perak	522192	211351303000463	73.900	cairan fogging disinfektan	
				211351303000717	459.900	cairan fogging disinfektan	
				211351303001442	453.000	cairan fogging disinfektan	
				211351303001760	316.000	cairan fogging disinfektan	
5	408913	KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI TANJUNG PRIOK	522192	211391301045233	79.695	Masker Hand Sanitizer dll	
6	664629	Rumah Detensi Imigrasi Semarang	522192		750.000	Biaya Kebutuhan Isoman Pegawai yang Positif	
7	407794	Lembaga Pemasyarakatan Abepura	521131	210631701000140	800.000	Jasa Rapid Tes	
			521131	210631301007830	800.000	Jasa Rapid Tes	
8	108266	BPSDM Hukum dan HAM	521131	211391302008567	41.820.500	SWAB DAN PAKET DATA	
				211391302013271	25.542.850	SWAB DAN PAKET DATA	
				211391303016565	97.230.000	SWAB ANTIGEN	
				211391302024809	7.672.500	BIAYA SWAB ANTIGEN	
				211391701001255	112.560.000	BIAYA SWAB ANTIGEN	
				211391302025367	1.659.996	BIAYA SWAB ANTIGEN	
				211391302027338	9.753.215	BIAYA SWAB ANTIGEN	
				211391302029795	9.716.000	BIAYA SWAB PCR	
				211391701001866	495.000.000	BIAYA SWAB PCR (550 ORANG)	
				211391303024472	44.850.000	BIAYA SWAB ANTIGEN	
				211391302031296	4.000.000	BIAYA SWAB ANTIGEN	
				211391302031291	7.200.000	BIAYA SWAB ANTIGEN	
				211391302031292	20.000.000	BIAYA SWAB ANTIGEN	
				211391302031293	9.720.000	BIAYA SWAB ANTIGEN	
				211391302031294	900.000	BIAYA SWAB ANTIGEN	
				211391302031341	2.117.500	BIAYA SWAB ANTIGEN	
				211391302032186	25.303.500	BIAYA SWAB ANTIGEN	
				211391302034992	56.857.429	BIAYA SWAB PCR	
				211391302036703	41.600.000	BIAYA SWAB ANTIGEN	
				211391303028651	2.625.000	PEMERIKSAAN GENOSE SARS	
				211391302036918	3.960.000	BIAYA SWAB ANTIGEN	
				211391302036919	6.930.000	BIAYA SWAB ANTIGEN	
				211391302040637	1.485.000	BIAYA SWAB ANTIGEN	
				211391302041522	1.600.000	SWAB PCR pegawai	
				211391302041523	3.960.000	SWAB PCR pegawai	
				211391302041543	9.207.000	BIAYA SWAB ANTIGEN	
				211391302041544	297.000	BIAYA SWAB ANTIGEN	
				211391302041542	2.079.000	BIAYA SWAB ANTIGEN	
				211391302041605	3.861.000	BIAYA SWAB ANTIGEN	
				211391302041606	8.217.000	BIAYA SWAB ANTIGEN	
				211391302041607	8.118.000	BIAYA SWAB ANTIGEN	

RINCIAN REALISASI BELANJA DALAM RANGKA PENANGANAN PANDEMI COVID-19 YANG TIDAK SESUAI DENGAN PERUNTUKANNYA
SEMESTER II TA 2021

NO	KODE SATKER	NAMA SATKER	KODE AKUN BELANJA	NO SP2D	JUMLAH	RINCIAN BELANJA	KETERANGAN
a	b	c	d	e	f	g	h
sudah jelas	sudah jelas	sudah jelas	diisi dengan kode akun belanja yang telah terbit SP2D dengan menggunakan akun khusus penanganan pandemi COVID-19 ataupun tidak	diisi dengan nomor SP2D atas belanja di kolom d	diisi dengan nilai belanja yang ada di SP2D	diisi dengan nama kegiatan atau jenis barang yang dibelanjakan	diisi dengan alasan penggunaan akun belanja yang tidak sesuai dalam rangka penanganan pandemi COVID-19
				211391302043281	3.795.000	SWAB PCR pegawai BPSDM	
				211391302047626	99.000	Test Swab Antigen SARS Covid sebanyak 1 orang	
				211391302047625	891.000	Test Swab Antigen SARS Covid sebanyak 9 orang	
				211391302047624	891.000	Test Swab Antigen SARS Covid sebanyak 9 orang	
				211391302045023	450.000	SWAB PCR pegawai	
				211391302047240	99.000	SWAB antigen pegawai	
				211391701004319	56.628.000	Biaya tes swab antigen	
				211391302056273	99.000	Biaya tes swab antigen	
				211391302056274	9.504.000	Biaya tes swab antigen	
				211391302056275	9.801.000	Biaya tes swab antigen	
				211391302056276	10.098.000	Biaya tes swab antigen	
				211391302056277	9.801.000	Biaya tes swab antigen	
				211391302056272	9.603.000	Biaya tes swab antigen	
				211391302056268	8.415.000	Biaya tes swab antigen	
				211391302056269	8.415.000	Biaya tes swab antigen	
				211391302056270	9.801.000	Biaya tes swab antigen	
				211391302056271	9.405.000	Biaya tes swab antigen	
				211391302056264	10.197.000	Biaya tes swab antigen	
				211391302056265	9.504.000	Biaya tes swab antigen	
				211391302056266	9.108.000	Biaya tes swab antigen	
				211391302056267	4.455.000	Biaya tes swab antigen	
				211391302056260	9.504.000	Biaya tes swab antigen	
				211391302056261	9.801.000	Biaya tes swab antigen	
				211391302056262	8.901.000	Biaya tes swab antigen	
				211391701006577	90.000	Biaya tes swab antigen	
				211391701007363	15.021.000	BIAYA SWAB ANTIGEN	
			521131	211391302024396	42.000.000	Paket data dan Komunikasi	
				211391302034532	1.215.000	Paket data dan Komunikasi	
				211391302038037	555.000	Paket data dan Komunikasi	
				211391302050827	9.702.000	Paket data dan Komunikasi	
				211391302041893	3.590.000	Paket data dan Komunikasi	
				211391302048105	11.286.000	Paket data dan Komunikasi	
				211391302048688	14.790.000	Paket data dan Komunikasi	
				211391302053222	2.748.000	Paket data dan Komunikasi	
				211391701006579	2.300.000	Paket data dan Komunikasi	
				211391303012593	14.700.000	Paket data dan Komunikasi	
				211391303012594	1.680.000	Paket data dan Komunikasi	
				211391303012591	8.610.000	Paket data dan Komunikasi	
				211391303012592	5.250.000	Paket data dan Komunikasi	
				211391302020156	2.530.000	Paket data dan Komunikasi	
				211391302024809	16.488.000	Paket data dan Komunikasi	
				211391303019008	22.040.000	Paket data dan Komunikasi	
			522192	211391302027338	2.675.000	Paket data dan Komunikasi	
8	108266	BPSDM Hukum dan HAM					Tidak dilakukan ralat SPM

RINCIAN REALISASI BELANJA DALAM RANGKA PENANGANAN PANDEMI COVID-19 YANG TIDAK SESUAI DENGAN PERUNTUKANNYA
SEMESTER II TA 2021

NO	KODE SATKER	NAMA SATKER	KODE AKUN BELANJA	NO SP2D	JUMLAH	RINCIAN BELANJA	KETERANGAN
a	b	c	d	e	f	g	h
sudah jelas	sudah jelas	sudah jelas	diisi dengan kode akun belanja yang telah terbit SP2D dengan menggunakan akun khusus penanganan pandemi COVID-19 ataupun tidak	diisi dengan nomor SP2D atas belanja di kolom d	diisi dengan nilai belanja yang ada di SP2D	diisi dengan nama kegiatan atau jenis barang yang dibelanjakan	diisi dengan alasan penggunaan akun belanja yang tidak sesuai dalam rangka penanganan pandemi COVID-19
				211391302034992	190.000	Paket data dan Komunikasi	
				211391302038561	190.000	Paket data dan Komunikasi	
				211391302059045	4.158.000	Paket data dan Komunikasi	
				211391701007363	201.935.000	Paket data dan Komunikasi	
9	408738	Kanwil Jawa Barat	521241	210221701000218	1.800.000	Swab test antigen perjadin 12 orang	
10	409204	Kanwil Sulawesi Tenggara	521131	210601303006301	900.000	Biaya PCR sebesar 900.000 masker dan vitamin sebesar 383000	
			521241	210401301004016	330.000	Rapid Test WBP a.n Maria Goreti Ili Ros	
			521131	210401301004017	460.000	Rapid Test Pegawai a.n Beny J. Kara	
			521241	210401301004605	550.000	Rapid Test pegawai a.n Ridho Pratama	
			521131	210401301005234	199.000	Rapid Test Pegawai a.n Antonius Semuki	
						Rapid Test Pegawai a.n Ridho Pratama	
			521241	210401301005916	210.000	Rapid Test WBP a.n Madina Rasyid	
						Rapid Test WBP a.n Paulus Beni	
						Rapid Test pegawai a.n Ridho Pratama	
						Rapid Test Pegawai a.n Antonius Semuki	
						Rapid Test pegawai a.n Ridho Pratama	
						Rapid Test pegawai a.n Antonius Semuki	
			521131	210401301005917		Rapid Test pegawai a.n Thesa D. Kase	
					590.000	Rapid Test pegawai a.n Maria I.P. Nggara	
					450.000	Rapid Test pegawai a.n Ni Made S. Candra	
					400.000	Rapid Test pegawai a.n Joanes Ch. Pati	
						Rapid Test pegawai a.n Milson D. Adu	
			521241		400.000	Rapid Test 4 orang WBP a.n Albertinus Tinus Lirong Blasius Bai Gervasius Rio Stefanus Leru	
			521241		300.000	Rapid Test 3 orang WBP a.n Yoseph Grandisius Hermanus roja Hayon Amandus Dusner	
11	407772	RUMAH TAHANAN NEGARA MAUMERE					Tidak dilakukan ralat SPM

**Rincian Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak Berdasarkan Satuan Kerja
Per 31 Desember 2021**

No	Nama Satker	Debitur	Saldo	Kualitas	Keterangan	Tahun Pengakuan
Sekretariat Jenderal						
1	SEKRETARIAT JENDERAL (PUSAT)	PT Paramitha	7.460.595.200,00	Lancar	Piutang PT Paramitha atas Penyewaan Lahan untuk Mall Balekota dengan rincian sebagai berikut: - Denda Tahun 2006 dan 2007 Rp 438.602.200 - Denda Tahun 2009 dan 2010 Rp 20.062.000 - Denda Tahun 2013 Rp 10.632.800 - Denda Tahun 2016 Rp 509.376.000 - Sewa Tahun 2018 Rp 1.040.600.000 - Denda Tahun 2018 Rp 595.537.800 - Denda Tahun 2019 Rp 347.391.600 - Sewa Tahun 2020 Rp 1.765.200.000 - Denda Tahun 2020 Rp 642.532.800 - Sewa Tahun 2021 Rp 1.827.500.000 - Denda Tahun 2021 Rp 263.160.000 masa sewa dari tahun 2006 s.d 2021	Tahun 2006 s.d 2021
2	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BANDUNG	PT Griya Cemerlang Sejahtera	188.114.789,00	Lancar	Kelebihan pembayaran belanja modal berupa pekerjaan rehabilitas gedung kantor dan renovasi instalasi listrik dan jaringan	2021
3	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM AMBON	PT. Duta karya Prathamaunggul	526.939.543,00	Lancar	Pengembalian belanja modal gedung dan bangunan atas temuan BPK TA 2021	2021
Total			8.175.649.532,00			
Ditjen AHU						
1	DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM	Piutang PNBPN Pesan Nama	259.359.235,00	Macet	Piutang yang berasal dari temuan BPK atas kewajiban PNBPN pesan nama perseroan yang berasal dari 155 Notaris	2016
2	DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM	Pertamina Retail	428.089.868,00	Lancar	Piutang PNBPN atas Transaksi Pengembalian Belanja Barang berupa Voucher RFID yang belum digunakan pada TA 2021	2021
Total			687.449.103,00			
Ditjen Pemasyarakatan						
1	LAPAS NARKOTIKA KELAS IIB RUMBAI	CV.Cahaya Utama	312.200.000,00	Lancar	Kelebihan Pembayaran Bama Bulan Desember 2021	2021
2	LEMBAGA PEMASYARAKATAN PERMISAN	PT. Sinar Alam Persada Abadi	10.346.605,00	Lancar	Lebih bayar Belanja Bama Desember 2021	2021
3	LEMBAGA PEMASYARAKATAN BESI	PT. Sinar Alam Persada Abadi	5.980.720,00	Lancar	Lebih bayar Belanja Bama Desember 2021	2021

4	LEMBAGA PEMASYARAKATAN KEMBANG KUNING	PT.SINAR PANCARAN	7.492.568,00	Lancar	Lebih bayar Belanja Bama Desember 2021	2021
5	RUMAH TAHANAN NEGARA PEKALONGAN	PT. SUMBER REJEKI BARU	2.342.760,00	Lancar	Lebih bayar Belanja Bama Desember 2021	2021
6	RUMAH TAHANAN NEGARA PALEMBANG	CV. LEMATANG INDAH	226.597.044,00	Lancar	Kelebihan Pembayaran Bama Tahun 2020	2020
7	LAPAS ARGAMAKMUR	PT Bintang Pancur	45.824.000,00	Lancar	Kelebihan pembayaran bahan makanan Tahun Anggaran 2021 yang sudah disetorkan ke kas negara pada Bulan Januari Tahun Anggaran 2022	2021
8	RUMAH TAHANAN NEGARA YOGYAKARTA	CV. Mitra Sejahtera	5.172.900,00	Lancar	Sisa BAMA 2021	2021
9	LPKA Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah	CV. SETIA	9.985.982,00	Lancar	Pengembalian belanja BAMA napi/tahanan bulan Desember 2021	2021
10	LPKA Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara	CV Pelangi	1.241.779,00	Lancar	Kelebihan Belanja Pengadaan BAMA Narapidana/Tahanan TA 2021	2021
11	LEMBAGA PEMASYARAKATAN CIPINANG	SAHABAT	48.153.431,00	Lancar	Piutang Lainnya atas kelebihan pembayaran BAMA bulan Desember 2021	2021
12	RUTAN KELAS I PONDOK BAMBU	CV NIAGA ABADI SEJAHTERA	25.666.633,00	Lancar	Piutang Lainnya atas kelebihan pembayaran BAMA bulan Desember 2021	2021
13	LAPAS SUMEDANG	CV Mulus Rahayu	2.722.880,00	Lancar	Kelebihan Pembayaran Belanja Bahan Makanan (BAMA) 2021	2021
14	LAPAS MAJALENGKA	CV Daya Teknik	1.706.713,00	Lancar	Kelebihan Pembayaran Belanja Bahan Makanan (BAMA) 2021	2021
15	LEMBAGA PEMASYARAKATAN BOGOR	CV Berkah Indopangan	22.661,00	Lancar	Kelebihan Pembayaran Bama TA. 2021	2021
16	LAPAS PURWAKARTA	PT. Birawa Mutiara Mas	517.386,00	Lancar	Kelebihan Pembayaran Belanja Bahan Makanan (BAMA) 2021	2021
17	LEMBAGA PEMASYARAKATAN YOGYAKARTA	CV Sampurno	1.122.600,00	Lancar	Sisa BAMA 2021	2021
18	RUMAH TAHANAN NEGARA WATES	CV. Budi Utama Sarana Mulya	1.985.000,00	Lancar	Sisa BAMA 2021	2021
19	RUMAH TAHANAN NEGARA WONOSARI	CV Eka Bersaudara	3.814.000,00	Lancar	Sisa BAMA 2021	2021
20	RUMAH TAHANAN NEGARA DEMAK	CV. SUMBER REJEKI	7.614.498,00	Lancar	Lebih bayar Belanja Bama Desember 2021	2021
21	RUMAH TAHANAN NEGARA PURWOREJO	CV. MITRA SEJAHTERA	108.105,00	Lancar	Lebih bayar Belanja Bama Desember 2021	2021
22	LAPAS KLATEN	CV. SUMBER REJEKI	1.614.507,00	Lancar	Lebih bayar Belanja Bama Desember 2021	2021

23	RUMAH TAHANAN NEGARA BANJARNEGARA	CV. MITRA SEJAHTERA	602.286,00	Lancar	Lebih bayar Belanja Bama Desember 2021	2021
24	LAPAS TUBAN	CV PELITA NUSANTARA	4.030,00	Lancar	Kelebihan pembayaran bama	2021
25	LAPAS BONDOWOSO	Bama	1.977.063,00	Lancar	Kelebihan pembayaran bama	2021
26	LEMBAGA PEMASYARAKATAN BANDA ACEH	CV. SIMPANG PENJARA	9.989.831,00	Lancar	Piutang atas kelebihan pembayaran BAMA bulan Desember TA 2021	2021
27	RUMAH TAHANAN NEGARA TAKENGON	CV. BUMI DEWANTARA	596.322,00	Lancar	Piutang atas kelebihan pembayaran BAMA bulan Desember TA 2021	2021
28	LEMBAGA PEMASYARAKATAN KUALA SIMPANG	CV. AMIRO	32.527.657,00	Lancar	Piutang atas kelebihan pembayaran BAMA bulan Desember TA 2021	2021
29	LEMBAGA PEMASYARAKATAN KUTACANE	CV. BUMI DEWANTARA	704.546,00	Lancar	Piutang atas kelebihan pembayaran BAMA bulan Desember TA 2021	2021
30	LAPAS KELAS IIB BLANGKEJEREN	CV. PUTROE BEUTONG	1.144.943,00	Lancar	Piutang atas kelebihan pembayaran BAMA bulan Desember TA 2021	2021
31	RUMAH TAHANAN NEGARA TANJUNG PURA	PT. Indra Bangun	7.630.968,00	Lancar	Kelebihan Pembayaran BAMA	2021
32	LEMBAGA PEMASYARAKATAN LABUHAN RUKU	CV. Graha Lestari	5.173.761,00	Lancar	Kelebihan Pembayaran BAMA	2021
33	LEMBAGA PEMASYARAKATAN RANTAU PRAPAT	PT. Indra Bangun	16.215.690,00	Lancar	Kelebihan Pembayaran BAMA	2021
34	LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEKANBARU	LAPAS KELAS IIA PEKANBARU	25.029.854,00	Lancar	Pengembalian belanja BAMA TA 2021	2021
35	LAPAS KELAS IIA BAGAN SIPI- API	CV. MALINDO	11.722.636,00	Lancar	Kelebihan Pembayaran bama di 2021	2021
36	LAPAS KELAS IIB SELATPANJANG	CV. TAUFIK ANAK NEGERI	2.422.072,00	Lancar	Kelebihan bayar belanja bahan makanan Desember 2021	2021
37	LEMBAGA PEMASYARAKATAN TANJUNG PINANG	CV. Pelangi Pagi	3.284.661,00	Lancar	Piutang dari Kelebihan Pembayaran Pengadaan Bahan Makanan Warga Binaan Pemasyarakatan Tahun Anggaran 2021	2021
38	LEMBAGA PEMASYARAKATAN JAMBI	PT BUANA PELANGI MULIA	47.663.500,00	Lancar	Kelebihan Pembayaran BAMA 2021	2021
39	LAPAS BANGKO	CV. NAKHA CREATIVE GROUP	6.530.661,00	Lancar	Kelebihan Belanja BAMA TAYL	2021
40	LEMBAGA PEMASYARAKATAN KUALA TUNGKAL	CV. BUMI JAMBI INDONESIA	924.754,00	Lancar	Piutang Penerimaan PNBPN berupa Pengembalian Kelebihan Belanja BAMA TA 2021	2021

41	LEMBAGA PEMASYARAKATAN LAHAT	CV. LEMATANG INDA	17.717.496,00	Lancar	Kelebihan Pembayaran Bama Tahun 2021	2021
42	LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK PALEMBANG	CV.AMMAN	6.144.836,00	Lancar	Kelebihan Pembayaran Bama Tahun 2021	2021
43	LEMBAGA PEMASYARAKATAN PONTIANAK	CV. DWI WARNA	1.984.130,00	Lancar	Pengembalian kelebihan pembayaran belanja BAMA 2021	2021
44	RUMAH TAHANAN NEGARA SANGGAU	CV Telaga Biru	6.526.987,00	Lancar	Pengembalian kelebihan pembayaran belanja BAMA 2021	2021
45	LEMBAGA PEMASYARAKATAN SINTANG	CV. RIAU KARYA	4.902.007,00	Lancar	Kelebihan bayar bahan makanan tahun 2021	2021
46	LEMBAGA PEMASYARAKATAN PALANGKARAYA	CV. SETIA	66.013.543,00	Lancar	Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja BAMA TA 2021 (Piutang Lainnya)	2021
47	RUMAH TAHANAN NEGARA KUALA KAPUAS	CV. DANISSA BERSAUDARA	12.460.774,00	Lancar	Pengembalian Belanja BAMA Bulan Desember 2021	2021
48	LAPAS SAMPIT	CV. KARYA PERDANA UTAMA	11.857.043,00	Lancar	Piutang kelebihan pembayaran pengadaan bahan makanan narapidana/tahanan bulan desember 2021	2021
49	LAPAS KELAS IIA TENGGARONG	CV. Lancar Makmur	27.778.997,00	Lancar	Kelebihan pembayaran pengadaan bahan makanan	2021
50	LEMBAGA PEMASYARAKATAN TARAKAN	CV. Adil	33.346.634,00	Lancar	Kelebihan pembayaran bama TA 2021	2021
51	LEMBAGA PEMASYARAKATAN GORONTALO	CV. Noorsaniah	9.377.506,00	Lancar	karena batas pengajuan LS Kontraktual tanggal 22 Desember 2021 jadi sisa kelebihan pembayarannya menjadi piutang	2021
52	RUMAH TAHANAN NEGARA PANGKAJENE	CV SARTIKA UTAMA	3.644.663,00	Lancar	Kelebihan pembayaran Bahan Makanan NAPI/Tahanan bulan Desember 2021	3644663
53	RUMAH TAHANAN NEGARA JENEPONTO	Jaenuddin (CV. Wulasi Jaya)	827.187,00	Lancar	Kelebihan Pembayar Bama Tahun 2021	2021
54	RUMAH TAHANAN NEGARA SINJAI	CV. WULASI JAYA	9.548.448,00	Lancar	Adanya kelebihan pembayaran bama tahun 2021	2021
55	RUMAH TAHANAN NEGARA ENREKANG	CV.TIGA BINTANG	1.853.312,00	Lancar	PIUTANG BAMA	2021
56	LEMBAGA PEMASYARAKATAN WATAMPONE	CV SARTIKA UTAMA	30.554.992,00	Lancar	Kelebihan pembayaran Bahan Makanan WBP	2021
57	LEMBAGA PEMASYARAKATAN BAU-BAU	CV. WOLIO GUNDU-GUNDU	2.143.336,00	Lancar	Kelebihan Belanja Pengadaan BAMA Narapidana/Tahanan TA 2021	2021

58	LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS IIA KEROBOKAN	Made Bayu Pranata	1.579.618,00	Lancar	Pengembalian Bama 2021	2022
59	RUMAH TAHANAN NEGARA GIANJAR	Rutan Gianjar	3.074.847,00	Lancar	Pengembalian Bama 2021	2022
60	RUMAH TAHANAN NEGARA RABA/BIMA	CV. Yuliawan Hadi	1.137.823,00	Lancar	Kelebihan bayar bama tahun 2021	2021
61	LEMBAGA PEMASYARAKATAN KUPANG	CV. JAYA SANTOSA	10.574.569,00	Lancar	Piutang kelebihan Pembayaran BAMA TA 2021	2021
62	LAPAS KELAS III BAA	CV. MIZPA	2.790.279,00	Lancar	Piutang kelebihan Pembayaran BAMA TA 2021	2021
63	RUMAH TAHANAN NEGARA MAUMERE	CV. Surya Abadi	1.726.565,00	Lancar	Piutang kelebihan Pembayaran BAMA TA 2021	2021
64	RUMAH TAHANAN NEGARA LARANTUKA	CV. Surya Abadi	7.852.449,00	Lancar	Piutang kelebihan Pembayaran BAMA TA 2021	2021
65	RUMAH TAHANAN NEGARA MANNA	Sumber Makmur	6.469.022,00	Lancar	Kelebihan pembayaran bahan makanan Tahun Anggaran 2021 yang sudah disetorkan ke kas negara pada Bulan Januari Tahun Anggaran 2022	2021
66	RUMAH TAHANAN NEGARA DUMAI	CV. Cahaya Utama	905.573,00	Lancar	Kelebihan bayar belanja bahan makanan Desember 2021	2021
67	LEMBAGA PEMASYARAKATAN KOTA AGUNG	CV. Way gelang	6.161.000,00		Lebih bayar bama 2021	2021
68	LEMBAGA PEMASYARAKATAN KALIANDA	CV. Kisam Jaya	16.549.000,00	Lancar	Kelebihan Pembayaran BAMA 26-31 Desember Tahun 2021 yang disetorkan pada 2022	2021
69	LEMBAGA PEMASYARAKATAN ANAK KUTOARJO	CV Sapto Argo	1.805.374,00	Lancar	Lebih bayar Belanja Bama Desember 2021	2021
70	LEMBAGA PEMASYARAKATAN PRIA TANGERANG	CV. Berkah Indopangan	10.412.749,00	Lancar	Kelebihan Pembayaran BAMA 2021	2021
71	LEMBAGA PEMASYARAKATAN ANAK PEKANBARU	CV. Kirana Reformasi	427.629,00	Lancar	Kelebihan bayar belanja bahan makanan Desember 2021	2021
72	Lapas Perempuan Kelas IIB Batam	CV. ARSINDO SEMESTA	17.949.267,00	Lancar	Piutang dari Kelebihan Pembayaran Pengadaan Bahan Makanan Warga Binaan Pemasyarakatan Tahun Anggaran 2021	2021
73	LPKA JAKARTA, PROVINSI DKI JAKARTA	PT. Dhuha Utama Abadi	2.004.000,00	Lancar	Piutang Lainnya atas kelebihan pembayaran BAMA bulan Desember 2021	2021
74	LPKA JOGJAKARTA, PROVINSI D.I YOGYAKARTA	CV. Eka Bersaudara	4.738.000,00	Lancar	Sisa BAMA 2021	2021
75	RUMAH TAHANAN NEGARA CIPINANG	CV Afatar Utama	5.473.143,00	Lancar	Piutang kelebihan pembayaran bama 2021	2021

76	LEMBAGA PEMASYARAKATAN SALEMBA	CV. SEJAHTERA ABADI	42.672.675,00	Lancar	Piutang Lainnya atas kelebihan pembayaran BAMA bulan Desember 2021	2021
77	LEMBAGA PEMASYARAKATAN SLAWI	CV. CEMERLANG JAYA	2.697.396,00	Lancar	Lebih bayar Belanja Bama Desember 2021	2021
78	LEMBAGA PEMASYARAKATAN BOALEMO	CV. Pena Anugrah Mandiri	770.882,00	Lancar	Kelebihan Pembayaran Bahan Makanan Tahun 2021	2021
79	RUMAH TAHANAN NEGARA BATAM	CV. ROSADIA PETAHO	53.074.862,00	Lancar	Piutang dari Kelebihan Pembayaran Pengadaan Bahan Makanan Warga Binaan Pemasyarakatan Tahun Anggaran 2021	2021
80	LAPAS NARKOTIKA KELAS IIB RUMBAI	CV.Cahaya Utama	1.289.437,00	Lancar	Kelebihan Pembayaran Bama Bulan Desember 2021	2021
81	LEMBAGA PEMASYARAKATAN SLEMAN	PT. Budi Utama Sarana Mulya	3.142.000,00	Lancar	Sisa BAMA 2021	2021
82	LEMBAGA PEMASYARAKATAN BITUNG	CV. Sinar Pelangi Abadi	786.330,00	Lancar	kelebihan pembayaran bama 2021	2021
83	LEMBAGA PEMASYARAKATAN TERBUKA NUSAKAMBANGAN	PT. Sinar Alam Persada Abadi	2.086.089,00	Lancar	Lebih bayar Belanja Bama Desember 2021	2021
84	LEMBAGA PEMASYARAKATAN NARKOTIKA PEMATANG SIANTAR	PT. Indra Bangun	375.229,00	Lancar	Kelebihan Pembayaran BAMA	2021
85	LAPAS NARKOTIKA KELAS IIA MUARA BELITI	CV. SARANA PANGAN UTAMA	457.644,00	Lancar	Kelebihan Pembayaran Bama Tahun 2021	2021
86	LEMBAGA PEMASYARAKATAN NARKOTIKA JAKARTA	CV. NIAGA ABADI SEJAHTERA	13.076.537,00	Lancar	Piutang Lainnya atas kelebihan pembayaran BAMA bulan Desember 2021	2021
87	RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS I TANJUNG PINANG	CV.Paramadi Perkasa	3.357.526,00	Lancar	Piutang dari Kelebihan Pembayaran Pengadaan Bahan Makanan Warga Binaan Pemasyarakatan Tahun Anggaran 2021	2021
88	RUMAH TAHANAN KELAS IIB KUPANG	CV. EDZAR TIMOR RAYA	57.764.364,00	Lancar	Piutang kelebihan Pembayaran BAMA TA 2021	2021
89	RUMAH SAKIT PENGAYOMAN CIPINANG KELAS D	CV LINTAS JAVA	68.270.685,00	Lancar	Piutang Lainnya atas kelebihan pembayaran BAMA bulan Desember 2021	2021
90	LAPAS KELAS IIA CIKARANG	PT KIRANA SURYA MANDIRI PRATAMA	62.357.376,00	Lancar	Kelebihan Pembayaran Bama TA. 2021	2021
91	LAPAS KELAS IIB BANJAR	CV. TIFA SUKSES LESTARI	55.324,00	Lancar	Kelebihan Pembayaran Bama TA. 2021	2021

92	LAPAS KELAS IIA CILEGON	CV. Berkah Indopangan	718.889,00	Lancar	Kelebihan Pembayaran Pengadaan Bahan Makanan Untuk Narapidana/Tahanan Pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Cilegon Tahun 2021 Yang Dibayarkan/Disetorkan Ke Negara Pada Tahun 2022	2021
93	LAPAS NARKOTIKA KELAS IIB MUARA SABAK	CV Sabena Mandiri Mulia	2.572.500,00	Lancar	Kelebihan atas Pembayaran Belanja BAMA Bulan Desember TA 2021	2021
94	RUTAN KELAS I PEKANBARU	CV. Cahaya Utama	688.701,00	Lancar	Kelebihan Pembayaran Bama TA. 2021	2021
95	LAPAS NARKOTIKA KELAS IIA GUNUNG SINDUR	UD ERNAWATI	113.029,00	Lancar	Kelebihan Pembayaran Bama TA. 2021	2021
96	Lapas anak Kelas III Batam	CV. Goodwil Laura Namarito	151.630,00	Lancar	Kelebihan Pembayaran Bama TA. 2021	2020
97	RUTAN KELAS I DEPOK	CV. WIRATAMA INDONESIA	18.132.029,00	Lancar	Kelebihan Pembayaran Bama TA. 2021	2021
98	LAPAS KELAS IIA PANCUR BATU	PT .Nusa Persada Lestari	965.477.858,00	Lancar	Pengembalian belanja modal gedung dan bangunan atas temuan BPK dan Itjen pada pekerjaan pembangunan fisik rutan yang disetorkan TA. 2022	2021
99	RUMAH TAHANAN NEGARA KABANJAHE	PT. Bukit Zaitun	362.917.826,00	Lancar	Pengembalian belanja modal gedung dan bangunan atas temuan BPK pada pekerjaan pembangunan fisik rutan yang disetorkan TA. 2022	2021
Total			2.907.697.623,00			
Ditjen Imigrasi						
1	KANTOR IMIGRASI KELAS I KHUSUS TPI BATAM	PT. Pelayaran Megah Jaya Sejahtera	350.000.000,00	Macet	Temuan BPK tahun 2017 atas beban alat angkut	2017
		PT. Batam Fast	150.000.000,00	Macet	Temuan BPK tahun 2017 atas beban alat angkut	2017
		PT. Indonesia Marine Service	300.000.000,00	Macet	Temuan BPK tahun 2017 atas beban alat angkut	2017
		PT. Prima Buana Gema Bahari	50.000.000,00	Macet	Temuan BPK tahun 2017 atas beban alat angkut	2017
		PT. Sindo Ferry	50.000.000,00	Macet	Temuan BPK tahun 2017 atas beban alat angkut	2017
		PT. Batam Fast	50.000.000,00	Macet	Masa Berlaku Paspor Kurang dari 6 bulan	2019
		PT. Batam Fast	50.000.000,00	Macet	Masa Berlaku Paspor Kurang dari 6 bulan	2019
		PT. Batam Fast	50.000.000,00	Macet	Masa Berlaku Paspor Kurang dari 6 bulan	2019
		PT. Indonesia Marine Service	50.000.000,00	Macet	Masa Berlaku Paspor Kurang dari 6 bulan	2018
2	KANTOR IMIGRASI KELAS I KHUSUS TPI SOEKARNO HATTA	Maskapai	800.000.000,00	Lancar	Piutang Maskapai yang timbul karena penanggungjawab alat angkut yang tidak memenuhi Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian yang tidak memiliki Dokumen Keimigrasian yang sah dan berlaku	Temuan BPK thn 2017
		Maskapai	600.000.000,00	Lancar		2018
		Maskapai	1.400.000.000,00	Lancar		2019
		Maskapai	300.000.000,00	Lancar		2020
		Maskapai	50.000.000,00	Lancar		2021

3	KANTOR IMIGRASI KELAS I KHUSUS TPI NGURAH RAI	MANDALA AIRLINES	90.000.000,00	Macet	Piutang denda beban alat angkut. Maskapai sudah tutup dan dinyatakan pailit oleh MA. KPKNL menyatakan Piutang Belum Dapat Ditagih. Sudah mengajukan permohonan penerbitan SK Penghapusan Bersyarat Piutang.	2014
		CITILINK	50.000.000,00	Macet	Piutang denda beban alat angkut. Piutang tersebut di Semester I 2021 tercatat sudah dibayar, namun saat dikonfirmasi ke KPKNL ternyata belum ada pembayaran dari maskapai. Belum ada update tindak lanjut dari maskapai	2017
		HONGKONG AIRLINES	50.000.000,00	Macet	Piutang denda beban alat angkut, sudah diajukan proses pelimpahan piutang ke KPKNL	2019
4	KANTOR IMIGRASI KELAS II NON TPI KARAWANG	Piutang Lainnya Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL atas Nama Pegawai Purwanto, AM.d.	2.231.152,00	Lancar	Berdasarkan Surat Pernyataan Hutang Nomor W11.IMI.IMI4-UM.01.01-0253 tanggal 22 Februari 2021 dan Surat Pertanggungjawaban Mutlak 22 Februari 2021 telah disepakati bahwa ada Belanja Pegawai yang telah diberikan kepada pegawai yang lebih dari pada seharusnya dikarenakan kesalahan Petugas Pengelola Administrasi Belanja Pegawai (PPABP) mencantumkan masa kerja pada kenaikan pangkat pegawai tersebut yang sudah dibayarkan pada 1 April TA 2019 s.d. 1 November TA 2020 dengan nominal kelebihan Pembayaran sebesar Rp4.056.640,-	1 Januari 2021
Total			4.442.231.152,00			
Ditjen KI						
1	DITJEN KEKAYAAN INTELEKTUAL	Pemegang Piutang Paten BDH	195.267.882.536,00	Macet	Piutang muncul karena pemegang paten tidak melakukan pembayaran atas biaya pemeliharaan sehingga paten Batal Demi Hukum	2012-2016
		Pemegang Piutang Paten PAPS	19.763.512.585,00 24.800.000,00	Macet Diragukan	permohonan pembatalan paten, namun memiliki kewajiban berupa pemeliharaan paten yang ada	2012-2016
		Pemegang Piutang Paten Dihapuskan	89.947.400,00	Macet	Piutang yang muncul apabila pemegang paten tidak membayar biaya tahunan selama tiga tahun berturut-turut sebagaimana ditentukan dalam pasal 18 UU No. 14 Tahun 2001 Tentang Paten.	2020-2021
2	DITJEN KEKAYAAN INTELEKTUAL	PT MITRA VISINDO TEKNOLOGI	408.361.617,00	Lancar	Kelebihan pembayaran pengadaan modal peralatan dan mesin yang merupakan Temuan BPK RI T.A 2021	2021
Total			215.554.504.138,00			
Grand Total			231.767.531.548,00			

Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Lancar Berdasarkan Satuan Kerja
Per 31 Desember 2021

No	Nama Satker	Jumlah Piutang Lancar	% Penyisihan	Jumlah penyisihan	Keterangan
SEKRETARIAT JENDERAL					
1	SEKRETARIAT JENDERAL (PUSAT)	50.598.000,00	50,00%	25.299.000,00	Diragukan
		23.876.000,00	50,00%	11.938.000,00	Diragukan
		23.292.500,00	50,00%	11.646.250,00	Diragukan
		19.512.500,00	50,00%	9.756.250,00	Diragukan
		25.626.000,00	50,00%	12.813.000,00	Diragukan
		23.292.500,00	50,00%	11.646.250,00	Diragukan
		32.042.500,00	50,00%	16.021.250,00	Diragukan
		20.440.750,00	0,50%	102.204,00	Lancar
		71.012.424,00	100,00%	71.012.424,00	Macet
		3.400.000,00	0,50%	17.000,00	Lancar
		13.290.126,00	100,00%	13.290.126,00	Macet
2	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM AMBON	90.713.032,00	0,50%	453.565,00	Lancar
Total		397.096.332,00		183.995.319,00	
Ditjen Pemasyarakatan					
1	LEMBAGA PEMASYARAKATAN BANCEUY BANDUNG	192.012.000,00	0,50%	960.060,00	Lancar
2	LAPAS KELAS III AMURANG	58.460.000,00	0,50%	292.300,00	Lancar
3	RUMAH PENYIMPANAN BARANG SITAAN NEGARA BANDUNG, KOT.BANDUNG, JAWA BARAT	423.134.500,00	0,50%	2.115.673,00	Lancar
4	BALAI PEMASYARAKATAN TERNATE, MALUKU UTARA	52.195.120,00	100,00%	52.195.120,00	Macet
Total		725.801.620,00		55.563.153,00	
Ditjen Imigrasi					
1	KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI MANADO	260.823.992,00	0,50%	1.304.120,00	Lancar
2	KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI TERNATE	161.209.240,00	0,50%	806.046,00	Lancar
3	KANTOR IMIGRASI KELAS II NON TPI MADIUN	138.200.000,00	0,50%	691.000,00	Lancar
4	KANTOR IMIGRASI KELAS III NON TPI KEDIRI	69.000.000,00	0,50%	345.000,00	Lancar
Total		629.233.232,00		3.146.166,00	
Grand Total		1.752.131.184,00		242.704.638,00	

RINCIAN PERSEDIAAN RANGKA PENANGANAN PANDEMI COVID-19
PER 31 Desember 2021

Unit Eselon I	Nilai	Jenis Barang
Sekretariat Jenderal	4.420.608.940,00	Air Sprayer/Humidifier Machine, Alkohol 96%, Desinfektan Sprayer, Sigprocare Desinfektan 5 L, Sanitasi Atom Series Kuwera , Dettol Disinfektan Spray Morning Dew - 225 ml, Zepa Humidifier Non Alcohol 5L , Sanitasi Atom Series Kuwera , Dettol Disinfektan Spray Morning Dew - 450 ml, Antazep 250 ml, Eagle Eucalyptus Disinfektan Spray - 280 ml , Sanitizer Dispenser Automatic, Hand Sanitizer HS5KL, Zegavit, Imboost Tablet, Multivitamin, Pritavit, Azithromycin, Grotein, Surbex Z, Astinox, Enervon C, Natur E Nourishing 300 iu, Natur E Small Pack 100 iu, Vitamin D3 5000 iu, Vitalong C, Bionicom Zink, Ondansetron 4mg, Paracetamol 650mg, Ibuprofen 400mg, Zinc Tablet, Caviplex, Selcom C, Fituno, Masker Headloop 3ply, Masker Headloop 4ply, Masker Earloop 3ply, Masker Earloop 4ply, Masker Evo, Masker Medis, Masker Sensi Duckbill, Masker Evo Plusmed White, Masker Evo Plusmed Black, Masker Cetakan Khusus Pimpinan, Rapid Test Antigen Merk Clungene Indonesia, APD, Face Shield Anti Splash Acrilic, Face Shield Standar Mika, Masker Earloop 4ply, Masker Evo, Rapid Test Antigen Merk ABBOT, Rapid Test Antigen Merk ANHUI, Hand Sanitizer Spray KIFA, Disinfektan Spray KIFA, Disinfektan Spray PRIMO, Sensi Convex Mask 4ply Earloop, Masker Sensi Duckbill, Masker Sensi Convex Mask 4ply,
Ditjen Administrasi Hukum Umum	389.824.366,00	Masker Sensi Duckbill, Hand sanitizer Lanco, Masker Ducbill rainbow female, Masker Ducbill rainbow male, Masker carelon duckbill white, Masker allando Duckbill white, Bio handspray 70%, Hand sanitizer happy care, Antis spray, Aseptic gel, Instance HST, Masker sensi duckbill, Masker Thankful Hijab, Hand sanitizer spray allvarian, masker, hand sanitizer, hand soap, Cairan disinfektan, masker, hand sanitizer, hand soap, Cairan disinfektan, masker, masker, Pembelian Masker , Pembelian Hand sanitizer 100 ml dan 70 ml, Masker KN95 filter, Aiken Sanitz 50 ml dan MaskerDuckbil 2 pak, Ion Masker 50 , Vice Vit 500 Lemon, Nature Nour Vit E 100, Secret Hs Spray 100, Nature Nour Vit E 300, Vice Vit 500 Anggur, Masker K494 , Masker KF94 , Masker Biasa, Win Masker PK5, Secret Hs 60 ml, Ademsari Vit'C 7Gr, Vitamin, Ademsari Vit'C 7,16Gr, Hemaviton C1000, Nature E Nour Vit E100, Hemaviton Jreng Madu, Secret HS Lio 60ml, M+Susu Orig/PK10, Masker KF94 Mauson, Win Masker PK5, Masker, Masker KF 94 Mauson, Masker Duckbil Mauson, Secret HS Spray,

Unit Eselon I	Nilai	Jenis Barang
Ditjen Imigrasi	1.730.825.473,00	Masker Promask, Masker Facemask, Masker Surgical Mask, Vitacimin C, Susu Bear Brand, Minuman You C 1000, Buavita, Biaya Zoom Pro 1 Bulan, Masker Merah Putih, Masker Softies, Masker Softies, Biaya Zoom Pro 1 Bulan, YOU C 1000, SUSU BERUANG, MASKER HIJAB, MASKER EARLOP GENIO, HANDSANITISER FRESCO 500 ML, HANDSANITISER FRESCO 5000 ML, MASKER SENSI CONVEX MERAH PUTIH, Sensi Mask Duckbill, Vitlong C 30'S, Imboost Force Tab, Botol Antis , Botol Handsanitizer, Box Imboost tube, Sanitizer Disinfektan All Surf, Imboost Effeervessent Jeruk, Masker Boson 3 Ply, Sanitizer Disinfektan Spray 400 ml, Masker Boson 3 Ply, Masker Evo Plusmed, Detol Sanitizer, Masker Evoplush 3 Ply Oranye, CDR Calcium Orange Effeervecent, Masker Evoplush 3 Ply Biru, Imboost EFF , Redoxon Fortimun, Handsanitizer spray 100 ml, Holly Hand Sanitizer, Masker Merah Putih, Handsanitizer Nuvo 250 ml, Antis Jeruk Nipis, Antis Handsanitizer, Masker, Masker 3 Fly, Antis Fresh Clean 250 ML, Antis Jeruk Nipis, Pembelian Disinfektan, Antis Pembersih Tangan Frsh, Masker 3 Fly, Masker Merah + Putih, Saniter All Surface Bottle S, S.O.S Handsanitizer 500 ML-Tempo, Handsanitizer INSTANCE 4 Liter, Handscoond Black VINYL 100'S, Masker Ducbil, Vitamin C1000, Bear Brand, Masker Bedah Karet, Earloop 3ply, isi 50 psc, Desinfektan / Antiseptik isi 5 Liter, Sarung tangan medis ukuran L, isi 100, Hand sanitizer gel, isi 5 Liter, Hand Sanitizer gel, isi 200 ml, Masker Bedah Karet, Earloop 3ply, isi 50 psc,
Ditjen Pemasyarakatan	12.263.539.401,36	Masker, Masker (Penutup Mulut), Masker (Penutup Mulut), Hand Glove, Desinfektan, Hand Sanitizer, Desinfektan, Anti Septik Cair, ANTISEPTICK GEL, Handwash, Pembersih Cuci Tangan, Tissu kering kemasan plastik, Tissu kering kemasan box, Tisu Gulung, Tisu Wastafel, Tisu Basah, Swab Antigen, Cairan Disinfektan, Hand Sanitizer Cair 1, Hand Sanitizer Gel 1, Disinfectant Aerosol Spray, Masker Sensi Earloop, Sarung Tangan Medis, Masker KF94, Masker Beauty KN95, Rapid test, HOLLOW 4X4, AKRILIK, PENGELASAN, POMPA DAN NOZEL SPRAYER, PENGECATAN, Baju Hazmat, Thermo Gun, Hand Sanitizer, Disinfektan, Hand Soap, Masker KN95, Masker Tali Karet, Swab Antigen, Sarung Tangan, Masker Pegawai, Thermo Gun, Hand Sanitizer Spray 100 ml, Cairan Hand Sanitizer 1L, Cairan Disinfektan 1L, Sabun Cuci tangan 1L, Sabun Cuci Tangan 400 ml, sarung tangan latex warna hitam, Gown, Face Shield, Sepatu Booth, Masker Medis Isi 5 Pcs, Alat Penyemprot Disinfectan, handscoon Uk M, APD Disposable Gown Tipis, handscoon Examination Uk S, masker 3 ply earlop, nurse cup, Masker KN 95, alcohol swab, plastik kuning ukuran sedang, Swab Antigen, JSP Masker Duckbill, Handsanitizer Covid, Masker, Sabun Cuci Tangan, Cairan Disinfektan Covid, Snap Handsoap 500 ml, JSP Mask, Snap Hand Sanitizer 500 ml, Snap Disinfectant, Snap Hand Sanitizer, Snap Hand Soap, Snap Hand Sanitizer 100 ml, Wadah Air, Cairan Disinfektan, HANDSOAP, Handsanitizer, CAIRAN DISINFEKTAN, MASKER KN 95, HAND SANITIZER, SABUN CUCI TANGAN (HAND SOAP), MASKER MEDIS, SABUN CUCI TANGAN (HAND SOAP), SARUNG TANGAN LATEX, ALAT SWAB ANTIGEN WBP, ALAT SWAB ANTIGEN WBP, Detection Kit Covid-19 (3Dmed), Extraction DNA/RNA Kit Covid-19 (Andis), Extraction DNA/RNA Kit Covid-19 (Andis), Masker Medis 3ply, Masker Medis 3ply, Video Conference Zoom, Sarung Tangan Medis Powder, Sarung Tangan Medis Free Powder, , , , Hand Sanitizer 5 Liter, Masker KN95, Multi One Plus Surgical Mask Hijab, Masker Medis M+ Earloop, Masker, Masker, Masker Bedah, Handsanitizer, Rapid Test, Antigen, Sanitizer Wipes, Hand Sanitizer, Hand Sanitizer, Swab Atigen, Sabun Cuci Tangan, Masker, Masker, Antiseptic Galon, Sanitozer 240ml, Alcohol Swab, Asetic Plus aloever, Disnfektan, Celemek Disposable, Masker Sensi,

Unit Eselon I	Nilai	Jenis Barang
Ditjen Hak Asasi Manusia	142.636.500,00	Desinfektan Merk Barokah 20 Galon, Hand Sanitizer Gell dan Liquid 20 Galon, Masker Edisi Merah Putih 250 Pcs, Masker KF94 4 Ply 500 Pak, Handsanitizer 5 Jerigen, Masker 250 buah, Madu TJ 500gr 230 botol, Masker KF 94 (isi 20 pcs) 500 pak, Handsanitizer botol 60 ml 250 botol, handsanitizer 5 L 10 Jerigen, TRIC H AND SANITIZER @60ML, REDOXON ZINC EFF @10, MINYAK KAYU PUTIH CAP LANG @60ML, DETTOL DISINTECTANT SPRAY BREEZE 225 ML, MADU TJ MURNI 250 GRM, RENOVIT KPL @30, GOODIE BAG, TRIC H AND SANITIZER @60ML, REDOXON ZINC EFF @10, MINYAK KAYU PUTIH CAP LANG @60ML, DETTOL DISINTECTANT SPRAY BREEZE 225 ML, MADU TJ MURNI 250 GRM, RENOVIT KPL @30, GOODIE BAG, Enervon C 230 botol 230.
Ditjen Hak Asasi Manusia	61.236.500,00	Desinfektan Merk Barokah 20 Galon @189.000, Hand Sanitizer Gell dan Liquid 20 Galon @180.000, Masker Edisi Merah Putih 250 Pcs @20.500, Masker KF94 4 Ply 500 Pak @66.500. TRIC H AND SANITIZER @60ML, REDOXON ZINC EFF @10, MINYAK KAYU PUTIH CAP LANG @60ML, DETTOL DISINTECTANT SPRAY BREEZE 225 ML, MADU TJ MURNI 250 GRM, RENOVIT KPL @30, GOODIE BAG. TRIC H AND SANITIZER @60ML, REDOXON ZINC EFF @10, MINYAK KAYU PUTIH CAP LANG @60ML, DETTOL DISINTECTANT SPRAY BREEZE 225 ML, MADU TJ MURNI 250 GRM, RENOVIT KPL @30, GOODIE BAG

Pendapatan Diterima Dimuka Berdasarkan Satuan Kerja
Per 31 Desember 2021

No	Nama Satker	Saldo	Keterangan
	Sekretariat Jenderal		
1	SEKRETARIAT JENDERAL (PUSAT)	16.942.716,00	Sewa Tanah di Jl. TMP taruna Tangerang a.n. Abdul Hanny
		21.240.196,82	Menara BTS di Gedung Setjen a.n. Adi Cipta
		7.345.471,04	Sewa Tanah di Jl. Jenderal Sudirman Tangerang a.n. Etty Nurbaiti
		6.974.244,14	Sewa Tanah di Jl. TMP taruna Tangerang a.n. Siti Rokhaniyah
		105.244.148,88	Sewa Tanah di Jl. Veteran Tangerang a.n. M.Luthfi
		105.387.479,47	Sewa Tanah di Jl. Veteran Tangerang a.n. Rita
		213.033.100,90	Sewa Tanah di Jl. Jenderal Sudirman Tangerang a.n. PT. Selarasgriya Adigunatama
		91.334.597,48	Sewa Tanah di Jl. LPK Pemuda VI Tangerang a.n. Nofli
		448.204.795,00	Sewa Tanah di Jl H.R Rasuna said Kav 6-7 a.n. BNI Tebet
		185.183.172,00	Sewa Tanah di Jl Perintis Kemerdekaan Tangerang a.n. Djunaedi
		20.794.520,55	Sewa Tanah Jl.LP Pemuda Tangerang a.n. Koperasi LP Pemuda
		13.767.123,29	Sewa Tanah di Jl H.R Rasuna said Kav 6-7 a.n. Koperasi Setjen
		277.098.538,88	Sewa Tanah di Jl Perintis Kemerdekaan Tangerang a.n. Protelindo
		458.261.879,80	Sewa Tanah di Jl Perintis Kemerdekaan Tangerang a.n. Yayasan Islam Syekh
2	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAKARTA RAYA	96.938.542,00	Sewa lahan untuk Ruang Kantor Kas BRI dan ATM BRI
3	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BANDUNG	553.815,00	Sewa lahan Kios a.n. Bapak Ihin
		2.761.689,00	Sewa lahan Kantin a.n. Bapak Adang Heri
4	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAWA TENGAH	17.167.032,00	Sewa lahan untuk ATM BRI
5	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SURABAYA	26.196.194,00	Sewa lahan untuk ATM BNI
6	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM UJUNG PANDANG	15.005.009,00	Sewa Sebagian Tanah Untuk ATM BNI
7	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BANDA ACEH	558.542,00	Sewa lahan untuk Yessi Marina
		1.351.203,00	Sewa lahan untuk Koperasi Pengayoman Kanwil
		3.939.726,03	Sewa lahan untuk Riski Muhammad Fadil
8	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PEKANBARU	14.359.260,95	Sewa lahan untuk ATM BNI
		4.368.814,88	Sewa lahan untuk Koperasi Pengayoman

9	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BANJARMASIN	2.526.986,00	Sewa lahan untuk Kantin
10	KANWIL DEPARTEMEN HUKUM DAN HAM MANADO	532.000,00	Sewa Gedung dan Bangunan (Kantin)
11	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BENGKULU	642.326,00	Sewa lahan untuk Kantin
12	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM YOGYAKARTA	22.520.000,00	Sewa lahan untuk ATM BRI
13	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM KENDARI	36.931.507,00	Sewa lahan untuk ATM BNI
14	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM MATARAM	4.195.896,00	Sewa lahan a.n. Marni
SUBTOTAL		2.221.360.527,10	
Ditjen AHU			
1	DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM	4.389.250.000,00	Pendapatan atas voucher yang telah dibeli masyarakat akan tetapi belum digunakan dalam pelayanan jasa hukum pada aplikasi AHU online.
SUBTOTAL		4.389.250.000,00	
Ditjen Pemasyarakatan			
1	RUMAH TAHANAN NEGARA JAKARTA PUSAT	159.087.025,00	Sewa Gedung dan Bangunan Koperasi Pegawai Rutan Kelas I Jakarta Pusat
		6.429.020,00	Sewa Gedung dan Bangunan ATM Bank BJB
2	LEMBAGA PEMASYARAKATAN SALEMBA	56.800.410,00	Sewa Gedung dan Bangunan koperasi
3	LEMBAGA PEMASYARAKATAN KARAWANG	19.301.054,00	Sewa lahan/tanah oleh pihak ketiga C.V Raja Astina
4	LAPAS SUMEDANG	1.515.441,00	Sewa Koperasi Pengayoman Lapas Sumedang
5	LAPAS GARUT	4.421.918,00	Sewa lahan KPRI Pengayoman Pegawai Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Garut
		5.687.671,00	Sewa lahan untuk Peternakan Ayam
6	LAPAS TASIKMALAYA	3.825.304,00	Sewa lahan untuk KOPERASI PEGAWAI LAPAS TASIKMALAYA
7	LEMBAGA PEMASYARAKATAN SUKAMISKIN	36.314.176,00	Sewa lahan/tanah oleh pihak ketiga PT. Era Bangun Towerindo
8	LAPAS SUKABUMI	3.291.582,00	Sewa lahan/tanah oleh Koperasi Pengayoman Lapas Sukabumi
9	LAPAS CIANJUR	1.448.688,00	Sewa lahan/tanah oleh KPPDK Lapas Cianjur
10	LAPAS PURWAKARTA	2.512.789,00	Sewa lahan/tanah oleh Koperasi Wahana Sejahtera
11	LEMBAGA PEMASYARAKATAN SUBANG	4.709.499,00	Sewa lahan/tanah oleh Kantin Koperasi
12	LEMBAGA PEMASYARAKATAN CIBINONG	19.201.313,00	Sewa lahan/tanah oleh Koperasi Pegawai Lapas Cibinong
13	LAPAS KELAS IIB WARUNG KIARA	8.756.503,00	Sewa lahan/tanah oleh Koperasi Konsumen Pegawai Lapas Warungkiara
14	RUTAN KELAS I DEPOK	7.562.546,00	Sewa lahan/tanah oleh KOPERASI KONSUMEN PEGAWAI
15	RUMAH TAHAN NEGARA WONOSARI	250.684,00	Sewa lahan/tanah oleh Koperasi
		2.487.685,00	Sewa lahan/tanah oleh Koperasi

16	LEMBAGA PEMASYARAKATAN SLEMAN	3.435.040,00	Sewa lahan/tanah oleh Koperasi Pegawai Lapas
17	RUMAH TAHANAN NEGARA TRENGGALEK	959.290,00	Sewa lahan/tanah oleh Kantin
18	LAPAS KELAS IIA BANYUWANGI	13.886.000,00	Sewa lahan/tanah oleh Koperasi Lapas
19	LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN MALANG	15.440.372,00	Sewa Lahan untuk kemandirian oleh PT Sahabat Grup Indonesia periode s.d. 2 Februari 2025
20	LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK BLITAR	273.859,00	Sewa lahan oleh Kantin Koperasi
		1.069.588,00	Sewa lahan oleh Kios Pracangan
		883.480,00	Sewa lahan oleh Bengkel Las
		919.134,00	Sewa lahan untuk Tambal Ban
		499.141,00	Sewa lahan untuk Warung Makan
		462.775,00	Sewa lahan untuk Kios Salon
		883.480,00	Sewa lahan untuk Kios Pangkas Rambut
		441.859,00	Sewa lahan untuk Kios Sticker
		475.372,00	Sewa lahan untuk Depo Air Minum
		620.361,00	Sewa lahan untuk Kios Agen Sosis Tempura
		26.739.703,00	Sewa lahan untuk Toko dan Cuci Mobil
		904.158,00	Sewa lahan untuk Bengkel Sepeda
21	RUMAH TAHANAN NEGARA GRESIK	109.392,00	Sewa Tanah Gedung dan Bangunan CV HIMALAYA
		241.970,00	Sewa Tanah Gedung dan Bangunan KOPERASI PEGAWAI RUTAN GRESIK
		2.349.315,00	Sewa Tanah Gedung dan Bangunan SULTON ARIFIN
22	LEMBAGA PEMASYARAKATAN NARKOTIKA MADIUN	5.930.199,00	Sewa Tanah Gedung dan Bangunan KPPDK Lapas Narkotika Kelas IIA Madiun
23	LEMBAGA PEMASYARAKATAN BANDA ACEH	252.216,00	Sewa lahan/tanah oleh Koperasi
24	RUMAH TAHANAN NEGARA SABANG	46.110,00	Sewa lahan/tanah oleh Dinda Tri Agustin
25	LAPAS KELAS III LHOK NGA	889.798,00	Sewa lahan/tanah oleh Koperasi
26	LAPAS KELAS III CALANG	399.770,00	Sewa lahan/tanah oleh Koperasi
27	RUMAH TAHANAN NEGARA JANTHOI	264.311,00	Sewa lahan/tanah oleh Koperasi
28	RUMAH TAHANAN KELAS IIB BANDA ACEH	1.010.377,00	Sewa lahan/tanah oleh Koperasi
29	LEMBAGA PEMASYARAKATAN BINJAI	12.444.297,00	Sewa lahan/tanah oleh KPN Pengayoman LP Binjai
30	LEMBAGA PEMASYARAKATAN RANTAU PRAPAT	353.543,00	Sewa lahan/tanah oleh Koperasi Pengayoman Pegawai
31	LEMBAGA PEMASYARAKATAN SIBORONG-BORONG	1.325.290,00	Sewa lahan/tanah oleh Koperasi Pengayoman Lapas
32	RUMAH TAHANAN NEGARA BALIGE	1.511.425,00	Sewa lahan/tanah oleh KSU Pengayoman Rutan Balige
33	LAPAS KELAS III BARUS	2.220.618,00	Sewa lahan/tanah oleh pihak ketiga oleh Johan Tonggo Siagian

34	RUTAN BATUSANGKAR	1.495.890,00	Sewa lahan/tanah oleh Sewa kantin
35	Lapas Kelas IIA Bangkinang	35.095.876,00	Sewa lahan/tanah oleh KPPDK
36	LEMBAGA PEMASYARAKATAN JAMBI	6.014.000,00	Sewa lahan/tanah untuk Kantin
37	LAPAS BANGKO	512.449,00	Sewa lahan/tanah untuk Koperasi Lapas Bangko
38	LEMBAGA PEMASYARAKATAN TANJUNG RAJA	57.534,00	Sewa lahan/tanah untuk Gudang Beras
		3.164.384,00	Sewa lahan/tanah untuk Kantin Koperasi
39	LEMBAGA PEMASYARAKATAN LAHAT	7.120.000,00	Sewa lahan Depan Lapas oleh Masyarakat
40	LEMBAGA PEMASYARAKATAN LUBUK LINGGAU	2.527.073,00	Sewa lahan/tanah untuk Kantin Koperasi
41	LEMBAGA PEMASYARAKATAN WANITA PALEMBANG	5.686.744,00	Sewa lahan/tanah untuk Koperasi
42	LAPAS NARKOTIKA KELAS IIA MUARA BELITI	7.300.548,00	Sewa atas Barang Milik Negara berupa Sebagian Tanah dan/atau Bangunan
43	LAPAS NARKOTIKA KELAS IIB BANYUASIN	16.204.866,00	Sewa lahan/tanah oleh pihak ketiga JEERA
44	LEMBAGA PEMASYARAKATAN METRO	3.116.438,00	Sewa lahan/tanah untuk KPRI Pengayoman Lapas Metro
45	LEMBAGA PEMASYARAKATAN WANITA BANDAR LAMPUNG	2.173.315,00	Sewa lahan/tanah untuk Sewa Koprasi
46	LEMBAGA PEMASYARAKATAN SINGKAWANG	6.442.053,00	Sewa lahan/tanah untuk Koperasi KPPDK Lapas Singkawang
47	RUMAH TAHANAN NEGARA SAMBAS	3.102.477,00	Sewa lahan/tanah untuk Koperasi Berkarya
48	Lapas Perempuan Kelas IIA Pontianak	4.566.829,00	Sewa lahan/tanah oleh pihak ketiga PT. Anugerah Vata Abadi Jakarta
49	RUMAH TAHANAN NEGARA PONTIANAK	1.008.444,00	Sewa oleh pihak ketiga oleh CV. Sabu Permai untuk Sewa Gudang Beras
50	LEMBAGA PEMASYARAKATAN PALANGKARAYA	9.118.079,00	Kontrak Sewa Pemanfaatan Tanah oleh MARLIANA DRAKEL
		918.033,00	Kontrak Sewa Tanah dan Bangunan oleh KOPERASI PENGAYOMAN LAPAS
		9.177.978,00	Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan oleh Asih Khotimah
		7.036.323,00	Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan oleh Supartono
51	LAPAS SAMPIT	7.990.000,00	Koperasi Pengayoman Lembaga Pemasyarakatan Sampit
52	LAPAS NARKOTIKA KELAS IIA KASONGAN	3.675.016,00	Sewa lahan/tanah untuk Sewa Koperasi
53	LEMBAGA PEMASYARAKATAN PALU	440.186,00	Sewa lahan/tanah untuk Sewa Koperasi KPN
54	LAPAS KELAS III PARIGI	1.737.205,00	Sewa lahan/tanah untuk KPN Lapas Kelas III Parigi
55	LAPAS KELAS III LEOK	177.196,00	Sewa lahan/tanah untuk Sewa Koperasi KPN
56	LAPAS KELAS III KOLONEDALE	8.463.054,00	Sewa lahan/tanah untuk sewa koperasi
57	RUMAH TAHANAN NEGARA POSO	517.234,00	Sewa lahan/tanah untuk sewa koperasi
58	LEMBAGA PEMASYARAKATAN AMPANA	1.322.052,00	Pendapatan diterima dimuka atas sewa koperasi periode sewa s.d. 6 Mei 2022
59	LEMBAGA PEMASYARAKATAN UJUNG PANDANG	9.056.164,00	Sewa lahan/tanah untuk Koperasi Pegawai Negeri Pengayoman

60	LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS IIA KEROBOKAN	25.166.934,00	Sewa Gedung
61	LEMBAGA PEMASYARAKATAN SINGARAJA	1.956.000,00	Sewa lahan/tanah untuk SEWA KANTIN
62	RUMAH TAHANAN NEGARA BANGLI	1.216.000,00	Sewa lahan/tanah untuk KOPERASI PENGAYOMAN RUTAN BANGLI
63	LEMBAGA PEMASYARAKATAN KARANGASEM	2.996.696,00	Sewa lahan/tanah untuk Sewa Kantin
64	LEMBAGA PEMASYARAKATAN MATARAM	1.148.533,00	Sewa lahan dan gedung untuk Koperasi KPPDK Lapas Kelas IIA Mataram
65	RUMAH TAHANAN NEGARA RABA/BIMA	1.200.547,00	Sewa lahan/tanah untuk koperasi
66	LEMBAGA PEMASYARAKATAN DOMPU	16.196.605,00	Sewa lahan/tanah untuk ATM BNI
		12.076.039,00	Sewa lahan/tanah untuk ATM NTB SYARIAH
67	LEMBAGA PEMASYARAKATAN KUPANG	16.785.369,00	Sewa Bangunan oleh pihak ketiga RM. Puti Bungsu
68	LAPAS ARGAMAKMUR	8,197,830	Sewa lahan/tanah Sewa kantin
69	LEMBAGA PEMASYARAKATAN JAILOLO	1.900.000,00	Sewa lahan/tanah Sewa Kantin
70	LEMBAGA PEMASYARAKATAN WANITA TANGERANG	18.882.636,00	Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan untuk kantin
71	RUMAH TAHANAN NEGARA PANDEGLANG	274.458,00	Sewa lahan/tanah untuk Koperasi Sejahtera Rutan Pandeglang
72	RUMAH TAHANAN NEGARA SERANG	1.121.918,00	Sewa lahan/tanah untuk Koperasi Pengayoman Rutan Serang
73	RUTAN KELAS IIB MUNTOK	1.043.422,00	Sewa lahan/tanah untuk Koperasi Pengayoman Rutan Muntok
74	RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAN NEGARA PANGKAL PINANG	1.185.284,00	Sewa lahan/tanah untuk Koperasi Rupbasan
75	LEMBAGA PEMASYARAKATAN TANJUNG PINANG	14.663.014,00	Sewa lahan/tanah untuk KPRI - KPPDK LP TPI
		10.504.110,00	Sewa lahan/tanah untuk Koperasi Pegawai Lapas Narkotika TPI
76	CABANG RUMAH TAHANAN NEGARA TANJUNG BALAI KARIMUN	6.495.071,00	Sewa lahan/tanah untuk Koperasi Pegawai Rutan Karimun
		2.746.988,00	Sewa lahan/tanah untuk Koperasi Pegawai Rutan Karimun
77	RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS I TANJUNG PINANG	5.400.000,00	Sewa lahan/tanah untuk Koperasi Konsumen Serba Usaha Pegawai Rutan Kelas I Tanjungpinang
78	Lapas anak Kelas III Batam	8.737.226,00	Sewa lahan/tanah untuk Koperasi Pegawai Republik Indonesia Pemasyarakatan Baloi Jaya
79	LAPAS ARGAMAKMUR	8.197.830,00	Sewa lahan/tanah untuk kantin s.d. 5 Juli 2024
80	LEMBAGA PEMASYARAKATAN SEMARANG	16.677.671,00	Sewa lahan/tanah untuk ATM BNI s.d. 31 Juli 2023
81	LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEKALONGAN	4.575.547,00	Sewa lahan/tanah untuk KPPDK Lapas Pekalongan s.d. 02 Februari 2023
82	LAPAS BREBES	4.372.560,00	Sewa lahan/tanah untuk KPPDK Lapas Brebes s.d. 29 Nov 2022
		5.820.569,00	Sewa lahan/tanah oleh Azizar s.d. 29 November 2024
83	RUMAH TAHANAN NEGARA REMBANG	1.379.500,00	Sewa lahan/tanah KPPDK Rutan Rembang s.d. 31 Desember 2022
84	LEMBAGA PEMASYARAKATAN PURWOKERTO	93.175,00	Sewa lahan/tanah untuk koperasi s.d. 8 Januari 2022
		3.572.327,00	Sewa lahan/tanah untuk koperasi s.d. 27 September 2022

85	RUMAH TAHANAN NEGARA PURBALINGGA	15.233.782,00	Sewa lahan oleh pihak ketiga PT. Mentari Billboard Outdoor Advertising Perwakilan Wil. Jateng s.d. 14 Okt 2024
86	RUMAH TAHANAN NEGARA BANJARNEGARA	458.886,00	Sewa Gedung untuk Koperasi periode sewa s.d. 14 Oktober 2022
87	LAPAS CILACAP	2.706.769,00	Sewa Gedung untuk Koperasi dan Kantin periode sewa s.d. 11 Agustus 2022
88	LEMBAGA PEMASYARAKATAN PASIR PANGARAYAN	46.575.484,00	sewa kantin dan tempat tinggal pegawai s.d. 30 Juli 2024
89	LAPAS MUARA BULIAN	2.860.564,00	Sewa lahan/tanah untuk koperasi s.d. 14 oktober 2022
90	LEMBAGA PEMASYARAKATAN BANJARMASIN	9.628.191,00	Sewa sebagian tanah, gedung dan bangunan oleh koperasi pegawai periode sewa s.d. 5 mei 2023
91	RUMAH TAHANAN NEGARA KANDANGAN	2.592.795,00	Pendapatan Diterima Dimuka untuk Sewa Kantin periode sewa s.d. 19 Feb 2024
92	RUMAH TAHANAN NEGARA TANJUNG	315.567,00	Pendapatan Dimuka berupa Koperasi Pegawai "OPAS" Rutan Kelas IIB Tanjung periode sewa s.d. 23 maret 2021
93	LEMBAGA PEMASYARAKATAN BALIKPAPAN	45.188.527,00	Sewa lahan oleh pihak ketiga PT Centratama Menara Indonesia periode sewa s.d. 30 Juni 2023
		18.408.970,00	Sewa lahan oleh pihak ketiga RM Torani periode sewa s.d. 1 Maret 2021
		12.740.712,00	Sewa lahan oleh pihak ketiga RM Bebek Goreng periode sewa s.d. 1 Mei 2021
94	LEMBAGA PEMASYARAKATAN PALOPO	5.016.267,00	Sewa Sebagian Tanah Untuk Taylor s.d 6 Januari 2023
95	BALAI PEMASYARAKATAN BANJARMASIN	224.500,00	Pendapatan Diterima Dimuka untuk Sewa Kantin periode sewa s.d. 28 Feb 2022
96	Lapas Perempuan Kelas IIA Martapura	814.841,00	Pendapatan Diterima Dimuka untuk Sewa Koperasi periode sewa s.d. 14 Sept 2022
97	RUMAH TAHANAN NEGARA BATANG	2.060.317,00	Sewa lahan untuk KPPDK Rutan Batang periode sewa s.d. 15 Juni 2023
98	LEMBAGA PEMASYARAKATAN SLAWI	2.033.954,00	Sewa lahan untuk Koperasi Pengayoman periode sewa s.d. 11 September 2023
99	RUMAH TAHANAN NEGARA UJUNG PANDANG	12.441.648,00	Perjanjian Sewa Bangunan sebagian Untuk ATM / PT. BRI (persero) Cabang Somba Opu Makassar periode sewa s.d. Oktober 2022
100	LEMBAGA PEMASYARAKATAN TERBUKA KENDAL	181.425.589,00	Sewa lahan/tanah untuk pihak ketiga PT SUMBER TIRTO WINDU s.d. 14 oktober 2022
101	RUMAH TAHANAN NEGARA BANDAR LAMPUNG	13.089.041,00	Sewa lahan untuk ATM periode sewa s.d. 31 maret 2022
		1.871.585,00	Sewa Koperasi periode sewa s.d. 1 Okt 2022
102	RUTAN KELAS I PEKANBARU	4.964.384,00	Sewa lahan untuk ATM periode sewa s.d. 30 Juni 2022
	SUBTOTAL	1.183.101.393,00	
	Ditjen Imigrasi		
1	DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI	69.305.678,00	Sewa Lahan Kantor Kas dan Mesin ATM BRI
		158.353.231,00	Sewa Lahan Penempatan Perangkat Telekomunikasi Selular PT Telkomsel
2	KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI BENGKULU	1.527.766,00	Pendapatan Sewa Kantin a.n. Bejo Waluyo

3	KANTOR IMIGRASI KELAS II NON TPI AGAM	3.033.548,00	Paymen Point Nagari
		19.480.083,00	Sewa lahan oleh Bank BRI
4	KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI POLONIA	1.967.397,00	Sewa Tanah dan Bangunan berupa tempat pembayaran PNPB Keimigrasian (BSI)
5	KANTOR IMIGRASI KELAS II NON TPI PEMATANG SIANTAR	5.535.431,00	Sewa Kantin a.n. Yuna Zenita
6	RUMAH DETENSI IMIGRASI PUSAT TANJUNG PINANG	5.168.216,00	Sewa Kantin
		4.588.091,00	Sewa Koperasi
7	KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI TANJUNG PINANG	4.060.274,00	Sewa Kantin
8	KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI TANJUNG BALAI KARIMUN	51.672.112,00	Sewa lahan untuk ATM BNI
9	KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI TANJUNG UBAN	8.350.000,00	Sewa lahan untuk Koperasi
10	KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI DUMAI	3.105.164,00	Pendapatan Sewa Tanah
11	KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI PALEMBANG	5.844.469,00	Sewa lahan untuk Bank BNI
		948.214,00	Sewa lahan untuk Koperasi
12	KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI BANDAR LAMPUNG	12.430.000,00	Sewa sebagian bidang tanah milik negara untuk kantor kas beserta ATM Bank
13	KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI BANDUNG	164.159,00	Sewa lahan untuk Pos
14	KANTOR IMIGRASI KELAS I NON TPI BOGOR	53.024.179,00	Sewa lahan untuk ATM BSI
		4.433.187,00	Sewa lahan untuk Koperasi
15	KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI CIREBON	46.725.479,00	Sewa lahan untuk ATM BNI
		2.465.912,00	Sewa lahan untuk Koperasi
16	KANTOR IMIGRASI KELAS II NON TPI KARAWANG	6.130.914,00	Sewa lahan untuk KPRI Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Karawang
17	KANTOR IMIGRASI KELAS II NON TPI SUKABUMI	7.066.893,00	Sewa tempat usaha Koperasi KPRI Pengayoman Imigrasi Kota Sukabumi
18	KANTOR IMIGRASI KELAS II NON TPI TASIKMALAYA	4.766.048,00	Sewa lahan untuk Koperasi Konsumen Pegawai Imigrasi Tasikmalaya
19	KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI CILEGON	292.131,00	Sewa Tempat Fotocopy & warung Nasi
20	KANTOR IMIGRASI KELAS II NON TPI MADIUN	3.508.078,00	Sewa Bangunan Koperasi(Kantin dll)
		14.571.341,00	Sewa Bangunan ATM BNI
21	KANTOR IMIGRASI KELAS III NON TPI KEDIRI	4.544.641,00	Sewa lahan untuk Koperasi Mitra Manunggal Raharja
22	KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI MALANG	4.029.134,00	Sewa lahan untuk ATM BNI
23	KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI CILACAP	169.353,00	Sewa lahan untuk PT. POS INDONESIA
24	KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI SURAKARTA	6.922.113,65	Sewa lahan oleh KOPERASI BHUMI MANDIRI
		35.109.174,00	Sewa lahan untuk ATM BNI

25	KANTOR IMIGRASI KELAS II NON TPI PEMALANG	9.615.079,00	Sewa lahan untuk ATM BRI
		3.289.625,00	Sewa lahan oleh KOPERASI BHUMI MANDIRI
26	KANTOR IMIGRASI KELAS II NON TPI PATI	17.894.370,00	Sewa lahan untuk ATM BNI
27	KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI BANJARMASIN	16.186.567,00	Sewa lahan untuk ATM BNI
28	KANTOR IMIGRASI KELAS I NON TPI PALANGKARAYA	3.420.574,00	Sewa lahan untuk Koperasi Gerbang Usaha Bersama
29	KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI TARAKAN	24.579.507,00	Sewa lahan untuk ATM BNI
30	KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI NUNUKAN	7.091.500,00	Sewa lahan untuk Koperasi KPN Pengayoman
31	KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI SANGGAU	2.086.528,00	Sewa lahan untuk kantin
32	KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI KENDARI	43.536.946,00	Sewa lahan untuk ATM BNI
33	KANTOR IMIGRASI KELAS I KHUSUS NON TPI JAKARTA BARAT	30.427.494,00	Sewa lahan untuk ATM BNI
		30.427.494,00	Sewa lahan untuk ATM Mandiri
		53.751.715,00	Sewa lahan untuk ATM BRI
34	KANTOR IMIGRASI KELAS I KHUSUS NON TPI JAKARTA SELATAN	257.768.605,00	Sewa Lahan Gedung dan Bangunan Kantor Kas Bank BRI dan 1 Unit ATM
		11.935.961,00	Sewa Lahan Gedung dan Bangunan 1 Unit ATM CRM Bank BRI
35	KANTOR IMIGRASI KELAS I KHUSUS TPI SOEKARNO HATTA	74.609.086,00	Sewa Gedung dan Bangunan untuk Mesin ATM BNI
36	KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI JAKARTA TIMUR	40.770.831,96	Sewa ruang ATM
		6.889.443,89	Sewa Ruang Koperasi
	SUBTOTAL	1.183.573.738,00	
	Ditjen KI		
1	DITJEN KEKAYAAN INTELEKTUAL	56.255.824,00	Sewa Gedung dan Bangunan oleh Bank BNI
		22.419.285,24	Sewa Gedung dan Bangunan Oleh Koperasi DJKI
		5.645.105.000,00	Pendapatan atas kode billing 2021 yang masih belum terpakai hingga 31 Desember 2021
		335.250.000,00	Perpanjangan Merek TA 2021 dengan Tanggal Jatuh Tempo setelah 31 Desember 2021
		26.602.935.000,00	Pendapatan atas kode billing 2020 yang masih belum terpakai hingga 31 Desember 2021
		16.153.500.000,00	Pendapatan atas Layanan Substantif Paten yang hingga 31 Desember 2021 belum memasuki masa pemeriksaan substantif paten
		526.285.150.000,00	Pengakuan Pendapatan Diterima Dimuka atas Layanan Jasa Tahunan Paten
	SUBTOTAL	575.100.615.109,24	
	DIREKTORAT JENDERAL HAM		
1	DIREKTORAT JENDERAL HAM	1.519.383,00	Sewa TV lift oleh PT. Focus Media
	SUBTOTAL	1.519.383,00	

	BPHN		
1	BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL	21.870.535,00	Sewa lahan untuk Kantin BPHN
	SUBTOTAL	21.870.535,00	
	BPSDM		
1	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA	7.452.099,00	Sewa Ruang ATM Mandiri
2	POLITEKNIK ILMU PEMASYARAKATAN	68.346.112,00	Sewa Gedung STIH LITIGASI
	SUBTOTAL	75.798.211,00	
	GRAND TOTAL	584.177.088.896,10	

**Rincian Utang Kepada Pihak Ketiga Berdasarkan Satuan Kerja
Per 31 Desember 2021**

NO	KODE SATKER	NAMA SATKER	Belanja Pegawai Yang Masih Harus Dibayar				HUTANG PIHAK KETIGA										Belanja Modal Yang Masih Harus Dibayar		Utang Pihak Ketiga Lainnya		Dana Pihak Ketiga		JUMLAH UTANG
			Kekurangan Gaji	Uang Makan	Lain-Lain		Langganan Daya Jasa AIR (PAM)	Langganan Daya Jasa Listrik (PLN)	Langganan Daya Jasa Telpom (Telkom)	Langganan Daya Jasa Internet)	Langganan Jasa Pos	BAMA (Lauk Pauk)	Beras Bulog	Lain-Lain		Rp	Keterangan	Rp	Keterangan (misal: sisa tunker yang belum dikembalikan)	Rp	Keterangan		
					Rp	Keterangan								Rp	Keterangan								
SEKRETARIAT JENDERAL																							
1	408870	Kanwil Hukum dan HAM Bali	0,00	0,00	0,00	0,00	1.839.880,00	28.846.544,00	761.440,00													31.447.864,00	
2	408751	Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur					391.800,00	64.080.515,00				1.740.000,00										66.212.315,00	
3	409181	Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM D.I.Yogyakarta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.240.412,00	0,00	0,00			0,00		0,00							33.240.412,00	
4	408720	Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM D.I.Yogyakarta						80.973.187,00	143.440,00													81.116.627,00	
5	408742	Kanwil Jateng		2.738.000,00			209.600,00	33.460.581,00	260.023,00													36.668.204,00	
6	667786	Kanwil Kepri (667786)	14.851.715,00					22.505.534,00	874.870,00			840.500,00										39.072.619,00	
7	408824	Kanwil Lampung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.099.035,00														29.099.035,00	
8	408798	Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Padang				-	-	-	11.006.000,00	-	-	-	29.340.000,00									40.346.000,00	
9	649001	Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kep. Bangka Belitung (649001)						21.258.648,00	38.360,00			1.258.500,00										22.555.508,00	
10	409175	Kanwil Kemendukham Bengkulu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.971.462,00	302.674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.274.136,00	
11	408818	Kanwil Kemendukham Sumatera Selatan (seljen)						14.693.791,00				247.520,00										14.941.311,00	
12	408830	Divisi Administrasi Kanwil Kabar (408830)		125.709.000,00				22.969.285,00	35.387.924,00													148.678.285,00	
13	409190	Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Tengah																					
14	408892	Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku	230.886,00																			230.886,00	
	1.094.997,00																			1.094.997,00			
	596.414,00																				596.414,00		
			58.064.000,00																		58.064.000,00		
																						30.979.524,00	
15	408906	Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Jayapura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.664.876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.664.876,00	
16	409226	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM MATARAM		114.693.950,00				92.750,00				13.260.758,00										128.047.458,00	
17	409201	Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kendari				146.186.000,00																146.186.000,00	
18	408861	Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Utara						22.450.525,00														22.450.525,00	
19	667790	Kantor Wilayah Hukum dan HAM Sulawesi Barat 667790		40.277.000,00				16.307.771,00	1.287.050,00													57.871.821,00	
20	408773	Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Uluung Pandang	0,00	0,00	0,00		1.884.690,00	22.334.557,00	102.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00			24.321.457,00	
21	409210	Kanwil Sulawesi Tengah DIPA Sekretaris Jenderal						30.474.389,00														30.474.389,00	
22	404233	Sekretariat Jenderal						198.093.332,00	21.355.135,00				8.182.879.800,00				3.140.200,00			Jurnal Kas Lainnya atas retur: - Biaya Perjudin Kegiatan Catar a n Desky Numansayah Rp1.834.200 - Biaya Swab Seleksi CPNS a n Rahendo Jati Rp308.000 dan Sunanto Rp198.000 - Biaya Komunikasi a n Febri Ramadanti Rp800.000		8.405.468.467,00	
23	408849	Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Selatan					1.956.935,00	25.319.310,00	214.344,00	3.960.000,00												31.450.589,00	
24	408855	Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Timur						16.854.784,00				12.311.585,00										29.166.369,00	
TOTAL			16.774.012,00	341.481.950,00	146.186.000,00		6.375.655,00	788.965.986,00	25.339.546,00	28.226.758,00	4.086.520,00	0,00	8.224.531.385,00		0,00		3.140.200,00		0,00		0,00	9.585.108.103,00	
DIT.JEN AHU																							
1	409257	Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum	362.700,00																			362.700,00	
2	409257	Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum						302.400,00														302.400,00	
3	409257	Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum	8.143.040,00																			8.143.040,00	
4	099300	Balai Harta Peninggalan Medan					583.946,00	5.499.721,00	91.020,00													6.174.687,00	
5	099299	Balai Harta Peninggalan Surabaya	0,00	0,00	0,00	-	371.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	371.200,00	
6	99298	Balai Harta Peninggalan Semarang					2.652.800,00	15.494.463,00	117.711,00	772.500,00												19.037.474,00	
TOTAL			8.808.140,00	0,00	0,00		3.607.946,00	20.994.184,00	208.731,00	772.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		34.391.591,00	
DIT.JEN PEMASYARAKATAN																							
1	404259	BALAI PEMASYARAKATAN JAKBAR							358.600,00													358.600,00	
2	408692	RUMAH TAHANAN NEGARA JAKARTA PUSAT										375.915.279,00										375.915.279,00	
3	20562	LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB SENTUL	3.840.356,00																			3.840.356,00	
4	109104	LEMBAGA PEMASYARAKATAN KARAWANG					65.714.089,00					110.140.750,00										175.854.839,00	
5	109105	LEMBAGA PEMASYARAKATAN BEKASI					55.898.617,00					194.146.953,00			-	-	-	-	-	-	-	250.045.570,00	
6	404322	LEMBAGA PEMASYARAKATAN BANGSELU BANDUNG					35.846.217,00	2.668.678,00														38.514.895,00	
7	404347	LAPAS GARUT									2.680.374,00											2.680.374,00	
8	404353	LAPAS CIAMIS	4.795.694,00				5.189.200,00	8.663.974,00	999.091,00						-	-	-	-	-	-	-	19.647.955,00	

[illegible]

66	404962	BALAI PEMASYARAKATAN PURWOKERTO		30.992.000,00			22.500,00	2.621.669,00	84.915,00				2.491.000,00	521111 - internet					36.212.084,00
67	404971	LEMBAGA PEMASYARAKATAN PURWOKERTO	360.000,00					31.107.115,00	178.000,00			25.406.994,00	2.125.500,00	521111 - internet					59.177.609,00
68	404987	RUMAH TAHANAN NEGARA BANYUWAS					1.261.250,00	7.068.817,00	615.399,00										8.945.466,00
69	404993	RUMAH TAHANAN NEGARA PURBALINGGA	900.900,00				15.750,00	8.104.765,00	98.603,00				736.200,00	521111 - internet					9.856.218,00
70	405007	RUMAH TAHANAN NEGARA BANJARNEGARA					1.800.000,00	4.500.000,00	50.000,00				1.000.000,00	521111 - internet					7.350.000,00
71	405022	LAPAS CILACAP	324.000,00				2.515.400,00	16.057.728,00	34.109,00			121.348.952,00							140.280.180,00
72	405038	LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEMUDA PLANTUNGAN	850.986,00					1.250.312,00											2.101.298,00
73	408655	LEMBAGA PEMASYARAKATAN ANAK KUTOARJO		47.236.000,00			1.572.700,00	3.655.350,00	50.320,00				536.000,00	521111 - internet					53.050.370,00
74	497691	RUMAH TAHANAN NEGARA BATANG										4.105.197,00							4.105.197,00
75	497702	LEMBAGA PEMASYARAKATAN PASIR PUTIH NUSAKAMBANGAN										27.133.935,00							27.133.935,00
76	497711	LEMBAGA PEMASYARAKATAN SLAWI					3.049.000,00	11.415.907,00	63.140,00										14.528.047,00
77	626089	RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAN NEGARA SEMARANG						2.366.770,00		514.000,00									2.880.770,00
78	632029	BAPAS KELAS II NUSAKAMBANGAN						3.276.580,00											3.276.580,00
79	632057	LAPAS KHUSUS KELAS IIA KARANGANYAR NUSAKAMBANGAN		24.954.000,00				74.707.296,00	50.605.159,00										150.266.455,00
80	632059	LAPAS NARKOTIKA KELAS IIB PURWOKERTO					615.000,00	9.503.124,00	41.900,00				973.500,00	521111 - internet					24.201.035,00
81	652351	RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAN NEGARA WONOGIRI					227.450,00	842.280,00	89.070,00			13.067.511,00	365.500,00	521111 - internet					1.524.300,00
82	652902	LEMBAGA PEMASYARAKATAN TERBUKA KENDAL	35.828.000,00				5.423.770,00	12.772.367,00				24.301.856,00							78.325.993,00
83	652916	LEMBAGA PEMASYARAKATAN TERBUKA NUSAKAMBANGAN						6.840.655,00											6.840.655,00
84	653000	LEMBAGA PEMASYARAKATAN NARKOTIKA NUSAKAMBANGAN						24.589.548,00	538.871,00			4.536.138,00							29.664.557,00
85	653307	RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAN NEGARA PURWOKERTO						1.765.645,00	22.500,00				998.000,00	521111 - internet					2.786.145,00
86	653311	RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAN NEGARA SURAKARTA	45.822,00				60.500,00	1.680.197,00	1.013.726,00										2.800.245,00
87	653328	RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAN NEGARA PEKALONGAN	186.143,00				257.300,00	1.282.894,00	49.500,00				660.000,00	521111 - internet					2.435.837,00
88	653332	RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAN NEGARA SRAGEN					224.850,00	1.266.540,00	38.390,00		104.182,00								1.633.962,00
89	653349	RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAN NEGARA PURBALINGGA					185.220,00	1.579.740,00	36.820,00										1.801.780,00
90	653353	RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAN NEGARA CILACAP					570.650,00	2.617.407,00	569.000,00				229.900,00	521111 - internet					3.886.957,00
91	109111	RUMAH TAHANAN NEGARA BANTUL	15.892.012,00				6.757.700,00	7.496.901,00	147.478,00	1.433.300,00									31.727.391,00
92	109636	RUMAH TAHANAN NEGARA YOGYAKARTA					60.000,00	13.041.772,00	175.468,00	1.215.500,00									14.492.740,00
93	404585	BALAI PEMASYARAKATAN YOGYAKARTA						2.050.140,00	639.773,00	465.570,00									3.155.483,00
94	404591	LEMBAGA PEMASYARAKATAN YOGYAKARTA	4.735.683,00			-		24.672.474,00	177.996,00	1.507.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	31.093.153,00
95	404611	RUMAH TAHANAN NEGARA WATES				-		4.393.193,00	609.756,00										5.002.949,00
96	404630	RUMAH TAHAN NEGARA WONOSARI	6.763.710,00				3.207.200,00	5.132.767,00	35.467,00	998.500,00									16.137.644,00
97	418340	Lapas Penempatan Kelas IIB Yogyakarta	941.748,00			-		14.321.862,00	-	947.244,00	-		149.087.900,00	-	-	-	-	-	165.298.754,00
98	419140	LPKA JOGJAKARTA, PROVINSI D.I YOGYAKARTA				-		8.433.552,00	2.082.750,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.516.302,00
99	497727	LEMBAGA PEMASYARAKATAN NARKOTIKA YOGYAKARTA	15.682.242,00			-		18.845.999,00	1.358.957,00	-	-		2.695.900,00	-	-	-	-	-	38.583.098,00
100	632590	RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAN NEGARA YOGYAKARTA				-		6.142.795,00	1.285.357,00										7.428.152,00
101	652433	KANTOR RUPBASAN WATES					129.200,00	2.218.876,00	561.935,00										2.910.011,00
102	652852	LEMBAGA PEMASYARAKATAN SLEMAN	4.605.363,00			-		7.429.500,00	144.252,00	1.454.201,00									13.633.316,00
103	653133	BALAI PEMASYARAKATAN WONOSARI				-		1.065.664,00	24.760,00										1.090.424,00
104	653438	RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAN NEGARA BANTUL					190.800,00	2.663.353,00	671.300,00										3.525.453,00
105	653442	RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAN NEGARA WONOSARI				-		1.540.354,00	80.660,00	453.500,00									2.074.514,00
106	109112	RUMAH TAHANAN NEGARA SURABAYA						58.228.521,00	38.360,00	629.500,00									58.896.381,00
107	405044	BALAI PEMASYARAKATAN SURABAYA					1.394.000,00	3.635.796,00	51.422,00	492.000,00									5.573.188,00
108	405053	LEMBAGA PEMASYARAKATAN KALISOSOK						106.722.271,00		2.576.410,00									109.298.681,00
109	405075	LEMBAGA PEMASYARAKATAN SIDOARJO					2.912.100,00	26.406.220,00	100.000,00	1.715.000,00	100.000,00								31.233.320,00
110	405081	LAPAS MOJOKERTO					288.300,00	20.958.150,00		1.155.000,00			433.455.345,00						455.856.795,00
111	405101	LAPAS JOMBANG	888.000,00				442.500,00	14.400.657,00	864.000,00				128.831.485,00						145.426.642,00
112	405102	BALAI PEMASYARAKATAN BOJONEGORO		16.296.000,00			307.400,00	1.153.000,00		833.500,00									18.658.900,00
113	405120	LEMBAGA PEMASYARAKATAN BOJONEGORO						10.922.360,00	31.160,00				48.466.189,00						59.419.709,00
114	405126	LAPAS TUBAN						12.776.675,00	57.500,00	1.696.000,00			36.414.817,00						50.944.992,00
115	405132	LAPAS LAMONGAN					1.639.070,00				648.500,00								2.287.570,00
116	405141	BALAI PEMASYARAKATAN KEDIRI						2.562.804,00	219.370,00	454.000,00									3.236.174,00
117	405157	LEMBAGA PEMASYARAKATAN KEDIRI					167.100,00	22.187.778,00	2.407.370,00										24.762.248,00
118	405172	RUMAH TAHANAN NEGARA NGANJUK					35.400,00	7.584.700,00	1.339.100,00	-	-		5.573.325,00						14.532.525,00
119	405188	LAPAS BLITAR					3.940.550,00	11.800.307,00	62.395,00	1.333.500,00	650.000,00	41.651.219,00							59.437.971,00

120	405194	RUMAH TAHANAN NEGARA TRENGGALEK					2.289.000,00	9.520.571,00	79.140,00	662.500,00		246.176.000,00						258.727.211,00
121	405208	BALAI PEMASYARAKATAN JEMBER					245.920,00											245.920,00
122	405214	LEMBAGA PEMASYARAKATAN JEMBER					5.597.535,00	17.929.171,00	129.140,00	1.386.000,00		307.129.142,00						332.170.988,00
123	405223	LAPAS BONDOWOSO	43.682.100,00					8.689.618,00	80.140,00	1.868.000,00								54.319.858,00
124	405239	LAPAS KELAS IIA BANYUWANGI					1.446.960,00	22.979.399,00	114.487,00	739.500,00		37.881.615,00						63.161.961,00
125	405245	RUMAH TAHANAN NEGARA SITUBONDO					1.066.610,00	6.139.973,00	58.570,00	1.427.300,00		16.766.950,00						25.459.403,00
126	405251	BALAI PEMASYARAKATAN PAMEKASAN						4.871.265,00	2.976.425,00									7.847.690,00
127	405270	LEMBAGA PEMASYARAKATAN PAMEKASAN						27.031.669,00	62.320,00	1.210.500,00		931.937.308,00						960.241.797,00
128	405282	RUMAH TAHANAN NEGARA SUMENEP					468.010,00	11.632.732,00		1.316.900,00								13.417.642,00
129	405302	LAPAS KELLAS III ARJASA	16.911.000,00				382.920,00											17.293.920,00
130	405311	RUMAH TAHANAN NEGARA SAMPANG					45.360,00	4.134.840,00		849.500,00								5.029.700,00
131	405327	BALAI PEMASYARAKATAN MALANG						2.883.700,00	1.385.500,00	-	402.200,00							4.671.400,00
132	405333	LEMBAGA PEMASYARAKATAN MALANG	172.381.000,00				5.290.450,00	59.305.057,00	261.000,00	1.284.800,00	180.000,00	556.624.036,00	8.748.394,00	BBM				804.074.737,00
133	405358	LAPAS PROBOLINGGO					2.455.500,00	9.053.822,00	131.070,00	3.075.500,00		84.748.500,00						99.464.392,00
134	405364	RUMAH TAHANAN NEGARA KRAKSAAN					1.191.300,00	8.254.110,00	75.785,00	2.400.796,00								11.921.991,00
135	405373	LAPAS LUMAJANG										601.994.090,00						601.994.090,00
136	405389	LAPAS PASURUAN										98.760.568,00						98.760.568,00
137	405395	RUMAH TAHANAN NEGARA BANGIL						15.413.011,00	80.690,00	1.350.300,00	-	209.769.959,00						226.613.960,00
138	405409	LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUNAN MALANG					12.869.000,00	7.258.726,00	114.280,00	747.500,00								20.989.506,00
139	405415	BALAI PEMASYARAKATAN MADIUN					479.760,00	3.747.662,00	148.800,00	536.000,00								4.912.222,00
140	405421	LEMBAGA PEMASYARAKATAN MADIUN	57.253.000,00				29.000,00	52.941.032,00										110.223.032,00
141	405446	RUMAH TAHANAN NEGARA MAGETAN					11.225.750,00	6.441.915,00	982.957,00	-	-	29.944.843,00						48.595.465,00
142	405452	LAPAS NGAWI										724.519.795,00						724.519.795,00
143	405461	RUMAH TAHANAN NEGARA PONOROGO	4.425.000,00				139.300,00	7.655.573,00	84.953,00	1.353.500,00	30.000,00	2.723.025,00						16.411.351,00
144	405477	RUMAH TAHANAN NEGARA PACITAN					46.800,00	4.601.230,00	62.320,00	877.500,00								5.887.850,00
145	405483	LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK BLITAR					341.350,00	5.871.259,00	451.500,00	949.000,00	1.034.000,00							8.647.109,00
146	418364	Rutan Perempuan Kelas IIA Surabaya						12.414.194,00										12.414.194,00
147	567869	RUMAH TAHANAN NEGARA GRESIK					19.648.000,00	11.375.455,00	109.175,00	539.000,00		29.264.682,00						60.936.312,00
148	626093	RUMAH PENYIMPANAN BARANG SITAAH NEGARA SURABAYA					118.700,00	1.928.785,00	625.100,00									2.672.585,00
149	652386	KANTOR RUPBASAN BLITAR					30.500,00	2.239.396,00	79.500,00	1.031.000,00								3.380.396,00
150	653002	LEMBAGA PEMASYARAKATAN NARKOTIKA MADIUN						48.788.851,00	78.140,00	2.908.000,00		366.454.243,00						418.229.234,00
151	653019	LEMBAGA PEMASYARAKATAN NARKOTIKA PAMEKASAN						33.951.782,00	1.710.564,00			608.436.363,00	500,00					644.099.209,00
152	653370	RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAH NEGARA MOJOKERTO	9.223.000,00					2.889.400,00		814.000,00								12.926.400,00
153	653374	RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAH NEGARA JOMBANG	6.697.000,00				157.500,00	727.376,00	671.607,00									8.253.483,00
154	653381	RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAH NEGARA PASURUAN						1.422.244,00	664.180,00									2.086.424,00
155	662945	RUPBASAN PROBOLINGGO	4.808.475,00				1.036.500,00	1.687.168,00	127.000,00	1.417.000,00								9.076.143,00
156	405492	LEMBAGA PEMASYARAKATAN BANDA ACEH	0,00	46.935.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.935.000,00
157	405503	RUMAH TAHANAN NEGARA SABANG	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.075.992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.075.992,00
158	405528	LEMBAGA PEMASYARAKATAN LHOK SEUMAWE	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.297.017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.297.017,00
159	405534	LAPAS KELAS III LHOK NGA	0,00	0,00	0,00		34.426.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.426.400,00
160	405543	LAPAS KELAS IIB LHOKSUKON	0,00	0,00	0,00		18.894.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480.215.101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499.109.101,00
161	405590	LAPAS KELAS IIB IDI RAYEUK	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.967.623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.967.623,00
162	405610	LAPAS KELAS IIB IDI	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374.425.514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374.425.514,00
163	405622	LAPAS KELAS IIB BLANGKEJEREN	0,00	18.915.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.915.000,00
164	405647	LAPAS KELAS III CALANG	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.582.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.582.700,00
165	683657	LAPAS NARKOTIKA KELAS IIB LANGSA	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.023.547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.023.547,00
166	683992	LAPAS PEREMPUNAN KELAS IIB SIGLI	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.369.621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.369.621,00
167	109114	LEMBAGA PEMASYARAKATAN WANITA MEDAN										388.574.739,00						388.574.739,00
168	109115	LEMBAGA PEMASYARAKATAN ANAK MEDAN										118.569.913,00						118.569.913,00
169	109116	RUMAH TAHANAN NEGARA MEDAN										4.034.440.529,00						4.034.440.529,00
170	405713	LEMBAGA PEMASYARAKATAN BINJAI										508.134.371,00						508.134.371,00
171	405735	LAPAS TANJUNG BALAI ASAHAN										765.562.745,00						765.562.745,00
172	405772	LAPAS KELAS III LABUAN BILIK					2.860.008,00					1.401.901,00						4.261.909,00
173	405797	RUTAN KELAS I LABUHAN DELI										23.893.916,00						23.893.916,00
174	405801	RUMAH TAHANAN NEGARA PANGKALAN BRANDAN										6.374.115,00						6.374.115,00
175	405817	LEMBAGA PEMASYARAKATAN TEBINGTINGGI DELI										160.641.349,00						160.641.349,00
176	405823	LAPAS LUBUK PAKAM										762.608.344,00						762.608.344,00
177	405832	RUMAH TAHANAN NEGARA SIDIKALANG										302.256.296,00						302.256.296,00
178	405848	LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEMATANG SIANTAR					75.327.232,00					1.145.334.664,00						1.220.661.896,00

[illegible]

[illegible]

393	408649	LEMBAGA PEMASYARAKATAN DOMPU	0,00	55.506.000,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.044.300,00	Retur belanja pegawai Februari TA 2020 yang diterima pada bulan Maret 2020 ke rekening giro bendahara yang lama tapi belum di lakukan penutupan	-	-	-	81.609.897,00
394	418351	Lapas Perempuan Kelas III Mataram	0,00	0,00	0,00	-	-	174.000,00	-	-	859.700,00	122.200,00	63.604.441,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	64.760.341,00
395	632734	RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAN NEGARA MATARAM	0,00	25.548.000,00	-	-	-	923.100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26.471.100,00
396	652923	LAPAS TERBUKA KELAS IIB LOMBOK TENGAH	0,00	38.688.000,00	-	-	-	953.100,00	-	-	-	-	2.728.352,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42.369.452,00
397	653182	BALAI PEMASYARAKATAN SUMBAWA BESAR	0,00	12.961.000,00	-	-	-	38.000,00	-	1.893.300,00	68.200,00	910.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.870.500,00
398	653417	RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAN NEGARA SUMBAWA BESAR	0,00	11.302.000,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.302.000,00
399	683373	LPKA KELAS II LOMBOK TENGAH	0,00	0,00	0,00	-	-	85.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	85.000,00
400	407675	LAPAS ATAMBUA	-	20.864.450,00	-	-	-	-	-	-	-	-	136.290.818,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	157.155.268,00
401	407681	RUMAH TAHANAN NEGARA KEFAMENANU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17.800.462,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17.800.462,00
402	407701	LAPAS KELAS III BAA	-	24.726.150,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.726.150,00
403	407702	RUMAH TAHANAN NEGARA SO'E	-	-	-	-	-	2.477.271,00	-	-	-	-	3.438.553,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.915.824,00
404	407720	LEMBAGA PEMASYARAKATAN KALABAH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	144.341.264,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	144.341.264,00
405	407741	LEMBAGA PEMASYARAKATAN ENDE	-	-	-	-	-	344.810,00	-	-	-	738.310,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.083.120,00
406	407757	RUMAH TAHANAN NEGARA BAJAWA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	84.202.192,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	84.202.192,00
407	407763	RUMAH TAHANAN NEGARA RUTENG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	41.123.737,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	41.123.737,00
408	621797	LEMBAGA PEMASYARAKATAN ANAK (LPA) KUPANG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	555.083,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	555.083,00
409	683352	LAPAS PEREMPUAN KELAS IIB KUPANG	-	-	-	-	-	6.151.530,00	-	-	-	-	57.227.492,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	63.379.022,00
410	683416	RUMAH TAHANAN KELAS IIB KUPANG	-	231.362.250,00	-	-	-	11.225.206,00	-	38.360,00	1.424.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	244.049.816,00
411	109149	Balai Pemasyarakatan Jayapura	-	14.478.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14.478.000,00
412	352615	LPKA Jayapura	-	29.203.000,00	-	-	-	3.780.000,00	-	-	-	-	750.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33.733.000,00
413	407794	Lembaga Pemasyarakatan Abepura	-	-	-	-	-	10.663.215,00	-	-	-	-	19.419.935,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30.083.150,00
414	407808	Lembaga Pemasyarakatan Wanena	-	45.347.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45.347.000,00
415	407814	Lembaga Pemasyarakatan Nabire	-	-	-	-	-	5.903.042,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.903.042,00
416	407839	Lembaga Pemasyarakatan Serui	-	-	-	-	-	5.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.000.000,00
417	418360	Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Jayapura	-	-	-	-	-	3.780.000,00	-	-	-	-	793.200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.573.200,00
418	632751	Rumah Penyimpanan Barang Sitaan Negara Jayapura	-	-	-	-	-	2.779.713,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.779.713,00
419	653051	Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Jayapura	-	-	-	-	-	8.785.108,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.785.108,00
420	109151	BALAI PEMASYARAKATAN BENGKULU	-	55.184.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	55.184.000,00
421	352606	LPKA Bengkulu Provinsi Bengkulu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19.354.841,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19.354.841,00
422	407902	LEMBAGA PEMASYARAKATAN BENGKULU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	162.072.139,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	162.072.139,00
423	407927	LEMBAGA PEMASYARAKATAN CURUP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	41.010.984,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	41.010.984,00
424	418342	Lapas Perempuan Kelas IIB Bengkulu	-	4.941.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.941.000,00
425	683997	Rutan Kelas II B Bengkulu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	88.391.303,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	88.391.303,00
426	407503	LAPAS KELAS III LABUHA	-	27.032.000,00	-	-	-	92.467.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	119.499.000,00
427	497840	LEMBAGA PEMASYARAKATAN JAILOLO	-	39.937.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	39.937.000,00
428	632047	BAPAS KELAS II TIDORE	-	23.678.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23.678.000,00
429	632712	RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAN NEGARA TERNATE	-	47.600.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	47.600.000,00
430	652827	LEMBAGA PEMASYARAKATAN TERNATE	-	22.677.000,00	-	-	-	12.616.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35.293.000,00
431	684003	Rutan Kelas II B Weda	-	37.170.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	37.170.000,00
432	107150	BALAI PEMASYARAKATAN KELAS I TANGERANG	-	-	-	-	-	5.418.085,00	-	1.057.920,00	624.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.100.005,00
433	404523	LEMBAGA PEMASYARAKATAN SERANG	0,00	0,00	0,00	-	-	24.376.000,00	-	34.070,00	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.410.070,00
434	404548	LAPAS KELAS III RANGKAS BITUNG	0,00	0,00	0,00	-	-	73.500,00	-	7.596.724,00	79.140,00	2.121.317,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.870.681,00
435	404554	LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEMUDA TANGERANG	0,00	0,00	0,00	-	-	10.593.375,00	-	117.966.233,00	83.860,00	-	0,00	22.937.388,00	-	-	-	-	-	-	-	-	151.580.856,00
436	404563	LEMBAGA PEMASYARAKATAN ANAK PRIA TANGERANG	0,00	0,00	0,00	-	-	5.467.375,00	-	12.078.908,00	38.360,00	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17.584.643,00
437	404579	LAPAS KELAS IIA TANGERANG	0,00	0,00	0,00	-	-	2.500.000,00	-	39.997.030,00	120.000,00	2.100.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	44.717.030,00
438	408661	LEMBAGA PEMASYARAKATAN WANITA TANGERANG	-	-	-	-	-	25.135.645,00	-	80.710,00	1.966.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27.162.355,00
439	408706	LEMBAGA PEMASYARAKATAN PRIA TANGERANG	0,00	0,00	0,00	-	-	141.171.810,00	-	472.255,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	141.644.065,00
440	497846	RUMAH TAHANAN NEGARA TANGERANG	0,00	0,00	0,00	-	-	55.364.258,00	-	4.217.169,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	59.581.427,00
441	526815	RUMAH TAHANAN NEGARA SERANG	-	67.888.000,00	-	-	-	69.000,00	-	20.460.085,00	-	-	126.904.613,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	215.321.698,00
442	626080	LAPAS TERBUKA CIANGIR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.594.868,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14.594.868,00
443	632573	RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAN NEGARA SERANG	-	16.237.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16.237.000,00
444	653239	BALAI PEMASYARAKATAN SERANG	-	2.296.000,00	0,00	-	-	5.370.406,00	-	1.020.000,00	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.686.406,00
445	683636	LAPAS KELAS IIA CILEGON	0,00	38.447.000,00	-	-	-	81.149.352,00	-	-	1.198.500,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	120.794.852,00
446	418347	Lapas Perempuan Kelas III Pangkat Pinang	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	22.210.500,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-	-	-	-	22.210.500,00

447	406922	LEMBAGA PEMASYARAKATAN GORONTALO		107.566.000,00														107.566.000,00
448	109.154	LAPAS BATAM			18.172.000,00	60.049.988,00		1.616.501,00										79.838.489,00
449	406.271	LEMBAGA PEMASYARAKATAN TANJUNG PINANG			4.796.900,00													4.796.900,00
450	406.287	CABANG RUMAH TAHANAN NEGARA TANJUNG BALAI KARIMUN			6.111.100,00	10.472.128,00	91.050,00	860.000,00	-			285.832.583,00						303.366.861,00
451	408.551	LAPAS KELAS III DABO SINGKEP			193.800,00	1.893.532,00		365.500,00				3.478.542,00						5.931.374,00
452	497.861	RUMAH TAHANAN NEGARA BATAM			6.701.200,00	42.059.294,00												48.760.494,00
453	497.877	LEMBAGA PEMASYARAKATAN NARKOTIKA TANJUNG PINANG				19.640.584,00												19.640.584,00
454	653.093	BALAI PEMASYARAKATAN TANJUNG PINANG			40.300,00	2.700.472,00	68.500,00	470.000,00										3.279.272,00
455	667.944	RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS I TANJUNG PINANG		50.604.000,00		18.643.854,00												69.247.854,00
456	683.998	Lapas anak Kelas III Batam			4.671.000,00	5.179.525,00												9.850.525,00
457	407851	LEMBAGA PEMASYARAKATAN MANOKWARI										16.227.270,00						16.227.270,00
458	407870	LAPAS KELAS III TEMINABUHAN		9.249.900,00														9.249.900,00
459	407876	LEMBAGA PEMASYARAKATAN SORONG			29.711.500,00													29.711.500,00
460	407882	LEMBAGA PEMASYARAKATAN FAK-FAK		21.093.100,00	2.544.000,00	2.944.000,00		2.600.000,00				53.294.000,00						82.475.100,00
461	407891	LAPAS KELAS III KAIMANA		9.561.900,00														9.561.900,00
462	632049	BAPAS KELAS II FAKFAK		5.648.800,00														5.648.800,00
463	653196	BALAI PEMASYARAKATAN SORONG		17.946.050,00														17.946.050,00
464	683441	BALAI PEMASYARAKATAN KELAS I MANOKWARI		23.942.600,00														23.942.600,00
465	683441	BALAI PEMASYARAKATAN KELAS I MANOKWARI		21.766.000,00														21.766.000,00
466	683767	RUTAN KELAS IIB BINTUNI PROPINSI PAPUA BARAT		14.456.650,00								36.014.000,00						50.470.650,00
467	352617	LPKA Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat			256.000,00	4.337.100,00												4.593.100,00
468	407267	RUMAH TAHANAN NEGARA MAJENE										39.001.915,00						39.001.915,00
469	407273	LEMBAGA PEMASYARAKATAN POLEWALI	1.482.044,00		916.000,00	14.826.954,00	68.140,00					73.083.432,00						90.376.570,00
470	407282	LAPAS KELAS III MAMASA			98.000,00	2.837.501,00	943.489,00	1.179.800,00	-			11.019.575,00	-					16.078.365,00
471	407298	RUMAH TAHANAN NEGARA MAMUJU	49.079.000,00		77.000,00	7.931.290,00		970.500,00				66.121.000,00						124.178.790,00
472	417949	RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAAN NEGARA (RUPBASAN) MAMUJU		8.798.000,00		2.296.960,00												11.094.960,00
473	418362	Lapas Perempuan Kelas III Mamuju	3.137.000,00			6.476.400,00	4.506.019,00											14.119.419,00
474	497883	BALAI PEMASYARAKATAN POLEWALI			40.501,00	1.968.803,00	743.570,00											
475	683423	RUMAH TAHANAN KELAS IIB PASANG KAYU	-	-	-	-	8.733.212,00	-	-	-	-	23.366.342,00	-	-	-	-	-	32.099.554,00
476	632037	BAPAS KELAS II TARAKAN			220.740,00													220.740,00
477	405693	LEMBAGA PEMASYARAKATAN MEDAN										166.901.115,00						166.901.115,00
478	407163	RUMAH TAHANAN NEGARA MALINO				959.000,00												959.000,00
479	653044	LEMBAGA PEMASYARAKATAN NARKOTIKA SUNGUMINASA				12.808.597,00												12.808.597,00
480	684002	LAPAS KELAS IIB PAHLUWATO										153.964.951,00						153.964.951,00
481	407653	RUMAH TAHANAN NEGARA RABA/BIMA													10.000,00	Sisa uang di rekening bendahara yang merupakan sisa pencairan SP2D yang belum dilakukan penarikan oleh bendahara		10.000,00
482	409221	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM MATARAM													200,00	Sisa uang di rekening bendahara yang merupakan sisa pencairan SP2D yang belum dilakukan penarikan oleh bendahara		200,00
483	407392	LAPAS KELAS III SAPARUA													14.000,00	Saldo kas pada rekening bendahara berupa saldo pencairan anggaran yang belum ditarik dari rekening		14.000,00
TOTAL				107.806.023,00	2.964.893.625,00	0,00	1.730.897.527,00	4.745.207.497,00	238.079.403,00	152.387.715,00	6.471.892,00	38.361.803.967,00	0,00	259.147.968,00	0,00	22.349.221,00	0,00	48.568.043.938,00
DITJEN IMIGRASI																		
1	408046	KANIM KELAS I KHUSUS MEDAN		190.385.000,00														190.385.000,00
2	408052	KANIM KELAS II SIANTAR		22.269.000,00														22.269.000,00
3	408981	KANIM KELAS II SIBOLGA		12.300.000,00														12.300.000,00
4	408624	Kantor Imigrasi Kelas I TPI Khusus Batam			7.564.500,00	69.016.835,00	1.637.216,00											78.218.551,00
5	677181	Rudenim Tanjung Pinang		67.548.000,00		55.300,00												67.603.300,00
6	408103	Kantor Imigrasi Kelas I TPI Tanjungpinang				14.261.923,00	188.006,00	3.604.570,00										18.054.499,00
7	409041	Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjung Uban		36.398.250,00		11.916.825,00		1.477.750,00										49.792.825,00
8	408128	Kantor Imigrasi Kelas II TPI Belakang Padang	-	-	-	454.500,00	11.900.272,00	88.600,00	1.820.054,00	54.780,00	-	-						14.318.206,00
9	408112	Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjung Balai Karimun			128.000,00	18.520.802,00	494.170,00	2.482.500,00										21.625.472,00
10	409057	Kantor Imigrasi Kelas II TPI Ranai			744.000,00	5.823.455,00	85.500,00	802.500,00										7.455.455,00
11	409020	Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tarempa		11.644.000,00		4.688.162,00	860.500,00											17.192.662,00
							825.000,00											825.000,00

12	109161	Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Dabo Singkep							1.924.000,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										

68	686574	Kantor Imigrasi Kelas III TPI Putussibau			30.108.000,00		354.500,00	5.726.067,00	702.904,00															36.891.471,00
69	109159	Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tembagapura		23.406.000,00				9.083.771,00	139.840,00	2.319.100,00														34.948.511,00
70	408602	Kantor Imigrasi Kelas I TPI Ambon	4.689.166,00																					4.689.166,00
71	662952	Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tual	6.825.800,00		476.800,00	Belanja Tunjangan Struktural PNS	1.058.000,00	8.905.239,00	1.108.042,00				3.008.450,00											21.382.331,00
72	686553	Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Baubau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.834.228,00	0,00	2.488.300,00	1.818.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.140.828,00
73	686549	Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Wakatobi	0,00	0,00	0,00	0,00	594.000,00	4.995.773,00	1.952.599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.542.372,00
74	418937	Kantor Imigrasi Palopo		26.883.300,00																				26.883.300,00
75	664675	Rudenim Makassar		45.668.500,00																				45.668.500,00
76	480505	Kantor Imigrasi Kelas I TPI Temate		37.191.000,00																				37.191.000,00
77	408278	Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sorong	0,00	29.472.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.472.000,00
78	408922	Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Soekarno-Hatta	-	-	-	-	-	19.428.500,00	3.436.785,00															22.865.285,00
79	652276	Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jakarta Utara					2.991.380,00	44.880.601,00	257.080,00															48.129.061,00
80	109155	KANTOR IMIGRASI KELAS I KHUSUS NON TPI JAKARTA SELATAN		136.187.000,00																				136.187.000,00
TOTAL			12.315.129,00	1.340.944.250,00	30.584.800,00		125.040.112,00	1.091.276.975,00	32.518.181,00	83.895.135,00	4.616.521,00	159.266.560,00	0,00	90.705.516,00		0,00		0,00		0,00		0,00		2.971.163.179,00
DITJEN KEKAYAAN INTELEKTUAL																								
1	097102	Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual						1.588.537.401,00	4.009.500,00		85.260.628,00			2.951.000,00	Langganan Air Minum Kantor									1.680.758.529,00
													21.933.748,00	Jasa Pengolahan Limbah									21.933.748,00	
														41.665.169,00	Penggunaan RFID TA 2021 yang masih harus dibayar									41.665.169,00
TOTAL			0,00	0,00	0,00		0,00	1.588.537.401,00	4.009.500,00	0,00	85.260.628,00	0,00	0,00	66.549.917,00		0,00		0,00		0,00		0,00		1.744.357.446,00
BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL																								
1	409288	BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.889.384,00	1.163.168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.052.552,00
TOTAL			0,00	0,00	0,00		0,00	84.889.384,00	1.163.168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.052.552,00
GRAND TOTAL			145.703.304,00	4.647.319.825,00	176.770.800,00		1.865.921.240,00	8.319.871.427,00	298.318.529,00	265.282.108,00	100.435.561,00	38.521.069.627,00	0,00	8.640.934.786,00		0,00		25.489.421,00		0,00		0,00		63.007.116.719,00

**Rincian Utang Kepada Pihak Ketiga Berdasarkan Satuan Kerja
Per 31 Desember 2021**

NO	KODE SATKER	NAMA SATKER	Belanja Pegawai Yang Masih Harus Dibayar				HUTANG PIHAK KETIGA										Belanja Modal Yang Masih Harus Dibayar		Utang Pihak Ketiga Lainnya		Dana Pihak Ketiga		JUMLAH UTANG
			Kekurangan Gaji	Uang Makan	Lain-Lain		Langganan Daya Jasa AIR (PAM)	Langganan Daya Jasa Listrik (PLN)	Langganan Daya Jasa Telpom (Telkom)	Langganan Daya Jasa Internet)	Langganan Jasa Pos	BAMA (Lauk Pauk)	Beras Bulog	Lain-Lain		Rp	Keterangan	Rp	Keterangan (misal: sisa tunkek yang belum dikembalikan	Rp	Keterangan		
					Rp	Keterangan								Rp	Keterangan								
SEKRETARIAT JENDERAL																							
1	408870	Kanwil Hukum dan HAM Bali	0,00	0,00	0,00	0,00	1.839.880,00	28.846.544,00	761.440,00													31.447.864,00	
2	408751	Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur					391.800,00	64.080.515,00					1.740.000,00									66.212.315,00	
3	409181	Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM D.I.Yogyakarta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.240.412,00	0,00	0,00				0,00		0,00						33.240.412,00	
4	408720	Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM D.I.Yogyakarta						80.973.187,00	143.440,00													81.116.627,00	
5	408742	Kanwil Jateng		2.738.000,00			209.600,00	33.460.581,00	260.023,00													36.668.204,00	
6	667786	Kanwil Kepri (667786)	14.851.715,00					22.505.534,00	874.870,00				840.500,00									39.072.619,00	
7	408824	Kanwil Lampung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.099.035,00														29.099.035,00	
8	408798	Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Padang				-	-	-	11.006.000,00	-	-	-	29.340.000,00									40.346.000,00	
9	649001	Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kep. Bangka Belitung (649001)						21.258.648,00	38.360,00			1.258.500,00										22.555.508,00	
10	409175	Kanwil Kemendiknas Bengkulu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.971.462,00	302.674,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.274.136,00	
11	408818	Kanwil Kemendiknas Sumatera Selatan (seljen)						14.693.791,00				247.520,00										14.941.311,00	
12	408830	Divisi Administrasi Kanwil Kabbar (408830)		125.709.000,00				22.969.285,00	35.387.924,00													148.678.285,00	
13	409190	Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Tengah																					
14	408892	Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku	230.886,00																			230.886,00	
	1.094.997,00																				1.094.997,00		
	596.414,00																					596.414,00	
			58.064.000,00																			58.064.000,00	
																							30.979.524,00
15	408906	Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Jayapura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.664.876,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.664.876,00	
16	409226	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM MATARAM		114.693.950,00				92.750,00			13.260.758,00											128.047.458,00	
17	409201	Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kendari				146.186.000,00																146.186.000,00	
18	408861	Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Utara						22.450.525,00														22.450.525,00	
19	667790	Kantor Wilayah Hukum dan HAM Sulawesi Barat 667790		40.277.000,00				16.307.771,00	1.287.050,00													57.871.821,00	
20	408773	Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Ulung Pandang	0,00	0,00	0,00		1.884.690,00	22.334.557,00	102.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.321.457,00	
21	409210	Kanwil Sulawesi Tengah DIPA Sekretaris Jenderal						30.474.389,00														30.474.389,00	
22	404233	Sekretariat Jenderal						198.093.332,00	21.355.135,00				8.182.879.800,00		3.140.200,00			Jurnal Kas Lainnya atas retur: - Biaya Perjudin Kegiatan Catur a n Desky Numansayah Rp1.834.200 - Biaya Swab Seleksi CPNS a n Rahendo Jati Rp308.000 dan Sunanto Rp198.000 - Biaya Komunikasi a n Febri Ramadanti Rp800.000			8.405.468.467,00		
23	408849	Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Selatan					1.956.935,00	25.319.310,00	214.344,00	3.960.000,00												31.450.589,00	
24	408855	Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Timur						16.854.784,00				12.311.585,00										29.166.369,00	
TOTAL			16.774.012,00	341.481.950,00	146.186.000,00		6.375.655,00	788.965.986,00	25.339.546,00	28.226.768,00	4.086.520,00	0,00	8.224.531.385,00		0,00		3.140.200,00		0,00	0,00	9.585.108.103,00		
DIT.JEN AHU																							
1	409257	Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum	362.700,00																			362.700,00	
2	409257	Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum						302.400,00														302.400,00	
3	409257	Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum	8.143.040,00																			8.143.040,00	
4	099300	Balai Harta Peninggalan Medan					583.946,00	5.499.721,00	91.020,00													6.174.687,00	
5	099299	Balai Harta Peninggalan Surabaya	0,00	0,00	0,00	-	371.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00	371.200,00	
6	99298	Balai Harta Peninggalan Semarang					2.652.800,00	15.494.463,00	117.711,00	772.500,00												19.037.474,00	
TOTAL			8.808.140,00	0,00	0,00		3.607.946,00	20.994.184,00	208.731,00	772.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	34.391.591,00		
DIT.JEN PEMASYARAKATAN																							
1	404259	BALAI PEMASYARAKATAN JAKBAR							358.600,00													358.600,00	
2	408692	RUMAH TAHANAN NEGARA JAKARTA PUSAT										375.915.279,00										375.915.279,00	
3	20562	LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB SENTUL	3.840.356,00																			3.840.356,00	
4	109104	LEMBAGA PEMASYARAKATAN KARAWANG					65.714.089,00					110.140.750,00										175.854.839,00	
5	109105	LEMBAGA PEMASYARAKATAN BEKASI					55.898.617,00					194.146.953,00		-	-	-	-	-	-	-	-	250.045.570,00	
6	404322	LEMBAGA PEMASYARAKATAN BANGSELU BANDUNG					35.846.217,00	2.668.678,00														38.514.895,00	
7	404347	LAPAS GARUT									2.680.374,00											2.680.374,00	
8	404353	LAPAS CIAMIS	4.795.694,00				5.189.200,00	8.663.974,00	999.091,00													19.647.955,00	

[illegible]

66	404962	BALAI PEMASYARAKATAN PURWOKERTO		30.992.000,00			22.500,00	2.621.669,00	84.915,00				2.491.000,00	521111 - internet					36.212.084,00
67	404971	LEMBAGA PEMASYARAKATAN PURWOKERTO	360.000,00					31.107.115,00	178.000,00			25.406.994,00	2.125.500,00	521111 - internet					59.177.609,00
68	404987	RUMAH TAHANAN NEGARA BANYUWAS					1.261.250,00	7.068.817,00	615.399,00										8.945.466,00
69	404993	RUMAH TAHANAN NEGARA PURBALINGGA	900.900,00				15.750,00	8.104.765,00	98.603,00				736.200,00	521111 - internet					9.856.218,00
70	405007	RUMAH TAHANAN NEGARA BANJARNEGARA					1.800.000,00	4.500.000,00	50.000,00				1.000.000,00	521111 - internet					7.350.000,00
71	405022	LAPAS CILACAP	324.000,00				2.515.400,00	16.057.728,00	34.109,00			121.348.952,00							140.280.180,00
72	405038	LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEMUDA PLANTUNGAN	850.986,00					1.250.312,00											2.101.298,00
73	408655	LEMBAGA PEMASYARAKATAN ANAK KUTOARJO		47.236.000,00			1.572.700,00	3.655.350,00	50.320,00				536.000,00	521111 - internet					53.050.370,00
74	497691	RUMAH TAHANAN NEGARA BATANG										4.105.197,00							4.105.197,00
75	497702	LEMBAGA PEMASYARAKATAN PASIR PUTIH NUSAKAMBANGAN										27.133.935,00							27.133.935,00
76	497711	LEMBAGA PEMASYARAKATAN SLAWI					3.049.000,00	11.415.907,00	63.140,00										14.528.047,00
77	626089	RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAN NEGARA SEMARANG						2.366.770,00		514.000,00									2.880.770,00
78	632029	BAPAS KELAS II NUSAKAMBANGAN						3.276.580,00											3.276.580,00
79	632057	LAPAS KHUSUS KELAS IIA KARANGANYAR NUSAKAMBANGAN		24.954.000,00				74.707.296,00	50.605.159,00										150.266.455,00
80	632059	LAPAS NARKOTIKA KELAS IIB PURWOKERTO					615.000,00	9.503.124,00	41.900,00				973.500,00	521111 - internet					24.201.035,00
81	652351	RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAN NEGARA WONOGIRI					227.450,00	842.280,00	89.070,00			13.067.511,00	365.500,00	521111 - internet					1.524.300,00
82	652902	LEMBAGA PEMASYARAKATAN TERBUKA KENDAL		35.828.000,00			5.423.770,00	12.772.367,00				24.301.856,00							78.325.993,00
83	652916	LEMBAGA PEMASYARAKATAN TERBUKA NUSAKAMBANGAN						6.840.655,00											6.840.655,00
84	653000	LEMBAGA PEMASYARAKATAN NARKOTIKA NUSAKAMBANGAN						24.589.548,00	538.871,00			4.536.138,00							29.664.557,00
85	653307	RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAN NEGARA PURWOKERTO						1.765.645,00	22.500,00				998.000,00	521111 - internet					2.786.145,00
86	653311	RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAN NEGARA SURAKARTA		45.822,00			60.500,00	1.680.197,00	1.013.726,00										2.800.245,00
87	653328	RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAN NEGARA PEKALONGAN		186.143,00			257.300,00	1.282.894,00	49.500,00				660.000,00	521111 - internet					2.435.837,00
88	653332	RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAN NEGARA SRAGEN					224.850,00	1.266.540,00	38.390,00		104.182,00								1.633.962,00
89	653349	RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAN NEGARA PURBALINGGA					185.220,00	1.579.740,00	36.820,00										1.801.780,00
90	653353	RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAN NEGARA CILACAP					570.650,00	2.617.407,00	569.000,00				229.900,00	521111 - internet					3.886.957,00
91	109111	RUMAH TAHANAN NEGARA BANTUL		15.892.012,00			6.757.700,00	7.496.901,00	147.478,00	1.433.300,00									31.727.391,00
92	109636	RUMAH TAHANAN NEGARA YOGYAKARTA					60.000,00	13.041.772,00	175.468,00	1.215.500,00									14.492.740,00
93	404585	BALAI PEMASYARAKATAN YOGYAKARTA						2.050.140,00	639.773,00	465.570,00									3.155.483,00
94	404591	LEMBAGA PEMASYARAKATAN YOGYAKARTA		4.735.683,00		-		24.672.474,00	177.996,00	1.507.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	31.093.153,00
95	404611	RUMAH TAHANAN NEGARA WATES				-		4.393.193,00	609.756,00										5.002.949,00
96	404630	RUMAH TAHAN NEGARA WONOSARI		6.763.710,00			3.207.200,00	5.132.767,00	35.467,00	998.500,00									16.137.644,00
97	418340	Lapas Penempatan Kelas IIB Yogyakarta		941.748,00		-		14.321.862,00	-	947.244,00	-		149.087.900,00	-	-	-	-	-	165.298.754,00
98	419140	LPKA JOGJAKARTA, PROVINSI D.I YOGYAKARTA				-		8.433.552,00	2.082.750,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.516.302,00
99	497727	LEMBAGA PEMASYARAKATAN NARKOTIKA YOGYAKARTA		15.682.242,00		-		18.845.999,00	1.358.957,00	-	-		2.695.900,00	-	-	-	-	-	38.583.098,00
100	632590	RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAN NEGARA YOGYAKARTA				-		6.142.795,00	1.285.357,00										7.428.152,00
101	652433	KANTOR RUPBASAN WATES					129.200,00	2.218.876,00	561.935,00										2.910.011,00
102	652852	LEMBAGA PEMASYARAKATAN SLEMAN		4.605.363,00		-		7.429.500,00	144.252,00	1.454.201,00									13.633.316,00
103	653133	BALAI PEMASYARAKATAN WONOSARI				-		1.065.664,00	24.760,00										1.090.424,00
104	653438	RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAN NEGARA BANTUL					190.800,00	2.663.353,00	671.300,00										3.525.453,00
105	653442	RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAN NEGARA WONOSARI				-		1.540.354,00	80.660,00	453.500,00									2.074.514,00
106	109112	RUMAH TAHANAN NEGARA SURABAYA						58.228.521,00	38.360,00	629.500,00									58.896.381,00
107	405044	BALAI PEMASYARAKATAN SURABAYA					1.394.000,00	3.635.796,00	51.422,00	492.000,00									5.573.188,00
108	405053	LEMBAGA PEMASYARAKATAN KALISOSOK						106.722.271,00		2.576.410,00									109.298.681,00
109	405075	LEMBAGA PEMASYARAKATAN SIDOARJO					2.912.100,00	26.406.220,00	100.000,00	1.715.000,00	100.000,00								31.233.320,00
110	405081	LAPAS MOJOKERTO					288.300,00	20.958.150,00		1.155.000,00			433.455.345,00						455.856.795,00
111	405101	LAPAS JOMBANG		888.000,00			442.500,00	14.400.657,00	864.000,00				128.831.485,00						145.426.642,00
112	405102	BALAI PEMASYARAKATAN BOJONEGORO		16.296.000,00			307.400,00	1.153.000,00		833.500,00									18.658.900,00
113	405120	LEMBAGA PEMASYARAKATAN BOJONEGORO						10.922.360,00	31.160,00				48.466.189,00						59.419.709,00
114	405126	LAPAS TUBAN						12.776.675,00	57.500,00	1.696.000,00			36.414.817,00						50.944.992,00
115	405132	LAPAS LAMONGAN					1.639.070,00				648.500,00								2.287.570,00
116	405141	BALAI PEMASYARAKATAN KEDIRI						2.562.804,00	219.370,00	454.000,00									3.236.174,00
117	405157	LEMBAGA PEMASYARAKATAN KEDIRI					167.100,00	22.187.778,00	2.407.370,00										24.762.248,00
118	405172	RUMAH TAHANAN NEGARA NGANJUK					35.400,00	7.584.700,00	1.339.100,00	-	-		5.573.325,00						14.532.525,00
119	405188	LAPAS BLITAR					3.940.550,00	11.800.307,00	62.395,00	1.333.500,00	650.000,00	41.651.219,00							59.437.971,00

120	405194	RUMAH TAHANAN NEGARA TRENGGALEK					2.289.000,00	9.520.571,00	79.140,00	662.500,00		246.176.000,00						258.727.211,00
121	405208	BALAI PEMASYARAKATAN JEMBER					245.920,00											245.920,00
122	405214	LEMBAGA PEMASYARAKATAN JEMBER					5.597.535,00	17.929.171,00	129.140,00	1.386.000,00		307.129.142,00						332.170.988,00
123	405223	LAPAS BONDOWOSO	43.682.100,00					8.689.618,00	80.140,00	1.868.000,00								54.319.858,00
124	405239	LAPAS KELAS IIA BANYUWANGI					1.446.960,00	22.979.399,00	114.487,00	739.500,00		37.881.615,00						63.161.961,00
125	405245	RUMAH TAHANAN NEGARA SITUBONDO					1.066.610,00	6.139.973,00	58.570,00	1.427.300,00		16.766.950,00						25.459.403,00
126	405251	BALAI PEMASYARAKATAN PAMEKASAN						4.871.265,00	2.976.425,00									7.847.690,00
127	405270	LEMBAGA PEMASYARAKATAN PAMEKASAN						27.031.669,00	62.320,00	1.210.500,00		931.937.308,00						960.241.797,00
128	405282	RUMAH TAHANAN NEGARA SUMENEP					468.010,00	11.632.732,00		1.316.900,00								13.417.642,00
129	405302	LAPAS KELLAS III ARJASA	16.911.000,00				382.920,00											17.293.920,00
130	405311	RUMAH TAHANAN NEGARA SAMPANG					45.360,00	4.134.840,00		849.500,00								5.029.700,00
131	405327	BALAI PEMASYARAKATAN MALANG						2.883.700,00	1.385.500,00	-	402.200,00							4.671.400,00
132	405333	LEMBAGA PEMASYARAKATAN MALANG	172.381.000,00				5.290.450,00	59.305.057,00	261.000,00	1.284.800,00	180.000,00	556.624.036,00	8.748.394,00	BBM				804.074.737,00
133	405358	LAPAS PROBOLINGGO					2.455.500,00	9.053.822,00	131.070,00	3.075.500,00		84.748.500,00						99.464.392,00
134	405364	RUMAH TAHANAN NEGARA KRAKSAAN					1.191.300,00	8.254.110,00	75.785,00	2.400.796,00								11.921.991,00
135	405373	LAPAS LUMAJANG										601.994.090,00						601.994.090,00
136	405389	LAPAS PASURUAN										98.760.568,00						98.760.568,00
137	405395	RUMAH TAHANAN NEGARA BANGIL						15.413.011,00	80.690,00	1.350.300,00	-	209.769.959,00						226.613.960,00
138	405409	LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUNAN MALANG					12.869.000,00	7.258.726,00	114.280,00	747.500,00								20.989.506,00
139	405415	BALAI PEMASYARAKATAN MADIUN					479.760,00	3.747.662,00	148.800,00	536.000,00								4.912.222,00
140	405421	LEMBAGA PEMASYARAKATAN MADIUN	57.253.000,00				29.000,00	52.941.032,00										110.223.032,00
141	405446	RUMAH TAHANAN NEGARA MAGETAN					11.225.750,00	6.441.915,00	982.957,00	-	-	29.944.843,00						48.595.465,00
142	405452	LAPAS NGAWI										724.519.795,00						724.519.795,00
143	405461	RUMAH TAHANAN NEGARA PONOROGO	4.425.000,00				139.300,00	7.655.573,00	84.953,00	1.353.500,00	30.000,00	2.723.025,00						16.411.351,00
144	405477	RUMAH TAHANAN NEGARA PACITAN					46.800,00	4.601.230,00	62.320,00	877.500,00								5.887.850,00
145	405483	LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK BLITAR					341.350,00	5.871.259,00	451.500,00	949.000,00	1.034.000,00							8.647.109,00
146	418364	Rutan Perempuan Kelas IIA Surabaya						12.414.194,00										12.414.194,00
147	567869	RUMAH TAHANAN NEGARA GRESIK					19.648.000,00	11.375.455,00	109.175,00	539.000,00		29.264.682,00						60.936.312,00
148	626093	RUMAH PENYIMPANAN BARANG SITAAH NEGARA SURABAYA					118.700,00	1.928.785,00	625.100,00									2.672.585,00
149	652386	KANTOR RUPBASAN BLITAR					30.500,00	2.239.396,00	79.500,00	1.031.000,00								3.380.396,00
150	653002	LEMBAGA PEMASYARAKATAN NARKOTIKA MADIUN						48.788.851,00	78.140,00	2.908.000,00		366.454.243,00						418.229.234,00
151	653019	LEMBAGA PEMASYARAKATAN NARKOTIKA PAMEKASAN						33.951.782,00	1.710.564,00			608.436.363,00	500,00					644.099.209,00
152	653370	RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAH NEGARA MOJOKERTO	9.223.000,00					2.889.400,00		814.000,00								12.926.400,00
153	653374	RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAH NEGARA JOMBANG	6.697.000,00				157.500,00	727.376,00	671.607,00									8.253.483,00
154	653381	RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAH NEGARA PASURUAN						1.422.244,00	664.180,00									2.086.424,00
155	662945	RUPBASAN PROBOLINGGO	4.808.475,00				1.036.500,00	1.687.168,00	127.000,00	1.417.000,00								9.076.143,00
156	405492	LEMBAGA PEMASYARAKATAN BANDA ACEH	0,00	46.935.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.935.000,00
157	405503	RUMAH TAHANAN NEGARA SABANG	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.075.992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.075.992,00
158	405528	LEMBAGA PEMASYARAKATAN LHOEK SEUMAWE	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.297.017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.297.017,00
159	405534	LAPAS KELAS III LHOEK NGA	0,00	0,00	0,00		34.426.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.426.400,00
160	405543	LAPAS KELAS IIB LHOEKBUKON	0,00	0,00	0,00		18.894.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480.215.101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499.109.101,00
161	405590	LAPAS KELAS IIB IDI RAYEUK	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.967.623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.967.623,00
162	405610	LAPAS KELAS IIB IDI	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374.425.514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374.425.514,00
163	405622	LAPAS KELAS IIB BLANGKEJEREN	0,00	18.915.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.915.000,00
164	405647	LAPAS KELAS III CALANG	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.582.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.582.700,00
165	683657	LAPAS NARKOTIKA KELAS IIB LANGSA	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.023.547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.023.547,00
166	683992	LAPAS PEREMPUNAN KELAS IIB SIGLI	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.369.621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.369.621,00
167	109114	LEMBAGA PEMASYARAKATAN WANITA MEDAN										388.574.739,00						388.574.739,00
168	109115	LEMBAGA PEMASYARAKATAN ANAK MEDAN										118.569.913,00						118.569.913,00
169	109116	RUMAH TAHANAN NEGARA MEDAN										4.034.440.529,00						4.034.440.529,00
170	405713	LEMBAGA PEMASYARAKATAN BINJAI										508.134.371,00						508.134.371,00
171	405735	LAPAS TANJUNG BALAI ASAHAN										765.562.745,00						765.562.745,00
172	405772	LAPAS KELAS III LABUAN BILIK					2.860.008,00					1.401.901,00						4.261.909,00
173	405797	RUTAN KELAS I LABUHAN DELI										23.893.916,00						23.893.916,00
174	405801	RUMAH TAHANAN NEGARA PANGKALAN BRANDAN										6.374.115,00						6.374.115,00
175	405817	LEMBAGA PEMASYARAKATAN TEBINGTINGGI DELI										160.641.349,00						160.641.349,00
176	405823	LAPAS LUBUK PAKAM										762.608.344,00						762.608.344,00
177	405832	RUMAH TAHANAN NEGARA SIDIKALANG										302.256.296,00						302.256.296,00
178	405848	LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEMATANG SIANTAR					75.327.232,00					1.145.334.664,00						1.220.661.896,00

[illegible]

[illegible]

393	408649	LEMBAGA PEMASYARAKATAN DOMPU	0,00	55.506.000,00	0,00	-	-	-	-	-	-	21.059.597,00	-	-	-	-	5.044.300,00	Retur belanja pegawai Februari TA 2020 yang diterima pada bulan Maret 2020 ke rekening giro bendahara yang lama tapi belum di lakukan penutupan	-	-	81.609.897,00
394	418351	Lapas Perempuan Kelas III Mataram	0,00	0,00	0,00	-	-	174.000,00	-	-	859.700,00	122.200,00	63.604.441,00	-	-	-	-	-	-	-	64.760.341,00
395	632734	RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAN NEGARA MATARAM	0,00	25.548.000,00	-	-	-	923.100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26.471.100,00
396	652923	LAPAS TERBUKA KELAS IIB LOMBOK TENGAH	0,00	38.688.000,00	-	-	-	953.100,00	-	-	-	-	2.728.352,00	-	-	-	-	-	-	-	42.369.452,00
397	653182	BALAI PEMASYARAKATAN SUMBAWA BESAR	0,00	12.961.000,00	-	-	-	38.000,00	-	1.893.300,00	68.200,00	910.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	15.870.500,00
398	653417	RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAN NEGARA SUMBAWA BESAR	0,00	11.302.000,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.302.000,00
399	683373	LPKA KELAS II LOMBOK TENGAH	0,00	0,00	0,00	-	-	85.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	85.000,00
400	407675	LAPAS ATAMBUJA	-	20.864.450,00	-	-	-	-	-	-	-	-	136.290.818,00	-	-	-	-	-	-	-	157.155.268,00
401	407681	RUMAH TAHANAN NEGARA KEFAMENANU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17.800.462,00	-	-	-	-	-	-	-	17.800.462,00
402	407701	LAPAS KELAS III BAA	-	24.726.150,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.726.150,00
403	407702	RUMAH TAHANAN NEGARA SO'E	-	-	-	-	-	2.477.271,00	-	-	-	-	3.438.553,00	-	-	-	-	-	-	-	5.915.824,00
404	407720	LEMBAGA PEMASYARAKATAN KALABAH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	144.341.264,00	-	-	-	-	-	-	-	144.341.264,00
405	407741	LEMBAGA PEMASYARAKATAN ENDE	-	-	-	-	-	344.810,00	-	-	-	738.310,00	-	-	-	-	-	-	-	-	1.083.120,00
406	407757	RUMAH TAHANAN NEGARA BAJAWA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	84.202.192,00	-	-	-	-	-	-	-	84.202.192,00
407	407763	RUMAH TAHANAN NEGARA RUTENG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	41.123.737,00	-	-	-	-	-	-	-	41.123.737,00
408	621797	LEMBAGA PEMASYARAKATAN ANAK (LPA) KUPANG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	555.083,00	-	-	-	-	-	-	-	555.083,00
409	683352	LAPAS PEREMPUAN KELAS IIB KUPANG	-	-	-	-	-	6.151.530,00	-	-	-	-	57.227.492,00	-	-	-	-	-	-	-	63.379.022,00
410	683416	RUMAH TAHANAN KELAS IIB KUPANG	-	231.362.250,00	-	-	-	11.225.206,00	-	38.360,00	1.424.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	244.049.816,00
411	109149	Balai Pemasyarakatan Jayapura	-	14.478.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14.478.000,00
412	352615	LPKA Jayapura	-	29.203.000,00	-	-	-	3.780.000,00	-	-	-	-	750.000,00	-	-	-	-	-	-	-	33.733.000,00
413	407794	Lembaga Pemasyarakatan Abepura	-	-	-	-	-	10.663.215,00	-	-	-	-	19.419.935,00	-	-	-	-	-	-	-	30.083.150,00
414	407808	Lembaga Pemasyarakatan Wanena	-	45.347.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45.347.000,00
415	407814	Lembaga Pemasyarakatan Nabire	-	-	-	-	-	5.903.042,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.903.042,00
416	407839	Lembaga Pemasyarakatan Serui	-	-	-	-	-	5.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.000.000,00
417	418360	Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Jayapura	-	-	-	-	-	3.780.000,00	-	-	-	-	793.200,00	-	-	-	-	-	-	-	4.573.200,00
418	632751	Rumah Penyimpanan Barang Sitaan Negara Jayapura	-	-	-	-	-	2.779.713,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.779.713,00
419	653051	Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Jayapura	-	-	-	-	-	8.785.108,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.785.108,00
420	109151	BALAI PEMASYARAKATAN BENGKULU	-	55.184.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	55.184.000,00
421	352606	LPKA Bengkulu Provinsi Bengkulu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19.354.841,00	-	-	-	-	-	-	-	19.354.841,00
422	407902	LEMBAGA PEMASYARAKATAN BENGKULU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	162.072.139,00	-	-	-	-	-	-	-	162.072.139,00
423	407927	LEMBAGA PEMASYARAKATAN CURUP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	41.010.984,00	-	-	-	-	-	-	-	41.010.984,00
424	418342	Lapas Perempuan Kelas IIB Bengkulu	-	4.941.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.941.000,00
425	683997	Rutan Kelas II B Bengkulu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	88.391.303,00	-	-	-	-	-	-	-	88.391.303,00
426	407503	LAPAS KELAS III LABUHA	-	27.032.000,00	-	-	-	92.467.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	119.499.000,00
427	497840	LEMBAGA PEMASYARAKATAN JAILOLO	-	39.937.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	39.937.000,00
428	632047	BAPAS KELAS II TIDORE	-	23.678.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23.678.000,00
429	632712	RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAN NEGARA TERNATE	-	47.600.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	47.600.000,00
430	652827	LEMBAGA PEMASYARAKATAN TERNATE	-	22.677.000,00	-	-	-	12.616.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35.293.000,00
431	684003	Rutan Kelas II B Weda	-	37.170.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	37.170.000,00
432	107150	BALAI PEMASYARAKATAN KELAS I TANGERANG	-	-	-	-	-	5.418.085,00	-	1.057.920,00	624.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.100.005,00
433	404523	LEMBAGA PEMASYARAKATAN SERANG	0,00	0,00	0,00	-	-	24.376.000,00	-	34.070,00	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	24.410.070,00
434	404548	LAPAS KELAS III RANGKAS BITUNG	0,00	0,00	0,00	-	-	73.500,00	-	7.596.724,00	79.140,00	2.121.317,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	9.870.681,00
435	404554	LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEMUDA TANGERANG	0,00	0,00	0,00	-	-	10.593.375,00	-	117.966.233,00	83.860,00	-	0,00	22.937.388,00	-	-	-	-	-	-	151.580.856,00
436	404563	LEMBAGA PEMASYARAKATAN ANAK PRIA TANGERANG	0,00	0,00	0,00	-	-	5.467.375,00	-	12.078.908,00	38.360,00	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	17.584.643,00
437	404579	LAPAS KELAS IIA TANGERANG	0,00	0,00	0,00	-	-	2.500.000,00	-	39.997.030,00	120.000,00	2.100.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	44.717.030,00
438	408661	LEMBAGA PEMASYARAKATAN WANITA TANGERANG	-	-	-	-	-	25.135.645,00	-	80.710,00	1.966.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27.162.355,00
439	408706	LEMBAGA PEMASYARAKATAN PRIA TANGERANG	0,00	0,00	0,00	-	-	141.171.810,00	-	472.255,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	141.644.065,00
440	497846	RUMAH TAHANAN NEGARA TANGERANG	0,00	0,00	0,00	-	-	55.364.258,00	-	4.217.169,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	59.581.427,00
441	526815	RUMAH TAHANAN NEGARA SERANG	-	67.888.000,00	-	-	-	69.000,00	-	20.460.085,00	-	-	126.904.613,00	-	-	-	-	-	-	-	215.321.698,00
442	626080	LAPAS TERBUKA CIANGIR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.594.868,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14.594.868,00
443	632573	RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAN NEGARA SERANG	-	16.237.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	16.237.000,00
444	653239	BALAI PEMASYARAKATAN SERANG	-	2.296.000,00	0,00	-	-	5.370.406,00	-	1.020.000,00	-	0,00	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	8.686.406,00
445	683636	LAPAS KELAS IIA CILEGON	0,00	38.447.000,00	-	-	-	81.149.352,00	-	-	1.198.500,00	0,00	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	120.794.852,00
446	418347	Lapas Perempuan Kelas III Pangkat Pinang	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00	22.210.500,00	0,00	0,00	-	0,00	-	0,00	-	22.210.500,00

[illegible]

12	109161	Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Dabo Singkep							1.924.000,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									</

[illegible]



ANALISA POS-POS LO dan LPE

1 PENDAPATAN PNBP LO

Pendapatan PNBP LO = Pendapatan PNBP LRA + ((Pendapatan YMHD Akhir - Pendapatan YMHD Awal) + (Piutang PNBP Akhir - Piutang PNBP Awal) + (Kas di Bendahara Penerimaan Akhir - Kas di Bendahara Penerimaan Awal)) - (Pendapatan Diterima Dimuka Akhir - Pendapatan Diterima Dimuka Awal) - Pendapatan TP/TGR - Pendapatan Pelepasan Aset - Pendapatan Pengembalian Belanja			
a	Pendapatan PNBP LO	3.016.169.551.976,00	
b	Pendapatan PNBP LRA	3.185.268.555.856,00	
c	Selisih Antara LO dan LRA (a - b)	(169.099.003.880,00)	
	Faktor Yang Mempengaruhi		
	Pendapatan Yang Masih Harus Diterima Akhir	25.139.898,00	
	Pendapatan Yang Masih Harus Diterima Awal	31.297.367,00	
d	Kenaikan/Penurunan Pendapatan YMHD	(6.157.469,00)	
	Piutang PNBP Akhir	231.767.531.548,00	
	Piutang PNBP Awal	271.664.242.306,00	
e	Kenaikan/Penurunan Piutang PNBP	(39.896.710.758,00)	
	Kas Di Bendahara Penerimaan Akhir	0,00	
	Kas Di Bendahara Penerimaan Awal	1.000.000,00	
f	Kenaikan/Penurunan Kas di Bend. Penerima	(1.000.000,00)	
	Pendapatan Diterima Dimuka Akhir	584.177.088.896,00	
	Pendapatan Diterima Dimuka Awal	485.306.124.011,00	
g	Kenaikan/Penurunan Pend. Ditrn Dimuka	98.870.964.885,00	
	Pendapatan dari Untung Selisih Kurs Uang Persediaan (425752)	2.275.370,00	
	Pendapatan Setoran dari Sisa Utang Non TP/TGR Pensiunan PNS (425931)	413.626.725,00	
	Pendapatan Pengembalian Belanja TAYL (42591x)	38.278.866.970,00	
h	PNBP yang membentuk Pendapatan Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya LO (o + p)	38.694.769.065,00	
	Pendapatan Dari Pemindahtanganan BMN (42512x)	3.171.191.455,00	
i	PNBP yang membentuk Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar LO (r)	3.171.191.455,00	
j	Jumlah Faktor Yang Mempengaruhi (d + e + f - g - h - i)	(180.640.793.632,00)	
	Faktor Lain Yang Mempengaruhi		
	Pendapatan Ganti Rugi Negara (42579x)	(187.604.373,00)	
	Jurnal Pencatatan Baru Piutang PNBP atas Transaksi Pengembalian Belanja Modal (Aset Belum Register)	(526.939.543,00)	
	Jurnal Pembayaran Piutang PNBP dengan menggunakan Akun 42591x	12.948.864.894,00	
	Jurnal Pencatatan Piutang PNBP dengan menggunakan Akun 42591x	(2.218.394.925,00)	
	Jurnal Pencatatan Baru Piutang PNBP atas Transaksi Pengembalian Belanja Barang (Termasuk pengembalian belanja BAMA, dsb)	(1.177.925.350,00)	
	Jurnal Penghapusan Piutang	7.432.130.740,00	
	Jurnal Balik Piutang atas Koreksi Belanja Barang Non Operasional Lainnya	423.000.000,00	



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Lampiran Catatan Atas Laporan Keuangan
Per 31 Desember Tahun Anggaran 2021 (*Audited*)
Dengan Angka Perbandingan 31 Desember Tahun Anggaran 2020
(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Jurnal Pencatatan Baru Piutang atas Koreksi Belanja Barang Non Operasional Lainnya	(851.089.868,00)	
	Jurnal Piutang Lainnya dengan Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi	(596.476.406,00)	
	Jurnal Pencatatan Piutang Jangka Panjang Lainnya terhadap PNBP LO	0,00	
	Jurnal Pembayaran Piutang Jangka Panjang Lainnya terhadap PNBP LO	0,00	
	Jurnal Manual Reklasifikasi Piutang PNBP	25.940.750,00	
	Jurnal Koreksi Lainnya Atas Transaksi Piutang	729.160.488,00	
	Jurnal Koreksi Lainnya Atas Transaksi Pendapatan Diterima Dimuka	40.327.255.614,00	
	Jurnal Kas Lainnya Di Bendahara Penerimaan atas Pendapatan	(44.785.426.213,00)	
	Jurnal Kas Lainnya Di Bendahara Pengeluaran atas Pendapatan	(6.056,00)	
	Jurnal Koreksi Lainnya Atas Pendapatan Yang Masih harus Diterima	(700.000,00)	
	Jurnal Transfer Masuk Piutang PNBP	(940.000.000,00)	
	Jurnal Transfer Keluar Piutang PNBP	940.000.000,00	
	Jurnal Pendapatan Selisih Kurs yang Belum Terealisasi atas Pendapatan	0,00	
	Jurnal Beban Kerugian Selisih Kurs yang Belum Terealisasi atas Pendapatan	0,00	
k	Total Faktor Lain Yang Mempengaruhi	11.541.789.752,00	
l	Pendapatan PNBP LO (b + j + k)	3.016.169.551.976,00	
	Selisih (a - l)	0,00	

2 BEBAN PEGAWAI LO

Beban Pegawai LO = Belanja Pegawai LRA - Pembayaran Utang Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu + Utang Belanja Pegawai di Tahun Anggaran Berjalan			
a	Beban Pegawai LO	6.762.851.059.636,00	
b	Belanja Pegawai LRA	6.762.254.319.598,00	
c	Selisih Antara LO dan LRA (a - b)	596.740.038,00	
	Faktor Yang Mempengaruhi		
	Pembayaran Utang Belanja Pegawai TAYL	(4.373.053.982,00)	
	Pencatatan Utang Belanja Pegawai Tahun Anggaran Berjalan	4.969.794.020,00	
d	Total Faktor Yang Mempengaruhi	596.740.038,00	
	Faktor Lain Yang Mempengaruhi		
	Jurnal Pencatatan Baru Piutang PNBP atas Transaksi Pengembalian Belanja Pegawai	0,00	
	Jurnal Kas Lainnya Di Bendahara Pengeluaran atas Pengembalian Belanja Pegawai Yang Belum Disetor Ke Kas Negara	0,00	
	Jurnal Pencatatan Piutang PNBP atas Transaksi Kelebihan Pembayaran Belanja Pegawai TAB (51xxxx)	0,00	
e	Total Faktor Lain Yang Mempengaruhi	0,00	
f	Beban Pegawai Total (b + d + e)	6.762.851.059.636,00	
	Selisih (a - f)	0,00	



3 BEBAN PERSEDIAAN LO

Beban Persediaan LO = Belanja Barang Persediaan LRA + Persediaan Awal - Persediaan Akhir			
a	Beban Persediaan LO	538.662.134.519,00	
b	Belanja Barang Persediaan LRA (Akun 5218xx)	536.747.039.834,00	
c	Selisih Antara LO dan LRA (a - b)	1.915.094.685,00	
	Faktor Yang Mempengaruhi		
	Persediaan Awal	597.192.271.954,00	
	Persediaan Akhir	604.873.054.596,00	
	Persediaan Belum diregister	0,00	
d	Kenaikan/Penurunan Persediaan	(7.680.782.642,00)	
	Blnj Brg Persediaan Pemeliharaan Gedung, Bangunan	8.840.363.773,00	
	Blnj Brg Persediaan Pemeliharaan Peralatan Mesin	2.265.584.263,00	
	Blnj Brg Persediaan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	0,00	
	Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Irigasi	0,00	
	Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Jaringan	0,00	
	Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Lainnya	0,00	
e	Blnj Brg Persediaan Akun 523xxx	11.105.948.036,00	
	Beban Persediaan Bahan Untuk Pemeliharaan	39.034.260.025,00	
	Beban Persediaan Suku Cadang	572.338.480,00	
f	Beban Persediaan Yang Membentuk Beban Pemeliharaan LO	39.606.598.505,00	
	Beban Peralatan dan Mesin Utk Diserahkan Kpd Masy.	0,00	
	Beban Jalan, Irigasi dan Jaringan Utk Diserahkan Kpd Masy.	0,00	
	Beban Barang Fisik Lainnya Utk Diserahkan Kpd Masy.	0,00	
	Beban Barang Lainnya Untuk Diserahkan Kpd Masy.	0,00	
	Beban Persediaan ATL Untuk Diserahkan Kpd Masy.	0,00	
	Beban Persediaan pita cukai, materai dan leges	0,00	
	Beban Brg Persed. Lainnya Utk Diserahkan Kpd Masy.	0,00	
	Beban Persediaan Peralatan dan mesin untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	0,00	
g	Beban Yang Membentuk Beban untuk Diserahkan Kepada Masyarakat LO	0,00	
	Faktor Lain Yang Mempengaruhi		
	Transfer Keluar Barang Persediaan	(298.384.222.955,00)	
	Koreksi Kurang Persediaan	0,00	
	Kerugian Persediaan Rusak/Usang	(5.848.632.439,00)	
	Penghapusan Barang Persediaan	(13.296.000,00)	
	Reklas Keluar	(75.517.572.723,00)	
	Persediaan Kurang	(379.763.724.117,00)	
	Transfer Masuk Barang Persediaan	273.591.460.208,00	
	Saldo Awal Persediaan Hasil Reklasifikasi Aset	8.314.217.463,00	
	Koreksi Tambah Persediaan	0,00	



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Lampiran Catatan Atas Laporan Keuangan
Per 31 Desember Tahun Anggaran 2021 (*Audited*)
Dengan Angka Perbandingan 31 Desember Tahun Anggaran 2020
(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Persediaan yang didapat dari Perolehan Lainnya	0,00	
	Hibah Masuk	23.364.164.491,00	
	Reklas Masuk	105.922.789.823,00	
	Persediaan Tambah	411.192.631.985,00	
	Jurnal Manual Koreksi Nilai Persediaan	175.414,00	
	Jurnal Persediaan Belum Register Karena Belanja Barang Persediaan, namun tidak menggunakan Akun Persediaan (521 / 522 non persediaan)	184.344.655,00	
	Jurnal Persediaan Belum Register Karena Belanja Barang Persediaan, namun tidak menggunakan Akun Persediaan (523 Non Persediaan)	0,00	
	Jurnal Persediaan Belum Register Karena Belanja Pemeliharaan (523 Non Persediaan) menggunakan Akun Belanja Persediaan	(40.766.176,00)	
	Jurnal Persediaan Belum Register Karena Belanja Menggunakan Akun Persediaan (5218xx), namun digunakan untuk Belanja Barang Non Persediaan (521 / 522 non persediaan)	(1.278.863.017,00)	
	Jurnal Manual Belum Register atas Belanja Persediaan yang membentuk Aset	(313.341.484,00)	
	Jurnal Manual Belum Register atas Belanja Persediaan yang menggunakan akun belanja 53	8.591.788.900,00	
	Jurnal Manual Belum Register atas Belanja Persediaan yang membentuk Beban Aset Ekstrakomptabel	(457.868.290,00)	
	Jurnal Persediaan Belum Diregister pada Pendapatan Penyesuaian Selisih Kurs	0,00	
	Jurnal Persediaan Belum Diregister pada Beban Penyesuaian Selisih Kurs	0,00	
	Jurnal Reklas Beban Persediaan ke Beban Barang/Jasa	0,00	
	Jurnal Penyesuaian/Umum	6.685.470.002,00	
	Koreksi Nilai Persediaan sebagai Dampak dari Update Aplikasi	(17.850.074,00)	
h	Total Faktor Lain Yang Mempengaruhi	38.096.527.796,00	
i	Beban Persediaan Total	538.662.134.519,00	
	Selisih (a - i)	0,00	

4 BEBAN BARANG DAN JASA LO

Beban Barang dan Jasa LO = Belanja Barang dan Jasa LRA - Pembayaran Utang Belanja Barang dan Jasa Tahun Anggaran Yang Lalu + Utang Belanja Barang dan Jasa Tahun Anggaran Berjalan			
a	Beban Barang dan Jasa LO	4.120.083.995.696,00	
b	Belanja Barang dan Jasa LRA	3.963.095.278.294,00	
c	Selisih Antara LO dan LRA (a - b)	156.988.717.402,00	
	Faktor Yang Mempengaruhi		
	Beban Rugi selisih Kurs Uang Persediaan Satker perwakilan RI/Atase Teknis	(117.935.499,00)	
	Pembayaran Utang Belanja Barang dan Jasa TAYL	(16.973.870.637,00)	
	Utang Belanja Barang dan Jasa Tahun Berjalan	49.669.920.194,00	
	Jurnal Persediaan Belum Register Karena Belanja Menggunakan Akun Persediaan (5218xx), namun digunakan untuk Belanja Barang Non Persediaan (521 / 522 non persediaan)	1.278.863.017,00	



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Lampiran Catatan Atas Laporan Keuangan
Per 31 Desember Tahun Anggaran 2021 (*Audited*)
Dengan Angka Perbandingan 31 Desember Tahun Anggaran 2020
(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Jurnal Persediaan Belum Register Karena Belanja Barang Persediaan, namun menggunakan Akun Non Persediaan	(184.344.655,00)	
	Jurnal Manual Belum Register atas Transaksi Belanja Barang dan Jasa (Akun 521xxx/522xxx) yang membentuk Aset	(611.880.620,00)	
	Jurnal Manual Belum Register atas Transaksi Belanja Barang dan Jasa (Akun 521xxx/522xxx) yang menggunakan akun belanja Modal (53)	690.845.063,00	
	Jurnal Pencatatan Baru Belanja Barang yang dibayar dimuka dengan menggunakan Belanja Barang dan Jasa (Akun 521xxx/522xxx)	(4.861.412.374,00)	
	Jurnal Pencatatan Atas Kadaluarsa atau Habis Masa Manfaat Belanja Barang yang dibayar dimuka dengan menggunakan Belanja Barang dan Jasa (Akun 521xxx/522xxx)	9.101.921.852,00	
	Jurnal Pencatatan Baru Piutang PNPB atas Transaksi Pengembalian Belanja Barang (Termasuk pengembalian belanja BAMA, dsb)	(1.177.925.350,00)	
	Jurnal Balik Piutang atas Koreksi Belanja Barang Non Operasional Lainnya	423.000.000,00	
	Jurnal Pencatatan Baru Piutang atas Koreksi Belanja Barang Non Operasional Lainnya	(851.089.868,00)	
	Jurnal Koreksi Lainnya Atas Transaksi Belanja Barang dan Jasa (Akun 521xxx/522xxx)	0,00	
	Jurnal Kas Lainnya Di Bendahara Pengeluaran atas Beban Honor yang belum diserahkan	0,00	
	Beban Ekstrakomptabel	1.561.566.942,00	
	Jurnal Manual atas Hibah Jasa	119.041.059.337,00	
	Jurnal Reklas dari Beban Barang/Jasa ke Beban Persediaan	0,00	
d	Total Faktor Yang Mempengaruhi	156.988.717.402,00	
	Selisih (c - d)	0,00	

5 BEBAN PEMELIHARAAN LO

Beban Pemeliharaan LO = Belanja Pemeliharaan LRA

a	Beban Pemeliharaan LO	567.858.477.279,00	
b	Belanja Pemeliharaan LRA (Akun 523xxx)	522.372.690.998,00	
c	Selisih Antara LO dan LRA (a - b)	45.485.786.281,00	
	Faktor Yang Mempengaruhi		
	Beban Persediaan Bahan Untuk Pemeliharaan	39.034.260.025,00	
	Beban Persediaan Suku Cadang	572.338.480,00	
d	Beban Barang Persediaan Yang Membentuk Beban Pemeliharaan LO	39.606.598.505,00	
	Blng Brg Persediaan Pemeliharaan Gedung, Bangunan	8.840.363.773,00	
	Blng Brg Persediaan Pemeliharaan Peralatan Mesin	2.265.584.263,00	
	Blng Brg Persediaan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	0,00	
	Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Irigasi	0,00	
	Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Jaringan	0,00	



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Lampiran Catatan Atas Laporan Keuangan
Per 31 Desember Tahun Anggaran 2021 (*Audited*)
Dengan Angka Perbandingan 31 Desember Tahun Anggaran 2020
(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Lainnya	0,00	
e	Belanja Akun 523xxx yang membentuk Barang Persediaan	11.105.948.036,00	
	Faktor Lain Yang Mempengaruhi		
	Jurnal Manual Belum Register atas Transaksi Belanja Akun 523 yang membentuk Aset Tetap	(498.066.000,00)	
	Jurnal Manual Belum Register atas Transaksi Belanja Akun 523 yang membentuk Aset Lain lain	(5.700.200.000,00)	
	Jurnal Persediaan Belum Register Karena Belanja Barang Persediaan, namun tidak menggunakan Akun Persediaan (523 Non Persediaan)	0,00	
	Jurnal Manual Belum Register atas Transaksi Belanja Pemeliharaan Menggunakan Akun Belanja Persediaan	40.766.176,00	
	Jurnal Manual Belum Register atas Transaksi Belanja Pemeliharaan Menggunakan Akun Belanja Modal	60.830.000,00	
	Jurnal Pencatatan Utang Bli Pemeliharaan Tahun Berjalan	8.748.394,00	
	Jurnal Pencatatan Baru Belanja Barang yang dibayar dimuka dengan menggunakan Belanja Pemeliharaan (Akun 523xxx)	(82.467.000,00)	
	Jurnal atas Pembayaran Utang Belanja Pemeliharaan TAYL (Jurnal Balik)	0,00	
	Beban Ekstrakomptabel Gedung dan Bangunan	53.000.000,00	
	Jurnal Pencatatan Atas Kadaluarsa atau Habis Masa Manfaat Belanja Barang yang dibayar dimuka dengan menggunakan Belanja Pemeliharaan (Akun 523xxx)	23.102.524.242,00	
f	Total Faktor Lain Yang Mempengaruhi	16.985.135.812,00	
g	Beban Pemeliharaan Total (b + d - e + f)	567.858.477.279,00	
	Selisih (a - g)	0,00	

6 BEBAN PERJALANAN DINAS LO

Beban Perjalanan Dinas LO = Belanja Perjalanan Dinas LRA - Pembayaran Utang Belanja Perjalanan Dinas Tahun Anggaran Yang Lalu + Utang Belanja Perjalanan Dinas Tahun Anggaran Berjalan			
a	Beban Perjalanan Dinas LO	642.282.586.429,00	
b	Belanja Perjalanan Dinas LRA	650.679.542.151,00	
c	Selisih Antara LO dan LRA (a - b)	(8.396.955.722,00)	
d	Faktor Yang Mempengaruhi		
	Jurnal atas Pembayaran Utang Belanja Perjalanan Dinas TAYL (Jurnal Balik)	(11.314.600.345,00)	
	Jurnal Pencatatan Utang Belanja Perjadiin Tahun Berjalan	2.757.918.853,00	
e	Faktor Lain Yang Mempengaruhi		
	Jurnal Pencatatan Baru Piutang PNBPN atas Transaksi Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas	0,00	
	Jurnal Belum Diregister karena Belanja Perjalanan Dinas yang membentuk Aset	0,00	
	Jurnal Belum Diregister karena Belanja Perjalanan Dinas yang menggunakan akun belanja Modal (53)	159.725.770,00	
	Jurnal Beban Perjadiin pada Kas Lainnya Di Bendahara Pengeluaran	0,00	
f	Beban Perjalanan Dinas Total (b + c + d + e)	642.282.586.429,00	
	Selisih (a - f)	0,00	



7 BEBAN BARANG UNTUK DISERAHKAN KEPADA MASYARAKAT LO

Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat LO = Belanja Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat			
a	Beban Barang Utk Diserahkan ke Masy. LO	0,00	
b	Belanja Barang Utk Diserahkan ke Masy. LRA	0,00	
c	Selisih Antara LO dan LRA (a - b)	0,00	
Faktor Yang Mempengaruhi			
	Beban Tanah Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	0,00	
	Beban Peralatan dan Mesin Utk Diserahkan Kpd Masy.	0,00	
	Beban Jalan, Irigasi, Jaringan Utk Diserahkan Kpd Masy.	0,00	
	Beban Barang Fisik Lainnya Utk Diserahkan Kpd Masy.	0,00	
	Beban Barang Lainnya Untuk Diserahkan Kpd Masy.	0,00	
	Beban Persediaan ATL Untuk Diserahkan Kpd Masy.	0,00	
	Beban Persediaan pita cukai, materai dan leges	0,00	
	Beban Brg Persed. Lainnya Utk Diserahkan Kpd Masy.	0,00	
	Beban Persediaan Peralatan dan mesin untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	0,00	
d	Beban Yang Membentuk Beban untuk Diserahkan Kepada Masyarakat LO	0,00	
e	Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat (d - b)	0,00	
	Selisih (c - e)	0,00	

8 BEBAN BANTUAN SOSIAL LO

	Beban Bantuan Sosial LO	0,00	
BEBAN INI TIDAK SESUAI DENGAN TUGAS DAN FUNGSI KEMENKUMHAM ANALISA PENYEBAB MUNCUL BEBAN INI, APABILA KARENA SALAH PENGGUNAAN AKUN, AGAR DILAKUKAN RALAT/REVISI. APABILA KARENA SALAH PENJURNALAN SUATU TRANSAKSI, AGAR DILAKUKAN PERBAIKAN TERHADAP JURNAL			

9 BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI LO

Beban Penyusutan dan Amortisasi LO = Akumulasi Penyusutan Awal - Akumulasi Penyusutan Akhir + Akumulasi Penyusutan Transaksional Transfer Masuk - Akumulasi Penyusutan Transaksional Transfer Keluar + Akumulasi Penyusutan Penghapusan Aset			
a	Beban Penyusutan dan Amortisasi LO	1.442.347.421.665,00	
b	Akumulasi Penyusutan Awal	(8.334.942.866.719,00)	
c	Akumulasi Penyusutan Akhir	(10.022.128.908.561,00)	
	Faktor Yang Mempengaruhi	(244.838.620.177,00)	
	Saldo Awal	(28.518.489.820,00)	
	Transfer Masuk	(48.861.889.177,00)	
	Hibah (Masuk)	(33.741.895.504,00)	
	Pembatalan Penghapusan	0,00	



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Lampiran Catatan Atas Laporan Keuangan
Per 31 Desember Tahun Anggaran 2021 (*Audited*)
Dengan Angka Perbandingan 31 Desember Tahun Anggaran 2020
(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Reklasifikasi Masuk	(57.491.076.024,00)	
Reklasifikasi Masuk Hasil Inventarisasi	0,00	
Perolehan hasil Tindak Lanjut Normalisasi	(410.595.514.222,00)	
Perolehan Reklasifikasi Dari Intra ke Ekstra/ Sebaliknya	(133.450.000,00)	
Pengembangan Nilai Aset	(6.340.598,00)	
Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas	(8.895.400.061,00)	
Transaksi Normalisasi BMN	(902.805.362,00)	
Koreksi Penilaian Kembali BMN	0,00	
Koreksi Penyusutan Karena 225	(9.042.031.123,00)	
Koreksi Hasil Revaluasi atas BMN yg tidak ditemukan	0,00	
Koreksi BMN ditemukan Kembali	0,00	
Koreksi Hasil Revaluasi atas BMN Reklasifikasi Keluar Hasil Inventarisasi	0,00	
Transaksi Normalisasi BMN (BMN Yang Dihentikan)	(15.607.000,00)	
Penghapusan	0,00	
Transfer Keluar	0,00	
Hibah (Keluar)	0,00	
Reklasifikasi Keluar	0,00	
Koreksi Pencatatan	0,00	
Usulan Barang Rusak Berat ke Pengelola	0,00	
Usulan Barang Hilang ke Pengelola	0,00	
Reklasifikasi Keluar Hasil Inventarisasi	0,00	
Koreksi Transfer Keluar Akibat Koreksi Revaluasi	0,00	
Koreksi Beban Kerugian Penghapusan akibat koreksi Revaluasi	0,00	
Koreksi ekuitas akibat Koreksi Revaluasi	0,00	
Penghapusan (BMN yang dihentikan)	0,00	
Koreksi Penyusutan Reklasifikasi Masuk Akibat Koreksi Revaluasi	0,00	
Reklasifikasi Keluar (BMN yang dihentikan)	0,00	
Koreksi Pencatatan (BMN yang dihentikan)	0,00	
Usulan Barang Rusak Berat ke Pengelola (BMN Yang Dihentikan)	0,00	
Usulan Barang Hilang ke Pengelola (BMN Yang Dihentikan)	0,00	
Koreksi Penyusutan Transfer Masuk Akibat Koreksi Revaluasi	0,00	
Penghapusan (semester I dokumen TAYL)	0,00	
Penghapusan semu karena reklasifikasi dari intra ke ekstra/ sebaliknya	0,00	
Penghapusan (semester II dokumen semester I)	0,00	
Penghapusan BMN yang Dihentikan (semester II dokumen TAYL)	0,00	
Penghapusan BMN yang Dihentikan (semester II dokumen semester I)	0,00	
Transfer Keluar (BMN yang dihentikan)	0,00	
Koreksi Nilai Tim Penertiban Aset	0,00	
Koreksi Transfer Masuk	0,00	



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Lampiran Catatan Atas Laporan Keuangan
Per 31 Desember Tahun Anggaran 2021 (*Audited*)
Dengan Angka Perbandingan 31 Desember Tahun Anggaran 2020
(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Koreksi atas Reklasifikasi Masuk Hasil Inventarisasi	0,00	
	Koreksi Input Normalisasi Akibat Koreksi Penilaian Kembali 225	0,00	
	Koreksi Reklasifikasi Keluar Akibat Koreksi Penilaian Kembali	0,00	
	Koreksi Normalisasi Akibat Koreksi Penilaian Kembali	(18.363.100,00)	
	Koreksi Reklasifikasi Masuk Akibat Koreksi Penilaian Kembali 225	0,00	
d	Akum. Penyusutan Transaksional (Masuk)	(598.222.861.991,00)	
	Saldo Awal	0,00	
	Transfer Masuk	0,00	
	Hibah (Masuk)	0,00	
	Reklasifikasi Masuk	0,00	
	Reklasifikasi Masuk Hasil Inventarisasi	0,00	
	Perolehan hasil Tindak Lanjut Normalisasi	0,00	
	Perolehan Reklasifikasi Dari Intra ke Ekstra/ Sebaliknya	0,00	
	Pengembangan Nilai Aset	0,00	
	Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas	15.166.342.153,00	
	Transaksi Normalisasi BMN	130.901.174.880,00	
	Koreksi Penilaian Kembali BMN	0,00	
	Koreksi Penyusutan Karena 225	1.874.697.098,00	
	Koreksi Hasil Revaluasi atas BMN yg tidak ditemukan	0,00	
	Koreksi BMN ditemukan Kembali	0,00	
	Koreksi Hasil Revaluasi atas BMN Reklasifikasi Keluar Hasil Inventarisasi	0,00	
	Transaksi Normalisasi BMN (BMN Yang Dihentikan)	3.289.908.897,00	
	Penghapusan	2.323.159.228,00	
	Transfer Keluar	43.588.721.486,00	
	Hibah (Keluar)	0,00	
	Reklasifikasi Keluar	53.136.550.827,00	
	Koreksi Pencatatan	37.099.070.521,00	
	Usulan Barang Rusak Berat ke Pengelola	0,00	
	Usulan Barang Hilang ke Pengelola	0,00	
	Reklasifikasi Keluar Hasil Inventarisasi	0,00	
	Koreksi Transfer Keluar Akibat Koreksi Revaluasi	0,00	
	Koreksi Beban Kerugian Penghapusan akibat koreksi Revaluasi	0,00	
	Koreksi ekuitas akibat Koreksi Revaluasi	0,00	
	Penghapusan (BMN yang dihentikan)	58.353.028.884,00	
	Koreksi Penyusutan Reklasifikasi Masuk Akibat Koreksi Revaluasi	0,00	
	Reklasifikasi Keluar (BMN yang dihentikan)	337.080.388,00	
	Koreksi Pencatatan (BMN yang dihentikan)	2.870.765.570,00	
	Usulan Barang Rusak Berat ke Pengelola (BMN Yang Dihentikan)	621.767.877,00	
	Usulan Barang Hilang ke Pengelola (BMN Yang Dihentikan)	0,00	



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Lampiran Catatan Atas Laporan Keuangan
Per 31 Desember Tahun Anggaran 2021 (*Audited*)
Dengan Angka Perbandingan 31 Desember Tahun Anggaran 2020
(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Koreksi Penyusutan Transfer Masuk Akibat Koreksi Revaluasi	0,00	
	Penghapusan (semester I dokumen TAYL)	59.000.000,00	
	Penghapusan (semester II dokumen TAYL)	788.595.650,00	
	Penghapusan semu karena reklasifikasi dari intra ke ekstra/ sebaliknya	2.846.500,00	
	Penghapusan (semester II dokumen semester I)	27.297.044,00	
	Penghapusan BMN yang Dihentikan (semester II dokumen TAYL)	562.327.527,00	
	Penghapusan BMN yang Dihentikan (semester II dokumen semester I)	1.401.709.878,00	
	Penghapusan BMN yang Dihentikan (semester I dokumen TAYL)	980.197.406,00	
	Transfer Keluar (BMN yang dihentikan)	0,00	
	Hibah Keluar (BMN yang dihentikan)	0,00	
	Koreksi Nilai Tim Penertiban Aset	0,00	
	Koreksi Transfer Masuk	0,00	
	Koreksi atas Reklasifikasi Masuk Hasil Inventarisasi	0,00	
	Koreksi Input Normalisasi Akibat Koreksi Penilaian Kembali 225	0,00	
	Koreksi Reklasifikasi Keluar Akibat Koreksi Penilaian Kembali	0,00	
	Koreksi Normalisasi Akibat Koreksi Penilaian Kembali	0,00	
	Koreksi Reklasifikasi Masuk Akibat Koreksi Penilaian Kembali 225	0,00	
e	Akum. Penyusutan Transaksional (Keluar)	353.384.241.814,00	
	Jurnal Manual Koreksi Reklasifikasi Aset pada Akumulasi Penyusutan/Amortisasi di Satker Konsolidasi	0,00	
	Jurnal Manual Koreksi Revaluasi Aset pada Akumulasi Penyusutan/Amortisasi di Satker Konsolidasi	0,00	
	Jurnal Manual Koreksi Non Revaluasi Aset pada Akumulasi Penyusutan/Amortisasi di Satker Konsolidasi	0,00	
	Jurnal Manual Beban Kerugian Pelepasan Aset pada Akumulasi Penyusutan/Amortisasi di Satker Konsolidasi	0,00	
	Jurnal Manual Transfer Keluar pada Akumulasi Penyusutan/Amortisasi di Satker Konsolidasi	0,00	
	Jurnal Manual Transfer Masuk pada Akumulasi Penyusutan/Amortisasi di Satker Konsolidasi	0,00	
	Jurnal Manual Koreksi Non Revaluasi Aset pada Beban Penyusutan di Satker Konsolidasi	0,00	
f	Jurnal Manual atas Beban Penyusutan	0,00	
g	Beban Penyusutan Total (b - c + d + e + f)	1.442.347.421.665,00	
	Selisih (a - u)	0,00	

10 BEBAN PENYISIHAN PIUTANG LO

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih LO = Penyisihan Piutang Akhir - Penyisihan Piutang Awal - Penghapusan Piutang			
a	Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih LO	(1.221.195.048,00)	
	Penyisihan Piutang Akhir	(217.031.575.332,00)	
	Penyisihan Piutang Awal	(244.855.420.210,00)	
	Penghapusan Piutang	7.432.130.740,00	
	Jurnal Koreksi Lainnya Atas Beban Penyisihan	(23.033.638.887,00)	



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Lampiran Catatan Atas Laporan Keuangan
Per 31 Desember Tahun Anggaran 2021 (*Audited*)
Dengan Angka Perbandingan 31 Desember Tahun Anggaran 2020
(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Jurnal Koreksi Lainnya Atas Penyisihan Piutang	(1.420.729.701,00)	
	Jurnal Transfer Masuk atas Penyisihan Piutang	(498.993.655,00)	
	Jurnal Transfer Keluar atas Penyisihan Piutang	498.993.655,00	
b	Beban Penyisihan Piutang Total	(1.221.195.048,00)	
	Selisih (a - b)	0,00	

11 BEBAN LAIN-LAIN LO

	Beban Lain- Lain LO	0	
BEBAN INI TIDAK SESUAI DENGAN TUGAS DAN FUNGSI KEMENKUMHAM ANALISA PENYEBAB MUNCUL BEBAN INI, APABILA KARENA SALAH PENGGUNAAN AKUN, AGAR DILAKUKAN RALAT/REVISI. APABILA KARENA SALAH PENJURNALAN SUATU TRANSAKSI, AGAR DILAKUKAN PERBAIKAN TERHADAP JURNAL			

12 PENDAPATAN PELEPASAN ASET NON LANCAR LO

Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar LO = Pendapatan Pelepasan Aset LRA			
a	Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar LO	3.171.191.455,00	
b	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN LRA	3.171.191.455,00	
	Selisih (a - b)	0,00	

13 BEBAN PELEPASAN ASET NON LANCAR LO

Beban Pelepasan Aset Non lancar LO = Beban Kerugian Pelepasan Aset Neraca Percobaan Akrua			
a	Beban Pelepasan Aset Non Lancar LO	27.099.431.134,00	
b	Beban Kerugian Pelepasan Aset	27.099.431.134,00	
	Selisih (a - b)	0,00	

14 PENDAPATAN DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL LAINNYA LO

Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya LO = Pendapatan TP/TGR LRA + Pendapatan Pengembalian Belanja LRA + Pendapatan Selisih Kurs + Pendapatan Perolehan Aset Lainnya			
a	Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional LO	37.346.850.228,00	
	Pendapatan dari Untung Selisih Kurs Uang Persediaan (425752)	2.275.370,00	
	Pendapatan Pengembalian Belanja TAYL (42591x)	38.278.866.970,00	
	Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara (42579x)	187.604.373,00	
	Pendapatan Setoran dari Sisa Utang Non TP/TGR Pensiunan PNS (425931)	413.626.725,00	
b	Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional LRA	38.882.373.438,00	
c	Selisih Antara LO dan LRA (a - b)	(1.535.523.210,00)	
	Faktor Yang Mempengaruhi		
	Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara (42579x)	(187.604.373,00)	



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Lampiran Catatan Atas Laporan Keuangan
Per 31 Desember Tahun Anggaran 2021 (*Audited*)
Dengan Angka Perbandingan 31 Desember Tahun Anggaran 2020
(Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Pendapatan Selisih Kurs yang Belum Terealisasi	2.401.551.004,00	
	Pendapatan Penyesuaian Selisih Kurs	0,00	
	Pendapatan Perolehan Aset Lainnya	6.770.476.988,00	
	Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan	0,00	
	Jurnal (Pencatatan Baru) Piutang Jangka Panjang TP/TGR	210.523.640,00	
	Jurnal Pengakuan Piutang PNB yang menggunakan akun Penerimaan Kembali Belanja TAYL (42591X)	2.218.394.925,00	
	Jurnal Balik atas Pembayaran Piutang PNB yang menggunakan akun Penerimaan Kembali Belanja TAYL (42591X)	(12.948.864.894,00)	
	Jurnal pencatatan baru atas penyetoran kelebihan belanja TAYL yang terdapat pada BP dengan menggunakan akun 42591x	0,00	
	Jurnal balik atas penyetoran kelebihan belanja TAYL yang terdapat pada BP dengan menggunakan akun 42591x	(500,00)	
d	Total Faktor Yang Mempengaruhi	(1.535.523.210,00)	
	Selisih (c - d)	0,00	

15 BEBAN DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL LAINNYA LO

a	Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya LO	8.368.118.942,00	
	Faktor Yang Mempengaruhi		
	Beban Rugi Selisih Kurs UP Satker Perwakilan	117.935.499,00	
	Beban Penyesuaian Nilai Persediaan	0,00	
	Kerugian Persediaan Rusak/Usang	5.848.632.439,00	
	Beban Kerugian Selisih Kurs Belum Terealisasi	2.401.551.004,00	
	Beban Penyesuaian Selisih Kurs	0,00	
b	Total Faktor Yang Mempengaruhi	8.368.118.942,00	
	Selisih (a - b)	0,00	

16 SURPLUS/DEFISIT

Surplus/Defisit LO = Surplus/Defisit LPE			
a	Surplus/Defisit LO	(11.054.086.826.689,00)	
b	Surplus/Defisit LPE	(11.054.086.826.689,00)	
	Selisih (a - b)	0,00	

17 EKUITAS AWAL

Ekuitas Awal LPE = Ekuitas Awal Neraca			
a	Ekuitas Awal LPE	67.744.562.310.510,00	
b	Ekuitas Awal Neraca	67.744.562.310.510,00	
	Selisih (a - b)	0,00	

18 EKUITAS AKHIR



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
 Lampiran Catatan Atas Laporan Keuangan
 Per 31 Desember Tahun Anggaran 2021 (*Audited*)
 Dengan Angka Perbandingan 31 Desember Tahun Anggaran 2020
 (Dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Ekuitas Akhir LPE = Ekuitas Akhir Neraca			
a	Ekuitas Akhir LPE	67.749.193.172.758,00	
b	Ekuitas Akhir Neraca	67.749.193.172.758,00	
	Selisih (a - b)	0,00	

19 TRANSAKSI ANTAR ENTITAS LPE

Transaksi Antar Entitas = Belanja - Pendapatan + Transfer Masuk - Transfer Keluar + Pengesahan Hibah-Pengembalian Pengesahan Hibah			
a	Transaksi Antar Entitas LPE	11.444.531.378.147,00	
	Belanja LRA	14.252.576.022.500,00	
	Pendapatan LRA	(3.185.268.555.856,00)	
	Transfer Masuk	986.243.334.038,00	
	Transfer Keluar	(936.656.604.776,00)	
	Pengesahan Hibah Langsung	190.353.580.555,00	
	Pengembalian Pengesahan Hibah Langsung	(6.679.400,00)	
	Pengesahan Hibah Langsung TAYL	138.313.541.686,00	
	Penerimaan Hibah Uang	(1.029.940.000,00)	
	Pengesahan Hibah Uang TAYL		
	Pengembalian Pengesahan Hibah Uang	6.679.400,00	
b	Total Transaksi Antar Entitas	11.444.531.378.147,00	
	Selisih (a - b)	0,00	



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Lampiran Catatan Atas Laporan Keuangan
Per 31 Desember Tahun Anggaran 2021 (*Audited*)
Dengan Angka Perbandingan 31 Desember Tahun Anggaran 2020
(dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Rincian Koreksi Nilai Persediaan per 31 Desember 2021

NO	KODE SATKER	NAMA SATKER	KOREKSI PERSEDIAAN	KETERANGAN
Barang Konsumsi				
1	1301	409175 KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BENGKULU	7.046.400,00	Hasil temuan inspektorat tahun 2020 berupa Papan Nama Jabatan 44 unit dan Tinta Brother LC-583 12 unit, dimana terdapat pencatatan saldo awal BMN berupa peralatan dan mesin dan saldo awal barang persediaan dengan total sejumlah Rp 136.256.400,00, dikarenakan dalam pembeliannya menggunakan akun 533121 bukan menggunakan akun 532111.
2	1305	407179 RUMAH TAHANAN NEGARA SINJAI	1.638.620,00	borgol yang sebelumnya diakui sebagai aset di koreksi menjadi persediaan
3	1305	404591 LEMBAGA PEMASYARAKATAN YOGYAKARTA	2.328.480,00	Penambahan Saldo awal karena terjadi kesalahan pencatatan transfer masuk barang berupa borgol dari Ditjen PAS tanggal 05-05-2012 dalam aplikasi Simak BMN
4	1305	405678 CABANG RUMAH TAHANAN NEGARA SINABANG	1.400.000,00	Sisa saldo persediaan per 31 desember 2020 bersaldo 0, setelah diopname fisik di tahun 2021 ternyata masih terdapat saldo persediaan
5	1305	405534 CABANG RUMAH TAHAN NEGARA LHOK NGA	8.894.200,00	Sisa saldo persediaan per 31 desember 2020 bersaldo 0, setelah diopname fisik di tahun 2021 ternyata masih terdapat saldo persediaan
6	1305	407499 RUMAH TAHANAN NEGARA TERNATE	9.900.000,00	Koreksi berupa gembok yang sebelumnya tercatat pada aplikasi BMN Peralatan dan Mesin ke Saldo Awal Persediaan
7	1305	407333 LEMBAGA PEMASYARAKATAN KENDARI	76.112.936,00	Pencatatan Saldo Awal atas perolehan barang persediaan hasil inventarisasi berupa 152 buah Gembok dengan harga satuan Rp.500.743
8	1305	109636 RUMAH TAHANAN NEGARA YOGYAKARTA	114.523.820,00	Pencatatan saldo awal (gembok dan matras)
9	1305	408530 LEMBAGA PEMASYARAKATAN KOTA AGUNG	188.457.500,00	Pencatatan saldo awal matras
10	1305	405239 LAPAS BANYUWANGI	17.766.520,00	Penginputan kembali saldo amunisi yang masih ada di gudang di saldo awal aplikasi persediaan, dengan rincian : Amunisi Karet Kaliber 12 GA 500x@9.249=4.624.500, Spray Bubuk Merica 40x@444.163=17.766.520
11	1305	418342 Lapas Perempuan Kelas IIB Bengkulu	10.280.000,00	Koreksi catat borgol dan gembok dari SIMAK-BMN yang kemudian dimasukkan ke dalam saldo awal persediaan Semester I TA 2021
12	1305	404630 RUMAH TAHAN NEGARA WONOSARI	11.354.080,00	Koreksi nilai saldo awal (borgol) dari aplikasi SIMAK BMN ke aplikasi persediaan
13	1305	409263 DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN	2.394.380.000,00	jurnal balik uang muka belanja modal atas koreksi saldo awal gembok tahun 2020 yang barangnya baru diterima di 2021



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Lampiran Catatan Atas Laporan Keuangan
Per 31 Desember Tahun Anggaran 2021 (Audited)
Dengan Angka Perbandingan 31 Desember Tahun Anggaran 2020
(dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NO	KODE SATKER		NAMA SATKER	KOREKSI PERSEDIAAN	KETERANGAN
14	1305	404611	RUMAH TAHANAN NEGARA WATES	538.500,00	Koreksi nilai saldo awal (borgol) dari aplikasi SIMAK BMN ke aplikasi persediaan
15	1305	653019	LEMBAGA PEMASYARAKATAN NARKOTIKA PAMEKASAN	17.766.520,00	Koreksi saldo awal tahun 2021 atas Barang Persediaan, yang terdiri dari : a) Amunisi Bubuk Merica Rp. 73.500.000 (70 pcs), Amunisi Karet Rp. 4.624.500 (500 butir), Amunisi Gas Air Mata Rp. 22.599.500 (10 pcs), Amunisi Gas Air Mata Rp. 3.468.400 (20 pcs) dan bubuk merica Rp. 17.766.520 (40 pcs)
16	1305	683589	LAPAS KELAS III BANYUASIN PROPINSI SUMATERA SELATAN	12.127.500,00	Dilakukan Koreksi Pencatatan terhadap Transfer masuk TAYL berupa gembok yang dikeluarkan dari simak bmn menjadi Saldo Awal Persediaan 2021, Tanggal 30 Desember 2021
17	1305	407318	RUMAH TAHANAN NEGARA SENGKANG	1.638.620,00	berupa borgol pengadaan TAYL koreksi catat sebagai saldo awal pada persediaan sebelumnya dicatat di simak BMN
18	1305	649040	LEMBAGA PEMASYARAKATAN NARKOTIKA DI CIREBON	161.807.450,00	barang berupa borgol sebelumnya tercatat di simak dikoreksi ke aplikasi Persediaan
19	1305	405693	LEMBAGA PEMASYARAKATAN MEDAN	4.000.000,00	Koreksi Saldo Awal
20	1305	407902	LEMBAGA PEMASYARAKATAN BENGKULU	8.364.400,00	Koreksi catat gembok dari SIMAK-BMN yang kemudian dimasukkan ke dalam saldo awal persediaan Semester I TA 2021
21	1305	418360	Lapas Perempuan Kelas III Jayapura	17.766.520,00	Koreksi BPK - atas selisih opname fisik pada spray merica yang belum dicatatkan pada aplikasi persediaan dengan kondisi saldo awal nihil (Koreksi Saldo Awal)
22	1305	406689	LEMBAGA PEMASYARAKATAN PALANGKARAYA	17.766.520,00	Koreksi BPK - atas selisih opname fisik pada spray bubuk mericayang belum dicatatkan pada aplikasi persediaan unaudited (Koreksi Saldo Awal)
23	1305	497682	LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA BANDUNG	13.324.890,00	Koreksi BPK - atas selisih opname fisik pada spray bubuk merica yang belum dicatatkan pada aplikasi persediaan dengan kondisi saldo awal selisih tambah sama(Koreksi Saldo Awal)
24	1305	352607	LPKA Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah	17.766.520,00	Koreksi BPK - atas selisih opname fisik pada spray bubuk merica yang belum dicatatkan pada aplikasi persediaan unaudited (Koreksi Saldo Awal)
25	1305	406922	LEMBAGA PEMASYARAKATAN GORONTALO	67.798.500,00	Koreksi BPK - atas selisih opname fisik pada spray bubuk merica yang belum dicatatkan pada aplikasi persediaan(Koreksi Saldo Awal)
26	1305	405172	RUMAH TAHANAN NEGARA NGANJUK	17.766.520,00	Koreksi BPK - atas selisih opname fisik pada spray merica yang belum dicatatkan pada aplikasi persediaan dengan kondisi saldo awal nihil (Koreksi Saldo Awal)
27	1305	404780	LAPAS BREBES	17.766.520,00	Koreksi Saldo Awal



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Lampiran Catatan Atas Laporan Keuangan
Per 31 Desember Tahun Anggaran 2021 (Audited)
Dengan Angka Perbandingan 31 Desember Tahun Anggaran 2020
(dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NO	KODE SATKER		NAMA SATKER	KOREKSI PERSEDIAAN	KETERANGAN
28	1305	407562	LAPAS TABANAN	8.883.260,00	Koreksi BPK - atas selisih opname fisik pada spray bubuk merica yang belum dicatatkan pada aplikasi persediaan (Koreksi Saldo Awal)
29	1305	408633	RUMAH TAHANAN NEGARA BUNTOK	17.766.520,00	Koreksi BPK - atas selisih opname fisik pada spray bubuk merica yang belum dicatatkan pada aplikasi persediaan unaudited (Koreksi Saldo Awal)
30	1305	683313	LAPAS KELAS IIB GUNUNG SUGIH	13.324.890,00	Koreksi BPK - atas selisih opname fisik pada spray merica yang belum dicatatkan pada aplikasi persediaan dengan kondisi saldo awal nihil (Koreksi Saldo Awal)
31	1305	652979	LEMBAGA PEMASYARAKATAN NARKOTIKA JAKARTA	17.766.520,00	Koreksi BPK - atas selisih opname fisik pada amunisi yang belum dicatatkan pada aplikasi persediaan unaudited (Koreksi Saldo Awal)
32	1305	406551	LAPAS KELAS IIA KOTABUMI	17.766.520,00	Koreksi BPK - atas selisih opname fisik pada spray merica yang belum dicatatkan pada aplikasi persediaan dengan kondisi saldo awal nihil (Koreksi Saldo Awal)
33	1305	652941	LEMBAGA PEMASYARAKATAN NARKOTIKA PEMATANG SIANTAR	91.266.520,00	Koreksi BPK - Amunisi Bubuk Merica (Koreksi Saldo Awal)
34	1305	405492	LEMBAGA PEMASYARAKATAN BANDA ACEH	792.000,00	Koreksi dampak update aplikasi - atassaldo minus pada tanggal 1 januari 2021 untuk barang berupa Sarung Tangan Steril dan dilakukan normalisasi dengan metode opsk pada tanggal 01-01-2021 untuk menghilangkan saldo minus
35	1305	683327	LAPAS KELAS IIB WARUNG KIARA	17.766.520,00	Koreksi Saldo Awal
36	1305	418332	Lapas Perempuan Kelas IIA Palangkaraya	17.766.520,00	Koreksi BPK - atas selisih opname fisik pada amunisi dan spray bubuk merica yang belum dicatatkan pada aplikasi persediaan unaudited
37	1306	408021	KANTOR IMIGRASI JEMBER	151.778,00	Adanya barang lebih ketika opname fisik persediaan pada bulan Juni 2021 yaitu berupa 26 Surat Keterangan Keimigrasian (SKIM) dan 42 KITAS Non Elektronik.
38	1306	409108	KANTOR IMIGRASI NGURAH RAI	93.232.110,00	Koreksi Nilai Persediaan muncul dikarenakan terdapat penambahan transaksi masuk saldo awal Barang Konsumsi berupa Surat Keterangan Keimigrasian sejumlah 9, Stiker Visa VKSK 30 Hari sejumlah 19.050, dan Kartu Afidavit sejumlah 9
39	1306	652319	KANTOR IMIGRASI TASIKMALAYA	5.142.958,00	PENGEMBALIAN DOKIM 700 DI LAPORAN NAMUN ADA 82 BUKU SECARA FISIK UNTUK ITU ADANYA PENAMBAHAN DI SALDO AWAL SEBANYAK 82 BUKU
40	1306	407933	KANTOR IMIGRASI JAKARTA PUSAT	11.101.263,00	Pencatatan transaksi saldo awal berupa paspor 24 sejumlah 177 buku dengan nilai Rp.11.101.263
41	1306	408015	KANTOR IMIGRASI MALANG	64.078.782,00	Koreksi kekeliruan paspor 48. Dimana ada saldo paspor yg blm dimasukkan pada saldo awal tahun 2021. Dan Koreksi atas Perdim dan Affidavit karena terdapat selisih BA



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Lampiran Catatan Atas Laporan Keuangan
Per 31 Desember Tahun Anggaran 2021 (*Audited*)
Dengan Angka Perbandingan 31 Desember Tahun Anggaran 2020
(dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NO	KODE SATKER		NAMA SATKER	KOREKSI PERSEDIAAN	KETERANGAN
					Opsik dan jumlah fisik atas pemeriksaan BPK
42	1306	539101	KANTOR IMIGRASI ENTIKONG	2.758.690,00	Disebabkan oleh Penambahan Saldo Awal di Aplikasi Persediaan Berupa SPRI/Paspor Biasa 48 Halaman yang tercatat di Berita Acara Opname Fisik tanggal 31 Desember 2020 sehingga dicatat sebagai saldo awal pada Bulan Januari 2021.
43	1306	652372	KANTOR IMIGRASI BLITAR	16.871.411,00	Koreksi atas kelebihan paspor 24 sebanyak 268 buku
44	1306	662967	KANTOR IMIGRASI SAMBAS	2.759.636,00	Disebabkan oleh Penambahan Saldo Awal di Aplikasi Persediaan Berupa SPRI/Paspor Biasa 24 Halaman yang tercatat di Berita Acara Opname Fisik tanggal 31 Desember 2020 sehingga dicatat sebagai saldo awal pada Bulan Januari 2021.
45	1306	408165	KANTOR IMIGRASI TANJUNG KARANG	564.471,00	Pengembalian dokim SPRI 24 HAL sebanyak 9 buku dari gudang penyimpanan lantaskim
46	1306	683111	KANTOR IMIGRASI KELAS III KOTABUMI	22.139.807,00	Pengembalian dokim SPRI 24 HAL sebanyak 353 buku dari gudang penyimpanan lantaskim
47	1306	407995	KANTOR IMIGRASI YOGYAKARTA	61.470.000,00	Menambahkan kuantitas ke dalam aplikasi persediaan sesuai dengan fisik yang ada di gudang sebagai TL Pemeriksaan BPK Bulan Maret 2021
48	1306	480505	KANTOR IMIGRASI TERNATE	126.812.000,00	Adanya Kesalahan Penginputan harga Pengadaan Map. Sehingga ada Koreksi Nilai Persediaan
49	1306	408953	KANTOR IMIGRASI TANJUNG PERAK	19.877.033,00	Koreksi nilai persediaan karena selisih pencatatan paspor 24 antara di sistem dan fisik
50	1306	652344	KANTOR IMIGRASI PATI	15.679.750,00	Koreksi saldo awal dokim (paspor)
51	1306	408479	KANTOR IMIGRASI SAMARINDA	6.271.900,00	Koreksi opsik paspor 24 halaman yang telah dikembalikan ke Ditjenim
52	1306	407958	KANTOR IMIGRASI BANDUNG	2.870.000,00	Reklas borgol ke aplikasi persediaan
53	1306	408061	KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI PEKANBARU	10.758.000,00	atas koreksi kuantitas tinta printer
54	1306	408598	KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI BANJARMASIN	7.965.313,00	atas koreksi paspor 24
55	1306	109159	KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI TEMBAGAPURA	1.900.800,00	Koreksi atas selisih nilai persediaan
SUBTOTAL				3.895.786.508,00	
Amunisi					
56	1301	409210	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PALU	77.171.325,00	Saat dilakukan inventarisasi BMN, digudang terdapat peluru (transfer dari Ditjen PAS untuk UPT dikanwil Sulteng)
57	1305	109140	RUMAH TAHANAN NEGARA TANAH GROGOT	2.145.000,00	Penginputan Saldo Awal Amunisi pada Aplikasi Persediaan
58	1305	405081	LAPAS MOJOKERTO	57.886.336,00	Penginputan kembali saldo amunisi yang masih ada di gudang di saldo awal aplikasi persediaan, dengan rincian : Amunisi Karet Kaliber



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Lampiran Catatan Atas Laporan Keuangan
Per 31 Desember Tahun Anggaran 2021 (*Audited*)
Dengan Angka Perbandingan 31 Desember Tahun Anggaran 2020
(dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NO	KODE SATKER		NAMA SATKER	KOREKSI PERSEDIAAN	KETERANGAN
					7,65x17 mm 500x@11.000=5.500.000
59	1305	352612	LPKA Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara	41.000.000,00	Pencatatan Saldo Awal atas perolehan barang persediaan hasil inventarisasi berupa 20 buah Catridge Gas Air Mata dengan harga satuan Rp. 2.050.000
60	1305	406049	CABANG RUMAH TAHANAN NEGARA MUARA LABUH	3.369.960,00	Penginputan atas amunisi berupa peluru senpi yang masih terdapat barang tersebut di gudang
61	1305	406426	CABANG RUMAH TAHANAN NEGARA MUARA DUA	82.928.665,00	Penginputan Saldo Awal Amunisi pada Aplikasi Persediaan
62	1305	405239	LAPAS BANYUWANGI	4.624.500,00	Penginputan kembali saldo amunisi yang masih ada di gudang di saldo awal aplikasi persediaan, dengan rincian : Amunisi Karet Kaliber 12 GA 500x@9.249=4.624.500, Spray Bubuk Merica 40x@444.163=17.766.520
63	1305	418335	Lapas Perempuan Kelas IIA Pekanbaru	42.939.050,00	penginputan amunisi yg ditemukan kembali di saldo awal
64	1305	497733	LEMBAGA PEMASYARAKATAN WANITA PALEMBANG	76.374.500,00	Penginputan Kembali Saldo Amunisi yang Masih Tersedia Setelah Dilakukan Opname Fisik Ulang
65	1305	653002	LEMBAGA PEMASYARAKATAN NARKOTIKA MADIUN	77.374.402,00	Penginputan kembali saldo amunisi yang masih ada di gudang di saldo awal aplikasi persediaan, dengan rincian : Amunisi bubuk merica 66x@1.050.000=69.300.000, Amunisi Karet Kaliber 12 GA 498x@9.249=4.606.002, dan Peluru Gas Air Mata Kaliber 20x@173.420=3.468.400
66	1305	406463	CABANG RUMAH TAHANAN NEGARA SOROLANGUN RAWAS	10.894.782,00	Penginputan Saldo Awal berupa Amunisi pada aplikasi Persediaan
67	1305	406432	CABANG RUMAH TAHANAN NEGARA PAGAR ALAM	94.158.625,00	Penambahan Saldo Awal Berupa Amunisi
68	1305	407644	LEMBAGA PEMASYARAKATAN SUMBAWA BESAR	12.367.500,00	Lapas Sumbawa ada Saldo Awal Persediaan Amunisi tahun 2015 belum dicatat temuan itjen 2017 senilai 12.367.500
69	1305	653019	LEMBAGA PEMASYARAKATAN NARKOTIKA PAMEKASAN	104.192.400,00	Koreksi saldo awal tahun 2021 atas Barang Persediaan, yang terdiri dari : a) Amunisi Bubuk Merica Rp. 73.500.000 (70 pcs), Amunisi Karet Rp. 4.624.500 (500 butir), Amunisi Gas Air Mata Rp. 22.599.500 (10 pcs), Amunisi Gas Air Mata Rp. 3.468.400 (20 pcs) dan bubuk merica Rp. 17.766.520 (40 pcs)
70	1305	406545	LEMBAGA PEMASYARAKATAN BANDAR LAMPUNG	44.349.575,00	Koreksi Saldo Awal
71	1305	406494	RUMAH TAHANAN NEGARA PRABUMULIH	116.839.151,00	Penginputan saldo awal berupa amunisi
72	1305	109112	RUMAH TAHANAN NEGARA SURABAYA	153.856.000,00	Penginputan saldo awal di persediaan atas amunisi yang fisiknya masih ada



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Lampiran Catatan Atas Laporan Keuangan
Per 31 Desember Tahun Anggaran 2021 (*Audited*)
Dengan Angka Perbandingan 31 Desember Tahun Anggaran 2020
(dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NO	KODE SATKER		NAMA SATKER	KOREKSI PERSEDIAAN	KETERANGAN
73	1305	653051	LEMBAGA PEMASYARAKATAN NARKOTIKA JAYAPURA	(591,00)	Koreksi atas Amunisi
74	1305	406420	LAPAS MUARA ENIM	(596.100,00)	Koreksi BPK - atas selisih opname fisik pada amunisi yang belum dicatatkan pada aplikasi persediaan unaudited dengan kondisi opsi selisih kurang beda harga.
75	1305	406344	LEMBAGA PEMASYARAKATAN KUALA TUNGKAL	(2.920,00)	Koreksi BPK - atas selisih opname fisik pada amunisi yang belum dicatatkan pada aplikasi persediaan unaudited dengan kondisi opsi selisih kurang beda harga.
76	1305	407845	LEMBAGA PEMASYARAKATAN MERAUKE	(8.672.125,00)	Koreksi BPK - atas selisih opname fisik pada amunisi yang belum dicatatkan pada aplikasi persediaan dengan kondisi saldo awal selisih tambah sama
77	1305	407701	LAPAS KELAS III BAA	(4.388.978,00)	Koreksi atas Amunisi
78	1305	407720	LEMBAGA PEMASYARAKATAN KALABAHI	(2.225.520,00)	Koreksi atas Amunisi
79	1305	109150	LAPAS ARGAMAKMUR	(5.346.000,00)	Koreksi atas Amunisi
80	1305	406803	LEMBAGA PEMASYARAKATAN AMUNTAI	(87.368.017,00)	Koreksi atas Amunisi
81	1305	683997	Rutan Kelas II B Bengkulu	90.226.700,00	Koreksi BPK - atas selisih opname fisik pada amunisi yang belum dicatatkan pada aplikasi persediaan dengan kondisiSaldo awal selisih tambah sama(Koreksi Saldo Awal)
82	1305	683636	LAPAS KELAS IIA CILEGON	7.334.712,00	Koreksi BPK - atas selisih opname fisik pada amunisi yang belum dicatatkan pada aplikasi persediaan dengan kondisiSaldo awal selisih tambah sama (Koreksi Saldo Awal)
83	1305	567869	RUMAH TAHANAN NEGARA GRESIK	11.330.025,00	Koreksi BPK - atas selisih opname fisik pada amunisi yang belum dicatatkan pada aplikasi persediaan dengan kondisi Saldo awal nihil (Koreksi Saldo Awal)
84	1305	404806	RUMAH TAHANAN NEGARA TEMANGGUNG	2.995.250,00	Koreksi BPK - atas selisih opname fisik pada amunisi yang belum dicatatkan pada aplikasi persediaan dengan kondisiSaldo awal selisih tambah sama (Koreksi Saldo Awal)
85	1305	406322	LEMBAGA PEMASYARAKATAN MUARA TEBO	18.359.265,00	Koreksi BPK - atas selisih opname fisik pada amunisi yang belum dicatatkan pada aplikasi persediaan dilakukan dengan mengkoreksi quantities (Koreksi Saldo Awal)
86	1305	497645	RUMAH TAHANAN NEGARA CIPINANG	202.999.000,00	Koreksi BPK - atas selisih opname fisik pada amunisi yang belum dicatatkan pada aplikasi persediaan unaudited (Koreksi Saldo Awal)
87	1305	406523	RUTAN KELAS IIB MUNTOK	12.189.183,00	Koreksi BPK - atas selisih opname fisik pada amunisi yang belum dicatatkan pada aplikasi persediaan unaudited (Koreksi Saldo Awal)
88	1305	407333	LEMBAGA PEMASYARAKATAN KENDARI	46.879.779,00	Koreksi BPK - atas selisih opname fisik pada amunisi yang belum dicatatkan pada aplikasi persediaan



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Lampiran Catatan Atas Laporan Keuangan
Per 31 Desember Tahun Anggaran 2021 (*Audited*)
Dengan Angka Perbandingan 31 Desember Tahun Anggaran 2020
(dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NO	KODE SATKER	NAMA SATKER	KOREKSI PERSEDIAAN	KETERANGAN
				dengan kondisi saldo awal nihil (Koreksi Saldo Awal)
89	1305	407675 LAPAS ATAMBUA	2.067.120,00	Koreksi BPK - atas selisih opname fisik dan pemakaian pada amunisi yang belum dicatatkan pada aplikasi persediaan unaudited (Koreksi Saldo Awal)
90	1305	418360 Lapas Perempuan Kelas III Jayapura	29.820.000,00	Koreksi BPK - atas selisih opname fisik pada amunisi yang belum dicatatkan pada aplikasi persediaan dengan kondisi saldo awal nihil (Koreksi Saldo Awal)
91	1305	405823 LAPAS LUBUK PAKAM	3.564.000,00	Koreksi BPK - atas selisih opname fisik pada amunisi yang belum dicatatkan pada aplikasi persediaan (Koreksi Saldo Awal)
92	1305	652983 LEMBAGA PEMASYARAKATAN NARKOTIKA BANDUNG	176.000,00	Koreksi BPK - atas selisih opname fisik pada amunisi yang belum dicatatkan pada aplikasi persediaan dengan kondisi saldo awal nihil (Koreksi Saldo Awal)
93	1305	405101 LAPAS JOMBANG	20.486.535,00	Koreksi BPK - atas selisih opname fisik pada amunisi yang belum dicatatkan pada aplikasi persediaan dengan kondisi saldo awal nihil (Koreksi Saldo Awal)
94	1305	406689 LEMBAGA PEMASYARAKATAN PALANGKARAYA	4.777.542,00	Koreksi BPK - atas selisih opname fisik pada amunisi yang belum dicatatkan pada aplikasi persediaan unaudited (Koreksi Saldo Awal)
95	1305	407483 LAPAS KELAS III SAUMLAKI	42.207.900,00	Koreksi Saldo Awal
96	1305	404472 LEMBAGA PEMASYARAKATAN BOGOR	4.787.200,00	Koreksi BPK - atas selisih opname fisik pada spray bubuk merica yang belum dicatatkan pada aplikasi persediaan dengan kondisi saldo awal selisih tambah sama (Koreksi Saldo Awal)
97	1305	405951 RUTAN KELAS IIB SIPIROK	567.600,00	Koreksi BPK - atas selisih opname fisik pada amunisi yang belum dicatatkan pada aplikasi persediaan dengan kondisi saldo awal nihil (Koreksi Saldo Awal)
98	1305	405936 RUMAH TAHANAN NEGARA BALIGE	3.822.120,00	Koreksi BPK - atas selisih opname fisik pada amunisi yang belum dicatatkan pada aplikasi persediaan dengan kondisi saldo awal nihil dan opsil selisih kurang harga sama (Koreksi Saldo Awal)
99	1305	405817 LEMBAGA PEMASYARAKATAN TEBINGTINGGI DELI	396.000,00	Koreksi BPK - atas selisih opname fisik pada amunisi yang belum dicatatkan pada aplikasi persediaan dgn kondisi opsik selisih kurnang harga sama dan saldo awal selisih tambah harga sama (Koreksi Saldo Awal)
100	1305	683589 LAPAS KELAS IIA BANYUASIN	83.250.000,00	Koreksi BPK - atas selisih opname fisik pada amunisi yang belum dicatatkan pada aplikasi persediaan (Koreksi Saldo Awal)
101	1305	406508 LEMBAGA PEMASYARAKATAN PANGKALPINANG	29.000.172,00	Koreksi BPK - atas selisih opname fisik pada amunisi yang belum dicatatkan pada aplikasi persediaan unaudited (Koreksi Saldo Awal)



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Lampiran Catatan Atas Laporan Keuangan
Per 31 Desember Tahun Anggaran 2021 (*Audited*)
Dengan Angka Perbandingan 31 Desember Tahun Anggaran 2020
(dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NO	KODE SATKER		NAMA SATKER	KOREKSI PERSEDIAAN	KETERANGAN
102	1305	404501	LAPAS PURWAKARTA	17.476.800,00	Koreksi BPK - atas selisih opname fisik pada amunisi yang belum dicatatkan pada aplikasi persediaan dengan kondisi saldo awal nihil (Koreksi Saldo Awal)
103	1305	405311	RUMAH TAHANAN NEGARA SAMPANG	4.624.500,00	Koreksi Saldo Awal
104	1305	407669	LEMBAGA PEMASYARAKATAN KUPANG	23.832.315,00	Koreksi BPK - atas selisih opname fisik pada amunisi berupa catridge gas air mata dan amunisi bubuk merica yang belum dicatatkan pada aplikasi persediaan (Koreksi Saldo Awal)
105	1305	406695	RUMAH TAHANAN NEGARA KUALA KAPUAS	73.500.000,00	Koreksi BPK - atas selisih opname fisik pada amunisi yang belum dicatatkan pada aplikasi persediaan unaudited (Koreksi Saldo Awal)
106	1305	663073	RUMAH TAHANAN NEGARA BANDAR LAMPUNG	40.760.055,00	Koreksi BPK - atas selisih opname fisik pada amunisi yang belum dicatatkan pada aplikasi persediaan dengan kondisi selisih kurang harga sama (Koreksi Saldo Awal)
107	1305	352607	LPKA Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah	41.000.000,00	Koreksi BPK - atas selisih opname fisik pada amunisi yang belum dicatatkan pada aplikasi persediaan unaudited (Koreksi Saldo Awal)
108	1305	405157	LEMBAGA PEMASYARAKATAN KEDIRI	8.449.056,00	Koreksi BPK - atas selisih opname fisik pada amunisi yang belum dicatatkan pada aplikasi persediaan kondisi saldo awal selisih tambah sama (Koreksi Saldo Awal)
109	1305	406271	LEMBAGA PEMASYARAKATAN TANJUNG PINANG	7.920.000,00	Koreksi BPK - atas selisih opname fisik pada amunisi yang belum dicatatkan dan atas pemakaian yang belum dicatatkan pada aplikasi persediaan unaudited (Koreksi Saldo Awal)
110	1305	406922	LEMBAGA PEMASYARAKATAN GORONTALO	27.783.699,00	Koreksi BPK - atas selisih opname fisik pada amunisi yang belum dicatatkan pada aplikasi persediaan (Koreksi Saldo Awal)
111	1305	405172	RUMAH TAHANAN NEGARA NGANJUK	5.940.000,00	Koreksi BPK - atas selisih opname fisik pada amunisi yang belum dicatatkan pada aplikasi persediaan dengan kondisi saldo awal nihil (Koreksi Saldo Awal)
112	1305	406457	LEMBAGA PEMASYARAKATAN LUBUK LINGGAU	95.550.000,00	Koreksi BPK - atas selisih opname fisik pada amunisi yang belum dicatatkan pada aplikasi persediaan unaudited dan koreksi atas pemakaian amunisi yang belum dicatatkan pada aplikasi (Koreksi Saldo Awal)
113	1305	407355	LEMBAGA PEMASYARAKATAN BAU-BAU	26.475.766,00	Koreksi BPK - atas selisih opname fisik pada amunisi yang belum dicatatkan pada aplikasi persediaan dengan kondisi saldo awal nihil (Koreksi Saldo Awal)
114	1305	404852	LEMBAGA PEMASYARAKATAN PATI	1.342.000,00	Koreksi Saldo Awal atas update aplikasi
115	1305	653000	LEMBAGA PEMASYARAKATAN NARKOTIKA NUSAKAMBANGAN	83.250.000,00	Koreksi BPK - atas selisih opname fisik pada amunisi yang belum dicatatkan pada aplikasi persediaan dengan kondisi saldo awal nihil (Koreksi Saldo Awal)



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Lampiran Catatan Atas Laporan Keuangan
Per 31 Desember Tahun Anggaran 2021 (*Audited*)
Dengan Angka Perbandingan 31 Desember Tahun Anggaran 2020
(dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NO	KODE SATKER		NAMA SATKER	KOREKSI PERSEDIAAN	KETERANGAN
116	1305	406344	LEMBAGA PEMASYARAKATAN KUALA TUNGKAL	84.293.700,00	Koreksi Saldo Awal
117	1305	406344	LEMBAGA PEMASYARAKATAN KUALA TUNGKAL	30.642.000,00	Koreksi atas Amunisi
118	1305	683746	LAPAS NARKOTIKA KELAS IIA GUNUNG SINDUR	462.856.400,00	Koreksi BPK - atas selisih opname fisik pada spray bubuk merica yang belum dicatatkan pada aplikasi persediaan dengan kondisi saldo awal nihil (Koreksi Saldo Awal)
119	1305	406709	LEMBAGA PEMASYARAKATAN MUARA TEWE	18.017.052,00	Koreksi BPK - atas selisih opname fisik pada amunisi yang belum dicatatkan dan atas pemakaian yang belum dilaporkan pada aplikasi persediaan unaudited (Koreksi Saldo Awal)
120	1305	405358	LAPAS PROBOLINGGO	15.501.024,00	Koreksi BPK - atas selisih opname fisik pada amunisi yang belum dicatatkan pada aplikasi persediaan unaudited kondisi saldo awal selisih tambah sama (Koreksi Saldo Awal)
121	1305	406402	LEMBAGA PEMASYARAKATAN LAHAT	126.771.848,00	Koreksi BPK - atas selisih opname fisik pada amunisi yang belum dicatatkan pada aplikasi persediaan unaudited (Koreksi Saldo Awal)
122	1305	406441	LAPAS KELAS IIB EMPAT LAWANG	30.583.192,00	Koreksi BPK - atas selisih opname fisik pada amunisi yang belum dicatatkan pada aplikasi persediaan (Koreksi Saldo Awal)
123	1305	404554	LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEMUDA TANGERANG	21.708.038,00	Koreksi BPK - atas selisih opname fisik pada amunisi yang belum dicatatkan pada aplikasi persediaan unaudited kondisi saldo awal selisih tambah sama (Koreksi Saldo Awal)
124	1305	407562	LAPAS TABANAN	18.007.454,00	Koreksi BPK - atas selisih opname fisik pada amunisi yang belum dicatatkan pada aplikasi persediaan (Koreksi Saldo Awal)
125	1305	404460	LAPAS INDRAMAYU	10.433.276,00	Koreksi BPK - atas selisih opname fisik pada amunisi yang belum dicatatkan pada aplikasi persediaan (Koreksi Saldo Awal)
126	1305	404331	LAPAS SUMEDANG	2.758.800,00	Koreksi BPK - atas selisih opname fisik pada amunisi yang belum dicatatkan pada aplikasi persediaan unaudited (Koreksi Saldo Awal)
127	1305	404353	LAPAS CIAMIS	12.276.000,00	Koreksi BPK - atas selisih opname fisik pada amunisi yang belum dicatatkan pada aplikasi persediaan unaudited (Koreksi Saldo Awal)
128	1305	683390	RUMAH TAHANAN KELAS IIB KOTA AGUNG	83.250.000,00	Koreksi BPK - atas selisih opname fisik pada amunisi yang belum dicatatkan pada aplikasi persediaan dengan kondisi saldo awal nihil (Koreksi Saldo Awal)
129	1305	406282	LEMBAGA PEMASYARAKATAN METRO	4.286.975,00	Koreksi BPK - atas selisih opname fisik pada amunisi yang belum dicatatkan pada aplikasi persediaan dengan kondisi fisik selisih kurang harga sama (Koreksi Saldo Awal)
130	1305	407845	LEMBAGA PEMASYARAKATAN MERAUKE	17.156.895,00	Koreksi atas Amunisi



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Lampiran Catatan Atas Laporan Keuangan
Per 31 Desember Tahun Anggaran 2021 (Audited)
Dengan Angka Perbandingan 31 Desember Tahun Anggaran 2020
(dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NO	KODE SATKER		NAMA SATKER	KOREKSI PERSEDIAAN	KETERANGAN
131	1305	683622	LAPAS KELAS IIB BANJAR	9.574.500,00	Koreksi BPK - atas selisih opname fisik pada spray bubuk merica yang belum dicatatkan pada aplikasi persediaan dengan kondisi saldo awal nihil (Koreksi Saldo Awal)
132	1305	407845	LEMBAGA PEMASYARAKATAN MERAUKE	157.233,00	Koreksi Saldo Awal
133	1305	404296	RUTAN KELAS I PONDOK BAMBU	10.128.525,00	Koreksi BPK - atas selisih opname fisik pada amunisi yang belum dicatatkan pada aplikasi persediaan unaudited dengan kondisi saldo awal selisih tambah sama (Koreksi Saldo Awal)
134	1305	405832	RUMAH TAHANAN NEGARA SIDIKALANG	6.126.120,00	Koreksi BPK - atas selisih opname fisik pada amunisi yang belum dicatatkan pada aplikasi persediaan dengan kondisi saldo awal selisih tambah sama (Koreksi Saldo Awal)
135	1305	406627	LEMBAGA PEMASYARAKATAN SINGKAWANG	131.894.180,00	Koreksi BPK - atas selisih opname fisik pada amunisi yang belum dicatatkan pada aplikasi persediaan dengan kondisi saldo awal nihil (Koreksi Saldo Awal)
136	1305	404362	LAPAS TASIKMALAYA	15.979.248,00	Koreksi BPK - atas selisih opname fisik pada spray bubuk merica yang belum dicatatkan pada aplikasi persediaan dengan kondisi saldo awal nihil (Koreksi Saldo Awal)
137	1305	408633	RUMAH TAHANAN NEGARA BUNTOK	80.568.600,00	Koreksi BPK - atas selisih opname fisik pada amunisi yang belum dicatatkan pada aplikasi persediaan unaudited (Koreksi Saldo Awal)
138	1305	406381	LEMBAGA PEMASYARAKATAN TANJUNG RAJA	10.610.661,00	Koreksi BPK - atas selisih opname fisik pada amunisi yang belum dicatatkan pada aplikasi persediaan unaudited dengan kondisi saldo awal nihil dan saldo awal selisih tambah sama (Koreksi Saldo Awal)
139	1305	653051	LEMBAGA PEMASYARAKATAN NARKOTIKA JAYAPURA	2.191.200,00	Koreksi BPK - atas selisih opname fisik pada amunisi yang belum dicatatkan pada aplikasi persediaan dengan kondisi saldo awal selisih tambah sama (Koreksi Saldo Awal)
140	1305	653051	LEMBAGA PEMASYARAKATAN NARKOTIKA JAYAPURA	7.801.200,00	Koreksi BPK - atas selisih opname fisik pada amunisi yang belum dicatatkan pada aplikasi persediaan dengan kondisi saldo awal selisih tambah sama (Koreksi Saldo Awal)
141	1305	405270	LEMBAGA PEMASYARAKATAN PAMEKASAN	77.608.350,00	Koreksi BPK - atas selisih opname fisik pada amunisi yang belum dicatatkan pada aplikasi persediaan unaudited kondisi saldo awal nihil dan saldo awal selisih tambah sama (Koreksi Saldo Awal)
142	1305	405132	LAPAS LAMONGAN	28.447.752,00	Koreksi BPK - atas selisih opname fisik pada amunisi yang belum dicatatkan pada aplikasi persediaan (Koreksi Saldo Awal)
143	1305	109154	LAPAS BATAM	9.448.425,00	Koreksi BPK - atas selisih opname fisik pada amunisi yang belum dicatatkan pada aplikasi persediaan unaudited (Koreksi Saldo Awal)
144	1305	407701	LAPAS KELAS III BAA	5.401.500,00	Koreksi Saldo Awal



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
 Lampiran Catatan Atas Laporan Keuangan
 Per 31 Desember Tahun Anggaran 2021 (*Audited*)
 Dengan Angka Perbandingan 31 Desember Tahun Anggaran 2020
 (dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NO	KODE SATKER		NAMA SATKER	KOREKSI PERSEDIAAN	KETERANGAN
145	1305	407701	LAPAS KELAS III BAA	13.200,00	Koreksi atas Amunisi
146	1305	683348	LAPAS KELAS IIB TANJUNG	1.053.930,00	Koreksi BPK - atas selisih opname fisik pada amunisi yang belum dicatatkan pada aplikasi persediaan dengan kondisi saldo awal nihil (Koreksi Saldo Awal)
147	1305	683313	LAPAS KELAS IIB GUNUNG SUGIH	92.871.775,00	Koreksi BPK - atas selisih opname fisik pada amunisi yang belum dicatatkan pada aplikasi persediaan dengan kondisi saldo awal nihil (Koreksi Saldo Awal)
148	1305	419139	LPKA JAKARTA, PROVINSI DKI JAKARTA	41.000.000,00	Koreksi BPK - atas selisih opname fisik pada amunisi yang belum dicatatkan pada aplikasi persediaan unaudited (Koreksi Saldo Awal)
149	1305	404322	LEMBAGA PEMASYARAKATAN BANCEUY BANDUNG	4.904.321,00	Koreksi BPK - atas selisih opname fisik pada amunisi yang belum dicatatkan pada aplikasi persediaan (Koreksi Saldo Awal)
150	1305	407870	LAPAS KELAS III TEMINABUHAN	11.330.025,00	Koreksi BPK - atas selisih opname fisik pada amunisi yang belum dicatatkan pada aplikasi persediaan dengan kondisi saldo awal nihil (Koreksi Saldo Awal)
151	1305	407720	LEMBAGA PEMASYARAKATAN KALABAHI	4.945.425,00	Koreksi Saldo Awal
152	1305	407720	LEMBAGA PEMASYARAKATAN KALABAHI	7.418.400,00	Koreksi atas Amunisi
153	1305	406664	LEMBAGA PEMASYARAKATAN KETAPANG	8.509.080,00	Koreksi BPK - atas selisih opname fisik pada amunisi yang belum dicatatkan pada aplikasi persediaan dengan kondisi saldo awal nihil (Koreksi Saldo Awal)
154	1305	404517	LEMBAGA PEMASYARAKATAN SUBANG	5.692.302,00	Koreksi BPK - atas selisih opname fisik pada amunisi yang belum dicatatkan pada aplikasi persediaan (Koreksi Saldo Awal)
155	1305	109109	LEMBAGA PEMASYARAKATAN KEMBANG KUNING	81.897.600,00	Koreksi BPK - atas selisih opname fisik pada amunisi yang belum dicatatkan pada aplikasi persediaan, laporan bersaldo kurang dari fisik (Koreksi Saldo Awal)
156	1305	405483	LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK BLITAR	3.625.608,00	Koreksi BPK - atas selisih opname fisik pada amunisi yang belum dicatatkan pada aplikasi persediaan (Koreksi Saldo Awal)
157	1305	406420	LAPAS MUARA ENIM	13.892.253,00	Koreksi BPK - atas selisih opname fisik pada amunisi yang belum dicatatkan pada aplikasi persediaan unaudited dengan kondisi opsik selisih kurang beda harga.
158	1305	408655	LEMBAGA PEMASYARAKATAN ANAK KUTOARJO	1.849.800,00	Koreksi BPK - atas selisih opname fisik pada amunisi yang belum dicatatkan pada aplikasi persediaan dengan kondisi saldo awal nihil (Koreksi Saldo Awal)
159	1305	109150	LAPAS ARGAMAKMUR	16.530.825,00	Koreksi Saldo Awal
160	1305	109150	LAPAS ARGAMAKMUR	13.200,00	Koreksi atas Amunisi



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
 Lampiran Catatan Atas Laporan Keuangan
 Per 31 Desember Tahun Anggaran 2021 (Audited)
 Dengan Angka Perbandingan 31 Desember Tahun Anggaran 2020
 (dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NO	KODE SATKER		NAMA SATKER	KOREKSI PERSEDIAAN	KETERANGAN
161	1305	109107	LEMBAGA PEMASYARAKATAN BATU	120.140.256,00	Koreksi BPK - atas selisih opname fisik pada amunisi yang belum dicatatkan pada aplikasi persediaan dengan kondisi saldo awal nihil (Koreksi Saldo Awal)
162	1305	419140	LPKA JOGJAKARTA, PROVINSI D.I YOGYAKARTA	62.000.000,00	Koreksi BPK - atas selisih opname fisik pada amunisi berupa catridge gas air mata dan amunisi bubuk merica yang belum dicatatkan pada aplikasi persediaan (Koreksi Saldo Awal)
163	1305	405693	LEMBAGA PEMASYARAKATAN MEDAN	244.335,00	Koreksi BPK - atas selisih opname fisik pada amunisi yang belum dicatatkan pada aplikasi persediaan dengan kondisi saldo awal nihil (Koreksi Saldo Awal)
164	1305	407851	LEMBAGA PEMASYARAKATAN MANOKWARI	31.746.768,00	Koreksi BPK - atas selisih opname fisik pada amunisi yang belum dicatatkan pada aplikasi persediaan dengan kondisi saldo awal nihil (Koreksi Saldo Awal)
165	1305	406715	LEMBAGA PEMASYARAKATAN PANGKALAN BUN	2.702.700,00	Koreksi BPK - atas selisih opname fisik pada amunisi yang belum dicatatkan pada aplikasi persediaan, laporan bersaldo kurang dari fisik (Koreksi Saldo Awal)
166	1305	497651	LEMBAGA PEMASYARAKATAN SALEMBA	462.450,00	Koreksi BPK - atas selisih opname fisik pada amunisi yang belum dicatatkan pada aplikasi persediaan unaudited (Koreksi Saldo Awal)
167	1305	404378	LEMBAGA PEMASYARAKATAN SUKAMISKIN	10.187.100,00	Koreksi BPK - atas selisih opname fisik pada spray bubuk merica yang belum dicatatkan pada aplikasi persediaan dengan kondisi opsik selisih kurang harga sama (Koreksi Saldo Awal)
168	1305	406803	LEMBAGA PEMASYARAKATAN AMUNTAI	22.994.517,00	Koreksi Saldo Awal
169	1305	406803	LEMBAGA PEMASYARAKATAN AMUNTAI	9.249,00	Koreksi atas Amunisi
170	1305	109115	LEMBAGA PEMASYARAKATAN ANAK MEDAN	16.350.344,00	Koreksi BPK - atas selisih opname fisik pada amunisi yang belum dicatatkan pada aplikasi persediaan dengan kondisi saldo awal nihil (Koreksi Saldo Awal)
171	1305	404481	LAPAS SUKABUMI	35.658.084,00	Koreksi BPK - atas selisih opname fisik pada amunisi yang belum dicatatkan pada aplikasi persediaan dengan kondisi saldo awal nihil (Koreksi Saldo Awal)
172	1305	109105	LEMBAGA PEMASYARAKATAN BEKASI	180.382.839,00	Koreksi BPK - atas selisih opname fisik pada amunisi yang belum dicatatkan pada aplikasi persediaan unaudited (Koreksi Saldo Awal)
173	1305	531891	RUMAH TAHANAN NEGARA SOASIU	12.474,00	Koreksi BPK - atas selisih opname fisik pada amunisi yang belum dicatatkan pada aplikasi persediaan unaudited (Koreksi Saldo Awal)
174	1305	407242	RUMAH TAHANAN NEGARA ENREKANG	1.624.975,00	Koreksi BPK - atas selisih opname fisik pada amunisi yang belum dicatatkan pada aplikasi persediaan unaudited (Koreksi Saldo Awal)



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Lampiran Catatan Atas Laporan Keuangan
Per 31 Desember Tahun Anggaran 2021 (Audited)
Dengan Angka Perbandingan 31 Desember Tahun Anggaran 2020
(dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NO	KODE SATKER		NAMA SATKER	KOREKSI PERSEDIAAN	KETERANGAN
175	1305	404441	LAPAS MAJALENGKA	10.213.632,00	Koreksi BPK - atas selisih opname fisik pada amunisi yang belum dicatatkan pada aplikasi persediaan dengan kondisi Saldo awal nihil (Koreksi Saldo Awal)
176	1305	406859	LAPAS KELAS IIA TENGGARONG	12.213.630,00	Koreksi BPK - atas selisih opname fisik pada amunisi yang belum dicatatkan pada aplikasi persediaan dengan kondisi saldo awal nihil (Koreksi Saldo Awal)
177	1305	418332	Lapas Perempuan Kelas IIA Palangkaraya	41.000.000,00	Koreksi BPK - atas selisih opname fisik pada amunisi dan spray bubuk merica yang belum dicatatkan pada aplikasi persediaan unaudited (Koreksi Saldo Awal)
178	1305	109104	LEMBAGA PEMASYARAKATAN KARAWANG	250.973.712,00	Koreksi BPK - atas selisih opname fisik pada amunisi yang belum dicatatkan pada aplikasi persediaan unaudited (Koreksi Saldo Awal)
179	1305	683593	LAPAS KELAS IIB KAYU AGUNG	1.202.370,00	Koreksi BPK - atas selisih opname fisik pada amunisi yang belum dicatatkan pada aplikasi persediaan (Koreksi Saldo Awal)
180	1306	408969	KANTOR IMIGRASI POLONIA	122.760,00	Koreksi pencatatan nilai saldo awal amunisi
181	1306	408046	KANTOR IMIGRASI MEDAN	99.000,00	Koreksi pencatatan nilai saldo awal amunisi
182	1306	408485	KANTOR IMIGRASI TEMBILAHAN	300.000,00	Penambahan barang persediaan yang belum terinput ke aplikasi persediaan (peluru/amunisi) sesuai arahan dari biro BMN
183	1306	408981	KANTOR IMIGRASI SIBOLGA	297.000,00	Koreksi pencatatan nilai saldo awal amunisi
SUBTOTAL				4.399.977.901,00	
Bahan Untuk Pemeliharaan					
184	1305	405678	CABANG RUMAH TAHANAN NEGARA SINABANG	250.000,00	Sisa saldo persediaan per 31 desember 2020 bersaldo 0, setelah diopname fisik di tahun 2021 ternyata masih terdapat saldo persediaan
185	01306	109159	KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI TEMBAGAPURA	352.980,00	Koreksi atas selisih nilai persediaan berupa bahan untuk pemeliharaan
SUBTOTAL				602.980,00	
Persediaan yang Belum Diregister					
186	1306	409272	DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI	175.414,00	Jurnal persediaan belum diregister karena adanya pembulatan dokumen keimigrasian
SUBTOTAL				175.414,00	
Uang Muka Belanja Modal (prepayment)					
187	1305	409263	DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN	(2.394.380.000,00)	jurnal balik uang muka belanja modal atas koreksi saldo awal gembok tahun 2020 yang barangnya baru diterima di 2021
SUBTOTAL				(2.394.380.000,00)	
TOTAL				5.902.162.803,00	



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
 Lampiran Catatan Atas Laporan Keuangan
 Per 31 Desember Tahun Anggaran 2021 (*Audited*)
 Dengan Angka Perbandingan 31 Desember Tahun Anggaran 2020
 (dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Rincian Koreksi Atas Reklasifikasi per 31 Desember 2021

URAIAN	NILAI	KETERANGAN
SEKRETARIAT JENDERAL	472.015.296,00	
Bahan untuk Pemeliharaan	737.000,00	Adanya perekaman transaksi reklasifikasi sebagai tindak lanjut perbaikan kodefikasi pencatatan barang menjadi lebih sesuai dengan kelompok barang yang seharusnya.
Barang Konsumsi	(737.000,00)	Adanya perekaman transaksi reklasifikasi sebagai tindak lanjut perbaikan kodefikasi pencatatan barang menjadi lebih sesuai dengan kelompok barang yang seharusnya.
Peralatan dan Mesin	171.452.995,00	Adanya perekaman transaksi reklasifikasi yang disebabkan antara lain: - Penyesuaian kodefikasi BMN - Pemecahan pencatatan BMN, umumnya terkait pencatatan perolehan/pengembangan bangunan yang didalamnya termasuk perolehan peralatan dan mesin. - Transaksi reklasifikasi antar kelompok atau pos BMN.
Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	165.638.809,00	Adanya perekaman transaksi reklasifikasi yang disebabkan antara lain: - Penyesuaian kodefikasi BMN - Pemecahan pencatatan BMN, umumnya terkait pencatatan perolehan/pengembangan bangunan yang didalamnya termasuk perolehan peralatan dan mesin. - Transaksi reklasifikasi antar kelompok atau pos BMN. - Transaksi reklasifikasi menimbulkan nilai penyusutan transaksional yang memperhitungkan posisi nilai penyusutan baik pada barang reklasifikasi masuk maupun reklasifikasi keluar. Hal tersebut sesuai dengan masa manfaat BMN yang ditentukan dalam Tabel Masa Manfaat.
Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	134.923.492,00	Adanya perekaman transaksi reklasifikasi yang disebabkan antara lain: - Penyesuaian kodefikasi BMN - Pemecahan pencatatan BMN, umumnya terkait pencatatan perolehan/pengembangan bangunan yang didalamnya termasuk perolehan peralatan dan mesin. - Transaksi reklasifikasi antar kelompok atau pos BMN. - Transaksi reklasifikasi menimbulkan nilai penyusutan transaksional yang memperhitungkan posisi nilai penyusutan baik pada barang reklasifikasi masuk maupun reklasifikasi keluar. Hal tersebut sesuai dengan masa manfaat BMN yang ditentukan dalam Tabel Masa Manfaat.
DITJEN AHU	(4.885.000,00)	
Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(100.000,00)	Adanya perekaman transaksi reklasifikasi yang disebabkan antara lain: - Penyesuaian kodefikasi BMN - Pemecahan pencatatan BMN, umumnya terkait pencatatan perolehan/pengembangan bangunan yang didalamnya termasuk perolehan peralatan dan mesin. - Transaksi reklasifikasi antar kelompok atau pos BMN.



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Lampiran Catatan Atas Laporan Keuangan
Per 31 Desember Tahun Anggaran 2021 (*Audited*)
Dengan Angka Perbandingan 31 Desember Tahun Anggaran 2020
(dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

URAIAN	NILAI	KETERANGAN
		- Transaksi reklasifikasi menimbulkan nilai penyusutan transaksional yang memperhitungkan posisi nilai penyusutan baik pada barang reklasifikasi masuk maupun reklasifikasi keluar. Hal tersebut sesuai dengan masa manfaat BMN yang ditentukan dalam Tabel Masa Manfaat.
Barang Konsumsi	(4.785.000,00)	Adanya perekaman transaksi reklasifikasi sebagai tindak lanjut perbaikan kodefikasi pencatatan barang menjadi lebih sesuai dengan kelompok barang yang seharusnya.
DITJEN PEMASYARAKATAN	(5.669.902.261,00)	
Amunisi	13.515.480,00	Adanya perekaman transaksi reklasifikasi sebagai tindak lanjut perbaikan kodefikasi pencatatan barang menjadi lebih sesuai dengan kelompok barang yang seharusnya.
Aset Tetap Lainnya	93.734.400,00	Adanya perekaman transaksi reklasifikasi yang disebabkan antara lain: - Penyesuaian kodefikasi BMN - Pemecahan pencatatan BMN, umumnya terkait pencatatan perolehan/pengembangan bangunan yang didalamnya termasuk perolehan peralatan dan mesin. - Transaksi reklasifikasi antar kelompok atau pos BMN.
Bahan untuk Pemeliharaan	(2.528.810,00)	Adanya perekaman transaksi reklasifikasi sebagai tindak lanjut perbaikan kodefikasi pencatatan barang menjadi lebih sesuai dengan kelompok barang yang seharusnya.
Barang Konsumsi	(176.436.670,00)	Adanya perekaman transaksi reklasifikasi sebagai tindak lanjut perbaikan kodefikasi pencatatan barang menjadi lebih sesuai dengan kelompok barang yang seharusnya.
Gedung dan Bangunan	(2.590.268.725,00)	Adanya perekaman transaksi reklasifikasi yang disebabkan antara lain: - Penyesuaian kodefikasi BMN - Pemecahan pencatatan BMN, umumnya terkait pencatatan perolehan/pengembangan bangunan yang didalamnya termasuk perolehan peralatan dan mesin. - Transaksi reklasifikasi antar kelompok atau pos BMN.
Hewan dan Tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	(875.500.000,00)	Adanya perekaman transaksi reklasifikasi sebagai tindak lanjut perbaikan kodefikasi pencatatan barang menjadi lebih sesuai dengan kelompok barang yang seharusnya.
Irigasi	3.305.584.236,00	Adanya perekaman transaksi reklasifikasi yang disebabkan antara lain: - Penyesuaian kodefikasi BMN - Pemecahan pencatatan BMN, umumnya terkait pencatatan perolehan/pengembangan bangunan yang didalamnya termasuk perolehan peralatan dan mesin. - Transaksi reklasifikasi antar kelompok atau pos BMN.
Peralatan dan Mesin	51.382.100,00	Adanya perekaman transaksi reklasifikasi yang disebabkan antara lain: - Penyesuaian kodefikasi BMN - Pemecahan pencatatan BMN, umumnya terkait pencatatan perolehan/pengembangan bangunan yang didalamnya termasuk perolehan peralatan dan mesin. - Transaksi reklasifikasi antar kelompok atau pos BMN.



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Lampiran Catatan Atas Laporan Keuangan
Per 31 Desember Tahun Anggaran 2021 (*Audited*)
Dengan Angka Perbandingan 31 Desember Tahun Anggaran 2020
(dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

URAIAN	NILAI	KETERANGAN
Persediaan Lainnya	954.450.000,00	Adanya perekaman transaksi reklasifikasi sebagai tindak lanjut perbaikan kodefikasi pencatatan barang menjadi lebih sesuai dengan kelompok barang yang seharusnya.
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	(18.663.000,00)	Adanya perekaman transaksi reklasifikasi yang disebabkan antara lain: - Penyesuaian kodefikasi BMN - Pemecahan pencatatan BMN, umumnya terkait pencatatan perolehan/pengembangan bangunan yang didalamnya termasuk perolehan peralatan dan mesin. - Transaksi reklasifikasi antar kelompok atau pos BMN. - Transaksi reklasifikasi menimbulkan nilai penyusutan transaksional yang memperhitungkan posisi nilai penyusutan baik pada barang reklasifikasi masuk maupun reklasifikasi keluar. Hal tersebut sesuai dengan masa manfaat BMN yang ditentukan dalam Tabel Masa Manfaat.
Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(7.325.509.281,00)	Adanya perekaman transaksi reklasifikasi yang disebabkan antara lain: - Penyesuaian kodefikasi BMN - Pemecahan pencatatan BMN, umumnya terkait pencatatan perolehan/pengembangan bangunan yang didalamnya termasuk perolehan peralatan dan mesin. - Transaksi reklasifikasi antar kelompok atau pos BMN. - Transaksi reklasifikasi menimbulkan nilai penyusutan transaksional yang memperhitungkan posisi nilai penyusutan baik pada barang reklasifikasi masuk maupun reklasifikasi keluar. Hal tersebut sesuai dengan masa manfaat BMN yang ditentukan dalam Tabel Masa Manfaat.
Akumulasi Penyusutan Irigasi	550.973.903,00	Adanya perekaman transaksi reklasifikasi yang disebabkan antara lain: - Penyesuaian kodefikasi BMN - Pemecahan pencatatan BMN, umumnya terkait pencatatan perolehan/pengembangan bangunan yang didalamnya termasuk perolehan peralatan dan mesin. - Transaksi reklasifikasi antar kelompok atau pos BMN. - Transaksi reklasifikasi menimbulkan nilai penyusutan transaksional yang memperhitungkan posisi nilai penyusutan baik pada barang reklasifikasi masuk maupun reklasifikasi keluar. Hal tersebut sesuai dengan masa manfaat BMN yang ditentukan dalam Tabel Masa Manfaat.
Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	349.364.106,00	Adanya perekaman transaksi reklasifikasi yang disebabkan antara lain: - Penyesuaian kodefikasi BMN - Pemecahan pencatatan BMN, umumnya terkait pencatatan perolehan/pengembangan bangunan yang didalamnya termasuk perolehan peralatan dan mesin. - Transaksi reklasifikasi antar kelompok atau pos BMN. - Transaksi reklasifikasi menimbulkan nilai penyusutan transaksional yang memperhitungkan posisi nilai penyusutan baik pada barang reklasifikasi masuk maupun reklasifikasi keluar. Hal tersebut sesuai dengan masa manfaat BMN yang ditentukan dalam Tabel Masa Manfaat.



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Lampiran Catatan Atas Laporan Keuangan
Per 31 Desember Tahun Anggaran 2021 (*Audited*)
Dengan Angka Perbandingan 31 Desember Tahun Anggaran 2020
(dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

URAIAN	NILAI	KETERANGAN
DITJEN IMIGRASI	32.635.725.936,00	
Peralatan dan Mesin	310.317.526,00	Adanya perekaman transaksi reklasifikasi yang disebabkan antara lain: - Penyesuaian kodefikasi BMN - Pemecahan pencatatan BMN, umumnya terkait pencatatan perolehan/pengembangan bangunan yang didalamnya termasuk perolehan peralatan dan mesin. - Transaksi reklasifikasi antar kelompok atau pos BMN.
Irigasi	(46.025.000,00)	Adanya perekaman transaksi reklasifikasi yang disebabkan antara lain: - Penyesuaian kodefikasi BMN - Pemecahan pencatatan BMN, umumnya terkait pencatatan perolehan/pengembangan bangunan yang didalamnya termasuk perolehan peralatan dan mesin. - Transaksi reklasifikasi antar kelompok atau pos BMN.
Barang Konsumsi	101.690.482.950,00	Adanya perekaman transaksi reklasifikasi sebagai tindak lanjut perbaikan kodefikasi pencatatan barang menjadi lebih sesuai dengan kelompok barang yang seharusnya.
Bahan untuk Pemeliharaan	(204.850,00)	Adanya perekaman transaksi reklasifikasi sebagai tindak lanjut perbaikan kodefikasi pencatatan barang menjadi lebih sesuai dengan kelompok barang yang seharusnya.
Bahan Baku	(71.193.776.000,00)	Adanya perekaman transaksi reklasifikasi sebagai tindak lanjut perbaikan kodefikasi pencatatan barang menjadi lebih sesuai dengan kelompok barang yang seharusnya.
Aset Tetap Lainnya	(9.570.000,00)	Adanya perekaman transaksi reklasifikasi yang disebabkan antara lain: - Penyesuaian kodefikasi BMN - Pemecahan pencatatan BMN, umumnya terkait pencatatan perolehan/pengembangan bangunan yang didalamnya termasuk perolehan peralatan dan mesin. - Transaksi reklasifikasi antar kelompok atau pos BMN.
Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	2.324.373.164,00	Adanya perekaman transaksi reklasifikasi yang disebabkan antara lain: - Penyesuaian kodefikasi BMN - Pemecahan pencatatan BMN, umumnya terkait pencatatan perolehan/pengembangan bangunan yang didalamnya termasuk perolehan peralatan dan mesin. - Transaksi reklasifikasi antar kelompok atau pos BMN. - Transaksi reklasifikasi menimbulkan nilai penyusutan transaksional yang memperhitungkan posisi nilai penyusutan baik pada barang reklasifikasi masuk maupun reklasifikasi keluar. Hal tersebut sesuai dengan masa manfaat BMN yang ditentukan dalam Tabel Masa Manfaat.
Akumulasi Penyusutan Irigasi	5.966.205,00	Adanya perekaman transaksi reklasifikasi yang disebabkan antara lain: - Penyesuaian kodefikasi BMN - Pemecahan pencatatan BMN, umumnya terkait pencatatan perolehan/pengembangan bangunan yang didalamnya termasuk perolehan peralatan dan mesin.



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
 Lampiran Catatan Atas Laporan Keuangan
 Per 31 Desember Tahun Anggaran 2021 (*Audited*)
 Dengan Angka Perbandingan 31 Desember Tahun Anggaran 2020
 (dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

URAIAN	NILAI	KETERANGAN
		- Transaksi reklasifikasi antar kelompok atau pos BMN. - Transaksi reklasifikasi menimbulkan nilai penyusutan transaksional yang memperhitungkan posisi nilai penyusutan baik pada barang reklasifikasi masuk maupun reklasifikasi keluar. Hal tersebut sesuai dengan masa manfaat BMN yang ditentukan dalam Tabel Masa Manfaat.
Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(445.838.059,00)	Adanya perekaman transaksi reklasifikasi yang disebabkan antara lain: - Penyesuaian kodefikasi BMN - Pemecahan pencatatan BMN, umumnya terkait pencatatan perolehan/pengembangan bangunan yang didalamnya termasuk perolehan peralatan dan mesin. - Transaksi reklasifikasi antar kelompok atau pos BMN. - Transaksi reklasifikasi menimbulkan nilai penyusutan transaksional yang memperhitungkan posisi nilai penyusutan baik pada barang reklasifikasi masuk maupun reklasifikasi keluar. Hal tersebut sesuai dengan masa manfaat BMN yang ditentukan dalam Tabel Masa Manfaat.
DITJEN PERUNDANG-UNDANGAN	(84.502.636,00)	
Peralatan dan Mesin	95.000.000,00	Adanya perekaman transaksi reklasifikasi yang disebabkan antara lain: - Penyesuaian kodefikasi BMN - Pemecahan pencatatan BMN, umumnya terkait pencatatan perolehan/pengembangan bangunan yang didalamnya termasuk perolehan peralatan dan mesin. - Transaksi reklasifikasi antar kelompok atau pos BMN.
Jaringan	(95.000.000,00)	Adanya perekaman transaksi reklasifikasi yang disebabkan antara lain: - Penyesuaian kodefikasi BMN - Pemecahan pencatatan BMN, umumnya terkait pencatatan perolehan/pengembangan bangunan yang didalamnya termasuk perolehan peralatan dan mesin. - Transaksi reklasifikasi antar kelompok atau pos BMN.
Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(118.940.136,00)	Adanya perekaman transaksi reklasifikasi yang disebabkan antara lain: - Penyesuaian kodefikasi BMN - Pemecahan pencatatan BMN, umumnya terkait pencatatan perolehan/pengembangan bangunan yang didalamnya termasuk perolehan peralatan dan mesin. - Transaksi reklasifikasi antar kelompok atau pos BMN. - Transaksi reklasifikasi menimbulkan nilai penyusutan transaksional yang memperhitungkan posisi nilai penyusutan baik pada barang reklasifikasi masuk maupun reklasifikasi keluar. Hal tersebut sesuai dengan masa manfaat BMN yang ditentukan dalam Tabel Masa Manfaat.
Akumulasi Penyusutan Jaringan	34.437.500,00	Adanya perekaman transaksi reklasifikasi yang disebabkan antara lain: - Penyesuaian kodefikasi BMN



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Lampiran Catatan Atas Laporan Keuangan
Per 31 Desember Tahun Anggaran 2021 (*Audited*)
Dengan Angka Perbandingan 31 Desember Tahun Anggaran 2020
(dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

URAIAN	NILAI	KETERANGAN
		- Pemecahan pencatatan BMN, umumnya terkait pencatatan perolehan/pengembangan bangunan yang didalamnya termasuk perolehan peralatan dan mesin. - Transaksi reklasifikasi antar kelompok atau pos BMN. - Transaksi reklasifikasi menimbulkan nilai penyusutan transaksional yang memperhitungkan posisi nilai penyusutan baik pada barang reklasifikasi masuk maupun reklasifikasi keluar. Hal tersebut sesuai dengan masa manfaat BMN yang ditentukan dalam Tabel Masa Manfaat.
DITJEN HAK ASASI MANUSIA	0,00	
Bahan untuk Pemeliharaan	402.500,00	Adanya perekaman transaksi reklasifikasi sebagai tindak lanjut perbaikan kodefikasi pencatatan barang menjadi lebih sesuai dengan kelompok barang yang seharusnya.
Suku Cadang	(402.500,00)	Adanya perekaman transaksi reklasifikasi sebagai tindak lanjut perbaikan kodefikasi pencatatan barang menjadi lebih sesuai dengan kelompok barang yang seharusnya.
BALITBANG HUKUM DAN HAM	(539.400,00)	
Peralatan dan Mesin	5.100.000,00	Adanya perekaman transaksi reklasifikasi yang disebabkan antara lain: - Penyesuaian kodefikasi BMN - Pemecahan pencatatan BMN, umumnya terkait pencatatan perolehan/pengembangan bangunan yang didalamnya termasuk perolehan peralatan dan mesin. - Transaksi reklasifikasi antar kelompok atau pos BMN.
Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(5.639.400,00)	Adanya perekaman transaksi reklasifikasi yang disebabkan antara lain: - Penyesuaian kodefikasi BMN - Pemecahan pencatatan BMN, umumnya terkait pencatatan perolehan/pengembangan bangunan yang didalamnya termasuk perolehan peralatan dan mesin. - Transaksi reklasifikasi antar kelompok atau pos BMN. - Transaksi reklasifikasi menimbulkan nilai penyusutan transaksional yang memperhitungkan posisi nilai penyusutan baik pada barang reklasifikasi masuk maupun reklasifikasi keluar. Hal tersebut sesuai dengan masa manfaat BMN yang ditentukan dalam Tabel Masa Manfaat.
BPSDM	(5.512.500,00)	
Software	49.000.000,00	Adanya perekaman transaksi reklasifikasi yang disebabkan antara lain: - Penyesuaian kodefikasi BMN - Pemecahan pencatatan BMN, umumnya terkait pencatatan perolehan/pengembangan bangunan yang didalamnya termasuk perolehan peralatan dan mesin. - Transaksi reklasifikasi antar kelompok atau pos BMN.
Jaringan	(49.000.000,00)	Adanya perekaman transaksi reklasifikasi yang disebabkan antara lain: - Penyesuaian kodefikasi BMN



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
 Lampiran Catatan Atas Laporan Keuangan
 Per 31 Desember Tahun Anggaran 2021 (*Audited*)
 Dengan Angka Perbandingan 31 Desember Tahun Anggaran 2020
 (dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

URAIAN	NILAI	KETERANGAN
		- Pemecahan pencatatan BMN, umumnya terkait pencatatan perolehan/pengembangan bangunan yang didalamnya termasuk perolehan peralatan dan mesin. - Transaksi reklasifikasi antar kelompok atau pos BMN.
Akumulasi Amortisasi Software	(6.125.000,00)	Adanya perekaman transaksi reklasifikasi yang disebabkan antara lain: - Penyesuaian kodefikasi BMN - Pemecahan pencatatan BMN, umumnya terkait pencatatan perolehan/pengembangan bangunan yang didalamnya termasuk perolehan peralatan dan mesin. - Transaksi reklasifikasi antar kelompok atau pos BMN. - Transaksi reklasifikasi menimbulkan nilai penyusutan transaksional yang memperhitungkan posisi nilai penyusutan baik pada barang reklasifikasi masuk maupun reklasifikasi keluar. Hal tersebut sesuai dengan masa manfaat BMN yang ditentukan dalam Tabel Masa Manfaat.
Akumulasi Penyusutan Jaringan	612.500,00	Adanya perekaman transaksi reklasifikasi yang disebabkan antara lain: - Penyesuaian kodefikasi BMN - Pemecahan pencatatan BMN, umumnya terkait pencatatan perolehan/pengembangan bangunan yang didalamnya termasuk perolehan peralatan dan mesin. - Transaksi reklasifikasi antar kelompok atau pos BMN. - Transaksi reklasifikasi menimbulkan nilai penyusutan transaksional yang memperhitungkan posisi nilai penyusutan baik pada barang reklasifikasi masuk maupun reklasifikasi keluar. Hal tersebut sesuai dengan masa manfaat BMN yang ditentukan dalam Tabel Masa Manfaat.
GRAND TOTAL	27.342.399.435,00	



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Lampiran Catatan Atas Laporan Keuangan
Per 31 Desember Tahun Anggaran 2021 (*Audited*)
Dengan Angka Perbandingan 31 Desember Tahun Anggaran 2020
(dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi per 31 Desember 2021

Akun	Transaksi	Total	KETERANGAN
Belanja Modal Dibayar Dimuka (prepaid)	Jurnal Manual	(841.240.400,00)	Jurnal balik atas pengakuan belanja modal dibayar di muka atas pengadaan laptop dan tablet PC di tahun 2020
Piutang Lainnya	Jurnal Manual	596.476.406,00	Piutang lainnya yang terdapat pada Kanwil Kemenkumham Bandung senilai Rp188.114.789,- atas Pengembalian belanja modal gedung dan bangunan temuan BPK (kelebihan pembayaran belanja modal berupa pekerjaan rehabilitasi gedung kantor dan renovasi instalasi listrik dan jaringan serta Ditjen Kekayaan Intelektual Senilai Rp408.361.617,- atas Piutang pihak ketiga atas kelebihan pembayaran pengadaan modal peralatan dan mesin yang merupakan Temuan BPK RI
Tanah	Koreksi Pencatatan	(10.064.343.000,00)	Secara umum merupakan transaksi yang dilakukan untuk mengeliminir suatu aset dari pencatatan di SIMAK
	Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas	(2.871.433.902,00)	Secara umum merupakan transaksi yang dilakukan untuk menambah atau mengurangi nilai Aset Tetap eksisting di SIMAK
	Perolehan hasil Tindak Lanjut Normalisasi	5.174.909.770.000,00	merupakan tindak lanjut Kertas Kerja Konfirmasi (K3) dimana terhadap BMN berupa Tanah teridentifikasi sebagai BMN Tidak Wajar dengan kategori Tanggal Perolehan Tidak Wajar (Di Bawah 1945), namun secara fisik diketahui bahwa Tanah tersebut masih digunakan sehingga dilakukan penginputan kembali
	Saldo Awal	7.715.635.839,00	Secara umum merupakan transaksi untuk menginput Aset Tetap yang pada tahun sebelumnya belum terinput di SIMAK
	Transaksi Normalisasi BMN	(5.175.464.557.000,00)	tindak lanjut Kertas Kerja Konfirmasi (K3) dimana terhadap BMN berupa Tanah teridentifikasi sebagai BMN Tidak Wajar dengan kategori Tanggal Perolehan Tidak Wajar (Di Bawah 1945), sehingga terhadap BMN tersebut dilakukan Normalisasi
Peralatan dan Mesin	Koreksi Pencatatan	(7.087.288.885,00)	Secara umum merupakan transaksi yang dilakukan untuk mengeliminir suatu aset dari pencatatan di SIMAK
	Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas	(18.653.715.928,00)	Secara umum merupakan transaksi yang dilakukan untuk menambah atau mengurangi nilai Aset Tetap eksisting di SIMAK
	Penghapusan (semester I dokumen TAYL)	(59.000.000,00)	Secara umum merupakan penginputan transaksi Penghapusan pada Semester I namun menggunakan dokumen penghapusan tahun sebelumnya
	Penghapusan (semester II dokumen TAYL)	(15.051.000,00)	Secara umum merupakan penginputan transaksi Penghapusan pada Semester I namun menggunakan dokumen penghapusan tahun sebelumnya
	Penghapusan semu karena reklasifikasi dari intra ke ekstra/ sebaliknya	(10.755.000,00)	Secara umum merupakan transaksi yang digunakan untuk memindahkan nilai Aset Tetap agar berpindah dari intrakomptabel ke ekstrakomptabel atau sebaliknya



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Lampiran Catatan Atas Laporan Keuangan
Per 31 Desember Tahun Anggaran 2021 (*Audited*)
Dengan Angka Perbandingan 31 Desember Tahun Anggaran 2020
(dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Akun	Transaksi	Total	KETERANGAN
	Perolehan hasil Tindak Lanjut Normalisasi	37.180.507.933,00	merupakan tindak lanjut Kertas Kerja Konfirmasi (K3) dimana terhadap BMN berupa Peralatan dan Mesin teridentifikasi sebagai BMN Tidak Wajar, namun secara fisik diketahui bahwa BMN tersebut masih ada sehingga dilakukan penginputan kembali
	Perolehan Reklasifikasi Dari Intra ke Ekstra/ Sebaliknya	132.800.000,00	Secara umum merupakan transaksi yang digunakan untuk memindahkan nilai Aset Tetap agar berpindah dari intrakomptabel ke ekstrakomptabel atau sebaliknya
	Saldo Awal	34.073.910.178,00	Secara umum merupakan transaksi untuk menginput Aset Tetap yang pada tahun sebelumnya belum terinput di SIMAK
	Transaksi Normalisasi BMN	(34.294.415.121,00)	merupakan tindak lanjut Kertas Kerja Konfirmasi (K3) dimana terhadap BMN berupa Peralatan dan Mesin teridentifikasi sebagai BMN Tidak Wajar, sehingga terhadap BMN tersebut dilakukan Normalisasi
Peralatan dan Mesin Belum Diregister	Jurnal Manual	5.800.917.364,00	Merupakan jurnal manual koreksi aset tetap non revaluasi atas aset peralatan dan mesin yang lebih catat/terdapat pengembalian belanja modal tahun anggaran berjalan
Gedung dan Bangunan	Koreksi Barang Berlebih Akibat Koreksi Penilaian Kembali	(1.556.180.000,00)	merupakan salah satu transaksi revaluasi dimana nilai Barang Berlebih berupa Bangunan hasil revaluasi yang terbaru lebih rendah dibandingkan revaluasi awal. Transaksi tersebut seharusnya diinput ketika pelaksanaan revaluasi tahun 2020, namun karena terdapat sejumlah kendala dalam Aplikasi SIMAK penginputannya baru dapat dilakukan setelah rilis update SIMAK 21.1 . Transaksi tersebut terdapat pada Lapas Gunung Sugih
	Koreksi barang Berlebih hasil Inventarisasi	197.213.000,00	merupakan Koreksi revaluasi berupa penambahan nilai dari perekaman barang berlebih, BMN berupa bangunan yang belum pernah tercatat berdasarkan LHIP Tahun 2017/2018. Transaksi tersebut terdapat pada Lapas Narkotika Bandar Lampung
	Koreksi Normalisasi Akibat Koreksi Penilaian Kembali	52.466.000,00	merupakan pengurangan nilai bangunan hasil dari eliminir nilai koreksi revaluasi (menjadi nilai wajar) dalam LHIP 2017/2018. Dan pada LHIP tahun 2020 diketahui bahwa dilakukan normalisasi pada bangunan tersebut, terdapat pada Lapas Saumlaki
	Koreksi Pencatatan	(34.374.784.309,00)	Secara umum merupakan transaksi yang dilakukan untuk mengeliminir suatu aset dari pencatatan di SIMAK
	Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas	(3.247.819.775,00)	Secara umum merupakan transaksi yang dilakukan untuk menambah atau mengurangi nilai Aset Tetap eksisting di SIMAK
	Penghapusan (semester II dokumen TAYL)	(3.649.038.769,00)	merupakan penyusutan transaksional atau penyusutan terhadap transaksi yang diinput di SIMAK
	Penghapusan semu karena reklasifikasi dari intra ke ekstra/ sebaliknya	(5.335.000,00)	Secara umum merupakan transaksi yang digunakan untuk memindahkan nilai Aset Tetap agar berpindah dari intrakomptabel ke ekstrakomptabel atau sebaliknya



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Lampiran Catatan Atas Laporan Keuangan
Per 31 Desember Tahun Anggaran 2021 (*Audited*)
Dengan Angka Perbandingan 31 Desember Tahun Anggaran 2020
(dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Akun	Transaksi	Total	KETERANGAN
	Perolehan hasil Tindak Lanjut Normalisasi	576.275.048.322,00	merupakan tindak lanjut Kertas Kerja Konfirmasi (K3) dimana terhadap BMN berupa Bangunan teridentifikasi sebagai BMN Tidak Wajar dengan kategori Tanggal Perolehan Tidak Wajar (Di Bawah 1945), namun secara fisik diketahui bahwa Bangunan tersebut masih digunakan sehingga dilakukan penginputan kembali
	Perolehan Reklasifikasi Dari Intra ke Ekstra/ Sebaliknya	25.400.000,00	Secara umum merupakan transaksi yang digunakan untuk memindahkan nilai Aset Tetap agar berpindah dari intrakomptabel ke ekstrakomptabel atau sebaliknya
	Saldo Awal	26.202.030.899,00	Secara umum merupakan transaksi untuk menginput Aset Tetap yang pada tahun sebelumnya belum terinput di SIMAK
	Transaksi Normalisasi BMN	(592.277.633.876,00)	merupakan tindak lanjut Kertas Kerja Konfirmasi (K3) dimana terhadap BMN berupa Bangunan teridentifikasi sebagai BMN Tidak Wajar dengan kategori Tanggal Perolehan Tidak Wajar (Di Bawah 1945) , sehingga terhadap BMN tersebut dilakukan Normalisasi.
Gedung dan Bangunan Belum Diregister	Jurnal Manual	32.080.889.519,00	Merupakan jurnal manual koreksi aset tetap non revaluasi atas aset gedung dan bangunan yang lebih catat/terdapat pengembalian belanja modal tahun anggaran berjalan
Jalan dan Jembatan	Koreksi Pencatatan	(8.093.320.047,00)	Secara umum merupakan transaksi yang dilakukan untuk mengeliminir suatu aset dari pencatatan di SIMAK
Irigasi	Koreksi Pencatatan	(26.454.797.249,00)	Secara umum merupakan transaksi yang dilakukan untuk mengeliminir suatu aset dari pencatatan di SIMAK
	Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas	1.250.213.598,00	Secara umum merupakan transaksi yang dilakukan untuk menambah atau mengurangi nilai Aset Tetap eksisting di SIMAK
	Perolehan hasil Tindak Lanjut Normalisasi	394.078.000,00	merupakan tindak lanjut Kertas Kerja Konfirmasi (K3)
	Transaksi Normalisasi BMN	(394.078.000,00)	merupakan tindak lanjut Kertas Kerja Konfirmasi (K3)
Jaringan	Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas	(2.080.249,00)	Secara umum merupakan transaksi yang dilakukan untuk menambah atau mengurangi nilai Aset Tetap eksisting di SIMAK
	Koreksi Pencatatan	(1.793.584.800,00)	Secara umum merupakan transaksi yang dilakukan untuk mengeliminir suatu aset dari pencatatan di SIMAK
Aset Tetap Renovasi	Koreksi Pencatatan	(5.348.271.300,00)	Secara umum merupakan transaksi yang dilakukan untuk mengeliminir suatu aset dari pencatatan di SIMAK
	Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas	(6.450.269,00)	Secara umum merupakan transaksi yang dilakukan untuk menambah atau mengurangi nilai Aset Tetap eksisting di SIMAK
	Perolehan hasil Tindak Lanjut Normalisasi	160.616.000,00	merupakan tindak lanjut Kertas Kerja Konfirmasi (K3)
	Transaksi Normalisasi BMN	(160.616.000,00)	merupakan tindak lanjut Kertas Kerja Konfirmasi (K3)
Aset Tetap Lainnya	Koreksi Pencatatan	(39.660.000,00)	Secara umum merupakan transaksi yang dilakukan untuk mengeliminir suatu aset dari pencatatan di SIMAK



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Lampiran Catatan Atas Laporan Keuangan
Per 31 Desember Tahun Anggaran 2021 (*Audited*)
Dengan Angka Perbandingan 31 Desember Tahun Anggaran 2020
(dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Akun	Transaksi	Total	KETERANGAN
	Perolehan hasil Tindak Lanjut Normalisasi	821.858.376,00	merupakan tindak lanjut Kertas Kerja Konfirmasi (K3)
	Transaksi Normalisasi BMN	(787.415.145,00)	merupakan tindak lanjut Kertas Kerja Konfirmasi (K3)
Konstruksi Dalam pengerjaan	-	22.470.152.788,00	Normalisasi Otomatis yg digunakan untuk memperbaiki Kartu KDP yg bernilai minus
	Koreksi Nilai KDP	(44.074.829.202,00)	Secara umum merupakan koreksi karena pekerjaan belum selesai 100% sampai dengan 31 Desember 2021
	Penghapusan/Penghentian KDP (semester II dokumen TAYL)	(7.184.332.903,00)	merupakan tindak lanjut terhadap validasi BMN 2021 berupa KDP
	Saldo Awal KDP	2.233.072.815,00	Perbaikan pencatatan, dimana semula pencatatan KDP yang substansinya sama namun dibukukan kedalam beberapa NUP KDP. Untuk itu dilakukan penyesuaian pencatatannya dgn menggabungkan NUP KDP tersebut melalui transaksi saldo awal, karena KDP tersebut perolehan TAYL.
Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	Hibah (Masuk)	(32.960.896.074,00)	merupakan penyusutan transaksional atau penyusutan terhadap transaksi yang diinput di SIMAK
	Koreksi Pencatatan	7.062.327.406,00	merupakan penyusutan transaksional atau penyusutan terhadap transaksi yang diinput di SIMAK
	Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas	11.360.231.311,00	merupakan penyusutan transaksional atau penyusutan terhadap transaksi yang diinput di SIMAK
	Koreksi Penyusutan Karena 225	229.622.063,00	-
	Penghapusan (semester I dokumen TAYL)	59.000.000,00	merupakan penyusutan transaksional atau penyusutan terhadap transaksi yang diinput di SIMAK
	Penghapusan (semester II dokumen TAYL)	15.051.000,00	merupakan penyusutan transaksional atau penyusutan terhadap transaksi yang diinput di SIMAK
	Penghapusan semu karena reklasifikasi dari intra ke ekstra/ sebaliknya	2.313.000,00	merupakan penyusutan transaksional atau penyusutan terhadap transaksi yang diinput di SIMAK
	Perolehan hasil Tindak Lanjut Normalisasi	(26.950.085.005,00)	merupakan penyusutan transaksional atau penyusutan terhadap transaksi yang diinput di SIMAK
	Perolehan Reklasifikasi Dari Intra ke Ekstra/ Sebaliknya	(133.450.000,00)	merupakan penyusutan transaksional atau penyusutan terhadap transaksi yang diinput di SIMAK
	Saldo Awal	(24.083.864.921,00)	merupakan penyusutan transaksional atau penyusutan terhadap transaksi yang diinput di SIMAK
	Transaksi Normalisasi BMN	22.165.930.677,00	merupakan penyusutan transaksional atau penyusutan terhadap transaksi yang diinput di SIMAK
Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	Hibah (Masuk)	(780.999.430,00)	merupakan penyusutan transaksional atau penyusutan terhadap transaksi yang diinput di SIMAK
	Koreksi Normalisasi Akibat	(18.363.100,00)	merupakan penyusutan transaksional atau penyusutan terhadap transaksi yang diinput di SIMAK



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Lampiran Catatan Atas Laporan Keuangan
Per 31 Desember Tahun Anggaran 2021 (*Audited*)
Dengan Angka Perbandingan 31 Desember Tahun Anggaran 2020
(dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Akun	Transaksi	Total	KETERANGAN
	Koreksi Penilaian Kembali		
	Koreksi Pencatatan	7.960.326.533,00	merupakan penyusutan transaksional atau penyusutan terhadap transaksi yang diinput di SIMAK
	Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas	(2.927.242.309,00)	merupakan penyusutan transaksional atau penyusutan terhadap transaksi yang diinput di SIMAK
	Koreksi Penyusutan Karena 225	(7.637.069.883,00)	merupakan penyusutan transaksional atau penyusutan terhadap transaksi yang diinput di SIMAK
	Pengembangan Nilai Aset	(6.340.598,00)	merupakan penyusutan transaksional atau penyusutan terhadap transaksi yang diinput di SIMAK
	Penghapusan (semester II dokumen TAYL)	773.544.650,00	merupakan penyusutan transaksional atau penyusutan terhadap transaksi yang diinput di SIMAK
	Penghapusan semu karena reklasifikasi dari intra ke ekstra/ sebaliknya	533.500,00	merupakan penyusutan transaksional atau penyusutan terhadap transaksi yang diinput di SIMAK
	Perolehan hasil Tindak Lanjut Normalisasi	(369.436.453.726,00)	merupakan penyusutan transaksional atau penyusutan terhadap transaksi yang diinput di SIMAK
	Saldo Awal	(642.113.305,00)	merupakan penyusutan transaksional atau penyusutan terhadap transaksi yang diinput di SIMAK
	Transaksi Normalisasi BMN	104.904.667.480,00	merupakan penyusutan transaksional atau penyusutan terhadap transaksi yang diinput di SIMAK
Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	Koreksi Pencatatan	4.779.925.060,00	merupakan penyusutan transaksional atau penyusutan terhadap transaksi yang diinput di SIMAK
	Koreksi Penyusutan Karena 225	240.113.795,00	merupakan penyusutan transaksional atau penyusutan terhadap transaksi yang diinput di SIMAK
Akumulasi Penyusutan Irigasi	Koreksi Pencatatan	5.928.824.951,00	merupakan penyusutan transaksional atau penyusutan terhadap transaksi yang diinput di SIMAK
	Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas	(12.504.853,00)	merupakan penyusutan transaksional atau penyusutan terhadap transaksi yang diinput di SIMAK
	Perolehan hasil Tindak Lanjut Normalisasi	(394.078.000,00)	merupakan penyusutan transaksional atau penyusutan terhadap transaksi yang diinput di SIMAK
	Transaksi Normalisasi BMN	256.043.531,00	merupakan penyusutan transaksional atau penyusutan terhadap transaksi yang diinput di SIMAK
Akumulasi Penyusutan Jaringan	Koreksi Pencatatan	172.886.934,00	merupakan penyusutan transaksional atau penyusutan terhadap transaksi yang diinput di SIMAK
	Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas	147.943,00	merupakan penyusutan transaksional atau penyusutan terhadap transaksi yang diinput di SIMAK
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	Perolehan hasil Tindak Lanjut Normalisasi	(7.800.000,00)	merupakan tindak lanjut Kertas Kerja Konfirmasi (K3)
	Transaksi Normalisasi BMN	975.000,00	merupakan tindak lanjut Kertas Kerja Konfirmasi (K3)



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Lampiran Catatan Atas Laporan Keuangan
Per 31 Desember Tahun Anggaran 2021 (*Audited*)
Dengan Angka Perbandingan 31 Desember Tahun Anggaran 2020
(dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Akun	Transaksi	Total	KETERANGAN
	Koreksi Pencatatan	60.000,00	Secara umum merupakan transaksi yang dilakukan untuk mengeliminir suatu aset dari pencatatan di SIMAK
Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan	Koreksi Pencatatan (BMN yang dihentikan)	(8.477.939.583,00)	Secara umum merupakan transaksi yang dilakukan untuk mengeliminir suatu aset yang sudah dihentikan penggunaannya dari pencatatan di SIMAK
	Penghapusan BMN yang Dihentikan (semester I dokumen TAYL)	(994.609.788,00)	Secara umum merupakan penginputan transaksi Penghapusan pada Semester I terhadap aset yang sudah dihentikan penggunaannya namun menggunakan dokumen penghapusan tahun sebelumnya
	Penghapusan BMN yang Dihentikan (semester II dokumen TAYL)	(562.327.527,00)	merupakan penyusutan transaksional atau penyusutan terhadap transaksi yang diinput di SIMAK
	Reklasifikasi Keluar (BMN yang dihentikan)	(365.234.726,00)	Secara umum merupakan perubahan kodefikasi terhadap aset yang sudah dihentikan dari penggunaannya
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan	Koreksi Pencatatan (BMN yang dihentikan)	2.870.765.570,00	merupakan penyusutan transaksional atau penyusutan terhadap transaksi yang diinput di SIMAK
	Penghapusan BMN yang Dihentikan (semester I dokumen TAYL)	980.197.406,00	merupakan penyusutan transaksional atau penyusutan terhadap transaksi yang diinput di SIMAK
	Penghapusan BMN yang Dihentikan (semester II dokumen TAYL)	562.327.527,00	merupakan penyusutan transaksional atau penyusutan terhadap transaksi yang diinput di SIMAK
	Reklasifikasi Keluar (BMN yang dihentikan)	337.080.388,00	merupakan penyusutan transaksional atau penyusutan terhadap transaksi yang diinput di SIMAK
	GRAND TOTAL	(361.967.447.195,00)	



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
 Lampiran Catatan Atas Laporan Keuangan
 Per 31 Desember Tahun Anggaran 2021 (*Audited*)
 Dengan Angka Perbandingan 31 Desember Tahun Anggaran 2020
 (dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Koreksi Nilai Aset Lainnya Non Revaluasi per 31 Desember 2021

AKUN	TRANSAKSI	TOTAL	KETERANGAN
Software	Koreksi Pencatatan	(11.450.150.503,00)	Secara umum merupakan transaksi yang dilakukan untuk mengeliminir suatu aset dari pencatatan di SIMAK
Software	Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas	2.091.662.500,00	Secara umum merupakan transaksi yang dilakukan untuk menambah atau mengurangi nilai Aset Tetap eksisting di SIMAK
Software	Perolehan hasil Tindak Lanjut Normalisasi	13.812.097.491,00	Secara umum merupakan untuk menginput kembali BMN anomali karena secara fisik BMN tersebut masih ada
Software	Saldo Awal	10.113.364.250,00	Secara umum merupakan transaksi untuk menginput Aset Tetap yang pada tahun sebelumnya belum terinput di SIMAK
Software	Transaksi Normalisasi BMN	(13.807.186.798,00)	Secara umum merupakan transaksi untuk menormalkan suatu Aset Tetap yang teridentifikasi anomali atau tidak normal
Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan	Transaksi Normalisasi BMN (BMN Yang Dihentikan)	(4.967.727.281,00)	Secara umum merupakan transaksi untuk menormalkan suatu BMN Yang Dihentikan yang teridentifikasi anomali atau tidak normal
Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintahan	Transaksi Normalisasi BMN (BMN Yang Dihentikan)	(4.910.693,00)	berupa tindak lanjut K3 pada Perwakilan Imigrasi di Berlin
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan	Transaksi Normalisasi BMN (BMN Yang Dihentikan)	3.269.391.204,00	Secara umum merupakan transaksi untuk menormalkan suatu BMN Yang Dihentikan yang teridentifikasi anomali atau tidak normal
Akumulasi Amortisasi Software	Koreksi Pencatatan	11.194.719.637,00	Secara umum merupakan transaksi yang dilakukan untuk mengeliminir suatu aset dari pencatatan di SIMAK
Akumulasi Amortisasi Software	Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas	(2.149.690.000,00)	Secara umum merupakan transaksi yang dilakukan untuk menambah atau mengurangi nilai Aset Tetap eksisting di SIMAK
Akumulasi Amortisasi Software	Perolehan hasil Tindak Lanjut Normalisasi	(13.807.097.491,00)	Secara umum merupakan untuk menginput kembali BMN anomali karena secara fisik BMN tersebut masih ada
Akumulasi Amortisasi Software	Saldo Awal	(3.792.511.594,00)	Secara umum merupakan transaksi untuk menginput Aset Tetap yang pada tahun sebelumnya belum terinput di SIMAK
Akumulasi Amortisasi Software	Transaksi Normalisasi BMN	2.670.752.830,00	Secara umum merupakan transaksi untuk menormalkan suatu Aset Tetap yang teridentifikasi anomali atau tidak normal



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Lampiran Catatan Atas Laporan Keuangan
Per 31 Desember Tahun Anggaran 2021 (*Audited*)
Dengan Angka Perbandingan 31 Desember Tahun Anggaran 2020
(dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

AKUN	TRANSAKSI	TOTAL	KETERANGAN
Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintahan	Transaksi Normalisasi BMN (BMN Yang Dihentikan)	4.910.693,00	berupa tindak lanjut K3 pada Perwakilan Imigrasi di Berlin
GRAND TOTAL		(6.822.375.755,00)	



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Lampiran Catatan Atas Laporan Keuangan
Per 31 Desember Tahun Anggaran 2021 (*Audited*)
Dengan Angka Perbandingan 31 Desember Tahun Anggaran 2020
(dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Rincian Koreksi Lain-Lain per 31 Desember 2021

URAIAN SATKER	NILAI KOREKSI	KETERANGAN
SEKRETARIAT JENDERAL		
SEKRETARIAT JENDERAL (PUSAT)	71.500,00	Jurnal Koreksi atas Beban Penyisihan disisi Kredit
SEKRETARIAT JENDERAL (PUSAT)	359.754.855,00	Jurnal Koreksi Hutang Biaya Mutasi atas Reviu BPKP : - Reviu 1 : Koreksi Tambah Rp3.749.548, Koreksi Kurang Rp334.214.403 - Reviu 2 : Koreksi Tambah Rp30.671.000, Koreksi Kurang Rp59.961.000
SEKRETARIAT JENDERAL (PUSAT)	(6.350.815.000,00)	Jurnal Koreksi Kurang Catat atas Hutang Biaya Mutasi Tahun 2019 dan 2020
SEKRETARIAT JENDERAL (PUSAT)	4.823.440,00	Jurnal Koreksi atas Lebih Catat Penyisihan Piutang PNBPT PT Paramitha per 31 Des 2020
SEKRETARIAT JENDERAL (PUSAT)	(12.000,00)	Koreksi Lainnya atas Kurang Catat Piutang TP/TGR 31 Des 2020 a.n Maruli
SEKRETARIAT JENDERAL (PUSAT)	8.500,00	Jurnal koreksi atas lebih catat Transfer Masuk Penyisihan Piutang TGR a.n Nurjaman
SEKRETARIAT JENDERAL (PUSAT)	(13.290.126,00)	Jurnal koreksi atas penyisihan piutang TP a.n Dedy Kusnadi tahun 1982
SEKRETARIAT JENDERAL (PUSAT)	3.500,00	Jurnal Koreksi Lainnya atas Lebih Catat Penyisihan TP/TGR a.n Maruli
SEKRETARIAT JENDERAL (PUSAT)	(964.688.097,00)	Jurnal Koreksi Lebih Catat atas Piutang PNBPT PT.Paramitha per 31 Des 2020
SEKRETARIAT JENDERAL (PUSAT)	(700.000,00)	Jurnal Koreksi Lebih Catat Piutang TP/TGR a.n Maruli
SEKRETARIAT JENDERAL (PUSAT)	11.400.000,00	Jurnal koreksi atas setoran PT.Taspen untuk Piutang TGR a.n Bambang Rushananto
SEKRETARIAT JENDERAL (PUSAT)	(1.700.000,00)	Jurnal Koreksi atas Lebih Catat Transfer Masuk Piutang TGR a.n Nurjaman
SEKRETARIAT JENDERAL (PUSAT)	13.290.126,00	jurnal koreksi TP a.n Dedy Kusnadi tahun 1982
SEKRETARIAT JENDERAL (PUSAT)	2.400.000,00	Koreksi Lainnya atas Kurang Catat Piutang TP/TGR 31 Des 2020 a.n Maruli
SEKRETARIAT JENDERAL (PUSAT)	(5.104.200,00)	Jurnal Koreksi Lainnya atas kurang catat Hutang kepada Pihak Ketiga Lainnya per 31 Des 2020 (retur biaya mutasi a.n Andika Dwi Prasetya)
KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM LAMPUNG	57.000,00	Penghapusan Piutang TPTGR
KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM LAMPUNG	(11.400.000,00)	Penghapusan Piutang TPTGR
KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SUMATERA UTARA	13.136,00	jurnal koreksi lainnya atas penyisihan piutang TPTGR atas nama Teti Winarti
KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SUMATERA UTARA	(13.136,00)	jurnal atas beban penyisihan piutang TPTGR atas nama Teti Winarti
KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SUMATERA UTARA	2.627.068,00	jurnal penyesuaian atas pelunasan TPTGR atas nama Teti Winarti
KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PEKANBARU	4.350,00	jurnal penyesuaian atas pelunasan TPTGR
KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PEKANBARU	(435.000,00)	jurnal penyesuaian atas pelunasan TPTGR
KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BENGKULU	990.000,00	Pembayaran Temuan BPK Tahun 2012
KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM AMBON	105.099,00	Koreksi lainnya atas penyisihan piutang



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
 Lampiran Catatan Atas Laporan Keuangan
 Per 31 Desember Tahun Anggaran 2021 (*Audited*)
 Dengan Angka Perbandingan 31 Desember Tahun Anggaran 2020
 (dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

URAIAN SATKER	NILAI KOREKSI	KETERANGAN
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PAPUA BARAT	21.529.529,00	Koreksi beban penyisihan piutang di kredit atas Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu. Pengembalian Hasil Temuan BPK TA.2013 terhadap kekurangan Volume atas Pekerjaan Pelaksanaan Pemeliharaan Gedung Bangunan Kanwil oleh CV.Tabyol Perkasa
SUB TOTAL	(6.931.079.456,00)	
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM		
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM	(63.843.000,00)	Penyesuaian nilai kurs Deposito sbdr HKD 7.800.000 pada DOJ Hongkong atas penanganan kasus Bank Century sesuai kurs tengah BI tgl 31 Desember 2021 yaitu 1HKD=Rp1.829,840
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM	(271.791.000,00)	Penyesuaian nilai kurs Deposito sbdr HKD 7.800.000 pada DOJ Hongkong atas penanganan kasus Bank Century sesuai kurs tengah BI tgl 30 Sep 2021 yaitu 1HKD=Rp1838,025 =>14.608.386.000-14.336.595.000=271791000
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM	417.534.000,00	Penyesuaian nilai kurs Deposito sbdr HKD 7.800.000 pada DOJ Hongkong atas penanganan kasus Bank Century sesuai kurs tengah BI tgl 1 Juli 2021 yaitu 1HKD=Rp1872,87 (SE DJPB S-21/PB/PB.6/2021) =>14.608.386.000-14.190.852.00=417534000
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM	65.582.654,00	Jurnal penyesuaian jumlah piutang PNBPN pesan nama perseroan berdasarkan hasil rekonsiliasi penanganan piutang negara antara Ditjen AHU dengan KPKNL Jakarta II
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM	6.155.007,00	Jurnal penyesuaian jumlah piutang PNBPN pesan nama perseroan berdasarkan hasil rekonsiliasi penanganan piutang negara antara Ditjen AHU dengan KPKNL Jakarta II
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM	(65.582.654,00)	Jurnal penyesuaian jumlah piutang PNBPN pesan nama perseroan berdasarkan hasil rekonsiliasi penanganan piutang negara antara Ditjen AHU dengan KPKNL Jakarta II
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM	(6.155.007,00)	Jurnal penyesuaian jumlah piutang PNBPN pesan nama perseroan berdasarkan hasil rekonsiliasi penanganan piutang negara antara Ditjen AHU dengan KPKNL Jakarta II
SUB TOTAL	81.900.000,00	
DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN		
BALAI PEMASYARAKATAN GARUT	27.500,00	Koreksi Penyisihan piutang TGR
BALAI PEMASYARAKATAN JAKARTA SELATAN	2.729,00	koreksi lainnya atas beban penyisihan piutang TP/TGR di sisi kredit
BALAI PEMASYARAKATAN SAMARINDA, KOT.SAMARINDA, KALIMANTAN TIMUR	(11.918,00)	koreksi hutang belanja tayl
BALAI PEMASYARAKATAN SAMARINDA, KOT.SAMARINDA, KALIMANTAN TIMUR	(21.089,00)	koreksi hutang belanja barang tayl
BALAI PEMASYARAKATAN SAMARINDA, KOT.SAMARINDA, KALIMANTAN TIMUR	(5.000,00)	koreksi hutang belanja barang tayl
BALAI PEMASYARAKATAN SAMARINDA, KOT.SAMARINDA, KALIMANTAN TIMUR	(1.500,00)	koreksi hutang belanja tayl
BALAI PEMASYARAKATAN TERNATE, MALUKU UTARA	4.500,00	Jurnal koreksi penyisihan piutang PNBPN di sisi kredit



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
 Lampiran Catatan Atas Laporan Keuangan
 Per 31 Desember Tahun Anggaran 2021 (*Audited*)
 Dengan Angka Perbandingan 31 Desember Tahun Anggaran 2020
 (dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

URAIAN SATKER	NILAI KOREKSI	KETERANGAN
BALAI PEMASYARAKATAN TERNATE, MALUKU UTARA	(4.500,00)	jurnal koreksi penyisihan piutang atas temuan Itjen
BALAI PEMASYARAKATAN TERNATE, MALUKU UTARA	(29.756.750,00)	jurnal koreksi atas penyisihan TGR yang macet
BALAI PEMASYARAKATAN TERNATE, MALUKU UTARA	900.000,00	Pengakuan Piutang Temuan ITJEN
BALAI PEMASYARAKATAN TERNATE, MALUKU UTARA	29.756.750,00	Koreksi Nilai TP/TGR An. Hussien Sepa
DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN	1.250.000,00	Koreksi atas saldo tidak normal beban penyisihan piutang Lainnya minus (-)
DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN	32.110.147,00	Koreksi atas saldo tidak normal beban penyisihan piutang PNBPN minus (-)
DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN	(258.596.500,00)	Usulan Mandiri - Koreksi atas pengakuan piutang tanpa adanya jaminan piutang
DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN	1.292.982,00	Usulan Mandiri - Koreksi atas pengakuan piutang tanpa adanya jaminan piutang
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PAPUA BARAT	5.000,00	Nilai ini muncul dari adanya setoran pengembalian TGR atas nama Yosep Weyasu sebesar Rp.1000.000 x 5/1000. Namun karena saldo beban penyisihan piutang berada pada posisi kredit sehingga Satker membuat jurnal koreksi lainnya untuk menghilangkan saldo yang berada pada posisi kredit tersebut.
LAPAS KELAS IIA KOTABARU	7.758.175,00	Beban Penyisihan Piutang PNBPN
LAPAS KELAS IIA TENGGARONG	76.131,00	Koreksi beban penyisihan piutang di kredit
LAPAS KELAS IIA BONTANG	31.486,00	Koreksi Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Piutang PNBPN pada sisi kredit
LAPAS KELAS IIA BONTANG	59.994,00	koreksi hutang belanja tayl
LAPAS KELAS IIA CIKARANG	439.565,00	Koreksi Penyesuaian atas penyisihan piutang
LAPAS KELAS IIB BANJAR	1.163,00	Koreksi Penyesuaian atas penyisihan piutang
LAPAS KELAS IIB BANJARBARU	216.392,00	Beban Penyisihan Piutang PNBPN
LAPAS KELAS IIB SOROLANGUN	31.700,00	Penyisihan Piutang PNBPN
Lapas anak Kelas III Batam	6.786.296,00	Koreksi atas Beban Penyisihan Piutang PNBPN Kelebihan Pembayaran BAMA Tahun Anggaran 2020 di Sisi Kredit
Lapas anak Kelas III Batam	(606.325.200,00)	Usulan Mandiri - koreksi atas pengakuan piutang TAYL yang tidak memiliki jaminan dan SKTJM
Lapas anak Kelas III Batam	3.031.626,00	Usulan Mandiri - koreksi atas pengakuan piutang TAYL yang tidak memiliki jaminan dan SKTJM (Penyisihan Piutang Lainnya)
LAPAS BANGKO	42.398,00	Koreksi Beban Penyisihan Piutang
LAPAS INDRAMAYU	14.430,00	Koreksi Penyesuaian atas penyisihan piutang
LAPAS KELAS IIB BLANGKEJEREN	1.050,00	Koreksi Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Piutang PNBPN pada sisi kredit
LAPAS KELAS IIB IDI	26.319,00	Koreksi atas beban penyisihan piutang pnbpn di sisi kredit
LAPAS KELAS IIB IDI RAYEUK	64.251,00	Koreksi atas beban penyisihan piutang pnbpn di sisi kredit
LAPAS KELAS IIB MUARA DUA	986,00	Pengakuan Penyisihan Piutang Bama Tahun lalu
LAPAS KELAS IIB MUARA DUA	197.157,00	Pengakuan Piutang Bama Tahun lalu
LAPAS KELAS IIB MUARA DUA	(986,00)	Pengakuan Penyisihan Piutang Bama Tahun lalu
LAPAS KELAS IIB SELATPANJANG	25.019,00	koreksi beban penyisihan piutang dikredit
LAPAS KELAS IIB SELONG	229,00	Koreksi terhadap nilai beban penyisihan piutang PNBPN di sisi kredit



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Lampiran Catatan Atas Laporan Keuangan
Per 31 Desember Tahun Anggaran 2021 (*Audited*)
Dengan Angka Perbandingan 31 Desember Tahun Anggaran 2020
(dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

URAIAN SATKER	NILAI KOREKSI	KETERANGAN
LAPAS KELAS III AMURANG	6.544,00	Koreksi Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Piutang PNBK pada sisi kredit
LAPAS KELAS III AMURANG	(1.206.450,00)	Usulan Mandiri - atas koreksi piutang temuan tanpa SKTJM dan Jaminan (Piutang Lainnya)
LAPAS KELAS III AMURANG	6.032,00	Penyisihan Piutang Lainnya
LAPAS KELAS III GUNUNG TUA	(29.357,00)	Koreksi pengakuan piutang bama
LAPAS KELAS III GUNUNG TUA	5.871.459,00	Koreksi pengakuan penyisihan piutang bama
LAPAS KELAS III GUNUNG TUA	29.357,00	Koreksi beban penyisihan piutang di sebelah kredit
LAPAS KELAS III KOTA PINANG	15.864,00	Koreksi beban penyisihan piutang di sebelah kredit
LAPAS KELAS III LEOK	9.804,00	Koreksi Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Piutang PNBK pada sisi kredit
LAPAS KELAS III LIRUNG	(2.600,00)	jurnal koreksi penyisihan piutang kelebihan bama
LAPAS KELAS III LIRUNG	520.000,00	Koreksi piutang pengembalian Bama 2020
LAPAS KELAS III LIRUNG	2.600,00	jurnal koreksi beban penyisihan piutang pnbk di sisi kredit
LAPAS KELAS III MAMASA	34.916,00	Koreksi atas beban penyisihan piutang
LAPAS KELAS III NAMLEA	46.141,00	koreksi atas saldo beban penyisihan bersaldo kredit
LAPAS KHUSUS KELAS IIA GUNUNG SINDUR	45.930,00	Koreksi Penyesuaian atas penyisihan piutang
LAPAS KHUSUS KELAS IIA KARANGANYAR NUSAKAMBANGAN	9.285,00	Koreksi atas piutang kelebihan bama 2020
LAPAS MAJALENGKA	9.022,00	Koreksi Penyesuaian atas penyisihan piutang
LAPAS NARKOTIKA KELAS IIA KASONGAN	(5.594.016,00)	Koreksi lainnya terkait pendapatan sewa diterima dimuka atas sewa koperasi tahun 2020 yang belum diakui di tahun 2020
LAPAS NARKOTIKA KELAS IIA SAMARINDA	13.159,00	Koreksi Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Piutang PNBK pada sisi kredit
LAPAS NARKOTIKA KELAS IIA SAMARINDA	240.171,00	koreksi hutang belanja tayl
LAPAS NARKOTIKA KELAS IIA GUNUNG SINDUR	137.354,00	Koreksi Penyesuaian atas penyisihan piutang
LAPAS NARKOTIKA KELAS IIA MUARA BELITI	10.328,00	Koreksi Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Piutang PNBK pada sisi kredit
LAPAS NARKOTIKA KELAS IIB BANYUASIN	(20.370.201,00)	Koreksi Pengakuan Pendapatan diterima dimuka TAYL yg blm dicatat di akhir desember 2020
LAPAS NARKOTIKA KELAS IIB LANGSA	448.076,00	Koreksi atas beban penyisihan piutang pnbk di sisi kredit
Lapas Perempuan Kelas IIA Denpasar	52.479,00	Koreksi atas beban penyisihan piutang PNBK saldo normal
Lapas Perempuan Kelas IIA Martapura	10.572,00	Beban Penyisihan Piutang PNBK
Lapas Perempuan Kelas IIA Pekanbaru	3.772,00	Koreksi Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Piutang PNBK pada sisi kredit
Lapas Perempuan Kelas IIA Pontianak	5.886,00	jurnal koreksi beban penyisihan piutang pnbk di sisi kredit
Lapas Perempuan Kelas IIA Pontianak	(9.133.659,00)	koreksi atas pengakuan pendapatan di terima di muka tahun 2020 yang belum tercatat
LAPAS PEREMPUAN KELAS IIB KUPANG	1.936,00	Koreksi Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Piutang PNBK pada sisi kredit
Lapas Perempuan Kelas IIB Batam	99.412,00	Koreksi atas Beban Penyisihan Piutang PNBK Kelebihan Pembayaran BAMA Tahun Anggaran 2020 di Sisi Kredit
Lapas Perempuan Kelas IIB Bengkulu	8.320,00	jurnal koreksi beban penyisihan piutang pnbk di sisi kredit
Lapas Perempuan Kelas IIB Jambi	160.495,00	penyisihan PNBK terkait belanja bama



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Lampiran Catatan Atas Laporan Keuangan
Per 31 Desember Tahun Anggaran 2021 (*Audited*)
Dengan Angka Perbandingan 31 Desember Tahun Anggaran 2020
(dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

URAIAN SATKER	NILAI KOREKSI	KETERANGAN
Lapas Perempuan Kelas IIB Yogyakarta	5.629,00	Koreksi atas beban yang bernilai negatif atas Jurnal balik penyisihan piutang PNBPN atas kelebihan pembayaran bama tahun 2020
Lapas Perempuan Kelas III Kendari	184.212,00	jurnal koreksi atas beban penyisihan piutang PNBPN
Lapas Perempuan Kelas III Kendari	(9.212,00)	jurnal koreksi penyisihan piutang pengembalian BAMA tahun 2020
Lapas Perempuan Kelas III Kendari	1.842.404,00	jurnal koreksi atas piutang pengembalian BAMA tahun 2020
Lapas Perempuan Kelas III Manokwari	500.000,00	Jurnal atas saldo beban penyisihan piutang yang sampai 31-12-2021 masih bersaldo kredit
Lapas Perempuan Kelas III Manokwari	1.881.000,00	Jurnal atas saldo beban penyisihan piutang yang sampai 31-12-2021 masih bersaldo kredit
Lapas Perempuan Kelas III Manokwari	(46.768.765,00)	Usulan Mandiri - koreksi atas piutang tanpa jaminan dan SKTJM (Piutang Lainnya)
Lapas Perempuan Kelas III Manokwari	233.844,00	Usulan Mandiri - koreksi atas piutang tanpa jaminan dan SKTJM (Penyisihan Piutang Lainnya)
Lapas Perempuan Kelas III Ternate	610.997,00	Jurnal Balik Penyisihan Piutang yang sudah lunas
LAPAS PURWAKARTA	2.358,00	Koreksi Penyesuaian atas penyisihan piutang
LAPAS SEKAYU	4.981,00	Koreksi Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Piutang PNBPN pada sisi kredit
LAPAS SUMEDANG	13.232,00	Koreksi Penyesuaian atas penyisihan piutang
LAPAS TANJUNG BALAI ASAHAN	101.856,00	Koreksi beban penyisihan piutang di sebelah kredit
LEMBAGA PEMASYARAKATAN AMBARAWA	15.733,00	Koreksi atas piutang kelebihan bama 2020
LEMBAGA PEMASYARAKATAN AMPANA	20.800,00	Koreksi lainnya pada beban penyisihan piutang bersaldo kredit
LEMBAGA PEMASYARAKATAN ANAK GIANYAR	2.659,00	Koreksi atas beban penyisihan piutang PNBPN saldo normal
LEMBAGA PEMASYARAKATAN ANAK KUTOARJO	4.404,00	koreksi saldo kredit beban penyisihan piutang
LEMBAGA PEMASYARAKATAN ANAK MEDAN	138.489,00	Koreksi beban penyisihan piutang di sebelah kredit
LEMBAGA PEMASYARAKATAN ANAK TOMOHON	9.318,00	jurnal koreksi beban penyisihan piutang pnbpn di sisi kredit
LEMBAGA PEMASYARAKATAN BANCEUY BANDUNG	20.555,00	Koreksi Penyisihan piutang TGR
LEMBAGA PEMASYARAKATAN BANCEUY BANDUNG	90.000,00	Koreksi Penyisihan piutang TGR
LEMBAGA PEMASYARAKATAN BANDAR LAMPUNG	114.873,00	Koreksi atas Beban Penyisihan Piutang di sisi Kredit yang menyebabkan nilai Minus pada LO, sesuai Surat Dirjen Perbendaharaan S-27/PB/PB.6/2021
LEMBAGA PEMASYARAKATAN BANJARMASIN	181.133,00	Beban Penyisihan Piutang PNBPN
LEMBAGA PEMASYARAKATAN BATU	7.055,00	jurnal penyisihan piutang kelebihan bama 2020 yang belum diakui
LEMBAGA PEMASYARAKATAN BAU-BAU	132.823,00	Koreksi atas beban penyisihan piutang PNBPN pengembalian BAMA TA 2020
LEMBAGA PEMASYARAKATAN BENGKULU	523.320,00	Koreksi Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Piutang PNBPN pada sisi kredit
LEMBAGA PEMASYARAKATAN BENGKULU	(52.332,00)	Jurnal koreksi penyisihan PNBPN atas kelebihan pembayaran bahan makanan TA 2020
LEMBAGA PEMASYARAKATAN BENGKULU	10.466.357,00	Koreksi PNBPN atas kelebihan pembayaran bama TA. 2020
LEMBAGA PEMASYARAKATAN BESI	513,00	Koreksi atas piutang kelebihan bama 2020
LEMBAGA PEMASYARAKATAN BITUNG	20.872,00	jurnal koreksi beban penyisihan piutang pnbpn di sisi kredit



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Lampiran Catatan Atas Laporan Keuangan
Per 31 Desember Tahun Anggaran 2021 (*Audited*)
Dengan Angka Perbandingan 31 Desember Tahun Anggaran 2020
(dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

URAIAN SATKER	NILAI KOREKSI	KETERANGAN
LEMBAGA PEMASYARAKATAN BITUNG	(20.872,00)	jurnal koreksi beban penyisihan piutang pnpb di sisi kredit
LEMBAGA PEMASYARAKATAN BITUNG	4.174.485,00	jurnal koreksi atas kelebihan bama yang belum diakui di 2020
LEMBAGA PEMASYARAKATAN BOALEMO	20.832,00	Koreksi Nilai terhadap beban penyisihan piutang di sisi kredit
LEMBAGA PEMASYARAKATAN BOGOR	87.716,00	Koreksi Penyesuaian atas penyisihan piutang
LEMBAGA PEMASYARAKATAN BULUKUMBA	21.673.665,00	koreksi pengakuan piutang
LEMBAGA PEMASYARAKATAN CURUP	33.399,00	Koreksi Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Piutang PNPB pada sisi kredit
LEMBAGA PEMASYARAKATAN CURUP	5,00	Koreksi atas piutang tgr non bendahara (pelunasan tgr an. Pak Lukman)
LEMBAGA PEMASYARAKATAN GORONTALO	20.309,00	Koreksi Nilai terhadap beban penyisihan piutang di sisi kredit
LEMBAGA PEMASYARAKATAN JAMBI	50.000,00	Penyisihan Piutang PNPB
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KALABAH	9.307,00	jurnal koreksi beban penyisihan piutang pnpb di sisi kredit
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB SENTUL	20,00	kelebihan catat hutang belanja pegawai tahun 2020
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS IIA KEROBOKAN	894.869,00	Koreksi atas beban penyisihan piutang PNPB saldo normal
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KUALA SIMPANG	64.746,00	Koreksi atas beban penyisihan piutang pnpb di sisi kredit
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KUPANG	638.616,00	Koreksi Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Piutang PNPB pada sisi kredit
LEMBAGA PEMASYARAKATAN LAHAT	(50.556,00)	penyisihan piutang atas Kelebihan bayar bama 2020 yg belum dicatat
LEMBAGA PEMASYARAKATAN LAHAT	10.111.219,00	Reklas Piutang PNPB Ke piutang Lainnya
LEMBAGA PEMASYARAKATAN MANOKWARI	30.000,00	Reklasifikasi penyisihan piutang dari TPTGR ke bagian lancar atas perpanjangan periode pelunasan TPTGR sampai dengan Desember 2024
LEMBAGA PEMASYARAKATAN MANOKWARI	(64.755,00)	Penyisihan Piutang atas Pengakuan Piutang TGR atas nama Yosep Weyasu. Perlu disampaikan bahwa Piutang TGR atas nama Yosep Weyasu sudah tidak terdapat pada Lapas Manokwari karena telah dilakukan transferan ke Kanwil Kemenkumham Papua Barat pada Satker 667774 (Divisi Pemasyarakatan), hal ini dilakukan karena yang bersangkutan sudah pindah tugas ke Kanwil Kemenkumham Papua Barat
LEMBAGA PEMASYARAKATAN MANOKWARI	12.951.000,00	Pengakuan Piutang TGR atas nama Yosep Weyasu. Perlu disampaikan bahwa Piutang TGR atas nama Yosep Weyasu sudah tidak terdapat pada Lapas Manokwari karena telah dilakukan transferan ke Kanwil Kemenkumham Papua Barat pada Satker 667774 (Divisi Pemasyarakatan), hal ini dilakukan karena yang bersangkutan sudah pindah tugas ke Kanwil Kemenkumham Papua Barat
LEMBAGA PEMASYARAKATAN MEDAN	38.555,00	Koreksi beban penyisihan piutang di sebelah kredit
LEMBAGA PEMASYARAKATAN MUARA BUNGO	420.145,00	Koreksi Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Piutang PNPB pada sisi kredit
LEMBAGA PEMASYARAKATAN NARKOTIKA BANDAR LAMPUNG	74.992,00	jurnal koreksi atas penyisihan piutang temuan Itjen
LEMBAGA PEMASYARAKATAN NARKOTIKA BANDAR LAMPUNG	(14.998.249,00)	Koreksi atas Piutang PNPB Hasil Pemeriksaan BPK Tahun 201
LEMBAGA PEMASYARAKATAN NARKOTIKA BANDAR LAMPUNG	(288.617.429,00)	Usulan Mandiri - atas koreksi piutang temuan tanpa SKTJM dan Jaminan (Piutang Lainnya)



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Lampiran Catatan Atas Laporan Keuangan
Per 31 Desember Tahun Anggaran 2021 (*Audited*)
Dengan Angka Perbandingan 31 Desember Tahun Anggaran 2020
(dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

URAIAN SATKER	NILAI KOREKSI	KETERANGAN
LEMBAGA PEMASYARAKATAN NARKOTIKA BANDAR LAMPUNG	1.443.087,00	Usulan Mandiri - atas koreksi piutang temuan tanpa SKTJM dan Jaminan (Penyisihan Piutang Lainnya)
LEMBAGA PEMASYARAKATAN NARKOTIKA BANGLI	5.156,00	Koreksi atas beban penyisihan piutang PNBPN saldo normal
LEMBAGA PEMASYARAKATAN NARKOTIKA JAKARTA	300.659,00	jurnal koreksi terhadap beban penyisihan piutang disisi kredit
LEMBAGA PEMASYARAKATAN NARKOTIKA MARTAPURA	197.240,00	Koreksi Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Piutang PNBPN pada sisi kredit
LEMBAGA PEMASYARAKATAN NARKOTIKA NUSAKAMBANGAN	31.852,00	Koreksi atas piutang kelebihan bama 2020
LEMBAGA PEMASYARAKATAN NARKOTIKA YOGYAKARTA	3.466,00	Koreksi atas beban yang bernilai negatif atas Jurnal balik penyisihan piutang PNBPN atas kelebihan pembayaran bama tahun 2020
LEMBAGA PEMASYARAKATAN PALANGKARAYA	187.396,00	Koreksi Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Piutang PNBPN pada sisi kredit
LEMBAGA PEMASYARAKATAN PALOPO	167.517,00	jurnal koreksi kelebihan atas bama tahun 2020 yang belum diakui
LEMBAGA PEMASYARAKATAN PALU	99.724,00	Koreksi Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Piutang PNBPN pada sisi kredit
LEMBAGA PEMASYARAKATAN PASIR PUTIH NUSAKAMBANGAN	60.686,00	jurnal koreksi beban penyisihan piutang pnbpn di sisi kredit
LEMBAGA PEMASYARAKATAN PATI	86.582,00	Koreksi atas piutang kelebihan bama 2020
LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEKANBARU	14.427,00	Koreksi Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Piutang PNBPN pada sisi kredit
LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEKANBARU	(14.427,00)	koreksi pengakuan penyisihan piutang bama
LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEKANBARU	2.885.330,00	koreksi pengakuan piutang bama
LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEMATANG SIANTAR	49.680,00	Koreksi beban penyisihan piutang di sebelah kredit
LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA BANDUNG	7.936,00	Koreksi Penyesuaian atas penyisihan piutang
LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN MALANG	541.996,00	Koreksi kelebihan nilai jurnal pengakuan hutang listrik Des 2020
LEMBAGA PEMASYARAKATAN PERMISAN	923.337,00	Kelebihan bayar bama 2020 yg belum dicatat
LEMBAGA PEMASYARAKATAN POLEWALI	60.010,00	Penyisihan Piutang PNBPN
LEMBAGA PEMASYARAKATAN PONTIANAK	9.344,00	Koreksi Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Piutang PNBPN pada sisi kredit
LEMBAGA PEMASYARAKATAN PRIA TANGERANG	25.927,00	jurnal koreksi beban penyisihan piutang pnbpn di sisi kredit
LEMBAGA PEMASYARAKATAN RANTAU PRAPAT	255.610,00	Koreksi beban penyisihan piutang di sebelah kredit
LEMBAGA PEMASYARAKATAN SEMARANG	482.830,00	Kelebihan bayar bama 2020 yg belum dicatat
LEMBAGA PEMASYARAKATAN SEMARANG	(482.830,00)	Kelebihan bayar bama 2020 yg belum dicatat
LEMBAGA PEMASYARAKATAN SEMARANG	96.565.900,00	Kelebihan bayar bama 2020 yg belum dicatat
LEMBAGA PEMASYARAKATAN SINGKAWANG	44.814,00	Koreksi Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Piutang PNBPN pada sisi kredit
LEMBAGA PEMASYARAKATAN SINTANG	34.305,00	Koreksi Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Piutang PNBPN pada sisi kredit
LEMBAGA PEMASYARAKATAN SLEMAN	21.655,00	Koreksi atas beban yang bernilai negatif atas Jurnal balik penyisihan piutang PNBPN atas kelebihan pembayaran bama tahun 2020
LEMBAGA PEMASYARAKATAN SRAGEN	5.222,00	Koreksi atas piutang kelebihan bama 2020
LEMBAGA PEMASYARAKATAN SUBANG	22.581,00	Koreksi Penyesuaian atas penyisihan piutang



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Lampiran Catatan Atas Laporan Keuangan
Per 31 Desember Tahun Anggaran 2021 (*Audited*)
Dengan Angka Perbandingan 31 Desember Tahun Anggaran 2020
(dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

URAIAN SATKER	NILAI KOREKSI	KETERANGAN
LEMBAGA PEMASYARAKATAN TANJUNG PINANG	1.945,00	Koreksi atas Beban Penyisihan Piutang PNBK Kelebihan Pembayaran BAMA Tahun Anggaran 2020 di Sisi Kredit
LEMBAGA PEMASYARAKATAN TARAKAN	951.039,00	koreksi beban penyisihan piutang PNBK di sisi Kredit
LEMBAGA PEMASYARAKATAN TARAKAN	(4.648,00)	koreksi kelebihan pembayaran belanja peg
LEMBAGA PEMASYARAKATAN TARAKAN	(698.515,00)	Koreksi kelebihan bayar bama 2020
LEMBAGA PEMASYARAKATAN TARAKAN	(247.876,00)	koreksi temuan belanja modal oleh itjen TA 2017
LEMBAGA PEMASYARAKATAN TARAKAN	929.600,00	koreksi kelebihan pembayaran belanja peg
LEMBAGA PEMASYARAKATAN TARAKAN	139.702.922,00	Koreksi kelebihan bayar bama 2020
LEMBAGA PEMASYARAKATAN TARAKAN	49.575.185,00	koreksi temuan belanja modal oleh itjen TA 2017
LEMBAGA PEMASYARAKATAN TERBUKA NUSAKAMBANGAN	8.917,00	Koreksi atas piutang kelebihan bama 2020
LEMBAGA PEMASYARAKATAN TONDANO	38.610,00	Jurnal koreksi piutang PNBK di sisi kredit
LEMBAGA PEMASYARAKATAN TONDANO	(38.610,00)	jurnal koreksi atas penyisihan piutang kelebihan bama tayl
LEMBAGA PEMASYARAKATAN TONDANO	7.721.969,00	Koreksi piutang pengembalian Bama 2020
LEMBAGA PEMASYARAKATAN TUAL	285.308,00	Koreksi atas beban penyisihan piutang lainnya bersaldo kredit
LEMBAGA PEMASYARAKATAN TUAL	(285.308,00)	Pencatatan penyisihan Piutang atas Temuan Itjen pada 2017
LEMBAGA PEMASYARAKATAN TUAL	57.061.663,00	Pencatatan Piutang Temuan Itjen pada 2017
LEMBAGA PEMASYARAKATAN UJUNG PANDANG	199.036,00	Koreksi Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Piutang PNBK pada sisi kredit
LEMBAGA PEMASYARAKATAN UJUNG PANDANG	(199.036,00)	jurnal koreksi beban penyisihan piutang PNBK di sisi kredit
LEMBAGA PEMASYARAKATAN UJUNG PANDANG	39.807.164,00	jurnal koreksi kelebihan atas bama tahun 2020 yang belum diakui
LEMBAGA PEMASYARAKATAN WANITA MEDAN	19.331,00	Koreksi beban penyisihan piutang di sebelah kredit
LEMBAGA PEMASYARAKATAN WANITA TANGERANG	3.913,00	Koreksi Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Piutang PNBK pada sisi kredit
LEMBAGA PEMASYARAKATAN WANITA TANGERANG	(3.913,00)	jurnal koreksi atas penyisihan piutang kelebihan BAMA TA 2020 yang belum diakui pada data audited
LEMBAGA PEMASYARAKATAN WANITA TANGERANG	782.654,00	koreksi atas kelebihan pembayaran BAMA TA 2020 yang belum diakui pada saldo audited
LEMBAGA PEMASYARAKATAN WAY KANAN	100.000,00	Koreksi atas Beban Penyisihan Piutang di sisi Kredit
LEMBAGA PEMASYARAKATAN WAY KANAN	169.190,00	Koreksi Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Piutang PNBK pada sisi kredit
LEMBAGA PEMASYARAKATAN WAY KANAN	78,00	Koreksi kurang catat nilai piutang 'Temuan BPK Tahun 2015
LEMBAGA PEMASYARAKATAN WAY KANAN	(77.537.792,00)	Usulan Mandiri - atas koreksi piutang temuan tanpa SKTJM dan Jaminan (Piutang Lainnya)
LEMBAGA PEMASYARAKATAN WAY KANAN	387.689,00	Usulan Mandiri - atas koreksi piutang temuan tanpa SKTJM dan Jaminan (Penyisihan Piutang Lainnya)
LEMBAGA PEMASYARAKATAN YOGYAKARTA	6.635,00	Koreksi atas beban yang bernilai negatif atas Jurnal balik penyisihan piutang PNBK atas kelebihan pembayaran bama tahun 2020
LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK MARTAPURA	42.791,00	Beban Penyisihan Piutang PNBK
LPKA Bengkulu, Provinsi Bengkulu	2.820,00	Koreksi Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Piutang PNBK pada sisi kredit



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
 Lampiran Catatan Atas Laporan Keuangan
 Per 31 Desember Tahun Anggaran 2021 (*Audited*)
 Dengan Angka Perbandingan 31 Desember Tahun Anggaran 2020
 (dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

URAIAN SATKER	NILAI KOREKSI	KETERANGAN
LPKA JAKARTA, PROVINSI DKI JAKARTA	10.715,00	koreksi lainnya atas beban penyisihan piutang PNBPN di sisi kredit
LPKA JOGJAKARTA, PROVINSI D.I YOGYAKARTA	5.442,00	Koreksi atas beban yang bernilai negatif atas Jurnal balik penyisihan piutang PNBPN atas kelebihan pembayaran bama tahun 2020
LPKA Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara	127.909,00	Koreksi Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Piutang PNBPN pada sisi kredit
LPKA Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara	(4.036,00)	Jurnal Koreksi atas pencatatan piutang kelebihan pembayaran BAMA tahun 2020 yg belum dicatat
LPKA Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara	807.166,00	Jurnal Koreksi atas pencatatan piutang kelebihan pembayaran BAMA tahun 2020 yg belum dicatat
LPKA Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah	169.613,00	Koreksi Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Piutang PNBPN pada sisi kredit
LPKA Pangkal Pinang, Provinsi Kep. Bangka Belitung	8.512,00	jurnal koreksi beban penyisihan piutang pnbpn di sisi kredit
LPKA Pangkal Pinang, Provinsi Kep. Bangka Belitung	(8.512,00)	pengakuan penyisihan piutang TAYL
LPKA Pangkal Pinang, Provinsi Kep. Bangka Belitung	1.702.419,00	Pengembalian BAMA TA. 2020 yang disetorkan pada tahun 2021
LPKA SAMARINDA, PROVINSI KALIMANTAN TIMUR	400.000,00	Koreksi beban penyisihan piutang di kredit
LPKA SAMARINDA, PROVINSI KALIMANTAN TIMUR	300.000,00	Koreksi beban penyisihan piutang di kredit
LPKA SAMARINDA, PROVINSI KALIMANTAN TIMUR	(8.046.000,00)	Koreksi keluar piutang temuan BPK (Piutang Lainnya)
LPKA SAMARINDA, PROVINSI KALIMANTAN TIMUR	40.230,00	Koreksi keluar piutang temuan BPK (Penyisihan Piutang Lainnya)
RUMAH PENYIMPANAN BARANG SITAAN NEGARA BANDUNG, KOT.BANDUNG, JAWA BARAT	10.000,00	Koreksi Penyisihan piutang TGR
RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAN NEGARA PEKANBARU	(14.081.000,00)	Jurnal Pengakuan Belanja pegawai yg masih harus dibayar tahun 2020
RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAN NEGARA JAYAPURA	53.975,00	koreksi beban penyisihan piutang lainnya bersaldo kredit
RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAN NEGARA JAYAPURA	25.000,00	Koreksi Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Piutang PNBPN pada sisi kredit
RUMAH TAHAN NEGARA WONOSARI	13.410,00	Koreksi atas beban yang bernilai negatif atas Jurnal balik penyisihan piutang PNBPN atas kelebihan pembayaran bama tahun 2020
RUMAH TAHANAN KELAS IIB KOTA AGUNG	69.265,00	Koreksi atas Beban Penyisihan Piutang di sisi Kredit yang menyebabkan nilai Minus pada LO, sesuai Surat Dirjen Perbendaharaan S-27/PB/PB.6/2021
RUMAH TAHANAN KELAS IIB KUPANG	84.286,00	Koreksi Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Piutang PNBPN pada sisi kredit
RUMAH TAHANAN NEGARA BAJAWA	41.079,00	Koreksi Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Piutang PNBPN pada sisi kredit
RUMAH TAHANAN NEGARA BAJAWA	8.215.810,00	Pengakuan Piutang PNBPN ke piutang lainnya atas temuan ltjen atas Kelebihan Pembayaran Kepada Konsultan Perencanaan Pengadaan Air Bersih dan Instalasi Ta 2016
RUMAH TAHANAN NEGARA BALIKPAPAN	(11.000,00)	Koreksi hutang belanja TAYL
RUMAH TAHANAN NEGARA BALIKPAPAN	(42.500,00)	Koreksi hutang belanja TAYL
RUMAH TAHANAN NEGARA BALIKPAPAN	487,00	Koreksi hutang belanja TAYL
RUMAH TAHANAN NEGARA BALIKPAPAN	12.750,00	Koreksi hutang belanja TAYL
RUMAH TAHANAN NEGARA BALIKPAPAN	1,00	Koreksi hutang belanja TAYL



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Lampiran Catatan Atas Laporan Keuangan
Per 31 Desember Tahun Anggaran 2021 (*Audited*)
Dengan Angka Perbandingan 31 Desember Tahun Anggaran 2020
(dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

URAIAN SATKER	NILAI KOREKSI	KETERANGAN
RUMAH TAHANAN NEGARA BANTUL	92.720,00	Koreksi atas beban yang bernilai negatif atas Jurnal balik penyisihan piutang PNBPN atas kelebihan pembayaran bama tahun 2020
RUMAH TAHANAN NEGARA BATAM	366.653,00	Koreksi atas Beban Penyisihan Piutang PNBPN Kelebihan Pembayaran BAMA Tahun Anggaran 2020 di Sisi Kredit
RUMAH TAHANAN NEGARA BATANG	3.066.776,00	Kelebihan bayar bama 2020 yg belum dicatat
RUMAH TAHANAN NEGARA BOYOLALI	8.793,00	Koreksi atas piutang kelebihan bama 2020
RUMAH TAHANAN NEGARA JEPARA	42.716,00	Kelebihan bayar bama 2020 yg belum dicatat
RUMAH TAHANAN NEGARA JEPARA	(42.716,00)	Kelebihan bayar bama 2020 yg belum dicatat
RUMAH TAHANAN NEGARA JEPARA	8.543.200,00	Kelebihan bayar bama 2020 yg belum dicatat
RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS I TANJUNG PINANG	74.971,00	Koreksi atas Beban Penyisihan Piutang PNBPN Kelebihan Pembayaran BAMA Tahun Anggaran 2020 di Sisi Kredit
RUMAH TAHANAN NEGARA KRUI	107.738,00	Koreksi Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Piutang PNBPN pada sisi kredit
RUMAH TAHANAN NEGARA KUALA KAPUAS	39.016,00	Koreksi Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Piutang PNBPN pada sisi kredit
RUMAH TAHANAN NEGARA LARANTUKA	429.365,00	Koreksi Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Piutang PNBPN pada sisi kredit
RUMAH TAHANAN NEGARA LUBUK SIKAPING	1.902.757,00	Pengembalian kelebihan pembayaran belanja barang berupa bahan makanan narapidana Tahun Lalu
RUMAH TAHANAN NEGARA MAJENE	36.513,00	Koreksi Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Piutang PNBPN pada sisi kredit
RUMAH TAHANAN NEGARA MAMUJU	32.840,00	Koreksi atas beban penyisihan piutang
RUMAH TAHANAN NEGARA MAMUJU	(32.840,00)	pengakuan penyisihan piutang TAYL
RUMAH TAHANAN NEGARA MAMUJU	6.567.921,00	pengakuan piutang TAYL
RUMAH TAHANAN NEGARA MANNA	65.455,00	Koreksi Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Piutang PNBPN pada sisi kredit
RUMAH TAHANAN NEGARA MARABAHAN	(30.000,00)	koreksi atas pengakuan hutang TAYL seharusnya 12.086.000 baru diakui sejumlah 12.056.000 di tahun 2020
RUMAH TAHANAN NEGARA MARABAHAN	331.399,00	penghapusan beban penyisihan piutang tidak tertagih TA 2020 karena salah jurnal
RUMAH TAHANAN NEGARA MARABAHAN	(66.279.656,00)	penghapusan piutang PNBPN kelebihan bama Tahun 2020 karena salah jurnal
RUMAH TAHANAN NEGARA MEDAN	588.114,00	Koreksi beban penyisihan piutang di sebelah kredit
RUMAH TAHANAN NEGARA MEDAN	300.000,00	Koreksi pengakuan penyisihan piutang bama
RUMAH TAHANAN NEGARA MEDAN	(60.000.000,00)	Koreksi pengakuan piutang bama
RUMAH TAHANAN NEGARA MENGKALA	97.480,00	Koreksi atas Beban Penyisihan Piutang di sisi Kredit yang menyebabkan nilai Minus pada LO, sesuai Surat Dirjen Perbendaharaan S-27/PB/PB.6/2021
RUMAH TAHANAN NEGARA NEGARA	3.842,00	Koreksi atas beban penyisihan piutang PNBPN saldo normal
RUMAH TAHANAN NEGARA PANGKALAN BRANDAN	21.573,00	Koreksi beban penyisihan piutang di sebelah kredit
RUMAH TAHANAN NEGARA PEKALONGAN	44.023,00	Kelebihan bayar bama 2020 yg belum dicatat
RUMAH TAHANAN NEGARA PEKALONGAN	(44.023,00)	Kelebihan bayar bama 2020 yg belum dicatat
RUMAH TAHANAN NEGARA PEKALONGAN	8.804.693,00	Kelebihan bayar bama 2020 yg belum dicatat



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Lampiran Catatan Atas Laporan Keuangan
Per 31 Desember Tahun Anggaran 2021 (*Audited*)
Dengan Angka Perbandingan 31 Desember Tahun Anggaran 2020
(dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

URAIAN SATKER	NILAI KOREKSI	KETERANGAN
RUMAH TAHANAN NEGARA PELAIHARI	21.550,00	Beban Penyisihan Piutang PNB
RUMAH TAHANAN NEGARA PEMALANG	88.238,00	Koreksi atas piutang kelebihan bama 2020
RUMAH TAHANAN NEGARA PONTIANAK	80.313,00	Koreksi Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Piutang PNB pada sisi kredit
RUMAH TAHANAN NEGARA POSO	14.564,00	Koreksi lainnya pada beban penyisihan piutang
RUMAH TAHANAN NEGARA PRABUMULIH	86.528,00	Koreksi Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Piutang PNB pada sisi kredit
RUMAH TAHANAN NEGARA PRAYA	31.796,00	jurnal koreksi penyisihan piutang PNB kelebihan bama yang belum diakui di 2020
RUMAH TAHANAN NEGARA PRAYA	(31.796,00)	jurnal koreksi penyisihan piutang kelebihan bama tayl
RUMAH TAHANAN NEGARA PRAYA	6.359.129,00	jurnal koreksi atas kelebihan bama yang belum diakui di 2020
RUMAH TAHANAN NEGARA PURWOREJO	315,00	Koreksi atas piutang kelebihan bama 2020
RUMAH TAHANAN NEGARA PUTUSSIBAU	1.972,00	Koreksi Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Piutang PNB pada sisi kredit
RUMAH TAHANAN NEGARA RUTENG	8.135,00	Koreksi Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Piutang PNB pada sisi kredit
RUMAH TAHANAN NEGARA SIDIKALANG	77.232,00	Koreksi pengakuan penyisihan piutang bama
RUMAH TAHANAN NEGARA SIDIKALANG	(15.446.389,00)	Koreksi pengakuan piutang bama
RUMAH TAHANAN NEGARA SINJAI	29.886,00	adanya beban penyisihan yang bersaldo minus
RUMAH TAHANAN NEGARA TANJUNG PURA	24.551,00	Koreksi beban penyisihan piutang di sebelah kredit
RUMAH TAHANAN NEGARA TANJUNG REDEP	(13.500,00)	koreksi hutang belanja tayl
RUMAH TAHANAN NEGARA TANJUNG REDEP	2.000,00	koreksi hutang belanja tayl
RUMAH TAHANAN NEGARA TANJUNG REDEP	2.000,00	koreksi hutang belanja tayl
RUMAH TAHANAN NEGARA UNAAHA	5.267,00	Jurnal Koreksi atas beban penyisihan piutang PNB disisi kredit
RUMAH TAHANAN NEGARA WATES	36.030,00	Koreksi atas beban yang bernilai negatif atas Jurnal balik penyisihan piutang PNB atas kelebihan pembayaran bama tahun 2020
RUMAH TAHANAN NEGARA WONOGIRI	88.238,00	Koreksi atas piutang kelebihan bama 2020
RUMAH TAHANAN NEGARA WONOGIRI	124.868,00	Koreksi Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Piutang PNB pada sisi kredit
RUMAH TAHANAN NEGARA WONOSOBO	16.310,00	koreksi atas beban penyisihan piutang lainnya bersaldo kredit
RUMAH TAHANAN NEGARA WONOSOBO	(16.310,00)	penyisihan piutang atas Kelebihan bayar bama 2020 yg belum dicatat
RUMAH TAHANAN NEGARA WONOSOBO	3.262.000,00	Kelebihan bayar bama 2020 yg belum dicatat
RUMAH TAHANAN NEGARA YOGYAKARTA	22.264,00	Koreksi atas beban yang bernilai negatif atas Jurnal balik penyisihan piutang PNB atas kelebihan pembayaran bama tahun 2020
RUTAN KELAS I DEPOK	1.481.341,00	Koreksi Penyesuaian atas penyisihan piutang
RUTAN KELAS I PONDOK BAMBU	30.273,00	Jurnal Koreksi terkait Beban Penyisihan Piutang PNB di sisi kredit
Rutan Kelas II B Bengkulu	394.200,00	Jurnal balik atas koreksi beban penyisihan piutang PNB
Rutan Kelas II B Bengkulu	11.418,00	Jurnal koreksi atas penyisihan PNB kelebihan listrik TA 2020
Rutan Kelas II B Bengkulu	(2.283.513,00)	Koreksi PNB atas kelebihan pembayaran listrik TA. 2020
RUTAN KELAS IIB SIBUHAN	539.031,00	Koreksi pengakuan penyisihan piutang bama



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
 Lampiran Catatan Atas Laporan Keuangan
 Per 31 Desember Tahun Anggaran 2021 (*Audited*)
 Dengan Angka Perbandingan 31 Desember Tahun Anggaran 2020
 (dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

URAIAN SATKER	NILAI KOREKSI	KETERANGAN
RUTAN KELAS IIB SIBUHAN	(107.806.139,00)	Koreksi pengakuan piutang bama
RUTAN KELAS IIB SIPIROK	152.651,00	Koreksi pengakuan penyisihan piutang bama
RUTAN KELAS IIB SIPIROK	(30.530.194,00)	Koreksi pengakuan piutang bama
LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK BANDAR LAMPUNG	(148.798.880,00)	Koreksi atas Piutang Lainnya
LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK BANDAR LAMPUNG	146.664.074,00	Koreksi atas Penyisihan Piutang Lainnya
RUMAH TAHANAN NEGARA AMBON	6.432,00	Koreksi BPK - Koreksi keluar atas pengakuan piutang denda temuan BPK (Penyisihan Piutang PNBPN)
RUMAH TAHANAN NEGARA MANADO	(94.310.000,00)	Usulan Mandiri - atas koreksi piutang temuan tanpa SKTJM dan Jaminan (Piutang Lainnya)
RUMAH TAHANAN NEGARA MANADO	471.550,00	Usulan Mandiri - atas koreksi piutang temuan tanpa SKTJM dan Jaminan (Penyisihan Piutang Lainnya)
RUMAH TAHANAN NEGARA SUKADANA	(20.843.530,00)	Koreksi atas Piutang Lainnya
RUMAH TAHANAN NEGARA SUKADANA	104.218,00	Koreksi atas Penyisihan Piutang Lainnya
SUB TOTAL	(1.163.243.470,00)	
DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI		
DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI	497.000.000,00	Koreksi beban penyisihan piutang PNBPN atas transfer masuk pembayaran biaya alat angkut
DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI	(237.529.847,00)	Jurnal koreksi saldo akun pendapatan sewa diterima dimuka PT Telkomsel pada TA 2020
DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI	(10.150.000,00)	Penyisihan piutang temuan BPK atas Pelaksanaan Belanja Barang dan Modal Ditjen Imigrasi TA 2018 dan 2019 atas pengadaan pencetakan paspor tahap II berupa denda keterlambatan pengadaan blangko paspor polikarbonat
DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI	(2.355.394,00)	Penyisihan piutang temuan BPK atas Pelaksanaan Belanja Barang dan Modal Ditjen Imigrasi TA 2018 dan 2019 atas pengadaan pencetakan paspor tahap II berupa denda keterlambatan pengadaan blangko paspor polikarbonat
DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI	(1.799.161.590,00)	Penyisihan piutang temuan BPK atas Pelaksanaan Belanja Barang dan Modal Ditjen Imigrasi TA 2018 dan 2019 atas pengadaan pencetakan paspor tahap II berupa denda keterlambatan pengadaan blangko paspor polikarbonat
DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI	1.799.161.590,00	Koreksi beban penyisihan piutang PNBPN atas transfer masuk pembayaran biaya alat angkut
DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI	2.030.000.000,00	Baru dilakukan jurnal terhadap temuan BPK atas LK TA 2019 yang belum terbayarkan berupa pengadaan pencetakan blangko paspor biasa elektronik 48 halaman dan non elektronik 48 halaman
DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI	471.078.840,00	Baru dilakukan jurnal terhadap temuan BPK atas Pelaksanaan Belanja Barang dan Modal Ditjen Imigrasi TA 2018 dan 2019 atas pengadaan pencetakan paspor tahap II berupa denda keterlambatan pengadaan blangko paspor polikarbonat



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Lampiran Catatan Atas Laporan Keuangan
Per 31 Desember Tahun Anggaran 2021 (*Audited*)
Dengan Angka Perbandingan 31 Desember Tahun Anggaran 2020
(dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

URAIAN SATKER	NILAI KOREKSI	KETERANGAN
DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI	1.799.161.590,00	Baru dilakukan jurnal terhadap temuan BPK atas LK TA 2019 yang belum terbayarkan berupa pengadaan pencetakan blangko paspor biasa elektronik 48 halaman dan non elektronik 48 halaman dan jurnal terhadap temuan BPK atas Pelaksanaan Belanja Barang dan Modal Ditjen Imigrasi TA 2018 dan 2019 atas pengadaan pencetakan paspor tahap II berupa denda keterlambatan pengadaan blangko paspor polikarbonat
DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI	(1.799.161.590,00)	Temuan BPK atas LK TA 2012 terhadap keterlambatan pekerjaan dan kelebihan pembayaran pengadaan barang. Sudah dilakukan koordinasi dengan KPKNL untuk melakukan pelimpahan piutang, status terakhir masih dalam penagihan terakhir oleh KPKNL
DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI	(2.501.078.840,00)	Koreksi Keluar Piutang Temuan BPK karena tidak ada Surat Pengakuan Piutang
DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI	12.505.394,00	Koreksi Keluar Piutang Temuan BPK karena tidak ada Surat Pengakuan Piutang
KANTOR IMIGRASI KARAWANG	9.127,00	Penyisihan Piutang Lainnya yang seharusnya di jurnal di Tahun Anggaran 2021
KANTOR IMIGRASI KELAS III TAKENGON KABUPATEN ACEH TENGAH	872.833,00	koreksi beban penyisihan piutang lainnya atas denda keterlambatan pekerjaan hasil temuan Inspektorat Jenderal TA 2019
KANTOR IMIGRASI MADIUN	30.000,00	Reklasifikasi penyisihan piutang dari TPTGR ke bagian lancar atas perpanjangan periode pelunasan TPTGR sampai dengan Desember 2024
KANTOR IMIGRASI JAKARTA UTARA	3.791.548.577,00	Koreksi nilai perhitungan akrual berupa sewa gedung tahun 2020
KANTOR IMIGRASI TANJUNG PINANG	(250.150,00)	Koreksi Lainnya (Kelebihan pencatatan belanja barang yang masih harus dibayar atas belanja langganan telepon, internet dan listrik 2020)
KANTOR IMIGRASI CENGKARENG	32,00	Koreksi atas Kelebihan Pencatatan Tagihan Air Desember 2020
KANTOR IMIGRASI PONTIANAK	(117.750,00)	Koreksi Pencatatan Atas Kelebihan Pembayaran Utang Pihak Ketiga antara lain Listrik sejumlah - Rp 3.000, Air sejumlah -Rp22.500, Internet sejumlah -Rp 92.250
KANTOR IMIGRASI PONTIANAK	(13.690.350,00)	Jurnal Koreksi di 01 Januari 2021 senilai Rp 13.690.350 atas Tagihan Utang Uang Makan Pegawai Bulan Desember TA 2020
KANTOR IMIGRASI PALANGKARAYA	1.165.956,00	koreksi nilai pendapatan sewa diterima di muka periode 31 Desember 2020
KANTOR IMIGRASI KELAS I KHUSUS TPI SOEKARNO HATTA	(35.479.684,00)	Koreksi pencatatan pendapatan sewa diterima dimuka ATM BRI Tahun 2020 yang ringkas kontrak baru terselesaikan di tahun 2021
KANTOR IMIGRASI KELAS I KHUSUS TPI SOEKARNO HATTA	(112.119.163,00)	Koreksi pencatatan pendapatan sewa diterima dimuka ATM BNI Tahun 2020 yang ringkas kontrak baru terselesaikan di tahun 2021
KANTOR IMIGRASI KELAS III KERINCI	700.000,00	pangakuan pendapatan yang masih harus di terima atas sewa kantin 2019 Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Kerinci yang lama (sanggaran Agung)
KANTOR IMIGRASI KARAWANG	(20.283,00)	Penyisihan Piutang Lainnya yang seharusnya di jurnal di Tahun Anggaran 2021
KANTOR IMIGRASI KELAS I KHUSUS TPI SOEKARNO HATTA	(1.800.000.000,00)	Koreksi Piutang Biaya Beban Alat Angkut yang belum tercatat (periode perolehan Piutang 2014 sd 2017) yang telah dilimpahkan ke KPKNL
KANTOR IMIGRASI KARAWANG	4.056.640,00	Jurnal Pengakuan Piutang Lainnya terhadap Koreksi Lainnya untuk Pengembalian Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2019-2020 yang dilunasi di Tahun Anggaran 2021



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Lampiran Catatan Atas Laporan Keuangan
Per 31 Desember Tahun Anggaran 2021 (*Audited*)
Dengan Angka Perbandingan 31 Desember Tahun Anggaran 2020
(dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

URAIAN SATKER	NILAI KOREKSI	KETERANGAN
KANTOR IMIGRASI SUKABUMI	5.523.406,00	Pembayaran pengembalian belanja barang (BBM Kendaraan Dinas) atas audit tusi pada Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Sukabumi TA.2019 oleh Inspektorat Jenderal
KANTOR IMIGRASI KELAS I KHUSUS TPI SOEKARNO HATTA	1.800.000.000,00	Penyisihan Piutang PNPB Biaya Beban Alat Angkut yang belum tercatat (periode perolehan Piutang 2014 sd 2017) dengan Katagori Macet (100%)
KANTOR IMIGRASI KUPANG	22.707.250,00	Pelunasan Temuan Irjen Tahun 2020 untuk belanja Modal Tahun 2019
KANTOR IMIGRASI KELAS III LABUAN BAJO KABUPATEN MANGGARAI BARAT	15.000.000,00	pelunasan Temuan Irjen Tahun 2020 untuk belanja Barang Tahun 2019
SUB TOTAL	3.939.406.594,00	
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL		
DITJEN HAK ATAS KEKAYAAN INTELEK TUAL	22.443.466.027,00	Jurnal Koreksi atas Beban penyisihan yang bernilai Negatif (sisi Kredit)
DITJEN HAK ATAS KEKAYAAN INTELEK TUAL	(15.807.931.600,00)	Pengesahan Hibah Langsung Luar Negeri TAYL berupa Jasa yang diterima oleh Ditjen KI berdasarkan perjanjian antara SECO dan Ditjen KI pada 29 November 2012 dalam proyek "The Indonesian-Swiss Intellectual Property Project" dan diserahterimakan melalui Berita Acara Serah Terima Nomor HKI.1-KU.03.02-04 tanggal 5 Februari 2020
DITJEN HAK ATAS KEKAYAAN INTELEK TUAL	(4.992.288.455,00)	Pengesahan Hibah Langsung Luar Negeri TAYL berupa Jasa yang diterima oleh Ditjen KI berdasarkan perjanjian antara SECO dan Ditjen KI pada 2 Mei 2017 dalam proyek "The Indonesian-Swiss Intellectual Property Project Phase II" dan diserahterimakan melalui Berita Acara Serah Terima Nomor HKI.1-KU.03.02-05 tanggal 5 Februari 2020
DITJEN HAK ATAS KEKAYAAN INTELEK TUAL	(30.225.000,00)	Pembatalan status lunas atas ID 12606 yang telah dicatat lunas pada TA 2020
DITJEN HAK ATAS KEKAYAAN INTELEK TUAL	10.140.000,00	Koreksi atas saldo awal penyisihan Piutang Paten BDH ID1252 yang telah dibayar 2019 namun belum dilakukan mutasi kurang pada tahun bersangkutan
DITJEN HAK ATAS KEKAYAAN INTELEK TUAL	96.975.000,00	Koreksi atas saldo awal penyisihan Piutang Paten PAPS ID5508 dari semula Rp113.575.000 menjadi Rp16.600.000
DITJEN HAK ATAS KEKAYAAN INTELEK TUAL	12.150.000,00	Koreksi atas Penyisihan Piutang PAPS lunas pada 2 ID yaitu ID20733 berdasarkan surat Direktur Paten, DTLST dan Rahasia Dagang Nomor HKI.3HI.05.03.03AR.20733/2021 dan ID37976 berdasarkan surat Direktur Paten, DTLST dan Rahasia Dagang Nomor HKI.3HI.05.03.03AR.37976/ 2021
DITJEN HAK ATAS KEKAYAAN INTELEK TUAL	(96.975.000,00)	Koreksi atas saldo awal Piutang Paten PAPS ID5508 dari semula Rp113.575.000 menjadi Rp16.600.000
DITJEN HAK ATAS KEKAYAAN INTELEK TUAL	(12.150.000,00)	Koreksi yang menjadikan saldo piutang PAPS lunas pada 2 ID yaitu ID20733 berdasarkan surat Direktur Paten, DTLST dan Rahasia Dagang Nomor HKI.3HI.05.03.03AR.20733/2021 dan ID37976 berdasarkan surat Direktur Paten, DTLST dan Rahasia Dagang Nomor HKI.3HI.05.03.03AR.37976/ 2021
DITJEN HAK ATAS KEKAYAAN INTELEK TUAL	(10.140.000,00)	Koreksi atas saldo awal Piutang Paten BDH ID1252 yang telah dibayar 2019 namun belum dilakukan mutasi kurang pada tahun bersangkutan
DITJEN HAK ATAS KEKAYAAN INTELEK TUAL	30.225.000,00	Pembatalan status lunas atas ID 12606 yang telah dicatat lunas pada TA 2020



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Lampiran Catatan Atas Laporan Keuangan
Per 31 Desember Tahun Anggaran 2021 (*Audited*)
Dengan Angka Perbandingan 31 Desember Tahun Anggaran 2020
(dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

URAIAN SATKER	NILAI KOREKSI	KETERANGAN
DITJEN HAK ATAS KEKAYAAN INTELEK TUAL	(39.908.195.000,00)	Koreksi Pengakuan Saldo Awal Pendapatan Diterima Di Muka TA 2021 atas Kode Billing TA 2020 yang belum digunakan dalam pelayanan hingga 31 Desember 2020
DITJEN HAK ATAS KEKAYAAN INTELEK TUAL	2.721.264,00	Koreksi Pengakuan Saldo Awal Pendapatan Diterima Di Muka TA 2021 atas Kode Billing TA 2020 yang belum digunakan dalam pelayanan hingga 31 Desember 2020
SUB TOTAL	(38.262.227.764,00)	
DITJEN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN		
DITJEN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	(2.261.013.402,00)	Hibah TA 2020 yang baru disahkan Tahun 2021 dikarenakan penyelesaian administrasi yang terhambat oleh pandemi covid-19 sehingga baru bisa diselesaikan
SUB TOTAL	(2.261.013.402,00)	
BPSDM		
POLITEKNIK ILMU PEMASYARAKATAN	275.000,00	Beban penyisihan piutang sewa STIH LITIGASI
SUB TOTAL	275.000,00	
GRAND TOTAL	(44.595.982.498,00)	



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
 Lampiran Catatan Atas Laporan Keuangan
 Per 31 Desember Tahun Anggaran 2021 (*Unaudited*)
 Dengan Angka Perbandingan 31 Desember Tahun Anggaran 2020
 (dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Rincian Selisih Transfer Keluar dan Transfer Masuk per 31 Desember 2021

URAIAN	TRANSFER KELUAR DARI BA 013	TRANSFER MASUK TUJUAN KE BA 013	TRANSFER KELUAR TUJUAN KE NON BA 013	TRANSFER MASUK DARI NON BA 013	TOTAL SELISIH (E-REKON&LK)	SELISIH TRANSFER DI NERACA PERCOBAAN AKRUAL	KETERANGAN
Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak	940.000.000,00	940.000.000,00			0,00	0,00	-
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang PNB	(497.000.000,00)	(497.000.000,00)			0,00	0,00	-
Barang Konsumsi	291.602.447.955,00	266.809.685.208,00	29.207.365.000,00	4.414.602.253,00	0,00	24.792.762.747,00	Selisih disebabkan adanya Transfer Keluar dan Transfer Masuk Barang Konsumsi berupa dokumen keimigrasian dari / untuk Satker Pusat Sekretariat Jenderal Kementerian Luar Negeri (011.01.403247) Non BA 013
Bahan untuk Pemeliharaan Tanah	6.781.775.000,00	6.781.775.000,00			0,00	0,00	-
	178.137.191.754,00	174.071.665.278,00	4.065.526.476,00		0,00	4.065.526.476,00	Selisih disebabkan adanya transfer ke non BA 013, yaitu dari Kanim Sambas ke Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah III Propinsi Kalimantan Barat di bawah Kementerian PUPR yang merupakan transfer keluar sebagian Tanah Kanim Sambas yang terkena proyek pembangunan jalan nasional serta transfer tanah dari Kanim Bogor ke KPKNL Bogor
Peralatan dan Mesin	456.767.735.753,00	457.846.166.605,00		1.078.430.852,00	0,00	(1.078.430.852,00)	



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
 Lampiran Catatan Atas Laporan Keuangan
 Per 31 Desember Tahun Anggaran 2021 (*Unaudited*)
 Dengan Angka Perbandingan 31 Desember Tahun Anggaran 2020
 (dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

URAIAN	TRANSFER KELUAR DARI BA 013	TRANSFER MASUK TUJUAN KE BA 013	TRANSFER KELUAR TUJUAN KE NON BA 013	TRANSFER MASUK DARI NON BA 013	TOTAL SELISIH (E-REKON&LK)	SELISIH TRANSFER DI NERACA PERCOBAAN AKRUAL	KETERANGAN
Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(40.862.480.383,00)	(41.324.742.212,00)		(462.261.829,00)	0,00	462.261.829,00	Selisih disebabkan adanya transfer masuk dari non BA 013 yaitu dari: 1. KEJAKSAAN NEGERI KOTA TANGERANG ke Rupbasan Jakarta; 2. SNVT PENYEDIAAN PERUMAHAN PROVINSI JAWA TENGAH ke LP Batu; 3. PERPUSTAKAAN NASIONAL RI JAKARTA ke Ditjen Pemasyarakatan
Gedung dan Bangunan	32.496.912.286,00	119.909.796.151,00	2.513.897.100,00	79.690.895.874,00	(10.235.885.091,00)	(87.412.883.865,00)	Selisih disebabkan: A. transfer keluar ke non BA 013 sebesar Rp2.513.897.100,00 dan akumulasi penyusutannya sebesar (Rp240.208.901,00) yaitu ke: 1. SEKRETARIAT KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA dari Setjen Kemenkumham; 2. KPKNL Bogor dari Kanim Bogor. B. transfer masuk dari non BA 013 sebesar Rp79.690.895.874,00 akumulasi penyusutannya sebesar (Rp5.009.414.763,00) yaitu dari: 1. SNVT PENYEDIAAN PERUMAHAN PROVINSI JAWA TENGAH ke LP Batu;
Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(2.588.753.787,00)	(7.357.959.649,00)	(240.208.901,00)	(5.009.414.763,00)	0,00	4.769.205.862,00	



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
 Lampiran Catatan Atas Laporan Keuangan
 Per 31 Desember Tahun Anggaran 2021 (*Unaudited*)
 Dengan Angka Perbandingan 31 Desember Tahun Anggaran 2020
 (dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

URAIAN	TRANSFER KELUAR DARI BA 013	TRANSFER MASUK TUJUAN KE BA 013	TRANSFER KELUAR TUJUAN KE NON BA 013	TRANSFER MASUK DARI NON BA 013	TOTAL SELISIH (E-REKON&LK)	SELISIH TRANSFER DI NERACA PERCOBAAN AKRUAL	KETERANGAN
							2. BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN JAWA I ke LP Kerobokan, LP Batu, LP Medan, Kanim Atambua, Kanim Batam dan Kanim Denpasar. C. aset tetap renovasi termasuk kedalam kelompok aset tetap lainnya, dimana perlakuan penatausahaan untuk realisasi pengembangan berupa gedung bangunan yang dibebankan bukan dari belanja satker itu sendiri. Sehingga di satker pemilik anggaran dicatat sebagai perolehan aset tetap renovasi (aset tetap lainnya) dan pada satker pemilik aset dicatat sebagai penerimaan aset tetap renovasi (gedung bangunan), sebesar Rp10.235.885.091,00 terdapat di: 1. Ditjen AHU ke Ditjen Imigrasi, BHP Surabaya dan BHP Semarang; 2. Setjen ke Setneg; 3. Ditjen PAS ke LP Pasir Putih, LP Batu, LPP Tangerang 4. Itjen ke Ditjen Imigrasi; 5. Ditjen KI ke BPSDM dan Ditjen Imigrasi.
Jalan dan Jembatan		139.000.000,00		139.000.000,00	0,00	(139.000.000,00)	Selisih disebabkan adanya transfer masuk dari non BA 013



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
 Lampiran Catatan Atas Laporan Keuangan
 Per 31 Desember Tahun Anggaran 2021 (*Unaudited*)
 Dengan Angka Perbandingan 31 Desember Tahun Anggaran 2020
 (dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

URAIAN	TRANSFER KELUAR DARI BA 013	TRANSFER MASUK TUJUAN KE BA 013	TRANSFER KELUAR TUJUAN KE NON BA 013	TRANSFER MASUK DARI NON BA 013	TOTAL SELISIH (E-REKON&LK)	SELISIH TRANSFER DI NERACA PERCOBAAN AKRUAL	KETERANGAN
Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan		(41.700.000,00)		(41.700.000,00)	0,00	41.700.000,00	(SNVT PENYEDIAAN PERUMAHAN PROVINSI JAWA TENGAH) ke LP Batu
Aset Tetap Renovasi	10.235.885.091,00	2.190.848.550,00	0,00	2.190.848.550,00	10.235.885.091,00	8.045.036.541,00	Selisih disebabkan: A. transfer masuk dari non BA 013 (PELAKSANAAN PRASARANA PERMUKIMAN WILAYAH II PROVINSI PAPUA) ke LP Abepura sebesar Rp2.190.848.550,00 B. aset tetap renovasi termasuk kedalam kelompok aset tetap lainnya, dimana perlakuan penatausahaan untuk realisasi pengembangan berupa gedung bangunan yang dibebankan bukan dari belanja satker itu sendiri. Sehingga di satker pemilik anggaran dicatat sebagai perolehan aset tetap renovasi (aset tetap lainnya) dan pada satker pemilik aset dicatat sebagai penerimaan aset tetap renovasi (gedung bangunan), sebesar Rp10.235.885.091,00 terdapat di: 1. Ditjen AHU ke Ditjen Imigrasi, BHP Surabaya dan BHP Semarang; 2. Setjen ke Setneg; 3. Ditjen PAS ke LP Pasir Putih, LP Batu, LPP Tangerang 4. Itjen ke Ditjen Imigrasi;



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
 Lampiran Catatan Atas Laporan Keuangan
 Per 31 Desember Tahun Anggaran 2021 (*Unaudited*)
 Dengan Angka Perbandingan 31 Desember Tahun Anggaran 2020
 (dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

URAIAN	TRANSFER KELUAR DARI BA 013	TRANSFER MASUK TUJUAN KE BA 013	TRANSFER KELUAR TUJUAN KE NON BA 013	TRANSFER MASUK DARI NON BA 013	TOTAL SELISIH (E-REKON&LK)	SELISIH TRANSFER DI NERACA PERCOBAAN AKRUAL	KETERANGAN
							5. Ditjen KI ke BPSDM dan Ditjen Imigrasi.
Aset Tetap Lainnya	3.754.763.185,00	6.887.671.185,00		3.132.908.000,00	0,00	-3.132.908.000,00	Selisih disebabkan adanya transfer masuk dari non BA 013 (PERPUSTAKAAN NASIONAL RI JAKARTA) ke Ditjen Pemasyarakatan
Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi	392.431.000,00	392.431.000,00			0,00	0,00	-
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi	-1.993.655,00	-1.993.655,00			0,00	0,00	-
Software	254.128.014,00	254.128.014,00			0,00	0,00	-
Akumulasi Amortisasi Software	-137.487.316,00	-137.487.316,00			0,00	0,00	-
Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar	-618.950.121,00	-618.950.121,00			0,00	0,00	-



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Lampiran Catatan Atas Laporan Keuangan
Per 31 Desember Tahun Anggaran 2021 (*Unaudited*)
Dengan Angka Perbandingan 31 Desember Tahun Anggaran 2020
(dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Rincian Pengesahan Hibah Langsung Per 31 Desember 2021

NO	SATKER PENERIMA	DONOR	NOMOR BAST	BENTUK	KET	NILAI HIBAH
SEKRETARIAT JENDERAL						84.515.696.802,00
1	SEKRETARIAT JENDERAL (PUSAT)	USAID	497-AA-030	Jasa	Hibah USAID Program Madani 281	14.008.408.960,00
		USAID	497-AA-030	Jasa	Hibah USAID Program Cegah 293	6.071.285.675,00
		USAID	497-AA-030	Jasa	Hibah USAID Program Maju 280	8.838.786.175,00
		USAID	497-AA-030	Jasa	Hibah USAID Program Harmoni 257	10.811.867.778,00
		USAID	497-AA-030	Jasa	Hibah USAID Program Maju 225	24.564.466.120,00
		FNS	006/Kemenkumha m/BAST/MSP- 3/08/2021	Jasa	Hibah FNS Program Penguatan Rule Of Law	3.655.435.387,00
2	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM KEPULAUAN RIAU	PT BNI (Persero) Tbk Cabang Tanjungpinang	TPN/5/288 A, W.32.PB.06.03- 201	Barang	Gedung Pos Jaga Permanen	40.000.000,00
3	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PALEMBANG	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) TBK	W6.KU.03.02 - 0123 Tanggal 13 Juli 2021	Barang	Peralatan dan mesin, infocus, mesin penghitung uang dan tv	45.130.000,00
4	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BANJARMASIN	Pemerintah Kabupaten Balangan (Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	030/07/BASTHIBA H-II/2021 Tanggal 30 Mei 2021	Barang	Tanah untuk pembangunan Lapas Balangan	1.196.400.000,00
		PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk.	3730- KC/LOG/X/2021 Tanggal 07/10/2021	Barang	MOBIL AMBULANCE LAPAS BANJARBARU	265.000.000,00
5	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SAMARINDA	Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara	No. 032/868/TU- PIMP/BKAD Tanggal 13 Juli 2021	Barang	Tanah Untuk Pembangunan Lapas	10.355.015.607,00
6	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAMBI	Bank BRI Cabang Jambi	W.5-PB.06.03- 8/W.5.PB.06.03-9	Barang	CCTV	41.800.000,00
		Bank BRI Cabang Jambi	W.5-PB.06.03- 8/W.5.PB.06.03- 10	Barang	Instalasi CCTV	16.940.000,00
		Pemerintah Kabupaten Sorolangun	BAST No.028/233/DPUP R/2021	Barang	Renovasi Bangunan	701.877.000,00
7	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAWA TENGAH	Bank BJB KC Semarang	0013/SEM- KON/BA/2021	Barang	alat music modern/ band drum yamaha	6.399.000,00
8	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SURABAYA	PT BNI (Persero) Kantor Cabang Surabaya	SBY/20.05/5669	Barang	Peralatan dan Mesin Alat Elektronik Teknologi Informasi	140.229.800,00



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Lampiran Catatan Atas Laporan Keuangan
Per 31 Desember Tahun Anggaran 2021 (*Unaudited*)
Dengan Angka Perbandingan 31 Desember Tahun Anggaran 2020
(dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NO	SATKER PENERIMA	DONOR	NOMOR BAST	BENTUK	KET	NILAI HIBAH
				Barang	Gedung dan Bangunan Renov	121.775.500,00
9	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM YOGYAKARTA	Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta	430/100434 Tanggal 15 Desember 2021	Barang	Gamelan	486.879.800,00
10	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PROPINSI BANTEN	BRI	B3097/KC.XV/OP S/10/2021	Barang	Pekerjaan Pembuatan Interior Ruang Layanan Kanwil Banten	174.000.000,00
		BJB	077/KBN-MDI/2021	Barang	Pekerjaan Pembuatan Ruang Layanan Kanwil Banten	150.000.000,00
11	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PROPINSI GORONTALO	Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo Utara	900/BK-GORUT/BAST/28 9.b/IX/2021	Barang	Tanah	2.824.000.000,00
DITJEN PEMASYARAKATAN						80.548.787.798,00
12	BALAI PEMASYARAKATAN KELAS I JAKARTA SELATAN	BANK SYARIAH INDONESIA	MOU No. 23/0044-3-068 Tgl 4/1/2021 dan BAST No. 2YEZJNYA 2BU5ED9A Tgl 18/1/2021	Barang	HIBAH LANGSUNG BARANG TA 2021 BERUPA INFOCUS	6.925.300,00
		BANK SYARIAH INDONESIA	MOU No. 01/0186-3/068 Tgl 15/4/2021 dan BAST No. 01/0186-3/068 Tgl 15/4/2021	Barang	HIBAH LANGSUNG BARANG TA 2021 BERUPA MEJA, KURSI, DLL	5.171.600,00
13	BALAI PEMASYARAKATAN MUARA BUNGO	Pemkab Tebo	MOU No. 028/13/NPHD/BA KEUDA-VI/2021 dan No. W.5.PAS.11.PB.0 4.01-1013 Tgl 27/7/2021 serta BAST No. 082/12/BAST/BAK EUDA-VI/2021 dan W.5.PAS.11.PB.0 4.01-1015 Tgl 27/7/2021	Barang	Tanah seluas 6.000 m2 di Jl Lintas Tebo-Bungo KM.12 Kec. Tebo Tengah, Kab. Tebo	66.146.892,00
14	BAPAS KELAS II NUSAKAMBANGAN	Marsito	BAST No. W13.PAS62.UM.0 2.02-7208 Tgl 18/11/2021	Barang	Hibah barang: 1 inui AC split 1 PK Merk Midea dan 1 unit AC Split 1 PK Merk Cawang	7.500.000,00
15	DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN	USAID Harmoni Indonesia	BAST No. 260/USAID-INA/BAST-Service/DRG Tgl 25/2/2021	Jasa	Implementation development objective 1 (DO1): democratic governance strengthened	166.754.664,00
		Government of the Commonwealth of Australia	BAST No. PAS1.KU.03.02-631 Tgl 3/5/2021	Jasa	APJ2 strengthening prison reform in Indonesia	12.826.106.066,00



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Lampiran Catatan Atas Laporan Keuangan
Per 31 Desember Tahun Anggaran 2021 (*Unaudited*)
Dengan Angka Perbandingan 31 Desember Tahun Anggaran 2020
(dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NO	SATKER PENERIMA	DONOR	NOMOR BAST	BENTUK	KET	NILAI HIBAH
		Government of the Commonwealth of Australia	BAST No. PAS1.KU.03.02-632 Tgl 3/5/2021	Jasa	APJ2 strengthening prison reform in Indonesia	8.358.077.939,00
		Australian Departement of Home Affairs	BAST Tgl. 24/6/2021	Barang	45 unit polycom system video converence dan instalasi	2.626.800.000,00
		Search For Commond Ground	MOU Tgl 9/8/2018 dan BAST No. 015/SEARCH/AD M/VIII/2021 Tgl 27/8/2021	Jasa	kegiatan pelatihan, lokakarya, dll	1.809.522.347,00
		International Committee of The Red Cross (ICRC)	BAST No. DJA 21/398 NMP/BCH dan PAS1.KU.03.02-1215 Tgl 5/10/2021	Barang	Termometer contacless, poster, handsanitizer refil dan pompa dan pegangan, baju APD, masker pakaian, pembalut wanita, sepatu boots, dll	23.438.800.753,00
		Government of the Commonwealth of Australia	BAST No. PAS1.KU.03.02-2580 Tgl 29/11/2021	Jasa	APJ2 strengthening prison reform in Indonesia	10.768.753.439,00
		USDOJ-ICITAP	No. Ref. USDOJ-ICITAP/X-22/002 Tgl 10/10/2021	Barang	20 set helm kendali huru hara dengan pelindung wajah; 20 set tameng huru-hara; 20 set tongkat kendali huru-hara; 20 set pelindung tubuh kendali huru-hara; 20 set masker gas dengan tabung filter; dan 20 set sarung tangan taktis	272.448.000,00
		USDOJ-ICITAP	No. Ref. USDOJ-ICITAP/X-22/003 Tgl 10/10/2021	Barang	5 buah borgol tangan; 5 buah rantai pengaman; dan 5 buah borgol kaki	5.251.460,00
16	LAPAS KELAS IIA BONTANG	Pemkot Bontang	BAST No. 600/50/DPUPR.01 Tgl 2/3/2021	Barang	Pembangunan pagar Lapas Bontang, Rehabilitasi kantor Lapas Bontang	431.437.994,00
17	LAPAS KELAS IIB SOROLANGUN	Pemkab Sorolangun	MOU No. 900/81.A/BPKAD/2021 dan No. W5-PB.06.03-03 Tgl 17/3/2021 dan BAST No. 900/95/BPKAD/2021 Tgl 23/3/2021	Barang	Tanah dan Bangunan di Jl. Pemasarakatan RT 22 Kelurahan Aur Gading, Sorolangun	576.410.000,00



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Lampiran Catatan Atas Laporan Keuangan
Per 31 Desember Tahun Anggaran 2021 (*Unaudited*)
Dengan Angka Perbandingan 31 Desember Tahun Anggaran 2020
(dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NO	SATKER PENERIMA	DONOR	NOMOR BAST	BENTUK	KET	NILAI HIBAH
18	LAPAS KELAS IIA TANGERANG	PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. CABANG TANGERANG	MOU No. B.133/KC- XV/RTL/08/2020 DAN W12.PAS.PAS.4.P B.06.04-068 Tgl 24/2/2021 dan BAST No. B.133/KC- XV/RTL/08/2020 Tgl 24/2/2021	Barang	RUANGAN KUNJUNGAN SEMI PERMANEN	50.000.000,00
		MAJELIS BUDDHAYANA INDONESIA	MOU No. 091A/PD MBI BANTEN/X/2021 DAN W12.LF.PB.06.04- 099 Tgl 26/6/2021 dan BAST No. 091B/PD MBI BANTEN/X/2021 Tgl. 26/6/2021	Barang	VIHARA	750.000.000,00
19	LAPAS KELAS IIA TARAKAN	Pemkot Tarakan	NPHD No. 030/BPKAD/BA/60 5/2021 dan No. W.18.PAS.e.PB.0 6.03-1891 Tgl 19/7/2021 dan BAST No. No. 030/BPKAD/BA/60 6/2021 dan No. W.18.PAS.e.PB.0 6.03-1892 Tgl 19/7/2021	Barang	Hibah bangunan gedung kantor permanen dengan luas bangunan 240,24 m2	4.498.082.271,00
20	LAPAS KELAS IIA TENGGARONG	Pemkab Kutai Kartanegara	BAST No. 10/BAST-HK/2021 Tgl 30/9/2021	Barang	Bangunan Gedung Kantor permanen dengan luas 92,46 m2 di kec. Tenggarong	1.808.205.500,00
21	LAPAS KELAS IIB BANJAR	PT BRI Tbk Kanca Banjar	BAST No.W11.PAS.PAS .25.PB.06.03- 283A Tgl 18/2/2021	Barang	pekerjaan renovasi ruang pelayanan publik Lapas Banjar 1 paket serta pengadaan perlengkapanny a (meja pendaftaran 1 unit, meja informasi 1 unit, meja laktasi 1 unit, kursi tunggu 2 unit, perlengkapan mini playground 1 paket, dan 2 unit AC	100.000.000,00
		PT BRI Tbk Kanca Banjar	BAST No. W11.PAS.PAS.25. PB.06.03-1459 Tgl 18/8/2021	Barang	Barang: pompa air, projector, dan screen projector	62.173.500,00



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Lampiran Catatan Atas Laporan Keuangan
Per 31 Desember Tahun Anggaran 2021 (*Unaudited*)
Dengan Angka Perbandingan 31 Desember Tahun Anggaran 2020
(dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NO	SATKER PENERIMA	DONOR	NOMOR BAST	BENTUK	KET	NILAI HIBAH
		Pemkot Banjar	NPHD No. No. 600/438-C DPUPRPKP dan No. W.11.PAS.PAS.25 -HH.05.02-1209 Tgl 24/8/2020 dan BAST No. 028/39a BAST/DPUPRPKP /2021 Tgl 1/7/2021	Barang	Hibah pembuatan sumur bor	246.667.000,00
22	LAPAS KELAS IIB BLANGKEJEREN	Pemkab Gayo Lues	NPHD No. 640/979.6/NPHD/ 2021 dan No. W.1.PAS.22.PB.0 2.09-817 Tgl 16/8/2021 dan BAST No. 032/1207/BAST/2 021 Tgl 3/1/2021	Barang	Hibah berupa bangunan yaitu Pembangunan Pagar Lapas Kelas IIB Blangkejeren beserta Dokumen Perencanaan dan Pengawasan Barang	86.755.000,00
23	LAPAS KELAS III PANGURURAN	Pemkab Samosir	MOU No. 01 TAHUN 2021 dan No. W1.E25.PB.06.03- 330 Tgl 22/4/2021 dan BAST No. 430/272/BAST/AM T/DISBUDPORA/I V/2021 Tgl 22/4/2021	Barang	Alat musik tradisional: 1 set tagading bergorga; 2 unit hasepi dengan ornamen; 1 unit garantung; 5 unit seruling; 1 unit sarune bolon; 1 unit sarune etek; dan 1 set Ogung	30.525.000,00
24	LAPAS KELAS III PARIGI	Pemkab Parigi Moutong	BAST No. 036/325/BPKAD Tgl 26/2/2021 dan NPHD No. 036/324/BPKAD Tgl 25/2/2021	Barang	Mobil Pick up merek Toyota Hilux 2.5E Double Cabin 4x4E M/T	364.300.000,00
25	LAPAS KELAS III RANGKAS BITUNG	Pemkab Lebak	523/65- Diskan/NPHD/202 1 dan W12.PAS.PAS.9.P B.06.03-114 Tgl 16/6/2021 serta BAST No. 523/64- Bud Tgl 16/6/2021	Barang	Benih ikan lele ukuran 7-9 cm 9.576 ekor; Pakan ikan -2 grower (pellet apung 2 mm, protein min 31%) 100 kg; dan pakan ikan - 3 finisher (pellet apung 3mm, protein min 31%) 700 kg	15.241.000,00
26	LAPAS NARKOTIKA KELAS IIB RUMBAI	PT. Bank Riau Kepri Pekanbaru	MOU No. W4.PAS.21.PB.05 .01-1859 Tgl 19/10/2021 dan BAST No. W4.PAS.21.PB.05 .01-1860 Tgl 19/10/2021	Barang	Masjid dan Halaman Parkir	1.372.250.000,00



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Lampiran Catatan Atas Laporan Keuangan
Per 31 Desember Tahun Anggaran 2021 (*Unaudited*)
Dengan Angka Perbandingan 31 Desember Tahun Anggaran 2020
(dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NO	SATKER PENERIMA	DONOR	NOMOR BAST	BENTUK	KET	NILAI HIBAH
27	LAPAS PEREMPUAN KELAS IIA JAKARTA	PT Pegadaian Persero	MOU No. W.10.PAS.PAS.18 .TI.04.02-154 dan No. 287- S/00026.02/2021 Tgl 30/4/2021 serta BAST No. 286- S/00026.02/2021 Tgl 30/4/2021	Barang	Barang: 5 unit laptop Asus	26.750.000,00
28	LAPAS PEREMPUAN KELAS IIA PALANGKARAYA	PT Bank Kalteng	MOU No. DPCS.05/PH- 1060/IV-21 dan No. W.17.PAS.PAS.2. KU.03.02-236 Tgl 23/4/2021 serta BAST Tgl 23/4/2021	Barang	1 unit motor viar typeNEW Karya 150 L (bak 1,8 m x 1,25 m)	33.720.000,00
		Pemkot Palangka Raya	MOU No. 900/179/Bid.IV/BP KAD/II/2021 Tgl 4/2/2021 dan BAST No. 900/180/Bid.IV/BP KAD/II/2021 Tgl 4/2/2021	Barang	Tanah seluas 121.800 m2 di Jl. Tjilik Riwut KM. 40 Kelurahan Tangkiling, Kec Bukit Batu, Palangka Raya	834.511.730,00
29	LAPAS PEREMPUAN KELAS IIA PONTIANAK	GWA Silaturahmi dan Tadarus Alumni SMA 2 N Pontianak	BAST No. GWA/06/III/2021 Tgl 25/3/2021 dan MOU No. GWA/05/III/2021 Tgl 24/3/2021	Barang	Bangunan Masjid Shilaturrahim dengan luas 121 m2	341.100.000,00
		GWA Silaturahmi dan Tadarus Alumni SMA 2 N Pontianak	BAST No. GWA/07/III/2021 Tgl 25/3/2021 dan MOU No. GWA/08/III/2021 Tgl 24/3/2021	Barang	4 buah corong; 1 buah ampli; 4 buah speaker; 1 buah stand mic; dan 3 buah microphone.	14.900.000,00
		Yayasan Indonesia Bangkit dan bersinar Cab-kalbar	MOU No. 002/NPH/RSM- PTK/VII/2021 dan No. W.16.PAS.R.06.03 -1012 Tgl 17/9/2021 serta BAST Nomor 002/BAST/RSM- PTK/VII/2021 Tgl 29/10/2021	Barang	1 unit Laptape dan 1 unit Proyektor	6.850.000,00
30	LAPAS PEREMPUAN KELAS IIB JAMBI	Pemkab Muaro Jambi	MOU No. 10/CKPR- GD/2020 Tgl 20/9/2020 dan BAST No. 600/01.8/BA- STBG- DPUPR/2021 Tgl 4/1/2021	Barang	Bangunan gedung: Pembangunan Turap LP Perempuan	484.756.000,00
31	LAPAS PEREMPUAN KELAS IIB YOGYAKARTA	Vihara Cetya Green Valley	MOU No. W14.PAS.PAS.14- PB.06.03-2466 Tgl 24/10/2021 dan BAST No. W14.PAS.PAS14-	Barang	Gazebo Vihara	30.000.000,00



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Lampiran Catatan Atas Laporan Keuangan
Per 31 Desember Tahun Anggaran 2021 (*Unaudited*)
Dengan Angka Perbandingan 31 Desember Tahun Anggaran 2020
(dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NO	SATKER PENERIMA	DONOR	NOMOR BAST	BENTUK	KET	NILAI HIBAH
			PB.06.03-2465 Tgl 4/10/2021			
32	LAPAS TULUNGAGUNG	Pemkab Tulungagung	NPHD No. 640/28/NPHD/BR G/2021 dan No. W.15.PAS.PAS.14 - 910.PB.06.03/202 1 Tgl 1/7/2021 dan BAST No. 640/37/BAST/BRG /2021 dan No. W.15.PAS.PAS.14 -PB.06.03-1210 Tgl 1/9/2021	Barang	Rehabilitasi bangunan Lapas Tulungagung; pekerjaan persiapan dan pekerjaan pasangan (pavingstone)	89.455.000,00
33	LAPAS KELAS IIA BANJARMASIN	KOPERASI PEGAWAI NEGERI "PENGAYOMAN"	BAST No. W.19.PAS.1.KP.1 4.03-785 Tgl 3/6/2021	Barang	GEDUNG OLAHRAGA TERTUTUP SEMI PERMANEN	50.000.000,00
34	LEMBAGA PEMASYARAKATAN BATU	BRI Cabang Cilacap	NPHD No. B.5835-KC- VII/LOG/09/2021 Tgl 8/9/2021 dan BAST No. B.4692- VII/KC/LOG/09/20 21 Tgl 15/9/2021	Barang	1 Unit Ambulance	720.000.000,00
35	LEMBAGA PEMASYARAKATAN CIBINONG	Koperasi Pegawai Pengayoman Lapas Cibirong	MOU No. W11.PAS.PAS.11. PB.06.03-3125 dan No. KOP/Lap Cib/VIII/2021/23 Tgl 5/8/2021 serta BAST No. W11.PAS.PAS.11. PB.06.03-3126 Tgl 5/8/2021	Barang	1 unit mesin pencacah plastik dan 1 unit alat cetak sablon	55.405.000,00
		Koperasi Pegawai Pengayoman Lapas Cibirong	MOU No. W11.PAS.PAS.11. PB.06.03-4249 dan No. KOP.Lap Cib/IX/2021/25 Tgl 21/10/2021 serta BAST No. W11.PAS.PAS.11. PB.06.03-4250 Tgl 21/10/2021	Barang	9 unit alat pemadam api ringan (APAR)	6.693.750,00
36	LEMBAGA PEMASYARAKATAN KOTA AGUNG	Pemkab Tanggamus	NPHD No. 024/4418/14/2021 dan W9.PAS7.PB.05.0 1-1179 Tgl 27/9/2021 dan BAST No. 024/4416/14/2021 Tgl 27/9/2021	Barang	1 unit kendaraan dinas AMBULANS jenis minibus SUZUKI model APV GL AB MT tahun pembuatan dan perakitan 2021	240.000.000,00
37	LEMBAGA PEMASYARAKATAN LABUHAN RUKU	PT. ANUGERAH VATA ABADI	NPHD No. 001/2021 Tgl 22/11/2021 dan BAST No. 002/2021 Tgl 22/11/2021	Barang	Hibah Barang berupa Bangunan Pos Wasrik dan Bangunan Pos ATM	50.000.000,00



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Lampiran Catatan Atas Laporan Keuangan
Per 31 Desember Tahun Anggaran 2021 (*Unaudited*)
Dengan Angka Perbandingan 31 Desember Tahun Anggaran 2020
(dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NO	SATKER PENERIMA	DONOR	NOMOR BAST	BENTUK	KET	NILAI HIBAH
38	LEMBAGA PEMASYARAKATAN LHOK SEUMAWE	Walikota Lhokseumawe	MOU No. 032/23/2021 dan No. W1/PAS.2.HM.05. 02-09 Tahun 2021 Tgl 2/11/2021	Barang	700 buah kain sarung merk wadimor/gold	118.300.000,00
39	LEMBAGA PEMASYARAKATAN METRO	BANK BRI CABANG METRO	NPHD No. W9.PAS.PAS.5.P B.06.03-1596 Tgl 26/8/2021 dan BAST No. W9.PAS.5.PB.06. 03-1614 Tgl. 26/8/2021	Barang	1 unit laptop merk acer, 1 unit laptop merk asus, dan 1 unit AC 1 PK merk AUX	15.550.000,00
40	LEMBAGA PEMASYARAKATAN NARKOTIKA BANDAR LAMPUNG	KOPERASI PEGAWAI REPUBLIK NDONESIA (KPRI) LEMBAGA PEMASYARAKA TAN NARKOTIKA BANDAR LAMPUNG	NPHD No. KOP.LPN/14/12/2 021 Tgl. 13/12/2021 dan BAST No. 13/12/2021	Barang	HIBAH LS BARANG BERUPA BANGUNAN GUEST HOUSE	145.000.000,00
41	LEMBAGA PEMASYARAKATAN PATI	BRI Cabang Pati	NPHD No. B3883/KC- VIII/09/2021 Tgl 7/12/2021 dan BAST No. B3884/KC- VIII/010/2021 Tgl 8/10/2021	Barang	2 unit TV LED, 2 set sound system, 1 unit dispenser, 1 unit PC komputer antrian, 6 buah meja layanan, 1 buah meja tempat kopi/teh, 1 unit boc PC antrian, dan 6 buah kursi besi layanan	42.500.000,00
		Pemkab Pati	NPHD No. 030/3370.10/2020 dan No. W.13.PAS.PAS18. PB.06.03-49 Tgl 7/12/2020 dan BAST No. 030/028.3/2021 Tgl 7/1/2021	Barang	Rehab kamar tahanan	199.751.963,00
42	LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEKANBARU	PT Anugerah Vata Abadi (AVA)	BAST No. 013/UM/AVA/2021 Tgl 20/12/2021	Barang	1 paket sistem keamanan CCTV	115.250.000,00
43	LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA SEMARANG	PT Pegadaian Syariah, Majapahit Semarang	MOU No. W13.PAS13.PB.0 6.03-57 Tgl 27/4/2021	Barang	1 unit mobil ambulance merk Suzuki No Mesin G15AID439092, No. Rangka MHYGDN41VM J400110 warna putih	240.000.000,00
44	LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN MALANG	Bank BNI	NPHD No. W15.PAS.PAS9- KU.03.03.02-1807 Tgl 25/1/2021 dan BAST No. W15.PAS.PAS.9- KU.03.03.02-	Barang	Barang berupa Renovasi dan Penambahan Bangunan seluas 18 m2 untuk P2U	30.000.000,00



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Lampiran Catatan Atas Laporan Keuangan
Per 31 Desember Tahun Anggaran 2021 (*Unaudited*)
Dengan Angka Perbandingan 31 Desember Tahun Anggaran 2020
(dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NO	SATKER PENERIMA	DONOR	NOMOR BAST	BENTUK	KET	NILAI HIBAH
			1807A Tgl 27/4/2021			
		Dinas Kominfo	NPHD No. W15.PAS.PAS9- KU.03.03.02-1803 Tgl 4/1/2021 dan BAST No. W15.PAS.PAS.9- KU.03.03.02- 1803A Tgl 8/1/2021	Barang	Barang berupa Peralatan Video Conference untuk Kegiatan Sidang Online	63.205.000,00
		Lembaga Khusus dan Pelatihan Ganesha	NPHD No. W15.PAS.PAS9- KU.03.03.02-1805 Tgl 5/1/2021 dan BAST No. W15.PAS.PAS.9- KU.03.03.02- 1805A Tgl 8/1/2021	Barang	Barang berupa Peralatan Laundry, Vacuum Fryer, Proyektor, dan Mesin Jahit untuk Kegiatan Pembinaan Kemandirian	50.038.000,00
45	LEMBAGA PEMASYARAKATAN PURWOKERTO	Koperasi Pegawai RI pegawai pengayoman Departemen Kehakiman	BAST No. W13.PAS.11.PB.0 6.03-1856 Tgl 31/12/2021	Barang	1 buah bangunan perpustakaan seluas 60 m2; 1 buah bangunan pos komandan jaga seluas 28 m2; 1 buah bangunan gudang penyimpanan seluas 24 m2; dan 1 buah bangunan pos pengawasan dan pemeriksaan seluas 10 m2	111.000.000,00
46	LEMBAGA PEMASYARAKATAN UJUNG PANDANG	Jeera Foundation	BAST No. W.23.PAS1.UM.01 .01-2600 Tgl 16/8/2021	Barang	1 unit AC Polytron 1 PK; 2 unit AC samsung 2 PK; 1 unit TV LED akari; 4 unit LED monitor 19,5 inch inforce; 1 unit PC venus; 3 unit meja operator informa; 3 buah kursi operator; 6 buah kursi pengunjung	40.826.000,00
		BRI Cab.Panakkukan g	MOU No. W.23.PAS1.PB.06 .03-2700 Tgl 26/10/2021 dan BAST No. W.23.PAS1.UM.01 .01-2701 Tgl 26/10/2021	Barang	1 unit AC Daikin 2 PK, 1 unit Samsung LED TV 43", 6 unit tali pembatas krisbow, 1 unit laptop lenovo, dan 1 unit all in one PC Lenovo	30.000.000,00



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Lampiran Catatan Atas Laporan Keuangan
Per 31 Desember Tahun Anggaran 2021 (*Unaudited*)
Dengan Angka Perbandingan 31 Desember Tahun Anggaran 2020
(dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NO	SATKER PENERIMA	DONOR	NOMOR BAST	BENTUK	KET	NILAI HIBAH
47	LEMBAGA PEMASYARAKATAN WAY KANAN	Muhammad Kholil	MOU No. W.9.PAS.8- PB.06.03-219 Tgl 8/3/2021 dan BAST No. W.9.PAS.8- PB.06.03-220 Tgl 8/3/2021	Barang	Bangunan PAS Mart	100.000.000,00
		PHDI Kab. Way kanan	MOU No. W.9.PAS.8- PB.06.03-530 Tgl 24/8/2021 dan BAST No. W.9.PAS.8- PB.06.03-531 Tgl 24/8/2021	Barang	Bangunan Pura Sudha Citta	75.000.000,00
		BSI Cabang Kotabumi	MOU No. W.9.PAS.8- PB.06.03-570 Tgl 1/9/2021 dan BAST No. W.9.PAS.8- PB.06.03-571 Tgl 1/9/2021	Barang	Bangunan Sekretariat Pondok Pesantren At- Taubah	37.500.000,00
		PEMKAB WAY KANAN	NPHD No. 564/940/IV.10- WK/2021 Tgl 15/12/2021 dan BAST No. 564/82/IV.10- WK/2021 Tgl 15/12/2021	Barang	HIBAH LS BARANG BERUPA MESIN JAHIT	12.000.000,00
48	LEMBAGA PEMASYARAKATAN MADIUN	PT Fajar Basthi Sejahtera	MOU No. 005/MGM/FBS/21 dan W15.PAS.PAS3- PB.06.03-76 Tgl 11/1/2021 serta BAST No. 006/MGM/FBS/21 Tgl 11/1/2021	Barang	Bangunan gedung: Gedung Sentra Layanan Publik	377.968.480,00
		PT Fajar Basthi Sejahtera	MOU No. 141/MGM/FBS/21 dan No. W15.PAS.PAS3- PB.06.03-187 Tgl 24/3/2021 serta BAST No. 142/MGM/FBS/21 Tgl 24/3/2021	Barang	Bangunan gedung ruang Ka. KPLP; Pos jaga utara; dan pos jaga selatan	112.839.000,00
49	RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAN NEGARA CILACAP	Wahyu Budi Heriyanto	BAST No. W13.PAS55.UM.0 2.02-236 Tgl 14/6/2021	Barang	2 unit AC split samsung; 1 unit mesin potong rumput Yamamax pro; 1 unit dispenser hot and cool miyako; 2 unit dispenser normal and hot; 1 set meja dan kursi tunggu romaro	9.550.000,00



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Lampiran Catatan Atas Laporan Keuangan
Per 31 Desember Tahun Anggaran 2021 (*Unaudited*)
Dengan Angka Perbandingan 31 Desember Tahun Anggaran 2020
(dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NO	SATKER PENERIMA	DONOR	NOMOR BAST	BENTUK	KET	NILAI HIBAH
50	RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAN NEGARA LAMPUNG	Ansori Sukanegara	MOU No. 2021/Umum.Hibah -012 Tgl 15/1/2021 dan BAST No. 2021/Umum.Hibah -013 Tgl 15/1/2021	Barang	5 unit AC	14.250.000,00
51	RUMAH TAHANAN NEGARA BANDAR LAMPUNG	KPRI Rutan Bandar Lampung	MOU No. W9.PAS11.Kop-06 Tgl 13/10/2021 dan BAST No. W9.PAS11.Kop-07 Tgl 13/10/2021	Barang	Pos wasrik dengan lus bangunan 28 M2 dan Mushola dengan luas bangunan 99,84 M2	127.840.000,00
52	RUMAH TAHANAN NEGARA BANGKALAN	Pemkab Bangkalan	NPHD No. 600/1135/NPHD/B RG/433.104/2021 Tgl 26/11/2021 dan BAST No. 600/1135/PA/433. 104/2021 Tgl 28/12/2021	Barang	Pembuatan interior ruang pelayanan rutan	49.486.500,00
		Pemkab Bangkalan	NPHD No. 600/755.NPHD/BR G/433.104/2021 Tgl 21/7/2021 dan BAST No. 600/1117/PA/433. 104/2021 Tgl 24/11/2021	Barang	Pembangunan unit layanan terpadu rutan	291.877.500,00
53	RUMAH TAHANAN NEGARA BANJARNEGARA	0	NPHD No. 028/2.a/PPKAD/T ahun 2021 dan No. W13.PAS27.PB.0 6.06.01-1434 Tgl 29/7/2021 dan BAST No. 028/10.a/PPKAD/ 2021 Tgl 29/7/2021	Barang	Bangunan gedung tempat ibadah permanen (rehabilitasi masjid At- Taubah)	192.270.000,00
54	RUMAH TAHANAN NEGARA BLORA	Pemkab Blora	NPHD No. 900/736.6/2021 Tgl 12/11/2021 dan BAST No. 030/860/2021 Tgl 21/12/2021	Barang	Rehabilitasi kantor rutan	190.368.000,00
55	RUMAH TAHANAN NEGARA BOYOLALI	Pemkab Boyolali	NPHD No. 030/10/5.2/2021 dan W13.PAS31.PB.0 6.03-662 Tgl 27/7/2021 dan BAST No. No. 030/02090/5.2/202 1 dan No. W13.PAS31.06.03 -663 Tgl 12/8/2021	Barang	Hibah berupa: 2 unit PC merk HP dan Asus, dan 1 unit video printer	24.700.000,00
56	RUMAH TAHANAN NEGARA CIREBON	LBH Cakra Garda Kencana	MOU No. W.11.PAS.PAS.28 .PB.05.01-701 Tgl 16/3/2021 dan BAST No. W11.PAS.PAS.28.	Barang	10 unit AC Samsung: 1 unit 2 PK; 5 unit 1 PK; dan 4 unit 1/2 PK	10.600.000,00



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Lampiran Catatan Atas Laporan Keuangan
Per 31 Desember Tahun Anggaran 2021 (*Unaudited*)
Dengan Angka Perbandingan 31 Desember Tahun Anggaran 2020
(dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NO	SATKER PENERIMA	DONOR	NOMOR BAST	BENTUK	KET	NILAI HIBAH
			PB.05.01-702 Tgl 16/3/2021			
		LBH Pancaran Hati	MOU No. W.11.PAS.PAS.28 .PB.05.01-818 Tgl 12/4/2021 dan BAST No. W11.PAS.PAS.28. PB.05.01-819 Tgl 12/4/2021	Barang	8 unit AC: 2 unit panasonic 1 PK; 1 unit Changhong 1 PK; 3 unit Sharp 1 PK; 1 unit Sharp 1,5 PK; dan 1 unit Polytron 3 PK.	10.300.000,00
57	RUMAH TAHANAN NEGARA GIANJAR	UD. Mulya Sari (I Gusti Ayu Alit Nurdianti)	BAST No. W20.EG.PB.04.01 .1395 Tgl 2/6/2021	Barang	2 unit AC Akari	6.200.000,00
58	RUMAH TAHANAN NEGARA GRESIK	Pemda Gresik	NPHD No. W15.PAS.PAS35- PB.06.03-2154b Tgl 26/10/2021 dan BAST No. 415.4/2025/437.61 /2021 Tgl 26/10/2021	Barang	Barang berupa 1 Unit Mobil Ambulance	256.020.000,00
59	RUMAH TAHANAN NEGARA MEDAN	Thomas Purba	MOU No. 001/2021 Tgl 2/2/2021 dan BAST No. 002/2021 Tgl 10/3/2021	Barang	Bangunan Strafsel 5 kamar	87.350.000,00
60	RUTAN KELAS IIB PELAIHARI	PEMKAB TANAH LAUT DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTAHANAN	NPHD No. 640/ - SET/DPUPRP/202 1 W.19.PAS.11.PB. 06.03-843 Tgl 2/8/2021 dan 640/ - CKJK/DPUPRP/20 21 Tgl 21/12/2021	Barang	BANGUNAN GEDUNG RUTAN KEAS II	1.293.549.000,00
61	RUMAH TAHANAN NEGARA PURBALINGGA	BRI Cabang Purbalingga	NPHD no. B.2005/KC/VII/LY/ 05/2021 Tgl 6/5/2021 dan BAST No. W13.PAS.37.KU.0 3.02-1136 Tgl 6/5/2021	Barang	1 unit AC split 1,5 PK dan 1 unit AC split 1 PK	8.500.000,00
62	RUMAH TAHANAN NEGARA SALATIGA	PT BRI Cabang Salatiga	NPHD No. B 2939/KC- VIII/08/2021 Tgl 22/7/2021 serta BAST No. W13.PAS41.UM.0 2.02-13 Tgl 22/7/2021	Barang	Pembuatan ruang layanan terpadu	32.012.000,00
63	RUMAH TAHANAN NEGARA SANGGAU	Pemkab Sanggau	NPHD No. 030/105/DPCK- TRP/2021 dan No. W16.PAS.H- PB.06.03-582 Tgl 25/1/2021 dan BAST No. 024/093/DPCK- TRP Tgl 25/1/2021	Barang	Bangunan sarana penyediaan IPAL	199.868.000,00



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Lampiran Catatan Atas Laporan Keuangan
Per 31 Desember Tahun Anggaran 2021 (*Unaudited*)
Dengan Angka Perbandingan 31 Desember Tahun Anggaran 2020
(dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NO	SATKER PENERIMA	DONOR	NOMOR BAST	BENTUK	KET	NILAI HIBAH
64	RUMAH TAHANAN NEGARA SIDIKALANG	Junimart Girsang Center	W2.E16.KU.03.02-629 Tgl 7/5/2021	Barang	Hibah Barang berupa Sepeda Motor	7.500.000,00
65	RUMAH TAHANAN NEGARA TANAH GROGOT	Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara	NPHD No. 030/266/TU-PIMP/BKAD Tgl 1/2/2021 dan BAST No. 030/267/TU-PIMP/BKAD Tgl 2/2/2021	Barang	Kendaraan roda 4: toyota rush Nopol KT 1082 VP	205.630.000,00
66	RUMAH TAHANAN NEGARA TANGERANG	Yayasan Mustika Nusantara Jaya	BAST No. 016/Y-MNJ/IX/2021 dan No. W12.PAS.PAS.14. PB.01.01-162 Tgl 27/9/2021 dan MOU No. 015/Y-MNJ/IX/2021 dan No. W12.PAS.PAS.14. PB.01.01-161 Tgl 27/9/2021	Barang	Bangunan Vihara seluas 96 m2 (8 x 12 m2)	564.406.150,00
		PT Bank Pembangunan Jawa Barat dan Banten	BAST No. 104/DMO-PKS/2021 dan No. W12.PAS.PAS.14. PB.01.01-94 Tgl 6/8/2021 dan MOU No. 0282/DMO-PKS/CSR dan No. W12.PAS.PAS.14. UM.01.01-217 Tgl 6/8/2021	Barang	Bangunan gedung serba guna/ruang tunggu dengan luas 192 m2 (8 x 24 m2)	154.608.000,00
67	RUMAH TAHANAN NEGARA UJUNG PANDANG	KPRI Pengayoman Rutan Kelas 1 Makasar	BAST No. W23.KP.14.03.61/2021 Tgl 10/9/2021	Barang	1 unit laptop HP 14s; 1 unit samsung AR 12 AC 1,5 PK standard R32; dan 1 unit AC akari 05D3 0,5 PK	14.587.000,00
68	RUMAH TAHANAN NEGARA WATES	BPD DIY	MOU No. W14.PAS.PAS.8.P B.06.03-028 Tgl 5/1/2021 dan BAST No. W14.PAS.PAS.8.P B.06.03-027 Tgl 5/1/2021	Barang	LED TV 43 inci	3.000.000,00
69	RUTAN KELAS I LABUHAN DELI	Koperasi Pegawai Pengayoman Rutan Labuhan Deli	MOU dan BAST No. 08/KPPDK/2021 dan No. W2.E20.PL.02.01-526 Tgl 24/2/2021	Barang	9 unit AC	17.000.000,00
		PT BSI Persero	MOU dan BAST No. 01/034-3/474 dan No. W2.E20.PL.02.01-463 Tgl 17/2/2021	Barang	Kursi tunggu stainless dan mesin jahit	13.000.000,00



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Lampiran Catatan Atas Laporan Keuangan
Per 31 Desember Tahun Anggaran 2021 (*Unaudited*)
Dengan Angka Perbandingan 31 Desember Tahun Anggaran 2020
(dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NO	SATKER PENERIMA	DONOR	NOMOR BAST	BENTUK	KET	NILAI HIBAH
70	RUTAN KELAS I DEPOK	Pemkot Depok	NPHD No. 978.4/26/NPHD/P emKS/2021 dan No. W.11.PAS.PAS.38 .PL.02.02-1911 Tgl 7/5/2021	Uang	Untuk pengadaan sarana dan prasarana	999.940.000,00
71	RUTAN KELAS IIB LUBUK SIKAPING	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA KAB. PASAMAN	NPHD No. 900/ 500/SP/ BH/DISPORAPAR /2021 Tgl 15/11/2021 dan BAST No. 00085/SP2D-LS/DISPORAPAR/ 2021 Tgl 4/11/2021	Uang	HIBAH LANGSUNG BERUPA UANG UNTUK KEGIATAN REHABILITASI LAPANGAN OLAHRAGA DARI DISPORAPAR KAB. PASAMAN	30.000.000,00
72	RUTAN KELAS IIB SINGKIL	Pemkab Aceh Singkil	NPHD No. 42/HK/2020 dan No. W1.PAS.14.UM.01 .01-028 Tgl 30/12/2020 serta BAST No. KU.900/12/2021 dan W1.PAS.14.PL.04. 01-028 Tgl 12/1/2021	Barang	Tanah seluas 40.500 m2	83.200.000,00
DITJEN IMIGRASI						8.104.501.168,00
73	KANTOR IMIGRASI KELAS I KHUSUS NON TPI JAKARTA SELATAN	PT. Bank Rakyat Indonesia (PERSERO), Tbk	B4665/KC-XIV/DJS11/2021 (01-02-2021)/ B.203/KC-XIV/DJS/01/2021 (04-01-2021)	Barang	Hibah peralatan dan mesin berupa 1 unit AC Standing 5 PK	20.000.000,00
		PT. Laman Davindo Bahman	032/LBD/III/2021 (07-04-2021)/ 033/LBD/III/2021 (05-04-2021)	Barang	Hibah peralatan dan mesin berupa meja kerja kayu, kursi besi metal, sofa, dispenser dan kanopi	185.490.000,00
		PT. 9Daun Consult & Landscaping Contractor	001/DKR-IM/07.21 (30-07-2021)/ 001/DKR-IM/07.21 (02-08-2021)	Barang	Hibah peralatan dan mesin berupa: Rumput sintetis, pot bunga, tanaman hias, penyemprot otomatis, vertical garden, kanopi, sofa dan ayunan	60.440.000,00
74	KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI KUALA TUNGKAL	Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi	028/215//BPKAD/ 2021	Barang	Tanah	85.123.481,00
		Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi	028/215//BPKAD/ 2021	Barang	Bangunan	2.591.438.519,00
75	KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI CILACAP	PT. Solusi Bangun Indonesia	W.13.IMI.IMI.3.PB. 06.03-0431	Barang	2 UNIT SPEAKER DAN 1 MIXER AUDIO	12.500.000,00
		BANK BNI Cabang Cilacap	W.13.IMI.IMI.3.PB. 06.03-0566	Barang	1 BUAH LAPTOP, 1	15.150.000,00



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Lampiran Catatan Atas Laporan Keuangan
Per 31 Desember Tahun Anggaran 2021 (*Unaudited*)
Dengan Angka Perbandingan 31 Desember Tahun Anggaran 2020
(dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NO	SATKER PENERIMA	DONOR	NOMOR BAST	BENTUK	KET	NILAI HIBAH
					BUAH LED TV DAN 1 UNIT AC	
		PT. Solusi Bangun Indonesia	W.13.IMI.IMI.3.PB. 06.03-0963	Barang	1 UNIT PODIUM DAN 1 UNIR SPEAKER PORTABLE	6.554.800,00
76	KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI TANJUNG BALAI KARIMUN	H. Mohd. Amin	W.32.IMI.3- PB.06.03-1108	Barang	Gedung mushola	45.000.000,00
		PT. Bank BNI Tbk Kantor Cabang Tanjung Balai Karimun	W.32.IMI.3- PB.06.03-1878	Barang	Pos Jaga	18.000.000,00
77	KANTOR IMIGRASI KELAS I KHUSUS TPI BATAM	Subagio	W32.IMI.IMI1- PB.06.03-0072 tanggal 07/01/2021, W32.IMI.IMI.1- PB.06.03-0073 tanggal 07/01/2021	Barang	MUSHOLA	150.000.000,00
		Lucky Hendrati / PT. Citramas Wisata Nusa	W32.IMI.IMI1- PB.06.03-1975 tanggal 15/04/2021, W32.IMI.IMI1- PB.06.03-1976 tanggal 15/04/2021	Barang	BANGUNAN OPERASIONAL KANTOR (MEDIA CENTRE)	172.000.000,00
		Muchsin Miralza	W32.IMI.IMI1- PB.06.03-4511 tanggal 23/08/2021, W32.IMI.IMI1- PB.06.03-4512 tanggal 23/08/2021	Barang	SOFTWARE KOMPUTER APLIKASI E- CLEARANCE	30.000.000,00
78	KANTOR IMIGRASI KELAS II NON TPI MADIUN	Rizky Andhika (PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk)	W15.IMI.IMI.7- PB.06.03-1078	Barang	Bangunan Toilet 3 Bilik beserta perlengkapanny a dengan luas 10.125 m2	60.100.000,00
79	KANTOR IMIGRASI KELAS II NON TPI TOBELO	PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA UTARA	W.29.IMI.IMI.2- PB.06.03-127	Barang	Kendaraan Dinas	130.700.000,00
80	RUMAH DETENSI IMIGRASI JAKARTA	PT. Maha Agung Persada	W.10.IMI.IMI.8.UM .01.01-160 2021 Nomor: 003/MAP/MOU/20 21 tgl 04 Januari 2021	Barang	Hibah Barang berupa Bangunan Gedung Peralatan Mesin dan atau Penambahan Nilai Gedung Bangunan dan Peralatan Mesin	1.474.100.000,00
81	RUMAH DETENSI IMIGRASI PUSAT TANJUNG PINANG	Perorangan (Bambang Tri Cahyono)	W.32.IMI.9- PB.05.03-1003	Barang	AC	6.200.000,00
		Perorangan (Rika Anggraini)	W.32.IMI.9- PB.05.03-1004	Barang	AC	5.050.000,00
		Perorangan (Zulkifli)	W.32.IMI.9- PB.05.03-1005	Barang	AC	5.650.000,00
		Perorangan (Kasnur Ijmal)	W.32.IMI.9- PB.05.03-1006	Barang	AC	3.600.000,00



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Lampiran Catatan Atas Laporan Keuangan
Per 31 Desember Tahun Anggaran 2021 (*Unaudited*)
Dengan Angka Perbandingan 31 Desember Tahun Anggaran 2020
(dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NO	SATKER PENERIMA	DONOR	NOMOR BAST	BENTUK	KET	NILAI HIBAH
82	KANTOR IMIGRASI KELAS III TPI LABUAN BAJO	JAYA MAHENDRA.,MH Dkk	476/HIBAH/68354 7/VIII/2021	Barang	Barang (AC)	12.000.000,00
			513/HIBAH/68354 7/IX/2021	Barang	Barang (AC)	8.000.000,00
83	KANTOR IMIGRASI KELAS II NON TPI MUARA ENIM	PEMDA MUSI RAWAS	BAST NOMOR : 028/0629/VII/2021 TANGGAL 16 DESEMBER 2021	Barang	BARANG BERUPA KENDARAAN DINAS RODA EMPAT	236.300.000,00
84	KANTOR IMIGRASI KELAS II NON TPI PEMATANG SIANTAR	Pemda Kabupaten Humbang Hasundutan	027/02/DH-DISKOMINFO/ XII/2021 ; W.2.IMI.4.UM.	Barang	3 Unit UPS	5.730.800,00
			01.01-4819	Barang	2 Unit Camera	18.376.000,00
				Barang	1 Unit Server	179.600.000,00
				Barang	1 Unit Rack Server	33.347.800,00
				Barang	2 Unit Scanner Dokumen	43.302.000,00
				Barang	2 Unit Printer Laser Jet	3.894.680,00
				Barang	1 Paket Perangkat Antrian	90.282.500,00
				Barang	1 Paket Aplikasi Antrian	89.100.000,00
85	KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI BANDUNG	RR Lighting (CV Perkasa Cahaya mandiri)	W.11.IMI.IMI.1.PB. 06.03-4393	Barang	Hibah Barang berupa 1 unit Videotron	215.900.000,00
		PT Ateja Tritunggal	W.11.IMI.IMI.1.PB. 06.03-4685	Barang	Hibah Barang berupa 1 unit bangunan lainnya (Kantin)	140.000.000,00
86	KANTOR IMIGRASI KELAS II NON TPI DEPOK	Walikota Depok	024/2251/BKD/20 21	Barang	Tanah	781.200.000,00
87	KANTOR IMIGRASI KELAS I KHUSUS TPI SURABAYA	Takmir Masjid	W.15.IMI.IMI.I-PB.06.04-4073-1	Barang	Barang	306.138.000,00
88	KANTOR IMIGRASI KELAS I KHUSUS TPI SOEKARNO-HATTA	PT. Tinindo Inter Nusa	W.10.IMI.IMI.1-PB.06.03-4865	Barang	Ambulance	114.000.000,00
		Setyo Pitriyono	W.10.IMI.IMI.1-PB.06.03-5541	Barang	Mushola	470.000.000,00
89	KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI NUNUKAN	PT. Pipit Mutiara Jaya	W18.IMI.IMI-4.PB.04.01-232	Barang	Barang (AC Standing)	26.700.000,00
			/ W18.IMI.IMI-4.PB.04.01-232			
90	KANTOR IMIGRASI SORONG	Limrawati	W.31.IMI.IMI.2-PB.06.03-015	Barang	Penerimaan hibah berupa meja kerja kayu	1.500.000,00
91	KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI TEMBILAHAN	PT. Pulau Sambu	W4.IMI.IMI.2-UM.01.01-2279	Barang	Renovasi Atap Dan Penambahan Pagar TPI Sungai Guntung	121.600.000,00
92	KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI CILEGON	PT Bank Rakyat Indonesia, Tbk	BAST B.8141-KC-XV/ADK/112021 tanggal 23 November 2021	Barang	Renovasi Kamar Mandi/Toilet Pemohon sebanyak 2 Unit	47.850.000,00
93	KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI MALANG	PT Bank Rakyat Indonesia, Tbk	W15.IMI.IMI.3-PB.06.04-720	Barang	Satu Unit Televisi Android Xiaomi	6.048.900,00



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
 Lampiran Catatan Atas Laporan Keuangan
 Per 31 Desember Tahun Anggaran 2021 (*Unaudited*)
 Dengan Angka Perbandingan 31 Desember Tahun Anggaran 2020
 (dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NO	SATKER PENERIMA	DONOR	NOMOR BAST	BENTUK	KET	NILAI HIBAH
		PT Trisakti Purwosari Makmur	W15.IMI.IMI.3- PB.06.04-915	Barang	Satu Paket Genose c-19	70.554.000,00
DITJEN KEKAYAAN INTELEKTUAL						12.571.692.181,00
94	DITJEN KEKAYAAN INTELEKTUAL	The European Union (EU)	ACA/2017/039- 036/ HKI.1-PB.06.03-05	Jasa	Jasa	6.260.869.348,00
			ACA/2017/039- 036/ HKI.1-HH.06.01- 31	Jasa	Jasa	6.310.822.833,00
DITJEN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN						1.478.167.600,00
95	DITJEN PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN	HSS	19.850/JB/np- 23.12.201	Jasa	Jasa	1.478.167.600,00
DITJEN HAK ASASI MANUSIA						2.700.354.777,00
96	DIREKTORAT JENDERAL HAM	FNS	001/Kemenkumha m/DitjenHAM/BAS T/MSP-2/2/2021	Jasa	Jasa	1.578.054.202,00
		FNS	001/Kemenkumha m/DitjenHAM/BAS T/MSP-2/3/2021	Jasa	Jasa	618.200.219,00
		FNS	001/Kemenkumha m/DitjenHAM/BAS T/MSP-2/3/2021	Jasa	Jasa	504.100.356,00
BALITBANG HUKUM DAN HAM						411.380.229,00
97	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA	USAID	279/USAID- INA/BAST- Service/DRG	Jasa	Jasa	411.380.229,00
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM DAN HAM						23.000.000,00
98	BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN HUKUM DAN HAM KEPULAUAN RIAU	PT. Bank Negara Indonesia Kantor Cabang Utama Batam	BTM/5/58	Barang	Hibah 1 (satu)buah sepeda motor	23.000.000,00
GRAND TOTAL						190.353.580.555,00



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Lampiran Catatan Atas Laporan Keuangan
Per 31 Desember Tahun Anggaran 2021 (*Unaudited*)
Dengan Angka Perbandingan 31 Desember Tahun Anggaran 2020
(dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Rincian Pengesahan Hibah Langsung Tahun Anggaran Yang Lalu Per 31 Desember 2021

NO	SATKER PENERIMA	DONOR	NOMOR BAST	BENTUK	KET	NILAI HIBAH
SEKRETARIAT JENDERAL						899.397.000,00
1	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM KUPANG	Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat	Nomor HK.24 Tahun 2020 - W22.PB.06.03-4645	Barang	Tanah Lembaga Pemasyarakatan Labuan Bajo	899.397.000,00
DITJEN PEMASYARAKATAN						79.785.432.136,00
2	LEMBAGA PEMASYARAKATAN BEKASI	Pemkot Bekasi	MOU No. 641.7/8045/BPKAD.Aset Tgl 30/12/2020 dan BAST No. 641.7/1589/BPKAD.Aset Tgl 30/12/2020	Barang	Bangunan Gedung	78.099.943.000,00
3	LAPAS SUKABUMI	Pemkot Sukabumi	NPHD No.560/118/Disnaker/2020 Tgl 2/12/2020 dan BAST No. 560/190/Disnaker/2020 Tgl 2/12/2020	Barang	Barang Berupa Mesin Jahit Untuk Keperluan Kemandirian WBP	69.730.000,00
4	LEMBAGA PEMASYARAKATAN NARKOTIKA BANDUNG	BANK JABAR BANTEN SYARIAH	BAST No. W.11.PAS.PAS.UM.01.01-4036A Tgl 20/11/2020	Barang	BARANG BERUPA KENDARAAN RODA EMPAT	274.000.000,00
5	RUMAH TAHANAN NEGARA PALEMBANG	PT BPD SUMSEL BABEL	BAST No. 002.3/BSB/BAST/2020 dan No. 106.PAS.PAS12.PK.01.04-872.a Tgl 9/6/2020	Barang	Instalasi Jaringan Listrik	688.438.136,00
6	BALAI PEMASYARAKATAN PANGKALAN BUN KALIMANTAN TENGAH	PT.BRI Cabang Pangkalan Bun	BAST Tgl 5/8/2020 dan MOU No. W17.PAS.PAS16.KU.03.02-2171 dan No. B.302/KC-X/umu/03/2021 Tgl 5/8/2020	Barang	Barang (kursi roda kursi tunggu AC TV)	12.650.000,00
7	RUMAH TAHANAN NEGARA TANJUNG REDEP	Pemkab Bulungan	NPHD No. 030/857/BPKAD-V/IX/2019 dan PB.06.02-490/2019 Tgl 12/9/2019 dan BAST No. 030/863/BPKAD-V/IX/2019 dan PB.06.03-489/2019 Tgl 16/9/2021	Barang	Minibus	198.121.000,00
8	RUMAH TAHANAN NEGARA BALIKPAPAN	PT Natur Palas Indonesia	NPHD No. 030/857/BPKAD-V/IX/2019 dan PB.06.02-490/2019 Tgl 12/9/2019 dan BAST No. 030/863/BPKAD-V/IX/2019 dan PB.06.03-489/2019 Tgl 16/9/2021	Barang	A.C Split 5 unit	22.550.000,00
9	LAPAS SUNGAI LIAT	PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA	MOU No. 032/4191/BPPKAD/2020 dan No. W.7.PAS.PAS.3.PB.06.03-1048 Tgl 11/9/2020 dan BAST No. BA/028/4234/BPPKAD/2020 Tgl 11/9/2020	Barang	Tanah	420.000.000,00
DITJEN IMIGRASI						34.567.479.093,00



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
 Lampiran Catatan Atas Laporan Keuangan
 Per 31 Desember Tahun Anggaran 2021 (*Unaudited*)
 Dengan Angka Perbandingan 31 Desember Tahun Anggaran 2020
 (dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NO	SATKER PENERIMA	DONOR	NOMOR BAST	BENTUK	KET	NILAI HIBAH
10	DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI	1. PT Nusantara Compnet Integrator 2. PT Berca Hardayaperkasa 3. PT Sigma Cipta Caraka	IMI.1-PB.06.03-011 tanggal 09 Juli 2021	Barang	Barang	32.575.746.352,00
11	KANTOR IMIGRASI KELAS II NON TPI BANGGAI	Pemkab Banggai	590/432/Bag.Kerjasama	Barang	Tanah	71.732.741,00
		Pemkab Morowali	590/1212/UMUM/XII/2019	Barang	Tanah	1.920.000.000,00
DITJEN KEKAYAAN INTELEKTUAL						20.800.220.055,00
12	DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL	The Swiss State Secretariat for Economic Affairs (SECO)	MoU.29.11.2012/ HKI.1-KU.03.02-04 MoU.02.05.2017/ HKI.1-KU.03.02-05	Jasa Jasa	Jasa Jasa	15.807.931.600,00 4.992.288.455,00
DITJEN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN						2.261.013.402,00
13	DIREKTORAT PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	JICA	PPE.1.HH.06.01.38	Jasa	Jasa	2.261.013.402,00
GRAND TOTAL						138.313.541.686,00

DAFTAR SELISIH REKONSILIASI SP2D BMN AKUN 53
S.D 31 Desember 2021 (Unduh Data per Tanggal 12 Mei 2022)

No	Kode Satker	Nama Satker	Kode Akun	No Dokumen	tanggal Dokumen	Rph Saiba	Rph Simak	Rph Selisih	Keterangan
DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN									
1	013.05.409263	DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN	5321	211391301014071	18-05-2021	8.840.000,00	0,00	(8.840.000,00)	Honorarium Pokja Pengadaan Senjata Less Lethal Ditjenpas TA 2021 dijadikan belanja modal dibayar dimuka
2	013.05.409263	DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN	5321	211391302026807	19-07-2021	15.048.000,00	0,00	(15.048.000,00)	Penggandaan, penjilidan dan pemb ATK pengadaan APAR Peggandaan, penjilidan dan pemb ATK pengadaan APAR
3	013.05.409263	DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN	5331	211391301026419	26-08-2021	55.640.000,00	0,00	(55.640.000,00)	Kesalahan penginputan tanggal dokumen di simak dan akan dilakukan perbaikan pada LK Audited
4	013.05.409263	DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN	5331	211391301026419	24-08-2021	0,00	55.640.000,00	55.640.000,00	
5	013.05.409263	DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN	5321	211391303039443	29-11-2021	21.136.500.000,00	0,00	(21.136.500.000,00)	Termin I Pengadaan Senjata Less Lethal Ditjenpas TA 2021 dijadikan belanja modal dibayar dimuka
6	013.05.409263	DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN	5331	211391701001382	17-07-2021	0,00	67.082.000,00	67.082.000,00	Kesalahan penginputan tanggal dokumen di simak dan akan dilakukan perbaikan pada LK Audited
7	013.05.409263	DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN	5331	211391701001382	14-07-2021	67.082.000,00	0,00	(67.082.000,00)	
8	013.05.409263	DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN	5321	211391301013975	18-05-2021	6.400.000,00	0,00	(6.400.000,00)	Honorarium Pokja Pengadaan Alat Pemadam Kebakaran Ditjenpas TA 2021 yang masuk di persediaan
9	013.05.409263	DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN	5321	211391301032333	06-10-2021	4.800.000,00	0,00	(4.800.000,00)	Akun PM untuk Honorarium Tim Teknis APAR yang masuk di persediaan
10	013.05.409263	DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN	5321	2,11391E+14	19-05-2021	10.080.000,00	0,00	(10.080.000,00)	Honorarium Pokja Pengadaan X-Ray Portable Ditjenpas TA 2021 dijadikan belanja modal dibayar dimuka
11	013.05.409263	DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN	5321	211391303046851	24-12-2021	5.284.125.000,00	0,00	(5.284.125.000,00)	Termin II Pengadaan Senjata Less Lethal Ditjenpas TA 2021 dijadikan belanja modal dibayar dimuka
12	013.05.409263	DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN	5321	211391302017286	18-05-2021	6.662.198.400,00	0,00	(6.662.198.400,00)	Akun PM untuk Pengadaan Alat Pemadam Api Fireblock type 4L Ditjenpas TA 2021 (TERMIN I) yang masuk di persediaan
13	013.05.409263	DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN	5321	211391302028100	29-07-2021	22.880.000,00	0,00	(22.880.000,00)	Pengadaan sarana satuan pengamanan Ditjenpas TA 2021(Pakaian Dinas, Kaos Pendek PDH, dll) yang masuk di persediaan
14	013.05.409263	DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN	5321	211391303046080	20-12-2021	5.002.989.750,00	0,00	(5.002.989.750,00)	Termin II Pengadaan X Ray Portable Ditjenpas TA 2021 dijadikan belanja modal dibayar dimuka
15	013.05.409263	DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN	5321	211391301047628	14-12-2021	6.630.000,00	0,00	(6.630.000,00)	Honorarium Tim Teknis Pengadaan Senjata Less Lethal Th 2021 dijadikan belanja modal dibayar dimuka
16	013.05.409263	DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN	5331	211391701002259	02-09-2021	199.452.000,00	0,00	(199.452.000,00)	Akun GB untuk Pemb Jasa Sewa Sound Sistem dalam rangka Keg Remisi Umum Ditjenpas yang seharusnya menggunakan akun 522141
17	013.05.409263	DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN	5321	211391301041854	26-11-2021	13.674.320,00	0,00	(13.674.320,00)	Akun peralatan mesin untuk Pemb Ruang Rapat utk Keg Pelatihan Aplikasi SAKTI 02 Nov 2021 yang seharusnya menggunakan akun 524111
18	013.05.409263	DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN	5321	211391303039216	26-11-2021	35.020.928.250,00	0,00	(35.020.928.250,00)	Termin I Pengadaan XRay Portable Ditjenpas TA 2021 dijadikan belanja modal dibayar dimuka
19	013.05.409263	DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN	5321	211391302028447	02-08-2021	1.665.549.600,00	0,00	(1.665.549.600,00)	Akun PM untuk Pembayaran Termin II Pengadaan Alat Pemadam Api (Fireblock) yang masuk di persediaan
20	013.05.409263	DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN	5321	211391303010913	03-05-2021	10.005.979.500,00	0,00	(10.005.979.500,00)	Pembayaran Uang Muka Pengadaan X-Ray Portable Ditjenpas TA 2021 dijadikan belanja modal dibayar dimuka
21	013.05.409263	DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN	5321	211391301030884	27-09-2021	11.014.220,00	0,00	(11.014.220,00)	Bi Perjadin Persiapan Instalasi Pemasangan X-Ray Portable di Cilacap 03-05 Sept 2021 dijadikan belanja modal dibayar dimuka
22	013.05.409263	DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN	5321	211391701000680	10-05-2021	25.000.000,00	0,00	(25.000.000,00)	Pengadaan ATK dalam Rangka Menunjang Keg Pengadaan XRay Portabel Ditjenpas TA 2021 dijadikan belanja modal dibayar dimuka
23	013.05.409263	DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN	5321	211391302028099	29-07-2021	31.210.300,00	0,00	(31.210.300,00)	Pengadaan sarana satuan pengamanan Ditjenpas TA 2021(Pakaian Dinas, Sepatu Tali, dll) yang masuk di persediaan
24	013.05.409263	DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN	5321	211391301036357	01-11-2021	150.910.000,00	0,00	(150.910.000,00)	Akun peralatan mesin untuk Keg Sosialisasi Pelatihan SAKTI 01-03 Nov 2021 yang seharusnya menggunakan akun 524111
25	013.05.409263	DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN	5321	211391301048250	16-12-2021	12.075.600,00	0,00	(12.075.600,00)	Akun PM untuk pembayaran Perjadin Pendampingan BPK ke Sulteng 07-11 Des 2021 yang seharusnya menggunakan akun 524111
26	013.05.409263	DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN	5321	211391301048865	17-12-2021	9.688.000,00	0,00	(9.688.000,00)	Akun PM untuk Keg Koordinasi Ditjenpas dan BPN Cilacap terkait Pemetaan Pengukuran Tanah NK 11-13 Des 2021 yang seharusnya menggunakan akun 524111
27	013.05.409263	DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN	5321	211391303024679	23-08-2021	199.100.000,00	0,00	(199.100.000,00)	Pengadaan Lisensi Pendukung TI berupa Lisensi Sonicwall Ditjenpas TA 2021. namun tidak bisa dicatat di SIMAK karena umurnya tidak sampai 1 tahun sehingga di jurnal ke akun 521111
28	013.05.409263	DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN	5321	211391302031661	23-08-2021	197.450.000,00	0,00	(197.450.000,00)	Pengadaan Renewal Nagios Enterprise Security dan Local Maintenance Ditjenpas TA 2021 namun tidak bisa dicatat di SIMAK karena umurnya tidak sampai 1 tahun sehingga di jurnal ke akun 521111
29	013.05.409263	DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN	5321	211391301015377	31-05-2021	2.520.000,00	0,00	(2.520.000,00)	Honorarium Pokja Pengadaan X-Ray Portable Ditjenpas TA 2021 dijadikan belanja modal dibayar dimuka

DAFTAR SELISIH REKONSILIASI SP2D BMN AKUN 53
S.D 31 Desember 2021 (Unduh Data per Tanggal 12 Mei 2022)

No	Kode Satker	Nama Satker	Kode Akun	No Dokumen	tanggal Dokumen	Rph Saiba	Rph Simak	Rph Selisih	Keterangan
30	013.05.653292	RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAN NEGARA INDRAMAYU	5361	210241302007915	29-11-2021	9.988.000,00	0,00	(9.988.000,00)	realisasi akun belanja modal 53 untuk pembelian aplikasi penunjang tusi Rupbasan yang sampai tanggal pelaporan belum diterima oleh satker, sehingga belum dapat dicatatkan sebagai aset dan di jurnal sebagai Saldo Belanja Modal dibayar dimuka.
31	013.05.683615	LAPAS KELAS IIA CIKARANG	5311	211711301006803	21-09-2021	8.800.000,00	0,00	(8.800.000,00)	realisasi akun belanja modal 531115 – belanja modal pengukuran dan pematangan tanah untuk pengerjaan pematangan jalan pada lapas cikarang yang seharusnya dibelanjakan dengan menggunakan akun 523111 – beban pemeliharaan gedung dan bangunan, sehingga tidak dapat dicatatkan pada SIMAK dan di jurnal kepada beban pemeliharaan
DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI									
32	013.06.408360	PERWAKILAN IMIGRASI DI DAVAO	5321	211391101000100	19-10-2021	1.411.010,00	0,00	(1.411.010,00)	kesalahan penggunaan akun. Akun 532119 (Belanja Modal Peralatan dan Mesin – Penanganan Pandemi Covid-19) digunakan untuk belanja barang swab pegawai (akun 522192)
33	013.06.408360	PERWAKILAN IMIGRASI DI DAVAO	5321	211391702000059	24-12-2021	682.053,00	0,00	(682.053,00)	kesalahan penggunaan akun. Akun 532119 (Belanja Modal Peralatan dan Mesin – Penanganan Pandemi Covid-19) digunakan untuk belanja barang swab pegawai (akun 522192)
DIREKTORAT JENDERAL KI									
34	013.07.097102	DITJEN KEKAYAAN INTELEKTUAL	5361	211391701006127	29-12-2021	188.532.500,00	95.782.500,00	(92.750.000,00)	belanja jasa konsultasi tp realisasinya pakai 53 karena awalnya dikira akan menghasilkan atb, ternyata outputnya bukan atb hanya dokumen

DAFTAR SELISIH REKONSILIASI GL BMN
S.D 31 Desember 2021 (Unduh Data per Tanggal 12 Mei 2022)

No	Kode Satker	Nama Satker	Akun	Uraian	Rph Selisih	Keterangan
SEKRETARIAT JENDERAL						
1	013.01.404233	SEKRETARIAT JENDERAL (PUSAT)	134000	JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN	(11.121.713.000,00)	Selisih karena pencatatan Aset Jalan senilai Rp11.121.713.000,00 yang realisasinya menggunakan akun Belanja Modal Gedung dan Bangunan
2	013.01.404233	SEKRETARIAT JENDERAL (PUSAT)	135000	ASET TETAP LAINNYA	(1.802.478.100,00)	Selisih karena pencatatan Aset Tetap Renovasi atas Renovasi Rumah Dinas Menteri (Aset Sekretariat Negara) senilai Rp1.802.478.100,00 yang realisasinya menggunakan akun Belanja Modal Gedung dan Bangunan
3	013.01.404233	SEKRETARIAT JENDERAL (PUSAT)	133111	GEDUNG DAN BANGUNAN	12.924.191.100,00	Selisih karena ada realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan senilai Rp12.924.191.100,00 yang membentuk Aset lain, yaitu Jalan serta Aset Tetap Renovasi
4	013.01.408720	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAKARTA RAYA	132111	PERALATAN DAN MESIN	(1.799.800,00)	Jurnal Beban Ekstrakompatabel
5	013.01.408742	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAWA TENGAH	132111	PERALATAN DAN MESIN	(990.000,00)	Jurnal Beban Ekstrakompatabel
6	013.01.408742	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAWA TENGAH	117111	PERSEDIAAN	990.000,00	Jurnal Beban Ekstrakompatabel
7	013.01.408751	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SURABAYA	133111	GEDUNG DAN BANGUNAN	(121.775.500,00)	Pengembangan Nilai Aset
8	013.01.408767	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SUMATERA UTARA DI MEDAN	132111	PERALATAN DAN MESIN	(18.656.000,00)	Jurnal Beban Ekstrakompatabel
9	013.01.408773	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM UJUNG PANDANG	133111	GEDUNG DAN BANGUNAN	(31.092.094,00)	Koreksi Nilai KDP
10	013.01.408824	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM TANJUNG KARANG	132111	PERALATAN DAN MESIN	(7.377.745,00)	Jurnal Beban Ekstrakompatabel
11	013.01.408849	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BANJARMASIN	132111	PERALATAN DAN MESIN	(14.795.000,00)	Jurnal Beban Ekstrakompatabel
12	013.01.409169	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAMBI	133111	GEDUNG DAN BANGUNAN	(701.877.000,00)	Koreksi Nilai KDP
13	013.01.409169	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAMBI	117111	PERSEDIAAN	1.954.000,00	Jurnal Beban Ekstrakompatabel
14	013.01.409169	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAMBI	132111	PERALATAN DAN MESIN	(1.954.000,00)	Jurnal Beban Ekstrakompatabel
15	013.01.409181	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM YOGYAKARTA	117111	PERSEDIAAN	7.271.000,00	Jurnal Beban Ekstrakompatabel
16	013.01.409181	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM YOGYAKARTA	132111	PERALATAN DAN MESIN	(7.271.000,00)	Jurnal Beban Ekstrakompatabel
17	013.01.409190	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PALANGKARAYA	132111	PERALATAN DAN MESIN	(200.000,00)	Jurnal Beban Ekstrakompatabel
18	013.01.409190	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PALANGKARAYA	117111	PERSEDIAAN	200.000,00	Jurnal Beban Ekstrakompatabel
19	013.01.409201	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM KENDARI	132111	PERALATAN DAN MESIN	(66.900.000,00)	Jurnal Beban Ekstrakompatabel
20	013.01.409226	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM MATARAM	133111	GEDUNG DAN BANGUNAN	(126.259.243,00)	Koreksi Nilai KDP
21	013.01.532413	PUSAT DATA DAN TEKNOLOGI INFORMASI	132111	PERALATAN DAN MESIN	3.086.022.500,00	Jurnal Beban Ekstrakompatabel
22	013.01.532413	PUSAT DATA DAN TEKNOLOGI INFORMASI	135000	ASET TETAP LAINNYA	(3.091.000.000,00)	Jurnal Beban Ekstrakompatabel
23	013.01.648999	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PROPINSI BANTEN	133111	GEDUNG DAN BANGUNAN	(324.000.000,00)	Koreksi Nilai KDP
24	013.01.649001	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PROPINSI BANGKA BELITUNG	132111	PERALATAN DAN MESIN	(27.020.000,00)	Jurnal Beban Ekstrakompatabel
25	013.01.667790	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SULAWESI BARAT	132111	PERALATAN DAN MESIN	(321.500,00)	Jurnal Beban Ekstrakompatabel
26	013.01.667790	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SULAWESI BARAT	133111	GEDUNG DAN BANGUNAN	(12.309.000,00)	Koreksi Nilai KDP
27	013.01.667790	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SULAWESI BARAT	117111	PERSEDIAAN	321.500,00	Jurnal Beban Ekstrakompatabel
DIREKTORAT JENDERAL AHU						
28	013.03.099297	BALAI HARTA PENINGGALAN JAKARTA	132111	PERALATAN DAN MESIN	(9.145.360,00)	Jurnal Beban Ekstrakompatabel
29	013.03.099297	BALAI HARTA PENINGGALAN JAKARTA	117111	PERSEDIAAN	5.530.200,00	Belanja persediaan yang tidak membentuk persediaan
30	013.03.408432	BALAI HARTA PENINGGALAN UJUNG PANDANG	132111	PERALATAN DAN MESIN	(1.630.000,00)	Jurnal Beban Ekstrakompatabel
31	013.03.409180	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM YOGYAKARTA	135000	ASET TETAP LAINNYA	(35.000.000,00)	Kesalahan penggunaan akun belanja jasa lainnya yang membentuk aset lainnya yang seharusnya menggunakan akun belanja modal aset lainnya
32	013.03.409257	DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM	133111	GEDUNG DAN BANGUNAN	24.750.000,00	Jurnal ats reklasifikasi pengembangan gedung & bangunan ke pembelian peralatan & mesin berupa TV senilai Rp9.350.000 & PC senilai Rp15.400.000 pada SPM 1569 SP2D 211391701002741
33	013.03.409257	DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM	132111	PERALATAN DAN MESIN	(490.566.735,00)	yg tidak dapat dilakukan ralat akun karena terdapat pada 1 invoice
34	013.03.409257	DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM	117111	PERSEDIAAN	1.900.000,00	Jurnal ats reklasifikasi pembelian Persediaan ke Beban Ekstrakompatabel PM berupa Kursi Roda Senilai Rp1.900.000 SP2D 211391303024700 SPM 1274
35	013.03.409257	DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM	135000	ASET TETAP LAINNYA	(9.457.885,00)	Jurnal ats reklasifikasi pembelian peralatan & mesin ke aset lainnya berupa lukisan cat minyak senilai Rp9.457.885 pada SPM 2159 SP2D 211391302051536 yg tidak dapat dilakukan ralat akun karena terdapat pada 1 invoice
DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN						
36	013.05.109105	LEMBAGA PEMASYARAKATAN BEKASI	117111	PERSEDIAAN	8.035.000,00	realisasi belanja akun persediaan yang tidak membentuk persediaan pada transaksi pembelian bahan kegiatan kemandirian dan pemenuhan kebutuhan napi rentan yang merupakan bawaan habis pakai dan di jurnal ke akun 521211

DAFTAR SELISIH REKONSILIASI GL BMN
S.D 31 Desember 2021 (Unduh Data per Tanggal 12 Mei 2022)

No	Kode Satker	Nama Satker	Akun	Uraian	Rph Selisih	Keterangan
37	013.05.109105	LEMBAGA PEMASYARAKATAN BEKASI	132111	PERALATAN DAN MESIN	(3.435.000,00)	Jurnal Beban Ekstrakompatabel
38	013.05.109118	RUMAH TAHANAN NEGARA PALEMBANG	133111	GEDUNG DAN BANGUNAN	(688.438.136,00)	Hibah gedung dan bangunan berupa pengembangan nilai aset
39	013.05.109152	LEMBAGA PEMASYARAKATAN TOBELLO	132111	PERALATAN DAN MESIN	(880.000,00)	Jurnal Beban Ekstrakompatabel
40	013.05.109152	LEMBAGA PEMASYARAKATAN TOBELLO	117111	PERSEDIAAN	880.000,00	realisasi belanja akun persediaan yang tidak membentuk persediaan pada transaksi pembelian bahan kegiatan kemandirian dan pemenuhan kebutuhan napi rentan yang merupakan bawaang habis pakai dan dijumlah ke akun 521211
41	013.05.109153	LEMBAGA PEMASYARAKATAN SANANA	132111	PERALATAN DAN MESIN	(980.000,00)	Jurnal Beban Ekstrakompatabel
42	013.05.109153	LEMBAGA PEMASYARAKATAN SANANA	117111	PERSEDIAAN	980.000,00	realisasi belanja akun persediaan yang tidak membentuk persediaan pada transaksi pembelian bahan kegiatan kemandirian dan pemenuhan kebutuhan napi rentan yang merupakan bawaang habis pakai dan dijumlah ke akun 521211
43	013.05.109636	RUMAH TAHANAN NEGARA YOGYAKARTA	132111	PERALATAN DAN MESIN	(8.172.700,00)	atas ATR di 5 satker, terdapat realisasi belanja gedung bangunan yang membentuk Aset Tetap Lainnya
44	013.05.109636	RUMAH TAHANAN NEGARA YOGYAKARTA	135000	ASET TETAP LAINNYA	(2.000.000,00)	pembelian 4 rebana @500.000 pakai akun 521219 membentuk aset intra
45	013.05.352605	LPKA Pangkal Pinang, Provinsi Kep. Bangka Belitung	117111	PERSEDIAAN	2.920.500,00	realisasi belanja 532111 membentuk ATB berupa aplikasi SDP Rp. 4.019.874.500 dan pekerjaan rehap bangunan LPP Tangerang Rp.184.250.000.-
46	013.05.352605	LPKA Pangkal Pinang, Provinsi Kep. Bangka Belitung	132111	PERALATAN DAN MESIN	(9.670.500,00)	penggunaan akun 532111 untuk transaksi pembelian Alat membuat batik berupa cap batik yang membentuk Aset tetap lainnya dibawah nilai kapitalisasi
47	013.05.352607	LPKA Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah	117111	PERSEDIAAN	4.093.500,00	Realisasi belanja 536111 untuk pembelian aplikasi penunjang Tusi Rupbasan yang sd 31 Desember belum diterima oleh satker
48	013.05.352607	LPKA Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah	132111	PERALATAN DAN MESIN	(8.658.000,00)	Jurnal Beban Ekstrakompatabel
49	013.05.352609	LPKA Palu, Provinsi Sulawesi Tengah	117111	PERSEDIAAN	28.951.000,00	realisasi belanja akun persediaan yang tidak membentuk persediaan pada transaksi pembelian bahan kegiatan kemandirian dan pemenuhan kebutuhan napi rentan yang merupakan bawaang habis pakai dan dijumlah ke akun 521211
50	013.05.352612	LPKA Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara	132111	PERALATAN DAN MESIN	(2.200.159,00)	Jurnal Beban Ekstrakompatabel
51	013.05.352612	LPKA Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara	117111	PERSEDIAAN	2.200.159,00	realisasi belanja akun persediaan yang tidak membentuk persediaan pada transaksi pembelian bahan kegiatan kemandirian dan pemenuhan kebutuhan napi rentan yang merupakan bawaang habis pakai dan dijumlah ke akun 521211
52	013.05.404271	LEMBAGA PEMASYARAKATAN CIPINANG	117111	PERSEDIAAN	60.685.680,00	realisasi belanja akun persediaan yang tidak membentuk persediaan pada transaksi pembelian bahan kegiatan kemandirian dan pemenuhan kebutuhan napi rentan yang merupakan bawaang habis pakai dan dijumlah ke akun 521211
53	013.05.404296	RUTAN KELAS I PONDOK BAMBU	132111	PERALATAN DAN MESIN	(605.000,00)	Jurnal Beban Ekstrakompatabel
54	013.05.404296	RUTAN KELAS I PONDOK BAMBU	117111	PERSEDIAAN	23.518.000,00	realisasi belanja akun persediaan yang tidak membentuk persediaan pada transaksi pembelian bahan kegiatan kemandirian dan pemenuhan kebutuhan napi rentan yang merupakan bawaang habis pakai dan dijumlah ke akun 521211
55	013.05.404316	BALAI PEMASYARAKATAN BANDUNG	117111	PERSEDIAAN	850.000,00	realisasi belanja akun persediaan yang tidak membentuk persediaan pada transaksi pembelian bahan kegiatan kemandirian dan pemenuhan kebutuhan napi rentan yang merupakan bawaang habis pakai dan dijumlah ke akun 521211
56	013.05.404316	BALAI PEMASYARAKATAN BANDUNG	132111	PERALATAN DAN MESIN	(850.000,00)	Jurnal Beban Ekstrakompatabel
57	013.05.404347	LAPAS GARUT	132111	PERALATAN DAN MESIN	(10.098.250,00)	Jurnal Beban Ekstrakompatabel
58	013.05.404347	LAPAS GARUT	117111	PERSEDIAAN	2.600.000,00	realisasi belanja akun persediaan yang tidak membentuk persediaan pada transaksi pembelian bahan kegiatan kemandirian dan pemenuhan kebutuhan napi rentan yang merupakan bawaang habis pakai dan dijumlah ke akun 521211
59	013.05.404362	LAPAS TASIKMALAYA	117111	PERSEDIAAN	4.985.000,00	realisasi belanja akun persediaan yang tidak membentuk persediaan pada transaksi pembelian bahan kegiatan kemandirian dan pemenuhan kebutuhan napi rentan yang merupakan bawaang habis pakai dan dijumlah ke akun 521211
60	013.05.404378	LEMBAGA PEMASYARAKATAN SUKAMISKIN	117111	PERSEDIAAN	1.000.000,00	realisasi belanja akun persediaan yang tidak membentuk persediaan pada transaksi pembelian bahan kegiatan kemandirian dan pemenuhan kebutuhan napi rentan yang merupakan bawaang habis pakai dan dijumlah ke akun 521211
61	013.05.404378	LEMBAGA PEMASYARAKATAN SUKAMISKIN	132111	PERALATAN DAN MESIN	(1.000.000,00)	Jurnal Beban Ekstrakompatabel
62	013.05.404393	BALAI PEMASYARAKATAN CIREBON	117111	PERSEDIAAN	440.700,00	realisasi belanja akun persediaan yang tidak membentuk persediaan pada transaksi pembelian bahan kegiatan kemandirian dan pemenuhan kebutuhan napi rentan yang merupakan bawaang habis pakai dan dijumlah ke akun 521211
63	013.05.404429	RUMAH TAHANAN NEGARA CIREBON	117111	PERSEDIAAN	1.960.000,00	realisasi belanja akun persediaan yang tidak membentuk persediaan pada transaksi pembelian bahan kegiatan kemandirian dan pemenuhan kebutuhan napi rentan yang merupakan bawaang habis pakai dan dijumlah ke akun 521211

DAFTAR SELISIH REKONSILIASI GL BMN
S.D 31 Desember 2021 (Unduh Data per Tanggal 12 Mei 2022)

No	Kode Satker	Nama Satker	Akun	Uraian	Rph Selisih	Keterangan
64	013.05.404435	LEMBAGA PEMASYARAKATAN KUNINGAN	117111	PERSEDIAAN	8.632.095,00	realisasi belanja akun persediaan yang tidak membentuk persediaan pada transaksi pembelian bahan kegiatan kemandirian dan pemenuhan kebutuhan napi rentan yang merupakan bawah habis pakai dan di jurnal ke akun 521211
65	013.05.404441	LAPAS MAJALENGKA	132111	PERALATAN DAN MESIN	(724.000,00)	Jurnal Beban Ekstrakompatabel
66	013.05.404441	LAPAS MAJALENGKA	117111	PERSEDIAAN	2.022.500,00	realisasi belanja akun persediaan yang tidak membentuk persediaan pada transaksi pembelian bahan kegiatan kemandirian dan pemenuhan kebutuhan napi rentan yang merupakan bawah habis pakai dan di jurnal ke akun 521211
67	013.05.404460	LAPAS INDRAMAYU	132111	PERALATAN DAN MESIN	(10.511.262,00)	Jurnal Beban Ekstrakompatabel
68	013.05.404460	LAPAS INDRAMAYU	117111	PERSEDIAAN	9.821.262,00	realisasi belanja akun persediaan yang tidak membentuk persediaan pada transaksi pembelian bahan kegiatan kemandirian dan pemenuhan kebutuhan napi rentan yang merupakan bawah habis pakai dan di jurnal ke akun 521211
69	013.05.404472	LEMBAGA PEMASYARAKATAN BOGOR	117111	PERSEDIAAN	10.025.290,00	realisasi belanja akun persediaan yang tidak membentuk persediaan pada transaksi pembelian bahan kegiatan kemandirian dan pemenuhan kebutuhan napi rentan yang merupakan bawah habis pakai dan di jurnal ke akun 521211
70	013.05.404472	LEMBAGA PEMASYARAKATAN BOGOR	132111	PERALATAN DAN MESIN	(3.407.000,00)	Jurnal Beban Ekstrakompatabel
71	013.05.404481	LAPAS SUKABUMI	117111	PERSEDIAAN	7.590.000,00	realisasi belanja akun persediaan yang tidak membentuk persediaan pada transaksi pembelian bahan kegiatan kemandirian dan pemenuhan kebutuhan napi rentan yang merupakan bawah habis pakai dan di jurnal ke akun 521211
72	013.05.404501	LAPAS PURWAKARTA	117111	PERSEDIAAN	957.000,00	realisasi belanja akun persediaan yang tidak membentuk persediaan pada transaksi pembelian bahan kegiatan kemandirian dan pemenuhan kebutuhan napi rentan yang merupakan bawah habis pakai dan di jurnal ke akun 521211
73	013.05.404501	LAPAS PURWAKARTA	132111	PERALATAN DAN MESIN	(957.000,00)	Jurnal Beban Ekstrakompatabel
74	013.05.404517	LEMBAGA PEMASYARAKATAN SUBANG	132111	PERALATAN DAN MESIN	(1.770.000,00)	Jurnal Beban Ekstrakompatabel
75	013.05.404563	LEMBAGA PEMASYARAKATAN ANAK PRIA TANGERANG	132111	PERALATAN DAN MESIN	(1.750.000,00)	realisasi belanja barang akun 52 yang membentuk aset tetap peralatan dan mesin karena telah memenuhi nilai kapitalisasi aset tetap
76	013.05.404563	LEMBAGA PEMASYARAKATAN ANAK PRIA TANGERANG	117111	PERSEDIAAN	1.750.000,00	realisasi belanja akun persediaan yang tidak membentuk persediaan pada transaksi pembelian bahan kegiatan kemandirian dan pemenuhan kebutuhan napi rentan yang merupakan bawah habis pakai dan di jurnal ke akun 521211
77	013.05.404585	BALAI PEMASYARAKATAN YOGYAKARTA	133111	GEDUNG DAN BANGUNAN	866.519.000,00	atas ATR di 5 satker, terdapat realisasi belanja gedung bangunan yang membentuk Aset Tetap Lainnya dan tdk menambah nilai GB
78	013.05.404585	BALAI PEMASYARAKATAN YOGYAKARTA	135000	ASET TETAP LAINNYA	(866.519.000,00)	atas ATR di 5 satker, terdapat realisasi belanja gedung bangunan yang membentuk Aset Tetap Lainnya
79	013.05.404585	BALAI PEMASYARAKATAN YOGYAKARTA	132111	PERALATAN DAN MESIN	(2.250.000,00)	Jurnal Beban Ekstrakompatabel
80	013.05.404611	RUMAH TAHANAN NEGARA WATES	132111	PERALATAN DAN MESIN	(750.000,00)	atas ATR di 5 satker, terdapat realisasi belanja gedung bangunan yang membentuk Aset Tetap Lainnya
81	013.05.404673	RUMAH TAHANAN NEGARA SALATIGA	132111	PERALATAN DAN MESIN	(1.900.000,00)	penggunaan akun 532111 untuk transaksi pembelian Alat pembatik berupa cap batik yang membentuk Aset tetap lainnya dibawah nilai kapitalisasi
82	013.05.404673	RUMAH TAHANAN NEGARA SALATIGA	133111	GEDUNG DAN BANGUNAN	(32.012.000,00)	realisasi belanja 532111 membentuk ATB berupa aplikasi SDP Rp. 4.019.874.500 dan pekerjaan rehap bangunan LPP Tangerang Rp.184.250.000.-
83	013.05.404698	RUMAH TAHANAN NEGARA DEMAK	132111	PERALATAN DAN MESIN	(1.200.000,00)	Realisasi belanja 536111 untuk pembelian aplikasi penunjang Tusi Rupbasan yang sd 31 Desember belum diterima oleh satker
84	013.05.404702	LEMBAGA PEMASYARAKATAN AMBARAWA	117111	PERSEDIAAN	1.500.000,00	realisasi belanja akun persediaan yang tidak membentuk persediaan pada transaksi pembelian bahan kegiatan kemandirian dan pemenuhan kebutuhan napi rentan yang merupakan bawah habis pakai dan di jurnal ke akun 521211
85	013.05.404702	LEMBAGA PEMASYARAKATAN AMBARAWA	132111	PERALATAN DAN MESIN	(1.500.000,00)	Jurnal Beban Ekstrakompatabel
86	013.05.404812	RUMAH TAHANAN NEGARA WONOSOBO	132111	PERALATAN DAN MESIN	(18.939.000,00)	Jurnal Beban Ekstrakompatabel
87	013.05.404852	LEMBAGA PEMASYARAKATAN PATI	132111	PERALATAN DAN MESIN	(4.767.000,00)	Jurnal Beban Ekstrakompatabel
88	013.05.404852	LEMBAGA PEMASYARAKATAN PATI	133111	GEDUNG DAN BANGUNAN	(199.751.963,00)	Hibah gedung dan bangunan berupa pengembangan nilai aset
89	013.05.404868	RUMAH TAHANAN NEGARA REMBANG	132111	PERALATAN DAN MESIN	(560.000,00)	Jurnal Beban Ekstrakompatabel
90	013.05.404874	RUMAH TAHANAN NEGARA JEPARA	117111	PERSEDIAAN	2.225.000,00	realisasi belanja akun persediaan yang tidak membentuk persediaan pada transaksi pembelian bahan kegiatan kemandirian dan pemenuhan kebutuhan napi rentan yang merupakan bawah habis pakai dan di jurnal ke akun 521211
91	013.05.404874	RUMAH TAHANAN NEGARA JEPARA	132111	PERALATAN DAN MESIN	(2.225.000,00)	Jurnal Beban Ekstrakompatabel
92	013.05.404899	RUMAH TAHANAN NEGARA BLORA	133111	GEDUNG DAN BANGUNAN	(190.368.000,00)	Hibah gedung dan bangunan berupa pengembangan nilai aset
93	013.05.404919	RUMAH TAHANAN NEGARA SURAKARTA	117111	PERSEDIAAN	17.325.000,00	realisasi belanja akun persediaan yang tidak membentuk persediaan pada transaksi pembelian bahan kegiatan kemandirian dan pemenuhan kebutuhan napi rentan yang merupakan bawah habis pakai dan di jurnal ke akun 521211

DAFTAR SELISIH REKONSILIASI GL BMN
S.D 31 Desember 2021 (Unduh Data per Tanggal 12 Mei 2022)

No	Kode Satker	Nama Satker	Akun	Uraian	Rph Selisih	Keterangan
94	013.05.404919	RUMAH TAHANAN NEGARA SURAKARTA	132111	PERALATAN DAN MESIN	(17.325.000,00)	Jurnal Beban Ekstrakompatabel
95	013.05.404925	LEMBAGA PEMASYARAKATAN SRAGEN	132111	PERALATAN DAN MESIN	(6.850.000,00)	Jurnal Beban Ekstrakompatabel
96	013.05.404925	LEMBAGA PEMASYARAKATAN SRAGEN	117111	PERSEDIAAN	6.850.000,00	realisasi belanja akun persediaan yang tidak membentuk persediaan pada transaksi pembelian bahan kegiatan kemandirian dan pemenuhan kebutuhan napi rentan yang merupakan bawaang habis pakai dan di jurnal ke akun 521211
97	013.05.404931	RUMAH TAHANAN NEGARA BOYOLALI	132111	PERALATAN DAN MESIN	(1.895.000,00)	Jurnal Beban Ekstrakompatabel
98	013.05.404931	RUMAH TAHANAN NEGARA BOYOLALI	117111	PERSEDIAAN	1.895.000,00	realisasi belanja akun persediaan yang tidak membentuk persediaan pada transaksi pembelian bahan kegiatan kemandirian dan pemenuhan kebutuhan napi rentan yang merupakan bawaang habis pakai dan di jurnal ke akun 521211
99	013.05.404950	LAPAS KLATEN	132111	PERALATAN DAN MESIN	(2.850.000,00)	Jurnal Beban Ekstrakompatabel
100	013.05.404950	LAPAS KLATEN	117111	PERSEDIAAN	2.850.000,00	realisasi belanja akun persediaan yang tidak membentuk persediaan pada transaksi pembelian bahan kegiatan kemandirian dan pemenuhan kebutuhan napi rentan yang merupakan bawaang habis pakai dan di jurnal ke akun 521211
101	013.05.404987	RUMAH TAHANAN NEGARA BANYUMAS	132111	PERALATAN DAN MESIN	(1.000.000,00)	Jurnal Beban Ekstrakompatabel
102	013.05.404987	RUMAH TAHANAN NEGARA BANYUMAS	117111	PERSEDIAAN	1.000.000,00	realisasi belanja akun persediaan yang tidak membentuk persediaan pada transaksi pembelian bahan kegiatan kemandirian dan pemenuhan kebutuhan napi rentan yang merupakan bawaang habis pakai dan di jurnal ke akun 521211
103	013.05.404993	RUMAH TAHANAN NEGARA PURBALINGGA	132111	PERALATAN DAN MESIN	(966.000,00)	Jurnal Beban Ekstrakompatabel
104	013.05.404993	RUMAH TAHANAN NEGARA PURBALINGGA	117111	PERSEDIAAN	966.000,00	realisasi belanja akun persediaan yang tidak membentuk persediaan pada transaksi pembelian bahan kegiatan kemandirian dan pemenuhan kebutuhan napi rentan yang merupakan bawaang habis pakai dan di jurnal ke akun 521211
105	013.05.405007	RUMAH TAHANAN NEGARA BANJARNEGARA	133111	GEDUNG DAN BANGUNAN	(192.270.000,00)	Hibah gedung dan bangunan berupa pengembangan nilai aset
106	013.05.405038	LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEMUDA PLANTUNGAN	132111	PERALATAN DAN MESIN	(8.083.600,00)	Jurnal Beban Ekstrakompatabel
107	013.05.405038	LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEMUDA PLANTUNGAN	117111	PERSEDIAAN	8.083.600,00	realisasi belanja akun persediaan yang tidak membentuk persediaan pada transaksi pembelian bahan kegiatan kemandirian dan pemenuhan kebutuhan napi rentan yang merupakan bawaang habis pakai dan di jurnal ke akun 521211
108	013.05.405053	LEMBAGA PEMASYARAKATAN KALISOSOK	132111	PERALATAN DAN MESIN	(4.319.600,00)	Jurnal Beban Ekstrakompatabel
109	013.05.405053	LEMBAGA PEMASYARAKATAN KALISOSOK	117111	PERSEDIAAN	4.319.600,00	realisasi belanja akun persediaan yang tidak membentuk persediaan pada transaksi pembelian bahan kegiatan kemandirian dan pemenuhan kebutuhan napi rentan yang merupakan bawaang habis pakai dan di jurnal ke akun 521211
110	013.05.405075	LEMBAGA PEMASYARAKATAN SIDOARJO	132111	PERALATAN DAN MESIN	(24.996.847,00)	Jurnal Beban Ekstrakompatabel
111	013.05.405075	LEMBAGA PEMASYARAKATAN SIDOARJO	117111	PERSEDIAAN	24.996.847,00	realisasi belanja akun persediaan yang tidak membentuk persediaan pada transaksi pembelian bahan kegiatan kemandirian dan pemenuhan kebutuhan napi rentan yang merupakan bawaang habis pakai dan di jurnal ke akun 521211
112	013.05.405101	LAPAS JOMBANG	132111	PERALATAN DAN MESIN	(5.900.000,00)	Jurnal Beban Ekstrakompatabel
113	013.05.405132	LAPAS LAMONGAN	132111	PERALATAN DAN MESIN	(18.575.920,00)	Jurnal Beban Ekstrakompatabel
114	013.05.405132	LAPAS LAMONGAN	117111	PERSEDIAAN	18.575.920,00	realisasi belanja akun persediaan yang tidak membentuk persediaan pada transaksi pembelian bahan kegiatan kemandirian dan pemenuhan kebutuhan napi rentan yang merupakan bawaang habis pakai dan di jurnal ke akun 521211
115	013.05.405163	LAPAS TULUNGAGUNG	133111	GEDUNG DAN BANGUNAN	(89.455.000,00)	Hibah gedung dan bangunan berupa pengembangan nilai aset
116	013.05.405214	LEMBAGA PEMASYARAKATAN JEMBER	117111	PERSEDIAAN	354.600,00	realisasi belanja akun persediaan yang tidak membentuk persediaan pada transaksi pembelian bahan kegiatan kemandirian dan pemenuhan kebutuhan napi rentan yang merupakan bawaang habis pakai dan di jurnal ke akun 521211
117	013.05.405214	LEMBAGA PEMASYARAKATAN JEMBER	132111	PERALATAN DAN MESIN	(354.600,00)	Jurnal Beban Ekstrakompatabel
118	013.05.405223	LAPAS BONDOWOSO	117111	PERSEDIAAN	781.000,00	realisasi belanja akun persediaan yang tidak membentuk persediaan pada transaksi pembelian bahan kegiatan kemandirian dan pemenuhan kebutuhan napi rentan yang merupakan bawaang habis pakai dan di jurnal ke akun 521211
119	013.05.405223	LAPAS BONDOWOSO	132111	PERALATAN DAN MESIN	(781.000,00)	Jurnal Beban Ekstrakompatabel
120	013.05.405245	RUMAH TAHANAN NEGARA SITUBONDO	117111	PERSEDIAAN	961.800,00	realisasi belanja akun persediaan yang tidak membentuk persediaan pada transaksi pembelian bahan kegiatan kemandirian dan pemenuhan kebutuhan napi rentan yang merupakan bawaang habis pakai dan di jurnal ke akun 521211
121	013.05.405245	RUMAH TAHANAN NEGARA SITUBONDO	132111	PERALATAN DAN MESIN	(961.800,00)	Jurnal Beban Ekstrakompatabel
122	013.05.405270	LEMBAGA PEMASYARAKATAN PAMEKASAN	132111	PERALATAN DAN MESIN	(3.975.000,00)	Jurnal Beban Ekstrakompatabel
123	013.05.405270	LEMBAGA PEMASYARAKATAN PAMEKASAN	117111	PERSEDIAAN	3.975.000,00	realisasi belanja akun persediaan yang tidak membentuk persediaan pada transaksi pembelian bahan kegiatan kemandirian dan pemenuhan kebutuhan napi rentan yang merupakan bawaang habis pakai dan di jurnal ke akun 521211
124	013.05.405358	LAPAS PROBOLINGGO	132111	PERALATAN DAN MESIN	(4.667.850,00)	Jurnal Beban Ekstrakompatabel

DAFTAR SELISIH REKONSILIASI GL BMN
S.D 31 Desember 2021 (Unduh Data per Tanggal 12 Mei 2022)

No	Kode Satker	Nama Satker	Akun	Uraian	Rph Selisih	Keterangan
125	013.05.405358	LAPAS PROBOLINGGO	117111	PERSEDIAAN	9.791.100,00	realisasi belanja akun persediaan yang tidak membentuk persediaan pada transaksi pembelian bahan kegiatan kemandirian dan pemenuhan kebutuhan napi rentan yang merupakan bawah habis pakai dan di jurnal ke akun 521211
126	013.05.405364	RUMAH TAHANAN NEGARA KRAKSAAN	132111	PERALATAN DAN MESIN	(5.325.000,00)	Jurnal Beban Ekstrakompatabel
127	013.05.405364	RUMAH TAHANAN NEGARA KRAKSAAN	117111	PERSEDIAAN	5.325.000,00	realisasi belanja akun persediaan yang tidak membentuk persediaan pada transaksi pembelian bahan kegiatan kemandirian dan pemenuhan kebutuhan napi rentan yang merupakan bawah habis pakai dan di jurnal ke akun 521211
128	013.05.405373	LAPAS LUMAJANG	132111	PERALATAN DAN MESIN	(1.136.000,00)	Jurnal Beban Ekstrakompatabel
129	013.05.405409	LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN MALANG	133111	GEDUNG DAN BANGUNAN	(30.000.000,00)	Hibah gedung dan bangunan berupa pengembangan nilai aset
130	013.05.405409	LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN MALANG	132111	PERALATAN DAN MESIN	(3.553.000,00)	Jurnal Beban Ekstrakompatabel
131	013.05.405409	LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN MALANG	117111	PERSEDIAAN	3.553.000,00	realisasi belanja akun persediaan yang tidak membentuk persediaan pada transaksi pembelian bahan kegiatan kemandirian dan pemenuhan kebutuhan napi rentan yang merupakan bawah habis pakai dan di jurnal ke akun 521211
132	013.05.405446	RUMAH TAHANAN NEGARA MAGETAN	117111	PERSEDIAAN	2.850.000,00	realisasi belanja akun persediaan yang tidak membentuk persediaan pada transaksi pembelian bahan kegiatan kemandirian dan pemenuhan kebutuhan napi rentan yang merupakan bawah habis pakai dan di jurnal ke akun 521211
133	013.05.405446	RUMAH TAHANAN NEGARA MAGETAN	132111	PERALATAN DAN MESIN	(2.850.000,00)	Jurnal Beban Ekstrakompatabel
134	013.05.405461	RUMAH TAHANAN NEGARA PONOROGO	117111	PERSEDIAAN	3.750.000,00	realisasi belanja akun persediaan yang tidak membentuk persediaan pada transaksi pembelian bahan kegiatan kemandirian dan pemenuhan kebutuhan napi rentan yang merupakan bawah habis pakai dan di jurnal ke akun 521211
135	013.05.405461	RUMAH TAHANAN NEGARA PONOROGO	132111	PERALATAN DAN MESIN	(3.750.000,00)	Jurnal Beban Ekstrakompatabel
136	013.05.405477	RUMAH TAHANAN NEGARA PACITAN	117111	PERSEDIAAN	900.000,00	realisasi belanja akun persediaan yang tidak membentuk persediaan pada transaksi pembelian bahan kegiatan kemandirian dan pemenuhan kebutuhan napi rentan yang merupakan bawah habis pakai dan di jurnal ke akun 521211
137	013.05.405477	RUMAH TAHANAN NEGARA PACITAN	132111	PERALATAN DAN MESIN	(900.000,00)	Jurnal Beban Ekstrakompatabel
138	013.05.405483	LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK BLITAR	117111	PERSEDIAAN	300.000,00	realisasi belanja akun persediaan yang tidak membentuk persediaan pada transaksi pembelian bahan kegiatan kemandirian dan pemenuhan kebutuhan napi rentan yang merupakan bawah habis pakai dan di jurnal ke akun 521211
139	013.05.405483	LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK BLITAR	132111	PERALATAN DAN MESIN	(300.000,00)	Jurnal Beban Ekstrakompatabel
140	013.05.405693	LEMBAGA PEMASYARAKATAN MEDAN	117111	PERSEDIAAN	352.400,00	realisasi belanja akun persediaan yang tidak membentuk persediaan pada transaksi pembelian bahan kegiatan kemandirian dan pemenuhan kebutuhan napi rentan yang merupakan bawah habis pakai dan di jurnal ke akun 521211
141	013.05.405693	LEMBAGA PEMASYARAKATAN MEDAN	132111	PERALATAN DAN MESIN	(378.000,00)	Jurnal Beban Ekstrakompatabel
142	013.05.405823	LAPAS LUBUK PAKAM	117111	PERSEDIAAN	12.365.000,00	realisasi belanja akun persediaan yang tidak membentuk persediaan pada transaksi pembelian bahan kegiatan kemandirian dan pemenuhan kebutuhan napi rentan yang merupakan bawah habis pakai dan di jurnal ke akun 521211
143	013.05.405823	LAPAS LUBUK PAKAM	132111	PERALATAN DAN MESIN	(12.365.000,00)	Jurnal Beban Ekstrakompatabel
144	013.05.405891	LAPAS KELAS III KOTANOPAN	132111	PERALATAN DAN MESIN	(1.600.000,00)	realisasi belanja barang akun 52 yang membentuk aset tetap peralatan dan mesin karena telah memenuhi nilai kapitalisasi aset tetap
145	013.05.405891	LAPAS KELAS III KOTANOPAN	117111	PERSEDIAAN	1.600.000,00	realisasi belanja akun persediaan yang tidak membentuk persediaan pada transaksi pembelian bahan kegiatan kemandirian dan pemenuhan kebutuhan napi rentan yang merupakan bawah habis pakai dan di jurnal ke akun 521211
146	013.05.406092	RUMAH TAHANAN NEGARA LUBUK SIKAPING	131111	TANAH	(30.000.000,00)	Hibah gedung dan bangunan berupa pengembangan nilai aset
147	013.05.406183	LEMBAGA PEMASYARAKATAN BENGKALIS	117111	PERSEDIAAN	56.477.800,00	realisasi belanja akun persediaan yang tidak membentuk persediaan pada transaksi pembelian bahan kegiatan kemandirian dan pemenuhan kebutuhan napi rentan yang merupakan bawah habis pakai dan di jurnal ke akun 521211
148	013.05.406183	LEMBAGA PEMASYARAKATAN BENGKALIS	132111	PERALATAN DAN MESIN	(56.477.800,00)	realisasi belanja barang akun 52 yang membentuk aset tetap peralatan dan mesin karena telah memenuhi nilai kapitalisasi aset tetap
149	013.05.406219	RUMAH TAHANAN NEGARA RENGAT	117111	PERSEDIAAN	1.200.000,00	realisasi belanja akun persediaan yang tidak membentuk persediaan pada transaksi pembelian bahan kegiatan kemandirian dan pemenuhan kebutuhan napi rentan yang merupakan bawah habis pakai dan di jurnal ke akun 521211
150	013.05.406219	RUMAH TAHANAN NEGARA RENGAT	132111	PERALATAN DAN MESIN	(1.200.000,00)	Realisasi belanja 536111 untuk pembelian aplikasi penunjang Tusi Rupbasan yang sd 31 Desember belum diterima oleh satker
151	013.05.406256	LAPAS KELAS IIA BANGKINANG	117111	PERSEDIAAN	27.100.000,00	realisasi belanja akun persediaan yang tidak membentuk persediaan pada transaksi pembelian bahan kegiatan kemandirian dan pemenuhan kebutuhan napi rentan yang merupakan bawah habis pakai dan di jurnal ke akun 521211

DAFTAR SELISIH REKONSILIASI GL BMN
S.D 31 Desember 2021 (Unduh Data per Tanggal 12 Mei 2022)

No	Kode Satker	Nama Satker	Akun	Uraian	Rph Selisih	Keterangan
152	013.05.406271	LEMBAGA PEMASYARAKATAN TANJUNG PINANG	117111	PERSEDIAAN	8.840.399,00	realisasi belanja akun persediaan yang tidak membentuk persediaan pada transaksi pembelian bahan kegiatan kemandirian dan pemenuhan kebutuhan napi rentan yang merupakan bawah habis pakai dan di jurnal ke akun 521211
153	013.05.406271	LEMBAGA PEMASYARAKATAN TANJUNG PINANG	132111	PERALATAN DAN MESIN	(8.840.399,00)	Jurnal Beban Ekstrakompatabel
154	013.05.406282	LEMBAGA PEMASYARAKATAN METRO	132111	PERALATAN DAN MESIN	(30.170.000,00)	Jurnal Beban Ekstrakompatabel
155	013.05.406293	LEMBAGA PEMASYARAKATAN JAMBI	132111	PERALATAN DAN MESIN	(1.950.000,00)	Jurnal Beban Ekstrakompatabel
156	013.05.406293	LEMBAGA PEMASYARAKATAN JAMBI	117111	PERSEDIAAN	1.950.000,00	realisasi belanja akun persediaan yang tidak membentuk persediaan pada transaksi pembelian bahan kegiatan kemandirian dan pemenuhan kebutuhan napi rentan yang merupakan bawah habis pakai dan di jurnal ke akun 521211
157	013.05.406293	LEMBAGA PEMASYARAKATAN JAMBI	133111	GEDUNG DAN BANGUNAN	(6.571.000,00)	Koreksi nilai KDP atas pengembalian belanja modal gedung dan bangunan
158	013.05.406322	LEMBAGA PEMASYARAKATAN MUARA TEBO	117111	PERSEDIAAN	2.000.000,00	realisasi belanja akun persediaan yang tidak membentuk persediaan pada transaksi pembelian bahan kegiatan kemandirian dan pemenuhan kebutuhan napi rentan yang merupakan bawah habis pakai dan di jurnal ke akun 521211
159	013.05.406322	LEMBAGA PEMASYARAKATAN MUARA TEBO	132111	PERALATAN DAN MESIN	(2.000.000,00)	pembelian 4 rebana @500.000 pakai akun 521219 membentuk aset intra
160	013.05.406344	LEMBAGA PEMASYARAKATAN KUALA TUNGKAL	117111	PERSEDIAAN	5.390.000,00	realisasi belanja akun persediaan yang tidak membentuk persediaan pada transaksi pembelian bahan kegiatan kemandirian dan pemenuhan kebutuhan napi rentan yang merupakan bawah habis pakai dan di jurnal ke akun 521211
161	013.05.406344	LEMBAGA PEMASYARAKATAN KUALA TUNGKAL	132111	PERALATAN DAN MESIN	(5.390.000,00)	Jurnal Beban Ekstrakompatabel
162	013.05.406353	RUMAH TAHANAN NEGARA SUNGAI PENUH	132111	PERALATAN DAN MESIN	(1.000.000,00)	Jurnal Beban Ekstrakompatabel
163	013.05.406353	RUMAH TAHANAN NEGARA SUNGAI PENUH	117111	PERSEDIAAN	1.000.000,00	realisasi belanja akun persediaan yang tidak membentuk persediaan pada transaksi pembelian bahan kegiatan kemandirian dan pemenuhan kebutuhan napi rentan yang merupakan bawah habis pakai dan di jurnal ke akun 521211
164	013.05.406381	LEMBAGA PEMASYARAKATAN TANJUNG RAJA	117111	PERSEDIAAN	9.206.000,00	realisasi belanja akun persediaan yang tidak membentuk persediaan pada transaksi pembelian bahan kegiatan kemandirian dan pemenuhan kebutuhan napi rentan yang merupakan bawah habis pakai dan di jurnal ke akun 521211
165	013.05.406381	LEMBAGA PEMASYARAKATAN TANJUNG RAJA	132111	PERALATAN DAN MESIN	(1.440.000,00)	Jurnal Beban Ekstrakompatabel
166	013.05.406401	LAPAS SEKAYU	117111	PERSEDIAAN	17.500.000,00	realisasi belanja akun persediaan yang tidak membentuk persediaan pada transaksi pembelian bahan kegiatan kemandirian dan pemenuhan kebutuhan napi rentan yang merupakan bawah habis pakai dan di jurnal ke akun 521211
167	013.05.406426	LAPAS KELAS IIB MUARA DUA	117111	PERSEDIAAN	40.000.000,00	realisasi belanja akun persediaan yang tidak membentuk persediaan pada transaksi pembelian bahan kegiatan kemandirian dan pemenuhan kebutuhan napi rentan yang merupakan bawah habis pakai dan di jurnal ke akun 521211
168	013.05.406432	LAPAS KELAS III PAGAR ALAM	132111	PERALATAN DAN MESIN	(5.055.000,00)	Jurnal Beban Ekstrakompatabel
169	013.05.406441	LAPAS KELAS IIB EMPAT LAWANG	117111	PERSEDIAAN	1.450.000,00	realisasi belanja akun persediaan yang tidak membentuk persediaan pada transaksi pembelian bahan kegiatan kemandirian dan pemenuhan kebutuhan napi rentan yang merupakan bawah habis pakai dan di jurnal ke akun 521211
170	013.05.406457	LEMBAGA PEMASYARAKATAN LUBUK LINGGAU	117111	PERSEDIAAN	80.000.000,00	realisasi belanja akun persediaan yang tidak membentuk persediaan pada transaksi pembelian bahan kegiatan kemandirian dan pemenuhan kebutuhan napi rentan yang merupakan bawah habis pakai dan di jurnal ke akun 521211
171	013.05.406463	LAPAS KELAS III SAROLANGUN RAWAS	117111	PERSEDIAAN	39.073.500,00	realisasi belanja akun persediaan yang tidak membentuk persediaan pada transaksi pembelian bahan kegiatan kemandirian dan pemenuhan kebutuhan napi rentan yang merupakan bawah habis pakai dan di jurnal ke akun 521211
172	013.05.406488	LAPAS KELAS IIB MARTAPURA	132111	PERALATAN DAN MESIN	(10.990.000,00)	Jurnal Beban Ekstrakompatabel
173	013.05.406488	LAPAS KELAS IIB MARTAPURA	117111	PERSEDIAAN	40.025.000,00	realisasi belanja akun persediaan yang tidak membentuk persediaan pada transaksi pembelian bahan kegiatan kemandirian dan pemenuhan kebutuhan napi rentan yang merupakan bawah habis pakai dan di jurnal ke akun 521211
174	013.05.406523	RUTAN KELAS IIB MUNTOK	132111	PERALATAN DAN MESIN	(1.150.000,00)	realisasi belanja barang akun 52 yang membentuk aset tetap peralatan dan mesin karena telah memenuhi nilai kapitalisasi aset tetap
175	013.05.406523	RUTAN KELAS IIB MUNTOK	117111	PERSEDIAAN	1.150.000,00	realisasi belanja akun persediaan yang tidak membentuk persediaan pada transaksi pembelian bahan kegiatan kemandirian dan pemenuhan kebutuhan napi rentan yang merupakan bawah habis pakai dan di jurnal ke akun 521211
176	013.05.406539	LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK PALEMBANG	117111	PERSEDIAAN	2.390.000,00	realisasi belanja akun persediaan yang tidak membentuk persediaan pada transaksi pembelian bahan kegiatan kemandirian dan pemenuhan kebutuhan napi rentan yang merupakan bawah habis pakai dan di jurnal ke akun 521211
177	013.05.406545	LEMBAGA PEMASYARAKATAN BANDAR LAMPUNG	132111	PERALATAN DAN MESIN	(10.000.000,00)	Jurnal Beban Ekstrakompatabel
178	013.05.406633	RUMAH TAHANAN NEGARA MEMPAWAH	132111	PERALATAN DAN MESIN	(11.720.000,00)	Jurnal Beban Ekstrakompatabel
179	013.05.406658	LEMBAGA PEMASYARAKATAN SINTANG	132111	PERALATAN DAN MESIN	(320.000,00)	Jurnal Beban Ekstrakompatabel

DAFTAR SELISIH REKONSILIASI GL BMN
S.D 31 Desember 2021 (Unduh Data per Tanggal 12 Mei 2022)

No	Kode Satker	Nama Satker	Akun	Uraian	Rph Selisih	Keterangan
180	013.05.406664	LEMBAGA PEMASYARAKATAN KETAPANG	117111	PERSEDIAAN	22.000.000,00	realisasi belanja akun persediaan yang tidak membentuk persediaan pada transaksi pembelian bahan kegiatan kemandirian dan pemenuhan kebutuhan napi rentan yang merupakan bawah habis pakai dan di jurnal ke akun 521211
181	013.05.406673	LEMBAGA PEMASYARAKATAN ANAK NEGARA SUNGAI RAYA	132111	PERALATAN DAN MESIN	(1.540.000,00)	Jurnal Beban Ekstrakompatabel
182	013.05.406761	LAPAS KELAS IIA KOTABARU	132111	PERALATAN DAN MESIN	(3.358.000,00)	Jurnal Beban Ekstrakompatabel
183	013.05.406761	LAPAS KELAS IIA KOTABARU	133111	GEDUNG DAN BANGUNAN	(52.660.634,00)	Koreksi nilai KDP atas pengembalian belanja modal gedung dan bangunan
184	013.05.406828	LEMBAGA PEMASYARAKATAN BALIKPAPAN	132111	PERALATAN DAN MESIN	(17.800.000,00)	Jurnal Beban Ekstrakompatabel
185	013.05.406828	LEMBAGA PEMASYARAKATAN BALIKPAPAN	117111	PERSEDIAAN	18.525.000,00	realisasi belanja akun persediaan yang tidak membentuk persediaan pada transaksi pembelian bahan kegiatan kemandirian dan pemenuhan kebutuhan napi rentan yang merupakan bawah habis pakai dan di jurnal ke akun 521211
186	013.05.406859	LAPAS KELAS IIA TENGARONG	133111	GEDUNG DAN BANGUNAN	(1.808.205.500,00)	Hibah gedung dan bangunan berupa pengembangan nilai aset
187	013.05.406859	LAPAS KELAS IIA TENGARONG	132111	PERALATAN DAN MESIN	(10.995.600,00)	Jurnal Beban Ekstrakompatabel
188	013.05.406922	LEMBAGA PEMASYARAKATAN GORONTALO	132111	PERALATAN DAN MESIN	(1.031.375,00)	Jurnal Beban Ekstrakompatabel
189	013.05.406962	LAPAS KELAS III LIRUNG	132111	PERALATAN DAN MESIN	(5.100.000,00)	Jurnal Beban Ekstrakompatabel
190	013.05.406962	LAPAS KELAS III LIRUNG	117111	PERSEDIAAN	5.100.000,00	realisasi belanja akun persediaan yang tidak membentuk persediaan pada transaksi pembelian bahan kegiatan kemandirian dan pemenuhan kebutuhan napi rentan yang merupakan bawah habis pakai dan di jurnal ke akun 521211
191	013.05.406984	LEMBAGA PEMASYARAKATAN ULU SIAU	132111	PERALATAN DAN MESIN	(4.830.000,00)	Jurnal Beban Ekstrakompatabel
192	013.05.406984	LEMBAGA PEMASYARAKATAN ULU SIAU	117111	PERSEDIAAN	4.830.000,00	realisasi belanja akun persediaan yang tidak membentuk persediaan pada transaksi pembelian bahan kegiatan kemandirian dan pemenuhan kebutuhan napi rentan yang merupakan bawah habis pakai dan di jurnal ke akun 521211
193	013.05.407013	LAPAS KELAS III PARIGI	132111	PERALATAN DAN MESIN	(1.370.000,00)	Jurnal Beban Ekstrakompatabel
194	013.05.407013	LAPAS KELAS III PARIGI	117111	PERSEDIAAN	1.370.000,00	realisasi belanja akun persediaan yang tidak membentuk persediaan pada transaksi pembelian bahan kegiatan kemandirian dan pemenuhan kebutuhan napi rentan yang merupakan bawah habis pakai dan di jurnal ke akun 521211
195	013.05.407029	LEMBAGA PEMASYARAKATAN TOLI-TOLI	132111	PERALATAN DAN MESIN	(2.400.000,00)	Jurnal Beban Ekstrakompatabel
196	013.05.407029	LEMBAGA PEMASYARAKATAN TOLI-TOLI	117111	PERSEDIAAN	2.400.000,00	realisasi belanja akun persediaan yang tidak membentuk persediaan pada transaksi pembelian bahan kegiatan kemandirian dan pemenuhan kebutuhan napi rentan yang merupakan bawah habis pakai dan di jurnal ke akun 521211
197	013.05.407066	RUMAH TAHANAN NEGARA POSO	132111	PERALATAN DAN MESIN	(5.800.000,00)	Jurnal Beban Ekstrakompatabel
198	013.05.407066	RUMAH TAHANAN NEGARA POSO	117111	PERSEDIAAN	5.800.000,00	realisasi belanja akun persediaan yang tidak membentuk persediaan pada transaksi pembelian bahan kegiatan kemandirian dan pemenuhan kebutuhan napi rentan yang merupakan bawah habis pakai dan di jurnal ke akun 521211
199	013.05.407097	RUMAH TAHANAN NEGARA PANGKAJENE	117111	PERSEDIAAN	3.150.000,00	realisasi belanja akun persediaan yang tidak membentuk persediaan pada transaksi pembelian bahan kegiatan kemandirian dan pemenuhan kebutuhan napi rentan yang merupakan bawah habis pakai dan di jurnal ke akun 521211
200	013.05.407097	RUMAH TAHANAN NEGARA PANGKAJENE	132111	PERALATAN DAN MESIN	(3.150.000,00)	Jurnal Beban Ekstrakompatabel
201	013.05.407211	LAPAS KELAS IIA PARE-PARE	117111	PERSEDIAAN	100.000.000,00	realisasi belanja akun persediaan yang tidak membentuk persediaan pada transaksi pembelian bahan kegiatan kemandirian dan pemenuhan kebutuhan napi rentan yang merupakan bawah habis pakai dan di jurnal ke akun 521211
202	013.05.407242	RUMAH TAHANAN NEGARA ENREKANG	132111	PERALATAN DAN MESIN	(3.050.000,00)	Jurnal Beban Ekstrakompatabel
203	013.05.407298	RUMAH TAHANAN NEGARA MAMUJU	132111	PERALATAN DAN MESIN	(500.000,00)	Jurnal Beban Ekstrakompatabel
204	013.05.407298	RUMAH TAHANAN NEGARA MAMUJU	117111	PERSEDIAAN	500.000,00	Jurnal Beban Ekstrakompatabel
205	013.05.407324	RUMAH TAHANAN NEGARA WATANSOPENG	132111	PERALATAN DAN MESIN	(180.000,00)	Jurnal Beban Ekstrakompatabel
206	013.05.407324	RUMAH TAHANAN NEGARA WATANSOPENG	117111	PERSEDIAAN	180.000,00	realisasi belanja akun persediaan yang tidak membentuk persediaan pada transaksi pembelian bahan kegiatan kemandirian dan pemenuhan kebutuhan napi rentan yang merupakan bawah habis pakai dan di jurnal ke akun 521211
207	013.05.407333	LEMBAGA PEMASYARAKATAN KENDARI	132111	PERALATAN DAN MESIN	(4.517.000,00)	Jurnal Beban Ekstrakompatabel
208	013.05.407333	LEMBAGA PEMASYARAKATAN KENDARI	117111	PERSEDIAAN	4.517.000,00	realisasi belanja akun persediaan yang tidak membentuk persediaan pada transaksi pembelian bahan kegiatan kemandirian dan pemenuhan kebutuhan napi rentan yang merupakan bawah habis pakai dan di jurnal ke akun 521211
209	013.05.407349	RUMAH TAHANAN NEGARA RAHA	117111	PERSEDIAAN	350.000,00	realisasi belanja akun persediaan yang tidak membentuk persediaan pada transaksi pembelian bahan kegiatan kemandirian dan pemenuhan kebutuhan napi rentan yang merupakan bawah habis pakai dan di jurnal ke akun 521211
210	013.05.407349	RUMAH TAHANAN NEGARA RAHA	132111	PERALATAN DAN MESIN	(350.000,00)	Jurnal Beban Ekstrakompatabel

DAFTAR SELISIH REKONSILIASI GL BMN
S.D 31 Desember 2021 (Unduh Data per Tanggal 12 Mei 2022)

No	Kode Satker	Nama Satker	Akun	Uraian	Rph Selisih	Keterangan
211	013.05.407499	RUMAH TAHANAN NEGARA TERNATE	117111	PERSEDIAAN	428.903,00	realisasi belanja akun persediaan yang tidak membentuk persediaan pada transaksi pembelian bahan kegiatan kemandirian dan pemenuhan kebutuhan napi rentan yang merupakan bawah habis pakai dan di jurnal ke akun 521211
212	013.05.407499	RUMAH TAHANAN NEGARA TERNATE	132111	PERALATAN DAN MESIN	(428.903,00)	Jurnal Beban Ekstrakompatabel
213	013.05.407519	BALAI PEMASYARAKATAN DENPASAR	132111	PERALATAN DAN MESIN	(112.800.000,00)	realisasi belanja barang akun 52 yang membentuk aset tetap peralatan dan mesin karena telah memenuhi nilai kapitalisasi aset tetap
214	013.05.407519	BALAI PEMASYARAKATAN DENPASAR	133111	GEDUNG DAN BANGUNAN	112.800.000,00	Kesalahan penggunaan akun belanja modal gedung dan bangunan yang membentuk aset peralatan dan mesin
215	013.05.407613	LEMBAGA PEMASYARAKATAN MATARAM	132111	PERALATAN DAN MESIN	(1.800.000,00)	Jurnal Beban Ekstrakompatabel
216	013.05.407613	LEMBAGA PEMASYARAKATAN MATARAM	117111	PERSEDIAAN	7.560.000,00	realisasi belanja akun persediaan yang tidak membentuk persediaan pada transaksi pembelian bahan kegiatan kemandirian dan pemenuhan kebutuhan napi rentan yang merupakan bawah habis pakai dan di jurnal ke akun 521211
217	013.05.407622	LAPAS KELAS IIB SELONG	117111	PERSEDIAAN	5.000.000,00	realisasi belanja akun persediaan yang tidak membentuk persediaan pada transaksi pembelian bahan kegiatan kemandirian dan pemenuhan kebutuhan napi rentan yang merupakan bawah habis pakai dan di jurnal ke akun 521211
218	013.05.407638	RUMAH TAHANAN NEGARA PRAYA	117111	PERSEDIAAN	3.614.000,00	realisasi belanja akun persediaan yang tidak membentuk persediaan pada transaksi pembelian bahan kegiatan kemandirian dan pemenuhan kebutuhan napi rentan yang merupakan bawah habis pakai dan di jurnal ke akun 521211
219	013.05.407638	RUMAH TAHANAN NEGARA PRAYA	132111	PERALATAN DAN MESIN	(3.614.000,00)	Jurnal Beban Ekstrakompatabel
220	013.05.407644	LEMBAGA PEMASYARAKATAN SUMBAWA BESAR	117111	PERSEDIAAN	14.730.000,00	realisasi belanja akun persediaan yang tidak membentuk persediaan pada transaksi pembelian bahan kegiatan kemandirian dan pemenuhan kebutuhan napi rentan yang merupakan bawah habis pakai dan di jurnal ke akun 521211
221	013.05.407653	RUMAH TAHANAN NEGARA RABA/BIMA	132111	PERALATAN DAN MESIN	(700.000,00)	Jurnal Beban Ekstrakompatabel
222	013.05.407653	RUMAH TAHANAN NEGARA RABA/BIMA	117111	PERSEDIAAN	6.700.000,00	realisasi belanja akun persediaan yang tidak membentuk persediaan pada transaksi pembelian bahan kegiatan kemandirian dan pemenuhan kebutuhan napi rentan yang merupakan bawah habis pakai dan di jurnal ke akun 521211
223	013.05.407794	LEMBAGA PEMASYARAKATAN ABEPURA	132111	PERALATAN DAN MESIN	(4.460.500,00)	Jurnal Beban Ekstrakompatabel
224	013.05.407794	LEMBAGA PEMASYARAKATAN ABEPURA	117111	PERSEDIAAN	4.460.500,00	realisasi belanja akun persediaan yang tidak membentuk persediaan pada transaksi pembelian bahan kegiatan kemandirian dan pemenuhan kebutuhan napi rentan yang merupakan bawah habis pakai dan di jurnal ke akun 521211
225	013.05.407870	LAPAS KELAS III TEMINABUHAN	132111	PERALATAN DAN MESIN	(6.380.000,00)	Jurnal Beban Ekstrakompatabel
226	013.05.407870	LAPAS KELAS III TEMINABUHAN	117111	PERSEDIAAN	6.380.000,00	realisasi belanja akun persediaan yang tidak membentuk persediaan pada transaksi pembelian bahan kegiatan kemandirian dan pemenuhan kebutuhan napi rentan yang merupakan bawah habis pakai dan di jurnal ke akun 521211
227	013.05.407876	LEMBAGA PEMASYARAKATAN SORONG	117111	PERSEDIAAN	18.000.000,00	realisasi belanja akun persediaan yang tidak membentuk persediaan pada transaksi pembelian bahan kegiatan kemandirian dan pemenuhan kebutuhan napi rentan yang merupakan bawah habis pakai dan di jurnal ke akun 521211
228	013.05.407876	LEMBAGA PEMASYARAKATAN SORONG	132111	PERALATAN DAN MESIN	(18.000.000,00)	realisasi belanja barang akun 52 yang membentuk aset tetap peralatan dan mesin karena telah memenuhi nilai kapitalisasi aset tetap
229	013.05.407882	LEMBAGA PEMASYARAKATAN FAK-FAK	117111	PERSEDIAAN	10.200.000,00	realisasi belanja akun persediaan yang tidak membentuk persediaan pada transaksi pembelian bahan kegiatan kemandirian dan pemenuhan kebutuhan napi rentan yang merupakan bawah habis pakai dan di jurnal ke akun 521211
230	013.05.407927	LEMBAGA PEMASYARAKATAN CURUP	117111	PERSEDIAAN	5.903.925,00	realisasi belanja akun persediaan yang tidak membentuk persediaan pada transaksi pembelian bahan kegiatan kemandirian dan pemenuhan kebutuhan napi rentan yang merupakan bawah habis pakai dan di jurnal ke akun 521211
231	013.05.407927	LEMBAGA PEMASYARAKATAN CURUP	132111	PERALATAN DAN MESIN	(5.903.925,00)	Jurnal Beban Ekstrakompatabel
232	013.05.408649	LEMBAGA PEMASYARAKATAN DOMPU	117111	PERSEDIAAN	9.160.000,00	realisasi belanja akun persediaan yang tidak membentuk persediaan pada transaksi pembelian bahan kegiatan kemandirian dan pemenuhan kebutuhan napi rentan yang merupakan bawah habis pakai dan di jurnal ke akun 521211
233	013.05.408649	LEMBAGA PEMASYARAKATAN DOMPU	132111	PERALATAN DAN MESIN	(98.229.500,00)	Jurnal Beban Ekstrakompatabel
234	013.05.408661	LEMBAGA PEMASYARAKATAN WANITA TANGERANG	117111	PERSEDIAAN	1.230.500,00	realisasi belanja akun persediaan yang tidak membentuk persediaan pada transaksi pembelian bahan kegiatan kemandirian dan pemenuhan kebutuhan napi rentan yang merupakan bawah habis pakai dan di jurnal ke akun 521211
235	013.05.408661	LEMBAGA PEMASYARAKATAN WANITA TANGERANG	132111	PERALATAN DAN MESIN	(1.230.500,00)	Jurnal Beban Ekstrakompatabel
236	013.05.408692	RUMAH TAHANAN NEGARA JAKARTA PUSAT	132111	PERALATAN DAN MESIN	(407.500,00)	Jurnal Beban Ekstrakompatabel

DAFTAR SELISIH REKONSILIASI GL BMN
S.D 31 Desember 2021 (Unduh Data per Tanggal 12 Mei 2022)

No	Kode Satker	Nama Satker	Akun	Uraian	Rph Selisih	Keterangan
237	013.05.408692	RUMAH TAHANAN NEGARA JAKARTA PUSAT	117111	PERSEDIAAN	407.500,00	realisasi belanja akun persediaan yang tidak membentuk persediaan pada transaksi pembelian bahan kegiatan kemandirian dan pemenuhan kebutuhan napi rentan yang merupakan bawah habis pakai dan di jurnal ke akun 521211
238	013.05.409151	LEMBAGA PEMASYARAKATAN ANAK PEKANBARU	117111	PERSEDIAAN	113.545.000,00	realisasi belanja akun persediaan yang tidak membentuk persediaan pada transaksi pembelian bahan kegiatan kemandirian dan pemenuhan kebutuhan napi rentan yang merupakan bawah habis pakai dan di jurnal ke akun 521211
239	013.05.409151	LEMBAGA PEMASYARAKATAN ANAK PEKANBARU	132111	PERALATAN DAN MESIN	(38.700.000,00)	realisasi belanja barang akun 52 yang membentuk aset tetap peralatan dan mesin karena telah memenuhi nilai kapitalisasi aset tetap
240	013.05.409263	DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN	117111	PERSEDIAAN	(8.550.729.599,00)	penggunaan akun 532111 untuk transaksi pembelian Alat membuat berupa cap batik yang membentuk Aset tetap lainnya dibawah nilai kapitalisasi
241	013.05.409263	DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN	135000	ASET TETAP LAINNYA	(4.204.124.500,00)	realisasi belanja 532111 membentuk ATB berupa aplikasi SDP Rp. 4.019.874.500 dan pekerjaan rehap bangunan LPP Tangerang Rp.184.250.000.-
242	013.05.409263	DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN	132111	PERALATAN DAN MESIN	89.260.084.340,00	Realisasi belanja modal peralatan dan mesin yang belum diinput di SIMAK BMN disebabkan barang belum diterima per 31 Desember 2021
243	013.05.409263	DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN	133111	GEDUNG DAN BANGUNAN	1.164.431.150,00	penggunaan akun 532111 untuk transaksi pembelian Alat membuat berupa cap batik yang membentuk Aset tetap lainnya dibawah nilai kapitalisasi
244	013.05.409263	DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN	134000	JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN	(596.970.000,00)	transaksi Pembangunan jalan dan jembatan di pulau nusa kambangan menggunakan akun GB dan tidak membentuk GB
245	013.05.418332	Lapas Perempuan Kelas IIA Palangkaraya	117111	PERSEDIAAN	355.000,00	realisasi belanja akun persediaan yang tidak membentuk persediaan pada transaksi pembelian bahan kegiatan kemandirian dan pemenuhan kebutuhan napi rentan yang merupakan bawah habis pakai dan di jurnal ke akun 521211
246	013.05.418332	Lapas Perempuan Kelas IIA Palangkaraya	132111	PERALATAN DAN MESIN	(355.000,00)	Realisasi belanja 536111 untuk pembelian aplikasi penunjang Tusi Rupbasan yang sd 31 Desember belum diterima oleh satker
247	013.05.418335	Lapas Perempuan Kelas IIA Pekanbaru	117111	PERSEDIAAN	2.210.000,00	realisasi belanja akun persediaan yang tidak membentuk persediaan pada transaksi pembelian bahan kegiatan kemandirian dan pemenuhan kebutuhan napi rentan yang merupakan bawah habis pakai dan di jurnal ke akun 521211
248	013.05.418335	Lapas Perempuan Kelas IIA Pekanbaru	132111	PERALATAN DAN MESIN	(2.210.000,00)	Jurnal Beban Ekstrakompatabel
249	013.05.418338	Lapas Perempuan Kelas IIB Jambi	133111	GEDUNG DAN BANGUNAN	(486.181.000,00)	Hibah gedung dan bangunan berupa pengembangan nilai aset
250	013.05.418338	Lapas Perempuan Kelas IIB Jambi	117111	PERSEDIAAN	1.335.500,00	realisasi belanja akun persediaan yang tidak membentuk persediaan pada transaksi pembelian bahan kegiatan kemandirian dan pemenuhan kebutuhan napi rentan yang merupakan bawah habis pakai dan di jurnal ke akun 521211
251	013.05.418340	Lapas Perempuan Kelas IIB Yogyakarta	132111	PERALATAN DAN MESIN	(15.500.000,00)	Jurnal Beban Ekstrakompatabel
252	013.05.418341	Lapas Perempuan Kelas IIB Batam	117111	PERSEDIAAN	290.000,00	realisasi belanja akun persediaan yang tidak membentuk persediaan pada transaksi pembelian bahan kegiatan kemandirian dan pemenuhan kebutuhan napi rentan yang merupakan bawah habis pakai dan di jurnal ke akun 521211
253	013.05.418341	Lapas Perempuan Kelas IIB Batam	132111	PERALATAN DAN MESIN	(290.000,00)	Jurnal Beban Ekstrakompatabel
254	013.05.418342	Lapas Perempuan Kelas IIB Bengkulu	117111	PERSEDIAAN	7.321.400,00	realisasi belanja akun persediaan yang tidak membentuk persediaan pada transaksi pembelian bahan kegiatan kemandirian dan pemenuhan kebutuhan napi rentan yang merupakan bawah habis pakai dan di jurnal ke akun 521211
255	013.05.418342	Lapas Perempuan Kelas IIB Bengkulu	132111	PERALATAN DAN MESIN	(7.321.400,00)	Jurnal Beban Ekstrakompatabel
256	013.05.418345	Lapas Perempuan Kelas III Kendari	117111	PERSEDIAAN	3.250.000,00	realisasi belanja akun persediaan yang tidak membentuk persediaan pada transaksi pembelian bahan kegiatan kemandirian dan pemenuhan kebutuhan napi rentan yang merupakan bawah habis pakai dan di jurnal ke akun 521211
257	013.05.418345	Lapas Perempuan Kelas III Kendari	132111	PERALATAN DAN MESIN	(3.250.000,00)	Jurnal Beban Ekstrakompatabel
258	013.05.418349	Lapas Perempuan Kelas III Gorontalo	132111	PERALATAN DAN MESIN	(1.310.000,00)	Jurnal Beban Ekstrakompatabel
259	013.05.418350	Lapas Perempuan Kelas III Ternate	117111	PERSEDIAAN	1.220.000,00	realisasi belanja akun persediaan yang tidak membentuk persediaan pada transaksi pembelian bahan kegiatan kemandirian dan pemenuhan kebutuhan napi rentan yang merupakan bawah habis pakai dan di jurnal ke akun 521211
260	013.05.418350	Lapas Perempuan Kelas III Ternate	132111	PERALATAN DAN MESIN	(1.220.000,00)	Jurnal Beban Ekstrakompatabel
261	013.05.418351	Lapas Perempuan Kelas III Mataram	117111	PERSEDIAAN	2.279.984,00	realisasi belanja akun persediaan yang tidak membentuk persediaan pada transaksi pembelian bahan kegiatan kemandirian dan pemenuhan kebutuhan napi rentan yang merupakan bawah habis pakai dan di jurnal ke akun 521211
262	013.05.418351	Lapas Perempuan Kelas III Mataram	132111	PERALATAN DAN MESIN	(2.828.300,00)	Jurnal Beban Ekstrakompatabel
263	013.05.418361	Lapas Perempuan Kelas III Manokwari	132111	PERALATAN DAN MESIN	(1.700.000,00)	Jurnal Beban Ekstrakompatabel
264	013.05.418365	Rutan Perempuan Kelas IIA Bandung	132111	PERALATAN DAN MESIN	(1.900.000,00)	penggunaan akun 532111 untuk transaksi pembelian Alat membuat berupa cap batik yang membentuk Aset tetap lainnya dibawah nilai kapitalisasi

DAFTAR SELISIH REKONSILIASI GL BMN
S.D 31 Desember 2021 (Unduh Data per Tanggal 12 Mei 2022)

No	Kode Satker	Nama Satker	Akun	Uraian	Rph Selisih	Keterangan
265	013.05.418365	Rutan Perempuan Kelas IIA Bandung	117111	PERSEDIAAN	9.997.750,00	realisasi belanja akun persediaan yang tidak membentuk persediaan pada transaksi pembelian bahan kegiatan kemandirian dan pemenuhan kebutuhan napi rentan yang merupakan bawang habis pakai dan dijumlah ke akun 521211
266	013.05.418366	LAPAS PEMUDA KELAS III LANGKAT PROVINSI SUMATERA UTARA	117111	PERSEDIAAN	79.000.000,00	realisasi belanja akun persediaan yang tidak membentuk persediaan pada transaksi pembelian bahan kegiatan kemandirian dan pemenuhan kebutuhan napi rentan yang merupakan bawang habis pakai dan dijumlah ke akun 521211
267	013.05.418367	Lapas Kelas III Sukamara Provinsi Kalimantan Tengah	117111	PERSEDIAAN	7.483.700,00	realisasi belanja akun persediaan yang tidak membentuk persediaan pada transaksi pembelian bahan kegiatan kemandirian dan pemenuhan kebutuhan napi rentan yang merupakan bawang habis pakai dan dijumlah ke akun 521211
268	013.05.418367	Lapas Kelas III Sukamara Provinsi Kalimantan Tengah	132111	PERALATAN DAN MESIN	(7.483.700,00)	realisasi belanja barang akun 52 yang membentuk aset tetap peralatan dan mesin karena telah memenuhi nilai kapitalisasi aset tetap
269	013.05.419140	LPKA JOGJAKARTA, PROVINSI D.I YOGYAKARTA	132111	PERALATAN DAN MESIN	(27.080.900,00)	Jurnal Beban Ekstrakompatabel
270	013.05.497645	RUMAH TAHANAN NEGARA CIPINANG	132111	PERALATAN DAN MESIN	(3.394.380,00)	Jurnal Beban Ekstrakompatabel
271	013.05.497645	RUMAH TAHANAN NEGARA CIPINANG	117111	PERSEDIAAN	3.394.380,00	realisasi belanja akun persediaan yang tidak membentuk persediaan pada transaksi pembelian bahan kegiatan kemandirian dan pemenuhan kebutuhan napi rentan yang merupakan bawang habis pakai dan dijumlah ke akun 521211
272	013.05.497651	LEMBAGA PEMASYARAKATAN SALEMBA	132111	PERALATAN DAN MESIN	(1.410.000,00)	Jurnal Beban Ekstrakompatabel
273	013.05.497651	LEMBAGA PEMASYARAKATAN SALEMBA	117111	PERSEDIAAN	1.410.000,00	realisasi belanja akun persediaan yang tidak membentuk persediaan pada transaksi pembelian bahan kegiatan kemandirian dan pemenuhan kebutuhan napi rentan yang merupakan bawang habis pakai dan dijumlah ke akun 521211
274	013.05.497676	LEMBAGA PEMASYARAKATAN CIBINONG	117111	PERSEDIAAN	16.104.200,00	realisasi belanja akun persediaan yang tidak membentuk persediaan pada transaksi pembelian bahan kegiatan kemandirian dan pemenuhan kebutuhan napi rentan yang merupakan bawang habis pakai dan dijumlah ke akun 521211
275	013.05.497676	LEMBAGA PEMASYARAKATAN CIBINONG	132111	PERALATAN DAN MESIN	(6.129.000,00)	Jurnal Beban Ekstrakompatabel
276	013.05.497682	LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA BANDUNG	117111	PERSEDIAAN	5.999.700,00	realisasi belanja akun persediaan yang tidak membentuk persediaan pada transaksi pembelian bahan kegiatan kemandirian dan pemenuhan kebutuhan napi rentan yang merupakan bawang habis pakai dan dijumlah ke akun 521211
277	013.05.497691	RUMAH TAHANAN NEGARA BATANG	132111	PERALATAN DAN MESIN	(3.450.000,00)	Jurnal Beban Ekstrakompatabel
278	013.05.497691	RUMAH TAHANAN NEGARA BATANG	117111	PERSEDIAAN	3.450.000,00	realisasi belanja akun persediaan yang tidak membentuk persediaan pada transaksi pembelian bahan kegiatan kemandirian dan pemenuhan kebutuhan napi rentan yang merupakan bawang habis pakai dan dijumlah ke akun 521211
279	013.05.497711	LEMBAGA PEMASYARAKATAN SLAWI	132111	PERALATAN DAN MESIN	(1.200.000,00)	Realisasi belanja 536111 untuk pembelian aplikasi penunjang Tusi Rupbasan yang sd 31 Desember belum diterima oleh satker
280	013.05.497711	LEMBAGA PEMASYARAKATAN SLAWI	117111	PERSEDIAAN	1.200.000,00	realisasi belanja akun persediaan yang tidak membentuk persediaan pada transaksi pembelian bahan kegiatan kemandirian dan pemenuhan kebutuhan napi rentan yang merupakan bawang habis pakai dan dijumlah ke akun 521211
281	013.05.497733	LEMBAGA PEMASYARAKATAN WANITA PALEMBANG	132111	PERALATAN DAN MESIN	(5.577.375,00)	Jurnal Beban Ekstrakompatabel
282	013.05.497758	LEMBAGA PEMASYARAKATAN WAY KANAN	117111	PERSEDIAAN	47.498.000,00	realisasi belanja akun persediaan yang tidak membentuk persediaan pada transaksi pembelian bahan kegiatan kemandirian dan pemenuhan kebutuhan napi rentan yang merupakan bawang habis pakai dan dijumlah ke akun 521211
283	013.05.497773	RUMAH TAHANAN NEGARA LANDAK	132111	PERALATAN DAN MESIN	(1.800.000,00)	Jurnal Beban Ekstrakompatabel
284	013.05.497773	RUMAH TAHANAN NEGARA LANDAK	117111	PERSEDIAAN	1.800.000,00	realisasi belanja akun persediaan yang tidak membentuk persediaan pada transaksi pembelian bahan kegiatan kemandirian dan pemenuhan kebutuhan napi rentan yang merupakan bawang habis pakai dan dijumlah ke akun 521211
285	013.05.526801	RUMAH TAHANAN NEGARA BANDUNG	117111	PERSEDIAAN	4.500.000,00	realisasi belanja akun persediaan yang tidak membentuk persediaan pada transaksi pembelian bahan kegiatan kemandirian dan pemenuhan kebutuhan napi rentan yang merupakan bawang habis pakai dan dijumlah ke akun 521211
286	013.05.559879	BALAI PEMASYARAKATAN JAKARTA SELATAN	132111	PERALATAN DAN MESIN	(10.906.500,00)	Jurnal Beban Ekstrakompatabel
287	013.05.567869	RUMAH TAHANAN NEGARA GRESIK	132111	PERALATAN DAN MESIN	(4.180.000,00)	realisasi belanja barang akun 52 yang membentuk aset tetap peralatan dan mesin karena telah memenuhi nilai kapitalisasi aset tetap
288	013.05.567869	RUMAH TAHANAN NEGARA GRESIK	117111	PERSEDIAAN	4.180.000,00	realisasi belanja akun persediaan yang tidak membentuk persediaan pada transaksi pembelian bahan kegiatan kemandirian dan pemenuhan kebutuhan napi rentan yang merupakan bawang habis pakai dan dijumlah ke akun 521211
289	013.05.567873	RUMAH TAHANAN NEGARA PONTIANAK	132111	PERALATAN DAN MESIN	(700.000,00)	Jurnal Beban Ekstrakompatabel
290	013.05.567890	RUMAH TAHANAN NEGARA PALU	117111	PERSEDIAAN	1.250.000,00	realisasi belanja akun persediaan yang tidak membentuk persediaan pada transaksi pembelian bahan kegiatan kemandirian dan pemenuhan kebutuhan napi rentan yang merupakan bawang habis pakai dan dijumlah ke akun 521211

DAFTAR SELISIH REKONSILIASI GL BMN
S.D 31 Desember 2021 (Unduh Data per Tanggal 12 Mei 2022)

No	Kode Satker	Nama Satker	Akun	Uraian	Rph Selisih	Keterangan
291	013.05.567890	RUMAH TAHANAN NEGARA PALU	132111	PERALATAN DAN MESIN	(1.250.000,00)	Jurnal Beban Ekstrakompatabel
292	013.05.568712	LAPAS SUNGAI LIAT	132111	PERALATAN DAN MESIN	(5.843.000,00)	Jurnal Beban Ekstrakompatabel
293	013.05.568712	LAPAS SUNGAI LIAT	117111	PERSEDIAAN	5.843.000,00	realisasi belanja akun persediaan yang tidak membentuk persediaan pada transaksi pembelian bahan kegiatan kemandirian dan pemenuhan kebutuhan napi rentan yang merupakan bawang habis pakai dan di jurnal ke akun 521211
294	013.05.626136	LEMBAGA PEMASYARAKATAN ANAK, MUARA BULIAN, JAMBI	132111	PERALATAN DAN MESIN	(1.000.000,00)	Jurnal Beban Ekstrakompatabel
295	013.05.626136	LEMBAGA PEMASYARAKATAN ANAK, MUARA BULIAN, JAMBI	117111	PERSEDIAAN	3.972.500,00	realisasi belanja akun persediaan yang tidak membentuk persediaan pada transaksi pembelian bahan kegiatan kemandirian dan pemenuhan kebutuhan napi rentan yang merupakan bawang habis pakai dan di jurnal ke akun 521211
296	013.05.632009	BAPAS KELAS II MUSI RAWAS UTARA	117111	PERSEDIAAN	26.680.000,00	realisasi belanja akun persediaan yang tidak membentuk persediaan pada transaksi pembelian bahan kegiatan kemandirian dan pemenuhan kebutuhan napi rentan yang merupakan bawang habis pakai dan di jurnal ke akun 521211
297	013.05.632025	BAPAS KELAS II BEKASI	117111	PERSEDIAAN	1.870.000,00	realisasi belanja akun persediaan yang tidak membentuk persediaan pada transaksi pembelian bahan kegiatan kemandirian dan pemenuhan kebutuhan napi rentan yang merupakan bawang habis pakai dan di jurnal ke akun 521211
298	013.05.632025	BAPAS KELAS II BEKASI	132111	PERALATAN DAN MESIN	(1.870.000,00)	Jurnal Beban Ekstrakompatabel
299	013.05.632029	BAPAS KELAS II NUSAKAMBANGAN	132111	PERALATAN DAN MESIN	(13.650.000,00)	Jurnal Beban Ekstrakompatabel
300	013.05.632029	BAPAS KELAS II NUSAKAMBANGAN	117111	PERSEDIAAN	5.750.000,00	realisasi belanja akun persediaan yang tidak membentuk persediaan pada transaksi pembelian bahan kegiatan kemandirian dan pemenuhan kebutuhan napi rentan yang merupakan bawang habis pakai dan di jurnal ke akun 521211
301	013.05.632031	BAPAS KELAS II SAMBAS	132111	PERALATAN DAN MESIN	(565.000,00)	Jurnal Beban Ekstrakompatabel
302	013.05.632037	BAPAS KELAS II TARAKAN	132111	PERALATAN DAN MESIN	(8.690.000,00)	Jurnal Beban Ekstrakompatabel
303	013.05.632055	LAPAS NARKOTIKA KELAS IIB RUMBAI	117111	PERSEDIAAN	12.958.000,00	realisasi belanja akun persediaan yang tidak membentuk persediaan pada transaksi pembelian bahan kegiatan kemandirian dan pemenuhan kebutuhan napi rentan yang merupakan bawang habis pakai dan di jurnal ke akun 521211
304	013.05.632055	LAPAS NARKOTIKA KELAS IIB RUMBAI	132111	PERALATAN DAN MESIN	(12.958.000,00)	Jurnal Beban Ekstrakompatabel
305	013.05.632057	LAPAS KHUSUS KELAS IIA KARANGANYAR NUSAKAMBANGAN	117111	PERSEDIAAN	541.500,00	realisasi belanja akun persediaan yang tidak membentuk persediaan pada transaksi pembelian bahan kegiatan kemandirian dan pemenuhan kebutuhan napi rentan yang merupakan bawang habis pakai dan di jurnal ke akun 521211
306	013.05.632057	LAPAS KHUSUS KELAS IIA KARANGANYAR NUSAKAMBANGAN	132111	PERALATAN DAN MESIN	(541.500,00)	Jurnal Beban Ekstrakompatabel
307	013.05.632059	LAPAS NARKOTIKA KELAS IIB PURWOKERTO	132111	PERALATAN DAN MESIN	(950.000,00)	Jurnal Beban Ekstrakompatabel
308	013.05.632059	LAPAS NARKOTIKA KELAS IIB PURWOKERTO	117111	PERSEDIAAN	950.000,00	realisasi belanja akun persediaan yang tidak membentuk persediaan pada transaksi pembelian bahan kegiatan kemandirian dan pemenuhan kebutuhan napi rentan yang merupakan bawang habis pakai dan di jurnal ke akun 521211
309	013.05.632513	RUMAH TAHANAN NEGARA KENDARI	132111	PERALATAN DAN MESIN	(2.230.000,00)	Jurnal Beban Ekstrakompatabel
310	013.05.632513	RUMAH TAHANAN NEGARA KENDARI	117111	PERSEDIAAN	2.230.000,00	realisasi belanja akun persediaan yang tidak membentuk persediaan pada transaksi pembelian bahan kegiatan kemandirian dan pemenuhan kebutuhan napi rentan yang merupakan bawang habis pakai dan di jurnal ke akun 521211
311	013.05.632590	RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAN NEGARA YOGYAKARTA	132111	PERALATAN DAN MESIN	(673.000,00)	Jurnal Beban Ekstrakompatabel
312	013.05.649040	LEMBAGA PEMASYARAKATAN NARKOTIKA DI CIREBON	132111	PERALATAN DAN MESIN	(6.068.000,00)	Jurnal Beban Ekstrakompatabel
313	013.05.649040	LEMBAGA PEMASYARAKATAN NARKOTIKA DI CIREBON	117111	PERSEDIAAN	16.068.000,00	realisasi belanja akun persediaan yang tidak membentuk persediaan pada transaksi pembelian bahan kegiatan kemandirian dan pemenuhan kebutuhan napi rentan yang merupakan bawang habis pakai dan di jurnal ke akun 521211
314	013.05.652852	LEMBAGA PEMASYARAKATAN SLEMAN	132111	PERALATAN DAN MESIN	(4.174.800,00)	Jurnal Beban Ekstrakompatabel
315	013.05.652869	LEMBAGA PEMASYARAKATAN BITUNG	117111	PERSEDIAAN	1.570.000,00	realisasi belanja akun persediaan yang tidak membentuk persediaan pada transaksi pembelian bahan kegiatan kemandirian dan pemenuhan kebutuhan napi rentan yang merupakan bawang habis pakai dan di jurnal ke akun 521211
316	013.05.652869	LEMBAGA PEMASYARAKATAN BITUNG	132111	PERALATAN DAN MESIN	(1.570.000,00)	Jurnal Beban Ekstrakompatabel
317	013.05.652916	LEMBAGA PEMASYARAKATAN TERBUKA NUSAKAMBANGAN	132111	PERALATAN DAN MESIN	(1.950.000,00)	Jurnal Beban Ekstrakompatabel
318	013.05.652958	LAPAS NARKOTIKA KELAS IIA MUARA BELITI	117111	PERSEDIAAN	87.400.000,00	realisasi belanja akun persediaan yang tidak membentuk persediaan pada transaksi pembelian bahan kegiatan kemandirian dan pemenuhan kebutuhan napi rentan yang merupakan bawang habis pakai dan di jurnal ke akun 521211

DAFTAR SELISIH REKONSILIASI GL BMN
S.D 31 Desember 2021 (Unduh Data per Tanggal 12 Mei 2022)

No	Kode Satker	Nama Satker	Akun	Uraian	Rph Selisih	Keterangan
319	013.05.652979	LEMBAGA PEMASYARAKATAN NARKOTIKA JAKARTA	135000	ASET TETAP LAINNYA	(6.924.500,00)	penggunaan akun 532111 untuk transaksi pembelian Alat membuat berupa cap batik yang membentuk Aset tetap lainnya dibawah nilai kapitalisasi
320	013.05.652979	LEMBAGA PEMASYARAKATAN NARKOTIKA JAKARTA	132111	PERALATAN DAN MESIN	1.934.625,00	Realisasi belanja 536111 untuk pembelian aplikasi penunjang Tusi Rupbasan yang sd 31 Desember belum diterima oleh satker
321	013.05.652979	LEMBAGA PEMASYARAKATAN NARKOTIKA JAKARTA	117111	PERSEDIAAN	3.740.000,00	penggunaan akun 532111 untuk transaksi pembelian Alat membuat berupa cap batik yang membentuk Aset tetap lainnya dibawah nilai kapitalisasi
322	013.05.652983	LEMBAGA PEMASYARAKATAN NARKOTIKA BANDUNG	117111	PERSEDIAAN	4.340.000,00	penggunaan akun 532111 untuk transaksi pembelian Alat membuat berupa cap batik yang membentuk Aset tetap lainnya dibawah nilai kapitalisasi
323	013.05.653196	BALAI PEMASYARAKATAN SORONG	132111	PERALATAN DAN MESIN	(2.300.000,00)	Realisasi belanja 536111 untuk pembelian aplikasi penunjang Tusi Rupbasan yang sd 31 Desember belum diterima oleh satker
324	013.05.653196	BALAI PEMASYARAKATAN SORONG	117111	PERSEDIAAN	2.300.000,00	realisasi belanja akun persediaan yang tidak membentuk persediaan pada transaksi pembelian bahan kegiatan kemandirian dan pemenuhan kebutuhan napi rentan yang merupakan bawah habis pakai dan di jurnal ke akun 521211
325	013.05.653292	RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAN NEGARA INDRAMAYU	135000	ASET TETAP LAINNYA	9.988.000,00	Realisasi belanja 536111 untuk pembelian aplikasi penunjang Tusi Rupbasan yang sd 31 Desember belum diterima oleh satker
326	013.05.662945	RUPBASAN PROBOLINGGO	117111	PERSEDIAAN	600.000,00	Realisasi belanja 536111 untuk pembelian aplikasi penunjang Tusi Rupbasan yang sd 31 Desember belum diterima oleh satker
327	013.05.662945	RUPBASAN PROBOLINGGO	132111	PERALATAN DAN MESIN	(600.000,00)	penggunaan akun 532111 untuk transaksi pembelian Alat membuat berupa cap batik yang membentuk Aset tetap lainnya dibawah nilai kapitalisasi
328	013.05.667944	RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS I TANJUNG PINANG	117111	PERSEDIAAN	228.800,00	Realisasi belanja 536111 untuk pembelian aplikasi penunjang Tusi Rupbasan yang sd 31 Desember belum diterima oleh satker
329	013.05.667944	RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS I TANJUNG PINANG	132111	PERALATAN DAN MESIN	(2.618.495,00)	penggunaan akun 532111 untuk transaksi pembelian Alat membuat berupa cap batik yang membentuk Aset tetap lainnya dibawah nilai kapitalisasi
330	013.05.683327	LAPAS KELAS IIB WARUNG KIARA	117111	PERSEDIAAN	1.855.000,00	realisasi belanja akun persediaan yang tidak membentuk persediaan pada transaksi pembelian bahan kegiatan kemandirian dan pemenuhan kebutuhan napi rentan yang merupakan bawah habis pakai dan di jurnal ke akun 521211
331	013.05.683327	LAPAS KELAS IIB WARUNG KIARA	132111	PERALATAN DAN MESIN	(3.785.000,00)	Jurnal Beban Ekstrakompatabel
332	013.05.683394	RUMAH TAHANAN KELAS IIB GARUT	132111	PERALATAN DAN MESIN	(500.000,00)	Jurnal Beban Ekstrakompatabel
333	013.05.683394	RUMAH TAHANAN KELAS IIB GARUT	117111	PERSEDIAAN	6.394.900,00	realisasi belanja akun persediaan yang tidak membentuk persediaan pada transaksi pembelian bahan kegiatan kemandirian dan pemenuhan kebutuhan napi rentan yang merupakan bawah habis pakai dan di jurnal ke akun 521211
334	013.05.683423	RUMAH TAHANAN KELAS IIB PASANG KAYU	132111	PERALATAN DAN MESIN	(900.000,00)	Jurnal Beban Ekstrakompatabel
335	013.05.683572	LAPAS KELAS IIB SOROLANGUN	132111	PERALATAN DAN MESIN	(3.005.000,00)	Jurnal Beban Ekstrakompatabel
336	013.05.683572	LAPAS KELAS IIB SOROLANGUN	117111	PERSEDIAAN	3.005.000,00	realisasi belanja akun persediaan yang tidak membentuk persediaan pada transaksi pembelian bahan kegiatan kemandirian dan pemenuhan kebutuhan napi rentan yang merupakan bawah habis pakai dan di jurnal ke akun 521211
337	013.05.683589	LAPAS KELAS IIA BANYUASIN	117111	PERSEDIAAN	202.398.500,00	realisasi belanja akun persediaan yang tidak membentuk persediaan pada transaksi pembelian bahan kegiatan kemandirian dan pemenuhan kebutuhan napi rentan yang merupakan bawah habis pakai dan di jurnal ke akun 521211
338	013.05.683589	LAPAS KELAS IIA BANYUASIN	132111	PERALATAN DAN MESIN	(1.476.000,00)	Jurnal Beban Ekstrakompatabel
339	013.05.683615	LAPAS KELAS IIA CIKARANG	117111	PERSEDIAAN	14.266.450,00	realisasi belanja akun persediaan yang tidak membentuk persediaan pada transaksi pembelian bahan kegiatan kemandirian dan pemenuhan kebutuhan napi rentan yang merupakan bawah habis pakai dan di jurnal ke akun 521211
340	013.05.683615	LAPAS KELAS IIA CIKARANG	132111	PERALATAN DAN MESIN	(4.366.450,00)	Jurnal Beban Ekstrakompatabel
341	013.05.683615	LAPAS KELAS IIA CIKARANG	131111	TANAH	8.800.000,00	Kesalahan penggunaan akun belanja modal tanah yang membentuk belanja pemeliharaan gedung dan bangunan
342	013.05.683622	LAPAS KELAS IIB BANJAR	133111	GEDUNG DAN BANGUNAN	(42.173.000,00)	Hibah gedung dan bangunan berupa pengembangan nilai aset
343	013.05.683643	LAPAS KELAS IIA BONTANG	133111	GEDUNG DAN BANGUNAN	(431.437.994,00)	Hibah gedung dan bangunan berupa pengembangan nilai aset
344	013.05.683678	LAPAS NARKOTIKA KELAS IIB MUARA SABAK	132111	PERALATAN DAN MESIN	(900.000,00)	Jurnal Beban Ekstrakompatabel
345	013.05.683678	LAPAS NARKOTIKA KELAS IIB MUARA SABAK	117111	PERSEDIAAN	900.000,00	realisasi belanja akun persediaan yang tidak membentuk persediaan pada transaksi pembelian bahan kegiatan kemandirian dan pemenuhan kebutuhan napi rentan yang merupakan bawah habis pakai dan di jurnal ke akun 521211
346	013.05.683682	LAPAS NARKOTIKA KELAS IIA PANGKAL PINANG	117111	PERSEDIAAN	1.653.000,00	realisasi belanja akun persediaan yang tidak membentuk persediaan pada transaksi pembelian bahan kegiatan kemandirian dan pemenuhan kebutuhan napi rentan yang merupakan bawah habis pakai dan di jurnal ke akun 521211
347	013.05.683682	LAPAS NARKOTIKA KELAS IIA PANGKAL PINANG	132111	PERALATAN DAN MESIN	(1.653.000,00)	Jurnal Beban Ekstrakompatabel

DAFTAR SELISIH REKONSILIASI GL BMN
S.D 31 Desember 2021 (Unduh Data per Tanggal 12 Mei 2022)

No	Kode Satker	Nama Satker	Akun	Uraian	Rph Selisih	Keterangan
348	013.05.683711	LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KELAS II BANDUNG PROPINSI JAWA BARAT	132111	PERALATAN DAN MESIN	(10.302.750,00)	Jurnal Beban Ekstrakompatabel
349	013.05.683711	LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KELAS II BANDUNG PROPINSI JAWA BARAT	117111	PERSEDIAAN	8.966.350,00	realisasi belanja akun persediaan yang tidak membentuk persediaan pada transaksi pembelian bahan kegiatan kemandirian dan pemenuhan kebutuhan napi rentan yang merupakan bawang habis pakai dan di jurnal ke akun 521211
350	013.05.683732	RUTAN KELAS I PEKANBARU	132111	PERALATAN DAN MESIN	(320.000,00)	Jurnal Beban Ekstrakompatabel
351	013.05.683732	RUTAN KELAS I PEKANBARU	117111	PERSEDIAAN	40.766.176,00	realisasi belanja akun persediaan yang tidak membentuk persediaan pada transaksi pembelian bahan kegiatan kemandirian dan pemenuhan kebutuhan napi rentan yang merupakan bawang habis pakai dan di jurnal ke akun 521211
352	013.05.683746	LAPAS NARKOTIKA KELAS IIA GUNUNG SINDUR	117111	PERSEDIAAN	648.000,00	realisasi belanja akun persediaan yang tidak membentuk persediaan pada transaksi pembelian bahan kegiatan kemandirian dan pemenuhan kebutuhan napi rentan yang merupakan bawang habis pakai dan di jurnal ke akun 521211
353	013.05.683753	RUTAN KELAS IIB TAMIYANG LAYANG PROPINSI KALIMANTAN TENGAH	132111	PERALATAN DAN MESIN	(31.826.400,00)	Jurnal Beban Ekstrakompatabel
354	013.05.683767	RUTAN KELAS IIB BINTUNI PROPINSI PAPUA BARAT	117111	PERSEDIAAN	3.570.000,00	realisasi belanja akun persediaan yang tidak membentuk persediaan pada transaksi pembelian bahan kegiatan kemandirian dan pemenuhan kebutuhan napi rentan yang merupakan bawang habis pakai dan di jurnal ke akun 521211
355	013.05.683767	RUTAN KELAS IIB BINTUNI PROPINSI PAPUA BARAT	132111	PERALATAN DAN MESIN	(2.670.000,00)	Jurnal Beban Ekstrakompatabel
356	013.05.683996	LAPAS NARKOTIKA KELAS IIB BANYUASIN	132111	PERALATAN DAN MESIN	(3.620.000,00)	Jurnal Beban Ekstrakompatabel
357	013.05.683996	LAPAS NARKOTIKA KELAS IIB BANYUASIN	117111	PERSEDIAAN	83.905.673,00	realisasi belanja akun persediaan yang tidak membentuk persediaan pada transaksi pembelian bahan kegiatan kemandirian dan pemenuhan kebutuhan napi rentan yang merupakan bawang habis pakai dan di jurnal ke akun 521211
358	013.05.683998	Lapas anak Kelas III Batam	117111	PERSEDIAAN	945.000,00	realisasi belanja akun persediaan yang tidak membentuk persediaan pada transaksi pembelian bahan kegiatan kemandirian dan pemenuhan kebutuhan napi rentan yang merupakan bawang habis pakai dan di jurnal ke akun 521211
359	013.05.683998	Lapas anak Kelas III Batam	132111	PERALATAN DAN MESIN	(945.000,00)	Jurnal Beban Ekstrakompatabel
360	013.05.683999	Lapas Terbuka Kelas III Rumbai	117111	PERSEDIAAN	79.961.200,00	realisasi belanja akun persediaan yang tidak membentuk persediaan pada transaksi pembelian bahan kegiatan kemandirian dan pemenuhan kebutuhan napi rentan yang merupakan bawang habis pakai dan di jurnal ke akun 521211
DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI						
361	013.06.109155	KANTOR IMIGRASI KELAS I KHUSUS NON TPI JAKARTA SELATAN	133111	GEDUNG DAN BANGUNAN	(104.800.000,00)	Hibah bangunan yg di input pengembangan Gedung dan Bangunan NUP 1
362	013.06.407933	KANTOR IMIGRASI KELAS I NON TPI JAKARTA PUSAT	132111	PERALATAN DAN MESIN	(20.658.000,00)	Jurnal Beban Ekstrakompatabel
363	013.06.407933	KANTOR IMIGRASI KELAS I NON TPI JAKARTA PUSAT	117111	PERSEDIAAN	20.658.000,00	Belanja persediaan membentuk aset ekstrakompatabel peralatan dan mesin
364	013.06.407942	KANTOR IMIGRASI KELAS I KHUSUS NON TPI JAKARTA BARAT	132111	PERALATAN DAN MESIN	(9.227.300,00)	Pembelian Thermo Stand k3 2 buah, Thermo Stand ir,Kr Standar, alat pemadam kebakaran 6 buah, dispenser, scanner Autoscan dan Barcode Scanner. Barang barang tersebut pembelian yang di akui jadi Aset dibawah 1 Juta beban Ekstrakompatabel
365	013.06.407958	KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI BANDUNG	132111	PERALATAN DAN MESIN	(1.508.200,00)	Pembelian 2 buah Thermogun dibawah 1 juta
366	013.06.407964	KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI CIREBON	132111	PERALATAN DAN MESIN	(790.000,00)	Pembelian 2 Unit Thermogun dibawah nilai kapitalisasi
367	013.06.407989	KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI CILACAP	133111	GEDUNG DAN BANGUNAN	(2.787.653,00)	Temuan kelebihan bayar oleh ltjen senilai 2.787.653, temuan itu sudah dibayar dan atas temuan itu dilakukan jurnal koreksi aset tetap non reval di saiba
368	013.06.407995	KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI YOGYAKARTA	132111	PERALATAN DAN MESIN	(1.650.000,00)	Pembelian 2 Unit Hardisk @Rp 825.000 yang membentuk Aset Ekstrakompatabel
369	013.06.408009	KANTOR IMIGRASI KELAS I KHUSUS TPI SURABAYA	132111	PERALATAN DAN MESIN	(3.236.000,00)	Pembelian partisi meja layanan sebanyak 9 unit dimana nilai atas meja tersebut dibawah nilai kapitalisasi
370	013.06.408046	KANTOR IMIGRASI KELAS I KHUSUS TPI MEDAN	132111	PERALATAN DAN MESIN	120.718.000,00	realisasi belanja barang akun 52 yang membentuk aset tetap peralatan dan mesin karena telah memenuhi nilai kapitalisasi aset tetap
371	013.06.408046	KANTOR IMIGRASI KELAS I KHUSUS TPI MEDAN	135000	ASET TETAP LAINNYA	(120.718.000,00)	Terdapat pembelian software menggunakan akun 532111 dan di catat pada aplikasi SIMAK-BMN dengan akun 536111
372	013.06.408077	KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI BENGKALIS	117111	PERSEDIAAN	31.186.000,00	Terdapat pembelian processor computer dan hardisk sebesar Rp7.840.000 menggunakan akun 52 dan di catat pada aplikasi simak, serta pembelian power supply sebesar Rp23.346.000 menggunakan akun persediaan dan di catat pada aplikasi SIMAK-BMN dengan nilai satuan dibawah nilai kapitalisasi sehingga menghasilkan beban asset ekstrakompatabel
373	013.06.408077	KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI BENGKALIS	132111	PERALATAN DAN MESIN	(31.186.000,00)	Jurnal Beban Ekstrakompatabel
374	013.06.408112	KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI TANJUNG BALAI KARIMUN	117111	PERSEDIAAN	8.755.000,00	Belanja persediaan membentuk aset ekstrakompatabel peralatan dan mesin

DAFTAR SELISIH REKONSILIASI GL BMN
S.D 31 Desember 2021 (Unduh Data per Tanggal 12 Mei 2022)

No	Kode Satker	Nama Satker	Akun	Uraian	Rph Selisih	Keterangan
375	013.06.408112	KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI TANJUNG BALAI KARIMUN	132111	PERALATAN DAN MESIN	(8.755.000,00)	Terdapat pembelian peralatan computer (keyboard, mouse,dll) menggunakan akun persediaan dan di catat pada aplikasi SIMAK-BMN dengan nilai satuan dibawah nilai kapitalisasi sehingga menghasilkan beban aset ekstrakomptabel
376	013.06.408222	KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI DENPASAR	117111	PERSEDIAAN	21.476.400,00	Belanja persediaan membentuk aset ekstrakomptabel peralatan dan mesin
377	013.06.408222	KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI DENPASAR	132111	PERALATAN DAN MESIN	(21.476.400,00)	Pembelian barang non Persediaan berupa tangga, infrared thermometer, hand dryer, bor listrik menggunakan akun belanja barang Persediaan. Tidak dapat dilakukan ralat akun dikarenakan anggaran sudah tidak tersedia
378	013.06.408231	KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI KUPANG	132111	PERALATAN DAN MESIN	(1.750.000,00)	Belanja modal di bawah nilai kapitalisasi berupa pembelian Thermogun
379	013.06.408262	KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI BIAK	132111	PERALATAN DAN MESIN	(4.200.000,00)	Pembelian hardisk yang menggunakan akun persediaan dan di catat pada aplikasi SIMAK-BMN
380	013.06.408262	KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI BIAK	117111	PERSEDIAAN	4.200.000,00	Belanja persediaan membentuk aset ekstrakomptabel peralatan dan mesin
381	013.06.408335	PERWAKILAN IMIGRASI DI HONGKONG	132111	PERALATAN DAN MESIN	(124.941.389,00)	Terdapat kesalahan penggunaan akun pada Perwakilan Imigrasi di Hongkong yaitu akun 536111 digunakan untuk belanja peralatan dan
382	013.06.408335	PERWAKILAN IMIGRASI DI HONGKONG	135000	ASET TETAP LAINNYA	124.941.389,00	Kesalahan penggunaan akun belanja modal aset lainnya yang membentuk aset peralatan dan mesin
383	013.06.408360	PERWAKILAN IMIGRASI DI DAVAO	132111	PERALATAN DAN MESIN	2.093.063,00	Kesalahan penggunaan akun. Akun 532119 (Belanja Modal Peralatan dan Mesin – Penanganan Pandemi Covid-19) digunakan untuk belanja barang swab pegawai (akun 522192) sebesar 2.093.063
384	013.06.408448	KANTOR IMIGRASI KELAS I NON TPI PALANGKARAYA	132111	PERALATAN DAN MESIN	(950.000,00)	Pembelian Thermogun di bawah nilai kapitalisas
385	013.06.408485	KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI TEMBILAHAN	133111	GEDUNG DAN BANGUNAN	(121.600.000,00)	Terdapat penerimaan hibah renovasi atap Gedung dan bangunan yang masuk kedalam pengembangan langsung
386	013.06.408511	KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI SELAT PANJANG	132111	PERALATAN DAN MESIN	(4.750.000,00)	Terdapat pembelian UPS dengan akun 52 nilai dibawah kapitalisasi yang di catat pada aplikasi SIMAK-BMN
387	013.06.408542	KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI JAKARTA TIMUR	132111	PERALATAN DAN MESIN	(2.397.600,00)	Selisih merupakan pembelian keperluan pandemi covid 19 berupa semprotan disinfektan dan thermogun menggunakan akun 521131 yang menghasilkan aset ekstra komptabel dan dicatat di SIMAK BMN
388	013.06.408624	KANTOR IMIGRASI KELAS I KHUSUS TPI BATAM	133111	GEDUNG DAN BANGUNAN	(172.000.000,00)	Terdapat penerimaan hibah bangunan operasional kantor dan masuk kedalam pengembangan langsung
389	013.06.408627	KANTOR IMIGRASI KELAS III NON TPI CIANJUR	132111	PERALATAN DAN MESIN	(4.614.000,00)	Pembelian 3 Thermogun dibawah 1 juta dan wastafel portabel
390	013.06.408913	KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI TANJUNG PRIOK	132111	PERALATAN DAN MESIN	(1.181.820,00)	Belanja aset yang nilainya dibawah kapitalisasi berupa pengadaan Thermogun sebanyak 10 Unit dengan total 1.181.820
391	013.06.408938	KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI CILEGON	133111	GEDUNG DAN BANGUNAN	(47.850.000,00)	Hibah dari Bank BRI berupa renovasi kamar mandi/toilet 2 unit
392	013.06.408969	KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI POLONIA	132111	PERALATAN DAN MESIN	(7.392.000,00)	Terdapat pembelian Kursi Besi/Metal dengan akun 52 nilai dibawah kapitalisasi yang di catat pada aplikasi SIMAK-BMN
393	013.06.409272	DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI	135000	ASET TETAP LAINNYA	(159.049.000,00)	Selisih pada akun Aset Lainnya sebesar Rp159.049.000 yaitu akibat adanya kesalahan akun belanja modal peralatan dan mesin yang seharusnya menggunakan akun belanja modal lainnya berupa alat musik
394	013.06.409272	DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI	117111	PERSEDIAAN	(134.635.069,00)	a.Belanja persediaan menggunakan akun non persediaan yaitu pembelian obat-obatan menggunakan akun 521219 sebesar Rp184.344.655, b. Belanja menggunakan akun persediaan yang menghasilkan aset berupa harddisk sebesar Rp(49.885.000), c. Koreksi nilai persediaan karena pembulatan harga dokumen keimigrasian sebesar Rp175.414
395	013.06.409272	DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI	133111	GEDUNG DAN BANGUNAN	(176.183.000,00)	Koreksi atas Paket Pekerjaan Plafond menggunakan akun pemeliharaan yang seharusnya menjadi Gedung dan Bangunan
396	013.06.409272	DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI	132111	PERALATAN DAN MESIN	109.164.000,00	a.Belanja modal peralatan dan mesin digunakan untuk pembelian alat musik yang seharusnya menggunakan akun belanja modal lainnya (536111) sebesar Rp159.049.000, b. Belanja yang menghasilkan aset ekstrakomptabel dengan menggunakan akun persediaan sebesar Rp(49.885.000)
397	013.06.418935	KANTOR IMIGRASI KELAS III NON TPI KERINCI	132111	PERALATAN DAN MESIN	(950.000,00)	Pembelian Thermogun di bawah nilai kapitalisas
398	013.06.418938	KANTOR IMIGRASI KELAS III NON TPI BIMA	133111	GEDUNG DAN BANGUNAN	(77.945.215,00)	Pengembalian belanja Gedung dan Bangunan hasil temuan BPK di tahun 2021
399	013.06.480505	KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI TERNATE	117111	PERSEDIAAN	1.046.200,00	Pembelian tabung gas pemadam kebakaran menggunakan akun persediaan dan di catat pada aplikasi SIMAK-BMN dengan nilai satuan
400	013.06.480505	KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI TERNATE	132111	PERALATAN DAN MESIN	(1.046.200,00)	realisasi belanja barang akun 52 yang membentuk aset tetap peralatan dan mesin karena telah memenuhi nilai kapitalisasi aset tetap

DAFTAR SELISIH REKONSILIASI GL BMN
S.D 31 Desember 2021 (Unduh Data per Tanggal 12 Mei 2022)

No	Kode Satker	Nama Satker	Akun	Uraian	Rph Selisih	Keterangan
401	013.06.498418	KANTOR IMIGRASI KELAS II NON TPI MAMUJU	117111	PERSEDIAAN	389.143,00	Belanja modal di bawah nilai kapitalisasi berupa pembelian kursi besi/metal dan belanja modal di bawah nilai kapitalisasi berupa pembelian mesin fingerprint Rp389.143;
402	013.06.498418	KANTOR IMIGRASI KELAS II NON TPI MAMUJU	132111	PERALATAN DAN MESIN	(389.143,00)	Jurnal Beban Ekstrakompatabel
403	013.06.652276	KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI JAKARTA UTARA	117111	PERSEDIAAN	3.851.000,00	penguat sinyal, laser pointer) serta pembelian Switch Hub , Laser Pointer, Repeater yang di bawah kapitalisasi
404	013.06.652276	KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI JAKARTA UTARA	132111	PERALATAN DAN MESIN	(3.851.000,00)	realisasi belanja barang akun 52 yang membentuk aset tetap peralatan dan mesin karena telah memenuhi nilai kapitalisasi aset tetap
405	013.06.652297	KANTOR IMIGRASI KELAS II NON TPI SUKABUMI	132111	PERALATAN DAN MESIN	(307.500,00)	Pembelian Thermogun dibawah 1 juta
406	013.06.652302	KANTOR IMIGRASI KELAS II NON TPI KARAWANG	132111	PERALATAN DAN MESIN	(18.000,00)	kelebihan pembayaran pada pembuatan SPP/SPM tersebut seharusnya Total SPP/SPM adalah senilai Rp44.946.000,- tetapi diinput senilai Rp44.964.000,- yang mengakibatkan kelebihan pembayaran Rp18.000,- dan telah dilakukan setoran pengembalian belanja modal dengan NTPN : CE28D8N3DO00QT7 tanggal bayar 20 Agustus 2021
407	013.06.652323	KANTOR IMIGRASI KELAS II NON TPI PEMALANG	133111	GEDUNG DAN BANGUNAN	(225.000,00)	Koreksi pencatatan hardisk dan modem dari persediaan menjadi BMN
408	013.06.652323	KANTOR IMIGRASI KELAS II NON TPI PEMALANG	132111	PERALATAN DAN MESIN	(17.300.714,00)	Temuan Inspektorat Jenderal atas kelebihan bayar
409	013.06.652323	KANTOR IMIGRASI KELAS II NON TPI PEMALANG	117111	PERSEDIAAN	1.525.000,00	Kelebihan pembayaran temuan itjen atas CV Anak Negeri
410	013.06.652365	KANTOR IMIGRASI KELAS II NON TPI MADIUN	117111	PERSEDIAAN	1.980.000,00	Pembelian 2 Unit Hardisk @ Rp 990.000 yang dikategorikan sebagai aset tetap namun pembelian hardisk tersebut menggunakan akun
411	013.06.652365	KANTOR IMIGRASI KELAS II NON TPI MADIUN	132111	PERALATAN DAN MESIN	(1.980.000,00)	Jurnal Beban Ekstrakompatabel
412	013.06.652372	KANTOR IMIGRASI KELAS II NON TPI BLITAR	133111	GEDUNG DAN BANGUNAN	(26.000.000,00)	Temuan Inspektorat Jenderal terkait pekerjaan pemeliharaan Peralatan dan Mesin yang memenuhi nilai kapitalisasi aset karena dapat memperpanjang masa manfaat atau kemungkinan besar memberi manfaat ekonomis di masa yang akan datang berupa Pembelian Media Filter.
413	013.06.652372	KANTOR IMIGRASI KELAS II NON TPI BLITAR	132111	PERALATAN DAN MESIN	(3.640.000,00)	Temuan Inspektorat Jenderal terkait pekerjaan pemeliharaan Gedung dan Bangunan (523111) yang memenuhi nilai kapitalisasi aset karena dapat memperpanjang masa manfaat atau kemungkinan besar memberi manfaat ekonomis di masa yang akan datang berupa pembuatan Kolam Filter sebesar 8m2.
414	013.06.664572	KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI TAHUNA	133111	GEDUNG DAN BANGUNAN	(89.700.000,00)	Belanja penambahan ruangan semi permanen menggunakan akun belanja pemeliharaan Gedung dan Bangunan 523111 yang tidak dapat diralat
415	013.06.664586	RUMAH DETENSI IMIGRASI MEDAN	132111	PERALATAN DAN MESIN	(23.100.000,00)	Terdapat pembelian Kursi Besi/Metal dengan akun 52 yang di catat pada aplikasi SIMAK-BMN
416	013.06.664612	RUMAH DETENSI IMIGRASI JAKARTA	133111	GEDUNG DAN BANGUNAN	(511.100.000,00)	Hibah berupa pengembangan nilai gedung dan bangunan dan diinput sebagai penambahan nilai gedung dan bangunan pada aplikasi SIMAK BMN
417	013.06.664696	RUMAH DETENSI IMIGRASI KUPANG	132111	PERALATAN DAN MESIN	(1.725.000,00)	Belanja modal di bawah nilai kapitalisasi berupa pembelian 5-unit hard disk
418	013.06.664696	RUMAH DETENSI IMIGRASI KUPANG	117111	PERSEDIAAN	1.725.000,00	Belanja modal di bawah nilai kapitalisasi berupa pembelian 5-unit hard disk
419	013.06.677181	RUMAH DETENSI IMIGRASI PUSAT TANJUNG PINANG	132111	PERALATAN DAN MESIN	(1.500.000,00)	Terdapat pembelian Thermogun dengan akun 52 yang di catat pada aplikasi SIMAK-BMN
420	013.06.679991	KANTOR IMIGRASI KELAS III NON TPI TANJUNG REDEB	132111	PERALATAN DAN MESIN	(11.736.000,00)	Belanja modal di bawah nilai kapitalisasi berupa pembelian kursi besi/metal, meja computer, loudspeaker dan alat penghancur kertas
421	013.06.683462	KANTOR IMIGRASI KELAS III NON TPI KEDIRI	132111	PERALATAN DAN MESIN	(2.850.000,00)	Pembelian 3 Unit Thermogun @ Rp 950.000 yang menggunakan akun 521131 Belanja Barang Persediaan Operasional - Penanganan Pandemi Covid-19
422	013.06.683547	KANTOR IMIGRASI KELAS III TPI LABUAN BAJO	117111	PERSEDIAAN	7.803.000,00	Belanja modal di bawah nilai kapitalisasi berupa pembelian hard disk, ups, stavolt, gerinda dan tangga
423	013.06.683547	KANTOR IMIGRASI KELAS III TPI LABUAN BAJO	132111	PERALATAN DAN MESIN	(8.070.750,00)	Belanja modal di bawah nilai kapitalisasi berupa pembelian hard disk, ups, stavolt, gerinda dan tangga

DAFTAR SELISIH REKONSILIASI GL BMN
S.D 31 Desember 2021 (Unduh Data per Tanggal 12 Mei 2022)

No	Kode Satker	Nama Satker	Akun	Uraian	Rph Selisih	Keterangan
424	013.06.684006	KANTOR IMIGRASI KELAS III NON TPI PONOROGO	133111	GEDUNG DAN BANGUNAN	(172.543.000,00)	Belanja pemeliharaan Gedung dan Bangunan (523111) yang memenuhi nilai kapitalisasi aset karena dapat memperpanjang masa manfaat atau kemungkinan besar memberi manfaat ekonomis di masa yang akan datang dan tidak memungkinkan dilakukan Revisi Anggaran ataupun Ralat SPM dikarenakan sumber dana yang digunakan ialah Rupiah Murni (RM) dan PNPB dengan rincian sebagai berikut: - Pekerjaan Area Dropzone dan Roof Garden sebesar Rp 35.444.624,95; - Pekerjaan Area KM/WC sebesar Rp 2.703.144,60; - Pekerjaan Ruang Prioritas sebesar Rp 15.910.000; - Pekerjaan Ruang Pelayanan sebesar Rp 3.169.060,06 - Pekerjaan Area Kantin sebesar Rp 29.796.469,40; - Pekerjaan Smoking Area sebesar Rp 48.384.432,16; - Pekerjaan Drop Zone Selatan sebesar Rp 21.450.000; - Pajak PPN 10% senilai Rp 15.685.773,12.
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL						
425	013.07.097102	DITJEN KEKAYAAN INTELEKTUAL	132111	PERALATAN DAN MESIN	6.313.880.100,00	belanja modal dibayar dimuka atas sisa pengadaan TIK data Center TA 2021 rp3.403.500.100, belanja modal dibayar dimuka atas sisa pengadaan Gd DKI It.5 TA 2022 Rp2.858.350.000,Aset Ekstrakompatabel PM 76.113.500,koreksi kesalahan akun atas belanja lisensi Adobe creative cloud Rp52.030.000
426	013.07.097102	DITJEN KEKAYAAN INTELEKTUAL	135000	ASET TETAP LAINNYA	(5.607.450.000,00)	Kesalahan penggunaan akun belanja modal aset lainnya yang menggunakan akun belanja pemeliharaan peralatan dan mesin
DIREKTORAT JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN						
427	013.08.626181	DITJEN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	132111	PERALATAN DAN MESIN	(1.265.200,00)	pembelian alat kedokteran berupa Infrared Thermometer sebanyak 2 unit senilai Rp1.265.200 yang membentuk aset ekstrakompatabel karena nilainya dibawah kapitalisasi.
BPSDM						
428	013.12.108266	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA	133111	GEDUNG DAN BANGUNAN	(11.105.000,00)	Koreksi nilai KDP atas pengembalian belanja modal gedung dan bangunan
429	013.12.108266	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA	117111	PERSEDIAAN	12.187.980,00	Belanja persediaan membentuk aset ekstrakompatabel peralatan dan mesin
430	013.12.108266	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA	132111	PERALATAN DAN MESIN	(13.846.360,00)	Pengembalian honor kepada negara sehingga menimbulkan selisih pada nilai gedung dan bangunan, karena pembayaran honor masih menggunakan akunh belanja KDP
431	013.12.404309	POLITEKNIK ILMU PEMASYARAKATAN	132111	PERALATAN DAN MESIN	(59.256.000,00)	Jurnal Beban Ekstrakompatabel
432	013.12.404309	POLITEKNIK ILMU PEMASYARAKATAN	135000	ASET TETAP LAINNYA	59.256.000,00	Jurnal Beban Ekstrakompatabel
433	013.12.409157	BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN HUKUM DAN HAM JAWA TENGAH	132111	PERALATAN DAN MESIN	(6.365.858,00)	Pembelian barang ekstrakompatabel

DAFTAR TRANSFER KELUAR / TRANSFER MASUK
S.D 31 Desember 2021 (Unduh Data per Tanggal 12 Mei 2022)

No	Kode	Uraian	Kode Akun	Uraian Akun	Transfer Keluar	Kode Masuk	Uraian Masuk	Transfer Masuk	Selisih	Keterangan
SEKRETARIAT JENDERAL										
1	013.01.404233	SEKRETARIAT JENDERAL (PUSAT)	133111	Gedung dan Bangunan	0,00	007.01.403013	SEKRETARIAT KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA	1.802.478.100,00	(1.802.478.100,00)	Selisih atas Transfer Aset Tetap Renovasi (ATR) yang menurut Juknis dari DJPB disebabkan karena pencatatan ATR pada satker penerima bukan sebagai Transaksi Transfer Masuk, melainkan sebagai Penerimaan Aset dari Pengembangan Aset Renovasi
2	013.01.404233	SEKRETARIAT JENDERAL (PUSAT)	135111	Aset Tetap Renovasi	1.802.478.100,00	007.01.403013	SEKRETARIAT KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA	0,00	1.802.478.100,00	
INSPEKTORAT JENDERAL										
3	013.02.409241	INSPEKTORAT JENDERAL	135111	Aset Tetap Renovasi	959.360.770,00	013.06.409272	DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI	0,00	959.360.770,00	Selisih atas Transfer Aset Tetap Renovasi (ATR) yang menurut Juknis dari DJPB disebabkan karena pencatatan ATR pada satker penerima bukan sebagai Transaksi Transfer Masuk, melainkan sebagai Penerimaan Aset dari Pengembangan Aset Renovasi
4	013.02.409241	INSPEKTORAT JENDERAL	133111	Gedung dan Bangunan	0,00	013.06.409272	DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI	959.360.770,00	(959.360.770,00)	
DITJEN AHU										
5	013.03.409257	DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM	135111	Aset Tetap Renovasi	964.160.789,00	013.06.409272	DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI	0,00	964.160.789,00	Selisih atas Transfer Aset Tetap Renovasi (ATR) yang menurut Juknis dari DJPB disebabkan karena pencatatan ATR pada satker penerima bukan sebagai Transaksi Transfer Masuk, melainkan sebagai Penerimaan Aset dari Pengembangan Aset Renovasi
6	013.03.409257	DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM	133111	Gedung dan Bangunan	0,00	013.03.099298	BALAI HARTA PENINGGALAN SEMARANG	392.998.755,00	(392.998.755,00)	
7	013.03.409257	DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM	133111	Gedung dan Bangunan	0,00	013.06.409272	DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI	964.160.789,00	(964.160.789,00)	
8	013.03.409257	DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM	135111	Aset Tetap Renovasi	392.998.755,00	013.03.099298	BALAI HARTA PENINGGALAN SEMARANG	0,00	392.998.755,00	
9	013.03.409257	DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM	135111	Aset Tetap Renovasi	2.572.266.596,00	013.03.099299	BALAI HARTA PENINGGALAN SURABAYA	0,00	2.572.266.596,00	
10	013.03.409257	DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM	133111	Gedung dan Bangunan	0,00	013.03.099299	BALAI HARTA PENINGGALAN SURABAYA	2.572.266.596,00	(2.572.266.596,00)	
DITJEN PEMASYARAKATAN										
11	013.05.404585	BALAI PEMASYARAKATAN YOGYAKARTA	133111	Gedung dan Bangunan	0,00	013.05.404611	RUMAH TAHANAN NEGARA WATES	191.077.000,00	(191.077.000,00)	Selisih atas Transfer Aset Tetap Renovasi (ATR) yang menurut Juknis dari DJPB disebabkan karena pencatatan ATR pada satker penerima bukan sebagai Transaksi Transfer Masuk, melainkan sebagai Penerimaan Aset dari Pengembangan Aset Renovasi
12	013.05.404585	BALAI PEMASYARAKATAN YOGYAKARTA	135111	Aset Tetap Renovasi	199.966.000,00	013.05.419140	LPKA JOGJAKARTA, PROVINSI D.I YOGYAKARTA	0,00	199.966.000,00	
13	013.05.404585	BALAI PEMASYARAKATAN YOGYAKARTA	135111	Aset Tetap Renovasi	191.077.000,00	013.05.404611	RUMAH TAHANAN NEGARA WATES	0,00	191.077.000,00	
14	013.05.404585	BALAI PEMASYARAKATAN YOGYAKARTA	133111	Gedung dan Bangunan	0,00	013.05.419140	LPKA JOGJAKARTA, PROVINSI D.I YOGYAKARTA	199.966.000,00	(199.966.000,00)	
15	013.05.404585	BALAI PEMASYARAKATAN YOGYAKARTA	133111	Gedung dan Bangunan	0,00	013.05.632590	RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAN NEGARA YOGYAKARTA	198.877.000,00	(198.877.000,00)	
16	013.05.404585	BALAI PEMASYARAKATAN YOGYAKARTA	135111	Aset Tetap Renovasi	98.749.000,00	013.05.652852	LEMBAGA PEMASYARAKATAN SLEMAN	0,00	98.749.000,00	
17	013.05.404585	BALAI PEMASYARAKATAN YOGYAKARTA	133111	Gedung dan Bangunan	0,00	013.05.653442	RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAN NEGARA WONOSARI	177.850.000,00	(177.850.000,00)	
18	013.05.404585	BALAI PEMASYARAKATAN YOGYAKARTA	135111	Aset Tetap Renovasi	177.850.000,00	013.05.404630	RUMAH TAHAN NEGARA WONOSARI	0,00	177.850.000,00	
19	013.05.404585	BALAI PEMASYARAKATAN YOGYAKARTA	135111	Aset Tetap Renovasi	198.877.000,00	013.05.632590	RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAN NEGARA YOGYAKARTA	0,00	198.877.000,00	
20	013.05.404585	BALAI PEMASYARAKATAN YOGYAKARTA	133111	Gedung dan Bangunan	0,00	013.05.652852	LEMBAGA PEMASYARAKATAN SLEMAN	98.749.000,00	(98.749.000,00)	
21	013.05.404642	LEMBAGA PEMASYARAKATAN SEMARANG	135111	Aset Tetap Renovasi	99.763.000,00	013.05.107170	BALAI PEMASYARAKATAN KELAS II KLATEN	0,00	99.763.000,00	
22	013.05.404642	LEMBAGA PEMASYARAKATAN SEMARANG	133111	Gedung dan Bangunan	0,00	013.05.107170	BALAI PEMASYARAKATAN KELAS II KLATEN	99.763.000,00	(99.763.000,00)	
23	013.05.404642	LEMBAGA PEMASYARAKATAN SEMARANG	135111	Aset Tetap Renovasi	25.158.000,00	013.01.408742	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAWA TENGAH	0,00	25.158.000,00	
24	013.05.404642	LEMBAGA PEMASYARAKATAN SEMARANG	133111	Gedung dan Bangunan	0,00	013.01.408742	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAWA TENGAH	25.158.000,00	(25.158.000,00)	
25	013.05.409263	DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN	133111	Gedung dan Bangunan	1.187.174.090,00	013.05.109107	LEMBAGA PEMASYARAKATAN BATU	1.236.392.490,00	(49.218.400,00)	
26	013.05.409263	DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN	133111	Gedung dan Bangunan	0,00	013.05.497702	LEMBAGA PEMASYARAKATAN PASIR PUTIH NUSAKAMBANGAN	1.438.343.456,00	(1.438.343.456,00)	
27	013.05.409263	DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN	135111	Aset Tetap Renovasi	49.218.400,00	013.05.109107	LEMBAGA PEMASYARAKATAN BATU	0,00	49.218.400,00	
28	013.05.409263	DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN	135111	Aset Tetap Renovasi	1.438.343.456,00	013.05.497702	LEMBAGA PEMASYARAKATAN PASIR PUTIH NUSAKAMBANGAN	0,00	1.438.343.456,00	
29	013.05.409263	DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN	135111	Aset Tetap Renovasi	184.250.000,00	013.05.408661	LEMBAGA PEMASYARAKATAN WANITA TANGERANG	0,00	184.250.000,00	
30	013.05.409263	DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN	133111	Gedung dan Bangunan	0,00	013.05.408661	LEMBAGA PEMASYARAKATAN WANITA TANGERANG	184.250.000,00	(184.250.000,00)	

DAFTAR TRANSFER KELUAR / TRANSFER MASUK
S.D 31 Desember 2021 (Unduh Data per Tanggal 12 Mei 2022)

No	Kode	Uraian	Kode Akun	Uraian Akun	Transfer Keluar	Kode Masuk	Uraian Masuk	Transfer Masuk	Selisih	Keterangan
DITJEN KI										
31	013.07.097102	DITJEN KEKAYAAN INTELEKTUAL	133111	Gedung dan Bangunan	0,00	013.12.108266	BPSDM	198.605.000,00	(198.605.000,00)	Selisih atas Transfer Aset Tetap Renovasi (ATR) yang menurut Juknis dari DJPB disebabkan karena pencatatan ATR pada satker penerima bukan sebagai Transaksi Transfer Masuk, melainkan sebagai Penerimaan Aset dari Pengembangan Aset Renovasi
32	013.07.097102	DITJEN KEKAYAAN INTELEKTUAL	133111	Gedung dan Bangunan	0,00	013.06.409272	DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI	682.763.225,00	(682.763.225,00)	
33	013.07.097102	DITJEN KEKAYAAN INTELEKTUAL	135111	Aset Tetap Renovasi	682.763.225,00	013.06.409272	DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI	0,00	682.763.225,00	
34	013.07.097102	DITJEN KEKAYAAN INTELEKTUAL	135111	Aset Tetap Renovasi	198.605.000,00	013.12.108266	BPSDM	0,00	198.605.000,00	

DAFTAR TRANSFER KELUAR / TRANSFER MASUK NON PERSEDIAAN
S.D 31 Desember 2021 (Unduh Data per Tanggal 12 Mei 2022)

No	Kode	Uraian	Kode Barang	Uraian Barang	Kuantitas	Rp	Kode Masuk	Uraian Masuk	Kuantitas	Rp	Selisih Kuantitas	Selisih Rp	Keterangan
DITJEN IMIGRASI													
1	013.06.40927 2.000	DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI	1010315001	Dokumen Keimigrasian	0	0,00	013.06.409272. 000	DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI	42.000,00	3.737.580.000,00	-42.000	-3.737.580.000,00	Selisih disebabkan karena terdapat dua transaksi pengiriman persediaan kepada Perwakilan Imigrasi di Seoul dan Perwakilan Imigrasi di Taipei yang secara struktur belum menjadi satker dan masih menginduk pada Ditjen Imigrasi. Atas kesalahan tersebut akan dilakukan koordinasi perbaikan mekanisme pencatatan.
2	013.06.40927 2.000	DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI	1010304004	Tinta/Toner Printer	2	6.440.000,00	013.06.409272. 002	DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI	0,00	0,00	2	6.440.000,00	
3	013.06.40927 2.000	DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI	1010315001	Dokumen Keimigrasian	42.000	3.737.580.000,00	013.06.409272. 001	DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI	0,00	0,00	42.000	3.737.580.000,00	
4	013.06.40927 2.000	DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI	1010304004	Tinta/Toner Printer	0	0,00	013.06.409272. 000	DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI	2,00	6.440.000,00	-2	-6.440.000,00	

DAFTAR TRANSFER KELUAR / TRANSFER MASUK NON PERSEDIAAN
S.D 31 Desember 2021 (Unduh Data per Tanggal 12 Mei 2022)

No	Kode	Uraian	Kode Barang	Uraian Barang	Transfer Keluar	Kode Masuk	Uraian Masuk	Transfer Masuk	Selisih	Keterangan
SEKRETARIAT JENDERAL										
1	013.01.40423 3.000	SEKRETARIAT JENDERAL (PUSAT)	6070301001	Gedung dan Bangunan Dalam Renovasi	1.802.478.100,00	007.01.403013. 001	SEKRETARIAT KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA	0,00	1.802.478.100,00	Selisih atas Transfer Aset Tetap Renovasi (ATR) yang menurut Juknis dari DJPB disebabkan karena pencatatan ATR pada satker penerima bukan sebagai Transaksi Transfer Masuk, melainkan sebagai Penerimaan Aset dari Pengembangan Aset Renovasi
INSPEKTORAT JENDERAL										
2	013.02.40924 1.000	INSPEKTORAT JENDERAL	6070501001	Aset Tetap Lainnya Dalam Renovasi	959.360.770,00	013.06.409272. 000	DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI	0,00	959.360.770,00	Selisih atas Transfer Aset Tetap Renovasi (ATR) yang menurut Juknis dari DJPB disebabkan karena pencatatan ATR pada satker penerima bukan sebagai Transaksi Transfer Masuk, melainkan sebagai Penerimaan Aset dari Pengembangan Aset Renovasi
DITJEN AHU										
3	013.03.40925 7.000	DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM	6070301001	Gedung dan Bangunan Dalam Renovasi	2.572.266.596,00	013.03.099299. 000	BALAI HARTA PENINGGALAN SURABAYA	0,00	2.572.266.596,00	Selisih atas Transfer Aset Tetap Renovasi (ATR) yang menurut Juknis dari DJPB disebabkan karena pencatatan ATR pada satker penerima bukan sebagai Transaksi Transfer Masuk, melainkan sebagai Penerimaan Aset dari Pengembangan Aset Renovasi
4	013.03.40925 7.000	DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM	6070301001	Gedung dan Bangunan Dalam Renovasi	392.998.755,00	013.03.099298. 000	BALAI HARTA PENINGGALAN SEMARANG	0,00	392.998.755,00	
5	013.03.40925 7.000	DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM	6070301001	Gedung dan Bangunan Dalam Renovasi	964.160.789,00	013.06.409272. 000	DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI	0,00	964.160.789,00	
DITJEN PEMASYARAKATAN										
6	013.05.40458 5.000	BALAI PEMASYARAKATAN YOGYAKARTA	6070301001	Gedung dan Bangunan Dalam Renovasi	198.877.000,00	013.05.632590. 000	RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAN NEGARA YOGYAKARTA	0,00	198.877.000,00	Selisih atas Transfer Aset Tetap Renovasi (ATR) yang menurut Juknis dari DJPB disebabkan karena pencatatan ATR pada satker penerima bukan sebagai Transaksi Transfer Masuk, melainkan sebagai Penerimaan Aset dari Pengembangan Aset Renovasi
7	013.05.40458 5.000	BALAI PEMASYARAKATAN YOGYAKARTA	6070301001	Gedung dan Bangunan Dalam Renovasi	177.850.000,00	013.05.653442. 000	RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAN NEGARA WONOSARI	0,00	177.850.000,00	
8	013.05.40458 5.000	BALAI PEMASYARAKATAN YOGYAKARTA	6070301001	Gedung dan Bangunan Dalam Renovasi	199.966.000,00	013.05.419140. 000	LPKA JOGJAKARTA, PROVINSI D.I YOGYAKARTA	0,00	199.966.000,00	
9	013.05.40458 5.000	BALAI PEMASYARAKATAN YOGYAKARTA	6070301001	Gedung dan Bangunan Dalam Renovasi	98.749.000,00	013.05.652852. 000	LEMBAGA PEMASYARAKATAN SLEMAN	0,00	98.749.000,00	
10	013.05.40458 5.000	BALAI PEMASYARAKATAN YOGYAKARTA	6070301001	Gedung dan Bangunan Dalam Renovasi	191.077.000,00	013.05.404611. 000	RUMAH TAHANAN NEGARA WATES	0,00	191.077.000,00	

DAFTAR TRANSFER KELUAR / TRANSFER MASUK NON PERSEDIAAN
S.D 31 Desember 2021 (Unduh Data per Tanggal 12 Mei 2022)

No	Kode	Uraian	Kode Barang	Uraian Barang	Transfer Keluar	Kode Masuk	Uraian Masuk	Transfer Masuk	Selisih	Keterangan
11	013.05.40464 2.000	LEMBAGA PEMASYARAKATAN SEMARANG	6070301001	Gedung dan Bangunan Dalam Renovasi	99.763.000,00	013.05.107170. 000	BALAI PEMASYARAKATAN KELAS II KLATEN	0,00	99.763.000,00	Selisih atas Transfer Aset Tetap Renovasi (ATR) yang menurut Juknis dari DJPB disebabkan karena pencatatan ATR pada satker penerima bukan sebagai Transaksi Transfer Masuk, melainkan sebagai Penerimaan Aset dari Pengembangan Aset Renovasi
12	013.05.40464 2.000	LEMBAGA PEMASYARAKATAN SEMARANG	6070301001	Gedung dan Bangunan Dalam Renovasi	25.158.000,00	013.01.408742. 000	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAWA TENGAH	0,00	25.158.000,00	
13	013.05.40926 3.000	DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN	6070301001	Gedung dan Bangunan Dalam Renovasi	1.438.343.456,00	013.05.497702. 000	LEMBAGA PEMASYARAKATAN PASIR PUTIH NUSAKAMBANGAN	0,00	1.438.343.456,00	
14	013.05.40926 3.000	DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN	6070301001	Gedung dan Bangunan Dalam Renovasi	184.250.000,00	013.05.408661. 000	LEMBAGA PEMASYARAKATAN WANITA TANGERANG	0,00	184.250.000,00	
15	013.05.40926 3.000	DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN	6070301001	Gedung dan Bangunan Dalam Renovasi	49.218.400,00	013.05.109107. 000	LEMBAGA PEMASYARAKATAN BATU	0,00	49.218.400,00	
DITJEN KI										
16	013.07.09710 2.000	DITJEN KEKAYAAN INTELEKTUAL	6070301001	Gedung dan Bangunan Dalam Renovasi	198.605.000,00	013.12.108266. 000	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA	0,00	198.605.000,00	Selisih atas Transfer Aset Tetap Renovasi (ATR) yang menurut Juknis dari DJPB disebabkan karena pencatatan ATR pada satker penerima bukan sebagai Transaksi Transfer Masuk, melainkan sebagai Penerimaan Aset dari Pengembangan Aset Renovasi
17	013.07.09710 2.000	DITJEN KEKAYAAN INTELEKTUAL	6070301001	Gedung dan Bangunan Dalam Renovasi	682.763.225,00	013.06.409272. 000	DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI	0,00	682.763.225,00	

DAFTAR SELISIH RESIPROKAL
S.D 31 Desember 2021 (Unduh Data per Tanggal 12 Mei 2022)

No	Kode Satker	Nama Satker	Kode Akun	Uraian Akun	Belanja	Kode Satker	Nama Satker	Pendapatan	Selisih	KETERANGAN
1	013.01.404233.KP	SEKRETARIAT JENDERAL (PUSAT)	010.WA.1553.EAF.521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	7.797.100	060.01.679330.KD	RUMKIT BHAYANGKARA BANDA ACEH	0,00	7.797.100,00	Selisih resiprokal disebabkan transaksi antara satker BLU/Non BLU Pemberi Kerja dan satker BLU Penerima Kerja yang menggunakan dana APBN yang belum dilakukan eliminasi
2	013.01.404233.KP	SEKRETARIAT JENDERAL (PUSAT)	000.00.0000.000.424111	Pendapatan Jasa Pelayanan Rumah Sakit	0	060.01.679330.KD	RUMKIT BHAYANGKARA BANDA ACEH	7.797.100,00	(7.797.100,00)	
3	013.01.404233.KP	SEKRETARIAT JENDERAL (PUSAT)	010.WA.1553.EAF.521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	17.717.100	060.01.646307.KD	RUMKIT BHAYANGKARA MAKASAR	0,00	17.717.100,00	
4	013.01.404233.KP	SEKRETARIAT JENDERAL (PUSAT)	000.00.0000.000.424111	Pendapatan Jasa Pelayanan Rumah Sakit	0	060.01.646307.KD	RUMKIT BHAYANGKARA MAKASAR	17.717.100,00	(17.717.100,00)	
5	013.01.404233.KP	SEKRETARIAT JENDERAL (PUSAT)	010.WA.1553.EAF.521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	32.627.100	060.01.679415.KD	RUMKIT BHAYANGKARA PEKANBARU	0,00	32.627.100,00	
6	013.01.404233.KP	SEKRETARIAT JENDERAL (PUSAT)	000.00.0000.000.424111	Pendapatan Jasa Pelayanan Rumah Sakit	0	060.01.679415.KD	RUMKIT BHAYANGKARA PEKANBARU	32.627.100,00	(32.627.100,00)	
7	013.01.404233.KP	SEKRETARIAT JENDERAL (PUSAT)	010.WA.1553.EAF.521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	14.392.100	060.01.679389.KD	RUMKIT BHAYANGKARA PADANG	0,00	14.392.100,00	
8	013.01.404233.KP	SEKRETARIAT JENDERAL (PUSAT)	000.00.0000.000.424111	Pendapatan Jasa Pelayanan Rumah Sakit	0	060.01.679389.KD	RUMKIT BHAYANGKARA PADANG	14.392.100,00	(14.392.100,00)	
9	013.01.404233.KP	SEKRETARIAT JENDERAL (PUSAT)	000.00.0000.000.424111	Pendapatan Jasa Pelayanan Rumah Sakit	0	060.01.641792.KD	RUMKIT BHAYANGKARA BANDAR LAMPUNG	61.927.100,00	(61.927.100,00)	
10	013.01.404233.KP	SEKRETARIAT JENDERAL (PUSAT)	010.WA.1553.EAF.521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	61.927.100	060.01.641792.KD	RUMKIT BHAYANGKARA BANDAR LAMPUNG	0,00	61.927.100,00	
11	013.01.404233.KP	SEKRETARIAT JENDERAL (PUSAT)	000.00.0000.000.424111	Pendapatan Jasa Pelayanan Rumah Sakit	0	060.01.650772.KD	RUMKIT BHAYANGKARA JAMBI	15.400.000,00	(15.400.000,00)	
12	013.01.404233.KP	SEKRETARIAT JENDERAL (PUSAT)	010.WA.1553.EAF.521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	15.400.000	060.01.650772.KD	RUMKIT BHAYANGKARA JAMBI	0,00	15.400.000,00	
13	013.01.404233.KP	SEKRETARIAT JENDERAL (PUSAT)	010.WA.1553.EAF.521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	44.200.000	060.01.650840.KD	RUMKIT BHAYANGKARA PALEMBANG	0,00	44.200.000,00	
14	013.01.404233.KP	SEKRETARIAT JENDERAL (PUSAT)	000.00.0000.000.424111	Pendapatan Jasa Pelayanan Rumah Sakit	0	060.01.650840.KD	RUMKIT BHAYANGKARA PALEMBANG	44.200.000,00	(44.200.000,00)	
15	013.01.404233.KP	SEKRETARIAT JENDERAL (PUSAT)	010.WA.1553.EAF.521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	17.497.100	060.01.679457.KD	RUMKIT BHAYANGKARA BENGKULU	0,00	17.497.100,00	
16	013.01.404233.KP	SEKRETARIAT JENDERAL (PUSAT)	000.00.0000.000.424111	Pendapatan Jasa Pelayanan Rumah Sakit	0	060.01.679457.KD	RUMKIT BHAYANGKARA BENGKULU	17.497.100,00	(17.497.100,00)	
17	013.01.404233.KP	SEKRETARIAT JENDERAL (PUSAT)	010.WA.1553.EAF.521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	18.717.100	060.01.651203.KD	RUMKIT BHAYANGKARA DENPASAR	0,00	18.717.100,00	
18	013.01.404233.KP	SEKRETARIAT JENDERAL (PUSAT)	000.00.0000.000.424111	Pendapatan Jasa Pelayanan Rumah Sakit	0	060.01.651203.KD	RUMKIT BHAYANGKARA DENPASAR	18.717.100,00	(18.717.100,00)	
19	013.01.404233.KP	SEKRETARIAT JENDERAL (PUSAT)	000.00.0000.000.424111	Pendapatan Jasa Pelayanan Rumah Sakit	0	060.01.679787.KD	RUMKIT BHAYANGKARA BANJARMASIN	7.697.100,00	(7.697.100,00)	
20	013.01.404233.KP	SEKRETARIAT JENDERAL (PUSAT)	010.WA.1553.EAF.521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	7.697.100	060.01.679787.KD	RUMKIT BHAYANGKARA BANJARMASIN	0,00	7.697.100,00	
21	013.01.404233.KP	SEKRETARIAT JENDERAL (PUSAT)	010.WA.1553.EAF.521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	6.297.100	060.01.215137.KD	RUMKIT BHAYANGKARA AMBON	0,00	6.297.100,00	
22	013.01.404233.KP	SEKRETARIAT JENDERAL (PUSAT)	000.00.0000.000.424111	Pendapatan Jasa Pelayanan Rumah Sakit	0	060.01.215137.KD	RUMKIT BHAYANGKARA AMBON	6.297.100,00	(6.297.100,00)	
23	013.01.404233.KP	SEKRETARIAT JENDERAL (PUSAT)	000.00.0000.000.424422	Pendapatan dari Pelayanan BLU yang Bersumber dari Entitas Pemerintah Pusat di luar Kementerian Negara/Lembaga yang membawahi BLU	0	060.01.651650.KD	RUMKIT BHAYANGKARA KENDARI	5.047.100,00	(5.047.100,00)	
24	013.01.404233.KP	SEKRETARIAT JENDERAL (PUSAT)	010.WA.1553.EAF.521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	5.047.100	060.01.651650.KD	RUMKIT BHAYANGKARA KENDARI	0,00	5.047.100,00	
25	013.01.404233.KP	SEKRETARIAT JENDERAL (PUSAT)	010.WA.1553.EAF.521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	137.400.000	060.01.679986.KD	RUMKIT BHAYANGKARA YOGYAKARTA	0,00	137.400.000,00	
26	013.01.404233.KP	SEKRETARIAT JENDERAL (PUSAT)	000.00.0000.000.424111	Pendapatan Jasa Pelayanan Rumah Sakit	0	060.01.679986.KD	RUMKIT BHAYANGKARA YOGYAKARTA	137.400.000,00	(137.400.000,00)	
27	013.01.404233.KP	SEKRETARIAT JENDERAL (PUSAT)	010.WA.1553.EAF.521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	14.627.100	060.01.679972.KD	RUMKIT BHAYANGKARA JAYAPURA	0,00	14.627.100,00	

DAFTAR SELISIH RESIPROKAL
S.D 31 Desember 2021 (Unduh Data per Tanggal 12 Mei 2022)

No	Kode Satker	Nama Satker	Kode Akun	Uraian Akun	Belanja	Kode Satker	Nama Satker	Pendapatan	Selisih	KETERANGAN
28	013.01.404233.KP	SEKRETARIAT JENDERAL (PUSAT)	000.00.0000.000.424422	Pendapatan dari Pelayanan BLU yang Bersumber dari Entitas Pemerintah Pusat di luar Kementerian Negara/Lembaga yang membawahi BLU	0	060.01.679972.KD	RUMKIT BHAYANGKARA JAYAPURA	14.627.100,00	(14.627.100,00)	Selisih resiprokal disebabkan transaksi antara satker BLU/Non BLU Pemberi Kerja dan satker BLU Penerima Kerja yang menggunakan dana APBN yang belum dilakukan eliminasi
29	013.01.404233.KP	SEKRETARIAT JENDERAL (PUSAT)	000.00.0000.000.424111	Pendapatan Jasa Pelayanan Rumah Sakit	0	060.01.642158.KP	RUMKIT BHAYANGKARA BRIMOB KELAPA DUA	275.800.000,00	(275.800.000,00)	
30	013.01.404233.KP	SEKRETARIAT JENDERAL (PUSAT)	010.WA.1553.EAF.521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	275.800.000	060.01.642158.KP	RUMKIT BHAYANGKARA BRIMOB KELAPA DUA	0,00	275.800.000,00	
31	013.01.404233.KP	SEKRETARIAT JENDERAL (PUSAT)	010.WA.1553.EAF.521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	2.797.100	060.01.651732.KD	RUMKIT BHAYANGKARA MANADO	0,00	2.797.100,00	
32	013.01.404233.KP	SEKRETARIAT JENDERAL (PUSAT)	000.00.0000.000.424111	Pendapatan Jasa Pelayanan Rumah Sakit	0	060.01.651732.KD	RUMKIT BHAYANGKARA MANADO	2.797.100,00	(2.797.100,00)	
33	013.01.404233.KP	SEKRETARIAT JENDERAL (PUSAT)	000.00.0000.000.424111	Pendapatan Jasa Pelayanan Rumah Sakit	0	060.01.651465.KD	RUMKIT BHAYANGKARA PALANGKARAYA	4.197.100,00	(4.197.100,00)	
34	013.01.404233.KP	SEKRETARIAT JENDERAL (PUSAT)	010.WA.1553.EAF.521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	4.197.100	060.01.651465.KD	RUMKIT BHAYANGKARA PALANGKARAYA	0,00	4.197.100,00	
35	013.01.404233.KP	SEKRETARIAT JENDERAL (PUSAT)	000.00.0000.000.424111	Pendapatan Jasa Pelayanan Rumah Sakit	0	060.01.679841.KD	RUMKIT BHAYANGKARA PALU	2.091.100,00	(2.091.100,00)	
36	013.01.404233.KP	SEKRETARIAT JENDERAL (PUSAT)	010.WA.1553.EAF.521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	2.091.100	060.01.679841.KD	RUMKIT BHAYANGKARA PALU	0,00	2.091.100,00	
37	013.01.404233.KP	SEKRETARIAT JENDERAL (PUSAT)	010.WA.1553.EAF.521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	157.500.000	060.01.651135.KD	RUMKIT BHAYANGKARA SURABAYA	0,00	157.500.000,00	
38	013.01.404233.KP	SEKRETARIAT JENDERAL (PUSAT)	000.00.0000.000.424119	Pendapatan Jasa Penyediaan Barang dan Jasa Lainnya	0	060.01.651135.KD	RUMKIT BHAYANGKARA SURABAYA	157.500.000,00	(157.500.000,00)	
39	013.03.409257.KP	DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM	000.00.0000.000.424422	Pendapatan dari Pelayanan BLU yang Bersumber dari Entitas Pemerintah Pusat di luar Kementerian Negara/Lembaga yang membawahi BLU	0	023.17.677507.KD	UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG	2.347.355.000,00	(2.347.355.000,00)	
40	013.03.409257.KP	DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM	040.WA.6234.EAC.522141	Belanja Sewa	3.088.625.000	023.17.677507.KD	UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG	0,00	3.088.625.000,00	
41	013.03.409257.KP	DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM	000.00.0000.000.424924	Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Peralatan dan Mesin	0	023.17.677507.KD	UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG	741.270.000,00	(741.270.000,00)	

DAFTAR SELISIH REKLASIFIKASI ASET
S.D 31 Desember 2021 (Unduh Data per Tanggal 12 Mei 2022)

No	Kode Satker	Uraian	Reklas Keluar	Reklas Masuk	Selisih	Keterangan
SEKRETARIAT JENDERAL						
1	013.01.408818.000	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PALEMBANG	38.150.000,00	211.192.995,00	173.042.995,00	Selisih disebabkan karena pemecahan pencatatan dalam rangka menyesuaikan dengan eksisting aset yang ada. Umumnya terjadi pada perolehan GB di mana di dalamnya terdapat juga perolehan barang-barang inventaris, sehingga dilakukan pemisahan pencatatan antara gedung bangunan dan peralatan mesin
DITJEN PEMASYARAKATAN						
2	013.05.404554.000	LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEMUDA TANGERANG	0,00	84.000.000,00	84.000.000,00	Kesalahan pencatatan akibat dampak migrasi data persediaan pada update aplikasi Persediaan dengan metode FIFO sehingga terdapat penyesuaian-penyesuaian pencatatan dalam aplikasi tersebut
3	013.05.418338.000	Lapas Perempuan Kelas IIB Jambi	0,00	539.940.511,00	539.940.511,00	Selisih disebabkan karena pemecahan pencatatan dalam rangka menyesuaikan dengan eksisting aset yang ada. Umumnya terjadi pada perolehan GB di mana di dalamnya terdapat juga perolehan barang-barang inventaris, sehingga dilakukan pemisahan pencatatan antara gedung bangunan dan peralatan mesin

No	Kode Saterdag	Nama Saterdag	Jenis Dokumen	Tanggal Dokumen	Nomor Dokumen	Akun	Debet	Kredit	Keterangan
SEKRETARIAT JENDERAL									
1	013.01.404233	SEKRETARIAT JENDERAL (PUSAT)	408	31/12/2021	202112404233006	133211	0,00	1.802.478.100,00	Jurnal manual penerimaan hibah USAID
2	013.01.404233	SEKRETARIAT JENDERAL (PUSAT)	408	31/12/2021	202112404233005	133211	0,00	11.121.713.000,00	Jurnal manual penerimaan hibah USAID
3	013.01.404233	SEKRETARIAT JENDERAL (PUSAT)	408	31/12/2021	202112404233005	134211	11.121.713.000,00	0,00	Jurnal manual penerimaan hibah USAID
4	013.01.404315	BALAI PEMASYARAKATAN BANDUNG	407	03/11/2021	ND-1075/PB.6/2021	132211	31.212.500,00	0,00	Jurnal Kemenkeu Menghilangkan Satker Inactive
5	013.01.404315	BALAI PEMASYARAKATAN BANDUNG	407	03/11/2021	ND-1075/PB.6/2021	132211	0,00	31.212.500,00	Jurnal Kemenkeu Menghilangkan Satker Inactive
6	013.01.404315	BALAI PEMASYARAKATAN BANDUNG	407	03/11/2021	ND-1075/PB.6/2021	391111	0,00	1.100.000,00	Jurnal Kemenkeu Menghilangkan Satker Inactive
7	013.01.404315	BALAI PEMASYARAKATAN BANDUNG	407	03/11/2021	ND-1075/PB.6/2021	391111	1.100.000,00	0,00	Jurnal Kemenkeu Menghilangkan Satker Inactive
8	013.01.404315	BALAI PEMASYARAKATAN BANDUNG	407	03/11/2021	ND-1075/PB.6/2021	132211	0,00	31.212.500,00	Jurnal Kemenkeu Menghilangkan Satker Inactive
9	013.01.404315	BALAI PEMASYARAKATAN BANDUNG	407	03/11/2021	ND-1075/PB.6/2021	132211	0,00	1.100.000,00	Jurnal Kemenkeu Menghilangkan Satker Inactive
10	013.01.404315	BALAI PEMASYARAKATAN BANDUNG	407	03/11/2021	ND-1075/PB.6/2021	132211	1.100.000,00	0,00	Jurnal Kemenkeu Menghilangkan Satker Inactive
11	013.01.404315	BALAI PEMASYARAKATAN BANDUNG	407	03/11/2021	ND-1075/PB.6/2021	132211	0,00	31.212.500,00	Jurnal Kemenkeu Menghilangkan Satker Inactive
12	013.01.404315	BALAI PEMASYARAKATAN BANDUNG	407	03/11/2021	ND-1075/PB.6/2021	132211	0,00	1.100.000,00	Jurnal Kemenkeu Menghilangkan Satker Inactive
13	013.01.404315	BALAI PEMASYARAKATAN BANDUNG	407	03/11/2021	ND-1075/PB.6/2021	132211	31.212.500,00	0,00	Jurnal Kemenkeu Menghilangkan Satker Inactive
14	013.01.404315	BALAI PEMASYARAKATAN BANDUNG	407	03/11/2021	ND-1075/PB.6/2021	132211	1.100.000,00	0,00	Jurnal Kemenkeu Menghilangkan Satker Inactive
15	013.01.404315	BALAI PEMASYARAKATAN BANDUNG	407	03/11/2021	ND-1075/PB.6/2021	132211	31.212.500,00	0,00	Jurnal Kemenkeu Menghilangkan Satker Inactive
16	013.01.404315	BALAI PEMASYARAKATAN BANDUNG	407	03/11/2021	ND-1075/PB.6/2021	132211	1.100.000,00	0,00	Jurnal Kemenkeu Menghilangkan Satker Inactive
17	013.01.404315	BALAI PEMASYARAKATAN BANDUNG	407	03/11/2021	ND-1075/PB.6/2021	132211	0,00	1.100.000,00	Jurnal Kemenkeu Menghilangkan Satker Inactive
18	013.01.404315	BALAI PEMASYARAKATAN BANDUNG	407	03/11/2021	ND-1075/PB.6/2021	391111	0,00	2.125.200.000,00	Jurnal Kemenkeu Menghilangkan Satker Inactive
19	013.01.404315	BALAI PEMASYARAKATAN BANDUNG	407	03/11/2021	ND-1075/PB.6/2021	391111	1.100.000,00	0,00	Jurnal Kemenkeu Menghilangkan Satker Inactive
20	013.01.404315	BALAI PEMASYARAKATAN BANDUNG	407	03/11/2021	ND-1075/PB.6/2021	391111	1.100.000,00	0,00	Jurnal Kemenkeu Menghilangkan Satker Inactive
21	013.01.404315	BALAI PEMASYARAKATAN BANDUNG	407	03/11/2021	ND-1075/PB.6/2021	391111	0,00	1.100.000,00	Jurnal Kemenkeu Menghilangkan Satker Inactive
22	013.01.404315	BALAI PEMASYARAKATAN BANDUNG	407	03/11/2021	ND-1075/PB.6/2021	391111	31.212.500,00	0,00	Jurnal Kemenkeu Menghilangkan Satker Inactive
23	013.01.404315	BALAI PEMASYARAKATAN BANDUNG	407	03/11/2021	ND-1075/PB.6/2021	391111	0,00	377.640.500,00	Jurnal Kemenkeu Menghilangkan Satker Inactive
24	013.01.404315	BALAI PEMASYARAKATAN BANDUNG	407	03/11/2021	ND-1075/PB.6/2021	391111	0,00	2.125.200.000,00	Jurnal Kemenkeu Menghilangkan Satker Inactive
25	013.01.404315	BALAI PEMASYARAKATAN BANDUNG	407	03/11/2021	ND-1075/PB.6/2021	391111	0,00	1.100.000,00	Jurnal Kemenkeu Menghilangkan Satker Inactive
26	013.01.404315	BALAI PEMASYARAKATAN BANDUNG	407	03/11/2021	ND-1075/PB.6/2021	391111	0,00	31.212.500,00	Jurnal Kemenkeu Menghilangkan Satker Inactive
27	013.01.404315	BALAI PEMASYARAKATAN BANDUNG	407	03/11/2021	ND-1075/PB.6/2021	391111	2.125.200.000,00	0,00	Jurnal Kemenkeu Menghilangkan Satker Inactive
28	013.01.404315	BALAI PEMASYARAKATAN BANDUNG	407	03/11/2021	ND-1075/PB.6/2021	391111	377.640.500,00	0,00	Jurnal Kemenkeu Menghilangkan Satker Inactive
29									

No	Kode Saterdag	Nama Saterdag	Jenis Dokumen	Tanggal Dokumen	Nomor Dokumen	Akun	Debet	Kredit	Keterangan
57	013.01.404315	BALAI PEMASYARAKATAN BANDUNG	407	03/11/2021	ND-1075/PB.6/2021	391111	1.100.000,00	0,00	Jurnal Kemenkeu Menghilangkan Satker Inactive
58	013.01.404315	BALAI PEMASYARAKATAN BANDUNG	407	03/11/2021	ND-1075/PB.6/2021	391111	2.125.200.000,00	0,00	Jurnal Kemenkeu Menghilangkan Satker Inactive
59	013.01.404315	BALAI PEMASYARAKATAN BANDUNG	407	03/11/2021	ND-1075/PB.6/2021	391111	31.212.500,00	0,00	Jurnal Kemenkeu Menghilangkan Satker Inactive
60	013.01.404315	BALAI PEMASYARAKATAN BANDUNG	407	03/11/2021	ND-1075/PB.6/2021	391111	0,00	377.640.500,00	Jurnal Kemenkeu Menghilangkan Satker Inactive
61	013.01.404315	BALAI PEMASYARAKATAN BANDUNG	407	03/11/2021	ND-1075/PB.6/2021	391111	0,00	2.125.200.000,00	Jurnal Kemenkeu Menghilangkan Satker Inactive
62	013.01.404315	BALAI PEMASYARAKATAN BANDUNG	407	03/11/2021	ND-1075/PB.6/2021	131111	2.125.200.000,00	0,00	Jurnal Kemenkeu Menghilangkan Satker Inactive
63	013.01.404315	BALAI PEMASYARAKATAN BANDUNG	407	03/11/2021	ND-1075/PB.6/2021	131111	0,00	2.125.200.000,00	Jurnal Kemenkeu Menghilangkan Satker Inactive
64	013.01.404392	BALAI PEMASYARAKATAN CIREBON	407	03/11/2021	ND-1075/PB.6/2021	391111	0,00	450.564.990,00	Jurnal Kemenkeu Menghilangkan Satker Inactive
65	013.01.404392	BALAI PEMASYARAKATAN CIREBON	407	03/11/2021	ND-1075/PB.6/2021	391111	103.676.800,00	0,00	Jurnal Kemenkeu Menghilangkan Satker Inactive
66	013.01.404392	BALAI PEMASYARAKATAN CIREBON	407	03/11/2021	ND-1075/PB.6/2021	391111	0,00	103.676.800,00	Jurnal Kemenkeu Menghilangkan Satker Inactive
67	013.01.404392	BALAI PEMASYARAKATAN CIREBON	407	03/11/2021	ND-1075/PB.6/2021	131111	0,00	103.676.800,00	Jurnal Kemenkeu Menghilangkan Satker Inactive
68	013.01.404392	BALAI PEMASYARAKATAN CIREBON	407	03/11/2021	ND-1075/PB.6/2021	391111	799.000,00	0,00	Jurnal Kemenkeu Menghilangkan Satker Inactive
69	013.01.404392	BALAI PEMASYARAKATAN CIREBON	407	03/11/2021	ND-1075/PB.6/2021	391111	0,00	825.416.000,00	Jurnal Kemenkeu Menghilangkan Satker Inactive
70	013.01.404392	BALAI PEMASYARAKATAN CIREBON	407	03/11/2021	ND-1075/PB.6/2021	391111	0,00	650.000,00	Jurnal Kemenkeu Menghilangkan Satker Inactive
71	013.01.404392	BALAI PEMASYARAKATAN CIREBON	407	03/11/2021	ND-1075/PB.6/2021	391111	650.000,00	0,00	Jurnal Kemenkeu Menghilangkan Satker Inactive
72	013.01.404392	BALAI PEMASYARAKATAN CIREBON	407	03/11/2021	ND-1075/PB.6/2021	391111	0,00	22.042.450,00	Jurnal Kemenkeu Menghilangkan Satker Inactive
73	013.01.404392	BALAI PEMASYARAKATAN CIREBON	407	03/11/2021	ND-1075/PB.6/2021	132211	0,00	799.000,00	Jurnal Kemenkeu Menghilangkan Satker Inactive
74	013.01.404392	BALAI PEMASYARAKATAN CIREBON	407	03/11/2021	ND-1075/PB.6/2021	391111	450.564.990,00	0,00	Jurnal Kemenkeu Menghilangkan Satker Inactive
75	013.01.404392	BALAI PEMASYARAKATAN CIREBON	407	03/11/2021	ND-1075/PB.6/2021	391111	0,00	799.000,00	Jurnal Kemenkeu Menghilangkan Satker Inactive
76	013.01.404392	BALAI PEMASYARAKATAN CIREBON	407	03/11/2021	ND-1075/PB.6/2021	391111	825.416.000,00	0,00	Jurnal Kemenkeu Menghilangkan Satker Inactive
77	013.01.404392	BALAI PEMASYARAKATAN CIREBON	407	03/11/2021	ND-1075/PB.6/2021	391111	650.000,00	0,00	Jurnal Kemenkeu Menghilangkan Satker Inactive
78	013.01.404392	BALAI PEMASYARAKATAN CIREBON	407	03/11/2021	ND-1075/PB.6/2021	391111	0,00	650.000,00	Jurnal Kemenkeu Menghilangkan Satker Inactive
79	013.01.404392	BALAI PEMASYARAKATAN CIREBON	407	03/11/2021	ND-1075/PB.6/2021	391111	22.042.450,00	0,00	Jurnal Kemenkeu Menghilangkan Satker Inactive
80	013.01.404392	BALAI PEMASYARAKATAN CIREBON	407	03/11/2021	ND-1075/PB.6/2021	132211	0,00	650.000,00	Jurnal Kemenkeu Menghilangkan Satker Inactive
81	013.01.404392	BALAI PEMASYARAKATAN CIREBON	407	03/11/2021	ND-1075/PB.6/2021	133111	0,00	825.416.000,00	Jurnal Kemenkeu Menghilangkan Satker Inactive
82	013.01.404392	BALAI PEMASYARAKATAN CIREBON	407	03/11/2021	ND-1075/PB.6/2021	132211	799.000,00	0,00	Jurnal Kemenkeu Menghilangkan Satker Inactive
83	013.01.404392	BALAI PEMASYARAKATAN CIREBON	407	03/11/2021	ND-1075/PB.6/2021	132211	650.000,00	0,00	Jurnal Kemenkeu Menghilangkan Satker Inactive
84	013.01.404392	BALAI PEMASYARAKATAN CIREBON	407	03/11/2021	ND-1075/PB.6/2021	131111	103.676.800,00	0,00	Jurnal Kemenkeu Menghilangkan Satker Inactive
85	013.01.404392	BALAI PEMASYARAKATAN CIREBON	407	03/11/2021	ND-1				

JURNAL TIDAK LAZIM
S.D 31 Desember 2021 (Unduh Data per Tanggal 12 Mei 2022)

No	Kode Satker	Nama Satker	Jenis Dokumen	Tanggal Dokumen	Nomor Dokumen	Akun	Debet	Kredit	Keterangan
114	013.01.404434	LEMBAGA PEMASYARAKATAN KUNINGAN	407	03/11/2021	ND-1075/PB.6/2021	391111	0,00	2.383.628.750,00	Jurnal Kemenkeu Menghilangkan Satker Inactive
115	013.01.404434	LEMBAGA PEMASYARAKATAN KUNINGAN	407	03/11/2021	ND-1075/PB.6/2021	391111	0,00	2.350.000,00	Jurnal Kemenkeu Menghilangkan Satker Inactive
116	013.01.404434	LEMBAGA PEMASYARAKATAN KUNINGAN	407	03/11/2021	ND-1075/PB.6/2021	132211	0,00	12.445.000,00	Jurnal Kemenkeu Menghilangkan Satker Inactive
117	013.01.404434	LEMBAGA PEMASYARAKATAN KUNINGAN	407	03/11/2021	ND-1075/PB.6/2021	132211	0,00	9.845.000,00	Jurnal Kemenkeu Menghilangkan Satker Inactive
118	013.01.404434	LEMBAGA PEMASYARAKATAN KUNINGAN	407	03/11/2021	ND-1075/PB.6/2021	132211	12.445.000,00	0,00	Jurnal Kemenkeu Menghilangkan Satker Inactive
119	013.01.404434	LEMBAGA PEMASYARAKATAN KUNINGAN	407	03/11/2021	ND-1075/PB.6/2021	132211	9.845.000,00	0,00	Jurnal Kemenkeu Menghilangkan Satker Inactive
120	013.01.404434	LEMBAGA PEMASYARAKATAN KUNINGAN	407	03/11/2021	ND-1075/PB.6/2021	132111	8.980.925.277,00	0,00	Jurnal Kemenkeu Menghilangkan Satker Inactive
121	013.01.404434	LEMBAGA PEMASYARAKATAN KUNINGAN	407	03/11/2021	ND-1075/PB.6/2021	391111	2.350.000,00	0,00	Jurnal Kemenkeu Menghilangkan Satker Inactive
122	013.01.404434	LEMBAGA PEMASYARAKATAN KUNINGAN	407	03/11/2021	ND-1075/PB.6/2021	391111	0,00	12.445.000,00	Jurnal Kemenkeu Menghilangkan Satker Inactive
123	013.01.404434	LEMBAGA PEMASYARAKATAN KUNINGAN	407	03/11/2021	ND-1075/PB.6/2021	391111	9.845.000,00	0,00	Jurnal Kemenkeu Menghilangkan Satker Inactive
124	013.01.404434	LEMBAGA PEMASYARAKATAN KUNINGAN	407	03/11/2021	ND-1075/PB.6/2021	131111	1.357.788.850,00	0,00	Jurnal Kemenkeu Menghilangkan Satker Inactive
125	013.01.404434	LEMBAGA PEMASYARAKATAN KUNINGAN	407	03/11/2021	ND-1075/PB.6/2021	132111	1.717.133.430,00	0,00	Jurnal Kemenkeu Menghilangkan Satker Inactive
126	013.01.404434	LEMBAGA PEMASYARAKATAN KUNINGAN	407	03/11/2021	ND-1075/PB.6/2021	132111	0,00	8.980.925.277,00	Jurnal Kemenkeu Menghilangkan Satker Inactive
127	013.01.404434	LEMBAGA PEMASYARAKATAN KUNINGAN	407	03/11/2021	ND-1075/PB.6/2021	132111	0,00	8.980.925.277,00	Jurnal Kemenkeu Menghilangkan Satker Inactive
128	013.01.404434	LEMBAGA PEMASYARAKATAN KUNINGAN	407	03/11/2021	ND-1075/PB.6/2021	132111	0,00	1.717.133.430,00	Jurnal Kemenkeu Menghilangkan Satker Inactive
129	013.01.404434	LEMBAGA PEMASYARAKATAN KUNINGAN	407	03/11/2021	ND-1075/PB.6/2021	132111	8.980.925.277,00	0,00	Jurnal Kemenkeu Menghilangkan Satker Inactive
130	013.01.404434	LEMBAGA PEMASYARAKATAN KUNINGAN	407	03/11/2021	ND-1075/PB.6/2021	133111	2.383.628.750,00	0,00	Jurnal Kemenkeu Menghilangkan Satker Inactive
131	013.01.404434	LEMBAGA PEMASYARAKATAN KUNINGAN	407	03/11/2021	ND-1075/PB.6/2021	133111	2.073.689.850,00	0,00	Jurnal Kemenkeu Menghilangkan Satker Inactive
132	013.01.404434	LEMBAGA PEMASYARAKATAN KUNINGAN	407	03/11/2021	ND-1075/PB.6/2021	133111	0,00	2.383.628.750,00	Jurnal Kemenkeu Menghilangkan Satker Inactive
133	013.01.404434	LEMBAGA PEMASYARAKATAN KUNINGAN	407	03/11/2021	ND-1075/PB.6/2021	133111	0,00	2.383.628.750,00	Jurnal Kemenkeu Menghilangkan Satker Inactive
134	013.01.404434	LEMBAGA PEMASYARAKATAN KUNINGAN	407	03/11/2021	ND-1075/PB.6/2021	133111	0,00	2.073.689.850,00	Jurnal Kemenkeu Menghilangkan Satker Inactive
135	013.01.404434	LEMBAGA PEMASYARAKATAN KUNINGAN	407	03/11/2021	ND-1075/PB.6/2021	133111	2.383.628.750,00	0,00	Jurnal Kemenkeu Menghilangkan Satker Inactive
136	013.01.404434	LEMBAGA PEMASYARAKATAN KUNINGAN	407	03/11/2021	ND-1075/PB.6/2021	391111	8.980.925.277,00	0,00	Jurnal Kemenkeu Menghilangkan Satker Inactive
137	013.01.404434	LEMBAGA PEMASYARAKATAN KUNINGAN	407	03/11/2021	ND-1075/PB.6/2021	131111	0,00	1.357.788.850,00	Jurnal Kemenkeu Menghilangkan Satker Inactive
138	013.01.404434	LEMBAGA PEMASYARAKATAN KUNINGAN	407	03/11/2021	ND-1075/PB.6/2021	131111	0,00	3.662.550.000,00	Jurnal Kemenkeu Menghilangkan Satker Inactive
139	013.01.404434	LEMBAGA PEMASYARAKATAN KUNINGAN	407	03/11/2021	ND-1075/PB.6/2021	131111	0,00	1.357.788.850,00	Jurnal Kemenkeu Menghilangkan Satker Inactive
140	013.01.404434	LEMBAGA PEMASYARAKATAN KUNINGAN	407	03/11/2021	ND-1075/PB.6/2021	391111	0,00	1.357.788.850,00	Jurnal Kemenkeu Menghilangkan Satker Inactive
141	013.01.404434	LEMBAGA PEMASYARAKATAN KUNINGAN	407	03/11/2021	ND-1075/PB.6/2021	391111	545.898.750,00	0,00	Jurnal Kemenkeu Menghilangkan Satker Inactive
142	013.01.404434	LEMBAGA PEMASYARAKATAN KUNINGAN	407	03/11/2021	ND-1075/PB.6/2021	391111	1.357.788.850,00	0,00	Jurnal Kemenkeu Menghilangkan Satker Inactive
143	013.01.404434	LEMBAGA PEMASYARAKATAN KUNINGAN	407	03/11/2021	ND-1075/PB.6/2021	391111	0,00	4.950.000,00	Jurnal Kemenkeu Menghilangkan Satker Inactive
144	013.01.404434	LEMBAGA PEMASYARAKATAN KUNINGAN	407	03/11/2021	ND-1075/PB.6/2021	391111	0,00	2.073.689.850,00	Jurnal Kemenkeu Menghilangkan Satker Inactive
145	013.01.404434	LEMBAGA PEMASYARAKATAN KUNINGAN	407	03/11/2021	ND-1075/PB.6/2021	391111	0,00	1.717.133.430,00	Jurnal Kemenkeu Menghilangkan Satker Inactive
146	013.01.404434	LEMBAGA PEMASYARAKATAN KUNINGAN	407	03/11/2021	ND-1075/PB.6/2021	391111	0,00	3.662.550.000,00	Jurnal Kemenkeu Menghilangkan Satker Inactive
147	013.01.404434	LEMBAGA PEMASYARAKATAN KUNINGAN	407	03/11/2021	ND-1075/PB.6/2021	391111	0,00	2.350.000,00	Jurnal Kemenkeu Menghilangkan Satker Inactive
148	013.01.404434	LEMBAGA PEMASYARAKATAN KUNINGAN	407	03/11/2021	ND-1075/PB.6/2021	131111	3.662.550.000,00	0,00	Jurnal Kemenkeu Menghilangkan Satker Inactive
149	013.01.404434	LEMBAGA PEMASYARAKATAN KUNINGAN	407	03/11/2021	ND-1075/PB.6/2021	391111	0,00	2.383.628.750,00	Jurnal Kemenkeu Menghilangkan Satker Inactive
150	013.01.404434	LEMBAGA PEMASYARAKATAN KUNINGAN	407	03/11/2021	ND-1075/PB.6/2021	391111	0,00	8.980.925.277,00	Jurnal Kemenkeu Menghilangkan Satker Inactive
151	013.01.404434	LEMBAGA PEMASYARAKATAN KUNINGAN	407	03/11/2021	ND-1075/PB.6/2021	391111	12.445.000,00	0,00	Jurnal Kemenkeu Menghilangkan Satker Inactive
152	013.01.408742	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAWA TENGAH	408	31/12/2021	2021124087421	117911	0,00	990.000,00	Aset ekstrakomtabel Peralatan dan Mesin
153	013.01.408751	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SURABAYA	407	14/12/2021	202112408751010	132211	140.229.800,00	0,00	Pendapatan Hibah Dalam Negeri Langsung Berbentuk Barang (Peralatan dan Mesin sebesar Rp140.299.800,- dan Gedung dan Bangunan sebesar Rp121.775.500,-)
154	013.01.408751	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SURABAYA	407	14/12/2021	202112408751009	133211	121.775.500,00	0,00	Pendapatan Hibah Dalam Negeri Langsung Berbentuk Barang (Peralatan dan Mesin sebesar Rp140.299.800,- dan Gedung dan Bangunan sebesar Rp121.775.500,-)
155	013.01.408773	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM UJUNG PANDANG	408	30/12/2021	202112408773001	133211	31.092.094,00	0,00	Temuan Itjen terkait kelebihan pembayaran saat pengerjaan KDP sehingga menimbulkan pengembalian
156	013.01.408773	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM UJUNG PANDANG	408	31/12/2021	202112408773002	132211	0,00	31.790.000,00	Temuan Itjen terkait kelebihan pembayaran saat pengerjaan KDP sehingga menimbulkan pengembalian
157	013.01.408782	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BANDA ACEH	408	31/12/2021	202112408782X01	117111	92.797.870,00	0,00	Dampak update aplikasi persediaan
158	013.01.408782	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BANDA ACEH	408	31/12/2021	202112408782X02	117113	1.594.500,00	0,00	Dampak update aplikasi persediaan
159	013.01.408782	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BANDA ACEH	408	31/12/2021	202112408782X04	117113	0,00	1.594.500,00	Dampak update aplikasi persediaan

JURNAL TIDAK LAZIM
S.D 31 Desember 2021 (Unduh Data per Tanggal 12 Mei 2022)

No	Kode Satker	Nama Satker	Jenis Dokumen	Tanggal Dokumen	Nomor Dokumen	Akun	Debet	Kredit	Keterangan
160	013.01.408782	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BANDA ACEH	408	31/12/2021	202112408782X03	117111	0,00	92.797.870,00	Dampak update aplikasi persediaan
161	013.01.408818	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PALEMBANG	407	22/09/2021	20210940881801	132211	45.130.000,00	0,00	Hibah langsung barang berupa TV, mesin hitung uang, infocus dari pt bank bri senilai Rp 45.130.000,-
162	013.01.408849	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BANJARMASIN	407	31/05/2021	202105408849003	131211	1.196.400.000,00	0,00	Hibah Tanah dari Pemkab Balangan sebesar Rp1.196.400.000
163	013.01.408849	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BANJARMASIN	407	07/10/2021	202110408849004	132211	265.000.000,00	0,00	Hibah Mobil Ambulance dari Bank BRI sebesar Rp265.000.000
164	013.01.408855	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SAMARINDA	407	30/09/2021	202109408855004	131211	10.355.015.607,00	0,00	Hibah tanah dari Penajam Paser Utara
165	013.01.408886	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM KUPANG	407	31/12/2021	20211240888601	131211	899.397.000,00	0,00	Jurnal atas hibah yang belum dicatat dan disahkan
166	013.01.408892	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM AMBON	408	31/12/2021	202112408892006	133211	526.939.543,00	0,00	Jurnal aset pengembalian belanja modal gedung dan bangunan atas temuan BPK
167	013.01.408892	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM AMBON	407	31/12/2021	202112408892024	133211	0,00	1.520.590.085,00	Jurnal atas KDP
168	013.01.408892	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM AMBON	408	31/12/2021	202112408892007	133211	0,00	526.939.543,00	Jurnal aset pengembalian belanja modal gedung dan bangunan atas temuan BPK
169	013.01.408892	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM AMBON	408	31/12/2021	202112408892005	133211	1.520.590.085,00	0,00	Jurnal atas KDP
170	013.01.409169	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAMBI	408	31/12/2021	202112409169002	117911	0,00	1.954.000,00	Hibah sarolangun berupa renovasi sebesar Rp701.877.000
171	013.01.409169	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAMBI	407	28/07/2021	202106409169003	133211	701.877.000,00	0,00	Hibah CCTV Rp45.480.000
172	013.01.409169	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAMBI	407	07/04/2021	202104409169001	132211	45.480.000,00	0,00	Pembelian exhause fan dibawah 1 juta sebesar Rp950.000
173	013.01.409169	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAMBI	408	31/12/2021	202112409169001	132211	0,00	950.000,00	Pembelian aset dengan menggunakan akun belanja barang pemeliharaan bangunan (kunci palu, staples) yang masuk kelompok aset peralatan mesin sebesar Rp1.954.000
174	013.01.409181	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM YOGYAKARTA	408	31/12/2021	202112409181001	117911	0,00	7.271.000,00	Pembelian 8 unit hardisk eksternal @Rp908.875,00. Pembelian menggunakan akun 521811 (Belanja Barang untuk Persediaan). Dimasukkan dalam SIMAK barang ekstrakomtabel peralatan mesin. Dilakukan pencatatan menggunakan jurnal umum: Beban Aset Ekstrakomtabel Peralatan Mesin -595112 (D) pada Persediaan yang Belum Diregister -117911 (K) senilai Rp7.271.00.
175	013.01.409190	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PALANGKARAYA	408	23/04/2021	202104409190001	117911	0,00	200.000,00	Beban ekstrakomptabel oxymeter
176	013.01.409210	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PALU	407	31/12/2021	202112409210003	132211	0,00	2.750.000,00	Pembelian white board dan alat penghancur kertas dengan harga di bawah nilai kapitalisasi
177	013.01.409226	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM MATARAM	408	01/10/2021	202110409226001	132211	0,00	79.112.000,00	Belanja 53 dibawah nilai kapitalisasi berupa kursi sebesar Rp79.112.000
178	013.01.409226	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM MATARAM	408	19/10/2021	20211040922602	133211	126.259.243,00	0,00	Pengembalian belanja 53 berupa pembangunan gedung di tahun berjalan atas temuan BPK sebesar Rp126.259.243
179	013.01.532413	PUSAT DATA DAN TEKNOLOGI INFORMASI	408	31/10/2021	20211053241301	132211	0,00	3.091.000.000,00	Belanja modal 532111 (Belanja Modal Peralatan dan Mesin), sedangkan untuk software atau ATB seharusnya menggunakan akun 536111 (Belanja Modal Lainnya).Penggunaan akun ini didasarkan pada kontrak PENGADAAN PEREMAJAAN PERANGKAT JARINGAN DAN KEAMANAN PUSAT DATA DAN TEKNOLOGI INFORMASI TA 2021 nomor SEK.7.PB.02.08-11 TA 2021 tanggal 15 april 2021 senilai 24,114,200,000 yang dibayarkan secara lumpsom menggunakan akun belanja 532111 (Belanja Modal Peralatan dan Mesin).

JURNAL TIDAK LAZIM
S.D 31 Desember 2021 (Unduh Data per Tanggal 12 Mei 2022)

No	Kode Satker	Nama Satker	Jenis Dokumen	Tanggal Dokumen	Nomor Dokumen	Akun	Debet	Kredit	Keterangan
180	013.01.626071	RUMAH PENYIMPANAN BARANG SITAAN NEGARA BANDUNG, KOT.BANDUNG, JAWA BARAT	407	03/11/2021	ND-1075/PB.6/2021	132211	15.000.000,00	0,00	Jurnal Kemenkeu Menghilangkan Satker Inactive
181	013.01.626071	RUMAH PENYIMPANAN BARANG SITAAN NEGARA BANDUNG, KOT.BANDUNG, JAWA BARAT	407	03/11/2021	ND-1075/PB.6/2021	132211	0,00	15.000.000,00	Jurnal Kemenkeu Menghilangkan Satker Inactive
182	013.01.626071	RUMAH PENYIMPANAN BARANG SITAAN NEGARA BANDUNG, KOT.BANDUNG, JAWA BARAT	407	03/11/2021	ND-1075/PB.6/2021	391111	0,00	15.000.000,00	Jurnal Kemenkeu Menghilangkan Satker Inactive
183	013.01.626071	RUMAH PENYIMPANAN BARANG SITAAN NEGARA BANDUNG, KOT.BANDUNG, JAWA BARAT	407	03/11/2021	ND-1075/PB.6/2021	391111	15.000.000,00	0,00	Jurnal Kemenkeu Menghilangkan Satker Inactive
184	013.01.626071	RUMAH PENYIMPANAN BARANG SITAAN NEGARA BANDUNG, KOT.BANDUNG, JAWA BARAT	407	03/11/2021	ND-1075/PB.6/2021	391111	0,00	15.000.000,00	Jurnal Kemenkeu Menghilangkan Satker Inactive
185	013.01.626071	RUMAH PENYIMPANAN BARANG SITAAN NEGARA BANDUNG, KOT.BANDUNG, JAWA BARAT	407	03/11/2021	ND-1075/PB.6/2021	132111	0,00	15.000.000,00	Jurnal Kemenkeu Menghilangkan Satker Inactive
186	013.01.626071	RUMAH PENYIMPANAN BARANG SITAAN NEGARA BANDUNG, KOT.BANDUNG, JAWA BARAT	407	03/11/2021	ND-1075/PB.6/2021	132111	15.000.000,00	0,00	Jurnal Kemenkeu Menghilangkan Satker Inactive
187	013.01.626071	RUMAH PENYIMPANAN BARANG SITAAN NEGARA BANDUNG, KOT.BANDUNG, JAWA BARAT	407	03/11/2021	ND-1075/PB.6/2021	391111	15.000.000,00	0,00	Jurnal Kemenkeu Menghilangkan Satker Inactive
188	013.01.648999	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PROPINSI BANTEN	407	31/12/2021	20211264899902	133211	174.000.000,00	0,00	Hibah pekerjaan ruang layanan
189	013.01.648999	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PROPINSI BANTEN	407	31/12/2021	20211264899901	133211	150.000.000,00	0,00	Jurnal tanah hibah dari Pemda Gorontalo Utara
190	013.01.649018	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PROPINSI GORONTALO	407	23/12/2021	20211264901801	131211	2.824.000.000,00	0,00	Jurnal hibah pos jaga
191	013.01.653291	RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAN NEGARA INDRAMAYU	407	03/11/2021	ND-1075/PB.6/2021	136111	0,00	592.826.000,00	Jurnal Kemenkeu Menghilangkan Satker Inactive
192	013.01.653291	RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAN NEGARA INDRAMAYU	407	03/11/2021	ND-1075/PB.6/2021	391111	0,00	0,00	Jurnal Kemenkeu Menghilangkan Satker Inactive
193	013.01.653291	RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAN NEGARA INDRAMAYU	407	03/11/2021	ND-1075/PB.6/2021	391111	0,00	0,00	Jurnal Kemenkeu Menghilangkan Satker Inactive
194	013.01.653291	RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAN NEGARA INDRAMAYU	407	03/11/2021	ND-1075/PB.6/2021	391111	31.636.362,00	0,00	Jurnal Kemenkeu Menghilangkan Satker Inactive
195	013.01.653291	RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAN NEGARA INDRAMAYU	407	03/11/2021	ND-1075/PB.6/2021	391111	123.536.236,00	0,00	Jurnal Kemenkeu Menghilangkan Satker Inactive
196	013.01.653291	RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAN NEGARA INDRAMAYU	407	03/11/2021	ND-1075/PB.6/2021	391111	400.000,00	0,00	Jurnal Kemenkeu Menghilangkan Satker Inactive
197	013.01.653291	RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAN NEGARA INDRAMAYU	407	03/11/2021	ND-1075/PB.6/2021	391111	0,00	71.636.362,00	Jurnal Kemenkeu Menghilangkan Satker Inactive
198	013.01.653291	RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAN NEGARA INDRAMAYU	407	03/11/2021	ND-1075/PB.6/2021	391111	39.500.000,00	0,00	Jurnal Kemenkeu Menghilangkan Satker Inactive
199	013.01.653291	RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAN NEGARA INDRAMAYU	407	03/11/2021	ND-1075/PB.6/2021	133211	0,00	592.826.000,00	Jurnal Kemenkeu Menghilangkan Satker Inactive
200	013.01.653291	RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAN NEGARA INDRAMAYU	407	03/11/2021	ND-1075/PB.6/2021	133211	592.826.000,00	0,00	Jurnal Kemenkeu Menghilangkan Satker Inactive
201	013.01.653291	RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAN NEGARA INDRAMAYU	407	03/11/2021	ND-1075/PB.6/2021	391111	0,00	592.826.000,00	Jurnal Kemenkeu Menghilangkan Satker Inactive
202	013.01.653291	RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAN NEGARA INDRAMAYU	407	03/11/2021	ND-1075/PB.6/2021	391111	592.826.000,00	0,00	Jurnal Kemenkeu Menghilangkan Satker Inactive
203	013.01.653291	RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAN NEGARA INDRAMAYU	407	03/11/2021	ND-1075/PB.6/2021	132111	39.500.000,00	0,00	Jurnal Kemenkeu Menghilangkan Satker Inactive

JURNAL TIDAK LAZIM
S.D 31 Desember 2021 (Unduh Data per Tanggal 12 Mei 2022)

No	Kode Satker	Nama Satker	Jenis Dokumen	Tanggal Dokumen	Nomor Dokumen	Akun	Debet	Kredit	Keterangan
204	013.01.653291	RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAN NEGARA INDRAMAYU	407	03/11/2021	ND-1075/PB.6/2021	391111	0,00	31.636.362,00	Jurnal Kemenkeu Menghilangkan Satker Inactive
205	013.01.653291	RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAN NEGARA INDRAMAYU	407	03/11/2021	ND-1075/PB.6/2021	136111	592.826.000,00	0,00	Jurnal Kemenkeu Menghilangkan Satker Inactive
206	013.01.653291	RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAN NEGARA INDRAMAYU	407	03/11/2021	ND-1075/PB.6/2021	391111	0,00	400.000,00	Jurnal Kemenkeu Menghilangkan Satker Inactive
207	013.01.653291	RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAN NEGARA INDRAMAYU	407	03/11/2021	ND-1075/PB.6/2021	391111	71.636.362,00	0,00	Jurnal Kemenkeu Menghilangkan Satker Inactive
208	013.01.653291	RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAN NEGARA INDRAMAYU	407	03/11/2021	ND-1075/PB.6/2021	132111	123.536.236,00	0,00	Jurnal Kemenkeu Menghilangkan Satker Inactive
209	013.01.653291	RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAN NEGARA INDRAMAYU	407	03/11/2021	ND-1075/PB.6/2021	132111	0,00	39.500.000,00	Jurnal Kemenkeu Menghilangkan Satker Inactive
210	013.01.653291	RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAN NEGARA INDRAMAYU	407	03/11/2021	ND-1075/PB.6/2021	132111	0,00	123.536.236,00	Jurnal Kemenkeu Menghilangkan Satker Inactive
211	013.01.653291	RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAN NEGARA INDRAMAYU	407	03/11/2021	ND-1075/PB.6/2021	117111	400.000,00	0,00	Jurnal Kemenkeu Menghilangkan Satker Inactive
212	013.01.653291	RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAN NEGARA INDRAMAYU	407	03/11/2021	ND-1075/PB.6/2021	391111	592.826.000,00	0,00	Jurnal Kemenkeu Menghilangkan Satker Inactive
213	013.01.653291	RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAN NEGARA INDRAMAYU	407	03/11/2021	ND-1075/PB.6/2021	117111	0,00	400.000,00	Jurnal Kemenkeu Menghilangkan Satker Inactive
214	013.01.653291	RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAN NEGARA INDRAMAYU	407	03/11/2021	ND-1075/PB.6/2021	133111	0,00	0,00	Jurnal Kemenkeu Menghilangkan Satker Inactive
215	013.01.653291	RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAN NEGARA INDRAMAYU	407	03/11/2021	ND-1075/PB.6/2021	391111	0,00	39.500.000,00	Jurnal Kemenkeu Menghilangkan Satker Inactive
216	013.01.653291	RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAN NEGARA INDRAMAYU	407	03/11/2021	ND-1075/PB.6/2021	133111	0,00	0,00	Jurnal Kemenkeu Menghilangkan Satker Inactive
217	013.01.653291	RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAN NEGARA INDRAMAYU	407	03/11/2021	ND-1075/PB.6/2021	391111	0,00	592.826.000,00	Jurnal Kemenkeu Menghilangkan Satker Inactive
218	013.01.653291	RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAN NEGARA INDRAMAYU	407	03/11/2021	ND-1075/PB.6/2021	391111	0,00	123.536.236,00	Jurnal Kemenkeu Menghilangkan Satker Inactive
219	013.01.653291	RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAN NEGARA INDRAMAYU	407	03/11/2021	ND-1075/PB.6/2021	132211	0,00	71.636.362,00	Jurnal Kemenkeu Menghilangkan Satker Inactive
220	013.01.653291	RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAN NEGARA INDRAMAYU	407	03/11/2021	ND-1075/PB.6/2021	132211	71.636.362,00	0,00	Jurnal Kemenkeu Menghilangkan Satker Inactive
221	013.01.653291	RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAN NEGARA INDRAMAYU	407	03/11/2021	ND-1075/PB.6/2021	132211	0,00	31.636.362,00	Jurnal Kemenkeu Menghilangkan Satker Inactive
222	013.01.653291	RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAN NEGARA INDRAMAYU	407	03/11/2021	ND-1075/PB.6/2021	132211	31.636.362,00	0,00	Jurnal Kemenkeu Menghilangkan Satker Inactive
223	013.01.667786	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM KEPULAUAN RIAU	407	01/04/2021	202104667786010	133211	40.000.000,00	0,00	Jurnal hibah pos jaga
224	013.01.667790	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SULAWESI BARAT	408	06/09/2021	202109667790004	117911	0,00	321.500,00	Pembelian barang berupa pulse oxymeter menggunakan akun persediaan 521841 yang seharusnya dicatat menjadi aset sebesar Rp321.499
225	013.01.667790	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SULAWESI BARAT	408	12/08/2021	202108667790003	132211	0,00	19.959.500,00	Pembelian 20 meja kerja besi/metal (997.975/satuan) atau kurang dari nilai kapitalisasi, sehingga terbentuk menjadi barang ekstrakomtabel sebesar Rp19.959.500
226	013.01.667790	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SULAWESI BARAT	408	24/12/2021	202112667790005	133211	12.309.000,00	0,00	Pengembalian belanja 53 Gedung dan Bangunan di tahun berjalan (KDP 2021) oleh temuan Itjen dengan nomor : ITJ.PW.05.01.IV-35 sebesar Rp12.309.000
DITJEN ADMINISTRASI HUKUM UMUM									
227	013.03.099297	BALAI HARTA PENINGGALAN JAKARTA	407	31/12/2021	202112099297005	117911	0,00	4.680.200,00	Jurnal persediaan yang belum diregister karena dibawah nilai kapasitas yang terdiri dari : Switch hub Tp link 2 unit total Rp.704.000 akun 523123 no spm 00288 sp2d 211391303039060 - Air cleaner 4 unit total Rp.3.976.200 akun 521841 no spm 00313

JURNAL TIDAK LAZIM
S.D 31 Desember 2021 (Unduh Data per Tanggal 12 Mei 2022)

No	Kode Satker	Nama Satker	Jenis Dokumen	Tanggal Dokumen	Nomor Dokumen	Akun	Debet	Kredit	Keterangan
228	013.03.099297	BALAI HARTA PENINGGALAN JAKARTA	407	31/12/2021	202112099297004	117911	0,00	850.000,00	Pengadaan belanja barang berupa bak mandi batu alam sebesar Rp. 850.000,- yang dihapus dari pencatatan pembelian persediaan karena tidak memenuhi kriteria persediaan dengan no spm 00285 Sp2d 211391302050073
229	013.03.099300	BALAI HARTA PENINGGALAN MEDAN	407	16/03/2021	202103099300004	132211	0,00	34.000.000,00	Beban ekstrakomptabel PM
230	013.03.408432	BALAI HARTA PENINGGALAN UJUNG PANDANG	408	31/12/2021	202112408432001	132211	30.000,00	0,00	Jurnal Umum atas Pengembalian Pembayaran Pembelian Sepeda Motor
231	013.03.409257	DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM	408	28/09/2021	202109409257002	132211	24.750.000,00	0,00	Jurnal atas BAST penyelesaian Pengadaan Laptop dan Tablet PC yang pada akhir tahun 2020 terjadi keterlambatan dengan SP2D 201391303056663 , dan telah d terima pada 22 Januari 2021
232	013.03.409257	DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM	407	31/12/2021	202112409257011	132211	0,00	9.724.000,00	211391302051536 yg tidak dapat dilakukan ralat akun karena terdapat pada 1 invoice
233	013.03.409257	DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM	407	31/12/2021	202112409257010	132211	0,00	4.406.280,00	Jurnal ats reklasifikasi pembelian Peralatan & Mesin ke Beban Ekstrakomptabel PM berupa Meja Kerja Kayu Senilai Rp2.535.978 dan Kursi Besi Metal Senilai Rp1.870.302 SP2D 211391701007391 SPM 2665
234	013.03.409257	DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM	407	31/12/2021	202112409257014	117911	0,00	1.900.000,00	Jurnal ats reklasifikasi pembelian Persediaan ke Beban Ekstrakomptabel PM berupa Kursi Roda Senilai Rp1.900.000 SP2D 211391303024700 SPM 1274
235	013.03.409257	DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM	408	28/09/2021	202109409257002	133211	0,00	24.750.000,00	Jurnal atas BAST penyelesaian Pengadaan Laptop dan Tablet PC yang pada akhir tahun 2020 terjadi keterlambatan dengan SP2D 201391303056663 , dan telah d terima pada 22 Januari 2021
236	013.03.409257	DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM	408	31/12/2021	202112409257002	132211	473.374.620,00	0,00	Jurnal atas reklasifikasi jasa lainnya berupa jasa pengiriman APD ke Peralatan dan Mesin berupa Alat Pengolah Data Senilai Rp473.374.620
237	013.03.409257	DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM	408	29/11/2021	202111409257001	132211	0,00	9.457.885,00	Jurnal ats reklasifikasi pembelian peralatan & mesin ke aset lainnya berupa lukisan cat minyak senilai Rp9.457.885 pada SPM 2159 SP2D
238	013.03.409257	DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM	407	31/12/2021	202112409257012	132211	0,00	2.176.731,00	Jurnal ats reklasifikasi pembelian Peralatan & Mesin ke Beban Ekstrakomptabel PM berupa Rak Kayu senilai Ro615.577 & Kursi Besi-Metal senilai Rp1.561.154 pd SPM 2159 SP2D 211391302051536
DITJEN PEMASYARAKATAN									
239	013.05.109105	LEMBAGA PEMASYARAKATAN BEKASI	408	31/12/2021	2021121091051	117911	0,00	303.249,00	Belanja Persediaan Yang Membentuk Aset Tetap Peralatan dan Mesin
240	013.05.109105	LEMBAGA PEMASYARAKATAN BEKASI	408	31/12/2021	2021121091052	117911	0,00	7.731.751,00	Belanja Persediaan Yang Membentuk Aset Tetap Peralatan dan Mesin
241	013.05.109105	LEMBAGA PEMASYARAKATAN BEKASI	407	13/12/2021	202112109105003	133211	78.099.943.000,00	0,00	Jurnal atas penerimaan hibah barang berupa aset gedung dan bangunan
242	013.05.109107	LEMBAGA PEMASYARAKATAN BATU	407	31/12/2021	20211210910700	132211	720.000.000,00	0,00	Jurnal atas penerimaan hibah barang berupa peralatan dan mesin
243	013.05.109116	RUMAH TAHANAN NEGARA MEDAN	407	18/05/2021	202105109116003	133211	87.350.000,00	0,00	Jurnal atas penerimaan hibah barang berupa aset gedung dan bangunan
244	013.05.109118	RUMAH TAHANAN NEGARA PALEMBANG	407	27/10/2021	202110109118013	133211	688.438.136,00	0,00	Jurnal atas penerimaan hibah barang berupa aset gedung dan bangunan
245	013.05.109140	RUMAH TAHANAN NEGARA TANAH GROGOT	407	02/02/2021	202102109140004	132211	205.630.000,00	0,00	Jurnal atas penerimaan hibah barang berupa peralatan dan mesin
246	013.05.109152	LEMBAGA PEMASYARAKATAN TOBELLO	408	31/12/2021	202112109152001	117911	0,00	880.000,00	Belanja Persediaan Yang Membentuk Aset Tetap Peralatan dan Mesin
247	013.05.109153	LEMBAGA PEMASYARAKATAN SANANA	408	31/12/2021	202112109153001	117911	0,00	980.000,00	Belanja Persediaan Yang Membentuk Aset Tetap Peralatan dan Mesin
248	013.05.352605	LPKA Pangkal Pinang, Provinsi Kep. Bangka Belitung	408	31/12/2021	20211235260505	117911	0,00	1.750.000,00	Belanja Persediaan Yang Membentuk Aset Tetap Peralatan dan Mesin

JURNAL TIDAK LAZIM
S.D 31 Desember 2021 (Unduh Data per Tanggal 12 Mei 2022)

No	Kode Satker	Nama Satker	Jenis Dokumen	Tanggal Dokumen	Nomor Dokumen	Akun	Debet	Kredit	Keterangan
249	013.05.352605	LPKA Pangkal Pinang, Provinsi Kep. Bangka Belitung	408	31/12/2021	20211235260505	132211	1.750.000,00	0,00	Belanja Persediaan Yang Membentuk Aset Tetap Peralatan dan Mesin
250	013.05.352605	LPKA Pangkal Pinang, Provinsi Kep. Bangka Belitung	408	31/12/2021	20211235260506	117911	0,00	570.500,00	Belanja Persediaan Yang Membentuk Aset Tetap Peralatan dan Mesin
251	013.05.352605	LPKA Pangkal Pinang, Provinsi Kep. Bangka Belitung	408	07/10/2021	20211035260507	132211	6.750.000,00	0,00	realisasi belanja barang 521219 yang membentuk aset Intra diatas nilai kapitalisasi
252	013.05.352605	LPKA Pangkal Pinang, Provinsi Kep. Bangka Belitung	408	09/07/2021	20210735260504	117911	0,00	600.000,00	Belanja Persediaan Yang Membentuk Aset Tetap Peralatan dan Mesin
253	013.05.352607	LPKA Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah	407	31/12/2021	202112352607001	117911	0,00	4.093.500,00	Belanja Persediaan Yang Membentuk Aset Tetap Peralatan dan Mesin
254	013.05.352609	LPKA Palu, Provinsi Sulawesi Tengah	408	31/12/2021	202112352609001	117911	0,00	28.951.000,00	Belanja Persediaan Yang Membentuk Aset Tetap Peralatan dan Mesin
255	013.05.352612	LPKA Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara	408	31/12/2021	202112352612004	117911	0,00	2.200.159,00	Belanja Persediaan Yang Membentuk Aset Tetap Peralatan dan Mesin
256	013.05.352614	LPKA Ternate, Provinsi Maluku Utara	408	31/12/2021	202112352614X03	117111	89.857.441,00	0,00	Dampak update aplikasi persediaan
257	013.05.352614	LPKA Ternate, Provinsi Maluku Utara	408	31/12/2021	202112352614X01	117111	0,00	89.857.441,00	Dampak update aplikasi persediaan
258	013.05.352614	LPKA Ternate, Provinsi Maluku Utara	408	31/12/2021	202112352614X02	117112	0,00	49.700.000,00	Dampak update aplikasi persediaan
259	013.05.352614	LPKA Ternate, Provinsi Maluku Utara	408	31/12/2021	202112352614X04	117112	49.700.000,00	0,00	Dampak update aplikasi persediaan
260	013.05.404271	LEMBAGA PEMASYARAKATAN CIPINANG	407	31/12/2021	202112404271003	117911	0,00	60.685.680,00	Belanja Persediaan Yang Membentuk Aset Tetap Peralatan dan Mesin
261	013.05.404296	RUTAN KELAS I PONDOK BAMBU	407	31/12/2021	202112404296008	117911	0,00	22.913.000,00	Belanja Persediaan Yang Membentuk Aset Tetap Peralatan dan Mesin
262	013.05.404296	RUTAN KELAS I PONDOK BAMBU	407	31/12/2021	202112404296009	117911	0,00	605.000,00	Belanja Persediaan Yang Membentuk Aset Tetap Peralatan dan Mesin
263	013.05.404316	BALAI PEMASYARAKATAN BANDUNG	408	29/12/2021	20211240431601	117911	0,00	850.000,00	Belanja Persediaan Yang Membentuk Aset Tetap Peralatan dan Mesin
264	013.05.404347	LAPAS GARUT	408	30/09/2021	202109404347004	117911	0,00	2.000.000,00	Belanja Persediaan Yang Membentuk Aset Tetap Peralatan dan Mesin
265	013.05.404347	LAPAS GARUT	408	10/03/2021	202103404347005	117911	0,00	600.000,00	Belanja Persediaan Yang Membentuk Aset Tetap Peralatan dan Mesin
266	013.05.404362	LAPAS TASIKMALAYA	408	31/12/2021	202112404362001	117911	0,00	4.985.000,00	Belanja Persediaan Yang Membentuk Aset Tetap Peralatan dan Mesin
267	013.05.404378	LEMBAGA PEMASYARAKATAN SUKAMISKIN	408	31/12/2021	202112404378001	117911	0,00	1.000.000,00	Belanja Persediaan Yang Membentuk Aset Tetap Peralatan dan Mesin
268	013.05.404393	BALAI PEMASYARAKATAN CIREBON	408	31/12/2021	202112404393001	117911	0,00	440.700,00	Belanja Persediaan Yang Membentuk Aset Tetap Peralatan dan Mesin
269	013.05.404429	RUMAH TAHANAN NEGARA CIREBON	408	31/12/2021	202112404429001	117911	0,00	1.960.000,00	Belanja Persediaan Yang Membentuk Aset Tetap Peralatan dan Mesin
270	013.05.404429	RUMAH TAHANAN NEGARA CIREBON	407	29/04/2021	202104404429003	132211	9.400.000,00	0,00	Jurnal atas penerimaan hibah barang berupa peralatan dan mesin
271	013.05.404429	RUMAH TAHANAN NEGARA CIREBON	407	19/04/2021	202104404429002	132211	8.000.000,00	0,00	Jurnal atas penerimaan hibah barang berupa peralatan dan mesin
272	013.05.404435	LEMBAGA PEMASYARAKATAN KUNINGAN	408	31/12/2021	202112404435001	117911	0,00	8.632.095,00	Belanja Persediaan Yang Membentuk Aset Tetap Peralatan dan Mesin
273	013.05.404441	LAPAS MAJALENGKA	408	31/12/2021	202112404441005	117911	0,00	1.172.500,00	Belanja Persediaan Yang Membentuk Aset Tetap Peralatan dan Mesin
274	013.05.404441	LAPAS MAJALENGKA	408	31/12/2021	202112404441006	117911	0,00	850.000,00	Belanja Persediaan Yang Membentuk Aset Tetap Peralatan dan Mesin
275	013.05.404460	LAPAS INDRAMAYU	408	31/12/2021	202112404460004	132211	7.393.782,00	0,00	Jurnal atas penerimaan hibah barang berupa peralatan dan mesin
276	013.05.404460	LAPAS INDRAMAYU	408	31/12/2021	202112404460003	117911	0,00	2.427.480,00	Belanja Persediaan Yang Membentuk Aset Tetap Peralatan dan Mesin
277	013.05.404460	LAPAS INDRAMAYU	408	31/12/2021	202112404460004	117911	0,00	7.393.782,00	Jurnal atas penerimaan hibah barang berupa peralatan dan mesin
278	013.05.404472	LEMBAGA PEMASYARAKATAN BOGOR	408	31/12/2021	20211240447204	117911	0,00	1.129.010,00	Belanja Persediaan Yang Membentuk Aset Tetap Peralatan dan Mesin

JURNAL TIDAK LAZIM
S.D 31 Desember 2021 (Unduh Data per Tanggal 12 Mei 2022)

No	Kode Satker	Nama Satker	Jenis Dokumen	Tanggal Dokumen	Nomor Dokumen	Akun	Debet	Kredit	Keterangan
279	013.05.404472	LEMBAGA PEMASYARAKATAN BOGOR	408	31/12/2021	20211240447203	117911	0,00	4.198.280,00	Belanja Persediaan Yang Membentuk Aset Tetap Peralatan dan Mesin
280	013.05.404472	LEMBAGA PEMASYARAKATAN BOGOR	408	31/12/2021	20211240447205	117911	0,00	4.698.000,00	Belanja Persediaan Yang Membentuk Aset Tetap Peralatan dan Mesin
281	013.05.404481	LAPAS SUKABUMI	408	31/12/2021	20211240448103	117911	0,00	7.590.000,00	Belanja Persediaan Yang Membentuk Aset Tetap Peralatan dan Mesin
282	013.05.404481	LAPAS SUKABUMI	407	31/12/2021	20211240448102	132211	69.730.000,00	0,00	Jurnal atas penerimaan hibah barang berupa peralatan dan mesin
283	013.05.404501	LAPAS PURWAKARTA	408	30/11/2021	202111404501005	117911	0,00	957.000,00	Belanja Persediaan Yang Membentuk Aset Tetap Peralatan dan Mesin
284	013.05.404548	LAPAS KELAS III RANGKAS BITUNG	407	30/11/2021	20211140454805	117911	15.241.000,00	0,00	Jurnal atas penerimaan hibah barang berupa persediaan
285	013.05.404563	LEMBAGA PEMASYARAKATAN ANAK PRIA TANGERANG	408	31/12/2021	202112404563001	117911	0,00	1.750.000,00	Belanja Persediaan Yang Membentuk Aset Tetap Peralatan dan Mesin
286	013.05.404563	LEMBAGA PEMASYARAKATAN ANAK PRIA TANGERANG	408	31/12/2021	202112404563001	132211	1.750.000,00	0,00	Belanja Persediaan Yang Membentuk Aset Tetap Peralatan dan Mesin
287	013.05.404579	LAPAS KELAS IIA TANGERANG	407	31/12/2021	202112404579002	133211	750.000.000,00	0,00	Jurnal atas penerimaan hibah barang berupa aset gedung dan bangunan
288	013.05.404579	LAPAS KELAS IIA TANGERANG	407	31/12/2021	202112404579001	133211	50.000.000,00	0,00	Jurnal atas penerimaan hibah barang berupa aset gedung dan bangunan
289	013.05.404585	BALAI PEMASYARAKATAN YOGYAKARTA	408	31/12/2021	202112404585001	133211	0,00	866.519.000,00	realisasi belanja modal gedung dan bangunan yang membentuk aset tetap renovasi
290	013.05.404611	RUMAH TAHANAN NEGARA WATES	407	27/12/2021	20211240461102	132211	3.000.000,00	0,00	Jurnal atas penerimaan hibah barang berupa peralatan dan mesin
291	013.05.404673	RUMAH TAHANAN NEGARA SALATIGA	407	25/10/2021	202110404673004	133211	32.012.000,00	0,00	Jurnal atas penerimaan hibah barang berupa aset gedung dan bangunan
292	013.05.404702	LEMBAGA PEMASYARAKATAN AMBARAWA	408	31/12/2021	202112404702002	117911	0,00	1.500.000,00	Belanja Persediaan Yang Membentuk Aset Tetap Peralatan dan Mesin
293	013.05.404718	LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA SEMARANG	407	30/06/2021	202106404718005	132211	240.000.000,00	0,00	Jurnal atas penerimaan hibah barang berupa peralatan dan mesin
294	013.05.404852	LEMBAGA PEMASYARAKATAN PATI	407	24/12/2021	202112404852011	133211	199.751.963,00	0,00	Jurnal atas penerimaan hibah barang berupa aset gedung dan bangunan
295	013.05.404852	LEMBAGA PEMASYARAKATAN PATI	407	31/12/2021	202112404852020	132211	0,00	2.200.000,00	Jurnal atas realisasi belanja modal peralatan dan mesin dibawah nilai kapitalisasi aset
296	013.05.404852	LEMBAGA PEMASYARAKATAN PATI	407	27/12/2021	202112404852012	132211	42.500.000,00	0,00	Jurnal atas penerimaan hibah barang berupa peralatan dan mesin
297	013.05.404874	RUMAH TAHANAN NEGARA JEPARA	408	31/12/2021	202112404874006	117911	0,00	2.225.000,00	Belanja Persediaan Yang Membentuk Aset Tetap Peralatan dan Mesin
298	013.05.404899	RUMAH TAHANAN NEGARA BLORA	407	31/12/2021	202112404899126	133211	190.368.000,00	0,00	Jurnal atas penerimaan hibah barang berupa aset gedung dan bangunan
299	013.05.404919	RUMAH TAHANAN NEGARA SURAKARTA	408	31/12/2021	202112404919001	117911	0,00	17.325.000,00	Belanja Persediaan Yang Membentuk Aset Tetap Peralatan dan Mesin
300	013.05.404925	LEMBAGA PEMASYARAKATAN SRAGEN	408	31/12/2021	202112404925007	117911	0,00	6.850.000,00	Belanja Persediaan Yang Membentuk Aset Tetap Peralatan dan Mesin
301	013.05.404931	RUMAH TAHANAN NEGARA BOYOLALI	407	16/12/2021	202112404931009	132211	24.700.000,00	0,00	Jurnal atas penerimaan hibah barang berupa peralatan dan mesin
302	013.05.404931	RUMAH TAHANAN NEGARA BOYOLALI	408	31/12/2021	202112404931002	117911	0,00	1.895.000,00	Belanja Persediaan Yang Membentuk Aset Tetap Peralatan dan Mesin
303	013.05.404950	LAPAS KLATEN	408	31/12/2021	202112404950002	117911	0,00	2.850.000,00	Belanja Persediaan Yang Membentuk Aset Tetap Peralatan dan Mesin
304	013.05.404971	LEMBAGA PEMASYARAKATAN PURWOKERTO	408	31/12/2021	202112404971001	133211	0,00	15.000.000,00	realisasi belanja modal gedung dan bangunan dibawah nilai kapitalisasi aset GB
305	013.05.404971	LEMBAGA PEMASYARAKATAN PURWOKERTO	407	31/12/2021	202112404971008	133211	111.000.000,00	0,00	Jurnal atas penerimaan hibah barang berupa Gedung bangunan
306	013.05.404987	RUMAH TAHANAN NEGARA BANYUMAS	408	31/12/2021	202112404987001	132211	1.000.000,00	0,00	Belanja Persediaan Yang Membentuk Aset Tetap Peralatan dan Mesin
307	013.05.404987	RUMAH TAHANAN NEGARA BANYUMAS	408	31/12/2021	202112404987001	117911	0,00	1.000.000,00	Belanja Persediaan Yang Membentuk Aset Tetap Peralatan dan Mesin

JURNAL TIDAK LAZIM
S.D 31 Desember 2021 (Unduh Data per Tanggal 12 Mei 2022)

No	Kode Satker	Nama Satker	Jenis Dokumen	Tanggal Dokumen	Nomor Dokumen	Akun	Debet	Kredit	Keterangan
308	013.05.404993	RUMAH TAHANAN NEGARA PURBALINGGA	408	31/12/2021	202112404993001	117911	0,00	966.000,00	Belanja Persediaan Yang Membentuk Aset Tetap Peralatan dan Mesin
309	013.05.404993	RUMAH TAHANAN NEGARA PURBALINGGA	407	31/12/2021	2,02112E+14	132211	8.500.000,00	0,00	Jurnal atas penerimaan hibah barang berupa peralatan dan mesin
310	013.05.405007	RUMAH TAHANAN NEGARA BANJARNEGARA	407	29/12/2021	202112405007006	133211	192.270.000,00	0,00	Jurnal atas penerimaan hibah barang berupa aset gedung dan bangunan
311	013.05.405038	LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEMUDA PLANTUNGAN	408	16/10/2021	202110405038002	117911	0,00	1.060.000,00	Belanja Persediaan Yang Membentuk Aset Tetap Peralatan dan Mesin
312	013.05.405038	LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEMUDA PLANTUNGAN	408	11/02/2021	202102405038001	117911	0,00	1.030.000,00	Belanja Persediaan Yang Membentuk Aset Tetap Peralatan dan Mesin
313	013.05.405038	LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEMUDA PLANTUNGAN	408	17/12/2021	202112405038004	132211	2.693.600,00	0,00	Jurnal atas penerimaan hibah barang berupa peralatan dan mesin
314	013.05.405038	LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEMUDA PLANTUNGAN	408	17/12/2021	202112405038004	117911	0,00	2.693.600,00	Jurnal atas penerimaan hibah barang berupa peralatan dan mesin
315	013.05.405038	LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEMUDA PLANTUNGAN	408	17/12/2021	202112405038005	117911	0,00	700.000,00	Belanja Persediaan Yang Membentuk Aset Tetap Peralatan dan Mesin
316	013.05.405038	LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEMUDA PLANTUNGAN	408	17/12/2021	202112405038006	117911	0,00	900.000,00	Belanja Persediaan Yang Membentuk Aset Tetap Peralatan dan Mesin
317	013.05.405038	LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEMUDA PLANTUNGAN	408	17/12/2021	202112405038003	117911	0,00	1.700.000,00	Belanja Persediaan Yang Membentuk Aset Tetap Peralatan dan Mesin
318	013.05.405053	LEMBAGA PEMASYARAKATAN KALISOSOK	408	31/12/2021	202112405053002	132211	3.558.000,00	0,00	Jurnal atas penerimaan hibah barang berupa peralatan dan mesin
319	013.05.405053	LEMBAGA PEMASYARAKATAN KALISOSOK	408	31/12/2021	202112405053002	117911	0,00	3.558.000,00	Jurnal atas penerimaan hibah barang berupa peralatan dan mesin
320	013.05.405053	LEMBAGA PEMASYARAKATAN KALISOSOK	408	31/12/2021	202112405053001	117911	0,00	761.600,00	Belanja Persediaan Yang Membentuk Aset Tetap Peralatan dan Mesin
321	013.05.405075	LEMBAGA PEMASYARAKATAN SIDOARJO	408	31/12/2021	202112405075001	132211	2.119.007,00	0,00	Belanja Persediaan Yang Membentuk Aset Tetap Peralatan dan Mesin
322	013.05.405075	LEMBAGA PEMASYARAKATAN SIDOARJO	408	31/12/2021	202112405075003	132211	2.400.000,00	0,00	Jurnal atas penerimaan hibah barang berupa peralatan dan mesin
323	013.05.405075	LEMBAGA PEMASYARAKATAN SIDOARJO	408	31/12/2021	202112405075002	132211	18.754.000,00	0,00	Belanja Persediaan Yang Membentuk Aset Tetap Peralatan dan Mesin
324	013.05.405075	LEMBAGA PEMASYARAKATAN SIDOARJO	408	31/12/2021	202112405075004	117911	0,00	1.723.840,00	Belanja Persediaan Yang Membentuk Aset Tetap Peralatan dan Mesin
325	013.05.405075	LEMBAGA PEMASYARAKATAN SIDOARJO	408	31/12/2021	202112405075003	117911	0,00	2.400.000,00	Jurnal atas penerimaan hibah barang berupa peralatan dan mesin
326	013.05.405075	LEMBAGA PEMASYARAKATAN SIDOARJO	408	31/12/2021	202112405075002	117911	0,00	18.754.000,00	Belanja Persediaan Yang Membentuk Aset Tetap Peralatan dan Mesin
327	013.05.405075	LEMBAGA PEMASYARAKATAN SIDOARJO	408	31/12/2021	202112405075001	117911	0,00	2.119.007,00	Belanja Persediaan Yang Membentuk Aset Tetap Peralatan dan Mesin
328	013.05.405132	LAPAS LAMONGAN	408	31/12/2021	202112405132001	117911	0,00	17.530.920,00	Jurnal atas penerimaan hibah barang berupa peralatan dan mesin
329	013.05.405132	LAPAS LAMONGAN	408	31/12/2021	202112405132001	132211	17.530.920,00	0,00	Jurnal atas penerimaan hibah barang berupa peralatan dan mesin
330	013.05.405132	LAPAS LAMONGAN	408	31/12/2021	202112405132002	117911	0,00	1.045.000,00	Belanja Persediaan Yang Membentuk Aset Tetap Peralatan dan Mesin
331	013.05.405163	LAPAS TULUNGAGUNG	407	17/09/2021	202109405163002	133211	89.455.000,00	0,00	Jurnal atas penerimaan hibah barang berupa aset gedung dan bangunan
332	013.05.405214	LEMBAGA PEMASYARAKATAN JEMBER	408	31/12/2021	202112405214001	117911	0,00	354.600,00	Belanja Persediaan Yang Membentuk Aset Tetap Peralatan dan Mesin
333	013.05.405223	LAPAS BONDOWOSO	408	31/12/2021	202112405223002	117911	0,00	781.000,00	Belanja Persediaan Yang Membentuk Aset Tetap Peralatan dan Mesin
334	013.05.405245	RUMAH TAHANAN NEGARA SITUBONDO	407	31/12/2021	202112405245010	117911	0,00	375.000,00	Belanja Persediaan Yang Membentuk Aset Tetap Peralatan dan Mesin
335	013.05.405245	RUMAH TAHANAN NEGARA SITUBONDO	407	31/12/2021	202112405245009	117911	0,00	586.800,00	Belanja Persediaan Yang Membentuk Aset Tetap Peralatan dan Mesin

JURNAL TIDAK LAZIM
S.D 31 Desember 2021 (Unduh Data per Tanggal 12 Mei 2022)

No	Kode Satker	Nama Satker	Jenis Dokumen	Tanggal Dokumen	Nomor Dokumen	Akun	Debet	Kredit	Keterangan
336	013.05.405270	LEMBAGA PEMASYARAKATAN PAMEKASAN	408	31/12/2021	202112405270001	117911	0,00	3.975.000,00	Belanja Persediaan Yang Membentuk Aset Tetap Peralatan dan Mesin
337	013.05.405291	RUMAH TAHANAN NEGARA BANGKALAN	407	31/12/2021	20211240529103	133211	291.877.500,00	0,00	Jurnal atas penerimaan hibah barang berupa aset gedung dan bangunan
338	013.05.405291	RUMAH TAHANAN NEGARA BANGKALAN	407	31/12/2021	20211240529102	132211	49.486.500,00	0,00	Jurnal atas penerimaan hibah barang berupa peralatan dan mesin
339	013.05.405358	LAPAS PROBOLINGGO	408	31/12/2021	202112405358001	117911	0,00	3.668.500,00	Jurnal atas penerimaan hibah barang berupa peralatan dan mesin
340	013.05.405358	LAPAS PROBOLINGGO	408	31/12/2021	202112405358002	117911	0,00	6.122.600,00	Belanja Persediaan Yang Membentuk Aset Tetap Peralatan dan Mesin
341	013.05.405358	LAPAS PROBOLINGGO	408	31/12/2021	202112405358001	132211	3.668.500,00	0,00	Jurnal atas penerimaan hibah barang berupa peralatan dan mesin
342	013.05.405364	RUMAH TAHANAN NEGARA KRAKSAAN	408	31/12/2021	202112405364001	117911	0,00	5.325.000,00	Belanja Persediaan Yang Membentuk Aset Tetap Peralatan dan Mesin
343	013.05.405409	LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN MALANG	407	31/12/2021	202112405409012	132211	47.338.000,00	0,00	Jurnal atas penerimaan hibah barang berupa peralatan dan mesin
344	013.05.405409	LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN MALANG	407	31/12/2021	202112405409011	132211	60.505.000,00	0,00	Jurnal atas penerimaan hibah barang berupa peralatan dan mesin
345	013.05.405409	LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN MALANG	408	31/12/2021	202112405409001	117911	0,00	3.553.000,00	Belanja Persediaan Yang Membentuk Aset Tetap Peralatan dan Mesin
346	013.05.405409	LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN MALANG	407	31/12/2021	202112405409013	133211	30.000.000,00	0,00	Jurnal atas penerimaan hibah barang berupa aset gedung dan bangunan
347	013.05.405421	LEMBAGA PEMASYARAKATAN MADIUN	407	15/03/2021	202103405421008	133211	377.968.480,00	0,00	Jurnal atas penerimaan hibah barang berupa aset gedung dan bangunan
348	013.05.405421	LEMBAGA PEMASYARAKATAN MADIUN	407	05/08/2021	202108405421009	133211	112.839.000,00	0,00	Jurnal atas penerimaan hibah barang berupa aset gedung dan bangunan
349	013.05.405446	RUMAH TAHANAN NEGARA MAGETAN	408	31/12/2021	202112405446001	132211	2.850.000,00	0,00	Jurnal atas penerimaan hibah barang berupa peralatan dan mesin
350	013.05.405446	RUMAH TAHANAN NEGARA MAGETAN	408	31/12/2021	202112405446001	117911	0,00	2.850.000,00	Jurnal atas penerimaan hibah barang berupa peralatan dan mesin
351	013.05.405461	RUMAH TAHANAN NEGARA PONOROGO	408	31/12/2021	202112405461001	117911	0,00	3.750.000,00	Belanja Persediaan Yang Membentuk Aset Tetap Peralatan dan Mesin
352	013.05.405477	RUMAH TAHANAN NEGARA PACITAN	408	31/12/2021	20211240547701	117911	0,00	900.000,00	Belanja Persediaan Yang Membentuk Aset Tetap Peralatan dan Mesin
353	013.05.405483	LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK BLITAR	408	31/12/2021	2021124054831	117911	0,00	300.000,00	Belanja Persediaan Yang Membentuk Aset Tetap Peralatan dan Mesin
354	013.05.405492	LEMBAGA PEMASYARAKATAN BANDA ACEH	408	31/12/2021	202112405492X01	117111	792.000,00	0,00	Jurnal normalisasi untuk menghilangkan saldo minus
355	013.05.405528	LEMBAGA PEMASYARAKATAN LHOK SEUMAWA	407	31/12/2021	202112405528003	117911	118.300.000,00	0,00	Jurnal atas penerimaan hibah barang berupa persediaan
356	013.05.405622	LAPAS KELAS IIB BLANGKEJEREN	407	31/12/2021	20211240562204	133211	86.755.000,00	0,00	Jurnal atas penerimaan hibah barang berupa aset gedung dan bangunan
357	013.05.405662	RUTAN KELAS IIB SINGKEL	407	15/10/2021	202110405662001	131211	83.200.000,00	0,00	Jurnal atas penerimaan hibah barang berupa tanah
358	013.05.405693	LEMBAGA PEMASYARAKATAN MEDAN	408	01/05/2021	20210540569302	117911	0,00	352.400,00	Belanja Persediaan Yang Membentuk Aset Tetap Peralatan dan Mesin
359	013.05.405741	LEMBAGA PEMASYARAKATAN LABUHAN RUKU	407	31/12/2021	202112405741001	133211	30.000.000,00	0,00	Jurnal atas penerimaan hibah barang berupa aset gedung dan bangunan
360	013.05.405797	RUTAN KELAS I LABUHAN DELI	407	14/06/2021	202106405797002	132211	17.000.000,00	0,00	Jurnal atas penerimaan hibah barang berupa peralatan dan mesin
361	013.05.405797	RUTAN KELAS I LABUHAN DELI	407	14/06/2021	202106405797001	132211	13.000.000,00	0,00	Jurnal atas penerimaan hibah barang berupa peralatan dan mesin
362	013.05.405823	LAPAS LUBUK PAKAM	408	31/12/2021	202112405823001	117911	0,00	12.365.000,00	Belanja Persediaan Yang Membentuk Aset Tetap Peralatan dan Mesin
363	013.05.405832	RUMAH TAHANAN NEGARA SIDIKALANG	407	31/12/2021	20211240583201	132211	7.500.000,00	0,00	Jurnal atas penerimaan hibah barang berupa peralatan dan mesin
364	013.05.405891	LAPAS KELAS III KOTANOPAN	408	31/12/2021	202112405891002	132211	1.600.000,00	0,00	Jurnal atas penerimaan hibah barang berupa peralatan dan mesin

JURNAL TIDAK LAZIM
S.D 31 Desember 2021 (Unduh Data per Tanggal 12 Mei 2022)

No	Kode Satker	Nama Satker	Jenis Dokumen	Tanggal Dokumen	Nomor Dokumen	Akun	Debet	Kredit	Keterangan
365	013.05.405891	LAPAS KELAS III KOTANOPAN	408	31/12/2021	202112405891002	117911	0,00	1.600.000,00	Jurnal atas penerimaan hibah barang berupa peralatan dan mesin
366	013.05.406092	RUMAH TAHANAN NEGARA LUBUK SIKAPING	408	31/12/2021	202112406092002	131211	30.000.000,00	0,00	Belanja Persediaan Yang Membentuk Aset Tetap Peralatan dan Mesin
367	013.05.406174	LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEKANBARU	407	31/12/2021	20211240617406	132211	115.250.000,00	0,00	Jurnal atas penerimaan hibah barang berupa peralatan dan mesin
368	013.05.406183	LEMBAGA PEMASYARAKATAN BENGKALIS	408	31/12/2021	202112406183001	117911	0,00	56.477.800,00	Jurnal atas penerimaan hibah barang berupa peralatan dan mesin
369	013.05.406183	LEMBAGA PEMASYARAKATAN BENGKALIS	408	31/12/2021	202112406183001	132211	56.477.800,00	0,00	Jurnal atas penerimaan hibah barang berupa peralatan dan mesin
370	013.05.406219	RUMAH TAHANAN NEGARA RENGAT	408	31/12/2021	202112406219001	117911	0,00	1.200.000,00	Belanja Persediaan Yang Membentuk Aset Tetap Peralatan dan Mesin
371	013.05.406256	LAPAS KELAS IIA BANGKINANG	407	31/12/2021	202112406256004	117911	0,00	27.100.000,00	Belanja Persediaan Yang Membentuk Aset Tetap Peralatan dan Mesin
372	013.05.406271	LEMBAGA PEMASYARAKATAN TANJUNG PINANG	408	30/06/2021	202106406271003	117911	0,00	3.195.000,00	Belanja Persediaan Yang Membentuk Aset Tetap Peralatan dan Mesin
373	013.05.406271	LEMBAGA PEMASYARAKATAN TANJUNG PINANG	408	31/10/2021	202110406271005	117911	0,00	981.400,00	Belanja Persediaan Yang Membentuk Aset Tetap Peralatan dan Mesin
374	013.05.406271	LEMBAGA PEMASYARAKATAN TANJUNG PINANG	408	30/11/2021	202111406271006	117911	0,00	1.770.000,00	Belanja Persediaan Yang Membentuk Aset Tetap Peralatan dan Mesin
375	013.05.406271	LEMBAGA PEMASYARAKATAN TANJUNG PINANG	408	31/12/2021	202112406271007	117911	0,00	2.209.999,00	Belanja Persediaan Yang Membentuk Aset Tetap Peralatan dan Mesin
376	013.05.406271	LEMBAGA PEMASYARAKATAN TANJUNG PINANG	408	31/07/2021	202107406271004	117911	0,00	684.000,00	Belanja Persediaan Yang Membentuk Aset Tetap Peralatan dan Mesin
377	013.05.406282	LEMBAGA PEMASYARAKATAN METRO	407	31/12/2021	20211240628206	132211	15.550.000,00	0,00	Jurnal atas penerimaan hibah barang berupa peralatan dan mesin
378	013.05.406293	LEMBAGA PEMASYARAKATAN JAMBI	408	31/12/2021	202112406293007	117911	0,00	1.950.000,00	Belanja Persediaan Yang Membentuk Aset Tetap Peralatan dan Mesin
379	013.05.406293	LEMBAGA PEMASYARAKATAN JAMBI	408	31/12/2021	202112406293006	133211	6.571.000,00	0,00	Jurnal atas penerimaan hibah barang berupa aset gedung dan bangunan
380	013.05.406322	LEMBAGA PEMASYARAKATAN MUARA TEBO	408	31/08/2021	202108406322001	117911	0,00	2.000.000,00	Belanja Persediaan Yang Membentuk Aset Tetap Peralatan dan Mesin
381	013.05.406344	LEMBAGA PEMASYARAKATAN KUALA TUNGKAL	408	31/12/2021	202112406344002	117911	0,00	5.390.000,00	Belanja Persediaan Yang Membentuk Aset Tetap Peralatan dan Mesin
382	013.05.406353	RUMAH TAHANAN NEGARA SUNGAI PENUH	408	11/04/2021	202104406353001	132211	1.000.000,00	0,00	Jurnal atas penerimaan hibah barang berupa peralatan dan mesin
383	013.05.406353	RUMAH TAHANAN NEGARA SUNGAI PENUH	408	11/04/2021	202104406353001	117911	0,00	1.000.000,00	Jurnal atas penerimaan hibah barang berupa peralatan dan mesin
384	013.05.406381	LEMBAGA PEMASYARAKATAN TANJUNG RAJA	407	31/12/2021	20211240638110	117911	0,00	9.206.000,00	Belanja Persediaan Yang Membentuk Aset Tetap Peralatan dan Mesin
385	013.05.406401	LAPAS SEKAYU	407	31/12/2021	202112406401003	117911	0,00	17.500.000,00	Belanja Persediaan Yang Membentuk Aset Tetap Peralatan dan Mesin
386	013.05.406426	LAPAS KELAS IIB MUARA DUA	407	31/12/2021	202112406426109	117911	0,00	40.000.000,00	Belanja Persediaan Yang Membentuk Aset Tetap Peralatan dan Mesin
387	013.05.406441	LAPAS KELAS IIB EMPAT LAWANG	407	31/12/2021	202112406441006	117911	0,00	1.450.000,00	Belanja Persediaan Yang Membentuk Aset Tetap Peralatan dan Mesin
388	013.05.406457	LEMBAGA PEMASYARAKATAN LUBUK LINGGAU	407	31/05/2021	202105406457007	117911	0,00	80.000.000,00	Belanja Persediaan Yang Membentuk Aset Tetap Peralatan dan Mesin
389	013.05.406463	LAPAS KELAS III SAROLANGUN RAWAS	407	31/12/2021	202112406463005	117911	0,00	39.073.500,00	Belanja Persediaan Yang Membentuk Aset Tetap Peralatan dan Mesin
390	013.05.406488	LAPAS KELAS IIB MARTAPURA	407	31/12/2021	202112406488005	117911	0,00	35.300.000,00	Belanja Persediaan Yang Membentuk Aset Tetap Peralatan dan Mesin
391	013.05.406488	LAPAS KELAS IIB MARTAPURA	408	01/10/2021	202110406488001	132211	4.725.000,00	0,00	Belanja Persediaan Yang Membentuk Aset Tetap Peralatan dan Mesin
392	013.05.406488	LAPAS KELAS IIB MARTAPURA	408	01/10/2021	202110406488001	117911	0,00	4.725.000,00	Belanja Persediaan Yang Membentuk Aset Tetap Peralatan dan Mesin

JURNAL TIDAK LAZIM
S.D 31 Desember 2021 (Unduh Data per Tanggal 12 Mei 2022)

No	Kode Satker	Nama Satker	Jenis Dokumen	Tanggal Dokumen	Nomor Dokumen	Akun	Debet	Kredit	Keterangan
393	013.05.406523	RUTAN KELAS IIB MUNTOK	408	30/12/2021	202112406523001	132211	1.150.000,00	0,00	Jurnal atas penerimaan hibah barang berupa peralatan dan mesin
394	013.05.406523	RUTAN KELAS IIB MUNTOK	408	30/12/2021	202112406523001	117911	0,00	1.150.000,00	Jurnal atas penerimaan hibah barang berupa peralatan dan mesin
395	013.05.406539	LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK PALEMBANG	407	31/12/2021	202112406539008	117911	0,00	2.390.000,00	Belanja Persediaan Yang Membentuk Aset Tetap Peralatan dan Mesin
396	013.05.406611	RUMAH TAHANAN NEGARA SANGGAU	407	19/10/2021	202110406611006	133211	199.868.000,00	0,00	Jurnal atas penerimaan hibah barang berupa aset gedung dan bangunan
397	013.05.406664	LEMBAGA PEMASYARAKATAN KETAPANG	407	31/12/2021	202112406664009	117911	0,00	22.000.000,00	Belanja Persediaan Yang Membentuk Aset Tetap Peralatan dan Mesin
398	013.05.406740	LEMBAGA PEMASYARAKATAN BANJARMASIN	407	31/12/2021	202112406740005	133211	50.000.000,00	0,00	Jurnal atas penerimaan hibah barang berupa aset gedung dan bangunan
399	013.05.406752	RUMAH TAHANAN NEGARA PELAIHARI	407	31/12/2021	202112406752006	133211	1.293.549.000,00	0,00	Jurnal atas penerimaan hibah barang berupa aset gedung dan bangunan
400	013.05.406761	LAPAS KELAS IIA KOTABARU	408	27/07/2021	202107406761001	133211	28.223.164,00	0,00	Jurnal atas penerimaan hibah barang berupa aset gedung dan bangunan
401	013.05.406761	LAPAS KELAS IIA KOTABARU	408	06/08/2021	202108406761002	133211	24.437.470,00	0,00	Jurnal atas penerimaan hibah barang berupa aset gedung dan bangunan
402	013.05.406828	LEMBAGA PEMASYARAKATAN BALIKPAPAN	408	29/11/2021	202111406828001	117911	0,00	4.525.000,00	Belanja Persediaan Yang Membentuk Aset Tetap Peralatan dan Mesin
403	013.05.406828	LEMBAGA PEMASYARAKATAN BALIKPAPAN	408	29/11/2021	202111406828002	132211	14.000.000,00	0,00	Belanja Persediaan Yang Membentuk Aset Tetap Peralatan dan Mesin
404	013.05.406828	LEMBAGA PEMASYARAKATAN BALIKPAPAN	408	29/11/2021	202111406828002	117911	0,00	14.000.000,00	Belanja Persediaan Yang Membentuk Aset Tetap Peralatan dan Mesin
405	013.05.406834	RUMAH TAHANAN NEGARA TANJUNG REDEP	407	20/12/2021	202112406834994	132211	198.121.000,00	0,00	Jurnal atas penerimaan hibah barang berupa peralatan dan mesin
406	013.05.406859	LAPAS KELAS IIA TENGGARONG	407	30/09/2021	202109406859005	133211	1.808.205.500,00	0,00	Jurnal atas penerimaan hibah barang berupa aset gedung dan bangunan
407	013.05.406865	LEMBAGA PEMASYARAKATAN TARAKAN	407	07/12/2021	202112406865017	133211	4.498.082.271,00	0,00	Jurnal atas penerimaan hibah barang berupa aset gedung dan bangunan
408	013.05.406962	LAPAS KELAS III LIRUNG	408	31/12/2021	202112406962001	132211	4.800.000,00	0,00	Jurnal atas penerimaan hibah barang berupa peralatan dan mesin
409	013.05.406962	LAPAS KELAS III LIRUNG	408	31/12/2021	2,02112E+14	117911	0,00	300.000,00	Belanja Persediaan Yang Membentuk Aset Tetap Peralatan dan Mesin
410	013.05.406962	LAPAS KELAS III LIRUNG	408	31/12/2021	202112406962001	117911	0,00	4.800.000,00	Jurnal atas penerimaan hibah barang berupa peralatan dan mesin
411	013.05.406984	LEMBAGA PEMASYARAKATAN ULU SIAU	408	31/12/2021	20211240698402	117911	0,00	2.510.000,00	Belanja Persediaan Yang Membentuk Aset Tetap Peralatan dan Mesin
412	013.05.406984	LEMBAGA PEMASYARAKATAN ULU SIAU	408	31/12/2021	20211240698402	132211	2.510.000,00	0,00	Belanja Persediaan Yang Membentuk Aset Tetap Peralatan dan Mesin
413	013.05.406984	LEMBAGA PEMASYARAKATAN ULU SIAU	408	31/12/2021	20211240698403	117911	0,00	2.320.000,00	Belanja Persediaan Yang Membentuk Aset Tetap Peralatan dan Mesin
414	013.05.407013	LAPAS KELAS III PARIGI	408	31/12/2021	202112407013001	117911	0,00	1.370.000,00	Belanja Persediaan Yang Membentuk Aset Tetap Peralatan dan Mesin
415	013.05.407013	LAPAS KELAS III PARIGI	407	20/05/2021	202105407013002	132211	364.300.000,00	0,00	Jurnal atas penerimaan hibah barang berupa peralatan dan mesin
416	013.05.407029	LEMBAGA PEMASYARAKATAN TOLI-TOLI	408	31/12/2021	202112407029003	117911	0,00	2.400.000,00	Belanja Persediaan Yang Membentuk Aset Tetap Peralatan dan Mesin
417	013.05.407066	RUMAH TAHANAN NEGARA POSO	408	31/12/2021	202112407066003	117911	0,00	5.800.000,00	Belanja Persediaan Yang Membentuk Aset Tetap Peralatan dan Mesin
418	013.05.407081	LEMBAGA PEMASYARAKATAN UJUNG PANDANG	407	31/12/2021	202112407081022	132211	0,00	5.385.000,00	Jurnal atas realisasi belanja modal peralatan dan mesin dibawah nilai kapitalisasi aset
419	013.05.407081	LEMBAGA PEMASYARAKATAN UJUNG PANDANG	407	31/12/2021	202112407081021	132211	0,00	3.600.000,00	Jurnal atas realisasi belanja modal peralatan dan mesin dibawah nilai kapitalisasi aset
420	013.05.407081	LEMBAGA PEMASYARAKATAN UJUNG PANDANG	407	21/10/2021	202110407081015	132211	40.826.000,00	0,00	Jurnal atas penerimaan hibah barang berupa peralatan dan mesin

JURNAL TIDAK LAZIM
S.D 31 Desember 2021 (Unduh Data per Tanggal 12 Mei 2022)

No	Kode Satker	Nama Satker	Jenis Dokumen	Tanggal Dokumen	Nomor Dokumen	Akun	Debet	Kredit	Keterangan
421	013.05.407081	LEMBAGA PEMASYARAKATAN UJUNG PANDANG	407	31/12/2021	202112407081017	132211	30.000.000,00	0,00	Jurnal atas penerimaan hibah barang berupa peralatan dan mesin
422	013.05.407097	RUMAH TAHANAN NEGARA PANGKAJENE	408	31/12/2021	202112407097002	132211	2.850.000,00	0,00	Belanja Persediaan Yang Membentuk Aset Tetap Peralatan dan Mesin
423	013.05.407097	RUMAH TAHANAN NEGARA PANGKAJENE	408	31/12/2021	202112407097003	117911	0,00	300.000,00	Belanja Persediaan Yang Membentuk Aset Tetap Peralatan dan Mesin
424	013.05.407097	RUMAH TAHANAN NEGARA PANGKAJENE	408	31/12/2021	202112407097002	117911	0,00	2.850.000,00	Belanja Persediaan Yang Membentuk Aset Tetap Peralatan dan Mesin
425	013.05.407211	LAPAS KELAS IIA PARE-PARE	408	31/12/2021	202112407211001	117911	0,00	100.000.000,00	Belanja Persediaan Yang Membentuk Aset Tetap Peralatan dan Mesin
426	013.05.407298	RUMAH TAHANAN NEGARA MAMUJU	408	31/12/2021	202112407298001	117911	0,00	500.000,00	Pencatatan satu unit stetoskop di aplikasi simak dengan nilai di bawah kapitalisasi
427	013.05.407324	RUMAH TAHANAN NEGARA WATANSOPENG	408	19/10/2021	202110407324001	117911	0,00	180.000,00	Belanja Persediaan Yang Membentuk Aset Tetap Peralatan dan Mesin
428	013.05.407333	LEMBAGA PEMASYARAKATAN KENDARI	408	31/12/2021	202112407333001	117911	0,00	4.517.000,00	Belanja Persediaan Yang Membentuk Aset Tetap Peralatan dan Mesin
429	013.05.407349	RUMAH TAHANAN NEGARA RAHA	408	31/03/2021	202103407349001	117911	0,00	350.000,00	Belanja Persediaan Yang Membentuk Aset Tetap Peralatan dan Mesin
430	013.05.407499	RUMAH TAHANAN NEGARA TERNATE	408	31/12/2021	202112407499003	117911	0,00	428.903,00	Belanja Persediaan Yang Membentuk Aset Tetap Peralatan dan Mesin
431	013.05.407519	BALAI PEMASYARAKATAN DENPASAR	408	31/12/2021	202112407519001	133211	0,00	112.800.000,00	Belanja modal GB yg menghasilkan Aset Peralatan dan Mesin
432	013.05.407519	BALAI PEMASYARAKATAN DENPASAR	408	31/12/2021	202112407519001	132211	112.800.000,00	0,00	Belanja modal GB yg menghasilkan Aset Peralatan dan Mesin
433	013.05.407571	RUMAH TAHANAN NEGARA GIANYAR	407	29/06/2021	202106407571008	132211	6.200.000,00	0,00	Jurnal atas penerimaan hibah barang berupa peralatan dan mesin
434	013.05.407613	LEMBAGA PEMASYARAKATAN MATARAM	408	31/12/2021	202112407613001	117911	0,00	5.760.000,00	Belanja Persediaan Yang Membentuk Aset Tetap Peralatan dan Mesin
435	013.05.407613	LEMBAGA PEMASYARAKATAN MATARAM	408	31/12/2021	202112407613002	117911	0,00	1.800.000,00	Belanja Persediaan Yang Membentuk Aset Tetap Peralatan dan Mesin
436	013.05.407622	LAPAS KELAS IIB SELONG	408	31/12/2021	202112407622002	117911	0,00	5.000.000,00	Belanja Persediaan Yang Membentuk Aset Tetap Peralatan dan Mesin
437	013.05.407638	RUMAH TAHANAN NEGARA PRAYA	408	31/12/2021	202112407638001	117911	0,00	3.614.000,00	Belanja Persediaan Yang Membentuk Aset Tetap Peralatan dan Mesin
438	013.05.407644	LEMBAGA PEMASYARAKATAN SUMBAWA BESAR	408	31/12/2021	202112407644001	117911	0,00	14.730.000,00	Belanja Persediaan Yang Membentuk Aset Tetap Peralatan dan Mesin
439	013.05.407653	RUMAH TAHANAN NEGARA RABA/BIMA	408	31/08/2021	202108407653001	117911	0,00	700.000,00	Belanja Persediaan Yang Membentuk Aset Tetap Peralatan dan Mesin
440	013.05.407653	RUMAH TAHANAN NEGARA RABA/BIMA	408	31/12/2021	202112407653002	117911	0,00	6.000.000,00	Belanja Persediaan Yang Membentuk Aset Tetap Peralatan dan Mesin
441	013.05.407794	LEMBAGA PEMASYARAKATAN ABEPURA	408	31/12/2021	202112407794006	117911	0,00	4.460.500,00	Belanja Persediaan Yang Membentuk Aset Tetap Peralatan dan Mesin
442	013.05.407870	LAPAS KELAS III TEMINABUHAN	408	31/12/2021	202112407870001	132211	5.700.000,00	0,00	Jurnal atas penerimaan hibah barang berupa peralatan dan mesin
443	013.05.407870	LAPAS KELAS III TEMINABUHAN	408	31/12/2021	202112407870003	117911	0,00	530.000,00	Belanja Persediaan Yang Membentuk Aset Tetap Peralatan dan Mesin
444	013.05.407870	LAPAS KELAS III TEMINABUHAN	408	31/12/2021	202112407870001	117911	0,00	5.700.000,00	Jurnal atas penerimaan hibah barang berupa peralatan dan mesin
445	013.05.407870	LAPAS KELAS III TEMINABUHAN	408	31/12/2021	202112407870002	117911	0,00	150.000,00	Belanja Persediaan Yang Membentuk Aset Tetap Peralatan dan Mesin
446	013.05.407876	LEMBAGA PEMASYARAKATAN SORONG	408	31/12/2021	202112407876001	117911	0,00	18.000.000,00	Jurnal atas penerimaan hibah barang berupa peralatan dan mesin
447	013.05.407876	LEMBAGA PEMASYARAKATAN SORONG	408	31/12/2021	202112407876001	132211	18.000.000,00	0,00	Jurnal atas penerimaan hibah barang berupa peralatan dan mesin
448	013.05.407882	LEMBAGA PEMASYARAKATAN FAK-FAK	408	31/12/2021	202112407882001	117911	0,00	10.200.000,00	Belanja Persediaan Yang Membentuk Aset Tetap Peralatan dan Mesin

JURNAL TIDAK LAZIM
S.D 31 Desember 2021 (Unduh Data per Tanggal 12 Mei 2022)

No	Kode Satker	Nama Satker	Jenis Dokumen	Tanggal Dokumen	Nomor Dokumen	Akun	Debet	Kredit	Keterangan
449	013.05.407927	LEMBAGA PEMASYARAKATAN CURUP	408	31/01/2021	202101407927002	132211	1.115.000,00	0,00	Belanja Persediaan Yang Membentuk Aset Tetap Peralatan dan Mesin
450	013.05.407927	LEMBAGA PEMASYARAKATAN CURUP	408	30/11/2021	202111407927004	117911	0,00	3.484.375,00	Belanja Persediaan Yang Membentuk Aset Tetap Peralatan dan Mesin
451	013.05.407927	LEMBAGA PEMASYARAKATAN CURUP	408	31/01/2021	202101407927003	117911	0,00	1.304.550,00	Belanja Persediaan Yang Membentuk Aset Tetap Peralatan dan Mesin
452	013.05.407927	LEMBAGA PEMASYARAKATAN CURUP	408	31/01/2021	202101407927002	117911	0,00	1.115.000,00	Belanja Persediaan Yang Membentuk Aset Tetap Peralatan dan Mesin
453	013.05.408530	LEMBAGA PEMASYARAKATAN KOTA AGUNG	407	31/12/2021	202112408530004	132211	240.000.000,00	0,00	Jurnal atas penerimaan hibah barang berupa peralatan dan mesin
454	013.05.408649	LEMBAGA PEMASYARAKATAN DOMPU	407	31/12/2021	202112408649010	132211	0,00	5.346.000,00	Jurnal atas realisasi belanja modal peralatan dan mesin dibawah nilai kapitalisasi aset
455	013.05.408649	LEMBAGA PEMASYARAKATAN DOMPU	408	14/10/2021	20211040864901	132211	89.069.500,00	0,00	Jurnal atas penerimaan hibah barang berupa peralatan dan mesin
456	013.05.408649	LEMBAGA PEMASYARAKATAN DOMPU	408	31/12/2021	20211240864903	132211	3.810.000,00	0,00	Belanja Persediaan Yang Membentuk Aset Tetap Peralatan dan Mesin
457	013.05.408649	LEMBAGA PEMASYARAKATAN DOMPU	408	31/12/2021	20211240864902	117911	0,00	5.350.000,00	Belanja Persediaan Yang Membentuk Aset Tetap Peralatan dan Mesin
458	013.05.408649	LEMBAGA PEMASYARAKATAN DOMPU	408	31/12/2021	20211240864903	117911	0,00	3.810.000,00	Belanja Persediaan Yang Membentuk Aset Tetap Peralatan dan Mesin
459	013.05.408661	LEMBAGA PEMASYARAKATAN WANITA TANGERANG	408	31/12/2021	202112408661001	117911	0,00	920.000,00	Belanja Persediaan Yang Membentuk Aset Tetap Peralatan dan Mesin
460	013.05.408661	LEMBAGA PEMASYARAKATAN WANITA TANGERANG	408	31/12/2021	202112408661002	117911	0,00	310.500,00	Belanja Persediaan Yang Membentuk Aset Tetap Peralatan dan Mesin
461	013.05.408692	RUMAH TAHANAN NEGARA JAKARTA PUSAT	407	31/12/2021	202112408692005	117911	0,00	407.500,00	Belanja Persediaan Yang Membentuk Aset Tetap Peralatan dan Mesin
462	013.05.409151	LEMBAGA PEMASYARAKATAN ANAK PEKANBARU	408	31/12/2021	202112409151001	132211	38.700.000,00	0,00	Belanja Persediaan Yang Membentuk Aset Tetap Peralatan dan Mesin
463	013.05.409151	LEMBAGA PEMASYARAKATAN ANAK PEKANBARU	408	31/12/2021	202112409151002	117911	0,00	74.845.000,00	Belanja Persediaan Yang Membentuk Aset Tetap Peralatan dan Mesin
464	013.05.409151	LEMBAGA PEMASYARAKATAN ANAK PEKANBARU	408	31/12/2021	202112409151001	117911	0,00	38.700.000,00	Belanja Persediaan Yang Membentuk Aset Tetap Peralatan dan Mesin
465	013.05.409263	DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN	407	31/12/2021	202112409263029	133211	0,00	13.981.686.712,00	pengakuan Belanja Dibayar Dimuka atas transaksi pembangunan Fisik mengikuti PMK No. 184/2021
466	013.05.409263	DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN	408	31/12/2021	202112409263019	132211	857.674.150,00	0,00	kesalahan penggunaan akun belanja modal yang menyebabkan penambahan beban perjalanan dinas dari realisasi anggaran belanja modal peralatan dan mesin
467	013.05.409263	DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN	407	13/12/2021	202112409263025	132211	0,00	21.024.000,00	pengakuan Belanja Dibayar Dimuka atas transaksi pengadaan barang dan jasa
468	013.05.409263	DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN	407	01/11/2021	202111409263024	132211	0,00	227.446.722,00	penerimaan hibah barang berupa peralatan mesin
469	013.05.409263	DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN	408	31/12/2021	202112409263017	117911	0,00	40.714.300,00	kesalahan penggunaan akun belanja modal dan akun persediaan yang menyebabkan penambahan beban sewa
470	013.05.409263	DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN	408	31/12/2021	202112409263016	117911	0,00	345.001,00	belanja Modal Gedung bangunan yang membentuk peralatan dan mesin
471	013.05.409263	DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN	407	13/12/2021	202112409263018	117911	5.251.460,00	0,00	realisasi belanja modal peralatan dan mesin yang membentuk aset tetap Gedung dan Bangunan
472	013.05.409263	DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN	407	03/09/2021	20210940926313	132211	2.626.800.000,00	0,00	pengakuan Belanja Dibayar Dimuka atas transaksi pengadaan barang dan jasa
473	013.05.409263	DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN	407	01/11/2021	202111409263015	117911	23.211.354.031,00	0,00	penerimaan hibah barang berupa persediaan
474	013.05.409263	DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN	408	31/12/2021	202112409263019	133211	0,00	857.674.150,00	kesalahan penggunaan akun belanja modal yang menyebabkan penambahan beban perjalanan dinas dari realisasi anggaran belanja modal peralatan dan mesin
475	013.05.409263	DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN	408	31/12/2021	202112409263014	133211	0,00	199.452.000,00	belanja Modal Peralatan dan Mesin yang membentuk persediaan

JURNAL TIDAK LAZIM
S.D 31 Desember 2021 (Unduh Data per Tanggal 12 Mei 2022)

No	Kode Satker	Nama Satker	Jenis Dokumen	Tanggal Dokumen	Nomor Dokumen	Akun	Debet	Kredit	Keterangan
476	013.05.409263	DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN	408	31/12/2021	202112409263012	133211	0,00	596.970.000,00	belanja Modal Gedung dan Bangunan yang membentuk Aset Tetap Jalan dan Jembatan
477	013.05.409263	DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN	408	31/12/2021	202112409263011	133211	0,00	184.250.000,00	realisasi belanja modal gedung dan bangunan yang membentuk aset tetap renovasi
478	013.05.409263	DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN	407	13/12/2021	202112409263026	132211	0,00	14.400.000,00	Belanja Persediaan Yang Membentuk Aset Tetap Peralatan dan Mesin
479	013.05.409263	DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN	407	31/12/2021	202112409263028	132211	391.685.000,00	0,00	penerimaan hibah barang berupa peralatan mesin
480	013.05.409263	DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN	408	31/12/2021	202112409263023	132211	89.406.000,00	0,00	Jurnal pencatatan pembelian Peralatan dan Mesin dengan menggunakan akun Beban Barang Non Operasional Lainnya yang belum di jurnal pada data unaudit
481	013.05.409263	DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN	407	13/12/2021	202112409263019	132211	272.448.000,00	0,00	kesalahan penggunaan akun belanja modal yang menyebabkan penambahan beban perjalanan dinas dari realisasi anggaran belanja modal peralatan dan mesin
482	013.05.409263	DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN	407	01/11/2021	202111409263016	132211	227.446.722,00	0,00	penerimaan hibah barang berupa peralatan mesin
483	013.05.409263	DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN	408	31/12/2021	202112409263021	117911	236.192.900,00	0,00	pengakuan Belanja Dibayar Dimuka atas transaksi pembangunan Fisik mengikuti PMK No. 184/2021
484	013.05.409263	DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN	408	31/12/2021	202112409263022	132211	0,00	159.725.770,00	Salah pembebanan belanja peralatan dan mesin yang membentuk belanja belanja perjalanan dinas biasa
485	013.05.409263	DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN	408	31/12/2021	202112409263021	132211	0,00	236.192.900,00	pengakuan Belanja Dibayar Dimuka atas transaksi pembangunan Fisik mengikuti PMK No. 184/2021
486	013.05.409263	DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN	408	31/12/2021	202112409263020	132211	0,00	396.550.000,00	Kesalahan belanja peralatan dan mesin yang tidak membentuk aset intra peralatan dan mesin
487	013.05.409263	DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN	407	31/12/2021	202112409263027	117911	14.018.000,00	0,00	penerimaan hibah barang berupa persediaan
488	013.05.409263	DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN	408	31/12/2021	202112409263018	132211	0,00	673.915.000,00	realisasi belanja modal peralatan dan mesin yang membentuk aset tetap Gedung dan Bangunan
489	013.05.409263	DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN	408	31/12/2021	202112409263015	117911	8.355.596.000,00	0,00	kesalahan penggunaan akun belanja modal dan akun persediaan yang menyebabkan penambahan beban sewa
490	013.05.409263	DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN	408	31/12/2021	202112409263013	133211	13.981.686.712,00	0,00	Belanja Persediaan Yang Membentuk Aset Tetap Peralatan dan Mesin
491	013.05.409263	DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN	408	31/12/2021	202112409263012	134211	596.970.000,00	0,00	belanja Modal Gedung dan Bangunan yang membentuk Aset Tetap Jalan dan Jembatan
492	013.05.409263	DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN	408	31/12/2021	202112409263015	132211	0,00	8.355.596.000,00	kesalahan penggunaan akun belanja modal dan akun persediaan yang menyebabkan penambahan beban sewa
493	013.05.409263	DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN	408	31/12/2021	202112409263018	133211	673.915.000,00	0,00	realisasi belanja modal peralatan dan mesin yang membentuk aset tetap Gedung dan Bangunan
494	013.05.409263	DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN	408	31/12/2021	202112409263010	132211	0,00	4.019.874.500,00	belanja modal peralatan dan mesin yang membentuk aset tetap lainnya berupa alat membatik pada Lapas Narkotika Jakarta dan aplikasi SDP pada Direktorat Jenderal Pemasyarakatan
495	013.05.409263	DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN	407	31/12/2021	202112409263031	132211	0,00	26.436.095.000,00	pengakuan Belanja Dibayar Dimuka atas transaksi pengadaan barang dan jasa
496	013.05.409263	DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN	407	31/12/2021	202112409263030	132211	0,00	50.078.511.720,00	pengakuan Belanja Dibayar Dimuka atas transaksi pengadaan barang dan jasa
497	013.05.409263	DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN	408	31/12/2021	202112409263017	132211	40.714.300,00	0,00	kesalahan penggunaan akun belanja modal dan akun persediaan yang menyebabkan penambahan beban sewa
498	013.05.418330	Lapas Perempuan Kelas IIA Jakarta	407	27/10/2021	202110418330001	132211	26.750.000,00	0,00	Jurnal atas penerimaan hibah barang berupa peralatan dan mesin
499	013.05.418332	Lapas Perempuan Kelas IIA Palangkaraya	407	31/12/2021	202112418332004	117911	0,00	355.000,00	Belanja Persediaan Yang Membentuk Aset Tetap Peralatan dan Mesin
500	013.05.418332	Lapas Perempuan Kelas IIA Palangkaraya	407	18/10/2021	202110418332002	131211	834.511.730,00	0,00	Jurnal atas penerimaan hibah barang berupa tanah

JURNAL TIDAK LAZIM
S.D 31 Desember 2021 (Unduh Data per Tanggal 12 Mei 2022)

No	Kode Satker	Nama Satker	Jenis Dokumen	Tanggal Dokumen	Nomor Dokumen	Akun	Debet	Kredit	Keterangan
501	013.05.418332	Lapas Perempuan Kelas IIA Palangkaraya	407	11/10/2021	202110418332001	132211	33.720.000,00	0,00	Jurnal atas penerimaan hibah barang berupa peralatan dan mesin
502	013.05.418335	Lapas Perempuan Kelas IIA Pekanbaru	408	31/12/2021	202112418335003	117911	0,00	2.210.000,00	Belanja Persediaan Yang Membentuk Aset Tetap Peralatan dan Mesin
503	013.05.418336	Lapas Perempuan Kelas IIA Pontianak	407	23/06/2021	20210641833604	132211	6.000.000,00	0,00	Jurnal atas penerimaan hibah barang berupa peralatan dan mesin
504	013.05.418336	Lapas Perempuan Kelas IIA Pontianak	407	23/06/2021	202106418336001	133211	341.100.000,00	0,00	Jurnal atas penerimaan hibah barang berupa aset gedung dan bangunan
505	013.05.418336	Lapas Perempuan Kelas IIA Pontianak	407	10/11/2021	202111418336005	132211	6.850.000,00	0,00	Jurnal atas penerimaan hibah barang berupa peralatan dan mesin
506	013.05.418338	Lapas Perempuan Kelas IIB Jambi	407	14/06/2021	202106418338001	133211	484.756.000,00	0,00	Jurnal atas penerimaan hibah barang berupa aset gedung dan bangunan
507	013.05.418338	Lapas Perempuan Kelas IIB Jambi	408	31/12/2021	202112418338004	117911	0,00	1.335.500,00	Belanja Persediaan Yang Membentuk Aset Tetap Peralatan dan Mesin
508	013.05.418338	Lapas Perempuan Kelas IIB Jambi	408	31/12/2021	202112418338005	133211	1.425.000,00	0,00	Jurnal atas penerimaan hibah barang berupa aset gedung dan bangunan
509	013.05.418339	Lapas Perempuan Kelas IIB Padang	408	31/12/2021	2,02112E+14	133211	11.731.027.915,00	0,00	Jurnal atas penerimaan hibah barang berupa aset gedung dan bangunan
510	013.05.418339	Lapas Perempuan Kelas IIB Padang	407	31/12/2021	202112418339001	133211	0,00	11.731.027.915,00	Jurnal atas penerimaan hibah barang berupa aset gedung dan bangunan
511	013.05.418340	Lapas Perempuan Kelas IIB Yogyakarta	408	30/11/2021	202111418340004	132211	3.600.000,00	0,00	realisasi belanja barang 521219 yang membentuk aset Intra diatas nilai kapitalisasi
512	013.05.418340	Lapas Perempuan Kelas IIB Yogyakarta	407	31/12/2021	202112418340006	133211	30.000.000,00	0,00	Jurnal atas penerimaan hibah barang berupa aset gedung dan bangunan
513	013.05.418341	Lapas Perempuan Kelas IIB Batam	408	28/10/2021	202110418341005	117911	0,00	290.000,00	Belanja Persediaan Yang Membentuk Aset Tetap Peralatan dan Mesin
514	013.05.418342	Lapas Perempuan Kelas IIB Bengkulu	408	31/07/2021	202107418342002	132211	3.011.000,00	0,00	Belanja Persediaan Yang Membentuk Aset Tetap Peralatan dan Mesin
515	013.05.418342	Lapas Perempuan Kelas IIB Bengkulu	408	31/12/2021	202112418342003	132211	2.578.650,00	0,00	Jurnal atas penerimaan hibah barang berupa peralatan dan mesin
516	013.05.418342	Lapas Perempuan Kelas IIB Bengkulu	408	31/07/2021	202107418342002	117911	0,00	3.011.000,00	Belanja Persediaan Yang Membentuk Aset Tetap Peralatan dan Mesin
517	013.05.418342	Lapas Perempuan Kelas IIB Bengkulu	408	31/12/2021	202112418342004	117911	0,00	1.731.750,00	Belanja Persediaan Yang Membentuk Aset Tetap Peralatan dan Mesin
518	013.05.418342	Lapas Perempuan Kelas IIB Bengkulu	408	31/12/2021	202112418342003	117911	0,00	2.578.650,00	Jurnal atas penerimaan hibah barang berupa peralatan dan mesin
519	013.05.418345	Lapas Perempuan Kelas III Kendari	408	31/12/2021	202112418345005	117911	0,00	3.250.000,00	Belanja Persediaan Yang Membentuk Aset Tetap Peralatan dan Mesin
520	013.05.418350	Lapas Perempuan Kelas III Ternate	408	31/12/2021	202112418350001	117911	0,00	1.220.000,00	Belanja Persediaan Yang Membentuk Aset Tetap Peralatan dan Mesin
521	013.05.418351	Lapas Perempuan Kelas III Mataram	408	31/12/2021	20211241835102	117911	0,00	775.300,00	Belanja Persediaan Yang Membentuk Aset Tetap Peralatan dan Mesin
522	013.05.418351	Lapas Perempuan Kelas III Mataram	408	31/12/2021	20211241835101	117911	0,00	1.504.684,00	Belanja Persediaan Yang Membentuk Aset Tetap Peralatan dan Mesin
523	013.05.418365	Rutan Perempuan Kelas IIA Bandung	408	31/12/2021	202112418365001	117911	0,00	9.997.750,00	Belanja Persediaan Yang Membentuk Aset Tetap Peralatan dan Mesin
524	013.05.418366	LAPAS PEMUDA KELAS III LANGKAT PROVINSI SUMATERA UTARA	408	31/12/2021	202112418366001	117911	0,00	79.000.000,00	Belanja Persediaan Yang Membentuk Aset Tetap Peralatan dan Mesin
525	013.05.418367	Lapas Kelas III Sukamara Provinsi Kalimantan Tengah	408	19/04/2021	202104418367001	117911	0,00	7.483.700,00	Belanja Persediaan Yang Membentuk Aset Tetap Peralatan dan Mesin
526	013.05.418367	Lapas Kelas III Sukamara Provinsi Kalimantan Tengah	408	19/04/2021	202104418367001	132211	7.483.700,00	0,00	Belanja Persediaan Yang Membentuk Aset Tetap Peralatan dan Mesin
527	013.05.497645	RUMAH TAHANAN NEGARA CIPINANG	407	31/12/2021	202112497645003	117911	0,00	3.394.380,00	Belanja Persediaan Yang Membentuk Aset Tetap Peralatan dan Mesin
528	013.05.497651	LEMBAGA PEMASYARAKATAN SALEMBA	407	31/12/2021	202112497651005	117911	0,00	1.410.000,00	Belanja Persediaan Yang Membentuk Aset Tetap Peralatan dan Mesin

JURNAL TIDAK LAZIM
S.D 31 Desember 2021 (Unduh Data per Tanggal 12 Mei 2022)

No	Kode Satker	Nama Satker	Jenis Dokumen	Tanggal Dokumen	Nomor Dokumen	Akun	Debet	Kredit	Keterangan
529	013.05.497676	LEMBAGA PEMASYARAKATAN CIBINONG	408	31/12/2021	202112497676003	117911	0,00	9.975.200,00	Belanja Persediaan Yang Membentuk Aset Tetap Peralatan dan Mesin
530	013.05.497676	LEMBAGA PEMASYARAKATAN CIBINONG	407	01/10/2021	202110497676003	132211	55.405.000,00	0,00	Jurnal atas penerimaan hibah barang berupa peralatan dan mesin
531	013.05.497676	LEMBAGA PEMASYARAKATAN CIBINONG	408	31/12/2021	202112497676001	117911	0,00	3.672.000,00	Jurnal atas penerimaan hibah barang berupa peralatan dan mesin
532	013.05.497676	LEMBAGA PEMASYARAKATAN CIBINONG	408	31/12/2021	202112497676001	132211	3.672.000,00	0,00	Jurnal atas penerimaan hibah barang berupa peralatan dan mesin
533	013.05.497676	LEMBAGA PEMASYARAKATAN CIBINONG	408	31/12/2021	202112497676002	117911	0,00	2.457.000,00	Belanja Persediaan Yang Membentuk Aset Tetap Peralatan dan Mesin
534	013.05.497682	LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA BANDUNG	408	31/12/2021	20211249768202	117911	0,00	5.999.700,00	Belanja Persediaan Yang Membentuk Aset Tetap Peralatan dan Mesin
535	013.05.497691	RUMAH TAHANAN NEGARA BATANG	408	31/12/2021	202112497691003	117911	0,00	1.500.000,00	Jurnal atas penerimaan hibah barang berupa peralatan dan mesin
536	013.05.497691	RUMAH TAHANAN NEGARA BATANG	408	31/12/2021	202112497691004	117911	0,00	1.950.000,00	Belanja Persediaan Yang Membentuk Aset Tetap Peralatan dan Mesin
537	013.05.497691	RUMAH TAHANAN NEGARA BATANG	408	31/12/2021	202112497691003	132211	1.500.000,00	0,00	Jurnal atas penerimaan hibah barang berupa peralatan dan mesin
538	013.05.497711	LEMBAGA PEMASYARAKATAN SLAWI	408	31/12/2021	202112497711001	117911	0,00	1.200.000,00	Belanja Persediaan Yang Membentuk Aset Tetap Peralatan dan Mesin
539	013.05.497758	LEMBAGA PEMASYARAKATAN WAY KANAN	407	30/12/2021	202112497758011	132211	12.000.000,00	0,00	Jurnal atas penerimaan hibah barang berupa peralatan dan mesin
540	013.05.497758	LEMBAGA PEMASYARAKATAN WAY KANAN	408	31/12/2021	202112497758005	117911	0,00	47.498.000,00	Belanja Persediaan Yang Membentuk Aset Tetap Peralatan dan Mesin
541	013.05.497758	LEMBAGA PEMASYARAKATAN WAY KANAN	407	23/11/2021	202111497758010	133211	37.500.000,00	0,00	Jurnal atas penerimaan hibah barang berupa aset gedung dan bangunan
542	013.05.497758	LEMBAGA PEMASYARAKATAN WAY KANAN	407	20/09/2021	202109497758004	133211	100.000.000,00	0,00	Jurnal atas penerimaan hibah barang berupa aset gedung dan bangunan
543	013.05.497758	LEMBAGA PEMASYARAKATAN WAY KANAN	407	26/10/2021	202110497758005	133211	75.000.000,00	0,00	Jurnal atas penerimaan hibah barang berupa aset gedung dan bangunan
544	013.05.497773	RUMAH TAHANAN NEGARA LANDAK	407	31/12/2021	202112497773006	117911	0,00	1.800.000,00	Belanja Persediaan Yang Membentuk Aset Tetap Peralatan dan Mesin
545	013.05.497846	RUMAH TAHANAN NEGARA TANGERANG	407	19/10/2021	202110497846005	133211	564.406.150,00	0,00	Jurnal atas penerimaan hibah barang berupa aset gedung dan bangunan
546	013.05.497846	RUMAH TAHANAN NEGARA TANGERANG	407	28/10/2021	202110497846006	133211	154.608.000,00	0,00	Jurnal atas penerimaan hibah barang berupa aset gedung dan bangunan
547	013.05.526793	RUMAH TAHANAN NEGARA UJUNG PANDANG	407	10/09/2021	202109526793004	132211	14.587.000,00	0,00	Jurnal atas penerimaan hibah barang berupa peralatan dan mesin
548	013.05.526801	RUMAH TAHANAN NEGARA BANDUNG	408	31/12/2021	202112526801001	117911	0,00	4.500.000,00	Belanja Persediaan Yang Membentuk Aset Tetap Peralatan dan Mesin
549	013.05.531887	RUMAH TAHANAN NEGARA BALIKPAPAN	407	31/12/2021	202112531887017	132211	22.550.000,00	0,00	Jurnal atas penerimaan hibah barang berupa peralatan dan mesin
550	013.05.559879	BALAI PEMASYARAKATAN JAKARTA SELATAN	407	31/12/2021	202112559879003	132211	8.670.600,00	0,00	Jurnal atas penerimaan hibah barang berupa peralatan dan mesin
551	013.05.567869	RUMAH TAHANAN NEGARA GRESIK	408	03/12/2021	20211256786901	132211	4.180.000,00	0,00	Belanja Persediaan Yang Membentuk Aset Tetap Peralatan dan Mesin
552	013.05.567869	RUMAH TAHANAN NEGARA GRESIK	408	03/12/2021	20211256786901	117911	0,00	4.180.000,00	Belanja Persediaan Yang Membentuk Aset Tetap Peralatan dan Mesin
553	013.05.567869	RUMAH TAHANAN NEGARA GRESIK	407	13/12/2021	202112567869013	132211	256.020.000,00	0,00	Jurnal atas penerimaan hibah barang berupa peralatan dan mesin
554	013.05.567890	RUMAH TAHANAN NEGARA PALU	408	31/12/2021	202112567890001	117911	0,00	1.250.000,00	Belanja Persediaan Yang Membentuk Aset Tetap Peralatan dan Mesin
555	013.05.568712	LAPAS SUNGAI LIAT	407	22/10/2021	20211056871202	131211	420.000.000,00	0,00	Jurnal atas penerimaan hibah barang berupa tanah
556	013.05.568712	LAPAS SUNGAI LIAT	408	30/11/2021	202111568712001	117911	0,00	2.573.000,00	Belanja Persediaan Yang Membentuk Aset Tetap Peralatan dan Mesin
557	013.05.568712	LAPAS SUNGAI LIAT	408	30/11/2021	202111568712003	117911	0,00	1.320.000,00	Belanja Persediaan Yang Membentuk Aset Tetap Peralatan dan Mesin

JURNAL TIDAK LAZIM
S.D 31 Desember 2021 (Unduh Data per Tanggal 12 Mei 2022)

No	Kode Satker	Nama Satker	Jenis Dokumen	Tanggal Dokumen	Nomor Dokumen	Akun	Debet	Kredit	Keterangan
558	013.05.568712	LAPAS SUNGAI LIAT	408	30/11/2021	202111568712002	117911	0,00	1.950.000,00	Belanja Persediaan Yang Membentuk Aset Tetap Peralatan dan Mesin
559	013.05.626136	LEMBAGA PEMASYARAKATAN ANAK, MUARA BULIAN, JAMBI	408	31/12/2021	202112626136002	117911	0,00	1.000.000,00	Belanja Persediaan Yang Membentuk Aset Tetap Peralatan dan Mesin
560	013.05.626136	LEMBAGA PEMASYARAKATAN ANAK, MUARA BULIAN, JAMBI	408	31/12/2021	202112626136001	117911	0,00	2.972.500,00	Belanja Persediaan Yang Membentuk Aset Tetap Peralatan dan Mesin
561	013.05.626178	BALAI PEMASYARAKATAN PANGKALAN BUN, KALIMANTAN TENGAH	407	25/11/2021	202111626178001	132211	12.650.000,00	0,00	Jurnal atas penerimaan hibah barang berupa peralatan dan mesin
562	013.05.632009	BAPAS KELAS II MUSI RAWAS UTARA	407	31/12/2021	202112632009003	117911	0,00	26.680.000,00	Belanja Persediaan Yang Membentuk Aset Tetap Peralatan dan Mesin
563	013.05.632025	BAPAS KELAS II BEKASI	408	31/12/2021	202112632025001	117911	0,00	1.870.000,00	Belanja Persediaan Yang Membentuk Aset Tetap Peralatan dan Mesin
564	013.05.632029	BAPAS KELAS II NUSAKAMBANGAN	407	06/12/2021	202112632029001	132211	7.500.000,00	0,00	Jurnal atas penerimaan hibah barang berupa peralatan dan mesin
565	013.05.632029	BAPAS KELAS II NUSAKAMBANGAN	408	31/12/2021	202112632029001	117911	0,00	5.750.000,00	Jurnal atas penerimaan hibah barang berupa peralatan dan mesin
566	013.05.632055	LAPAS NARKOTIKA KELAS IIB RUMBAI	407	31/12/2021	202112632055005	133211	1.372.250.000,00	0,00	Jurnal atas penerimaan hibah barang berupa aset gedung dan bangunan
567	013.05.632055	LAPAS NARKOTIKA KELAS IIB RUMBAI	408	31/12/2021	202112632055003	133211	183.932.534,00	0,00	Jurnal atas penerimaan hibah barang berupa aset gedung dan bangunan
568	013.05.632055	LAPAS NARKOTIKA KELAS IIB RUMBAI	407	31/12/2021	202112632055008	133211	0,00	183.932.534,00	Belanja Persediaan Yang Membentuk Aset Tetap Peralatan dan Mesin
569	013.05.632055	LAPAS NARKOTIKA KELAS IIB RUMBAI	408	31/12/2021	202112632055001	117911	0,00	11.880.000,00	Belanja Persediaan Yang Membentuk Aset Tetap Peralatan dan Mesin
570	013.05.632055	LAPAS NARKOTIKA KELAS IIB RUMBAI	408	31/12/2021	202112632055002	117911	0,00	1.078.000,00	Jurnal atas penerimaan hibah barang berupa peralatan dan mesin
571	013.05.632055	LAPAS NARKOTIKA KELAS IIB RUMBAI	408	31/12/2021	202112632055002	132211	1.078.000,00	0,00	Jurnal atas penerimaan hibah barang berupa peralatan dan mesin
572	013.05.632057	LAPAS KHUSUS KELAS IIA KARANGANYAR NUSAKAMBANGAN	408	31/12/2021	202112632057002	117911	0,00	541.500,00	Belanja Persediaan Yang Membentuk Aset Tetap Peralatan dan Mesin
573	013.05.632059	LAPAS NARKOTIKA KELAS IIB PURWOKERTO	408	31/12/2021	202112632059001	117911	0,00	950.000,00	Belanja Persediaan Yang Membentuk Aset Tetap Peralatan dan Mesin
574	013.05.632513	RUMAH TAHANAN NEGARA KENDARI	408	31/12/2021	202112632513001	117911	0,00	2.230.000,00	Belanja Persediaan Yang Membentuk Aset Tetap Peralatan dan Mesin
575	013.05.632548	RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAN NEGARA JAKARTA UTARA	408	31/12/2021	202112632548X01	117111	495.000,00	0,00	Dampak update aplikasi persediaan
576	013.05.632548	RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAN NEGARA JAKARTA UTARA	408	31/12/2021	202112632548X02	117111	0,00	495.000,00	Dampak update aplikasi persediaan
577	013.05.632623	RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAN NEGARA LAMPUNG	407	04/05/2021	202105632623003	132211	14.250.000,00	0,00	Jurnal atas penerimaan hibah barang berupa peralatan dan mesin
578	013.05.649040	LEMBAGA PEMASYARAKATAN NARKOTIKA DI CIREBON	408	31/12/2021	202112649040001	117911	0,00	10.000.000,00	Belanja Persediaan Yang Membentuk Aset Tetap Peralatan dan Mesin
579	013.05.649040	LEMBAGA PEMASYARAKATAN NARKOTIKA DI CIREBON	408	31/12/2021	202112649040002	117911	0,00	740.000,00	Belanja Persediaan Yang Membentuk Aset Tetap Peralatan dan Mesin
580	013.05.649040	LEMBAGA PEMASYARAKATAN NARKOTIKA DI CIREBON	408	31/12/2021	202112649040003	132211	5.328.000,00	0,00	Belanja Persediaan Yang Membentuk Aset Tetap Peralatan dan Mesin
581	013.05.649040	LEMBAGA PEMASYARAKATAN NARKOTIKA DI CIREBON	408	31/12/2021	202112649040003	117911	0,00	5.328.000,00	Belanja Persediaan Yang Membentuk Aset Tetap Peralatan dan Mesin
582	013.05.652831	LEMBAGA PEMASYARAKATAN LUBUK BASUNG	408	31/12/2021	202112652831001	131211	10.939.500,00	0,00	Jurnal atas hibah yang belum dilakukan pencatatan pengakuan dan belum disahkan pada unaudit
583	013.05.652869	LEMBAGA PEMASYARAKATAN BITUNG	408	31/12/2021	2021126528691	117911	0,00	1.570.000,00	Belanja Persediaan Yang Membentuk Aset Tetap Peralatan dan Mesin
584	013.05.652923	LAPAS TERBUKA KELAS IIB LOMBOK TENGAH	408	30/10/2021	202110652923001	132211	0,00	800.000,00	Jurnal atas realisasi belanja modal peralatan dan mesin dibawah nilai kapitalisasi aset
585	013.05.652958	LAPAS NARKOTIKA KELAS IIA MUARA BELITI	407	31/12/2021	202112652958011	117911	0,00	390.000,00	Belanja Persediaan Yang Membentuk Aset Tetap Peralatan dan Mesin

JURNAL TIDAK LAZIM
S.D 31 Desember 2021 (Unduh Data per Tanggal 12 Mei 2022)

No	Kode Satker	Nama Satker	Jenis Dokumen	Tanggal Dokumen	Nomor Dokumen	Akun	Debet	Kredit	Keterangan
586	013.05.652958	LAPAS NARKOTIKA KELAS IIA MUARA BELITI	407	31/12/2021	202112652958008	117911	0,00	87.010.000,00	Belanja Persediaan Yang Membentuk Aset Tetap Peralatan dan Mesin
587	013.05.652962	LEMBAGA PEMASYARAKATAN NARKOTIKA BANDAR LAMPUNG	407	31/12/2021	202112652962006	133211	145.000.000,00	0,00	Jurnal atas penerimaan hibah barang berupa aset gedung dan bangunan
588	013.05.652979	LEMBAGA PEMASYARAKATAN NARKOTIKA JAKARTA	408	29/03/2021	202103652979005	132211	0,00	3.184.500,00	Jurnal atas realisasi belanja modal peralatan dan mesin dibawah nilai kapitalisasi aset
589	013.05.652979	LEMBAGA PEMASYARAKATAN NARKOTIKA JAKARTA	408	29/03/2021	202103652979004	132211	0,00	3.740.000,00	Jurnal atas realisasi belanja modal peralatan dan mesin dibawah nilai kapitalisasi aset
590	013.05.652979	LEMBAGA PEMASYARAKATAN NARKOTIKA JAKARTA	407	31/12/2021	202112652979006	117911	0,00	3.740.000,00	Belanja Persediaan Yang Membentuk Aset Tetap Peralatan dan Mesin
591	013.05.652979	LEMBAGA PEMASYARAKATAN NARKOTIKA JAKARTA	407	29/03/2021	202103652979002	132211	0,00	1.595.000,00	Jurnal atas realisasi belanja modal peralatan dan mesin dibawah nilai kapitalisasi aset
592	013.05.652983	LEMBAGA PEMASYARAKATAN NARKOTIKA BANDUNG	408	31/12/2021	202112652983001	117911	0,00	4.340.000,00	Belanja Persediaan Yang Membentuk Aset Tetap Peralatan dan Mesin
593	013.05.652983	LEMBAGA PEMASYARAKATAN NARKOTIKA BANDUNG	407	18/10/2021	202110652983002	132211	274.000.000,00	0,00	Jurnal atas penerimaan hibah barang berupa peralatan dan mesin
594	013.05.653112	BALAI PEMASYARAKATAN MUARA BUNGO	407	31/08/2021	202108653112001	131211	66.146.892,00	0,00	Jurnal atas penerimaan hibah barang berupa tanah
595	013.05.653196	BALAI PEMASYARAKATAN SORONG	408	31/12/2021	202112653196001	117911	0,00	2.300.000,00	Belanja Persediaan Yang Membentuk Aset Tetap Peralatan dan Mesin
596	013.05.653353	RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAN NEGARA CILACAP	407	23/06/2021	202106653353007	132211	6.400.000,00	0,00	Jurnal atas penerimaan hibah barang berupa peralatan dan mesin
597	013.05.653403	RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAN NEGARA SANGGAU	408	31/12/2021	202112653403X02	117111	3.703.174,00	0,00	Dampak update aplikasi persediaan
598	013.05.653403	RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAN NEGARA SANGGAU	408	31/12/2021	202112653403X01	117111	0,00	3.703.174,00	Dampak update aplikasi persediaan
599	013.05.662945	RUPBASAN PROBOLINGGO	408	31/12/2021	202112662945001	117911	0,00	600.000,00	Belanja Persediaan Yang Membentuk Aset Tetap Peralatan dan Mesin
600	013.05.663073	RUMAH TAHANAN NEGARA BANDAR LAMPUNG	407	08/11/2021	202111663073004	133211	127.840.000,00	0,00	Jurnal atas penerimaan hibah barang berupa aset gedung dan bangunan
601	013.05.667944	RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS I TANJUNG PINANG	407	31/12/2021	20211266794406	117911	0,00	228.800,00	Belanja Persediaan Yang Membentuk Aset Tetap Peralatan dan Mesin
602	013.05.683327	LAPAS KELAS IIB WARUNG KIARA	408	31/12/2021	202112683327002	117911	0,00	1.855.000,00	Belanja Persediaan Yang Membentuk Aset Tetap Peralatan dan Mesin
603	013.05.683394	RUMAH TAHANAN KELAS IIB GARUT	408	31/12/2021	202112683394002	117911	0,00	500.000,00	Belanja Persediaan Yang Membentuk Aset Tetap Peralatan dan Mesin
604	013.05.683394	RUMAH TAHANAN KELAS IIB GARUT	408	31/12/2021	202112683394001	117911	0,00	5.894.900,00	Belanja Persediaan Yang Membentuk Aset Tetap Peralatan dan Mesin
605	013.05.683572	LAPAS KELAS IIB SOROLANGUN	407	05/04/2021	202104683572004	132211	76.720.000,00	0,00	Jurnal atas penerimaan hibah barang berupa peralatan dan mesin
606	013.05.683572	LAPAS KELAS IIB SOROLANGUN	408	31/12/2021	202112683572002	117911	0,00	3.005.000,00	Belanja Persediaan Yang Membentuk Aset Tetap Peralatan dan Mesin
607	013.05.683572	LAPAS KELAS IIB SOROLANGUN	407	05/04/2021	202104683572002	131211	306.550.000,00	0,00	Jurnal atas penerimaan hibah barang berupa tanah
608	013.05.683572	LAPAS KELAS IIB SOROLANGUN	407	05/04/2021	202104683572003	133211	193.140.000,00	0,00	Jurnal atas penerimaan hibah barang berupa aset gedung dan bangunan
609	013.05.683589	LAPAS KELAS IIA BANYUASIN	407	31/12/2021	2,02113E+14	117911	0,00	1.476.000,00	Belanja Persediaan Yang Membentuk Aset Tetap Peralatan dan Mesin
610	013.05.683589	LAPAS KELAS IIA BANYUASIN	407	31/12/2021	202112683589007	117911	0,00	200.922.500,00	Belanja Persediaan Yang Membentuk Aset Tetap Peralatan dan Mesin
611	013.05.683615	LAPAS KELAS IIA CIKARANG	408	31/12/2021	202112683615004	117911	0,00	4.366.450,00	Belanja Persediaan Yang Membentuk Aset Tetap Peralatan dan Mesin
612	013.05.683615	LAPAS KELAS IIA CIKARANG	408	31/12/2021	202112683615003	117911	0,00	9.900.000,00	Belanja Persediaan Yang Membentuk Aset Tetap Peralatan dan Mesin
613	013.05.683615	LAPAS KELAS IIA CIKARANG	408	31/12/2021	202112683615005	131211	0,00	8.800.000,00	belanja modal pengukuran dan pematangan tanah untuk pengerjaan pematangan jalan pada lapas cikarang yang seharusnya dibelanjakan dengan menggunakan akun 523111

JURNAL TIDAK LAZIM
S.D 31 Desember 2021 (Unduh Data per Tanggal 12 Mei 2022)

No	Kode Satker	Nama Satker	Jenis Dokumen	Tanggal Dokumen	Nomor Dokumen	Akun	Debet	Kredit	Keterangan
614	013.05.683622	LAPAS KELAS IIB BANJAR	407	11/10/2021	202110683622005	133211	42.173.000,00	0,00	Jurnal atas penerimaan hibah barang berupa aset gedung dan bangunan
615	013.05.683622	LAPAS KELAS IIB BANJAR	407	11/10/2021	202110683622006	132211	61.423.500,00	0,00	Jurnal atas penerimaan hibah barang berupa peralatan dan mesin
616	013.05.683622	LAPAS KELAS IIB BANJAR	407	13/12/2021	202112683622008	134212	246.667.000,00	0,00	Belanja Persediaan Yang Membentuk Aset Tetap Peralatan dan Mesin
617	013.05.683622	LAPAS KELAS IIB BANJAR	407	11/10/2021	202110683622004	132211	57.827.000,00	0,00	Jurnal atas penerimaan hibah barang berupa peralatan dan mesin
618	013.05.683643	LAPAS KELAS IIA BONTANG	407	02/03/2021	202103683643006	133211	198.783.994,00	0,00	Jurnal atas penerimaan hibah barang berupa aset gedung dan bangunan
619	013.05.683643	LAPAS KELAS IIA BONTANG	407	02/03/2021	202103683643005	133211	232.654.000,00	0,00	Jurnal atas penerimaan hibah barang berupa aset gedung dan bangunan
620	013.05.683678	LAPAS NARKOTIKA KELAS IIB MUARA SABAK	408	05/10/2021	202110683678002	117911	0,00	900.000,00	Belanja Persediaan Yang Membentuk Aset Tetap Peralatan dan Mesin
621	013.05.683682	LAPAS NARKOTIKA KELAS IIA PANGKAL PINANG	408	31/12/2021	20211268368202	117911	0,00	663.000,00	Belanja Persediaan Yang Membentuk Aset Tetap Peralatan dan Mesin
622	013.05.683682	LAPAS NARKOTIKA KELAS IIA PANGKAL PINANG	408	30/09/2021	20210968368201	132211	0,00	9.000.000,00	Jurnal atas realisasi belanja modal peralatan dan mesin dibawah nilai kapitalisasi aset
623	013.05.683682	LAPAS NARKOTIKA KELAS IIA PANGKAL PINANG	408	31/12/2021	20211268368203	117911	0,00	990.000,00	Belanja Persediaan Yang Membentuk Aset Tetap Peralatan dan Mesin
624	013.05.683711	LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KELAS II BANDUNG PROPINSI JAWA BARAT	408	30/06/2021	20210668371101	117911	0,00	7.263.225,00	Belanja Persediaan Yang Membentuk Aset Tetap Peralatan dan Mesin
625	013.05.683711	LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KELAS II BANDUNG PROPINSI JAWA BARAT	408	30/06/2021	20210668371101	132211	7.263.225,00	0,00	Belanja Persediaan Yang Membentuk Aset Tetap Peralatan dan Mesin
626	013.05.683711	LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KELAS II BANDUNG PROPINSI JAWA BARAT	408	30/06/2021	20210668371102	117911	0,00	1.703.125,00	Belanja Persediaan Yang Membentuk Aset Tetap Peralatan dan Mesin
627	013.05.683732	RUTAN KELAS I PEKANBARU	408	31/12/2021	202112683732001	117911	0,00	40.766.176,00	Belanja Persediaan Yang Membentuk Aset Tetap Peralatan dan Mesin
628	013.05.683746	LAPAS NARKOTIKA KELAS IIA GUNUNG SINDUR	408	31/12/2021	202112683746004	117911	0,00	648.000,00	Belanja Persediaan Yang Membentuk Aset Tetap Peralatan dan Mesin
629	013.05.683767	RUTAN KELAS IIB BINTUNI PROPINSI PAPUA BARAT	408	31/12/2021	202112683767001	117911	0,00	950.000,00	Belanja Persediaan Yang Membentuk Aset Tetap Peralatan dan Mesin
630	013.05.683767	RUTAN KELAS IIB BINTUNI PROPINSI PAPUA BARAT	408	31/12/2021	202112683767003	117911	0,00	1.720.000,00	Belanja Persediaan Yang Membentuk Aset Tetap Peralatan dan Mesin
631	013.05.683767	RUTAN KELAS IIB BINTUNI PROPINSI PAPUA BARAT	408	31/12/2021	202112683767002	117911	0,00	900.000,00	Belanja Persediaan Yang Membentuk Aset Tetap Peralatan dan Mesin
632	013.05.683996	LAPAS NARKOTIKA KELAS IIB BANYUASIN	407	31/12/2021	202112683996005	117911	0,00	83.180.673,00	Belanja Persediaan Yang Membentuk Aset Tetap Peralatan dan Mesin
633	013.05.683996	LAPAS NARKOTIKA KELAS IIB BANYUASIN	407	31/12/2021	202112683996008	117911	0,00	725.000,00	Belanja Persediaan Yang Membentuk Aset Tetap Peralatan dan Mesin
634	013.05.683998	Lapas anak Kelas III Batam	408	30/07/2021	202107683998017	117911	0,00	495.000,00	Belanja Persediaan Yang Membentuk Aset Tetap Peralatan dan Mesin
635	013.05.683998	Lapas anak Kelas III Batam	408	19/08/2021	202108683998018	117911	0,00	450.000,00	Belanja Persediaan Yang Membentuk Aset Tetap Peralatan dan Mesin
636	013.05.683999	Lapas Terbuka Kelas III Rumbai	408	31/12/2021	202112683999001	117911	0,00	79.961.200,00	Belanja Persediaan Yang Membentuk Aset Tetap Peralatan dan Mesin
637	013.05.684003	Rutan Kelas II B Weda	408	31/12/2021	202112684003000	132211	0,00	5.405.000,00	Jurnal atas realisasi belanja modal peralatan dan mesin dibawah nilai kapitalisasi aset
DITJEN IMIGRASI									
638	013.06.109155	KANTOR IMIGRASI KELAS I KHUSUS NON TPI JAKARTA SELATAN	407	30/09/2021	202109109155008	132211	91.940.000,00	0,00	Jurnal atas penerimaan hibah barang berupa peralatan dan mesin
639	013.06.109155	KANTOR IMIGRASI KELAS I KHUSUS NON TPI JAKARTA SELATAN	407	30/09/2021	202109109155009	133211	104.800.000,00	0,00	Jurnal atas penerimaan hibah barang berupa aset gedung dan bangunan

JURNAL TIDAK LAZIM
S.D 31 Desember 2021 (Unduh Data per Tanggal 12 Mei 2022)

No	Kode Satker	Nama Satker	Jenis Dokumen	Tanggal Dokumen	Nomor Dokumen	Akun	Debet	Kredit	Keterangan
640	013.06.109155	KANTOR IMIGRASI KELAS I KHUSUS NON TPI JAKARTA SELATAN	407	31/12/2021	202112109155015	132211	8.000.000,00	0,00	Jurnal atas penerimaan hibah barang berupa peralatan dan mesin
641	013.06.109156	KANTOR IMIGRASI KELAS II NON TPI KUALA TUNGKAL	407	30/09/2021	202109109156002	133211	2.591.438.519,00	0,00	Jurnal atas penerimaan hibah barang berupa aset gedung dan bangunan
642	013.06.109156	KANTOR IMIGRASI KELAS II NON TPI KUALA TUNGKAL	407	30/09/2021	202109109156001	131211	85.123.481,00	0,00	Jurnal atas hibah tanah
643	013.06.109158	KANTOR IMIGRASI KELAS II BATULICIN	408	31/10/2021	202110109158001	132211	0,00	7.028.000,00	Jurnal atas belanja modal peralatan dan mesin yang membentuk aset ekstrakomptabel
644	013.06.109159	KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI TEMBAGAPURA	408	31/12/2021	202112109159X02	117113	352.980,00	0,00	Dampak update aplikasi persediaan
645	013.06.109159	KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI TEMBAGAPURA	408	31/12/2021	202112109159X01	117111	1.900.800,00	0,00	Dampak update aplikasi persediaan
646	013.06.109161	KANTOR IMIGRASI KELAS II NON TPI DABO SINGKEP	408	31/12/2021	202112109161X02	117111	41.147.077,00	0,00	Dampak update aplikasi persediaan
647	013.06.109161	KANTOR IMIGRASI KELAS II NON TPI DABO SINGKEP	408	31/12/2021	202112109161X01	117111	0,00	41.147.077,00	Dampak update aplikasi persediaan
648	013.06.407933	KANTOR IMIGRASI KELAS I NON TPI JAKARTA PUSAT	408	31/12/2021	202112407933001	117911	0,00	20.658.000,00	Jurnal atas belanja persediaan yang membentuk aset ekstrakomptabel
649	013.06.407942	KANTOR IMIGRASI KELAS I KHUSUS NON TPI JAKARTA BARAT	408	31/12/2021	202112407942X02	117111	1.650,00	0,00	Dampak update aplikasi persediaan
650	013.06.407942	KANTOR IMIGRASI KELAS I KHUSUS NON TPI JAKARTA BARAT	408	31/12/2021	202112407942X01	117111	0,00	1.650,00	Dampak update aplikasi persediaan
651	013.06.407958	KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI BANDUNG	407	30/11/2021	202111407958002	133211	140.000.000,00	0,00	Jurnal atas penerimaan hibah barang berupa aset gedung dan bangunan
652	013.06.407958	KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI BANDUNG	407	25/11/2021	202111407958001	132211	215.900.000,00	0,00	Jurnal atas penerimaan hibah barang berupa peralatan dan mesin
653	013.06.407958	KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI BANDUNG	408	31/08/2021	202108407958002	132211	0,00	7.750.000,00	Jurnal atas belanja modal peralatan dan mesin yang membentuk aset ekstrakomptabel
654	013.06.407973	KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI SEMARANG	408	31/12/2021	20211240797302	133211	795.683.187,00	0,00	Jurnal atas penerimaan hibah barang berupa aset gedung dan bangunan
655	013.06.407973	KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI SEMARANG	408	31/12/2021	202112407973001	133211	0,00	795.683.187,00	Jurnal atas penerimaan hibah barang berupa aset gedung dan bangunan
656	013.06.407989	KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI CILACAP	408	14/12/2021	202112407989001	133211	2.787.653,00	0,00	Jurnal atas penerimaan hibah barang berupa aset gedung dan bangunan
657	013.06.407989	KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI CILACAP	407	22/06/2021	20210640798907	132211	6.554.800,00	0,00	Jurnal atas penerimaan hibah barang berupa peralatan dan mesin
658	013.06.407989	KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI CILACAP	407	30/03/2021	20210340798906	132211	12.500.000,00	0,00	Jurnal atas penerimaan hibah barang berupa peralatan dan mesin
659	013.06.407989	KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI CILACAP	407	30/03/2021	20210340798905	132211	15.150.000,00	0,00	Jurnal atas penerimaan hibah barang berupa peralatan dan mesin
660	013.06.408009	KANTOR IMIGRASI KELAS I KHUSUS TPI SURABAYA	407	02/11/2021	202111408009005	133211	253.226.000,00	0,00	Jurnal atas penerimaan hibah barang berupa aset gedung dan bangunan
661	013.06.408009	KANTOR IMIGRASI KELAS I KHUSUS TPI SURABAYA	407	02/11/2021	202111408009007	132211	0,00	1.375.000,00	Jurnal atas belanja modal peralatan dan mesin yang membentuk aset ekstrakomptabel
662	013.06.408009	KANTOR IMIGRASI KELAS I KHUSUS TPI SURABAYA	407	02/11/2021	202111408009006	132211	52.912.000,00	0,00	Jurnal atas penerimaan hibah barang berupa peralatan dan mesin
663	013.06.408015	KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI MALANG	407	31/12/2021	20211240801511	132211	76.602.900,00	0,00	Jurnal atas penerimaan hibah barang berupa peralatan dan mesin
664	013.06.408046	KANTOR IMIGRASI KELAS I KHUSUS TPI MEDAN	408	31/12/2021	202112408046002	132211	0,00	120.718.000,00	Kesalahan penggunaan akun belanja modal peralatan dan mesin yang membentuk aset lainnya
665	013.06.408052	KANTOR IMIGRASI KELAS II NON TPI PEMATANG SIANTAR	407	31/12/2021	202112408052001	132211	469.613.468,00	0,00	Jurnal atas penerimaan hibah barang berupa peralatan dan mesin
666	013.06.408052	KANTOR IMIGRASI KELAS II NON TPI PEMATANG SIANTAR	408	30/11/2021	20211140805200	132211	0,00	942.000,00	Jurnal atas belanja modal peralatan dan mesin yang membentuk aset ekstrakomptabel
667	013.06.408077	KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI BENGKALIS	408	31/12/2021	202112408077001	132211	7.840.000,00	0,00	Kesalahan penggunaan akun belanja persediaan yang membentuk Peralatan dan mesin

JURNAL TIDAK LAZIM
S.D 31 Desember 2021 (Unduh Data per Tanggal 12 Mei 2022)

No	Kode Satker	Nama Satker	Jenis Dokumen	Tanggal Dokumen	Nomor Dokumen	Akun	Debet	Kredit	Keterangan
668	013.06.408077	KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI BENGKALIS	408	31/12/2021	202112408077002	117911	0,00	23.346.000,00	Jurnal atas belanja persediaan yang membentuk aset ekstrakomptabel
669	013.06.408077	KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI BENGKALIS	408	31/12/2021	202112408077001	117911	0,00	7.840.000,00	Kesalahan penggunaan akun belanja persediaan yang membentuk Peralatan dan mesin
670	013.06.408112	KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI TANJUNG BALAI KARIMUN	408	26/11/2021	202111408112001	133211	0,00	18.000.000,00	Jurnal atas hibah yang membentuk aset ekstrakomptabel
671	013.06.408112	KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI TANJUNG BALAI KARIMUN	407	05/08/2021	202108408112005	133211	45.000.000,00	0,00	Jurnal atas penerimaan hibah barang berupa aset gedung dan bangunan
672	013.06.408112	KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI TANJUNG BALAI KARIMUN	407	26/11/2021	202111408112006	133211	18.000.000,00	0,00	Jurnal atas penerimaan hibah barang berupa aset gedung dan bangunan
673	013.06.408112	KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI TANJUNG BALAI KARIMUN	408	31/12/2021	202112408112002	117911	0,00	8.755.000,00	Jurnal atas belanja persediaan yang membentuk aset ekstrakomptabel
674	013.06.408134	KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI JAMBI	408	31/10/2021	202110408134001	132211	0,00	25.157.000,00	Jurnal atas belanja modal peralatan dan mesin yang membentuk aset ekstrakomptabel
675	013.06.408222	KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI DENPASAR	408	29/06/2021	202106408222002	117911	0,00	7.200.000,00	Jurnal atas belanja modal peralatan dan mesin yang membentuk aset ekstrakomptabel
676	013.06.408222	KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI DENPASAR	408	27/08/2021	202108408222004	117911	0,00	7.920.000,00	Jurnal atas belanja modal peralatan dan mesin yang membentuk aset ekstrakomptabel
677	013.06.408222	KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI DENPASAR	408	29/06/2021	202106408222001	117911	0,00	796.400,00	Jurnal atas belanja modal peralatan dan mesin yang membentuk aset ekstrakomptabel
678	013.06.408222	KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI DENPASAR	408	27/10/2021	202110408222005	117911	0,00	1.980.000,00	Jurnal atas belanja modal peralatan dan mesin yang membentuk aset ekstrakomptabel
679	013.06.408222	KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI DENPASAR	408	28/10/2021	202110408222006	117911	0,00	990.000,00	Jurnal atas belanja modal peralatan dan mesin yang membentuk aset ekstrakomptabel
680	013.06.408222	KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI DENPASAR	408	27/07/2021	202107408222003	117911	0,00	2.590.000,00	Jurnal atas belanja modal peralatan dan mesin yang membentuk aset ekstrakomptabel
681	013.06.408231	KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI KUPANG	408	31/12/2021	202112408231002	132211	1.750.000,00	0,00	Jurnal atas penerimaan hibah barang berupa peralatan dan mesin
682	013.06.408253	KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI JAYAPURA	407	30/11/2021	202111408253001	132211	0,00	28.215.000,00	Jurnal atas belanja modal peralatan dan mesin yang membentuk aset ekstrakomptabel
683	013.06.408262	KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI BIAK	408	31/12/2021	202112408262001	117911	0,00	4.200.000,00	Jurnal atas belanja persediaan yang membentuk aset peralatan dan mesin
684	013.06.408262	KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI BIAK	408	31/12/2021	202112408262001	132211	4.200.000,00	0,00	Jurnal atas belanja persediaan yang membentuk aset peralatan dan mesin
685	013.06.408278	KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI SORONG	407	16/11/2021	20211140827801	132211	1.500.000,00	0,00	Jurnal atas penerimaan hibah barang berupa peralatan dan mesin
686	013.06.408278	KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI SORONG	408	31/12/2021	202112408278001	132211	0,00	8.314.800,00	Jurnal atas belanja modal peralatan dan mesin yang membentuk aset ekstrakomptabel
687	013.06.408335	PERWAKILAN IMIGRASI DI HONGKONG	408	31/12/2021	202112408335004	132211	0,00	429.702,00	Jurnal atas belanja modal peralatan dan mesin yang membentuk aset ekstrakomptabel
688	013.06.408335	PERWAKILAN IMIGRASI DI HONGKONG	408	31/12/2021	202112408335003	132211	124.941.389,00	0,00	Jurnal atas penerimaan hibah barang berupa peralatan dan mesin
689	013.06.408360	PERWAKILAN IMIGRASI DI DAVAO	408	31/12/2021	202112408360003	132211	0,00	2.093.063,00	Kesalahan penggunaan akun belanja Covid menggunakan belanja modal peralatan dan mesin
690	013.06.408423	KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI PALU	408	31/12/2021	202112408423003	132211	0,00	800.000,00	Jurnal atas belanja modal peralatan dan mesin yang membentuk aset ekstrakomptabel
691	013.06.408423	KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI PALU	408	30/11/2021	202111408423001	132211	0,00	99.994.767,00	Jurnal atas belanja modal peralatan dan mesin yang membentuk aset ekstrakomptabel
692	013.06.408423	KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI PALU	408	31/12/2021	202112408423005	133211	1.984.230.931,00	0,00	Koreksi selisih progress fisik dengan pembayaran (KDP)
693	013.06.408423	KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI PALU	408	31/12/2021	202112408423004	133211	0,00	1.984.230.931,00	Koreksi selisih progress fisik dengan pembayaran (KDP)
694	013.06.408423	KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI PALU	408	31/12/2021	202112408423002	132211	0,00	39.310.000,00	Jurnal atas belanja modal peralatan dan mesin yang membentuk aset ekstrakomptabel
695	013.06.408485	KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI TEMBILAHAN	407	22/12/2021	20211240848501	133211	121.600.000,00	0,00	Jurnal atas penerimaan hibah barang berupa aset gedung dan bangunan
696	013.06.408485	KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI TEMBILAHAN	407	06/10/2021	202110408485001	132211	0,00	16.300.000,00	Jurnal atas belanja modal peralatan dan mesin yang membentuk aset ekstrakomptabel

JURNAL TIDAK LAZIM
S.D 31 Desember 2021 (Unduh Data per Tanggal 12 Mei 2022)

No	Kode Satker	Nama Satker	Jenis Dokumen	Tanggal Dokumen	Nomor Dokumen	Akun	Debet	Kredit	Keterangan
697	013.06.408542	KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI JAKARTA TIMUR	407	31/07/2021	202107408542004	132211	0,00	22.990.000,00	Jurnal atas belanja modal peralatan dan mesin yang membentuk aset ekstrakomptabel
698	013.06.408618	KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI MANADO	408	19/11/2021	202111408618001	132211	0,00	7.128.000,00	Jurnal atas belanja modal peralatan dan mesin yang membentuk aset ekstrakomptabel
699	013.06.408624	KANTOR IMIGRASI KELAS I KHUSUS TPI BATAM	407	02/02/2021	202102408624001	133211	150.000.000,00	0,00	Jurnal atas penerimaan hibah barang berupa aset gedung dan bangunan
700	013.06.408624	KANTOR IMIGRASI KELAS I KHUSUS TPI BATAM	407	18/05/2021	202105408624004	133211	172.000.000,00	0,00	Jurnal atas penerimaan hibah barang berupa aset gedung dan bangunan
701	013.06.408922	KANTOR IMIGRASI KELAS I KHUSUS TPI SOEKARNO HATTA	407	22/10/2021	202110408922013	132211	114.000.000,00	0,00	Jurnal atas penerimaan hibah barang berupa peralatan dan mesin
702	013.06.408922	KANTOR IMIGRASI KELAS I KHUSUS TPI SOEKARNO HATTA	407	28/10/2021	202110408922014	133211	470.000.000,00	0,00	Jurnal atas penerimaan hibah barang berupa aset gedung dan bangunan
703	013.06.408938	KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI CILEGON	407	31/12/2021	202112408938012	133211	47.850.000,00	0,00	Jurnal atas penerimaan hibah barang berupa aset gedung dan bangunan
704	013.06.409020	KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI TAREMPA	408	31/12/2021	202112409020001	132211	0,00	7.150.000,00	Jurnal atas belanja modal peralatan dan mesin yang membentuk aset ekstrakomptabel
705	013.06.409057	KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI RANAI	408	01/11/2021	202111409057001	132211	0,00	8.950.000,00	Jurnal atas belanja modal peralatan dan mesin yang membentuk aset ekstrakomptabel
706	013.06.409057	KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI RANAI	408	01/11/2021	202111409057002	132211	0,00	4.320.000,00	Jurnal atas belanja modal peralatan dan mesin yang membentuk aset ekstrakomptabel
707	013.06.409057	KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI RANAI	408	01/11/2021	202111409057003	132211	0,00	4.035.000,00	Jurnal atas belanja modal peralatan dan mesin yang membentuk aset ekstrakomptabel
708	013.06.409088	KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI NUNUKAN	407	27/12/2021	202112409088007	132211	26.700.000,00	0,00	Jurnal atas penerimaan hibah barang berupa peralatan dan mesin
709	013.06.409094	KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI BITUNG	408	30/09/2021	2,02109E+13	132211	0,00	643.300,00	Jurnal atas belanja modal peralatan dan mesin yang membentuk aset ekstrakomptabel
710	013.06.409123	KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI MAUMERE	408	26/03/2021	202103409123001	132211	0,00	1.600.000,00	Jurnal atas belanja modal peralatan dan mesin yang membentuk aset ekstrakomptabel
711	013.06.409272	DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI	408	31/12/2021	202112409272005	132211	0,00	12.606.000,00	Jurnal atas belanja modal peralatan dan mesin yang membentuk aset ekstrakomptabel
712	013.06.409272	DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI	408	31/12/2021	202112409272006	133211	176.183.000,00	0,00	Koreksi atas Paket Pekerjaan Plafond menggunakan akun pemeliharaan yang seharusnya menjadi Gedung dan Bangunan
713	013.06.409272	DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI	408	31/12/2021	202112409272001	117911	184.344.655,00	0,00	Kesalahan penggunaan akun belanja non operasional lainnya yang membentuk persediaan
714	013.06.409272	DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI	408	31/12/2021	202112409272002	117911	0,00	49.885.000,00	Jurnal atas belanja persediaan yang membentuk aset ekstrakomptabel
715	013.06.409272	DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI	408	31/12/2021	202112409272007	132211	5.703.788.800,00	0,00	Koreksi atas progres pekerjaan pengadaan Air Handling Unit
716	013.06.409272	DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI	408	31/12/2021	202112409272003	117911	175.414,00	0,00	Jurnal atas koreksi persediaan yang disebabkan adanya pembulatan persediaan
717	013.06.409272	DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI	408	31/12/2021	202112409272004	132211	0,00	159.049.000,00	Kesalahan penggunaan akun modal peralatan dan mesin yang membentuk aset lainnya
718	013.06.409272	DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI	407	31/12/2021	202112409272035	132211	0,00	5.703.788.800,00	Koreksi atas progres pekerjaan pengadaan Air Handling Unit
719	013.06.409272	DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI	407	01/10/2021	202110409272023	132211	32.575.746.352,00	0,00	Jurnal atas penerimaan hibah barang berupa peralatan dan mesin
720	013.06.418936	KANTOR IMIGRASI KELAS III NON TPI KETAPANG	408	31/12/2021	202112418936X01	117111	0,00	100.278.486,00	Dampak update aplikasi persediaan
721	013.06.418936	KANTOR IMIGRASI KELAS III NON TPI KETAPANG	408	31/12/2021	202112418936X02	117111	100.278.486,00	0,00	Dampak update aplikasi persediaan
722	013.06.418938	KANTOR IMIGRASI KELAS III NON TPI BIMA	408	31/12/2021	202112418938X04	117111	0,00	356.050.212,00	Dampak update aplikasi persediaan
723	013.06.418938	KANTOR IMIGRASI KELAS III NON TPI BIMA	408	31/12/2021	202112418938X02	117111	356.050.212,00	0,00	Dampak update aplikasi persediaan
724	013.06.418938	KANTOR IMIGRASI KELAS III NON TPI BIMA	408	19/07/2021	202107418938001	132211	0,00	8.162.000,00	Jurnal atas belanja modal peralatan dan mesin yang membentuk aset ekstrakomptabel
725	013.06.418938	KANTOR IMIGRASI KELAS III NON TPI BIMA	408	29/11/2021	20211141893802	133211	77.945.215,00	0,00	Jurnal atas penerimaan hibah barang berupa aset gedung dan bangunan

JURNAL TIDAK LAZIM
S.D 31 Desember 2021 (Unduh Data per Tanggal 12 Mei 2022)

No	Kode Satker	Nama Satker	Jenis Dokumen	Tanggal Dokumen	Nomor Dokumen	Akun	Debet	Kredit	Keterangan
726	013.06.418938	KANTOR IMIGRASI KELAS III NON TPI BIMA	408	31/12/2021	202112418938X01	117111	0,00	356.050.212,00	Dampak update aplikasi persediaan
727	013.06.418938	KANTOR IMIGRASI KELAS III NON TPI BIMA	408	31/12/2021	202112418938X03	117111	356.050.212,00	0,00	Dampak update aplikasi persediaan
728	013.06.480505	KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI TERNATE	408	31/12/2021	202112480505005	117911	0,00	1.046.200,00	Jurnal atas belanja modal peralatan dan mesin yang membentuk aset ekstrakomptabel
729	013.06.498382	KANTOR IMIGRASI KELAS II NON TPI DEPOK	408	30/10/2021	202110498382001	131211	781.200.000,00	0,00	Jurnal atas penerimaan hibah barang berupa peralatan dan mesin
730	013.06.498418	KANTOR IMIGRASI KELAS II NON TPI MAMUJU	407	30/03/2021	202103498418003	132211	0,00	4.254.800,00	Jurnal atas belanja modal peralatan dan mesin yang membentuk aset ekstrakomptabel
731	013.06.498418	KANTOR IMIGRASI KELAS II NON TPI MAMUJU	408	31/10/2021	202110498418001	117911	0,00	389.143,00	Jurnal atas belanja modal peralatan dan mesin yang membentuk aset ekstrakomptabel
732	013.06.652276	KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI JAKARTA UTARA	408	31/12/2021	202112652276001	117911	0,00	2.587.000,00	Kesalahan penggunaan akun belanja persediaan yang membentuk Peralatan dan mesin
733	013.06.652276	KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI JAKARTA UTARA	408	31/12/2021	202112652276002	117911	0,00	1.264.000,00	Jurnal atas belanja modal peralatan dan mesin yang membentuk aset ekstrakomptabel
734	013.06.652276	KANTOR IMIGRASI KELAS I TPI JAKARTA UTARA	408	31/12/2021	202112652276001	132211	2.587.000,00	0,00	Kesalahan penggunaan akun belanja persediaan yang membentuk Peralatan dan mesin
735	013.06.652283	KANTOR IMIGRASI KELAS I NON TPI SERANG	408	31/12/2021	20211265228301	132211	0,00	745.000,00	Jurnal atas belanja modal peralatan dan mesin yang membentuk aset ekstrakomptabel
736	013.06.652302	KANTOR IMIGRASI KELAS II NON TPI KARAWANG	408	31/12/2021	202112652302009	132211	18.000,00	0,00	Jurnal atas penerimaan hibah barang berupa peralatan dan mesin
737	013.06.652323	KANTOR IMIGRASI KELAS II NON TPI PEMALANG	408	31/12/2021	202112652323002	133211	225.000,00	0,00	Jurnal atas penerimaan hibah barang berupa aset gedung dan bangunan
738	013.06.652323	KANTOR IMIGRASI KELAS II NON TPI PEMALANG	408	31/12/2021	202112652323003	117911	0,00	1.525.000,00	Jurnal atas belanja persediaan yang membentuk aset ekstrakomptabel
739	013.06.652323	KANTOR IMIGRASI KELAS II NON TPI PEMALANG	408	31/12/2021	202112652323001	132211	7.743.314,00	0,00	Jurnal atas penerimaan hibah barang berupa peralatan dan mesin
740	013.06.652365	KANTOR IMIGRASI KELAS II NON TPI MADIUN	407	22/07/2021	2021076523659	133211	60.100.000,00	0,00	Jurnal atas penerimaan hibah barang berupa aset gedung dan bangunan
741	013.06.652365	KANTOR IMIGRASI KELAS II NON TPI MADIUN	408	31/12/2021	20211265236505	117911	0,00	1.980.000,00	Jurnal atas belanja persediaan yang membentuk aset ekstrakomptabel
742	013.06.652372	KANTOR IMIGRASI KELAS II NON TPI BLITAR	407	31/12/2021	20211265237209	132211	1.750.000,00	0,00	Jurnal atas penerimaan hibah barang berupa peralatan dan mesin
743	013.06.652372	KANTOR IMIGRASI KELAS II NON TPI BLITAR	407	31/12/2021	20211265237208	132211	1.890.000,00	0,00	Jurnal atas penerimaan hibah barang berupa peralatan dan mesin
744	013.06.652372	KANTOR IMIGRASI KELAS II NON TPI BLITAR	407	31/12/2021	20211265237207	133211	26.000.000,00	0,00	Jurnal atas penerimaan hibah barang berupa aset gedung dan bangunan
745	013.06.662952	KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI TUAL	408	31/12/2021	202112662952001	131211	73.856.000,00	0,00	Jurnal atas penerimaan hibah barang berupa tanah
746	013.06.662952	KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI TUAL	407	27/10/2021	202110662952005	132211	0,00	33.000.000,00	Jurnal atas belanja modal peralatan dan mesin yang membentuk aset ekstrakomptabel
747	013.06.662968	KANTOR IMIGRASI KELAS II NON TPI TOBELO	407	18/03/2021	202103662968001	132211	130.700.000,00	0,00	Jurnal atas penerimaan hibah barang berupa peralatan dan mesin
748	013.06.662968	KANTOR IMIGRASI KELAS II NON TPI TOBELO	408	31/07/2021	202107662968001	132211	0,00	11.000.000,00	Jurnal atas belanja modal peralatan dan mesin yang membentuk aset ekstrakomptabel
749	013.06.664565	KANTOR IMIGRASI KELAS II NON TPI MUARA ENIM	408	31/07/2021	20210766456501	132211	0,00	11.060.000,00	Jurnal atas belanja modal peralatan dan mesin yang membentuk aset ekstrakomptabel
750	013.06.664565	KANTOR IMIGRASI KELAS II NON TPI MUARA ENIM	407	31/12/2021	20211266456501	132211	236.300.000,00	0,00	Jurnal atas penerimaan hibah barang berupa peralatan dan mesin
751	013.06.664572	KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI TAHUNA	407	31/08/2021	202108664572001	133211	89.700.000,00	0,00	Jurnal atas penerimaan hibah barang berupa aset gedung dan bangunan
752	013.06.664612	RUMAH DETENSI IMIGRASI JAKARTA	407	30/03/2021	202103664612003	132211	35.100.000,00	0,00	Jurnal atas penerimaan hibah barang berupa peralatan dan mesin
753	013.06.664612	RUMAH DETENSI IMIGRASI JAKARTA	407	30/03/2021	202103664612004	133211	1.439.000.000,00	0,00	Jurnal atas penerimaan hibah barang berupa aset gedung dan bangunan
754	013.06.664661	RUMAH DETENSI IMIGRASI MANADO	408	30/06/2021	202106664661001	132211	0,00	11.154.000,00	Jurnal atas belanja modal peralatan dan mesin yang membentuk aset ekstrakomptabel
755	013.06.664696	RUMAH DETENSI IMIGRASI KUPANG	408	31/12/2021	20211266469601	117911	0,00	1.725.000,00	Jurnal atas belanja modal peralatan dan mesin yang membentuk aset ekstrakomptabel

JURNAL TIDAK LAZIM
S.D 31 Desember 2021 (Unduh Data per Tanggal 12 Mei 2022)

No	Kode Satker	Nama Satker	Jenis Dokumen	Tanggal Dokumen	Nomor Dokumen	Akun	Debet	Kredit	Keterangan
756	013.06.677181	RUMAH DETENSI IMIGRASI PUSAT TANJUNG PINANG	407	16/06/2021	202106677181010	132211	3.600.000,00	0,00	Jurnal atas penerimaan hibah barang berupa peralatan dan mesin
757	013.06.677181	RUMAH DETENSI IMIGRASI PUSAT TANJUNG PINANG	407	16/06/2021	202106677181007	132211	6.200.000,00	0,00	Jurnal atas penerimaan hibah barang berupa peralatan dan mesin
758	013.06.677181	RUMAH DETENSI IMIGRASI PUSAT TANJUNG PINANG	407	16/06/2021	202106677181009	132211	5.650.000,00	0,00	Jurnal atas penerimaan hibah barang berupa peralatan dan mesin
759	013.06.677181	RUMAH DETENSI IMIGRASI PUSAT TANJUNG PINANG	407	16/06/2021	202106677181008	132211	5.050.000,00	0,00	Jurnal atas penerimaan hibah barang berupa peralatan dan mesin
760	013.06.683547	KANTOR IMIGRASI KELAS III TPI LABUAN BAJO	407	01/09/2021	20210968354703	132211	12.000.000,00	0,00	Jurnal atas penerimaan hibah barang berupa peralatan dan mesin
761	013.06.683547	KANTOR IMIGRASI KELAS III TPI LABUAN BAJO	407	28/09/2021	20210968354702	132211	8.000.000,00	0,00	Jurnal atas penerimaan hibah barang berupa peralatan dan mesin
762	013.06.683547	KANTOR IMIGRASI KELAS III TPI LABUAN BAJO	408	31/12/2021	20211268354703	117911	0,00	7.803.000,00	Jurnal atas belanja persediaan yang membentuk aset ekstrakompabel
763	013.06.683547	KANTOR IMIGRASI KELAS III TPI LABUAN BAJO	408	31/12/2021	20211268354705	132211	267.750,00	0,00	Jurnal atas penerimaan hibah barang berupa peralatan dan mesin
764	013.06.684006	KANTOR IMIGRASI KELAS III NON TPI PONOROGO	408	08/09/2021	202109684006001	133211	172.543.000,00	0,00	Jurnal atas penerimaan hibah barang berupa aset gedung dan bangunan
765	013.06.686549	KANTOR IMIGRASI KELAS III NON TPI WAKATOB	408	31/12/2021	202112686549X01	117111	0,00	3.312.617,00	Dampak update aplikasi persediaan
766	013.06.686549	KANTOR IMIGRASI KELAS III NON TPI WAKATOB	408	31/12/2021	202112686549X02	117111	3.312.617,00	0,00	Dampak update aplikasi persediaan
767	013.06.686570	KANTOR IMIGRASI KELAS III NON TPI BANGGAI	407	16/11/2021	202111686570160	131211	71.732.741,00	0,00	Jurnal atas penerimaan hibah tanah
768	013.06.686570	KANTOR IMIGRASI KELAS III NON TPI BANGGAI	407	27/12/2021	202112686570194	131211	1.920.000.000,00	0,00	Jurnal atas penerimaan hibah tanah
DITJEN KEKAYAAN INTELEKTUAL									
769	013.07.097102	DITJEN KEKAYAAN INTELEKTUAL	407	31/12/2021	20211209710265	132211	0,00	2.858.350.000,00	b,modal dibayar dimuka atas sisa pengadaan Gd DJKI It.5 TA 2022
770	013.07.097102	DITJEN KEKAYAAN INTELEKTUAL	407	31/12/2021	20211209710249	132211	0,00	76.113.500,00	Aset Ekstrakompatabel PM
771	013.07.097102	DITJEN KEKAYAAN INTELEKTUAL	407	31/12/2021	20211209710269	132211	0,00	52.030.000,00	koreksi kesalahan akun atas belanja lisensi Adobe creative cloud
772	013.07.097102	DITJEN KEKAYAAN INTELEKTUAL	407	31/12/2021	20211209710264	132211	0,00	3.403.500.100,00	b,modal dibayar dimuka atas sisa pengadaan TIK data Center TA 2021
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA									
773	013.12.108266	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA	408	31/12/2021	202112108266002	133211	9.830.000,00	0,00	gedung dan bangunan belum diregister dikarenakan kesalahan penggunaan akun aset sehingga dilakukan koreksi nilai aset non revaluasi
774	013.12.108266	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA	408	31/12/2021	202112108266003	117911	0,00	12.187.980,00	Jurnal atas Persediaan Yang Belum Diregister membentuk ekstrakompatabel
775	013.12.108266	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA	407	18/11/2021	202111108266002	132211	0,00	26.257.000,00	pengembalian belanja yang membentuk aset gedung dan bangunan
776	013.12.108266	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA	408	30/06/2021	202106108266001	133211	1.275.000,00	0,00	pengembalian honor pokja pembangunan Politeknik di Tangerang.
777	013.12.404309	POLITEKNIK ILMU PEMASYARAKATAN	408	31/12/2021	202112404309003	132211	59.256.000,00	0,00	peralatan dan mesin belum diregister karena pembelian aset di bawah nilai kapitalias
778	013.12.404309	POLITEKNIK ILMU PEMASYARAKATAN	407	31/08/2021	202108404309003	132211	0,00	13.898.500,00	peralatan dan mesin belum diregister karena pembelian aset di bawah nilai kapitalias
779	013.12.404309	POLITEKNIK ILMU PEMASYARAKATAN	407	30/09/2021	202109404309004	132211	0,00	15.675.000,00	peralatan dan mesin belum diregister karena pembelian aset di bawah nilai kapitalias
780	013.12.409155	BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN HUKUM DAN HAM KEPULAUAN RIAU	407	01/11/2021	202111409155107	132211	23.000.000,00	0,00	hibah satu motor dari bank Mandiri
781	013.12.409159	BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN HUKUM DAN HAM SULAWESI UTARA	408	31/12/2021	20211240915901	133211	0,00	1.034.418.773,00	Koreksi selisih progress fisik dengan pembayaran (KDP)

JURNAL TIDAK LAZIM
S.D 31 Desember 2021 (Unduh Data per Tanggal 12 Mei 2022)

No	Kode Satker	Nama Satker	Jenis Dokumen	Tanggal Dokumen	Nomor Dokumen	Akun	Debet	Kredit	Keterangan
782	013.12.409159	BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN HUKUM DAN HAM SULAWESI UTARA	408	31/12/2021	20211240915902	133211	1.034.418.773,00	0,00	Koreksi selisih progress fisik dengan pembayaran (KDP)

RINCIAN MUTASI UANG PIHAK KETIGA (KHUSUS SATKER BALAI HARTA PENINGGALAN)
TA. 2021

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM

NO	NAMA SATKER	URAIAN	SALDO AWAL	MUTASI KURANG	MUTASI TAMBAH		SALDO
				KLAIM/PNBP/ PAJAK/SETOR JASA GIRO	TRANSFER MASUK / HASIL PENJUALAN / HASIL SEWA	JASA GIRO	
1	Balai Harta Peninggalan Makassar	Harta Tidak Hadir (Afwezighed)	155.575.431,00	0,00	0,00	0,00	155.575.431,00
2		Harta Tak Terurus (Onbeheerde)	20.150.379,00	0,00	0,00	0,00	20.150.379,00
3		Harta Lain (Harta Belum Terbagi dan Harta Milik Kanak-Kanak)	13.884.594,00	0,00	0,00	0,00	13.884.594,00
4	Balai Harta Peninggalan Medan		1.773.427.658,02	84.567,92	0,00	6.087.212,31	1.779.430.302,41
5	Balai Harta Peninggalan Semarang	WILHELMINA V GELDER	139.456.506,00	0,00	0,00	225.042,00	139.681.548,00
6		PT NGOO HOK	117.104.490,00	0,00	0,00	188.973,00	117.293.463,00
7		REBONO RADIN	885.442.103,00	0,00	0,00	1.428.847,00	886.870.950,00
8		ONG LIES NIO, TAN LAK WIE Janda ONG KIEM JAN, ONG MEI LIE	234.725.128,00	0,00	0,00	378.778,00	235.103.906,00
9		LIE TJIANG TJOE NIO	80.737.920,00	0,00	0,00	130.288,00	80.868.208,00
10		LIE TJIANG SIEM NIO	80.737.920,00	0,00	0,00	130.288,00	80.868.208,00
11		SETYAWATI	65.266.209,00	0,00	0,00	105.321,00	65.371.530,00
12		MARIMAN	7.738.630,00	0,00	0,00	12.488,00	7.751.118,00
13		MAT PAKRUR	304.880,00	0,00	0,00	492,00	305.372,00
14		LINA APPRILIYANTI	44.028.843,00	0,00	0,00	71.050,00	44.099.893,00
15		PHYPPES	33.925.990,00	0,00	0,00	54.747,00	33.980.737,00
16		TAN ING TJOEN	34.051.131,00	0,00	0,00	54.949,00	34.106.080,00
17		THENG YOU WAN	33.916.436,00	0,00	0,00	54.731,00	33.971.167,00
18		MTH. KESSING	235.241.809,00	0,00	0,00	379.612,00	235.621.421,00
19		NJOO TAMBAH NIO	53.449.448,00	0,00	0,00	86.252,00	53.535.700,00
20		SUTAPA WIGAGANAPUTRA	35.037.577,00	0,00	0,00	56.540,00	35.094.117,00
21	Balai Harta Peninggalan Surabaya	Jasa Giro Januari 2021	25.359.627.711,24	0,00	0,00	40.922.796,51	25.400.550.507,75
22		Sewa Afwezigh Ali Moetlik Alkatiri Maret 2020- Februari 2021	25.400.550.507,75	0,00	6.000.000,00		25.406.550.507,75
23		Jasa Giro Februari 2021	25.406.550.507,75	0,00	0,00	37.029.980,48	25.443.580.488,23
24		Sewa Afwezigh Sjech Mohammad Bin Abubakar Januari 2021-Juni 2021	25.443.580.488,23	0,00	600.000,00		25.444.180.488,23
25		Sewa Afwezigh Ali Moetlik Alkatiri Maret 2021- Februari 2022	25.444.180.488,23	0,00	6.600.000,00		25.450.780.488,23
26		Jasa Giro Maret 2021	25.450.780.488,23	0,00	0,00	41.061.519,21	25.491.842.007,44

NO	NAMA SATKER	URAIAN	SALDO AWAL	MUTASI KURANG	MUTASI TAMBAH		SALDO
				KLAIM/PNBP/ PAJAK/SETOR JASA GIRO	TRANSFER MASUK / HASIL PENJUALAN / HASIL SEWA	JASA GIRO	
27	Balai Harta Peninggalan Surabaya	Sewa Afwezig Madie Sjech Hasan Bin Achmad Mei 2020-Maret 2021	25.491.842.007,44	0,00	2.200.000,00		25.494.042.007,44
28		Sewa Afwezig Stichting Boen Sin Kong Soe April 2020-Maret 2021	25.494.042.007,44	0,00	6.000.000,00		25.500.042.007,44
29		Jasa Giro April 2021	25.500.042.007,44	0,00	0,00	39.816.122,05	25.539.858.129,49
30		Jasa Giro Mei 2021	25.539.858.129,49	0,00	0,00	41.213.634,09	25.581.071.763,58
31		Jasa Giro Juni 2021	25.581.071.763,58	0,00	0,00	39.948.523,04	25.621.020.286,62
32		Jasa Giro Juli 2021	25.621.020.286,62	0,00	0,00	41.344.605,35	25.662.364.891,97
33		Sewa Afwezig Lauw Siang Khing Jl. Klimbungan November 2021-Oktober 2022	25.662.364.891,97	0,00	6.000.000,00		25.668.364.891,97
34		Sewa Afwezig Lauw Siang Khing Jl. Jagalan Januari-Desember 2022	25.668.364.891,97	0,00	6.600.000,00		25.674.964.891,97
35		Sewa Afwezig Tjoo Tek Gan April 2021-Maret 2022	25.674.964.891,97	0,00	4.200.000,00		25.679.164.891,97
36		Jasa Giro Agustus 2021	25.679.164.891,97	0,00	0,00	41.421.817,33	25.720.586.709,30
37		Setor 30 tahun	25.720.586.709,30	173.644.367,84	0,00	0,00	25.546.942.341,46
38		Setor Pajak Afwezig Oetami Mudjiani	25.546.942.341,46	52.424.375,00	0,00	0,00	25.494.517.966,46
39		Jasa Giro September 2021	25.494.517.966,46	0,00	0,00	39.873.393,52	25.534.391.359,98
40		Jasa Giro Oktober 2021	25.534.391.359,98	0,00	0,00	41.204.812,37	25.575.596.172,35
41		Jasa Giro November 2021	25.575.596.172,35	0,00	0,00	39.939.972,11	25.615.536.144,46
42		Sewa HTK Dr. Agus Kusumo Januari-Desember 2021	25.615.536.144,46	0,00	4.200.000,00		25.619.736.144,46
43		Jasa Giro Desember 2021	25.619.736.144,46	0,00	0,00	41.339.690,94	25.661.075.835,40
44	Balai Harta Peninggalan Jakarta	TRANSFER DANA	34.470.956.345,93	27.285.831,96	8.526.203.977,00	601.577.449,95	43.571.451.940,92
45		PERWALIAN	509.859.914,49	22.814.010,00	0,00	8.278.856,98	495.324.761,47
46		ONBEHERDE (Harta Tak terurus)	4.174.943.894,93	0,00	0,00	67.790.705,80	4.242.734.600,73
47		AFWEIZIGHEID (Harta Tidak Hadir)	22.086.326.430,41	0,00	0,00	361.687.309,80	22.448.013.740,21

RINCIAN MUTASI UANG PAILIT (KHUSUS SATKER BALAI HARTA PENINGGALAN)
TA. 2021

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM

NO	NAMA SATKER	URAIAN	SALDO AWAL	MUTASI KURANG	MUTASI TAMBAH		SALDO
				KLAIM/PNBP/ PAJAK/SETOR JASA GIRO	TRANSFER MASUK / HASIL PENJUALAN / HASIL SEWA	JASA GIRO	
1	Balai Harta Peninggalan Makassar	Michael Stephen (Kepailitan)	1.207.287,00	0,00	0,00	0,00	1.207.287,00
2		Agung Jaya Matra (Kepailitan)	2.602.023,00	0,00	0,00	0,00	2.602.023,00
3		CV. Nelly Garment (Kepailitan)	23.064.840,00	0,00	0,00	0,00	23.064.840,00
4		Tuan Jauw To Boen (Kepailitan)	1.723.598,00	0,00	0,00	0,00	1.723.598,00
5		KSU.Anugrah Bersama (Kepailitan)	1.052.688,00	0,00	0,00	0,00	1.052.688,00
6	Balai Harta Peninggalan Medan		1.352.690.703,00	13.260.000,00	811.872.700,00	0,00	2.151.303.403,00
7	Balai Harta Peninggalan Surabaya	Pembagian Kreditur Konkuren Pailit CV. Timika Sejahtera	3.327.507.338,52	2.291.451,72	0,00	0,00	3.325.215.886,80
8		Pembayaran KJPP penilaian harta pailit CV. New Intertex	3.325.215.886,80	33.000.000,00	0,00	0,00	3.292.215.886,80
9		Pembayaran PBB 2017-2021 harta pailit CV. New Intertex	3.292.215.886,80	11.111.624,00	0,00	0,00	3.281.104.262,80
10		Pembayaran tagihan PDAM harta pailit CV. New Intertex	3.281.104.262,80	1.930.200,00	0,00	0,00	3.279.174.062,80
11		Pembayaran tagihan PDAM bulan Juni 2021 harta pailit CV. New Intertex	3.279.174.062,80	38.400,00	0,00	0,00	3.279.135.662,80
12		Pembayaran tagihan listrik harta pailit CV. New Intertex	3.279.135.662,80	1.403.553,00	0,00	0,00	3.277.732.109,80
13		Pemblokiran dan Pemindahbukuan rekening pailit CV. Greenleaf Indonesia	3.277.732.109,80	0,00	2.340.406,62	0,00	3.280.072.516,42
14		Jasa Kurator Pailit Koperasi Serba Usaha Montana Hotel	3.280.072.516,42	0,00	1.800.000,00	0,00	3.281.872.516,42
15		Jasa Kurator Pailit Koperasi Serba Usaha Montana Hotel	3.281.872.516,42	0,00	1.200.000,00	0,00	3.283.072.516,42
16		Jasa Kurator Pailit Koperasi Serba Usaha Montana Hotel	3.283.072.516,42	1.800.000,00	0,00	0,00	3.281.272.516,42
17		Jasa Kurator Pailit Koperasi Serba Usaha Montana Hotel	3.281.272.516,42	1.200.000,00	0,00	0,00	3.280.072.516,42
18		Pembayaran kebersihan harta pailit CV. New Intertex	3.280.072.516,42	600.000,00	0,00	0,00	3.279.472.516,42
19		Pembayaran kebersihan harta pailit CV. New Intertex	3.279.472.516,42	600.000,00	0,00	0,00	3.278.872.516,42
20		Pembayaran asuransi kebakaran CV. New Intertex	3.278.872.516,42	4.088.078,60	0,00	0,00	3.274.784.437,82
21		Angsuran PNBP Montana Hotel	3.274.784.437,82	0,00	2.400.000,00	0,00	3.277.184.437,82
22		Setor PNBP Montana Hotel	3.277.184.437,82	2.400.000,00	0,00	0,00	3.274.784.437,82
23		Pemindahbukuan rekening Koperasi Mandiri Artha Makmur	3.274.784.437,82	0,00	765.419,32	0,00	3.275.549.857,14
24		Pembayaran PBB 2006-2021 harta pailit CV. New Intertex	3.275.549.857,14	1.318.280,00	0,00	0,00	3.274.231.577,14
25		Pembayaran DP 10% pembelian dibawah tangan harta pailit CV. New Intertex	3.274.231.577,14	0,00	124.050.000,00	0,00	3.398.281.577,14

NO	NAMA SATKER	URAIAN	SALDO AWAL	MUTASI KURANG	MUTASI TAMBAH		SALDO
				KLAIM/PNBP/ PAJAK/SETOR JASA GIRO	TRANSFER MASUK / HASIL PENJUALAN / HASIL SEWA	JASA GIRO	
26	Balai Harta Peninggalan Surabaya	Pelunasan pembelian dibawah tangan harta pailit CV. New Intertex	3.398.281.577,14	0,00	1.116.450.000,00	0,00	4.514.731.577,14
27		Pembayaran PPh Final penjualan harta pailit CV. New Intertex	4.514.731.577,14	31.012.500,00	0,00	0,00	4.483.719.077,14
28		Setor PNBP CV. New Intertex	4.483.719.077,14	93.037.500,00	0,00	0,00	4.390.681.577,14
29		Setor PNBP CV. New Intertex	4.390.681.577,14	31.012.500,00	0,00	0,00	4.359.669.077,14
30		Pembayaran iklan pengumuman pembagian tahap keempat CV. New Intertex	4.359.669.077,14	2.500.000,00	0,00	0,00	4.357.169.077,14
31		Pembayaran iklan pengumuman pembagian tahap keempat CV. New Intertex	4.357.169.077,14	1.000.000,00	0,00	0,00	4.356.169.077,14
32		Penjualan harta pailit PT. Tiara Persada Raya	4.356.169.077,14	0,00	2.500.000,00	0,00	4.358.669.077,14
33		Pembagian Kreditur Sepatatis CV. New Intertex	4.358.669.077,14	1.020.421.207,20	0,00	0,00	3.338.247.869,94
34	Balai Harta Peninggalan Semarang	Penyetoran bunga giro bulan Desember sebesar Rp. 4.910.500 ke Kas Negara	3.804.811.487,22	4.910.500,00	0,00	0,00	3.799.900.987,22
35		Biaya perjalanan dinas ke Surakarta untuk pegawai a.n Sdr. Ismet, Sdr. Bernado da Cruz, Sdr. Rusarichin, dan Sdr. Herlambang Fadlan S. yaitu dalam rangka melakukan pengecekan dan penagihan piutang KSU Mitra Manunggal Surakarta (dalam pailit) pada tanggal 22-23 Desember 2020, putusan No. 04/Pailit/2007/PN.Niaga Smg, Tgl 11 Februari 2008, dengan rincian: Uang Harian Rp. 370.000 X 2 Hari X 4 Orang , Biaya Hotel Rp. 300.000 X 1 hari X 2 kamar Total Rp. 3.560.000	3.799.900.987,22	3.560.000,00	0,00	0,00	3.796.340.987,22
36		Biaya perjalanan dinas ke Surakarta untuk pegawai a.n Sdr. Bernardo da Cruz, Sdr. Trijono, Sdr. Bifa Wisnu A.D. dan Sdr. Mita Khoirunisa yaitu dalam rangka melakukan pelacakan dan pencarian piutang ex nasabah KSU Manunggal (dalam pailit) pada tanggal 14-15 Januari 2021, No. 04/Pailit/2008/PN.Niaga Smg, Tgl 11 Februari 2008, dengan rincian: Uang Harian Rp. 370.000 X 2 Hari X 4 Orang, Biaya Hotel (Rp. 460.000 + Rp. 359.500) X 1 hari X 1 Kamar Total Rp. 3.779.500	3.796.340.987,22	3.779.500,00	0,00	0,00	3.792.561.487,22
37		Pembayaran pengumuman kepailitan (pembagian kreditor tahap I) PT Krisma Watu Land (dalam pailit) berdasarkan putusan No. 17/Pdt.Sus.Pailit/2019/PN.Niaga Smg, Tgl 4 November 2019 di 2 (dua) Surat Kabar yaitu Solo Pos sebesar Rp. 2.296.800 dan Pos Kota sebesar Rp. 2.640.000 pada tanggal 22 Januari 2021. Total 4.936.800	3.792.561.487,22	4.936.800,00	0,00	0,00	3.787.624.687,22

NO	NAMA SATKER	URAIAN	SALDO AWAL	MUTASI KURANG	MUTASI TAMBAH		SALDO
				KLAIM/PNBP/ PAJAK/SETOR JASA GIRO	TRANSFER MASUK / HASIL PENJUALAN / HASIL SEWA	JASA GIRO	
38	Balai Harta Peninggalan Semarang	Pengembalian sisa pengembalian sisa bon pengiriman surat untuk PT Cito Indo Prima (dalam Pailit) bulan Desember 2020	3.787.624.687,22	0,00	3.500,00	0,00	3.787.628.187,22
39		Penarikan untuk biaya pengeluaran kepailitan PT Krisma Watu Land	3.787.628.187,22	615.295.522,00	0,00	0,00	3.172.332.665,22
40		Penarikan untuk biaya pengeluaran kepailitan PT Krisma Watu Land	3.172.332.665,22	0,00	615.295.522,00	0,00	3.787.628.187,22
41		Pembayaran PNPB Pembersihan Kepailitan PT Krisma Watu Land (dalam pailit) berdasarkan putusan No. 17/Pdt.Sus.Pailit/2019/PN.Niaga Smg, Tgl 4 November 2019 sebesar Rp. 62.255.282	3.787.628.187,22	62.255.282,00	0,00	0,00	3.725.372.905,22
42		Pembayaran pembagian kepailitan PT Krisma Watu Land berdasarkan putusan No. 17/Pdt.Sus.Pailit/2019/ PN.Niaga Smg, Tgl 4 November 2019 sebesar Rp. 543.630.240, dengan rincian: tagihan Pajak dari KPP Pratama Surakarta Rp. 430.636.356 , tagihan BPJS Kesehatan dari BPJS Kesehatan KC. Surakarta Rp. 2.081.620 , dan pembayaran pembagian karyawan Rp. 110.912.364	3.725.372.905,22	543.630.240,00	0,00	0,00	3.181.742.665,22
43		Biaya perjalanan dinas ke Surakarta untuk pegawai a.n Sdr. Hendra Andy Satya G., Sdr. Sdr. Bernado da Cruz, Sdr.Wulandari Setyoningrum, Sdr. Ida Elsha Nastiti, dan Sdr. Bagus Setiawan yaitu dalam rangka menindaklanjuti persetujuan hakim pengawas dengan melaksanakan pembagian harta pailit kepada para Kreditor PT. Krisma Watu Land (dalam pailit) pada tanggal 28-29 Januari 2021, putusan No. 17/Pdt.Sus.Pailit/2019/ PN.Niaga Smg, Tgl 4 November 2019, dengan rincian: Uang Harian Rp. 370.000 X 2 Hari X 5 Orang , Biaya Hotel Rp. 215.000 X 1 hari X 2 kamar Total Rp. 4.130.000	3.181.742.665,22	4.130.000,00	0,00	0,00	3.177.612.665,22
44		Biaya perjalanan dinas ke Surakarta untuk pegawai a.n Sdr. Hardhini Ambarwati, Sdr. Agustina Suryaningtyas, Sdr. Purwadi Joko Santoso, dan Sdr. Daris A.Raft yaitu dalam rangka melakukan koordinasi dengan para Kreditor Separatis terkait akan dilaksanakannya lelang eksekusi harta pailit PT. Krisma Watu Land (dalam pailit) pada tanggal 28-29 Januari 2021, putusan No. 17/Pdt.Sus.Pailit/2019/ PN.Niaga Smg, Tgl 4 November 2019, dengan rincian: Uang Harian Rp. 370.000 X 2 Hari X 4 Orang , Biaya Hotel Rp. 215.000 X 1 hari X 2 kamar Total Rp. 3.390.000	3.177.612.665,22	3.390.000,00	0,00	0,00	3.174.222.665,22
45		Biaya Konsumsi Rapat Mediasi Kreditor kepailitan PT Krisma Watu Land tanggal 18 Januari 2021 dengan rincian: Snack Rp. 15.000 X 20 kotak	3.174.222.665,22	300.000,00	0,00	0,00	3.173.922.665,22

NO	NAMA SATKER	URAIAN	SALDO AWAL	MUTASI KURANG	MUTASI TAMBAH		SALDO
				KLAIM/PNBP/ PAJAK/SETOR JASA GIRO	TRANSFER MASUK / HASIL PENJUALAN / HASIL SEWA	JASA GIRO	
46	Balai Harta Peninggalan Semarang	Biaya Konsumsi Rapat Pembagian Kreditor kepailitan PT Krisma Watu Land tanggal 28 Januari 2021 dengan rincian: Snack Rp. 15.000 X 30 kotak Lunch Box Rp. 38.000 X 30 kotak Total Rp. 1.590.000	3.173.922.665,22	1.590.000,00	0,00	0,00	3.172.332.665,22
47		Penarikan untuk biaya pengeluaran kepailitan KSU Kencana dan Koperasi Manunggal	3.172.332.665,22	13.651.155,55	0,00	0,00	3.158.681.509,67
48		Penarikan untuk biaya pengeluaran kepailitan KSU Kencana dan Koperasi Manunggal	3.158.681.509,67	0,00	13.651.155,55	0,00	3.172.332.665,22
49		Penarikan tunai untuk pembagian Kreditor tahap 1 KSU Kencana (dalam Pailit) an. Tan Sioe Eun (440) sebesar Rp. 4.864.675,32 dan Woen Ferry Setiawan (464) sebesar Rp. 3.651.155,55 Total Rp.8.515.830,87	3.172.332.665,22	8.515.830,87	0,00	0,00	3.163.816.834,35
50		Penarikan untuk biaya perjalanan Dinas Koperasi Manunggal	3.163.816.834,35	3.779.500,00	0,00	0,00	3.160.037.334,35
51		Penarikan untuk biaya perjalanan Dinas Koperasi Manunggal	3.160.037.334,35	0,00	3.779.500,00	0,00	3.163.816.834,35
52		Pembayaran bon untuk biaya perjalanan Dinas Koperasi Manunggal tanggal 4-5 Februari 2021	3.163.816.834,35	7.580.000,00	0,00	0,00	3.156.236.834,35
53		Setor sisa penarikan uang tunai dari DL Pailit KSU Manunggal tanggal 4-5 Februari 2021	3.156.236.834,35	1.338.324,68	0,00	0,00	3.154.898.509,67
54		Setor sisa penarikan uang tunai dari DL Pailit KSU Manunggal tanggal 4-5 Februari 2021	3.154.898.509,67	0,00	1.338.324,68	0,00	3.156.236.834,35
55		Penerimaan bunga giro bulan Januari 2021 (dikurangi pajak)	3.156.236.834,35	0,00	0,00	4.768.660,84	3.161.005.495,19
56		Bon untuk biaya perjalanan Dinas Koperasi Manunggal (dalam pailit) tanggal 4-5 Februari 2021 yang dibayar tanggal 29 Januari 2021	3.161.005.495,19	0,00	7.580.000,00	0,00	3.168.585.495,19
57		Biaya perjalanan dinas ke Surakarta untuk pegawai a.n Sdr. Hardhini Ambarwati, Sdr. Dendy Lesmana Ellion, Sdr. Mita Khoirunisa dan Sdr. Achmad Muhajir yaitu dalam rangka melakukan koordinasi dengan kelurahan setempat serta penagihan piutang ex nasabah KSU Manunggal (dalam pailit) pada tanggal 4-5 Februari 2021, No. 04/Pailit/2008/PN.Niaga Smg, Tgl 11 Februari 2008, dengan rincian: Uang Harian Rp. 370.000 X 2 Hari X 4 Orang, Biaya Hotel Rp. 320.000 X 1 hari X 2 Kamar Total Rp.3.600.000	3.168.585.495,19	3.600.000,00	0,00	0,00	3.164.985.495,19

NO	NAMA SATKER	URAIAN	SALDO AWAL	MUTASI KURANG	MUTASI TAMBAH		SALDO
				KLAIM/PNBP/ PAJAK/SETOR JASA GIRO	TRANSFER MASUK / HASIL PENJUALAN / HASIL SEWA	JASA GIRO	
58	Balai Harta Peninggalan Semarang	Biaya perjalanan dinas ke Surakarta untuk pegawai a.n Sdr. Bernardo da Cruz, Sdr. Trijono, dan Sdr. Bifa Wisnu A.D. yaitu dalam rangka melakukan koordinasi dengan kelurahan setempat serta penagihan piutang ex nasabah KSU Manunggal (dalam pailit) pada tanggal 4-5 Februari 2021, No. 04/Pailit/2008/PN.Niaga Smg, Tgl 11 Februari 2008, dengan rincian: Uang Harian Rp. 370.000 X 2 Hari X 3 Orang, Biaya Hotel Rp. 320.000 X 1 hari X 2 Kamar Total Rp.2.860.000	3.164.985.495,19	2.860.000,00	0,00	0,00	3.162.125.495,19
59		Penarikan tunai untuk penyeteroran bunga giro, biaya perjalanan dinas kepailitan Koperasi Manunggal dan kepailitan BPR Gunung Arto	3.162.125.495,19	26.948.600,00	0,00	0,00	3.135.176.895,19
60		Penarikan tunai untuk penyeteroran bunga giro, biaya perjalanan dinas kepailitan Koperasi Manunggal dan kepailitan BPR Gunung Arto	3.135.176.895,19	0,00	26.948.600,00	0,00	3.162.125.495,19
61		Penyeteroran bunga giro bulan Januari 2021 sebesar Rp. 4.768.600 ke Kas Negara	3.162.125.495,19	4.768.600,00	0,00	0,00	3.157.356.895,19
62		Biaya perjalanan dinas ke Sragen untuk pegawai a.n Sdr. Bernardo da Cruz, Sdr. Dendy Lesmana Ellion, dan Sdr. Mita Khoirunisa yaitu dalam rangka melakukan koordinasi dengan BPN Sragen terkait pelacakan asset ex nasabah KSU Manunggal (dalam pailit) pada tanggal 15-16 Februari 2021, No. 04/Pailit/2008/PN.Niaga Smg, Tgl 11 Februari 2008, dengan rincian: Uang Harian Rp. 370.000 X 2 Hari X 3 Orang, Biaya Hotel Rp. 260.000 X 1 hari X 2 Kamar Total Rp.2.740.000	3.157.356.895,19	2.740.000,00	0,00	0,00	3.154.616.895,19
63		Biaya perjalanan dinas ke Sragen untuk pegawai a.n Sdr. Hardhini Ambarwati, Sdr. Bifa Wisnu A.D., dan Sdr. Mita Khoirunisa yaitu dalam rangka melakukan koordinasi dengan BPN Sragen terkait pelacakan asset ex nasabah KSU Manunggal (dalam pailit) pada tanggal 18-19 Februari 2021, No. 04/Pailit/2008/PN.Niaga Smg, Tgl 11 Februari 2008, dengan rincian: Uang Harian Rp. 370.000 X 2 Hari X 3 Orang, Biaya Hotel Rp. 260.000 X 1 hari X 2 Kamar Total Rp.2.740.000	3.154.616.895,19	2.740.000,00	0,00	0,00	3.151.876.895,19
64		Pengembalian biaya Hotel DL PT Krisma Watu Land (dalam pailit) tanggal 28-29 Januari 2021, dengan rincian: Bon Rp.215.000 x 2 Kamar x 2 Tim = Rp. 860.000 terpakai Rp. 227.050 + Rp. 232.750 + Rp. 232.750 = Rp. 692.550 sisa Rp. 167.450	3.151.876.895,19	0,00	167.450,00	0,00	3.152.044.345,19

NO	NAMA SATKER	URAIAN	SALDO AWAL	MUTASI KURANG	MUTASI TAMBAH		SALDO
				KLAIM/PNBP/ PAJAK/SETOR JASA GIRO	TRANSFER MASUK / HASIL PENJUALAN / HASIL SEWA	JASA GIRO	
65	Balai Harta Peninggalan Semarang	Biaya perjalanan dinas ke Klaten untuk pegawai a.n Sdr. Bernardo da Cruz, Sdr. Dendy Lesmana Ellion, dan Sdr. Bifa Wisnu P.A.D. yaitu dalam rangka melakukan koordinasi dengan BPN Sragen terkait pelacakan asset ex nasabah KSU Manunggal (dalam pailit) pada tanggal 22-23 Februari 2021, No. 04/Pailit/2008/PN.Niaga Smg, Tgl 11 Februari 2008, dengan rincian: Uang Harian Rp. 370.000 X 2 Hari X 3 Orang, Biaya Hotel Rp. 350.000 X 1 hari X 2 Kamar Total Rp.2.920.000	3.152.044.345,19	2.920.000,00	0,00	0,00	3.149.124.345,19
66		Biaya perjalanan dinas ke Surakarta untuk pegawai a.n Sdr. Hardhini Ambarwati, Sdr. Bernardo da Cruz, Sdr. Dendy Lesmana Ellion, dan Sdr. Bifa Wisnu P.A.D. yaitu dalam rangka melakukan penagihan piutang ex nasabah KSU Manunggal (dalam pailit) pada tanggal 25-26 Februari 2021, No. 04/Pailit/2008/PN.Niaga Smg, Tgl 11 Februari 2008, dengan rincian: Uang Harian Rp. 370.000 X 2 Hari X 4 Orang, Biaya Hotel Rp. 270.000 X 1 hari X 2 Kamar Total Rp.3.500.000	3.149.124.345,19	3.500.000,00	0,00	0,00	3.145.624.345,19
67		Pembayaran BON untuk biaya DL Gunung Arto Tanggal 1-2 Maret 2021	3.145.624.345,19	4.560.000,00	0,00	0,00	3.141.064.345,19
68		Pembayaran BON untuk biaya DL Manunggal 1-2 maret	3.141.064.345,19	4.160.000,00	0,00	0,00	3.136.904.345,19
69		Biaya perjalanan dinas ke Kota Semarang untuk pegawai a.n Sdr. Daman Huri, Sdr. Arif Syarifudin, dan Sdr. Lianita Insani Putri, yaitu melakukan penagihan hutang / piutang kepada ex nasabah BPR Gunung Arto (dalam Pailit) pada tanggal 18 Februari 2021, putusan No. 04/Pdt.Sus-Pailit/2016/PN.Niaga Smg, Tgl 15 Mei 2016, dengan rincian: Uang Harian Rp. 150.000 X 1 Hari X 3 Orang Total Rp. 450.000	3.136.904.345,19	450.000,00	0,00	0,00	3.136.454.345,19
70		Biaya perjalanan dinas ke Kota Semarang untuk pegawai a.n Sdr. Purwadi Joko Santoso, Sdr. Arif Syarifudin, dan Sdr. Lianita Insani Putri, yaitu melakukan penagihan hutang / piutang kepada ex nasabah BPR Gunung Arto (dalam Pailit) pada tanggal 19 Februari 2021, putusan No. 04/Pdt.Sus-Pailit/2016/PN.Niaga Smg, Tgl 15 Mei 2016, dengan rincian: Uang Harian Rp. 150.000 X 1 Hari X 3 Orang Total Rp. 450.000	3.136.454.345,19	450.000,00	0,00	0,00	3.136.004.345,19
71		Setor sisa penarikan uang tunai dari DL Pailit KSU Manunggal dan PT Krisma Watu Land	3.136.004.345,19	1.947.450,00	0,00	0,00	3.134.056.895,19
72		Setor sisa penarikan uang tunai dari DL Pailit KSU Manunggal dan PT Krisma Watu Land	3.134.056.895,19	0,00	1.947.450,00	0,00	3.136.004.345,19

NO	NAMA SATKER	URAIAN	SALDO AWAL	MUTASI KURANG	MUTASI TAMBAH		SALDO
				KLAIM/PNBP/ PAJAK/SETOR JASA GIRO	TRANSFER MASUK / HASIL PENJUALAN / HASIL SEWA	JASA GIRO	
73	Balai Harta Peninggalan Semarang	Penerimaan bunga giro bulan Februari 2021 (dikurangi pajak)	3.136.004.345,19	0,00	0,00	3.671.392,05	3.139.675.737,24
74		Bon untuk biaya perjalanan Dinas Koperasi Manunggal (dalam pailit) tanggal 1-2 Maret 2021 yang dibayar tanggal 16 Februari 2021	3.139.675.737,24	0,00	4.160.000,00	0,00	3.143.835.737,24
75		Biaya perjalanan dinas ke Boyolali untuk pegawai a.n Sdr. Hardhini Ambarwati, Sdr.Bernardo da Cruz, Sdr. Mita Khoirunisa dan Sdr. Trijono yaitu dalam rangka melakukan koordinasi dengan BPN Boyolali terkait pelacakan asset ex nasabah KSU Manunggal (dalam pailit) pada tanggal 1-2 Maret 2021, No. 04/Pailit/2008/PN.Niaga Smg, Tgl 11 Februari 2008, dengan rincian: Uang Harian Rp. 370.000 X 2 Hari X 4 Orang, Biaya Hotel Rp. 300.000 X 1 hari X 2 Kamar Total Rp.3.560.000	3.143.835.737,24	3.560.000,00	0,00	0,00	3.140.275.737,24
76		Bon untuk biaya perjalanan Dinas BPR Gunung Arto (dalam pailit) tanggal 1-2 Maret 2021 yang dibayar tanggal 16 Februari 2021	3.140.275.737,24	0,00	4.560.000,00	0,00	3.144.835.737,24
77		Biaya perjalanan dinas ke Kota Yogyakarta untuk pegawai a.n Sdr. Ismet (Kurator), Sdr. Dendy Lesmana Ellion, Sdr. Arif Syarifudin, dan Sdr. Purwadi Joko Santoso yaitu melakukan penagihan hutang / piutang kepada ex nasabah BPR Gunung Arto (dalam Pailit) pada tanggal 1-2 Maret 2021, putusan No. 04/Pdt.Sus-Pailit/2016/PN.Niaga Smg, Tgl 15 Mei 2016, dengan rincian: Uang Harian Rp. 420.000 X 1 Hari X 4 Orang, Biaya Hotel Rp. 216.076 X 1 hari X 2 Kamar Total Rp. 3.792.152	3.144.835.737,24	3.792.152,00	0,00	0,00	3.141.043.585,24
78		Terima dari CT. Sri Sariningsih (ex Nasabah Koperasi Manunggal (dalam pailit)) untuk pembayaran puitang kepada Koperasi Manunggal (dalam pailit) pada tanggal 1 Maret 2021	3.141.043.585,24	0,00	14.050.000,00	0,00	3.155.093.585,24
79		Pengembalian sisa biaya perjalanan Dinas Koperasi Manunggal (dalam pailit) tanggal 1-2 Maret 2021	3.155.093.585,24	600.000,00	0,00	0,00	3.154.493.585,24
80		Pengembalian sisa biaya perjalanan Dinas Koperasi Manunggal (dalam pailit) tanggal 1-2 Maret 2021	3.154.493.585,24	0,00	600.000,00	0,00	3.155.093.585,24
81		Penarikan tunai untuk penyetoran bunga giro, biaya perjalanan dinas Koperasi Manunggal (dalam pailit)	3.155.093.585,24	10.511.400,00	0,00	0,00	3.144.582.185,24
82		Penarikan tunai untuk penyetoran bunga giro, biaya perjalanan dinas Koperasi Manunggal (dalam pailit)	3.144.582.185,24	0,00	10.511.400,00	0,00	3.155.093.585,24
83		Penyetoran bunga giro bulan Feburari 2021 sebesar Rp. 3.671.400 ke Kas Negara	3.155.093.585,24	3.671.400,00	0,00	0,00	3.151.422.185,24

NO	NAMA SATKER	URAIAN	SALDO AWAL	MUTASI KURANG	MUTASI TAMBAH		SALDO
				KLAIM/PNBP/ PAJAK/SETOR JASA GIRO	TRANSFER MASUK / HASIL PENJUALAN / HASIL SEWA	JASA GIRO	
84	Balai Harta Peninggalan Semarang	Biaya perjalanan dinas ke Surakarta untuk pegawai a.n Sdr. Bernardo da Cruz, Sdr. Mita Khoirunisa, dan Sdr. Trijono yaitu dalam rangka melakukan penyerahan sertifikat kepada ex nasabah KSU Manunggal (dalam pailit) atas nama Sri Walyatmi, CTH. Sri Sariningsih, dan Rochmadin pada tanggal 9-10 Maret 2021, No. 04/Pailit/2008/PN.Niaga Smg, Tgl 11 Februari 2008, dengan rincian: Uang Harian Rp. 370.000 X 2 Hari X 3 Orang, Biaya Hotel Rp. 232.749 X 1 hari X 2 Kamar Total Rp.2.685.498	3.151.422.185,24	2.685.498,00	0,00	0,00	3.148.736.687,24
85		Biaya perjalanan dinas ke Surakarta untuk pegawai a.n Sdr. Hardhini Ambarwati, Sdr. Dendy Lesmana Ellion, dan Sdr. Bifa Wisnu A.D. yaitu dalam rangka melakukan penagihan piutang kepada ex nasabah KSU Manunggal (dalam pailit) pada tanggal 9-10 Maret 2021, No. 04/Pailit/2008/PN.Niaga Smg, Tgl 11 Februari 2008, dengan rincian: Uang Harian Rp. 370.000 X 2 Hari X 3 Orang, Biaya Hotel (Rp. 275.499 + Rp. 253.899) X 1 hari X 1 Kamar Total Rp. 2.749.398	3.148.736.687,24	2.749.398,00	0,00	0,00	3.145.987.289,24
86		Biaya Konsumsi Kegiatan penyerahan sertifikat ex nasabah KSU Manunggal (dalam pailit) tanggal 10 Maret 2021 dengan rincian: Snack Rp. 13.500 X 30 kotak Lunch Box Rp. 33.000 X 30 kotak Total Rp. 1.395.000	3.145.987.289,24	1.395.000,00	0,00	0,00	3.144.592.289,24
87		Terima dari Sri Walyatmi (ex Nasabah Koperasi Manunggal (dalam pailit)) untuk pembayaran piutang kepada Koperasi Manunggal (dalam pailit) pada tanggal 10 Maret 2021	3.144.592.289,24	0,00	15.000.000,00	0,00	3.159.592.289,24
88		Terima dari Sdr. VP. Heru Prasetyo merupakan pembayaran lelang KWL sebesar Rp.28.500.000	3.159.592.289,24	0,00	300.000,00	0,00	3.159.892.289,24
89		Setor sisa penarikan uang tunai dari DL Pailit KSU Manunggal dan BPR Gunung Arto	3.159.892.289,24	777.952,00	0,00	0,00	3.159.114.337,24
90		Setor sisa penarikan uang tunai dari DL Pailit KSU Manunggal dan BPR Gunung Arto	3.159.114.337,24	0,00	777.952,00	0,00	3.159.892.289,24
91		Penerimaan bunga giro bulan Maret 2021 (dikurangi pajak)	3.159.892.289,24	0,00	0,00	4.074.420,03	3.163.966.709,27
92		Penyetoran bunga giro bulan Maret 2021 sebesar Rp. 4.074.400 ke Kas Negara	3.163.966.709,27	4.074.400,00	0,00	0,00	3.159.892.309,27
93		Penarikan uang pailit untuk biaya peradilan kepailitan PT Krisma Watu Land tgl 26 April	3.159.892.309,27	2.920.000,00	0,00	0,00	3.156.972.309,27
94		Penarikan uang pailit untuk biaya peradilan kepailitan PT Krisma Watu Land tgl 26 April	3.156.972.309,27	0,00	2.920.000,00	0,00	3.159.892.309,27

NO	NAMA SATKER	URAIAN	SALDO AWAL	MUTASI KURANG	MUTASI TAMBAH		SALDO
				KLAIM/PNBP/ PAJAK/SETOR JASA GIRO	TRANSFER MASUK / HASIL PENJUALAN / HASIL SEWA	JASA GIRO	
95	Balai Harta Peninggalan Semarang	Biaya perjalanan dinas ke Surakarta untuk pegawai a.n Sdr. Bernardo da Cruz, Sdr. Herlambang Fadlan S., dan Sdr.Hardityo Mulyawan yaitu dalam rangka koordinasi dengan PT. Bank BJB Kancab. Surakarta (Kreditor Separatis) guna mempersiapkan eksekusi lelang harta pailit PT. Krisma Watu Land (dalam pailit) dan pembahasan biaya-biaya yang akan timbul saat eksekusi hak tanggungan, pada tanggal 26-27 April 2021, putusan No. 17/Pdt.Sus.Pailit/2019/ PN.Niaga Smg, Tgl 4 November 2019, dengan rincian: Uang Harian Rp. 370.000 X 2 Hari X 3 Orang , Hotel Rp. 250.000 x 1 Hari X 2 Kamar Total Rp. 2.720.000	3.159.892.309,27	2.720.000,00	0,00	0,00	3.157.172.309,27
96		Penarikan uang pailit untuk biaya perjadiin kepailitan PT Krisma Watu Land dan kepailitan PT Cito Indo Prima	3.157.172.309,27	42.134.000,00	0,00	0,00	3.115.038.309,27
97		Penarikan uang pailit untuk biaya perjadiin kepailitan PT Krisma Watu Land dan kepailitan PT Cito Indo Prima	3.115.038.309,27	0,00	42.134.000,00	0,00	3.157.172.309,27
98		Biaya perjalanan dinas ke Boyolali untuk pegawai a.n Sdr. Agustina Suryaningtyas, Sdr. Purwadi Joko Santoso, dan Sdr.Wulandari Setyoningrum yaitu dalam rangka koordinasi dengan Kantor Pertanahan Kab. Boyolali untuk memperoleh SKT/SKPT dan peninjauan ke lokasi objek hak tanggungan milik PT. Krisma Watu Land (dalam pailit) pada tanggal 29-30 April 2021, putusan No. 17/Pdt.Sus.Pailit/2019/ PN.Niaga Smg, Tgl 4 November 2019, dengan rincian: Uang Harian Rp. 370.000 X 2 Hari X 3 Orang, Total Rp. 2.220.000	3.157.172.309,27	2.220.000,00	0,00	0,00	3.154.952.309,27
99		Biaya perjalanan dinas ke Sleman untuk pegawai a.n Sdr. Hendra Andy Satya G., Sdr. Hardhini Ambarwati, Sdr. Daris A.Raft G. dan Sdr.Herlambang Fadlan S. yaitu dalam rangka koordinasi dengan Kantor Pertanahan Kab. Sleman untuk memperoleh SKT/SKPT dan peninjauan ke lokasi objek hak tanggungan milik PT. Krisma Watu Land (dalam pailit) pada tanggal 29-30 April 2021, putusan No. 17/Pdt.Sus.Pailit/2019/ PN.Niaga Smg, Tgl 4 November 2019, dengan rincian: Uang Harian Rp. 420.000 X 2 Hari X 4 Orang , Biaya Hotel 30% Rp. 245.700 X 4 Orang Total Rp. 4.342.8000	3.154.952.309,27	4.342.800,00	0,00	0,00	3.150.609.509,27
100		Biaya Permohonan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah pada Kantor BPN Boyolali (Kepailitan PT Krisma Watu Land	3.150.609.509,27	50.000,00	0,00	0,00	3.150.559.509,27

NO	NAMA SATKER	URAIAN	SALDO AWAL	MUTASI KURANG	MUTASI TAMBAH		SALDO
				KLAIM/PNBP/ PAJAK/SETOR JASA GIRO	TRANSFER MASUK / HASIL PENJUALAN / HASIL SEWA	JASA GIRO	
101	Balai Harta Peninggalan Semarang	Bon biaya perjadiin kepailitan PT Cito Indoprima ke Jakarta tgl 3-5 Mei 2021	3.150.559.509,27	17.348.000,00	0,00	0,00	3.133.211.509,27
102		Bon biaya perjadiin kepailitan PT Krisma Watu Land ke Bogor tgl 2-4 Mei 2021	3.133.211.509,27	13.681.000,00	0,00	0,00	3.119.530.509,27
103		Setor sisa penarikan uang tunai dari DL Pailit PT Krisma Watu Land	3.119.530.509,27	4.692.200,00	0,00	0,00	3.114.838.309,27
104		Setor sisa penarikan uang tunai dari DL Pailit PT Krisma Watu Land	3.114.838.309,27	0,00	4.692.200,00	0,00	3.119.530.509,27
105		Penerimaan bunga giro bulan April 2021 (dikurangi pajak)	3.119.530.509,27	0,00	0,00	3.944.432,48	3.123.474.941,75
106		Bon biaya perjadiin kepailitan PT Cito Indoprima ke Jakarta tgl 3-5 Mei 2021	3.123.474.941,75	0,00	17.348.000,00	0,00	3.140.822.941,75
107		Bon biaya perjadiin kepailitan PT Krisma Watu Land ke Bogor tgl 2-4 Mei 2021	3.140.822.941,75	0,00	13.681.000,00	0,00	3.154.503.941,75
108		Terima dari Muchammad Wahyu Aji (ex Nasabah BPR Gunung Arto (dalam pailit)) untuk pembayaran puitang kepada BPR Gunung Arto (dalam pailit) pada tanggal 7 Mei 2021	3.154.503.941,75	0,00	1.000.000,00	0,00	3.155.503.941,75
109		Biaya perjalanan dinas ke Bogor untuk pegawai a.n Sdr. Hendra Andy Satya G., Sdr. Hilda Mulyadin, Sdr. Agustina Suryaningtyas, Sdr. Daris A.Raft G. Sdr. Herlambang Fadlan S., dan Sdr. Wulandari Setyoningrum yaitu dalam rangka koordinasi dengan Kepolisian Resor Bogor terkait Laporan Polisi kasus tindak pidana penipuan yang dilakukan Debitor PT. Krisma Watu Land (dalam pailit), pada tanggal 2-4 Mei 2021, putusan No. 17/Pdt.Sus.Pailit/2019/ PN.Niaga Smg, Tgl 4 November 2019, dengan rincian: Uang Harian Rp. 430.000 X 3 Hari X 6 Orang , Hotel Rp. 532.000 x 2 Hari X 2 Kamar, Hotel 30% Rp. 319.200 X 2 orang, Transportasi Tol PP Rp. 561.500 Total Rp. 11.067.900	3.155.503.941,75	11.067.900,00	0,00	0,00	3.144.436.041,75

NO	NAMA SATKER	URAIAN	SALDO AWAL	MUTASI KURANG	MUTASI TAMBAH		SALDO
				KLAIM/PNBP/ PAJAK/SETOR JASA GIRO	TRANSFER MASUK / HASIL PENJUALAN / HASIL SEWA	JASA GIRO	
110	Balai Harta Peninggalan Semarang	Biaya perjalanan dinas ke Jakarta untuk pegawai a.n Sdr. Amien Fajar Ocham, Sdr. Saut Parulian N., Sdr. Aprilian Dwi Raharjanto, dan Sdr. Hardityo Mulyawan yaitu dalam rangka melaksanakan koordinasi dengan PT CIMB Niaga Tbk dan PT Bank Danamon Indonesia Tbk untuk melakukan pengecekan kembali piutang para kreditor yang didaftarkan kepada Kurator BHP Semaang yang terdahulu serta memberitahukan progres penyelesaian kepailitan PT Citoputra Indoprima (dalam pailit) pada tanggal 3 - 5 mei 2021, putusan No. 08/Pailit/2010/PN.Niaga Smg, Tangal 12 Juli 2010, dengan rincian: Uang Harian Rp. 530.000 X 3 Hari X 4 Orang , Hotel (Rp. 650.000 + Rp. 500.000) x 1 Hari X 2 Kamar, Transportasi Kereta PP Rp. 705.000 X 2 Orang, Transportasi Bus PP Rp. 350.000 X 2 PP X 2 Orang, Taksi Rp. 46.000 + Rp. 27.000 + Rp.21.000 + Rp. 16.000 + Rp.54.000, Kirim Surat Rp. 18.000 x 2 Surat Total Rp. 11.670.000	3.144.436.041,75	11.670.000,00	0,00	0,00	3.132.766.041,75
111		Biaya perjalanan dinas ke Boyolali untuk pegawai a.n Sdr. Bernardo da Cruz, Sdr. Hardityo Mulyawan, dan Sdr.Wulandari Setyoningrum yaitu dalam rangka koordinasi memenuhi panggilan sidang selaku kurator PT Krisma Watu Land (dalam pailit) di Pengadilan Negeri Boyolali dan berkoordinasi dengan Kantor Pertanahan Kab. Boyolali terkait pengurusan SKPT atas SHM No 928 di Desa Dukuh Boyolali pada tanggal 24-25 Mei 2021, putusan No. 17/Pdt.Sus.Pailit/2019/ PN.Niaga Smg, Tgl 4 November 2019, dengan rincian: Uang Harian Rp. 370.000 X 2 Hari X 3 Orang, Hotel Rp. 195.000 X 1 Hari X 2 Kamar Total Rp. 2.610.000	3.132.766.041,75	2.610.000,00	0,00	0,00	3.130.156.041,75
112		Terima uang dari Sdr. Rusarichin yang merupakan pengembalian Tahap Sembilan dari uang Pembagian Kreditor Pailit KSU Kencana	3.130.156.041,75	0,00	1.000.000,00	0,00	3.131.156.041,75
113		Penyetoran bunga giro bulan April 2021 sebesar Rp. 3.944.400 ke Kas Negara	3.131.156.041,75	3.944.400,00	0,00	0,00	3.127.211.641,75
114		Setor sisa penarikan uang tunai dari DL Pailit PT Krisma Watu Land	3.127.211.641,75	1.726.700,00	0,00	0,00	3.125.484.941,75
115		Setor sisa penarikan uang tunai dari DL Pailit PT Krisma Watu Land	3.125.484.941,75	0,00	1.726.700,00	0,00	3.127.211.641,75
116		Kurang setor	3.127.211.641,75	10.000,00	0,00	0,00	3.127.201.641,75
117		Penerimaan bunga giro bulan Mei 2021 (dikurangi pajak)	3.127.201.641,75	0,00	0,00	4.033.599,01	3.131.235.240,76
118		Kurang setor	3.131.235.240,76	0,00	10.000,00	0,00	3.131.245.240,76

NO	NAMA SATKER	URAIAN	SALDO AWAL	MUTASI KURANG	MUTASI TAMBAH		SALDO
				KLAIM/PNBP/ PAJAK/SETOR JASA GIRO	TRANSFER MASUK / HASIL PENJUALAN / HASIL SEWA	JASA GIRO	
119	Balai Harta Peninggalan Semarang	Penarikan uang tunai untuk pembayaran setoran jasa giro bulan Mei dan bon biaya perjadiin Kepailitan PT Krisma Watu Land	3.131.245.240,76	9.088.600,00	0,00	0,00	3.122.156.640,76
120		Penarikan uang tunai untuk pembayaran setoran jasa giro bulan Mei dan bon biaya perjadiin Kepailitan PT Krisma Watu Land	3.122.156.640,76	0,00	9.088.600,00	0,00	3.131.245.240,76
121		Penyetoran bunga giro bulan Mei 2021 sebesar Rp. 4.033.600 ke Kas Negara	3.131.245.240,76	4.033.600,00	0,00	0,00	3.127.211.640,76
122		Biaya perjalanan dinas ke Sleman untuk pegawai a.n Sdr. Hardhini Ambarwati, Sdr. Daris A.Raft Ginting, dan Sdr.Herlambang Fadlan S. yaitu dalam rangka koordinasi lanjutan dengan Kantor Pertanahan Kab. Sleman, Badan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Sleman dan Dukuh Candirejo Desa Sardonoarjo terkait PT Krisma Watu Land (dalam pailit) di pada tanggal 3-4 Juni 2021, putusan No. 17/Pdt.Sus.Pailit/2019/ PN.Niaga Smg, Tgl 4 November 2019, dengan rincian: Uang Harian Rp. 420.000 X 2 Hari X 3 Orang, Hotel Rp. 538.560 X 1 Hari X 2 Kamar, Hotel 30% Rp. 161.568 Total Rp. 3.758.688	3.127.211.640,76	3.758.688,00	0,00	0,00	3.123.452.952,76
123		Biaya pembayaran untuk kepailitan PT. Krisma Watu Land yaitu Surat Keterangan Pendaftaran Tanah HM 04156 Maguwoharjo Rp. 50.000 , Surat Keterangan Pendaftaran Tanah HM 05317 Sardonoarjo Rp. 50.000 , Surat Keterangan Pendaftaran Tanah HM 05320 Sardonoarjo Rp. 50.000 , Pajak Bumi Bangunan WP Putu Tahun SPPT 2012 Rp. 84.013 , Pajak Bumi Bangunan WP Putu Tahun SPPT 2011 Rp. 72.839 , Pajak Bumi Bangunan Tahun WP Arjo Utomo SPPT 2019 Rp. 138.138 , Pajak Bumi Bangunan Tahun WP Arjo Utomo SPPT 2020 Rp. 114.791	3.123.452.952,76	559.781,00	0,00	0,00	3.122.893.171,76
124		Penarikan uang tunai untuk pembayaran bon biaya perjadiin Kepailitan PT Krisma Watu Land	3.122.893.171,76	4.310.000,00	0,00	0,00	3.118.583.171,76
125		Penarikan uang tunai untuk pembayaran bon biaya perjadiin Kepailitan PT Krisma Watu Land	3.118.583.171,76	0,00	4.310.000,00	0,00	3.122.893.171,76

NO	NAMA SATKER	URAIAN	SALDO AWAL	MUTASI KURANG	MUTASI TAMBAH		SALDO
				KLAIM/PNBP/ PAJAK/SETOR JASA GIRO	TRANSFER MASUK / HASIL PENJUALAN / HASIL SEWA	JASA GIRO	
126	Balai Harta Peninggalan Semarang	Biaya perjalanan dinas ke Boyolali untuk pegawai a.n Sdr. Hendra Andy Satya G, Sdr. Bernardo da Cruz, Sdr. Hardityo Mulyawan dan Sdr. Bagus Setiawan, yaitu dalam rangka memenuhi panggilan sidang selaku kurator PT Krisma Watu Land (dalam pailit) di Pengadilan Negeri Boyolali pada tanggal 9 - 10 Juni 2021, putusan No. 17/Pdt.Sus.Pailit/2019/ PN.Niaga Smg, Tgl 4 November 2019, dengan rincian: Uang Harian Rp. 370.000 X 2 Hari X 4 Orang, Hotel Rp. 195.000 X 1 Hari X 2 Kamar Total Rp. 3.350.000	3.122.893.171,76	3.350.000,00	0,00	0,00	3.119.543.171,76
127		Setor sisa penarikan uang tunai dari DL Pailit PT Krisma Watu Land	3.119.543.171,76	1.706.531,00	0,00	0,00	3.117.836.640,76
128		Setor sisa penarikan uang tunai dari DL Pailit PT Krisma Watu Land	3.117.836.640,76	0,00	1.706.531,00	0,00	3.119.543.171,76
129		Penerimaan bunga giro bulan Juni 2021 (dikurangi pajak)	3.119.543.171,76	0,00	0,00	3.897.495,28	3.123.440.667,04
130		Penyetoran bunga giro bulan Juni 2021 sebesar Rp. 3.897.500 ke Kas Negara	3.123.440.667,04	3.897.500,00	0,00	0,00	3.119.543.167,04
131		Penerimaan bunga giro bulan Juli 2021 (dikurangi pajak)	3.119.543.167,04	0,00	0,00	4.029.474,33	3.123.572.641,37
132		Dana Talangan dari Kreditor KSP Syariah Logam Mulia (dalam pailit) untuk biaya pengurusan kepailitan KSP Syariah Logam Mulia	3.123.572.641,37	0,00	50.000.000,00	0,00	3.173.572.641,37
133		Penyetoran bunga giro bulan Juli 2021 sebesar Rp. 4.029.400 ke Kas Negara	3.173.572.641,37	4.029.400,00	0,00	0,00	3.169.543.241,37
134		Biaya perjalanan dinas ke Boyolali untuk pegawai a.n Sdr. Bernardo Da Cruz, dan Sdr. Hardityo Mulyawan, yaitu dalam rangka memenuhi relaas panggilan sidang selaku kurator PT Krisma Watu Land (dalam pailit) di Pengadilan Negeri Boyolali pada tanggal 12 Agustus 2021, putusan No. 17/Pdt.Sus.Pailit/2019/ PN.Niaga Smg, Tgl 4 November 2019, dengan rincian: Uang Harian Rp. 370.000 X 1 Hari X 1 Orang Total Rp. 740.000	3.169.543.241,37	740.000,00	0,00	0,00	3.168.803.241,37
135		Biaya perjalanan dinas ke Boyolali untuk pegawai a.n Sdr. Hendra Andy Satya G, Sdr. Bernardo da Cruz, dan Sdr. Hardityo Mulyawan, yaitu dalam rangka memenuhi panggilan sidang selaku kurator PT Krisma Watu Land (dalam pailit) di Pengadilan Negeri Boyolali pada tanggal 26-27 Agustus 2021, putusan No. 17/Pdt.Sus.Pailit/2019/ PN.Niaga Smg, Tgl 4 November 2019, dengan rincian: Uang Harian Rp. 370.000 X 2 Hari X 3 Orang Total Rp. 2.220.000	3.168.803.241,37	2.220.000,00	0,00	0,00	3.166.583.241,37
136		Bon Biaya Perjadin Kepailitan KSP Syariah Logam Mulia ke Jakarta untuk melaksanakan pengumuman di Berita Negara	3.166.583.241,37	2.600.000,00	0,00	0,00	3.163.983.241,37

NO	NAMA SATKER	URAIAN	SALDO AWAL	MUTASI KURANG	MUTASI TAMBAH		SALDO
				KLAIM/PNBP/ PAJAK/SETOR JASA GIRO	TRANSFER MASUK / HASIL PENJUALAN / HASIL SEWA	JASA GIRO	
137	Balai Harta Peninggalan Semarang	Penerimaan bunga giro bulan Agustus 2021 (dikurangi pajak)	3.163.983.241,37	0,00	0,00	4.042.900,37	3.168.026.141,74
138		Penarikan uang tunai untuk pembayaran bon biaya Kepailitan PT Krisma Watu Land, Kepailitan KSP Syariah Logam Mulia, Kepailitan KSU Kencana dan Kepailitan PT Cito Indoprima	3.168.026.141,74	29.761.232,73	0,00	0,00	3.138.264.909,01
139		Penarikan uang tunai untuk pembayaran bon biaya Kepailitan PT Krisma Watu Land, Kepailitan KSP Syariah Logam Mulia, Kepailitan KSU Kencana dan Kepailitan PT Cito Indoprima	3.138.264.909,01	0,00	29.761.232,73	0,00	3.168.026.141,74
140		Biaya Rapat Pemberesan Harta Pailit PT Cito Indoprima pada tanggal 7 September 2021 di BHP Semarang, dengan rincian: Fotocopy dokumen Rp. 35.800, Pengiriman surat undangan Rp. 57.000, Makan siang 14 kotak Rp. 30.000, Snack 14 kotak X Rp. 14.000, Total Rp. 708.800	3.168.026.141,74	708.800,00	0,00	0,00	3.167.317.341,74
141		Biaya perjalanan dinas ke Boyolali untuk pegawai a.n Sdr. Hilda Mulyadin, Sdr. Wulandari Setyoningrum, dan Sdr. Nur Amiruddin yaitu dalam rangka menghadiri sidang mediasi perkara perdata Nomor 17/Pdt.G/2021/PN.Byl sidang selaku kurator PT Krisma Watu Land (dalam pailit) di Pengadilan Negeri Boyolali pada tanggal 2-3 September 2021, putusan No. 17/Pdt.Sus.Pailit/2019/PN.Niaga Smg, Tgl 4 November 2019, dengan rincian: Uang Harian Rp. 370.000 X 2 Hari X 3 Orang Total Rp. 2.220.000	3.167.317.341,74	2.220.000,00	0,00	0,00	3.165.097.341,74
142		Biaya perjalanan dinas ke Grobogan untuk pegawai a.n Sdr. Hendra Andy Satya G, Sdr. Amien Fajar Ocham, Sdr. Ismet, Sdr. Arif Syarifudin, Sdr. Aprilian Dwi R. dan Sdr. Bagus Setyawan yaitu dalam rangka melakukan pengecekan Kantor Cabang dan koordinasi dengan pengurus/ ex-karyawan untuk melakukan penelusuran harta pailit KSP Syariah Logam Mulia (dalam pailit) pada tanggal 5-6 September 2021, putusan No. 9/Pdt.Sus.Pailit/2021/PN Niaga Smg tanggal 8 Juni 2021, dengan rincian: Uang Harian Rp. 370.000 X 2 Hari X 6, Biaya pembuatan MMT/banner sita umum Rp. 250.000, Biaya fotocopy dokumen Rp. 127.000, Biaya isi token listrik Rp. 103.000, Biaya pembelian paku Rp. 10.000 Total Rp. 4.930.000	3.165.097.341,74	4.930.000,00	0,00	0,00	3.160.167.341,74

NO	NAMA SATKER	URAIAN	SALDO AWAL	MUTASI KURANG	MUTASI TAMBAH		SALDO
				KLAIM/PNBP/ PAJAK/SETOR JASA GIRO	TRANSFER MASUK / HASIL PENJUALAN / HASIL SEWA	JASA GIRO	
143	Balai Harta Peninggalan Semarang	Biaya perjalanan dinas ke Boyolali untuk pegawai a.n Sdr. Daris A.Raft Ginting dan Sdr. Hardityo Mulyawan, yaitu dalam rangka memenuhi panggilan sidang perkara perdata Nomor 17/Pdt.G/2021/PN.Byl sidang selaku kurator PT Krisma Watu Land (dalam pailit) di Pengadilan Negeri Boyolali pada tanggal 9-10 September 2021, putusan No. 17/Pdt.Sus.Pailit/2019/ PN.Niaga Smg, Tgl 4 November 2019, dengan rincian: Uang Harian Rp. 370.000 X 2 Hari X 2 Orang Total Rp. 1.480.000	3.160.167.341,74	1.480.000,00	0,00	0,00	3.158.687.341,74
144		Biaya perjalanan dinas ke Boyolali untuk pegawai a.n Sdr. Hendra Andy Satya G, Sdr. Hilda Mulyadin, dan Sdr. Hardityo Mulyawan, yaitu dalam rangka memenuhi panggilan sidang perkara perdata Nomor 17/Pdt.G/2021/PN.Byl sidang selaku kurator PT Krisma Watu Land (dalam pailit) di Pengadilan Negeri Boyolali pada tanggal 16-17 September 2021, putusan No. 17/Pdt.Sus.Pailit/2019/ PN.Niaga Smg, Tgl 4 November 2019, dengan rincian: Uang Harian Rp. 370.000 X 2 Hari X 3 Orang, Biaya Hotel Rp. 580.000 X 1 Malam X 2 Kamar Total Rp. 3.380.000	3.158.687.341,74	3.380.000,00	0,00	0,00	3.155.307.341,74
145		Biaya perjalanan dinas ke Boyolali untuk pegawai a.n Sdr. Hardhini Ambarwati, Sdr. Wulandari Setyoningrum, Sdr. Herlambang Fadlan S., Sdr. Daris A.Raft Ginting, dan Sdr. Achmad Muhajir, yaitu dalam rangka pemantauan dan pendampingan survei harta pailit yang akan dilakukan oleh Penilai di Dusun Malangan, Dukuh, Boyolali selaku kurator PT Krisma Watu Land (dalam pailit pada tanggal 16-17 September 2021, putusan No. 9/Pdt.Sus.Pailit/2021/PN Niaga Smg tanggal 8 Juni 2021, dengan rincian: Uang Harian Rp. 370.000 X 2 Hari X 5 Orang, Biaya Hotel Rp. 580.000 X 1 Malam X 2 Kamar Total Rp. 4.860.000	3.155.307.341,74	4.860.000,00	0,00	0,00	3.150.447.341,74

NO	NAMA SATKER	URAIAN	SALDO AWAL	MUTASI KURANG	MUTASI TAMBAH		SALDO
				KLAIM/PNBP/ PAJAK/SETOR JASA GIRO	TRANSFER MASUK / HASIL PENJUALAN / HASIL SEWA	JASA GIRO	
146	Balai Harta Peninggalan Semarang	Biaya perjalanan dinas ke Surakarta untuk pegawai a.n Sdr. Bernardo Da Cruz, Sdr. Ning Rahayu, Sdr. Heru Raharjo., dan Sdr. Ida Elsha Nastiti yaitu dalam rangka melakukan pengurusan dan pemberesan kepailitan KSU Kencana (dalam pailit khususnya melakukan rapat pembagian tahap ketiga pada tanggal 16-17 September 2021, putusanNo. 04/Pailit/2008/PN.Niaga Smg, Tgl 03 April 2008, dengan rincian: Uang Harian Rp. 370.000 X 2 Hari X 4 Orang, Biaya Hotel Rp. 580.000 X 1 Malam X 2 Kamar, Biaya Snack 30 kotak X Rp. 13.000, Biaya persuratan 16 Kreditor X Rp. 11.000 Total Rp. 4.686.000	3.150.447.341,74	4.686.000,00	0,00	0,00	3.145.761.341,74
147		Pembayaran untuk pembagian Kreditor tahap 3 KSU Kencana (dalam Pailit) pada tanggal 16 September 2021 di Kantor Bapas Surakarta: an. Dra. Warsiki S / Kuenia Kasih (70) sebesar Rp. 476.587,83 , Irwan Santoso (164) sebesar Rp. 621.310,46 , Lauw Giok Djay (258) sebesar Rp. 728.621,37 , Maria Lindawati (264) Rp. 710.177,18 , Notaris Ina Megahwati (292) sebesar Rp. 658.009,03 dan TB. Morodadi (424) sebesar Rp. 593.085,72 Total Rp.3.787.791,59	3.145.761.341,74	3.787.791,59	0,00	0,00	3.141.973.550,15
148		Penyetoran bunga giro bulan Agustus 2021 sebesar Rp. 4.042.900 ke Kas Negara	3.141.973.550,15	4.042.900,00	0,00	0,00	3.137.930.650,15
149		Biaya pengiriman surat KSP Syariah Logam Mulia (dalam pailit)	3.137.930.650,15	15.000,00	0,00	0,00	3.137.915.650,15
150		Penarikan uang tunai untuk pembayaran bon biaya Kepailitan PT Krisma Watu Land	3.137.915.650,15	2.800.000,00	0,00	0,00	3.135.115.650,15
151		Penarikan uang tunai untuk pembayaran bon biaya Kepailitan PT Krisma Watu Land	3.135.115.650,15	0,00	2.800.000,00	0,00	3.137.915.650,15
152		Biaya perjalanan dinas ke Boyolali untuk pegawai a.n Sdr. Hendra Andy Satya G, Sdr. Hilda Mulyadin, dan Sdr. Hardityo Mulyawan, yaitu dalam rangka memenuhi panggilan sidang perkara perdata Nomor 17/Pdt.G/2021/PN.Byl sidang selaku kurator PT Krisma Watu Land (dalam pailit) di Pengadilan Negeri Boyolali pada tanggal 29-30 September 2021, putusan No. 17/Pdt.Sus.Pailit/2019/ PN.Niaga Smg, Tgl 4 November 2019, dengan rincian: Uang Harian Rp. 370.000 X 2 Hari X 3 Orang Total Rp. 2.220.000	3.137.915.650,15	2.220.000,00	0,00	0,00	3.135.695.650,15
153		Setor sisa Perjadin KSP Syariah Logam Mulia Ke Jakarta dari Pak Amien Fajar Ocham	3.135.695.650,15	0,00	1.090.000,00	0,00	3.136.785.650,15
154		Setor sisa penarikan uang tunai dari Pembagian Kreditor KSU Kencana dan DL Pailit PT Krisma Watu Land	3.136.785.650,15	230.741,14	0,00	0,00	3.136.554.909,01

NO	NAMA SATKER	URAIAN	SALDO AWAL	MUTASI KURANG	MUTASI TAMBAH		SALDO
				KLAIM/PNBP/ PAJAK/SETOR JASA GIRO	TRANSFER MASUK / HASIL PENJUALAN / HASIL SEWA	JASA GIRO	
155	Balai Harta Peninggalan Semarang	Setor sisa penarikan uang tunai dari Pembagian Kreditor KSU Kencana dan DL Pailit PT Krisma Watu Land	3.136.554.909,01	0,00	230.741,14	0,00	3.136.785.650,15
156		Penerimaan bunga giro bulan September 2021 (dikurangi pajak)	3.136.785.650,15	0,00	0,00	0,00	3.136.785.650,15
157		Pembayaran dari debitur KSP Syariah Logam Mulia (dalam pailit) an. Noor Cholik	3.136.785.650,15	0,00	2.000.000,00	0,00	3.138.785.650,15
158		Pembayaran dari debitur KSP Syariah Logam Mulia (dalam pailit) an. Andriyas Wijayanti	3.138.785.650,15	0,00	33.000.000,00	0,00	3.171.785.650,15
159		Penarikan uang tunai untuk pembayaran bon biaya Kepailitan PT Krisma Watu Land dan Kepailitan KSP Syariah Logam Mulia	3.171.785.650,15	6.660.000,00	0,00	0,00	3.165.125.650,15
160		Penarikan uang tunai untuk pembayaran bon biaya Kepailitan PT Krisma Watu Land dan Kepailitan KSP Syariah Logam Mulia	3.165.125.650,15	0,00	6.660.000,00	0,00	3.171.785.650,15
161		Biaya perjalanan dinas ke Grobogan untuk pegawai a.n Sdr. Ismet, Sdr. Arif Syarifudin, Sdr. Nur Hening Pariyah dan Sdr. Achmad Muhajir yaitu dalam rangka koordinasi dengan kuasa hukum ex-pengurus KSP Syariah Logam Mulia (dalam pailit) terkait penyerahan dokumen-dokumen jaminan milik nasabah peminjam kredit seta melakukan penagihan kepada para peminjam kredit pada tanggal 4-5 Oktober 2021, putusan No. 9/Pdt.Sus.Pailit/2021/PN Niaga Smg tanggal 8 Juni 2021, dengan rincian: Uang Harian Rp. 370.000 X 2 Hari X 4, Total Rp. 2.960.000	3.171.785.650,15	2.960.000,00	0,00	0,00	3.168.825.650,15
162		Biaya perjalanan dinas ke Grobogan untuk pegawai a.n Sdr. Amien Fajar Ocham, Sdr. Dendy Lesmana Ellion dan Sdr. Aprilian Dwi R. yaitu dalam rangka rapat koordinasi dengan kuasa hukum KSP Syariah Logam Mulia (dalam pailit) dan para kreditur (pelapor) terkait aduan/laporan kepolisisan kepada debitur pailit yang dilakukan oleh kreditur pada tanggal 4-5 Oktober 2021, putusan No. 9/Pdt.Sus.Pailit/2021/PN Niaga Smg tanggal 8 Juni 2021, dengan rincian: Uang Harian Rp. 370.000 X 2 Hari X 3, Total Rp. 2.220.000	3.168.825.650,15	2.220.000,00	0,00	0,00	3.166.605.650,15
163		Biaya perjalanan dinas ke Boyolali untuk pegawai a.n Sdr. Rusarichin dan Sdr. Hardityo Mulyawan, yaitu dalam rangka memenuhi panggilan sidang perkara perdata Nomor 17/Pdt.G/2021/PN.Byl sidang selaku kurator PT Krisma Watu Land (dalam pailit) di Pengadilan Negeri Boyolali pada tanggal 7-8 Oktober 2021, putusan No. 17/Pdt.Sus.Pailit/2019/ PN.Niaga Smg, Tgl 4 November 2019, dengan rincian: Uang Harian Rp. 370.000 X 2 Hari X 2 Orang Total Rp. 1.480.000	3.166.605.650,15	1.480.000,00	0,00	0,00	3.165.125.650,15

NO	NAMA SATKER	URAIAN	SALDO AWAL	MUTASI KURANG	MUTASI TAMBAH		SALDO
				KLAIM/PNBP/ PAJAK/SETOR JASA GIRO	TRANSFER MASUK / HASIL PENJUALAN / HASIL SEWA	JASA GIRO	
164	Balai Harta Peninggalan Semarang	Penarikan uang tunai untuk pembayaran bon biaya Kepailitan PT Krisma Watu Land dan Kepailitan KSP Syariah Logam Mulia	3.165.125.650,15	14.862.000,00	0,00	0,00	3.150.263.650,15
165		Penarikan uang tunai untuk pembayaran bon biaya Kepailitan PT Krisma Watu Land dan Kepailitan KSP Syariah Logam Mulia	3.150.263.650,15	0,00	14.862.000,00	0,00	3.165.125.650,15
166		Biaya perjalanan dinas ke Boyolali untuk pegawai a.n Sdr. Bernardo Da Cruz, Sdr. Rusarichin dan Sdr. Ida Elsha Nastiti, yaitu dalam rangka menghadiri agenda mediasi sidang perkara perdata Nomor 17/Pdt.G/2021/PN.Byl sidang selaku kurator PT Krisma Watu Land (dalam pailit) di Pengadilan Negeri Boyolali pada tanggal 21-22 Oktober 2021, putusan No. 17/Pdt.Sus.Pailit/2019/PN.Niaga Smg, Tgl 4 November 2019, dengan rincian: Uang Harian Rp. 370.000 X 2 Hari X 2 Orang Biaya Hotel Rp. 195.000 X 1 Malam X 2 Kamar Total Rp. 2.610.000	3.165.125.650,15	2.610.000,00	0,00	0,00	3.162.515.650,15
167		Biaya perjalanan dinas ke Surakarta untuk pegawai a.n Sdr. Nursalim, Sdr. Wulandari Setyoningrum, dan Sdr. Hardityo Mulyawan, yaitu dalam rangka melakukan koordinasi dengan Notaris Dewi Cahyadi Edy SUD, SH selaku Notaris yang mengurus peralihan hak atas tanah yang menjadi objek hak tanggungan dari perjanjian utang antara PT Bank BCA dengan PT Krisma Watu Land (dalam pailit pada tanggal 21-22 Oktober 2021, putusan No. 9/Pdt.Sus.Pailit/2021/PN Niaga Smg tanggal 8 Juni 2021, dengan rincian: Uang Harian Rp. 370.000 X 2 Hari X 3 Orang, Biaya Hotel Rp. 300.000 X 1 Malam X 2 Kamar Total Rp. 2.820.000	3.162.515.650,15	2.820.000,00	0,00	0,00	3.159.695.650,15
168		Biaya jasa KJPP Hari Utomo dan Rekan dalam menilai boedel pailit PT Krisma Watu Land (dalam pailit) berupa 1 bidang tanah seluas 2.063m2 tang terletak di desa Dukuh Kec. Banyudono, Kab. Boyolali sesuai dengan SHM No. 928 atas nama Tri Marheni senilai Rp. 8.000.000 PPn 10% Rp. 800.000 Rp. 8.800.000	3.159.695.650,15	8.800.000,00	0,00	0,00	3.150.895.650,15
169		Biaya Rapat Verifikasi Pajak KSP Syariah Logam Mulia tanggal 6 Oktober 2021 di Kantor BHP Semarang, dengan rincian: 13 Kotak Makan Siang X Rp. 30.000 dan 13 Kotak Snack X Rp. 14.000 Total Rp. 572.000	3.150.895.650,15	572.000,00	0,00	0,00	3.150.323.650,15
170		Pembayaran dari debitur KSP Syariah Logam Mulia (dalam pailit) an. Sutrisni	3.150.323.650,15	0,00	1.000.000,00	0,00	3.151.323.650,15
171		Setor sisa penarikan uang tunai DL Pailit PT Krisma Watu Land	3.151.323.650,15	60.000,00	0,00	0,00	3.151.263.650,15

NO	NAMA SATKER	URAIAN	SALDO AWAL	MUTASI KURANG	MUTASI TAMBAH		SALDO
				KLAIM/PNBP/ PAJAK/SETOR JASA GIRO	TRANSFER MASUK / HASIL PENJUALAN / HASIL SEWA	JASA GIRO	
172	Balai Harta Peninggalan Semarang	Setor sisa penarikan uang tunai DL Pailit PT Krisma Watu Land	3.151.263.650,15	0,00	60.000,00	0,00	3.151.323.650,15
173		Penerimaan bunga giro bulan Oktober 2021 (dikurangi pajak)	3.151.323.650,15	0,00	0,00	0,00	3.151.323.650,15
174		Terima uang dari Sdr. Rusarichin yang merupakan pengembalian Tahap Sembilan dari uang Pembagian Kreditor Pailit KSU Kencana	3.151.323.650,15	0,00	1.750.000,00	0,00	3.153.073.650,15
175		Potong permintaan buku cek	3.153.073.650,15	100.000,00	0,00	0,00	3.152.973.650,15
176		Penarikan uang tunai untuk pembayaran bon biaya Kepailitan PT Krisma Watu Land dan Kepailitan PT Cito Indoprima	3.152.973.650,15	34.779.000,00	0,00	0,00	3.118.194.650,15
177		Penarikan uang tunai untuk pembayaran bon biaya Kepailitan PT Krisma Watu Land dan Kepailitan PT Cito Indoprima	3.118.194.650,15	0,00	34.779.000,00	0,00	3.152.973.650,15
178		Biaya perjalanan dinas ke Sleman untuk pegawai a.n Sdr. Hendra Andy Satya Gruring, Sdr. Bernardo Da Cruz, Sdr.Daris A.Raft Ginting dan Sdr.Hardityo Mulyawan, yaitu dalam rangka melaksanakan pemantauan dan pendampingan survei harta pailit yang akan dilakukan oleh Penilai di Desa Maguwoharjo dan Desa Sardonoharjo merupakan boedel PT Krisma Watu Land (dalam pailit) yang akan dilelang pada tanggal 16-17 November 2021, putusan No. 17/Pdt.Sus.Pailit/2019/PN.Niaga Smg, Tgl 4 November 2019, dengan rincian: Uang Harian Rp. 420.000 X 2 Hari X 4 Orang Biaya Hotel (Rp. 517.000 X 2 Kamar) + (Rp. 453.963 X 2Kamar) X 1 Malam Total Rp. 5.301.926	3.152.973.650,15	5.301.926,00	0,00	0,00	3.147.671.724,15
179		Biaya perjalanan dinas ke Kudus untuk pegawai a.n Sdr. Nur Hening Pariyah, Sdr.Yulisa Dian Mulyaningsih, Sdr. Sukron Dzikri yaitu dalam rangka melakukan koordinasi dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu terkait kepailitan PT Citoputra Indoprima pada tanggal 16 November 2021, putusan No. 08/Pailit/2010/PN.Niaga Smg, Tanggal 12 Juli 2010, dengan rincian: Uang Harian Rp. 370.000 X 1 Hari X 3 Orang Total Rp. 1.110.000	3.147.671.724,15	1.110.000,00	0,00	0,00	3.146.561.724,15

NO	NAMA SATKER	URAIAN	SALDO AWAL	MUTASI KURANG	MUTASI TAMBAH		SALDO
				KLAIM/PNBP/ PAJAK/SETOR JASA GIRO	TRANSFER MASUK / HASIL PENJUALAN / HASIL SEWA	JASA GIRO	
180	Balai Harta Peninggalan Semarang	Biaya perjalanan dinas ke Jakarta untuk pegawai a.n Sdr. Hardhini Ambarwati dan Sdr. Saut Parulian, yaitu dalam rangka melakukan koordinasi dengan Ditjen AHU untuk mengetahui mekanisme/ prosedur dan persyaratan penghapusan status badan hukum PT oleh Kurator sebagai Likuidator terkait Pengakhiran Kepailitan PT Citoputra Indoprima pada tanggal 17-19 November 2021, putusan No. 08/Pailit/2010/PN.Niaga Smg, Tanggal 12 Juli 2010, dengan rincian: Uang Harian Rp. 530.000 X 3 Hari X 2 Orang , Biaya Hotel (Rp. 900.000 + Rp.950.000) X 2 Malam X 1 Kamar , Biaya Tiket Pesawat PP (Rp. 759.800 + Rp. 1.010.600) X 2 Orang , Biaya Tes Antigen Rp. 99.000 X 2 Orang , Biaya Taksi Rp. 235.000 + Rp. 95.000 + Rp. 50.000 Total Rp. 10.998.800	3.146.561.724,15	10.998.800,00	0,00	0,00	3.135.562.924,15
181		Pembayaran Permohonan Lelang yang dilaksanakan oleh KPKNL terkait boedel pailit PT Krisma Watu Land	3.135.562.924,15	150.000,00	0,00	0,00	3.135.412.924,15
182		Biaya perjalanan dinas ke Grobogan untuk pegawai a.n Sdr. Hardhini Ambarwati, Sdr. Amien Fajar Ocham, Sdr. Nur Hening Pariyah dan Sdr. Aprilian Dwi Raharjanto yaitu dalam rangka melakukan penagihan hutang kepada nasabah (debitur) KSP Syariah Logam Mulia (dalam pailit) pada tanggal 22-23 November 2021, putusan No. 9/Pdt.Sus.Pailit/2021/PN Niaga Smg tanggal 8 Juni 2021, dengan rincian: Uang Harian Rp. 370.000 X 2 Hari X 4, Total Rp. 2.960.000	3.135.412.924,15	2.960.000,00	0,00	0,00	3.132.452.924,15
183		Biaya perjalanan dinas ke Grobogan untuk pegawai a.n Sdr. Ismet, Sdr. Dendy Lesmana Ellion, Sdr. Arif Syarifudin, dan Sdr. Achmad Muhajir yaitu dalam rangka melakukan penagihan hutang kepada nasabah (debitur) KSP Syariah Logam Mulia (dalam pailit) pada tanggal 22-23 November 2021, putusan No. 9/Pdt.Sus.Pailit/2021/PN Niaga Smg tanggal 8 Juni 2021, dengan rincian: Uang Harian Rp. 370.000 X 2 Hari X 3, Rp. 370.000 X 1 Hari X 1 Orang Total Rp. 2.590.000	3.132.452.924,15	2.590.000,00	0,00	0,00	3.129.862.924,15

NO	NAMA SATKER	URAIAN	SALDO AWAL	MUTASI KURANG	MUTASI TAMBAH		SALDO
				KLAIM/PNBP/ PAJAK/SETOR JASA GIRO	TRANSFER MASUK / HASIL PENJUALAN / HASIL SEWA	JASA GIRO	
184	Balai Harta Peninggalan Semarang	Biaya jasa KJPP Hari Utomo dan Rekan dalam menilai boedel pailit PT Krisma Watu Land (dalam pailit) berupa 2 bidang tanah yang terletak di desa Desa Maguwoharjo sesuai dengan SHM No. 4165 atas namaTri Narheni senilai Rp. 5.500.000 dan di Desa Sardonoarjo sesuai SHM No. 5321, 5317 atas nama Dyah Irma Pramonowati senilai Rp. 6.000.000 yang keduanya berlokasi di Kab. Sleman Total 11.500.000	3.129.862.924,15	11.500.000,00	0,00	0,00	3.118.362.924,15
185		Pembayaran dari debitur KSP Syariah Logam Mulia (dalam pailit) an. Arini, Murdiyanto, Moh. Riyanto	3.118.362.924,15	0,00	15.500.000,00	0,00	3.133.862.924,15
186		Setor sisa penarikan uang tunai DL Pailit PT Krisma Watu Land dan PT Cito Indoprima	3.133.862.924,15	168.274,00	0,00	0,00	3.133.694.650,15
187		Setor sisa penarikan uang tunai DL Pailit PT Krisma Watu Land dan PT Cito Indoprima	3.133.694.650,15	0,00	168.274,00	0,00	3.133.862.924,15
188		Penerimaan bunga giro bulan November 2021 (dikurangi pajak)	3.133.862.924,15	0,00	0,00	0,00	3.133.862.924,15
189		Pembayaran dari debitur KSP Syariah Logam Mulia (dalam pailit) an. Muhammad Tohir	3.133.862.924,15	0,00	150.000,00	0,00	3.134.012.924,15
190		Penarikan uang tunai untuk pembayaran bon biaya Kepailitan KSP Syariah Logam Mulia	3.134.012.924,15	8.880.000,00	0,00	0,00	3.125.132.924,15
191		Penarikan uang tunai untuk pembayaran bon biaya Kepailitan KSP Syariah Logam Mulia	3.125.132.924,15	0,00	8.880.000,00	0,00	3.134.012.924,15
192		Biaya perjalanan dinas ke Kudus untuk pegawai a.n Sdr. Hardhini Ambarwati, Sdr. Nurhening Pariyah, Sdr. Annisa Noor Fatima, dan Sdr. Achmad Muhajir yaitu dalam rangka melakukan penagihan hutang kepada nasabah (debitur) KSP Syariah Logam Mulia (dalam pailit) pada tanggal 6-8 Desember 2021, putusan No. 9/Pdt.Sus.Pailit/2021/PN Niaga Smg tanggal 8 Juni 2021, dengan rincian: Uang Harian Rp. 370.000 X 3 Hari X 3 Orang, Uang Harian Rp. 370.000 X 2 Hari X 1 Orang, Biaya Hotel Rp. 400.075 X 1 Hari X 3 Kamar, Biaya Hotel Rp. 400.078 X 1 Hari X 1 Kamar Total Rp. 5.670.303	3.134.012.924,15	5.670.303,00	0,00	0,00	3.128.342.621,15
193		Biaya perjalanan dinas ke Kudus untuk pegawai a.n Sdr. Ismet, Sdr. Dendy Lesmana Ellion, Sdr. Arif Syarifudin, dan Sdr. Aprilian Dwi Raharjanto yaitu dalam rangka melakukan penagihan hutang kepada nasabah (debitur) KSP Syariah Logam Mulia (dalam pailit) pada tanggal 13-15 Desember 2021, putusan No. 9/Pdt.Sus.Pailit/2021/PN Niaga Smg tanggal 8 Juni 2021, dengan rincian: Uang Harian Rp. 370.000 X 3 Hari X 4 Orang Total Rp. 4.440.000	3.128.342.621,15	4.440.000,00	0,00	0,00	3.123.902.621,15

NO	NAMA SATKER	URAIAN	SALDO AWAL	MUTASI KURANG	MUTASI TAMBAH		SALDO
				KLAIM/PNBP/ PAJAK/SETOR JASA GIRO	TRANSFER MASUK / HASIL PENJUALAN / HASIL SEWA	JASA GIRO	
194	Balai Harta Peninggalan Semarang	Penarikan uang tunai untuk pembayaran bon biaya Kepailitan PT Krisma Watu Land dan Kepailitan KSP Syariah Logam Mulia	3.123.902.621,15	4.230.303,00	0,00	0,00	3.119.672.318,15
195		Penarikan uang tunai untuk pembayaran bon biaya Kepailitan PT Krisma Watu Land dan Kepailitan KSP Syariah Logam Mulia	3.119.672.318,15	0,00	4.230.303,00	0,00	3.123.902.621,15
196		Biaya perjalanan dinas ke Sleman untuk pegawai a.n Sdr.Daris A.Raft Ginting dan Sdr.Wulan Setyoningrum, yaitu dalam rangka koordinasi lelang dengan KPKNL Yogyakarta terkait eksekusi harta pailit PT Krisma Watu Land (dalam pailit) yang terletak di Kab. Sleman, pada tanggal 9-10 Desember 2021, putusan No. 17/Pdt.Sus.Pailit/2019/ PN.Niaga Smg, Tgl 4 November 2019, dengan rincian: Uang Harian Rp. 420.000 X 2 Hari X 2 Orang Biaya Hotel Rp. 598.000 X 1 Kamar X 1 Malam Total Rp. 2.278.000	3.123.902.621,15	2.278.000,00	0,00	0,00	3.121.624.621,15
197		Pembayaran Permohonan Lelang yang dilaksanakan oleh KPKNL terkait boedel pailit PT Krisma Watu Land	3.121.624.621,15	150.000,00	0,00	0,00	3.121.474.621,15
198		Pembayaran dari debitur KSP Syariah Logam Mulia (dalam pailit) an. Zunaedi	3.121.474.621,15	0,00	1.425.000,00	0,00	3.122.899.621,15
199		Pembayaran dari debitur KSP Syariah Logam Mulia (dalam pailit) an. Agus Sulistyono (kumanto/Lasmini)	3.122.899.621,15	0,00	5.000.000,00	0,00	3.127.899.621,15
200		Pembayaran dari debitur KSP Syariah Logam Mulia (dalam pailit) an. Abdul Muid (Sudarmi/Safar)	3.127.899.621,15	0,00	2.400.000,00	0,00	3.130.299.621,15
201		Penarikan uang tunai untuk pembayaran bon biaya Kepailitan KSU Kencana dan KSP Syariah Logam Mulia	3.130.299.621,15	196.658.698,00	0,00	0,00	2.933.640.923,15
202		Penarikan uang tunai untuk pembayaran bon biaya Kepailitan KSU Kencana dan KSP Syariah Logam Mulia	2.933.640.923,15	0,00	196.658.698,00	0,00	3.130.299.621,15
203		Biaya perjalanan dinas ke Surabaya untuk pegawai a.n. Sdr. Hendra Andy S. Gurning, Sdr. Hardhini Ambarwati, Sdr. Bernardo Da Cruz, Sdr. Nursalim, dan Sdr. Daris A.Raft Ginting yaitu dalam rangka melakukan pembagian harta pailit KSU Kencana (dalam pailit yag berdomisili di SURabaya dan sekitarnya pada tanggal 20-22 Desember 2021, putusanNo. 04/Pailit/2008/PN.Niaga Smg, Tgl 03 April 2008, dengan rincian: Uang Harian Rp. 410.000 X 3 Hari X 5 Orang, Biaya Hotel Rp. 606.100 X 2 Malam X 5 Kamar, Biaya Transport Tol Rp. 726.000 + Rp. 702.500, Biaya Snack 30 kotak X Rp. 14.500 Total Rp. 14.074.500	3.130.299.621,15	14.074.500,00	0,00	0,00	3.116.225.121,15

NO	NAMA SATKER	URAIAN	SALDO AWAL	MUTASI KURANG	MUTASI TAMBAH		SALDO
				KLAIM/PNBP/ PAJAK/SETOR JASA GIRO	TRANSFER MASUK / HASIL PENJUALAN / HASIL SEWA	JASA GIRO	
204	Balai Harta Peninggalan Semarang	Pembayaran untuk pembagian Kreditor KSU Kencana (dalam Pailit) pada tanggal 21 Desember 2021 di KantorBHP Surabaya: an. Eddy Soendjojo (95) sebesar Rp. 28.127.676,71, Felita Suryani (109) sebesar Rp.5.010.297,69 , Ida Surjati Tanumihardja (154) sebesar Rp. 7.266.435,84 , Ichwan Hindarno (156) Rp. 571.462,69 , Ichwanul Hindrawati (183) sebesar Rp. 511.282,33, James Winario (191) sebesar Rp. 1.255.500,41 , Kevin Sutario (208) sebesar Rp. 1.544.098,58 , Kurniawati (223) sebesar Rp. 68.845,18 , Kurniawati (225) sebesar Rp. 122.297.827,04 Rp. Lie Tjoe Siang (255) sebesar Rp. 2.437.635,78 dan Wolly Sandra (465) sebesar Rp.2.437.635,78 Total Rp.171.528.698,03	3.116.225.121,15	171.528.698,00	0,00	0,00	2.944.696.423,15
205		Biaya perjalanan dinas ke Kudus untuk pegawai a.n Sdr. Amien Fajar Ocham, Sdr. Dini Kesumatuti, Sdr. Nurhening Pariyah, dan Sdr. Achmad Muhajir yaitu dalam rangka melakukan penagihan hutang kepada nasabah (debitur) KSP Syariah Logam Mulia (dalam pailit) pada tanggal 22-24 Desember 2021, putusan No. 9/Pdt.Sus.Pailit/2021/PN Niaga Smg tanggal 8 Juni 2021, dengan rincian: Uang Harian Rp. 370.000 X 3 Hari X 4 Orang, Biaya Hotel (Rp. 360.136 + Rp. 360.000 + Rp. 400.000 + Rp. 400.000) X 1 Kamar X 1 Hari Total Rp. 5.960.136	2.944.696.423,15	5.960.136,00	0,00	0,00	2.938.736.287,15
206		Biaya perjalanan dinas ke Grobogan untuk pegawai a.n Sdr. Ismet, Sdr. Dendy Lesmana Ellion, Sdr. Arif Syarifudin, dan Sdr. Aprilian Dwi Raharjanto yaitu dalam rangka melakukan penagihan hutang kepada nasabah (debitur) KSP Syariah Logam Mulia (dalam pailit) pada tanggal 21-23 Desember 2021, putusan No. 9/Pdt.Sus.Pailit/2021/PN Niaga Smg tanggal 8 Juni 2021, dengan rincian: Uang Harian Rp. 370.000 X 3 Hari X 4 Orang, Total Rp.4.440.000	2.938.736.287,15	4.440.000,00	0,00	0,00	2.934.296.287,15
207		Pembayaran dari debitur KSP Syariah Logam Mulia (dalam pailit) an. Noor Biyanto	2.934.296.287,15	0,00	1.500.000,00	0,00	2.935.796.287,15
208		Pembayaran dari debitur KSP Syariah Logam Mulia (dalam pailit) an. Sri Nuryani/Parno	2.935.796.287,15	0,00	500.000,00	0,00	2.936.296.287,15
209		Pembayaran dari debitur KSP Syariah Logam Mulia (dalam pailit) an. Ramin	2.936.296.287,15	0,00	1.662.000,00	0,00	2.937.958.287,15
210		Pengembalian biaya Buku Cek	2.937.958.287,15	0,00	100.000,00	0,00	2.938.058.287,15
211		Penarikan uang tunai untuk pembayaran bon biaya Kepailitan KSP Syariah Logam Mulia	2.938.058.287,15	7.400.000,00	0,00	0,00	2.930.658.287,15
212		Penarikan uang tunai untuk pembayaran bon biaya Kepailitan KSP Syariah Logam Mulia	2.930.658.287,15	0,00	7.400.000,00	0,00	2.938.058.287,15

NO	NAMA SATKER	URAIAN	SALDO AWAL	MUTASI KURANG	MUTASI TAMBAH		SALDO
				KLAIM/PNBP/ PAJAK/SETOR JASA GIRO	TRANSFER MASUK / HASIL PENJUALAN / HASIL SEWA	JASA GIRO	
213	Balai Harta Peninggalan Semarang	Biaya perjalanan dinas ke Kudus untuk pegawai a.n Sdr. Ismet, Sdr. Dendy Lesmana Ellion, Sdr. Arif Syarifudin, dan Sdr. Aprilian Dwi Raharjanto yaitu dalam rangka melakukan penagihan hutang kepada nasabah (debitur) KSP Syariah Logam Mulia (dalam pailit) pada tanggal 27-29 Desember 2021, putusan No. 9/Pdt.Sus.Pailit/2021/PN Niaga Smg tanggal 8 Juni 2021, dengan rincian: Uang Harian Rp. 370.000 X 3 Hari X 4 Orang, Total Rp.4.440.000	2.938.058.287,15	4.440.000,00	0,00	0,00	2.933.618.287,15
214		Biaya perjalanan dinas ke Demak untuk pegawai a.n Sdr. Amien Fajar Ocham, Sdr. Hardhini Ambarwati, Sdr. Nurhening Pariyah, dan Sdr. Nursalim yaitu dalam rangka melakukan penagihan hutang kepada nasabah (debitur) KSP Syariah Logam Mulia (dalam pailit) pada tanggal 28-29 Desember 2021, putusan No. 9/Pdt.Sus.Pailit/2021/PN Niaga Smg tanggal 8 Juni 2021, dengan rincian: Uang Harian Rp. 370.000 X 2 Hari X 4 Orang Total Rp. 2.960.000	2.933.618.287,15	2.960.000,00	0,00	0,00	2.930.658.287,15
215		Pembayaran dari debitur KSP Syariah Logam Mulia (dalam pailit) an. Abdul Wahid / Suntini	2.930.658.287,15	0,00	1.386.000,00	0,00	2.932.044.287,15
216		Pembayaran dari debitur KSP Syariah Logam Mulia (dalam pailit) an. Tariun / Suparmi	2.932.044.287,15	0,00	1.400.000,00	0,00	2.933.444.287,15
217		Pembayaran dari debitur KSP Syariah Logam Mulia (dalam pailit) an. Agus S.	2.933.444.287,15	0,00	8.500.000,00	0,00	2.941.944.287,15
218		Pembayaran dari debitur KSP Syariah Logam Mulia (dalam pailit) an. Ruslan	2.941.944.287,15	0,00	4.925.000,00	0,00	2.946.869.287,15
219		Setor sisa penarikan uang tunai DL Pailit PT Krisma Watu Land dan KSU Kencana	2.946.869.287,15	1.227.364,00	0,00	0,00	2.945.641.923,15
220		Setor sisa penarikan uang tunai DL Pailit PT Krisma Watu Land dan KSU Kencana	2.945.641.923,15	0,00	1.227.364,00	0,00	2.946.869.287,15
221	Balai Harta Peninggalan Semarang	Penerimaan bunga giro bulan Desember 2021 (dikurangi pajak)	2.946.869.287,15	0,00	0,00	0,00	2.946.869.287,15
222	Balai Harta Peninggalan Jakarta	NY. INGE LUCIANA YAHYADI	1.422,21				1.422,21
223		ASOKA	157,48				157,48
224		YAP MARLIN	2.638.186,92				2.638.186,92
225		PT. PELAYANAN ARAFAT	4.472.101,86				4.472.101,86
226		LEMBAH ANDI FARENA	835.682,32				835.682,32
227		TYAY BENG	14.857.058,70				14.857.058,70
228		LAUW NGIE SIANG	565.928,59				565.928,59
229		NY. KURNIAWATI KUSNADI	5.327.119,09				5.327.119,09
230		NY. ANA INDRAWATI	996.050,16				996.050,16
231		HANAFI JOHAR/ TOKO BINTANG TERANG	570.709,82				570.709,82
232		TATANG ADI KUSUMA	1.737.084,57				1.737.084,57

NO	NAMA SATKER	URAIAN	SALDO AWAL	MUTASI KURANG	MUTASI TAMBAH		SALDO
				KLAIM/PNBP/ PAJAK/SETOR JASA GIRO	TRANSFER MASUK / HASIL PENJUALAN / HASIL SEWA	JASA GIRO	
233	Balai Harta Peninggalan Jakarta	AWIE YAHYA/ BAMBANG SUHAEMI	3.241.389,19				3.241.389,19
234		HIE MIN TJONG	3.482.873,63				3.482.873,63
235		PT. A.D.A ZAMRUD A.V.W CORP	369.853,36				369.853,36
236		LO BCF SUDJATMIKO/ CV MULTI MOTOR	35.646,15				35.646,15
237		PT. MORE SAKTI IND.BULK TRANSPORT	75.376,76				75.376,76
238		ROBERT WIJAYA	0,79				0,79
239		PT. YIM ADHINASA & YAP BOEN SIN	10.768.552,26				10.768.552,26
240		PT. INDONESIA GEE COSMOS	16.928.780,36				16.928.780,36
241		HADI GUNAWAN KUNTJORO	40.859.251,55				40.859.251,55
242		PT. MYUNG SUNG INDONESIA	52.958,40				52.958,40
243		YULIAWATI	5.037.585,86				5.037.585,86
244		PT. LHINCE RAMSEY ROSWELL	570.085.603,64				570.085.603,64
245		PT. UNIVERSAL JAYA KHARISMA PERSADA	153.773.893,52				153.773.893,52
246		KOPERASI PERSADA MADANI	19.724.287.252,00				19.724.287.252,00
247		PT. SWISSINDO MARINE	635.583.351,40	389.270.729,00			246.312.622,40
248		PT. KARYA DUTA KONSULINDO	18.565.872,89				18.565.872,89
249		PT WOON INDONESIA	0,06				0,06
250		PT DAESUKO ENGINEERING	462.697,54				462.697,54
251		ARIFIN KUSNI	46.411.142,62				46.411.142,62
252		YANTI FITRIA	2.154.774.800,00	1.929.737.190,00			225.037.610,00
253		PT. CIPTA ADIMEDIA NUSANTARA	280.197.138,84		3.675.469.303,00		3.955.666.441,84
254		PT. COSFRA INTERGUNA JAYA	18.764.000,13	7.413.000,00			11.351.000,13
255		PT. MEGAWARNA SEJATINUSA	895.717.261,92	21.009.668,00	3.439.620,00		878.147.213,92
256		PT. INDOASIA CEMERLANG	21.227.893,43				21.227.893,43
257		PT.PILETECH INDONESIA MACHINARY	187.185.745,80				187.185.745,80
258		PT. IMPERIUM PERKASA ABADI	220.482.724,44	791.804,00			219.690.920,44
259		MUTIARA PERSADA	52.000.000,00				52.000.000,00
260		SANITYOSO RUMANTYO	2.769.470.000,00				2.769.470.000,00

**IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN HIBAH LUAR NEGERI
PADA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA**

PER 31 Desember 2021

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM

SEKRETARIAT JENDERAL					
		LK HLN 1	LK HLN 2	LK HLN 3	Jumlah *)
1	Nama Hibah Luar Negeri	USAID (United States Agency For International Development)	FNS (Friedrich Naumann Stiftung)		-
2	Pemberi Hibah	USAID	FNS		-
3	Nama Proyek	Implementation of Development Objective 1 (DO1): Democratic Governance Strengthened	Cooperation To Strengthen The Rule Of Law, Human Rights, Democracy, and Good Governance		-
4	Loan ID				-
6	Date Sign	16 Juni 2020	16 Oktober 2018		-
7	Date Effective	04 Agustus 2016	16 Oktober 2021		-
8	Closing Date	31 Desember 2020	16 Oktober 2021		-
9	Loan Amount	\$ 67.046.176,00	€ 348.000,00		67.394.176
10	Disbursement s.d 2021	Rp197.904.802.614,00			197.904.802.614

11	Disbursement pada tahun 2021	Rp307.889.638.465,00	Rp 3.655.435.387,00		311.545.073.852
12	Belanja Tahun 2021 (Rupiah)				-
	a. Belanja Pegawai				-
	b. Belanja Barang				-
	c. Belanja Modal				-
	d. Belanja Bansos				-
13	Neraca (Rupiah)				-
	a. Aset Lancar				-
	b. Aset Tetap				-
	c. Aset Lainnya				-
	d. Kewajiban				-
14	Executing Agency	Kementerian Hukum dan HAM RI, Kode Satker 404233 (Sekretariat Jenderal)	Kementerian Hukum dan HAM RI, Kode Satker 404233 (Sekretariat Jenderal)		-
15	Pemeriksa (BPK/BPKP/KAP)				-
INSPEKTORAT JENDERAL					
NIHIL					
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM JENDERAL					
NIHIL					
DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI					
NIHIL					
DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN					
1	Nama Hibah Luar Negeri	Hibah Jasa dari ICRC	Hibah Jasa dari USAID	Hibah Jasa dari Search for Common Ground	Hibah Barang dari Australia
2	Pemberi Hibah	International Committee of The Red Cross (ICRC)	United States Agency for International Development (USAID)	Search for Common Ground	Australia
3	Nama Proyek	Penanganan Pencegahan Covid-	Strengthened Under USAID	Kapasitas Manajemen Warga	Conference Polycom
4	Loan ID				
5	No Register	2VS5LC4A	2DS44SFA	2HV5QHWA	2TZTAR2A

6	Date Sign	28/10/2021	25/02/2021	27/08/2021	44.371
7	Date Effective				
8	Closing Date	31/12/2021		31/12/2021	44.561
9	Loan Amount	23.438.800.753	166.754.664	1.809.522.347	2.626.800.000
10	Disbursement s.d 2021				
11	Disbursement pada tahun 2021				
12	Belanja Tahun 2021 (Rupiah)				
	a. Belanja Pegawai				
	b. Belanja Barang		166.754.664	1.809.522.347	
	c. Belanja Modal				
	d. Belanja Bansos				
13	Neraca (Rupiah)				
	a. Aset Lancar	23.211.354.031			
	b. Aset Tetap	227.446.722			2.626.800.000
	c. Aset Lainnya				
	d. Kewajiban				
14	Executing Agency	Direktorat Jenderal Pemasarakatan	Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM	Direktorat Jenderal Pemasarakatan	Direktorat Jenderal Pemasarakatan
15	Pemeriksa (BPK/BPKP/KAP)				
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL					
		LK HLN 1	LK HLN 2	LK HLN 3	Jumlah *)
1	Nama Hibah Luar Negeri	The Indonesian-Swiss Intellectual Property Project	The Indonesian-Swiss Intellectual Property Project Phase II	ASEAN Regional Integration Support - Indonesia Trade-Related Assistance (ARISE Plus Indonesia)	-
2	Pemberi Hibah	The Swiss State Secretariat for Economic Affairs (SECO)	The Swiss State Secretariat for Economic Affairs (SECO)	The European Union (EU)	-

3	Nama Proyek	The Indonesian-Swiss Intellectual Property Project	The Indonesian-Swiss Intellectual Property Project Phase II	ASEAN Regional Integration Support - Indonesia Trade-Related Assistance (ARISE Plus Indonesia)	-
4	Loan ID	CHF	CHF	EUR	-
5	No Register	2LBBK5WA	2DY4BJ6A	2ANAKPPA	-
6	Date Sign	29 November 2012	2 Mei 2017	21 Agustus 2018	-
7	Date Effective	29 November 2012	2 Mei 2017	21 Agustus 2018	-
8	Closing Date	5 Februari 2020	2 Mei 2022	21 Agustus 2023	-
9	Loan Amount	1.109.680	1.850.000	15.000.000	17.959.680
10	Disbursement s.d 2021	1.109.680	350.459	752.554	2.212.693
11	Disbursement pada tahun 2021	-	-	752.554	752.554
12	Belanja Tahun 2021 (Rupiah)				-
	a. Belanja Pegawai				-
	b. Belanja Barang				-
	c. Belanja Modal				-
	d. Belanja Bansos				-
13	Neraca (Rupiah)				-
	a. Aset Lancar				-
	b. Aset Tetap				-
	c. Aset Lainnya				-
	d. Kewajiban				-

14	<i>Executing Agency</i>	Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual	Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual	Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual	-
15	Pemeriksa (BPK/BPKP/KAP)				-
DIREKTORAT JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN					
		LK HLN 1	LK HLN 2	LK HLN 3	Jumlah *)
1	Nama Hibah Luar Negeri				-
2	Pemberi Hibah	Japan International Cooperation Agency (JICA)	Hanns Seidel Stiftung (HSS)		-
3	Nama Proyek	The Project on Intellectual Property Rights Protection and Legal Consistency for Improving Business Environment	Penguatan Pembentukan, Diseminasi, dan Implementasi Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan Nilai-Nilai Negara Hukum dan Demokrasi		-
4	<i>Loan ID</i>	Japan International Cooperation Agency (JICA)	Hanns Seidel Stiftung (HSS)		-
6	<i>Date Sign</i>	30-12-2020	23-12-2021		-
7	<i>Date Effective</i>	01/01/2020	12/02/2020		-
8	<i>Closing Date</i>	31-12-2020	28-12-2021		-
9	<i>Loan Amount</i>	2.261.013.402,00	1.478.167.600,00		3.739.181.002
10	<i>Disbursement</i> s.d 2021				-
11	<i>Disbursement</i> pada tahun 2021				-
12	Belanja Tahun 2021 (Rupiah)				-

	a.	Belanja Pegawai				-
	b.	Belanja Barang				-
	c.	Belanja Modal				-
	d.	Belanja Bansos				-
13	Neraca (Rupiah)					-
	a.	Aset Lancar				-
	b.	Aset Tetap				-
	c.	Aset Lainnya				-
	d.	Kewajiban				-
14	Executing Agency					-
15	Pemeriksa (BPK/BPKP/KAP)					-
DIREKTORAT JENDERAL HAK ASASI MANUSIA						
		LK HLN 1	LK HLN 2	LK HLN 3	Jumlah *)	
1	Nama Hibah Luar Negeri		Memorandum Saling Pengertian (MSP) antara Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI dan Friedrich Naumann Stiftung (FNS)			-
2	Pemberi Hibah		Friedrich Naumann Stiftung (FNS)			-
3	Nama Proyek		Kerja Sama Penguatan Rule of Law, Hak Asasi Manusia, Demokrasi dan Good Governance			-
4	Loan ID		Friedrich Naumann Stiftung (FNS)			
6	Date Sign		16 Oktober 2018			-

7	Date Effective	16 Oktober 2018			-
8	Closing Date	16 Oktober 2021			-
9	Loan Amount	2.700.354.777,68			2.700.354.778
10	Disbursement s.d 2021				-
11	Disbursement pada tahun 2021				-
12	Belanja Tahun 2021 (Rupiah)				-
	a. Belanja Pegawai				-
	b. Belanja Barang				-
	c. Belanja Modal				-
	d. Belanja Bansos				-
13	Neraca (Rupiah)				-
	a. Aset Lancar				-
	b. Aset Tetap				-
	c. Aset Lainnya				-
	d. Kewajiban				-
14	Executing Agency				-
15	Pemeriksa (BPK/BPKP/KAP)				-
BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL					
NIHIL					
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN HAM					
NIHIL					
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA					
NIHIL					

DAFTAR PEMBAYARAN DENGAN JAMINAN BANK (BANK GARANSI)
TAHUN ANGGARAN 2021

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM

Jumlah Satker	Kode Satker	Satker	No	Rincian Kontrak					Jaminan Bank			
				Nama Penyedia	Nama Pekerjaan (Paket Pengadaan)	Nomor Kontrak dan Tanggal Kontrak	Periode Kontrak (tgl mulai s.d. tgl akhir)	Nilai Kontrak (Rp)	Nama Bank	Nomor dan Tanggal Jaminan Bank	Periode Jaminan	Nilai Jaminan (Rp)
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m
SEKRETARIAT JENDERAL												
1	409201	Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kendari	1	CV. RANING DWI LAKSANA	Paket Pekerjaan Konstruksi Pembuatan Sumur Bor, Tower dan Instalasinya	W25.PB.02.09-141 Tanggal 10 Juni 2021	Tanggal 10 Juni 2021 s.d 07 September 2021 (90 Hari Kalender)	789.900.000,00	PT. ASURANSI KREDIT INDONESIA	Jaminan Pemeliharaan Nomor 55.45.21.00529.6.13.01.0 Tanggal 08 September 2021	Tanggal 07 September 2021 s.d 05 Maret 2022	39.495.000,00
2	409190	Kanwil Kemenkumham Kalimantan Tengah	2	CV. Adhi Karya Persada	Pekerjaan Konstruksi Renovasi Aula Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Tengah	W.17.PB.02.09-188 Tanggal 4 Juni 2021	90 hari kalender (4 Juni 2021 s.d. 1 September 2021)	1.158.105.726,00	Bank Kalteng (Jaminan Uang Muka)	1000813002254 tanggal 7 Juni 2021	90 hari kalender (4 Juni 2021 s.d. 1 September 2021)	347.431.718,00
					Pekerjaan Konstruksi Renovasi Aula Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Tengah	W.17.PB.02.09-188 Tanggal 4 Juni 2021	90 hari kalender (4 Juni 2021 s.d. 1 September 2021)	1.158.105.726,00	Bank Kalteng (Jaminan Pelaksanaan)	1000812003660 tanggal 4 Juni 2021	104 hari kalender (25 Mei 2021 s.d. 5 September 2021)	57.905.287,00
					Pekerjaan Konstruksi Renovasi Aula Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Tengah	W.17.PB.02.09-188 Tanggal 4 Juni 2021	90 hari kalender (4 Juni 2021 s.d. 1 September 2021)	1.158.105.726,00	Jamkrindo Syariah (Jaminan Pelaksanaan)	SBD 2021 09.0 2 013310 tanggal 16 September 2021	180 hari kalender (16 September 2021 s.d. 16 September 2021)	57.905.286,00
				CV. Satryaditha Mulya	Pengadaan Generator Set 250 KVA serta Instalasi Pendukungnya	W.17.PB.02.08-70 Tanggal 3 Maret 2021	45 hari kalender (3 Maret 2021 s.d.16 September 2021)	798.450.400,00	Bank Kalteng (Jaminan Uang Muka)	1000813001801 tanggal 9 Maret 2021	45 hari kalender (3 Maret 2021 s.d. 16 April 2021)	239.535.120,00
3	409226	Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Nusa Tenggara Barat	3	PT.Mardika Griya Prasta	Pekerjaan Pembangunan lanjutan Gedung Kantor Utama Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM NTB Tahun Anggaran 2021	W21.PB.01.01 - 1726 tanggal 19 Mei 2021	19 Mei 2021 - 15 September 2021	7.251.853.000,00	BANK BPD BALI	No. 0024/GB-PML/MTM/HAK/2021	180 Hari (16 September 2021 - 14 Maret 2022)	362.592.650,00
4	409181	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM YOGYAKARTA	4	CV. MATA KANCING	PENGADAAN PAKAIAN DINAS	No. W14.PB.02.03-817 tanggal 01 Februari 2021	tanggal 01 Februari s.d 11 Mei 2021	218.645.900,00	PT. ASURANSI UMUM BUMIPUTERAMUDA 1967	Nomor : PS.1127.1008.2021.01.0 053 tanggal 01 Februari 2022	Tanggal 01 Februari s.d 01 Mei 2021 (90 hari kalender)	59.722.080,00
5	408782	Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Aceh	5	PT. e-LM Haurata Solusindo	Pengadaan Perangkat pengolah data dan komunikasi	W1.PB.02.04-2402 Tanggal 4 November 2021	4 November 2021 s/d 3 Desember 2021	580.470.000,00	PT Asuransi Kresna Mitra	20.08.06.1105.134101 Tanggal 04 november 2021	04 november 2021 s/d 03 Desember 2021	29.023.500,00
				CV. Bayu Mandiri	Pengadaan Pakaian dinas	W1.PB.02.02-0890 Tanggal 19 Maret 2021	19 Maret 2021 s/d 2 Mei 2021	186.103.500,00	PT Jasaraharja Putera	103001102032100076 Tanggal 19 Maret 2021	19 Maret 2021 s/d 02 Mei 2021	9.305.175,00
		Kantor Wilayah Kementerian Hukum		PT. Jaya Karya Pasundan	Pekerjaan Pengadaan Pakaian Dinas Pegawai Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan	W.23-PB.02.01-104 Tanggal 10 Juni 2021	10 Juni 2021 s.d 31 Agustus 2021	212.212.000,00	PT. Bank Mandiri (Persero)	BG13321069173 Tanggal 24 Mei 2021	27 Mei 2021 s.d 25 Juli 2021	16.410.570,00
				PT. Sagita Utama Lestari	Pekerjaan Rehabilitasi Gedung Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan	W.23-PB.02.09-126 Tanggal 14 Juni 2021	14 Juni s.d 11 September 2021	2.927.835.099,00	PT. Bank Mandiri (Persero)	BG60321071996 Tanggal 11 Juni 2021	11 Juni 2021 s.d 8 September 2021	146.391.755,00
				PT. Sagita Utama Lestari	Konstruksi Rehabilitasi Gedung Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2021	W.23-PB.02.09-126 Tanggal 14 Juni 2021	14 Juni s.d 11 September 2021	2.927.835.099,00	PT. (Persero) Asuransi Kredit Indonesia	55.02.21.02961.2.13.01.0 Tanggal 11 September 2021	11 September 2021 s.d 9 Desember 2021	146.391.755,00

Jumlah Satker	Kode Satker	Satker	No	Rincian Kontrak					Jaminan Bank			
				Nama Penyedia	Nama Pekerjaan (Paket Pengadaan)	Nomor Kontrak dan Tanggal Kontrak	Periode Kontrak (tgl mulai s.d. tgl akhir)	Nilai Kontrak (Rp)	Nama Bank	Nomor dan Tanggal Jaminan Bank	Periode Jaminan	Nilai Jaminan (Rp)
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m
6	408773	Kem. Hukum dan HAM Sulawesi Selatan (Seljen)	6	PT. Sagita Utama Lestari	Konstruksi Rehabilitasi Gedung Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2021	W.23-PB.02.09-126 Tanggal 14 Juni 2021	14 Juni s.d 11 September 2021	2.927.835.099,00	PT. (Persero) Asuransi Kredit Indonesia	55.02.21.00760.5.13.01.0 Tanggal 14 Juni 2021	14 Juni 2021 s.d 11 September 2021	585.567.019,87
				CV. Adhy Cipta Persada	Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan	W.23-PB.02.08-341 Tanggal 28 September 2021	28 September 2021 s.d 26 November 2021	1.485.660.000,00	PT. (Persero) Asuransi Kredit Indonesia	56.02.21.00266.8.13.01.0 Tanggal 23 September 2021	23 September 2021 s.d 21 Nopember 2021	74.283.000,00
				CV. Adhy Cipta Persada	Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan	W.23-PB.02.08-341 Tanggal 28 September 2021	28 September 2021 s.d 26 November 2021	1.485.660.000,00	PT. (Persero) Asuransi Kredit Indonesia	56.02.21.00267.2.13.01.0 Tanggal 28 September 2021	28 September 2021 s.d 26 Nopember 2021	445.698.000,00
7	408892	Kanwil Hukum dan HAM Ambon	7	PT. Dutakarya Pratamaunggul	Pengadaan Jasa Konstruksi Pembangunan Gedung Baru Kantor Wilayah Hukum dan HAM Maluku	W.28.PB.02.09-1983 Tanggal 02 Juli 2021	02 Juli s.d. 31 Desember 2021	41.546.177.198,00	Bank BNI	22/ABN/023/7649/RAB U 05 Januari 2022	17 Desember 2021 s/d 19 Februari 2022	4.050.752.275,00
GRAND TOTAL								66.812.954.473,00				6.668.410.190,87
DITJEN ADMINISTRASI HUKUM UMUM												
	409257	DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM	1	PT. TRANS DANA PROFITRI	Pengadaan Jasa Pengamanan Gedung dan Lingkungan Anggaran 2021	AHU.1.PB.02.03-3/2021 Tanggal 1 Januari 2021	1 Januari s.d 31 Desember 2021	14.613.442.085,00	PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	21/RWM/05/9593/KAMIS Tanggal 16 Desember 2021	16 Desember 2021 s.d 31 Desember 2021	1.112.655.139,00
	409257	DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM	2	PT. AIRKON PRATAMA	Pengadaan Supplies Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Tahun Anggaran 2021	AHU.1.PB.02.03-6/2021 Tanggal 1 Januari 2021	1 Januari s.d 31 Desember 2021	1.660.298.310,00	PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang Jakarta Pasar Rumpit	BG12421107299 Tanggal 17 Desember 2021	1 Desember 2021 s.d 31 Desember 2021	138.358.198,00
	409257	DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM	3	PT. AIRKON PRATAMA	Pengadaan Jasa Building Management Tahun Anggaran 2021	AHU.1.PB.02.03-2/2021 Tanggal 1 Januari 2021	1 Januari s.d 31 Desember 2021	14.576.069.844,00	PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang Jakarta Pasar Rumpit	BG12421106466 Tanggal 17 Desember 2021	1 Desember 2021 s.d 31 Desember 2021	1.214.672.487,00
	409257	DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM	4	PT. MARVIC LUMONGGA INDAH	Pengadaan Renovasi Interior Lobby dan Selasar Gedung Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum	AHU.1.PB.02.09-129/2021 Tanggal 11 Oktober 2021	11 Oktober s.d 31 Desember 2021	3.600.527.743,00	Bank DKI Kantor Layanan Matraman	0143/AA.155/BG5/500/12 /21 Tanggal 22 Desember 2021	20 Desember 2021 s.d 31 Desember 2021	900.131.936,00
	409257	DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM	5	CV. HANYTECH JAYA MAKMUR	Pengadaan Renovasi Rumah Dinas BHP Surabaya di Lingkungan Ditjen AHU	AHU.1.PB.02.09-214/2021 Tanggal 29 November 2021	29 November 2021 s.d 29 Desember 2021	2.383.209.596,00	PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk Cabang Kebayoran Baru	PB0114008021 Tanggal 20 Desember 2021	20 Desember 2021 s.d 29 Desember 2021	2.383.209.596,00
	409257	DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM	6	PT. SANGKURIANG INTERNASIONAL	Pengadaan Pemeliharaan Aplikasi AHU Online	AHU.1.PB.02.03-58/2021 Tanggal 25 Januari 2021	25 Januari 2021 s.d 30 Desember 2021	7.413.120.000,00	PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Jakarta Pasar Minggu	0040521122200006 Tanggal 24 Desember 2021	24 Desember 2021 s.d 30 Desember 2021	436.065.882,00
	409257	DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM	7	PT. BINA INDEX CONSULT	Pengadaan Grand Design Microservice	AHU.1.PB.02.04-164/2021 Tanggal 4 Agustus 2021	04 Agustus 2021 s.d 31 Desember 2021	1.810.545.000,00	PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Jakarta Pasar Minggu	0038921122100008 Tanggal 24 Desember 2021	24 Desember 2021 s.d 31 Desember 2021	362.109.000,00
	409257	DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM	8	PT. SANGKURIANG INTERNASIONAL	Pengembangan Sumber Data dan Optimalisasi ELT (Extract Load Transform) Data Warehouse	AHU.1.PB.02.04-273/2021 Tanggal 5 Oktober 2021	05 Oktober 2021 s.d 31 Desember 2021	1.138.901.500,00	PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Jakarta Pasar Minggu	0040521121700002 Tanggal 24 Desember 2021	24 Desember 2021 s.d 31 Desember 2021	398.615.525,00
	409257	DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM	9	PT MITREKA SOLUSI INDONESIA	Pembuatan Aplikasi Apostile	AHU.1.PB.02.06-106/2021 Tanggal 5 Oktober 2021	05 Oktober 2021 s.d 30 Desember 2021	684.420.000,00	PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Jakarta Rawamangun	0038621121600034 Tanggal 24 Desember 2021	24 Desember 2021 s.d 30 Desember 2021	342.210.000,00
	409257	DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM	10	PT. BAHTERA CIPTA ARTISTIKA	Pengadaan Peralatan Mekanikal dan Elektrikal Bangunan Cagar Budaya Weeskamer	AHU.1.PB.02.08-846/2021 Tanggal 11 November 2021	11 November 2021 s.d 31 Desember 2021	2.108.359.341,00	PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang Jakarta Mid Plaza	BG12221107877 Tanggal 16 Desember 2021	16 Desember 2021 s.d 31 Desember 2021	2.101.301.741,00

Jumlah Satker	Kode Satker	Satker	No	Rincian Kontrak					Jaminan Bank			
				Nama Penyedia	Nama Pekerjaan (Paket Pengadaan)	Nomor Kontrak dan Tanggal Kontrak	Periode Kontrak (tgl mulai s.d. tgl akhir)	Nilai Kontrak (Rp)	Nama Bank	Nomor dan Tanggal Jaminan Bank	Periode Jaminan	Nilai Jaminan (Rp)
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m
	409257	DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM	11	PT. SUCOFINDO ADVISORY UTAMA	Pengadaan Aplikasi Sistem Manajemen Aset	AHU.1.PB.02.06-114/2021 Tanggal 1 Oktober 2021	01 Oktober 2021 s.d 31 Desember 2021	848.749.000,00	PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang Jakarta Pancoran L'Avenue	BG12421104938 Tanggal 20 Desember 2021	20 Desember 2021 s.d 31 Desember 2021	848.749.000,00
	099300	BALAI HARTA PENINGGALAN MEDAN	12	CV. DAME CIPTA MANDIRI	Pekerjaan Renovasi Bangunan dan gedung Balai Harta Peninggalan Medan	W2.AHU.2.PB.02.01-1465 tanggal 22 November 2021	22 November 2021 s.d 31 Desember 2021	465.846.619,00	PT. Bank SUMUT	00004/100/BGSP2D-BG/2021 tanggal 23 Desember 2021	23 Desember 2021 s.d 31 Desember 2021	92.004.800,00
GRAND TOTAL								51.303.489.038,00				10.330.083.304,00
DITJEN PEMASYARAKATAN												
	407519	Balai Pemasarakatan Kelas I Denpasar	65	PT. Jaya Agung Utama Yasa	Pembangunan Gedung Kantor Bapas Denpasar	W20.PAS.EBDP.PR.04.01-56 05 July 2021	05 Juli 2021 - 31 Desember 2021 (180 hari)	5.188.342.849,00	Bank Pembangunan Daerah Bali	0530/GB-PML/DPS/HAK/2021 23 December 2021	21 Desember 2021 s/d 20 Desember 2022	259.417.142,00
	418367	Lembaga Pemasarakatan Kelas III Sukamara	67	CV. BUMI INDAH MEMBANGUN	Pembayaran Pengadaan Pekerjaan Kontruksi Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Tahap II Pada Lembaga Pemasarakatan Kelas III Sukamara TA.2021	W.17.PAS.PAS8.PB.02.09-454 10 April 2021	30 Hari	156.600.000,00	PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALTENG KC PALANGKA RAYA	W.17.PAS.PAS8.PB.02.09-454 10 April 2021	10-04-2021 s.d 09.05.2021	156.600.000,00
	407519	Balai Pemasarakatan Kelas I Denpasar	76	CV. Mahawu Agung	Renovasi Gedung 2 Lantai	W20.PAS.EBDP.PL.01.04-263 29 October 2021	29 Oktober 2021 - 12 Desember 2021	156.771.000,00	PT JAMKRIDA BALI MANDARA	0029052 13 December 2021	13/12/2021 s/d 10/06/2022	7.838.550,00
	407519	Balai Pemasarakatan Kelas I Denpasar	83	CV. Ulun Swi	Pekerjaan Pengadaan Gedung Penunjang (Pos Satpam dan Ruang Tunggu)	W20.PAS.EBDP.PR.04.01-262 29 October 2021	29 Oktober 2021 - 12 Desember 2021	154.898.000,00	PT JAMKRIDA BALI MANDARA	0028816 13 December 2021	13/12/2021 s/d 10/06/2022	7.744.900,00
	352604	LPKA Banda Aceh	89	CV. KENCANA	Pembangunan dan Rehabilitasi Gedung dan Bangunan pada LPKA Banda Aceh	W1.PAS.28.PB.04.02-1516 Tahun 2021 10 August 2021	10 Agustus 2021 s.d 31 Desember 2021	3.017.254.483,00	Bank Syariah Indonesia	MD2135763809 23 December 2021	22 Desember 2021 s.d 31 Desember 2021	331.897.986,00
	407519	Balai Pemasarakatan Kelas I Denpasar	92	CV. Mulia Siwa Jaya	Pekerjaan Pengadaan Tempat Pakir	W20.PAS.EBDP.PL.01.04-303 09 November 2021	15 Nopembr 2021 - 14 Desember 2021	112.222.000,00	JASARAHARJA PUTERA	107001104122100267 14 December 2021	14/12/2021 s/d 11/06/2022	5.629.100,00
	407519	Balai Pemasarakatan Kelas I Denpasar	96	CV. Lancar Jaya Konstruksi	Pekerjaan Pengadaan Tempat Ibadah	W20.PAS.EBDP.PR.04.01-261 29 October 2021	29 Oktober 2021 - 12 Desember 2021	139.366.000,00	PT JAMKRIDA BALI MANDARA	0028980 13 December 2021	12/12/2021 s/d 09/06/2022	6.968.300,00
	418339	Lapas Perempuan Kelas IIB Padang	102	PT SAKARNAS	PEKER AAN KONSTRUKSI PEMBANGUNAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIB PADANG	W3.PAS.PAS.12.PB.02.09-411 Tanggal 03 Juni 2021 03 June 2021	03-06-2021 S.D 29-12-2021	22.251.570.400,00	BANK MANDIRI	BG60421110162 22 December 2021	22-12-2021 S.D 21-03-2022	1.252.636.694,00
	418367	Lembaga Pemasarakatan Kelas III Sukamara	122	CV. BUMI INDAH MEMBANGUN	Pengadaan Pekerjaan Kontruksi Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Tahap II Pada Lembaga Pemasarakatan Kelas III Sukamara TA.2021	W.17.PAS.PAS8.PB.02.09-454 10 April 2021	10-04-2021 s.d 09-05-2021	156.600.000,00	-	10 April 2021	-	-
	404585	BALAI PEMASYARAKATAN KELAS I YOGYAKARTA	135	CV. BINTANG ABADI	Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Gedung Kantor Balai Pemasarakatan Kelas I Yogyakarta	W.14.PAS.PAS.4-PB.02.09-8487, Add I W.14.PAS.PAS.4-PB.02.09-11386 Tanggal 22 November 2021, Add II W.14.PAS.PAS.4-PB.02.09-11991 Tanggal 10 Desember 2021 12 August 2021	142 hari	5.453.570.580,00	PT Bank Pembangunan Daerah (BPD) Daerah Istimewa Yogyakarta	006711010586 22 December 2021	10 hari	680.000.000,00
	404585	BALAI PEMASYARAKATAN KELAS I YOGYAKARTA	142	CV. ARSIGRAPHI	Pekerjaan Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan Gedung Kantor Balai Pemasarakatan Kelas I Yogyakarta	W.14.PAS.PAS.4-PB.02.04-8142 30 July 2021	142 hari	483.494.594,00	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang Bantul	BG13721110551 23 December 2021	10 hari	59.267.067,00
	652890	LAPAS TERBUKA PASAMAN	150	CV. QAISYA PERKASA	PEMELIHARAAN GEDUNG TIDAK BERTINGKAT	W3. PAS. 08.PB.02.09-086 TAHUN 2021 17 February 2021	40 Hari	193.400.000,00	Jasa Raharja putera	109001102022100037 23 February 2021	40 hari	9.670.000,00

Jumlah Satker	Kode Satker	Satker	No	Rincian Kontrak					Jaminan Bank			
				Nama Penyedia	Nama Pekerjaan (Paket Pengadaan)	Nomor Kontrak dan Tanggal Kontrak	Periode Kontrak (tgl mulai s.d. tgl akhir)	Nilai Kontrak (Rp)	Nama Bank	Nomor dan Tanggal Jaminan Bank	Periode Jaminan	Nilai Jaminan (Rp)
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m
	407613	Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Mataram	151	CV. SASANA KARYA	Paket Pekerjaan Jasa Konsultansi Manajemen Konstruksi Pembangunan Lapas Kelas IIA Mataram Tahap IV Tahun Anggaran 2021	W21.EM.PB.04.01-578 18 March 2021	18 MARET 2021 - 12 NOVEMBER 2021	937.723.000,00	PT.ASURANSI BINAGRIYA UPAKARA	03.B04.21.04316 12 November 2021	12 NOVEMBER 2021 S/D 10 MEI 2022	93.772.300,00
	404585	BALAI PEMASYARAKATAN KELAS I YOGYAKARTA	153	CV. TRI GUNA	Pekerjaan Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan Gedung Kantor Balai Pemasyarakatan Kelas I Yogyakarta	W.14.PAS.PAS.4-PB.02.04-5679 26 April 2021	45 hari	585.034.450,00	PT Bank Syariah Indonesia Tbk	MD2135754651 23 December 2021	10 hari	87.755.167,00
	409263	DITJEN PEMASYARAKATAN	157	PT. MANDA PUTRA NUSANTARA	PEMBANGUNAN 2 LAPAS MAKSIMUM DAN 1 LAPAS MINIMUM	PAS1.PB.02.09-2428 22 June 2021	22 JUNI 2021 sd 31 MARET 2022	279.633.734.237,00	BANK RAKYAT INDONESIA	0037621122100018 31 December 2021	31 DESEMBER 2021 SD 31 MARET 2022	13.981.686.712,00
	407613	LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA MATARAM	159	PT. SELARAS MULTIARSI KONSULTAN	PAKET PEKERJAAN JASA KONSULTASI PERENCANAAN LAPAS KELAS IIA MATARAM TAHAP IV TAHUN NGGARAN 2021	W21.EM.PB.04.01-556 NOMOR ADENDUM W21.EM.PB.04.01-614 15 March 2021	15 MARET 2021 S/D 28 MEI 2021	696.921.000,00	PT.ASURANSI BINAGIRYA UPAKARA	03.B04.21.04317 28 May 2021	28 MEI 2021 S/D 23 NOVEMBER 2021	69.692.100,00
	407613	LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA MATARAM	175	PT. GRIYA CEMERLANG SEJAHTERA	PEKERJAAN PEMBANGUNAN LANJUTAN LAPAS KELAS IIA MATARAM TAHAP IV TAHUN ANGGARAN 2021	W21.EM.PB.02.09-1070 ADENDUM W21.EM.PB.02.09-2161 04 June 2021	4 JUNI 2021 S/D 30 NOVEMBER 2021	23.472.637.000,00	PT. ASURANSI BINAGIRYA UPAKARA	19.B04.21.79269/02112 09 November 2021	8 NOVEMBER 2021 S/D 6 MEI 2022	1.160.981.850,00
	409263	DITJEN PEMASYARAKATAN	176	PT MITRAPLAN KONS	MANAJEMEN KONTRUKSI PEMBANGUNAN LAPAS DI NUSAKAMBANGAN 2 LAPAS MAKSIMUM DAN 1 LAPAS MINIMUM	PAS1.PB.02.09-608 25 February 2021	25 FEBRUARI 2021 SD 31 DESEMBER 2021	6.327.664.200,00	BANK MANDIRI	BG16621106453 05 January 2022	23 DESEMBER 2021 SD 31 MARET 2022	110.000.000,00
	409263	DITJEN PEMASYARAKATAN	184	PT WAHANACIPTA BANGUNWISMA	PERENCANAAN PEMBANGUNAN LAPAS DI NUSAKAMBANGAN 2 LAPAS MAKSIMUM DAN 1 LAPAS MINIMUM	PAS1.PB.02.09-611 25 February 2021	25 FEBRUARI 2021 SD 31 DESEMBER 2021	6.602.472.800,00	BANK MANDIRI	BG16621043500 05 January 2022	15 DESEMBER 2021 SD 31 MARET 2022	60.000.000,00
	409263	DITJEN PEMASYARAKATAN	203	CV GENTONG KARYA	PEKERJAAN PERLUASAN MUSHOLA DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN	PAS1.PB.02.09-4494 02 November 2021	2 NOVEMBER 2021 SD 31 DESEMBER 2021	807.723.544,00	BANK RAKYAT INDONESIA	0037621122100017 21 December 2021	22 DESEMBER 2021 SD 31 DESEMBER 2021	56.540.648,00
	632573	Rupbasan Kelas II Serang	204	CV.ANUGRAH BARU	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Kantor Rupbasan Serang TA 2021	W12.PAS.PAS.13.PL.02.03-05 03 May 2021	20 (dua puluh)hari kalender mulai 03 Mei s.d 22 Mei 2021	94.889.500,00	Jamkrida banten	0402/SULIHARA/05/2021 22 May 2021	30 (tiga puluh) hari kalender mulai 22 Mei s.d 20 Juni 2021	4.744.475,00
	409263	DITJEN PEMASYARAKATAN	211	CV DUTA BIMA ABADI	PENATAAN INTERIOR AULA GRAHA PEMASYARAKATAN LANTAI 6 DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN	PAS1.PB.02.09-4496 02 November 2021	2 NOVEMBER 2021 SD 31 DESEMBER 2021	3.070.194.694,00	BANK RAKYAT INDONESIA	003762112300020 22 December 2021	22 DESEMBER 2021 SD 31 DESEMBER 2021	184.211.681,00
	409263	DITJEN PEMASYARAKATAN	214	CV TORCHE INDONESIA	APLIKASI PEMBANGUNAN SISTEM DATABASE PEMASYARAKATAN (SDP) DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN	PAS1.PB.02.04-1836 18 May 2021	18 MEI 2021 SD 31 DESEMBER 2021	4.014.395.000,00	BANK MANDIRI	BG13121103295 07 December 2021	10 DESEMBER 2021 SD 31 DESEMBER 2021	1.204.318.500,00
	409263	DITJEN PEMASYARAKATAN	216	PT INDONESIA COMNETS PLUS	PERAWATAN IT LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS IIA KARANGANYAR NUSAKAMBANGAN	PAS1.PB.02.09-468 08 February 2021	8 FEBRUARI 2021 SD 31 DESEMBER 2021	4.894.633.810,00	BANK MANDIRI	BG12621107258 15 December 2021	15 DESEMBER 2021 SD 31 DESEMBER 2021	1.223.658.453,00
	409263	DITJEN PEMASYARAKATAN	221	PT INDONESIA COMNETS PLUS	JASA INTERNET DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN DAN UPT PEMASYARAKATAN	PAS1.PB.02.03-151 04 January 2021	4 JANUARI 2021 SD 31 DESEMBER 2021	61.399.272.281,00	BANK MANDIRI	BG12621109228 21 December 2021	21 DESEMBER 2021 SD 31 DESEMBER 2021	10.851.417.468,00
	409263	DITJEN PEMASYARAKATAN	226	PT INDONESIA COMNETS PLUS	SEWA CCTV DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN	PAS1.PB.02.07-152 04 January 2021	4 JANUARI 2021 SD 31 DESEMBER 2021	20.659.074.516,00	BANK MANDIRI	BG12621107206 15 December 2021	15 DESEMBER 2021 SD 31 DESEMBER 2021	4.131.814.905,00
	632055	Lapas Narkotika Rumbai	228	PT. PANCA ENGINEERING	Manajemen Konstruksi pada Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIB Rumbai TA. 2021	W4.PAS.21.PB.02.01-0458 01 April 2021	263 Hari (01 April 2021 s.d 19 Desember 2021)	368.915.525,00	Bank BNI KCU Pekanbaru	21/PBR/044/6870/SELAS A 21 December 2021	10 Hari (20 Desember 2021 s.d 31 Desember 2021)	58.400.452,00

Jumlah Satker	Kode Satker	Satker	No	Rincian Kontrak					Jaminan Bank			
				Nama Penyedia	Nama Pekerjaan (Paket Pengadaan)	Nomor Kontrak dan Tanggal Kontrak	Periode Kontrak (tgl mulai s.d. tgl akhir)	Nilai Kontrak (Rp)	Nama Bank	Nomor dan Tanggal Jaminan Bank	Periode Jaminan	Nilai Jaminan (Rp)
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m
	632055	Lapas Narkotika Rumbai	231	PT. CENTRAL TATA BANGUN	Jasa Konstruksi Pembangunan pada Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIB Rumbai TA. 2021	W4.PAS.21.PB.01.02-1239 23 July 2021	150 Hari (23 Juli 2021 s.d 19 Desember 2021)	14.300.114.787,00	Bank BNI KCU Pekanbaru	21/PBR/042/8276/SELAS A 21 Desember 2021	10 Hari (20 Desember 2021 s.d 31 Desember 2021)	537.684.316,00
	406545	Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Bandar Lampung	241	CV. BEKAKE	Jaminan Pelaksanaan	AKM-A 101789 31 December 2020	01 Januari 2021 s.d. 31 Desember 2021	308.656.000,00	PT. ASURANSI KRESNA MITRA Tbk.	21.01.20.1105.101789 04 January 2021	01 Januari 2021 s.d. 31 Desember 2021	308.656.000,00
GRAND TOTAL								465.638.146.250,00				36.903.004.766,00
DITJEN IMIGRASI												
	409272	Ditjen Imigrasi	1	PT. Mitra Sistematika Global	Pemeliharaan Perangkat Keras Printer Paspor SIMKIM Tahun Anggaran 2021	IMI.1.PB.02.03-28204 24 Agustus 2021	24 Agustus-31 Desember 2021	1.385.531.400,00	Bank Mandiri	BG07021107851 16 Desember 2021		750.853.400,00
	409272	Ditjen Imigrasi	2	PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk	Paket Pekerjaan Sewa Jaringan Komunikasi Sistem Keimigrasian Tahun Anggaran 2021	IMI.1.PB.02.03-14281 30 April 2021	30 April-31 Desember 2021	51.477.834.111,00	Bank Mandiri	BG60821105920 13 Desember 2021		3.640.835.509,00
	409272	Ditjen Imigrasi	3	PT. Teknologi Cipta Karya	Pengadaan Perangkat Printer Paspor Paperbased Tahun Anggaran 2021	IMI.1.PB.02.08-34457 15 Oktober 2021	15 Oktober-31 Desember 2021	18.515.200.000,00	BRI	20621121500041 15 Desember 2021		18.515.200.000,00
	409272	Ditjen Imigrasi	4	PT. Mega Bugar Sejahtera	Paket Pekerjaan Pengadaan Barang Pengadaan Chiller	IMI.1.PB.02.02-28443 26 Agustus 2021	26 Agustus-31 Desember 2021	6.607.699.000,00	Bank Mandiri	BG12221106843 15 Desember 2021		991.154.850,00
	409272	Ditjen Imigrasi	5	PT. Sadatahi Jaya Tama	Paket Pekerjaan Konstruksi Pekerjaan Pembangunan Pagar Permanen dan Pintu Gerbang Komplek Imigrasi Tanah Tinggi Kota Tangerang	IMI.1.PB.02.09-34823 18 Oktober 2021	18 Oktober-31 Desember 2021	1.231.042.000,00	BRI	0043421121500006 15 Desember 2021		184.656.300,00
	409272	Ditjen Imigrasi	6	PT. Global Mulya Jaya	Paket Pekerjaan Building Management (Pemeliharaan Gedung)	IMI.1.PB.02.03-21733 01 Juli 2021	01 Juli-31 Desember 2021	6.144.478.593,00	Bank Mandiri	BG12321110173 22 Desember 2021		1.458.264.973,00
	409272	Ditjen Imigrasi	7	PT. Mitreka Solusi Indonesia	Pemeliharaan Program Aplikasi Layanan Keimigrasian Tahun Anggaran 2021	IMI.1.PB.02.03-29168 01 September 2021	01 September-31 Desember 2021	3.230.810.000,00	BRI	0038621122000042 20 Desember 2021		809.765.000,00
	409272	Ditjen Imigrasi	8	PT. Mumrajaya Rimbara Lestari	Paket Pekerjaan Pengadaan Barang Pengadaan AHU	IMI.1.PB.02.08-32653 30 September 2021	30 September-31 Desember 2021	8.912.170.000,00	Bank Mandiri	BG07021107851 24 Desember 2021		5.728.910.115,00
	409108	Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Ngurah Rai	9	CV. Sari Yoga	Pengadaan Konsumsi Makan Petugas di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI)	Nomor Kontrak : W20.IMI1.PL.02.04-61/2021 Tgl. 05-01-2021; Nomor Addendum: W.20.IMI.IMI.1-PB.02.03-7788/2021 Tgl.15-11-2021	5 Januari 2021 - 31 Desember 2021	1.772.767.200,00	PT. Bank Mandiri (Persero) Trade Service Center Denpasar	BG62121105518 Tgl. 13-12-2021	13 Desember 2021 - 31 Desember 2021	247.262.700,00
	664696	RUMAH DETENSI IMIGRASI KUPANG	10	CV. ALTREN	PELEBARAN GEDUNG KANTOR	W22.IMI.PB.02.02-59	04/10/2021 s.d 17/12/2021	Rp.489.233.721	PT. PENJAMINAN KREDIT DAERAH NUSA TENGGARA TIMUR	APB 06 10 2021 000454	04/10/2021 S.d 17/12/2021	146.770.116,00
			11							PB 05 10 2021 000399	04/10/2021 S.d 17/12/2021	24.461.685,00
			12							PB 17 12 2021 000478	04/10/2021 S.d 17/12/2021	24.461.686,00
	408423	Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palu	13	PT. NURMAN ABADI	Pengadaan Jasa Konstruksi Pembangunan Gedung dan Rumah Dinas Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palu	W.24.Fa-PL.02.09-1351 05 Agustus 2021	05 Agustus 2021 s.d. 31 Desember 2021	25.148.681.000,00	BANK RAKYAT INDONESIA	0006022010400001 04 Januari 2022	31 Desember 2021 s.d. 31 Januari 2021	5.344.373.265,00
			14	PT. TURBO MITRA PERKASA	Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran (Video Wall) 2 Unit	W.24.Fa-PB.02.08-2315 17 November 2021	17 November 2021 s.d. 31 Desember 2021	1.131.781.000,00	BANK MANDIRI	BG11921109470 21 Desember 2021	17 Desember 2021 s.d. 28 Februari 2022	1.131.781.000,00
			15	CV. STB 64	Pengadaan Jasa Konsultasi Pengawasan Konstruksi Pembangunan Gedung dan Rumah Dinas Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palu Tahun Anggaran 2021	W.24.Fa-PB.02.04-1320 29 Juli 2021	05 Agustus 2021 s.d. 31 Desember 2021	461.000.000,00	BANK RAKYAT INDONESIA	0006022010400002 04 Januari 2022	31 Desember 2021 s.d. 31 Januari 2021	110.640.000,00
	408278	Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sorong	16	CV. Dusok Mema Meyah	Jaminan Uang Muka atas Pekerjaan Rehabilitasi Rumah Dinas Tipe C, Tipe D, Renovasi Halaman Gedung Kantor, dan Renovasi Pagar Rumah Dinas Kepala Kantor	W.31.IMI.IMI.2-PB.02.09-025 10 September 2021	10 September 2021 - 08 Desember 2021		PT. Bank Pembangunan Daerah Papua	J.UM.300.004.0516.09.2 1 16 September 2021	10 September 2021 - 08 Desember 2021	292.571.280,00

Jumlah Satker	Kode Satker	Satker	No	Rincian Kontrak					Jaminan Bank			
				Nama Penyedia	Nama Pekerjaan (Paket Pengadaan)	Nomor Kontrak dan Tanggal Kontrak	Periode Kontrak (tgl mulai s.d. tgl akhir)	Nilai Kontrak (Rp)	Nama Bank	Nomor dan Tanggal Jaminan Bank	Periode Jaminan	Nilai Jaminan (Rp)
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m
	408278	Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sorong	17	CV. Dusok Mema Meyah	Jaminan Pemeliharaan atas Pekerjaan Konstruksi Rehabilitasi Rumah Dinas Tipe C, Tipe D, Renovasi Halaman Gedung Kantor, dan Renovasi Pagar Rumah Dinas Kepala Kantor	W.31.IMI.IMI.2-PB.02.09-025 10 September 2021	10 September 2021 - 08 Desember 2021	975.237.600,00	PT. Bank Pembangunan Daerah Papua	J.PEM.300.055.0516.12-21 22 Desember 2021	20 Desember 2021 - 17 Juni 2022	48.761.880,00
	652408	Kantor Imigrasi Kelas II TPI Singaraja	18	CV Umah Luwung	Pemeliharaan dan Penataan Ruang Pelayanan Keimigrasian TA 2021	W20.IMI.FSR.PL.02.01-683 Tgl 18 Maret 2021	18 Maret 2021 s/d 01 Mei 2021	92.600.000,00	PT. Jamkrida Bali Mandara	PB.2021.02.0063 (Jaminan Pelaksanaan)	18 Maret s/d 15 Mei 2021	4.630.000,00
			19							APB.2021.03.0041 (Jaminan Uang Muka)	18 Maret s/d 15 Mei 2021	27.780.000,00
			20							MB.2021.05.0058 (Jaminan Pemeliharaan)	01 Mei s/d 27 Oktober 2021	4.630.000,00
GRAND TOTAL								127.086.831.904,00				39.487.763.759,00
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA												
	108266	BPSDM HUKUM DAN HAM	1	PT. INDONESIA COMNETS PLUS	PENGADAAN AKSES INTERNET BPSDM HUKUM DAN HAM TA.2021	SDM.1.PB.02.07.957	01/07/2021 s.d 31-12-2021	1.219.234.500,00	BANK MANDIRI	N0.BG12621106130	13-12-2021 SAMPAI 31-12-2021	203.205.750,00
	409159	BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN HUKUM DAN HAM SULAWESI UTARA	2	PT. WIMA MAYA NUSANTARA	PENGAWASAN PEMBANGUNAN ASRAMA DUA LANTAI DAN PEMBANGUNAN GEDUNG SERBAGUNA DUA LANTAI PADA BALAI PENDIDIKAN DAN ELATIHAN HUKUM DAN HAM SULAWESI UTARA T.A 2021	W.27.SDM9.PB.02.04-903	30-06-2021 s.d 26-12-2021	269.260.200,00	BANK SULUTGO	02/GB-P/BTG/2021 Tanggal 23-12-2021	23-12-2021 s.d 26-12-2021	67.315.050,00
	409159	BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN HUKUM DAN HAM SULAWESI UTARA	3	PT. TRIKARSA UTAMA LESTARI	PEMBANGUNAN ASRAMA DUA LANTAI DAN PEMBANGUNAN GEDUNG SERBAGUNA DUA LANTAI PADA BALAI PENDIDIKAN DAN ELATIHAN HUKUM DAN HAM SULAWESI UTARA T.A 2021	W.27.SDM9.PB.02.04-901	30-06-2021 s.d 26-12-2021	7.060.879.000,00	BANK SULUTGO	01/GB-SP/BTG/2022 Tanggal 6-01-2022	23-12-2021 s.d 26-01-2022	1.244.587.324,00
GRAND TOTAL								8.549.373.700,00	0,00	0,00	0,00	1.515.108.124,00
DITJEN KEKAYAAN INTELEKTUAL												
	097102	Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual	1	PT. Global Mulya Jaya	Pengadaan Jasa Building Management Kantor Jakarta	HKI.06.02/PPK.DM/SP/02.0 2.02/2021, 2 Februari 2021	2 Februari 2021 - 31 Desember 2021	8.587.356.398,00	Bank Negara Indonesia	21/TEB/007/9182/KAMIS 16 Desember 2021	16 Desember 2021 - 31 Desember 2021	537.104.664,00
			2	PT. Tujuh Utama	Pengadaan Pemeliharaan CCTV	HKI.06.02/PPK.DM/SPK/04. 01.08/2021, 4 Januari 2021	4 Januari 2021 - 31 Desember 2021	185.823.000,00	Bank Negara Indonesia	21/MLR/011/7763/JUMAT, 3 Desember 2021	3 Desember 2021 - 31 Desember 2021	61.941.000,00
			3	PT. Pilar Cipta Solusi Integratika	Pengadaan Pengembangan Aplikasi Kekayaan Intelektual Komunal	HKI.06.02/PPK.TI/SP/09.12. 01/2021, 9 Desember 2021	9 Desember 2021 - 31 Desember 2021	240.900.000,00	Bank Negara Indonesia	21/JKT/023/6153/KAMIS, 16 Desember 2021	16 Desember 2021 - 31 Desember 2021	240.900.000,00
			4	PT. Trans Dana Profitri	Pengadaan Jasa Pengamanan Kantor	HKI.06.02/PPK.DM/SP/01.0 1.01/2021, 1 Januari 2021	1 Januari 2021 - 31 Desember 2021	9.165.609.090,00	Bank Negara Indonesia	21/RWM/039/9228/KAMIS, 9 Desember 2021	9 Desember 2021 - 31 Desember 2021	652.393.208,00
			5	PT. Agusta Triasa	Pengadaan Perlengkapan Ruang Gedung DJKI Lantai 5	HKI.06.02/PPK.DM/SP/01.1 1.04/2021, 1 November 2021	1 November 2021 - 31 Desember 2021 (diperpanjang hingga 19 Februari 2022)	4.158.682.000,00	Bank Mandiri	BG61021105495, 13 Desember 2021	13 Desember 2021 - 31 Desember 2021	4.158.682.000,00
			6	PT. Astra Graphia Information Technology	Pengadaan Perangkat TIK Data Center	HKI.06.02/PPK.TI/SP/29.10. 01/2021, 29 Oktober 2021	31 Desembr 2021 (diperpanjang hingga 31 Januari 2022)	60.574.580.000,00	Bank Negara Indonesia	21/OJR/037/7411/SELASA, 14 Desember 2021	14 Desember 2021 - 31 Desember 2021	15.530.607.400,00

Jumlah Satker	Kode Satker	Satker	No	Rincian Kontrak					Jaminan Bank			
				Nama Penyedia	Nama Pekerjaan (Paket Pengadaan)	Nomor Kontrak dan Tanggal Kontrak	Periode Kontrak (tgl mulai s.d. tgl akhir)	Nilai Kontrak (Rp)	Nama Bank	Nomor dan Tanggal Jaminan Bank	Periode Jaminan	Nilai Jaminan (Rp)
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m
	097102	Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual	7	PT. Rasindo Tata Laksana	Paket Pengadaan Pemeliharaan Peralatan Kantor Lainnya Berupa Pemeliharaan Chiller DJKI	HKI.06.02/PPK.DM/SPK/25.11.01/2021, 25 November 2021	25 November 2021 - 24 Desember 2021 (diperpanjang hingga 31 Januari 2022)	187.000.000,00	Bank Negara Indonesia	21/FM/091/5496/RABU, 8 Desember 2021	8 Desember 2021 - 31 Desember 2021	187.000.000,00
8			PT. Alumagubi Raya Indonesia	Pemeliharaan Aplikasi Fasilitatif	HKI.06.02/PPK.TI/SP/10.11.02/2021, 10 November 2021	10 November 2021 - 31 Desember 2021	1.464.375.000,00	Bank Tabungan Negara	164/JKK.I/BCSU-L/GB/XII/2021, 16 Desember 2021	16 Desember 2021 - 31 Desember 2021	585.750.000,00	
9			PT. Bhinneka Mentaridimensi	Pengadaan PC All In One	HKI.06.02/PPK.DM/SP/06.12.02/2021, 6 Desember 2021	6 Desember 2021 - 31 Desember 2021	3.129.400.000,00	Bank UOB Indonesia	RCMPG012658, 17 Desember 2021	17 Desember 2021 - 31 Desember 2021	3.129.400.000,00	
GRAND TOTAL								87.693.725.488,00	-	-	-	25.083.778.272,00
GRAND TOTAL								807.084.520.853,00				119.988.148.415,87